



LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

(Audited)

PEMERINTAH KOTA BOGOR

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamiin, berkat rahmat dan hidayah Allah SWT, buku Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bogor Tahun Anggaran 2025 telah selesai disusun. Seluruh rangkaian pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Bogor sepanjang tahun anggaran 2025, yang senantiasa mengacu pada ketentuan peraturan dan perundang-undangan pengelolaan keuangan negara.

Ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang dimaksud adalah UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta UU Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bogor *Audited* Tahun Anggaran 2025, disusun dengan kelengkapan sebuah laporan keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi APBD Kota Bogor Tahun Anggaran 2025 dan 2024, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Tahun Anggaran 2025 dan 2024, Neraca per 31 Desember Tahun Anggaran 2025 dan 2024, Laporan Operasional Tahun Anggaran 2025 dan 2024, Laporan Arus Kas Tahun Anggaran 2025 dan 2024, Laporan Perubahan Ekuitas Tahun Anggaran 2025 dan 2024, serta Catatan atas Laporan Keuangan yang seluruhnya dilengkapi dengan lampiran.

Dengan demikian, diharapkan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bogor Tahun Anggaran 2025 ini, dapat memberikan informasi yang lengkap dan transparan tentang pengelolaan keuangan daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2025. Semoga laporan ini dapat memenuhi harapan semua pihak, untuk dapat mengetahui secara utuh pengelolaan keuangan daerah Kota Bogor sepanjang Tahun Anggaran 2025.

Bogor, 28 Mei 2026

WALI KOTA BOGOR,



DEDIE A. RACHIM

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bogor yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL); (c) Neraca; (d) Laporan Operasional (LO); (e) Laporan Arus Kas (LAK); (f) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); (g) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, serta perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Bogor, 28 Mei 2026

WALI KOTA BOGOR,



DEDIE A. RACHIM

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bogor *Audited* Tahun Anggaran 2025 adalah laporan keuangan yang merupakan gabungan (konsolidasian) keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi yang terdapat pada Pemerintah Kota Bogor. Laporan Keuangan ini disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Wali Kota Bogor 12 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah yang merupakan pelaksanaan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah. Disamping ketentuan tersebut, Laporan Keuangan ini juga disusun dan disajikan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja memuat informasi mengenai Pendapatan, Belanja, Transfer, dan Pembiayaan Daerah. Yang didasarkan pada Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja SKPD.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL)

LP SAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL Awal, SiLPA/SiKPA, Koreksi, dan SAL Akhir.

3. Neraca

Neraca memuat informasi mengenai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas. Aset terdiri dari Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Dana Cadangan, dan Aset Lainnya. Kewajiban terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek, dan Kewajiban Jangka Panjang.

4. Laporan Operasional (LO)

LO menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas yang tercermin dalam Pendapatan-LO, Beban dan Surplus/Defisit Operasional dari suatu entitas yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

5. Laporan Arus Kas (LAK)

LAK disusun berdasarkan data penerimaan dan pengeluaran kas yang dikelola oleh PPKD sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) serta penerimaan dan pengeluaran kas non rekening umum kas daerah selama Tahun Anggaran 2025.

6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

LPE menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari Ekuitas Awal, Surplus/Defisit-LO, Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar, Koreksi Nilai Persediaan, Selisih Revaluasi Aset Tetap, Lain-lain dan Ekuitas Akhir.

7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

CaLK menyajikan penjelasan dan daftar mengenai nilai suatu akun yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas, sedangkan Neraca, LO, dan LPE untuk Tahun 2025 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Pernyataan Tanggung Jawab	ii
Ikhtisar Laporan Keuangan	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	ix
Daftar Grafik	xvi
Bagian I Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2025 dan 2024	1
Bagian II Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2025 dan 2024	3
Bagian III Neraca per 31 Desember 2025 dan 2024	4
Bagian IV Laporan Operasional Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2025 dan 2024	6
Bagian V Laporan Arus Kas Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2025 dan 2024	8
Bagian VI Laporan Perubahan Ekuitas Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2025 dan 2024	10
BAB I Informasi umum	11
1.1 Maksud dan tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	11
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	12
1.3 Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi	13
1.4 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan	14
BAB II Ekonomi Makro dan Kebijakan Keuangan Daerah	15
2.1 Ekonomi Makro	15
2.1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Bogor	15
2.1.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	15
2.1.3 Pengeluaran Per Kapita (Konsumsi Per Kapita)	18
2.1.4 Tingkat Inflasi Daerah	19
2.1.5 Pemerataan kesejahteraan masyarakat	21
2.1.6 Angka Kemiskinan	22
2.1.7 Kondisi Ketenagakerjaan	24
2.2 Kebijakan Keuangan Daerah	26
2.2.1 Kebijakan Pendapatan	28
2.2.2 Kebijakan Belanja	30
2.2.3 Kebijakan Pembiayaan	34
BAB III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	35
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	35
3.2 Alokasi Belanja Wajib Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2025	36
3.3 Hambatan Dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan	38
BAB IV Dasar Penyajian Laporan Keuangan Dan Kebijakan Akuntansi	39
4.1 Pendahuluan	39
4.2 Asumsi Dasar Akuntansi	40
4.3 Komponen Laporan Keuangan	43
4.4 Keterbatasan Laporan Keuangan	44
4.5 Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas	45
4.6 Kebijakan Akuntansi Piutang	45
4.7 Kebijakan Akuntansi Beban dibayar dimukaKebijakan Akuntansi Beban dibayar dimuka	49
4.8 Kebijakan Akuntansi Persediaan	49
4.9 Kebijakan Akuntansi Investasi	50
4.10 Kebijakan Akuntansi Properti Investasi	52
4.11 Kebijakan Akuntansi Aset Tetap	56
4.12 Kebijakan Akuntansi Dana Cadangan	67
4.13 Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya	67
4.14 Kebijakan Akuntansi Kewajiban	80
4.15 Kebijakan Akuntansi Ekuitas	85
4.16 Kebijakan Akuntansi Pendapatan	86

4.17	Kebijakan Akuntansi Beban dan Belanja	87
4.18	Kebijakan Akuntansi Pembiayaan	90
4.19	Kebijakan Akuntansi SILPA/SIKPA/SAL	91
4.20	Kebijakan Akuntansi Transaksi Transitoris (Transaksi Yang Tidak Mengubah Posisi Kas)	91
4.21	Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Dan Peristiwa Luar Biasa	92
4.22	Kebijakan Akuntansi BLUD	94
4.23	Kebijakan Akuntansi Penerimaan Dan Pengeluaran Daerah Yang Tidak Melalui Rekening Kas Umum Daerah	95
4.24	Masa Manfaat Aset Tetap	98
4.25	Kebijakan Akuntansi Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan	108
BAB V	Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	111
5.1	PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)	111
5.1.1	Pendapatan Daerah	112
5.1.1.1	Pendapatan Asli Daerah	112
5.1.1.1.1	Pajak Daerah	113
5.1.1.1.2	Retiribusi Daerah	114
5.1.1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	119
5.1.1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	121
5.1.1.2	Pendapatan Transfer	126
5.1.1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat=Dana Perimbangan	127
5.1.1.2.1.1	Dana Bagi Hasil	128
5.1.1.2.1.2	Dana Alokasi Umum	129
5.1.1.2.1.3	Dana Alokasi Khusus - Fisik	130
5.1.1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	131
5.1.1.2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya	131
5.1.1.2.3	Pendapatan Transfer Antar Daerah	132
5.1.1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil	132
5.1.1.2.3.2	Bantuan Keuangan	133
5.1.2	Belanja	134
5.1.2.1	Belanja Operasi	134
5.1.2.1.1	Belanja Pegawai	135
5.1.2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	138
5.1.2.1.3	Belanja Bunga	148
5.1.2.1.4	Belanja Hibah	149
5.1.2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	152
5.1.2.2	Belanja Modal	154
5.1.2.2.1	Belanja Modal Tanah	155
5.1.2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	156
5.1.2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	162
5.1.2.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	164
5.1.2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	166
5.1.2.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	167
5.1.2.3	Belanja Tak Terduga	168
5.1.3	Belanja Transfer	170
5.1.4	Belanja Pembiayaan	170
5.1.4.1	Penerimaan Pembiayaan	171
5.1.4.2	Pengeluaran Pembiayaan	172
5.1.5	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	173
5.2	LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LP - SAL)	175
5.2.1	Saldo Anggaran Lebih Awal	175
5.2.2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	175
5.2.3	Sisa Lebih/ (Kurang) Pembiayaan Anggaran SILPA/ SIKPA	176
5.2.4	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	178
5.2.5	Saldo Anggaran Lebih Akhir	176
5.3	PENJELASAN POS-POS NERACA	178
5.3.1	Aset	178

5.3.1.1	Aset Lancar	179
5.3.1.1.1	Kas di Kas Daerah	181
5.3.1.1.2	Kas di Bendahara Penerimaan	181
5.3.1.1.3	Kas di Bendahara Pengeluaran	182
5.3.1.1.4	Kas di BLUD	182
5.3.1.1.5	Kas Lainnya	183
5.3.1.1.6	Kas Dana BOSP	184
5.3.1.1.7	Kas Dana BOK Puskesmas	185
5.3.1.2.1	Piutang Pajak	186
5.3.1.2.2	Piutang Retribusi	186
5.3.1.2.3	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	187
5.3.1.2.4	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	188
5.3.1.2.5	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	189
5.3.1.2.6	Piutang Transfer Antar Daerah	189
5.3.1.1.3	Piutang Lainnya	189
5.3.1.1.4	Penyisihan Piutang	191
5.3.1.1.5	Beban Dibayar Dimuka	192
5.3.1.1.6	Persediaan	193
5.3.1.2	Invenstasi Jangka Panjang	211
5.3.1.2.1	Investasi Non Permanen	212
5.3.1.2.1.1	Dana Bergulir	212
5.3.1.2.1.2	Penyisihan Dana Bergulir	213
5.3.1.2.2	Investasi Permanen	213
5.3.1.3	Aset Tetap	216
5.3.1.3.1	Tanah	219
5.3.1.3.2	Peralatan dan Mesin	224
5.3.1.3.3	Gedung dan Bangunan	226
5.3.1.3.4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	228
5.3.1.3.5	Aset Tetap Lainnya	230
5.3.1.3.6	Konstruksi dalam Pengerjaan	231
5.3.1.3.7	Akumulasi Penyusutan	232
5.3.1.4	Dana Cadangan	233
5.3.1.5	Aset Lainnya	234
5.3.1.5.1	Tagihan Penjualan Angsuran	234
5.3.1.5.2	Tuntutan Ganti Rugi	234
5.3.1.5.3	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	235
5.3.1.5.4	Aset Tak Berwujud	235
5.3.1.5.5	Aset Lain - lain	235
5.3.1.5.6	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	238
5.3.1.5.7	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	238
5.3.1.5.8	Treasury Deposit Facility (TDF)	239
5.3.1.6	Properti Investasi	239
5.3.1.6.1	Properti Investasi Tanah	240
5.3.1.6.2	Properti Investasi Gedung dan Bangunan	241
5.3.1.6.4	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	242
5.3.2	Kewajiban	242
5.3.2.1	Kewajiban Jangka Pendek	243
5.3.2.1.1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	243
5.3.2.1.2	Utang Bunga	243
5.3.2.1.3	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	244
5.3.2.1.4	Pendapatan Diterima Dimuka	244
5.3.2.1.5	Utang Belanja	244
5.3.2.1.6	Utang Jangka Pendek Lainnya	245
5.3.2.2	Kewajiban Jangka Panjang	245
5.3.2.2.1	Utang kepada Pemerintah Pusat	245

5.3.2.2.2	Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	246
5.4	PENJELASAN ATAS POS - POS LAPORAN OPERASIONAL	247
5.4.1	PENDAPATAN	247
5.4.1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	247
5.4.1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	247
5.4.1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	249
5.4.1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	253
5.4.1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	255
5.4.1.2	PENDAPATAN TRANSFER	258
5.4.1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO	259
5.4.1.2.1.1	Dana Bagi Hasil	259
5.4.1.2.1.2	Dana Alokasi Umum	261
5.4.1.2.1.3	Dana Alokasi Khusus (DAK)	262
5.4.1.2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	263
5.4.1.2.2.1	Insentif Fiskal	263
5.4.1.2.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	264
5.4.1.2.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	264
5.4.1.2.2.2.2	Bantuan Keuangan	266
5.4.1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	266
5.4.1.3.1	Pendapatan Hibah	266
5.4.2	BEBAN DAERAH	268
5.4.2.1	Beban Operasi	268
5.4.2.1.1	Beban Pegawai	268
5.4.2.1.2	Beban Persediaan	269
5.4.2.1.3	Beban Jasa	273
5.4.2.1.4	Beban Pemeliharaan	275
5.4.2.1.5	Beban Perjalanan Dinas	276
5.4.2.1.6	Beban Bunga	277
5.4.2.1.7	Beban Hibah	278
5.4.2.1.8	Beban Bantuan Sosial	279
5.4.2.1.9	Beban Penyusutan dan Amortisasi	279
5.4.2.1.10	Beban Penyisihan Piutang	280
5.4.2.1.11	Beban Lain-lain	282
5.4.2.2	Beban Transfer	282
5.4.3	Surplus/ (Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional - LO	283
5.4.3.1	Surplus Dari Kegiatan Non Operasional - LO	283
5.4.3.1.1	Surplus Penjualan / Pertukaran / Pelepasan Aset Non Lancar - LO	283
5.4.3.2	Defisit Dari Kegiatan Non Operasional - LO	283
5.4.3.2.1	Defisit Penjualan / Pertukaran / Pelepasan Aset Non Lancar - LO	283
5.4.3.2.2	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya- LO	283
5.4.4	Pos Luar Biasa	284
5.4.4.1	Pendapatan Luar Biasa - LO	284
5.4.4.1.1	Pendapatan Luar Biasa - LO	284
5.4.4.2	Beban Luar Biasa - LO	284
5.4.4.2.1	Beban Luar Biasa - LO	284
	Surplus/Defisit - LO	284
5.5	PENJELASAN POS-POS ARUS KAS	285
5.5.1	Tujuan Laporan Arus Kas	285
5.5.2	Definisi Arus Kas	285
5.5.3	Aktivitas Arus Kas	285
5.5.4	Posisi Kas	286
5.5.5	Arus Kas dari Aktivitas Operasi	287
5.5.6	Arus Kas dari Aktivitas Investasi	291
5.5.7	Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan	292
5.5.8	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	293

	5.5.9 Saldo Akhir Kas	294
5.6	PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	
	5.6.1 Ekuitas Awal	295
	5.6.2 Surplus/Defisit - LO	295
	5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	295
	5.6.4 Ekuitas Akhir	297
BAB VI	Informasi Tambahan	298
	6.1 Visi dan Misi Kota Bogor	298
	6.2 Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor	298
	6.3 Kondisi Geografis	299
BAB VII	Penutup	301
Lampiran		

DAFTAR TABEL

Tabel No.	Nama Tabel	Hal
2.1.2	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Miliar) Kota Bogor Tahun 2021-2025	16
2.1.3	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Jenis Pengeluaran (miliar rupiah) Kota Bogor 2021-2025	16
2.1.6	PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha di (miliar rupiah) Kota Bogor 2021-2025	18
2.1.7	PDRB dan PDRB Per Kapita Kota Bogor 2020-2024	19
2.1.8	Tingkat Inflasi Tahun-ke-tahun (t-ke-t) Kota Bogor, 2023-2025 (Persen)	20
2.1.9	Tingkat Inflasi Bulan-ke-bulan (b-ke-b), Tahun Kalender, dan Tahun-ke-tahun (t-ke-t) Kota Bogor bulan Desember, 2023-2025 (Persen)	20
2.1.12	Persentase Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas dan Golongan Pengeluaran 2025	21
2.1.17	Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja, Agustus 2023 - Agustus 2025	25
2.1.18	Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja, Agustus 2023 - Agustus 2025	26
3.1.1	Ikhtisar Target Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Bogor Tahun Anggaran 2025	35
3.2.1	Anggaran dan Realisasi Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2025	37
3.2.2	Anggaran dan Realisasi Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2025	38
3.2.3	Anggaran dan Realisasi Belanja Infrastruktur Tahun Anggaran 2025	38
5.1.1	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2025 dan 2024	112
5.1.2	Pendapatan Asli Daerah TA 2025 dan 2024	112
5.1.3	Pajak Daerah TA 2025 dan 2024	113
5.1.4	Retribusi Daerah TA 2025 dan 2024	114
5.1.5	Realisasi Retribusi Jasa Umum TA 2025 dan 2024	115
5.1.6	Realisasi Retribusi Jasa Umum per Perangkat Daerah TA 2025 dan 2024	116
5.1.7	Realisasi Retribusi Jasa Usaha TA 2025 dan 2024	118
5.1.8	Realisasi Retribusi Jasa Usaha per Perangkat Daerah TA 2025 dan 2024	118
5.1.9	Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu TA 2025 dan 2024	119
5.1.10	Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu per Perangkat Daerah TA 2025 dan 2024	119
5.1.11	Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan Tahun 2025 dan 2024	120
5.1.12	Rincian Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan Tahun 2025 dan 2024	120
5.1.13	Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Tahun 2025 dan 2024	121
5.1.14	Realisasi Pendapatan Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan Tahun 2025 dan 2024	122
5.1.15	Realisasi Jasa Giro TA 2025 dan 2024	122
5.1.16	Realisasi Pendapatan Denda Pajak Daerah	123
5.1.17	Realisasi Pendapatan Denda Retribusi Daerah	123
5.1.18	Realisasi Pendapatan dari Pengembalian TA 2025 dan 2024	123
5.1.19	Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah per Perangkat Daerah Tahun 2025 dan 2024	126
5.1.20	Realisasi Pendapatan Transfer TA 2025 dan 2024	127
5.1.21	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan TA 2025 dan 2024	127
5.1.22	Dana Bagi Hasil TA 2025 dan 2024	128
5.1.23	Dana Bagi Hasil Pajak TA 2025 dan 2024	128
5.1.24	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam TA 2025 dan 2024	129
5.1.25	Dana Alokasi Umum TA 2025 dan 2024	129
5.1.26	Dana Alokasi Khusus TA 2025 dan 2024	130
5.1.27	Dana Alokasi Khusus - Fisik Tahun Anggaran 2025 dan 2024	130
5.1.28	Dana Alokasi Khusus - Non Fisik Tahun Anggaran 2025 dan 2024	131
5.1.29	Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2025 dan 2024	131
5.1.30	Pendapatan Transfer Antar Daerah Tahun Anggaran 2025 dan 2024	132
5.1.31	Pendapatan Bagi Hasil TA 2025 dan 2024	132
5.1.32	Bantuan Keuangan TA 2025 dan 2024	133
5.1.33	Rincian Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2025	133
5.1.34	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan 2024	134
5.1.35	Belanja Operasi Tahun Anggaran 2025 dan 2024	134
5.1.36	Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2025 dan 2024	135
5.1.37	Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN TA 2025 dan 2024	135
5.1.38	Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan ASN TA 2025 dan 2024	136
5.1.39	Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD TA 2025 dan 2024	136
5.1.40	Realisasi Belanja Belanja Gaji dan Tunjangan KDH / WKDH TA 2025 dan 2024	137
5.1.41	Realisasi Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH TA 2025 dan 2024	138

Tabel No.	Nama Tabel	Hal
5.1.42	Realisasi Belanja Pegawai per Perangkat Daerah TA 2025 dan 2024	138
5.1.43	Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2025 dan 2024	139
5.1.44	Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2025 dan 2024	139
5.1.45	Realisasi Belanja Jasa Tahun Anggaran 2025 dan 2024	141
5.1.46	Belanja Pemeliharaan Tahun Anggaran 2025 dan 2024	145
5.1.47	Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2025 dan 2024	146
5.1.48	Realisasi Belanja Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Tahun Anggaran 2025 dan 2024	147
5.1.49	Realisasi Belanja Barang dan Jasa per Perangkat Daerah	147
5.1.50	Belanja Bunga Tahun Anggaran 2025 dan 2024	148
5.1.51	Realisasi Belanja Bunga per Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025 dan 2024	149
5.1.52	Belanja Hibah Tahun Anggaran 2025 dan 2024	150
5.1.53	Realisasi Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2025 dan 2024	150
5.1.54	Realisasi Belanja Hibah Uang Kepada Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2025 dan 2024	150
5.1.55	Realisasi Belanja Hibah Barang Kepada Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2025 dan 2024	151
5.1.56	Realisasi Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Tahun Anggaran 2025 dan 2024	151
5.1.57	Realisasi Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2025 dan 2024	151
5.1.58	Realisasi Belanja Hibah per Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025 dan 2024	152
5.1.59	Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2025 dan 2024	153
5.1.60	Realisasi Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu Tahun Anggaran 2025 dan 2024	153
5.1.61	Realisasi Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu - Realisasi Bantuan Pelunasan Biaya Pendidikan	154
5.1.62	Realisasi Belanja Bantuan Sosial per Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025 dan 2024	154
5.1.63	Belanja Modal Tahun Anggaran 2025 dan 2024	155
5.1.64	Belanja Tanah Tahun Anggaran 2025 dan 2024	155
5.1.65	Rincian Realisasi Belanja Tanah Tahun Anggaran 2025 dan 2024	155
5.1.66	Realisasi Belanja Modal Tanah per Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025 dan 2024	156
5.1.67	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2025 dan 2024	156
5.1.68	Realisasi Belanja Modal Alat Berat Tahun Anggaran 2025 dan 2024	156
5.1.69	Realisasi Belanja Modal Alat Angkutan Tahun Anggaran 2025 dan 2024	157
5.1.70	Realisasi Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur Tahun Anggaran 2025 dan 2024	157
5.1.71	Realisasi Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Tahun Anggaran 2025 dan 2024	158
5.1.72	Realisasi Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar Tahun Anggaran 2025 dan 2024	158
5.1.73	Realisasi Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan Tahun Anggaran 2025 dan 2024	159
5.1.74	Realisasi Belanja Modal Alat Laboratorium Tahun Anggaran 2025 dan 2024	159
5.1.75	Realisasi Belanja Modal Komputer Tahun Anggaran 2025 dan 2024	159
5.1.76	Realisasi Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja Tahun Anggaran 2025 dan 2024	160
5.1.77	Realisasi Belanja Modal Rambu-Rambu Tahun Anggaran 2025 dan 2024	160
5.1.78	Realisasi Belanja Modal Peralatan Olahraga Anggaran 2025 dan 2024	160
5.1.79	Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP Tahun Anggaran 2025 dan 2024	160
5.1.80	Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025 dan 2024	161
5.1.81	Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2025 dan 2024	162
5.1.82	Rincian Realisasi Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Tahun Anggaran 2025 dan 2024	162
5.1.83	Rincian Realisasi Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Tahun Anggaran 2025 dan 2024	163
5.1.84	Rincian Realisasi Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan Tahun Anggaran 2025 dan 2024	163
5.1.85	Rincian Realisasi Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Tahun Anggaran 2025 dan	163
5.1.86	Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025 dan 2024	163
5.1.87	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2025 dan 2024	164
5.1.88	Belanja Modal Jalan dan Jembatan Tahun Anggaran 2025 dan 2024	164
5.1.89	Realisasi Belanja Modal Bangunan Air Tahun Anggaran 2025 dan 2024	165
5.1.90	Realisasi Belanja Modal Instalasi Tahun Anggaran 2025 dan 2024	165
5.1.91	Realisasi Belanja Modal Jaringan Tahun Anggaran 2025 dan 2024	165
5.1.92	Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan per Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025 dan 2024	166
5.1.93	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2025 dan 2024	166
5.1.94	Realisasi Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tahun Anggaran 2025 dan 2024	167
5.1.95	Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya per Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025 dan 2024	167
5.1.96	Belanja Modal Aset Lainnya Tahun Anggaran 2025 dan 2024	167
5.1.97	Realisasi Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Tahun Anggaran 2025 dan 2024	168

Tabel No.	Nama Tabel	Hal
5.1.98	Realisasi Belanja Modal Aset Tidak Berwujud per Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025 dan 2024	168
5.1.99	Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2025 dan 2024	169
5.1.100	Belanja Transfer Tahun Anggaran 2025 dan 2024	170
5.1.101	Pembiayaan Tahun Anggaran 2025 dan 2024	171
5.1.102	Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2025 dan 2024	171
5.1.103	SiLPA Anggaran tahun sebelumnya Tahun Anggaran 2025 dan 2024	171
5.1.104	Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2025 dan 2024	172
5.1.105	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 dan 2024	173
5.1.106	Rincian SiLPA Tahun Anggaran 2025 dan 2024	173
5.1.107	Rincian SiLPA Tahun Anggaran 2025	174
5.2.1	Rincian Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun 2025 dan 2024	175
5.2.2	Rincian Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan Tahun 2025 dan 2024	175
5.2.3	Rincian Sisa Lebih/ (Kurang) Pembiayaan Anggaran SiLPA/ SiKPA Tahun 2025 dan 2024	176
5.2.4	Rincian Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun 2025 dan 2024	176
5.2.5	Rincian Saldo Anggaran Lebih TA 2025 dan 2024	177
5.2.6	Rincian Saldo Anggaran Lebih TA 2025	177
5.3.1	Neraca	178
5.3.2	Aset TA 2025 dan 2024	178
5.3.3	Aset Lancar TA 2025 dan 2024	179
5.3.4	Kas dan Setara Kas TA 2025 dan 2024	179
5.3.5	Kas dan Setara Kas Per Perangkat Daerah	179
5.3.6	Mutasi Kas di Kas Daerah	181
5.3.7	Rincian Kas di Kasda	181
5.3.8	Kas di Bendahara Penerimaan	181
5.3.9	Kas di Bendahara Pengeluaran	182
5.3.10	Rincian Kas di BLUD	182
5.3.11	Mutasi Kas di BLUD	183
5.3.12	Rincian Kas di BLUD	183
5.3.13	Kas Lainnya	183
5.3.14	Kas Lainnya per Perangkat Daerah	184
5.3.15	Kas Lainnya pada Dinas Pendidikan	184
5.3.16	Mutasi Kas di Bendahara BOS Pusat	184
5.3.17	Kas Dana BOK Puskesmas	185
5.3.18	Piutang	185
5.3.19	Piutang Pajak Daerah	186
5.3.20	Mutasi Piutang Pajak Daerah	186
5.3.21	Piutang Retribusi Daerah	187
5.3.22	Piutang Retribusi Daerah per Perangkat Daerah	187
5.3.23	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	187
5.3.24	Piutang Bagian Laba yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	188
5.3.25	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	188
5.3.26	Piutang Lain-lain PAD yang Sah per Perangkat Daerah	188
5.3.27	Mutasi Piutang Denda Pajak	188
5.3.28	Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	189
5.3.29	Rincian Piutang Transfer Antar Daerah	189
5.3.30	Piutang Lainnya	189
5.3.31	Piutang Lainnya per Perangkat Daerah	190
5.3.32	Piutang Lainnya pada BKAD	190
5.3.33	Penyisihan Piutang	191
5.3.34	Penyisihan Piutang Pajak	191
5.3.35	Penyisihan Piutang Retribusi	191
5.3.36	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	192
5.3.37	Penyisihan Piutang Lainnya	192
5.3.38	Beban Dibayar Dimuka per Perangkat Daerah	193
5.3.39	Persediaan Pemerintah Kota Bogor	193
5.3.40	Persediaan per Perangkat Daerah	194

Tabel No.	Nama Tabel	Hal
5.3.41	Persediaan Bahan Bangunan dan Konstruksi per Perangkat Daerah	196
5.3.42	Persediaan Bahan Kimia per Perangkat Daerah	197
5.3.43	Persediaan Bahan Bakar dan Pelumas per Perangkat Daerah	197
5.3.44	Persediaan Bahan Baku per Perangkat Daerah	198
5.3.45	Persediaan Bahan/Bibit Tanaman per Perangkat Daerah	198
5.3.46	Persediaan Isi Tabung Pemadam Kebakaran per Perangkat Daerah	198
5.3.47	Persediaan Isi Tabung Gas per Perangkat Daerah	199
5.3.48	Persediaan Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan per Perangkat Daerah	199
5.3.49	Persediaan Bahan Lainnya per Perangkat Daerah	199
5.3.50	Persediaan Suku Cadang Alat Angkutan per Perangkat Daerah	200
5.3.51	Persediaan Suku Cadang Alat Besar per Perangkat Daerah	200
5.3.52	Persediaan Suku Cadang Alat Kedokteran per Perangkat Daerah	200
5.3.53	Persediaan Suku Cadang Alat Laboratorium per Perangkat Daerah	201
5.3.54	Persediaan Suku Cadang Alat Pertanian per Perangkat Daerah	201
5.3.55	Persediaan Suku Cadang Alat Bengkel per Perangkat Daerah	201
5.3.56	Persediaan Suku Cadang Lainnya per Perangkat Daerah	202
5.3.57	Persediaan Alat Tulis Kantor per Perangkat Daerah	202
5.3.58	Persediaan Kertas dan Cover per Perangkat Daerah	203
5.3.59	Persediaan Bahan Cetak per Perangkat Daerah	203
5.3.60	Persediaan Benda Pos per Perangkat Daerah	204
5.3.61	Persediaan Bahan Komputer per Perangkat Daerah	204
5.3.62	Persediaan Perabot Kantor per Perangkat Daerah	205
5.3.63	Persediaan Alat Listrik per Perangkat Daerah	205
5.3.64	Persediaan Perlengkapan Dinas per Perangkat Daerah	206
5.3.65	Persediaan Perlengkapan Pendukung Olah Raga per Perangkat Daerah	207
5.3.66	Persediaan Suvenir/Cendera Mata per Perangkat Daerah	207
5.3.67	Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya per Perangkat Daerah	207
5.3.68	Persediaan Obat per Perangkat Daerah	208
5.3.69	Persediaan Obat-Obatan Lainnya per Perangkat Daerah	208
5.3.70	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat per Perangkat Daerah	209
5.3.71	Persediaan Natura per Perangkat Daerah	209
5.3.72	Persediaan Pakan per Perangkat Daerah	210
5.3.73	Persediaan Komponen Peralatan per Perangkat Daerah	210
5.3.74	Persediaan Komponen Rambu-Rambu per Perangkat Daerah	210
5.3.75	Persediaan Komponen Lainnya per Perangkat Daerah	211
5.3.76	Persediaan Pipa Baja per Perangkat Daerah	211
5.3.77	Persediaan Pipa Plastik PVC (UPVC) per Perangkat Daerah	211
5.3.78	Investasi Jangka Panjang	212
5.3.79	Dana Bergulir	212
5.3.80	Penyisihan Dana Bergulir	213
5.3.81	Penyertaan Modal Pemerintah	213
5.3.82	Penyertaan Modal Pemerintah pada BJB	213
5.3.83	Penyertaan Modal Pemerintah pada PDAM	214
5.3.84	Penyertaan Modal Pemerintah pada Bank Kota Bogor	215
5.3.85	Penyertaan Modal Pemerintah pada PDJT	215
5.3.86	Penyertaan Modal Pemerintah pada PD Pasar Pakuan Jaya	216
5.3.87	Aset Tetap	216
5.3.88	Aset tetap per perangkat daerah	217
5.3.89	Mutasi Aset Tetap	218
5.3.90	Tanah per perangkat daerah	219
5.3.91	Rincian Mutasi Tanah	220
5.3.92	Tanah yang telah bersertifikat	221
5.3.93	Tanah yang belum bersertifikat	221
5.3.94	Rencana aksi sertifikasi tanah tahun 2026	222
5.3.95	Peralatan Mesin Per Perangkat Daerah	224
5.3.96	Mutasi Aset Tetap Peralatan Mesin	225

Tabel No.	Nama Tabel	Hal
5.3.97	Gedung Bangunan per Perangkat Daerah	227
5.3.98	Mutasi Aset Tetap Gedung Bangunan	227
5.3.99	Jaringan, Irigasi dan Jalan per Perangkat Daerah	229
5.3.100	Mutasi Aset Tetap Jaringan Irigasi Jalan	229
5.3.101	Aset tetap Lainnya per Perangkat Daerah	230
5.3.102	Mutasi Aset Tetap Lainnya	231
5.3.103	Konstruksi Dalam Pengerjaan per Perangkat Daerah	232
5.3.104	Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan	232
5.3.105	Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	233
5.3.106	Rincian Beban Penyusutan	233
5.3.107	Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku Aset Tetap	233
5.3.108	Dana Cadangan	234
5.3.109	Aset Lainnya	234
5.3.110	Tagihan Jangka Panjang	234
5.3.111	Tuntutan Ganti Rugi	235
5.3.112	Mutasi Tuntutan Ganti Rugi	235
5.3.113	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	235
5.3.114	Aset Tidak Berwujud	235
5.3.115	Aset Lain-lain - Penerusan Dana Pinjaman PDAM	236
5.3.116	Rincian Aset Lain-lain per Perangkat Daerah	236
5.3.117	Mutasi Aset Lain-lain	237
5.3.118	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	238
5.3.119	Mutasi Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	238
5.3.120	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	238
5.3.121	Dana Transfer Treasury Deposit Facility	239
5.3.122	Rincian Properti Investasi Tanah OPD	241
5.3.123	Rincian Properti Investasi Gedung Bangunan OPD	242
5.3.124	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	242
5.3.125	Kewajiban	243
5.3.126	Kewajiban Jangka Pendek	243
5.3.127	Utang Perhitungan Pihak Ketiga	243
5.3.128	Utang Bunga	243
5.3.129	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	244
5.3.130	Pendapatan Diterima Dimuka	244
5.3.131	Utang Belanja Per Objek	244
5.3.132	Utang Jangka Pendek Lainnya	245
5.3.133	Kewajiban Jangka Panjang	245
5.3.134	Utang atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri	246
5.3.135	Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) - BUMD	246
5.3.136	Ekuitas	246
5.4.1	Pendapatan Daerah LO TA 2025 dan 2024	247
5.4.2	Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO TA 2025 dan 2024	247
5.4.3	Pajak Daerah - LO TA 2025 dan 2024	248
5.4.4	Rincian PAD - Pajak Daerah - LO Per Perangkat Daerah TA 2025 dan 2024	248
5.4.5	Perbandingan Nilai PAD - Pajak Daerah pada LO dan LRA TA 2025	249
5.4.6	Rincian Selisih Nilai PAD - Pajak Daerah pada LO dan LRA TA 2025	249
5.4.7	Pendapatan Retribusi Daerah TA 2025 dan 2024	250
5.4.8	Perbandingan Nilai PAD - Retribusi Daerah pada LO dan LRA TA 2025	250
5.4.9	Rincian Selisih Nilai PAD - Retribusi Daerah pada LO dan LRA TA 2025	250
5.4.10	Pendapatan Retribusi Jasa Umum TA 2025 dan 2024	251
5.4.11	Pendapatan Retribusi Jasa Umum per Perangkat Daerah TA 2025 dan 2024	251
5.4.12	Pendapatan Retribusi Jasa Usaha TA 2025 dan 2024	252
5.4.13	Rincian Pendapatan Retribusi Jasa Usaha per Perangkat Daerah TA 2025 dan TA 2024	252
5.4.14	Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu TA 2025 dan 2024	253
5.4.15	Rincian Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu per Perangkat Daerah TA 2025 dan 2024	253
5.4.16	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2025 dan 2024	253

Tabel No.	Nama Tabel	Hal
5.4.17	Perbandingan Nilai PAD - Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah pada LO dan LRA TA 2025	254
5.4.18	Rincian selisih Nilai PAD - Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah pada LO dan LRA TA 2025	255
5.4.19	Lain-lain PAD yang Sah - LO TA 2025 dan 2024	255
5.4.20	Perbandingan Nilai Lain-lain PAD yang Sah pada LO dan LRA TA 2025	256
5.4.21	Rincian Selisih Nilai Lain-lain PAD yang Sah pada LO dan LRA TA 2025	256
5.4.22	Lain-lain PAD yang Sah - LO per Perangkat Daerah TA 2025 dan 2024	257
5.4.23	Pendapatan Transfer - LO TA 2025 dan 2024	258
5.4.24	Perbandingan Nilai Pendapatan Transfer Pusat - LO pada LO dan LRA TA 2025	258
5.4.25	Rician selisih Nilai Pendapatan Transfer Pusat - LO Pada LO dan LRA TA 2025	258
5.4.26	Transfer Pemerintah Pusat TA 2025 dan 2024	259
5.4.27	Dana Bagi Hasil Pajak TA 2025 dan 2024	259
5.4.28	Perbandingan Nilai Pendapatan Transfer Pusat - LO Pada LO dan LRA TA 2025	260
5.4.29	Rincian selisih Nilai Pendapatan Transfer Pusat - LO Pada LO dan LRA TA 2025	260
5.4.30	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA)	260
5.4.31	Perbandingan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) pada LO dan LRA TA 2025	260
5.4.32	Rincian selisih Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) pada LO dan LRA TA 2025	261
5.4.33	Dana Alokasi Umum (DAU) TA 2025 dan 2024	261
5.4.34	Perbandingan Dana Alokasi Umum (DAU) antara LO dan LRA TA 2025	262
5.4.35	Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2025 dan 2024	262
5.4.36	Perbandingan Dana Alokasi Khusus (DAK) antara LO dan LRA TA 2025	262
5.4.37	Rincian DAK Fisik dan DAN Non Fisik TA 2025 dan 2024	263
5.4.38	Insentif Fiskal TA 2025 dan 2024	264
5.4.39	Transfer Pemerintah antar Daerah TA 2025 dan 2024	264
5.4.40	Pendapatan Bagi Hasil TA 2025 dan 2024	264
5.4.41	Rincian Pendapatan Bagi Hasil - LO TA 2025 dan 2024	264
5.4.42	Perbandingan Pendapatan Bagi Hasil-LO antara LO dan LRA TA 2025	265
5.4.43	Rincian Selisih Pendapatan Bagi Hasil-LO antara LO dan LRA TA 2025	265
5.4.44	Bantuan Keuangan TA 2025 dan 2024	266
5.4.45	Pendapatan Hibah - LO TA 2025 dan 2024	266
5.4.46	Rincian Pendapatan Hibah - LO TA 2025 dan 2024	266
5.4.47	Rincian Pendapatan Hibah - LO TA 2025 dan 2024 Per Perangkat Daerah	267
5.4.48	Beban Operasi TA 2025 dan 2024	268
5.4.49	Beban Pegawai TA 2025 dan 2024	269
5.4.50	Perbandingan Nilai Beban Pegawai pada LO dan LRA Tahun 2025	269
5.4.51	Beban Persediaan TA 2025 dan 2024	269
5.4.52	Beban Jasa TA 2025 dan 2024	273
5.4.53	Perbandingan Beban Jasa TA 2025 antara LO dan LRA	273
5.4.54	Rincian Selisih Perbandingan Beban Jasa TA 2025 antara LO dan LRA	274
5.4.55	Beban Pemeliharaan TA 2025 dan 2024	275
5.4.56	Perbandingan Nilai Beban Pemeliharaan pada LO dan LRA tahun 2025	275
5.4.57	Rincian Selisih Nilai Beban Pemeliharaan pada LO dan LRA tahun 2025	275
5.4.58	Beban Perjalanan Dinas TA 2025 dan 2024	276
5.4.59	Perbandingan Nilai Beban Perjalanan Dinas pada LO dan LRA Tahun 2025	276
5.4.60	Rincian selisih Nilai Beban Perjalanan Dinas pada LO dan LRA Tahun 2025	276
5.4.61	Beban Bunga TA 2025 dan TA 2024	277
5.4.62	Perbandingan Nilai Beban Bunga pada LO dan LRA Tahun 2025	277
5.4.63	Rincian Selisih Nilai Beban Bunga pada LO dan LRA Tahun 2025	278
5.4.64	Beban Hibah TA 2025 dan 2024	278
5.4.65	Perbandingan Nilai Beban Hibah pada LO dan LRA Tahun 2025	279
5.4.66	Beban Bantuan Sosial TA 2025 dan 2024	279
5.4.67	Perbandingan Nilai Beban Bantuan Sosial pada LO dan LRA Tahun 2025	279
5.4.68	Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2025 dan 2024	280
5.4.69	Penurunan Beban Penyusutan Peralatan Mesin pada TA 2025	280
5.4.70	Penurunan Beban Penyusutan Jalan Irigasi dan Jaringan pada TA 2025	280
5.4.71	Beban Penyisihan Piutang TA 2025 dan 2024	281
5.4.72	Beban Penyisihan Piutang TA 2025 dan 2024 Per Perangkat Daerah	281

Tabel No.	Nama Tabel	Hal
5.4.73	Beban Lain-lain TA 2025 dan 2024	282
5.4.74	Beban Transfer TA 2025 dan 2024	282
5.4.75	Perbandingan Nilai Beban Transfer pada LO dan LRA Tahun 2025	283
5.4.76	Rincian Beban Luar Biasa TA 2025 dan 2024	284
5.5.1	Rincian Saldo Awal Kas Tahun Anggaran 2025 dan 2024	286
5.5.2	Arus Kas Masuk Tahun Anggaran 2025 dan 2024	286
5.5.3	Arus Kas Keluar Tahun Anggaran 2025 dan 2024	286
5.5.4	Kenaikan/ (Penurunan Kas) Tahun Anggaran 2025 dan 2024	286
5.5.5	Arus Kas dari Aktivitas Operasi Tahun Anggaran 2025 dan 2024	287
5.5.6	Arus masuk kas dari Aktivitas Operasi Tahun Anggaran 2025 dan 2024	287
5.5.7	Arus masuk kas dari Penerimaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2025 dan 2024	287
5.5.8	Arus masuk kas dari Penerimaan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025 dan 2024	288
5.5.9	Arus masuk kas dari Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Tahun Anggaran 2025 dan 2024	288
5.5.10	Arus masuk kas dari Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah Tahun Anggaran 2025 dan 2024	288
5.5.11	Arus masuk kas dari Penerimaan Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Tahun Anggaran 2025 dan 2024	289
5.5.12	Penerimaan Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2025 dan 2024	289
5.5.13	Arus masuk Kas dari Penerimaan Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Tahun Anggaran 2025 dan 2024	290
5.5.14	Arus masuk Kas dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2025 dan 2024	290
5.5.15	Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi Tahun Anggaran 2025 dan 2024	291
5.5.16	Arus Kas bersih dari Aktivitas Investasi Tahun Anggaran 2025 dan 2024	291
5.5.17	Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi Tahun Anggaran 2025 dan 2024	291
5.5.18	Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi Tahun Anggaran 2025 dan 2024	292
5.5.19	Arus Kas bersih dari Aktivitas Pembiayaan Tahun Anggaran 2025 dan 2024	291
5.5.20	Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pembiayaan Tahun Anggaran 2025 dan 2024	292
5.5.21	Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pembiayaan Tahun Anggaran 2025 dan 2024	292
5.5.22	Arus Kas bersih dari Aktivitas Transitoris Tahun Anggaran 2025 dan 2024	293
5.5.23	Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris Tahun Anggaran 2025 dan 2024	293
5.5.24	Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris Tahun Anggaran 2025 dan 2024	293
5.5.25	Rincian Saldo Akhir Kas Tahun Anggaran Tahun Anggaran 2025 dan 2024	294
5.6.1	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar TA. 2023	295
5.6.2	Koreksi Nilai Persediaan	296
5.6.3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar - Aset Tetap	296
5.6.4	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar - Koreksi Ekuitas Lainnya	297
6.2.1	Rekapitulasi Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor	299
6.3.1	Luas daerah per kecamatan (%)	300
6.3.2	Rekapitulasi Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor	300

DAFTAR GRAFIK

Tabel No.	Uraian	Hal
2.1.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Bogor Tahun 2021 - 2025	15
2.1.4	Perbandingan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut pengeluaran Tahun 2021 - 2024	17
2.1.5	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Bogor dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 - 2025	17
2.1.10	Perkembangan Inflasi Kota Bogor Tahun 2025	20
2.1.11	Perkembangan Inflasi Year on Year (yoy) Kota Bogor tahun 2025	21
2.1.13	Perbandingan Gini Rasio Kota Bogor dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 - 2025	22
2.1.14	Persentase Perkembangan Penduduk Miskin Kota Bogor dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 - 2025	22
2.1.15	Persentase Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Bogor dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 - 2025	23
2.1.16	Persentase Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Bogor dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 - 2025	24



PEMERINTAH KOTA BOGOR
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
PER 31 DESEMBER 2025 dan 2024

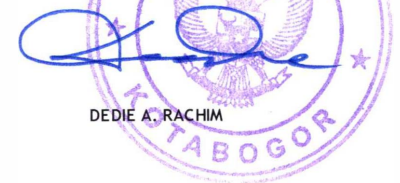
(Dalam Rupiah)

Uraian	REF	Anggaran 2025	Realisasi 2025 (Audited)	Realisasi 2024 (Audited)
PENDAPATAN	5.1.1			
PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.1.1.1	1.745.089.943.776,00	1.665.054.114.174,02	1.458.619.452.757,24
Pajak Daerah	5.1.1.1.1	1.243.958.559.538,00	1.129.091.295.713,00	973.768.860.850,00
Retribusi Daerah	5.1.1.1.2	429.350.280.951,00	452.987.996.053,02	417.445.452.990,24
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.1.1.3	38.153.497.994,00	37.011.667.932,00	34.287.163.763,00
Lain-lain PAD yang Sah	5.1.1.1.4	33.627.605.293,00	45.963.154.476,00	33.117.975.154,00
PENDAPATAN TRANSFER	5.1.1.2	1.573.722.062.181,00	1.567.716.762.107,00	1.711.878.175.798,00
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN	5.1.1.2.1	1.397.832.990.595,00	1.394.165.684.267,00	1.341.380.091.442,00
Dana Bagi Hasil	5.1.1.2.1.1	128.665.186.000,00	126.979.208.200,00	114.423.344.000,00
Dana Alokasi Umum	5.1.1.2.1.2	875.909.426.000,00	884.106.755.956,00	853.803.503.264,00
Dana Alokasi Khusus - Fisik	5.1.1.2.1.3	39.815.057.000,00	25.574.335.904,00	44.829.645.150,00
Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	5.1.1.2.1.4	353.443.321.595,00	357.505.384.207,00	328.323.599.028,00
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	5.1.1.2.2	16.164.800.000,00	16.164.800.000,00	28.047.664.000,00
Dana Insentif Daerah	5.1.1.2.2.1	16.164.800.000,00	16.164.800.000,00	28.047.664.000,00
PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	5.1.1.2.3	159.724.271.586,00	157.386.277.840,00	342.450.420.356,00
Pendapatan Bagi Hasil	5.1.1.2.3.1	147.481.481.861,00	145.298.859.311,00	303.076.793.631,00
Bantuan Keuangan	5.1.1.2.3.2	12.242.789.725,00	12.087.418.529,00	39.373.626.725,00
JUMLAH PENDAPATAN		3.318.812.005.957,00	3.232.770.876.281,02	3.170.497.628.555,24
BELANJA	5.1.2			
BELANJA OPERASI	5.1.2.1	2.958.012.808.956,00	2.835.000.060.430,00	2.774.250.053.629,00
Belanja Pegawai	5.1.2.1.1	1.291.590.593.554,00	1.242.050.494.107,00	1.242.957.964.907,00
Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.2	1.467.211.385.939,00	1.402.071.586.114,00	1.304.164.987.240,00
Belanja Bunga	5.1.2.1.3	8.000.000.000,00	5.028.947.290,00	7.027.746.595,00
Belanja Hibah	5.1.2.1.4	153.546.983.624,00	151.099.258.419,00	176.519.335.387,00
Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.5	37.663.845.839,00	34.749.774.500,00	43.580.019.500,00
BELANJA MODAL	5.1.2.2	409.174.368.181,00	383.274.926.236,00	400.367.986.619,00
Belanja Modal Tanah	5.1.2.2.1	36.731.950.693,00	28.044.059.320,00	2.477.717.100,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.2	117.741.742.284,00	110.067.042.014,00	133.226.642.367,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.3	119.664.337.862,00	114.464.370.580,00	141.166.601.172,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.2.2.4	121.533.865.971,00	117.476.854.621,00	112.729.496.656,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.5	12.884.796.571,00	12.610.804.842,00	10.693.173.754,00
Belanja Modal Aset Lainnya	5.1.2.2.6	617.674.800,00	611.794.859,00	74.355.570,00
BELANJA TAK TERDUGA	5.1.2.3	11.673.612.070,00	6.149.734.000,00	2.187.943.885,00
Belanja Tak Terduga	5.1.2.3	11.673.612.070,00	6.149.734.000,00	2.187.943.885,00
JUMLAH BELANJA		3.378.860.789.207,00	3.224.424.720.666,00	3.176.805.984.133,00
BELANJA TRANSFER	5.1.3			
BELANJA BANTUAN KEUANGAN	5.1.3	3.711.375.000,00	3.660.750.000,00	1.660.750.000,00
Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi	5.1.3	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	1.660.750.000,00
Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	5.1.3	1.665.750.000,00	1.660.750.000,00	1.660.750.000,00
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	5.1.3	45.625.000,00	0,00	1.660.750.000,00
JUMLAH BELANJA TRANSFER		3.711.375.000,00	3.660.750.000,00	1.660.750.000,00
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER		3.382.572.164.207,00	3.228.085.470.666,00	3.178.466.734.133,00
SURPLUS/ (DEFISIT)		(63.760.158.250,00)	4.685.405.615,02	(7.969.105.577,76)

Uraian	REF	Anggaran 2025	Realisasi 2025 (Audited)	Realisasi 2024 (Audited)
PEMBIAYAAN	5.1.4			
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.1.4.1	97.354.304.246,00	240.845.870.193,38	225.089.463.440,14
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	5.1.4.1	84.935.591.686,00	84.939.423.716,38	54.255.954.664,14
Pencairan Dana Cadangan	5.1.4.1	6.921.680.300,00	6.921.680.300,00	38.648.742.600,00
Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	5.1.4.1	0,00	143.500.000.000,00	126.700.000.000,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	5.1.4.1	5.497.032.260,00	5.484.766.177,00	5.484.766.176,00
PENGELUARAN DAERAH	5.1.4.2	33.594.145.996,00	172.284.766.176,00	132.184.766.176,00
Pembentukan Dana Cadangan	5.1.4.2	8.300.000.000,00	8.300.000.000,00	0,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.1.4.2	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	0,00
Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Pusat	5.1.4.2	5.497.032.260,00	5.484.766.176,00	5.484.766.176,00
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank	5.1.4.2	0,00	143.500.000.000,00	126.700.000.000,00
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank	5.1.4.2	4.797.113.736,00	0,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTO		63.760.158.250,00	68.561.104.017,38	92.904.697.264,14
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	5.1.5	0,00	73.246.509.632,40	84.935.591.686,38

Bogor, 28 Mei 2026

WALI KOTA BOGOR



DEDIE A. RACHIM



PEMERINTAH KOTA BOGOR
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

NO	URAIAN	REF	2025 AUDITED	2024 AUDITED
1	SALDO ANGGARAN LEBIH AWAL	5.2.1	84.935.591.686,38	54.250.445.599,14
2	PENGUNAAN SAL SEBAGAI PENERIMAAN PEMBIAYAAN TAHUN BERJALAN	5.2.2	(84.939.423.716,38)	(54.255.954.664,14)
	JUMLAH SUB TOTAL (1+2)		(3.832.030,00)	(5.509.065,00)
3	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA/SIKPA)	5.2.3	73.246.509.632,40	84.935.591.686,38
	JUMLAH SUB TOTAL (1+2+3)		73.242.677.602,40	84.930.082.621,38
4	KOREKSI KESALAHAN PEMBUKUAN TAHUN SEBELUMNYA	5.2.4	3.832.030,00	5.509.065,00
5	LAIN-LAIN		0,00	0,00
	SALDO ANGGARAN LEBIH AKHIR (1+2+3+4+5)	5.2.5	73.246.509.632,40	84.935.591.686,38

Bogor, 28 Mei 2026

WALI KOTA BOGOR


DEDIE A. RACHIM



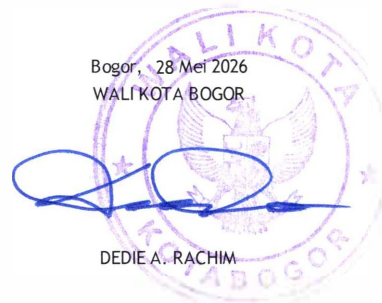
PEMERINTAH KOTA BOGOR
NERACA
PER 31 DESEMBER 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	REF	2025 (Audited)	2024 (Audited)
ASET	5.3.1		
ASET LANCAR	5.3.1.1		
Kas di Kas Daerah	5.3.1.1.1.1	56.718.328.310,00	79.503.327.898,00
Kas di Bendahara Penerimaan	5.3.1.1.1.2	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	5.3.1.1.1.3	0,00	0,00
Kas di BLUD	5.3.1.1.1.4	15.610.395.136,40	2.153.130.596,38
Kas Lainnya	5.3.1.1.1.5	48.870.128,00	1.012.808.839,00
Kas Dana BOSP	5.3.1.1.1.6	616.566.724,00	947.597.794,00
Kas Dana BOK Puskesmas	5.3.1.1.1.7	300.849.334,00	0,00
Setara Kas	5.3.1.1.1.8	0,00	0,00
Piutang Pajak	5.3.1.1.2.1	681.423.976.390,00	617.775.532.829,00
Piutang Retribusi	5.3.1.1.2.2	56.316.655.316,70	84.392.660.913,70
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.3.1.1.2.3	0,00	4.510.852.544,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	5.3.1.1.2.4	192.079.349.935,00	177.064.672.727,00
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	5.3.1.1.2.5	79.309.259.000,00	0,00
Piutang Transfer Antar Daerah	5.3.1.1.2.6	1.313.722.709,00	12.733.735.118,00
Piutang Lainnya	5.3.1.1.3	15.718.793.772,00	59.596.923.188,00
Penyisihan Piutang	5.3.1.1.4	(438.194.379.730,57)	(389.964.184.114,24)
Beban Dibayar Dimuka	5.3.1.1.5	839.255.994,52	505.228.167,24
Persediaan	5.3.1.1.6	54.191.413.663,23	49.525.803.484,97
JUMLAH ASET LANCAR		716.293.056.682,28	699.758.089.985,05
INVESTASI JANGKA PANJANG	5.3.1.2		
Investasi Non Permanen	5.3.1.2.1	0,00	0,00
Investasi kepada BUMN		0,00	0,00
Investasi kepada BUMD		0,00	0,00
Investasi dalam Obligasi		0,00	0,00
Investasi dalam Proyek Pembangunan		0,00	0,00
Dana Bergulir	5.3.1.2.1.1	51.753.390,00	51.753.390,00
Penyisihan Dana Bergulir	5.3.1.2.1.2	(51.753.390,00)	(51.753.390,00)
Investasi Permanen	5.3.1.2.2	1.008.990.818.971,85	1.002.293.416.444,24
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.3.1.2.2	1.008.990.818.971,85	1.002.293.416.444,24
Investasi - Pemberian Pinjaman Daerah		0,00	0,00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG		1.008.990.818.971,85	1.002.293.416.444,24
ASET TETAP	5.3.1.3		
Tanah	5.3.1.3.1	5.903.621.720.319,76	5.796.161.596.908,69
Peralatan dan Mesin	5.3.1.3.2	1.327.301.398.116,04	1.256.136.708.584,89
Gedung dan Bangunan	5.3.1.3.3	2.003.565.470.360,46	1.888.200.567.932,12
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.3.1.3.4	3.703.754.923.717,67	3.588.464.657.486,93
Aset Tetap Lainnya	5.3.1.3.5	18.845.414.375,99	15.088.820.384,99
Konstruksi dalam Pengerjaan	5.3.1.3.6	17.020.829.760,00	15.583.780.825,00
Akumulasi Penyusutan	5.3.1.3.7	(3.850.727.070.536,35)	(3.521.544.006.794,74)
JUMLAH ASET TETAP		9.123.382.686.113,57	9.038.092.125.327,88
DANA CADANGAN			
Dana Cadangan	5.3.1.4	8.300.000.000,00	8.398.684.760,00
JUMLAH DANA CADANGAN		8.300.000.000,00	8.398.684.760,00
ASET LAINNYA	5.3.1.5		
Tagihan Jangka Panjang		0,00	0,00
Tagihan Penjualan Angsuran	5.3.1.5.1	750.038.672,00	770.678.122,00
Tuntutan Ganti Rugi	5.3.1.5.2	1.495.359.633,90	351.103.844,90
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	5.3.1.5.3	11.014.184.310,00	11.014.184.310,00
Aset Tak Berwujud	5.3.1.5.4	17.931.181.742,80	16.970.742.403,80
Aset Lain - lain	5.3.1.5.5	236.087.502.380,73	187.940.474.139,24
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	5.3.1.5.6	(17.295.915.993,55)	(16.493.115.025,80)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	5.3.1.5.7	(143.898.151.723,71)	(131.320.042.007,03)
Treasury Deposit Facility (TDF)	5.3.1.5.8	-	7.169.764.000,00
JUMLAH ASET LAINNYA		106.084.199.022,17	76.403.789.787,11

PROPERTI INVESTASI	5.3.1.6		
Properti Investasi Tanah	5.3.1.6.1	135.483.205.373,00	213.767.403.459,00
Properti Investasi Gedung dan Bangunan	5.3.1.6.2	4.408.486.403,00	4.408.486.403,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan Properti Investasi		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	5.3.1.6.3	(1.059.772.796,12)	(977.705.908,52)
JUMLAH PROPERTI INVESTASI		138.831.918.979,88	217.198.183.953,48
JUMLAH ASET		11.101.882.679.769,75	11.042.144.290.257,76
KEWAJIBAN	5.3.2		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	5.3.2.1		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.3.2.1.1	48.500.000,00	158.277.901,00
Utang Bunga	5.3.2.1.2	483.260.494,00	543.668.056,00
Utang Pinjaman Jangka Pendek		0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	5.3.2.1.3	10.281.879.912,00	10.281.879.912,00
Pendapatan Diterima Dimuka	5.3.2.1.4	1.848.615.329,52	2.569.064.213,13
Utang Belanja	5.3.2.1.5	115.856.028.849,13	96.531.896.093,66
Utang Jangka Pendek Lainnya	5.3.2.1.6	69.023.455,00	6.666.000,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		128.587.308.039,65	110.091.452.175,79
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	5.3.2.2		
Utang kepada Pemerintah Pusat	5.3.2.2.1	38.393.363.243,00	43.878.129.419,00
Utang kepada Lembaga Keuangan Bank		0,00	0,00
Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	5.3.2.2.2	13.991.579.400,00	18.788.693.136,00
Utang kepada Masyarakat (Obligasi)		0,00	0,00
Premium (Diskonto) Obligasi		0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		52.384.942.643,00	62.666.822.555,00
JUMLAH KEWAJIBAN		180.972.250.682,65	172.758.274.730,79
EKUITAS			
Ekuitas	5.3.3	10.920.910.429.087,10	10.869.386.015.526,97
JUMLAH EKUITAS		10.920.910.429.087,10	10.869.386.015.526,97
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		11.101.882.679.769,75	11.042.144.290.257,76

Bogor, 28 Mei 2026
WALIKOTA BOGOR



DEDIE A. RACHIM



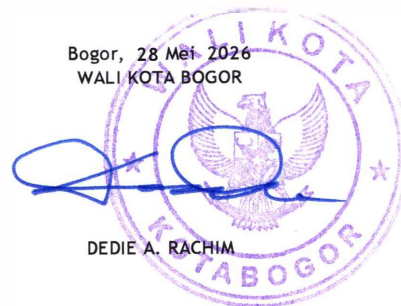
PEMERINTAH KOTA BOGOR
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	REF	2025 (Audited)	2024 (Audited)
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN	5.4.1		
PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.4.1.1	1.752.556.128.106,24	1.613.207.035.756,08
Pendapatan Pajak Daerah	5.4.1.1.1	1.216.051.506.304,00	1.072.592.914.165,00
Pendapatan Retribusi Daerah	5.4.1.1.2	425.526.925.108,63	429.458.652.647,18
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.4.1.1.3	65.318.785.141,61	75.711.032.790,57
Lain-lain PAD yang Sah	5.4.1.1.4	45.658.911.552,00	35.444.436.153,33
PENDAPATAN TRANSFER	5.4.1.2	1.633.233.358.434,00	1.701.821.239.565,00
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN	5.4.1.2.1	1.471.102.293.003,00	1.329.578.089.178,00
Dana Bagi Hasil	5.4.1.2.1.1	199.118.703.200,00	97.824.228.000,00
Dana Alokasi Umum	5.4.1.2.1.2	888.903.869.692,00	858.600.617.000,00
Dana Alokasi Khusus - Fisik	5.4.1.2.1.3	25.574.335.904,00	44.829.645.150,00
Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	5.4.1.2.1.3	357.505.384.207,00	328.323.599.028,00
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	5.4.1.2.2	16.164.800.000,00	28.047.664.000,00
Insentif Fiskal	5.4.1.2.2.1	16.164.800.000,00	28.047.664.000,00
PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	5.4.1.2.2.2	145.966.265.431,00	344.195.486.387,00
Pendapatan Bagi Hasil	5.4.1.2.2.2.1	133.878.846.902,00	304.828.525.662,00
Bantuan Keuangan	5.4.1.2.2.2.2	12.087.418.529,00	39.366.960.725,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	5.4.1.3	48.555.007.254,51	42.961.879.333,77
Pendapatan Hibah	5.4.1.3.1	48.555.007.254,51	42.961.879.333,77
Pendapatan Lainnya	5.4.1.3.2	-	-
JUMLAH PENDAPATAN		3.434.344.493.794,75	3.357.990.154.654,85
BEBAN			
BEBAN OPERASIONAL	5.4.2.1	3.318.102.221.671,87	3.295.465.961.046,54
Beban Pegawai	5.4.2.1.1	1.239.422.847.923,00	1.242.262.790.024,00
Beban Persediaan	5.4.2.1.2	398.819.152.251,79	361.655.139.056,65
Beban Jasa	5.4.2.1.3	817.895.657.735,72	763.459.300.802,48
Beban Pemeliharaan	5.4.2.1.4	200.667.467.236,00	146.011.452.259,00
Beban Perjalanan Dinas	5.4.2.1.5	63.463.101.473,00	94.617.582.922,00
Beban Bunga	5.4.2.1.6	4.968.539.728,00	7.571.414.651,00
Beban Hibah	5.4.2.1.7	151.099.258.419,00	176.519.335.387,00
Beban Bantuan Sosial	5.4.2.1.8	34.749.774.500,00	43.580.019.500,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	5.4.2.1.9	358.786.226.789,03	373.846.048.605,39
Beban Penyisihan Piutang	5.4.2.1.10	48.230.195.616,33	62.607.181.457,02
Beban Lain-lain	5.4.2.1.11	-	23.335.696.382,00
BEBAN TRANSFER	5.4.2.2	3.660.750.000,00	1.660.750.000,00
Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	5.4.2.2	-	-
Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	5.4.2.2	-	-
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	5.4.2.2	3.660.750.000,00	1.660.750.000,00
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	5.4.2.2	-	-
Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	5.4.2.2	-	-
JUMLAH BEBAN		3.321.762.971.671,87	3.297.126.711.046,54
SURPLUS/ (DEFISIT) KEGIATAN OPERASIONAL		112.581.522.122,88	60.863.443.608,31
SURPLUS/ (DEFISIT) KEGIATAN NON OPERASIONAL			
SURPLUS DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	5.4.3		
Surplus Penjualan Aset Non Lancar	5.4.3.1	-	14.388.624.170,56
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	5.4.3.1.1	-	-
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	5.4.3.1.1	-	-
DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	5.4.3.2	27.017.432.924,00	-
Defisit Penjualan Aset Non Lancar	5.4.3.2.1	-	-
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	5.4.3.2.1	-	-
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	5.4.3.2.2	27.017.432.924,00	-
SURPLUS/ (DEFISIT) KEGIATAN NON OPERASIONAL		(27.017.432.924,00)	14.388.624.170,56

URAIAN	REF	2025 (Audited)	2024 (Audited)
SURPLUS/ (DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA		85.564.089.198,88	75.252.067.778,87
POS LUAR BIASA	5.4.4		
PENDAPATAN LUAR BIASA	5.4.4.1	-	-
Pendapatan Luar Biasa	5.4.4.1.1	-	-
BEBAN LUAR BIASA	5.4.4.2	6.143.068.000,00	2.187.043.885,00
Beban Luar Biasa	5.4.4.2.1	6.143.068.000,00	2.187.043.885,00
SURPLUS/ (DEFISIT) KEGIATAN POS LUAR BIASA		(6.143.068.000,00)	(2.187.043.885,00)
SURPLUS/ (DEFISIT) LO		79.421.021.198,88	73.065.023.893,87

Bogor, 28 Mei 2026
WALI KOTA BOGOR



DEDIE A. RACHIM



PEMERINTAH KOTA BOGOR
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	Ref	2025 (Audited)	2024 (Audited)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	5.5.5		
Arus Masuk Kas	5.5.5.1		
Penerimaan Pajak Daerah	5.5.5.1	1.129.091.295.713,00	973.768.860.850,00
Penerimaan Retribusi Daerah	5.5.5.1	452.987.996.053,02	417.445.452.990,24
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5.5.5.1	37.011.667.932,00	34.287.163.763,00
Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.5.5.1	44.260.038.751,00	31.728.557.279,00
Penerimaan Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	5.5.5.1	126.979.208.200,00	114.423.344.000,00
Penerimaan Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	5.5.5.1	884.106.755.956,00	853.803.503.264,00
Penerimaan Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	5.5.5.1	25.574.335.904,00	44.829.645.150,00
Penerimaan Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	5.5.5.1	357.505.384.207,00	328.323.599.028,00
Penerimaan Insentif Fiskal	5.5.5.1	16.164.800.000,00	28.047.664.000,00
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil	5.5.5.1	145.298.859.311,00	303.076.793.631,00
Penerimaan Bantuan Keuangan	5.5.5.1	12.087.418.529,00	39.373.626.725,00
Jumlah Arus Masuk Kas		3.231.067.760.556,02	3.169.108.210.680,24
Arus Keluar Kas	5.5.5.2		
Pembayaran Pegawai	5.5.5.2	1.242.050.494.107,00	1.242.957.964.907,00
Pembayaran Barang dan Jasa	5.5.5.2	1.402.071.586.114,00	1.304.164.987.240,00
Pembayaran Bunga	5.5.5.2	5.028.947.290,00	7.027.746.595,00
Pembayaran Subsidi	5.5.5.2	0,00	0,00
Pembayaran Hibah	5.5.5.2	151.099.258.419,00	176.519.335.387,00
Pembayaran Bantuan Sosial	5.5.5.2	34.749.774.500,00	43.580.019.500,00
Pembayaran Tidak Terduga	5.5.5.2	6.149.734.000,00	2.187.943.885,00
Pembayaran Bantuan Keuangan	5.5.5.2	3.660.750.000,00	1.660.750.000,00
Jumlah Arus Keluar Kas		2.844.810.544.430,00	2.778.098.747.514,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		386.257.216.126,02	391.009.463.166,24
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	5.5.6		
Arus Masuk Kas	5.5.6.1		
Pencairan Dana Cadangan	5.5.6.1	6.921.680.300,00	38.648.742.600,00
Penjualan atas Tanah	5.5.6.1	20.639.450,00	24.168.075,00
Penjualan atas Peralatan dan Mesin	5.5.6.1	227.897.000,00	40.529.200,00
Penjualan atas Gedung dan Bangunan	5.5.6.1	0,00	0,00
Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.5.6.1	0,00	0,00
Pendapatan Penjualan Aset Tetap Lainnya	5.5.6.1	0,00	0,00
Pendapatan Penjualan Aset Lainnya	5.5.6.1	0,00	0,00
Pendapatan Penjualan Aset Lain-Lain	5.5.6.1	1.454.579.275,00	1.324.720.600,00
Jumlah Arus Masuk Kas		8.624.796.025,00	40.038.160.475,00
Arus Keluar Kas	5.5.6.2		
Pembentukan Dana Cadangan	5.5.6.2	8.300.000.000,00	0,00
Perolehan Tanah	5.5.6.2	28.044.059.320,00	2.477.717.100,00
Perolehan Peralatan dan Mesin	5.5.6.2	110.067.042.014,00	133.226.642.367,00
Perolehan Gedung dan Bangunan	5.5.6.2	114.464.370.580,00	141.166.601.172,00
Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5.5.6.2	117.476.854.621,00	112.729.496.656,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya	5.5.6.2	12.610.804.842,00	10.693.173.754,00
Perolehan Aset Lainnya	5.5.6.2	611.794.859,00	74.355.570,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.5.6.2	15.000.000.000,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas		406.574.926.236,00	400.367.986.619,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(397.950.130.211,00)	(360.329.826.144,00)

Uraian	Ref	2025 (Audited)	2024 (Audited)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN	5.5.7		
Arus Masuk Kas	5.5.7.1		
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	5.5.7.1	143.500.000.000,00	126.700.000.000,00
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	5.5.7.1	5.484.766.177,00	5.484.766.176,00
Jumlah Arus Masuk Kas		148.984.766.177,00	132.184.766.176,00
Arus Keluar Kas	5.5.7.2		
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	5.5.7.2	5.484.766.176,00	5.484.766.176,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	5.5.7.2	143.500.000.000,00	126.700.000.000,00
Jumlah Arus Keluar Kas	5.5.7.2	148.984.766.176,00	132.184.766.176,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan		1,00	-
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	5.5.8		
Arus Masuk Kas	5.5.8.1		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PPK)	5.5.8.1	234.127.228.024,89	240.844.476.337,48
Koreksi SiLPA	5.5.8.1	3.832.030,00	5.550.000,00
Jumlah Arus Masuk Kas		234.131.060.054,89	240.850.026.337,48
Arus Keluar Kas	5.5.8.2		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PPK)	5.5.8.2	234.237.005.925,89	240.946.249.332,48
Koreksi SiLPA	5.5.8.2	0,00	40.935,00
Jumlah Arus Keluar Kas		234.237.005.925,89	240.946.290.267,48
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		(105.945.871,00)	(96.263.930,00)
Kenaikan/Penurunan Bersih Kas Selama Periode		(11.798.859.954,98)	30.583.373.092,24
Saldo Awal Kas di BUD, Kas di Bendaharan Penerimaan dan Kas Lainnya		85.093.869.587,38	54.510.496.495,14
Saldo Akhir Kas di BUD		73.295.009.632,40	85.093.869.587,38
Terdiri dari :			
Saldo Akhir Kas di BUD		56.718.328.310,00	79.503.327.898,00
Saldo Kas Di BLUD		15.610.395.136,40	2.153.130.596,38
Saldo Kas di Bendahara BOS		616.566.724,00	947.597.794,00
Saldo Kas di Bendahara Penerimaan		0,00	0,00
Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran		0,00	0,00
Saldo Kas Lainnya		48.870.128,00	1.012.808.839,00
Kas Dana BOK Puskesmas		300.849.334,00	

Bogor, 28 Mei 2026
WALI KOTA BOGOR

DEDIE A. RACHIM



PEMERINTAH KOTA BOGOR
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	REF	2025 AUDITED	2024 AUDITED
EKUITAS AWAL	5.6.1	10.869.386.015.526,97	10.613.114.672.934,97
SURPLUS/DEFISIT-LO	5.6.2	79.421.021.198,88	73.065.023.893,87
Kewajiban untuk Dikonsolidasikan		0,00	0,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:	5.6.3	(27.896.607.638,75)	183.206.318.698,13
Koreksi Nilai Persediaan		(591.939.014,93)	25.303.013,44
Selisih Revaluasi Aset Tetap		0,00	0,00
Mutasi Saldo Awal - Aset Lancar		0,00	0,00
Mutasi Saldo Awal - Investasi Jangka Panjang		0,00	0,00
Mutasi Saldo Awal - Aset Tetap		0,00	0,00
Mutasi Saldo Awal - Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		0,00	0,00
Mutasi Saldo Awal - Dana Cadangan		0,00	0,00
Mutasi Saldo Awal - Aset Lainnya		0,00	0,00
Mutasi Saldo Awal - Kewajiban Jangka Pendek		0,00	0,00
Mutasi Saldo Awal - Kewajiban Jangka Panjang		0,00	0,00
Hasil Inventarisasi - Aset Tetap (Tanah)		1.230.636.025,07	73.815.713.760,00
Hasil Inventarisasi - Aset Tetap (Peralatan dan Mesin)		(28.201.577.198,85)	(6.852.682.613,17)
Hasil Inventarisasi - Aset Tetap (Gedung dan Bangunan)		(3.306.841.078,66)	(509.028.026,00)
Hasil Inventarisasi - Aset Tetap (Jalan Irigasi dan Jaringan)		(185.595.205,26)	2.734.814.178,00
Hasil Inventarisasi - Aset Tetap (Aset Tetap Lainnya)		(240.774.129,00)	677.492.474,15
Hasil Inventarisasi - Aset Lainnya		10.102.309.482,49	(12.075.219.301,50)
Hasil Inventarisasi - Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		28.892.161.976,44	9.643.553.427,56
Hasil Inventarisasi - Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		(12.751.976.501,05)	11.679.490.047,73
Koreksi ekuitas lainnya		(22.843.011.995,00)	104.066.881.737,92
EKUITAS AKHIR		10.920.910.429.087,10	10.869.386.015.526,97

Bogor, 28 Mei 2026

WALI KOTA BOGOR


DEDIE A. RACHIM

BAB I PENDAHULUAN

1.1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai salah satu upaya konkret untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pemerintah Kota Bogor menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bogor Tahun Anggaran 2025.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Laporan keuangan yang disusun ini meliputi :

a. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, surplus/defisit, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing dibandingkan dengan anggarannya dalam satu periode tertentu.

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

c. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

d. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

e. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan dan non keuangan.

f. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

CaLK sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan, menyajikan informasi pos- pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Laporan keuangan dimaksud disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Bogor 12 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah yang merupakan pelaksanaan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah.

LKPD Kota Bogor Tahun Anggaran 2025 disusun dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan informasi dari *stakeholders* (antara lain: masyarakat, DPRD, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa, dan Pemerintah Pusat) mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bogor selama Tahun Anggaran 2025 serta menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan dengan menyediakan informasi mengenai pendapatan LRA, Pendapatan LO, belanja, beban, transfer, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dan arus kas. Informasi ini disajikan agar pengguna memiliki pengetahuan mengenai:

1. Kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
2. Kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
3. Jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kota Bogor serta hasil-hasil yang dicapai;
4. Usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bogor dalam mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kas;
5. Posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Kota Bogor berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak, retribusi dan pembiayaan; dan
6. Perubahan posisi keuangan Pemerintah Kota Bogor sebagai akibat pelaksanaan kegiatan selama Tahun Anggaran 2025.

1.2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bogor disusun berdasarkan peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020);
12. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2022 Nomor 9);

-
13. Peraturan Wali Kota Bogor 12 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

1.3. ENTITAS PELAPORAN DAN ENTITAS AKUNTANSI

Entitas pelaporan adalah Pemerintah Daerah Kota Bogor, sedangkan Entitas Akuntansi meliputi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor. Entitas Akuntansi tidak termasuk perusahaan daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kota Bogor.

SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor meliputi:

1. Dinas Pendidikan
2. Dinas Kesehatan
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Dinas Perumahan dan Permukiman
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6. Satuan Polisi Pamong Praja
7. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
8. Dinas Sosial
9. Dinas Tenaga Kerja
10. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
11. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
12. Dinas Lingkungan Hidup
13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
14. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
15. Dinas Perhubungan
16. Dinas Komunikasi dan Informatika
17. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
19. Dinas Pemuda dan Olah Raga
20. Dinas Arsip dan Perpustakaan
21. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
22. Sekretariat Daerah
23. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
24. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
25. Badan Keuangan dan Aset Daerah
26. Badan Pendapatan Daerah
27. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
28. Inspektorat
29. Kecamatan Bogor Utara
30. Kecamatan Bogor Selatan
31. Kecamatan Bogor Timur
32. Kecamatan Bogor Barat
33. Kecamatan Bogor Tengah
34. Kecamatan Tanah Sereal
35. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

BLUD meliputi:

1. BLUD Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bogor
2. BLUD Puskesmas dan BLUD Labkesda yang merupakan unit kerja dibawah Dinas Kesehatan Kota Bogor

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 04 tentang Catatan Atas Laporan Keuangan, Sistematika Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor disusun sebagai berikut:

Bab I INFORMASI UMUM

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- 1.3 Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi
- 1.4 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Bab II EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

- 2.1 Ekonomi Makro
- 2.2 Kebijakan Keuangan Daerah

Bab III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

- 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
- 3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Bab IV DASAR PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 4.1 Pendahuluan
- 4.2 Asumsi Dasar Akuntansi
- 4.3 Komponen Laporan Keuangan
- 4.4 Keterbatasan Laporan Keuangan
- 4.5 Kebijakan Akuntansi
 1. Entitas Pelaporan
 2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
 3. Basis Pengukuran yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
 4. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah

Bab V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

- 5.1 Rincian dan Penjelasan Pos-pos Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah:
 1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
 2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL);
 3. Neraca;
 4. Laporan Operasional (LO);
 5. Laporan Arus Kas (LAK);
 6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Bab VI INFORMASI TAMBAHAN**Bab VII PENUTUP**

BAB II

EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

2.1 Ekonomi Makro

Pembangunan Ekonomi Kota Bogor sangat ditentukan dari aspek daya saing ekonomi masyarakat yang selanjutnya dapat diukur melalui aspek-aspek indikator makro ekonomi yakni:

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Bogor;
2. Produk domestik regional bruto (PDRB);
3. Pengeluaran Per Kapita (Konsumsi Per Kapita);
4. Tingkat Inflasi daerah;
5. Pemerataan kesejahteraan masyarakat;
6. Angka Kemiskinan; dan
7. Kondisi Ketenagakerjaan.

2.1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Bogor

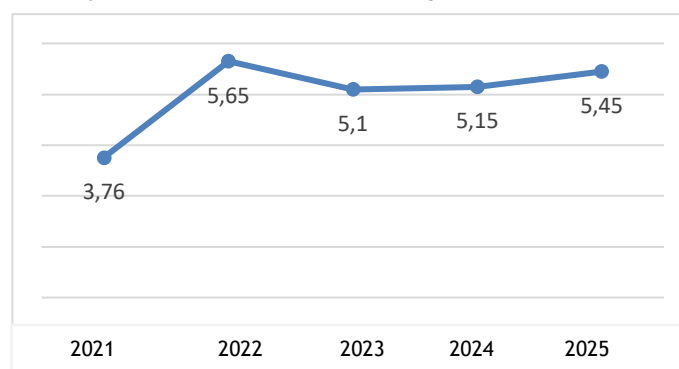
Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu daerah secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu.

Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan daerah.

Pertumbuhan ekonomi Kota Bogor pada tahun 2025 adalah sebesar 5,45 persen. Sektor yang mengalami pertumbuhan paling rendah pada tahun 2025 adalah Sektor pengadaan listrik dan gas mengalami kontraksi yaitu sebesar -2,66 persen. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Sepeda Motor pada tahun 2025 memberikan sumbangan tertinggi terhadap ekonomi Kota 18,83 persen, dengan laju pertumbuhan sebesar 5,16 persen. Sektor Industri terbesar kedua terhadap perekonomian Kota Bogor yaitu sebesar 17,79 persen dengan laju pertumbuhan sebesar 2,15 persen.

Pada PDRB menurut komponen pengeluaran, kontribusi terbesar berasal dari komponen konsumsi rumah tangga, yaitu sebesar 36.431,78 miliar rupiah. Selain itu, komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) juga memberikan kontribusi yang cukup besar. Berdasarkan harga konstan, nilai PMTB pada tahun 2025 mencapai 13.605,09 miliar rupiah

Grafik 2.1.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Bogor Tahun 2021 - 2025



Sumber: Badan Pusat Statistik, Kota Bogor dalam angka 2026

2.1.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik sebagai akibat berbagai aktivitas ekonomi pada suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. Penyusunan PDRB dilakukan melalui 3 pendekatan yaitu: pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku atau PDRB nominal berdasarkan harga berlaku pada periode penghitungan dan bertujuan untuk

melihat struktur perekonomian. PDRB atas dasar harga konstan disusun berdasarkan harga tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi.

PDRB pengeluaran yang terdiri dari komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah tangga (PK-RT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), ekspor neto (E) atau ekspor minus impor barang dan jasa. PDRB Kota Bogor Sebagian besar digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumah tangga (PK-RT).

PDRB pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku mengalami peningkatan di tahun 2025 sebesar 4.734,38 miliar rupiah dari nilai 65.786,05 miliar rupiah jika dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar 61.05,67 miliar rupiah. Dilihat dari PDRB Pengeluaran atas dasar harga berlaku komponen terbesar adalah dari Konsumsi Rumah Tangga sebesar 66.465,15 miliar rupiah. Komponen PMTB mempunyai kontribusi yang relatif besar, yaitu 35,1%. Komponen net ekspor menunjukkan angka negatif, artinya selama 2021 - 2025 untuk memenuhi pengeluaran Kota Bogor masih dipenuhi oleh banyak impor. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian kebutuhan domestik masih harus dipenuhi oleh produk yang berasal dari luar wilayah atau bahkan luar negeri (impor). Peningkatan PDRB ini dipengaruhi oleh peningkatan harga yang harus dibayarkan pada setiap komponen PDRB. Di tahun 2025 PDRB Kota Bogor Atas Dasar Harga Berlaku mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Tabel 2.1.2
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran
(Miliar) Kota Bogor Tahun 2021-2025

Pengeluaran	2021	2022	2023	2024	2025
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	47.301,11	52.172,90	56.362,06	61.788,67	66.465,15
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	788,75	860,78	958,04	1.090,26	1.151,66
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	4.943,91	4.996,68	5.521,01	5.607,49	6.745,42
Pembentukan Modal Tetap Bruto	16.435,04	17.441,68	19.739,33	21.076,37	23.090,16
Perubahan Inventori	-529,4	-18,4	7,44	23,68	6,99
Net Ekspor Barang dan Jasa	-20.613,76	-22.539,04	-25.584,13	-28.534,78	-31.673,34
Produk Domestik Regional Bruto	48.325,64	52.914,60	57.003,76	61.051,67	65.786,05

Sumber: Badan Pusat Statistik, Kota Bogor dalam angka 2026

Selain dinilai atas dasar harga yang berlaku, PDRB pengeluaran juga dapat dinilai Atas Dasar Harga Konstan 2010 atau atas dasar harga dari berbagai jenis produk yang dievaluasi dengan harga tahun 2010. Melalui pendekatan ini, nilai PDRB pada masing-masing tahun memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau kuantitas (tanpa dipengaruhi oleh perubahan harga). PDRB pengeluaran Atas Dasar Harga Konstan 2010 menggambarkan terjadinya perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya terkait dengan peningkatan volume permintaan atau konsumsi akhir. PDRB menurut pengeluaran Atas Dasar Harga Konstan Kota umumnya mengalami kenaikan, tahun 2025 PDRB pengeluaran mencapai 41.087,07 Miliar, mengalami peningkatan sebesar 2.122,40 miliar Rupiah dari nilai 38.964,67 miliar rupiah jika dibandingkan dengan tahun 2024. Peningkatan yang terjadi pada PDRB Atas Dasar Harga Konstan ini mencerminkan terjadinya peningkatan volume pengeluaran yang terjadi selama tahun 2025 tanpa adanya pengaruh perubahan harga.

Tabel 2.1.3
PDRB atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Jenis Pengeluaran (miliar rupiah) Kota Bogor
2021-2025

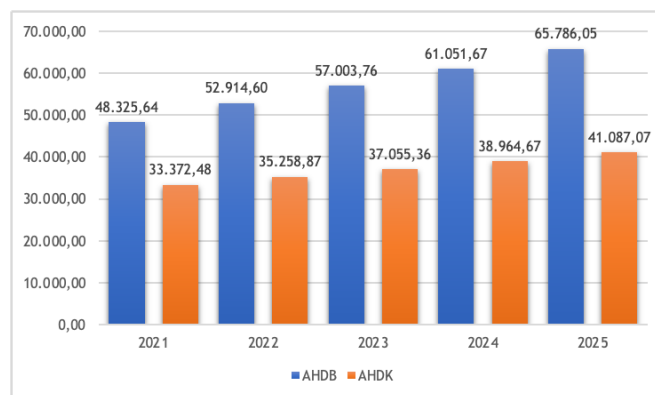
Pengeluaran	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	30.660	32.421	33.546	34.787	36.432
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	563,21	589,91	626,92	701,69	718,94
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	3.011	2.983	3.274	3.192	3.715
Pembentukan Modal Tetap Bruto	11.113	11.316	12.381	12.853	13.605

Perubahan Inventori	-300,58	-10,4	4,05	12,6	3,51
Net Ekspor Barang dan Jasa	-1.167	-12.040	-12.776	-12.581	-13.387
Produk Domestik Regional Bruto	33.372,48	35.258,87	37.055,36	38.964,67	41.087,07

Sumber: Badan Pusat Statistik, Kota Bogor dalam angka 2025

Apabila dibandingkan antara nilai PDRB atas Dasar Harga Berlaku dengan nilai PDRB atas Dasar Harga Konstan, nilai PDRB atas Dasar Harga Berlaku selalu lebih tinggi dari PDRB atas Dasar Harga Konstan. Hal tersebut sangat dipengaruhi oleh perubahan harga yang cenderung meningkat, sedangkan pada PDRB atas Dasar Harga Konstan pengaruh dari harga tersebut telah diiadakan. Sama halnya PDRB atas Dasar Harga Berlaku, sebagian besar pengeluaran akhir PDRB atas Dasar Harga Konstan juga menunjukkan peningkatan dari tahun 2021 ke 2025, dikarenakan telah terjadi perubahan peningkatan volume yang menyebabkan pertumbuhan nilai PDRB di tahun 2025.

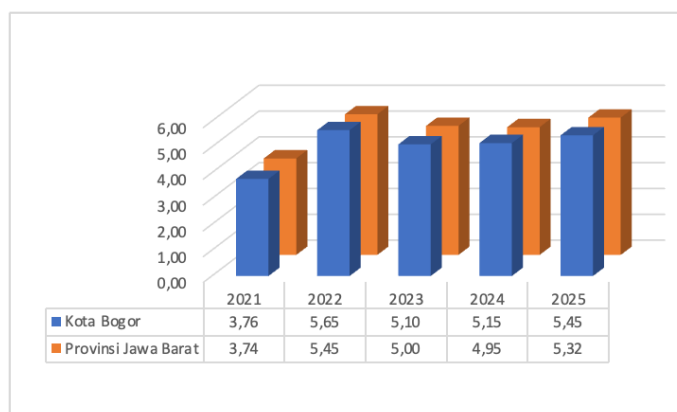
Grafik 2.1.4
Perbandingan PDRB atas Dasar Harga Berlaku dan atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut pengeluaran Tahun 2021 - 2024



Sumber: Badan Pusat Statistik, Kota Bogor dalam angka 2025

Untuk melihat pertumbuhan perekonomian kota dapat dilihat dari laju pertumbuhan PDRB pengeluaran dan lapangan usaha.

Grafik 2.1.5
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Bogor dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2021-2025



Sumber: Badan Pusat Statistik, Kota Bogor dalam angka 2026 dan Badan Pusat Statistik, Proinsi Jawa Barat dalam angka 2026

Bila dilihat pada grafik di atas, pertumbuhan ekonomi Kota Bogor lebih baik dari Provinsi Jawa Barat, dimana pada tahun 2025 laju pertumbuhan ekonomi Kota Bogor sebesar 5,45% sedangkan Provinsi Jawa Barat sebesar 5,32%. Begitupun pada tahun 2021 - 2024 pertumbuhan ekonomi Kota Bogor lebih baik dari Provinsi Jawa Barat.

Tabel 2.1.6
PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha di (miliar rupiah) Kota Bogor
2021-2025

No	lapangan Usaha	2021	2022	2023	2024	2025
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	258,71	267,41	275,95	279,23	349,80
B	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-
C	Industri Pengolahan/ Manufacturing	6.283,63	6.603,00	6.864,58	7.032,53	7.183,75
D	Pengadaan Listrik dan Gas	813,13	893,01	869,60	844,77	822,26
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	39,77	42,44	47,06	51,13	49,91
F	Konstruksi	3.659,26	3.672,50	4.094,47	4.142,49	4.232,21
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6.379,30	6.722,52	6.973,02	7.191,20	7.562,47
H	Transportasi dan Pergudangan	3.961,65	4.352,35	4.744,10	5.322,75	5.975,17
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.550,68	1.734,17	1.825,38	1.960,93	2.223,37
J	Informasi dan Komunikasi	3.182,27	3.344,93	3.563,35	3.951,15	4.142,41
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2.245,47	2.223,68	2.246,72	2.327,49	2.298,58
L	Real Estate	821,06	877,63	896,55	957,85	989,47
M	Jasa Perusahaan	598,73	666,39	673,10	693,83	724,37
N	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	746,40	730,75	745,61	807,29	850,04
O	Jasa Pendidikan	1.096,42	1.195,60	1.241,04	1.265,99	1.346,66
P	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	540,88	595,55	606,70	621,83	696,52
Q	Jasa Lainnya	1.195,11	1.336,93	1.388,12	1.514,21	1.640,06
Produk Domestik Regional Bruto		33.372,48	35.258,87	37.055,36	38.964,67	41.087,07

Sumber: Badan Pusat Statistik, Kota Bogor dalam angka 2026

Sektor yang mengalami pertumbuhan paling rendah pada tahun 2025 adalah Sektor Pengadaan Listrik dan Gas mengalami kontraksi yaitu sebesar -2,66%. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor pada tahun 2024 memberikan sumbangan tertinggi terhadap ekonomi Kota Bogor sebesar 18,83%, dengan laju pertumbuhan sebesar 5,16 persen. Sektor Industri Pengolahan penyumbang terbesar kedua terhadap perekonomian Kota Bogor yaitu sebesar 17,79 persen dengan laju pertumbuhan sebesar 2,15 persen.

2.1.3 Pengeluaran Per Kapita (Konsumsi Per Kapita)

PDRB per kapita merupakan pendapatan rata-rata penduduk yang didapat dari hasil bagi antara PDRB dengan populasi di suatu wilayah pada tahun tertentu. Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut.

PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Pada tahun 2020, PDRB perkapita atas dasar harga konstan mengalami peningkatan sebesar 4,27%, diiringi dengan peurunan jumlah penduduk sebesar 4,49, kemudian di tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 2,74% dengan pertumbuhan penduduk sebesar 1,00% menunjukkan pemulihan ekonomi yang sedang menggeliat di Kota Bogor. Tahun 2022, 2023 dan 2024 PDRB per kapita tumbuh sebesar 4,66%, 4,13% dan 4,41% menunjukkan semakin stabil dan membaiknya kondisi perekonomian Kota Bogor. Perubahan angka PDRB per kapita yang meningkat ini lebih disebabkan oleh inflasi dan tidak menggambarkan peningkatan kemakmuran secara riil.

Tabel 2.1.7
PDRB dan PDRB per Kapita Kota Bogor 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6
Nilai PDRB (Miliar Rp)					
- ADHB	45.911,86	48.325,64	52.914,60	57.003,76	61.051,67
- ADHK 2010	32.162,74	33.372,48	35.258,87	37.055,36	38.964,67
PDRB perkapita (Ribu Rp)					
- ADHB	44.122,01	45.984,13	49.875,44	53.238,77	56.615,77
- ADHK 2010	30.908,89	31.755,49	33.233,77	34.607,92	36.133,57
Pertumbuhan PDRB					
perkapita ADHK 2010 (persen)	4,27	2,74	4,66	4,13	4,41
Jumlah penduduk (000 org)	1.040,57	1.050,92	1.060,94	1.070,72	1.078,35
Pertumbuhan (persen)	-4,49	1,00	0,95	0,92	0,71

Sumber: Badan Pusat Statistik, Produk Domestik Regional Bruto Kota Bogor Menurut Pengeluaran 2020-2024

PDRB per kapita Kota Bogor menunjukkan perubahan dari tahun ke tahun, diiringi dengan kenaikan jumlah penduduk. Indikator ini menunjukkan bahwa secara ekonomi setiap penduduk rata-rata mampu menciptakan PDRB atau nilai tambah sebesar nilai PDRB per kapita di masing-masing tahun tersebut. Sementara itu pertumbuhan per kapita secara “riil” juga selalu meningkat. Pertumbuhan ekonomi tersebut diikuti pula oleh penambahan jumlah penduduk pada tiap tahunnya.

2.1.4 Tingkat Inflasi Daerah

Inflasi merupakan kecenderungan naiknya harga barang-barang secara umum dan terjadi secara terus menerus. Kenaikan harga satu atau beberapa barang tidak dapat dikatakan bahwa terjadi inflasi. Selain itu, apabila kenaikan harga barang terjadi secara temporer, seperti menjelang hari raya misalnya, maka hal itu tidak dapat dikatakan sebagai inflasi. Dengan naiknya harga barang di satu sisi, hal itu mengandung arti terjadinya penurunan nilai uang di sisi lain.

Indeks Harga konsumen (IHK) Indeks yang menghitung rata-rata perubahan harga dari suatu paket barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga dalam kurun waktu tertentu. IHK merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inflasi. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan (inflasi) atau tingkat penurunan (deflasi) dari barang dan jasa. Secara nasional pengelompokan komoditas terdiri dari 11 kelompok dan 43 sub kelompok. Konkordansi pengelompokan IHK (2012=100) yang sebanyak 7 kelompok, berubah menjadi 11 kelompok pada IHK (2018=100), yaitu: Makanan, minuman dan tembakau; Pakaian dan alas kaki; Perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga; Perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga; Kesehatan; Transportasi; Informasi, komunikasi, dan jasa keuangan; Rekreasi, olahraga dan budaya; Pendidikan; Penyediaan makanan dan minuman/restoran; dan Perawatan pribadi dan jasa lainnya.

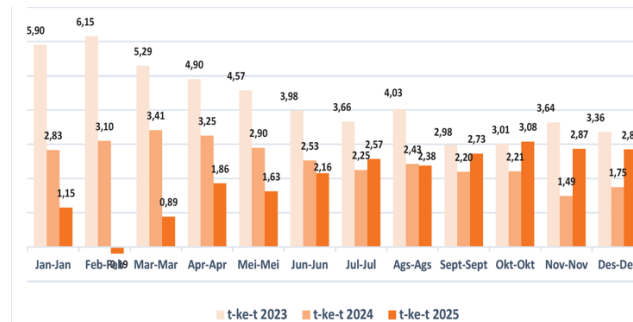
Pada Desember 2025 terjadi inflasi tahun-ke-tahun (t-ke-t) sebesar 2,85 persen, atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 107,41 pada Desember 2024 menjadi 110,47 pada Desember 2025. Secara b-ke-b, Kota Bogor mengalami inflasi sebesar 0,46 persen dan secara tahun kalender terjadi inflasi sebesar 2,85 persen.

Pada Desember 2025, Kota Bogor mengalami inflasi tahun-ke-tahun (t-ke-t) 2,85 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 110,47. Inflasi tahun-ke-tahun (t-ke-t) terjadi karena adanya kenaikan harga pada seluruh kelompok pengeluaran, yaitu Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau 4,00 persen; Kelompok Pakaian dan Alas Kaki 2,08 persen; Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga sebesar 0,95 persen; Kelompok Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga sebesar 1,98 persen; Kelompok Kesehatan sebesar 0,40 persen; Kelompok Transportasi sebesar 1,53 persen; Kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan sebesar 0,05 persen; Kelompok Rekreasi, Olahraga dan Budaya sebesar 1,81 persen; Kelompok Pendidikan 1,81 persen; Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran 1,87 persen; dan Kelompok Perawatan

Pribadi dan Jasa lainnya yang mengalami inflasi 16,34 persen.

Secara bulan-ke-bulan (b-ke-b), Kota Bogor mengalami inflasi 0,46 persen, dan secara tahun kalender Desember 2025 terjadi inflasi 2,85 persen

Tabel 2.1.8
Tingkat Inflasi Tahun-ke-tahun (t-ke-t) Kota Bogor, 2023-2025 (Persen)



Sumber: Badan Pusat Statistik, Kota Bogor Perkembangan Indeks Harga Konsumen, Desember 2025

Tabel 2.1.9
Tingkat Inflasi Bulan-ke-bulan (b-ke-b), Tahun Kalender, dan Tahun-ke-tahun (t-ke-t) Kota Bogor bulan Desember, 2023-2025 (Persen)

Tingkat Inflasi	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)
Bulan-ke-bulan (b-ke-b)	0,22	0,49	0,46
Tahun kalender	3,36	1,75	2,85
Tahun-ke-tahun (t-ke-t)	3,36	1,75	2,85

Sumber: Badan Pusat Statistik, Kota Bogor Perkembangan Indeks Harga Konsumen, Desember 2025

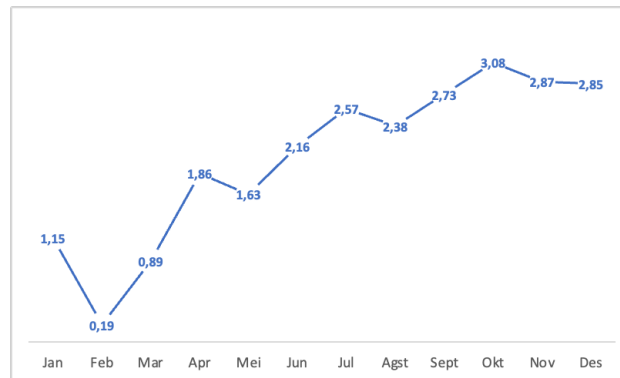
Perkembangan inflasi t-ke-t Kota Bogor tahun 2023-2025 secara bulanan terlihat bahwa Desember 2025 Kota Bogor mengalami inflasi t-ke-t yang lebih tinggi dibanding inflasi t-ke-t pada 2024, namun lebih rendah dibanding inflasi t-ke-t Desember 2023..

Grafik 2.1.10
Perkembangan Inflasi Bulanan Kota Bogor tahun 2025



Sumber: Badan Pusat Statistik, Kota Bogor dalam angka 2026

Grafik 2.1.11
Perkembangan Inflasi Year on Year (yoy) Kota Bogor tahun 2025



Sumber: Badan Pusat Statistik, Kota Bogor dalam angka 2026

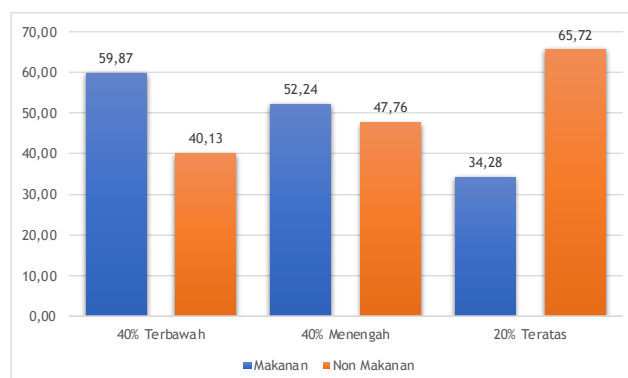
2.1.5 Pemerataan kesejahteraan masyarakat

Kesejahteraan suatu kelompok masyarakat dapat diketahui dari tingkat pendapatan masyarakatnya. Namun, karena data pendapatan yang akurat sulit diperoleh, melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), tingkat kesejahteraan masyarakat diperoleh dengan pendekatan Pengeluaran Rumah Tangga.

Pengeluaran rumah tangga yang terdiri dari pengeluaran yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan makanan dan bukan makanan dapat menggambarkan bagaimana kebutuhan setiap rumah tangga. Walaupun harga antar daerah berbeda, namun nilai pengeluaran kebutuhan antar ekonomi. Rata-rata pengeluaran per kapita penduduk di Kota Bogor tahun 2025 tercatat sebesar 2.405.598 rupiah per bulan, dari total pengeluaran tersebut yang digunakan untuk kebutuhan makanan sebesar 44,16 persen atau sebesar 1.062.428 rupiah, sedangkan sisanya untuk kebutuhan non makanan sebesar 55,84 persen sebesar 1.343.170 rupiah.

Tingkat kesejahteraan masyarakat tidak hanya diukur dari peningkatan PDRB per Kapita. Tetapi harus dievaluasi juga apakah tingkat kesejahteraan tersebut dinikmati secara merata oleh masyarakat. Dari hasil evaluasi terhadap indikator makro ekonomi Kota Bogor, ternyata Kesenjangan sosial diakibatkan oleh ketimpangan pendapatan masyarakat Kota Bogor yang masih cukup tinggi. Pemenuhan kebutuhan dasar yang terjangkau dan bermutu bagi keluarga miskin belum maksimal, sehingga ketimpangan sosial semakin terlihat jelas. Kesempatan keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya terlihat masih sangat timpang dibandingkan dengan keluarga pada kelompok masyarakat dengan tingkat pendapatan yang lebih baik.

Tabel 2.1.12
Persentase Pengeluaran per Kapita Sebulan
Menurut Kelompok Komoditas dan Golongan Pengeluaran 2025

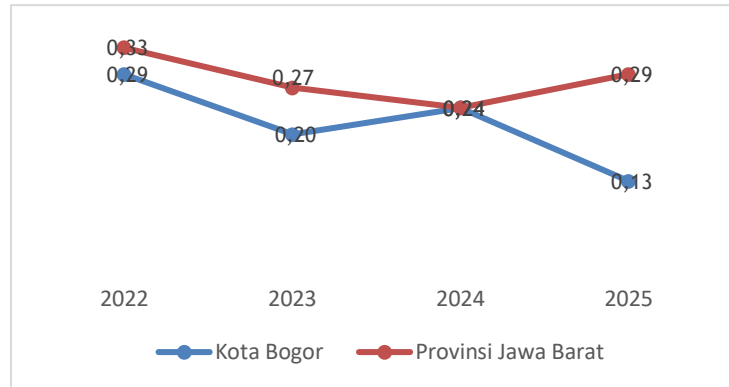


Sumber: Badan Pusat Statistik, Kota Bogor dalam angka 2026

Apabila dilihat dari tabel diatas, kesenjangan antara pengeluaran per kapita penduduk dengan pengeluaran 20% atas dan penduduk dengan pengeluaran 40% bawah masih sangat tinggi dimana ada kesenjangan hampir berkisar 25,59% untuk masing-masing kelompok komoditas. Hal ini menunjukkan

bahwa pemerataan kesejahteraan masyarakat masih menjadi masalah yang cukup serius di Kota Bogor. Hal ini juga dapat dibuktikan dari indikator Gini Rasio Kota Bogor yang terus meningkat dalam 3 tahun terakhir, pada tahun 2024 berada di level 0,477. Berikut ini adalah gambaran perbandingan kondisi tingkat pemerataan kesejahteraan masyarakat yang diukur dengan indeks ketimpangan (gini rasio) sebagai berikut:

Grafik 2.1.13
Perbandingan Gini Rasio Kota Bogor dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 - 2025



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bogor

Kondisi ketimpangan kesejahteraan masyarakat yang terjadi di Kota Bogor sebagaimana dijelaskan pada grafik diatas terus mengalami peningkatan, pada tahun 2022 berada di level 0,430 tahun 2023 di level 0,464, tahun 2024 di level 0,477 dan tahun 2025 dilevel 0,435 dalam hal ini indeks gini rasio di Kota Bogor jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat yang dimana pada tahun 2022 angka gini rasio Provinsi Jawa Barat berada dilevel 0,417, tahun 2023 berada dilevel 0,425, tahun 2024 berada di level 0,421 dan tahun 2025 di level 0,416

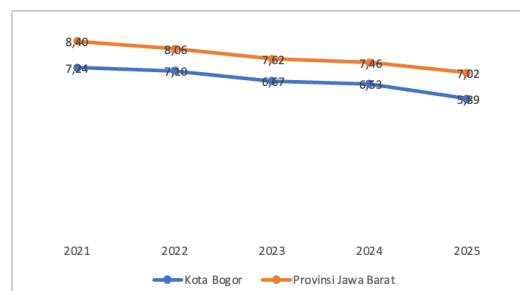
2.1.6 Angka Kemiskinan

Kemiskinan selalu menjadi isu strategis baik di tingkat Kota, di tingkat Provinsi maupun di tingkat nasional. Secara umum, kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak- hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Berdasarkan dari hasil evaluasi ada beberapa indikator yang dijadikan parameter untuk penanggulangan kemiskinan antara lain adalah:

1. Angka Kemiskinan

Angka Kemiskinan di Kota Bogor mengalami penurunan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Di tahun 2025 dengan adanya berbagai upaya pemulihan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan maka persentase penduduk miskin menjadi 5,89%, atau mengalami penurunan sebesar 0,64% jika dibandingkan dengan tahun 2024 yang mencapai 6,53%. Berikut adalah gambaran perkembangan penduduk miskin dari tahun 2021-2025.

Grafik 2.1.14
Persentase Perkembangan Penduduk Miskin Kota Bogor dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 - 2025



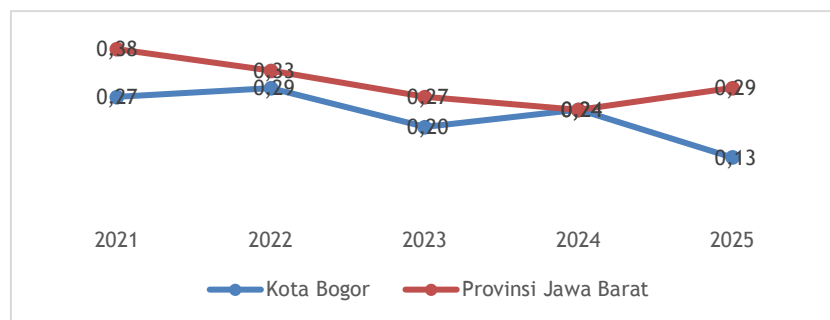
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat 2026

Bila dilihat pada grafik di atas, persentase penduduk miskin Kota Bogor mulai dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 selalu berada dibawah Provinsi Jawa Barat. Dalam hal ini, dapat dibuktikan persentase penduduk miskin Kota Bogor pada tahun 2025 sebesar 5,89% sedangkan persentase penduduk miskin Provinsi Jawa Barat sebesar 7,02%.

2. Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*)

Merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, Semakin tinggi Indeks Kedalaman Kemiskinan maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Penurunan nilai indeks Kedalaman Kemiskinan mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit, Kegunaan dari Nilai agregat dari *poverty gap index* adalah untuk mengetahui seberapa besar biaya untuk mengentaskan kemiskinan, Semakin kecil nilai *poverty gap index*, maka semakin besar potensi ekonomi untuk dana pengentasan kemiskinan untuk target sasaran bantuan dan program. Berikut gambaran indeks kedalaman kemiskinan dari tahun 2021-2024:

Grafik 2.1.15
Persentase Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Bogor dan Provinsi Jawa Barat
Tahun 2021 - 2025



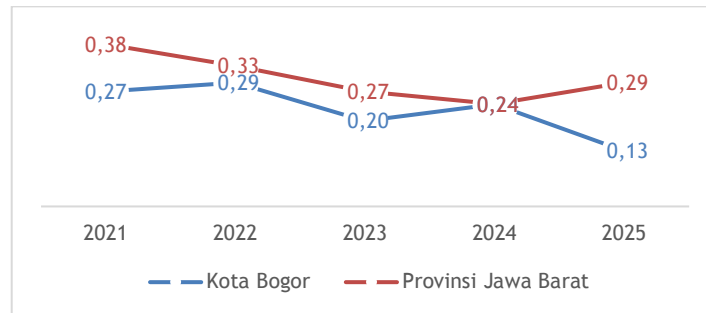
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bogor dan Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat 2025

Grafik diatas menggambarkan bahwa untuk tahun 2021 sampai tahun 2025 Indeks kedalaman Kemiskinan Kota Bogor selalu dibawah Jawa Barat. Dalam hal ini indeks kedalam kemiskinan di Kota Bogor pada tahun 2025 sebesar 0,70% sedangkan indeks kedalaman kemiskinan Provinsi Jawa Barat di tahun 2025 sebesar 1,17%.

3. Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index-P2*)

Merupakan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin, semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Indikator Keparahan Kemiskinan berfungsi untuk memberikan informasi yang saling melengkapi pada insiden kemiskinan, sebagai contoh mungkin terdapat kasus bahwa beberapa kelompok penduduk miskin memiliki insiden kemiskinan yang tinggi tetapi jurang kemiskinannya (*poverty gap*) rendah, sementara kelompok penduduk lain mempunyai insiden kemiskinan yang rendah tetapi memiliki jurang kemiskinan yang tinggi bagi penduduk yang miskin. Berdasarkan publikasi dari BPS Provinsi Jawa Barat Tahun 2026, berikut gambaran Indeks Keparahan kemiskinan dari tahun 2021-2025:

Grafik 2.1.16
Persentase Indeks Keparahatan Kemiskinan Kota Bogor dan Provinsi Jawa Barat
Tahun 2021 - 2025



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat 2025

Grafik diatas menggambarkan bahwa pada tahun 2025 Indeks Keparahatan Kemiskinan Kota Bogor mengalami penurunan dari tahun 2024. Hal ini mengindikasikan semakin lebarnya ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin, yang berarti kesenjangan ekonomi di kalangan masyarakat miskin semakin besar. Hal ini akan berimplikasi pada besaran pembiayaan program penanggulangan kemiskinan.

2.1.7 Kondisi Ketenagakerjaan

Bekerja adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan paling sedikit selama satu jam dalam seminggu terakhir. Untuk melihat struktur penduduk bekerja, maka perlu diperhatikan karakteristiknya. Karakteristik penduduk bekerja akan disajikan berdasarkan lapangan pekerjaan utama, status pekerjaan utama, dan pendidikan tertinggi yang ditamatkan.

Penduduk usia kerja merupakan semua orang yang berumur 15 tahun ke atas. Berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), penduduk usia kerja pada Agustus 2024 sebanyak 834.478 orang. Sebagian besar penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja yaitu 561.986 orang, sisanya termasuk bukan angkatan kerja sebesar 272.492 orang. Komposisi angkatan kerja pada Agustus 2024 terdiri dari 516.284 orang penduduk yang bekerja dan 45.702 orang pengangguran. Apabila dibandingkan Agustus 2023, jumlah angkatan kerja meningkat sebanyak 27.454 orang. Penduduk bekerja naik sebanyak 31.950, sementara pengangguran turun sebanyak 4.496 orang.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengalami peningkatan dibandingkan Agustus 2023. TPAK pada Agustus 2024 sebesar 67,35 persen, naik 2,54 persen poin dibandingkan Agustus 2023. TPAK adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk usia kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/wilayah.

Berdasarkan jenis kelamin, pada Agustus 2024, TPAK laki-laki sebesar 83,71%, lebih tinggi dibandingkan TPAK perempuan yang sebesar 50,69%. Jika dibandingkan Agustus 2022, TPAK laki-laki mengalami kenaikan sebesar 0,76% poin (dari 82,95% menjadi 83,71%) sedangkan yang perempuan mengalami kenaikan sebesar 1,34% poin (dari 46,32% menjadi 50,69%).

Tabel 2.1.17
Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja, Agustus 2023 – Agustus 2025

Bulan/ Tahun	Jenis Kelamin	Penduduk Usia Kerja (ribu)	Angkatan Kerja (ribu)	Bekerja (ribu)	Penganggu- ran Terbuka (ribu)	TPAK (%)	TPT (%)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
Agustus 2023	Laki-laki	416,3	345,3	312,2	33,1	82,95	9,59
	Perempuan	408,5	189,2	172,1	17,1	46,32	9,04
	Total	824,8	534,5	484,3	50,2	64,81	9,39
Agustus 2024	Laki-laki	420,9	352,4	325,0	27,4	83,71	7,77
	Perempuan	413,5	209,6	191,3	18,3	50,69	8,74
	Total	834,5	562,0	516,3	45,7	67,35	8,13
Agustus 2025	Laki-laki	426.4	342.9	309.6	33.3	80.41	9.71
	Perempuan	419.4	208.5	197.9	10.6	49.70	5.07
	Total	845.8	551.4	507.5	43.9	65.18	7.95

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survey Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2025

Pada tahun 2025, penduduk berstatus buruh/karyawan/pegawai mendominasi status pekerjaan utama di Kota Bogor. Urutan terbesar selanjutnya adalah berusaha sendiri, pekerja keluarga/tak dibayar, berusaha dibantu pekerja tidak tetap, pekerja bebas dan persentase terkecil adalah berstatus berusaha dibantu pekerja tetap/dibayar.

Dalam setahun terakhir (Agustus 2024 - Agustus 2025), persentase status pekerja keluarga/tak dibayar adalah satu satunya status pekerjaan yang mengalami peningkatan yaitu sebesar 2,27 poin. Sedangkan untuk 6 status pekerjaan yang lainnya mengalami penurunan. Status pekerjaan berusaha sendiri mengalami penurunan sebesar 0,39 poin; berusaha dibantu pekerja tidak tetap turun sebesar 0,03 poin; berusaha dibantu pekerja tetap turun sebesar 0,87 poin; buruh karyawan pegawai turun sebesar 0,11 poin; dan pekerja bebas turun sebesar 0,86 poin.

Dibandingkan dengan keadaan Agustus 2023, status pekerjaan pekerja keluarga/tak dibayar dan status berusaha dibantu pekerja tidak tetap mengalami peningkatan, masing masing sebesar 4,30 poin dan 2,01 poin. Sedangkan status pekerjaan yang lain mengalami penurunan. Status pekerjaan berusaha sendiri turun 0,04 poin; berusaha dibantu pekerja tetap turun 0,29 poin; buruh karyawan pegawai turun 4,59 poin (merupakan penurunan terbesar) dan pekerja bebas turun 1,38 poin. Penurunan ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk pergeseran status ke jenis pekerjaan lain, seperti pekerjaan informal yang meningkat atau dampak dari disrupsi industri dan tingginya pemutusan hubungan kerja.

Status pekerjaan utama penduduk dapat mengidentifikasi kegiatan formal dan informal dari penduduk bekerja. Pekerja formal mencakup status berusaha dengan dibantu buruh tetap dan buruh/karyawan, sedangkan status pekerjaan sisanya termasuk pekerja informal. Berdasarkan identifikasi ini, maka pada Agustus 2025 tercatat sebanyak 295,9 ribu orang (58,30 persen) merupakan pekerja formal dan sebanyak 211,6 ribu orang (41,70 persen) merupakan pekerja informal. Selama periode Agustus 2024 - Agustus 2025 terjadi pergeseran kegiatan penduduk bekerja dari formal menjadi informal sebesar 0,98 persen. Tingginya persentase pekerja informal didorong oleh tingginya peningkatan dan persentase pekerja dengan status pekerja keluarga/tidak dibayar. Dibandingkan dengan keadaan Agustus 2023, persentase pekerja formal berkurang sebanyak 4,89 poin.

Tabel 2.1.18

Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja, Agustus 2023 – Agustus 2025

Status Pekerjaan	Agustus 2023		Agustus 2024		Agustus 2025	
Utama	ribu orang	persen (%)	ribu orang	persen (%)	ribu orang	persen (%)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
Berusaha sendiri	107,5	22,20	116,4	22,55	112,5	22,16
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/ buruh tidak dibayar	20,9	4,31	32,8	6,35	32,1	6,32
Berusaha dibantu buruh tetap/ buruh dibayar	10,3	2,12	13,9	2,69	9,3	1,83
Buruh/ karyawan/ pegawai	295,8	61,06	292,1	56,58	286,6	56,47
Pekerja bebas	33,7	6,95	33,2	6,43	28,3	5,57
Pekerja keluarga/ tak dibayar	16,2	3,35	27,8	5,39	38,9	7,66
Jumlah	484,3	100,0	516,3	100,0	507,5	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survey Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2025

2.2 KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Pemerintah Kota Bogor Menyusun Kebijakan Umum APBD sebagai pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2025-2026 yang diterbitkan melalui Peraturan Wali Kota Bogor No. 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2025-2026, yang mempunyai Tema Pembangunan Kota Bogor tahun 2025-2026 adalah “Memperkokoh Kemandirian Masyarakat”, yang dijabarkan ke dalam tema tahunan pembangunan untuk periode tahun 2025-2026 sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahunan.

Dengan dilantikannya Wali Kota Bogor periode 2025-2030, Kota Bogor memiliki Visi Jangka Menengah yaitu “Bogor Beres, Bogor Maju”, dengan 4 Misi yaitu:

- 1) Bogor Cerdas
Memastikan ketersediaan fasilitas dan perluasan akses pendidikan yang merata, terjangkau, berkelanjutan, berkeadilan untuk seluruh lapisan masyarakat. Serta memperdayakan Lembaga Pendidikan formal dan non formal.
- 2) Bogor Sehat
Memastikan setiap warga kota bogor mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang memadai dan berkualitas untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia.
- 3) Bogor Sejahtera
Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
- 4) Bogor Lancar
Menjadikan Kota Bogor sebagai Kota yang nyaman, modern, dan siap menghadapi tantangan masa depan dengan mengatasi kemacetan lalu lintas serta mengoptimalkan fasilitas public

Program Prioritas yang dikawal langsung oleh Walikota dan Wakil Walikota:

1. Program Cerdas
 - a. Menambah unit sekolah dan ruang kelas baru;
 - b. Subsidi biaya Pendidikan bagi siswa kurang mampu;

-
- c. Memberikan insentif bagi guru ngaji secara terukur;
 - d. Meningkatkan gaji dan fasilitas guru honorer;
 - e. Memberikan beasiswa bagi mahasiswa berprestasi yang kurang mampu;
 - f. Memastikan setiap siswa mendapatkan ijazah setelah lulus Pendidikan formal dan non formal;
 - g. Memfasilitasi akses beasiswa LPDP dan dari berbagai Lembaga;
 - h. Mengembangkan command center;
 - i. Pengembangan CCTV di lokasi strategis;
 - j. Pemasangan wifi gratis di seluruh fasilitas publik;
 - k. Pembangunan gedung pemerintahan terpadu;
 - l. Penyuluhan bahaya judi online dan pinjaman onlinen berkolaborasi dengan aparaturnya penegak hukum dan wilayah;
 - m. Memberikan bantuan hukum gratis kepada masyarakat yang berhadapan dengan hukum;
 - n. Pelayanan jemput bola administrasi kependudukan;
 - o. Pelayanan jemput bola perizinan;
 - p. Penguatan sarana prasarana pelayanan public (Kantor kecamatan dan kelurahan).
2. Program Bogor Sehat:
- a. Pelayanan Kesehatan Prima.
 - 1) Pemeriksaan kesehatan gratis;
 - 2) Menambah fasilitas ruang ICU, Alat-alat Kesehatan, Dokter spesialis dan sub spesialis di Rumah sakit milik pemerintah Kota Bogor, Puskesmas, Posyandu, dan fasilitas Kesehatan lainnya;
 - 3) Penyediaan layanan rawat inap di setiap Puskesmas;
 - 4) Bogor Quick Respon dalam penanganan pasien darurat dan bencana alam;
 - 5) Membuat system pelayanan rujukan yang terpusat dan terintegrasi keseluruhan Rumah sakit di dalam dan diluar Kota Bogor;
 - 6) Menambah Kuota kepesertaan BPJS PBI APBD untuk masyarakat miskin;
 - 7) Menyediakan layanan armada ambulan gratis disetiap kecamatan yang dapat di akses 24 jam oleh masyarakat beserta dengan layanan fasilitas dokter keliling;
 - 8) Memberikan Fasilitas bantuan dan Layanan khusus kelompok rentan (Disabilitas dan lansia) dengan memfasilitasi layanan dokter keliling;
 - 9) Pencegahan stunting baik pada balita dan ibu hamil dengan memaksimalkan peran posyandu, penyuluhan dan makanan bergizi secara terukur;
 - 10) Peningkatan ketahanan pangan dan gizi berkelanjutan;
 - b. Pelayanan Kebersihan.
 - 1) Pengembangan pengelolaan sampah berbasis wilayah dengan metode 3R (Reduce, Reuse, Recycle);
 - 2) Penyediaan fasilitas dan armada angkutan sampah yang layak dan memadai;
 - 3) Peningkatan kualitas sanitasi (air limbah domestik dan air minum)
 - 4) Perencanaan tata ruang yang mempertimbangan resiko perubahan iklim dan resiko bencana;
 - c. Ketahanan Keluarga
 - 1) Penyediaan tempat tinggal yang layak melalui program bedah rumah, bantuan RTLH serta pemberian subsidi rusunawa bagi masyarakat kurang mampu;
 - 2) Memberikan santunan kematian bagi masyarakat miskin;
 - 3) Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil;
 - 4) Pembangunan Gedung olahraga masyarakat di 4 Kecamatan;
 - 5) Revitalisasi GOR Pajajaran menjadi pusat olahraga dan gedung kreatif dan seni terpadu
3. Program Bogor Sejahtera
- a. Pengangguran

- 1) Menciptakan kesempatan kerja dengan konsep kolaborasi antara pengusaha, UMKM, Perbankan dan Profesional;
- 2) Memaksimalkan peran balai latihan kerja dengan memberikan pelatihan keterampilan berdasarkan kebutuhan kesempatan kerja di Kota Bogor;
- b. Ekonomi Kreatif
 - 1) Membangun sentra kuliner di setiap kelurahan;
 - 2) Menambah dan memaksimalkan peran kampung tematik sebagai daya Tarik bagi wisatawan sekaligus wadah mempromosikan seni budaya lokal;
 - 3) Memfasilitasi pelaku usaha mikro kecil menengah untuk mendapatkan askes bantuan permodalan dan system pemasaran produk (Memfasilitasi Kredit Usaha Rakyat disetiap kelurahan, membuat regulasi yang mewajibkan setiap ASN untuk membeli produk UMKM);
 - 4) Penyediaan portal akses dalam promosi dan pemasaran UMKM dan Industri kreatif;
 - 5) Inkubasi bisnis muda dan pemula untuk menciptakan pelaku usaha muda pemula naik kelas;
4. Program Bogor Lancar
 - a. Penambahan Armada Transportasi umum baru yang ramah lingkungan dan nyaman, dilengkapi dengan fasilitas modern seperti Wi-Fi, AC, dan sistem pembayaran elektronik;
 - b. Integrasi Moda Transportasi: Membangun sistem transportasi terpadu yang mengintegrasikan bus, angkot, dan layanan transportasi lainnya untuk memastikan konektivitas antar moda;
 - c. Peningkatan Fasilitas Transportasi Umum: Renovasi dan pembangunan halte bus, terminal, dan stasiun angkot dengan fasilitas yang lebih baik, seperti tempat duduk, papan informasi digital, dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas;
 - d. Promosi Penggunaan Transportasi Umum: Melakukan kampanye besar-besaran untuk mendorong warga menggunakan transportasi umum dengan memperkenalkan program-program insentif seperti tarif terjangkau atau diskon untuk pelajar dan pekerja;
 - e. Pembangunan Perlintasan Tidak Sebidang Kebon Pedes;
 - f. Pembangunan akses Jalan Pemuda Menuju Jalan Sukaresmi.
 - g. Pembangunan Lanjutan R3, R2, Inner Ring Road

Program hasil terbaik cepat:

1. Menciptakan kesempatan kerja dengan konsep kolaborasi antara pengusaha, umkm, Perbankan dan Profesional;
2. Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil;
3. Peningkatan Fasilitas Transportasi Umum: Renovasi dan pembangunan halte bus, terminal, dan stasiun angkot dengan fasilitas yang lebih baik, seperti tempat duduk, papan informasi digital, dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas;
4. Pencegahan stunting baik pada balita dan ibu hamil dengan memaksimalkan peran posyandu, penyuluhan dan makanan bergizi secara terukur;
5. Menyediakan layanan armada ambulan gratis disetiap kecamatan yang dapat di akses 24 jam oleh masyarakat beserta dengan layanan fasilitas dokter keliling serta Layanan khusus kelompok rentan (Disabilitas dan lansia);
6. Memastikan setiap siswa dapat sekolah dengan fasilitas yang layak dan mendapatkan ijazah setelah lulus pendidikan formal dan non formal.

2.2.1 KEBIJAKAN PENDAPATAN

Arah Kebijakan yang ditetapkan untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2025 mengacu kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diturunkan dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai berikut:

1. Implementasi pendapatan bagi hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang tercatat sebagai pendapatan transfer menjadi pajak daerah berupa Opsen PKB dan Opsen BBNKB;
2. Meningkatkan kesadaran dan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah;
3. Optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah (intensifikasi) dan mengupayakan sumber pendapatan baru (ekstensifikasi);
4. Pematapan kelembagaan dan system pemungutan pendapatan daerah;
5. Inventarisasi, pemetaan dan peningkatan kualitas data dasar seluruh potensi sumber-sumber pendapatan daerah;
6. Peningkatan peran dan fungsi petugas yang ada di Kecamatan dalam pelayanan dan pengamatan potensi yang ada;
7. Peningkatan koordinasi, evaluasi dan pengawasan terhadap pemungutan pendapatan daerah;
8. Peningkatan sinergitas, koordinasi dan kerjasama pendapatan asli daerah dengan instansi terkait;
9. Peningkatan pelayanan publik (masyarakat) baik kecepatan pelayanan pembayaran maupun kemudahan untuk memperoleh informasi dan kesadaran masyarakat wajib pajak/retribusi daerah;
10. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM pengelola pendapatan daerah;
11. Penerapan pola insentif dan disinsentif bagi Wajib Pajak;
12. Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pendapatan daerah;
13. Peningkatan digitalisasi dan elektronifikasi pajak daerah dan retribusi daerah;
14. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dengan mendukung upaya BUMD untuk memaksimalkan pendapatan;
15. Meningkatkan komitmen seluruh Stakeholder agar dapat terlaksananya Strategi peningkatan PAD;
16. Melaksanakan sensus data kepemilikan kendaraan bermotor di Kota Bogor;
17. Sinergi pemungutan pajak opsen PKB dan BBNKB dengan Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah (P3DW) Kota Bogor;
18. Optimalisasi penagihan piutang pajak daerah;

19. Kewajiban melaksanakan validasi pada saat proses peralihan hak BPHTB;
20. Optimalisasi monitoring dan evaluasi penggunaan Tapping Box.
21. Dalam Rangka mendukung pelaksanaan Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03.HK/KPTS/Mn/2024, Nomor 3015/KPTS/M/2024, dan Nomor 600.10-4849 Tahun 2024 tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan Tiga Juta Rumah, Pemerintah Bogor telah menetapkan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 41 Tahun 2024 tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah:

Dalam Rangka mendukung pelaksanaan Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03.HK/KPTS/Mn/2024, Nomor 3015/KPTS/M/2024, dan Nomor 600.10-4849 Tahun 2024 tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan Tiga Juta Rumah, Pemerintah Bogor telah menetapkan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

Arah kebijakan pendapatan untuk penerimaan Pendapatan Transfer sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan upaya intensifikasi Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPH OPDN, PPH Pasal 21).
2. Meningkatkan akurasi data, dan Sumber Daya sebagai dasar perhitungan pembagian dalam Dana Perimbangan.

3. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan pendapatan Transfer.
4. Penetapan alokasi Dana Bagi Hasil dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai perkiraan alokasi Dana Bagi Hasil TA 2025, Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Bagi Hasil TA 2025 belum ditetapkan, perkiraan alokasi Dana Bagi Hasil dapat direncanakan berdasarkan pada :
 - a. Realisasi pendapatan Dana Bagi Hasil 4 (empat) tahun terakhir;
 - b. Informasi resmi dari Kementerian Keuangan mengenai daftar alokasi transfer ke daerah TA 2025.
5. Pertimbangan penetapan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT TA 2025, Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-CHT TA 2025 belum ditetapkan, perkiraan alokasi DBH-CHT dapat direncanakan berdasarkan pada :
 - a. Realisasi pendapatan DBH-CHT 3 (tiga) tahun terakhir ;
 - b. Informasi resmi dari Kementerian Keuangan mengenai daftar alokasi transfer ke daerah TA 2025.
6. Alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2025 sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2025, Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan, penganggaran DAU didasarkan pada alokasi DAU Kota TA 2025 yang diinformasikan resmi oleh Kementerian Keuangan, Apabila Peraturan Presiden atau Peraturan Menteri Keuangan dimaksud belum diterbitkan, maka penganggaran DAU dapat direncanakan berdasarkan pada alokasi DAU TA 2024.
7. Dana Alokasi Khusus (DAK) dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DAK TA 2025, Dalam hal Peraturan Presiden atau Peraturan Menteri Keuangan dimaksud belum ditetapkan, penganggaran DAK didasarkan pada informasi resmi dari Kementerian Keuangan. Apabila Peraturan Presiden atau Peraturan Menteri Keuangan dimaksud belum diterbitkan, maka perkiraan alokasi DAK dapat direncanakan berdasarkan pada:
 - a. Realisasi pendapatan DAK 3 (tiga) tahun terakhir ;
 - B. informasi resmi dari Kementerian Keuangan mengenai daftar alokasi transfer ke daerah TA 2025.

2.2.2 KEBIJAKAN BELANJA

Kebijakan perencanaan belanja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan perencanaan belanja operasi sebagai berikut:

A. Belanja Pegawai

- 1) Penganggaran Belanja Pegawai dengan proporsi sesuai ketentuan Pasal 146 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 2) Belanja gaji dan tunjangan disesuaikan dengan kebutuhan tahun 2025 dengan alokasi 14 bulan;
- 3) Belanja Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dialokasikan 14 bulan (menyesuaikan dengan regulasi dari pemerintah pusat);
- 4) Belanja Non ASN dianggarkan maksimal sama dengan jumlah Non ASN Tahun 2024 (Tenaga Pendukung Administrasi, Tenaga Pendukung Teknis, Keamanan, Pengemudi, Kebersihan);
- 5) Belanja Non ASN yang masuk pagu masing-masing perangkat daerah terdiri dari jasa kebersihan, keamanan dan pengemudi yang dihitung 13 bulan serta BPJS yang dihitung

selama 12 bulan sesuai dengan standar harga satuan jasa tahun 2025;

- 6) Belanja Non ASN untuk TKK dihitung 14 bulan;
- 7) Tidak ada rekrutmen baru Non ASN di tahun 2025;
- 8) Non ASN tidak mendapatkan Tambahan Penghasilan Pegawai/Insentif Pemungutan Pajak Retribusi;
- 9) Penganggaran belanja honorarium penanggungjawab pengelola keuangan (BUD/Kuasa BUD, PA/KPA, PPK-SKPD, PPTK, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu/Penerimaan Pembantu) dan honorarium pengadaan barang dan jasa maksimal sebesar 10% dari Pagu SKPD diluar Sub Kegiatan Gaji dan Tunjangan

Contoh: Pagu SKPD A diluar gaji dan tunjangan sebesar 50 Milyar, maka total honor yang boleh dianggarkan adalah maksimal 5 Milyar terdiri dari:

- a) honor PA (spesifikasi diatas 25M - 50M) = 12 bulan x 3.420.000= 41.040.000
 - b) honor PPK-SKPD (spesifikasi diatas 25M - 50M) = 12 bulan x 1.520.000 = 18.240.000
 - c) honor Bendahara Pengeluaran (spesifikasi diatas 25M - 50M) = 12 bulan x 1.320.000 = 15.840.000
 - d) total a, b, dan c = 75.120.000 (lebih kecil dari 5 milyar)
- 10) Spesifikasi yang dapat diambil untuk honor BUD/Kuasa BUD, PA/KPA, PPK-SKPD, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu/Penerimaan Pembantu adalah Pagu SKPD diluar Sub Kegiatan Gaji dan Tunjangan (contoh di poin 9).

B. Belanja barang dan jasa :

- 1) Belanja air, listrik, telepon dianggarkan untuk kebutuhan 12 bulan dengan menerapkan prinsip efisiensi;
- 2) Penganggaran BLUD alokasi sesuai dengan target pendapatan 2025;
- 3) Alokasi PBI disesuaikan dengan proporsi penyediaan anggaran oleh Kota Bogor;
- 4) Alokasi BOS sesuai dengan jumlah siswa yang ada pada dapodik tahun 2024;
- 5) Belanja persediaan untuk operasional kantor dialokasikan pada sub kegiatan:
 - A. Penyediaan komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
 - B. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor
 - C. Penyediaan Peralatan Rumah tangga
 - D. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah dialokasikan di sub kegiatan Pemeliharaan BMD;
- 7) Pemeliharaan BMD dan Pengadaan BMD harus mengacu pada Dokumen RKBMD;
- 8) Pemeliharaan kendaraan hanya untuk kendaraan dinas yang tercatat pada Daftar Barang Milik Daerah Kota Bogor dan masih digunakan menunjang tugas dan fungsi;
- 9) Kendaraan yang rusak berat dan kendaraan yang bersifat rekondisi atau overhaul, tidak dianggarkan lagi untuk pemeliharaan, diusulkan untuk dihapuskan dari daftar inventaris;
- 10) Harga satuan pemeliharaan kendaraan mengacu pada Standar Harga Satuan Jasa 2025;
- 11) Harga satuan pemeliharaan kendaraan dinas pejabat atau kendaraan dinas operasional sudah termasuk BBM;
- 12) Menganggarkan Pajak untuk semua kendaraan yang tercatat pada Daftar Barang Milik Daerah Kota Bogor, kecuali yang rusak berat;

- 13) Pemberian Honorarium Posyandu, Kader Posbindu, Kader RW Siaga, Kader Kelurahan Siaga Aktif, mengacu pada jumlah kader sesuai dengan tahun anggaran 2024 dan Standar Harga Satuan Jasa 2025. Tidak ada penambahan jumlah kader (sesuai kemampuan keuangan daerah);
- 14) Pemberian Belanja Operasional RT, RW dan LPM disesuaikan dengan Standar Harga Satuan Jasa 2025;
- 15) Pemberian Honorarium ASN Kota Bogor hanya diperkenankan untuk:
 - a. Honorarium penanggungjawab pengelolaan keuangan;
 - b. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
 - c. Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa di luar pejabat fungsional pengadaan barang dan jasa pada Bagian PBJ.
- 16) Tidak ada honorarium lembur untuk ASN;
- 17) Honorarium Lembur dapat diberikan kepada non ASN yang menangani kejadian bencana pada saat kejadian bencana, hari Kemerdekaan RI, Idul Fitri, Idul Adha, Natal dan Tahun Baru;
- 18) Perjalanan Dinas dalam kota untuk ASN dan Non ASN Pemerintah Kota Bogor diperkenankan hanya untuk anggaran yang bersumber dari dana transfer sesuai juklak dan juknis yang berlaku;
- 19) Pertemuan di luar kantor yang dilaksanakan oleh perangkat daerah berupa rapat, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan atau sejenisnya dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) dilaksanakan secara selektif dengan mengutamakan dalam bentuk online;
 - b) peserta berasal dari lintas (lebih dari satu) perangkat daerah dan jumlah peserta lebih dari 30 (tiga puluh) orang;
 - c) dilaksanakan di wilayah Kota Bogor
 - d) dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c untuk rapat kerja dengan Kepala Daerah dan rapat kerja dengan DPRD;
- 20) Penyediaan makan dan minum, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) tidak menyediakan makan dan minum rapat yang dilaksanakan internal Perangkat Daerah;
 - b) tidak menyediakan makan dan minum tamu dalam rangka kunjungan kerja, studi banding, dan atau sejenisnya, kecuali untuk tamu yang diterima oleh Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
 - c) Penyediaan biaya makanan penambah daya tahan tubuh untuk Sekretaris Pribadi, Ajudan dan Supir dalam rangka pelayanan kepada Wali Kota, Wakil Wali Kota, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Sekretaris Daerah.
- 21) Setiap aktivitas dalam rincian belanja agar mendukung prioritas penanganan Kemiskinan, Open Defecation Free (ODF)/Stop Buang Air Besar Sembarangan, Stunting, Kota Layak Anak (KLA), Pengendalian Inflasi, Peningkatan Potensi Investasi dan Gender;
- 22) Penganggaran untuk pengoperasian angkutan umum perkotaan dengan skema Pembelian Layanan/ Buy The Service (BTS) di Kota Bogor sesuai kebutuhan berdasarkan hasil kajian;
- 23) Perencanaan, Persiapan, Pembebasan Tanah, dan Penanganan Dampak Bencana Longsor di Jalan R. Saleh Danasasmita;

-
- 24) Implementasi terhadap Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- C. Belanja Subsidi
- Belanja subsidi dialokasikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- D. Belanja bunga :
- Pembayaran bunga atas pinjaman Perumda Tirta Pakuan kepada World Bank;
- E. Belanja hibah dan belanja bantuan sosial :
- 1) Untuk data masyarakat miskin dan penerimaan hibah/bantuan sosial harus terdaftar dalam database di aplikasi SOLID;
 - 2) Belanja hibah bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - 3) Belanja Hibah disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Daftar penerima hibah dan bantuan sosial sudah terdaftar pada aplikasi SAHABAT dan telah dilakukan verifikasi oleh OPD verifikator yang sudah masuk kedalam RKPD Kota Bogor.
2. Kebijakan Belanja Modal
1. Belanja modal harus memperhatikan batasan nilai kapitalisasi dan masa manfaat lebih dari 12 bulan, batasan nilai kapitalisasi mengacu pada Peraturan tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Bogor;
 2. Belanja kegiatan fisik yang anggarannya bersumber bukan dari dana transfer dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan lebih dari 3 (tiga) bulan wajib didasarkan pada sudah tersedianya dokumen perencanaan pada tahun sebelumnya terkecuali kegiatan yang mendukung pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat ke XV Tahun 2026;
 3. Belanja pengadaan tanah didasarkan pada dokumen Rencana Pengadaan Tanah sesuai ketentuan yang berlaku;
 4. Rencana Belanja Modal harus didasarkan pada kebutuhan riil dan mengutamakan produksi dalam negeri serta dapat melibatkan usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem, dan kualitas kemampuan teknis.
 5. Pemenuhan fasilitas kendaraan dinas jabatan secara selektif, efektif dan efisien untuk pelayanan publik;
 6. Perencanaan, Persiapan, Pembebasan Tanah, dan Penanganan Dampak Bencana Longsor di Jalan R. Saleh Danasasmata;
 7. Implementasi terhadap Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
3. Kebijakan Belanja Tidak Terduga
- Perencanaan anggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2024 dan memperhitungkan kegiatan-kegiatan yang tidak dapat diprediksikan sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta tidak biasa/tanggap darurat, yang tidak diharapkan berulang dan belum tertampung dalam Kegiatan dan Subkegiatan pada tahun Anggaran 2025.
4. Kebijakan Belanja Transfer
- 1) Terlaksananya bantuan kompensasi dampak lingkungan terhadap masyarakat sekitar TPAS Galuga sesuai pasal 9 Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Bogor

dengan Pemerintah Kota Bogor nomor 119/37/PKS/KS/XII/2020 dan nomor 658.1-DLH/2020 tentang Pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir Sampah Galuga di Desa Galuga Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor tanggal 30 Desember 2020

- 2) Terlaksananya bantuan kompensasi dampak lingkungan terhadap masyarakat sekitar TPPAS regional sesuai Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Bogor, Pemerintah Kota Bogor, Pemerintah Kota Depok, dan Pemerintah Kota Tangerang Selatan Nomor 89 / PBL.04/DLH, Nomor 100.3.7.1 / 126/ PKS/ KS-Banhuk / IX / 2024, Nomor 500.12.17.1/Perj.91-DLH/2024, Nomor 051/46/DLHK/Pemks/2024, Nomor 100.3.7.1/4208/Setda/Tapem/2024 tentang Pelayanan Tempat Pengolahan dan Pemrosesan akhir Sampah (TPPAS) Regional untuk Wilayah Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, dan Kota Tangerang Selatan tanggal 24 September 2024

2.2.3 KEBIJAKAN PEMBIAYAAN

2.2.3.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Kebijakan penerimaan pembiayaan Pemerintah Kota Bogor untuk Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

1. Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2024, dengan memperhitungkan sumber-sumber SiLPA dimaksud;
2. Penerimaan Cicilan Utang Penerusan pinjaman dari World Bank kepada Pemerintah Daerah Kota Bogor untuk Perumda Tirta Pakuan.

2.2.3.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Kebijakan pengeluaran pembiayaan Pemerintah Kota Bogor untuk Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

1. Penyertaan modal kepada Perumda Tirta Pakuan;
2. Pembayaran cicilan pokok utang terkait:
 - a. Penerusan pinjaman dari World Bank kepada Pemerintah Daerah Kota Bogor untuk Perumda Tirta Pakuan;
 - b. Pinjaman PEN Daerah Kota Bogor.
3. Pembentukan dana cadangan sesuai dengan Perda Nomor 6 Tahun 2024 tentang Dana Cadangan Pekan Olah Raga Provinsi Jawa Barat ke XV Tahun 2026 dan sesuai dengan kemampuan anggaran.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Dalam Laporan Realisasi APBD Kota Bogor Tahun Anggaran 2025, realisasi Pendapatan Daerah Kota Bogor mencapai Rp3.232.770.876.281,02 atau mencapai 97,41% dari target semula yang ditetapkan sebesar Rp3.318.812.005.957,00. Pada sisi lain, Realisasi Belanja dan Transfer mencapai Rp3.228.085.470.666,00 atau 95,43% dari anggaran yang ditetapkan semula sebesar Rp3.382.572.164.207,00 sehingga berdasarkan selisih pendapatan dan belanja terdapat defisit sebesar Rp4.685.405.615,02.

Pada aspek pembiayaan terdapat Pembiayaan Neto sebesar Rp68.561.104.017,38 dari yang dianggarkan sebesar Rp63.760.158.250,00. Dengan demikian di dalam Tahun Anggaran 2025 terdapat sisa lebih pembiayaan anggaran sebesar Rp73.246.509.632,40.

Sebagai suatu bangsa yang merdeka dan berdaulat, Negara Indonesia memiliki konstitusi atau Undang- Undang Dasar yang menjamin setiap warganya untuk hidup sesuai dengan hak-haknya dan berupaya untuk mewujudkan tujuan-tujuannya, serta mengatur semua permasalahan yang menyangkut pemerintahan. Untuk mewujudkan hal tersebut, pelayanan terhadap rakyatnya tidak mungkin terpusat pada pemerintah pusat, tetapi harus didistribusikan pada pemerintah daerah yang menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.

Pemerintahan daerah dibentuk dengan tujuan mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan kepada masyarakat. Dengan adanya otonomi, daerah diharapkan akan lebih mandiri dalam menentukan seluruh kegiatannya dan mampu memainkan perannya dalam membuka peluang memajukan daerah tanpa intervensi dari pihak lain, yang disertai dengan pertanggungjawaban publik, serta pertanggungjawaban kepada pemerintah pusat, sebagai konsekuensi dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk menjalankan urusan-urusan pemerintahan di daerah yang merupakan sasaran pembangunan daerah, pemerintah daerah menerima penyerahan wewenang pemerintahan dari pemerintah pusat untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (asas desentralisasi). Kewenangan daerah ini mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan yang dikecualikan dalam undang-undang, yaitu kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, yustisi, moneter, dan fiskal nasional dan agama. Selain pemberlakuan asas desentralisasi, penyelenggaraan pemerintahan di daerah pun berprinsip pada asas dekonsentrasi, yaitu urusan-urusan pemerintahan yang diserahkan ini tetap menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan tugas pembantuan, yaitu tugas-tugas untuk turut serta dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah tingkat atasnya, dengan kewajiban mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan. Urusan yang ditugaskan itu sepenuhnya masih menjadi wewenang pemerintah pusat atau provinsi.

Untuk membiayai belanja rumah tangga pemerintah daerah dalam mengemban penyerahan wewenang pemerintahan, pemerintah pusat memberi sumber-sumber keuangan, pengalokasian dana perimbangan, dan pemberian pinjaman dan/atau hibah kepada pemerintah daerah. Umumnya, sebagian besar sumber keuangan daerah berupa bantuan pemerintah pusat.

Kebijakan keuangan daerah tercermin pada kebijakan fiskal atau anggaran daerah, dan kebijakan ini termasuk bagian dari kebijakan pemerintah daerah dalam pembangunan, sehingga kebijakan penganggaran daerah harus ditangani dengan sebaik-baiknya. Pengumpulan dan penggunaan dana harus disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan daerah. Pendapatan pemerintah daerah harus selalu meningkat, sedangkan pengeluaran harus dilakukan seefisien mungkin sehingga sumber-sumber dana daerah dapat dimanfaatkan dengan baik.

Pada Tahun Anggaran 2025 anggaran Belanja dan Transfer Daerah Kota Bogor ditetapkan sebesar Rp3.382.572.164.207,00 direncanakan didanai melalui penerimaan pendapatan yang bersumber pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp1.745.089.943.776,00 dan Pendapatan Transfer sebesar Rp1.573.722.062.181,00 sehingga akan menghasilkan defisit anggaran sebesar Rp63.760.158.250,00 yang ditutup melalui pembiayaan netto.

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan Pemerintah Kota Bogor selama Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat secara ringkas pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1.1
Ikhtisar Target Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Bogor
Tahun Anggaran 2025

NO URUT	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SELISIH	
		2025	2025	(Rp)	%
1	PENDAPATAN	3.318.812.005.957,00	3.232.770.876.281,02	(86.041.129.675,98)	(2,59)
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.745.089.943.776,00	1.665.054.114.174,02	(80.035.829.601,98)	(4,59)
	PENDAPATAN TRANSFER	1.573.722.062.181,00	1.567.716.762.107,00	(6.005.300.074,00)	(0,38)
2	BELANJA DAN TRANSFER	3.382.572.164.207,00	3.228.085.470.666,00	(154.486.693.541,00)	(4,57)
	BELANJA OPERASI	2.958.012.808.956,00	2.835.000.060.430,00	(123.012.748.526,00)	(4,16)
	BELANJA MODAL	409.174.368.181,00	383.274.926.236,00	(25.899.441.945,00)	(6,33)
	BELANJA TAK TERDUGA	11.673.612.070,00	6.149.734.000,00	(5.523.878.070,00)	(47,32)
	TRANSFER	3.711.375.000,00	3.660.750.000,00	(50.625.000,00)	(1,36)
	SURPLUS / (DEFISIT)	(63.760.158.250,00)	4.685.405.615,02	68.445.563.865,02	(107,35)
3	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	97.354.304.246,00	240.845.870.193,38	143.491.565.947,38	147,39
4	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	33.594.145.996,00	172.284.766.176,00	138.690.620.180,00	412,84
	PEMBIAYAAN NETTO	63.760.158.250,00	68.561.104.017,38	4.800.945.767,38	7,53
	SILPA	0,00	73.246.509.632,40	73.246.509.632,40	0,00

Tabel diatas memperlihatkan bahwa pada Tahun 2025 realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Bogor kurang dari target yang telah ditetapkan. Selisih (kurang) realisasi Pendapatan Daerah adalah sebesar Rp86.041.129.675,98 atau 2,59% dari target tahun 2025 dengan rincian selisih (kurang) realisasi Pendapatan Asli Daerah dari target tahun 2025 sebesar Rp80.035.829.601,98 atau 4,59%, selisih (kurang) realisasi Pendapatan Transfer dari target tahun 2025 sebesar Rp6.005.300.074,00 atau 0,38% dari target tahun 2025.

Realisasi Belanja Daerah dan Transfer Pemerintah Kota Bogor pada Tahun 2025 tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Belanja daerah ini merupakan pengeluaran yang dilakukan Pemerintah Kota Bogor untuk mendanai seluruh kegiatan/program yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap layanan publik di Kota Bogor.

Realisasi belanja dan transfer Pemerintah Kota Bogor pada Tahun 2025 adalah sebesar Rp3.228.085.470.666,00 atau 95,43% dari target belanja dan transfer yang telah ditetapkan sebesar Rp3.382.572.164.207,00.

Dalam hal Pembiayaan Daerah sebagai pos untuk menutup defisit anggaran dan memanfaatkan surplus anggaran, dari target Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp97.354.304.246,00 dapat direalisasikan sebesar Rp240.845.870.193,38 atau 247,39% yang berasal dari Silpa tahun anggaran sebelumnya, pencairan Dana Cadangan, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah dan Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Pendek, realisasi pembiayaan pada BLUD RSUD Kota Bogor sebesar Rp143.500.000,00, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, struktur anggaran BLUD terdiri dari pendapatan BLUD, belanja BLUD dan pembiayaan BLUD, pembiayaan merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun anggaran berikutnya.

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp172.284.766.176,00 dialokasikan untuk Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri Jangka Panjang dan Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Pendek dan pembayaran pembiayaan BLUD RSUD Kota Bogor sebesar Rp143.500.000.000,00.

3.2 Alokasi Belanja Wajib Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2025

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Daerah dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2025, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBD, juga memperhatikan hal khusus lainnya, antara lain:

1. Dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran kesehatan secara memadai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa. Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - a. dalam hal persentase belanja infrastruktur pelayanan publik belum mencapai 40% (empat puluh persen), Pemerintah Daerah menyesuaikan porsi belanja infrastruktur pelayanan publik daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, sehingga batas akhir Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja infrastruktur sekurang kurangnya 40% sampai dengan TA 2027;
 - b. belanja infrastruktur pelayanan publik merupakan belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan dan pemeliharaan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan publik antar daerah.
 - c. belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa adalah belanja bagi hasil dan/atau transfer yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain bagi hasil Pajak provinsi kepada kabupaten/kota, bagi hasil Pajak dan Retribusi kabupaten/kota kepada desa, dan transfer kepada desa yang berasal dari DD dan ADD.

Adapun anggaran dan realisasi hal tersebut diatas adalah sebagai berikut :

1. Anggaran Bidang Pendidikan pada Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp919.578.328.589,00 atau 27,19% dari total Belanja Daerah, dengan realisasi sebesar Rp897.519.282.460,00 atau mencapai 27,80% dari total Belanja Daerah. Penjelasan lebih lanjut terkait dengan Anggaran dan Realisasi Bidang Pendidikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.2.1
Anggaran dan Realisasi Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2025

No	Komponen Perhitungan	Pagu	Realisasi
1	a. Urusan Bidang Pendidikan	791.272.078.883,00	772.687.222.066,00
	1) Belanja Operasi	676.798.995.325,00	665.582.435.283,00
	a. belanja pegawai	454.381.320.728,00	451.765.245.744,00
	b. belanja barang dan jasa	136.943.537.597,00	129.034.185.394,00
	c. belanja hibah	79.286.210.000,00	78.726.290.145,00
	d. belanja bantuan sosial	6.187.927.000,00	6.056.714.000,00
	2) Belanja Modal	114.473.083.558,00	107.104.786.783,00
	b. Urusan Bidang Kebudayaan	2.064.956.572,00	2.008.051.920,00
	1) Belanja Operasi		
	a. belanja pegawai		
	b. belanja barang dan jasa	1.768.215.572,00	1.727.386.200,00
	c. belanja hibah		
	d. belanja bantuan sosial		
	2) Belanja Modal	296.741.000,00	280.665.720,00
	c. Urusan Bidang Perpustakaan	918.834.400,00	890.762.512,00
	1) Belanja Operasi		
	a. belanja pegawai		
	b. belanja barang dan jasa	659.093.200,00	648.758.110,00
	c. belanja hibah		
	d. belanja bantuan sosial		
	2) Belanja Modal	259.741.200,00	242.004.402,00
	d. Urusan Bidang Kepemudaan dan Olahraga	67.763.703.594,00	65.701.056.568,00
	1) Belanja Operasi		
	a. belanja pegawai		
	b. belanja barang dan jasa	17.204.416.394,00	15.615.023.038,00
	c. belanja hibah	25.989.000.000,00	25.989.000.000,00
	d. belanja bantuan sosial		
	2) Belanja Modal	24.570.287.200,00	24.097.033.530,00
	e. Belanja diluar Urusan Pendidikan, Urusan Kebudayaan, Urusan Perpustakaan dan Urusan Kepemudaan dan Olahraga yang menunjang masyarakat dibidang Pendidikan, antara lain:	57.558.755.140,00	56.232.189.394,00
	1) Belanja Operasi		
	a. belanja pegawai		
	b. belanja barang dan jasa	57.558.755.140,00	56.232.189.394,00
	c. belanja hibah		
	d. belanja bantuan sosial		
	2) Belanja Modal		
2	Anggaran Fungsi Pendidikan (a+b+c+d+e)	919.578.328.589,00	897.519.282.460,00
3	Total Belanja Daerah	3.382.572.164.207,00	3.228.085.470.666,00
4	Rasio Anggaran Pendidikan (2:3) x 100%	27,19	27,80

2. Anggaran Bidang Kesehatan pada Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp719.069.977.574,00 atau 25,88% dari total Belanja Daerah diluar gaji, dengan realisasi sebesar Rp704.112.102.227,00 atau mencapai 26,57% dari total Belanja Daerah diluar gaji. Penjelasan lebih lanjut terkait dengan Anggaran dan Realisasi Bidang Kesehatan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.2.2
Anggaran dan Realisasi Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2025

No	Komponen Perhitungan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	Belanja pada Dinas Kesehatan	719.069.977.574,00	704.112.102.227,00	97,92
	1) Belanja Operasi	685.548.899.361,00	672.035.412.572,00	98,03
	Belanja Pegawai	207.460.376.523,00	198.656.908.151,00	95,76
	Belanja Barang dan Jasa	475.967.522.838,00	472.447.059.977,00	99,26
	Belanja Hibah	1.121.000.000,00	806.000.000,00	71,90
	2) Belanja Modal	33.521.078.213,00	32.076.689.655,00	95,69
2	Anggaran Kesehatan	719.069.977.574,00	704.112.102.227,00	97,92
3	Total Belanja Daerah	3.382.572.164.207,00	3.228.085.470.666,00	95,43
4	Gaji ASN	603.646.346.146,00	578.380.763.752,00	95,81
5	Total Belanja Daerah di luar Gaji ASN (3-4)	2.778.925.818.061,00	2.649.704.706.914,00	95,35
	Rasio anggaran Kesehatan (2:5) x 100%	25,88	26,57	

3. Anggaran Belanja infrastruktur pada tahun 2025 mencapai Rp1.425.141.135.648,00 atau 42,18% dari total belanja daerah dikurangi belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa dengan realisasi sebesar Rp1.362.557.412.090,00 atau mencapai 42,26%.

Tabel 3.2.3
Anggaran dan Realisasi Belanja Infrastruktur Tahun Anggaran 2025

No	Komponen Perhitungan	Anggaran	Realisasi	Persentase
1	Total Belanja Daerah	3.382.572.164.207,00	3.228.085.470.666,00	95,43
2	Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/ atau desa			
	a) belanja bagi hasil	0,00	0,00	
	b) bantuan keuangan	3.711.375.000,00	3.660.750.000,00	98,64
	Jumlah (a+b)	3.711.375.000,00	3.660.750.000,00	98,64
3	Selisih	3.378.860.789.207,00	3.224.424.720.666,00	
4	Minimal Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (40% x Selisih)	1.351.544.315.682,80	1.289.769.888.266,40	95,43
B PERHITUNGAN BELANJA INFRASTRUKTUR				
No	Komponen Perhitungan	Anggaran	Realisasi	Persentase
1	Belanja Modal			
	1) Tanah	36.731.950.693,00	28.044.059.320,00	76,35
	2) peralatan dan mesin	87.197.756.167,00	79.385.304.817,00	91,04
	3) bangunan dan gedung	119.483.685.862,00	115.665.583.188,00	96,80
	4) jalan, jaringan dan irigasi	106.359.314.390,00	105.065.195.021,00	98,78
	5) aset tetap lainnya	259.741.200,00	242.004.402,00	93,17
	6) aset lainnya	137.834.100,00	132.256.500,00	
2	Belanja Operasi			
	a) Belanja Pegawai	80.776.844.886,00	77.420.706.454,00	
	b) Belanja Bmng dan Jasa	966.702.661.511,00	931.320.256.944,00	
	c) Belanja Bunga	1.000.000.000,00	125.444.444,00	
	c) Belanja Hibah	2.400.000.000,00	2.380.000.000,00	99,17
	d) Belanja Bantuan Sosial	24.091.346.839,00	22.776.601.000,00	
3	Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah (1+2)	1.425.141.135.648,00	1.362.557.412.090,00	95,61
4	Persentase Belanja Infrastruktur	42,18	42,26	

3.3 Hambatan Dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

Secara umum faktor-faktor yang menjadi hambatan dan kendala dalam pencapaian target kinerja keuangan tahun anggaran 2025, yaitu :

- Adanya kebutuhan pendanaan untuk belanja daerah yang melebihi dari pendapatan daerah;
- Adanya kebijakan efisiensi anggaran sesuai dengan Inpres Presiden Nomor 1 Tahun 2025, yang juga mengurangi Dana Transfer ke Daerah
- Belum optimalnya kesinambungan antara proses perencanaan dan proses penganggaran, dan belum konsistennya proses politik dalam menerjemahkan dokumen perencanaan menjadi dokumen anggaran;
- Belum optimalnya monitoring dan evaluasi dalam rangka menjamin keselarasan antara dokumen perencanaan dan implementasi pelaksanaan program;
- Belum optimalnya kinerja pelaksanaan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dalam menyusun Analisa Beban Kerja dan target SKPD.

BAB IV**DASAR PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAN KEBIJAKAN AKUNTANSI****4.1 Pendahuluan****4.1.1 Tujuan**

Tujuan kebijakan akuntansi adalah mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Kota Bogor untuk tujuan umum dalam rangka membandingkan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode.

Tujuan khusus kebijakan akuntansi adalah memberikan acuan bagi:

- a. Penyusun laporan keuangan dalam menyelesaikan permasalahan akuntansi yang belum diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan;
- b. Pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan; dan
- c. Pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

4.1.2 Ruang Lingkup

Dalam pemerintah daerah terdapat 2 (dua) jenis entitas yang menyusun laporan keuangan yaitu entitas akuntansi dan entitas pelaporan. Adapun penjelasan kedua entitas tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Entitas akuntansi merupakan unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya. Entitas Akuntansi yang ada pada Pemerintah Daerah adalah seluruh SKPD pemerintah daerah dan SKPKD selaku entitas yang mengelola keuangan pada level Pemerintah Daerah. Keduanya mempunyai kewajiban untuk menyusun laporan keuangan yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan ini selanjutnya digabungkan menjadi laporan keuangan Pemerintah Daerah.
- b. Entitas pelaporan adalah satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah atau organisasi lainnya yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan keuangan. Dalam hal ini entitas pelaporan adalah Pemerintah Daerah. Adapun laporan keuangan yang harus disajikan oleh Pemerintah Daerah adalah LRA, LPSAL, Neraca, LO, LPE, LAK, dan CALK. Dalam penetapan entitas pelaporan, perlu dipertimbangkan syarat pengelolaan, pengendalian, dan penguasaan suatu entitas pelaporan terhadap aset, yurisdiksi, tugas dan misi tertentu, dengan bentuk pertanggungjawaban dan wewenang yang terpisah dari entitas pelaporan lainnya.

4.1.3 Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual. Dalam basis akrual ini, pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Namun demikian, basis kas masih digunakan dalam rangka penyusunan LRA sepanjang dokumen anggaran disusun berdasarkan basis kas.

4.1.4 Aplikasi Akuntansi

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 600.5.4/48/SJ tanggal 06 Januari 2023 perihal : Implementasi SIPD bahwa Pemerintah Daerah agar dapat menyusun dokumen perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan akuntansi pelaporan Tahun Anggaran 2024 dan seterusnya dengan mengakses SIPD, namun dalam pelaksanaannya Tahun 2025 Pemerintah Kota Bogor menggunakan aplikasi pendamping dalam proses penatausahaan dan akuntansi yaitu Sistem Informasi Keuangan Daerah atau Kuarta-Kota Bogor.

4.2 Asumsi Dasar Akuntansi

4.2.1 Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Penyajian informasi untuk tujuan akuntabilitas ini antara lain dilakukan:

1. Menyediakan informasi yang dapat dipercaya mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
2. Menyediakan informasi yang dapat dipercaya mengenai perubahan sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
3. Menyediakan informasi yang dapat sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4. Menyediakan informasi yang dapat dipercaya mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
5. Menyediakan informasi yang dapat dipercaya mengenai cara entitas pelaporan mendanai mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
6. Menyediakan informasi yang dapat dipercaya mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

1. Indikasi sumber daya yang telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
2. Indikasi sumber daya yang diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan dalam APBD.

Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal:

1. Aset;
2. Kewajiban;
3. Ekuitas;
4. Pendapatan-LRA;
5. Belanja;
6. Transfer;
7. Pembiayaan;
8. Saldo Anggaran Lebih;
9. Pendapatan-LO;
10. Beban; dan
11. Arus Kas.

Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi tujuan pelaporan keuangan, namun demikian masih diperlukan informasi tambahan, termasuk laporan non keuangan, untuk dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan guna memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas pelaporan selama satu periode.

4.2.2 Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan

Pimpinan entitas baik entitas akuntansi maupun entitas pelaporan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

4.2.3 Komponen Laporan Keuangan

Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan terdiri atas laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary report*) dan laporan finansial (*financial report*) sehingga laporan keuangan pemerintah daerah yang lengkap terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
3. Neraca;
4. Laporan Operasional (LO);
5. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
6. Laporan Arus Kas (LAK); dan
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas kecuali LAK dan Laporan Perubahan SAL yang hanya dibuat oleh BLUD dan entitas pelaporan.

4.2.4 Bahasa Laporan Keuangan

Laporan keuangan harus disusun dalam bahasa Indonesia. Jika laporan keuangan juga disusun dalam bahasa lain selain bahasa Indonesia, maka laporan keuangan dalam bahasa lain tersebut harus memuat informasi dan waktu yang sama (tanggal dan posisi dan cakupan periode). Selanjutnya, laporan keuangan dalam bahasa lain tersebut harus diterbitkan untuk periode atau waktu yang sama dengan laporan keuangan dalam bahasa Indonesia.

4.2.5 Mata Uang Pelaporan

Pelaporan harus dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penyajian neraca, aset dan/atau kewajiban dalam mata uang lain selain dari rupiah harus dijabarkan dalam mata uang rupiah dengan kurs menggunakan kurs tengah Bank Sentral. Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan dalam transaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan rupiah, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs transaksi, yaitu sebesar rupiah yang digunakan untuk memperoleh mata uang asing tersebut. Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan untuk bertransaksi dan mata uang tersebut dibeli dengan mata uang asing lainnya, maka :

1. Transaksi mata uang asing ke mata uang asing lainnya dijabarkan dengan menggunakan kurs transaksi;
2. Transaksi dalam mata uang asing lainnya tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Sentral pada tanggal transaksi.

Keuntungan dan kerugian dalam periode berjalan yang terkait dengan transaksi dalam mata uang asing dinilai dengan menggunakan kurs sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PSAP, IPSAP dan Buletin Teknis SAP serta peraturan perundang-undangan terkait yang mengatur tentang transaksi dalam mata uang asing.

4.2.6 Kebijakan Akuntansi

Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi dan praktik-praktik spesifik yang dipakai oleh suatu entitas akuntansi dan entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan tersebut mencerminkan prinsip kehati-hatian dan mencakup semua hal yang material sesuai dengan ketentuan dalam PSAP. Kebijakan akuntansi disusun untuk memastikan bahwa laporan keuangan dapat menyajikan informasi yang:

1. Relevan terhadap kebutuhan para pengguna laporan untuk pengambilan keputusan;
2. Dapat diandalkan, dengan pengertian:
 - a. Mencerminkan kejujuran penyajian hasil dan posisi keuangan entitas;
 - b. Menggambarkan substansi ekonomi dari suatu kejadian atau transaksi dan tidak semata-mata bentuk hukumnya;
 - c. Netral, yaitu bebas dari keberpihakan;
 - d. Mencerminkan kehati-hatian; dan
 - e. Mencakup semua hal yang material.
3. Dapat dibandingkan, dengan pengertian informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas lain pada umumnya;
4. Dapat dipahami, dengan pengertian informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan tingkat pemahaman para pengguna.

Dalam melakukan pertimbangan untuk penetapan kebijakan akuntansi, pemerintah daerah memperhatikan :

1. Persyaratan dan pedoman PSAP yang mengatur hal-hal yang mirip dengan masalah terkait;
2. Definisi, kriteria pengakuan dan pengukuran aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, dan penerimaan/pengeluaran pembiayaan yang ditetapkan dalam Kerangka Konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan dan PSAP; dan
3. Peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan daerah.

4.2.7 Penyusunan Laporan Keuangan

1. Laporan keuangan harus menyajikan secara wajar posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas disertai pengungkapan yang diharuskan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Aset disajikan berdasarkan karakteristiknya menurut ukuran likuiditas, sedangkan kewajiban disajikan menurut urutan waktu jatuh temponya.
3. Laporan Operasional menggambarkan pendapatan dan beban yang dipisahkan menurut karakteristiknya dari kegiatan utama/operasional entitas dan kegiatan yang bukan merupakan tugas dan fungsinya.
4. Catatan atas Laporan Keuangan harus disajikan secara sistematis dengan ukuran penyajian sesuai komponen utamanya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan. Informasi dalam catatan atas laporan keuangan berkaitan dengan pos-pos dalam neraca, laporan operasional, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, laporan perubahan SAL, dan laporan perubahan ekuitas yang sifatnya memberikan penjelasan, baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif, termasuk komitmen dan kontijensi serta transaksi-transaksi lainnya.
5. Penjelasan atas pos-pos laporan keuangan tidak diperkenankan menggunakan ukuran kualitatif seperti “sebagian besar” untuk menggambarkan bagian dari suatu jumlah tetapi harus dinyatakan dalam jumlah nominal atau persentase.
6. Perubahan akuntansi wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Perubahan estimasi akuntansi.

Estimasi akuntansi dapat diubah apabila terdapat perubahan kondisi yang mendasarinya. Selain itu, juga wajib diungkapkan pengaruh material dari perubahan yang terjadi baik pada periode berjalan maupun pada periode-periode berikutnya.

Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan dalam LO pada periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan. Misalnya, perubahan estimasi masa manfaat aset tetap berpengaruh pada LO tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut. Pengaruh perubahan terhadap LO tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya diungkapkan dalam CaLK.

- b. Perubahan Kebijakan Akuntansi.

Kebijakan akuntansi dapat diubah apabila :

- (1) Penetapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan atau SAP yang berlaku;
- (2) Diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan penyajian kejadian atau transaksi yang lebih sesuai dalam laporan keuangan.
- (3) Kesalahan Mendasar.

Koreksi kesalahan mendasar dilakukan secara retrospektif dengan melakukan penyajian ulang untuk seluruh periode sajian dan melaporkan dampaknya terhadap masa sebelum periode penyajian.

4.2.8 Konsistensi

1. Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari satu periode ke periode lain oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal), Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi lainnya. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam CaLK.
2. Penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan antar periode harus konsisten, kecuali :
 - a. Terjadi perubahan yang signifikan terhadap sifat operasi entitas pemerintahan daerah; atau

b. Perubahan tersebut diperkenankan oleh PSAP.

3. Apabila penyajian atau klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan diubah, maka penyajian periode sebelumnya tidak perlu direklasifikasi tetapi harus diungkapkan secara memadai di dalam CaLK.

4.2.9 Materialitas dan Agregasi

1. Penyajian laporan keuangan didasarkan pada konsep materialitas.
2. Pos-pos yang jumlahnya material disajikan tersendiri dalam laporan keuangan. Sedangkan, pos-pos yang jumlahnya tidak material dapat digabungkan sepanjang memiliki sifat atau fungsi sejenis.
3. Informasi dianggap material apabila kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam pencatatan informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan yang diambil.

4.2.10 Periode Pelaporan

Laporan keuangan wajib disajikan secara tahunan berdasarkan tahun takwim. Laporan keuangan dapat disajikan untuk periode yang lebih pendek dari satu tahun takwim, misalnya pada saat terbentuknya entitas baru. Penyajian laporan keuangan untuk periode yang lebih pendek dari tahun takwim dijelaskan dalam CaLK.

4.2.11 Informasi Komparatif

- 1) Laporan keuangan tahunan dan interim disajikan secara komparatif dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Khusus neraca interim, disajikan secara komparatif dengan neraca akhir tahun sebelumnya. LO dan LRA interim disajikan mencakup periode sejak awal tahun anggaran sampai dengan akhir periode interim yang dilaporkan.
- 2) Informasi komparatif yang bersifat negatif dan deskriptif dari laporan keuangan periode sebelumnya wajib diungkapkan kembali apabila relevan untuk pemahaman laporan keuangan periode berjalan.

4.2.12 Laporan Keuangan Interim

1. Laporan keuangan interim adalah laporan keuangan yang diterbitkan diantara dua laporan keuangan tahunan dan harus dipandang sebagai bagian integral dari laporan periode tahunan. Penyusunan laporan interim dapat dilakukan secara bulanan, triwulanan, atau semesteran.
2. Laporan keuangan interim memuat komponen yang sama seperti laporan keuangan tahunan yang terdiri dari neraca, LRA, LO, LAK, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan SAL, dan CaLK.

4.2.13 Laporan Keuangan Konsolidasian

Dalam menyusun laporan keuangan konsolidasian untuk mendapatkan laporan keuangan pemerintah daerah secara keseluruhan, PPKD menggabungkan laporan keuangan entitas satu persatu dengan menjumlahkan unsur-unsur yang sejenis dari aset, kewajiban, ekuitas, pembiayaan, belanja, dan beban. Agar laporan keuangan konsolidasian dapat menyajikan informasi keuangan tersebut sebagai satu kesatuan ekonomi, maka perlu dilakukan langkah-langkah berikut :

- a. Transaksi dan saldo resiprokal antara Bendahara Umum Daerah (BUD) dan entitas akuntansi dieliminasi.
- b. Laporan keuangan konsolidasian disusun dengan menggunakan kebijakan yang sama untuk transaksi, peristiwa dan keadaan yang sama atau sejenis.
- c. Laporan keuangan konsolidasian mencakup laporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

4.3 Komponen Laporan Keuangan

Laporan keuangan untuk tujuan umum terdiri dari :

4.3.1 Laporan Realisasi Anggaran

LRA merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. LRA menyajikan informasi mengenai ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh SKPD/SKPKD/Pemerintah Daerah dalam satu periode pelaporan. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran Pemerintah Daerah. LRA menggunakan basis kas dalam pencatatannya.

4.3.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

LPSAL merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut Saldo Anggaran Lebih awal, Penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan, Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya, dan Saldo Anggaran Lebih Akhir.

4.3.3 Neraca

Neraca merupakan komponen laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

4.3.4 Laporan Operasional

LO merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan. Disamping melaporkan kegiatan operasional, LO juga melaporkan transaksi keuangan dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa yang merupakan transaksi di luar tugas dan fungsi utama entitas. Berbeda dengan LRA, LO menggunakan basis akrual dalam pencatatannya.

4.3.5 Laporan Arus Kas

LAK adalah bagian dari laporan keuangan yang menyajikan informasi penerimaan, pengeluaran, dan perubahan kas dan setara kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

4.3.6 Laporan Perubahan Ekuitas

LPE merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas awal, surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir.

4.3.7 Catatan Atas Laporan Keuangan

CaLK merupakan komponen laporan keuangan yang meliputi penjelasan, daftar rincian dan/atau analisis atas laporan keuangan dan pos-pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK, dan LPE. Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, CaLK sekurang-kurangnya disajikan dengan susunan sebagai berikut:

- 1) informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi regional/ekonomi makro, pencapaian target peraturan daerah APBD Kota Bogor, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- 2) ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan;
- 3) informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- 4) pengungkapan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas;
- 5) informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan
- 6) daftar dan tabel.

Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh SAP serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian wajar laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan/atau komitmen-komitmen lainnya.

4.4 Keterbatasan Laporan Keuangan

Pengambilan keputusan ekonomi tidak semata-mata didasarkan pada informasi yang terdapat dalam laporan keuangan. Hal ini disebabkan laporan keuangan mempunyai keterbatasan, antara lain yaitu:

1. Bersifat historis, yaitu pencatatan atas transaksi atau peristiwa yang telah lampau akan terus dibawa dalam laporan keuangan. Hal ini berakibat pada revaluasi yang berakibat pada naiknya nilai aset dibandingkan pada periode sebelumnya;
2. Bersifat umum, baik dari sisi informasi maupun manfaat bagi pihak pengguna. Biasanya informasi khusus yang dibutuhkan oleh pihak tertentu tidak dapat secara langsung dipenuhi semata-mata dari laporan keuangan;
3. Tidak luput dari penggunaan berbagai pertimbangan dan taksiran;

4. Hanya melaporkan informasi yang bersifat material;
5. Bersifat konservatif dalam menghadapi ketidakpastian, yang artinya apabila terdapat beberapa kemungkinan yang tidak pasti mengenai penilaian suatu pos, maka dipilih alternatif yang menghasilkan pendapatan bersih atau nilai aset yang paling kecil; dan
6. Lebih menekankan pada penyajian transaksi dan peristiwa sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk hukumnya (formalitas).

4.5 Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas

4.5.1 Definisi

Kas Pemerintah Daerah terdiri dari Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di BLUD, Kas Dana BOS, dan Kas Dana Kapitasi. Saldo simpanan di bank yang dapat dikategorikan sebagai kas adalah saldo simpanan atau rekening di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran. Termasuk dalam kategori kas adalah setara kas yaitu investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas yang mempunyai masa jatuh tempo yang pendek, yaitu 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya.

Kas Pemerintah Daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab bendahara umum daerah. Kas pemerintah daerah tersebut terdiri dari:

- 1) Saldo rekening kas daerah, yaitu setiap saldo rekening pada bank yang digunakan untuk menampung penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah;
- 2) Setara kas, antara lain berupa Surat Utang Negara (SUN) dan Deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh bendahara umum daerah;
- 3) Uang tunai di bendahara umum daerah.

Kas Pemerintah Daerah yang dikuasai dan di bawah tanggung jawab selain bendahara umum daerah terdiri dari:

- 1) Kas di Bendahara Pengeluaran
- 2) Kas di Bendahara Penerimaan.
- 3) Kas di BLUD
- 4) Kas Dana BOS
- 5) Kas Dana Kapitasi
- 6) Kas Lainnya

4.5.2 Pengakuan

Kas diakui pada saat memenuhi definisi kas dan/atau setara kas yaitu ketika kas diterima oleh Bendahara/Rekening Kas Umum Daerah dan pada saat dikeluarkan oleh Bendahara/Rekening Kas Umum Daerah. Selain itu juga, ketika penguasaan dan/atau kepemilikan telah beralih kepada pemerintah. Kas di jurnal di posisi debit jika bertambah dan di posisi kredit jika berkurang

4.5.3 Pengukuran

Kas dicatat sebesar nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam valuta asing maka dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca

4.5.4 Penyajian dan Pengungkapan

Penyajian kas dan setara kas di neraca dan laporan arus kas harus menunjukkan posisi kas pada tanggal laporan keuangan dan menunjukkan asal usul kas.

Selanjutnya informasi terkait pengungkapan kas dan setara kas dijelaskan, diperinci dan diberikan analisa dalam CaLK. Beberapa hal yang perlu diungkapkan dalam CaLK antara lain:

- a. penjelasan dan sifat serta penggunaan dari rekening yang dimiliki dan dikuasai pemerintah;
- b. pengungkapan informasi penting lainnya terutama yang mempunyai pengaruh dalam pengambilan keputusan.

4.6 Kebijakan Akuntansi Piutang

4.6.1 Definisi

Buletin Teknis SAP Nomor 02 tahun 2005 menyatakan piutang adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Piutang juga dapat didefinisikan sebagai hak entitas dan/atau manfaat masa depan yang diakui pada saat ini

yang dapat dinilai dengan uang, sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Piutang Pemerintah Daerah diklasifikasikan menjadi dua yaitu:

- 1) Piutang Jangka Pendek
- 2) Piutang Jangka Panjang

4.6.2 Pengakuan

Pengakuan piutang yang berasal dari pendapatan daerah, didahului dengan pengakuan terhadap pendapatan yang mempengaruhi piutang tersebut.

Untuk dapat diakui sebagai piutang, harus dipenuhi kriteria:

- 1) Telah diterbitkan surat ketetapan dan/atau
- 2) Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan
- 3) belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan

4.6.3 Pengukuran

Piutang pajak dicatat berdasarkan surat ketetapan pajak yang pembayarannya belum diterima. Dalam penyusunan neraca, surat ketetapan pajak yang pembayarannya belum diterima dicatat sebagai Piutang Pajak sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah pajak-pajak yang belum dilunasi. Informasi mengenai saldo piutang pajak dapat diperoleh dari SKPD yang menerbitkan surat ketetapan pajak.

Piutang retribusi diukur sesuai nilai yang tercantum dalam SKRD yang belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.

Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dicatat sebesar nilai yang dituangkan dalam risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang disahkan oleh notaris untuk hasil investasi dari Perseroda atau SK Kuasa Pemilik Modal (KPM) untuk hasil investasi dari Perumda yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran.

Piutang lain-lain PAD yang Sah dicatat sebesar jumlah pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian Pemerintah Daerah yang belum dibayar yang tertuang dalam dokumen tagihan/ketetapan/kontrak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Termasuk di dalam Piutang Lain-lain PAD yang Sah adalah sanksi administrasi berupa denda pajak dan denda retribusi.

Piutang Transfer dicatat sebesar nilai kurang salur transfer dari pemberi (Pemerintah Pusat/Pemerintah Provinsi).

Piutang Lainnya dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.

1) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Aset berupa piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Alat untuk menyesuaikan adalah dengan melakukan penyisihan piutang tidak tertagih. Kebijakan penyisihan piutang tidak tertagih harus dirumuskan dengan sikap penuh kehati-hatian agar kebijakan ini mampu menghasilkan nilai yang diharapkan dapat ditagih atas piutang yang ada per tanggal neraca.

Metode penyisihan terhadap piutang yang tidak tertagih terdiri atas taksiran kemungkinan tidak tertagih pada saat pelaporan keuangan. Metode ini lebih meyakinkan terhadap penyajian nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) yang tersaji di neraca.

Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang adalah kualitas piutang. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) klasifikasi, yaitu:

- a) Kualitas piutang lancar;
- b) Kualitas piutang kurang lancar;
- c) Kualitas piutang diragukan;
- d) Kualitas piutang macet.

Penggolongan kualitas piutang dipilah berdasarkan cara pemungutan pajak, yaitu:

- a) Pajak dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (*Self Assessment*);
- b) Pajak ditetapkan oleh Kepala Daerah (*Official Assessment*).

Penggolongan kualitas piutang Pajak Daerah dimana pemungutan pajaknya dibayar sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*), dilakukan dengan ketentuan:

- a) kualitas lancar, dengan kriteria:
 - (1) umur piutang kurang dari 1 (satu) tahun;

- (2) Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan;
- (3) Wajib Pajak kooperatif;
- (4) Wajib Pajak likuid; dan/atau
- (5) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
- b) kualitas kurang lancar, dengan kriteria:
 - (1) umur piutang 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun;
 - (2) Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan;
 - (3) Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan;
 - (4) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
- c) kualitas diragukan, dengan kriteria:
 - (1) umur piutang lebih dari 2 (dua) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun;
 - (2) Wajib Pajak tidak kooperatif;
 - (3) Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
 - (4) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- d) Kualitas Macet, dengan kriteria:
 - (1) umur piutang lebih dari 5 (lima) tahun;
 - (2) Wajib Pajak tidak ditemukan;
 - (3) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia;
 - (4) Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).

Penggolongan kualitas piutang pajak Daerah dimana pemungutan pajaknya ditetapkan oleh Kepala Daerah (*official assessment*), dilakukan dengan ketentuan:

- a) kualitas lancar, dengan kriteria:
 - (1) umur piutang kurang dari 1 (satu) tahun;
 - (2) Wajib Pajak kooperatif;
 - (3) Wajib Pajak likuid; dan/atau
 - (4) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
- b) kualitas kurang lancar, dengan kriteria:
 - (1) umur piutang 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun;
 - (2) Wajib Pajak kurang kooperatif; dan/atau
 - (3) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
- c) kualitas diragukan, dengan kriteria:
 - (1) umur piutang 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) tahun;
 - (2) Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - (3) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- d) kualitas macet, dengan kriteria:
 - (1) umur piutang diatas 5 (lima) tahun; dan/atau
 - (2) Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - (3) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - (4) Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).

Penggolongan kualitas piutang bukan pajak khusus untuk objek Retribusi, dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:

- a) kualitas lancar, jika umur piutang sampai dengan 1 (satu) bulan;
- b) kualitas kurang lancar, jika umur piutang di atas 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan;
- c) kualitas diragukan, jika umur piutang di atas 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan;
- d) kualitas macet, jika umur piutang lebih dari 12 (dua belas) bulan

Penggolongan kualitas piutang bukan pajak selain yang disebutkan retribusi, dilakukan dengan ketentuan:

- a) kualitas lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
- b) kualitas kurang lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan;

- c) kualitas diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan; dan
- d) kualitas macet, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan.

Besarnya persentase penyisihan piutang tidak tertagih yang didasarkan pada umur piutang ditetapkan sebagai berikut:

Kualifikasi	Besaran Penyisihan
Piutang Lancar	nilai penyisihan sebesar 0.5%
Piutang Kurang Lancar	nilai penyisihan sebesar 10%
Piutang Diragukan	50% setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada)
Piutang Macet	100% setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada)

2) Penghentian Pengakuan Piutang

Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang dimaksud. Secara umum penghentian pengakuan piutang dengan cara membayar tunai (pelunasan) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas.

Pemberhentian pengakuan piutang selain karena pelunasan juga bisa dilakukan karena adanya penghapusan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah, penghapusan piutang dikenal dengan dua cara yaitu: penghapusan bersyarat dan penghapusan mutlak. Penghapusan secara bersyarat dilakukan dengan menghapuskan Piutang Daerah dari pembukuan tanpa menghapuskan hak tagih. Sementara itu penghapusan secara mutlak dilakukan dengan menghapuskan hak tagih Daerah.

Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan net realizable value-nya.

Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang. Apabila piutang dihapusbukukan, piutang dialihkan dari pencatatan intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel. Diperlukan laporan *off balance sheet* tentang piutang yang dihapusbukukan namun secara yuridis-formil belum dihapus, dan atau belum diberitahukan kepada pihak berutang serta masih harus terus ditagih secara intensif.

4.6.4 Penyajian dan Pengungkapan

Penyajian piutang yang timbul karena peraturan perundang-undangan merupakan tagihan yang harus dilunasi oleh para wajib bayar pada periode berjalan tahun dan disajikan di neraca sebagai Aset Lancar.

Penyisihan piutang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama timbulnya piutang, sehingga dapat menggambarkan nilai yang betul-betul diharapkan dapat ditagih. Jumlah penyisihan piutang disajikan sebagai pengurang dari akun piutang (*contra account*) dan disajikan di Neraca, sebagai unsur pengurang dari piutang yang bersangkutan.

Penyajian piutang dan tagihan yang berasal dari pemberian pinjaman, jual beli, pemberian jasa, dan kemitraan disajikan dalam neraca sebagai Aset Lancar atau Aset Lainnya sesuai dengan tanggal jatuh temponya.

Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:

- 1) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran piutang;
- 2) Rincian jenis-jenis, dan saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
- 3) Perhitungan penyisihan piutang tidak tertagih;
- 4) Penjelasan atas penyelesaian piutang;
- 5) Jaminan atau sita jaminan jika ada; dan
- 6) Informasi tentang Piutang Pajak yang masih dalam upaya hukum (sengketa) oleh Wajib Pajak, bila ada.

4.7 Kebijakan Akuntansi Beban dibayar dimuka

4.7.1 Definisi

Beban dibayar dimuka adalah suatu transaksi pengeluaran kas untuk membayar suatu beban atau keperluan yang kemanfaatannya dirasakan dalam tahun buku mendatang, seperti pembayaran sewa, premi asuransi, dan sebagainya. Pengeluaran tersebut belum merupakan biaya dalam tahun buku berjalan sehingga dicatat sebagai Aset Lancar.

4.7.2 Pengakuan

Beban dibayar dimuka diakui ketika hak klaim untuk mendapatkan arus kas masuk atau manfaat ekonomi lainnya dari entitas lain telah atau tetap masih terpenuhi, dan nilai klaim tersebut dapat diukur atau diestimasi.

4.7.3 Pengukuran

Pengukuran beban dibayar dimuka dilakukan berdasarkan jumlah kas yang dikeluarkan/dibayarkan sejumlah tagihan atau premi dan manfaatnya belum dinikmati pada periode tahun berjalan.

4.7.4 Penyajian dan Pengungkapan

Beban dibayar dimuka disajikan dalam Neraca sebagai bagian dari Aset Lancar.

4.8 Kebijakan Akuntansi Persediaan

4.8.1 Definisi

Mengacu pada paragraf 8 PSAP Nomor 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan, persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan merupakan aset yang berupa:

- 1) Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional Pemerintah Daerah;
- 2) Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi;
- 3) Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
- 4) Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan Pemerintah Daerah.

Adapun beberapa jenis persediaan, yaitu:

- 1) Persediaan berdasarkan sifat pemakaiannya terdiri dari:
 - a) Barang pakai habis;
 - b) Barang tak habis pakai; dan
 - c) Barang bekas dipakai.
- 2) Berdasarkan bentuk dan jenisnya, persediaan dapat terdiri dari:
 - a) Barang konsumsi;
 - b) Amunisi;
 - c) Bahan untuk pemeliharaan;
 - d) Suku cadang;
 - e) Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga;
 - f) Pita cukai dan leges;
 - g) Bahan baku;
 - h) Barang dalam proses/setengah jadi; dan
 - i) Semua pengadaan barang yang akan dijual/diserahkan pada masyarakat baik berupa Bangunan, Peralatan dan Mesin, Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya.

4.8.2 Pengakuan

Persediaan diakui pada saat:

- 1) Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Biaya tersebut didukung oleh bukti/dokumen yang dapat diverifikasi dan di dalamnya terdapat elemen harga barang persediaan sehingga dapat diverifikasi dan bersifat netral.
- 2) Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah. Dokumen sumber yang digunakan sebagai pengakuan perolehan persediaan adalah faktur, kuitansi, atau Berita Acara Serah Terima (BAST).

4.8.3 Pengukuran

Persediaan disajikan sebesar:

- 1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian.
- 2) Biaya perolehan persediaan hanya meliputi harga pembelian.
- 3) Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis berdasarkan ukuran yang digunakan pada saat penyusunan rencana kerja dan anggaran.
- 4) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi atau rampas.

4.8.4 Penyajian dan Pengungkapan

Persediaan disajikan di neraca pada bagian aset lancar

Persediaan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan berupa:

- 1) Kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah yang digunakan dalam pengukuran persediaan
- 2) Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
- 3) Penjelasan atas selisih antara pencatatan dengan hasil inventarisasi fisik; dan
- 4) Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

4.9 Kebijakan Akuntansi Investasi

4.9.1 Definisi

Investasi merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas.

Investasi dikategorisasi berdasarkan jangka waktunya, yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang.

1) Investasi jangka pendek

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Karakteristik investasi jangka pendek adalah:

- a) Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
- b) Investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas; dan
- c) Berisiko rendah.

Investasi jangka pendek, terdiri dari:

- a) Deposito berjangka waktu 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan dan atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (*revolving deposits*); dan
- b) Pembelian Surat Berharga Negara (SBN) jangka pendek dan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) oleh pemerintah pusat.

2) Investasi jangka panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Investasi jangka panjang menurut sifat penanaman investasi dibagi menjadi 2 (dua):

a) Investasi Permanen

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, artinya investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali. Investasi permanen meliputi:

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada perusahaan negara/daerah/internasional dan badan lainnya; dan
- (2) Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

b) Investasi Non Permanen

Investasi Non permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan, artinya kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali. Investasi non permanen meliputi:

- (1) Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
- (3) Dana yang disisihkan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat; dan
- (4) Investasi non permanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/ penyelamatan perekonomian.

4.9.2 Pengakuan

Investasi dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria:

- 1) Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah.
- 2) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable).

4.9.3 Pengukuran

Pengukuran untuk investasi jangka pendek adalah sebagai berikut:

- 1) Beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar. Untuk jenis investasi yang seperti ini, nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.
- 2) Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek (efek), dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah dengan komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.
- 3) Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut. Disamping itu, apabila surat berharga yang diperoleh dari hibah yang tidak memiliki nilai pasar maka dinilai berdasarkan hasil penilaian sesuai ketentuan.
- 4) Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.
- 5) Investasi jangka pendek dalam mata uang asing disajikan pada neraca dalam mata uang rupiah sebesar kurs tengah bank sentral pada tanggal pelaporan.

Sedangkan pengukuran untuk investasi jangka panjang adalah sebagai berikut:

- 1) Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal pemerintah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.
- 2) Investasi nonpermanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.
- 3) Investasi nonpermanen dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
- 4) Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah daerah, maka nilai investasi diakui sebesar nilai wajar aset yang diperoleh. Jika nilai wajar aset yang diperoleh tidak tersedia, nilai investasi diakui sebesar nilai wajar aset yang diserahkan atau nilai buku aset yang diserahkan apabila tidak diketahui nilai wajarnya.

- 5) Nilai perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayar dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.
- 6) Diskonto atau premium pada pembelian investasi diamortisasi selama periode dari pembelian sampai saat jatuh tempo sehingga hasil yang konstan diperoleh dari investasi tersebut. Diskonto atau premium merupakan penambahan atau pengurangan dari nilai tercatat (*carrying value*) investasi tersebut. Amortisasi diskonto atau premium akan mengurangi diskonto atau premium. Amortisasi diskonto atau premium akan diakui sebagai pengurang atau penambah pendapatan bunga dalam laporan operasional. Pendapatan bunga LRA tidak dipengaruhi oleh amortisasi diskonto atau premium.

4.9.4 Penyajian dan Pengungkapan

Investasi jangka pendek disajikan pada pos aset lancar di neraca. Sedangkan hasil dari investasi, seperti bunga, diakui sebagai pendapatan dan disajikan pada LRA dan LO. Transaksi pengeluaran kas untuk perolehan investasi jangka pendek dicatat sebagai reklasifikasi kas menjadi investasi jangka pendek oleh BUD, dan tidak dilaporkan dalam LRA. Keuntungan atau kerugian saat pelepasan investasi jangka pendek disajikan dalam LO dan sebagai penyesuaian SiLPA pada LRA.

Sedangkan untuk investasi jangka panjang disajikan pada neraca menurut jenisnya, baik yang bersifat non permanen maupun yang bersifat permanen. Investasi non permanen yang diragukan tertagih/terrealisasi disajikan sebagai pengurang investasi jangka panjang non permanen. Investasi nonpermanen yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan direklasifikasi menjadi bagian lancar investasi nonpermanen pada aset lancar.

Hal-hal lain yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah berkaitan dengan investasi jangka pendek, antara lain:

- 1) Kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah untuk penentuan nilai investasi jangka pendek;
- 2) Jenis-jenis investasi;
- 3) Perubahan harga pasar;
- 4) Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut; Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya; dan
- 5) Perubahan pos investasi.

Sedangkan hal-hal yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah berkaitan dengan investasi jangka panjang, antara lain:

- 1) Kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah untuk penentuan nilai investasi.
- 2) Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan non permanen.
- 3) Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang.
- 4) Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut.
- 5) Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya.
- 6) Perubahan pos investasi.
- 7) Penjelasan perhitungan penyisihan atas investasi non permanen.

4.10 Kebijakan Akuntansi Properti Investasi

4.10.1 Definisi

Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:

- 1) digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
- 2) dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Properti investasi menghasilkan arus kas yang sebagian besar tidak bergantung pada aset lain yang dikuasai oleh entitas. Hal ini membedakan properti investasi dari properti yang digunakan sendiri (aset tetap).

Termasuk dalam kategori properti investasi antara lain:

- 1) Tanah yang dikuasai dan/atau dikuasai dalam jangka panjang dengan tujuan untuk memperoleh kenaikan nilai dan bukan untuk dijual atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

- 2) Tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki namun belum ditentukan penggunaannya dimasa depan untuk digunakan sendiri atau dijual dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah lain dalam jangka pendek, tanah tersebut diakui sebagai tanah yang dimiliki dalam rangka peningkatan nilai.
- 3) Bangunan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi.
- 4) Bangunan yang belum terpakai yang dikuasai dan/atau dimiliki pemerintah daerah tetapi tersedia untuk disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi.
- 5) Properti dalam proses pembangunan atau pengembangan yang dimasa depan digunakan sebagai properti investasi.

Tidak termasuk dan bukan merupakan bagian dari definisi properti investasi aset-aset sebagai berikut:

- 1) Properti yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau sedang dalam proses pembangunan dan/atau pengembangan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- 2) Properti yang masih dalam proses pembangunan dan/atau pengembangan atas nama pihak ketiga.
- 3) Properti yang digunakan sendiri termasuk diantaranya properti yang dikuasai untuk digunakan dimasa depan sebagai properti yang digunakan sendiri.
- 4) Properti yang disewakan kepada entitas lain dengan cara sewa pembiayaan.
- 5) Properti yang dimiliki dalam rangka bantuan sosial yang menghasilkan tingkat pendapatan sewa dibawah harga pasar, misalnya pemerintah daerah membangun apartemen atau rumah susun yang disediakan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan mengenakan sewa dibawah harga pasar.
- 6) Properti yang digunakan untuk kegiatan operasional namun sesekali disewakan kepada pihak lain.

4.10.2 Pengakuan

Properti investasi diakui sebagai aset jika:

- 1) Besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke entitas di masa yang akan datang dari aset properti investasi; dan
- 2) Biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal.

Dalam menentukan suatu properti investasi memenuhi kriteria pertama pengakuan, entitas perlu menilai tingkat kepastian yang melekat atas aliran manfaat ekonomi masa depan berdasarkan bukti yang tersedia pada waktu pengakuan awal. Kepastian bahwa entitas akan menerima manfaat ekonomi yang melekat dan risiko yang terkait dengan properti investasi tersebut.

Kriteria kedua pengakuan properti investasi biasanya telah terpenuhi dari bukti perolehan aset properti investasi tersebut. Apabila suatu properti investasi diperoleh bukan dari pembelian maka nilai perolehannya disajikan sebesar nilai wajar pada tanggal/saat perolehan.

4.10.3 Pengukuran

Pengukuran Saat Awal Perolehan

- 1) Properti Investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan, termasuk didalamnya biaya transaksi. Apabila properti investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, properti investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan.
- 2) Biaya perolehan dari properti investasi yang dibeli meliputi harga pembelian, biaya transaksi, dan semua pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung. Pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung antara lain biaya jasa hukum, pajak dan biaya transaksi lainnya.
- 3) Biaya perolehan properti investasi tidak bertambah atas biaya-biaya di bawah ini:
 - a) Biaya perintisan (kecuali biaya-biaya yang diperlukan untuk membawa properti investasi ke kondisi siap digunakan);
 - b) Kerugian operasional yang terjadi sebelum properti investasi mencapai tingkat penggunaan yang direncanakan; atau
 - c) Pemborosan bahan baku, tenaga kerja atau sumber daya lain yang terjadi selama masa pembangunan atau pengembangan properti investasi
- 4) Biaya perolehan awal hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa dan diklasifikasikan sebagai properti investasi yang dicatat sebagai sewa pembiayaan, dalam hal ini aset diakui pada jumlah mana yang lebih

rendah antara nilai wajar dan nilai kini dari pembayaran sewa minimum. Jumlah yang setara diakui sebagai liabilitas sesuai dengan ketentuan paragraf yang sama.

- 5) Properti investasi mungkin diperoleh dari hasil pertukaran dengan aset moneter atau aset nonmoneter atau kombinasi aset moneter dan nonmoneter. Nilai perolehan properti investasi tersebut dihitung dari nilai wajar kecuali (a) transaksi 0 pertukaran tersebut tidak memiliki substansi komersial atau (b) nilai wajar aset yang diterima maupun aset yang diserahkan tidak dapat diukur secara andal. Jika aset yang diperoleh tidak dapat diukur dengan nilai wajar, biaya perolehannya diukur dengan jumlah tercatat aset yang diserahkan.

Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

- 1) Properti investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.
- 2) Properti Investasi, kecuali tanah, disusutkan dengan metode penyusutan sesuai dengan Kebijakan Akuntansi yang mengatur tentang Penyusutan Aset Tetap.
- 3) Penilaian kembali atau revaluasi properti investasi tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran.
- 4) Revaluasi atas properti investasi dapat dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.
- 5) Dalam hal proses revaluasi dilakukan secara bertahap, hasil revaluasi atas properti investasi diperoleh diakui dalam laporan keuangan periode revaluasi dilaksanakan.
- 6) Properti investasi direvaluasi secara simultan untuk menghindari revaluasi aset secara selektif dan pelaporan jumlah dalam laporan keuangan yang merupakan campuran antara biaya dan nilai (*costs and values*) pada tanggal yang berbeda. Namun, properti investasi dapat dinilai kembali secara bertahap (*rolling basis*) asalkan penilaian kembali tersebut diselesaikan dalam waktu singkat dan nilai revaluasi tetap diperbarui.
- 7) Pada saat revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar berdasarkan hasil revaluasi. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat properti investasi diakui pada akun ekuitas pada periode dilakukannya revaluasi. Setelah revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar dikurangi akumulasi penyusutan. Entitas dapat menyesuaikan masa manfaat atas properti investasi yang direvaluasi berdasarkan kondisi fisik properti investasi tersebut.
- 8) Jika jumlah tercatat properti investasi meningkat akibat revaluasi, maka kenaikan tersebut diakui sebagai kenaikan dalam ekuitas. Sebaliknya, jika jumlah tercatat properti investasi turun akibat revaluasi, maka penurunan tersebut diakui sebagai penurunan dalam ekuitas.

Alih Guna Ke dan Dari Properti Investasi

- 1) Alih guna ke atau dari properti investasi dilakukan jika terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan:
 - a) dimulainya penggunaan properti investasi oleh entitas, dialihgunakan dari properti investasi menjadi aset tetap;
 - b) dimulainya pengembangan properti investasi untuk dijual, dialihgunakan dari properti investasi menjadi persediaan;
 - c) berakhirnya pemakaian aset oleh entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan, dialihgunakan dari aset tetap menjadi properti investasi;
 - d) dimulainya sewa operasi ke pihak lain, ditransfer/ direklasifikasi dari persediaan menjadi properti investasi.
- 2) Penggunaan properti oleh pemerintah daerah dapat berubah-ubah dari waktu ke waktu. Misal, pemerintah daerah dapat memutuskan untuk menggunakan bangunan yang saat ini diklasifikasikan sebagai properti investasi atau menyewakan kepada pihak ketiga bangunan yang saat ini digunakan untuk tujuan administratif. Dalam contoh pertama, properti investasi dialihgunakan menjadi aset tetap. Dalam contoh kedua, aset tetap dialihgunakan menjadi properti investasi.
- 3) Entitas mengalihgunakan properti dari properti investasi menjadi persediaan jika terdapat perubahan penggunaan, yang ditunjukkan dengan dimulainya pengembangan dengan tujuan untuk dijual. Jika entitas memutuskan untuk melepas Properti investasi tanpa dikembangkan, maka entitas tetap memperlakukan

properti sebagai properti investasi hingga dihentikan pengakuannya (dihapuskan dari laporan posisi keuangan) dan tidak memperlakukannya sebagai persediaan.

- 4) Demikian juga jika entitas mulai mengembangkan properti investasi dan akan tetap menggunakannya di masa depan sebagai properti investasi, maka properti investasi tersebut tidak dialihgunakan dan tetap diakui sebagai properti investasi.
- 5) Entitas dapat secara teratur mengevaluasi pemanfaatan gedung-gedung untuk menentukan apakah memenuhi syarat sebagai Properti investasi. Jika pemerintah daerah memutuskan bangunan tersebut tetap dapat menghasilkan pendapatan sewa dan potensi kenaikan nilai maka bangunan tersebut diklasifikasikan sebagai properti investasi pada permulaan berlakunya sewa.
- 6) Karena entitas menggunakan metode biaya, alih guna antara properti investasi, properti yang digunakan sendiri dan persediaan tidak mengubah jumlah tercatat properti yang dialihgunakan serta tidak mengubah biaya properti untuk tujuan pengukuran dan pengungkapan. Nilai yang digunakan ketika dilakukannya alih guna adalah nilai tercatat dari properti investasi yang dialihgunakan.

Pelepasan Properti Investasi

- 1) Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomi di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasannya.
- 2) Pelepasan properti investasi dapat dilakukan dengan cara dijual, ditukar, dihapuskan atau dihentikan pengakuannya.
- 3) Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan properti investasi ditentukan dari selisih antara hasil neto dari pelepasan dan dari jumlah tercatat aset, dan diakui dalam Surplus/Defisit dalam periode terjadinya penghentian atau pelepasan tersebut.
- 4) Imbalan yang diterima atas pelepasan properti investasi pada awalnya diakui sebesar nilai wajar. Jika pembayaran atas properti investasi ditangguhkan, imbalan yang diterima pada awalnya diakui sebesar setara harga tunai. Selisih antara jumlah nominal dari imbalan dan nilai yang setara dengan harga tunai diakui sebagai pendapatan bunga.
- 5) Entitas mencatat kewajiban yang masih ada sehubungan dengan properti investasi setelah pelepasan properti investasi tersebut.
- 6) Kompensasi dari pihak ketiga yang diberikan sehubungan dengan penurunan nilai, kehilangan, kerusakan atau pengembalian properti investasi diakui sebagai surplus/deftisit ketika kompensasi tersebut diakui sebagai piutang.

4.10.4 Penyajian

- 1) Properti investasi diklasifikasikan dalam aset non lancar dan disajikan terpisah dari kelompok aset tetap dan aset lainnya.
- 2) Karena sifat pengklasifikasian properti investasi adalah untuk memperoleh pendapatan sewa atau kenaikan nilai, entitas dapat menjual apabila kenaikan nilai atas properti investasi menguntungkan dan entitas tidak akan memanfaatkan properti tersebut di masa mendatang.

4.10.5 Pengungkapan

Entitas pelaporan dan entitas akuntansi mengungkapkan dalam laporan keuangannya sebagai berikut:

- 1) dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount) properti investasi.
- 2) metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan.
- 3) jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (agregat dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode.
- 4) rekonsiliasi jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir periode, yang menunjukkan:
 - a) penambahan, pengungkapan terpisah untuk penambahan yang dihasilkan dari penggabungan dan penambahan pengeluaran setelah perolehan yang diakui sebagai aset.
 - b) penambahan yang dihasilkan melalui penggabungan
 - c) pelepasan
 - d) penyusutan
 - e) alih guna ke dan dari persediaan dan properti yang digunakan sendiri
 - f) perubahan lain.

- 5) apabila entitas melakukan revaluasi atas properti investasi, nilai wajar dari properti investasi, menjelaskan hal-hal antara lain sebagai berikut:
 - a) uraian properti investasi yang dilakukan revaluasi.
 - b) dasar peraturan untuk menilai kembali properti investasi.
 - c) tanggal efektif penilaian kembali
 - d) nilai tercatat sebelum revaluasi
 - e) jumlah penyesuaian atas nilai wajar
 - f) nilai tercatat properti investasi setelah revaluasi
- 6) metode dan asumsi diterapkan dalam menentukan nilai wajar apabila entitas melakukan revaluasi properti investasi, penentuan nilai wajar tersebut didukung oleh bukti pasar berdasarkan faktor lain (yang harus diungkapkan oleh entitas tersebut) atau menggunakan penilai independen
- 7) jumlah yang diakui dalam Surplus/Defisit untuk:
 - a) penghasilan sewa menyewa biasa dari properti investasi.
 - b) beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul dari properti investasi yang menghasilkan penghasilan rental selama periode tersebut.
 - c) beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul dari properti investasi yang tidak menghasilkan pendapatan sewa menyewa biasa selama periode tersebut.

4.11 Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

4.11.1 Definisi

yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan sifat dan fungsinya dalam kegiatan pemerintah. Aset tetap tersebut dibagi menjadi 6 klasifikasi, yaitu:

- 1) Tanah;
- 2) Peralatan dan Mesin;
- 3) Gedung dan Bangunan;
- 4) Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
- 5) Aset Tetap Lainnya; dan
- 6) Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

1) Tanah

Tanah yang dimaksud sebagai aset tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

2) Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin yang termasuk aset tetap mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan (memenuhi batasan nilai satuan minimal kapitalisasi) dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

3) Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap pakai.

Gedung dan bangunan tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan gedung dan bangunan yang ada di atasnya. Tanah yang diperoleh untuk keperluan dimaksud dimasukkan dalam kelompok Tanah.

4) Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan yang termasuk aset tetap adalah jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai dan dalam kondisi siap dipakai. Jalan, irigasi dan jaringan tersebut, selain digunakan dalam kegiatan pemerintah, juga dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Jalan, irigasi dan jaringan yang tidak dimanfaatkan oleh masyarakat umum diklasifikasikan sebagai aset yang menambah nilai aset tetap tempat melekatnya jalan, irigasi atau jaringan dimaksud.

Termasuk dalam klasifikasi jalan, irigasi, dan jaringan adalah jalan raya, jembatan, bangunan air, instalasi air bersih, instalasi pembangkit listrik, jaringan air minum, jaringan listrik, dan jaringan telepon. Jalan,

irigasi, dan jaringan ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan jalan, irigasi dan jaringan. Tanah yang diperoleh untuk keperluan dimaksud dimasukkan dalam kelompok Tanah.

5) Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Aset Tetap Tanah, Aset Tetap Peralatan dan Mesin, Aset Tetap Gedung dan Bangunan, Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Aset yang termasuk dalam klasifikasi Aset Tetap Lainnya adalah koleksi perpustakaan/buku dan non buku, barang bercorak kesenian/kebudayaan/ olah raga, hewan, ikan, dan tanaman. Termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah Aset Tetap dalam Renovasi.

6) Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Konstruksi dalam pengerjaan (KDP) mencakup Aset Tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal pelaporan keuangan belum selesai seluruhnya. Entitas yang melaksanakan pembangunan aset tetap untuk dipakai dalam penyelenggaraan kegiatan operasional pemerintahan dan/atau pelayanan masyarakat, dalam jangka waktu tertentu, baik yang dilaksanakan dengan membangun sendiri (swakelola) maupun oleh pihak ketiga wajib menerapkan standar akuntansi yang ada.

4.11.2 Pengakuan

Aset Tetap diakui pada saat:

- 1) Manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh;
- 2) Terjadi perpindahan kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum;
- 3) Nilainya dapat diukur secara handal.

Aset secara umum diakui sebagai aset tetap jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Berwujud;
- 2) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 3) Biaya perolehan aset dapat diukur secara handal;
- 4) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- 5) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan
- 6) Memenuhi batas minimum nilai kapitalisasi

Batasan minimal kapitalisasi aset tetap Pemerintah Daerah ditetapkan dalam tabel berikut:

JENIS ASET TETAP	Batas Nilai Kapitalisasi
Tanah	Rp1 per unit
Peralatan dan Mesin	> Rp1 juta per unit
Gedung dan Bangunan	
Rehabilitasi	> Rp100 juta per unit
Renovasi/Revitalisasi	Rp1 per unit
Jalan Lingkungan	
Rehabilitasi	> Rp100 juta per unit
Renovasi/Revitalisasi	Rp1 per unit
Jalan Kota	
Peningkatan/Perkerasan	Rp1 per unit
Pengairan (Bangunan Irigasi dan Drainase)	
Pemeliharaan Rutin	-
Perbaikan/Rehabilitasi	Rp1 per unit
Aset Tetap Lainnya	
Buku dan Perpustakaan	≥Rp50 ribu per unit
Barang Bercorak Kesenian & Kebudayaan	≥Rp500 ribu per unit

JENIS ASET TETAP	Batas Nilai Kapitalisasi
Alat-alat Olahraga	≥Rp300 ribu per unit
Hewan Ternak dan Tanaman	≥Rp3,4 juta per unit
Konstruksi dalam Pengerjaan	Rp1 per unit

Perolehan dan pengeluaran setelah perolehan yang memenuhi batas kapitalisasi diakui sebagai belanja modal dan masuk dalam perolehan atau kapitalisasi aset tetap. Sedangkan jika tidak memenuhi batas nilai kapitalisasi diakui sebagai belanja barang dan jasa.

Pemeliharaan atau perbaikan yang diklasifikasikan sebagai aset tetap harus memenuhi kriteria memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi dan peningkatan standar kinerja.

Dalam tabel di atas, yang dimaksud dengan:

- Rehabilitasi adalah perbaikan aset tetap yang rusak sebagian dengan tanpa meningkatkan kualitas dan atau kapasitas dengan maksud dapat digunakan sesuai dengan kondisi semula.
- Renovasi/Revitalisasi adalah perbaikan aset tetap yang rusak atau mengganti yang baik dengan maksud meningkatkan kualitas atau kapasitas.
- Pemeliharaan rutin bangunan irigasi dan drainase diakui sebagai belanja barang dan jasa.

Pengakuan atas aset tetap berdasarkan jenis transaksinya, antara lain perolehan, pengembangan, pengurangan serta penghentian dan pelepasan.

- Perolehan adalah suatu transaksi perolehan aset tetap sampai dengan aset tersebut dalam kondisi siap digunakan.
- Pengembangan adalah suatu transaksi peningkatan nilai aset tetap yang berakibat pada peningkatan masa manfaat, peningkatan efisiensi, peningkatan kapasitas, mutu produksi dan kinerja dan/atau penurunan biaya pengoperasian.
- Pengurangan adalah suatu transaksi penurunan nilai Aset Tetap dikarenakan berkurangnya volume/nilai Aset Tetap tersebut atau dikarenakan penyusutan.
- Penghentian dan pelepasan adalah suatu transaksi penghentian dari penggunaan aktif atau penghentian permanen suatu aset tetap.

4.11.3 Pengukuran

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan merupakan jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih harus dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih harus diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan. Apabila biaya perolehan suatu aset adalah tanpa nilai atau tidak dapat diidentifikasi, maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar. Nilai wajar digunakan untuk mencatat aset tetap yang bersumber dari donasi/hibah atau rampasan/sitaan yang tidak diketahui nilai perolehannya.

1) Pengukuran Tanah

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan tanah mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, pembayaran honor tim (panitia pengadaan), biaya pembuatan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, dan pengurangan, biaya perjalanan dinas, dan biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pengadaan aset tetap tersebut.

Biaya yang terkait dengan peningkatan bukti kepemilikan tanah, misalnya dari status tanah girik menjadi Sertifikat Hak Pengelolaan, dikapitalisasi sebagai biaya perolehan tanah. Biaya yang timbul atas penyelesaian sengketa tanah, seperti biaya pengadilan dan pengacara tidak dikapitalisasi sebagai biaya perolehan tanah.

Aset tetap tanah disajikan dalam neraca sesuai dengan biaya perolehan atau sebesar nilai wajar pada saat tanah tersebut diperoleh. Aset tetap tanah disajikan dalam neraca sesuai dengan biaya perolehan atau sebesar nilai wajar pada saat tanah tersebut diperoleh. Aset tetap tanah tidak disusutkan.

2) Pengukuran Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin dinilai dengan biaya perolehan atau nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan

untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga barang, ongkos angkut, biaya asuransi, biaya pemasangan, biaya selama masa uji coba, biaya perjalanan, dan biaya lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Peralatan dan mesin yang perolehannya melalui pembuatan, pengukuran nilainya adalah sebagai berikut:

- a) Pembuatan peralatan dan mesin dan bangunannya yang dilaksanakan melalui kontrak berupa pengeluaran sebesar nilai kontrak ditambah biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa konsultan, biaya perjalanan dan biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembuatan aset tetap tersebut;
- b) Pembuatan peralatan dan mesin dan bangunannya yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, dan biaya perizinan, biaya perjalanan dan biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembuatan aset tetap tersebut;

3) Pengukuran Gedung dan Bangunan

Biaya perolehan Gedung dan Bangunan yang dilaksanakan melalui kontrak antara lain meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama, biaya perjalanan dan biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pengadaan aset tetap tersebut.

Biaya perolehan Gedung dan Bangunan yang dibangun dengan cara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama, biaya perjalanan, dan biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Gedung dan Bangunan yang diperoleh dari sumbangan (donasi) dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

Apabila penilaian Gedung dan Bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan.

4) Pengukuran Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada di atas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan, biaya perjalanan, dan biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut. Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada di atas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan, biaya perjalanan dan biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Jalan, Irigasi dan Jaringan yang diperoleh dari sumbangan (donasi) dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

5) Pengukuran Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan aset tetap lainnya sampai siap pakai meliputi harga kontrak/beli, ongkos angkut, biaya asuransi, biaya perjalanan dan biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diperoleh dengan cara pembangunan/ pembuatan yang dilaksanakan melalui kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan dan biaya perizinan. Sedangkan biaya perolehan aset tetap lainnya yang diperoleh dengan cara pembangunan/pembuatan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan.

6) Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

KDP dicatat dengan biaya perolehan. Pengukuran biaya perolehan dipengaruhi oleh metode yang digunakan dalam proses konstruksi aset tetap tersebut, yaitu secara swakelola atau secara kontrak konstruksi.

a) Pengukuran Konstruksi Secara Swakelola

Apabila konstruksi aset tetap tersebut dilakukan dengan swakelola, maka biaya-biaya yang dapat diperhitungkan sebagai biaya perolehan adalah seluruh biaya langsung dan tidak langsung yang dikeluarkan sampai KDP tersebut siap untuk digunakan, meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada di atas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan. Biaya konstruksi secara swakelola diukur berdasarkan jumlah uang yang telah dibayarkan dan tidak memperhitungkan jumlah uang yang masih diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan. Bahan dan upah langsung sehubungan dengan kegiatan konstruksi antara lain meliputi:

- (1) biaya pekerja lapangan termasuk penyalah;
- (2) biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
- (3) biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan ke lokasi pelaksanaan konstruksi;
- (4) biaya penyewaan sarana dan peralatan;
- (5) biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi

Bahan tidak langsung dan upah tidak langsung dan biaya overhead lainnya yang dapat diatribusikan kepada kegiatan konstruksi antara lain meliputi:

- (1) asuransi, misalnya asuransi kebakaran;
- (2) biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu; dan
- (3) biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi

Biaya semacam itu dialokasikan dengan menggunakan metode yang sistematis dan rasional dan diterapkan secara konsisten pada semua biaya yang mempunyai karakteristik yang sama. Metode alokasi biaya yang dianjurkan adalah metode rata-rata tertimbang atas dasar proporsi biaya langsung.

b) Pengukuran Konstruksi Secara Kontrak Konstruksi Apabila konstruksi dikerjakan oleh kontraktor melalui suatu kontrak konstruksi, maka komponen nilai perolehan KDP tersebut meliputi:

- (1) termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
- (2) kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor sehubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan; dan
- (3) pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi

Kontraktor meliputi kontraktor utama dan subkontraktor, namun demikian penanggung jawab utama tetap kontraktor utama dan pemerintah selaku pemberi kerja hanya berhubungan dengan kontraktor utama. Pembayaran yang dilakukan oleh kontraktor utama kepada subkontraktor tidak berpengaruh pada pemerintah.

Pembayaran atas kontrak konstruksi pada umumnya dilakukan secara bertahap (termin) berdasarkan tingkat penyelesaian yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi. Setiap pembayaran yang dilakukan dicatat sebagai penambah nilai KDP.

Klaim dapat timbul, umpamanya, dari keterlambatan yang disebabkan oleh pemberi kerja, kesalahan dalam spesifikasi atau rancangan dan perselisihan penyimpangan dalam pengerjaan kontrak. Klaim tersebut tentu akan mempengaruhi nilai yang akan diakui sebagai KDP.

c) Konstruksi Dibiayai dari Pinjaman

Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal. Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi.

Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.

Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara yang tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat *force majeure*, maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi. Pemberhentian sementara pekerjaan kontrak konstruksi dapat terjadi karena beberapa hal seperti kondisi *force majeure* atau adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang karena berbagai hal. Jika pemberhentian tersebut dikarenakan adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang, biaya pinjaman selama pemberhentian sementara dikapitalisasi. Sebaliknya jika pemberhentian sementara karena kondisi *force majeure*, biaya pinjaman tidak dikapitalisasi tetapi dicatat sebagai biaya bunga pada periode yang bersangkutan. Dengan demikian, biaya bunga tersebut tidak ditambahkan sebagai nilai aset. Suatu kontrak konstruksi dapat mencakup beberapa jenis aset yang masing-masing dapat diidentifikasi. Dalam hal ini termasuk juga konstruksi aset tambahan atas permintaan pemerintah, yang mana aset tersebut berbeda secara signifikan dalam rancangan, teknologi, atau fungsi dengan aset yang tercakup dalam kontrak semula dan harga aset tambahan tersebut ditetapkan tanpa memperhatikan harga kontrak semula. Jika jenis-jenis pekerjaan tersebut diselesaikan pada titik waktu yang berlainan maka biaya pinjaman yang dikapitalisasi hanya biaya pinjaman untuk bagian kontrak konstruksi atau jenis pekerjaan yang belum selesai. Untuk bagian pekerjaan yang telah diselesaikan tidak diperhitungkan lagi biaya pinjaman. Biaya pinjaman setelah konstruksi selesai disajikan sebagai beban pada Laporan Operasional.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait pengukuran aset tetap adalah sebagai berikut:

1) Komponen Biaya Perolehan

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Apabila terdapat potongan harga (diskon) dan rabat, maka harus dikurangkan dari harga pembelian.

Contoh biaya yang secara langsung dapat dihubungkan/diatribusikan secara langsung dengan aset adalah sebagai berikut:

- a) biaya persiapan tempat;
- b) biaya pengiriman awal (*initial delivery*) dan biaya simpan dan bongkar muat (*handling cost*);
- c) biaya pemasangan (*installation cost*);
- d) biaya profesional seperti arsitek dan insinyur;
- e) biaya konstruksi;
- f) biaya pengujian aset untuk menguji apakah aset telah berfungsi dengan benar (*testing cost*);
- g) biaya kepanitiaan;
- h) biaya *Feasibility Study* (FS) dan *Detail Engineering Design* (DED);

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

2) Pengeluaran Setelah Tanggal Perolehan

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan. Istilah untuk menyebutkan penambahan tersebut adalah kapitalisasi.

Pemerintah Daerah dalam Kebijakan Akuntansi ini menetapkan batasan minimal jumlah biaya yang dikapitalisasi (*capitalization thresholds*) dan bersifat seragam untuk seluruh entitas akuntansi/entitas pelaporan di lingkungan Pemerintah Daerah. Batasan minimal jumlah biaya yang harus dikapitalisasi (*capitalization thresholds*) tersebut diterapkan secara konsisten dan akan diungkapkan dalam CaLK. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu Aset Tetap hanya dapat dikapitalisasikan pada nilai aset jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) Pengeluaran tersebut menambah efisiensi;
- b) Pengeluaran tersebut memperpanjang umur aset;
- c) Pengeluaran tersebut meningkatkan kapasitas, kualitas dan volume aset;

- d) Pengeluaran tersebut meningkatkan kapasitas atau mutu produksi;
 - e) Pengeluaran tersebut memenuhi batasan minimal nilai kapitalisasi Aset Tetap/aset lainnya.
- Pengeluaran lainnya yang timbul setelah perolehan awal (selain pengeluaran yang memberi nilai manfaat tersebut) diakui sebagai beban pengeluaran (expenses) pada periode dimana beban pengeluaran tersebut terjadi.
- Beban yang dikeluarkan untuk perbaikan atau pemeliharaan Aset Tetap yang ditujukan untuk memulihkan atau mempertahankan economic benefit atau potensi service atas aset dimaksud dari performa standar yang diharapkan diperlakukan sebagai beban pada saat dikeluarkan/terjadi.

4.11.4 Pertukaran

Suatu aset dapat diperoleh melalui pertukaran suatu aset atau sebagian aset yang tidak serupa dan memiliki nilai wajar yang tidak sama. Biaya perolehan aset tersebut diukur dengan nilai wajar aset yang dilepas dan disesuaikan dengan jumlah kas atau setara kas lainnya yang ditransfer/diserahkan. Suatu aset tetap yang diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa, memiliki masa manfaat dan nilai wajar yang serupa dicatat sebesar nilai tercatat aset tersebut dan tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui atas transaksi tersebut. Hal ini juga berlaku untuk keadaan dimana suatu aset dilepas dan ditukar dengan kepemilikan aset yang serupa.

Dalam hal aset yang diperoleh memiliki nilai wajar yang sama dengan aset yang dilepas namun demikian terdapat indikasi dari nilai wajar aset yang diterima bahwa aset tersebut masih harus dilakukan perbaikan untuk membawa aset dalam kondisi bekerja seperti yang diharapkan, maka biaya perolehan yang diakui adalah sebesar nilai aset yang dilepas dan disesuaikan dengan jumlah kas yang harus dikeluarkan untuk perbaikan aset tersebut.

Aset tetap hasil pertukaran bisa diakui apabila kepemilikan atas aset telah berpindah dan nilai perolehan aset hasil pertukaran tersebut dapat diukur dengan andal.

4.11.5 Penyusutan

Aset tetap merupakan komponen aset operasi pemerintah yang penting dalam menjalankan operasional pemerintahan. Aset tetap memiliki sifat yang rentan terhadap penurunan kapasitas sejalan dengan penggunaan atau pemanfaatannya. Oleh karena itu pemerintah daerah harus menyajikan informasi tentang nilai aset tetap secara memadai agar dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam pengelolaan aset.

Salah satu informasi yang sangat dibutuhkan dalam pengambilan keputusan yang terkait dalam pengelolaan aset tetap adalah informasi mengenai nilai wajar aset. Dalam rangka penyajian wajar atas nilai aset tetap tersebut, pemerintah daerah melakukannya melalui penetapan kebijakan penyusutan.

Penyusutan aset tetap dilakukan untuk:

- a. menyajikan nilai aset tetap secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi aset dalam laporan keuangan pemerintah daerah;
- b. mengetahui potensi Barang Milik Daerah dengan memperkirakan sisa masa manfaat suatu Barang Milik Daerah yang masih dapat diharapkan dapat diperoleh dalam beberapa tahun ke depan;
- c. memberikan bentuk pendekatan yang sistematis dan logis dalam menganggarkan belanja pemeliharaan atau menambahkan nilai aset tetap yang sudah dimiliki.

a) Prasyarat Penyusutan

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat yang bersangkutan. Kapasitas atau manfaat suatu aset tetap semakin lama semakin menurun karena digunakan dalam kegiatan operasi pemerintah dan sejalan dengan itu maka nilai aset tetap tersebut juga semakin menurun.

Tujuan utama dari penyusutan bukan untuk menumpuk sumber daya bagi pembayaran utang atau penggantian aset tetap yang disusutkan. Tujuan dasarnya adalah menyesuaikan nilai aset tetap untuk mencerminkan nilai wajarnya. Di samping itu penyusutan juga dimaksudkan untuk mengalokasikan beban penyusutan yang diakibatkan pemakaian aset tetap dalam kegiatan pemerintahan.

Untuk menerapkan penyusutan, prasyarat yang perlu dipenuhi adalah:

(1) Identitas Aset yang kapasitasnya menurun

Aset tetap harus dapat diidentifikasi sehingga dapat dibedakan antara aset tetap yang dapat menurun kapasitas dan manfaatnya dengan aset yang tidak menurun kapasitas dan manfaatnya. Aset yang kapasitas

dan manfaatnya menurun adalah peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Sedangkan aset yang tidak menurun kapasitas dan manfaatnya atau bahkan bertambah nilainya adalah tanah dan konstruksi dalam pengerjaan. Aset tetap yang dapat menurun kapasitas dan manfaatnya akan memerlukan penyesuaian nilai, sehingga perlu disusutkan. Sebaliknya, aset tetap yang tidak menurun kapasitas dan manfaatnya tidak perlu disusutkan.

(2) Nilai yang Dapat Disusutkan

Nilai aset tetap menjadi prasyarat dalam penyusutan. Standar akuntansi menganut nilai historis, sehingga kecuali karena kondisi yang tidak memungkinkan perolehan nilai historis, nilai aset tetap yang diakui secara umum adalah nilai perolehannya. Tanpa mengetahui nilai perolehan aset tetap, maka nilai aset tetap yang dapat disusutkan tidak dapat dihitung.

(3) Masa Manfaat dan Kapasitas Aset Tetap

Suatu aset disebut sebagai aset tetap adalah karena manfaatnya dapat dinikmati lebih dari satu tahun atau satu periode akuntansi. Ukuran manfaat itu sendiri berbeda-beda. Ada yang dapat diukur dengan indikator yang terkuantifikasi dan ada yang tidak. Untuk aset yang tidak mempunyai unit manfaat yang dapat dihitung dengan spesifik, dipakailah indikator pengganti seperti prakiraan potensi masa manfaat.

Hanya dengan terpenuhinya ketiga prasyarat di atas, penyusutan dapat dihitung. Tanpa prasyarat pertama, maka kedua prasyarat terakhir menjadi tidak relevan. Sedangkan perhitungan tiap metode penyusutan memang membutuhkan kuantifikasi prasyarat kedua dan ketiga. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat Aset Tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Seluruh Aset Tetap kecuali tanah dan konstruksi dalam pengerjaan disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, dan buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

b) Pengelompokan Aset

Identifikasi aset-aset yang dapat dianggap sebagai aset yang harus disusutkan secara berkelompok dengan kriteria sebagai berikut:

- (1) Aset tersebut diperoleh dalam waktu yang bersamaan dan mempunyai masa manfaat yang sama;
- (2) Manfaat secara teknis suatu aset sangat bergantung pada aset lain (peralatan kesehatan seperti kamera sinar X dan alat pencetakan film sinar X, dan lain-lain);
- (3) Pembelian aset dilakukan secara berpasangan dan harga belinya merupakan keseluruhan harga pasangan (misalnya mesin cetak digital, komputer, dan perangkat lunaknya);
- (4) Walaupun pemanfaatannya tidak terlalu bergantung dengan aset lain, tetapi demi kemudahan dan efisiensi biaya administrasi, berbagai aset dapat dikelompokkan karena kedekatan teknik dan konteks pemanfaatannya (misalnya peralatan bedah).

Terhadap aset yang tidak memenuhi kriteria yang dibutuhkan di atas, misalnya gedung dan bangunan, disusutkan secara individual.

c) Nilai yang Dapat Disusutkan

Oleh karena aset tetap milik pemerintah diperoleh bukan untuk tujuan dijual, melainkan untuk sepenuhnya digunakan sesuai tugas dan fungsi instansi pemerintah, maka nilai sisa/residu tidak diakui. Dengan demikian, setiap nilai aset tetap, baik yang bersifat individual maupun kelompok, langsung diakui sebagai nilai yang dapat disusutkan.

Nilai yang dapat disusutkan didasarkan pada nilai buku semesteran dan tahunan, kecuali untuk penyusutan pertama kali, didasarkan pada nilai buku akhir tahun pembukuan sebelum diberlakukannya penyusutan.

d) Metode Penyusutan

Metode penyusutan yang diterapkan Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan nilai/besaran aset yang dapat didepresiasi (*depreciable amount*) secara sistematis sepanjang umur aset adalah metode garis lurus (*straight line method*). Metode garis lurus menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama.

Rumusan tersebut adalah:

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa manfaat}}$$

Keunggulan metode garis lurus adalah bahwa perhitungannya mudah. Metode ini cocok dipergunakan untuk Aset Tetap yang penggunaannya dari periode ke periode relatif sama.

Berdasarkan metode garis lurus, penyusutan nilai aset tetap dilakukan dengan mengalokasikan beban penyusutan secara merata selama masa manfaatnya. Persentase penyusutan yang dipakai dalam metode ini dipergunakan sebagai pengali nilai yang dapat disusutkan untuk mendapat nilai penyusutan per tahun.

Penyusutan juga tidak dilakukan terhadap aset yang direklasifikasikan sebagai aset lainnya berupa:

- (1) Aset tetap dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada pengelola barang untuk dilakukan penghapusannya
- (2) Aset tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada pengelola barang untuk dilakukan penghapusan

Dalam hal terjadinya perubahan aset tetap sebagai akibat koreksi nilai aset tetap yang disebabkan kesalahan dan pencatuman nilai yang diketahui di kemudian hari, maka penyusutan aset tetap tersebut perlu disesuaikan.

Aset tetap yang diperoleh sebelum diberlakukannya Penyusutan Aset Tetap, dikenakan koreksi Penyusutan Aset Tetap, Koreksi Penyusutan Aset Tetap dicatat sebagai penambah nilai akun Akumulasi Penyusutan dan pengurang nilai ekuitas pada neraca serta sebagai transaksi koreksi pada periode diberlakukannya penyusutan.

e) Hal-hal khusus yang terkait dengan penyusutan

- (1) Pemanfaatan Aset Tetap yang Seluruh Nilainya Sudah Disusutkan Walaupun suatu aset sudah disusutkan seluruh nilainya hingga nilai bukunya menjadi Rp0, mungkin secara teknis aset itu masih dapat dimanfaatkan. Jika hal seperti ini terjadi, aset tetap tersebut tetap disajikan dengan menunjukkan baik nilai perolehan maupun akumulasi penyusutannya. Aset tersebut tetap dicatat dalam kelompok aset tetap yang bersangkutan dan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Aset tetap yang telah habis masa penyusutannya dapat dihapuskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Penjualan Aset Tetap yang Telah Disusutkan Seluruhnya Dalam hal terjadi aset tetap yang telah disusutkan seluruhnya dilakukan penjualan, maka hasil penjualan tersebut dicatat sebagai surplus/defisit penjualan aset tetap pada Laporan Operasional.

(3) Tukar-Menukar Aset Tetap

Tukar menukar aset tetap dapat dilakukan antar pemerintah sesuai dengan peraturan perundangundangan. Pertukaran dapat dilakukan atas aset tetap dengan jenis seperti:

(a) Pertukaran aset yang tidak sejenis

Nilai aset yang diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat aset yang diserahkan setelah disesuaikan dengan jumlah kas yang diserahkan. Artinya nilai perolehan dan akumulasi penyusutan aset tetap yang diserahkan harus diketahui.

(b) Pertukaran aset tetap yang sejenis

Dalam pertukaran aset tetap yang sejenis tidak diakui adanya laba rugi. Dalam keadaan demikian, nilai aset tetap yang diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat aset yang diserahkan. Akan tetapi tetap masih ada penentuan masa manfaat agar dapat ditentukan penyusutan aset yang diperoleh.

(4) Perbaikan Aset Tetap yang Menambah Masa Manfaat atau Kapasitas Manfaat

Perbaikan yang dilakukan atas suatu aset tetap dapat menambah masa manfaat atau menambah kapasitas aset tetap yang bersangkutan. Pengeluaran yang dilakukan untuk perbaikan semacam ini disebut pengeluaran modal (*capital expenditure*). Pengeluaran seperti ini akan mempengaruhi nilai yang dapat disusutkan, perkiraan output dan bahkan masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.

Pengeluaran seperti ini ditambahkan ke nilai tercatat aset tetap yang bersangkutan. Artinya, pengeluaran modal seperti ini ditambahkan pada nilai buku aset tetap yang bersangkutan. Nilai buku aset ditambah dengan pengeluaran modal akan menjadi nilai baru yang dapat disusutkan selama sisa masa manfaat aset yang bersangkutan.

- (5) Penyusutan atas Aset Tetap Secara Berkelompok Aset tetap bervariasi dalam bentuk dan nilai. Ada aset tetap yang nilai per jenis sangat besar. Misalnya, gedung berupa rumah atau kantor dengan nilai yang relatif besar. Jalan berupa jalan negara atau jalan provinsi misalnya juga memiliki nilai yang signifikan.

Akan tetapi ada juga aset tetap yang jenisnya banyak tetapi nilainya relatif kecil. Misalnya, mesin-mesin kecil seperti kalkulator dan peralatan kantor lainnya.

Menghitung besarnya penyusutan untuk aset tetap yang nilai per unitnya besar dapat dilakukan dengan menghitung penyusutan setiap jenis aset tetap yang bersangkutan. Menghitung besarnya penyusutan setiap aset tetap yang jumlahnya banyak tetapi nilainya relatif kecil sangat merepotkan. Bahkan mungkin biaya yang dikeluarkan lebih besar dari manfaat yang diperoleh. Untuk itu diperlukan cara yang lebih praktis untuk menghitung besarnya penyusutan jenis aset yang nilainya relatif kecil.

Penghitungan penyusutan untuk aset yang nilainya relatif kecil dapat dilakukan dengan mengelompokkan aset-aset tersebut kemudian menghitung besarnya penyusutan dari kelompok aset tersebut. Kelompok aset tersebut harus memiliki persamaan atribut misalnya masa manfaat yang sama. Dengan adanya persamaan atribut dan maka penyusutan dihitung dengan menerapkan persentase penyusutan dengan metode garis lurus terhadap rata-rata aset tetap yang bersangkutan.

(6) Perhitungan Penyusutan Aset Tetap yang Diperoleh Tengah Tahun

Aset tetap diperoleh pada waktu tertentu di sepanjang tahun. Ada kalanya aset tetap diperoleh awal tahun, pertengahan tahun atau akhir tahun. Permasalahan tersebut di atas dialami khusus untuk aset tetap yang akan disusutkan berdasarkan waktu (masa manfaat). Penentuan besarnya penyusutan dilakukan berdasarkan *cut-off* output.

Untuk menentukan waktu yang akan digunakan dalam perhitungan penyusutan aset yang diperoleh di tengah tahun, Pemerintah Daerah menggunakan pendekatan bulan penggunaan dimana waktu penyusutan ditentukan berdasarkan bulan saat aset tersebut diperoleh atau digunakan.

(7) Perubahan Estimasi dan Konsekuensinya

(a) Umur aset sesungguhnya lebih dari estimasi

Ada kalanya masa manfaat aset tetap lebih lama dari perkiraan dalam menentukan penyusutan. Setelah perkiraan masa manfaat dilalui dan akumulasi penyusutan telah sama dengan nilai perolehannya kadang-kadang aset tetap masih dapat digunakan. Hal ini menunjukkan bahwa aset tetap yang bersangkutan masih memiliki nilai wajar. Oleh karena nilai yang dapat disusutkan (*depreciable cost*) tidak ada lagi maka atas aset ini tidak dapat dilakukan penyusutan. Mengingat bahwa nilai sisa aset tetap tidak diakui maka nilai perolehan aset tetap dan akumulasi penyusutannya tetap dicantumkan dalam neraca.

(b) Penghentian Penggunaan

Aset tetap disusutkan selama aset tersebut memberikan manfaat atau memproduksi. Ada kalanya suatu aset tidak dapat memproduksi atau tidak digunakan karena berbagai alasan. Oleh karena tidak digunakan maka seharusnya aset yang bersangkutan tidak disusutkan bahkan harus dipindahkan ke kelompok aset lain-lain. Pemindahan ke aset lain-lain dapat dilakukan apabila aset tetap tersebut tidak memproduksi atau tidak digunakan secara permanen. Akan tetapi jika hanya tidak memproduksi sementara aset tetap tersebut tidak dipindahkan ke aset lainlain.

Karena Pemerintah Daerah menggunakan metode garis lurus, penyusutan atas aset tetap tersebut tetap dihitung. Hal ini dilakukan dengan alasan aset tetap tersebut tetap mengalami penurunan nilai meskipun tidak digunakan.

(8) Perhitungan Penyusutan Aset Tetap yang Dilepaskan di Tengah Periode Akuntansi

Adakalanya suatu aset tetap dihapuskan dari neraca dikarenakan dijual/dipertukarkan/diserahkan kepada entitas pelaporan lainnya. Permasalahan yang muncul adalah perhitungan beban penyusutannya.

4.11.6 Penghentian dan Pelepasan

PSAP Nomor 7 menyatakan jika Aset Tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang. Aset Tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam CaLK. Sedangkan Aset Tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Daerah tidak memenuhi definisi Aset Tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Penghentian suatu aset tetap secara permanen umumnya dilakukan karena:

- a) Rusak berat, terkena bencana alam/*force majeure*

- b) Tidak dapat digunakan secara optimal (*idle*)
- c) Terkena planologi kota
- d) Kebutuhan organisasi karena perkembangan tugas
- e) Penyatuan lokasi dalam rangka efisiensi dan memudahkan koordinasi
- f) Pertimbangan dalam rangka pelaksanaan rencana strategis Hankam
- g) Pertimbangan teknis
- h) Pertimbangan ekonomis

Salah satu cara untuk melakukan penghentian aset tetap adalah dengan menjual atau menukar aset tetap tersebut. Jika penjualan atau penukaran aset tetap terjadi ketika belum seluruh nilai buku Aset Tetap yang bersangkutan habis disusutkan, maka selisih antara harga jual atau harga pertukarannya dengan nilai buku Aset Tetap terkait diperlakukan sebagai penambah atau pengurang ekuitas. Penerimaan kas akibat penjualan dibukukan sebagai pendapatan dan dilaporkan pada LO dan LRA Pemerintah Daerah.

Aset Tetap harus dihapuskan dari laporan keuangan entitas pada saat dilakukan penghapusan atau ketika aset tersebut secara permanen tidak lagi digunakan oleh entitas dan tidak ada lagi manfaat ekonomi atau potensi servis/pelayanan yang dapat diharapkan dan telah diterbitkan Keputusan Wali Kota tentang Penghapusan Barang Milik Daerah.

4.11.7 Penilaian Kembali

Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.

4.11.8 Aset Tetap yang Berasal dari Hibah/Donasi

Aset tetap yang berasal dari hibah/donasi diakui pada saat diterima oleh pemerintah daerah dan diukur sebesar nilai wajar pada saat perolehannya. Pada saat diterima, aset tetap akan bertambah dan di sisi lain mengakui hibah/donasi tersebut sebagai pendapatan hibah-LO.

4.11.9 Aset Tetap yang berasal dari Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP)

- (a) Saat penyerahan TJSLP berupa barang dibuat berita acara penyerahan yang ditandatangani oleh perusahaan penyelenggara TJSLP dengan Sekretaris Daerah atau Kepala Perangkat Daerah yang membidangi.
- (b) TJSLP berupa barang disertai dengan Naskah Perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat jenis, jumlah, dan nilai barang, yang ditandatangani oleh perusahaan penyelenggara TJSLP dengan Sekretaris Daerah atau Kepala Perangkat Daerah yang membidangi.
- (c) Aset tetap yang berasal dari TJSLP diakui pada saat diterima oleh pemerintah daerah dan diukur sebesar nilai wajar pada saat perolehannya. Pada saat diterima, aset tetap akan bertambah dan di sisi lain mengakui hibah/donasi tersebut sebagai pendapatan hibah-LO.

4.11.10 Penyajian dan Pengungkapan

Penyajian Aset Tetap berdasarkan kepada biaya perolehan Aset Tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Aset Tetap disajikan pada bagian Aset dalam laporan neraca Pemerintah Daerah.

Besarnya penyusutan setiap tahun disajikan dalam Neraca dan LO. Penyusutan disajikan dalam neraca dengan akun akumulasi penyusutan yang mengurangi nilai perolehan aset tetap. Neraca menyajikan Akumulasi Penyusutan sekaligus nilai perolehan aset tetap sehingga nilai buku aset tetap sebagai gambaran dari potensi manfaat yang masih dapat diharapkan dari aset yang bersangkutan dapat diketahui. Sedangkan beban penyusutan disajikan dalam LO.

Selain disajikan dalam neraca, penjelasan tentang aset tetap juga harus dituangkan dalam CaLK. Dalam CaLK harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis Aset Tetap secara umum sebagai berikut:

- 1) Dasar penilaian Aset Tetap yang digunakan;
- 2) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan
 - a) Penambahan;
 - b) Pelepasan;
 - c) Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
 - d) Mutasi Aset Tetap lainnya.
- 3) Informasi penyusutan, meliputi:
 - a) Nilai penyusutan;

- b) Metode penyusutan yang digunakan;
- c) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
- d) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
- 4) Dalam hal terjadi pertukaran Aset Tetap, meliputi:
 - a) Pihak yang melakukan pertukaran Aset Tetap;
 - b) Jenis Aset Tetap yang diserahkan dan nilainya;
 - c) Jenis Aset Tetap yang diterima beserta nilainya; dan
 - d) Jumlah hibah selisih lebih dari pertukaran Aset Tetap.
- 5) Informasi lainnya, seperti:
 - a) Eksistensi dan batasan hak milik atas Aset Tetap;
 - b) Kebijakan akuntansi Pemda untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Aset Tetap;
 - c) Jumlah pengeluaran pada pos Aset Tetap dalam konstruksi; dan
 - d) Jumlah komitmen untuk akuisisi Aset Tetap.

4.12 Kebijakan Akuntansi Dana Cadangan

4.12.1 Definisi

PSAP Nomor 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan paragraf 65 mendefinisikan dana cadangan sebagai dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya. Pembentukan dana cadangan ini harus didasarkan perencanaan yang matang, sehingga jelas tujuan dan pengalokasiannya. Untuk pembentukan dana cadangan harus ditetapkan dalam peraturan daerah yang di dalamnya mencakup:

- 1) penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
- 2) program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
- 3) besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan dalam bentuk rekening tersendiri;
- 4) sumber dana cadangan; dan
- 5) tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

4.12.2 Pengakuan

Pembentukan dana cadangan akan dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan, sedangkan pencairannya akan dianggarkan pada penerimaan pembiayaan. Untuk penggunaannya dianggarkan dalam program kegiatan yang sudah tercantum di dalam peraturan daerah. Dana cadangan diakui pada saat terjadi pemindahan dana dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Dana Cadangan. Proses pemindahan ini harus melalui proses penatausahaan yang menggunakan mekanisme LS.

4.12.3 Pengukuran

Dana cadangan dicatat sebesar nilai nominal atas besarnya dana yang disisihkan.

4.12.4 Penyajian dan Pengungkapan

Dana cadangan disajikan dalam neraca dan informasi terkait dana cadangan diungkapkan dalam CaLK.

Adapun informasi yang harus diungkapkan dalam CaLK adalah sumber dana cadangan dan peraturan daerah yang mengatur tentang dana cadangan tersebut.

4.13 Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan. Beberapa aset lainnya antara lain:

- a. Tagihan penjualan angsuran;
- b. Tuntutan ganti rugi;
- c. Kemitraan dengan pihak ketiga;
- d. Aset tak berwujud; dan
- e. Aset lain-lain.
- f. *Treasury Deposit Facility (TDF)*

4.13.1 Tagihan Penjualan Angsuran

4.13.1.1 Definisi

Tagihan penjualan angsuran adalah penjualan aset yang tidak dipisahkan pengelolaannya dan biasanya diangsur lebih dari 12 (dua belas) bulan. Dalam lingkungan pemerintah daerah, tagihan penjualan angsuran dapat dilakukan berupa Penjualan Barang Milik Daerah seperti Kendaraan Perorangan Dinas yang dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Wali Kota. Pembayaran penjualan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas tanpa melalui lelang kepada:

- 1) Pejabat Daerah/mantan Pejabat Daerah, harus dibayar sekaligus;
- 2) pegawai ASN, anggota TNI, atau anggota Polri, dapat dibayar secara angsuran paling lama 2 (dua) tahun. Pembayaran dilakukan melalui penyetoran ke RKUD:
 - a) paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal berlakunya surat persetujuan penjualan, untuk pembayaran sekaligus;
 - b) sesuai mekanisme yang diatur dalam perjanjian antara Pengguna Barang dengan pegawai ASN, anggota TNI, atau anggota Polri, yang membeli, untuk pembayaran secara angsuran.

4.13.1.2 Pengakuan

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan kendaraan perorangan dinas kepada kepala daerah dan penjualan rumah golongan III.

4.13.1.3 Pengukuran

Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

4.13.1.4 Penyajian dan Pengungkapan

“Tagihan Penjualan Angsuran” disajikan dalam neraca sebagai bagian dari “Aset Lainnya”.

Pengungkapan “Tagihan Penjualan Angsuran” dalam CaLK sekurang-kurangnya harus mengungkapkan:

- a) Besaran dan rincian Tagihan Penjualan Angsuran
- b) Informasi lainnya yang penting

4.13.2 Tuntutan Ganti Rugi

4.13.2.1 Definisi

Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Terdapat 3 (tiga) sebab kerugian yang dapat terjadi, yaitu:

- a) Kerugian Daerah yang Disebabkan oleh Bendahara Undang-Undang Perbendaharaan Negara secara tegas mengatakan bahwa setiap kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus diganti oleh pihak yang bersalah. Dengan adanya penyelesaian kerugian tersebut, Negara dapat dipulihkan dari kerugian yang telah terjadi. Sehubungan dengan itu, setiap pimpinan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib segera melakukan tuntutan ganti rugi setelah mengetahui bahwa dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan terjadi kerugian.

Pengenaan ganti kerugian daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, sedangkan pengenaan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara ditetapkan oleh Wali Kota. Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, dan pejabat lain yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian daerah dapat dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana apabila terbukti melakukan pelanggaran administratif dan/atau pidana.

- b) Kerugian Daerah yang Disebabkan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara
Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas kerugian yang diderita oleh daerah

sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum atau kelalaian yang dilakukan oleh pegawai tersebut dalam melakukan kewajibannya.

- c) Kerugian Daerah berdasarkan Putusan Pengadilan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 menyatakan bahwa apabila dalam pemeriksaan kerugian daerah sebagaimana ditemukan unsur pidana, Badan Pemeriksa Keuangan menindaklanjutinya sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 terdakwa tindak pidana korupsi dapat dipidana, denda, dapat dikenakan pidana tambahan berupa uang pengganti. Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya, secara langsung merugikan keuangan daerah wajib mengganti kerugian tersebut dan setiap pimpinan kepala satuan kerja dapat segera melakukan tuntutan ganti rugi setelah mengetahui bahwa dalam satuan kerja terjadi kerugian akibat perbuatan manapun.

Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dilakukan terhadap pegawai negeri bendahara/bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan kerugian daerah yang penyelesaian tagihannya di atas 12 bulan.

4.13.2.2 Pengakuan

1. Kerugian Daerah yang Disebabkan oleh Bendahara Pengakuan atas kejadian yang mengakibatkan terjadinya kerugian Daerah yang disebabkan oleh Bendahara diakui di neraca menjadi Piutang Tuntutan Perbendaharaan pada saat terbit Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atau Surat Keputusan Pembebanan dari BPK.
2. Kerugian Daerah yang Disebabkan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara
3. Pengakuan atas kejadian yang mengakibatkan terjadinya kerugian Daerah yang disebabkan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara diakui pada saat terbit SKTJM atau Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) dan/atau Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K).
4. Kerugian Daerah berdasarkan Putusan Pengadilan
Suatu peristiwa yang mengakibatkan terjadinya kerugian Daerah berdasarkan putusan pengadilan diakui pada saat terbit keputusan pengadilan yang perkara yang berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht*).

4.13.2.3 Pengukuran

1. Kerugian Daerah yang Disebabkan oleh Bendahara
Pengukuran nilai kerugian daerah yang disebabkan oleh Bendahara diukur sebesar Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atau Surat Keputusan Pembebanan dari BPK.
2. Kerugian Daerah yang Disebabkan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara
Pengukuran nilai kerugian Daerah yang berasal dari kerugian Daerah karena pegawai bukan bendahara diukur sebesar SKTJM atau Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) dan/atau Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K)
3. Kerugian Daerah berdasarkan Putusan Pengadilan Pengukuran nilai kerugian Daerah yang berasal dari kerugian Daerah karena putusan pengadilan sebesar nilai yang tertera dalam putusan pengadilan yang perkara yang berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht*).

4.13.2.4 Penyajian dan Pengungkapan

Tuntutan ganti rugi disajikan dalam neraca sebagai aset lainnya.

Pengungkapan kerugian Daerah pada CaLK antara lain:

1. Kebijakan akuntansi kerugian Daerah.
2. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan dalam CaLK. Informasi dimaksud dapat berupa:
 - (1) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran tagihan TGR;
 - (2) Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
 - (3) Penjelasan atas penyelesaian piutang, masih di daerah atau telah diserahkan penagihannya ke PUPN;

- (4) Tuntutan ganti rugi/perbendaharaan yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan.
3. Dalam hal terdapat barang/uang yang disita oleh Daerah sebagai jaminan maka hal ini wajib diungkapkan.

4.13.3 Kemitraan dengan Pihak Ketiga

4.13.3.1 Definisi

Berikut adalah beberapa definisi tentang kemitraan dengan pihak ketiga:

1. Aset Kerjasama/Kemitraan adalah aset tetap yang dibangun atau digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan kerjasama/kemitraan.
2. Bangun, Guna, Serah - BGS (*Build, Operate, Transfer* - BOT), adalah pemanfaatan tanah milik Pemerintah Daerah oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya tanah beserta bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, diserahkan kembali kepada pengelola barang setelah berakhirnya jangka waktu kerjasama BGS.
3. Bangun, Serah, Guna- BSG (*Build, Transfer, Operate* - BTO) adalah pemanfaatan tanah milik pemerintah oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada pengelola barang untuk kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut selama jangka waktu tertentu yang disepakati.
4. Kerjasama Pemanfaatan (KSP) adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan Daerah dan sumber pembiayaan lainnya.
5. Masa kerjasama/kemitraan adalah jangka waktu dimana Pemerintah Daerah dan mitra kerjasama masih terikat dengan perjanjian kerjasama/kemitraan.

4.13.3.2 Pengakuan

Beberapa hal yang harus diperhatikan terkait dengan pengakuan kemitraan dengan pihak ketiga adalah sebagai berikut:

1. Aset Kerjasama/Kemitraan diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/ kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset kerjasama/kemitraan.
2. Aset Kerjasama/Kemitraan berupa Gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dalam rangka kerja sama Bangun Guna Serah (BGS), diakui pada saat pengadaan/pembangunan Gedung dan/atau Sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan.
3. Dalam rangka kerja sama pola Bangun Serah Guna (BSG)/*Build Transfer Operate* (BTO), harus diakui adanya Utang Kemitraan dengan Pihak Ketiga, yaitu sebesar nilai aset yang dibangun oleh mitra dan telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah pada saat proses pembangunan selesai.
4. Setelah masa perjanjian kerjasama berakhir, aset kerjasama/kemitraan harus diaudit oleh aparat pengawas fungsional sebelum diserahkan kepada Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang.
5. Penyerahan kembali objek kerjasama beserta fasilitasnya kepada Pengelola Barang dilaksanakan setelah berakhirnya perjanjian dituangkan dalam berita acara serah terima barang.
6. Setelah masa pemanfaatan berakhir, tanah serta bangunan dan fasilitas hasil kerjasama/kemitraan ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang.
7. Klasifikasi aset hasil kerjasama/kemitraan berubah dari "Aset Lainnya" menjadi "Aset Tetap" sesuai jenisnya setelah berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang.

4.13.3.3 Pengukuran

Aset yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah untuk diusahakan dalam perjanjian kerjasama/kemitraan harus dicatat sebagai aset kerjasama/ kemitraan sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.

Dana yang ditanamkan Pemerintah Daerah dalam Kerjasama/Kemitraan dicatat sebagai penyertaan Kerjasama/Kemitraan. Di sisi lain, investor mencatat dana yang diterima ini sebagai kewajiban.

Aset hasil kerjasama yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah setelah berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan status penggunaannya, dicatat sebesar nilai bersih yang tercatat atau sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diserahkan, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.

4.13.3.4 Penyajian dan Pengungkapan

Aset kerjasama/kemitraan disajikan dalam neraca sebagai aset lainnya.

Dalam hal sebagian dari luas aset kemitraan (tanah dan atau gedung/bangunan), sesuai perjanjian, digunakan untuk kegiatan operasional SKPD, maka harus diungkapkan dalam CaLK.

Aset kerjasama/kemitraan selain tanah harus dilakukan penyusutan selama masa kerja sama. Masa penyusutan aset kemitraan dalam rangka BGS melanjutkan masa penyusutan aset sebelum direklasifikasi menjadi aset kemitraan. Masa penyusutan aset kemitraan dalam rangka BSG adalah selama masa kerjasama.

Atas kemitraan dengan pihak ketiga, CaLK setidaknya memuat informasi sebagai berikut:

1. Klasifikasi aset yang membentuk aset kerjasama.
2. Penentuan biaya perolehan aset kerjasama/kemitraan.
3. Penentuan depresiasi/penyusutan aset kerjasama/kemitraan.

Setelah aset diserahkan dan ditetapkan penggunaannya, aset hasil kerjasama disajikan dalam neraca dalam klasifikasi aset tetap.

4.13.4 Aset Tak Berwujud

4.13.4.1 Definisi

Aset Tak Berwujud (ATB) adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas.

4.13.5.1.1 Kriteria Aset Tak Berwujud

Definisi ATB mensyaratkan bahwa ATB harus memenuhi kriteria dapat diidentifikasi, dikendalikan oleh entitas, dan mempunyai potensi manfaat ekonomi masa depan. Masing-masing unsur tersebut diuraikan di bawah ini.

1. Aset non-moneter yang dapat diidentifikasi

Yang dimaksud dengan kriteria ini adalah:

- a. Dapat dipisahkan, artinya aset ini memungkinkan untuk dipisahkan atau dibedakan secara jelas dari aset-aset yang lain pada suatu entitas. Oleh karena aset ini dapat dipisahkan atau dibedakan dengan aset yang lain, maka ATB dapat dijual, dipindahtangankan, diberikan lisensi, disewakan, ditukarkan, baik secara individual maupun secara bersama-sama.
- b. Timbul dari kesepakatan yang mengikat, seperti hak kontraktual atau hak hukum lainnya, tanpa memperhatikan apakah hak tersebut dapat dipindahtangankan atau dipisahkan dari entitas atau dari hak dan kewajiban lainnya.

2. Dikendalikan oleh entitas Pemerintah Daerah

Pengendalian merupakan syarat yang harus dipenuhi. Tanpa adanya kemampuan untuk mengendalikan aset maka sumber daya dimaksud tidak dapat diakui sebagai aset suatu entitas. Suatu entitas disebut "mengendalikan aset" jika entitas memiliki kemampuan untuk memperoleh manfaat ekonomi masa depan yang timbul dari aset tersebut dan dapat membatasi akses pihak lain dalam memperoleh manfaat ekonomi dari aset tersebut. Kemampuan untuk mengendalikan aset ini pada umumnya didasarkan pada dokumen hukum yang sah dari lembaga yang berwenang, namun demikian dokumen hukum ini bukanlah sebagai suatu prasyarat yang wajib dipenuhi karena mungkin masih terdapat cara lain yang digunakan entitas untuk mengendalikan hak tersebut.

3. Mempunyai potensi manfaat ekonomi masa depan Manfaat ekonomis dapat menghasilkan aliran masuk atas kas, setara kas, barang, atau jasa ke pemerintah. Jasa yang melekat pada aset dapat saja memberikan manfaat kepada pemerintah dalam bentuk selain kas atau barang, misalnya dalam meningkatkan pelayanan publik sebagai salah satu tujuan utama pemerintah atau peningkatan efisiensi pelaksanaan suatu kegiatan pemerintah.

4.13.4.1.2 Jenis-jenis Aset Tak Berwujud

ATB yang dimiliki dan/atau dikuasai pemerintah dapat dibedakan berdasarkan jenis sumber daya, cara perolehan, dan masa manfaat.

Berdasarkan jenis sumber daya, ATB pemerintah dapat berupa:

1. Software komputer
yang dapat disimpan dalam berbagai media penyimpanan seperti *flash disk*, *compact disk*, disket, pita, dan media penyimpanan lainnya. Software komputer yang masuk dalam kategori ATB adalah software yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari hardware komputer tertentu. Jadi software ini dapat digunakan di komputer lain. Oleh karena itu software komputer sepanjang memenuhi definisi dan kriteria pengakuan merupakan ATB.
2. Lisensi dan *franchise*
Lisensi dapat diartikan memberi izin. Pemberian lisensi dilakukan jika ada pihak yang memberi lisensi dan pihak yang menerima lisensi, melalui sebuah perjanjian. Dapat juga merupakan pemberian izin dari pemilik barang/jasa kepada pihak yang menerima lisensi untuk menggunakan barang atau jasa yang dilisensikan. *Franchise* merupakan perikatan dimana salah satu pihak diberikan hak memanfaatkan dan atau menggunakan hak dari kekayaan intelektual (HAKI) atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak lain tersebut dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang dan jasa.
3. Hak Paten dan Hak Cipta
Hak Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil Invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. (UU No 14 Tahun 2001, Pasal 1, ayat 1).
Hak cipta adalah hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi tertentu. Hak cipta merupakan "hak untuk menyalin suatu ciptaan". Hak cipta memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi penggandaan tidak sah atas suatu ciptaan. Pada umumnya, hak cipta memiliki masa berlaku tertentu yang terbatas. Hak cipta berlaku pada berbagai jenis karya seni atau karya cipta atau ciptaan.
Hak-hak tersebut pada dasarnya diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan intelektual, pengetahuan teknis, suatu cipta karya yang dapat menghasilkan manfaat bagi entitas. Hak ini dapat mengendalikan pemanfaatan aset tersebut dan membatasi pihak lain yang tidak berhak untuk memanfaatkannya. Oleh karena itu Hak Paten dan Hak Cipta sepanjang memenuhi definisi dan kriteria pengakuan merupakan ATB.
4. Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang
Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial di masa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset. Apabila hasil kajian tidak dapat diidentifikasi dan tidak memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial maka tidak dapat diakui sebagai ATB.
5. ATB yang mempunyai nilai sejarah/budaya
Film dokumenter, misalkan, dibuat untuk mendapatkan kembali naskah kuno/alur sejarah/rekaman peristiwa lalu yang pada dasarnya mempunyai manfaat ataupun

nilai bagi pemerintah maupun masyarakat. Hal ini berarti film tersebut mengandung nilai tertentu yang dapat mempunyai manfaat di masa depan bagi pemerintah. Film/Karya Seni/Budaya dapat dikategorikan dalam heritage ATB.

6. ATB dalam Pengerjaan

Suatu kegiatan perolehan ATB dalam pemerintahan, khususnya yang diperoleh secara internal, sebelum selesai dikerjakan dan menjadi ATB, belum memenuhi salah satu kriteria pengakuan aset yaitu digunakan untuk operasional pemerintah. Namun dalam hal ini seperti juga aset tetap, aset ini nantinya juga diniatkan untuk digunakan dalam pelaksanaan operasional pemerintahan, sehingga dapat diakui sebagai bagian dari ATB.

Berdasarkan cara perolehan, ATB dapat berasal dari:

1. Pembelian

Pembelian ATB dapat dilakukan secara terpisah (individual) maupun secara gabungan. Hal ini akan berpengaruh pada identifikasi ATB serta pengukuran biaya perolehan.

2. Pengembangan secara internal

ATB dapat diperoleh melalui kegiatan pengembangan yang dilakukan secara internal oleh suatu entitas. Perolehan dengan cara demikian akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan tentang identifikasi kegiatan yang masuk lingkup riset serta kegiatankegiatan yang masuk lingkup pengembangan yang memenuhi definisi dan kriteria pengakuan ATB sehingga dapat dikapitalisasi menjadi harga perolehan ATB.

3. Pertukaran

ATB dapat diperoleh melalui pertukaran dengan aset yang dimiliki oleh suatu entitas lain.

4. Kerjasama

Pengembangan suatu ATB yang memenuhi definisi dan kriteria pengakuan dapat dilakukan melalui kerjasama oleh dua entitas atau lebih. Hak dan kewajiban masing-masing entitas harus dituangkan dalam suatu perjanjian, termasuk hak kepemilikan atas ATB yang dihasilkan. Entitas yang berhak sesuai ketentuan yang akan mengakui kepemilikan ATB yang dihasilkan, sementara entitas yang lain cukup mengungkapkan hak dan kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya atas ATB tersebut.

5. Donasi/hibah

ATB, dapat berasal dari donasi atau hibah, misalnya suatu perusahaan software memberikan software kepada suatu instansi pemerintah untuk digunakan tanpa adanya imbalan yang harus diberikan.

6. Warisan Budaya/Sejarah (*intangible heritage assets*). Pemerintah dapat memiliki ATB yang berasal dari warisan sejarah, budaya, atau lingkungan masa lalu. Aset ini pada umumnya dipegang oleh instansi pemerintah dengan maksud tidak semata-mata untuk menghasilkan pendapatan, namun ada alasan-alasan lain kenapa aset ini dipegang oleh pemerintah, misalnya karena mempunyai nilai sejarah dan untuk mencegah penyalahgunaan hak atas aset ini oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Suatu entitas harus mengidentifikasi dan mengakui aset warisan ini sebagai ATB jika definisi dan kriteria pengakuan atas ATB telah terpenuhi.

Berdasarkan masa manfaat, ATB dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. TB dengan umur manfaat terbatas (*finite life*)

Umur manfaat ATB dalam kelompok ini dapat dibatasi dari umur atau banyaknya unit produk yang dihasilkan, yang didasarkan pada harapan entitas untuk menggunakan aset tersebut, atau faktor hukum atau faktor ekonomis mana yang lebih pendek.

2. ATB dengan umur manfaat yang tak terbatas (*indefinite life*)

Dari berbagai faktor relevan yang ada, ATB tertentu diyakini tidak mempunyai batas-batas periode untuk memberikan manfaat kepada entitas. Oleh karena itu, atas ATB

yang mempunyai umur manfaat yang tak terbatas, harus dilakukan revaluasi secara berkala untuk melihat kemampuan aset tersebut dalam memberikan manfaat.

4.13.4.2 Pengakuan

Untuk dapat diakui sebagai Aset Tak Berwujud maka suatu entitas harus dapat membuktikan bahwa aktivitas/kegiatan tersebut telah memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Definisi ATB;
2. Kriteria pengakuan.

Persyaratan pengakuan tersebut berlaku untuk pengeluaran pada saat pengakuan awal dan pengeluaran biaya setelah pengakuan awal. Pada pengakuan awal ATB akan diakui sebesar biaya perolehan untuk ATB yang berasal dari transaksi pertukaran atau untuk ATB yang dihasilkan dari internal entitas. Nilai wajar digunakan untuk ATB yang diperoleh melalui transaksi bukan pertukaran. Pengeluaran setelah pengakuan awal diakui sebesar biaya yang dikeluarkan untuk menambah dan mengganti ATB yang memenuhi kriteria pengakuan ATB.

4.12.5.2.1 Pengakuan Aset Tak Berwujud Yang Diperoleh Secara Internal Untuk menentukan apakah perolehan internal ATB memenuhi kriteria untuk pengakuan, perolehan ATB dikelompokkan dalam 2 tahap, yaitu:

1. Tahap penelitian atau riset

Pengeluaran untuk kegiatan penelitian/riset (atau tahap penelitian/ riset dari aktivitas internal) tidak dapat diakui sebagai ATB. Pengeluaran-pengeluaran tersebut harus diakui sebagai beban pada saat terjadi. Dalam tahap ini, pemerintah tidak/belum dapat membuktikan bahwa ATB telah ada dan akan menghasilkan manfaat ekonomi masa datang. Oleh karenanya, pengeluaran ini diakui sebagai beban biaya pada saat terjadi.

Contoh-contoh dari kegiatan penelitian/riset adalah:

- a. Kegiatan/aktivitas yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan baru (*new knowledge*);
- b. Pencarian, evaluasi dan seleksi akhir untuk penerapan atas penemuan penelitian;
- c. pengetahuan lainnya;
- d. Pencarian alternatif bahan baku, peralatan, produk, proses, sistem ataupun layanan;
- e. Formula/rumus, rancangan, evaluasi dan seleksi akhir atas alternatif yang tersedia untuk peningkatan material, peralatan, produk, proses, sistem dan layanan yang baru atau yang diperbaiki.

2. Tahap pengembangan

ATB yang timbul dari pengembangan (atau dari tahapan pengembangan satu kegiatan internal) harus diakui jika, dan hanya jika, pemerintah dapat memperlihatkan seluruh kondisi dibawah ini, yaitu adanya:

- a. Kelayakan teknis atas penyelesaian ATB sehingga dapat tersedia untuk digunakan atau dimanfaatkan;
- b. Keinginan untuk menyelesaikan dan menggunakan atau memanfaatkan ATB tersebut;
- c. Kemampuan untuk menggunakan dan memanfaatkan ATB tersebut;
- d. Manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa datang;
- e. Ketersediaan sumber daya teknis, keuangan, dan sumber daya lainnya yang cukup untuk menyelesaikan pengembangan dan penggunaan atau pemanfaatan ATB tersebut;
- f. Kemampuan untuk mengukur secara memadai pengeluaran-pengeluaran yang diatribusikan ke ATB selama masa pengembangan.

Contoh aktivitas-aktivitas pada tahap pengembangan adalah:

- (a) Desain, konstruksi dan percobaan sebelum proses produksi prototipe atau model;
- (b) Desain, konstruksi dan pengoperasian kegiatan percobaan proses produksi yang belum berjalan pada skala ekonomis yang menguntungkan untuk produksi komersial;
- (c) Desain, konstruksi dan percobaan beberapa alternatif pilihan, untuk bahan, peralatan, produk, proses, sistem atau pelayanan yang sifatnya baru atau sedang dikembangkan.

4.13.4.2.2 Penelitian dibiayai instansi lain

Sesuai dengan konsep belanja dalam pemerintahan dan konsep entitas maka entitas yang memiliki anggaran adalah yang berhak mencatat aset apabila dari belanja yang dikeluarkan dari anggaran tersebut menghasilkan ATB walaupun penelitiannya dilakukan oleh lembaga lain.

Namun demikian instansi pemerintah yang memberikan dana tidak dapat serta merta mengakui ATB tersebut, kecuali jika memenuhi karakteristik ATB dan memenuhi kriteria pengakuan. ATB yang berasal dari Penelitian dan Pengembangan harus sesuai dengan kriteria pengakuan ATB dan memenuhi kondisi pengakuan untuk biaya pada tahap pengembangan, bukan biaya dalam tahap penelitian.

Jika pemerintah tidak dapat membedakan tahap penelitian/riset dengan tahap pengembangan atas aktivitas/kegiatan internal untuk menghasilkan ATB, pemerintah harus memperlakukan seluruh pengeluaran atas aktivitas/ kegiatan tersebut sebagai pengeluaran dalam tahap penelitian/riset.

4.13.4.2.3 Perlakuan Untuk Hak Paten

Hak Paten adalah salah satu jenis ATB yang kemungkinan dapat dimiliki oleh Pemerintah yang perolehannya dapat berasal dari hasil kajian dan pengembangan atas penelitian yang dilakukan pemerintah atau pendaftaran atas suatu kekayaan/warisan budaya/sejarah yang dimiliki.

Hak Paten yang diperoleh untuk melindungi kekayaan/warisan budaya/sejarah, maka atas aset ini secara umum diakui pada saat dokumen hukum yang sah atas Hak Paten tersebut telah diperoleh. Namun untuk mengantisipasi lamanya jangka waktu terbitnya dokumen tersebut, maka entitas dapat mengakui sebagai Hak Paten terlebih dahulu dengan nilai sebesar biaya pendaftarannya, kemudian memberikan penjelasan yang memadai dalam CaLK.

Dalam praktik selama ini di terdapat beberapa perlakuan pencatatan terhadap Hak Paten dari hasil kajian/pengembangan yang memerlukan perlakuan khusus. Untuk Hak Paten yang masih dalam proses pendaftaran dan dokumen sumber belum terbit, maka entitas dapat mengakui sebagai Hak Paten terlebih dahulu dengan nilai sebesar biaya pendaftaran ditambah nilai Hasil Kajian/ Pengembangan yang telah dikapitalisasi sebagai ATB, kemudian memberikan penjelasan yang memadai dalam CaLK.

4.13.4.2.4 Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan

Terdapat kemungkinan pengembangan suatu ATB yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai ATB dalam pengerjaan (*Intangible Asset-Work In Progress*), dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi Aset Tidak Berwujud yang bersangkutan.

4.13.4.3 Pengukuran

Beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan Aset Tak Berwujud adalah sebagai berikut:

4.13.4.3.1 Pengukuran pada saat perolehan

Secara umum, ATB pada awalnya diukur dengan harga perolehan, kecuali ketika ATB diperoleh dengan cara selain pertukaran diukur dengan nilai wajar.

1. Pengukuran aset tak berwujud yang diperoleh secara eksternal

a. Pembelian

Harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu ATB akan mencerminkan kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang diharapkan di masa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas tersebut. Dengan kata lain, entitas pemerintah mengharapkan adanya manfaat ekonomi ataupun jasa potensial yang mengalir masuk ke dalam entitas.

ATB yang diperoleh melalui pembelian dinilai berdasarkan biaya perolehan. Bila ATB diperoleh secara gabungan, harus dihitung nilai untuk masing-masing aset, yaitu dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

Biaya untuk memperoleh ATB dengan pembelian biasanya dapat diukur secara andal, khususnya bila berkenaan dengan pembelian melalui pertukaran kas atau aset keuangan lainnya.

Biaya untuk memperoleh ATB dengan pembelian terdiri dari:

- (1) Harga beli, termasuk biaya impor dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;
- (2) Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:
- (3) Biaya staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
- (4) Biaya profesional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
- (5) Biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik.

Contoh dari biaya yang bukan merupakan unsur ATB adalah:

- (1) Biaya untuk memperkenalkan produk atau jasa baru (termasuk biaya advertising dan promosi);
- (2) Biaya untuk melaksanakan operasi pada lokasi baru atau sehubungan dengan pemakai (user) baru atas suatu jasa (misalnya biaya pelatihan pegawai);
- (3) Biaya administrasi dan *overhead* umum lainnya.

Biaya-biaya perolehan ATB meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk menjadikan aset tersebut dalam kondisi siap untuk beroperasi seperti yang diinginkan oleh manajemen. Oleh karenanya, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menggunakan dan memanfaatkan ATB bukan merupakan bagian dari perolehan ATB.

4.13.4.3.2 Pertukaran

Perolehan ATB dari pertukaran aset yang dimiliki entitas dinilai sebesar nilai wajar dari aset yang diserahkan. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama sehingga pengukuran dinilai sebesar aset yang dipertukarkan ditambah dengan kas yang diserahkan.

4.13.4.3.3 Kerjasama

ATB dari hasil kerjasama antar dua entitas atau lebih disajikan berdasarkan biaya perolehannya dan dicatat pada entitas yang menerima ATB tersebut sesuai dengan perjanjian dan/atau peraturan yang berlaku.

4.13.4.3.4 Donasi/hibah

ATB yang diperoleh dari donasi/hibah harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Penyerahan ATB tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.

4.13.4.3.5 Pengembangan secara internal

ATB yang diperoleh dari pengembangan secara internal, misalnya hasil dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, nilai perolehannya diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak ditetapkan ATB tersebut memiliki masa manfaat di masa yang akan datang sampai dengan ATB tersebut telah selesai dikembangkan.

Pengeluaran atas unsur ATB yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban pada suatu periode tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan ATB periode berikutnya.

ATB yang dihasilkan dari pengembangan software komputer yang memerlukan tiga tahap sebagaimana dimaksud dalam Bab III Aspek Pengakuan mengenai perlakuan khusus untuk *software* komputer, maka tahap yang dapat dilakukan kapitalisasi adalah tahap pengembangan aplikasi, bila telah memenuhi kriteria dimaksud dikapitalisasi dan dinilai sebesar pengeluarannya.

4.13.4.3.6 Aset budaya/bersejarah tak berwujud (*intangible heritage assets*)

ATB yang berasal dari aset bersejarah (*heritage assets*) tidak diharuskan untuk disajikan di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Namun apabila ATB bersejarah tersebut didaftarkan untuk memperoleh hak paten maka hak patennya dicatat di neraca sebesar nilai pendaftarannya.

4.13.4.3.7 Pengukuran Setelah Perolehan

Sifat alamiah ATB, dalam banyak kasus, adalah tidak adanya penambahan nilai terhadap ATB tertentu atau penggantian dari sebagian ATB dimaksud. Oleh karena itu, kebanyakan pengeluaran setelah perolehan dari ATB mungkin dimaksudkan untuk memelihara manfaat ekonomi di masa datang atau jasa potensial yang terkandung dalam ATB dimaksud dan tidak lagi merupakan upaya untuk memenuhi definisi ATB dan kriteria pengakuannya. Dengan kata lain, seringkali sulit untuk mengatribusikan secara langsung pengeluaran setelah perolehan terhadap suatu ATB tertentu sehingga diperlakukan sebagai beban operasional suatu entitas. Namun demikian, apabila memang terdapat pengeluaran setelah perolehan yang dapat diatribusikan langsung terhadap ATB tertentu, maka pengeluaran tersebut dapat dikapitalisasi ke dalam nilai ATB dimaksud. Biaya yang telah dibebankan tidak dapat diakui sebagai ATB.

4.13.5.3.8 Amortisasi

Terhadap Aset Tak Berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas Aset Tak Berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Amortisasi adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap tidak berwujud yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Masa manfaat tersebut dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan, atau kontrak.

Nilai amortisasi untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap tidak berwujud dalam neraca dan beban amortisasi dalam laporan operasional.

Metode Amortisasi yang digunakan dipilih berdasarkan pola konsumsi manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dan diterapkan secara konsisten dari periode ke periode lainnya. Amortisasi yang dibebankan setiap periode disajikan dengan menyesuaikan

akun aset tidak berwujud dan akun diinvestasikan pada aset lainnya. Metode penyusutan yang digunakan yaitu dengan metode garis lurus.

Metode garis lurus merupakan metode yang paling umum digunakan dalam amortisasi. Berdasarkan metode garis lurus, amortisasi nilai aset tidak berwujud dilakukan dengan mengalokasikan beban amortisasi secara merata selama masa manfaatnya.

Masa manfaat aset tidak berwujud yang dapat diamortisasi harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, amortisasi periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian. Masa manfaat untuk menghitung tarif amortisasi untuk masing-masing kelompok aset tidak berwujud adalah sebagai berikut:

MASA MANFAAT BARANG MILIK DAERAH BERUPA ASET TIDAK BERWUJUD

URAIAN	TAHUN
Lisensi	10
Franchise	5
Hak Cipta Atas Ciptaan Gol.I	70
Hak Cipta Atas Ciptaan Gol.II	50
Hak Cipta Karya Seni Terapan	25
Hak Paten Sederhana	10
Paten Biasa	20
Software Komputer	4
Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan	50
Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran	20
Merek	10
Desain Industri	10
Rahasia Dagang	10
Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25

4.13.4.3.9 Penghentian dan Pelepasan

ATB diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam mendukung kegiatan operasional pemerintah. Namun demikian, pada saatnya suatu ATB harus dihentikan dari penggunaannya. Beberapa keadaan dan alasan penghentian ATB antara lain adalah penjualan, pertukaran, hibah, atau berakhirnya masa manfaat ATB sehingga perlu diganti dengan yang baru. Secara umum, penghentian ATB dilakukan pada saat dilepaskan atau ATB tersebut tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Pelepasan aset tak berwujud mengikuti ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pengelolaan Barang Milik Daerah.

Apabila suatu ATB tidak dapat digunakan karena ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak, atau masa kegunaannya telah berakhir, maka ATB tersebut hakekatnya tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan, sehingga penggunaannya harus dihentikan. Apabila suatu ATB dihentikan dari penggunaannya, baik karena dipindahtangankan maupun karena berakhirnya masa

manfaat/tidak lagi memiliki manfaat ekonomi, maka pencatatan akun ATB yang bersangkutan harus dihentikan dan diproses penghapusannya. Entitas dapat mengajukan proses penghapusan ATB sesuai dengan ketentuan berlaku. Pada saat penghapusan, ATB dihentikan dari pencatatan dan diakui kerugian penghapusan ATB sebesar nilai tercatat neto.

Dalam hal penghentian ATB merupakan akibat dari pemindahtanganan dengan cara dijual atau dipertukarkan sehingga pada saat terjadinya transaksi belum seluruh nilai buku ATB yang bersangkutan habis diamortisasi, maka selisih antara harga jual atau harga pertukarannya dengan nilai buku ATB terkait diperlakukan sebagai kerugian atau keuntungan non operasional. Penerimaan kas dari penjualan dicatat dan dilaporkan sebagai pendapatan pada Laporan Realisasi Anggaran. Penghentian ATB harus diungkapkan dalam CaLK.

4.13.4.4 Penyajian dan Pengungkapan

Aset Tidak Berwujud disajikan dalam neraca sebagai bagian dari “Aset Lainnya”.

Amortisasi aset tidak berwujud dibebankan sebagai penambah beban kegiatan operasional. Penyajian beban amortisasi digabung pada pos beban penyusutan dalam Laporan Operasional.

Laporan keuangan harus mengungkapkan hal-hal untuk setiap golongan aset tak berwujud, dengan membedakan antara aset tak berwujud yang dihasilkan secara internal dan aset tak berwujud lainnya

4.13.5 Aset lain-lain

4.13.5.1 Definisi

Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran, tuntutan perbendaharaan, tuntutan ganti rugi, dan kemitraan dengan pihak ketiga. Dalam kebijakan ini yang dimaksud aset lain-lain adalah aset tetap yang diberhentikan penggunaan oleh pemerintah sehingga direklasifikasi menjadi aset lain-lain. Pemberhentian aset tetap dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, atau penyertaan modal).

4.13.5.2 Pengakuan

Pengakuan aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Daerah dan direklasifikasi ke dalam aset lain-lain.

4.13.5.3 Pengukuran

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain menurut nilai tercatatnya. Aset lain-lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap disusutkan mengikuti kebijakan penyusutan aset tetap. Proses penghapusan terhadap aset lainlain dilakukan paling lama 12 bulan sejak direklasifikasi kecuali ditentukan lain menurut ketentuan perundangundangan.

4.13.5.4 Penyajian dan Pengungkapan

Aset Lain-lain disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dalam neraca dan diungkapkan secara memadai di dalam CaLK.

Hal-hal yang perlu diungkapkan antara lain adalah faktor-faktor yang menyebabkan dilakukannya penghentian penggunaan, jenis aset tetap yang dihentikan penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan.

4.13.6 Treasury Deposit Facility (TDF)

4.13.6.1 Definisi

Treasury Deposit Facility yang selanjutnya disingkat TDF adalah fasilitas yang disediakan oleh bendahara umum negara bagi Pemerintah Daerah untuk menyimpan uang di bendahara umum negara sebagai bentuk penyaluran transfer ke daerah nontunai berupa penyimpanan di Bank Indonesia. Penyaluran melalui fasilitas TDF ini terdiri atas DBH dan/atau DAU yang tidak ditentukan penggunaannya (blockgrant) serta termasuk DBH Kurang Bayar.

Dana TDF diberikan remunerasi terhitung mulai tanggal penyimpanan dalam TDF pada Bank Indonesia. Persentase remunerasi atas dana TDF ditetapkan sebesar persentase remunerasi yang diterima Pemerintah dari Bank Indonesia.

4.13.6.2 Penyajian dan Pengungkapan

a) Penyaluran pokok Dana Bagi Hasil (DBH)/Dana Alokasi Umum melalui fasilitas TDF

Dalam hal pokok DBH/DAU telah disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening TDF, Pemerintah Daerah mencatat Aset Lainnya (Neraca) pada Pendapatan Transfer-Dana Transfer Umum DBH/DAU (Laporan Operasional).

Dalam hal pokok DBH/DAU telah dilakukan penarikan oleh Pemerintah Daerah dari Rekening TDF dan telah disalurkan ke RKUD, Pemerintah Daerah mencatat sebagai Kas di Kas Daerah pada Aset Lainnya dan mengakui pendapatan dengan mencatat Estimasi Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada Pendapatan Transfer-Dana Transfer Umum DBH/DAU (LRA)

b) Penyaluran Remunerasi DBH/DAU melalui Fasilitas TDF

Dalam hal Bank Indonesia telah memberikan remunerasi atas DBH/DAU yang dibayarkan melalui fasilitas TDF dengan skema transfer ke RKUN, namun belum ditarik dan ditransfer ke RKUD, maka Pemerintah Daerah mencatat sebagai Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah atau akun sejenis (LO).

Dalam hal remunerasi atas DBH/DAU yang dibayarkan melalui fasilitas TDF telah disalurkan dari RKUN ke RKUD, Pemerintah Daerah mencatat sebagai Kas di Kas Daerah pada Piutang Lain-Lain PAD yang Sah (Neraca) dan mengakui pendapatan dengan mencatat Estimasi Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada Pendapatan Bunga Lain-Lain PAD yang Sah atau akun sejenis (LRA).

4.14 Kebijakan Akuntansi Kewajiban

4.14.1 Definisi

Mengacu pada PSAP Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan paragraf 8, kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban Pemerintah Daerah dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan waktu jatuh temponya, kewajiban dibagi menjadi dua yaitu kewajiban jangka panjang dan kewajiban jangka pendek.

1) Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek adalah kewajiban yang jatuh temponya kurang dari 12 (dua belas) bulan. Kewajiban jangka pendek di SKPKD terdiri dari utang bunga, bagian lancar utang jangka panjang, utang beban, dan utang jangka pendek lainnya. Sedangkan kewajiban jangka pendek di SKPD terdiri dari utang perhitungan pihak ketiga (PFK), pendapatan diterima dimuka, utang beban dan utang jangka pendek lainnya.

2) Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban Jangka Panjang adalah utang atau kewajiban yang jatuh temponya lebih dari 12 (dua belas) bulan. Disamping itu kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 bulan dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban panjang jika:

- Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 bulan
- Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang
- Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum pelaporan keuangan disetujui.

Kewajiban jangka panjang di Pemerintah Daerah hanya terdapat pada SKPKD. Adapun kewajiban jangka panjang di SKPKD yaitu utang dalam negeri, utang luar negeri dan utang jangka panjang lainnya.

4.14.2 Pengakuan

Secara umum kewajiban Pemerintah Daerah diakui pada saat:

- 1) Dana pinjaman diterima oleh pemerintah; atau
- 2) Dana pinjaman dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan pemerintah daerah; atau
- 3) Pada saat kewajiban timbul

Pengakuan Kewajiban Pemerintah Daerah:

1) Utang Jangka Pendek

a) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang PFK diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh BUD atau bendahara pengeluaran SKPD atas pengeluaran dari kas daerah untuk pembayaran tertentu.

b) Utang Belanja/Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada pihak ketiga diakui pada saat terdapat klaim yang sah dari pihak ketiga, yang biasanya dinyatakan dalam bentuk surat penagihan (*invoice*) kepada pemerintah terkait penerimaan barang/jasa yang belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah. Utang kepada pihak ketiga juga diakui apabila pada akhir tahun masih terdapat dana yang berasal dari SPM-LS kepada Bendahara Pengeluaran yang belum diserahkan kepada Pihak yang berhak.

Dalam transaksi pembelian jasa, utang diakui pada saat jasa/bagian jasa diserahkan sesuai perjanjian tetapi pada tanggal pelaporan belum dibayar. Dalam hal kontrak pembangunan fasilitas atau peralatan, utang diakui pada saat sebagian/seluruh fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/serah terima, tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

Utang Belanja Bagi Hasil dan Utang Belanja Bantuan Keuangan diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku.

c) Utang Bunga

Utang bunga, sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi dan belum dibayar, pada dasarnya berakumulasi seiring dengan berjalannya waktu, tetapi demi kepraktisan diakui pada setiap akhir periode pelaporan.

d) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Akun ini diakui pada saat melakukan reklasifikasi pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu (dua belas) bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali bagian lancar utang jangka panjang yang akan didanai kembali Termasuk dalam Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah utang jangka panjang yang persyaratan tertentu telah dilanggar sehingga kewajiban tersebut menjadi kewajiban jangka pendek (*payable on demand*).

e) Uang Muka dari Kas Umum Daerah

Uang muka dari kas daerah diakui pada saat bendahara pengeluaran menerima UP dari Kas Umum Daerah.

f) Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka dapat diakui dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan kewajiban atau pendekatan pendapatan. Pendapatan diterima dimuka diakui pada saat terdapat/timbul klaim pihak ketiga kepada pemerintah terkait kas yang telah diterima pemerintah dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang/jasa dari pemerintah pada akhir periode pelaporan keuangan.

g) Utang Luar Negeri

Utang Luar Negeri adalah salah satu instrumen yang diambil oleh Pemerintah Daerah dalam upaya menanggulangi defisit anggaran dan keperluan lain sesuai dengan rencana kerja dan keuangan Pemerintah Daerah yang terdiri dari:

(1) Utang Bunga dan Commitment Fee (Accrued Interest)

Utang bunga sebagai bagian dari kewajiban pokok utang berupa kewajiban bunga atau Commitment Fee yang telah terjadi dan belum dibayarkan, berakumulasi seiring berjalannya waktu, dan demi kepraktisan diakui setiap akhir periode pelaporan.

(2) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang merupakan bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca,

diakui saat melakukan reklasifikasi pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali bagian lancar utang jangka panjang yang akan didanai kembali sebagaimana dimaksud dalam PSAP 09 paragraf 14 Termasuk dalam Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah utang jangka panjang menurut PSAP 09 paragraf 17 yang persyaratan tertentu telah dilanggar sehingga kewajiban tersebut menjadi kewajiban jangka pendek (payable on demand)

2) Utang Jangka Panjang

a) Utang Dalam Negeri - Non Perbankan

(1) Obligasi

Utang Obligasi Daerah diakui pada saat kewajiban timbul yaitu pada saat terjadi transaksi penjualan.

Sehubungan dengan transaksi penjualan utang obligasi, bunga atas utang obligasi diakui sejak saat penerbitan utang obligasi tersebut, atau sejak tanggal pembayaran bunga terakhir, sampai saat terjadinya transaksi. Obligasi yang telah jatuh tempo tetapi belum dilunasi diakui sebagai kewajiban jangka pendek.

Penerbitan obligasi memerlukan biaya yang terkait dengan pencetakan dokumen, jasa konsultan, jasa hukum, dan jenis biaya lainnya. Jika dana yang diperoleh dari penerbitan obligasi digunakan untuk membangun aset tetap tertentu, maka biaya - biaya penerbitan obligasi dikapitalisasi dalam nilai aset tetap tersebut. Akan tetapi, jika tidak dapat diatribusikan pada aset tetap tertentu, maka biaya penerbitan tersebut diakui sebagai biaya ditangguhkan yang akan diamortisasi selama umur obligasi yang bersangkutan.

(2) Utang Pembelian Cicilan

Sehubungan dengan utang pembelian cicilan, baik yang mengandung bunga secara eksplisit maupun bunga secara tersamar, utang diakui ketika barang yang dibeli telah diserahkan kepada pembeli dan perjanjian utang selanjutnya secara legal telah mengikat para pihak, yaitu ketika perjanjian utang ditandatangani oleh pihak penjual yang sekaligus bertindak selaku kreditur dan pembeli yang juga menjadi debitur.

(3) Utang Jangka Panjang Lainnya

Utang kemitraan diakui pada saat aset diserahkan oleh pihak ketiga kepada pemerintah yang untuk selanjutnya akan dibayar sesuai perjanjian, misalnya secara angsuran.

b) Utang Dalam Negeri - Perbankan

Utang dalam negeri-perbankan diakui pada saat pinjaman dari lembaga perbankan diterima pada rekening kas daerah. Biaya-biaya terkait dengan pengurusan pinjaman diakui pada saat terutang yaitu pada saat timbulnya kewajiban berdasarkan kontrak atau kesepakatan.

c) Utang Luar Negeri

Utang luar negeri jangka panjang berasal dari pinjaman luar negeri yang bersumber dari:

- (1) Kredit multilateral
- (2) Kredit bilateral
- (3) Kredit swasta asing
- (4) Lembaga pinjaman kredit ekspor

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul.

4.14.3 Pengukuran

Secara umum, kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Apabila kewajiban tersebut dalam bentuk mata uang asing maka harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Penggunaan nilai nominal dalam pengukuran kewajiban ini berbeda untuk masing-masing pos mengikuti karakteristiknya. Pengukuran kewajiban atau utang jangka pendek Pemerintah Daerah berbeda-beda berdasarkan jenis investasinya. Berikut ini akan dijabarkan bagaimana pengukuran kewajiban untuk masing-masing jenis kewajiban jangka pendek.

1) Pengukuran Utang kepada Pihak Ketiga

Ketika Pemerintah Daerah menerima hak atas barang atau jasa, maka pada saat itu pemerintah daerah mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut.

2) Pengukuran Utang Bunga

Utang bunga atas utang Pemerintah Daerah dicatat sebesar nilai bunga yang telah terjadi dan belum dibayar dan diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

3) Pengukuran Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain di akhir periode harus dicatat sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

4) Pengukuran Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Bagian lancar utang jangka panjang dicatat sejumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

5) Pengukuran Kewajiban Lancar Lainnya

Pengukuran kewajiban lancar lainnya disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut.

Kewajiban atau utang jangka panjang Pemerintah Daerah juga diukur berdasarkan karakteristiknya. Terdapat dua karakteristik utang jangka panjang pemerintah daerah, yaitu:

1) Utang yang tidak diperjualbelikan

Utang yang tidak diperjualbelikan memiliki nilai nominal sebesar pokok utang dan bunga sebagaimana yang tertera dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan, misal pinjaman dari *World Bank*.

2) Utang yang diperjualbelikan

Utang yang diperjualbelikan pada umumnya berbentuk sekuritas utang pemerintah. Sekuritas utang pemerintah dinilai sebesar nilai pari (*original face value*) dengan memperhitungkan diskonto atau premium yang belum diamortisasi. Jika sekuritas utang pemerintah dijual tanpa sebesar nilai pari, maka dinilai sebesar nilai parinya. Jika sekuritas utang pemerintah dijual dengan harga diskonto, maka nilainya akan bertambah selama periode penjualan hingga jatuh tempo. Sementara itu, jika sekuritas dijual dengan harga premium, maka nilainya akan berkurang selama periode penjualan hingga jatuh tempo.

Pengukuran Kewajiban Pemerintah Daerah:

1) Utang Jangka Pendek

a) Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga dinilai sebesar kewajiban entitas pemerintah atas barang/jasa yang belum dibayar sesuai kesepakatan/perjanjian atau sebesar dana yang belum diserahkan kepada yang berhak. Dalam hal kesepakatan atau perjanjian menyebutkan syarat pembayaran (*terms of payment*) dengan diskon tertentu untuk pembayaran dalam jangka waktu tertentu (misalkan 2/10, n/30) maka nilai utang kepada pihak ketiga ditentukan sebesar jumlah utang dengan atau tanpa memperhitungkan diskon tergantung pada kebijakan akuntansi pembayaran utang yang ditetapkan.

Dalam hal pihak ketiga/kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan pemerintah, dan 4 sebagian/seluruh fasilitas atau peralatan tersebut telah diserahkan tetapi belum dibayar sampai dengan tanggal pelaporan, maka transaksi tersebut akan diakui sebagai utang kepada pihak ketiga sebesar jumlah yang belum dibayar.

b) Utang Bunga

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban bunga yang telah terjadi tetapi belum dibayar oleh pemerintah. Besaran kewajiban tersebut pada naskah perjanjian pinjaman biasanya dinyatakan dalam persentase dan periode tertentu yang telah disepakati oleh para pihak.

c) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban PFK yang sudah dipotong tetapi oleh BUN/BUD belum disetorkan kepada yang berkepentingan.

d) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Nilai yang dicantumkan di neraca untuk bagian lancar utang jangka panjang sebesar jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Dalam kasus kewajiban jangka pendek yang terjadi karena *payable on demand*, nilai yang dicantumkan di neraca adalah sebesar saldo utang jangka panjang beserta denda dan kewajiban lainnya yang harus ditanggung oleh peminjam sesuai perjanjian.

e) Uang Muka dari Kas Umum Daerah

Nilai yang dicantumkan di neraca sebesar saldo uang muka yang belum disetorkan/dipertanggungjawabkan ke kas daerah sampai dengan tanggal neraca.

f) Pendapatan Diterima Dimuka

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar bagian barang/jasa yang belum diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga sampai dengan tanggal neraca.

h) Utang Luar Negeri

a) Utang Bunga dan *Commitment Fee (Accrued Interest)*

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban bunga atau commitment fee yang telah terjadi tetapi belum dibayar oleh pemerintah. Besaran kewajiban tersebut pada naskah perjanjian pinjaman biasanya dinyatakan dalam persentase dan periode tertentu yang telah disepakati oleh para pihak.

b) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Nilai yang dicantumkan di neraca untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah sebesar jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Dalam kasus kewajiban jangka pendek yang terjadi karena payable on demand, nilai yang dicantumkan di neraca adalah sebesar saldo utang jangka panjang beserta denda dan kewajiban lainnya yang harus ditanggung oleh peminjam sesuai perjanjian.

2) Utang Jangka Panjang

a) Utang Dalam Negeri - Non Perbankan

(1) Obligasi

Utang Obligasi Daerah dicatat sebesar nilai nominal/ par, ditambah premium atau dikurangi diskon yang disajikan pada akun terpisah. Nilai nominal Utang Obligasi Daerah tersebut mencerminkan nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah dan merupakan nilai yang akan dibayar pemerintah pada saat jatuh tempo. Dalam hal utang obligasi yang pelunasannya diangsur, aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat (*carrying amount*) utang tersebut. Apabila surat utang obligasi dijual di bawah nilai par (dengan diskon), maupun di atas nilai par (dengan premium), maka nilai pokok utang tersebut adalah sebesar nilai nominalnya atau nilai jatuh temponya, sedangkan diskon atau premium dikapitalisasi untuk diamortisasi sepanjang masa berlakunya surat utang obligasi. Amortisasi premi atau diskonto dapat menggunakan metode garis lurus atau metode bunga efektif. Apabila surat utang obligasi diterbitkan dengan denominasi valuta asing, maka kewajiban tersebut perlu dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

(2) Utang Pembelian Cicilan

Utang pembelian cicilan, baik yang bunganya dinyatakan secara eksplisit maupun yang bunganya disamakan dalam bentuk cicilan anuitas, dicatat sebesar nilai nominal.

Khusus mengenai utang cicilan anuitas, setiap pelunasan harus dipecah menjadi unsur pelunasan pokok utang dan pelunasan bunga.

Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

(3) Utang Jangka Panjang Lainnya

Utang kemitraan diukur berdasarkan nilai yang disepakati dalam perjanjian kemitraan BSK sebesar nilai yang belum dibayar.

b) Utang Dalam Negeri - Perbankan

Jumlah utang yang tercantum dalam naskah perjanjian merupakan komitmen maksimum jumlah pendanaan yang disediakan oleh pemberi pinjaman. Penerima pinjaman belum tentu menarik seluruh jumlah pendanaan tersebut, sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca untuk utang dalam negeri-perbankan adalah sebesar jumlah dana yang telah ditarik oleh penerima pinjaman dan disetorkan ke kas daerah. Dalam perkembangan selanjutnya, pembayaran pokok pinjaman akan mengurangi jumlah utang sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca adalah sebesar total penarikan dikurangi dengan pelunasan.

c) Utang Luar Negeri

Utang dicatat sebesar nilai nominal. Utang dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada tanggal neraca. Nilai nominal atas utang mencerminkan nilai utang pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat utang tersebut.

4.14.4 Penyajian dan Pengungkapan

Kewajiban jangka pendek dan jangka panjang disajikan di bagian kewajiban dalam neraca. Selain itu, informasi mengenai kewajiban juga harus diungkapkan dalam CaLK Pemerintah Daerah.

Adapun hal-hal yang harus diungkapkan adalah sebagai berikut:

- 1) Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan (dirinci) berdasarkan pemberi pinjaman;
- 2) Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya;
- 3) Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;
- 4) Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;
- 5) Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:
 - a) Pengurangan pinjaman;
 - b) Modifikasi persyaratan utang;
 - c) Pengurangan tingkat bunga pinjaman;
 - d) Pengunduran jatuh tempo pinjaman;
 - e) Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan
 - f) Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.
- 6) Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur.
- 7) Biaya pinjaman:
 - a) Perlakuan biaya pinjaman;
 - b) Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan; dan
 - c) Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.

4.15 Kebijakan Akuntansi Ekuitas

4.15.1 Definisi

Mengacu pada PSAP Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan paragraf 8, ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Dalam akuntansi berbasis akrual, pemerintah daerah hanya menyajikan dua jenis pos Ekuitas, yaitu Ekuitas dan Ekuitas untuk Dikonsolidasikan. Ekuitas diklasifikasikan ke dalam:

- 1) Ekuitas Awal;
- 2) Surplus/Defisit LO;
- 3) Koreksi-koreksi yang menambah/mengurangi Ekuitas; dan
- 4) Ekuitas Akhir

Saldo akhir Ekuitas diperoleh dari perhitungan pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Sedangkan saldo pos Ekuitas untuk Dikonsolidasikan didapat dari transaksi timbal balik antara Entitas Pelaporan (PPKD) dengan Entitas Akuntansi (SKPD dan SKPKD) yang berupa akun Rekening Koran (R/K) pada masing-masing entitas.

Pada penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), pos Ekuitas untuk Dikonsolidasikan tidak muncul karena telah dilakukan eliminasi antara akun R/K PPKD dan akun R/K masing-masing SKPD pada saat proses konsolidasi antara entitas pelaporan dengan entitas akuntansi.

Ekuitas disajikan pada Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

4.15.2 Pengakuan

Pengakuan ekuitas berdasarkan saat pengakuan aset dan kewajiban.

4.15.3 Pengukuran

Pengukuran atas ekuitas berdasarkan pengukuran atas aset dan kewajiban.

4.14.4 Penyajian dan Pengungkapan

Saldo akhir ekuitas diperoleh dari perhitungan pada Laporan Perubahan Ekuitas. Ekuitas disajikan dalam Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, dan CaLK.

4.16 Kebijakan Akuntansi Pendapatan

4.16.1 Definisi

1) Pendapatan LO

Mengacu pada PSAP Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan paragraf 8, pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Hak pemerintah tersebut dapat diakui sebagai Pendapatan-LO apabila telah timbul hak pemerintah untuk menagih atas suatu pendapatan atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

2) Pendapatan-LRA

Mengacu pada PSAP Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan paragraf 8, pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pendapatan-LRA terdiri dari pendapatan-LRA untuk SKPKD dan pendapatan-LRA untuk SKPD. Pendapatan-LRA di SKPKD meliputi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, LainLain Pendapatan Daerah yang Sah, serta Pendapatan Non Operasional. Pendapatan-LRA di SKPD meliputi Pendapatan Asli Daerah.

4.16.2 Pengakuan

1) Pendapatan LO

Pendapatan-LO diakui pada saat hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Secara rinci, Pendapatan- LO diakui pada saat:

- a) Timbulnya hak atas pendapatan;
- b) Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan. Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh Pemerintah Daerah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan. Pengakuan pendapatan LO dapat terjadi di SKPKD dan SKPD

2) Pendapatan LRA

Pendapatan-LRA diakui pada saat penerimaan Rekening Kas Umum Daerah atau entitas lainnya di bawah pemerintah daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah yang mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a) Pendapatan kas yang telah diterima pada RKUD.
- b) Pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan yang sebagai pendapatan daerah dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD.
- c) Pendapatan kas yang diterima SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan daerah.
- d) Pendapatan kas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan daerah.
- e) Pendapatan kas yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

4.16.3 Pengukuran

1) Pendapatan LO

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal

besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

2) Pendapatan LRA

Akuntansi pendapatan-LRA Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang sifatnya berulang (*recurring*) dan terjadi pada tahun yang sama maupun tahun sebelumnya dilakukan dengan membebankan pada rekening penerimaan (Pendapatan) yang bersangkutan.

Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang sifatnya tidak berulang (*nonrecurring*) yang terjadi dalam tahun yang sama dilakukan dengan membebankan pada rekening penerimaan (pendapatan) yang bersangkutan. Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang sifatnya tidak berulang (*nonrecurring*) yang terjadi pada tahun sebelumnya dilakukan dengan membebankan pada rekening belanja tidak terduga.

4.16.4 Penyajian dan Pengungkapan

1) Pendapatan-LO

Pendapatan LO disajikan berdasarkan jenis pendapatan dalam laporan operasional dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan dalam CaLK. Berikut adalah contoh penyajian pendapatan LO dalam laporan operasional:

Hal-hal yang perlu diungkapkan dan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan mengenai Pendapatan-LO antara lain adalah sebagai berikut:

- a) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengakuan, pengukuran Pendapatan-LO;
- b) Rincian Pendapatan-LO.

2) Pendapatan LRA

Pendapatan disajikan berdasarkan jenis pendapatan dalam laporan realisasi anggaran dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan dalam CaLK. Penjelasan sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, sangat dianjurkan untuk diungkapkan dalam CaLK.

4.17 Kebijakan Akuntansi Beban dan Belanja

4.17.1 Beban

4.17.1 Beban

4.17.1.1 Definisi

PSAP Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan paragraf 8 mendefinisikan beban sebagai penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (menurut kelompok dan jenis beban) yang meliputi:

- a) Beban Operasi, terdiri atas:
 - (1) Beban Pegawai
 - (2) Beban Barang dan Jasa
 - (3) Beban Bunga
 - (4) Beban Subsidi
 - (5) Beban Hibah
 - (6) Beban Bantuan Sosial
- b) Beban Penyisihan Piutang
- c) Beban Penyusutan dan Amortisasi
- d) Beban Transfer

e) Beban Tak Terduga

4.17.1.2 Pengakuan

Beban diakui pada saat:

- a) Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat terdapat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contohnya adalah penyisihan piutang, penyusutan aset tetap, dan amortisasi aset tidak berwujud.

- b) Terjadinya konsumsi aset.

Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset dalam Pemerintah Daerah adalah saat terjadinya:

- (1) pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban; dan/atau
- (2) konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah.

Contohnya adalah pembayaran gaji pegawai, pembayaran perjalanan dinas, pembayaran hibah, pembayaran subsidi, dan penggunaan persediaan.

- c) Timbulnya kewajiban

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain kepada Pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari Kas Umum Daerah. Timbulnya kewajiban antara lain diakibatkan penerimaan manfaat ekonomi dari pihak lain yang belum dibayarkan. Contohnya adalah diterimanya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar Pemerintah Daerah.

4.17.1.3 Pengukuran

- a) Beban Pegawai

Beban pegawai dicatat sebesar nilai nominal yang terdapat dalam dokumen sumber seperti Dokumen Kepegawaian, Daftar Gaji, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang menjadi dasar pengeluaran Daerah kepada pegawai dimaksud.

- b) Beban Barang dan Jasa

- (1) Beban Persediaan

Beban persediaan dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen tagihan dari pihak ketiga.

- (2) Beban Jasa, Pemeliharaan, dan Perjalanan Dinas

Beban jasa, pemeliharaan dan perjalanan dinas dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen tagihan dari pihak ketiga yang telah mendapatkan persetujuan dari PA/KPA.

- c) Beban Bunga

Beban bunga dicatat sebesar nilai bunga yang telah terjadi atau jatuh tempo seiring dengan berjalannya waktu. Besaran beban bunga biasanya diukur sebagai besaran persentase tertentu atas pokok utang serta periode pembayaran bunga utang serta hal lain jika ada, sebagaimana dinyatakan dalam perjanjian pemberian utang yang telah disepakati sebelumnya. Pada prinsipnya metode pengukuran besaran pengenaan bunga biasanya tercakup pada pasal dalam naskah perjanjian pemberian pinjaman untuk mencegah dispute/perselisihan di kemudian hari.

- d) Beban Subsidi

Pengukuran beban subsidi didasarkan pada nilai nominal sesuai dengan dokumen tagihan yang diajukan pihak ketiga yang telah mendapatkan persetujuan dari pejabat perbendaharaan.

- e) Beban Hibah

Beban hibah dalam bentuk uang dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam nota perjanjian hibah. Beban hibah dalam bentuk barang/jasa dicatat sebesar nilai wajar barang/jasa tersebut saat terjadinya transaksi.

- f) Beban Bantuan Sosial

Beban bansos diukur sebesar nilai bantuan sosial berupa uang/barang/ jasa yang telah diserahkan kepada masyarakat penerima bansos.

Pemerintah Daerah dalam pengukuran Beban Bantuan Sosial perlu memperhatikan peraturan perundangundangan terkait dengan penyaluran Bantuan Sosial. Penyaluran Bantuan Sosial pada praktiknya sesuai peraturan teknis yang ditetapkan pemerintah dapat disalurkan langsung oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan kepada penerima bantuan sosial atau melalui lembaga penyalur yang ditetapkan pemerintah.

Apabila Bantuan Sosial disalurkan melalui lembaga penyalur kepada masyarakat, untuk mengukur nilai Beban Bantuan Sosial, maka Pemerintah Daerah harus mendapatkan informasi mengenai nilai yang telah disalurkan oleh Lembaga Penyalur kepada masyarakat. Nilai Beban Bantuan Sosial tersebut diukur hanya sebesar yang telah disalurkan oleh lembaga penyalur. Untuk Bantuan Sosial berupa uang yang belum disalurkan tersebut jika Pemerintah Daerah Pemerintah masih menguasai uang yang masih berada di lembaga penyalur, maka Pemerintah Daerah juga harus melaporkan kas tersebut dalam Neraca. Untuk Bansos dalam bentuk barang yang telah dikeluarkan namun belum diserahkan ke masyarakat akan diakui sebagai persediaan.

Persediaan yang berasal dari belanja bantuan sosial dalam bentuk barang dinilai dan disajikan sebesar:

- (1) biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
- (2) biaya standar apabila diproduksi sendiri;
- (3) nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Penyaluran Bantuan Sosial dapat menimbulkan kewajiban apabila Pemerintah Daerah pemerintah belum menyalurkan Bantuan Sosial yang sudah menjadi hak penerima bantuan sosial, dan penerima masih memiliki hak untuk memperoleh bantuan sosial tersebut pada periode berikutnya/masa mendatang.

g) Beban Penyisihan Piutang

Beban penyisihan piutang diakui berdasarkan hasil perhitungan melalui *aging schedule* piutang pada tanggal pelaporan.

Beban penyisihan piutang tak tertagih diukur berdasarkan nilai yang ada di *aging schedule* dibandingkan dengan saldo awal penyisihan piutang tak tertagih.

h) Beban Penyusutan dan Amortisasi

Pengukuran dan pencatatan beban penyusutan dan amortisasi dijelaskan dalam bagian Aset Tetap dan Aset Tak Berwujud.

i) Beban Transfer

Beban transfer diakui dan dicatat sebesar kas yang dikeluarkan dan jumlah kewajiban yang belum disalurkan. Nilai pengeluaran kas didasarkan pada penyaluran transfer yang dikeluarkan dari rekening kas umum daerah kepada rekening penerima. Selain itu, kurang bayar/salur merupakan bagian dari beban transfer yang diukur sebesar nilai yang seharusnya disalurkan sesuai ketentuan perundang-undangan.

j) Beban Tak Terduga

Beban tak terduga dicatat sebesar kas yang dikeluarkan dari Kas Umum Daerah.

Koreksi dan Penerimaan Kembali

Penerimaan kembali atas kelebihan beban/belanja yang sifatnya berulang (*recurring*) dan terjadi pada tahun yang sama maupun tahun sebelumnya dilakukan dengan mengurangkan pada rekening beban dan/atau belanja yang bersangkutan. Penerimaan kembali atas kelebihan beban/belanja yang sifatnya tidak berulang (*non recurring*) yang terjadi dalam tahun yang sama dilakukan dengan mengurangkan pada rekening beban dan/atau belanja yang bersangkutan.

4.17.1.3 Penyajian dan Pengungkapan

Beban disajikan dalam Laporan Operasional. Berikut adalah contoh penyajian beban dalam LO:

Penjelasan secara sistematis mengenai rincian, analisis dan informasi lainnya yang bersifat material harus diungkapkan dalam CaLK sehingga menghasilkan informasi yang andal dan relevan.

4.17.2 Belanja

4.17.2.1 Definisi

Menurut PSAP Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan paragraf 8, belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (menurut kelompok dan jenis beban) yang meliputi:

- a) Belanja Operasi, terdiri atas:
 - (1) Belanja Pegawai
 - (2) Belanja Barang dan Jasa
 - (3) Belanja Bunga
 - (4) Belanja Subsidi
 - (5) Belanja Hibah
 - (6) Belanja Bantuan Sosial
- b) Belanja Modal
- c) Belanja Tak Terduga
- d) Belanja Transfer

4.17.2.2 Pengakuan

Sesuai dengan paragraf 31 sampai 33 PSAP No. 02, pengakuan belanja dilakukan saat:

- a. terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah
- b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.
- c. Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai BLUD.
- d. Belanja yang tidak melalui RKUD diakui saat belanja telah di sahkan BUD dalam SP2B.

4.17.2.3 Pengukuran

Belanja diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen sumber pengeluaran yang sah untuk pengeluaran dari Kas Daerah (SP2D) dan diukur berdasarkan azas bruto.

4.17.2.4 Penyajian dan Pengungkapan

Belanja Pemerintah Daerah disajikan dan diungkapkan dalam:

- a) Laporan Realisasi Anggaran sebagai pengeluaran daerah;
- b) Laporan Arus Kas masuk kategori Aktivitas Operasi;
- c) Laporan Arus Kas masuk kategori Aktivitas Investasi;
- d) CaLK untuk memudahkan pengguna mendapatkan informasi.

4.18 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

4.18.1 Definisi

Menurut PSAP Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan paragraf 8, pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Jenis-jenis pembiayaan Pemerintah Daerah terdiri dari:

- 1) Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang perlu dibayar kembali yang antara lain berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) daerah tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman dan/atau penerimaan kembali pemberian pinjaman.

2) Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah yang akan diterima kembali yang antara lain berupa pembayaran utang, pembentukan dana cadangan, dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial.

4.18.2 Pengakuan

Penerimaan Pembiayaan diakui pada saat kas diterima pada Rekening Kas Umum Daerah atau pada saat terjadi pengesahan penerimaan pembiayaan oleh Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah. Sedangkan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau pada saat terjadi pengesahan pengeluaran pembiayaan oleh Bendahara Umum Daerah/Kuasa bendahara Umum Daerah.

4.18.3 Pengukuran

Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dicatat sebesar nilai nominal. Apabila penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tersebut dalam bentuk mata uang asing maka harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

4.18.4 Penyajian dan Pengungkapan

Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan disajikan dalam LRA, Laporan Arus Kas (Aktivitas Investasi atau Aktivitas Pendanaan), serta diungkapkan dalam CaLK.

4.19 Kebijakan Akuntansi SILPA/SIKPA/SAL

4.19.1 Definisi

Mengacu pada PSAP Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan paragraf 8, Saldo Anggaran Lebih adalah gabungan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.

SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan. SiLPA/SiKPA disajikan pada LRA dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih. Sedangkan SAL disajikan pada Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih. SAL dipengaruhi oleh SiLPA/SiKPA dan koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih hanya dilaporkan pada Laporan Konsolidasian.

4.19.2 Penyajian

SiLPA/SiKPA disajikan pada LRA dan LPSAL. Sedangkan SAL disajikan pada Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

4.20 Kebijakan Akuntansi Transaksi Transitoris (Transaksi Yang Tidak Mengubah Posisi Kas)

4.20.1 Definisi

Transaksi Transitoris (non anggaran) adalah transaksi kas yang mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, belanja, dan pembiayaan pemerintah. Adapun jenis-jenis transaksi transitoris Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

1) Transaksi Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Transaksi Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) adalah transaksi kas yang berasal dari potongan langsung gaji pokok dan tunjangan keluarga pegawai negeri/pejabat daerah, dan tabungan perumahan Pegawai Negeri Sipil Daerah, serta jenis kas transitoris lainnya untuk disalurkan kepada Pihak Ketiga. Yang termasuk dalam kas transitoris antara lain Taspen, luran Jaminan Kesehatan, luran Jaminan Kecelakaan Kerja, luran Jaminan Kematian, PPh 21, PPh 22, PPh 23, PPh 25, PPN Pusat, Taperum, dan luran Wajib Pegawai.

2) Transaksi pemindahbukuan/kiriman uang

- 3) Transaksi pemindahbukuan/kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar rekening Bendahara Umum Daerah. Dalam hal terjadi pemindahbukuan antar rekening dari rekening valas ke rekening rupiah atau rekening valas lainnya maka perlu diakui adanya selisih kurs terealisasi. Selisih kurs terealisasi tersebut dilaporkan dalam LRA dan Laporan Operasional.
- 4) Transaksi koreksi kesalahan pemindahbukuan pada Rekening BUD
- 5) Transaksi koreksi kesalahan pemindahbukuan pada Rekening BUD merupakan transaksi antara rekening BUD dengan rekening pihak ketiga yang disebabkan karena kesalahan pemindahbukuan.
- 6) Uang jaminan dan/atau Titipan Uang Muka yang diberikan oleh pihak ketiga kepada pemerintah daerah dalam melakukan suatu pekerjaan yang memiliki risiko kegagalan dalam pelaksanaannya atau jaminan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai contoh uang jaminan dimaksud antara lain uang jaminan pekerjaan, uang jaminan pemeliharaan, uang jaminan bongkar reklame, dan jaminan lainnya; sehingga apabila ada kegagalan dalam pekerjaan atau penyebab lain yang mengakibatkan pekerjaan tidak dapat dilaksanakan maka uang jaminan ini menjadi milik pihak pemberi pekerjaan, dalam hal ini pemerintah daerah.
- 7) Jenis kas transitoris lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.20.2 Penyajian dan Pengungkapan

Transaksi transitoris disajikan dalam Laporan Arus Kas sebagai Aktivitas Transitoris dan diungkapkan dalam CaLK. Hal-hal yang diungkapkan pada CaLK antara lain:

- 1) Rincian jenis transaksi transitoris;
- 2) Pengaruh transaksi transitoris terhadap aset atau kewajiban; dan
- 3) Informasi Mutasi Saldo.

4.21 Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Dan Peristiwa Luar Biasa

4.21.1 Definisi

Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensikonvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Kesalahan adalah Penyajian pos-pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya, yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.

Koreksi adalah Tindakan pembetulan akuntansi agar pos-pos yang tersaji dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah menjadi sesuai dengan yang seharusnya.

Peristiwa luar biasa adalah Kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas normal Pemerintah Daerah dan karenanya tidak diharapkan terjadi dan berada di luar kendali atau pengaruh Pemerintah Daerah sehingga memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau aset/kewajiban.

4.21.2 Koreksi Kesalahan

Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode mungkin baru ditemukan pada periode berjalan, kesalahan mungkin timbul adanya: keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran; kesalahan dalam penetapan standar dan kebijakan akuntansi; kesalahan interpretasi fakta; dan kecurangan atau kelalaian. Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.

Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:

1. Kesalahan yang tidak berulang;

Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali, yang dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:

1) Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan;

Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan.

2) Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.

Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, maka dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan atau akun belanja dari periode yang bersangkutan.

Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, maka dilakukan dengan pembetulan pos-pos neraca terkait pada periode ditemukannya kesalahan. Kesalahan yang tidak mempengaruhi posisi kas adalah belanja untuk membeli perabotan kantor (aset tetap) dilaporkan sebagai belanja, maka koreksi yang perlu dilakukan adalah mendebet pos aset tetap dan mengkredit pos ekuitas.

2. Kesalahan yang berulang dan sistemik

Kesalahan yang berulang dan sistemik adalah Kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi, contoh: penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak. Kesalahan berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi. Akibat kumulatif dari koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dapat dilaporkan dalam baris tersendiri pada Laporan Arus Kas tahun berjalan.

4.21.3 Perubahan Kebijakan Akuntansi

Pemerintah Daerah perlu membandingkan laporan keuangan dari waktu ke waktu untuk mengetahui trend posisi keuangan, kinerja, dan arus kas, maka kebijakan akuntansi yang digunakan harus diterapkan secara konsisten pada setiap periode.

Suatu perubahan kebijakan akuntansi harus dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, arus kas yang lebih relevan dan lebih handal dalam penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang secara substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya; dan
- b. Adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau transaksi yang sebelumnya tidak ada atau yang tidak material.
- c. Perubahan kebijakan akuntansi dan pengaruhnya harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4.21.4 Peristiwa Luar Biasa

Peristiwa luar biasa menggambarkan suatu kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas biasa. Di dalam aktivitas biasa Pemerintah Daerah termasuk penanggulangan bencana alam atau sosial yang terjadi berulang. Dengan demikian, yang termasuk dalam peristiwa luar biasa hanyalah peristiwa-peristiwa yang belum pernah atau jarang terjadi sebelumnya.

Dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian yang dimaksud secara tunggal menyebabkan penyerapan sebagian besar anggaran belanja tak terduga atau dana darurat, sehingga memerlukan perubahan/ pergeseran anggaran secara mendasar.

Apabila selama tahun anggaran berjalan terjadi peristiwa darurat, bencana, dan sebagainya yang menyebabkan penyerapan dana dari mata anggaran Belanja Tidak Terduga, peristiwa tersebut tidak dengan sendirinya termasuk peristiwa luar biasa, terutama bila peristiwa tersebut tidak sampai menyerap porsi yang signifikan dari anggaran yang tersedia. Tetapi apabila peristiwa tersebut secara tunggal harus menyerap 50% (lima puluh persen) atau lebih anggaran tahunan, maka peristiwa tersebut layak dikategorikan peristiwa luar biasa. Sebagai petunjuk, akibat dari penyerapan dana sebesar itu, Pemerintah Daerah memerlukan perubahan anggaran atau pergeseran anggaran guna membiayai peristiwa luar biasa, yang seharusnya dibiayai dengan mata anggaran belanja tidak terduga atau anggaran lain-lain untuk kebutuhan darurat.

Dampak yang signifikan terhadap posisi aset/kewajiban karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian atau transaksi dimaksud menyebabkan perubahan yang mendasar dalam keberadaan atau nilai aset/kewajiban Pemerintah Daerah. Peristiwa luar biasa harus memenuhi seluruh persyaratan berikut ini:

1. Tidak merupakan kegiatan normal dari Pemerintah Daerah;
2. Tidak diharapkan terjadi dan tidak diharapkan terjadi berulang-ulang;
3. Berada di luar kendali atau pengaruh Pemerintah Daerah; dan
4. Memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi aset/kewajiban.

Belanja Tak Terduga diakui pada saat keluar dari rekening kas umum daerah, sebesar nilai yang tercantum dalam dokumen SP2D sedangkan pada laporan operasional belanja tak terduga diakui pada pos luar biasa.

Pencatatan pada pos luar biasa dikecualikan apabila belanja tak terduga digunakan untuk pengadaan Aset Tetap, maka akan diakui sebagai Aset Tetap pada SKPD yang menggunakan Aset Tetap tersebut.

4.22 Kebijakan Akuntansi BLUD

4.22.1 Pendahuluan

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, satuan kerja dapat ditetapkan menjadi satuan kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLUD). Satuan kerja tersebut diberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan tanpa mengutamakan keuntungan, melakukan kegiatannya dengan prinsip efisiensi dan produktivitas. Satuan kerja pemerintah dimaksud memberikan layanan publik, seperti pemberian layanan barang/jasa, pengelolaan dana khusus, dan pengelolaan kawasan.

Sesuai dengan ketentuan, satuan kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD diberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan, antara lain pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, pengelolaan utang-piutang, pengelolaan investasi dan pengadaan barang/jasa, kesempatan untuk mempekerjakan tenaga profesional non Pegawai Negeri Sipil (PNS), serta kesempatan pemberian imbalan jasa kepada pegawai sesuai dengan kontribusinya.

4.22.2 Entitas Akuntansi/ Entitas Pelaporan

BLUD merupakan instansi di lingkungan pemerintah daerah yang mengelola kekayaan daerah yang tidak dipisahkan. Sebagai instansi pemerintah daerah BLUD menerapkan kebijakan akuntansi berdasarkan standar akuntansi pemerintahan dalam menyusun laporan keuangan.

BLUD adalah entitas pelaporan karena merupakan satuan kerja pelayanan yang walaupun bukan berbentuk badan hukum yang mengelola kekayaan daerah yang dipisahkan, mempunyai karakteristik sebagai berikut:

1. Pendanaan entitas tersebut merupakan bagian dari APBD;
2. Entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundangundangan;
3. Pimpinan entitas tersebut adalah pejabat yang diangkat atau ditunjuk;
4. Entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung kepada entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahnya dan secara tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran;
5. mempunyai kewenangan dalam pengelolaan keuangan, antara lain penggunaan pendapatan, pengelolaan kas, investasi, dan pinjaman sesuai dengan ketentuan;
6. memberikan jasa layanan kepada masyarakat/pihak ketiga;
7. mengelola sumber daya yang terpisah dari entitas akuntansi/ entitas pelaporan yang membawahnya;
8. mempunyai pengaruh signifikan dalam pencapaian program pemerintah; dan
9. laporan keuangan BLUD diaudit dan diberi opini oleh auditor eksternal.

Selaku penerima anggaran belanja pemerintah (APBD) yang menyelenggarakan akuntansi, BLUD adalah entitas akuntansi, yang laporan keuangannya dikonsolidasikan pada entitas akuntansi/entitas pelaporan yang secara organisatoris membawahnya.

4.22.3 Definisi

BLUD adalah instansi di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

4.22.4 Laporan Keuangan BLUD

Laporan keuangan BLUD merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh BLUD. Laporan keuangan setidaknya-tidaknya terdiri dari komponen-komponen berikut ini:

1. Laporan Realisasi Anggaran
 2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
 3. Neraca
 4. Laporan Operasional
 5. Laporan Arus Kas
 6. Laporan Perubahan Ekuitas
 7. CaLK
- 4.22.5 Tanggung Jawab Pelaporan Keuangan BLUD
- Tanggung jawab penyusunan dan penyajian laporan keuangan BLUD berada pada pimpinan BLUD atau pejabat yang ditunjuk.
- 4.22.6 Periode Pelaporan
- Laporan keuangan BLUD disajikan paling kurang sekali dalam setahun.
- 4.22.7 Kebijakan Pelaporan Keuangan dan Kebijakan Akun di BLUD
- Kebijakan Pelaporan Keuangan dan Kebijakan Akun di BLUD diatur lebih lanjut dalam peraturan Kepala Daerah tentang Kebijakan Akuntansi BLUD.
- 4.22.8 Penggabungan Laporan Keuangan BLUD Ke Dalam Laporan Keuangan Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan
- Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas BLUD digabungkan pada laporan keuangan entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahnya. Seluruh pendapatan, belanja, dan pembiayaan pada LRA BLUD dikonsolidasikan ke dalam LRA entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahnya.
- Laporan Arus Kas BLUD dikonsolidasikan pada Laporan Arus Kas unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum. Transaksi dalam Laporan Arus Kas BLUD yang dikonsolidasikan pada Laporan Arus Kas unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum adalah pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang telah disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.
- Laporan Perubahan SAL BLUD digabungkan dalam Laporan Perubahan SAL Bendahara Umum Daerah dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasiannya.
- Dalam rangka konsolidasian laporan keuangan BLUD ke dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah yang membawahnya, perlu dilakukan eliminasi terhadap akun-akun timbal balik (reciprocal accounts) seperti pendapatan, beban, aset, dan kewajiban yang berasal dari entitas akuntansi/pelaporan dalam satu Pemerintah Daerah kecuali akun-akun pendapatan dan belanja pada LRA yang berasal dari entitas akuntansi/pelaporan.

4.23 Kebijakan Akuntansi Penerimaan Dan Pengeluaran Daerah Yang Tidak Melalui Rekening Kas Umum Daerah

4.23.1 Definisi

Sejak ditetapkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, menguatkan pilar akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah. Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, pemerintah daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban keuangan daerah berupa laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Standar akuntansi pemerintahan tersebut telah diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2020 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akural pada Pemerintah Daerah.

Salah satu asas umum pengelolaan keuangan daerah bahwa semua penerimaan dan pengeluaran daerah dianggarkan dalam APBD dan dilakukan melalui RKUD yang dikelola oleh BUD. Jika terdapat pengaturan lain yang berimplikasi terhadap adanya penerimaan dan pengeluaran daerah yang tidak melalui RKUD, pemerintah mengakui pendapatan dan belanja daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penerimaan dan pengeluaran Daerah yang tidak melalui RKUD, dapat berupa:

1. pendapatan dan belanja Dana BOS;
2. pendapatan dan belanja dana kapitasi bagi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)
3. pendapatan dan belanja BLUD;

4. pendapatan dan belanja Dana Desa; dan
5. pendapatan dan belanja Hibah langsung.

4.23.1.1 Pendapatan dan belanja Dana BOS

Dana Bantuan Operasional Sekolah (Dana BOS) adalah program Pemerintah Pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan khusus dan satuan pendidikan menengah yang bersumber dari dana alokasi khusus nonfisik.

Pendapatan Dana BOS dikelola oleh Satuan Pendidikan dan digunakan untuk membiayai belanja atau operasional penyelenggaraan pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.23.1.2 Pendapatan dan belanja Dana Kapitasi bagi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)

Dalam Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah, disebutkan beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisistik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya;
2. Pengelolaan Dana Kapitasi adalah tata cara penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban dana kapitasi yang diterima oleh FKTP dari BPJS Kesehatan;
3. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per bulan yang dibayar dimuka kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan;
4. Pembayaran Dana Kapitasi dari BPJS Kesehatan dilakukan melalui Rekening Dana Kapitasi JKN pada FKTP dan diakui sebagai pendapatan dan digunakan langsung untuk pelayanan kesehatan peserta JKN pada FKTP;

4.23.1.3 Pendapatan pendapatan dan belanja BLUD Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. BLUD memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan meliputi pengelolaan pendapatan, pengelolaan belanja, dan pembiayaan.

4.23.1.4 Pendapatan dan belanja Dana Desa Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan dana desa ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

4.23.1.5 Pendapatan dan belanja Hibah Langsung Pemerintah Daerah Kabupaten dapat menerima hibah yang bersumber sumbangan dari masyarakat atau pihak ketiga/sejenis, berupa uang, barang dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Pendapatan atas penerimaan dana yang bersumber dari masyarakat atau pihak ketiga/sejenis dalam bentuk uang/barang tersebut dapat digunakan langsung oleh Perangkat Daerah Kabupaten yang secara fungsional melaksanakan urusan pemerintahan daerah. Penggunaan hibah langsung dalam bentuk uang dilakukan tanpa terlebih dahulu disetor ke RKUD dan secara analogis diterapkan pada belanja daerah. Penggunaan hibah langsung dalam bentuk barang digunakan langsung oleh perangkat daerah yang secara fungsional menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.

4.23.2 Pihak-pihak terkait dalam sistem akuntansi dan pelaporan terhadap belanja oleh SKPD/Unit SKPD yang tidak melalui RKUD adalah:

4.23.2.1 Penanggungjawab penggunaan dana

Penanggungjawab penggunaan dana atas pendapatan yang diterima dan digunakan langsung oleh SKPD/Unit SKPD yang tidak melalui RKUD adalah Kepala SKPD/Unit SKPD yang diberi tanggungjawab

terhadap penggunaan dana yang diterima dan digunakan langsung yang tidak melalui RKUD. Penanggungjawab penggunaan dana mempunyai tugas:

1. Bertanggungjawab terhadap pendapatan dan belanja yang tidak melalui RKUD;
2. Menyampaikan laporan pendapatan dan belanja kepada kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD.

4.23.2.2 Bendahara SKPD/Unit SKPD

Bendahara SKPD/Unit SKPD atau nama lain yang disetarakan, mempunyai tugas:

1. Mencatat dan membukukan semua pendapatan dan belanja ke dalam Buku Kas Umum (BKU);
2. Menyusun Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atas pendapatan dan belanja.

4.23.2.3 PPK-SKPD

PPK-SKPD melaksanakan fungsi akuntansi SKPD, mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menyiapkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) yang disampaikan oleh Kepala SKPD kepada PPKD;
2. Mencatat transaksi/kejadian akuntansi atas pendapatan dan belanja berdasarkan bukti yang telah disahkan oleh SKPKD;
3. Melakukan posting jurnal-jurnal transaksi/kejadian pendapatan dan belanja ke dalam buku besar masing-masing;
4. Menyusun laporan keuangan, yang terdiri dari LRA, Neraca, LO, LPE, dan CaLK.

4.23.2.4 Kepala SKPD

Kepala SKPD selaku pengguna anggaran mempunyai tugas menandatangani dan menyampaikan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) atas pendapatan dan belanja yang tidak melalui RKUD kepada SKPKD selaku BUD.

4.23.2.5 BUD

PPKD selaku BUD melakukan pengesahan terhadap pendapatan dan belanja yang diterima langsung oleh SKPD/Unit SKPD yang tidak melalui RKUD berdasarkan SP3B yang diusulkan oleh Kepala SKPD.

4.23.3 Pengakuan

Pendapatan diakui ketika timbul realisasi pendapatan SKPD/Unit SKPD yang tidak melalui RKUD. Pendapatan kas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran Pemerintah Daerah dengan syarat Pemerintah Daerah wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan daerah.

Beban diakui ketika sudah timbul kewajiban atas belanja SKPD/Unit SKPD yang tidak melalui RKUD. Belanja diakui berdasarkan realisasi jenis belanja yang tercantum dalam SP2B yang telah disahkan oleh BUD. Realisasi belanja modal diakui berdasarkan penambahan nilai aset sebesar realisasi belanja modal yang tertera dalam SP2B.

4.23.4 Pengukuran

Pendapatan, beban dan belanja daerah yang tidak melalui RKUD diukur sesuai nilai yang tertera dalam pencatatan dan pengesahan BUD atas pendapatan dan belanja di SP2B. Penerbitan SP2B dilakukan secara berkala sesuai kebutuhan pemerintah daerah sebagai dasar untuk melakukan akuntansi dan pelaporan terhadap pendapatan dan belanja yang tidak melalui RKUD.

4.23.5 Penyajian Dan Pengungkapan

Penyajian dan pengungkapan pada laporan keuangan atas pendapatan dan belanja SKPD/Unit SKPD tidak melalui RKPD, disajikan dalam:

1. LRA, untuk menyajikan laporan pendapatan-LRA dan belanja;
2. Neraca, untuk menyajikan laporan yang berupa aset lancar, aset tetap, dan aset lainnya;
3. LO, untuk menyajikan laporan pendapatan-LO dan beban;
4. LPE, untuk menyajikan pos-pos ekuitas awal, surplus/defisit LO pada periode bersangkutan, koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir;
5. CaLK, untuk menyajikan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera salam, LRA, Neraca, LO dan LPE

Jika pendapatan dan belanja yang tidak melalui RKUD belum ditetapkan dalam perda tentang APBD pada tahun anggaran berkenaan, maka dalam rangka penyusunan laporan keuangan SKPD, paling sedikit disajikan dalam Neraca, LO, dan CaLK.

Penyajian pada laporan keuangan atas pendapatan dan belanja pemerintah daerah yang tidak melalui RKUD, disajikan dalam LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK, LPE, dan CaLK. Jika pendapatan dan belanja yang tidak melalui RKUD belum ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD pada tahun anggaran berkenaan, maka dalam rangka penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, paling sedikit disajikan dalam Neraca, LO, LAK, dan CaLK.

4.24 Masa Manfaat Aset Tetap

Berikut ini adalah tabel masa manfaat terkait aset tetap:

KODEFIKASI					URAIAN	MASA MANFAAT (TAHUN)
1	3	2	01		ALAT BESAR	
1	3	2	01	01	ALAT BESAR DARAT	10
1	3	2	01	02	ALAT BESAR APUNG	8
1	3	2	01	03	ALAT BANTU	7
1	3	2	02		ALAT ANGKUTAN	
1	3	2	02	01	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	7
1	3	2	02	02	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	2
1	3	2	02	03	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR	10
1	3	2	02	04	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR	3
1	3	2	02	05	ALAT ANGKUTAN BERMOTOR UDARA	20
1	3	2	03		ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	
1	3	2	03	01	ALAT BENGKEL BERMESIN	10
1	3	2	03	02	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	5
1	3	2	03	03	ALAT UKUR	5
1	3	2	04		ALAT PERTANIAN	
1	3	2	04	01	ALAT PENGOLAHAN	4
1	3	2	05		ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	
1	3	2	05	01	ALAT KANTOR	5
1	3	2	05	02	ALAT RUMAH TANGGA	5
1	3	2	05	03	MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT	5
1	3	2	06		ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	
1	3	2	06	01	ALAT STUDIO	5
1	3	2	06	02	ALAT KOMUNIKASI	5
1	3	2	06	03	PERALATAN PEMANCAR	10
1	3	2	06	04	PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI	5
1	3	2	07		ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	
1	3	2	07	01	ALAT KEDOKTERAN	5
1	3	2	07	02	ALAT KESEHATAN UMUM	5
1	3	2	08		ALAT LABORATORIUM	
1	3	2	08	01	UNIT ALAT LABORATORIUM	8
1	3	2	08	02	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	8
1	3	2	08	03	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH	10
1	3	2	08	04	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	15

KODEFIKASI					URAIAN	MASA MANFAAT (TAHUN)
1	3	2	08	05	ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI LINGKUNGAN	10
1	3	2	08	06	RADIATION APPLICATION AND NON DESTRUCTIVE TESTING LABORATORY LAINNYA	10
1	3	2	08	07	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	7
1	3	2	08	08	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	15
1	3	2	08	09	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI DAN INSTRUMENTASI	7
1	3	2	09		ALAT PERSENJATAAN	
1	3	2	09	01	SENJATA API	10
1	3	2	09	02	PERSENJATAAN NON SENJATA API	5
1	3	2	09	03	SENJATA SINAR	3
1	3	2	09	04	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	5
1	3	2	10		KOMPUTER	
1	3	2	10	01	KOMPUTER UNIT	4
1	3	2	10	02	PERALATAN KOMPUTER	4
1	3	2	11		ALAT EKSPLORASI	
1	3	2	11	01	ALAT EKSPLORASI TOPOGRAFI	7
1	3	2	11	02	ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA	7
1	3	2	12		ALAT PENGEBORAN	
1	3	2	12	01	ALAT PENGEBORAN MESIN	7
1	3	2	12	02	ALAT PENGEBORAN NON MESIN	7
1	3	2	13		ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	
1	3	2	13	01	SUMUR	7
1	3	2	13	02	PRODUKSI	7
1	3	2	13	03	PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	7
1	3	2	14		ALAT BANTU EKSPLORASI	
1	3	2	14	01	ALAT BANTU EKSPLORASI	7
1	3	2	14	02	ALAT BANTU PRODUKSI	7
1	3	2	15		ALAT KESELAMATAN KERJA	
1	3	2	15	01	ALAT DETEKSI	5
1	3	2	15	02	ALAT PELINDUNG	5
1	3	2	15	03	ALAT SAR	5
1	3	2	15	04	ALAT KERJA PENERBANGAN	5
1	3	2	16		ALAT PERAGA	
1	3	2	16	01	ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN	4
1	3	2	17		PERALATAN PROSES/PRODUKSI	
1	3	2	17	01	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	5
1	3	2	18		RAMBU - RAMBU	
1	3	2	18	01	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	5

KODEFIKASI					URAIAN	MASA MANFAAT (TAHUN)
1	3	2	18	02	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS UDARA	5
1	3	2	18	03	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS LAUT	5
1	3	2	19		PERALATAN OLAH RAGA	
1	3	2	19	01	PERALATAN OLAH RAGA	5
1	3	3	01		BANGUNAN GEDUNG	
1	3	3	01	01	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	50
1	3	3	01	02	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	50
1	3	3	02		MONUMEN	
1	3	3	02	01	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI	50
1	3	3	03		BANGUNAN MENARA	
1	3	3	03	01	BANGUNAN MENARA PERAMBUAN	40
1	3	3	04		TUGU TITIK KONTROL/PASTI	
1	3	3	04	01	TUGU/TANDA BATAS	50
1	3	4	01		JALAN DAN JEMBATAN	
1	3	4	01	01	JALAN	10
1	3	4	01	02	JEMBATAN	50
1	3	4	02		BANGUNAN AIR	
1	3	4	02	01	BANGUNAN AIR IRIGASI	50
1	3	4	02	02	BANGUNAN PENGAIRAN PASANG SURUT	50
1	3	4	02	03	BANGUNAN PENGEMBANGAN RAWA DAN POLDER	25
1	3	4	02	04	BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN BENCANA ALAM	10
1	3	4	02	05	BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH	30
1	3	4	02	06	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	40
1	3	4	02	07	BANGUNAN AIR KOTOR	40
1	3	4	03		INSTALASI	
1	3	4	03	01	INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU	30
1	3	4	03	02	INSTALASI AIR KOTOR	30
1	3	4	03	03	INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH	10
1	3	4	03	04	INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN	10
1	3	4	03	05	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK	40
1	3	4	03	06	INSTALASI GARDU LISTRIK	40
1	3	4	03	07	INSTALASI PERTAHANAN	30
1	3	4	03	08	INSTALASI GAS	30
1	3	4	03	09	INSTALASI PENGAMAN	20
1	3	4	03	10	INSTALASI LAIN	
1	3	4	04		JARINGAN	
1	3	4	04	01	JARINGAN AIR MINUM	30
1	3	4	04	02	JARINGAN LISTRIK	40
1	3	4	04	03	JARINGAN TELEPON	20
1	3	4	04	04	JARINGAN GAS	30

KODEFIKASI					URAIAN	MASA MANFAAT (TAHUN)
1	3	5	01		BAHAN PERPUSTAKAAN	
1	3	5	01	01	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	4
1	3	5	01	02	BAHAN PERPUSTAKAAN TEREKAM DAN BENTUK MIKRO	4
1	3	5	01	03	KARTOGRAFI, NASKAH DAN LUKISAN	4
1	3	5	01	04	MUSIK	4
1	3	5	01	05	KARYA GRAFIKA (GRAPHIC MATERIAL)	4
1	3	5	01	06	THREE DIMENSIONAL ARTEFACS AND REALITA	4

Berikut ini adalah tabel penambahan masa manfaat terkait aset tetap:

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Alat Besar			
Alat Besar Darat	Overhaul	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	3
		>45% s.d 65%	5
Alat Besar Apung	Overhaul	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	2
		>45% s.d 65%	4
Alat Bantu	Overhaul	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	2
		>45% s.d 65%	4
Alat Angkutan			
Alat Angkutan Darat Bermotor	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	1
Alat Angkutan Apung Bermotor	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d.100%	6
Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	Renovasi	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Alat Angkutan Bermotor Udara	Overhaul	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	6
		>50% s.d 75%	9
		>75% s.d.100%	12
Alat Bengkel dan Alat Ukur			
Alat Bengkel Bermesin	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat Bengkel Tak bermesin	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	1
Alat Ukur	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Pertanian			
Alat Pengolahan	Overhaul	>0% s.d. 20%	1
		>21% s.d 40%	2
		>51% s.d 75%	5
Alat Kantor dan Rumah Tangga		>0% s.d. 25%	0
Alat Kantor	Overhaul	>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Rumah Tangga	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
Alat Studio		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Alat Komunikasi	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Peralatan Pemancar	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d.100%	5
Peralatan Komunikasi Navigasi	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d.100%	9
Alat Kedokteran dan Kesehatan			
Alat Kedokteran	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Kesehatan Umum	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat laboratorium			
Unit Alat laboratorium	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d.100%	4
Unit Alat laboratorium Kimia Nuklir	Overhaul	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d.100%	8
Alat Laboratorium Fisika	Overhaul	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d.100%	8
Alat Proteksi radiasi / Proteksi Lingkungan	Overhaul	>0% s.d. 25%	2

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d.100%	5
Radiation Application & Non Destructive Testing laboratory	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d.100%	5
Alat laboratorium Lingkungan Hidup	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Peralatan Laboratorium Hidrodinamica	Overhaul	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d.100%	8
Alat laboratorium Standarisasi Kalibrasi & Instrumentasi	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d.100%	5
Alat Persenjataan			
Senjata Api	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Persenjataan Non Senjata Api	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	1
Senjata Sinar	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	0
		>75% s.d.100%	2
Alat Khusus Kepolisian	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>75% s.d.100%	2
Komputer			
Komputer Unit	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	2
Peralatan Komputer	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	2
Alat Eksplorasi			
Alat Eksplorasi Topografi	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Eksplorasi Geofisika	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d.100%	5
Alat Pengeboran			
Alat Pengeboran Mesin	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d.100%	7
Alat Pengeboran Non Mesin	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Alat Produksi Pengolahan dan Pemurnian			
Sumur	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Produksi	Renovasi	>0% s.d. 25%	0

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Pengolahan dan Pemurnian	Overhaul	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d.100%	8
Alat Bantu Explorasi			
Alat Bantu Explorasi	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d.100%	7
Alat Bantu Produksi	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d.100%	7
Alat keselamatan Kerja			
Alat Deteksi	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Pelindung	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Bangunan Gedung Tempat Kerja	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Monumen			
Candi/ Tugu Peringatan/ Prasasti	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Bangunan Menara			
Bangunan Menara Perambuan	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Tugu Titik Kontrol/Prasasti			
Tugu/Tanda batas	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Jalan dan Jembatan			
Jalan	Renovasi	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 60%	5
		>60% s.d 100%	10
Jembatan	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Bangunan Air			
Bangunan Air Irigasi	Renovasi	>0% s.d. 5%	2
		>5% s.d 10%	5
		>10% s.d 20%	10
Bangunan Pengairan Pasang Surut	Renovasi	>0% s.d. 5%	2
		>5% s.d 10%	5
		>10% s.d 20%	10
Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	Renovasi	>0% s.d. 5%	1
		>5% s.d 10%	3
		>10% s.d 20%	5
Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana alam	Renovasi	>0% s.d. 5%	1
		>5% s.d 10%	2
		>10% s.d 20%	3
Jaringan			
Jaringan air Minum	Overhaul	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	10
Jaringan Listrik	Overhaul	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Jaringan Telepon	Overhaul	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	5

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>45% s.d 65%	10
Jaringan Gas	Overhaul	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	10
Alat Musik Modern/Band	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d 100%	2
Aset Tetap Dalam Renovasi			
Peralatan dan Mesin dalam renovasi	Overhaul	>0% s.d. 100%	2
Gedung dan bangunan dalam Renovasi	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Jaringan Irigasi dan Jaringan dalam Renovasi	Renovasi/ Overhaul	>0% s.d. 100%	5

4.25 Kebijakan Akuntansi Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan

4.25.1 Pendahuluan:

4.25.1.1 Tujuan

- 1) Tujuan pernyataan ini adalah untuk menentukan:
 - a) Bilamana entitas menyesuaikan laporan keuangannya atas peristiwa setelah tanggal pelaporan; dan
 - b) Pengungkapan yang dibuat entitas tentang tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit dan peristiwa setelah tanggal pelaporan.
- 2) Pernyataan ini juga mensyaratkan bahwa entitas tidak perlu menyajikan laporan keuangannya dengan asumsi kesinambungan entitas apabila peristiwa setelah tanggal pelaporan mengindikasikan bahwa penerapan asumsi kesinambungan entitas tidak dapat diterapkan

4.25.1.2 Ruang Lingkup

Pernyataan standar ini diterapkan dalam akuntansi untuk, dan pengungkapan atas, peristiwa setelah tanggal pelaporan.

Pernyataan Standar ini berlaku untuk entitas pelaporan dalam menyusun laporan keuangan suatu entitas pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan laporan keuangan konsolidasian, tidak termasuk perusahaan daerah.

4.25.1.2 Definisi

Berikut ini adalah istilah yang digunakan dalam Pernyataan Standar dengan pengertian:

Peristiwa setelah tanggal pelaporan adalah peristiwa, baik yang menguntungkan maupun yang tidak menguntungkan, yang terjadi di antara tanggal pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit. Peristiwa tersebut dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

- 1) Peristiwa yang memberikan bukti adanya kondisi pada tanggal pelaporan (merupakan peristiwa penyesuaian setelah tanggal pelaporan)

- 2) Peristiwa yang mengindikasikan timbulnya kondisi setelah tanggal pelaporan (merupakan peristiwa non penyesuaian setelah tanggal pelaporan).

4.25.2 Otorisasi Penerbitan Laporan Keuangan

Untuk menentukan suatu peristiwa memenuhi definisi peristiwa setelah tanggal pelaporan, perlu dilakukan identifikasi tanggal pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit. Tanggal pelaporan adalah tanggal terakhir dari periode pelaporan keuangan tersebut. Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit adalah tanggal saat audit laporan keuangan telah selesai yang dinyatakan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) auditor atau tanggal saat pemerintah menyatakan bertanggung jawab atas laporan keuangan, apabila laporan keuangan tersebut tidak diaudit. Proses yang terjadi di antara penyusunan laporan keuangan dan otorisasi penerbitan laporan keuangan dapat berbeda tergantung pada sifat organisasi, struktur organisasi, ketentuan yang wajib diikuti oleh entitas serta prosedur yang ditetapkan dalam proses penyusunan dan penyelesaian laporan keuangan.

4.25.3 Pengakuan dan Pengukuran

Dalam periode antara tanggal pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, pemerintah mungkin mengumumkan kebijakan yang dapat berdampak pada penyajian/ pengungkapan pos-pos dalam laporan keuangan. Sejauh mana peristiwa akibat kebijakan pemerintah berdampak pada penyesuaian laporan keuangan tergantung pada (a) apakah kejadian/peristiwa tersebut memberikan informasi yang cukup tentang kondisi terkini pada tanggal pelaporan dan (b) apakah terdapat bukti yang cukup memadai dapat diperoleh atau dapat dipenuhi.

4.25.4 Peristiwa Penyesuaian Setelah Tanggal Pelaporan

Entitas menyesuaikan jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan karena adanya peristiwa penyesuaian setelah tanggal pelaporan.

Berikut ini beberapa contoh peristiwa penyesuaian setelah tanggal pelaporan yang memerlukan penyesuaian angka-angka laporan keuangan, atau untuk mengakui peristiwa yang belum disajikan sebelumnya, antara lain:

- 1) Penyelesaian atas putusan pengadilan yang telah bersifat final dan memiliki kekuatan hukum tetap setelah tanggal pelaporan yang memutuskan bahwa entitas memiliki kewajiban kini pada tanggal pelaporan. Entitas menyesuaikan nilai kewajiban yang terkait dengan penyelesaian putusan pengadilan tersebut setelah tidak ada upaya lainnya.
- 2) Informasi yang diterima setelah tanggal pelaporan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai piutang pada tanggal pelaporan, misalnya informasi kedaluwarsa pajak (kedaluwarsanya hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak) dan kepailitan debitur yang terjadi setelah tanggal pelaporan keuangan yang mengindikasikan kemungkinan piutang tidak dapat ditagih, sehingga perlu disesuaikan.
- 3) Ditetapkannya jumlah pendapatan berdasarkan informasi yang diperoleh dari entitas lain yang berwenang pada periode pelaporan setelah tanggal pelaporan.
- 4) Ditemukannya kecurangan atau kesalahan yang mengakibatkan salah saji laporan keuangan.
- 5) Pengesahan yang dilakukan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum terhadap transaksi belanja dan/ atau pendapatan yang terjadi sebelum tanggal pelaporan.
- 6) Hasil pemeriksaan BPK yang terbit setelah tanggal pelaporan keuangan atas perhitungan subsidi yang seharusnya diakui pemerintah.

4.25.5 Peristiwa Non Penyesuaian Setelah Tanggal Pelaporan

Entitas tidak menyesuaikan jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan karena adanya peristiwa nonpenyesuaian setelah tanggal pelaporan.

Contoh dari peristiwa nonpenyesuaian setelah tanggal pelaporan di antaranya:

- 1) Adanya kebijakan penyajian kembali nilai aset dengan menggunakan nilai wajar secara teratur yang menyebabkan menurunnya nilai aset diantara tanggal pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit. Penurunan nilai tersebut tidak berhubungan dengan kondisi aset pada tanggal laporan keuangan namun akan menggambarkan keadaan yang terjadi pada periode berikutnya.
- 2) Pengumuman pembagian dividen yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Daerah setelah tanggal pelaporan.

4.25.6 Kesenambungan Entitas

Entitas pelaporan tidak menyusun laporan keuangan dengan dasar kesinambungan entitas apabila setelah tanggal pelaporan terdapat penetapan pemerintah untuk melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek.

Jika asumsi kesinambungan entitas tidak lagi terpenuhi, standar ini mensyaratkan entitas untuk mencerminkan hal ini dalam laporan keuangannya. Dampak perubahan semacam itu akan tergantung pada keadaan khusus entitas, misalnya, apakah operasi akan dialihkan ke entitas pemerintah lain atau dilikuidasi. Dibutuhkan pertimbangan dalam menentukan apakah diperlukan perubahan pada nilai aset dan kewajiban yang tercatat.

Ketika asumsi kesinambungan entitas tidak lagi terpenuhi, perlu juga untuk mempertimbangkan apakah perubahan kondisi tersebut mengarah pada munculnya kewajiban tambahan atau memicu klausul dalam kontrak utang yang mengarah pada reklasifikasi utang jangka Panjang menjadi utang jangka pendek.

PSAP 01 mensyaratkan adanya suatu pengungkapan apabila:

- 1) Laporan keuangan tidak disusun atas dasar kesinambungan entitas. PSAP 01 mensyaratkan bahwa pada saat laporan keuangan tidak disusun atas dasar kesinambungan entitas, hal tersebut harus diungkapkan, bersama dengan dasar penyusunan laporan keuangan yang digunakan dan alasan mengapa entitas dianggap tidak berkesinambungan; atau
- 2) Pihak yang bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan menyadari ketidakpastian terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menimbulkan keraguan pada kemampuan entitas untuk melanjutkan kesinambungan operasinya. Peristiwa atau kondisi yang memerlukan pengungkapan dapat timbul setelah tanggal pelaporan.

PSAP 01 mensyaratkan ketidakpastian tersebut untuk diungkapkan

4.25.7 Pengungkapan

Pengungkapan Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit Entitas pelaporan mengungkapkan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit dan pihak yang bertanggung jawab mengotorisasi laporan keuangan.

Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit penting diketahui oleh pengguna karena laporan keuangan tidak mencerminkan peristiwa setelah tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit.

Pemutakhiran Pengungkapan Kondisi pada Tanggal Pelaporan Apabila entitas pelaporan menerima informasi setelah tanggal pelaporan dan sebelum tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, maka entitas memutakhirkan pengungkapan berdasarkan informasi terkini tersebut.

Dalam beberapa kasus, entitas pelaporan perlu memutakhirkan pengungkapan laporan keuangannya untuk mencerminkan informasi yang diterima setelah tanggal pelaporan, walaupun informasi tersebut tidak mempengaruhi jumlah yang disajikan dalam laporan keuangannya. Salah satu contoh perlunya pemutakhiran pengungkapan adalah ketika bukti tentang kewajiban kontinjensi yang ada pada tanggal pelaporan baru tersedia setelah akhir tanggal pelaporan.

4.25.8 Pengungkapan Peristiwa Non penyesuaian Setelah Tanggal Pelaporan

Apabila peristiwa non penyesuaian setelah tanggal pelaporan memiliki nilai yang material, tidak adanya pengungkapan dapat mempengaruhi pengambilan keputusan pengguna laporan. Karena itu, entitas mengungkapkan informasi untuk setiap hal yang material dari peristiwa non penyesuaian setelah tanggal pelaporan, yang mencakup:

- (a) Sifat peristiwa; dan
- (b) Estimasi atas dampak keuangan, atau pernyataan bahwa estimasi tersebut tidak dapat dibuat.

Berikut adalah contoh peristiwa nonpenyesuaian setelah tanggal pelaporan yang umumnya diungkapkan dalam laporan keuangan:

- (a) Pengumuman untuk tidak melanjutkan suatu program atau kegiatan pemerintah, pelepasan aset serta penyelesaian kewajiban terkait dengan penghentian program atau kegiatan pemerintah;
- (b) Pembelian atau pelepasan aset dalam jumlah yang signifikan;
- (c) Kerusakan aset akibat kebakaran setelah tanggal pelaporan;
- (d) Perubahan tidak normal setelah tanggal pelaporan atas harga aset atau kurs valuta asing;
- (e) Komitmen entitas atau timbulnya kewajiban kontinjensi seperti penerbitan jaminan yang memiliki nilai yang signifikan; dan
- (f) Dimulainya proses tuntutan hukum yang signifikan yang setelah tanggal pelaporan, termasuk tuntutan keberatan/banding/restitusi pajak yang signifikan.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bogor Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah telah ditetapkan sebagai Petunjuk Pelaksanaan, sedangkan teknik penyusunan laporan keuangan telah dilakukan dengan cara konsolidasi yaitu penggabungan laporan keuangan Perangkat Daerah selaku entitas yang secara struktural berada dibawahnya.

Penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sepenuhnya disajikan berdasarkan pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

5.1. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya.

Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

Anggaran yang dimuat dalam Laporan Realisasi Anggaran merupakan anggaran yang diuraikan pada Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2024 tanggal 30 Desember 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2024 Nomor 14);
2. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 42 Tahun 2024 tanggal 30 Desember 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
3. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2025 tanggal 18 Maret 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
4. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2025 tanggal 28 April 2025 tentang Perubahan Kedua Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
5. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025 tanggal 12 September 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2025 Nomor 174);
6. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 26 Tahun 2025 tanggal 12 September 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
7. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 34 Tahun 2025 tanggal 30 Oktober 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 26 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
8. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 47 Tahun 2025 tanggal 11 Desember 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 26 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
9. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
10. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 34 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Laporan Realisasi Anggaran sekurang-kurangnya mencakup pos-pos sebagai berikut:

1. Pendapatan;
2. Belanja;
3. Transfer;
4. Surplus atau defisit;
5. Penerimaan pembiayaan;
6. Pengeluaran pembiayaan;
7. Pembiayaan neto; dan
8. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA / SiKPA)

5.1.1 Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, akun, kelompok, jenis, objek dan rincian objek serta sub rincian objek pendapatan daerah.

Pendapatan Kota Bogor Tahun Anggaran 2025 bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, dengan anggaran dan realisasi dalam Tahun Anggaran 2025 serta realisasi Tahun Anggaran 2024 dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.1.1
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025				Realisasi 2024	Kenaikan/(Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)		(Rp)	(%)
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
1	Pendapatan Asli Daerah	1.745.089.943.776,00	1.665.054.114.174,02	95,41	(80.035.829.601,98)	1.458.619.452.757,24	206.434.661.416,78	14,15
2	Pendapatan Transfer	1.573.722.062.181,00	1.567.716.762.107,00	99,62	(6.005.300.074,00)	1.711.878.175.798,00	(144.161.413.691,00)	(8,42)
	Jumlah	3.318.812.005.957,00	3.232.770.876.281,02	97,41	(86.041.129.675,98)	3.170.497.628.555,24	62.273.247.725,78	1,96

Tabel di atas menunjukkan Anggaran Pendapatan Daerah TA 2025 sebesar Rp3.318.812.005.957,00 terealisasi sebesar Rp3.232.770.876.281,02 atau 97,41% dari Anggaran, apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp3.170.497.628.555,24 mengalami kenaikan sebesar Rp62.273.247.725,78 atau 1,96 %. Realisasi masing-masing akun pendapatan daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, serta Lain-lain PAD yang Sah, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.2
Pendapatan Asli Daerah TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025				Realisasi 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)		(Rp)	(%)
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
1	Pajak Daerah	1.243.958.559.538,00	1.129.091.295.713,00	90,77	(114.867.263.825,00)	973.768.860.850,00	155.322.434.863,00	15,95
2	Retribusi Daerah	429.350.280.951,00	452.987.996.053,02	105,51	23.637.715.102,02	417.445.452.990,24	35.542.543.062,78	8,51
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	38.153.497.994,00	37.011.667.932,00	97,01	(1.141.830.062,00)	34.287.163.763,00	2.724.504.169,00	7,95
4	Lain-lain PAD yang Sah	33.627.605.293,00	45.963.154.476,00	136,68	12.335.549.183,00	33.117.975.154,00	12.845.179.322,00	38,79
	Jumlah	1.745.089.943.776,00	1.665.054.114.174,02	95,41	(80.035.829.601,98)	1.458.619.452.757,24	206.434.661.416,78	14,15

Berdasarkan tabel di atas anggaran Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.745.089.943.776,00 terealisasi sebesar Rp1.665.054.114.174,02 atau 95,41%, dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.458.619.452.757,24 realisasi Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan sebesar Rp206.434.661.416,78 atau 14,15%. Pelampauan realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2025 terdapat pada sektor Retribusi Daerah dan Lain-Lain PAD yang Sah, sedangkan Pajak Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tidak mencapai target yang telah ditetapkan.

5.1.1.1.1 Pajak Daerah

Anggaran dan realisasi pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2025 serta realisasi Tahun Anggaran 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.1.3
Pajak Daerah TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025				Realisasi 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)		(Rp)	(%)
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
1	Pajak Reklame Papan / Billboard / Videotron / Megatron	6.500.000.000,00	8.896.936.480,00	136,88	2.396.936.480,00	8.552.017.868,00	344.918.612,00	4,03
2	Pajak Reklame Kain	500.000.000,00	736.003.003,00	147,20	236.003.003,00	655.950.666,00	80.052.337,00	12,20
3	Pajak Reklame Metekat / Stiker	10.000.000,00	9.366.016,00	93,66	(633.984,00)	9.893.000,00	(526.984,00)	(5,33)
4	Pajak Reklame Berjalan	500.000.000,00	702.750.000,00	140,55	202.750.000,00	518.625.000,00	184.125.000,00	35,50
5	Pajak Reklame Udara	10.000.000,00	0,00	0,00	(10.000.000,00)	0,00	0,00	0,00
6	Pajak Air Tanah	1.400.000.000,00	1.833.350.454,00	130,95	433.350.454,00	1.924.708.540,00	(91.358.086,00)	(4,75)
7	PBBP2	210.000.000.000,00	232.621.103.275,00	110,77	22.621.103.275,00	210.911.617.241,00	21.709.486.034,00	10,29
8	BPHTB-Pemberian Hak Baru	361.730.227.374,00	217.482.762.394,00	60,12	(144.247.464.980,00)	286.435.829.900,00	(68.953.067.506,00)	(24,07)
9	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	210.000.000.000,00	221.822.999.895,00	105,63	11.822.999.895,00	208.515.593.649,00	13.307.406.246,00	6,38
10	PBJT-Tenaga Listrik	95.000.000.000,00	101.043.228.390,00	106,36	6.043.228.390,00	95.818.548.299,00	5.224.680.091,00	5,45
11	PBJT-Jasa Perhotelan	85.000.000.000,00	105.426.536.368,00	124,03	20.426.536.368,00	123.207.802.097,00	(17.781.265.729,00)	(14,43)
12	PBJT-Jasa Parkir	7.500.000.000,00	8.075.688.877,00	107,68	575.688.877,00	7.859.694.368,00	215.994.509,00	2,75
13	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	26.650.000.000,00	27.689.541.711,00	103,90	1.039.541.711,00	29.358.580.222,00	(1.669.038.511,00)	(5,69)
14	Opsen PKB	156.130.070.824,00	135.150.286.950,00	86,56	(20.979.783.874,00)	0,00	135.150.286.950,00	0,00
15	Opsen BBNKB	83.028.261.340,00	67.600.741.900,00	81,42	(15.427.519.440,00)	0,00	67.600.741.900,00	0,00
	Jumlah	1.243.958.559.538,00	1.129.091.295.713,00	90,77	(114.867.263.825,00)	973.768.860.850,00	155.322.434.863,00	15,95

Target Pajak Daerah tahun 2025 adalah sebesar Rp1.243.958.559.538,00 dan terealisasi sebesar Rp1.129.091.295.713,00 atau 90,77%, realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami peningkatan dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp155.322.434.863 atau 15,95%.

Penurunan target dan realisasi PBJT-Jasa Perhotelan salah satunya disebabkan oleh efisiensi belanja terhadap pelaksanaan kegiatan rapat yang menggunakan fasilitas hotel oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dimana sumber penghasilan terbesar hotel di wilayah Kota Bogor berasal dari kegiatan *Meeting, Insemtf, Convention and Exbition*. Tidak tercapainya target Pajak Daerah disebabkan oleh ketidaktercapaian BPHTB, Opsen PKB dan Opsen BBNKB. Realisasi BPHTB sebesar Rp217.482.762.394,00 atau 60,12% dari target sebesar Rp361.730.227.374,00.

Selanjutnya, realisasi Pajak Opsen PKB sebesar Rp135.150.286. 950,00 atau 86,56% dari target sebesar Rp156.130.070.824,00 serta realisasi Pajak Opsen BBNKB sebesar Rp67.600.741.900,00 atau 81,42% dari target sebesar Rp83.028.261.340,00. Ketidaktercapaian BPHTB disebabkan karena dalam perencanaan target BPHTB masih memperhitungkan potensi dari pembayaran BPHTB PT Perkebunan Nusantara III yang berdasarkan Surat Edaran Mendagri No.900.1.13.1/1276/SJ mendapatkan penghapusan tarif BPHTB sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional. Selanjutnya, Tidak tercapainya target Opsen PKB dan BBNKB pada periode ini secara signifikan dipengaruhi oleh kebijakan fiskal terkait Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025 yang menyebabkan hilangnya potensi penerimaan dari tunggakan pajak yang sebelumnya telah masuk dalam perhitungan target.

Adapun ketercapaian target Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, PBB P2, PBJT-Makanan dan/atau Minuman, PBJT-Jasa Perhotelan, PBJT-Jasa Parkir dan PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan adalah hasil ekstensifikasi dan intensifikasi Pajak Daerah yang diantaranya adalah:

- Penjaringan Wajib Pajak Baru sehingga selama tahun 2025 terdapat penambahan Wajib Pajak baru sebanyak 898 Wajib Pajak, terdiri dari 12 Wajib Pajak Hotel, 194 Wajib Pajak Restoran, 47 Wajib Pajak Parkir, 31 Wajib Pajak Jasa Kesenian dan Hiburan, 3 Wajib Pajak Air Tanah dan 611 Wajib Pajak Reklame.
- Sosialisasi dan penyuluhan kewajiban Pajak Daerah terhadap Wajib Pajak;
- Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak Daerah;
- Kerja sama dengan Kejaksaan dalam upaya penagihan pajak;
- Kerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dalam rangka pertukaran data perpajakan dan pengawasan Wajib Pajak;
- Penilaian individual dalam rangka penyesuaian NJOP PBB P2;
- Perluasan menjadi 22 kanal pembayaran pajak dan pelaksanaan Kegiatan Mobil keliling pembayaran pajak; dan
- Kegiatan Mobil Keliling dan Operasi Sisir pembayaran PBB P2 yang melibatkan instansi kecamatan dan kelurahan.
- Kegiatan operasi gabungan pemungutan pajak kendaraan bekerja sama dengan Samsat dan Kepolisian.
- Kegiatan *One Day Service* pendaftaran perizinan reklame dan pembayaran pajak reklame

5.1.1.1.2 Retribusi Daerah

Retribusi Daerah merupakan Pendapatan Asli Daerah yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2023. Anggaran dan realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025 serta Realisasi Tahun Anggaran 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.1.4

Retribusi Daerah TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025				Realisasi 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
1	Retribusi Jasa Umum	410.400.457.661,00	433.149.802.834,02	105,54	22.749.345.173,02	400.997.137.220,24	32.152.665.613,78	8,02
2	Retribusi Jasa Usaha	6.138.868.000,00	7.586.176.146,00	123,58	1.447.308.146,00	7.953.316.342,00	(367.140.196,00)	(4,62)
3	Retribusi Perizinan Tertentu	12.810.955.290,00	12.252.017.073,00	95,64	(558.938.217,00)	8.494.999.428,00	3.757.017.645,00	44,23
	Jumlah	429.350.280.951,00	452.987.996.053,02	105,51	23.637.715.102,02	417.445.452.990,24	35.542.543.062,78	8,51

Berdasarkan tabel di atas realisasi retribusi daerah tahun 2025 sebesar Rp452.987.996.053,02 atau 100,51% dari anggaran tahun 2025 sebesar Rp429.350.280.951,00 realisasi Tahun Anggaran 2025 tersebut mengalami kenaikan dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp35.542.543.062,78.

5.1.1.1.2.1 Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Realisasi retribusi jasa umum pada tahun anggaran 2025 dirinci pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1.5
Realisasi Retribusi Jasa Umum TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025				Realisasi 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	391.606.465.661,00	414.089.674.534,02	105,74	22.483.208.873,02	383.213.924.158,24	30.875.750.375,78	8,06
2	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	0,00	0,00	0,00	0,00	246.100.000,00	(246.100.000,00)	(100,00)
3	Retribusi Pengolahan Limbah Cair	0,00	0,00	0,00	0,00	55.027.345,00	(55.027.345,00)	(100,00)
4	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	0,00	0,00	0,00	0,00	39.171.500,00	(39.171.500,00)	(100,00)
5	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	0,00	0,00	0,00	0,00	14.682.315.717,00	(14.682.315.717,00)	(100,00)
6	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	3.053.992.000,00	3.090.375.000,00	101,19	36.383.000,00	2.753.673.000,00	336.702.000,00	12,23
7	Retribusi Pelayanan Kebersihan	15.740.000.000,00	15.969.753.300,00	101,46	229.753.300,00	0,00	15.969.753.300,00	0,00
8	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00	0,00	0,00	0,00	6.925.500,00	(6.925.500,00)	(100,00)
Jumlah		410.400.457.661,00	433.149.802.834,02	105,54	22.749.345.173,02	400.997.137.220,24	32.152.665.613,78	8,02

Tabel di atas menunjukkan realisasi retribusi jasa umum tahun anggaran 2025 sebesar Rp433.149.802.834,02 atau mencapai 105,54% dari anggaran sebesar Rp410.400.457.661,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan 8,02% atau sebesar Rp32.152.665.613,78 dibandingkan dengan tahun anggaran 2024.

Retribusi Pelayanan Kebersihan mencapai 101,46% dari target yang ditetapkan, dimana salah satu upaya yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian target adalah penggalan potensi baru terutama pada pelanggan PDAM sesuai dengan perjanjian

kerja sama tentang pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan Nomor 500.12.17.1/Perj.31-DLH/2025 dan Nomor 690/SP.02-PERUMDA.TPKB/2025.

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum mencapai 101,19% dari target, peningkatan ini merupakan hasil evaluasi penertiban lalu lintas dan penataan Lokasi parkir yang ditetapkan melalui Perwali Nomor 100.3.3.3/KEP-Dis.hub/2024 tentang Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir di Kota Bogor, yang menetapkan 6 Titik Lokasi Parkir Khusus, 86 titik

lokasi Parkir Tepi Jalan Umum, dan. 19 titik Lokasi Parkir Tepi Jalan Umum Rawan Kemacetan.

Rincian realisasi Retribusi Jasa Umum pada masing-masing Perangkat Daerah Pemerintah Kota Bogor per 31 Desember 2025 dan 2024 dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.1.6

Realisasi Retribusi Jasa Umum per Perangkat Daerah TA 2025 dan 2024

No	SKPD	Tahun 2025				Realisasi 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)		(Rp)	(%)
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
1	DINAS KESEHATAN							
	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	391.606.465.661,00	0,00	0,00	(391.606.465.661,00)	0,00	0,00	0,00
2	PUSKESMAS BOGOR SELATAN							
	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	0,00	2.891.634.896,00	0,00	2.891.634.896,00	3.161.947.874,00	(270.312.978,00)	0,00
3	PUSKESMAS CIPAKU							
	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	0,00	3.795.175.869,00	0,00	3.795.175.869,00	3.702.704.768,00	92.471.101,00	0,00
4	PUSKESMAS BONDONGAN							
	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	0,00	2.510.890.669,00	0,00	2.510.890.669,00	2.442.173.445,00	68.717.224,00	0,00
5	PUSKESMAS LAWANG GINTUNG							
	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	0,00	1.900.743.228,00	0,00	1.900.743.228,00	1.772.437.527,00	128.305.701,00	0,00
6	PUSKESMAS BOGOR TIMUR							
	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	0,00	4.158.552.276,00	0,00	4.158.552.276,00	4.008.086.693,00	150.465.583,00	0,00
7	PUSKESMAS PULO ARMYN							
	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	0,00	2.443.676.607,00	0,00	2.443.676.607,00	2.441.152.903,00	2.523.704,00	0,00
8	PUSKESMAS BOGOR TENGAH							
	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	0,00	1.833.253.416,00	0,00	1.833.253.416,00	1.923.955.308,00	(90.701.892,00)	0,00
9	PUSKESMAS SEMPUR							
	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	0,00	1.642.830.989,00	0,00	1.642.830.989,00	1.606.234.873,00	36.596.116,00	0,00
10	PUSKESMAS GANG AUT							
	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	0,00	1.012.772.351,00	0,00	1.012.772.351,00	1.078.677.618,00	(65.905.267,00)	0,00
11	PUSKESMAS BELONG							
	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	0,00	785.552.515,00	0,00	785.552.515,00	684.435.857,00	101.116.658,00	0,00
12	PUSKESMAS MERDEKA							
	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	0,00	2.061.649.256,00	0,00	2.061.649.256,00	2.120.165.754,00	(58.516.498,00)	0,00
13	PUSKESMAS SEMPLAK							
	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	0,00	2.839.652.789,00	0,00	2.839.652.789,00	2.718.489.760,00	121.163.029,00	0,00
14	PUSKESMAS PANCASAN							
	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	0,00	2.793.413.791,00	0,00	2.793.413.791,00	2.463.110.019,00	330.303.772,00	0,00
15	PUSKESMAS PASIR MULYA							
	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	0,00	3.229.122.411,00	0,00	3.229.122.411,00	3.035.831.908,00	193.290.503,00	0,00
16	PUSKESMAS GANG KELOR							
	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	0,00	3.005.291.128,00	0,00	3.005.291.128,00	2.686.283.153,00	319.007.975,00	0,00
17	PUSKESMAS SINDANG BARANG							
	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	0,00	3.486.785.040,00	0,00	3.486.785.040,00	3.392.514.829,00	94.270.211,00	0,00
18	PUSKESMAS BOGOR UTARA							
	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	0,00	4.035.026.068,00	0,00	4.035.026.068,00	3.672.242.535,00	362.783.533,00	0,00
19	PUSKESMAS TEGAL GUNDIL							
	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	0,00	2.404.200.239,00	0,00	2.404.200.239,00	2.120.285.605,00	283.914.634,00	0,00
20	PUSKESMAS WARUNG JAMBU							
	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	0,00	2.594.321.223,00	0,00	2.594.321.223,00	2.669.544.637,00	(75.223.414,00)	0,00
21	PUSKESMAS TANAH SAREAL							
	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	0,00	3.317.000.120,00	0,00	3.317.000.120,00	2.623.495.696,00	693.504.424,00	0,00
22	PUSKESMAS PONDOK RUMPUT							

No	SKPD	Tahun 2025				Realisasi 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	0,00	1.242.212.243,00	0,00	1.242.212.243,00	1.051.734.895,00	190.477.348,00	0,00
23	PUSKESMAS KEDUNG BADAQ							
	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	0,00	2.905.071.869,00	0,00	2.905.071.869,00	2.925.399.066,00	(20.327.197,00)	0,00
24	PUSKESMAS KAYU MANIS							
	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	0,00	3.031.765.537,00	0,00	3.031.765.537,00	2.564.318.930,00	467.446.607,00	0,00
25	PUSKESMAS MEKARWANGI							
	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	0,00	3.604.603.906,00	0,00	3.604.603.906,00	3.412.892.836,00	191.711.070,00	0,00
26	PUSKESMAS MULYAHARJA							
	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	0,00	2.017.052.026,00	0,00	2.017.052.026,00	1.962.519.728,00	54.532.298,00	0,00
27	UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH							
	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis	0,00	1.587.821.700,00	0,00	1.587.821.700,00	1.095.071.700,00	492.750.000,00	0,00
28	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH							
	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	0,00	346.952.708.622,02	0,00	346.952.708.622,02	319.878.216.241,24	27.074.492.380,78	0,00
29	UPTD PUBLIC SAFETY CENTER GERAKAN EMERGENSI TERPADU 11							
	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis	0,00	6.893.750,00	0,00	6.893.750,00	0,00	6.893.750,00	0,00
29	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							
	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	240.000.000,00	242.250.000,00	100,94	2.250.000,00	246.100.000,00	(3.850.000,00)	(1,56)
	Retribusi Pengolahan Limbah Cair Rumah Tangga, Perkantoran, dan Industri	55.000.000,00	55.107.300,00	100,20	107.300,00	55.027.345,00	79.955,00	0,15
30	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN							
	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	0,00	0,00	0,00	0,00	39.171.500,00	(39.171.500,00)	(100,00)
31	DINAS LINGKUNGAN HIDUP							
	Retribusi Pelayanan Persampahan	15.445.000.000,00	15.672.396.000,00	101,47	227.396.000,00	14.682.315.717,00	990.080.283,00	6,74
32	DINAS PERHUBUNGAN							
	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	3.053.992.000,00	3.090.375.000,00	101,19	36.383.000,00	2.753.673.000,00	336.702.000,00	12,23
33	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU							
	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00	0,00	0,00	0,00	6.925.500,00	(6.925.500,00)	(100,00)
Jumlah		410.400.457.661,00	433.149.802.834,02	105,54	22.749.345.173,02	400.997.137.220,24	32.152.665.613,78	8,02

5.1.1.1.2.2 Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha.

Realisasi Retribusi Jasa Usaha per 31 Desember 2025 dan 2024 dirinci pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1.7
Realisasi Retribusi Jasa Usaha TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025				Realisasi 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
1	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	4.721.980.000,00	5.555.871.506,00	117,66	833.891.506,00	5.420.786.342,00	135.085.164,00	2,49
2	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	46.008.000,00	50.745.000,00	110,30	4.737.000,00	54.970.000,00	(4.225.000,00)	(7,69)
4	Retribusi Rumah Potong Hewan	700.000.000,00	959.534.640,00	137,08	259.534.640,00	813.828.000,00	145.706.640,00	17,90
5	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	670.880.000,00	1.020.025.000,00	152,04	349.145.000,00	1.663.732.000,00	(643.707.000,00)	(38,69)
Jumlah		6.138.868.000,00	7.586.176.146,00	123,58	1.447.308.146,00	7.953.316.342,00	(367.140.196,00)	(4,62)

Tabel di atas menunjukkan realisasi retribusi jasa usaha tahun anggaran 2025 sebesar Rp7.586.176.146,00 atau mencapai 123,58% dari anggaran sebesar Rp6.138.868.000,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar 4,62% atau sebesar Rp367.140.196,00 dibandingkan dengan tahun anggaran 2024. Rincian realisasi Retribusi Jasa Usaha pada masing-masing Perangkat Daerah Pemerintah Kota Bogor per 31 Desember 2025 dan 2024 dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.1.8
Realisasi Retribusi Jasa Usaha per Perangkat Daerah TA 2025 dan 2024

No	SKPD	Tahun 2025				Realisasi 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							
	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	155.000.000,00	84.000.000,00	54,19	(71.000.000,00)	151.750.000,00	(67.750.000,00)	(44,65)
2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN							
	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	1.854.480.000,00	2.037.120.000,00	109,85	182.640.000,00	1.932.775.000,00	104.345.000,00	5,40
	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	85.880.000,00	112.110.000,00	130,54	26.230.000,00	110.430.000,00	0,00	0,00
3	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN							
	Retribusi Rumah Potong Hewan	700.000.000,00	959.534.640,00	137,08	259.534.640,00	813.828.000,00	145.706.640,00	17,90
4	DINAS PERHUBUNGAN							
	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	46.008.000,00	50.745.000,00	110,30	4.737.000,00	54.970.000,00	(4.225.000,00)	(7,69)
5	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU							
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	559.620.848,00	(559.620.848,00)	(100,00)
6	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA							
	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	585.000.000,00	907.915.000,00	155,20	322.915.000,00	1.553.302.000,00	(645.387.000,00)	(41,55)
	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	65.000.000,00	88.000.000,00	135,38	23.000.000,00	0,00	88.000.000,00	0,00
7	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN							
	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	6.500.000,00	6.500.000,00	100,00	0,00	54.000.000,00	(47.500.000,00)	(87,96)
8	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH							
	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	2.191.000.000,00	2.845.905.506,00	129,89	654.905.506,00	2.722.640.494,00	123.265.012,00	4,53
9	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN							
	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	450.000.000,00	494.346.000,00	109,85	44.346.000,00	0,00	494.346.000,00	0,00
Jumlah		6.138.868.000,00	7.586.176.146,00	123,58	1.447.308.146,00	7.953.316.342,00	(367.140.196,00)	(4,62)

5.1.1.1.2.3 Retribusi Perizinan Tertentu

Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Rincian realisasi Retribusi Perizinan Tertentu per 31 Desember 2025 dan 2024 dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.1.9
Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025				Realisasi 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	1.755.337,00	(1.755.337,00)	(100,00)
2	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	12.410.955.290,00	11.896.357.593,00	95,85	(514.597.697,00)	8.048.021.591,00	3.848.336.002,00	47,82
3	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	400.000.000,00	355.659.480,00	88,91	(44.340.520,00)	445.222.500,00	(89.563.020,00)	(20,12)
	Jumlah	12.810.955.290,00	12.252.017.073,00	95,64	(558.938.217,00)	8.494.999.428,00	3.757.017.645,00	44,23

Tabel di atas menunjukkan realisasi retribusi Perizinan Tertentu tahun anggaran 2025 sebesar Rp12.252.017.073,00 atau mencapai 95,64% dari anggaran sebesar Rp12.810.955.290,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan 44,23% atau sebesar Rp3.757.017.645,00 dibandingkan dengan tahun anggaran 2024.

Rincian realisasi Retribusi Perizinan Tertentu pada masing-masing Perangkat Daerah Pemerintah Kota Bogor per 31 Desember 2025 dan 2024 dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.1.10
Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu per Perangkat Daerah TA 2025 dan 2024

No	SKPD	Tahun 2025				Realisasi 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							
	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	1.755.337,00	(1.755.337,00)	0,00
	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	12.410.955.290	11.896.357.593	95,85	(514.597.697,00)	8.048.021.591,00	3.848.336.002,00	0,00
2	DINAS TENAGA KERJA							
	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	400.000.000	355.659.480,00	88,91	(44.340.520,00)	445.222.500,00	(89.563.020,00)	0,00
	Jumlah	12.810.955.290,00	12.252.017.073,00	95,64	(558.938.217,00)	8.494.999.428,00	3.757.017.645,00	44,23

5.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Keuangan daerah meliputi kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan, Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Kepala Daerah selaku wakil Pemerintah

Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan berkedudukan sebagai pemilik modal pada perusahaan umum daerah atau pemegang saham pada perseroan daerah.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan Penerimaan Daerah dari bagian laba atas penyertaan modal Pemerintah Kota Bogor pada Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yaitu pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk, Perumda Bank Kota Bogor, Perumda Tirta Pakuan dan Perumda Pasar Pakuan Jaya dan Perumda Transportasi Pakuan Kota Bogor. Pendapatan ini seluruhnya dianggarkan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) dengan realisasi TA 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.1.11
Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025				Realisasi 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	7.202.567.296,00	7.202.567.297,00	100,00	0,00	7.525.221.558,00	(322.654.261,00)	(4,29)
2	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	1.391.830.063,00	250.000.000,00	17,96	(1.141.830.063,00)	1.173.573.966,00	(923.573.966,00)	(78,70)
3	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Bidang Air Minum)	29.559.100.635,00	29.559.100.635,00	100,00	0,00	25.588.368.239,00	3.970.732.396,00	15,52
	Jumlah	38.153.497.994,00	37.011.667.932,00	97,01	(1.141.830.062,00)	34.287.163.763,00	2.724.504.169,00	7,95

Tabel di atas menunjukkan realisasi Pendapatan Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tahun anggaran 2025 sebesar Rp37.011.667.932,00 atau mencapai 97,01% dari anggaran sebesar Rp38.153.497.994,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan 7,95% atau sebesar Rp2.724.504.169,00 dibandingkan dengan tahun anggaran 2024. Rincian Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.1.12
Rincian Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025				Realisasi 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
1	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk	4.260.852.544,00	4.260.852.544,00	100,00	0,00	5.225.479.571,00	(964.627.027,00)	(18,46)
2	Perumda Bank Kota Bogor	2.941.714.753,00	2.941.714.753,00	100,00	0,00	2.383.402.426,00	558.312.327,00	23,43
3	Perumda Tirta Pakuan	29.559.100.635,00	29.559.100.635,00	100,00	0,00	24.957.647.000,00	4.601.453.635,00	18,44
4	Perumda Pasar Pakuan Jaya	1.391.830.063,00	250.000.000,00	17,96	(1.141.830.063,00)	1.394.247.438,00	(1.144.247.438,00)	(82,07)
	Jumlah	38.153.497.995,00	37.011.667.932,00	97,01	(1.141.830.063,00)	33.960.776.435,00	3.050.891.497,00	8,98

Tabel di atas menunjukan realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang berasal dari bagian laba tahun buku 2024 yang diterima di Kas Daerah pada tahun 2025, dimana Perumda Tirta Pakuan mengalami kenaikan 15,52% atau sebesar Rp3.970.732.396,00. Perumda Bank Kota Bogor mengalami kenaikan 23,43% atau sebesar Rp558.312.327,00.

Perumda Pasar Pakuan Jaya pada tahun 2025 tidak memberikan bagian laba karena berdasarkan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 *Audited* mengalami kerugian. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor Pasal 89 yang menyatakan bahwa “Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”. Berdasarkan Keputusan Wali Kota Nomor 900.1.13.2/Kep.271-Bag.Ekon/2025 tentang Penggunaan Laba Perusahaan Umum Daerah Pasar Pakuan Jaya Tahun Buku 2024, laba digunakan untuk pemenuhan dana cadangan. Penerimaan tahun 2025 sebesar Rp250.000.000,00 berasal dari pembayaran piutang bagian laba tahun buku 2023.

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk yang mengalami penurunan sebesar 18,46% yang disebabkan oleh penurunan laba bersih konsolidasi tahun buku 2024 yang berpengaruh terhadap pembagian dividen.

5.1.1.1.4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang dirinci berdasarkan objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Realisasi Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah pada tahun anggaran 2025 dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2024 dirinci pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1.13
Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025				Realisasi 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)		(Rp)	(%)
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	1.029.052.000,00	1.703.115.725,00	165,50	674.063.725,00	1.389.417.875,00	313.697.850,00	22,58
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	12.629.016,00	(12.629.016,00)	(100,00)
3	Jasa Giro	3.274.976.140,00	5.570.270.122,00	170,09	2.295.293.982,00	4.035.307.746,00	1.534.962.376,00	38,04
4	Pendapatan Bunga	7.000.000.000,00	5.061.653.874,00	72,31	(1.938.346.126,00)	7.224.677.557,00	(2.163.023.683,00)	(29,94)
5	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	10.400.002,00	27.943.254,00	268,69	17.543.252,00	13.441.667,00	14.501.587,00	107,89
6	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	3.618.420.755,00	6.510.665.593,00	179,93	2.892.244.838,00	397.410.914,00	6.113.254.679,00	1.538,27
7	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	4.618.277,00	260.857.056,00	5.648,36	256.238.779,00	627.473.886,00	(366.616.830,00)	(58,43)
8	Pendapatan Denda Pajak Daerah	0,00	7.347.837.291,00	0,00	7.347.837.291,00	14.649.420.176,00	(7.301.582.885,00)	(49,84)
9	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	36.883.767,00	72.453.178,00	196,44	35.569.411,00	111.287.554,00	(38.834.376,00)	(34,90)
10	Pendapatan dari Pengembalian	13.916.228.616,00	15.259.278.151,00	109,65	1.343.049.535,00	3.836.302.493,00	11.422.975.658,00	297,76
11	Pendapatan BLUD	0,00	1.250.115.130,00	0,00	1.250.115.130,00	813.022.806,00	437.092.324,00	53,76
12	Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan	721.600,00	4.718.670,00	653,92	3.997.070,00	4.481.604,00	237.066,00	5,29
13	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	750.000,00	8.550.000,00	1.140,00	7.800.000,00	3.101.860,00	5.448.140,00	175,64

No	Uraian	Tahun 2025				Realisasi 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
14	Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah	4.735.554.136,00	2.885.696.432,00	60,94	(1.849.857.704,00)	0,00	2.885.696.432,00	0,00
Jumlah		33.627.605.293,00	45.963.154.476,00	136,68	12.335.549.183,00	33.117.975.154,00	12.845.179.322,00	38,60

Tabel di atas menunjukkan realisasi Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah tahun anggaran 2025 sebesar Rp45.963.154.476,00 atau mencapai 136,68% dari anggaran sebesar Rp33.627.605.293,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan 38,79% atau sebesar Rp12.845.179.322,00 dibandingkan dengan tahun anggaran 2024 sebesar Rp33.117.975.154,00.

Penjelasan lebih lanjut atas Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah antara lain sebagai berikut:

Realisasi Pendapatan Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.703.115.725,00 dan Rp1.389.417.875,00 dengan rincian berikut.

Tabel 5.1.14
Realisasi Pendapatan Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024
		(Rp)	(Rp)
1	Hasil Penjualan Tanah	20.639.450,00	24.168.075,00
2	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	227.897.000,00	40.529.200,00
3	Hasil Penjualan Aset Lain-Lain	1.454.579.275,00	1.324.720.600,00
Jumlah		1.703.115.725,00	1.389.417.875,00

Realisasi Jasa Giro Tahun Anggaran 2025 dan 2024 sebesar Rp5.570.270.122,00 dan Rp4.035.307.746,00 dengan rincian berikut.

Tabel 5.1.15
Realisasi Jasa Giro TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024
		(Rp)	(Rp)
1	Jasa Giro pada Kas Daerah	5.429.215.802,00	3.815.384.199,00
2	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	141.003.869,00	202.022.634,00
3	Pendapatan Jasa Giro pada Rekening Dana BOSP	50.451,00	0,00
4	Pendapatan Jasa Giro pada Rekening Dana BOK Puskesmas	0,00	17.900.913,00
Jumlah		5.570.270.122,00	4.035.307.746,00

Realisasi Pendapatan Bunga Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp5.061.653.874,00 dan Rp7.224.677.557,00. Pada Tahun Anggaran 2025 pendapatan bunga terdiri dari bunga deposito pencairan dana cadangan pada Bank DKI, pendapatan remunerasi TDF pada rekening TDF DBH dan bunga atas penerusan Penerimaan Pinjaman BUMD untuk dana pinjaman dari *International Bank For Reconstruction and Development*, *Loan Agreement* Nomor 770-ID tanggal 1 September 2009 dalam rangka pembiayaan *Urban Water Supply And Sanitation Project* sesuai dengan Perjanjian Penerusan Pinjaman Nomor SLA-1226/DSMI/2009 tanggal 02 November 2009 sebagaimana telah diamandemen sesuai dengan surat nomor S-88/MK.5/2023 tanggal 12 September 2023 tentang Penandatanganan Perubahan (Amandemen) Perjanjian Penerusan Pinjaman Nomor SLA-1226/DSMI/2009 tanggal 02 November 2009 antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kota Bogor.

Realisasi Pendapatan Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp6.510.665.593,00 dan Rp397.410.914,00. Peningkatan realisasi pada tahun 2025 disebabkan adanya penerimaan dari beroperasinya layanan Bis Kita pada 4 koridor yaitu Terminal Bubulak - Cidangiang, Terminal Bubulak - Sindangsari, Stasiun Bogor - Terminal Ciparigi dan Terminal Bubulak - Parung Banteng sebesar Rp6.239.948.835,00.

Realisasi Pendapatan Denda Pajak Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp7.347.837.291,00 dan Rp14.649.420.176,00 dengan rincian berikut:

Tabel 5.1.16
Realisasi Pendapatan Denda Pajak Daerah

No	Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024
		(Rp)	(Rp)
1	Pendapatan Denda Pajak Reklame	35.316.274,00	154.044.002,00
2	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	12.675.188,00	3.370.009,00
3	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)	4.269.826.261,00	9.610.277.339,00
4	Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	1.000.000,00	12.750.000,00
5	Pendapatan Denda Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	3.029.019.568,00	4.868.978.826,00
Jumlah		7.347.837.291,00	14.649.420.176,00

Realisasi Pendapatan Denda Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp72.453.178,00 dan Rp111.287.554,00 dengan rincian berikut:

Tabel 5.1.17
Realisasi Pendapatan Denda Retribusi Daerah

No	Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024
		(Rp)	(Rp)
1	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	2.748.030,00	2.414.967,00
2	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	57.741.459,00	70.936.740,00
3	Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu	11.963.689,00	37.935.847,00
Jumlah		72.453.178,00	111.287.554,00

Realisasi Pendapatan dari Pengembalian Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp15.259.278.151,00 dan Rp3.836.302.493,00 dengan rincian berikut:

Tabel 5.1.18
Realisasi Pendapatan dari Pengembalian TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024
		(Rp)	(Rp)
1	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	0,00	38.096.568,00
2	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	0,00	20.508.895,00
3	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Biasa	888.000,00	0,00
4	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	43.022.000,00	0,00
5	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Luar Negeri-Perjalanan Dinas Biasa-Luar Negeri	0,00	1.051.981.009,00
6	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran JKK	0,00	20.767,00
7	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran JKM	0,00	62.301,00
8	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS	29.654.598,00	0,00

No	Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024
		(Rp)	(Rp)
9	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PPPK	36.703.142,00	0,00
10	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Keluarga ASN-Tunjangan Keluarga PNS	37.363.520,00	1.355.880,00
11	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus ASN-Tunjangan Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus PNS	1.046.813,00	0,00
12	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	27.308.500,00	0,00
13	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis- Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	351.244.049,00	575.358.160,00
14	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis- Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	200.000,00	0,00
15	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	14.100.518,00	0,00
16	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Beasiswa Pendidikan PNS-Beasiswa Tugas Belajar S1	2.250.000,00	0,00
17	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Bermotor Penumpang	1.469.133.779,00	0,00
18	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kota	20.818.616,00	0,00
19	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	0,00	3.379.500,00
20	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	64.380.667,00	0,00
21	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	11.664.967.315,00	6.976.000,00
22	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	16.350.630,00	128.340.000,00
23	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	0,00	2.507.000,00
24	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	24.090.000,00	0,00
25	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	20.159.000,00	0,00
26	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikswa Swasta	4.610,00	0,00
27	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	7.444.439,00	9.500.000,00
28	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	0,00	38.340.994,00
29	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	175.463.018,00	0,00
30	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	162.743.061,00	320.010.000,00
31	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	667.335.500,00	54.391.537,00
32	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga	0,00	57.145.627,00
33	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Perpustakaan	0,00	356.879.113,00

No	Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024
		(Rp)	(Rp)
34	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	56.445.336,00	90.000.000,00
35	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan-Jalan Kota	155.793.210,00	1.050.601.362,00
36	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jembatan- Jembatan pada Jalan Kota	38.319.089,00	
37	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai / Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam- Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai / Pantai	63.726.526,00	10.000.101,00
38	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai / Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam- Bangunan Pengaman Sungai / Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	90.471.478,00	0,00
39	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Air Kotor- Bangunan Pembuang Air Kotor	0,00	5.318.722,00
40	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Instalasi Air Kotor- Instalasi Air Buangan Domestik	11.704.537,00	0,00
41	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BOS	1.530.000,00	0,00
42	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang dan Jasa BOS	4.516.200,00	12.228.957,00
43	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	100.000,00	0,00
44	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	0,00	3.300.000,00
JUMLAH		15.259.278.151,00	3.836.302.493,00

Realisasi Pendapatan BLUD Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan dibandingkan Tahun Anggaran 2024 dengan realisasi sebesar Rp1.250.115.130,00 dan Rp813.022.806,00 kenaikan tersebut berasal dari hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain dan Jasa Giro pada BLUD Puskesmas.

Realisasi Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp4.718.670,00 dan Rp4.481.604,00 merupakan denda dari hasil penjualan tanah.

Realisasi Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp8.550.000,00 dan Rp3.101.860,00, merupakan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat.

Realisasi Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp2.885.696.432,00 dan pada tahun 2024 tidak terdapat realisasi yang disebabkan adanya perubahan kode rekening pada tahun 2025 sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rincian lain-lain pendapatan asli daerah yang sah pada masing-masing Perangkat Daerah per 31 Desember 2025 dan 2024 dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.1.19
Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah per Perangkat Daerah TA 2025 dan 2024

No	SKPD	Tahun 2025				Realisasi 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)		(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
1	DINAS KESEHATAN							
	Pendapatan BLUD	0,00	1.250.115.130,00	0,00	1.250.115.130,00	813.022.806,00	437.092.324,00	53,76
2	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							
	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	0,00	11.963.689,00	0,00	11.963.689,00	2.500,00	11.961.189,00	478.447,56
3	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN							
	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	35.000,00	35.000,00	100,00	-	5.000,00	30.000,00	600,00
	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	3.065.963,00	39.096.362,00	1.275,17	36.030.399,00	45.463.975,00	(6.367.613,00)	(14,01)
4	DINAS LINGKUNGAN HIDUP							
	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	0,00	2.748.030,00	0,00	2.748.030,00	1.748.337,00	999.693,00	57,18
5	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU							
	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	46.285.836,00	(46.285.836,00)	(100,00)
5	DINAS PERHUBUNGAN							
	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	3.530.304.000,00	6.239.948.835,00	176,75	2.709.644.835,00	0,00	6.239.948.835,00	0,00
6	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH							
	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	1.029.052.000,00	1.703.115.725,00	165,50	674.063.725,00	1.389.417.875,00	313.697.850,00	22,58
	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	12.629.016,00	(12.629.016,00)	(100,00)
	Jasa Giro	3.274.976.140,00	5.570.270.122,00	170,09	2.295.243.531,00	4.035.307.746,00	1.534.911.925,00	38,04
	Pendapatan Bunga	7.000.000.000,00	5.061.653.874,00	72,31	(1.938.346.126,00)	7.224.677.557,00	(2.163.023.683,00)	(29,94)
	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	10.400.002,00	27.943.254,00	268,69	17.543.252,00	13.441.667,00	14.501.587,00	107,89
	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	88.081.755,00	102.929.755,00	116,86	14.848.000,00	230.348.570,00	(127.418.815,00)	(55,32)
	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	4.618.277,00	260.857.056,00	5.648,36	256.238.779,00	627.473.886,00	(366.616.830,00)	(58,43)
	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	33.817.804,00	18.645.097,00	55,13	(15.172.707,00)	17.786.906,00	858.191,00	4,82
	Pendapatan dari Pengembalian	13.916.228.616,00	15.259.278.151,00	109,65	1.343.049.535,00	3.836.302.493,00	11.422.975.658,00	297,76
	Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan	721.600,00	4.718.670,00	653,92	3.997.070,00	4.481.604,00	237.066,00	5,29
	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	750.000,00	8.550.000,00	1.140,00	7.800.000,00	3.101.860,00	5.448.140,00	175,64
7	BADAN PENDAPATAN DAERAH							
	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00	167.752.003,00	0,00	167.752.003,00	167.057.344,00	694.659,00	0,42
	Pendapatan Denda Pajak Daerah	0,00	7.347.837.291,00	0,00	7.347.837.291,00	14.649.420.176,00	(7.301.582.885,00)	(49,84)
	Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah	4.735.554.136,00	2.885.696.432,00	60,94	(1.849.857.704,00)	0,00	2.885.696.432,00	0,00
	Jumlah	33.627.605.293,00	45.963.154.476,00	136,68	12.335.549.183,00	33.117.975.154,00	12.845.179.322,00	38,79

5.1.1.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Pendapatan Transfer meliputi Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat, Transfer Pemerintah Pusat Lainnya, dan Pendapatan Transfer Antar Daerah. Klasifikasi APBD menurut akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek pendapatan transfer dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yaitu Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor.

Alokasi Dana Transfer Pemerintah Pusat ke Pemerintah Kota Bogor diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025.

Realisasi pendapatan transfer pada TA 2025 dibandingkan dengan TA 2024 dirinci pada tabel berikut:

Tabel 5.1.20
Realisasi Pendapatan Transfer TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025				Realisasi 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.397.832.990.595,00	1.394.165.684.267,00	99,74	(3.667.306.328,00)	1.341.380.091.442,00	52.785.592.825,00	3,94
2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	16.164.800.000,00	16.164.800.000,00	100,00	0,00	28.047.664.000,00	(11.882.864.000,00)	(42,37)
3	Pendapatan Transfer Antar Daerah	159.724.271.586,00	157.386.277.840,00	98,54	(2.337.993.746,00)	342.450.420.356,00	(185.064.142.516,00)	(54,04)
Jumlah		1.573.722.062.181,00	1.567.716.762.107,00	99,62	(6.005.300.074,00)	1.711.878.175.798,00	(144.161.413.691,00)	(8,42)

Tabel di atas menunjukkan realisasi Pendapatan Transfer TA 2025 mencapai 99,62% atau sebesar Rp1.567.716.762.107,00 dari target sebesar Rp1.573.722.062.181,00. Dibandingkan realisasi TA 2024 sebesar Rp1.711.878.175.798,00, realisasi TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp144.161.413.691,00 atau 8,42%.

5.1.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan, merupakan Transfer Ke Daerah yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dan disalurkan kepada daerah untuk dikelola oleh Daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Pendapatan Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2025 tidak terlepas dari kebijakan dalam Inpres No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan ditindaklanjuti dengan KMK Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Selanjutnya hasil efisiensi dialihkan untuk digunakan pada bidang sebagai berikut:

1. bidang pendidikan;
2. bidang kesehatan;
3. infrastruktur dan sanitasi;
4. optimalisasi penanganan pengendalian inflasi;
5. stabilitas harga makanan dan minuman;
6. penyediaan cadangan pangan; dan
7. prioritas lainnya yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan pekerjaan, dan pertumbuhan ekonomi.

Anggaran dan realisasi Dana Transfer ke Daerah pada Pemerintah Kota Bogor untuk periode tahun anggaran 2025 dan tahun anggaran 2024 dapat dirinci pada tabel berikut.

Tabel 5.1.21
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025				Realisasi 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
1	Dana Bagi Hasil	129.190.683.000,00	126.979.208.200,00	98,29	(2.211.474.800,00)	114.423.344.000,00	12.555.864.200,00	10,97
2	Dana Alokasi Umum	889.509.426.000,00	884.106.755.956,00	99,39	(5.402.670.044,00)	853.803.503.264,00	30.303.252.692,00	3,55
3	Dana Alokasi Khusus - Fisik	25.689.560.000,00	25.574.335.904,00	99,55	(115.224.096,00)	44.829.645.150,00	(19.255.309.246,00)	(42,95)
4	Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	353.443.321.595,00	357.505.384.207,00	101,15	4.062.062.612,00	328.323.599.028,00	29.181.785.179,00	8,89
Jumlah		1.397.832.990.595,00	1.394.165.684.267,00	99,74	(3.667.306.328,00)	1.341.380.091.442,00	52.785.592.825,00	3,94

Untuk lebih rinci masing-masing penerimaan Transfer ke Daerah pada Tahun Anggaran 2025 dan 2024 dijelaskan pada uraian di bawah ini.

5.1.1.2.1.1 Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil merupakan bagian dari Transfer Pemerintah Pusat - Transfer ke Daerah yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan kinerja tertentu yang dibagikan kepada daerah otonom penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah otonom, serta kepada daerah otonom lain non penghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 5.1.22
Dana Bagi Hasil TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025				Realisasi 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)		(Rp)	(%)
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
1	Dana Bagi Hasil Pajak	108.178.537.000,00	102.469.806.200,00	94,72	(5.708.730.800,00)	85.946.116.000,00	16.523.690.200,00	19,23
2	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	21.012.146.000,00	24.509.402.000,00	116,64	3.497.256.000,00	28.477.228.000,00	(3.967.826.000,00)	(13,93)
	Jumlah	129.190.683.003,00	126.979.208.204,00	98,29	(2.211.474.799,00)	114.423.344.007,00	12.555.864.197,00	10,97

5.1.1.2.1.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak

Dana Hasil Pajak merupakan transfer ke daerah yang berasal dari penerimaan pajak pusat yang disalurkan ke daerah yang terdiri dari:

Tabel 5.1.23
Dana Bagi Hasil Pajak TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025				Realisasi 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)		(Rp)	(%)
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
1	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	4.919.403.000,00	4.896.049.600,00	99,53	(23.353.400,00)	14.620.813.000,00	(9.724.763.400,00)	(66,51)
2	DBH PPh Pasal 21	85.294.302.000,00	80.274.210.100,00	94,11	(5.020.091.900,00)	54.897.720.000,00	25.376.490.100,00	46,23
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	9.730.399.000,00	9.065.113.500,00	93,16	(665.285.500,00)	8.471.478.000,00	593.635.500,00	7,01
4	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	8.234.433.000,00	8.234.433.000,00	100,00	0,00	7.956.105.000,00	278.328.000,00	3,50
	Jumlah	108.178.537.000,00	102.469.806.200,00	94,72	(5.708.730.800,00)	85.946.116.000,00	16.523.690.200,00	19,23

Tabel di atas menunjukkan realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp102.469.806.200,00 atau mencapai 94,72% dari target sebesar Rp108.178.537.000,00. Apabila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2024, realisasi TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp16.523.690.200,0 atau 19,2.

5.1.1.2.1.1.2 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam merupakan bagian dari transfer Pemerintah Pusat - Transfer ke Daerah kepada Kota Bogor, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.1.24
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025				Realisasi 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)		(Rp)	(%)
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
1	DBH SDA Minyak Bumi	3.637.356.000,00	3.714.407.000,00	102,12	77.051.000,00	14.970.852.000,00	(11.256.445.000,00)	(75,19)
2	DBH SDA Gas Bumi	975.722.000,00	1.329.313.000,00	136,24	353.591.000,00	1.451.833.000,00	(122.520.000,00)	(8,44)
3	DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi	13.552.032.000,00	16.240.749.000,00	119,84	2.688.717.000,00	8.852.128.000,00	7.388.621.000,00	83,47
4	DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent	525.497.000,00	64.400,00	0,00	0,00	0,00	64.400,00	0,00
5	DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty	1.455.790.000,00	2.355.874.600,00	161,83	900.084.600,00	1.073.803.000,00	1.282.071.600,00	119,40
6	DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	31.944.000,00	35.189.000,00	110,16	3.245.000,00	1.031.457.000,00	(996.268.000,00)	(96,59)
7	DBH SDA Perikanan	833.805.000,00	833.805.000,00	100,00	0,00	1.097.155.000,00	(263.350.000,00)	(24,00)
	Jumlah	21.012.146.000,00	24.509.402.000,00	116,64	4.022.688.600,00	28.477.228.000,00	(3.967.826.000,00)	(13,93)

Tabel di atas menunjukkan realisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp24.509.402.000,00 atau mencapai 116,64% dari target sebesar Rp21.012.146.000,00. Apabila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2024, realisasi TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp3.967.826.000,00 atau 13,93%.

5.1.1.2.1.2 Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar daerah. Rincian Realisasi Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.1.25
Dana Alokasi Umum (DAU) TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025				Realisasi 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)		(Rp)	(%)
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
1	Dana Alokasi Umum (DAU)	756.729.494.000,00	751.326.823.956,00	99,29	(5.402.670.044,00)	741.419.287.264,00	9.907.536.692,00	1,34
2	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	13.600.000.000,00	13.600.000.000,00	100,00	0,00	13.600.000.000,00	0,00	0,00
3	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	5.645.224.000,00	5.645.224.000,00	100,00	0,00	36.138.888.000,00	(30.493.664.000,00)	-84,38
4	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	70.049.238.000,00	70.049.238.000,00	100,00	0,00	31.725.202.000,00	38.324.036.000,00	120,80
5	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	43.485.470.000,00	43.485.470.000,00	100,00	0,00	17.761.219.000,00	25.724.251.000,00	144,83
6	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	0,00	0,00	0,00	0,00	13.158.907.000,00	(13.158.907.000,00)	-100,00
	Jumlah	889.509.426.000,00	884.106.755.956,00	99,39	(5.402.670.044,00)	853.803.503.264,00	30.303.252.692,00	3,60

Berdasarkan tabel di atas, realisasi DAU tahun 2025 sebesar Rp884.106.755.956,00 atau 99,39% dari target anggaran sebesar Rp889.509.426.000,00. Ketidaktercapaian realisasi DAU tersebut disebabkan adanya pembayaran pokok pinjaman kepada Lembaga Keuangan Nonbank,

yang dilakukan dengan cara pemotongan langsung terhadap penyaluran Dana Alokasi Umum yang mengacu kepada perjanjian pengelolaan pinjaman. Besaran DAU dapat diperhitungkan sesuai dengan hasil rekonsiliasi antara pihak pertama dengan DJPK. Besarnya angsuran pokok setiap bulan sebesar 1/12 dari nilai DTU yang dapat diperhitungkan di tahun berkenaan yang dibayarkan setiap akhir bulan setelah masa tenggang terakhir sebesar Rp4.797.113.736,00 atau sebesar Rp399.759.478 setiap bulan.

5.1.1.2.1.3 Dana Alokasi Khusus Fisik

Dana Alokasi Khusus (DAK) bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel 5.1.26
Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025				Realisasi 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
1	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	25.689.560.000,00	25.574.335.904,00	99,55	(115.224.096,00)	44.829.645.150,00	(19.255.309.246,00)	(42,95)
2	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	353.443.321.595,00	357.505.384.207,00	101,15	4.062.062.612,00	328.323.599.028,00	29.181.785.179,00	8,89
	Jumlah	379.132.881.595,00	383.079.720.111,00	101,04	3.946.838.516,00	373.153.244.178,00	9.926.475.933,00	2,66

Berdasarkan tabel di atas, realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp383.079.720.111,00 atau 101,04% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp379.132.881.595,00, dengan realisasi lebih sebesar Rp3.946.838.516,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp373.153.244.178,00, terdapat kenaikan sebesar Rp9.926.475.933,00 atau mencapai 2,66%.

Rincian Dana Alokasi Khusus Fisik disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.1.27
Dana Alokasi Khusus - Fisik Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025				Realisasi 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
1	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	0,00	0,00	0,00	0,00	204.102.129,00	(204.102.129)	(100,00)
2	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	200.000.000,00	198.500.000,00	99,25	(1.500.000,00)	1.977.458.787,00	(1.778.958.787)	(89,96)
3	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	216.600.000,00	168.600.009,00	77,84	(47.999.991,00)	0,00	168.600.009	0,00
4	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	0,00	0,00	0,00	0,00	9.534.780.000,00	(9.534.780.000)	(100,00)
5	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB					77.707.500,00	(77.707.500)	(100,00)
6	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	0,00	0,00	0,00	0,00	33.035.596.734,00	(33.035.596.734)	(100,00)
7	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem dan Kapasitas Pelayanan Kesehatan	15.000.000.000,00	14.968.163.988,00	99,79	(31.836.012,00)	0,00	14.968.163.988	0,00
8	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Layanan Dasar	579.300.000,00	545.411.907,00	94,15	(33.888.093,00)	0,00	545.411.907	0,00
9	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Layanan Dasar	9.693.660.000,00	9.693.660.000,00	100,00	0,00	0,00	9.693.660.000	0,00
	Jumlah	25.689.560.000,00	25.574.335.904,00		(115.224.096,00)	44.829.645.150,00	(19.255.309.246,00)	(42,95)

5.1.1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus-Non Fisik

Rincian Dana Alokasi Khusus - Non Fisik pada masing-masing bidang kegiatan dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.1.28
Dana Alokasi Khusus - Non Fisik Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025				Realisasi 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)				
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)		(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
1	DAK Non Fisik-BOS Reguler	0,00	0,00	0,00	0,00	152.805.914.824,00	(152.805.914.824)	(100,00)
2	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	0,00	0,00	0,00	0,00	2.335.000.000,00	(2.335.000.000)	(100,00)
3	DAK Non Fisik-TPG PNSD	135.699.726.000,00	142.528.915.100,00	105,03	6.829.189.100,00	103.382.644.000,00	39.146.271.100	37,87
4	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	1.439.000.000,00	973.500.000,00	67,65	(465.500.000,00)	3.816.547.000,00	(2.843.047.000)	(74,49)
5	DAK Non Fisik-BOP PAUD	0,00	0,00	0,00	0,00	9.076.914.900,00	(9.076.914.900)	(100,00)
6	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	0,00	0,00	0,00	0,00	8.036.889.807,00	(8.036.889.807)	(100,00)
7	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	354.633.800,00	(354.633.800)	(100,00)
8	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	0,00	0,00	0,00	0,00	406.000.000,00	(406.000.000)	(100,00)
9	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000.000,00	(520.000.000)	(100,00)
10	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler	155.367.300.000,00	153.724.702.206,00	98,94	(1.642.597.794,00)	0,00	153.724.702.206	0,00
11	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja	2.160.750.000,00	2.863.250.000,00	132,51	702.500.000,00	0,00	2.863.250.000	0,00
12	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	9.834.560.000,00	9.582.277.279,00	97,43	(252.282.721,00)	0,00	9.582.277.279	0,00
13	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	60.000.000,00	45.000.000,00	75,00	(15.000.000,00)	90.000.000,00	(45.000.000)	(50,00)
14	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	17.256.410.000,00	17.018.452.735,00	98,62	(237.957.265,00)	15.616.122.000,00	1.402.330.735	8,98
15	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	270.000.000,00	270.000.000,00	100,00	0,00	180.000.000,00	90.000.000	50,00
16	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	8.771.025.936,00	8.771.025.936,00	100,00	0,00	15.174.498.103,00	(6.403.472.167)	(42,20)
17	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	14.961.854.000,00	14.105.565.292,00	94,28	(856.288.708,00)	16.528.434.594,00	(2.422.869.302)	(14,66)
18	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana	6.971.956.659,00	6.971.956.659,00	100,00	0,00	0,00	6.971.956.659	0,00
19	DAK Non Fisik-BOK-BOK Pengawasan Obat dan Makanan	564.099.000,00	564.099.000,00	100,00	0,00	0,00	564.099.000	0,00
20	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian	86.640.000,00	86.640.000,00	100,00	0,00	0,00	86.640.000	0,00
	Jumlah	353.443.321.595,00	357.505.384.207,00	101,15	4.062.062.612,00	328.323.599.028,00	29.181.785.179,00	8,89

5.1.1.2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya 5.1.1.2.2.1 Insentif Fiskal

Insentif Fiskal adalah dana yang bersumber dari APBN yang diberikan kepada Daerah atas pencapaian Kinerja berdasarkan kriteria tertentu berupa perbaikan dan/atau pencapaian Kinerja pemerintahan daerah antara lain pengelolaan keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar, dukungan terhadap kebijakan strategis nasional, dan/atau pelaksanaan kebijakan fiskal nasional. Berikut rincian realisasi Insentif Fiskal tahun anggaran 2025 dan tahun anggaran 2024 sebagai berikut.

Tabel 5.1.29
Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025				Realisasi 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)		(Rp)	(%)
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
1	Insentif Fiskal	16.164.800.000,00	16.164.800.000,00	100,00	0,00	28.047.664.000,00	(11.882.864.000,00)	(42,37)
	Jumlah	16.164.800.000,00	16.164.800.000,00	100,00	0,00	28.047.664.000,00	(11.882.864.000,00)	(42,37)

Berdasarkan tabel di atas, realisasi Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp16.164.800.000,00 atau 100,00% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp16.164.800.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp28.047.664.000,00, terdapat penurunan sebesar Rp11.882.864.000,00 atau 42,37%.

5.1.1.2.3 Pendapatan Transfer Antar Daerah

Transfer Antar Daerah terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat sesuai dengan:

1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
2. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
4. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 34 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Tabel 5.1.30
Pendapatan Transfer Antar Daerah Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025				Realisasi 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	147.481.481.861,00	145.298.859.311,00	98,52	(2.182.622.550,00)	303.076.793.631,00	(157.777.934.320,00)	(52,06)
2	Bantuan Keuangan	12.242.789.725,00	12.087.418.529,00	98,73	(155.371.196,00)	39.373.626.725,00	(27.286.208.196,00)	(69,30)
Jumlah		159.724.271.586,00	157.386.277.840,00	98,54	(2.337.993.746,00)	342.450.420.356,00	(185.064.142.516,00)	(54,04)

Tabel di atas menunjukkan realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah mencapai Rp157.386.277.840,00 atau 98,54% dari anggaran sebesar Rp159.724.271.586,00. Apabila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2024, terdapat penurunan realisasi TA 2025 sebesar Rp185.064.142.516,00 atau mencapai 54,04%.

5.1.1.2.3.1 Pendapatan Bagi Hasil

Pendapatan Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari Pendapatan Daerah yang dialokasikan kepada Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel 5.1.31
Pendapatan Bagi Hasil Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025				Realisasi 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	5.174.285.040,00	5.174.285.040,00	100,00	0,00	107.078.086.620,00	(101.903.801.580,00)	(95,17)
2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	4.666.803.750,00	4.666.803.750,00	100,00	0,00	66.162.370.710,00	(61.495.566.960,00)	(92,95)
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	71.092.781.439,00	71.067.683.322,00	99,96	(25.098.117,00)	70.084.028.487,00	983.654.835,00	1,40
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	199.105.801,00	199.105.801,00	100,00	0,00	219.606.800,00	(20.500.999,00)	(9,34)

No	Uraian	Tahun 2025				Realisasi 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	66.348.505.831,00	64.190.981.398,00	96,75	(2.157.524.433,00)	59.532.701.014,00	4.658.280.384,00	7,82
	Jumlah	147.481.481.861,00	145.298.859.311,00	98,52	(2.182.622.550,00)	303.076.793.631,00	(157.777.934.320,00)	(52,06)

Tabel di atas menunjukkan realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp145.298.859.311,00 atau 98,52% dari anggaran sebesar Rp147.481.481.861,00. Realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp157.777.934.320,00 atau mencapai 52,06% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2024. Penurunan disebabkan oleh implementasi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, berupa pemberlakuan opsen pajak yaitu tambahan pungutan pajak daerah meliputi Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) menjadi komponen pendapatan Pajak Daerah pada Pendapatan Asli Daerah.

5.1.1.2.3.2 Bantuan Keuangan

Bantuan Keuangan merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya. Realisasi Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2025 berasal dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai berikut:

Tabel 5.1.32
Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025				Realisasi 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
1	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah	12.242.789.725,00	12.087.418.529,00	98,73	(155.371.196,00)	39.373.626.725,00	(27.286.208.196,00)	(69,30)
	Jumlah	12.242.789.725,00	12.087.418.529,00	98,73	(155.371.196,00)	39.373.626.725,00	(27.286.208.196,00)	(69,30)

Realisasi Bantuan Keuangan tahun 2025 sebesar Rp12.087.418.529,00 mengalami penurunan 69,30% atau Rp27.286.208.196,00 dari realisasi tahun 2024 sebesar Rp39.373.626.725,00 yang dialokasikan untuk kegiatan sebagai berikut:

Tabel 5.1.33
Rincian Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2025

No	Nama Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih/ (Kurang)	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5=(4/3)	6	7
1	Jaminan Kesehatan bagi PBPU dan PB yang didaftarkan oleh Pemda	8.931.169.725,00	8.931.115.200,00	100,00	(54.525,00)	Dinas Kesehatan
2	Peningkatan Akses Masyarakat Disabilitas dan Terlantar terhadap Pelayanan Dasar	1.311.620.000,00	1.273.188.329,00	97,07	(38.431.671,00)	Dinas Sosial
3	Mobil Pemadam kebakaran	2.000.000.000,00	1.883.115.000,00	94,16	(116.885.000,00)	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	Jumlah	12.242.789.725,00	12.087.418.529,00	98,73	(155.371.196,00)	

5.1.2 Belanja

Belanja Daerah dan Transfer Tahun Anggaran 2024 disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pada tahun anggaran 2023 Pemerintah Kota Bogor telah menerapkan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2023 dan sesuai dengan Peraturan Wali Kota Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

Belanja Daerah meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer. Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kota Bogor Tahun Anggaran 2025 serta Realisasi Tahun Anggaran 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.1.34

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025				Realisasi 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
1	BELANJA OPERASI	2,958,012,808,956.00	2,835,000,060,430.00	95.84	(123,012,748,526.00)	2,774,250,053,629.00	60,750,006,801.00	2.19
2	BELANJA MODAL	409,174,368,181.00	383,274,926,236.00	93.67	(25,899,441,945.00)	400,367,986,619.00	(17,093,060,383.00)	(4.27)
3	BELANJA TIDAK TERDUGA	11,673,612,070.00	6,149,734,000.00	52.68	(5,523,878,070.00)	2,187,943,885.00	3,961,790,115.00	181.07
4	BELANJA TRANSFER	3,711,375,000.00	3,660,750,000.00	98.64	(50,625,000.00)	1,660,750,000.00	2,000,000,000.00	120.43
Jumlah		3,382,572,164,207.00	3,228,085,470,666.00	95.43	(154,486,693,541.00)	3,178,466,734,133.00	49,618,736,533.00	1.56

Berdasarkan tabel di atas, realisasi belanja tahun anggaran 2025 mencapai Rp3.228.085.470.666,00 atau 95,43% dari anggaran sebesar Rp3.382.572.164.207,00. Realisasi tahun anggaran 2025 mengalami kenaikan dibandingkan dengan realisasi 2024 sebesar Rp49.618.736.533,00 atau mencapai 1,56% dengan rincian sebagai berikut.

5.1.2.1 Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2025 serta Realisasi Tahun Anggaran 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.1.35

Belanja Operasi Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025				Realisasi 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
1	Belanja Pegawai	1,291,590,593,554.00	1,242,050,494,107.00	96.16	(49,540,099,447.00)	1,242,957,964,907.00	(907,470,800.00)	(0.07)
2	Belanja Barang dan Jasa	1,467,211,385,939.00	1,402,071,586,114.00	95.56	(65,139,799,825.00)	1,304,164,987,240.00	97,906,598,874.00	7.51
3	Belanja Bunga	8,000,000,000.00	5,028,947,290.00	62.86	(2,971,052,710.00)	7,027,746,595.00	(1,998,799,305.00)	(28.44)
4	Belanja Hibah	153,546,983,624.00	151,099,258,419.00	98.41	(2,447,725,205.00)	176,519,335,387.00	(25,420,076,968.00)	(14.40)
5	Belanja Bantuan Sosial	37,663,845,839.00	34,749,774,500.00	92.26	(2,914,071,339.00)	43,580,019,500.00	(8,830,245,000.00)	(20.26)
Jumlah		2,958,012,808,956.00	2,835,000,060,430.00	95.84	(123,012,748,526.00)	2,774,250,053,629.00	60,750,006,801.00	2.19

Tabel di atas menunjukkan realisasi belanja operasi tahun anggaran 2025 mencapai Rp2.835.000.060.430,00 atau 95,84% dari anggaran sebesar Rp2.958.012.808.956,00. Realisasi tahun anggaran 2025 mengalami kenaikan dibandingkan dengan realisasi 2024 sebesar Rp60.750.006.801,00 atau mencapai 2,19% dengan rincian sebagai berikut.

5.1.2.1.1 Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kompensasi diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN. Belanja pegawai paling sedikit berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan Pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta kepala daerah, wakil kepala daerah, honorarium, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/Jasa layanan lainnya, dan honorarium yang selanjutnya terkait belanja pegawai diuraikan dalam peraturan perundang-undangan. Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2025 serta Tahun Anggaran 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.1.36
Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025				Realisasi 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)		(Rp)	(%)
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	603,646,346,146.00	578,380,763,752.00	95.81	(25,265,582,394.00)	572,966,490,524.00	5,414,273,228.00	0.94
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	554,851,183,465.00	534,996,954,814.00	96.42	(19,854,228,651.00)	393,170,766,177.00	141,826,188,637.00	36.07
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0.00	0.00	0.00	0.00	148,571,534,471.00	(148,571,534,471.00)	(100.00)
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	50,074,880,000.00	49,255,633,478.00	98.36	(819,246,522.00)	47,141,457,844.00	2,114,175,634.00	4.48
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH / WKDH	1,022,599,792.00	776,919,319.00	75.97	(245,680,473.00)	64,134,616.00	712,784,703.00	1,111.39
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH / WKDH	2,977,289,265.00	2,977,288,820.00	100.00	(445.00)	2,329,008,000.00	648,280,820.00	27.84
7	Belanja Pegawai BLUD	79,018,294,886.00	75,662,933,924.00	95.75	(3,355,360,962.00)	78,714,573,275.00	(3,051,639,351.00)	(3.88)
	Jumlah	1,291,590,593,554.00	1,242,050,494,107.00	96.16	(49,540,099,447.00)	1,242,957,964,907.00	(907,470,800.00)	(0.07)

Berdasarkan tabel di atas, realisasi belanja pegawai tahun anggaran 2025 mencapai Rp1.242.050.494.107,00 atau 96,16% dari anggaran sebesar Rp1.291.590.593.554,00. Realisasi tahun anggaran 2025 mengalami penurunan dibandingkan dengan realisasi 2024 sebesar Rp907.470.800,00 atau mencapai 0,07%. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN pada tahun 2025 tidak terdapat realisasi karena berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5.3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan, berubah menjadi rekening rincian objek dalam Belanja Tambahan Penghasilan ASN.

Penjelasan lebih lanjut atas Belanja Pegawai antara lain sebagai berikut:

- Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp578,380,763,752.00 dan Rp572,966,490,524.00 yang terinci sebagai berikut.

Tabel 5.1.37
Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024
		(Rp)	(Rp)
1	Belanja Gaji Pokok PNS	297,840,899,457.00	313,497,999,701.00
2	Belanja Gaji Pokok PPPK	104,133,271,558.00	84,067,202,433.00
3	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	27,101,248,789.00	28,269,036,359.00
4	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	8,299,489,101.00	6,165,325,644.00
5	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	6,250,900,000.00	6,683,805,000.00
6	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	20,994,532,000.00	22,188,019,000.00
7	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	10,060,054,912.00	8,152,942,000.00
8	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	3,799,449,036.00	3,890,084,175.00
9	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	219,616,650.00	0,00
10	Belanja Tunjangan Beras PNS	15,076,468,094.00	15,902,200,860.00
11	Belanja Tunjangan Beras PPPK	5,873,915,832.00	4,520,963,340.00
12	Belanja Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus PNS	42,685,987,540.00	45,104,192,983.00

No	Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024
		(Rp)	(Rp)
13	Belanja Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus PPPK	706,692,301.00	495,994,994.00
14	Belanja Pembulatan Gaji PNS	3,838,288.00	4,195,227.00
15	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1,033,829.00	977,381.00
16	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	24,683,391,440.00	25,903,395,590.00
17	Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK	7,342,603,107.00	4,842,964,629.00
18	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	609,984,911.00	642,881,405.00
19	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	216,824,637.00	176,550,228.00
20	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	1,829,827,703.00	1,928,130,353.00
21	Belanja luran Jaminan Kematian PPPK	650,734,567.00	529,629,222.00
Jumlah		578,380,763,752.00	572,966,490,524.00

- b. Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan ASN Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp534,996,954,814.00 dan Rp532,744,654,149.00 yang terinci sebagai berikut.

Tabel 5.1.38

Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan ASN TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024
		(Rp)	(Rp)
1	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	196,937,360,447.00	176,666,170,977
2	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	5,184,884,908.00	8,854,728,313
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	72,317,834,649.00	72,829,306,904
4	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK	3,463,067,159.00	2,911,658,886
5	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	196,670,331.00	192,637,956
6	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	73,364,969,731.00	131,450,855,666
7	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	8,822,740,201.00	265,407,475
8	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Hotel	0.00	4,377,192,195
9	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Restoran	0.00	8,412,494,494
10	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Hiburan	0.00	821,355,539
11	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame	348,559,435.00	402,067,032
12	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Penerangan Jalan	0.00	3,473,652,848
13	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Parkir	0.00	251,717,413
14	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Air Tanah	39,780,552.00	78,470,726
15	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	9,744,266,894.00	8,811,631,712
16	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	4,835,009,553.00	3,301,917,593
17	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	14,481,623,324.00	0.00
18	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	90,860,425,500.00	96,477,790,420
19	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	97,500,000.00	376,500,000
20	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	1,757,772,530.00	0.00
21	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK	51,668,489,600.00	9,668,698,000
22	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PPPK	876,000,000.00	3,120,400,000
Jumlah		534,996,954,814.00	532,744,654,149.00

- c. Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp49,255,633,478.00 dan Rp47,141,457,844.00 yang terinci sebagai berikut.

Tabel 5.1.39

Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024
		(Rp)	(Rp)
1	Belanja Uang Representasi DPRD	1,114,260,000.00	1,111,635,000.00
2	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	104,017,200.00	109,384,800.00
3	Belanja Tunjangan Beras DPRD	122,534,640.00	124,996,920.00
4	Belanja Uang Paket DPRD	95,508,000.00	95,245,500.00

No	Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024
		(Rp)	(Rp)
5	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1,615,677,000.00	1,611,870,750.00
6	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	134,649,900.00	123,002,775.00
7	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	19,183,500.00	16,854,075.00
8	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	8,820,000,000.00	8,805,300,000.00
9	Belanja Tunjangan Reses DPRD	2,190,300,000.00	1,440,600,000.00
10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	14,334,470.00	599,456.00
11	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	288,000,000.00	272,160,000.00
12	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	2,292,192.00	2,285,892.00
13	Belanja Jaminan Kematian DPRD	6,876,576.00	6,857,676.00
14	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	24,024,000,000.00	23,509,000,000.00
15	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	10,704,000,000.00	9,442,000,000.00
16	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	0	469,665,000.00
Jumlah		49,255,633,478.00	47,141,457,844.00

- d. Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan KDH / WKDH Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp776,919,319.00 dan Rp64,134,616.00 yang terinci sebagai berikut.

Tabel 5.1.40

Realisasi Belanja Belanja Gaji dan Tunjangan KDH / WKDH TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024
		(Rp)	(Rp)
1	Belanja Gaji Pokok KDH / WKDH	42,900,000.00	19,500,000.00
2	Belanja Tunjangan Keluarga KDH / WKDH	5,082,000.00	2,370,000.00
3	Belanja Tunjangan Jabatan KDH / WKDH	77,220,000.00	35,100,000.00
4	Belanja Tunjangan Beras KDH / WKDH	4,779,720.00	2,172,600.00
5	Belanja Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus KDH / WKDH	78,696.00	1,001,616.00
6	Belanja Pembulatan Gaji KDH / WKDH	694.00	640.00
7	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi KDH / WKDH	9,600,000.00	3,840,000.00
8	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH / WKDH	93,600.00	37,440.00
9	Belanja luran Jaminan Kematian KDH / WKDH	280,800.00	112,320.00
10	Belanja Insentif bagi KDH / WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	10,614,652	0.00
11	Belanja Insentif bagi KDH / WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah	1,142,426	0.00
12	Belanja Insentif bagi KDH / WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	281,580,261	0.00
13	Belanja Insentif bagi KDH / WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	145,371,756	0.00
14	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	198,174,714	0.00
Jumlah		776,919,319.00	64,134,616.00

Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH tahun 2025 jauh lebih besar dari realisasi tahun 2024 yang disebabkan karena berakhirnya masa jabatan Wali Kota dan Wali Kota Bogor tahun 2019-2024 pada 20 April 2024 sehingga pada tahun 2024 hanya terealisasi 4 bulan.

- e. Realisasi Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.977.288.820,00 dan Rp2.329.008.000,00 yang terinci sebagai berikut.

Tabel 5.1.41
Realisasi Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD
serta KDH/WKDH TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024
		(Rp)	(Rp)
1	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	393,120,000.00	360,360,000.00
2	Belanja Dana Operasional KDH / WKDH	2,584,168,820.00	1,968,648,000.00
Jumlah		2,977,288,820.00	2,329,008,000.00

Rincian Belanja Pegawai pada masing-masing Perangkat Daerah per 31 Desember 2025 dan 2024 dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 5.1.42
Realisasi Belanja Pegawai per Perangkat Daerah TA 2025 dan 2024

No	SKPD	Tahun 2025				Realisasi 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)		(Rp)	(%)
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)			
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
1	DINAS PENDIDIKAN	454,381,320,728.00	451,765,245,744.00	99.42	(2,616,074,984.00)	347,744,732,035.00	104,020,513,709.00	29.91
2	DINAS KESEHATAN	207,460,376,523.00	198,656,908,151.00	95.76	(8,803,468,372.00)	118,768,482,491.00	79,888,425,660.00	67.26
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	0.00	0.00	0.00	0.00	50,282,142,702.00	(50,282,142,702.00)	(100.00)
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	19,235,669,642.00	18,307,354,863.00	95.17	(928,314,779.00)	18,014,127,623.00	293,227,240.00	1.63
5	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	15,074,448,857.00	14,191,502,353.00	94.14	(882,946,504.00)	13,886,851,718.00	304,650,635.00	2.19
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	3,619,102,414.00	3,467,861,889.00	95.82	(151,240,525.00)	3,246,025,259.00	221,836,630.00	6.83
7	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	38,220,620,285.00	35,367,672,738.00	92.54	(2,852,947,547.00)	31,210,204,002.00	4,157,468,736.00	13.32
8	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	12,363,210,266.00	11,647,494,018.00	94.21	(715,716,248.00)	11,379,425,803.00	268,068,215.00	2.36
9	DINAS SOSIAL	9,715,939,784.00	9,143,913,389.00	94.11	(572,026,395.00)	7,814,140,617.00	1,329,772,772.00	17.02
10	DINAS TENAGA KERJA	8,542,997,988.00	7,721,598,893.00	90.39	(821,399,095.00)	7,153,276,589.00	568,322,304.00	7.94
11	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	7,156,811,703.00	6,661,311,946.00	93.08	(495,499,757.00)	6,089,850,350.00	571,461,596.00	9.38
12	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	14,139,868,550.00	13,511,796,485.00	95.56	(628,072,065.00)	12,883,268,934.00	628,527,551.00	4.88
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	33,614,843,784.00	31,857,902,703.00	94.77	(1,756,941,081.00)	30,208,457,978.00	1,649,444,725.00	5.46
14	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	10,704,349,074.00	10,005,548,906.00	93.47	(698,800,168.00)	9,106,518,171.00	899,030,735.00	9.87
15	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	6,768,089,601.00	6,158,986,724.00	91.00	(609,102,877.00)	5,529,581,072.00	629,405,652.00	11.38
16	DINAS PERHUBUNGAN	36,162,073,252.00	34,439,052,929.00	95.24	(1,723,020,323.00)	31,106,829,608.00	3,332,223,321.00	10.71
17	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	13,099,985,450.00	12,398,553,192.00	94.65	(701,432,258.00)	10,056,662,932.00	2,341,890,260.00	23.29
18	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	13,524,969,098.00	12,698,592,973.00	93.89	(826,376,125.00)	12,763,659,754.00	(65,066,781.00)	(0.51)
19	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	11,441,316,595.00	10,599,476,082.00	92.64	(841,840,513.00)	9,415,533,298.00	1,183,942,784.00	12.57
20	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	9,291,123,691.00	8,966,629,789.00	96.51	(324,493,902.00)	8,486,133,802.00	480,495,987.00	5.66
21	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	7,462,787,357.00	7,043,292,544.00	94.38	(419,494,813.00)	6,869,256,346.00	174,036,198.00	2.53
22	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	8,181,529,918.00	7,846,259,320.00	95.90	(335,270,598.00)	7,085,649,254.00	760,610,066.00	10.73
23	SEKRETARIAT DAERAH	52,205,934,932.00	49,034,193,536.00	93.92	(3,171,741,396.00)	40,407,418,922.00	8,626,774,614.00	21.35
24	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	62,391,938,637.00	60,843,895,719.00	97.52	(1,548,042,918.00)	57,808,128,472.00	3,035,767,247.00	5.25
25	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	14,919,444,172.00	14,202,822,040.00	95.20	(716,622,132.00)	12,096,400,736.00	2,106,421,304.00	17.41
26	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	15,620,683,218.00	11,946,526,361.00	76.48	(3,674,156,857.00)	10,716,081,034.00	1,230,445,327.00	11.48
27	BADAN PENDAPATAN DAERAH	35,119,447,155.00	34,638,892,802.00	98.63	(480,554,353.00)	36,956,307,352.00	(2,317,414,550.00)	(6.27)
28	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	15,843,106,090.00	14,022,183,275.00	88.51	(1,820,922,815.00)	13,759,896,161.00	262,287,114.00	1.91
29	INSPEKTORAT	22,612,632,733.00	21,691,959,525.00	95.93	(920,673,208.00)	16,027,698,740.00	5,664,260,785.00	35.34
30	KECAMATAN BOGOR UTARA	16,339,744,856.00	15,446,558,276.00	94.53	(893,186,580.00)	14,492,182,073.00	954,376,203.00	6.59
31	KECAMATAN BOGOR SELATAN	28,484,494,596.00	26,843,057,918.00	94.24	(1,641,436,678.00)	24,695,566,644.00	2,147,491,274.00	8.70
32	KECAMATAN BOGOR TIMUR	12,871,765,860.00	12,131,266,544.00	94.25	(740,499,316.00)	10,718,821,079.00	1,412,445,465.00	13.18
33	KECAMATAN BOGOR BARAT	28,285,948,013.00	25,909,628,156.00	91.60	(2,376,319,857.00)	24,734,004,605.00	1,175,623,551.00	4.75
34	KECAMATAN BOGOR TENGAH	21,048,615,456.00	19,388,220,863.00	92.11	(1,660,394,593.00)	18,414,870,979.00	973,349,884.00	5.29
35	KECAMATAN TANAH SAREAL	20,302,232,037.00	18,883,379,272.00	93.01	(1,418,852,765.00)	18,592,389,436.00	290,989,836.00	1.57
36	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	5,383,171,239.00	4,610,954,189.00	85.65	(772,217,050.00)	5,133,850,317.00	(522,896,128.00)	(10.19)
Jumlah		291,590,593,554.00	242,050,494,107.00	96.16	(49,540,099,447.00)	1,063,654,426,888.00	178,396,067,219.00	16.77

5.1.2.1.2 Belanja Barang Dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan

diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain. Pengadaan barang dan jasa dalam rangka melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD.

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2025 serta Realisasi Tahun Anggaran 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.1.43
Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025				Realisasi 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)		(Rp)	(%)
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
1	Belanja Barang	277,528,283,719.50	252,110,843,632.00	90.84	(25,417,440,087.50)	237,760,321,885.00	14,350,521,747.00	6.04
2	Belanja Jasa	488,837,476,738.50	456,666,723,358.00	93.42	(32,170,753,380.50)	414,617,730,955.00	42,048,992,403.00	10.14
3	Belanja Pemeliharaan	179,729,343,620.00	174,447,159,113.00	97.06	(5,282,184,507.00)	116,798,066,547.00	57,649,092,566.00	49.36
4	Belanja Perjalanan Dinas	68,491,356,592.00	55,732,710,854.00	81.37	(12,758,645,738.00)	85,268,016,110.00	(29,535,305,256.00)	(34.64)
5	Belanja Uang dan / atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga / Pihak Lain / Masyarakat	56,922,862,700.00	55,635,474,703.00	97.74	(1,287,387,997.00)	46,269,973,715.00	9,365,500,988.00	20.24
6	Belanja Barang dan Jasa BOS	74,276,040,412.00	73,122,428,943.00	98.45	(1,153,611,469.00)	75,033,649,408.00	(1,911,220,465.00)	(2.55)
7	Belanja Barang dan Jasa BLUD	308,222,718,157.00	321,453,013,375.00	104.29	13,230,295,218.00	311,886,037,328.00	9,566,976,047.00	3.07
8	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	13,203,304,000.00	12,903,232,136.00	0.00	(300.071.864.00)	16.531.191.292.00	(3.627.959.156.00)	(21.95)
Jumlah		1,467,211,385,939.00	1,402,071,586,114.00	95.56	(65,139,799,825.00)	1,304,164,987,240.00	97,906,598,874.00	7.51

Berdasarkan tabel di atas, realisasi Belanja Barang dan Jasa tahun anggaran 2025 mencapai Rp1.402.071.586.114,00 atau 95,56% dari anggaran sebesar Rp1.467.211.385.939,00. Realisasi tahun anggaran 2025 mengalami kenaikan dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp97.906.598.874,00 atau 7,51%.

Penjelasan lebih lanjut atas Belanja Barang dan Jasa antara lain sebagai berikut.

- Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp252.110.843.632,00 dan Rp237.760.321.885,00 yang terinci sebagai berikut.

Tabel 5.1.44
Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No	Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024
		(Rp)	(Rp)
1	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	24.737.095.774	25.026.384.824
2	Belanja Bahan-Bahan Kimia	1.211.400.128	857.616.794
3	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	20.986.180.172	23.211.237.995
4	Belanja Bahan-Bahan Baku	6.671.000	17.238.400
5	Belanja Bahan-Bahan / Bibit Tanaman	2.133.031.221	1.485.632.693
6	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	40.040.600	78.261.580
7	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	108.954.700	91.385.800
8	Belanja Bahan-Bahan / Bibit Ternak / Bibit Ikan	72.200.000	84.456.100
9	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	450.238.331	23.790.997
10	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	4.776.487.393	6.934.596.162
11	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	398.198.292	1.007.446.900
12	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	171.100.846	63.901.500
13	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	5.730.408	157.444.500
14	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	875.540.281	492.945.500

No	Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024
		(Rp)	(Rp)
15	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	16.364.400	4.935.500
16	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	256.000	85.962.285
17	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	11.599.701.019	11.743.323.305
18	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	2.432.594.802	2.483.294.736
19	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	4.720.000	301.562.500
20	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	95.765.700	130.859.500
21	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	8.646.744.994	5.047.890.088
22	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	3.047.018.514	3.648.005.970
23	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	14.623.075.662	12.507.618.756
24	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	8.775.803.104	3.770.180.910
25	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga	59.125.690	666.319.525
26	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir / Cendera Mata	1.954.592.024	1.483.594.450
27	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2.377.489.518	2.168.920.605
28	Belanja Obat-Obatan-Obat	8.735.914.883	9.296.454.388
29	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	11.210.359.570	6.511.845.076
30	Belanja Barang untuk Dijual / Diserahkan kepada Masyarakat	65.000.116.773	64.223.539.412
31	Belanja Natura dan Pakan-Natura	4.493.082.509	9.053.422.401
32	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	107.264.545	180.019.250
33	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	142.900.800	0,00
34	Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Lainnya	13.259.400	11.878.624
35	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	19.995.029.810	19.608.205.236
36	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	5.906.959.599	2.926.024.167
37	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	178.110.950	114.172.000
38	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	127.900.000	206.120.000
39	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	7.865.070.722	5.414.855.510
40	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	675.000.000	1.027.500.000
41	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	453.174.869	645.188.598
42	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	0,00	627.649.530
43	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	0,00	30.360.000
44	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	0,00	99.000.000
45	Belanja Pakaian Penyelamatan	0,00	34.000.000
46	Belanja Pakaian Siaga	0,00	23.550.000
47	Belanja Pakaian Teknik	0,00	38.074.665
48	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	0,00	84.609.000
49	Belanja Pakaian Adat Daerah	264.087.367	87.127.000
50	Belanja Pakaian Batik Tradisional	0,00	112.500.000
51	Belanja Pakaian Olahraga	0,00	43.050.000
52	Belanja Pakaian Paskibraka	0,00	176.383.200
53	Belanja Pakaian Jas/Safari	0,00	5.100.000
54	Belanja Komponen-Komponen Peralatan	537.257.110	367.599.650
55	Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu	16.434.486.902	13.085.459.723
56	Belanja Komponen-Komponen Lainnya	15.012.400	0,00
57	Belanja Pipa-Pipa Baja	11.211.000	0,00
58	Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	139.221.300	0,00
59	Belanja Pipa-Pipa Lainnya	0,00	6.530.000
60	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Peralatan Intelijen	26.307.000	0,00
61	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat BengkelBermesin-Perkakas Bengkel Service	449.550	0,00

No	Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024
		(Rp)	(Rp)
62	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Kerja	0,00	1.225.600
63	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	129.360.000	0,00
64	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat RumahTangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	32.856.000	0,00
65	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-AlatStudio-Peralatan Studio Audio	1.830.000	0,00
66	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-AlatKomunikasi-Alat Komunikasi Telephone	8.500.000	0,00
67	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	0,00	450.300
68	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya	0,00	788.540
69	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Farmasi	0,00	51.846.220
70	Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	0,00	58.238.000
71	Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	0,00	8.737.920
72	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Sepatu Lapangan	0,00	24.010.000
	Jumlah	252.110.843.632,00	237.760.321.885,00

- b. Realisasi Belanja Jasa Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp456.666.723.358,00 dan Rp414.617.730.955,00 mengalami kenaikan sebesar Rp42.048.992.403,00 atau 10.14 % salah satunya disebabkan oleh adanya perubahan jenis belanja yang pada tahun 2024 termasuk belanja pegawai sedangkan pada tahun 2025 masuk sebagai belanja barang dan jasa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5.3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan.yang terinci sebagai berikut.

Tabel 5.1.45
Realisasi Belanja Jasa Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No	Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024
		(Rp)	(Rp)
1	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	6.058.295.000,00	7.045.839.800,00
2	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	8.971.825.000,00	6.467.430.000,00
3	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	608.400.000,00	529.200.000,00
4	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	86.640.000,00	5.600.000,00
5	Honorarium Rohaniwan	5.000.000,00	8.900.000,00
6	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	165.300.000,00	6.000.000,00
7	Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota	0,00	21.600.000,00
8	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	15.600.000,00	1.663.600.000,00
9	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	557.600.000,00	567.100.000,00
10	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	15.305.970.000,00	23.383.003.720,00

No	Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024
		(Rp)	(Rp)
11	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	5.070.938.807,00	7.785.762.920,00
12	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	1.356.303.029,00	1.704.049.448,00
13	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	18.934.894.761,00	17.122.554.712,00
14	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	4.875.902.903,00	4.989.566.749,00
15	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	905.000.000,00	975.000.000,00
16	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	1.655.000.000,00	1.817.500.000,00
17	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	1.050.400.000,00	770.800.000,00
18	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	766.164.468,00	520.000.000,00
19	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	602.300.000,00	828.000.000,00
20	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	32.931.724.017,00	34.831.042.061,00
21	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	195.589.998,00	333.308.000,00
22	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	2.419.689.848,00	2.919.781.844,00
23	Belanja Jasa Tenaga Ahli	4.951.518.493,00	3.351.140.467,00
24	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	59.436.556.549,00	62.609.537.408,00
25	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	18.634.336.101,00	16.704.253.644,00
26	Belanja Jasa Tenaga Caraka	129.000.000,00	120.000.000,00
27	Belanja Jasa Tenaga Supir	7.926.017.182,00	3.588.901.511,00
28	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	155.122.424,00	192.240.150,00
29	Belanja Jasa Audit / Surveillance ISO	733.998.390,00	407.468.340,00
30	Belanja Jasa Juri Perlombaan / Pertandingan	598.650.000,00	362.850.000,00
31	Belanja Jasa Tata Rias	20.000.000,00	11.000.000,00
32	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	2.288.143.655,00	2.497.869.146,00
33	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	230.500.000,00	0,00
34	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	34.794.082,00	43.666.643,00
35	Belanja Jasa Pelayanan Perpustakaan	106.875.000,00	0,00
36	Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan	166.931.324,00	199.973.738,00
37	Belanja Jasa Konversi Aplikasi / Sistem Informasi	396.869.604,00	1.996.282.510,00
38	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	2.878.063.126,00	2.782.025.484,00
39	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	293.040.590,00	490.267.685,00
40	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	273.204.061,00	0,00
41	Belanja Jasa Kalibrasi	268.388.450,00	435.990.500,00
42	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	181.618.470,00	74.639.000,00
43	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	205.977.000,00	265.600.700,00
44	Belanja Jasa Jalan / Tol	2.064.000,00	2.107.500,00
45	Belanja Jasa Iklan / Reklame, Film, dan Pementasan	8.377.408.481,00	6.595.345.400,00
46	Belanja Tagihan Telepon	280.182.450,00	276.216.162,00
47	Belanja Tagihan Air	2.799.762.710,00	3.156.202.695,00
48	Belanja Tagihan Listrik	46.498.524.628,00	46.720.799.405,00
49	Belanja Langganan Jurnal / Surat Kabar / Majalah	606.454.165,00	592.667.800,00
50	Belanja Kawat / Faksimili / Internet / TV Berlangganan	6.126.451.488,00	6.324.280.737,00
51	Belanja Paket / Pengiriman	28.300.000,00	4.428.000,00
52	Belanja Penambahan Daya	142.229.400,00	0,00
53	Belanja Registrasi / Keanggotaan	329.850.000,00	2.624.337.000,00
54	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	965.600.581,00	1.244.009.054,00
55	Belanja Pengolahan Air Limbah	21.000.000,00	28.754.900,00
56	Belanja Ganti Rugi kepada Pihak Ketiga Akibat Kecelakaan	196.653.150,00	200.000.000,00
57	Belanja Lembur	112.476.000,00	0,00
58	Belanja Medical Check Up	131.058.070,00	128.162.985,00
59	Belanja Jasa Pengujian Sampel Pangan	413.428.200,00	0,00
60	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	8.627.428.000,00	0,00
61	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/ Jasa	1.738.088.000,00	0,00
62	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBK)	128.250.000,00	0,00

No	Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024
		(Rp)	(Rp)
63	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta BPJS dan BP Kelas 3	75.780.732.000,00	75.063.978.740,00
64	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta BPJS dan BP Kelas 3	8.664.941.600,00	7.756.162.400,00
65	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	5.869.847.295,00	5.463.264.411,00
66	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	296.825.079,00	304.077.987,00
67	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	371.648.830,00	380.234.910,00
68	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	2.355.981.166,00	822.509.469,00
69	Belanja Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS	1.053.443.484,00	829.523.200,00
70	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja Rentan	318.030.000,00	0,00
71	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Pekerja Rentan	216.260.400,00	0,00
72	Belanja Sewa Tanah Kering	0,00	80.500.000,00
73	Belanja Sewa Tanah Lapangan Olahraga	27.600.000,00	49.000.000,00
74	Belanja Sewa Tanah Lapangan Parkir	44.100.000,00	38.880.000,00
75	Belanja Sewa Tanah Lapangan Pemancar dan Studio Alam	88.100.000,00	77.167.800,00
76	Belanja Sewa Mesin Proses	379.995.028,00	0,00
78	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	23.974.033.766,00	1.839.897.856,00
79	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	0,00	42.180.000,00
80	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	224.209.489,00	6.836.000,00
81	Belanja Sewa Mebel	553.753.196,00	321.359.100,00
82	Belanja Sewa Alat Pembersih	172.221.360,00	0,00
83	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	3.215.000.065,00	1.790.239.993,00
84	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	0,00	15.324.600,00
85	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	47.889.000,00	0,00
86	Belanja Sewa Sumber Tenaga	0,00	149.002.100,00
87	Belanja Sewa Peralatan Umum	60.023.000,00	7.434.000,00
88	Belanja Sewa Photo and Film Equipment	3.000.000,00	0,00
89	Belanja Sewa Komputer Jaringan	1.878.233.699,00	702.798.120,00
90	Belanja Sewa Peralatan Jaringan	0,00	722.000.000,00
91	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	1.894.198.568,00	912.047.400,00
92	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	148.500.000,00	0,00
93	Belanja Sewa Taman	16.268.910,00	22.826.200,00
94	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	1.339.821.944,00
95	Belanja Sewa Rumah Tidak Bersusun	133.050.000,00	152.500.000,00
96	Belanja Sewa Tanaman	155.111.400,00	171.295.200,00
97	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	2.994.678.318,00	2.009.154.723,00
98	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	41.540.640,00	34.247.940,00
99	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior	99.130.000,00	0,00
100	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	692.907.066,00	1.017.096.099,00
101	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	36.175.788,00	0,00
102	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	1.951.692.076,00	6.762.695.634,00
103	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	4.923.598.140,00	5.727.037.915,00
104	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal dalam Bangunan	516.259.890,00	0,00
105	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	31.968.000,00	0,00
106	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan	334.480.520,00	279.750.525,00

No	Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024
		(Rp)	(Rp)
107	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	98.954.960,00	0,00
108	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape	9.534.239.264,00	755.748.935,00
109	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang	582.254.940,00	648.019.110,00
110	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	74.041.739,00	434.543.910,00
111	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	8.155.223.792,00	2.051.546.298,00
112	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	837.145.350,00	2.504.719.212,00
113	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	929.667.513,00	3.424.900.597,00
114	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta	0,00	59.995.500,00
115	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi	1.200.986.864,00	476.478.600,00
116	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	263.113.000,00	1.345.648.325,00
117	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kuangan	1.001.037.898,00	1.268.828.390,00
118	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pendidikan	322.536.800,00	0,00
119	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan	367.491.800,00	269.643.420,00
120	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kependudukan	47.000.000,00	91.697.100,00
121	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	420.758.500,00	282.239.700,00
122	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	7.091.365.304,00	4.846.563.624,00
123	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	1.130.227.277,00	1.152.002.250,00
124	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	97.347.000,00	136.463.400,00
125	Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisata-Jasa Konsultansi Penelitian Kepariwisata	0,00	90.742.500,00
126	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	60.000.000,00	8.000.000,00
127	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	103.500.000,00	135.000.000,00
128	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3	16.000.000,00	72.000.000,00
129	Belanja Kursus Singkat / Pelatihan	2.281.599.930,00	843.877.000,00
130	Belanja Bimbingan Teknis	1.560.272.000,00	0,00
131	Belanja Diklat Kepemimpinan	897.530.000,00	501.571.000,00
132	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Software	55.649.999,00	0,00
Jumlah		456.666.723.358,00	414.617.730.955,00

- c. Realisasi Belanja Pemeliharaan Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp174.447.159.113,00 dan Rp116.798.066.547,00 mengalami kenaikan sebesar 49,36% atau Rp57.649.092.566,00 yang salah satunya berasal dari adanya kenaikan Belanja Pemeliharaan alat berat berupa bulldozer, excavator dan backhoe pada Dinas Lingkungan Hidup, kenaikan Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang pada Dinas Lingkungan Hidup untuk belanja suku cadang, perbaikan, pengelasan dan pengecatan kendaraan roda 6 sebanyak 69 kendaraan, pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk layanan sedot tinja dan pemeliharaan jalan, Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor pada Dinas Pemuda dan Olahraga sebagai persiapan pelaksanaan Pekan Olah Raga Provinsi pada tahun 2026,

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian untuk mendukung sarana Nursery, dan pemeliharaan gedung kantor pada 68 Kelurahan yang terinci sebagai berikut.

Tabel 5.1.46

Belanja Pemeliharaan Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No	Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024
		(Rp)	(Rp)
1	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Pengangkat	215.976.000,00	107.920.000,00
2	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	1.228.548.000,00	158.000.000,00
3	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Feeder	459.191.716,00	87.409.000,00
4	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	245.833.300,00	268.457.300,00
5	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	283.371.500,00	299.546.700,00
6	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	969.300.708,00	1.447.838.048,00
7	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	12.754.171.851,00	9.065.546.712,00
8	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	156.122.674,00	130.495.843,00
9	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	348.569.495,00	287.128.080,00
10	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	95.435.010,00	1.591.256.283,00
11	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik	0,00	31.999.500,00
12	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Kalibrasi	0,00	12.350.000,00
13	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor	137.325.000,00	158.500.000,00
14	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	0,00	2.580.000,00
15	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	25.864.500,00	98.927.000,00
16	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	5.550.000,00	0,00
17	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	1.072.501.471,00	768.661.218,00
18	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	336.065.380,00	357.451.750,00
19	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	1.275.202.595,00	1.113.826.302,00
20	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	251.596.530,00	148.019.850,00
21	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	0,00	165.101.710,00
22	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	207.659.700,00	259.442.500,00
23	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Cetak	0,00	17.275.000,00
24	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lain	86.879.700,00	0,00
25	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lain	0,00	49.190.760,00
26	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	927.827.772,00	567.977.642,00
27	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	1.396.275.903,00	1.331.028.487,00
28	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	862.615.062,00	661.340.800,00
29	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	70.180.774,00	410.883.690,00
30	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	20.465.020,00	215.628.485,00
31	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	0,00	159.688.152,00
32	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	43.660.119.975,00	21.817.211.008,00
33	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar	0,00	243.667.909,00
34	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	323.851.386,00	1.969.487.091,00
35	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah	1.980.999.999,00	0,00
36	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	7.299.064.631,00	2.475.857.562,00
37	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Pengujian Kelaikan	179.995.241,00	0,00

No	Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024
		(Rp)	(Rp)
38	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	25.641.000,00
39	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	298.930.992,00	0,00
40	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	15.195.753.453,00	2.876.584.354,00
41	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	118.585.614,00	74.784.918,00
42	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kota	51.274.341,00	370.406.232,00
43	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Desa	1.348.475.769,00	281.124.742,00
44	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya	48.865.667.477,00	39.035.881.342,00
45	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kota	236.587.505,00	181.285.200,00
46	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Lainnya	0,00	302.463.969,00
47	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pelengkap Irigasi	22.843.161.019,00	24.165.153.348,00
48	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	231.244.898,00	0,00
49	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor	1.667.020.661,00	153.542.818,00
50	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembuang Air Kotor	0,00	1.718.099.705,00
51	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Air Kotor Lainnya	850.547.688,00	0,00
52	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Domestik	0,00	49.764.618,00
53	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya	154.119.092,00	0,00
54	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Bangunan Penampung Sampah	598.948.444,00	0,00
55	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lain	315.630.341,00	0,00
56	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	537.126.081,00	703.409.419,00
57	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software	4.257.524.845,00	380.230.500,00
Jumlah		174.447.159.113,00	116.798.066.547,00

- d. Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp55.732.710.854,0 dan Rp85.268.016.110,00 yang terinci sebagai berikut:

Tabel 5.1.47

Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No	Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024
		(Rp)	(Rp)
1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	41.158.086.527,00	57.514.851.625,00
2	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.577.815.000,00	5.967.853.850,00
3	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	8.286.981.654,00	15.802.146.287,00
4	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	2.457.512.300,00	3.692.573.810,00
5	Belanja Perjalanan Dinas Biasa-Luar Negeri	252.315.373,00	2.290.590.538,00
Jumlah		55.732.710.854,00	85.268.016.110,00

- e. Realisasi Belanja Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp55.635.474.703,00 dan Rp46.269.973.715,00 mengalami kenaikan sebesar Rp9.365.500.988,00 atau 20,24% yang berasal dari:

- kenaikan Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan pada Dinas Pemuda dan Olahraga berupa pemberian penghargaan terhadap atlet dan pelatih berprestasi sesuai dengan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Bagi Atlet, Pelatih dan Induk Organisasi Cabang Olahraga Berprestasi.
- kenaikan Belanja Beasiswa pada Dinas Pendidikan jumlah penerima tahun 2024 sebanyak 70 orang dan tahun 2025 sebanyak 80 orang.
- kenaikan Belanja Uang yang Diberikan kepada RT dan RW yang sebelumnya untuk RT sebesar Rp300.000,00 per bulan naik menjadi Rp350.000,00 per bulan dan RW Rp400.000,00 per bulan naik menjadi Rp450.000,00 per bulan dan LPM dari Rp500.000,00 menjadi Rp600.000,00,
- kenaikan Belanja Uang yang Diberikan kepada Posyandu

- 5) kenaikan Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat pada Bagian Kesejahteraan Rakyat yang disebabkan oleh kenaikan insentif guru ngaji berdasarkan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 27 Tahun 2025 tentang Perubahan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemberian Insentif Kepada Guru Ngaji sebesar Rp200.000,00 per bulan yang terinci sebagai berikut:

Tabel 5.1.48
Realisasi Belanja Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No	Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024
		(Rp)	(Rp)
1	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	6.868.625.000,00	4.983.670.000,00
2	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	688.000.000,00	105.000.000,00
3	Belanja Beasiswa	1.523.910.000,00	1.050.110.000,00
4	Belanja Uang yang Diberikan kepada RT atau dengan Sebutan Lain	16.082.116.799,00	14.985.216.401,00
5	Belanja Uang yang Diberikan kepada RW atau dengan Sebutan Lain	4.502.900.000,00	4.237.200.000,00
6	Belanja Uang yang Diberikan kepada Karang Taruna	115.200.000,00	175.200.000,00
7	Belanja Uang yang Diberikan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	503.200.000,00	481.250.000,00
8	Belanja Uang yang Diberikan kepada Posyandu	13.227.375.000,00	8.598.200.000,00
9	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	1.067.746.904,00	719.200.000,00
10	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	11.056.401.000,00	10.934.927.314,00
Jumlah		55.635.474.703,00	46.269.973.715,00

Rincian Belanja Barang dan Jasa pada masing-masing Perangkat Daerah per 31 Desember 2025 dan 2024 dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 5.1.49
Realisasi Belanja Barang dan Jasa per Perangkat Daerah

No	SKPD	Tahun 2025				Realisasi 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
			(Rp)	(Rp)				
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
1	DINAS PENDIDIKAN	136.943.537.597,00	129.034.185.394,00	94,22	(7.909.352.203,00)	137.910.962.933,00	(8.876.777.539,00)	(6,44)
2	DINAS KESEHATAN	475.967.522.838,00	472.447.059.977,00	99,26	(3.520.462.861,00)	178.746.028.287,00	293.701.031.690,00	164,31
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00	288.917.179.193,00	(288.917.179.193,00)	(100,00)
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	84.254.002.208,00	79.937.978.662,00	94,88	(4.316.023.546,00)	77.581.900.838,00	2.356.077.824,00	3,04
5	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	156.978.812.241,00	154.456.828.870,00	98,39	(2.521.983.371,00)	137.211.228.552,00	17.245.600.318,00	12,57
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	5.175.616.823,00	4.083.326.837,00	78,90	(1.092.289.986,00)	4.158.871.360,00	(75.544.523,00)	(1,82)
7	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	10.091.696.042,00	9.383.497.567,00	92,98	(708.198.475,00)	11.708.363.126,00	(2.324.865.559,00)	(19,86)
8	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	9.634.985.164,00	9.129.562.622,00	94,75	(505.422.542,00)	3.676.419.440,00	5.453.143.182,00	148,33
9	DINAS SOSIAL	8.924.833.889,00	8.381.322.692,00	93,91	(543.511.197,00)	7.084.062.863,00	1.297.259.829,00	18,31
10	DINAS TENAGA KERJA	14.468.614.227,00	13.726.994.686,00	94,87	(741.619.541,00)	9.536.967.770,00	4.190.026.916,00	43,93
11	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	4.460.164.056,00	4.335.232.811,00	97,20	(124.931.245,00)	6.973.091.842,00	(2.637.859.031,00)	(37,83)
12	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	20.765.757.188,00	19.918.441.661,00	95,92	(847.315.527,00)	13.391.855.444,00	6.526.586.217,00	48,74
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	87.669.515.503,00	77.820.149.288,00	88,77	(9.849.366.215,00)	78.059.050.076,00	(238.900.788,00)	(0,31)
14	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	7.223.795.092,00	6.905.837.128,00	95,60	(317.957.964,00)	5.616.977.279,00	1.288.859.849,00	22,95
15	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	13.213.923.496,00	12.591.683.105,00	95,29	(622.240.391,00)	12.255.810.842,00	335.872.263,00	2,74
16	DINAS PERHUBUNGAN	110.155.491.548,00	105.271.941.886,00	95,57	(4.883.549.662,00)	72.800.723.402,00	32.471.218.484,00	44,60
17	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	15.758.154.221,00	15.144.856.477,00	96,11	(613.297.744,00)	10.986.430.788,00	4.158.425.689,00	37,85
18	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	4.731.691.490,00	4.223.968.813,00	89,27	(507.722.677,00)	4.248.465.973,00	(24.497.160,00)	(0,58)
19	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	4.876.550.962,00	4.637.212.772,00	95,09	(239.338.190,00)	4.091.752.708,00	545.460.064,00	13,33
20	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	21.609.220.911,00	19.330.613.995,00	89,46	(2.278.606.916,00)	8.289.693.271,00	11.040.920.724,00	133,19

No	SKPD	Tahun 2025				Realisasi 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)		(Rp)	(%)
21	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	3.411.381.824,00	3.284.426.622,00	96,28	(126.955.202,00)	3.050.521.631,00	233.904.991,00	7,67
22	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	6.304.623.411,00	6.128.412.727,00	97,21	(176.210.684,00)	4.107.428.532,00	2.020.984.195,00	49,20
23	SEKRETARIAT DAERAH	57.463.969.557,00	54.184.615.755,00	94,29	(3.279.353.802,00)	40.529.812.196,00	13.654.803.559,00	33,69
24	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	78.548.570.203,00	66.744.333.762,00	84,97	(11.804.236.441,00)	77.726.744.290,00	(10.982.410.528,00)	(14,13)
25	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	7.589.904.500,00	6.967.733.467,00	91,80	(622.171.033,00)	7.739.456.296,00	(771.722.829,00)	(9,97)
26	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	12.945.910.090,00	11.069.265.504,00	85,50	(1.876.644.586,00)	8.562.122.246,00	2.507.143.258,00	29,28
27	BADAN PENDAPATAN DAERAH	14.487.289.830,00	12.625.850.561,00	87,15	(1.861.439.269,00)	10.195.094.770,00	2.430.755.791,00	23,84
28	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	6.732.410.450,00	6.280.467.961,00	93,29	(451.942.489,00)	5.874.987.890,00	405.480.071,00	6,90
29	INSPEKTORAT	4.265.623.321,00	3.392.026.536,00	79,52	(873.596.785,00)	3.451.023.120,00	(58.996.584,00)	(1,71)
30	KECAMATAN BOGOR UTARA	12.707.366.345,00	12.450.016.367,00	97,97	(257.349.978,00)	9.172.216.082,00	3.277.800.285,00	35,74
31	KECAMATAN BOGOR SELATAN	15.007.069.473,00	14.656.132.043,00	97,66	(350.937.430,00)	14.236.256.394,00	419.875.649,00	2,95
32	KECAMATAN BOGOR TIMUR	10.219.093.271,00	9.893.919.353,00	96,82	(325.173.918,00)	8.122.560.047,00	1.771.359.306,00	21,81
33	KECAMATAN BOGOR BARAT	14.240.314.025,00	13.994.002.924,00	98,27	(246.311.101,00)	12.063.634.362,00	1.930.368.562,00	16,00
34	KECAMATAN BOGOR TENGAH	12.305.294.275,00	12.051.708.908,00	97,94	(253.585.367,00)	9.841.827.961,00	2.209.880.947,00	22,45
35	KECAMATAN TANAH SAREAL	13.288.663.733,00	12.985.927.449,00	97,72	(302.736.284,00)	10.514.552.471,00	2.471.374.978,00	23,50
36	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	4.790.016.135,00	4.602.050.932,00	96,08	(187.965.203,00)	5.730.912.965,00	(1.128.862.033,00)	(19,70)
Jumlah		1.467.211.385.939,00	1.402.071.586.114,00	95,56	(65.139.799.825,00)	1.304.164.987.240,00	97.906.598.874,00	7,51

5.1.2.1.3 Belanja Bunga

Belanja Bunga merupakan pengeluaran anggaran untuk pembayaran bunga yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima Pemerintah Kota seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda. Realisasi Belanja Bunga Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.1.50
Belanja Bunga Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025				Realisasi 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)		(Rp)	(%)
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
1	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri - Jangka Panjang	7.000.000.000,00	4.903.502.846,00	70,05	(2.096.497.154,00)	6.035.551.928,00	(1.132.049.082,00)	(18,76)
2	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN- Jangka Pendek	1.000.000.000,00	125.444.444,00	12,54	(874.555.556,00)	992.194.667,00	(866.750.223,00)	(87,36)
Jumlah		8.000.000.000,00	5.028.947.290,00	62,86	(2.971.052.710,00)	7.027.746.595,00	(1.998.799.305,00)	(28,44)

Berdasarkan tabel di atas, realisasi belanja bunga tahun anggaran 2025 sebesar Rp5.028.947.290,00 atau mencapai 62,86% dari anggaran sebesar Rp8.000.000.000,00. Realisasi tahun anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp1.998.799.305,00 atau 28,44% dari realisasi tahun anggaran 2024.

Realisasi belanja bunga utang pinjaman kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri - Jangka Panjang Tahun 2025 sebesar Rp4.903.502.846,00 merupakan bunga utang pinjaman kepada Pemerintah Pusat atas penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang atas dana pinjaman dari International Bank For Reconstruction and Development, Loan Agreement Nomor 7730-ID tanggal 1 September 2009 dalam rangka pembiayaan *Urban Water Supply And Sanitation Project* sesuai dengan Perjanjian Penerusan Pinjaman Nomor SLA-1226/DSMI/2009 tanggal 02 November 2009.

Metode perhitungan tingkat bunga sesuai amandemen terhadap SLA-1226/DSMI/2009 tanggal 02 November 2009 sesuai dengan surat Nomor S-88/MK.5/2023 tanggal 12

September 2023 tentang Penandatanganan Perubahan (Amandemen) Perjanjian Penerusan Pinjaman Nomor SLA-1226/DSMI/2009 tanggal 02 November 2009 antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kota Bogor, semula Pemkot Bogor wajib membayar bunga dalam mata uang Rupiah kepada Pemerintah atas jumlah pinjaman penerusan yang telah ditarik dan masih terutang dari waktu ke waktu, sebesar tingkat bunga NPPLN LIBOR + Variable Spread + 5,02 % (lima koma nol dua perseratus) per tahun terhitung sejak penarikan pinjaman didasarkan pada ketetapan yang disampaikan oleh IBRD kepada pemerintah, menjadi Pemkot Bogor membayar bunga dalam mata uang Rupiah kepada Pemerintah atas jumlah pinjaman penerusan yang telah ditarik dan masih terutang dari waktu ke waktu sebesar tingkat bunga Pinjaman Luar Negeri ditambah 5,02% (lima koma nol dua perseratus) berdasarkan tagihan yang disampaikan oleh The World Bank kepada pemerintah.

Realisasi Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Pendek sebesar Rp125.444.444,00 merupakan pembayaran bunga atas pinjaman pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah dan Peraturan Wali Kota Nomor 67 tentang 2018 tentang Pengelolaan Pinjaman pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor. Keseluruhan bunga pinjaman yang telah dibayarkan adalah sebesar Rp1.382.777.775,00 dimana sebesar Rp1.257.333.331,00 dibayarkan melalui rekening Belanja Jasa Transaksi Keuangan pada Belanja Barang dan Jasa BLUD.

Rincian Belanja Bunga pada masing-masing Perangkat Daerah per 31 Desember 2025 dan 2024 dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.1.51

Realisasi Belanja Bunga per Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No	SKPD	Tahun 2025				Realisasi 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
1	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	1.000.000.000,00	125.444.444,00	12,54	(874.555.556,00)	992.194.667,00	(866.750.223,00)	(87,36)
2	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	7.000.000.000,00	4.903.502.846,00	70,05	(2.096.497.154,00)	6.035.551.928,00	(1.132.049.082,00)	(18,76)
Jumlah		8.000.000.000,00	5.028.947.290,00	62,86	(2.971.052.710,00)	7.027.746.595,00	(1.998.799.305,00)	(28,44)

5.1.2.1.4 Belanja Hibah

Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Tata cara penganggaran, pelaksanaan, dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial di Pemerintah Kota Bogor diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 101 Tahun 2022. Realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.1.52
Belanja Hibah Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025				Realisasi 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)		(Rp)	(%)
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
1	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	27.614.244.500,00	26.561.439.150,00	96,19	(1.052.805.350,00)	64.853.633.758,00	(38.292.194.608,00)	(59,04)
2	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	49.246.391.124,00	48.349.691.124,00	98,18	(896.700.000,00)	38.968.786.299,00	9.380.904.825,00	24,07
3	Belanja Hibah Dana BOS	46.404.570.000,00	46.404.570.000,00	100,00	-	44.978.226.430,00	1.426.343.570,00	3,17
4	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	3.616.338.000,00	3.616.338.000,00	100,00	0,00	3.397.282.000,00	219.056.000,00	6,45
5	Belanja Hibah Dana BOSP	26.665.440.000,00	26.167.220.145,00	98,13	(498.219.855,00)	24.321.406.900,00	1.845.813.245,00	7,59
	Jumlah	153.546.983.624,00	151.099.258.419,00	98,41	(2.447.725.205,00)	176.519.335.387,00	(25.420.076.968,00)	(14,40)

Berdasarkan tabel di atas, realisasi belanja hibah tahun anggaran 2025 sebesar Rp151.099.258.419,00 atau mencapai 98,41% dari anggaran sebesar Rp153.546.983.624,00 realisasi hibah tahun anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp25.420.076.968,00 atau sebesar 14,40% dibandingkan realisasi tahun 2024.

Penjelasan lebih lanjut atas Belanja Hibah antara lain sebagai berikut.

- Realisasi Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp26.561.439.150,00 dan Rp64.853.633.758,00 yang terinci sebagai berikut

Tabel 5.1.53
Realisasi Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No	Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	21.445.290.489,00	53.933.637.450,00
2	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	5.116.148.661,00	10.919.996.308,00
	Jumlah	26.561.439.150,00	64.853.633.758,00

Hibah kepada Pemerintah Pusat diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga nonkementerian yang wilayah kerjanya berada dalam Kota Bogor sebesar Rp21.445.290.489,00, rincian Hibah berupa uang diberikan kepada.

Tabel 5.1.54
Realisasi Belanja Hibah Uang Kepada Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No	Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Satuan Tugas Saber Pungli Kota Bogor	875.000.000,00	875.000.000,00
2	Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor	464.474.895,00	28.858.713.600,00
3	Badan Pengawasan Pemilu Kota Bogor	890.376.300,00	9.790.029.000,00
4	Polresta Bogor Kota Bogor	10.845.226.294,00	8.576.071.000,00
5	Datasemen Polisi Militer/Denpom III/I Kota Bogor	1.647.973.000,00	350.000.000,00
6	Komando Resor Militer 061 Kota Bogor	534.240.000,00	100.000.000,00
7	Komando Distrik Militer 0606 Kota Bogor	4.038.000.000,00	2.926.375.000,00
8	Batalyon Infanteri 315/Garuda	50.000.000,00	0,00
9	Garnisun Kota Bogor	100.000.000,00	250.000.000,00
10	Kementerian Agama Kota Bogor	2.000.000.000,00	150.000.000,00
12	Kejaksaan Negeri Kota Bogor	0,00	1.732.448.850,00
13	Lanud Atang Sanjaya	0,00	150.000.000,00
14	LP KELAS IIA	0,00	75.000.000,00
15	Badan Standardisasi Instrumen Pertanian	0,00	100.000.000,00
	Jumlah	21.445.290.489,00	53.933.637.450,00

Sedangkan Hibah barang sebesar Rp5.116.148.661,00 diberikan berupa sarana dan prasarana kantor kepada.

Tabel 5.1.55

Realisasi Belanja Hibah Barang Kepada Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No	Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024
		(Rp)	(Rp)
1	Kejaksaan Negeri Kota Bogor	4.636.860.096,00	6.950.943.077,00
2	BPJN Kota Bogor	0,00	1.805.083.556,00
3	Komando Distrik Militer 0606	0,00	1.348.500.000,00
4	Kantor Pengadilan Bogor Kelas IA	227.740.365,00	781.068.000,00
5	Detasemen Kesehatan Wilayah 03.04.01	251.548.200,00	34.401.675,00
Jumlah		5.116.148.661,00	10.919.996.308,00

- b. Realisasi Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp48.349.691.124,00 dan Rp38.968.786.299,00 yang terinci sebagai berikut:

Tabel 5.1.56

Realisasi Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No	Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024
		(Rp)	(Rp)
1	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang - Undangan	32.472.661.124,00	18.128.279.189,00
2	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	575.000.000,00	486.350.000,00
3	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	14.467.030.000,00	20.314.157.110,00
4	Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	835.000.000,00	40.000.000,00
Jumlah		48.349.691.124,00	38.968.786.299,00

- c. Realisasi Belanja Hibah Dana BOS Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp46.404.570.000,00 dan Rp44.978.226.430,00 merupakan realisasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi Sekolah Dasar (SD) Swasta dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta yang penyalurannya langsung diberikan oleh Pemerintah Pusat ke sekolah penerima.
- d. Realisasi Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp3.616.338.000,00 dan Rp3.397.282.000,00 dengan rincian realisasi Tahun Anggaran 2025 dan 2024 sebagai berikut.

Tabel 5.1.57

Realisasi Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No	Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024
		(Rp)	(Rp)
1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	418.236.000,00	478.508.000,00
2	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	230.880.000,00	224.092.000,00
3	Partai Bulan Bintang (PBB)	0,00	49.256.000,00
4	Partai Amanat Nasional (PAN)	303.918.000,00	250.658.000,00
5	Partai Nasional Demokrat (NASDEM)	180.264.000,00	136.904.000,00
6	Partai Hati Nurani Rakyat	0,00	95.380.000,00
7	Partai Demokrat	262.050.000,00	246.650.000,00
8	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	473.292.000,00	554.124.000,00
9	Partai Golongan Karya (GOLKAR)	540.096.000,00	410.016.000,00
10	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	795.870.000,00	680.850.000,00

No	Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024
		(Rp)	(Rp)
11	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	284.700.000,00	228.500.000,00
12	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	127.032.000,00	42.344.000,00
Jumlah		3.616.338.000,00	3.397.282.000,00

Rincian Belanja Hibah pada masing-masing Perangkat Daerah per 31 Desember 2025 dan 2024 dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 5.1.58
Realisasi Belanja Hibah per Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No	SKPD	Tahun 2025				Realisasi 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
1	DINAS PENDIDIKAN	79.286.210.000,00	78.726.290.145,00	99,29	(559.919.855,00)	77.943.678.330,00	782.611.815,00	1,00
2	DINAS KESEHATAN	1.121.000.000,00	806.000.000,00	71,90	(315.000.000,00)	1.187.879.189,00	(381.879.189,00)	(32,15)
3	DINAS SOSIAL	130.000.000,00	130.000.000,00	100,00	0,00	229.500.000,00	(99.500.000,00)	(43,36)
4	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	785.000.000,00	785.000.000,00	100,00	0,00	380.900.000,00	404.100.000,00	106,09
5	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	(150.000.000,00)	0,00
6	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	(40.000.000,00)	(100,00)
7	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	25.989.000.000,00	25.989.000.000,00	100,00	0,00	10.635.000.000,00	15.354.000.000,00	144,37
8	SEKRETARIAT DAERAH	13.657.691.124,00	13.137.691.124,00	96,19	(520.000.000,00)	17.001.462.110,00	(3.863.770.986,00)	(22,73)
9	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	32.578.082.500,00	31.525.277.150,00	96,77	(1.052.805.350,00)	68.950.915.758,00	(37.425.638.608,00)	(54,28)
Jumlah		153.546.983.624,00	151.099.258.419,00	98,41	(2.447.725.205,00)	176.519.335.387,00	(25.420.076.968,00)	(14,40)

5.1.2.1.5 Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tata cara penganggaran, pelaksanaan, dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial di Pemerintah Kota Bogor diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 101 Tahun 2022.

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2025 serta Realisasi Tahun Anggaran 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.1.59
Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025				Realisasi 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
1	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	28.356.918.839,00	26.592.060.500,00	93,78	(1.764.858.339,00)	33.118.435.000,00	(6.526.374.500,00)	(19,71)
2	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	9.306.927.000,00	8.157.714.000,00	87,65	(1.149.213.000,00)	10.461.584.500,00	(2.303.870.500,00)	(22,02)
Jumlah		37.663.845.839,00	34.749.774.500,00	92,26	(2.914.071.339,00)	43.580.019.500,00	(8.830.245.000,00)	(20,26)

Berdasarkan tabel di atas, realisasi belanja bantuan sosial Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp34.749.774.500,00 atau mencapai 92,26% dari anggaran sebesar Rp37.663.845.839,00. Realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp8.830.245.000,00 atau mencapai 20,26% dibandingkan dengan tahun 2024. Penjelasan lebih lanjut atas Belanja Bantuan Sosial antara lain sebagai berikut.

- Realisasi Belanja Bantuan Sosial kepada Individu Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp26.592.060.500,00 dan Rp33.118.435.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.60
Realisasi Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No	Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024
		(Rp)	(Rp)
1	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	26.592.060.500,00	33.118.435.000,00
Jumlah		26.592.060.500,00	33.118.435.000,00

Adapun Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu diberikan dalam rangka perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang terealisasi sebesar Rp22.500.308.000,00 melalui anggaran pada Dinas Perumahan dan Permukiman, program RTLH merupakan bagian dari urusan perumahan dan kawasan permukiman yang bertujuan meningkatkan kualitas hunian Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui rehabilitasi rumah tidak layak huni. Pelaksanaan dilakukan secara swakelola berbasis pemberdayaan masyarakat dengan prinsip tepat sasaran, mutu, dan waktu, sesuai Perwali Kota Bogor Nomor 101 Tahun 2022.

Mekanisme pelaksanaan bersifat bottom-up, dimulai dari pengajuan masyarakat melalui kelurahan, verifikasi dan validasi, hingga penginputan dalam aplikasi Sahabat. Persyaratan meliputi identitas, bukti kepemilikan tanah, surat keterangan tidak mampu, kepesertaan program sosial, dan dokumentasi kondisi rumah. Penerima merupakan MBR desil 1-5, dengan bantuan maksimal Rp20 juta/unit, wajib menyampaikan bukti belanja dan progres kegiatan, serta dapat mengajukan kembali setelah 5 tahun. Realisasi belanja RTLH Tahun Anggaran 2025 sebanyak 2.122 unit rumah. Secara kumulatif hingga 2025, capaian penanganan RTLH mencapai 34.827 unit rumah, yang bersumber dari APBD Kota, APBD Provinsi, APBN, DAK, dan CSR.

Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu lainnya adalah bantuan pelunasan biaya pendidikan melalui anggaran Bagian Kesejahteraan Sosial pada Sekretariat Daerah yang diberikan terhadap 1411 siswa pada 84 sekolah SMA, SMK dan MA di Kota Bogor sebesar Rp4.01.752.500,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.61

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu - Realisasi Bantuan Pelunasan Biaya Pendidikan

Penerima	Daftar Penerima			Pencairan		
	Sekolah	Siswa	Nilai (Rp.)	Sekolah	Siswa	Nilai (Rp.)
1. SMA	10	65	143.865.000,00	10	58	127.935.000,00
2. SMK	72	1397	4.010.257.000,00	70	1328	3.902.417.500,00
3. MA	4	36	84.485.000,00	4	25	61.400.000,00
Jumlah	86	1498	4.238.607.000,00	84	1411	4.091.752.500,00

- b. Realisasi Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp8.157.714.000,00 dan Rp10.461.584.500,00 diberikan kepada Lembaga Pendidikan Swasta yang terdiri dari 20 PKBM, 68 SD Swasta, 83 SMP/MTs Swasta dan 92 SMA/SMK/MA Swasta.

Rincian Belanja Bantuan Sosial pada masing-masing Perangkat Daerah per 31 Desember 2025 dan 2024 dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 5.1.62

Realisasi Belanja Bantuan Sosial per Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No	SKPD	Tahun 2025				Realisasi 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)		(Rp)	(%)
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
1	DINAS PENDIDIKAN	6.187.927.000,00	6.056.714.000,00	97,88	(131.213.000,00)	5.015.796.000,00	1.040.918.000,00	20,75
2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	24.091.346.839,00	22.500.308.000,00	93,40	(1.591.038.839,00)	33.118.435.000,00	(10.618.127.000,00)	(32,06)
3	SEKRETARIAT DAERAH	7.384.572.000,00	6.192.752.500,00	83,86	(1.191.819.500,00)	5.445.788.500,00	746.964.000,00	13,72
	Jumlah	37.663.845.839,00	34.749.774.500,00	92,26	(2.914.071.339,00)	43.580.019.500,00	(8.830.245.000,00)	(20,26)

5.1.2.2 Belanja Modal

Mengacu pada Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan terkait Belanja Modal diatur sebagai berikut:

- a. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap memenuhi kriteria:

- 1) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 2) Digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
- 3) Batas minimal kapitalisasi aset.

Selain kriteria juga memuat kriteria lainnya yaitu:

- 1) Berwujud;
- 2) Biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal;
- 3) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- 4) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

- b. Dalam hal tidak memenuhi kriteria batas minimal kapitalisasi aset tetap dianggarkan dalam belanja barang dan jasa. Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

- c. Aset tetap dianggarkan belanja modal sebesar harga perolehan. Harga perolehan merupakan harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.

Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.1.63
Belanja Modal Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025				Realisasi 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)		(Rp)	(%)
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
1	Belanja Tanah	36.731.950.693,00	28.044.059.320,00	76,35	(8.687.891.373,00)	2.477.717.100,00	25.566.342.220,00	1.031,85
2	Belanja Peralatan dan Mesin	117.741.742.284,00	110.067.042.014,00	93,48	(7.674.700.270,00)	133.226.642.367,00	(23.159.600.353,00)	(17,38)
3	Belanja Gedung dan Bangunan	119.664.337.862,00	114.464.370.580,00	95,65	(5.199.967.282,00)	141.166.601.172,00	(26.702.230.592,00)	(18,92)
4	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi	121.533.865.971,00	117.476.854.621,00	96,66	(4.057.011.350,00)	112.729.496.656,00	4.747.357.965,00	4,21
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	12.884.796.571,00	12.610.804.842,00	97,87	(273.991.729,00)	10.693.173.754,00	1.917.631.088,00	17,93
6	Belanja Aset Lainnya	617.674.800,00	611.794.859,00	99,05	(5.879.941,00)	74.355.570,00	537.439.289,00	722,80
	Jumlah	409.174.368.181,00	383.274.926.236,00	93,67	(25.899.441.945,00)	400.367.986.619,00	(17.093.060.383,00)	(4,27)

5.1.2.2.1 Belanja Modal Tanah

Belanja Tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.1.64
Belanja Tanah Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025				Realisasi 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)		(Rp)	(%)
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
1	Belanja Modal Tanah	36.731.950.693,00	28.044.059.320,00	76,35	(8.687.891.373,00)	2.477.717.100,00	25.566.342.220,00	1.031,85
	Jumlah	36.731.950.693,00	28.044.059.320,00	76,35	(8.687.891.373,00)	2.477.717.100,00	25.566.342.220,00	1.031,85

Berdasarkan tabel di atas, realisasi belanja tanah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp28.044.059.320,00 atau mencapai 76,35% dari anggaran sebesar Rp36.731.950.693,00. Realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp25.566.342.220,00 atau 1.031,85% disebabkan oleh adanya pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta pengadaan bidang tanah untuk pembangunan kantor Kelurahan Situ Gede pada Kecamatan Bogor Barat. Dari anggaran sebesar Rp36.731.950.693,00 terealisasi sebesar Rp28.044.059.320,00 atau 76,35% , efisiensi berasal dari harga appraisal atas pengadaan tanah jalan R.Shaleh Danasasmita.

Penjelasan lebih lanjut atas Belanja Tanah antara lain sebagai berikut.

Tabel 5.1.65
Rincian Realisasi Belanja Tanah Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No	Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024
		(Rp)	(Rp)
1	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	6.947.807.700,00	813.680.000,00
2	Belanja Modal Tanah untuk Jalan	21.096.251.620,00	560.621.000,00
3	Belanja Modal Tanah untuk Taman	0,00	1.103.416.100,00
	Jumlah	28.044.059.320,00	2.477.717.100,00

Rincian Belanja Modal Tanah pada masing-masing Perangkat Daerah per 31 Desember 2025 dan 2024 dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 5.1.66
Realisasi Belanja Modal Tanah per Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No	SKPD	Tahun 2025				Realisasi 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)		(Rp)	(%)
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
1	DINAS PENDIDIKAN	0,00	0,00	0,00	0,00	813.680.000,00	(813.680.000,00)	0,00
2	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	29.771.910.693,00	21.096.251.620,00	0,00	0,00	560.621.000,00	20.535.630.620,00	0,00
3	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103.416.100,00	(1.103.416.100,00)	(100,00)
4	KECAMATAN BOGOR SELATAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	KECAMATAN BOGOR BARAT	6.960.040.000,00	6.947.807.700,00	0,00	0,00	0,00	6.947.807.700,00	0,00
	Jumlah	36,731,950,693,00	28,044,059,320,00	76,35	0,00	2,477,717,100,00	25,566,342,220,00	1,031,85

5.1.2.2.2 Belanja Modal Peralatan Dan Mesin

Belanja Peralatan dan Mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2025 serta Realisasi Tahun Anggaran 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.1.67
Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025				Realisasi 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)		(Rp)	(%)
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
1	Belanja Modal Alat Besar	10.951.521.500,00	10.260.308.042,00	93,69	(691.213.458,00)	25.553.015.350,00	(15.292.707.308,00)	(59,85)
2	Belanja Modal Alat Angkutan	20.175.133.100,00	18.962.382.132,00	93,99	(1.212.750.968,00)	6.625.361.000,00	12.337.021.132,00	186,21
3	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	794.534.200,00	773.631.170,00	97,37	(20.903.030,00)	173.421.950,00	600.209.220,00	346,10
4	Belanja Modal Alat Pertanian	0,00	0,00	0,00	0,00	10.050.000,00	(10.050.000,00)	(100,00)
5	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	20.183.395.798,00	16.929.927.668,00	83,88	(3.253.468.130,00)	14.090.525.351,00	2839402317,00	20,15
6	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	2.353.685.600,00	2.287.234.297,00	97,18	(66.451.303,00)	3.097.244.816,00	(810.010.519,00)	(26,15)
7	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	11.234.037.114,00	11.187.819.600,00	99,59	(46.217.514,00)	39.547.226.381,00	(28.359.406.781,00)	(71,71)
8	Belanja Modal Alat Laboratorium	5.731.678.586,00	5.000.603.009,00	87,25	(731.075.577,00)	1.570.522.568,00	3.430.080.441,00	218,40
9	Belanja Modal Komputer	15.543.921.800,00	15.224.961.979,00	97,95	(318.959.821,00)	8.221.395.190,00	7.003.566.789,00	85,19
10	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	163.974.200,00	159.840.000,00	97,48	(4.134.200,00)	154.000.000,00	5.840.000,00	3,79
11	Belanja Modal Rambu - Rambu	121.899.756,00	113.220.000,00	92,88	(8.679.756,00)	213.405.714,00	(100.185.714,00)	(46,95)
12	Belanja Modal Peralatan Olahraga	50.241.100,00	49.688.600,00	98,90	(552.500,00)	316.990.400,00	(267.301.800,00)	(84,32)
13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	24.977.914.217,00	24.491.963.787,00	98,05	(485.950.430,00)	25.699.965.311,00	(1.208.001.524,00)	(4,70)
14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	5.459.805.313,00	4.625.461.730,00	84,72	(834.343.583,00)	7.953.518.336,00	(3.328.056.606,00)	(41,84)
	Jumlah	117.741.742.284,00	110.067.042.014,00	93,48	(7.674.700.270,00)	133.226.642.367,00	(23.159.600.353,00)	(17,38)

Berdasarkan tabel di atas, realisasi Belanja Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp110.067.042.014,00 atau 93,48% dari anggaran sebesar Rp117.741.742.284,00. Realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp23.159.600.353,00 atau mencapai 17,38% dibandingkan Tahun Anggaran 2024.

Penjelasan lebih lanjut atas Belanja Peralatan dan Mesin antara lain sebagai berikut:

- Realisasi Belanja Modal Alat Besar Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp10.260.308.042,00 dan Rp25.553.015.350,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.1.68
Realisasi Belanja Modal Alat Besar Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No	Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024
		(Rp)	(Rp)
1	Belanja Modal Tractor	0,00	3.853.920.000,00
2	Belanja Modal Excavator	0,00	1.789.320.000,00
3	Belanja Modal Hauler	4.611.519.500,00	6.257.177.000,00
4	Belanja Modal Asphalt Equipment	270.549.998,00	9.271.200.000,00

No	Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024
		(Rp)	(Rp)
5	Belanja Modal Compacting Equipment	18.000.001,00	0,00
6	Belanja Modal Loader	0,00	2.094.570.000,00
7	Belanja Modal Mesin Proses	0,00	194.400.000,00
8	Belanja Modal Alat Besar Darat Lainnya	3.887.000.000,00	0,00
9	Belanja Modal Compressor	0,00	5.850.000,00
10	Belanja Modal Electric Generating Set	1.145.718.901,00	1.098.250.000,00
11	Belanja Modal Pompa	95.520.802,00	33.200.000,00
12	Belanja Modal Mesin Bor	8.222.840,00	0,00
13	Belanja Modal Perlengkapan Kebakaran Hutan	0,00	9.973.350,00
14	Belanja Modal Peralatan Selam	0,00	21.900.000,00
15	Belanja Modal Peralatan SAR Mountenering	0,00	53.255.000,00
16	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	223.776.000,00	870.000.000,00
Jumlah		10.260.308.042,00	25.553.015.350,00

- b. Realisasi Belanja Modal Alat Angkutan Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp18.962.382.132,00 dan Rp6.625.361.000,00 kenaikan berasal dari adanya pembelian kendaraan listrik sebagai amanat Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (battery electric vehicle) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta pembelian mobil layanan kepada masyarakat diantaranya mobil ambulans, bus toilet, mobil pemadam kebakaran, mobil layanan sosial dan kendaraan pelayanan pajak, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.1.69
Realisasi Belanja Modal Alat Angkutan Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No	Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024
		(Rp)	(Rp)
1	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	6.108.500.000,00	1.886.083.000,00
2	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	0,00	1.044.179.000,00
3	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	2.744.850.000,00	936.000.000,00
4	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1.881.464.722,00	128.500.000,00
5	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	127.650.000,00	38.000.000,00
6	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	8.099.917.410,00	2.527.050.000,00
7	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	0,00	64.400.000,00
8	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	0,00	1.149.000,00
Jumlah		18.962.382.132,00	6.625.361.000,00

- c. Realisasi Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp773.631.170,00 dan Rp173.421.950,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.1.70
Realisasi Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No	Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024
		(Rp)	(Rp)
1	Belanja Modal Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi	3,021,420.00	0.00
2	Belanja Modal Perkakas Bengkel Service	0.00	4,750,000.00
3	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu	111,360,750.00	149,596,990.00
4	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya	0.00	10,900,000.00
5	Belanja Modal Perkakas Standard (Standard Tools)	6,680,000.00	0.00

No	Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024
		(Rp)	(Rp)
6	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kerja	0.00	2,500,000.00
7	Belanja Modal Alat Ukur/Tes Klinis Lain	0.00	1,283,800.00
8	Belanja Modal Alat Ukur Lain-Lain	0.00	4,391,160.00
9	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	652,569,000.00	0.00
Jumlah		773,631,170.00	173,421,950.00

- d. Realisasi Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp16.929.927.668,00 dan Rp14.090.525.351,0 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.1.71

Realisasi Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No	Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024
		(Rp)	(Rp)
1	Belanja Modal Mesin Ketik	0,00	17.250.000,00
2	Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan)	53.391.000,00	0,00
3	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	679.900.965,00	129.100.000,00
4	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	2.043.143.773,00	1.131.482.414,00
5	Belanja Modal Mebel	6.905.765.743,00	8.248.087.559,00
6	Belanja Modal Alat Pembersih	204.009.250,00	100.780.000,00
7	Belanja Modal Alat Pendingin	2.889.451.542,00	1.076.684.480,00
8	Belanja Modal Alat Dapur	213.612.840,00	142.697.540,00
9	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	3.041.490.750,00	1.141.127.000,00
10	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	0,00	80.837.500,00
11	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	46.259.000,00	99.711.409,00
12	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	131.447.400,00	215.826.900,00
13	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	0,00	595.247.300,00
14	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	0,00	798.075.000,00
15	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	721.455.405,00	313.618.249,00
Jumlah		16.929.927.668,00	14.090.525.351,00

- e. Realisasi Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.287.234.297,00 dan Rp3.097.244.816,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.1.72

Realisasi Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No	Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024
		(Rp)	(Rp)
1	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	708.717.000,00	642.728.316,00
2	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	1.198.735.799,00	1.667.512.400,00
3	Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	0,00	6.800.000,00
4	Belanja Modal Peralatan Cetak	105.330.000,00	210.660.000,00
5	Belanja Modal Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	11.990.000,00	0,00
6	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	0,00	48.327.100,00
7	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	262.461.498,00	133.627.000,00
8	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	0,00	52.900.000,00
9	Belanja Modal Humidity Control	0,00	29.750.000,00
10	Belanja Modal Sumber Tenaga	0,00	304.940.000,00
Jumlah		2.287.234.297,00	3.097.244.816,00

- f. Realisasi Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp11.187.819.600,00 dan Rp39.547.226.381,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.1.73
Realisasi Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No	Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024
		(Rp)	(Rp)
1	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	619.723.050,00	1.068.827.600,00
2	Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi	150.036.000,00	420.000.000,00
3	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah	4.540.937.988,00	11.166.563.475,00
4	Belanja Modal Alat Kedokteran Mata	0,00	258.277.506,00
5	Belanja Modal Alat Kedokteran Anak	988.500.000,00	0,00
6	Belanja Modal Alat Kedokteran Poliklinik	0,00	12.844.150.759,00
7	Belanja Modal Alat Kedokteran Radiodiagnostic	0,00	9.029.800.000,00
8	Belanja Modal Alat Kedokteran Gawat Darurat	410.000.000,00	275.820.000,00
9	Belanja Modal Alat Kedokteran ICU	4.246.200.000,00	1.675.000.000,00
10	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	0,00	1.474.000.000,00
11	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	232.422.562,00	1.334.787.041,00
Jumlah		11.187.819.600,00	39.547.226.381,00

- g. Realisasi Belanja Modal Alat Laboratorium Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp5.000.603.009,00 dan Rp1.570.522.568,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.74
Realisasi Belanja Modal Alat Laboratorium Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No	Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024
		(Rp)	(Rp)
1	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	2.551.800.000,00	0,00
2	Belanja Modal Alat Laboratorium Mikrobiologi	1.241.190.000,00	0,00
3	Belanja Modal Alat Laboratorium Patologi	230.000.000,00	0,00
4	Belanja Modal Alat Laboratorium Metrologi	0,00	15.250.000,00
5	Belanja Modal Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas	4.534.500,00	0,00
6	Belanja Modal Alat Laboratorium Lain	0,00	1.555.272.568,00
7	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi: IPA Menengah	168.600.009,00	0,00
8	Belanja Modal System/Power Supply	804.478.500,00	0,00
Jumlah		5.000.603.009,00	1.570.522.568,00

- h. Realisasi Belanja Modal Komputer Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp15.224.961.979,00 dan Rp8.221.395.190,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.1.75
Realisasi Belanja Modal Komputer Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No	Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024
		(Rp)	(Rp)
1	Belanja Modal Komputer Jaringan	502.546.000,00	475.250.000,00
2	Belanja Modal Personal Computer	10.817.789.429,00	6.163.697.800,00
3	Belanja Modal Peralatan Mainframe	30.100.000,00	0,00
4	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	2.326.892.651,00	1.416.277.260,00
5	Belanja Modal Peralatan Jaringan	1.323.168.999,00	134.978.230,00
6	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	224.464.900,00	31.191.900,00
Jumlah		15.224.961.979,00	8.221.395.190,00

- i. Realisasi Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp159.840.000,00 dan Rp154.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.1.76
Realisasi Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No	Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024
		(Rp)	(Rp)
1	Belanja Modal Baju Pengaman	0,00	49.100.000,00
2	Belanja Modal Alat Pendukung Pencarian	0,00	12.300.000,00
3	Belanja Modal Alat SAR Lainnya	159.840.000,00	92.600.000,00
Jumlah		159.840.000,00	154.000.000,00

- j. Realisasi Belanja Modal Rambu-Rambu Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp113.220.000,00 dan Rp213.405.714,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.1.77
Realisasi Belanja Modal Rambu-Rambu Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No	Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024
		(Rp)	(Rp)
1	Belanja Modal Rambu Bersuar	113.220.000,00	0,00
2	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar	0,00	213.405.714,00
Jumlah		113.220.000,00	213.405.714,00

- k. Realisasi Belanja Modal Peralatan Olahraga Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp49.688.600,00 dan Rp316.990.400,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.1.78
Realisasi Belanja Modal Peralatan Olahraga Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No	Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024
		(Rp)	(Rp)
1	Belanja Modal Peralatan Permainan	49.688.600,00	211.800.000,00
2	Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	0,00	105.190.400,00
Jumlah		49.688.600,00	316.990.400,00

- l. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp24.491.963.787,00 dan Rp25.699.965.311,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.1.79
Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No	Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024
		(Rp)	(Rp)
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	25.699.965.311,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Reguler	24.182.118.506,00	0,00
3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Kinerja	58.613.400,00	0,00
4	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP PAUD Reguler	77.945.461,00	0,00
5	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	173.286.420,00	0,00
Jumlah		24.491.963.787,00	25.699.965.311,00

- m. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp4.625.461.730,00 dan Rp7.953.518.336,00.

Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada masing-masing Perangkat Daerah per 31 Desember 2025 dan 2024 dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 5.1.80
Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No	SKPD	Tahun 2025				Realisasi 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)	(Rp)	(Rp) (%)	
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)			
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
1	DINAS PENDIDIKAN	33.955.238.917,00	31.037.890.553,00	91,41	(2.917.348.364,00)	32.832.656.811,00	(1.794.766.258,00)	(5,47)
2	DINAS KESEHATAN	26.034.580.213,00	24.831.232.013,00	95,38	(1.203.348.200,00)	7.475.671.330,00	17.355.560.683,00	232,16
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00	45.422.284.974,00	(45.422.284.974,00)	(100,00)
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	2.903.476.600,00	2.853.228.450,00	98,27	(50.248.150,00)	15.652.357.325,00	(12.799.128.875,00)	(81,77)
5	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	2.359.405.600,00	2.141.314.499,00	90,76	(218.091.101,00)	1.759.559.040,00	381.755.459,00	21,70
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	163.974.200,00	159.840.000,00	97,48	(4.134.200,00)	560.286.260,00	(400.446.260,00)	(71,47)
7	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	150.834.700,00	150.750.000,00	99,94	(84.700,00)	126.941.000,00	23.809.000,00	18,76
8	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	2.235.673.700,00	2.115.826.002,00	94,64	(119.847.698,00)	257.200.000,00	1.858.626.002,00	722,64
9	DINAS SOSIAL	1.477.849.700,00	1.424.667.111,00	96,40	(53.182.589,00)	182.756.400,00	1.241.910.711,00	679,54
10	DINAS TENAGA KERJA	83.846.100,00	83.760.000,00	99,90	(86.100,00)	52.010.160,00	31.749.840,00	61,05
11	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	237.143.200,00	235.051.336,00	99,12	(2.091.864,00)	122.099.500,00	112.951.836,00	92,51
12	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	291.246.200,00	285.728.750,00	98,11	(5.517.450,00)	19.742.999,00	265.985.751,00	1.347,24
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	10.764.826.000,00	10.073.776.000,00	93,58	(691.050.000,00)	12.198.505.000,00	(2.124.729.000,00)	(17,42)
14	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1.487.992.800,00	1.434.392.494,00	96,40	(53.600.306,00)	737.063.200,00	697.329.294,00	94,61
15	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	72.853.000,00	70.620.000,00	96,93	(2.233.000,00)	60.620.000,00	10.000.000,00	16,50
16	DINAS PERHUBUNGAN	432.866.656,00	416.102.370,00	96,13	(16.764.286,00)	213.405.714,00	202.696.656,00	94,98
17	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	3.148.646.000,00	2.462.080.947,00	78,19	0,00	15.598.270,00	2.446.482.677,00	0,00
18	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	0,00	0,00	0,00	0,00	16.399.000,00	(16.399.000,00)	(100,00)
19	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	1.970.696.800,00	1.860.853.500,00	94,43	(109.843.300,00)	127.500.000,00	1.733.353.500,00	1.359,49
20	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	1.508.374.000,00	1.496.596.228,00	99,22	(11.777.772,00)	69.591.300,00	1.427.004.928,00	2.050,55
21	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	293.176.300,00	291.221.300,00	99,33	(1.955.000,00)	61.035.000,00	230.186.300,00	377,14
22	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	137.790.900,00	130.949.000,00	95,03	(6.841.900,00)	107.389.000,00	23.560.000,00	21,94
23	SEKRETARIAT DAERAH	9.152.455.400,00	8.416.993.787,00	91,96	(735.461.613,00)	3.253.902.356,00	5.163.091.431,00	158,67
24	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	5.971.937.000,00	5.781.784.886,00	96,82	(190.152.114,00)	1.476.334.400,00	4.305.450.486,00	291,63
25	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.262.623.300,00	1.232.271.800,00	97,60	(30.351.500,00)	73.808.340,00	1.158.463.460,00	1.569,56
26	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1.355.226.700,00	1.245.822.500,00	91,93	(109.404.200,00)	1.730.501.169,00	(484.678.669,00)	(28,01)
27	BADAN PENDAPATAN DAERAH	3.397.882.000,00	3.008.918.027,00	88,55	(388.963.973,00)	811.325.000,00	2.197.593.027,00	270,86
28	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.041.768.200,00	1.033.171.200,00	99,17	(8.597.000,00)	375.500.000,00	657.671.200,00	175,15
29	INSPEKTORAT	720.508.900,00	717.460.300,00	99,58	(3.048.600,00)	916.932.000,00	(199.471.700,00)	(21,75)
30	KECAMATAN BOGOR UTARA	684.134.100,00	680.882.280,00	99,52	(3.251.820,00)	618.875.000,00	62.007.280,00	10,02
31	KECAMATAN BOGOR SELATAN	1.046.513.600,00	1.042.818.500,00	99,65	(3.695.100,00)	1.263.670.000,00	(220.851.500,00)	(17,48)
32	KECAMATAN BOGOR TIMUR	881.241.100,00	869.148.400,00	98,63	(12.092.700,00)	840.650.000,00	28.498.400,00	0,00
33	KECAMATAN BOGOR BARAT	590.399.200,00	587.000.000,00	99,42	(3.399.200,00)	778.922.960,00	(191.922.960,00)	0,00
34	KECAMATAN BOGOR TENGAH	1.272.953.000,00	1.268.528.000,00	99,65	(4.425.000,00)	803.557.900,00	464.970.100,00	0,00
35	KECAMATAN TANAH SAREAL	342.074.498,00	340.943.600,00	99,67	(1.130.898,00)	1.300.500.000,00	(959.556.400,00)	0,00
36	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	311.533.700,00	285.418.181,00	91,62	(26.115.519,00)	911.490.959,00	(626.072.778,00)	0,00
	Jumlah	117.741.742.284,00	110.067.042.014,00	93,48	(7.674.700.270,00)	133.226.642.367,00	(23.159.600.353,00)	(17,38)

5.1.2.2.3 Belanja Modal Gedung Dan Bangunan

Belanja Gedung dan Bangunan, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.1.81

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025				Realisasi 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
1	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	117.336.337.862,00	112.151.553.898,00	95,58	(5.184.783.964,00)	137.821.755.710,00	(25.670.201.812,00)	(18,63)
2	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	300.000.000,00	299.708.480,00	99,90	(291.520,00)	86.900.104,00	212.808.376,00	244,89
3	Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan	0,00	0,00	0,00	-	534.121.026,00	(534.121.026,00)	(100,00)
4	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	2.028.000.000,00	2.013.108.202,00	99,27	(14.891.798,00)	2.723.824.332,00	(710.716.130,00)	(26,09)
Jumlah		119.664.337.862,00	114.464.370.580,00	95,65	(5.199.967.282,00)	141.166.601.172,00	(26.702.230.592,00)	(18,92)

Berdasarkan tabel di atas, realisasi belanja modal gedung dan bangunan tahun anggaran 2025 sebesar Rp114.464.370.580,00 atau mencapai 95,65% dari anggaran sebesar Rp119.664.337.862,00. Realisasi tahun anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp26.702.230.592,00 atau 18,92% dari realisasi tahun 2024.

- Realisasi Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp112.151.553.898,00 dan Rp137.821.755.710,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.1.82

Rincian Realisasi Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No	Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024
		(Rp)	(Rp)
1	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	44.833.656.911,00	14.574.142.168,00
2	Belanja Modal Bangunan Gedung Instalasi	0,00	287.787.221,00
3	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	342.508.488,00	4.941.441.161,00
4	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	0,00	6.923.144.191,00
5	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	61.261.021.171,00	104.333.432.219,00
6	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	0,00	1.840.500.000,00
7	Belanja Modal Bangunan Gedung Museum	280.665.720,00	0,00
8	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	136.689.574,00	0,00
9	Belanja Modal Taman	5.297.012.034,00	4.921.308.750,00
10	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	0,00	86.900.104,00
Jumlah		112.151.553.898,00	137.908.655.814,00

- Realisasi Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp299.708.480,00 dan Rp86.900.104,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.1.83
Rincian Realisasi Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Tahun
Anggaran 2025 dan 2024

No	Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024
		(Rp)	(Rp)
1	Belanja Modal Rumah Tidak Bersusun	299.708.480,00	86.900.104,00
Jumlah		299.708.480,00	86.900.104,00

- c. Realisasi Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp0,00 dan Rp534.121.026,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.1.84
Rincian Realisasi Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan Tahun Anggaran
2025 dan 2024

No	Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024
		(Rp)	(Rp)
1	Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan Lainnya	0,00	534.121.026,00
Jumlah		0,00	534.121.026,00

- d. Realisasi Belanja Modal Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.013.108.202,00 dan Rp2.723.824.332,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.1.85
Rincian Realisasi Belanja Modal Tugu/Tanda Batas
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No	Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024
		(Rp)	(Rp)
1	Belanja Modal Pagar	2.013.108.202,00	2.723.824.332,00
Jumlah		2.013.108.202,00	2.723.824.332,00

Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada masing-masing Perangkat Daerah per 31 Desember 2025 dan 2024 dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.1.86
Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No	SKPD	Tahun 2025				Realisasi 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
1	DINAS PENDIDIKAN	65.058.288.412,00	61.261.021.171,00	94,16	(3.797.267.241,00)	105.326.273.527,00	(44.065.252.356,00)	(41,84)
2	DINAS KESEHATAN	7.223.648.000,00	7.012.157.642,00	97,07	(211.490.358,00)	3.956.535.744,00	3.055.621.898,00	77,23
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	99.688.000,00	97.868.700,00	98,18	(1.819.300,00)	8.550.030.791,00	(8.452.162.091,00)	(98,86)
4	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	5.733.966.620,00	5.596.720.514,00	97,61	(137.246.106,00)	4.788.815.359,00	807.905.155,00	16,87
5	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	0,00	0,00	0,00	0,00	7.222.717.570,00	(7.222.717.570,00)	0,00
6	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	0,00	0,00	0,00	0,00	586.396.251,00	(586.396.251,00)	(100,00)
7	DINAS PERHUBUNGAN	12.395.006.780,00	11.940.469.237,00	96,33	(454.537.543,00)	534.121.026,00	11.406.348.211,00	2.135,54
8	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	23.975.890.000,00	23.508.383.880,00	98,05	(467.506.120,00)	1.840.500.000,00	21.667.883.880,00	1.177,28
9	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	296.741.000,00	280.665.720,00	0,00	0,00	0,00	280.665.720,00	0,00
10	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	2.028.000.000,00	2.013.108.202,00	99,27	(14.891.798,00)	1.453.664.125,00	559.444.077,00	38,49
11	INSPEKTORAT	180.652.000,00	180.174.179,00	99,74	(477.821,00)	0,00	180.174.179,00	0,00

No	SKPD	Tahun 2025				Realisasi 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
12	KECAMATAN BOGOR UTARA	0,00	0,00	0,00	0,00	925.996.841,00	(925.996.841,00)	0,00
13	KECAMATAN BOGOR SELATAN	344.005.200,00	342.508.488,00	99,56	0,00	0,00	342.508.488,00	0,00
14	KECAMATAN BOGOR BARAT	198.348.850,00	197.780.067,00	99,71	(568.783,00)	582.226.098,00	(384.446.031,00)	0,00
15	KECAMATAN BOGOR TIMUR	0,00	0,00	0,00	0,00	91.982.415,00	(91.982.415,00)	(100,00)
16	KECAMATAN BOGOR TENGAH	0,00	0,00	0,00	0,00	2.043.086.591,00	(2.043.086.591,00)	0,00
17	KECAMATAN TANAH SAREAL	2.130.103.000,00	2.033.512.780,00	95,47	2.033.512.780,00	2.956.087.795,00	(922.575.015,00)	(31,21)
18	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0,00	0,00	0,00	0,00	308.167.039,00	(308.167.039,00)	0,00
Jumlah		119.664.337.862,00	114.464.370.580,00	95,65	(5.199.967.282,00)	141.166.601.172,00	(26.702.230.592,00)	(18,92)

5.1.2.2.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi Dan Jaringan

Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2025 serta Realisasi Tahun Anggaran 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.1.87
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025				Realisasi 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
1	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	75.675.877.245,00	73.331.023.793,00	96,90	(2.344.853.452,00)	53.400.131.735,00	19.930.892.058,00	37,32
2	Belanja Modal Bangunan Air	42.668.519.826,00	41.087.245.412,00	96,29	(1.581.274.414,00)	56.419.934.712,00	(15.332.689.300,00)	(27,18)
3	Belanja Modal Instalasi	1.459.545.000,00	1.361.284.406,00	93,27	(98.260.594,00)	2.909.430.209,00	(1.548.145.803,00)	(53,21)
4	Belanja Modal Jaringan	1.729.923.900,00	1.697.301.010,00	98,11	(32.622.890,00)	0,00	1.697.301.010,00	0,00
Jumlah		121.533.865.971,00	117.476.854.621,00	96,66	(4.057.011.350,00)	112.729.496.656,00	4.747.357.965,00	4,21

Berdasarkan tabel di atas, realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun anggaran 2025 sebesar Rp117.476.854.621,00 atau mencapai 96,66% dari anggaran sebesar Rp121.533.865.971,00. Realisasi tahun anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp4.747.357.965,00 atau 4,21% dari realisasi tahun 2024.

Penjelasan lebih lanjut atas Jalan, Irigasi dan Jaringan antara lain sebagai berikut.

- Realisasi Belanja Modal Jalan dan Jembatan Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp73.331.023.793,00 dan Rp53.400.131.735,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.1.88
Belanja Modal Jalan dan Jembatan Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No	Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024
		(Rp)	(Rp)
1	Belanja Modal Jalan Kota	69.155.263.827,00	45.323.254.124,00
2	Belanja Modal Jalan Desa	965.249.231,00	584.747.171,00
3	Belanja Modal Jalan Lainnya	1.080.582.980,00	2.728.976.267,00
4	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kota	1.910.623.074,00	4.763.154.173,00
5	Belanja Modal Jembatan Penyeberangan	219.304.681,00	0,00
Jumlah		73.331.023.793,00	53.400.131.735,00

- b. Realisasi Belanja Modal Bangunan Air Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp41.087.245.412,00 dan Rp56.419.934.712,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.1.89
Realisasi Belanja Modal Bangunan Air Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No	Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024
		(Rp)	(Rp)
1	Belanja Modal Bangunan Pengaman Irigasi	0,00	550.409.443,00
2	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Irigasi	448.638.106,00	792.040.095,00
3	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	774.133.320,00	922.150.556,00
4	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	18.031.488.137,00	33.004.511.126,00
5	Belanja Modal Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	259.400.393,00	0,00
6	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	119.598.106,00	0,00
7	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	55.078.200,00	0,00
8	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	17.308.126.503,00	19.314.153.989,00
9	Belanja Modal Bangunan Pengaman Air Kotor	0,00	0,00
10	Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya	4.090.782.647,00	1.836.669.503,00
Jumlah		41.087.245.412,00	56.419.934.712,00

- c. Realisasi Belanja Modal Instalasi Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.361.284.406,00 dan Rp2.909.430.209,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.1.90
Realisasi Belanja Modal Instalasi Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No	Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024
		(Rp)	(Rp)
1	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	744.319.264,00	0,00
2	Belanja Modal Instalasi Air Buangan Domestik	0,00	989.734.442,00
3	Belanja Modal Instalasi Air Kotor Lainnya	499.003.232,00	1.701.782.491,00
4	Belanja Modal Bangunan Penampung Sampah	0,00	217913276,00
5	Belanja Modal Instalasi Gas Lainnya	117961910,00	0,00
Jumlah		1.361.284.406,00	2.909.430.209,00

- d. Realisasi Belanja Modal Jaringan Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.697.301.010,00 dan Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.1.91
Realisasi Belanja Modal Jaringan Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No	Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024
		(Rp)	(Rp)
1	Belanja Modal Jaringan Transmisi	143.851.938,00	0,00
2	Belanja Modal Jaringan dengan Media Udara	1.553.449.072,00	0,00
Jumlah		1.697.301.010,00	0,00

Rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan pada masing-masing Perangkat Daerah per 31 Desember 2025 dan 2024 dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.1.92
Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan per Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No	SKPD	Tahun 2025				Realisasi 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
1	DINAS PENDIDIKAN	2.834.500.858,00	2.437.074.619,00	85,98	(397.426.239,00)	390.614.237,00	2.046.460.382,00	523,91
2	DINAS KESEHATAN	224.000.000,00	200.000.000,00	89,29	(24.000.000,00)	0,00	200.000.000,00	0,00
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	108.204.933.111,00	104.712.746.186,00	96,77	(3.492.186.925,00)	102.962.295.119,00	1.750.451.067,00	1,70
4	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	1.960.565.186,00	1.942.937.758,00	99,10	(17.627.428,00)	3.737.578.307,00	(1.794.640.549,00)	(48,02)
12	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	194.859.000,00	194.346.489,00	99,74	(512.511,00)	0,00	194.346.489,00	0,00
5	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	-	-	0,00	0,00	197.935.738,00	(197.935.738,00)	(100,00)
6	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	936.069.400,00	870.947.798,00	93,04	(65.121.602,00)	970.346.631,00	(99.398.833,00)	(10,24)
13	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1.585.024.100,00	1.553.449.072,00	98,01	(31.575.028,00)	0,00	1.553.449.072,00	0,00
7	KECAMATAN BOGOR UTARA	-	-	0,00	0,00	949.676.375,00	(949.676.375,00)	(100,00)
8	KECAMATAN BOGOR SELATAN	850.314.000,00	843.105.319,00	99,15	(7.208.681,00)	685.563.196,00	157.542.123,00	22,98
9	KECAMATAN BOGOR TIMUR	561.031.200,00	557.995.208,00	99,46	(3.035.992,00)	124.320.511,00	433.674.697,00	348,84
10	KECAMATAN BOGOR BARAT	1.625.366.870,00	1.619.419.860,00	99,63	(5.947.010,00)	1.336.970.942,00	282.448.918,00	21,13
11	KECAMATAN BOGOR TENGAH	191.627.500,00	189.610.422,00	98,95	(2.017.078,00)	0,00	189.610.422,00	0,00
11	KECAMATAN TANAH SAREAL	2.365.574.746,00	2.355.221.890,00	99,56	(10.352.856,00)	1.374.195.600,00	981.026.290,00	71,39
	Jumlah	121.533.865.971,00	117.476.854.621,00	96,66	(4.057.011.350,00)	112.729.496.656,00	4.747.357.965,00	4,21

5.1.2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja Aset Tetap Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Tabel 5.1.93
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025				Realisasi 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	259.741.200,00	242.004.402,00	93,17	(17.736.798,00)	126.990.800,00	115.013.602,00	90,57
2	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	12.625.055.371,00	12.368.800.440,00	97,97	(256.254.931,00)	10.566.182.954,00	1.802.617.486,00	17,06
	Jumlah	12.884.796.571,00	12.610.804.842,00	97,87	(273.991.729,00)	10.693.173.754,00	1.917.631.088,00	17,93

Berdasarkan tabel di atas, realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya tahun anggaran 2025 sebesar Rp12.610.804.842,00 atau mencapai 97,87% dari anggaran sebesar Rp12.884.796.571,00. Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya tahun anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp1.917.631.088,00 atau 17,93% dari realisasi tahun 2024.

- a. Realisasi Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tahun Anggaran 2025 dan 2024 sebesar Rp242.004.402,00 dan Rp126.990.800,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.1.94
Realisasi Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No	Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024
		(Rp)	(Rp)
1	Belanja Modal Buku Umum	114.088.000,00	97.710.800,00
2	Belanja Modal Buku Ilmu Sosial	0,00	29.280.000,00
3	Belanja Modal Terekam Dan Bentuk Mikro Lainnya	127.916.402,00	0,00
Jumlah		242.004.402,00	126.990.800,00

- b. Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS Tahun Anggaran 2025 dan 2024 sebesar Rp12.368.800.440,00 dan Rp10.566.182.954,00.

Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada masing-masing Perangkat Daerah per 31 Desember 2025 dan 2024 dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 5.1.95
Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya per Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No	SKPD	Tahun 2025				Realisasi 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)		(Rp)	(%)
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
1	DINAS PENDIDIKAN	12.625.055.371,00	12.368.800.440,00	97,97	(256.254.931,00)	10.566.182.954,00	1.802.617.486,00	17,06
2	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	259.741.200,00	242.004.402,00	93,17	(17.736.798,00)	97.710.800,00	144.293.602,00	0,00
3	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00	29.280.000,00	(29.280.000,00)	0,00
Jumlah		12.884.796.571,00	12.610.804.842,00	97,87	(273.991.729,00)	10.693.173.754,00	1.917.631.088,00	17,93

5.1.2.2.6 Belanja Modal Aset Lainnya

Belanja Aset Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Belanja modal aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Aset lainnya berupa aset tidak berwujud dengan kriteria:

- 1) Dapat diidentifikasi;
- 2) Tidak mempunyai wujud fisik;
- 3) Dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual;
- 4) Dapat dikendalikan oleh entitas; dan
- 5) Memiliki manfaat ekonomi masa depan.

Tabel 5.1.96
Belanja Modal Aset Lainnya Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025				Realisasi 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)		(Rp)	(%)
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
1	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	617.674.800,00	611.794.859,00	99,05	(5.879.941,00)	74.355.570,00	537.439.289,00	722,80
Jumlah		617.674.800,00	611.794.859,00	99,05	(5.879.941,00)	74.355.570,00	537.439.289,00	722,80

Berdasarkan tabel di atas, realisasi Belanja Aset Lainnya tahun anggaran 2025 sebesar Rp611.794.859,00 atau mencapai 99,05% dari anggaran sebesar Rp617.674.800,00. Realisasi tahun anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp537.439.289,00 atau 722,80% dari realisasi tahun 2024.

- a. Realisasi Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp611.794.859,00 dan Rp74.355.570,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.1.97

Realisasi Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No	Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024
		(Rp)	(Rp)
1	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	611.794.859,00	74.355.570,00
Jumlah		611.794.859,00	74.355.570,00

Rincian Belanja Modal Aset Tidak Berwujud pada masing-masing Perangkat Daerah per 31 Desember 2025 dan 2024 dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.1.98

Realisasi Belanja Modal Aset Tidak Berwujud per Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No	SKPD	Tahun 2025				Realisasi 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
			(Rp)	(Rp)			(%)	(Rp)
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
1	DINAS KESEHATAN	38.850.000,00	33.300.000,00	85,71	(5.550.000,00)	0,00	33.300.000,00	0,00
1	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	0,00	0,00	0,00	0,00	74.355.570,00	(74.355.570,00)	0,00
2	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATANGAN SIPIL	380.037.300,00	379.734.959,00	99,92	(302.341,00)	0,00	379.734.959,00	0,00
3	SEKRETARIAT DAERAH	198.787.500,00	198.759.900,00	99,99	(27.600,00)	0,00	198.759.900,00	0,00
Jumlah		617.674.800,00	611.794.859,00	99,05	(5.879.941,00)	74.355.570,00	537.439.289,00	722,80

5.1.2.3 Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 mengacu pada Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, ketentuan terkait Belanja Tidak Terduga diatur sebagai berikut:

- a. Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- b. Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Keadaan darurat meliputi:
 - 1) bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau
 - 2) kejadian luar biasa;
 - 3) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - 4) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu
 - 5) kegiatan pelayanan publik.

Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat

bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa. Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penggunaan belanja tidak terduga untuk kebutuhan tanggap darurat bencana meliputi pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, dan penampungan serta tempat hunian sementara.

Batas waktu penggunaan belanja tidak terduga adalah waktu status keadaan darurat bencana yaitu dimulai saat tanggap darurat ditetapkan oleh kepala daerah sampai ditetapkan tahap tanggap darurat selesai.

d. Keperluan mendesak meliputi:

- 1) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- 2) Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - a) Belanja daerah yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti:
 - (1) belanja pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan gaji, tunjangan; dan
 - (2) belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik dan internet
 - b) Belanja daerah yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain: pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- 4) Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat. Pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD dan/atau Perubahan DPA SKPD.

e. Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD tahun berkenaan.

f. Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.

g. Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya diusulkan oleh SKPD terkait

Realisasi belanja tak terduga seluruhnya terdapat di Badan Keuangan dan Aset Daerah dengan realisasi Tahun Anggaran 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.1.99
Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025				Realisasi 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
1	Belanja Tidak Terduga	11.673.612.070,00	6.149.734.000,00	52,68	(5.523.878.070,00)	2.187.943.885,00	3.961.790.115,00	181,07
Jumlah		11.673.612.070,00	6.149.734.000,00	52,68	(5.523.878.070,00)	2.187.943.885,00	3.961.790.115,00	181,07

Berdasarkan tabel di atas realisasi belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp6.149.734.000,00 dari anggaran sebesar Rp11.673.612.070,00 atau mencapai 52,68%. Realisasi tahun anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp3.961.790.115,00 atau 181,07% dibandingkan dengan tahun anggaran 2024, yang diantaranya digunakan untuk Bantuan Sosial Tidak Terencana untuk Rumah Tidak Layak Huni pada Dinas Perumahan dan Pemukiman sebanyak 348 penerima manfaat sebesar Rp6.124.000.000,00, dan Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya sebesar Rp25.734.000,00.

Penggunaan Belanja Tidak Terduga selain melalui pembebanan langsung pada Badan Keuangan dan Aset Daerah juga digunakan untuk mendanai keperluan mendesak yang dilakukan melalui pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga ke RKA/DPA SKPD/Unit SKPD yang membidangi. Pada tahun 2025 dilakukan pergeseran pada Dinas Perumahan dan Permukiman untuk pembangunan 4 Tembok Penahan Tanah (TPT), perbaikan 2 Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) sebesar Rp3.378.628.680,00, pergeseran pada Kecamatan Bogor Timur untuk pemenuhan belanja daerah yang bersifat mengikat sebesar Rp10.403.240,00 dan pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebesar Rp16.000.000,00 serta dilakukan juga pergeseran untuk belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara sebagai bantuan dampak bencana alam sebesar Rp2.000.000.000,00.

5.1.3 Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja Transfer Tahun Anggaran 2025 direalisasikan untuk kompensasi dampak lingkungan terhadap masyarakat sekitar TPAS Galuga yaitu Desa Galuga, Desa Cijujung dan Desa Dukuh sesuai dengan Keputusan Wali Kota Bogor Nomor 600.1.16.3/Kep.263-DLH/2025 tanggal 6 Agustus 2025 dan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Provinsi Aceh sebesar Rp1.000.000.000,00, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp500.000.000,00 dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp500.000.000,00 dalam rangka penanganan masyarakat terdampak bencana alam.

Realisasi belanja transfer seluruhnya terdapat di Badan Keuangan dan Aset Daerah dengan Realisasi Tahun Anggaran 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.1.100

Belanja Transfer Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025				Realisasi 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
1	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000.000,00	0,00
2	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten / Kota	1.665.750.000,00	1.660.750.000,00	0,00	(5.000.000,00)	1.660.750.000,00	0,00	0,00
3	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten / Kota kepada Desa	45.625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	3.665.750.000,00	3.660.750.000,00	99,86	(5.000.000,00)	1.660.750.000,00	2.000.000.000,00	120,43

Berdasarkan tabel di atas realisasi belanja transfer Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp3.660.750.000,00 atau 99,86% dari anggaran sebesar Rp3.665.750.000,00.

5.1.4 Pembiayaan

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan

Daerah meliputi Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah, dengan anggaran dan realisasi Tahun Anggaran 2025 dan 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.1.101
Pembiayaan Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025				Realisasi 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)		(Rp)	(%)
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	97.354.304.246,00	240.845.870.193,38	247,39	225.089.463.440,14	192.611.572.644,34	48.234.297.549,04	25,04
2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	33.594.145.996,00	172.284.766.176,00	512,84	132.184.766.176,00	76.821.017.476,00	95.463.748.700,00	124,27
Pembiayaan Netto		63.760.158.250,00	68.561.104.017,38	107,53	4.800.945.767,38	115.790.555.168,34	(47.229.451.150,96)	(40,79)

Realisasi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dapat dirinci dan dijelaskan sebagai berikut.

5.1.4.1 Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan daerah berasal dari penggunaan Sisa lebih Perhitungan APBD (SiLPA) tahun lalu, Pencairan Dana Cadangan dan Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMD.

Anggaran dan realisasi Penerimaan Daerah Tahun Anggaran 2025 dan 2024 dapat dirinci pada tabel berikut.

Tabel 5.1.102
Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025				Realisasi 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)		(Rp)	(%)
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	84.935.591.686,00	84.939.423.716,38	100,00	3.832.030,38	54.255.954.664,14	30.683.469.052,24	56,55
2	Pencairan Dana Cadangan	6.921.680.300,00	6.921.680.300,00	100,00	0,00	38.648.742.600,00	(31.727.062.300,00)	(82,09)
3	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	0,00	143.500.000.000,00	0,00	0,00	126.700.000.000,00	16.800.000.000,00	13,26
4	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMD	5.497.032.260,00	5.484.766.177,00	99,78	(12.266.083,00)	5.484.766.176,00	1,00	0,00
Jumlah		97.354.304.246,00	240.845.870.193,38	247,39	143.491.565.947,38	225.089.463.440,14	15.756.406.753,24	7,00

Berdasarkan tabel di atas realisasi penerimaan pembiayaan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp240.845.870.193,38 atau mencapai 247,39% dari anggaran sebesar Rp97.354.304.246,00. Realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp15.756.406.753,24 dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2024.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebesar Rp84.939.423.716,380 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.1.103
SiLPA Anggaran tahun sebelumnya Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No	Rincian SiLPA	TA 2025	TA 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5=3-4	6=5/4
1	Kas di Kas Daerah	79.503.327.898,00	33.520.359.707,00	45.982.968.191,00	137,18
2	Kas di Bendahara Penerimaan	0	922.000,00	(922.000,00)	(100,00)
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	1.260.000,00	(1.260.000,00)	(100,00)
4	Kas di BLUD	2.144.352.695,38	17.663.770.272,14	(15.519.417.576,76)	(87,86)
5	Kas Lainnya	863.308.839,00	859.045.406,00	4.263.433,00	0,50
6	Kas Dana BOS Pusat	951.429.824,00	1.649.723.756,00	(698.293.932,00)	(42,33)
7	Bunga atas Dana Cadangan	1.477.004.460,00	555.364.458,00	921.640.002,00	165,95
Jumlah		84.939.423.716,38	54.250.445.599,14	30.688.978.117,24	56,57

Terdapat koreksi SILPA anggaran tahun sebelumnya sebesar Rp3.832.030,00 yang berasal dari pengembalian dana BOS pada SDN Neglasari Bogor Barat berdasarkan hasil audit BPK tahun 2021, sehingga merubah silpa tahun sebelumnya dari Rp84.935.591.686,38 menjadi Rp84.939.423.719,38

Pencairan Dana Cadangan pada Bank DKI merupakan sisa dana cadangan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor Tahun Anggaran 2024 yang secara keseluruhan berjumlah Rp8.398.684.760,00 dimana sebesar Rp6.921.680.300,00 merupakan pokok dan sebesar Rp1.477.004.460,00 merupakan bunga deposito yang sudah diakui penerimaannya di Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bogor Tahun Anggaran 2024.

Realisasi Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMD sebesar Rp5.484.766.176,00 merupakan realisasi Penerimaan Pinjaman BUMD untuk dana pinjaman dari International Bank For Reconstruction and Development, Loan Agreement Nomor 770-ID tanggal 1 September 2009 dalam rangka pembiayaan *Urban Water Supply And Sanitation Project* sesuai dengan Perjanjian Penerusan Pinjaman Nomor SLA- 1226/DSMI/2009 tanggal 02 November 2009 sebagaimana telah diamandemen sesuai dengan surat nomor S-88/MK.5/2023 tanggal 12 September 2023 tentang Penandatanganan Perubahan (Amandemen) Perjanjian Penerusan Pinjaman Nomor SLA-1226/DSMI/2009 tanggal 02 November 2009 antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kota Bogor.

Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah dan Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Pendek, realisasi pembiayaan pada BLUD RSUD Kota Bogor sebesar Rp143.500.000.000,00 dimana berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, struktur anggaran BLUD terdiri dari pendapatan BLUD, belanja BLUD dan pembiayaan BLUD, pembiayaan merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya dan sesuai dengan Peraturan Wali Kota Nomor 67 tentang 2018 tentang Pengelolaan Pinjaman pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor.

5.1.4.2 Pengeluaran Pembiayaan

Anggaran dan realisasi Pengeluaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2025 serta realisasi tahun 2024 dapat dirinci pada tabel berikut:

Tabel 5.1.104
Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025				Realisasi 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)		(Rp)	(%)
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
1	Pembentukan Dana Cadangan	8.300.000.000,00	8.300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.300.000.000,00	0,00
2	Penyertaan Modal Daerah	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	100,00	0,00	0,00	15.000.000.000,00	0,00
3	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat	10.294.145.996,00	5.484.766.176,00	53,28	(4.809.379.820,00)	5.484.766.176,00	-	0,00
4	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Pendek	0,00	143.500.000.000	0,00	0,00	126.700.000.000	16.800.000.000,00	13,26
Jumlah		33.594.145.996,00	172.284.766.176,00	512,84	(4.809.379.820,00)	132.184.766.176,00	40.100.000.000,00	30,34

Berdasarkan tabel di atas realisasi pengeluaran pembiayaan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp172.284.766.176,00 atau mencapai 512,84% dari Anggaran sebesar Rp33.594.145.996,00. Realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp33.594.145.996,00 dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2024.

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan berasal dari Pembentukan Dana Cadangan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2024 tentang Dana Cadangan Pekan Olah Raga Provinsi Jawa Barat XV Tahun 2026 sebesar Rp8.300.000.000,00.

Realisasi Penyertaan Modal Daerah Pada BUMD yaitu pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pakuan sebesar Rp15.000.000.000,00 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Tirta Pakuan.

Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat sebesar Rp5.484.766.176,00 adalah Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat untuk dana pinjaman dari International Bank For Reconstruction and Development, Loan Agreement Nomor 770-ID tanggal 1 September 2009 dalam rangka pembiayaan *Urban Water Supply And Sanitation Project* sesuai dengan Perjanjian Penerusan Pinjaman Nomor SLA-1226/DSMI/2009 tanggal 02 November 2009 sebagaimana telah diamandemen sesuai dengan Surat Nomor S-88/MK.5/2023 tanggal 12 September 2023 tentang Penandatanganan Perubahan (Amandemen) Perjanjian Penerusan Pinjaman Nomor SLA-1226/DSMI/2009 tanggal 02 November 2009 antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kota Bogor.

Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri Jangka Panjang dan Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Pendek dan pembayaran pembiayaan BLUD RSUD Kota Bogor sebesar Rp143.500.000.000,00.

5.1.5 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) merupakan selisih antara surplus/ (defisit) anggaran dengan pembiayaan netto, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp73.246.509.632,40 dengan rincian tahun anggaran 2025 dan tahun anggaran 2024 sebagai berikut.

Tabel 5.1.105
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025				Realisasi 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
1	Pendapatan	3.318.812.005.957,00	3.232.770.876.281,02	97,41	(86.041.129.675,98)	3.170.497.628.555,24	62.273.247.725,78	1,96
2	Belanja dan Transfer	3.382.572.164.207,00	3.228.085.470.666,00	95,43	(154.486.693.541,00)	3.178.466.734.133,00	49.618.736.533,00	1,56
3	Surplus/ (Defisit) (1-2)	(63.760.158.250,00)	4.685.405.615,02	(7,35)	68.445.563.865,02	(7.969.105.577,76)	12.654.511.192,78	(158,79)
4	Penerimaan Pembiayaan	97.354.304.246,00	240.845.870.193,38	247,39	143.491.565.947,38	225.089.463.440,14	15.756.406.753,24	7,00
5	Pengeluaran Pembiayaan	33.594.145.996,00	172.284.766.176,00	512,84	138.690.620.180,00	132.184.766.176,00	40.100.000.000,00	30,34
6	Pembiayaan Netto (4-5)	63.760.158.250,00	68.561.104.017,38	107,53	4.800.945.767,38	92.904.697.264,14	(24.343.593.246,76)	(26,20)
	Jumlah	0,00	73.246.509.632,40	0,00	73.246.509.632,40	84.935.591.686,38	(11.689.082.053,98)	(13,76)

Tabel di atas menunjukkan SILPA Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp73.246.509.632,40 dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp84.935.591.686,38 mengalami penurunan sebesar Rp11.689.082.053,98 atau mencapai 13,76%. SILPA Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.1.106
Rincian SILPA Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No	Rincian SiLPA	TA 2025	TA 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5=3-4	6=5/4
1	Kas di Kas Daerah	56.718.328.310,00	79.503.327.898,00	(22.784.999.588,00)	(28,66)
2	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Kas di BLUD	15.610.395.136,40	2.144.352.695,38	13.466.042.441,02	627,98
5	Kas Lainnya	370.128,00	863.308.839,00	(862.938.711,00)	(99,96)
6	Kas Dana BOS Pusat	616.566.724,00	951.554.744,00	(334.988.020,00)	(35,20)

No	Rincian SiLPA	TA 2025	TA 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5=3-4	6=5/4
7	Kas Dana BOK Puskesmas	300.849.334,00	0,00	300.849.334,00	100,00
8	Bunga atas Dana Cadangan	0,00	1.473.047.510,00	(1.473.047.510,00)	(100,00)
	Jumlah	73.246.509.632,40	84.935.591.686,38	(11.689.082.053,98)	(13,76)

Tabel 5.1.107
Rincian SILPA Tahun Anggaran 2025

SILPA		73.246.509.632,40
KAS DI RKUD		56.718.328.310,00
1	Kas Earmark	23.024.314.667,00
	Dana Bagi Hasil Sawit	138.599.920,00
	Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	1.152.805.116,00
	Dana Alokasi Umum Pendanaan Kelurahan	89.344.991,00
	Dana Alokasi Umum Pendidikan	7.277.213.322,00
	Dana Alokasi Umum Kesehatan	8.388.183.740,00
	Dana Alokasi Khusus Fisik	3.167.245.504,00
	Dana Insentif Fiskal	1.145.876.138,00
	Dana Bantuan Operasional Kesehatan - Dinas	442.403.662,00
	Dana Bantuan Operasional Kesehatan - Pengawasan Obat dan Makanan	189.656.000,00
	Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana	384.828.998,00
	Dana Tunjangan Profesi Guru ASN	128.060.020,00
	Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN	447.983.700,00
	Dana Fasilitasi Penanaman Modal	72.113.556,00
2	Kas Non-Earmark	33.694.013.643,00
KAS NON RKUD		16.528.181.322,40
	Kas di BLUD	15.610.395.136,40
	Kas Lainnya Dana BOS	370.128,00
	Kas Dana BOSP	616.566.724,00
	Kas Dana BOK Puskesmas	300.849.334,00

5.2 LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LP - SAL)

Penyajian Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih mencakup Saldo Anggaran Lebih tahun sebelumnya, penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) tahun berjalan, dan penyesuaian lain yang diperkenankan.

Nilai Saldo Anggaran Lebih (SAL) per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp73.246.509.632,40 dengan rincian sebagai berikut:

5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo Anggaran Lebih Awal berasal dari akumulasi SiLPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. Saldo Anggaran Lebih Awal tahun 2025 sebesar Rp84.935.591.686,38 merupakan SiLPA per 31 Desember 2024, sedangkan Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun 2024 sebesar Rp54.250.445.599,14 merupakan SiLPA per 31 Desember 2023. Saldo Anggaran Lebih Awal tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 56,56% atau Rp30.685.146.087,24 dibandingkan Saldo Anggaran Lebih awal tahun 2024. Saldo Anggaran Lebih Awal tersebut terdiri dari:

Tabel 5.2.1
Rincian Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun 2025 dan 2024

No	Rincian SiLPA	TA 2025	TA 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5=3-4	6=5/4
1	Kas di Kas Daerah	79.503.327.898,00	33.520.359.707,00	45.982.968.191,00	137,18
2	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	922.000,00	(922.000,00)	(100,00)
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	1.260.000,00	(1.260.000,00)	(100,00)
4	Kas di BLUD	2.144.352.695,38	17.663.770.272,14	(15.519.417.576,76)	(87,86)
5	Kas Lainnya	863.308.839,00	859.045.406,00	4.263.433,00	0,50
6	Kas Dana BOS	947.597.794,00	1.649.723.756,00	(702.125.962,00)	(42,56)
7	Bunga atas Dana Cadangan	1.477.004.460,00	555.364.458,00	921.640.002,00	165,95
Jumlah		84.935.591.686,38	54.250.445.599,14	30.685.146.087,24	56,56

5.2.2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Merupakan Saldo Anggaran Lebih yang telah digunakan sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan, Tahun 2025 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan sebesar Rp84.939.423.716,38 atau mengalami kenaikan 56,55% yaitu sebesar Rp30.683.469.052,24 dari Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan tahun 2024 sebesar Rp54.255.954.664,14. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan tersebut terdiri dari:

Tabel 5.2.2
Rincian Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan Tahun 2025 dan 2024

No	Rincian SiLPA	TA 2025	TA 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5=3-4	6=5/4
1	Kas di Kas Daerah	79.503.327.898,00	33.520.359.707,00	45.982.968.191,00	137,18
2	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	922.000,00	(922.000,00)	(100,00)
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	1.260.000,00	(1.260.000,00)	(100,00)
4	Kas di BLUD	2.144.352.695,38	17.663.770.272,14	(15.519.417.576,76)	(87,86)
5	Kas Lainnya	863.308.839,00	859.045.406,00	4.263.433,00	0,50
6	Kas Dana BOS	951.429.824,00	1.655.232.821,00	(703.802.997,00)	(42,52)

No	Rincian SiLPA	TA 2025	TA 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5=3-4	6=5/4
7	Bunga atas Dana Cadangan	1.477.004.460,00	555.364.458,00	921.640.002,00	165,95
	Jumlah	84.939.423.716,38	54.255.954.664,14	30.683.469.052,24	56,55

5.2.3 Sisa Lebih/ (Kurang) Pembiayaan Anggaran SiLPA/ SiKPA.

Merupakan selisih lebih/(kurang) antara realisasi pendapatan LRA dan Belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan. SiLPA tahun 2025 sebesar Rp73.246.509.632,40 sedangkan SiLPA tahun 2024 sebesar Rp84.935.591.686,38. Mengalami penurunan 13,83% atau sebesar Rp11.750.132.504,98.

Sisa Lebih/ (Kurang) Pembiayaan Anggaran SiLPA/ SiKPA tersebut terdiri dari:

Tabel 5.2.3
Rincian Sisa Lebih/ (Kurang) Pembiayaan Anggaran SiLPA/ SiKPA Tahun 2025 dan 2024

No	Rincian SiLPA	TA 2025	TA 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5=3-4	6=5/4
1	Kas di Kas Daerah	56.718.328.310,00	79.503.327.898,00	(22.845.999.588,00)	(28,74)
2	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Kas di BLUD	15.610.395.136,40	2.144.352.695,38	13.466.042.441,02	627,98
5	Kas Lainnya	370.128,00	863.308.839,00	(862.938.711,00)	(99,96)
6	Kas Dana BOSP	616.566.724,00	947.597.794,00	(331.081.521,00)	(34,94)
7	Kas Dana BOK Puskesmas	300.849.334,00	0,00	0,00	0,00
8	Bunga atas Dana Cadangan	0,00	1.477.004.460,00	(1.477.004.460,00)	(100,00)
	Jumlah	73.246.509.632,40	84.935.591.686,38	(11.750.132.504,98)	(13,83)

5.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Terdapat koreksi atas saldo kas pada SDN Neglasari Bogor Bogor Barat sebesar Rp3.832.030,00 merupakan temuan hasil pemeriksaan BPK tahun 2021 atas LKPD TA 2020 yang dikembalikan ke rekening sekolah.

5.2.5 Saldo Anggaran Lebih Akhir

Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun 2025 sebesar Rp73.246.509.632,40 Penjelasan lebih lanjut atas Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dijabarkan pada tabel-tabel dibawah ini.

Tabel 5.2.4
Rincian Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun 2025 dan 2024

No	Rincian SiLPA	TA 2025	TA 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5=3-4	6=5/4
1	Kas di Kas Daerah	56.657.328.310,00	79.503.327.898,00	(22.845.999.588,00)	(28,74)
2	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Kas di BLUD	15.610.395.136,40	2.144.352.695,38	13.466.042.441,02	627,98
5	Kas Lainnya	370.128,00	863.308.839,00	(862.938.711,00)	(99,96)
6	Kas Dana BOSP	616.566.724,00	947.597.794,00	(331.081.521,00)	(34,94)
7	Kas Dana BOK Puskesmas	300.849.334,00	0,00	0,00	0,00

No	Rincian SiLPA	TA 2025	TA 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5=3-4	6=5/4
8	Bunga atas Dana Cadangan	0,00	1.477.004.460,00	(1.477.004.460,00)	(100,00)
	Jumlah	73.246.509.632,40	84.935.591.686,38	(11.750.132.504,98)	(13,83)

Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun 2025 sebesar Rp73.246.509.632,40, dengan rincian Tahun 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.2.5
Rincian Saldo Anggaran Lebih TA 2025 dan 2024

No	Rincian SiLPA	TA 2025	TA 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5=3-4	6=5/4
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	84.935.591.686,38	54.250.445.599,14	30.685.146.087,24	56,56
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	84.939.423.716,38	54.255.954.664,14	30.683.469.052,24	56,55
3	Sub Total (1-2)	(3.832.030,00)	(5.509.065,00)	1.677.035,00	(30,44)
4	SiLPA/ (SiKPA)				
5	Pendapatan Asli Daerah	1.665.054.114.174,02	1.458.619.452.757,24	206.434.661.416,78	14,15
6	Pendapatan Transfer	1.567.716.762.107,00	1.711.878.175.798,00	(144.161.413.691,00)	(8,42)
7	Lain-Lain Pendapatan yang Sah	0,00	0,00	0,00	-
8	Jumlah (5 s.d.7)	3.232.770.876.281,02	3.170.497.628.555,24	62.273.247.725,78	1,96
9	Belanja Operasi	2.835.000.060.430,00	2.774.250.053.629,00	60.750.006.801,00	2,19
10	Belanja Modal	383.274.926.236,00	400.367.986.619,00	(17.093.060.383,00)	(4,27)
11	Belanja Tak Terduga	6.149.734.000,00	2.187.943.885,00	3.961.790.115,00	181,07
12	Transfer	3.660.750.000,00	1.660.750.000,00	2.000.000.000,00	120,43
13	Jumlah (9 s.d.12)	3.228.085.470.666,00	3.178.466.734.133,00	49.618.736.533,00	1,56
14	Penerimaan Pembiayaan	240.845.870.193,38	225.089.463.440,14	15.756.406.753,24	7,00
15	Pengeluaran Pembiayaan	172.284.766.176,00	132.184.766.176,00	40.100.000.000,00	30,34
16	Jumlah (14 - 15)	68.561.104.017,38	92.904.697.264,14	(24.343.593.246,76)	(26,20)
17	Koreksi kesalahan pembukuan tahun Sebelumnya	3.832.030,00	5.509.065,00	(1.677.035,00)	(30,44)
18	Lain-Lain (17)	0,00	0,00	0,00	-
	Saldo Anggaran Lebih Tahun Berkenaan (3+8-13+16-18)	73.246.509.632,40	84.935.591.686,38	(11.689.082.053,98)	(13,76)

Tabel 5.2.6
Rincian Saldo Anggaran Lebih TA 2025

URAIAN	Saldo Anggaran Lebih s.d TA 2025
Saldo Anggaran Lebih	73.246.509.632,40
KAS EARMARK DI RKUD	22.376.157.391,00
DBH Sawit	138.599.920,00
DBHCHT	1.152.805.116,00
DAU Kelurahan	89.344.991,00
DAU Pendidikan	7.277.213.322,00
DAU Kesehatan	8.388.183.740,00
DAK Fisik-Sanitasi	3.167.245.504,00
Insentif Fiskal	1.145.876.138,00
DAK Non Fisik - Dinas	442.403.662,00
DAK Non Fisik - POM	189.656.000,00
DAK Non Fisik - BOKB	384.828.998,00
KAS EARMARK NON RKUD	16.528.181.322,40
Kas di BLUD	15.610.395.136,40
Kas Lainnya Dana BOS	370.128,00
Kas Dana BOSP	616.566.724,00
Kas Dana BOK Puskesmas	300.849.334,00
KAS NON EARMARK di RKUD	34.342.170.919,00

5.3 PENJELASAN POS - POS NERACA

Untuk memberikan gambaran yang lebih ringkas mengenai Posisi Keuangan Pemerintah Kota Bogor, berikut ini kami sajikan Penjelasan Pos-pos Neraca Pemerintah Kota Bogor yang menggambarkan posisi keuangan entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas secara komparatif pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.3.1
Neraca

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / (penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Aset				
2	Aset Lancar	716.293.056.682,28	699.758.089.985,05	16.534.966.697,23	2,36
3	Investasi Jangka Panjang	1.008.990.818.971,85	1.002.293.416.444,24	6.697.402.527,61	0,67
4	Aset tetap	9.123.382.686.113,57	9.038.092.125.327,88	85.290.560.785,69	0,94
5	Dana Cadangan	8.300.000.000,00	8.398.684.760,00	(98.684.760,00)	(1,18)
6	Aset Lainnya	106.084.199.022,17	76.403.789.787,11	29.680.409.235,06	38,85
7	Properti Investasi	138.831.918.979,88	217.198.183.953,48	(78.366.264.973,60)	(36,08)
8	Jumlah Aset	11.101.882.679.769,75	11.042.144.290.257,76	59.738.389.511,99	0,54
9	Kewajiban				
10	Kewajiban Jangka Pendek	128.587.308.039,65	110.091.452.175,79	18.495.855.863,86	16,80
11	Kewajiban Jangka Panjang	52.384.942.643,00	62.666.822.555,00	(10.281.879.912,00)	(16,41)
12	Jumlah Kewajiban	180.972.250.682,65	172.758.274.730,79	8.213.975.951,86	4,75
13	Ekuitas				
14	Ekuitas	10.920.910.429.087,10	10.869.386.015.526,97	51.524.413.560,13	0,47
15	Jumlah Ekuitas	10.920.910.429.087,10	10.869.386.015.526,97	51.524.413.560,13	0,47
	Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	11.101.882.679.769,75	11.042.144.290.257,76	59.738.389.511,99	0,54

Untuk lebih jelasnya rincian aset, kewajiban dan ekuitas disajikan dibawah ini.

5.3.1 Aset

Aset merupakan salah satu pos yang terdapat dalam Neraca Pemerintah Kota Bogor. Total aset Pemerintah Kota Bogor per 31 Desember 2025 sebesar Rp11.101.882.679.769,75 naik sebesar Rp59.738.389.511,99 atau 0,54% dibandingkan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp11.042.144.290.257,76 sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.3.2
Aset TA 2025 dan 2024

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / (penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Aset				
2	Aset Lancar	716.293.056.682,28	699.758.089.985,05	16.534.966.697,23	2,36
3	Investasi Jangka Panjang	1.008.990.818.971,85	1.002.293.416.444,24	6.697.402.527,61	0,67
4	Aset tetap	9.123.382.686.113,57	9.038.092.125.327,88	85.290.560.785,69	0,94
5	Dana Cadangan	8.300.000.000,00	8.398.684.760,00	(98.684.760,00)	(1,18)
6	Aset Lainnya	106.084.199.022,17	76.403.789.787,11	29.680.409.235,06	38,85
7	Properti Investasi	138.831.918.979,88	217.198.183.953,48	(78.366.264.973,60)	(36,08)
	Jumlah Aset	11.101.882.679.769,75	11.042.144.290.257,76	59.738.389.511,99	0,54

Kenaikan sebagian besar disebabkan oleh penambahan aset tetap yang bersumber dari Belanja Modal dalam APBD Tahun Anggaran 2025. Sedangkan penurunan disebabkan dari properti investasi yang direklasifikasi ke dalam aset tetap karena sudah ditetapkan penggunaannya antara lain digunakan untuk Program PSEL (Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik) dan Sekolah Rakyat. Berikut komposisi aset Pemerintah Kota Bogor per 31 Desember 2025.

5.3.1.1 Aset Lancar

Aset lancar terdiri atas kas dan setara kas serta aset yang diharapkan untuk segera direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Bogor pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 pada tabel berikut.

Tabel 5.3.3
Aset Lancar TA 2025 dan 2024

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / (penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Aset Lancar				
2	Kas dan Setara Kas	73.295.009.632,40	83.616.865.127,38	(10.321.855.494,98)	(12,34)
3	Piutang Pajak	681.423.976.390,00	617.775.532.829,00	63.648.443.561,00	10,30
4	Piutang Retribusi	56.316.655.316,70	84.392.660.913,70	(28.076.005.597,00)	(33,27)
5	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	4.510.852.544,00	(4.510.852.544,00)	(100,00)
6	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	192.079.349.935,00	177.064.672.727,00	15.014.677.208,00	8,48
7	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	79.309.259.000,00	0,00	79.309.259.000,00	0,00
8	Piutang Transfer Antar Daerah	1.313.722.709,00	12.733.735.118,00	(11.420.012.409,00)	(89,68)
9	Piutang Lainnya	15.718.793.772,00	59.596.923.188,00	(43.878.129.416,00)	(73,62)
10	Penyisihan Piutang	(438.194.379.730,57)	(389.964.184.114,24)	(48.230.195.616,33)	12,37
11	Beban Dibayar Dimuka	839.255.994,52	505.228.167,24	334.027.827,28	66,11
12	Persediaan	54.191.413.663,23	49.525.803.484,97	4.665.610.178,26	9,42
	Jumlah Aset Lancar	716.293.056.682,28	699.758.089.985,05	16.534.966.697,23	2,36

Berdasarkan tabel rincian Aset Lancar di atas, Aset Lancar Pemerintah Kota Bogor 31 Desember 2025 sebesar Rp716.293.056.682,28 secara umum mengalami kenaikan sebesar Rp16.534.966.697,23 atau 2,36% jika dibandingkan dengan nilai Aset Lancar per 31 Desember 2024 sebesar Rp699.758.089.985,05.

5.3.1.1.1 Kas dan Setara Kas

Rekening ini menggambarkan saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2025 dan 2024 yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah (BUD), BLUD RSUD, BLUD Puskesmas, dan Bendahara BOS pada Dinas Pendidikan baik berupa uang tunai, rekening giro bank yang seluruhnya merupakan Kas Daerah atau Utang PFK yang belum disetor ke Kas Negara/Kas Daerah, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.3.4
Kas dan Setara Kas TA 2025 dan 2024

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / (penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Kas dan Setara Kas				
2	Kas di Kas Daerah	56.718.328.310,00	79.503.327.898,00	(22.784.999.588,00)	(28,66)
3	Kas di BLUD	15.610.395.136,40	2.153.130.596,38	13.457.264.540,02	625,01
4	Kas Lainnya	48.870.128,00	1.012.808.839,00	(963.938.711,00)	(95,17)
5	Kas Dana BOSP	616.566.724,00	947.597.794,00	(331.031.070,00)	(34,93)
6	Kas Dana BOK Puskesmas	300.849.334,00	0,00	300.849.334,00	-
	Jumlah Kas dan Setara Kas	73.295.009.632,40	83.616.865.127,38	(10.321.855.494,98)	(12,34)

Saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2025 sebesar Rp73.295.009.632,40 turun sebesar Rp10.321.855.494,98 atau 12,34% dibandingkan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp83.616.865.127,38 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.3.5
Kas dan Setara Kas Per Perangkat Daerah

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / (penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Kas dan Setara Kas				
2	Kas di Kas Daerah	56.718.328.310,00	79.503.327.898,00	(22.784.999.588,00)	(28,66)
	- Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	56.718.328.310,00	79.503.327.898,00	(22.784.999.588,00)	(28,66)
3	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00	0,00	-



No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / (penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
	- Dinas Perhubungan	0,00	0,00	0,00	-
4	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00	0,00	-
	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	0,00	0,00	-
	- Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	0,00	0,00	0,00	-
5	Kas di BLUD	15.610.395.136,40	2.153.130.596,38	13.457.264.540,02	625,01
	Puskesmas Bogor Selatan	109.329.381,00	65.981.575,00	43.347.806,00	65,70
	Puskesmas Cipaku	178.343.858,00	130.635.416,00	47.708.442,00	36,52
	Puskesmas Bondongan	143.557.003,00	46.288.543,00	97.268.460,00	210,14
	Puskesmas Lawanggintung	20.807.088,00	110.734.890,00	(89.927.802,00)	(81,21)
	Puskesmas Bogor Timur	122.569.266,00	19.666.167,00	102.903.099,00	523,25
	Puskesmas Pulo Armin	2.300.973,00	94.073.214,00	(91.772.241,00)	(97,55)
	Puskesmas Bogor Tengah	16.962.230,00	51.744.594,00	(34.782.364,00)	(67,22)
	Puskesmas Sempur	41.702.507,00	37.364.555,00	4.337.952,00	11,61
	Puskesmas Gang Aut	9.269.962,00	13.157.615,00	(3.887.653,00)	(29,55)
	Puskesmas Belong	86.085.299,00	2.269.180,00	83.816.119,00	3.693,67
	Puskesmas Merdeka	172.878.447,00	68.770.529,00	104.107.918,00	151,38
	Puskesmas Semplak	4.821.086,00	30.356.626,00	(25.535.540,00)	(84,12)
	Puskesmas Pancasan	255.780.495,00	50.175.253,00	205.605.242,00	409,77
	Puskesmas Pasir Mulya	22.511.771,00	79.625.567,00	(57.113.796,00)	(71,73)
	Puskesmas Gang Kelor	143.014.097,00	3.863.561,00	139.150.536,00	3.601,61
	Puskesmas Sindang Barang	145.621.857,00	5.777.814,00	139.844.043,00	2.420,36
	Puskesmas Bogor Utara	262.842.598,00	12.516.734,00	250.325.864,00	1.999,93
	Puskesmas Tegal Gundil	235.826.488,00	35.057.009,00	200.769.479,00	572,69
	Puskesmas Warung Jambu	138.743.824,00	23.621.526,00	115.122.298,00	487,36
	Puskesmas Tanah Sareal	339.039.659,00	984.597,00	338.055.062,00	34.334,36
	Puskesmas Pondok Rumpit	76.480.994,00	73.398.940,00	3.082.054,00	4,20
	Puskesmas Kedung Badak	289.407.345,00	181.830.764,00	107.576.581,00	59,16
	Puskesmas Kayu Manis	47.742.544,00	10.963.139,00	36.779.405,00	335,48
	Puskesmas Mekarwangi	225.270.167,00	329.988.366,00	(104.718.199,00)	(31,73)
	Puskesmas Mulyaharja	2.283.834,00	7.287.732,00	(5.003.898,00)	(68,66)
	UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	228.941.607,00	96.642.695,00	132.298.912,00	136,89
	Rumah Sakit Umum Daerah	12.288.260.756,40	570.353.995,38	11.717.906.761,02	2.054,50
6	Kas Lainnya	48.870.128,00	1.012.808.839,00	(963.938.711,00)	(95,17)
	Dinas Pendidikan	370.128,00	7.020.131,00	(6.650.003,00)	(94,73)
	Puskesmas Bogor Selatan	0,00	1.400.000,00	(1.400.000,00)	(100,00)
	Puskesmas Cipaku	0,00	69.941.520,00	(69.941.520,00)	(100,00)
	Puskesmas Bondongan	0,00	20.586.020,00	(20.586.020,00)	(100,00)
	Puskesmas Lawanggintung	0,00	38.537.212,00	(38.537.212,00)	(100,00)
	Puskesmas Bogor Timur	0,00	7.650.020,00	(7.650.020,00)	(100,00)
	Puskesmas Pulo Armin	0,00	94.610.639,00	(94.610.639,00)	(100,00)
	Puskesmas Bogor Tengah	0,00	16.883.986,00	(16.883.986,00)	(100,00)
	Puskesmas Sempur	0,00	0,00	0,00	-
	Puskesmas Gang Aut	0,00	4.350.000,00	(4.350.000,00)	(100,00)
	Puskesmas Belong	0,00	32.839,00	(32.839,00)	(100,00)
	Puskesmas Merdeka	0,00	92.328.419,00	(92.328.419,00)	(100,00)
	Puskesmas Semplak	0,00	13.755.020,00	(13.755.020,00)	(100,00)
	Puskesmas Pancasan	0,00	27.406.520,00	(27.406.520,00)	(100,00)
	Puskesmas Pasir Mulya	0,00	56.668.500,00	(56.668.500,00)	(100,00)
	Puskesmas Gang Kelor	0,00	3.725.826,00	(3.725.826,00)	(100,00)
	Puskesmas Sindang Barang	0,00	167.632.520,00	(167.632.520,00)	(100,00)
	Puskesmas Bogor Utara	0,00	35.217.120,00	(35.217.120,00)	(100,00)
	Puskesmas Tegal Gundil	0,00	10.903.520,00	(10.903.520,00)	(100,00)
	Puskesmas Warung Jambu	0,00	61.300.402,00	(61.300.402,00)	(100,00)
	Puskesmas Tanah Sareal	0,00	5.483.520,00	(5.483.520,00)	(100,00)
	Puskesmas Pondok Rumpit	0,00	6.368.520,00	(6.368.520,00)	(100,00)
	Puskesmas Kedung Badak	0,00	18.150.000,00	(18.150.000,00)	(100,00)
	Puskesmas Kayu Manis	0,00	15.006.720,00	(15.006.720,00)	(100,00)
	Puskesmas Mekarwangi	0,00	78.089.020,00	(78.089.020,00)	(100,00)
	Puskesmas Mulyaharja	0,00	10.260.845,00	(10.260.845,00)	(100,00)
	UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	0,00	0,00	0,00	-
	PPKD	48.500.000,00	149.500.000,00	(101.000.000,00)	(67,56)
7	Kas di BOSP	616.566.724,00	947.597.794,00	(331.031.070,00)	(34,93)
	Dinas Pendidikan	616.566.724,00	947.597.794,00	(331.031.070,00)	(34,93)
8	Kas Dana BOK Puskesmas	300.849.334,00	0,00	300.849.334,00	-
	Puskesmas Bogor Selatan	700.000,00	0,00	700.000,00	-
	Puskesmas Cipaku	50.000,00	0,00	50.000,00	-
	Puskesmas Bondongan	3.050.000,00	0,00	3.050.000,00	-
	Puskesmas Lawanggintung	9.081.500,00	0,00	9.081.500,00	-
	Puskesmas Bogor Timur	150.000,00	0,00	150.000,00	-
	Puskesmas Pulo Armin	17.171.000,00	0,00	17.171.000,00	-
	Puskesmas Bogor Tengah	6.668.840,00	0,00	6.668.840,00	-
	Puskesmas Sempur	93.000,00	0,00	93.000,00	-
	Puskesmas Gang Aut	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-
	Puskesmas Belong	6.990.002,00	0,00	6.990.002,00	-
	Puskesmas Merdeka	5.783.145,00	0,00	5.783.145,00	-
	Puskesmas Semplak	24.663.500,00	0,00	24.663.500,00	-
	Puskesmas Pancasan	5.233.000,00	0,00	5.233.000,00	-
	Puskesmas Pasir Mulya	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00	-
	Puskesmas Gang Kelor	104.095.000,00	0,00	104.095.000,00	-
	Puskesmas Sindang Barang	99.069.500,00	0,00	99.069.500,00	-
	Puskesmas Bogor Utara	100.000,00	0,00	100.000,00	-
	Puskesmas Tegal Gundil	956.000,00	0,00	956.000,00	-
	Puskesmas Warung Jambu	1.446.064,00	0,00	1.446.064,00	-
	Puskesmas Tanah Sareal	4.873.500,00	0,00	4.873.500,00	-
	Puskesmas Pondok Rumpit	590.000,00	0,00	590.000,00	-
	Puskesmas Kedung Badak	0	0,00	-	-
	Puskesmas Kayu Manis	1.086.000,00	0,00	1.086.000,00	-

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / (penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
	Puskesmas Mekarwangi	458.000,00	0,00	458.000,00	-
	Puskesmas Mulyaharja	2.141.283,00	0,00	2.141.283,00	-
	Jumlah Kas dan Setara Kas	73.295.009.632,40	83.616.865.127,38	(10.321.855.494,98)	(12,34)

5.3.1.1.1.1 Kas di Kas Daerah

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2025 sesuai dengan Rekening Kas Umum Daerah sebesar Rp56.766.828.310,00 sedangkan saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2025 pada Neraca sebesar Rp56.718.328.310,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp48.500.000,00. Selisih tersebut merupakan sisa utang jaminan bongkar reklame yang dicatat sebagai kas transitoris pada akun kas lainnya sesuai dengan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 19 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Reklame. Berikut mutasi kas di kas daerah sesuai dengan neraca tahun 2025 dan 2024.

Tabel 5.3.6
Mutasi Kas di Kas Daerah

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Saldo awal Kas di Kas Daerah pada RKUD	79.652.827.898,00	33.769.359.707,00
2	Penerimaan Kas	2.499.295.833.196,00	9.986.710.881.372,00
3	Pengeluaran Kas	2.522.181.832.784,00	9.940.827.413.181,00
4	Saldo Akhir Kas di Kas Daerah pada RKUD	56.766.828.310,00	79.652.827.898,00
5	Sisa Utang Jaminan Bongkar yang direklas ke Kas Lainnya	(48.500.000,00)	(149.500.000,00)
6	Saldo Akhir Kas di Kas Daerah pada Neraca	56.718.328.310,00	79.503.327.898,00

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2025 sebesar Rp56.718.328.310,00 terdiri dari Kas Earmark sebesar Rp23.024.314.667,00 dan Kas Non Earmark sebesar Rp33.694.013.643,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.3.7
Rincian Kas di Kas Daerah

	Uraian	Nilai
1	Kas Earmark di Kas Daerah	23.024.314.667,00
	DBH Sawit	138.599.920,00
	DBHCHT	1.152.805.116,000
	DAU Kelurahan	89.344.991,00
	DAU Pendidikan	7.277.213.322,00
	DAU Kesehatan	8.388.183.740,00
	DAK Alokasi Khusus Fisik	3.167.245.504,00
	Insentif Fiskal	1.145.876.138,00
	DAK Non Fisik-Dinas	442.403.662,00
	DAK Non Fisik-POM	189.656.000,00
	DAK Non Fisik-BOKB	384.828.998,00
	Dana Tunjangan Profesi Guru ASN	128.060.020,00
	Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN	447.983.700,00
	Dana Fasilitas Penanaman Modal	72.113.556,00
2	Kas Non Earmark di Kas Daerah	33.694.013.643,00
	Saldo Kas di Kas Daerah	56.718.328.310,00

5.3.1.1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00 dan per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00. Mutasi Kas di Bendahara Penerimaan selama tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3.8
Kas di Bendahara Penerimaan

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Saldo awal Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
2	Penerimaan Kas	0,00	18.634.541.399,00
3	Pengeluaran Kas	0,00	18.634.541.399,00
4	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00

5.3.1.1.1.3 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00 dan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00. Mutasi Kas di Bendahara Pengeluaran selama tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3.9
Kas di Bendahara Pengeluaran

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Saldo awal Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	1.810.000,00
2	Penerimaan Kas	510.482.282.672,81	531.060.924.715,48
3	Pengeluaran Kas	510.482.282.672,81	531.062.734.715,48
4	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00

5.3.1.1.1.4 Kas di BLUD

Saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2025 sebesar Rp15.610.395.136,40 naik sebesar Rp13.457.264.540,02 atau 625,01% dibandingkan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.153.130.596,38 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.10
Rincian Kas di BLUD

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / (penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Kas di BLUD	15.610.395.136,40	2.153.130.596,38	13.457.264.540,02	625,01
	Puskesmas Bogor Selatan	109.329.381,00	65.981.575,00	43.347.806,00	65,70
	Puskesmas Cipaku	178.343.858,00	130.635.416,00	47.708.442,00	36,52
	Puskesmas Bondongan	143.557.003,00	46.288.543,00	97.268.460,00	210,14
	Puskesmas Lawanggantung	20.807.088,00	110.734.890,00	(89.927.802,00)	(81,21)
	Puskesmas Bogor Timur	122.569.266,00	19.666.167,00	102.903.099,00	523,25
	Puskesmas Pulo Armin	2.300.973,00	94.073.214,00	(91.772.241,00)	(97,55)
	Puskesmas Bogor Tengah	16.962.230,00	51.744.594,00	(34.782.364,00)	(67,22)
	Puskesmas Sempur	41.702.507,00	37.364.555,00	4.337.952,00	11,61
	Puskesmas Gang Aut	9.269.962,00	13.157.615,00	(3.887.653,00)	(29,55)
	Puskesmas Belong	86.085.299,00	2.269.180,00	83.816.119,00	3.693,67
	Puskesmas Merdeka	172.878.447,00	68.770.529,00	104.107.918,00	151,38
	Puskesmas Semplak	4.821.086,00	30.356.626,00	(25.535.540,00)	(84,12)
	Puskesmas Pancasan	255.780.495,00	50.175.253,00	205.605.242,00	409,77
	Puskesmas Pasir Mulya	22.511.771,00	79.625.567,00	(57.113.796,00)	(71,73)
	Puskesmas Gang Kelor	143.014.097,00	3.863.561,00	139.150.536,00	3.601,61
	Puskesmas Sindang Barang	145.621.857,00	5.777.814,00	139.844.043,00	2.420,36
	Puskesmas Bogor Utara	262.842.598,00	12.516.734,00	250.325.864,00	1.999,93
	Puskesmas Tegal Gundil	235.826.488,00	35.057.009,00	200.769.479,00	572,69
	Puskesmas Warung Jambu	138.743.824,00	23.621.526,00	115.122.298,00	487,36
	Puskesmas Tanah Sereal	339.039.659,00	984.597,00	338.055.062,00	34.334,36
	Puskesmas Pondok Rumpit	76.480.994,00	73.398.940,00	3.082.054,00	4,20
	Puskesmas Kedung Badak	289.407.345,00	181.830.764,00	107.576.581,00	59,16
	Puskesmas Kayu Manis	47.742.544,00	10.963.139,00	36.779.405,00	335,48
	Puskesmas Mekarwangi	225.270.167,00	329.988.366,00	(104.718.199,00)	(31,73)
	Puskesmas Mulyaharja	2.283.834,00	7.287.732,00	(5.003.898,00)	(68,66)
	UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	228.941.607,00	96.642.695,00	132.298.912,00	136,89
	Rumah Sakit Umum Daerah	12.288.260.756,40	570.353.995,38	11.717.906.761,02	2.054,50
	Jumlah Kas di BLUD	15.610.395.136,40	2.153.130.596,38	13.457.264.540,02	625,01

Saldo Kas di BLUD tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp15.610.395.136,40 dan Rp2.153.130.596,38 dengan rincian mutasi sebagai berikut:

Tabel 5.3.11
Mutasi Kas di BLUD

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Saldo awal Kas di BLUD	2.153.130.596,38	17.674.780.233,14
2	Penerimaan Kas	585.040.490.642,02	535.756.334.350,24
3	Pengeluaran Kas	571.583.226.102,00	551.277.983.987,00
4	Saldo Akhir Kas di BLUD	15.610.395.136,40	2.153.130.596,38

Saldo Kas di BLUD Tahun Anggaran 2025 dan 2024 sebesar Rp15.610.395.136,40 dan Rp2.153.130.596,38 terdapat pada unit kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yaitu Puskesmas dan Labkesda serta Rumah Sakit Umum Daerah. Rincian saldo kas di BLUD Rumah Sakit Umum Daerah sebagai berikut:

Tabel 5.3.12
Rincian Kas di BLUD pada Rumah Sakit Umum Daerah

No	Uraian	No Rekening	Peruntukan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1	Kas Tunai	-		13.141.000,00	30.609.500,00
2	Bank BJB	00601878287001	Operasional	9.792.042.877,00	454.708.118,00
3	Bank Mandiri	1330070807066	Tampungan Asuransi	1.425.062.032,40	23.232.324,38
4	Bank BNI	352582588	Tampungan Asuransi	1.058.014.847,00	61.804.053,00
Total				12.288.260.756,40	570.353.995,38

5.3.1.1.1.5 Kas Lainnya

Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp48.870.128,00 dan Rp1.012.808.839,00.

Tabel 5.3.13
Kas Lainnya

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Saldo awal Kas Lainnya	1.012.808.839,00	1.108.045.406,00
2	Penerimaan Kas	170.442.145.114,00	41.519.971.494,00
3	Pengeluaran Kas	171.406.083.825,00	41.615.208.061,00
4	Saldo Akhir Kas Lainnya	48.870.128,00	1.012.808.839,00

Kas lainnya pada tahun 2025 sebesar Rp48.870.128,00 terdiri dari Saldo BOP PAUD pada Dinas Pendidikan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 31/KM.7/2021 tentang Penyaluran dan Pelaporan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan anak Usia Dini dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan sebesar Rp370.128,00 dan uang jaminan bongkar sesuai dengan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 19 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Reklame sebesar Rp48.500.000,00.

Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2025 sebesar Rp48.870.128,00 turun sebesar Rp963.938.711,00 atau 95,17% dibandingkan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.012.808.839,00. Hal ini dikarenakan terdapat perubahan kodefikasi akun untuk kas lainnya pada puskesmas yang bersumber dari dana BOK menjadi Kas Dana BOK Puskesmas sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dengan

rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.14
 Kas Lainnya per Perangkat Daerah

No	Uraian	31 Desember	31 Desember 2024	Kenaikan / (penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Kas Lainnya	48.870.128,00	1.012.808.839,00	(963.938.711,00)	(95,17)
	Dinas Pendidikan	370.128,00	7.020.131,00	(6.650.003,00)	(94,73)
	Puskesmas Bogor Selatan	0,00	1.400.000,00	(1.400.000,00)	(100,00)
	Puskesmas Cipaku	0,00	69.941.520,00	(69.941.520,00)	(100,00)
	Puskesmas Bondongan	0,00	20.586.020,00	(20.586.020,00)	(100,00)
	Puskesmas Lawanggantung	0,00	38.537.212,00	(38.537.212,00)	(100,00)
	Puskesmas Bogor Timur	0,00	7.650.020,00	(7.650.020,00)	(100,00)
	Puskesmas Pulo Armin	0,00	94.610.639,00	(94.610.639,00)	(100,00)
	Puskesmas Bogor Tengah	0,00	16.883.986,00	(16.883.986,00)	(100,00)
	Puskesmas Gang Aut	0,00	4.350.000,00	(4.350.000,00)	(100,00)
	Puskesmas Belong	0,00	32.839,00	(32.839,00)	(100,00)
	Puskesmas Merdeka	0,00	92.328.419,00	(92.328.419,00)	(100,00)
	Puskesmas Semplak	0,00	13.755.020,00	(13.755.020,00)	(100,00)
	Puskesmas Pancasan	0,00	27.406.520,00	(27.406.520,00)	(100,00)
	Puskesmas Pasir Mulya	0,00	56.668.500,00	(56.668.500,00)	(100,00)
	Puskesmas Gang Kelor	0,00	3.725.826,00	(3.725.826,00)	(100,00)
	Puskesmas Sindang Barang	0,00	167.632.520,00	(167.632.520,00)	(100,00)
	Puskesmas Bogor Utara	0,00	35.217.120,00	(35.217.120,00)	(100,00)
	Puskesmas Tegal Gundil	0,00	10.903.520,00	(10.903.520,00)	(100,00)
	Puskesmas Warung Jambu	0,00	61.300.402,00	(61.300.402,00)	(100,00)
	Puskesmas Tanah Sareal	0,00	5.483.520,00	(5.483.520,00)	(100,00)
	Puskesmas Pondok Rumput	0,00	6.368.520,00	(6.368.520,00)	(100,00)
	Puskesmas Kedung Badak	0,00	18.150.000,00	(18.150.000,00)	(100,00)
	Puskesmas Kayu Manis	0,00	15.006.720,00	(15.006.720,00)	(100,00)
	Puskesmas Mekarwangi	0,00	78.089.020,00	(78.089.020,00)	(100,00)
	Puskesmas Mulyaharja	0,00	10.260.845,00	(10.260.845,00)	(100,00)
	PPKD	48.500.000,00	149.500.000,00	(101.000.000,00)	(67,56)
	Jumlah Kas Lainnya	48.870.128,00	1.012.808.839,00	(963.938.711,00)	(95,17)

Tabel 5.3.15
 Kas Lainnya pada Dinas Pendidikan

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	Penerimaan	Pengeluaran	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / (penurunan)	
						(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7=6-3)	(8=7/3)
1	TK Negeri Mexindo	4.054.224,00	170.415.776,00	174.105.072,00	364.928,00	(3.689.296,00)	(91,00)
2	TK Negeri Motekar	2.965.907,00	69.304.093,00	72.267.500,00	2.500,00	(2.963.407,00)	(99,92)
3	SKB PAUD	-	171.550.000,00	171.550.000,00	-	-	-
4	SKB Kesetaraan	-	337.240.000,00	337.237.300,00	2.700,00	2.700,00	-
	Jumlah Saldo Kas di Bendahara BOS Pusat	7.020.131,00	748.509.869,00	755.159.872,00	370.128,00	(6.650.003,00)	(94,73)

5.3.1.1.1.6 Kas Dana BOSP

Saldo Kas Dana BOSP per 31 Desember 2025 adalah Rp616.566.724,00 turun sebesar Rp331.031.070,00 atau mencapai 34,93% dibandingkan saldo 31 Desember 2024 sebesar Rp947.597.794,00 dengan mutasi pada tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 5.3.16
 Mutasi Kas di Bendahara BOS Pusat

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	Koreksi	Penerimaan	Pengeluaran	Jasa Giro	31 Desember 2025 (Rp)	Kenaikan / (penurunan)	
								(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9=8-3)	(10=9/8)
1	Sekolah Dasar	583.182.853,00	3.832.030,00	83.954.617.147,00	84.377.232.597,00	0,00	164.399.433,00	(418.783.420,00)	(71,81)
2	Sekolah Menengah Pertama	364.414.941,00	0,00	26.228.765.059,00	26.141.063.160,00	50.451,00	452.167.291,00	87.752.350,00	24,08
	Jumlah Saldo Kas di Bendahara BOS Pusat	947.597.794,00	3.832.030,00	110.183.382.206,00	110.518.295.757,00	50.451,00	616.566.724,00	(331.031.070,00)	(34,93)

(Rincian kas di bendahara BOS pusat disajikan pada Lampiran 1.)

5.3.1.1.1.7

Kas Dana BOK Puskesmas

Saldo Kas Dana BOK Puskesmas per 31 Desember 2025 adalah Rp300.849.334,00 naik sebesar Rp300.849.334,00 atau mencapai 0,00% dibandingkan saldo 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 dengan mutasi pada tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 5.3.17
Kas Dana BOK Puskesmas

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / (penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Kas Dana BOK Puskesmas	300.849.334,00	0,00	300.849.334,00	-
	Puskesmas Bogor Selatan	700.000,00	0,00	700.000,00	-
	Puskesmas Cipaku	50.000,00	0,00	50.000,00	-
	Puskesmas Bondongan	3.050.000,00	0,00	3.050.000,00	-
	Puskesmas Lawanggintang	9.081.500,00	0,00	9.081.500,00	-
	Puskesmas Bogor Timur	150.000,00	0,00	150.000,00	-
	Puskesmas Pulo Armin	17.171.000,00	0,00	17.171.000,00	-
	Puskesmas Bogor Tengah	6.668.840,00	0,00	6.668.840,00	-
	Puskesmas Sempur	93.000,00	0,00	93.000,00	-
	Puskesmas Gang Aut	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-
	Puskesmas Belong	6.990.002,00	0,00	6.990.002,00	-
	Puskesmas Merdeka	5.783.145,00	0,00	5.783.145,00	-
	Puskesmas Semplak	24.663.500,00	0,00	24.663.500,00	-
	Puskesmas Pancasan	5.233.000,00	0,00	5.233.000,00	-
	Puskesmas Pasir Mulya	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00	-
	Puskesmas Gang Kelor	104.095.000,00	0,00	104.095.000,00	-
	Puskesmas Sindang Barang	99.069.500,00	0,00	99.069.500,00	-
	Puskesmas Bogor Utara	100.000,00	0,00	100.000,00	-
	Puskesmas Tegal Gundil	956.000,00	0,00	956.000,00	-
	Puskesmas Warung Jambu	1.446.064,00	0,00	1.446.064,00	-
	Puskesmas Tanah Sereal	4.873.500,00	0,00	4.873.500,00	-
	Puskesmas Pondok Rumpit	590.000,00	0,00	590.000,00	-
	Puskesmas Kedung Badak	0	0,00	-	-
	Puskesmas Kayu Manis	1.086.000,00	0,00	1.086.000,00	-
	Puskesmas Mekarwangi	458.000,00	0,00	458.000,00	-
	Puskesmas Mulyaharja	2.141.283,00	0,00	2.141.283,00	-
	Jumlah Kas Dana BOK Puskesmas	300.849.334,00	0,00	300.849.334,00	-

5.3.1.1.2 Piutang

Piutang menggambarkan hak Pemerintah Kota Bogor terhadap penerimaan kas, baik pendapatan yang belum diterima secara kas maupun tagihan-tagihan lainnya. Saldo rekening tersebut per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.026.161.757.122,70 mengalami kenaikan sebesar Rp70.087.379.803,00 atau 7,33% dibandingkan posisi per 31 Desember 2024 sebesar Rp956.074.377.319,70.

Terhadap saldo piutang sampai dengan tahun 2025 Pemerintah Kota Bogor terus melakukan upaya penagihan antara lain melakukan penagihan secara door-to-door langsung ke rumah atau lokasi objek pajak melalui kegiatan operasi sisir dan Pemasangan Plang/Stiker Penunggak.

Adapun rincian piutang dapat dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 5.3.18
Piutang

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / (penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Piutang				
2	Piutang Pajak Daerah	681.423.976.390,00	617.775.532.829,00	63.648.443.561,00	10,30
3	Piutang Retribusi Daerah	56.316.655.316,70	84.392.660.913,70	(28.076.005.597,00)	(33,27)

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / (penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
4	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	4.510.852.544,00	(4.510.852.544,00)	(100,00)
5	Piutang Lain - lain PAD yang Sah	192.079.349.935,00	177.064.672.727,00	15.014.677.208,00	8,48
6	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	79.309.259.000,00	0,00	79.309.259.000,00	-
7	Piutang Transfer Antar Daerah	1.313.722.709,00	12.733.735.118,00	(11.420.012.409,00)	(89,68)
8	Piutang Lainnya	15.718.793.772,00	59.596.923.188,00	(43.878.129.416,00)	(73,62)
	Jumlah Piutang	1.026.161.757.122,70	956.074.377.319,70	70.087.379.803,00	7,33

5.3.1.1.2.1 Piutang Pajak Daerah

Piutang Pajak merupakan pos untuk menampung saldo tagihan pajak daerah kepada pihak ketiga yang diharapkan akan diterima dalam waktu 12 bulan. Piutang Pajak terjadi dikarenakan adanya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daerah) yang dikeluarkan oleh Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA), sampai dengan batas waktu tertentu pada tanggal Neraca belum dibayar oleh Wajib Pajak Daerah (WP-Daerah).

Tabel 5.3.19
Piutang Pajak Daerah

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / (penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Piutang				
2	Piutang Pajak Hotel	11.519.393.214,00	14.623.197.503,00	(3.103.804.289,00)	(21,23)
3	Piutang Pajak Restoran	18.416.839.127,00	12.515.948.758,00	5.900.890.369,00	47,15
4	Piutang Pajak Hiburan	959.301.065,00	1.000.174.810,00	(40.873.745,00)	(4,09)
5	Piutang Pajak Reklame	2.045.523.692,00	1.960.325.995,00	85.197.697,00	4,35
6	Piutang Pajak Parkir	473.636.477,00	273.039.183,00	200.597.294,00	73,47
7	Piutang Pajak Air Tanah	394.294.550,00	351.031.902,00	43.262.648,00	12,32
8	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)	647.535.409.065,00	586.951.846.128,00	60.583.562.937,00	10,32
9	Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	79.579.200,00	99.968.550,00	(20.389.350,00)	(20,40)
	Jumlah Piutang Pajak	681.423.976.390,00	617.775.532.829,00	63.648.443.561,00	10,30

Saldo Piutang Pajak Per 31 Desember 2025 sebesar Rp681.423.976.390,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp63.648.443.561,00 atau 10,30% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp617.775.532.829,00 lebih lengkap rincian mutasi piutang pajak daerah disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.3.20
Mutasi Piutang Pajak Daerah

No	Uraian	Saldo 31 Desember 2024	Penambahan / Pengurangan Masa Pajak s/d th 2024	Penerbitan Ketetapan Baru	Penambahan / Ketetapan th 2025	Pengurangan	Saldo Akhir 31 Desember 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 3+4+5-6-7)
1	Piutang Pajak						
2	Piutang PBJT Hotel	14.623.197.503,00		2.000.000,00	102.320.732.079,00	105.426.536.368,00	11.519.393.214,00
3	Piutang PBJT Restoran	12.515.948.758,00		13.079.388,00	227.710.810.876,00	221.822.999.895,00	18.416.839.127,00
4	Piutang PBJT Hiburan	1.000.174.810,00		1.814.438,00	27.646.853.528,00	27.689.541.711,00	959.301.065,00
5	Piutang PBJT Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber L	0,00			101.043.228.390,00	101.043.228.390,00	-
6	Piutang Pajak Reklame	1.960.325.995,00			10.430.253.196,00	10.345.055.499,00	2.045.523.692,00
7	Piutang Pajak Parkir	273.039.183,00			8.276.286.171,00	8.075.688.877,00	473.636.477,00
8	Piutang Pajak Air Tanah	351.031.902,00			1.876.613.102,00	1.833.350.454,00	394.294.550,00
9	Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	99.968.550,00		79.178.200	217.973.595.793,00	218.073.163.343,00	79.579.200,00
10	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)	586.951.846.128,00	(23.311.767.030,00)		316.516.433.242,00	232.621.103.275,00	647.535.409.065,00
	Jumlah Piutang Pajak	617.775.532.829,00	(23.311.767.030,00)	96.072.026,00	1.013.794.806.377,00	926.930.667.812,00	681.423.976.390,00

(Rincian piutang pajak disajikan pada Lampiran 2)

5.3.1.1.2.2 Piutang Retribusi Daerah

Saldo Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2025 sebesar Rp56.316.655.316,70 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp84.392.660.913,70 adalah nilai Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang telah diterbitkan tetapi belum diterima pembayarannya. Mutasi piutang retribusi daerah tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 5.3.21
Piutang Retribusi Daerah

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Saldo awal Piutang Retribusi	84.392.660.913,70	5.848.053.235,00
2	Penerimaan	343.485.880.123,00	419.447.484.596,70
3	Pengeluaran	371.561.885.720,00	340.902.876.918,00
4	Saldo Akhir Piutang Retribusi	56.316.655.316,70	84.392.660.913,70

Saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2025 sebesar Rp56.316.655.316,70 atau turun sebesar Rp28.076.005.597,00 atau 33,27% dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp84.392.660.913,70. Adapun rincian piutang retribusi per perangkat daerah sebagai berikut.

Tabel 5.3.22
Piutang Retribusi Daerah per Perangkat Daerah

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / (penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
	Piutang Retribusi				
1	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD	49.828.243.224,70	78.180.963.263,70	(28.352.720.039,00)	(36,27)
	- Rumah Sakit Umum Daerah	49.828.243.224,70	78.180.963.263,70	(28.352.720.039,00)	(36,27)
2	Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian an dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	265.720.500,00	265.720.500,00	0,00	0,00
	- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	265.720.500,00	265.720.500,00	0,00	0,00
3	Piutang Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	3.639.751.789,00	3.318.645.023,00	321.106.766,00	9,68
	- Dinas Perumahan dan Permukiman	1.188.960.000,00	1.113.355.000,00	75.605.000,00	6,79
	- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	270.579.776,00	(270.579.776,00)	(100,00)
	- BKAD	2.450.791.789,00	1.934.710.247,00	516.081.542,00	26,67
4	Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	2.150.570.160,00	2.150.570.160,00	0,00	0,00
	- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.150.570.160,00	2.150.570.160,00	0,00	0,00
5	Piutang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	117.195.125,00	117.195.125,00	0,00	0,00
	- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	117.195.125,00	117.195.125,00	0,00	0,00
6	Piutang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	315.174.518,00	359.566.842,00	(44.392.324,00)	(12,35)
	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	315.174.518,00	359.566.842,00	(44.392.324,00)	(12,35)
	Jumlah Piutang Retribusi	56.316.655.316,70	84.392.660.913,70	(28.076.005.597,00)	(33,27)

(Rincian piutang retribusi disajikan pada Lampiran 3.1, 3.2, 3.2., 3.4 dan 3.5)

5.3.1.1.2.3 Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Saldo Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00 dan tahun 2024 sebesar Rp4.510.852.544,00 adalah piutang Bagian Laba Yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD. Mutasi pada tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 5.3.23
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Saldo awal	4.510.852.544,00	4.961.512.690,00
2	koreksi saldo awal	0,00	250.000.000,00
3	Penerimaan	0,00	4.260.852.544,00
4	Pengeluaran	4.510.852.544,00	4.961.512.690,00
5	Saldo Akhir	0,00	4.510.852.544,00

Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00 mengalami penurunan sebesar Rp4.510.852.544,00 dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp4.510.852.544,00 atau mencapai 100,00% yang disebabkan oleh belum adanya keputusan adalah piutang Bagian Laba Yang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.24
Piutang Bagian Laba yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (Dividen)
atas Penyertaan Modal pada BUMD

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / (penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				
1	Piutang Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	0,00	4.260.852.544,00	(4.260.852.544,00)	(100,00)
2	Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	0,00	250.000.000,00	(250.000.000,00)	(100,00)
	Jumlah	0,00	4.510.852.544,00	(4.510.852.544,00)	(100,00)

5.3.1.1.2.4 Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Piutang Lain-Lain PAD yang Sah per 31 Desember 2025 Rp192.079.349.935,00 dan per 31 Desember 2024 sebesar Rp177.064.672.727,00 adalah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang belum diterima pembayarannya, dengan rincian mutasi sebagai berikut:

Tabel 5.3.25
Piutang Lain-lain PAD yang Sah

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Saldo awal	177.064.672.727,00	207.821.455.185,70
2	Penerimaan	47.314.858.132,00	44.098.484.942,00
3	Pengeluaran	32.300.180.924,00	74.855.267.400,70
4	Saldo Akhir	192.079.349.935,00	177.064.672.727,00

Saldo Piutang Lain-Lain PAD yang Sah per 31 Desember 2025 sebesar Rp192.079.349.935,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp15.014.677.208,00 atau 8,48% dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp177.064.672.727,00. Berikut rincian Piutang lain-lain PAD yang sah per perangkat daerah.

Tabel 5.3.26
Piutang Lain-lain PAD yang Sah per Perangkat Daerah

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / (penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
	Piutang Lain-lain PAD yang Sah				
1	Piutang Pendapatan Bunga	483.260.494,00	543.668.056,00	(60.407.562,00)	(11,11)
	- Badan Keuangan dan Aset Daerah	483.260.494,00	543.668.056,00	(60.407.562,00)	(11,11)
2	Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah	190.563.727.801,00	175.510.440.021,00	15.053.287.780,00	0,09
	- Badan Pendapatan Daerah	190.563.727.801,00	175.510.440.021,00	15.053.287.780,00	0,09
3	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Daerah	1.032.361.640,00	1.010.564.650,00	21.796.990,00	0,02
	- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	118.741.244,00	1.010.564.650,00	(891.823.406,00)	(0,88)
	- Badan Keuangan dan Aset Daerah	49.505.704,00	0,00	49.505.704,00	-
	- Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang	864.114.692,00	0,00	864.114.692,00	-
	Jumlah Piutang	192.079.349.935,00	177.064.672.727,00	15.014.677.208,00	8,48

(Rincian piutang retribusi disajikan pada Lampiran 4.1, 4.2 dan 4.3)

Tabel 5.3.27
Mutasi Piutang Denda Pajak

No	Jenis Pajak	Piutang Denda 31 Desember 2023	Penambahan/ Pengurangan Denda Masa Pajak s/d 2024	Penambahan Denda Masa Pajak Tahun 2024	Realisasi Penerimaan Denda Pajak 2024	Saldo Piutang 2024	Piutang Denda Berjalan 2024	Saldo Piutang Denda Per 31 Desember 2024
1	2	3	4	5	6	7 = 3 + 4 + 5 - 6	8	9 = 7 + 8
1	Pajak Hotel	1.472.581.408	(1.472.581.408)	7.025.346.691	2.896.411.920	4.128.934.771		4.128.934.771
2	Pajak Restoran	2.954.542.981	(2.954.542.981)	4.944.671.104	582.629.865	4.362.041.239		4.362.041.239
3	Pajak Reklame	1.301.072.387	(314.795.593)	609.578.965	26.379.803	1.569.475.956		1.569.475.956
4	Pajak Parkir	137.026.415	(105.921.696)	155.974.825	5.850.353	181.229.191		181.229.191
5	Pajak Hiburan	78.590.635	(1.095.972.148)	472.381.834	29.897.367	(574.897.046)		(574.897.046)
6	Pajak Air Tanah	42.430.994	(42.430.994)	115.004.818	12.550.604	102.454.214		102.454.214
7	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	169.524.195.201	(16.701.943.994)	24.653.202.005	4.620.749.461	172.854.703.751	7.939.785.725	180.794.489.476
	Jumlah	175.510.440.021	(22.688.188.814)	37.976.160.242	8.174.469.373	182.623.942.076	7.939.785.725	190.563.727.801

5.3.1.1.2.5 Piutang Transfer Pemerintah Pusat

Piutang Piutang Transfer Pemerintah Pusat per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp79.309.259.000,00 dan per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00. Piutang transfer pemerintah pusat sesuai dengan PMK no 120 tahun 2025 tentang penetapan kurang bayar dan lebih bayar Dana Bagi Hasil tahun 2025 Pemerintah Kota Bogor sebesar Rp79.309.259.000,00 dengan rincian berikut.

Tabel 5.3.28
Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan

No	Jenis Piutang	31 Desember 2024 (Rp)	Penambahan/kurang bayar 2025 (Rp)	Pengurangan/lebih bayar (Rp)	31 Desember 2025 (Rp)
1	Piutang Transfer Pemerintah Pusat				
	- DBH PPh Pasal 21	0,00	46.359.536.000,00	0,00	46.359.536.000,00
	- DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29 / WPOPDN	0,00	6.039.247.000,00	0,00	6.039.247.000,00
	- DBH PBB	0,00	3.033.155.000,00	0,00	3.033.155.000,00
	- DBH CHT	0,00	2.507.038.000,00	0,00	2.507.038.000,00
	- DBH SDA Minyak Bumi	0,00	2.604.506.000,00	0,00	2.604.506.000,00
	- DBH SDA Gas Bumi	0,00	655.874.000,00	287.879.000,00	367.995.000,00
	- DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi	0,00	16.073.114.000,00	7.313.000,00	16.065.801.000,00
	- DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent	0,00	3.456.000,00	0,00	3.456.000,00
	- DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty	0,00	2.306.960.000,00	0,00	2.306.960.000,00
	- DBH SDA Kehutanan-PSDH	0,00	21.565.000,00	0,00	21.565.000,00
	Jumlah	0,00	79.604.451.000,00	295.192.000,00	79.309.259.000,00

5.3.1.1.2.6 Piutang Transfer Antar Daerah

Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya per 31 Desember 2025 Rp1.313.722.709,00 dan per 31 Desember 2024 sebesar Rp12.733.735.118,00. Saldo Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya tahun 2025 sebesar Rp1.313.722.709,00 merupakan piutang kurang salur bagi hasil pajak tahun 2025 sesuai dengan Kepgub Jawa Barat Nomor 973/Kep.195-BPKAD/2026 tentang kurang/lebih salur bagi hasil pajak daerah Provinsi Jawa Barat per 31 Desember 2025 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.29
Rincian Piutang Transfer Antar Daerah

No	Jenis Piutang	31 Desember 2024 (Rp)	Penambahan 2025 (Rp)	Pengurangan/ pembayaran (Rp)	31 Desember 2025 (Rp)
	Piutang Transfer Antar Daerah				
1	Piutang Bagi Hasil				
	- Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	5.174.285.040,00	935.573.880,00	5.174.285.040,00	935.573.880,00
	- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	4.666.803.750,00	350.180.250,00	4.666.803.750,00	350.180.250,00
	- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	1.295.204.745,00	2.060.181,00	1.295.204.745,00	2.060.181,00
	- Air Permukaan (APER)	14.569.900,00	25.908.398,00	14.569.900,00	25.908.398,00
	- Pajak Rokok	1582871683,00	0,00	1582871683,00	0,00
	Jumlah	12.733.735.118,00	1.313.722.709,00	12.733.735.118,00	1.313.722.709,00
2	Piutang Bantuan Keuangan				
	- Bantuan keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	12.733.735.118,00	1.313.722.709,00	12.733.735.118,00	1.313.722.709,00

5.3.1.1.3 Piutang Lainnya

Piutang Lainnya per 31 Desember 2025 sebesar Rp15.718.793.772,00 dan pada tahun 2024 sebesar Rp59.596.923.188,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.30
Piutang Lainnya

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Saldo awal	59.596.923.188,00	65.081.689.452,00

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
2	Penerimaan	0,00	0,00
3	Pengeluaran	5.484.766.177,00	5.484.766.264,00
4	Reklas ke aset lain-lain	38.393.363.239,00	0,00
5	Saldo Akhir	15.718.793.772,00	59.596.923.188,00

Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2025 sebesar Rp15.718.793.772,00 atau turun 73,62% dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp59.596.923.188,00 karena adanya pembayaran pada tahun 2025 sebesar Rp5.484.766.177,00 dan reklasifikasi ke aset lain-lain Rp38.393.363.239,00. Saldo Piutang Lainnya Pemerintah Kota Bogor terdapat pada perangkat daerah berikut:

Tabel 5.3.31
Piutang Lainnya per Perangkat Daerah

No	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan / (penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Piutang Lainnya				
	- Dinas Perhubungan (Pemutusan Kontrak Konsultan PT. Indocitra Intiperkasa)	63.100.000,00	63.100.000,00	0,00	0,00
	- Badan Keuangan dan Aset Daerah	15.655.693.772,00	59.533.823.188,00	(49.878.129.416,00)	(73,70)
	Jumlah Piutang	15.718.793.772,00	59.596.923.188,00	(49.878.129.416,00)	(73,62)

Tabel 5.3.32
Piutang Lainnya pada BKAD

No.	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Piutang Hasil Pemeriksaan (Temuan) BPK-RI yang timbul berdasarkan hasil pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan Tahun 2004 (Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun Anggaran 2005 atas Laporan Keuangan Kota Bogor Tahun 2004)	10.140.927.595,00	10.140.927.595,00
2	Penggunaan langsung Kontribusi PT. Bina Citra atas Pengelolaan Plaza Bogor kegiatan operasional Kantor Pengelolaan Pasar	30.000.000,00	30.000.000,00
3	Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang terkait penerusan dana pinjaman PDAM	5.484.766.177,00	49.362.895.593,00
	Jumlah	15.655.693.772,00	59.533.823.188,00

Bagian lancar tagihan jangka panjang terkait penerusan dana pinjaman PDAM Tirta Pakuan sesuai Naskah Perjanjian Penerusan Pinjaman (NPPP) antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Kota Bogor Nomor SLA-1226/DSMI/2009 tanggal 2 November 2009 tentang Dana Pinjaman dari International Bank for Reconstruction and Development No.7730-ID tanggal 1 September 2009 dalam rangka pembiayaan Urban Water Supply and Sanitation Project.

Pemerintah Kota Bogor sebagai pihak yang menandatangani NPPP wajib menganggarkan di dalam APBD pembayaran cicilan pinjaman yang terdiri atas pokok pinjaman dan bunga pinjaman, dengan mengakui adanya utang jangka panjang terlebih dahulu. Adapun sumber dana untuk pembayaran cicilan utang jangka panjang tersebut berasal dari PDAM Tirta Pakuan. Atas dasar inilah maka Pemerintah Kota Bogor mencatat sebagai piutang kepada PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor. Pada tahun 2015 pinjaman dari pemerintah pusat secara keseluruhan sudah diterima yaitu sebesar Rp85.013.875.740,00.

5.3.1.1.4 Penyisihan Piutang

Saldo Penyisihan Piutang per 31 Desember 2025 sebesar Rp(438.194.379.730,57) atau meningkat sebesar Rp48.230.195.616,33 atau 12,37% dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp(389.964.184.114,24). Rincian Penyisihan Piutang sebesar Rp(438.194.379.730,57) sebagai berikut:

Tabel 5.3.33
Penyisihan Piutang

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / (penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4-3)	(6=5/4)
1	Penyisihan Piutang				
2	Penyisihan Piutang Pajak Daerah	(322.797.489.414,00)	(290.953.447.046,00)	31.844.042.368,00	(10,94)
3	Penyisihan Piutang Retribusi	(14.489.027.706,22)	(13.373.378.274,50)	1.115.649.431,72	(8,34)
4	Penyisihan Piutang Lain - lain PAD yang Sah	(100.907.862.610,35)	(85.390.544.315,74)	15.517.318.294,61	(18,17)
5	Penyisihan Piutang Lainnya - Bagian Lancar	0,00	(246.814.478,00)	(246.814.478,00)	100,00
	Tagihan Jangka Panjang dari Pemerintah Pusat				
	Jumlah Penyisihan Piutang	(438.194.379.730,57)	(389.964.184.114,24)	48.230.195.616,33	(12,37)

5.3.1.1.4.1. Penyisihan Piutang Pajak

Saldo Penyisihan Piutang Pajak per 31 Desember 2025 sebesar Rp(322.797.489.414,00) atau meningkat sebesar Rp31.844.042.368,00 atau 10,94% dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp(290.953.447.046,00). Jumlah penyisihan piutang pajak sebesar Rp(322.797.489.414,00) terdiri dari penyisihan:

Tabel 5.3.34
Penyisihan Piutang Pajak

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / (penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4-3)	(6=5/4)
1	Penyisihan Piutang Pajak				
2	Penyisihan Piutang Pajak Hotel	(4.073.485.489,00)	(8.580.808.067,00)	(4.507.322.578,00)	52,53
3	Penyisihan Piutang Pajak Restoran	(4.057.694.655,00)	(2.737.469.106,00)	1.320.225.549,00	(48,23)
4	Penyisihan Piutang Pajak Hiburan	(469.406.147,00)	(296.339.256,00)	173.066.891,00	(58,40)
5	Penyisihan Piutang Pajak Reklame	(1.103.783.479,00)	(1.076.393.391,00)	27.390.088,00	(2,54)
6	Penyisihan Piutang Pajak Parkir	(182.081.316,00)	(122.181.717,00)	59.899.599,00	(49,03)
7	Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah	(131.861.130,00)	(136.352.201,00)	(4.491.071,00)	3,29
8	Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	(312.778.779.302,00)	(278.003.403.465,00)	34.775.375.837,00	(12,51)
9	Penyisihan Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	(397.896,00)	(499.843,00)	(101.947,00)	20,40
	Jumlah Penyisihan Piutang	(322.797.489.414,00)	(290.953.447.046,00)	31.844.042.368,00	(10,94)

(Rincian Penyisihan piutang pajak disajikan pada lampiran 2)

5.3.1.1.4.2. Penyisihan Piutang Retribusi

Saldo Penyisihan Piutang Retribusi per 31 Desember 2025 sebesar Rp(14.489.027.706,22) atau meningkat sebesar Rp1.115.649.431,72 atau 8,34% dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp(13.373.378.274,50). Jumlah penyisihan piutang retribusi sebesar Rp(14.489.027.706,22) terdiri dari penyisihan:

Tabel 5.3.35
Penyisihan Piutang Retribusi

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / (penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4-3)	(6=5/4)
1	Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD				
	- Rumah Sakit Umum Daerah	(8.622.058.955,82)	(8.011.966.481,00)	610.092.474,82	(7,61)
2	Penyisihan Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi				
	- Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu	(265.720.500,00)	(265.720.500,00)	0,00	0,00
3	Penyisihan Piutang Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan				
	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	(2.150.570.160,00)	0,00	2.150.570.160,00	-
	- Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu	0,00	(2.150.570.160,00)	(2.150.570.160,00)	100,00
4	Penyisihan Piutang Retribusi Perizinan Tertentu- Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol				

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / (penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4-3)	(6=5/4)
	- Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu	(117.195.125,00)	(117.195.125,00)	0,00	0,00
5	Penyisihan Piutang Retribusi Perizinan Tertentu Persetujuan Bangunan Gedung				
	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	(114.234.013,20)	0,00	114.234.013,20	-
	- Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu	0,00	(57.606.549,55)	(57.606.549,55)	100,00
6	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha Pemanfaatan Aset Daerah- Pemanfaatan Aset Daerah				
	- Dinas Perumahan dan Permukiman	(1.035.838.950,00)	(982.508.725,00)	53.330.225,00	(5,43)
	- Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu	-	(172.702.484,75)	(172.702.484,75)	(100,00)
	- Badan Keuangan dan Aset Daerah	(2.183.410.002,20)	(1.615.108.249,20)	568.301.753,00	(35,19)
	Jumlah Penyisihan Piutang	(14.489.027.706,22)	(13.373.378.274,50)	1.115.649.431,72	(8,34)

(Rincian penyisihan piutang retribusi disajikan pada lampiran 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 dan 3.5)

5.3.1.1.4.3. Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Saldo Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2025 sebesar Rp(100.907.862.610,35) meningkat sebesar Rp15.517.318.295,61 atau 18,17% dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp(85.390.544.314,74). Jumlah penyisihan piutang pajak sebesar Rp(100.907.862.610,35) terdiri dari penyisihan:

Tabel 5.3.36
Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / (penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4-3)	(6=5/4)
1	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah				
	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	(846.955.745,55)	0,00	846.955.745,55	-
	- Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu	(128.232.824,00)	(1.012.697.599,74)	(884.464.775,74)	(87,34)
	- Badan Pendapatan Daerah	(99.884.060.826,00)	(84.377.846.715,00)	15.506.214.111,00	18,38
	- Badan Keuangan dan Aset Daerah	(48.613.214,80)	0,00	48.613.214,80	-
	Jumlah Penyisihan Piutang	(100.907.862.610,35)	(85.390.544.314,74)	15.517.318.295,61	18,17

(rincian penyisihan piutang lain-lain Pad yang sah disajikan pada lampiran 4.1, 4.2 dan 4.3)

5.3.1.1.4.4. Penyisihan Piutang Lainnya - Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang dari Pemerintah Pusat

Saldo Penyisihan Piutang Lainnya per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00 atau menurun sebesar Rp246.814.478,00 atau 100,00% dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp(246.814.478,00). Hal itu disebabkan karena adanya reklasifikasi piutang lainnya ke akun bagian lancar tagihan jangka Panjang dan aset lain-lain.

Tabel 5.3.37
Penyisihan Piutang Lainnya

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / (penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4-3)	(6=5/4)
1	Penyisihan Piutang Lainnya - Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang dari Pemerintah Pusat				
	- Badan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	(246.814.478,00)	(246.814.478,00)	(100,00)
	Jumlah Penyisihan Piutang	0,00	(246.814.478,00)	(246.814.478,00)	(100,00)

5.3.1.1.5. Beban Dibayar Dimuka

Saldo Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2025 sebesar Rp839.255.994,52 atau naik sebesar Rp334.027.827,28 atau 66,11% dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp505.228.167,24. Adapun rincian Beban Dibayar Dimuka Rp839.255.994,52 terdiri dari:

Tabel 5.3.38
Beban Dibayar Dimuka per Perangkat Daerah

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / (penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Beban dibayar dimuka				
	- Rumah Sakit Umum Daerah - BLUD	6.210.636,16	6.278.182,36	(67.546,20)	(1,08)
	- Dinas Perumahan dan Permukiman	95.835.616,44	87.671.232,88	8.164.383,56	9,31
	- Badan Keuangan dan Aset Daerah	638.717.434,23	317.733.547,00	320.983.887,23	101,02
	- Kecamatan Bogor Selatan	98.492.307,69	93.545.205,00	4.947.102,69	5,29
	Jumlah Beban Dibayar Dimuka	839.255.994,52	505.228.167,24	334.027.827,28	66,11

(Rincian disajikan pada Lampiran 5)

5.3.1.1.6 Persediaan

Persediaan merupakan aset lancar berupa barang pakai habis dan barang tak habis pakai yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksud untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan menggambarkan nilai persediaan yang dimiliki/dikuasai oleh Kota Bogor per 31 Desember 2025 dan 2024. Saldo Persediaan Kota Bogor Per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp54.191.413.663,23 dan Rp49.525.803.484,97. Saldo Persediaan 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp4.665.610.178,26 atau 9,42% dibandingkan tahun 2024. Pada tahun 2025 terdapat penerimaan persediaan sebesar Rp396.805.134.380,20 dan pengurangan persediaan sebesar Rp392.139.524.201,94. Adapun rincian persediaan tersebut sebagai berikut:

Tabel 5.3.39

Persediaan Pemerintah Kota Bogor

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	Penambahan 2025	Pengurangan 2025	31 Desember 2025 (Rp)	Kenaikan/ (penurunan)	
						(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)	(7=6-3)	(8=7/3)
1	Bahan						
	Bahan Bangunan Dan Konstruksi	859.997.205,11	25.346.885.078,00	24.994.222.082,07	1.212.660.201,04	352.662.995,93	41,01
	Bahan Kimia	248.653.027,22	5.502.061.942,02	5.295.017.661,50	455.697.307,74	207.044.280,52	83,27
	Bahan Bakar Dan Pelumas	648.200.040,00	1.305.884.719,00	1.275.109.524,00	678.975.235,00	30.775.195,00	4,75
	Bahan Baku	16.280.000,00	74.340.200,00	90.620.200,00	-	(16.280.000,00)	(100,00)
	Bahan/Bibit Tanaman	20.456.680,00	2.274.081.321,00	2.282.090.901,00	12.447.100,00	(8.009.580,00)	(39,15)
	Isi Tabung Pemadam Kebakaran	-	11.693.800,00	10.603.800,00	1.090.000,00	1.090.000,00	0,00
	Isi Tabung Gas	1.710.000,00	25.487.080,00	24.699.300,00	2.497.780,00	787.780,00	46,07
	Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	-	72.200.000,00	72.200.000,00	-	-	0,00
	Bahan Lainnya	5.241.201.088,03	12.207.434.562,55	14.108.579.296,33	3.340.056.354,25	(1.901.144.733,78)	(36,22)
	Bahan	7.036.498.040,36	46.820.068.702,57	48.153.142.764,90	5.703.423.978,03	(1.333.074.062,33)	(18,95)
2	Suku Cadang						
	Suku Cadang Alat Angkutan	1.231.369.450,00	4.121.221.993,00	4.494.456.558,00	858.134.885,00	(373.234.565,00)	(30,31)
	Suku Cadang Alat Besar	1.990.600,00	398.198.292,00	400.188.892,00	-	(1.990.600,00)	(100,00)
	Suku Cadang Alat Kedokteran	35.394.014,00	261.651.146,00	295.300.160,00	1.745.000,00	(33.649.014,00)	(95,07)
	Suku Cadang Alat Laboratorium	-	5.730.408,00	5.730.408,00	-	-	0,00
	Suku Cadang Alat Pertanian	115.904.886,00	875.180.281,00	863.051.791,00	128.033.376,00	12.128.490,00	10,46
	Suku Cadang Alat Bengkel	-	16.364.400,00	16.364.400,00	-	-	0,00
	Suku Cadang Lainnya	4.878.614,00	9.398.600,00	10.101.906,00	4.175.308,00	(703.306,00)	(14,42)
	Suku Cadang	1.389.537.564,00	5.687.745.120,00	6.085.194.115,00	992.088.569,00	(397.448.995,00)	(28,60)
3	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor						
	Alat Tulis Kantor	2.954.473.280,11	15.054.473.481,42	15.294.154.906,69	2.714.791.854,84	(239.681.425,27)	(8,11)
	Kertas Dan Cover	407.852.697,00	5.061.160.111,40	5.076.691.681,71	392.321.126,69	(15.531.570,31)	(3,81)
	Bahan Cetak	215.837.083,00	660.089.539,00	705.882.287,00	170.044.335,00	(45.792.748,00)	(21,22)
	Benda Pos	4.745.500,00	131.142.770,00	125.200.930,00	10.687.340,00	5.941.840,00	125,21
	Bahan Komputer	1.539.596.684,00	11.836.507.270,00	11.389.770.993,05	1.986.332.960,95	446.736.276,95	29,02
	Perabot Kantor	841.502.641,71	6.343.613.724,00	6.605.284.697,73	579.831.667,98	(261.670.973,73)	(31,10)
	Alat Listrik	3.487.214.848,50	16.315.698.867,01	18.162.858.663,59	1.640.055.051,92	(1.847.159.796,58)	(52,97)
	Perlengkapan Dinas	521.566.500,00	9.645.719.951,00	10.089.494.306,00	77.792.145,00	(443.774.355,00)	(85,08)
	Perlengkapan Pendukung Olah Raga	2.225.130,00	861.199.714,00	837.484.044,00	25.940.800,00	23.715.670,00	1.065,81
	Suvenir/Cendera Mata	68.258.900,00	1.047.880.894,00	1.107.035.194,00	9.104.600,00	(59.154.300,00)	(86,66)
	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	629.126.053,37	4.946.809.662,02	5.118.611.809,89	457.323.905,50	(171.802.147,87)	(27,31)
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor	10.672.399.317,69	71.904.295.983,85	74.512.469.513,66	8.064.225.787,88	(2.608.173.529,81)	(24,44)
4	Obat-Obatan						
	Obat	18.773.757.900,97	110.817.692.609,95	112.866.821.149,46	16.724.629.361,46	(2.049.128.539,51)	(10,91)
	Obat-Obatan Lainnya	7.844.865.006,63	76.060.318.812,72	74.706.932.378,49	9.198.251.440,86	1.353.386.434,23	17,25
	Obat-Obatan	26.618.622.907,60	186.878.011.422,67	187.573.753.527,95	25.922.880.802,32	(695.742.105,28)	(2,61)
5	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan						

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	Penambahan 2025	Pengurangan 2025	31 Desember 2025 (Rp)	Kenaikan/ (penurunan)	
						(Rp)	%
	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	1.242.197.202,06	64.271.158.311,00	53.116.355.277,06	12.397.000.236,00	11.154.803.033,94	897,99
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan	1.242.197.202,06	64.271.158.311,00	53.116.355.277,06	12.397.000.236,00	11.154.803.033,94	897,99
6	Natura Dan Pakan						
	Natura	2.440.764.293,26	4.255.465.349,11	5.803.704.897,37	892.524.745,00	(1.548.239.548,26)	(63,43)
	Pakan	-	107.264.545,00	107.264.545,00	-	-	0,00
	Natura Dan Pakan	2.440.764.293,26	4.362.729.894,11	5.910.969.442,37	892.524.745,00	(1.548.239.548,26)	(63,43)
7	Komponen						
	Komponen Peralatan	121.276.000,00	551.640.490,00	486.795.905,00	186.120.585,00	64.844.585,00	53,47
	Komponen Rambu-Rambu	-	16.177.484.656,00	16.147.585.696,00	29.898.960,00	29.898.960,00	0,00
	Komponen Lainnya	4.508.160,00	1.567.500,00	2.825.660,00	3.250.000,00	(1.258.160,00)	(27,91)
	Komponen	125.784.160,00	16.730.692.646,00	16.637.207.261,00	219.269.545,00	93.485.385,00	74,32
8	P I P A						
	Pipa Baja	-	11.211.000,00	11.211.000,00	-	-	0,00
	Pipa Plastik PVC (UPVC)	-	139.221.300,00	139.221.300,00	-	-	0,00
	P I P A	-	150.432.300,00	150.432.300,00	-	-	0,00
-	TOTAL PERSIDIAAN	49.525.803.484,97	396.805.134.380,20	392.139.524.201,94	54.191.413.663,23	4.665.610.178,26	0,09

Penambahan dan Pengurangan Persediaan Kota Bogor selama tahun 2025, terdiri dari:

1. Penambahan yang merupakan perolehan persediaan melalui pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2025 dan perolehan lain yang sah seperti hibah dan hasil inventarisasi
2. Penggunaan persediaan untuk kegiatan operasional dan diserahkan kepada masyarakat
3. Perpindahan persediaan antar Perangkat Daerah
4. Reklasifikasi persediaan antar jenis sesuai dengan peraturan perundang-undangan
5. Koreksi atas pencatatan Persediaan sebelumnya

Rincian Persediaan pada masing-masing Perangkat Daerah Pemerintah Kota Bogor per 31 Desember 2025 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.3.40
Persediaan per Perangkat Daerah

No	SKPD	31 Desember 2024 (Rp)	Penambahan 2025 (Rp)	Pengurangan 2025 (Rp)	31 Desember 2025 (Rp)	Kenaikan/ (penurunan)	
						(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)	(7=6-3)	(8=7/3)
1	Dinas Pendidikan	327.834.963,67	17.950.219.676,00	17.466.566.261,87	811.488.377,80	483.653.414,13	147,53
2	Dinas Kesehatan	35.705.856.503,77	212.078.758.296,79	216.579.074.480,74	31.205.540.319,82	(4.500.316.183,95)	(12,60)
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	603.797.599,00	40.791.333.868,00	33.433.201.853,00	7.961.929.614,00	7.358.132.015,00	1.218,64
4	Dinas Perumahan Dan Permukiman	626.653.386,00	26.067.554.522,00	22.161.693.679,16	4.532.514.228,84	3.905.860.842,84	623,29
5	Satuan Polisi Pamong Praja	7.621.500,00	916.114.827,00	917.821.527,00	5.914.800,00	(1.706.700,00)	(22,39)
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	153.575.510,00	1.074.815.183,00	1.093.417.548,00	134.973.145,00	(18.602.365,00)	(12,11)
7	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	74.527.250,00	968.538.862,00	1.043.066.112,00	0,00	(74.527.250,00)	(100,00)
8	Dinas Sosial	868.334.867,00	4.107.500.893,00	4.287.394.438,00	688.441.322,00	(179.893.545,00)	(20,72)
9	Dinas Tenaga Kerja	45.528.350,00	3.474.192.697,00	3.506.847.216,00	12.873.831,00	(32.654.519,00)	(71,72)
10	Dinas Lingkungan Hidup	3.952.601.725,06	9.427.343.107,00	10.664.264.877,14	2.715.679.954,92	(1.236.921.770,14)	(31,29)
11	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	1.012.294.327,00	5.118.951.821,00	4.913.984.446,00	1.217.261.702,00	204.967.375,00	20,25
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	23.103.750,00	311.080.200,00	330.454.050,00	3.729.900,00	(19.373.850,00)	(83,86)
13	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	356.840.050,00	966.568.005,00	926.286.538,00	397.121.517,00	40.281.467,00	11,29
14	Dinas Perhubungan	3.435.714.246,00	29.022.943.171,41	30.822.177.208,80	1.636.480.208,61	(1.799.234.037,39)	(52,37)
15	Dinas Komunikasi Dan Informatika	1.804.285,00	2.372.676.564,00	2.374.294.849,00	186.000,00	(1.618.285,00)	(89,69)
16	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan Dan Perindustrian	8.093.600,00	211.126.380,00	207.234.080,00	11.985.900,00	3.892.300,00	48,09
17	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.023.300,00	167.725.465,00	166.623.985,00	2.124.780,00	1.101.480,00	107,64
18	Dinas Pemuda Dan Olah Raga	546.500,00	1.510.274.389,00	1.510.385.889,00	435.000,00	(111.500,00)	(20,40)
19	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	2.510.500,00	376.049.032,00	372.915.843,31	5.643.688,69	3.133.188,69	124,80
20	Dinas Arsip Dan Perpustakaan	0,00	238.292.700,00	235.455.700,00	2.837.000,00	2.837.000,00	100,00
21	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	6.988.300,00	11.458.925.381,00	11.463.235.181,00	2.678.500,00	(4.309.800,00)	(61,67)
22	Sekretariat Daerah	56.481.573,00	8.006.816.963,00	7.910.922.536,00	152.376.000,00	95.894.427,00	169,78
23	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	82.706.240,00	2.105.918.910,00	2.040.141.328,00	148.483.822,00	65.777.582,00	79,53
24	Kecamatan Bogor Selatan	30.411.140,00	817.692.266,00	826.408.146,00	21.695.260,00	(8.715.880,00)	(28,66)
25	Kecamatan Bogor Timur	130.774.700,00	740.299.932,00	836.241.839,14	34.832.792,86	(95.941.907,14)	(73,36)
26	Kecamatan Bogor Tengah	78.793.000,00	625.387.160,00	613.722.374,55	90.457.785,45	11.664.785,45	14,80
27	Kecamatan Bogor Barat	1.305.500,00	1.951.071.155,00	1.951.550.955,00	825.700,00	(479.800,00)	(36,75)
28	Kecamatan Bogor Utara	100.575.800,00	3.455.965.813,00	3.539.411.813,00	17.129.800,00	(83.446.000,00)	(82,97)
29	Kecamatan Tanah Sareal	88.658.244,00	681.641.813,00	655.118.554,67	115.181.502,33	26.523.258,33	29,92
30	Inspektorat	35.563.225,00	195.089.013,00	171.088.509,00	59.563.729,00	24.000.504,00	67,49
31	Badan Perencanaan Pembangunan Riset Dan Inovasi Daerah	207.095,00	146.515.105,00	101.277.143,00	45.445.057,00	45.237.962,00	21.84,06
32	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	337.507.044,17	1.200.759.758,00	962.663.338,88	575.603.463,29	238.096.419,12	70,55
33	Badan Pendapatan Daerah	1.297.206.261,30	2.348.048.125,00	2.085.411.616,76	1.559.842.769,54	262.636.508,24	20,25
34	Badan Kepegawain Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	68.139.150,00	209.592.300,00	261.472.400,00	16.259.050,00	(51.880.100,00)	(76,14)
35	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	2.224.000,00	5.709.351.027,00	5.707.697.884,92	3.877.142,08	1.653.142,08	74,33
	Jumlah	49.525.803.484,97	396.805.134.380,20	392.139.524.201,94	54.191.413.663,23	4.665.610.178,26	9,42

Persediaan Kota Bogor Periode Januari - Desember 2025 pada umumnya diperoleh melalui pembelian (belanja) dan dikeluarkan sebagai pemakaian persediaan perangkat daerah. Terdapat penerimaan dan pengeluaran persediaan yang berasal dari sumber lainnya sebagai berikut:

I. Penerimaan Persediaan dari Hibah:

- a. Dinas Kesehatan
 - Bahan Lainnya sebesar Rp4.781.571.672,89
 - Alat Tulis Kantor sebesar Rp2.925.000,00
 - Obat sebesar Rp32.139.374.115,62
 - Obat-Obatan Lainnya sebesar Rp54.904.047,00
 - Natura sebesar Rp59.018.400,00
- b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 - Perlengkapan Dinas sebesar Rp1.525.000,00
 - Natura sebesar Rp6.179.925,00
- c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - Tulis Kantor sebesar Rp1.348.962.000,00
- d. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 - Obat sebesar Rp372.959.555,00

II. Penerimaan Persediaan melalui Hasil Inventarisasi:

- a. Dinas Kesehatan
 - Obat sebesar Rp33.679.433.305,97
 - Obat-Obatan Lainnya sebesar Rp9.465.789.913,63

III. Penerimaan Persediaan melalui Mutasi Masuk:

- a. Dinas Kesehatan
 - Bahan Lainnya sebesar Rp5.082.805.095,63
 - Suku Cadang Alat Kedokteran sebesar Rp85.000.000,00
 - Alat Tulis Kantor sebesar Rp428.166.334,40
 - Kertas dan Cover sebesar Rp1.280.850,00
 - Perabot Kantor sebesar Rp277.400,00
 - Alat Listrik sebesar Rp106.560,00
 - Perlengkapan Dinas sebesar Rp24.886.200,00
 - Obat sebesar Rp33.679.433.305,97
 - Obat-Obatan Lainnya sebesar Rp9.465.789.913,63
 - Natura sebesar Rp477.744.636,00
- b. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - Alat Tulis Kantor sebesar Rp3.898.050,00
- c. Dinas Lingkungan Hidup
 - Alat Tulis Kantor sebesar Rp4.492.250,00
- d. Dinas Perhubungan
 - Alat Tulis Kantor sebesar Rp136.943.100,00
- e. Dinas Pemuda dan Olah Raga
 - Alat Tulis Kantor sebesar Rp67.500,00

IV. Penerimaan Persediaan melalui Reklasifikasi dari Aset Tetap:

- a. Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
 - Perabot Kantor sebesar Rp4.826.400,00

V. Penerimaan Persediaan atas Koreksi Pengeluaran Tahun Lalu:

- a. Badan Pendapatan Daerah
 - Alat Tulis Kantor sebesar Rp199.100,00

VI. Penerimaan Persediaan Koreksi Kurang Catat atas Utang Belanja Berdasarkan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT):

- a. Dinas Kesehatan
 - Bahan Lainnya sebesar Rp4.434.450,00
 - Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya sebesar Rp49.402.028,00
 - Obat sebesar Rp7.028.284.575,19
 - Obat-Obatan Lainnya sebesar Rp6.644.711.054,89
 - Natura sebesar Rp8.441.702,26

VII. Pengeluaran Persediaan melalui Hibah:

- a. Dinas Kesehatan
 - Bahan Lainnya sebesar Rp902.757.476,10
 - Alat Tulis Kantor sebesar Rp5.231.231,12
 - Obat sebesar Rp6.868.601.506,40
 - Obat-Obatan Lainnya sebesar Rp278.689.339,00

VIII. Pengeluaran Persediaan melalui Mutasi Keluar:

- a. Dinas Kesehatan
 - Bahan Lainnya sebesar Rp5.082.805.095,63
 - Suku Cadang Alat Kedokteran sebesar Rp85.000.000,00
 - Alat Tulis Kantor sebesar Rp428.166.334,40
 - Kertas dan Cover sebesar Rp1.280.850,00
 - Perabot Kantor sebesar Rp277.400,00
 - Alat Listrik sebesar Rp106.560,00
 - Perlengkapan Dinas sebesar Rp24.886.200,00
 - Obat sebesar Rp33.679.433.305,97
 - Obat-Obatan Lainnya sebesar Rp9.465.789.913,63
 - Natura sebesar Rp477.744.636,00
- b. Badan Pendapatan Daerah
 - Alat Tulis Kantor sebesar Rp145.400.900,00

IX. Pengeluaran Persediaan Rusak Berat melalui Reklasifikasi Kondisi:

- a. Dinas Kesehatan
 - Bahan Kimia sebesar Rp2.684.000,00
 - Bahan Lainnya sebesar Rp14.221.514,00
 - Obat sebesar Rp1.024.867.148,63
- b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - Alat Tulis Kantor sebesar Rp118.340.000,00
- c. Badan Pendapatan Daerah
 - Alat Tulis Kantor sebesar Rp592.138.115,00

X. Pengeluaran Persediaan Reklasifikasi ke Aset Tetap:

- a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - Bahan Komputer sebesar Rp499.049.990,00

XI. Pengeluaran Persediaan Koreksi Kurang Catat atas Utang Belanja Berdasarkan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT):

- a. Dinas Kesehatan
 - Bahan Lainnya sebesar Rp4.434.450,00
 - Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya sebesar Rp49.402.028,00
 - Obat sebesar Rp7.028.284.575,19
 - Obat-Obatan Lainnya sebesar Rp6.644.711.054,89
 - Natura sebesar Rp8.441.702,26

5.3.1.1.6.1 Bahan Bangunan dan Konstruksi

Saldo Persediaan Bahan Bangunan dan Konstruksi Kota Bogor Per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.212.660.201,04 dan Rp859.997.205,11. Saldo Persediaan 2025 mengalami kenaikan nilai sebesar Rp352.662.995,93 atau 41,01% dibandingkan tahun 2024. Pada tahun 2025 terdapat penerimaan persediaan sebesar Rp25.346.885.078,00 dan pengurangan persediaan sebesar Rp24.994.222.082,07. Rincian Persediaan Bahan Bangunan dan Konstruksi pada masing-masing Perangkat Daerah Kota Bogor per 31 Desember 2025 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.3.41

Persediaan Bahan Bangunan dan Konstruksi per Perangkat Daerah

No	SKPD	31 Desember 2024	Penambahan 2025	Pengurangan 2025	31 Desember 2025	Kenaikan/ (penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)	(7=6-3)	(8=7/3)
1	Dinas Pendidikan	776.250,00	221.486.618,00	214.914.168,00	7.348.700,00	6.572.450,00	846,69
2	Dinas Kesehatan	119.909.056,11	432.989.686,00	517.908.863,11	34.989.879,00	(84.919.177,11)	(70,82)
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	576.682.149,00	22.811.077.792,00	22.904.338.026,00	483.421.915,00	(93.260.234,00)	(16,17)
4	Dinas Perumahan Dan Permukiman	48.709.600,00	700.810.647,00	497.376.534,16	252.143.712,84	203.434.112,84	417,65
5	Dinas Sosial	0,00	27.198.330,00	27.198.330,00	0,00	0,00	0,00
6	Dinas Lingkungan Hidup	61.775.200,00	359.954.810,00	366.285.570,00	55.444.440,00	(6.330.760,00)	(10,25)
7	Dinas Perhubungan	52.144.950,00	106.623.745,00	121.331.295,00	37.437.400,00	(14.707.550,00)	(28,21)
8	Dinas Komunikasi Dan Informatika	0,00	31.068.900,00	31.068.900,00	0,00	0,00	0,00
9	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	0,00	15.293.000,00	15.293.000,00	0,00	0,00	0,00
10	Inspektorat	0,00	54.930.000,00	54.930.000,00	0,00	0,00	0,00
11	Badan Perencanaan Pembangunan Riset Dan Inovasi Daerah	0,00	5.994.000,00	5.994.000,00	0,00	0,00	0,00
12	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	0,00	411.457.550,00	69.583.395,80	341.874.154,20	341.874.154,20	100,00
13	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	0,00	168.000.000,00	168.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	859.997.205,11	25.346.885.078,00	24.994.222.082,07	1.212.660.201,04	352.662.995,93	41,01

5.3.1.1.6.2 Bahan Kimia

Saldo Persediaan Bahan Kimia Kota Bogor Per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp455.697.307,74 dan Rp248.653.027,22. Saldo Persediaan 2025 mengalami kenaikan nilai sebesar Rp207.044.280,52 atau 83,27% dibandingkan tahun 2024. Pada tahun 2025 terdapat penerimaan persediaan sebesar Rp5.502.061.942,02 dan pengurangan persediaan sebesar Rp5.295.017.661,50. Rincian Persediaan Bahan Kimia pada masing-masing Perangkat Daerah Kota Bogor per 31 Desember 2025 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.3.42
Persediaan Bahan Kimia per Perangkat Daerah

No	SKPD	31 Desember 2024 (Rp)	Penambahan 2025 (Rp)	Pengurangan 2025 (Rp)	31 Desember 2025 (Rp)	Kenaikan/ (penurunan)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)	(7=6-3)	(8=7/3)
1	Dinas Pendidikan	510.000,00	30.210.500,00	30.150.500,00	570.000,00	60.000,00	11,76
2	Dinas Kesehatan	248.143.027,22	4.317.863.314,02	4.117.553.833,50	448.452.507,74	200.309.480,52	80,72
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	0,00	165.881.730,00	165.881.730,00	0,00	-	0,00
4	Dinas Perumahan Dan Permukiman	0,00	117.834.910,00	117.834.910,00	0,00	-	0,00
5	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	131.319.800,00	127.001.900,00	4.317.900,00	4.317.900,00	100,00
6	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	0,00	6.990.000,00	6.337.600,00	652.400,00	652.400,00	100,00
7	Dinas Pemuda Dan Olah Raga	0,00	446.179.540,00	446.179.540,00	0,00	-	0,00
8	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	0,00	278.451.248,00	278.451.248,00	0,00	-	0,00
9	Kecamatan Bogor Timur	0,00	4.976.400,00	4.976.400,00	0,00	-	0,00
10	Kecamatan Bogor Barat	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00	-	0,00
11	Badan Perencanaan Pembangunan Riset Dan Inovasi Daerah	0,00	1.704.500,00	0,00	1.704.500,00	1.704.500,00	100,00
	Jumlah	248.653.027,22	5.502.061.942,02	5.295.017.661,50	455.697.307,74	207.044.280,52	83,27

5.3.1.1.6.3 Bahan Bakar dan Pelumas

Saldo Persediaan Bahan Bakar dan Pelumas Kota Bogor Per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp678.975.235,00 dan Rp648.200.040,00. Saldo Persediaan 2025 mengalami kenaikan nilai sebesar Rp30.775.195,00 atau 4,75% dibandingkan tahun 2024. Pada tahun 2025 terdapat penerimaan persediaan sebesar Rp1.305.884.719,00 dan pengurangan persediaan sebesar Rp1.275.109.524,00. Rincian Persediaan Bahan Bakar dan Pelumas pada masing-masing Perangkat Daerah Kota Bogor per 31 Desember 2025 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.3.43
Persediaan Bahan Bakar dan Pelumas per Perangkat Daerah

No	SKPD	31 Desember 2024 (Rp)	Penambahan 2025 (Rp)	Pengurangan 2025 (Rp)	31 Desember 2025 (Rp)	Kenaikan/ (penurunan)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)	(7=6-3)	(8=7/3)
1	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	0,00	193.184.400,00	193.184.400,00	0,00	-	0,00
2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	13.209.000,00	9.246.300,00	3.962.700,00	3.962.700,00	100,00
3	Dinas Lingkungan Hidup	648.200.040,00	1.092.360.069,00	1.065.547.574,00	675.012.535,00	26.812.495,00	4,14
4	Sekretariat Daerah	0,00	7.131.250,00	7.131.250,00	0,00	-	0,00
	Jumlah	648.200.040,00	1.305.884.719,00	1.275.109.524,00	678.975.235,00	30.775.195,00	4,75

5.3.1.1.6.4 Bahan Baku

Saldo Persediaan Bahan Baku Kota Bogor Per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp16.280.000,00. Saldo Persediaan 2025 mengalami penurunan nilai sebesar Rp16.280.000,00 atau 100,00% dibandingkan tahun 2024. Pada tahun 2025 terdapat penerimaan persediaan sebesar Rp74.340.200,00 dan pengurangan persediaan sebesar Rp90.620.200,00. Rincian Persediaan Bahan Baku pada masing-masing Perangkat Daerah Kota Bogor per 31 Desember 2025 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.3.44

Persediaan Bahan Baku per Perangkat Daerah

No	SKPD	31 Desember 2024 (Rp)	Penambahan 2025 (Rp)	Pengurangan 2025 (Rp)	31 Desember 2025 (Rp)	Kenaikan/ (penurunan)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)	(Rp)	%
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	71.228.700,00	71.228.700,00	0,00	(16.280.000,00)	(100,00)
2	Dinas Sosial	16.280.000,00	0,00	16.280.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Dinas Perhubungan	0,00	1.665.000,00	1.665.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00	1.265.000,00	1.265.000,00	0,00	0,00	0,00
5	Inspektorat	0,00	181.500,00	181.500,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	16.280.000,00	74.340.200,00	90.620.200,00	0,00	(16.280.000,00)	(100,00)

5.3.1.1.6.5 Bahan/Bibit Tanaman

Saldo Persediaan Bahan/Bibit Tanaman Kota Bogor Per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp12.447.100,00 dan Rp20.456.680,00. Saldo Persediaan 2025 mengalami penurunan nilai sebesar Rp8.009.580,00 atau 39,15% dibandingkan tahun 2024. Pada tahun 2025 terdapat penerimaan persediaan sebesar Rp2.274.081.321,00 dan pengurangan persediaan sebesar Rp2.282.090.901,00. Rincian Persediaan Bahan/Bibit Tanaman pada masing-masing Perangkat Daerah Kota Bogor per 31 Desember 2025 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.3.45

Persediaan Bahan/Bibit Tanaman per Perangkat Daerah

No	SKPD	31 Desember 2024 (Rp)	Penambahan 2025 (Rp)	Pengurangan 2025 (Rp)	31 Desember 2025 (Rp)	Kenaikan/ (penurunan)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)	(Rp)	%
1	Dinas Pendidikan	490.000,00	141.050.100,00	141.540.100,00	0,00	(19.966.680,00)	(100,00)
2	Dinas Perumahan dan Permukiman	19.966.680,00	1.865.038.273,00	1.885.004.953,00	0,00	12.447.100,00	100,00
3	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	52.809.100,00	40.362.000,00	12.447.100,00	0,00	0,00
4	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00	215.183.848,00	215.183.848,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	20.456.680,00	2.274.081.321,00	2.282.090.901,00	12.447.100,00	(8.009.580,00)	(39,15)

5.3.1.1.6.6 Isi Tabung Pemadam Kebakaran

Saldo Persediaan Isi Tabung Pemadam Kebakaran Kota Bogor Per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.090.000,00 dan Rp0,00. Saldo Persediaan 2025 mengalami kenaikan nilai sebesar Rp1.090.000,00 atau 100,00% dibandingkan tahun 2024. Pada tahun 2025 terdapat penerimaan persediaan sebesar Rp11.693.800,00 dan pengurangan persediaan sebesar Rp10.603.800,00. Rincian Persediaan Isi Tabung Pemadam Kebakaran pada masing-masing Perangkat Daerah Kota Bogor per 31 Desember 2025 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.3.46

Persediaan Isi Tabung Pemadam Kebakaran per Perangkat Daerah

No	SKPD	31 Desember 2024 (Rp)	Penambahan 2025 (Rp)	Pengurangan 2025 (Rp)	31 Desember 2025 (Rp)	Kenaikan/ (penurunan)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)	(Rp)	%
1	Dinas Pendidikan	0,00	1.638.800,00	1.638.800,00	0,00	0,00	0,00
2	Dinas Kesehatan	0,00	1.090.000,00	0,00	1.090.000,00	1.090.000,00	100,00
3	Sekretariat Daerah	0,00	8.965.000,00	8.965.000,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	11.693.800,00	10.603.800,00	1.090.000,00	1.090.000,00	100,00

5.3.1.1.6.7 Isi Tabung Gas

Saldo Persediaan Isi Tabung Gas Kota Bogor Per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp2.497.780,00 dan Rp1.710.000,00. Saldo Persediaan 2025 mengalami kenaikan nilai sebesar Rp787.780,00 atau 46,07% dibandingkan tahun 2024. Pada tahun 2025 terdapat penerimaan persediaan sebesar Rp25.487.080,00 dan pengurangan persediaan sebesar Rp24.699.300,00. Rincian Persediaan Isi Tabung Gas pada masing-masing Perangkat Daerah Kota Bogor per 31 Desember 2025 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.3.47

Persediaan Isi Tabung Gas per Perangkat Daerah

No	SKPD	31 Desember 2024 (Rp)	Penambahan 2025 (Rp)	Pengurangan 2025 (Rp)	31 Desember 2025 (Rp)	Kenaikan/ (penurunan)	
						(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)	(7=6-3)	(8=7/3)
1	Dinas Kesehatan	1.710.000,00	19.715.080,00	18.927.300,00	2.497.780,00	787.780,00	46,07
2	Sekretariat Daerah	0,00	2.977.000,00	2.977.000,00	0,00	-	0,00
3	Badan Kepegawalan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	2.795.000,00	2.795.000,00	0,00	-	0,00
	Jumlah	1.710.000,00	25.487.080,00	24.699.300,00	2.497.780,00	787.780,00	46,07

5.3.1.1.6.8 Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan

Saldo Persediaan Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan Kota Bogor Per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Persediaan 2025 tidak mengalami perubahan dibandingkan tahun 2024. Pada tahun 2025 terdapat penerimaan persediaan sebesar Rp72.200.000,00 dan pengurangan persediaan sebesar Rp72.200.000,00. Rincian Persediaan Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan pada masing-masing Perangkat Daerah Kota Bogor per 31 Desember 2025 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.3.48

Persediaan Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan per Perangkat Daerah

No	SKPD	31 Desember 2024 (Rp)	Penambahan 2025 (Rp)	Pengurangan 2025 (Rp)	31 Desember 2025 (Rp)	Kenaikan/ (penurunan)	
						(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)	(7=6-3)	(8=7/3)
1	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	0,00	72.200.000,00	72.200.000,00	0,00	-	0,00
	Jumlah	0,00	72.200.000,00	72.200.000,00	0,00	-	0,00

5.3.1.1.6.9 Bahan Lainnya

Saldo Persediaan Bahan Lainnya Kota Bogor Per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp3.340.056.354,25 dan Rp5.241.201.088,03. Saldo Persediaan 2025 mengalami penurunan nilai sebesar Rp1.901.144.733,78 atau 36,27% dibandingkan tahun 2024. Pada tahun 2025 terdapat penerimaan persediaan sebesar Rp12.207.434.562,55 dan pengurangan persediaan sebesar Rp14.108.579.296,33. Rincian Persediaan Bahan Lainnya pada masing-masing Perangkat Daerah Kota Bogor per 31 Desember 2025 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.3.49

Persediaan Bahan Lainnya per Perangkat Daerah

No	SKPD	31 Desember 2024 (Rp)	Penambahan 2025 (Rp)	Pengurangan 2025 (Rp)	31 Desember 2025 (Rp)	Kenaikan/ (penurunan)	
						(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)	(7=6-3)	(8=7/3)
1	Dinas Pendidikan	1.112.900,00	79.334.522,00	74.557.742,00	5.889.680,00	4.776.780,00	429,22
2	Dinas Kesehatan	5.216.940.734,03	11.803.133.552,55	13.855.032.373,25	3.165.041.913,33	(2.051.898.820,70)	(39,33)
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	0,00	3.460.000,00	3.460.000,00	0,00	-	0,00
4	Dinas Sosial	10.840.852,00	1.144.500,00	11.985.352,00	0,00	(10.840.852,00)	(100,00)
5	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	99.260.196,00	1.559.803,08	97.700.392,92	97.700.392,92	100,00
6	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	12.306.602,00	139.970.000,00	80.852.234,00	71.424.368,00	59.117.766,00	480,37
7	Dinas Perhubungan	0,00	6.255.960,00	6.255.960,00	0,00	-	0,00
8	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	0,00	73.798.432,00	73.798.432,00	0,00	-	0,00
9	Inspektorat	0,00	675.000,00	675.000,00	0,00	-	0,00
10	Badan Pendapatan Daerah	0,00	402.400,00	402.400,00	0,00	-	0,00
	Jumlah	5.241.201.088,03	12.207.434.562,55	14.108.579.296,33	3.340.056.354,25	(1.901.144.733,78)	(36,27)

5.3.1.1.6.10 Suku Cadang Alat Angkutan

Saldo Persediaan Suku Cadang Alat Angkutan Kota Bogor Per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp858.134.885,00 dan Rp1.231.369.450,00. Saldo Persediaan 2025 mengalami penurunan nilai sebesar Rp373.234.565,00 atau 30,31% dibandingkan tahun 2024. Pada tahun 2025 terdapat penerimaan persediaan sebesar Rp4.121.221.993,00 dan pengurangan persediaan sebesar Rp4.494.456.558,00. Rincian Persediaan Suku Cadang Alat Angkutan pada masing-masing Perangkat Daerah Kota Bogor per 31 Desember 2025 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.3.50

Persediaan Suku Cadang Alat Angkutan per Perangkat Daerah

No	SKPD	31 Desember 2024	Penambahan 2025	Pengurangan 2025	31 Desember 2025	Kenaikan/ (penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)	(7=6-3)	(8=7/3)
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	397.917.240,00	397.917.240,00	0,00	-	0,00
2	Dinas Perumahan dan Permukiman	18.600.000,00	0,00	18.600.000,00	0,00	(18.600.000,00)	(100,00)
3	Dinas Lingkungan Hidup	1.212.769.450,00	1.830.869.525,00	2.185.504.090,00	858.134.885,00	(354.634.565,00)	(29,24)
4	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	53.352.900,00	53.352.900,00	0,00	-	0,00
5	Dinas Perhubungan	0,00	864.099.950,00	864.099.950,00	0,00	-	0,00
6	Sekretariat Daerah	0,00	950.160.000,00	950.160.000,00	0,00	-	0,00
7	Badan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	24.822.378,00	24.822.378,00	0,00	-	0,00
	Jumlah	1.231.369.450,00	4.121.221.993,00	4.494.456.558,00	858.134.885,00	(373.234.565,00)	(30,31)

5.3.1.1.6.11 Suku Cadang Alat Besar

Saldo Persediaan Suku Cadang Alat Besar Kota Bogor Per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp1.990.600,00. Saldo Persediaan 2025 mengalami penurunan nilai sebesar Rp1.990.600,00 atau 100,00% dibandingkan tahun 2024. Pada tahun 2025 terdapat penerimaan persediaan sebesar Rp398.198.292,00 dan pengurangan persediaan sebesar Rp400.188.892,00. Rincian Persediaan Suku Cadang Alat Besar pada masing-masing Perangkat Daerah Kota Bogor per 31 Desember 2025 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.3.51

Persediaan Suku Cadang Alat Besar per Perangkat Daerah

No	SKPD	31 Desember 2024	Penambahan 2025	Pengurangan 2025	31 Desember 2025	Kenaikan/ (penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)	(7=6-3)	(8=7/3)
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	398.198.292,00	398.198.292,00	0,00	-	0,00
2	Dinas Lingkungan Hidup	1.990.600,00	0,00	1.990.600,00	0,00	(1.990.600,00)	(100,00)
	Jumlah	1.990.600,00	398.198.292,00	400.188.892,00	0,00	(1.990.600,00)	(100,00)

5.3.1.1.6.12 Suku Cadang Alat Kedokteran

Saldo Persediaan Suku Cadang Alat Kedokteran Kota Bogor Per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.745.000,00 dan Rp35.394.014,00. Saldo Persediaan 2025 mengalami penurunan nilai sebesar Rp33.649.014,00 atau 95,07% dibandingkan tahun 2024. Pada tahun 2025 terdapat penerimaan persediaan sebesar Rp261.651.146,00 dan pengurangan persediaan sebesar Rp295.300.160,00. Rincian Persediaan Suku Cadang Alat Kedokteran pada masing-masing Perangkat Daerah Kota Bogor per 31 Desember 2025 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.3.52

Persediaan Suku Cadang Alat Kedokteran per Perangkat Daerah

No	SKPD	31 Desember 2024	Penambahan 2025	Pengurangan 2025	31 Desember 2025	Kenaikan/ (penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)	(7=6-3)	(8=7/3)
1	Dinas Kesehatan	4.093.014,00	192.505.791,00	194.853.805,00	1.745.000,00	(2.348.014,00)	(57,37)
2	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00	69.145.355,00	69.145.355,00	0,00	-	0,00
3	Kecamatan Bogor Timur	31.301.000,00	0,00	31.301.000,00	0,00	(31.301.000,00)	(100,00)
	Jumlah	35.394.014,00	261.651.146,00	295.300.160,00	1.745.000,00	(33.649.014,00)	(95,07)

5.3.1.1.6.13 Suku Cadang Alat Laboratorium

Saldo Persediaan Suku Cadang Alat Laboratorium Kota Bogor Per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Persediaan 2025 tidak mengalami perubahan dibandingkan tahun 2024. Pada tahun 2025 terdapat penerimaan persediaan sebesar Rp5.730.408,00 dan pengurangan persediaan sebesar Rp5.730.408,00. Rincian Persediaan Suku Cadang Alat Laboratorium pada masing-masing Perangkat Daerah Kota Bogor per 31 Desember 2025 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.3.53

Persediaan Suku Cadang Alat Laboratorium per Perangkat Daerah

No	SKPD	31 Desember 2024 (Rp)	Penambahan 2025 (Rp)	Pengurangan 2025 (Rp)	31 Desember 2025 (Rp)	Kenaikan/ (penurunan)	
						(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)	(7=6-3)	(8=7/3)
1	Dinas Kesehatan	0,00	2.904.426,00	2.904.426,00	0,00	-	0,00
2	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	0,00	2.825.982,00	2.825.982,00	0,00	-	0,00
	Jumlah	0,00	5.730.408,00	5.730.408,00	0,00	-	0,00

5.3.1.1.6.14 Suku Cadang Alat Pertanian

Saldo Persediaan Suku Cadang Alat Pertanian Kota Bogor Per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp128.033.376,00 dan Rp115.904.886,00. Saldo Persediaan 2025 mengalami kenaikan nilai sebesar Rp12.128.490,00 atau 10,46% dibandingkan tahun 2024. Pada tahun 2025 terdapat penerimaan persediaan sebesar Rp875.180.281,00 dan pengurangan persediaan sebesar Rp863.051.791,00. Rincian Persediaan Suku Cadang Alat Pertanian pada masing-masing Perangkat Daerah Kota Bogor per 31 Desember 2025 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.3.54

Persediaan Suku Cadang Alat Pertanian per Perangkat Daerah

No	SKPD	31 Desember 2024 (Rp)	Penambahan 2025 (Rp)	Pengurangan 2025 (Rp)	31 Desember 2025 (Rp)	Kenaikan/ (penurunan)	
						(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)	(7=6-3)	(8=7/3)
1	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	0,00	233.358.630,00	233.358.630,00	0,00	-	0,00
2	Dinas Perumahan Dan Permukiman	11.737.686,00	396.646.500,00	408.384.186,00	0,00	(11.737.686,00)	(100,00)
3	Dinas Lingkungan Hidup	104.167.200,00	149.485.376,00	125.619.200,00	128.033.376,00	23.866.176,00	22,91
4	Dinas Perhubungan	0,00	164.835,00	164.835,00	0,00	-	0,00
5	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	0,00	94.140.940,00	94.140.940,00	0,00	-	0,00
6	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	0,00	1.384.000,00	1.384.000,00	0,00	-	0,00
	Jumlah	115.904.886,00	875.180.281,00	863.051.791,00	128.033.376,00	12.128.490,00	10,46

5.3.1.1.6.15 Suku Cadang Alat Bengkel

Saldo Persediaan Suku Cadang Alat Bengkel Kota Bogor Per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Persediaan 2025 tidak mengalami perubahan dibandingkan tahun 2024. Pada tahun 2025 terdapat penerimaan persediaan sebesar Rp16.364.400,00 dan pengurangan persediaan sebesar Rp16.364.400,00. Rincian Persediaan Suku Cadang Alat Bengkel pada masing-masing Perangkat Daerah Kota Bogor per 31 Desember 2025 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.3.55

Persediaan Suku Cadang Alat Bengkel per Perangkat Daerah

No	SKPD	31 Desember 2024 (Rp)	Penambahan 2025 (Rp)	Pengurangan 2025 (Rp)	31 Desember 2025 (Rp)	Kenaikan/ (penurunan)	
						(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)	(7=6-3)	(8=7/3)
1	Dinas Perhubungan	0,00	3.951.600,00	3.951.600,00	0,00	-	0,00
2	Badan Pendapatan Daerah	0,00	12.412.800,00	12.412.800,00	0,00	-	0,00
	Jumlah	0,00	16.364.400,00	16.364.400,00	0,00	-	0,00

5.3.1.1.6.16 Suku Cadang Lainnya

Saldo Persediaan Suku Cadang Lainnya Kota Bogor Per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp4.175.308,00 dan Rp4.878.614,00. Saldo Persediaan

2025 mengalami penurunan nilai sebesar Rp703.306,00 atau 14,42% dibandingkan tahun 2024. Pada tahun 2025 terdapat penerimaan persediaan sebesar Rp9.398.600,00 dan pengurangan persediaan sebesar Rp10.101.906,00. Rincian Persediaan Suku Cadang Lainnya pada masing-masing Perangkat Daerah Kota Bogor per 31 Desember 2025 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.3.56

Persediaan Suku Cadang Lainnya per Perangkat Daerah

No	SKPD	31 Desember 2024 (Rp)	Penambahan 2025 (Rp)	Pengurangan 2025 (Rp)	31 Desember 2025 (Rp)	Kenaikan/ (penurunan)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)	(Rp)	%
1	Dinas Kesehatan	4.878.614,00	8.329.500,00	9.032.806,00	4.175.308,00	(703.306,00)	(14,42)
2	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	0,00	813.100,00	813.100,00	0,00	-	0,00
3	Badan Pendapatan Daerah	0,00	256.000,00	256.000,00	0,00	-	0,00
	Jumlah	4.878.614,00	9.398.600,00	10.101.906,00	4.175.308,00	(703.306,00)	(14,42)

5.3.1.1.6.17 Alat Tulis Kantor

Saldo Persediaan Alat Tulis Kantor Kota Bogor Per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp2.714.791.854,84 dan Rp2.954.473.280,11. Saldo Persediaan 2025 mengalami penurunan nilai sebesar Rp239.681.425,27 atau 8,11% dibandingkan tahun 2024. Pada tahun 2025 terdapat penerimaan persediaan sebesar Rp15.054.473.481,42 dan pengurangan persediaan sebesar Rp15.294.154.906,69. Rincian Persediaan Alat Tulis Kantor pada masing-masing Perangkat Daerah Kota Bogor per 31 Desember 2025 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.3.57

Persediaan Alat Tulis Kantor per Perangkat Daerah

No	SKPD	31 Desember 2024 (Rp)	Penambahan 2025 (Rp)	Pengurangan 2025 (Rp)	31 Desember 2025 (Rp)	Kenaikan/ (penurunan)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)	(Rp)	%
1	Dinas Pendidikan	119.584.379,00	5.353.261.649,00	5.223.882.685,00	248.963.343,00	129.378.964,00	108,19
2	Dinas Kesehatan	550.209.744,14	3.119.079.776,42	3.286.890.974,59	382.398.545,97	(167.811.198,17)	(30,50)
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	8.031.400,00	89.160.920,00	94.792.865,00	2.399.455,00	(5.631.945,00)	(70,12)
4	Dinas Perumahan Dan Permukiman	17.446.500,00	357.736.811,00	362.766.711,00	12.416.600,00	(5.029.900,00)	(28,83)
5	Satuan Polisi Pamong Praja	4.345.500,00	307.328.872,00	310.318.872,00	1.355.500,00	(2.990.000,00)	(68,81)
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.882.300,00	13.652.318,00	15.102.118,00	1.432.500,00	(1.449.800,00)	(50,30)
7	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	29.978.850,00	221.532.000,00	251.510.850,00	0,00	(29.978.850,00)	(100,00)
8	Dinas Sosial	14.186.000,00	64.245.900,00	70.374.800,00	8.057.100,00	(6.128.900,00)	(43,20)
9	Dinas Tenaga Kerja	3.360.000,00	54.893.110,00	57.701.966,00	551.144,00	(2.808.856,00)	(83,60)
10	Dinas Lingkungan Hidup	125.272.702,00	114.061.636,00	120.360.895,00	118.973.443,00	(6.299.259,00)	(5,03)
11	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	241.497.527,00	1.485.150.567,00	1.673.610.456,00	53.037.638,00	(188.459.889,00)	(78,04)
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	1.453.650,00	47.254.400,00	48.340.450,00	367.600,00	(1.086.050,00)	(74,71)
13	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	14.289.400,00	76.926.650,00	86.716.650,00	4.499.400,00	(9.790.000,00)	(68,51)
14	Dinas Perhubungan	401.894.283,00	196.575.078,00	225.162.219,00	373.307.142,00	(28.587.141,00)	(7,11)
15	Dinas Komunikasi Dan Informatika	748.800,00	19.693.000,00	20.441.800,00	0,00	(748.800,00)	(100,00)
16	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan Dan Perindustrian	1.476.600,00	33.245.200,00	31.183.300,00	3.538.500,00	2.061.900,00	139,64
17	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	372.100,00	16.213.830,00	16.321.750,00	264.180,00	(107.920,00)	(29,00)
18	Dinas Pemuda Dan Olah Raga	104.400,00	42.188.400,00	42.292.800,00	0,00	(104.400,00)	(100,00)
19	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	2.022.500,00	21.162.000,00	22.019.050,00	1.165.450,00	(857.050,00)	(42,38)
20	Dinas Arsip Dan Perpustakaan	0,00	73.427.200,00	73.427.200,00	0,00	0,00	0,00
21	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	97.800,00	20.828.050,00	20.925.850,00	0,00	(97.800,00)	(100,00)
22	Sekretariat Daerah	52.230.273,00	1.018.276.785,00	1.006.170.528,00	64.336.530,00	12.106.257,00	23,18
23	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	3.455.200,00	231.076.850,00	183.424.050,00	51.108.000,00	47.652.800,00	1.379,16
24	Kecamatan Bogor Selatan	11.237.800,00	103.476.800,00	107.467.500,00	7.247.100,00	(3.990.700,00)	(35,51)
25	Kecamatan Bogor Timur	25.462.500,00	81.917.900,00	93.506.200,00	13.874.200,00	(11.588.300,00)	(45,51)
26	Kecamatan Bogor Tengah	22.823.900,00	67.648.800,00	65.275.300,00	25.197.400,00	2.373.500,00	10,40
27	Kecamatan Bogor Barat	85.700,00	91.478.900,00	91.502.800,00	61.800,00	(23.900,00)	(27,89)
28	Kecamatan Bogor Utara	24.962.800,00	37.267.600,00	61.201.000,00	1.029.400,00	(23.933.400,00)	(95,88)
29	Kecamatan Tanah Sareal	25.612.044,00	126.253.540,00	133.554.238,67	18.311.345,33	(7.300.698,67)	(28,50)
30	Inspektoral	15.429.500,00	34.160.813,00	32.965.159,00	16.625.154,00	1.195.654,00	7,75
31	Badan Perencanaan Pembangunan Riset Dan Inovasi Daerah	207.095,00	21.665.265,00	17.776.628,00	4.095.732,00	3.888.637,00	1.877,71
32	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	45.828.061,67	72.140.025,00	84.156.086,67	33.812.000,00	(12.016.061,67)	(26,22)
33	Badan Pendapatan Daerah	1.169.021.621,30	1.322.254.456,00	1.234.179.474,76	1.257.096.602,54	88.074.981,24	7,53
34	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	18.551.350,00	108.726.000,00	118.008.300,00	9.269.050,00	(9.282.300,00)	(50,04)
35	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	311.000,00	10.512.380,00	10.823.380,00	0,00	(311.000,00)	(100,00)
	Jumlah	2.954.473.280,11	15.054.473.481,42	15.294.154.906,69	2.714.791.854,84	(239.681.425,27)	(8,11)

5.3.1.1.6.18 Kertas dan Cover

Saldo Persediaan Kertas dan Cover Kota Bogor Per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp392.321.126,69 dan Rp407.852.697,00. Saldo Persediaan 2025 mengalami penurunan nilai sebesar Rp15.531.570,31 atau 3,81% dibandingkan tahun 2024. Pada tahun 2025 terdapat penerimaan persediaan sebesar

Rp5.061.160.111,40 dan pengurangan persediaan sebesar Rp5.076.691.681,71. Rincian Persediaan Kertas dan Cover pada masing-masing Perangkat Daerah Kota Bogor per 31 Desember 2025 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.3.58
Persediaan Kertas dan Cover per Perangkat Daerah

No	SKPD	31 Desember 2024	Penambahan 2025	Pengurangan 2025	31 Desember 2025	Kenaikan/ (penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)	(7=6-3)	(8=7/3)
1	Dinas Pendidikan	77.249.536,00	2.751.619.149,00	2.648.065.925,08	180.802.759,92	103.553.223,92	134,05
2	Dinas Kesehatan	67.465.556,00	92.867.841,00	120.934.581,00	39.398.816,00	(28.066.740,00)	(41,60)
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	7.752.350,00	99.330.000,00	103.883.850,00	3.198.500,00	(4.553.850,00)	(58,74)
4	Dinas Perumahan dan Permukiman	23.325.500,00	56.640.800,00	73.403.300,00	6.563.000,00	(16.762.500,00)	(71,86)
5	Satuan Polisi Pamong Praja	1.038.000,00	134.460.040,00	135.196.240,00	301.800,00	(736.200,00)	(70,92)
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	430.000,00	6.473.000,00	6.251.000,00	652.000,00	222.000,00	51,63
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	37.614.200,00	234.197.300,00	271.811.500,00	0,00	(37.614.200,00)	(100,00)
8	Dinas Sosial	27.260.900,00	39.561.100,00	60.668.900,00	6.153.100,00	(21.107.800,00)	(77,43)
9	Dinas Tenaga Kerja	23.170.800,00	48.136.521,00	60.396.921,00	10.910.400,00	(12.260.400,00)	(52,91)
10	Dinas Lingkungan Hidup	5.657.330,00	30.527.000,00	35.777.330,00	407.000,00	(5.250.330,00)	(92,81)
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	150.000,00	33.105.475,00	32.797.600,00	457.875,00	307.875,00	205,25
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	39.261.300,00	39.060.100,00	201.200,00	201.200,00	100,00
13	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	26.545.600,00	26.545.600,00	0,00	-	0,00
14	Dinas Perhubungan	14.998.050,00	107.327.800,40	117.268.550,40	5.057.300,00	(9.940.750,00)	(66,28)
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	17.905.100,00	17.905.100,00	0,00	-	0,00
16	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	3.524.400,00	32.855.700,00	32.214.100,00	4.166.000,00	641.600,00	18,20
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	436.800,00	19.610.300,00	19.925.000,00	122.100,00	(314.700,00)	(72,05)
18	Dinas Pemuda dan Olah Raga	149.200,00	17.416.000,00	17.365.400,00	199.800,00	50.600,00	33,91
19	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	390.000,00	17.239.978,00	14.977.989,31	2.651.988,69	2.261.988,69	580,00
20	Dinas Arsip dan Perpustakaan	0,00	22.357.000,00	22.075.000,00	282.000,00	282.000,00	100,00
21	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	558.000,00	12.756.600,00	12.833.800,00	480.800,00	(77.200,00)	(13,84)
22	Sekretariat Daerah	2.652.900,00	361.951.650,00	311.939.490,00	52.665.060,00	50.012.160,00	1.885,19
23	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	4.894.000,00	197.323.000,00	194.672.000,00	7.545.000,00	2.651.000,00	54,17
24	Kecamatan Bogor Selatan	8.557.800,00	125.314.900,00	127.077.400,00	6.795.300,00	(1.762.500,00)	(20,60)
25	Kecamatan Bogor Timur	6.829.100,00	41.783.400,00	47.684.400,00	928.100,00	(5.901.000,00)	(86,41)
26	Kecamatan Bogor Tengah	10.028.000,00	58.771.818,00	58.241.818,00	10.558.000,00	530.000,00	5,29
27	Kecamatan Bogor Barat	1.219.800,00	138.059.600,00	138.729.400,00	550.000,00	(669.800,00)	(54,91)
28	Kecamatan Bogor Utara	26.215.200,00	59.668.000,00	80.412.900,00	5.470.300,00	(20.744.900,00)	(79,13)
29	Kecamatan Tanah Sereal	15.419.200,00	61.314.500,00	68.854.500,00	7.879.200,00	(7.540.000,00)	(48,90)
30	Inspektorat	9.041.600,00	53.141.250,00	36.694.475,00	25.488.375,00	16.446.775,00	181,90
31	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah	0,00	19.503.810,00	17.621.250,00	1.882.560,00	1.882.560,00	100,00
32	Badan Keuangan dan Aset Daerah	17.871.200,00	7.090.000,00	18.465.650,00	6.495.550,00	(11.375.650,00)	(63,65)
33	Badan Pendapatan Daerah	12.006.475,00	69.285.380,00	79.586.855,00	1.705.000,00	(10.301.475,00)	(85,80)
34	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.816.800,00	19.898.000,00	20.994.700,00	720.100,00	(1.096.700,00)	(60,36)
35	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	130.000,00	7.861.199,00	6.359.056,92	1.632.142,08	1.502.142,08	1.155,49
	Jumlah	407.852.697,00	5.061.160.111,40	5.076.691.681,71	392.321.126,69	(15.531.570,31)	(3,81)

5.3.1.1.6.19 Bahan Cetak

Saldo Persediaan Bahan Cetak Kota Bogor Per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp170.044.335,00 dan Rp215.837.083,00. Saldo Persediaan 2025 mengalami penurunan nilai sebesar Rp45.792.748,00 atau 21,22% dibandingkan tahun 2024. Pada tahun 2025 terdapat penerimaan persediaan sebesar Rp660.089.539,00 dan pengurangan persediaan sebesar Rp705.882.287,00. Rincian Persediaan Bahan Cetak pada masing-masing Perangkat Daerah Kota Bogor per 31 Desember 2025 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.3.59
Persediaan Bahan Cetak per Perangkat Daerah

No	SKPD	31 Desember 2024	Penambahan 2025	Pengurangan 2025	31 Desember 2025	Kenaikan/ (penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)	(7=6-3)	(8=7/3)
1	Dinas Pendidikan	0,00	20.340.200,00	20.340.200,00	0,00	-	0,00
2	Dinas Kesehatan	209.958.283,00	635.029.339,00	679.663.287,00	165.324.335,00	(44.633.948,00)	(21,26)
3	Dinas Lingkungan Hidup	5.878.800,00	4.720.000,00	5.878.800,00	4.720.000,00	(1.158.800,00)	(19,71)
	Jumlah	215.837.083,00	660.089.539,00	705.882.287,00	170.044.335,00	(45.792.748,00)	(21,22)

5.3.1.1.6.20 Benda Pos

Saldo Persediaan Benda Pos Kota Bogor Per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp10.687.340,00 dan Rp4.745.500,00. Saldo Persediaan 2025 mengalami kenaikan nilai sebesar Rp5.941.840,00 atau 125,21% dibandingkan tahun 2024. Pada tahun 2025 terdapat penerimaan persediaan sebesar Rp131.142.770,00 dan pengurangan persediaan sebesar Rp125.200.930,00. Rincian Persediaan Benda Pos pada masing-masing Perangkat Daerah Kota Bogor per 31 Desember 2025 dapat

dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.3.60
Persediaan Benda Pos per Perangkat Daerah

No	SKPD	31 Desember 2024 (Rp)	Penambahan 2025 (Rp)	Pengurangan 2025 (Rp)	31 Desember 2025 (Rp)	Kenaikan/ (penurunan)	
						(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)	(7=6-3)	(8=7/3)
1	Dinas Pendidikan	0,00	11.403.800,00	11.289.300,00	114.500,00	114.500,00	100,00
2	Dinas Kesehatan	1.120.000,00	44.196.470,00	39.703.130,00	5.613.340,00	4.493.340,00	401,19
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	322.500,00	15.000.000,00	15.172.500,00	150.000,00	(172.500,00)	(53,49)
4	Dinas Perumahan Dan Permukiman	0,00	4.990.000,00	3.680.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00	100,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	350.000,00	10.620.000,00	10.590.500,00	379.500,00	29.500,00	8,43
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	500.000,00	1.900.000,00	2.200.000,00	200.000,00	(300.000,00)	(60,00)
7	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	0,00	4.650.000,00	4.650.000,00	0,00	-	0,00
8	Dinas Sosial	903.000,00	1.550.000,00	2.453.000,00	0,00	(903.000,00)	(100,00)
9	Dinas Lingkungan Hidup	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	(350.000,00)	(100,00)
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	0,00	3.565.000,00	3.565.000,00	0,00	-	0,00
11	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	0,00	1.550.000,00	1.250.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00
12	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	0,00	1.162.500,00	1.162.500,00	0,00	-	0,00
13	Sekretariat Daerah	0,00	5.590.000,00	5.590.000,00	0,00	-	0,00
14	Kecamatan Bogor Selatan	0,00	1.440.000,00	1.320.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00
15	Kecamatan Bogor Barat	0,00	6.175.000,00	6.175.000,00	0,00	-	0,00
16	Inspektorat	1.200.000,00	3.100.000,00	2.300.000,00	2.000.000,00	800.000,00	66,67
17	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	0,00	6.600.000,00	6.100.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00
18	Badan Pendapatan Daerah	0,00	5.850.000,00	5.850.000,00	0,00	-	0,00
19	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	-	0,00
	Jumlah	4.745.500,00	131.142.770,00	125.200.930,00	10.687.340,00	5.941.840,00	125,21

5.3.1.1.6.21 Bahan Komputer

Saldo Persediaan Bahan Komputer Kota Bogor Per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.986.332.960,95 dan Rp1.539.596.684,00. Saldo Persediaan 2025 mengalami kenaikan nilai sebesar Rp446.736.276,95 atau 29,02% dibandingkan tahun 2024. Pada tahun 2025 terdapat penerimaan persediaan sebesar Rp11.836.507.270,00 dan pengurangan persediaan sebesar Rp11.389.770.993,05. Rincian Persediaan Bahan Komputer pada masing-masing Perangkat Daerah Kota Bogor per 31 Desember 2025 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.3.61
Persediaan Bahan Komputer per Perangkat Daerah

No	SKPD	31 Desember 2024 (Rp)	Penambahan 2025 (Rp)	Pengurangan 2025 (Rp)	31 Desember 2025 (Rp)	Kenaikan/ (penurunan)	
						(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)	(7=6-3)	(8=7/3)
1	Dinas Pendidikan	57.012.100,00	3.273.150.783,00	3.196.627.787,46	133.535.095,54	76.522.995,54	134,22
2	Dinas Kesehatan	27.848.254,00	72.414.383,00	63.233.772,49	37.028.864,51	9.180.610,51	32,97
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	4.033.000,00	453.512.500,00	451.737.100,00	5.808.400,00	1.775.400,00	44,02
4	Dinas Perumahan Dan Permukiman	10.089.000,00	37.701.800,00	45.812.800,00	1.978.000,00	(8.111.000,00)	(80,39)
5	Satuan Polisi Pamong Praja	318.000,00	38.450.000,00	38.651.000,00	117.000,00	(201.000,00)	(63,21)
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	890.000,00	7.954.200,00	7.944.200,00	900.000,00	10.000,00	1,12
7	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	5.540.000,00	75.802.500,00	81.342.500,00	0,00	(5.540.000,00)	(100,00)
8	Dinas Sosial	36.768.400,00	26.163.900,00	56.301.300,00	6.631.000,00	(30.137.400,00)	(81,97)
9	Dinas Tenaga Kerja	10.045.350,00	25.458.848,00	35.183.519,00	320.679,00	(9.724.671,00)	(96,81)
10	Dinas Lingkungan Hidup	1.117.600,00	21.278.000,00	22.207.600,00	188.000,00	(929.600,00)	(83,18)
11	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	746.307.800,00	3.577.631.379,00	3.179.875.990,00	1.144.063.189,00	397.755.389,00	53,30
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	20.467.200,00	66.839.800,00	84.663.100,00	2.643.900,00	(17.823.300,00)	(87,08)
13	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	0,00	42.275.200,00	42.275.200,00	0,00	-	0,00
14	Dinas Perhubungan	88.152.350,00	123.607.780,00	115.242.380,00	96.517.750,00	8.365.400,00	9,49
15	Dinas Komunikasi Dan Informatika	496.000,00	1.842.266.874,00	1.842.762.874,00	0,00	(496.000,00)	(100,00)
16	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan Dan Perindustrian	150.100,00	53.822.280,00	52.544.080,00	1.428.300,00	1.278.200,00	851,57
17	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	214.400,00	63.916.698,00	62.905.848,00	1.225.250,00	1.010.850,00	471,48
18	Dinas Pemuda Dan Olah Raga	0,00	10.422.000,00	10.422.000,00	0,00	-	0,00
19	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	0,00	13.419.900,00	12.115.650,00	1.304.250,00	1.304.250,00	100,00
20	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	3.819.000,00	12.542.300,00	14.590.100,00	1.771.200,00	(2.047.800,00)	(53,62)
21	Sekretariat Daerah	0,00	226.657.500,00	195.012.690,00	31.644.810,00	31.644.810,00	100,00
22	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	1.935.000,00	406.727.400,00	356.115.000,00	52.547.400,00	50.612.400,00	2.615,63
23	Kecamatan Bogor Selatan	7.345.340,00	101.392.100,00	103.454.040,00	5.283.400,00	(2.061.940,00)	(28,07)
24	Kecamatan Bogor Timur	13.797.200,00	13.880.100,00	27.677.300,00	0,00	(13.797.200,00)	(100,00)
25	Kecamatan Bogor Tengah	18.863.500,00	38.092.713,00	32.652.727,55	24.303.485,45	5.439.985,45	28,84
26	Kecamatan Bogor Barat	0,00	84.528.800,00	84.314.900,00	213.900,00	213.900,00	100,00
27	Kecamatan Bogor Utara	29.123.200,00	116.007.200,00	139.120.400,00	6.010.000,00	(23.113.200,00)	(79,36)
28	Kecamatan Tanah Sareal	10.957.100,00	147.898.608,00	133.636.388,00	25.219.320,00	14.262.220,00	130,16
29	Inspektorat	6.035.625,00	18.243.150,00	10.948.575,00	13.330.200,00	7.294.575,00	120,86
30	Badan Perencanaan Pembangunan Riset Dan Inovasi Daerah	0,00	39.709.695,00	39.243.495,00	466.200,00	466.200,00	100,00
31	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	273.091.000,00	286.442.700,00	393.890.399,55	165.643.300,45	(107.447.699,55)	(39,35)
32	Badan Pendapatan Daerah	116.178.165,00	449.711.079,00	347.844.077,00	218.045.167,00	101.867.002,00	87,68
33	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	47.771.000,00	58.067.600,00	99.568.700,00	6.269.900,00	(41.501.100,00)	(86,88)
34	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	1.231.000,00	10.517.500,00	9.853.500,00	1.895.000,00	664.000,00	53,94
	Jumlah	1.539.596.684,00	11.836.507.270,00	11.389.770.993,05	1.986.332.960,95	446.736.276,95	29,02

5.3.1.1.6.22 Perabot Kantor

Saldo Persediaan Perabot Kantor Kota Bogor Per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp579.831.667,98 dan Rp841.502.641,71. Saldo Persediaan 2025 mengalami penurunan nilai sebesar Rp261.670.973,73 atau 31,10% dibandingkan tahun 2024. Pada tahun 2025 terdapat penerimaan persediaan sebesar Rp6.343.613.724,00 dan pengurangan persediaan sebesar Rp6.605.284.697,73. Rincian Persediaan Perabot Kantor pada masing-masing Perangkat Daerah Kota Bogor per 31 Desember 2025 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.3.62

Persediaan Perabot Kantor per Perangkat Daerah

No	SKPD	31 Desember 2024 (Rp)	Penambahan 2025 (Rp)	Pengurangan 2025 (Rp)	31 Desember 2025 (Rp)	Kenaikan/ (penurunan)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)	(7=6-3)	(8=7/3)
1	Dinas Pendidikan	36.144.617,67	2.880.463.866,00	2.794.937.640,00	121.670.843,67	85.526.226,00	236,62
2	Dinas Kesehatan	146.601.270,04	594.303.946,00	630.460.659,59	110.444.556,45	(36.156.713,59)	(24,66)
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	0,00	83.301.330,00	83.301.330,00	0,00	-	0,00
4	Dinas Perumahan Dan Pemukiman	53.969.620,00	146.651.000,00	184.884.620,00	15.736.000,00	(38.233.620,00)	(70,84)
5	Satuan Polisi Pamong Praja	1.090.000,00	11.720.000,00	11.400.000,00	1.410.000,00	320.000,00	29,36
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.230.000,00	11.085.300,00	11.255.300,00	2.060.000,00	(170.000,00)	(7,62)
7	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	1.394.200,00	4.839.000,00	6.233.200,00	0,00	(1.394.200,00)	(100,00)
8	Dinas Sosial	12.974.969,00	1.555.600,00	9.185.569,00	5.345.000,00	(7.629.969,00)	(58,81)
9	Dinas Tenaga Kerja	2.011.700,00	2.371.310,00	4.383.010,00	0,00	(2.011.700,00)	(100,00)
10	Dinas Lingkungan Hidup	465.846.480,00	143.304.125,00	466.443.055,00	142.707.550,00	(323.138.930,00)	(69,37)
11	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	0,00	3.164.400,00	3.164.400,00	0,00	-	0,00
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	1.182.900,00	5.070.400,00	6.253.300,00	0,00	(1.182.900,00)	(100,00)
13	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	6.702.900,00	40.689.650,00	44.570.700,00	2.821.850,00	(3.881.050,00)	(57,90)
14	Dinas Perhubungan	0,00	14.152.550,00	14.152.550,00	0,00	-	0,00
15	Dinas Komunikasi Dan Informatika	127.485,00	10.899.800,00	10.841.285,00	186.000,00	58.515,00	45,90
16	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan Dan Perindustrian	1.705.500,00	24.279.600,00	24.674.100,00	1.311.000,00	(394.500,00)	(23,13)
17	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	11.717.937,00	11.204.687,00	513.250,00	513.250,00	100,00
18	Dinas Pemuda Dan Olah Raga	123.500,00	32.171.500,00	32.295.000,00	0,00	(123.500,00)	(100,00)
19	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	0,00	5.384.610,00	5.162.610,00	222.000,00	222.000,00	100,00
20	Dinas Arsip Dan Perpustakaan	0,00	53.249.500,00	50.694.500,00	2.555.000,00	2.555.000,00	100,00
21	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	641.500,00	61.142.350,00	61.357.350,00	426.500,00	(215.000,00)	(33,52)
22	Sekretariat Daerah	0,00	870.952.350,00	870.952.350,00	0,00	-	0,00
23	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	4.975.000,00	266.271.700,00	250.872.700,00	20.374.000,00	15.399.000,00	309,53
24	Kecamatan Bogor Selatan	2.083.600,00	43.341.110,00	43.350.950,00	2.073.760,00	(9.840,00)	(0,47)
25	Kecamatan Bogor Timur	35.590.700,00	30.266.000,00	53.567.557,14	12.289.142,86	(23.301.557,14)	(65,47)
26	Kecamatan Bogor Tengah	19.756.300,00	135.823.535,00	132.235.335,00	23.344.500,00	3.588.200,00	18,16
27	Kecamatan Bogor Barat	0,00	115.286.100,00	115.286.100,00	0,00	-	0,00
28	Kecamatan Bogor Utara	10.589.000,00	157.712.900,00	166.505.000,00	1.796.900,00	(8.792.100,00)	(83,03)
29	Kecamatan Tanah Sareal	32.720.900,00	120.801.355,00	97.239.600,00	56.282.655,00	23.561.755,00	72,01
30	Inspektorat	3.040.500,00	4.215.900,00	7.256.400,00	0,00	(3.040.500,00)	(100,00)
31	Badan Perencanaan Pembangunan Riset Dan Inovasi Daerah	0,00	9.359.400,00	9.224.400,00	135.000,00	135.000,00	100,00
32	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	0,00	383.704.110,00	358.744.650,00	24.959.460,00	24.959.460,00	100,00
33	Badan Pendapatan Daerah	0,00	32.745.800,00	1.579.100,00	31.166.700,00	31.166.700,00	100,00
34	Badan Kepengawasan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	2.176.000,00	2.176.000,00	0,00	-	0,00
35	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	0,00	29.439.690,00	29.439.690,00	0,00	-	0,00
	Jumlah	841.502.641,71	6.343.613.724,00	6.605.284.697,73	579.831.667,98	(261.670.973,73)	(31,10)

5.3.1.1.6.23 Alat Listrik

Saldo Persediaan Alat Listrik Kota Bogor Per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.640.055.051,92 dan Rp3.487.214.848,50. Saldo Persediaan 2025 mengalami penurunan nilai sebesar Rp1.847.159.796,58 atau 52,97% dibandingkan tahun 2024. Pada tahun 2025 terdapat penerimaan persediaan sebesar Rp16.315.698.867,01 dan pengurangan persediaan sebesar Rp18.162.858.663,59. Rincian Persediaan Alat Listrik pada masing-masing Perangkat Daerah Kota Bogor per 31 Desember 2025 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.3.63

Persediaan Alat Listrik per Perangkat Daerah

No	SKPD	31 Desember 2024 (Rp)	Penambahan 2025 (Rp)	Pengurangan 2025 (Rp)	31 Desember 2025 (Rp)	Kenaikan/ (penurunan)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)	(7=6-3)	(8=7/3)
1	Dinas Pendidikan	20.539.810,00	1.352.885.105,00	1.320.274.250,00	53.150.665,00	32.610.855,00	158,77
2	Dinas Kesehatan	250.475.993,00	588.194.327,00	713.587.204,33	125.083.115,67	(125.392.877,33)	(50,06)
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	6.468.200,00	59.327.827,00	59.619.683,00	6.176.344,00	(291.856,00)	(4,51)
4	Dinas Perumahan Dan Pemukiman	276.054.200,00	1.316.978.500,00	1.322.725.800,00	270.306.900,00	(5.747.300,00)	(2,08)
5	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	7.104.000,00	7.104.000,00	0,00	-	0,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	6.069.260,00	4.627.200,00	1.442.060,00	1.442.060,00	100,00
7	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	0,00	551.670,00	551.670,00	0,00	-	0,00
8	Dinas Sosial	4.941.910,00	21.584.700,00	23.880.110,00	2.646.500,00	(2.295.410,00)	(46,45)

No	SKPD	31 Desember 2024	Penambahan 2025	Pengurangan 2025	31 Desember 2025	Kenaikan/ (penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)	(7=6-3)	(8=7/3)
9	Dinas Tenaga Kerja	6.940.500,00	9.489.720,00	16.008.432,00	421.788,00	(6.518.712,00)	(93,92)
10	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	25.349.900,00	24.253.500,00	1.096.400,00	1.096.400,00	100,00
11	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	0,00	16.700.000,00	16.700.000,00	0,00	-	0,00
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	0,00	25.012.000,00	25.012.000,00	0,00	-	0,00
13	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	0,00	72.047.350,00	72.047.350,00	0,00	-	0,00
14	Dinas Perhubungan	2.878.524.613,00	11.310.031.847,01	13.094.294.803,40	1.094.261.656,61	(1.784.262.956,39)	(61,99)
15	Dinas Komunikasi Dan Informatika	432.000,00	427.024.891,00	427.456.891,00	0,00	(432.000,00)	(100,00)
16	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan Dan Perindustrian	1.237.000,00	24.000.000,00	23.694.900,00	1.542.100,00	305.100,00	24,66
17	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	19.395.000,00	19.395.000,00	0,00	-	0,00
18	Dinas Pemuda Dan Olah Raga	169.400,00	47.288.000,00	47.222.200,00	235.200,00	65.800,00	38,84
19	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	98.000,00	9.185.250,00	9.283.250,00	0,00	(98.000,00)	(100,00)
20	Dinas Arsitektur Dan Perumahan	0,00	22.871.000,00	22.871.000,00	0,00	-	0,00
21	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	1.872.000,00	36.653.400,00	38.525.400,00	0,00	(1.872.000,00)	(100,00)
22	Sekretariat Daerah	0,00	215.445.410,00	215.445.410,00	0,00	-	0,00
23	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	5.482.040,00	329.519.960,00	318.092.578,00	16.909.422,00	11.427.382,00	208,45
24	Kecamatan Bogor Selatan	1.186.600,00	37.894.150,00	38.905.050,00	175.700,00	(1.010.900,00)	(85,19)
25	Kecamatan Bogor Timur	12.264.500,00	26.762.400,00	35.437.800,00	3.589.100,00	(8.675.400,00)	(70,74)
26	Kecamatan Bogor Tengah	7.321.300,00	58.178.905,00	58.445.805,00	7.054.400,00	(266.900,00)	(3,65)
27	Kecamatan Bogor Barat	0,00	68.008.800,00	68.008.800,00	0,00	-	0,00
28	Kecamatan Bogor Utara	7.173.000,00	22.188.500,00	26.813.500,00	2.548.000,00	(4.625.000,00)	(64,48)
29	Kecamatan Tanah Sareal	3.949.000,00	64.407.610,00	60.867.628,00	7.488.982,00	3.539.982,00	89,64
30	Inspektorat	816.000,00	7.035.000,00	6.421.000,00	1.430.000,00	614.000,00	75,25
31	Badan Perencanaan Pembangunan Riset Dan Inovasi Daerah	0,00	9.167.490,00	6.590.070,00	2.577.420,00	2.577.420,00	100,00
32	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	716.782,50	8.502.995,00	6.900.778,86	2.318.998,64	1.602.216,14	223,53
33	Badan Pendapatan Daerah	0,00	58.697.100,00	19.446.800,00	39.250.300,00	39.250.300,00	100,00
34	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	1.366.800,00	1.366.800,00	0,00	-	0,00
35	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	552.000,00	10.780.000,00	10.982.000,00	350.000,00	(202.000,00)	(36,59)
	Jumlah	3.487.214.848,50	16.315.698.867,01	18.162.858.663,59	1.640.055.051,92	(1.847.159.796,58)	(52,97)

5.3.1.1.6.24 Perlengkapan Dinas

Saldo Persediaan Perlengkapan Dinas Kota Bogor Per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp77.792.145,00 dan Rp521.566.500,00. Saldo Persediaan 2025 mengalami penurunan nilai sebesar Rp443.774.355,00 atau 85,08% dibandingkan tahun 2024. Pada tahun 2025 terdapat penerimaan persediaan sebesar Rp9.645.719.951,00 dan pengurangan persediaan sebesar Rp10.089.494.306,00. Rincian Persediaan Perlengkapan Dinas pada masing-masing Perangkat Daerah Kota Bogor per 31 Desember 2025 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.3.64

Persediaan Perlengkapan Dinas per Perangkat Daerah

No	SKPD	31 Desember 2024	Penambahan 2025	Pengurangan 2025	31 Desember 2025	Kenaikan/ (penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)	(7=6-3)	(8=7/3)
1	Dinas Pendidikan	0,00	57.215.376,00	53.215.376,00	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00
2	Dinas Kesehatan	0,00	104.926.900,00	104.926.900,00	0,00	-	0,00
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	0,00	510.456.791,00	510.456.791,00	0,00	-	0,00
4	Dinas Perumahan Dan Permukiman	86.316.500,00	614.701.275,00	701.017.775,00	0,00	(86.316.500,00)	(100,00)
5	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	377.222.915,00	377.222.915,00	0,00	-	0,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	101.425.000,00	101.425.000,00	0,00	-	0,00
7	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	0,00	49.385.600,00	49.385.600,00	0,00	-	0,00
8	Dinas Lingkungan Hidup	419.200.000,00	449.439.761,00	868.639.761,00	0,00	(419.200.000,00)	(100,00)
9	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	16.050.000,00	67.133.000,00	48.465.000,00	34.718.000,00	18.668.000,00	116,31
10	Dinas Perhubungan	0,00	77.211.600,00	77.211.600,00	0,00	-	0,00
11	Dinas Komunikasi Dan Informatika	0,00	21.708.000,00	21.708.000,00	0,00	-	0,00
12	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	26.018.100,00	26.018.100,00	0,00	-	0,00
13	Dinas Pemuda Dan Olah Raga	0,00	30.343.189,00	30.343.189,00	0,00	-	0,00
14	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	0,00	9.400.000,00	9.400.000,00	0,00	-	0,00
15	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	0,00	10.732.000,00	10.732.000,00	0,00	-	0,00
16	Sekretariat Daerah	0,00	1.255.031.774,00	1.255.031.774,00	0,00	-	0,00
17	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0,00	675.000.000,00	675.000.000,00	0,00	-	0,00
18	Kecamatan Bogor Selatan	0,00	5.314.000,00	5.314.000,00	0,00	-	0,00
19	Kecamatan Bogor Tengah	0,00	182.407.050,00	182.407.050,00	0,00	-	0,00
20	Kecamatan Bogor Barat	0,00	64.994.400,00	64.994.400,00	0,00	-	0,00
21	Kecamatan Bogor Utara	0,00	57.916.400,00	57.916.400,00	0,00	-	0,00
22	Kecamatan Tanah Sareal	0,00	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	-	0,00
23	Inspektorat	0,00	3.866.100,00	3.866.100,00	0,00	-	0,00
24	Badan Perencanaan Pembangunan Riset Dan Inovasi Daerah	0,00	26.495.145,00	0,00	26.495.145,00	26.495.145,00	100,00
25	Badan Pendapatan Daerah	0,00	234.424.800,00	221.845.800,00	12.579.000,00	12.579.000,00	100,00
26	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	0,00	4.584.950.775,00	4.584.950.775,00	0,00	-	0,00
	Jumlah	521.566.500,00	9.645.719.951,00	10.089.494.306,00	77.792.145,00	(443.774.355,00)	(85,08)

5.3.1.1.6.25 Perlengkapan Pendukung Olah Raga

Saldo Persediaan Perlengkapan Pendukung Olah Raga Kota Bogor Per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp25.940.800,00 dan Rp2.225.130,00. Saldo Persediaan 2025 mengalami kenaikan nilai sebesar Rp23.715.670,00 atau 1065,81% dibandingkan tahun 2024. Pada tahun 2025 terdapat penerimaan persediaan sebesar Rp861.199.714,00 dan pengurangan persediaan sebesar Rp837.484.044,00. Rincian Persediaan Perlengkapan Pendukung Olah Raga pada masing-masing Perangkat Daerah Kota Bogor per 31 Desember 2025 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.3.65

Persediaan Perlengkapan Pendukung Olah Raga per Perangkat Daerah

No	SKPD	31 Desember 2024 (Rp)	Penambahan 2025 (Rp)	Pengurangan 2025 (Rp)	31 Desember 2025 (Rp)	Kenaikan/ (penurunan)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)	(7=6-3)	(8=7/3)
1	Dinas Pendidikan	2.225.130,00	809.885.524,00	786.169.854,00	25.940.800,00	23.715.670,00	1.065,81
2	Dinas Perhubungan	0,00	6.283.710,00	6.283.710,00	0,00	-	0,00
3	Dinas Pemuda Dan Olah Raga	0,00	45.030.480,00	45.030.480,00	0,00	-	0,00
	Jumlah	2.225.130,00	861.199.714,00	837.484.044,00	25.940.800,00	23.715.670,00	1.065,81

5.3.1.1.6.26 Suvenir/Cendera Mata

Saldo Persediaan Suvenir/Cendera Mata Kota Bogor Per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp9.104.600,00 dan Rp68.258.900,00. Saldo Persediaan 2025 mengalami penurunan nilai sebesar Rp59.154.300,00 atau 86,66% dibandingkan tahun 2024. Pada tahun 2025 terdapat penerimaan persediaan sebesar Rp1.047.880.894,00 dan pengurangan persediaan sebesar Rp1.107.035.194,00. Rincian Persediaan Suvenir/Cendera Mata pada masing-masing Perangkat Daerah Kota Bogor per 31 Desember 2025 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.3.66

Persediaan Suvenir/Cendera Mata per Perangkat Daerah

No	SKPD	31 Desember 2024 (Rp)	Penambahan 2025 (Rp)	Pengurangan 2025 (Rp)	31 Desember 2025 (Rp)	Kenaikan/ (penurunan)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)	(7=6-3)	(8=7/3)
1	Dinas Pendidikan	0,00	102.738.600,00	102.738.600,00	0,00	-	0,00
2	Dinas Kesehatan	3.325.000,00	11.350.000,00	10.075.000,00	4.600.000,00	1.275.000,00	38,35
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	508.000,00	27.900.000,00	27.633.000,00	775.000,00	267.000,00	52,56
4	Dinas Lingkungan Hidup	5.827.500,00	0,00	5.827.500,00	0,00	(5.827.500,00)	(100,00)
5	Dinas Arsip Dan Perpustakaan	0,00	66.388.000,00	66.388.000,00	0,00	-	0,00
6	Sekretariat Daerah	1.598.400,00	802.933.094,00	800.801.894,00	3.729.600,00	2.131.200,00	133,33
7	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	57.000.000,00	0,00	57.000.000,00	0,00	(57.000.000,00)	(100,00)
8	Kecamatan Bogor Barat	0,00	22.135.200,00	22.135.200,00	0,00	-	0,00
9	Kecamatan Tanah Sareal	0,00	14.436.000,00	14.436.000,00	0,00	-	0,00
	Jumlah	68.258.900,00	1.047.880.894,00	1.107.035.194,00	9.104.600,00	(59.154.300,00)	(86,66)

5.3.1.1.6.27 Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya

Saldo Persediaan Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya Kota Bogor Per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp457.323.905,50 dan Rp629.126.053,37. Saldo Persediaan 2025 mengalami penurunan nilai sebesar Rp171.802.147,87 atau 27,31% dibandingkan tahun 2024. Pada tahun 2025 terdapat penerimaan persediaan sebesar Rp4.946.809.662,02 dan pengurangan persediaan sebesar Rp5.118.611.809,89. Rincian Persediaan Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya pada masing-masing Perangkat Daerah Kota Bogor per 31 Desember 2025 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.3.67

Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya per Perangkat Daerah

No	SKPD	31 Desember 2024 (Rp)	Penambahan 2025 (Rp)	Pengurangan 2025 (Rp)	31 Desember 2025 (Rp)	Kenaikan/ (penurunan)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)	(7=6-3)	(8=7/3)
1	Dinas Pendidikan	8.246.741,00	438.906.154,00	431.803.799,33	15.349.095,67	7.102.354,67	86,12
2	Dinas Kesehatan	216.285.651,37	2.514.445.070,02	2.567.323.116,56	163.407.604,83	(52.878.046,54)	(24,45)
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	0,00	51.681.730,00	51.681.730,00	0,00	-	0,00
4	Dinas Perumahan Dan Permukiman	3.390.000,00	284.659.000,00	282.549.000,00	5.500.000,00	2.110.000,00	62,24
5	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	29.209.000,00	26.858.000,00	2.351.000,00	2.351.000,00	100,00
6	Dinas Sosial	940.250,00	985.400,00	1.925.650,00	0,00	(940.250,00)	(100,00)

No	SKPD	31 Desember 2024 (Rp)	Penambahan 2025 (Rp)	Pengurangan 2025 (Rp)	31 Desember 2025 (Rp)	Kenaikan/ (penurunan)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)	(7=6-3)	(8=7/3)
7	Dinas Lingkungan Hidup	362.917.111,00	251.313.950,00	376.941.006,00	237.290.055,00	(125.627.056,00)	(34,62)
8	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	24.339.000,00	3.200.000,00	7.836.000,00	19.703.000,00	(4.636.000,00)	(19,05)
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	0,00	28.931.700,00	28.414.500,00	517.200,00	517.200,00	100,00
10	Dinas Perhubungan	0,00	25.747.460,00	25.747.460,00	0,00	-	0,00
11	Dinas Komunikasi Dan Informatika	0,00	2.109.999,00	2.109.999,00	0,00	-	0,00
12	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	10.853.600,00	10.853.600,00	0,00	-	0,00
13	Dinas Pemuda Dan Olah Raga	0,00	44.250.102,00	44.250.102,00	0,00	-	0,00
14	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	0,00	8.408.120,00	8.408.120,00	0,00	-	0,00
15	Sekretariat Daerah	0,00	315.692.350,00	315.692.350,00	0,00	-	0,00
16	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	4.965.000,00	0,00	4.965.000,00	0,00	(4.965.000,00)	(100,00)
17	Kecamatan Bogor Selatan	0,00	43.875.000,00	43.875.000,00	0,00	-	0,00
18	Kecamatan Bogor Timur	5.529.700,00	22.225.625,00	23.603.075,00	4.152.250,00	(1.377.450,00)	(24,91)
19	Kecamatan Bogor Tengah	0,00	84.464.339,00	84.464.339,00	0,00	-	0,00
20	Kecamatan Bogor Barat	0,00	105.557.250,00	105.557.250,00	0,00	-	0,00
21	Kecamatan Bogor Utara	2.512.600,00	27.550.000,00	29.787.400,00	275.200,00	(2.237.400,00)	(89,05)
22	Kecamatan Tanah Sareal	0,00	20.674.200,00	20.674.200,00	0,00	-	0,00
23	Inspektorat	0,00	14.981.000,00	14.291.000,00	690.000,00	690.000,00	100,00
24	Badan Perencanaan Pembangunan Riset Dan Inovasi Daerah	0,00	12.915.800,00	4.827.300,00	8.088.500,00	8.088.500,00	100,00
25	Badan Pendapatan Daerah	0,00	480.000,00	480.000,00	0,00	-	0,00
26	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	14.762.900,00	14.762.900,00	0,00	-	0,00
27	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	0,00	588.929.913,00	588.929.913,00	0,00	-	0,00
	Jumlah	629.126.053,37	4.946.809.662,02	5.118.611.809,89	457.323.905,50	(171.802.147,87)	(27,31)

5.3.1.1.6.28 Obat

Saldo Persediaan Obat Kota Bogor Per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp16.724.629.361,46 dan Rp18.773.757.900,97. Saldo Persediaan 2025 mengalami penurunan nilai sebesar Rp2.049.128.539,51 atau 10,91% dibandingkan tahun 2024. Pada tahun 2025 terdapat penerimaan persediaan sebesar Rp110.817.692.609,95 dan pengurangan persediaan sebesar Rp112.866.821.149,46. Rincian Persediaan Obat pada masing-masing Perangkat Daerah Kota Bogor per 31 Desember 2025 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.3.68
Persediaan Obat per Perangkat Daerah

No	SKPD	31 Desember 2024 (Rp)	Penambahan 2025 (Rp)	Pengurangan 2025 (Rp)	31 Desember 2025 (Rp)	Kenaikan/ (penurunan)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)	(7=6-3)	(8=7/3)
1	Dinas Pendidikan	3.595.500,00	225.469.180,00	220.144.991,00	8.919.689,00	5.324.189,00	148,08
2	Dinas Kesehatan	18.504.151.402,97	109.955.191.199,95	111.982.267.429,46	16.477.075.173,46	(2.027.076.229,51)	(10,95)
3	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	266.010.998,00	467.175.555,00	494.552.054,00	238.634.499,00	(27.376.499,00)	(10,29)
4	Dinas Pemuda Dan Olah Raga	0,00	17.892.090,00	17.892.090,00	0,00	-	0,00
5	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	0,00	151.964.585,00	151.964.585,00	0,00	-	0,00
	Jumlah	18.773.757.900,97	110.817.692.609,95	112.866.821.149,46	16.724.629.361,46	(2.049.128.539,51)	(10,91)

5.3.1.1.6.29 Obat-Obatan Lainnya

Saldo Persediaan Obat-Obatan Lainnya Kota Bogor Per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp9.198.251.440,86 dan Rp7.844.865.006,63. Saldo Persediaan 2025 mengalami kenaikan nilai sebesar Rp1.353.386.434,23 atau 17,25% dibandingkan tahun 2024. Pada tahun 2025 terdapat penerimaan persediaan sebesar Rp76.060.318.812,72 dan pengurangan persediaan sebesar Rp74.706.932.378,49. Rincian Persediaan Obat-Obatan Lainnya pada masing-masing Perangkat Daerah Kota Bogor per 31 Desember 2025 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.3.69
Persediaan Obat-Obatan Lainnya per Perangkat Daerah

No	SKPD	31 Desember 2024 (Rp)	Penambahan 2025 (Rp)	Pengurangan 2025 (Rp)	31 Desember 2025 (Rp)	Kenaikan/ (penurunan)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)	(7=6-3)	(8=7/3)
1	Dinas Pendidikan	348.000,00	113.375.350,00	108.490.144,00	5.233.206,00	4.885.206,00	1.403,79
2	Dinas Kesehatan	7.819.192.256,63	75.882.804.580,72	74.541.541.002,49	9.160.455.834,86	1.341.263.578,23	17,15
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	1.815.000,00	1.815.000,00	0,00	-	0,00
4	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	25.324.750,00	26.815.000,00	19.577.350,00	32.562.400,00	7.237.650,00	28,58
5	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	0,00	35.508.882,00	35.508.882,00	0,00	-	0,00
	Jumlah	7.844.865.006,63	76.060.318.812,72	74.706.932.378,49	9.198.251.440,86	1.353.386.434,23	17,25

5.3.1.1.6.30 Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat

Saldo Persediaan Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Kota Bogor Per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp12.397.000.236,00 dan Rp1.242.197.202,06. Saldo Persediaan 2025 mengalami kenaikan nilai sebesar Rp11.154.803.033,94 atau 897,99% dibandingkan tahun 2024. Pada tahun 2025 terdapat penerimaan persediaan sebesar Rp64.271.158.311,00 dan pengurangan persediaan sebesar Rp53.116.355.277,06. Rincian Persediaan Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat pada masing-masing Perangkat Daerah Kota Bogor per 31 Desember 2025 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.3.70
Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat per Perangkat Daerah

No	SKPD	31 Desember 2024 (Rp)	Penambahan 2025 (Rp)	Pengurangan 2025 (Rp)	31 Desember 2025 (Rp)	Kenaikan/ (penurunan)	
						(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)	(7=6-3)	(8=7/3)
1	Dinas Pendidikan	0,00	56.654.400,00	56.654.400,00	0,00	-	0,00
2	Dinas Kesehatan	0,00	66.729.990,00	66.729.990,00	0,00	-	0,00
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	0,00	15.110.903.986,00	7.650.903.986,00	7.460.000.000,00	7.460.000.000,00	100,00
4	Dinas Perumahan Dan Permukiman	0,00	19.736.386.626,00	15.872.738.010,00	3.863.648.616,00	3.863.648.616,00	100,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	146.643.210,00	828.155.820,00	899.097.030,00	75.702.000,00	(70.941.210,00)	(48,38)
6	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	0,00	377.580.792,00	377.580.792,00	0,00	-	0,00
7	Dinas Sosial	611.994.780,00	3.904.454.463,00	3.875.897.621,00	640.551.622,00	28.556.842,00	4,67
8	Dinas Tenaga Kerja	0,00	3.333.843.188,00	3.333.173.368,00	669.820,00	669.820,00	100,00
9	Dinas Lingkungan Hidup	467.403.812,06	4.671.289.859,00	4.794.074.093,06	344.619.578,00	(122.784.234,06)	(26,27)
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	0,00	9.542.400,00	9.542.400,00	0,00	-	0,00
11	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	16.155.400,00	0,00	4.346.800,00	11.808.600,00	(4.346.800,00)	(26,91)
12	Dinas Perhubungan	0,00	1.759.600,00	1.759.600,00	0,00	-	0,00
13	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan Dan Perindustrian	0,00	42.923.600,00	42.923.600,00	0,00	-	0,00
14	Dinas Pemuda Dan Olah Raga	0,00	777.093.088,00	777.093.088,00	0,00	-	0,00
15	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	0,00	298.707.294,00	298.707.294,00	0,00	-	0,00
16	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	0,00	9.241.572.344,00	9.241.572.344,00	0,00	-	0,00
17	Sekretariat Daerah	0,00	264.650.300,00	264.650.300,00	0,00	-	0,00
18	Kecamatan Bogor Selatan	0,00	348.991.806,00	348.991.806,00	0,00	-	0,00
19	Kecamatan Bogor Timur	0,00	518.488.107,00	518.488.107,00	0,00	-	0,00
20	Kecamatan Bogor Barat	0,00	1.253.397.105,00	1.253.397.105,00	0,00	-	0,00
21	Kecamatan Bogor Utara	0,00	2.977.655.213,00	2.977.655.213,00	0,00	-	0,00
22	Kecamatan Tanah Sareal	0,00	77.856.000,00	77.856.000,00	0,00	-	0,00
23	Badan Pendapatan Daerah	0,00	161.528.310,00	161.528.310,00	0,00	-	0,00
24	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	0,00	210.994.020,00	210.994.020,00	0,00	-	0,00
	Jumlah	1.242.197.202,06	64.271.158.311,00	53.116.355.277,06	12.397.000.236,00	11.154.803.033,94	897,99

5.3.1.1.6.31 Natura

Saldo Persediaan Natura Kota Bogor Per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp892.524.745,00 dan Rp2.440.764.293,26. Saldo Persediaan 2025 mengalami penurunan nilai sebesar Rp1.548.239.548,26 atau 63,43% dibandingkan tahun 2024. Pada tahun 2025 terdapat penerimaan persediaan sebesar Rp4.255.465.349,11 dan pengurangan persediaan sebesar Rp5.803.704.897,37. Rincian Persediaan Natura pada masing-masing Perangkat Daerah Kota Bogor per 31 Desember 2025 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.3.71
Persediaan Natura per Perangkat Daerah

No	SKPD	31 Desember 2024 (Rp)	Penambahan 2025 (Rp)	Pengurangan 2025 (Rp)	31 Desember 2025 (Rp)	Kenaikan/ (penurunan)	
						(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)	(7=6-3)	(8=7/3)
1	Dinas Pendidikan	0,00	29.130.000,00	29.130.000,00	0,00	-	0,00
2	Dinas Kesehatan	2.309.040.487,26	1.617.125.624,11	3.052.698.366,37	873.467.745,00	(1.435.572.742,26)	(62,17)
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	0,00	16.452.000,00	16.452.000,00	0,00	-	0,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	(480.000,00)	(100,00)
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	6.179.925,00	6.179.925,00	0,00	-	0,00
6	Dinas Sosial	131.243.806,00	19.057.000,00	131.243.806,00	19.057.000,00	(112.186.806,00)	(85,48)
7	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	0,00	31.437.200,00	31.437.200,00	0,00	-	0,00
8	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	0,00	785.587.900,00	785.587.900,00	0,00	-	0,00
9	Sekretariat Daerah	0,00	1.700.402.500,00	1.700.402.500,00	0,00	-	0,00
10	Kecamatan Bogor Selatan	0,00	6.652.400,00	6.652.400,00	0,00	-	0,00
11	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	0,00	43.440.800,00	43.440.800,00	0,00	-	0,00
	Jumlah	2.440.764.293,26	4.255.465.349,11	5.803.704.897,37	892.524.745,00	(1.548.239.548,26)	(63,43)

5.3.1.1.6.32 Pakan

Saldo Persediaan Pakan Kota Bogor Per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Persediaan 2025 tidak mengalami perubahan dibandingkan tahun 2024. Pada tahun 2025 terdapat penerimaan persediaan sebesar Rp107.264.545,00 dan pengurangan persediaan sebesar Rp107.264.545,00. Rincian Persediaan Pakan pada masing-masing Perangkat Daerah Kota Bogor per 31 Desember 2025 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.3.72
Persediaan Pakan per Perangkat Daerah

No	SKPD	31 Desember 2024	Penambahan 2025	Pengurangan 2025	31 Desember 2025	Kenaikan/ (penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)	(7=6-3)	(8=7/3)
1	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	0,00	107.264.545,00	107.264.545,00	0,00	-	0,00
	Jumlah	0,00	107.264.545,00	107.264.545,00	0,00	-	0,00

5.3.1.1.6.33 Komponen Peralatan

Saldo Persediaan Komponen Peralatan Kota Bogor Per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp186.120.585,00 dan Rp121.276.000,00. Saldo Persediaan 2025 mengalami kenaikan nilai sebesar Rp64.844.585,00 atau 53,47% dibandingkan tahun 2024. Pada tahun 2025 terdapat penerimaan persediaan sebesar Rp551.640.490,00 dan pengurangan persediaan sebesar Rp486.795.905,00. Rincian Persediaan Komponen Peralatan pada masing-masing Perangkat Daerah Kota Bogor per 31 Desember 2025 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.3.73
Persediaan Komponen Peralatan per Perangkat Daerah

No	SKPD	31 Desember 2024	Penambahan 2025	Pengurangan 2025	31 Desember 2025	Kenaikan/ (penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)	(7=6-3)	(8=7/3)
1	Dinas Perumahan Dan Permukiman	57.048.100,00	430.778.380,00	384.915.080,00	102.911.400,00	45.863.300,00	80,39
2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	76.896.360,00	28.274.475,00	48.621.885,00	48.621.885,00	100,00
3	Dinas Lingkungan Hidup	64.227.900,00	0,00	29.640.600,00	34.587.300,00	(29.640.600,00)	(46,15)
4	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	0,00	1.425.000,00	1.425.000,00	0,00	-	0,00
5	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	0,00	42.540.750,00	42.540.750,00	0,00	-	0,00
	Jumlah	121.276.000,00	551.640.490,00	486.795.905,00	186.120.585,00	64.844.585,00	53,47

5.3.1.1.6.34 Komponen Rambu-Rambu

Saldo Persediaan Komponen Rambu-Rambu Kota Bogor Per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp29.898.960,00 dan Rp0,00. Saldo Persediaan 2025 mengalami kenaikan nilai sebesar Rp29.898.960,00 atau 100,00% dibandingkan tahun 2024. Pada tahun 2025 terdapat penerimaan persediaan sebesar Rp16.177.484.656,00 dan pengurangan persediaan sebesar Rp16.147.585.696,00. Rincian Persediaan Komponen Rambu-Rambu pada masing-masing Perangkat Daerah Kota Bogor per 31 Desember 2025 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.3.74
Persediaan Komponen Rambu-Rambu per Perangkat Daerah

No	SKPD	31 Desember 2024	Penambahan 2025	Pengurangan 2025	31 Desember 2025	Kenaikan/ (penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)	(7=6-3)	(8=7/3)
1	Dinas Perhubungan	0,00	16.177.484.656,00	16.147.585.696,00	29.898.960,00	29.898.960,00	100,00
	Jumlah	0,00	16.177.484.656,00	16.147.585.696,00	29.898.960,00	29.898.960,00	100,00

5.3.1.1.6.35 Komponen Lainnya

Saldo Persediaan Komponen Lainnya Kota Bogor Per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp3.250.000,00 dan Rp4.508.160,00. Saldo Persediaan 2025 mengalami penurunan nilai sebesar Rp1.258.160,00 atau 27,91% dibandingkan tahun 2024. Pada tahun 2025 terdapat penerimaan persediaan sebesar Rp1.567.500,00 dan pengurangan persediaan sebesar Rp2.825.660,00. Rincian Persediaan Komponen Lainnya pada masing-masing Perangkat Daerah Kota Bogor per 31 Desember 2025

dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.3.75

Persediaan Komponen Lainnya per Perangkat Daerah

No	SKPD	31 Desember 2024 (Rp)	Penambahan 2025 (Rp)	Pengurangan 2025 (Rp)	31 Desember 2025 (Rp)	Kenaikan/ (penurunan)	
						(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)	(7=6-3)	(8=7/3)
1	Dinas Kesehatan	4.508.160,00	1.567.500,00	2.825.660,00	3.250.000,00	(1.258.160,00)	(27,91)
	Jumlah	4.508.160,00	1.567.500,00	2.825.660,00	3.250.000,00	(1.258.160,00)	(27,91)

5.3.1.1.6.36 Pipa Baja

Saldo Persediaan Pipa Baja Kota Bogor Per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Persediaan 2025 tidak mengalami perubahan dibandingkan tahun 2024. Pada tahun 2025 terdapat penerimaan persediaan sebesar Rp11.211.000,00 dan pengurangan persediaan sebesar Rp11.211.000,00. Rincian Persediaan Pipa Baja pada masing-masing Perangkat Daerah Kota Bogor per 31 Desember 2025 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.3.76

Persediaan Pipa Baja per Perangkat Daerah

No	SKPD	31 Desember 2024 (Rp)	Penambahan 2025 (Rp)	Pengurangan 2025 (Rp)	31 Desember 2025 (Rp)	Kenaikan/ (penurunan)	
						(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)	(7=6-3)	(8=7/3)
1	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	0,00	11.211.000,00	11.211.000,00	0,00	-	0,00
	Jumlah	0,00	11.211.000,00	11.211.000,00	0,00	-	0,00

5.3.1.1.6.37 Pipa Plastik PVC (UPVC)

Saldo Persediaan Pipa Plastik PVC (UPVC) Kota Bogor Per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Persediaan 2025 tidak mengalami perubahan dibandingkan tahun 2024. Pada tahun 2025 terdapat penerimaan persediaan sebesar Rp139.221.300,00 dan pengurangan persediaan sebesar Rp139.221.300,00. Rincian Persediaan Pipa Plastik PVT (UPVC) pada masing-masing Perangkat Daerah Kota Bogor per 31 Desember 2025 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.3.77

Persediaan Pipa Plastik PVC (UPVC) per Perangkat Daerah

No	SKPD	31 Desember 2024 (Rp)	Penambahan 2025 (Rp)	Pengurangan 2025 (Rp)	31 Desember 2025 (Rp)	Kenaikan/ (penurunan)	
						(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)	(7=6-3)	(8=7/3)
1	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	0,00	137.862.000,00	137.862.000,00	0,00	-	0,00
2	Kecamatan Bogor Barat	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	-	0,00
3	Inspektorat	0,00	559.300,00	559.300,00	0,00	-	0,00
	Jumlah	0,00	139.221.300,00	139.221.300,00	0,00	-	0,00

5.3.1.2 Investasi Jangka Panjang

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi pemerintah daerah diklasifikasikan menjadi dua yaitu investasi jangka pendek dan jangka panjang. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang dan merupakan kelompok aset lancar. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan dan merupakan kelompok aset non lancar. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu non permanen dan permanen.

Nilai Investasi Jangka Panjang Kota Bogor per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.008.990.818.971,85 mengalami kenaikan sebesar Rp6.697.402.527,61 atau 0,67% dari Tahun 2024 sebesar Rp1.002.293.416.444,24 yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.3.78
Investasi Jangka Panjang

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / (penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Investasi Jangka Panjang				
2	Investasi Jangka Panjang Non Permanen				
3	Dana Bergulir	51.753.390,00	51.753.390,00	-	-
4	Penyisihan Dana Bergulir	(51.753.390,00)	(51.753.390,00)	-	-
5	Investasi Jangka Panjang Permanen	1.008.990.818.971,85	1.002.293.416.444,24	6.697.402.527,61	0,67
6	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	1.008.990.818.971,85	1.002.293.416.444,24	6.697.402.527,61	0,67
	Jumlah Investasi Jangka Panjang	1.008.990.818.971,85	1.002.293.416.444,24	6.697.402.527,61	0,67

5.3.1.2.1.1 Investasi Jangka Panjang Non Permanen - Dana Bergulir

Saldo Investasi Non Permanen - Dana Bergulir per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp51.753.390,00 dan Rp51.753.490,00. Jumlah dana bergulir per 31 Desember 2025 sebesar Rp51.753.490,00 adalah nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) yang terdiri dari saldo dana bergulir yang dapat tertagih.

Nilai semula Dana Bergulir adalah sebesar Rp1.750.000.000,00. Jumlah tersebut merupakan dana yang disalurkan melalui Program Gerakan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Garda Emas). Jumlah tersebut merupakan akumulasi realisasi pencairan SPMU sejak tahun 2000 sampai dengan 2003, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.79
Dana Bergulir

No	Uraian	Nilai
1	Tahun 2000	300.000.000,00
2	Tahun 2001	300.000.000,00
3	Tahun 2002	550.000.000,00
4	Tahun 2003	600.000.000,00
5	Jumlah	1.750.000.000,00
6	Jumlah yang telah diselesaikan sebesar	(1.686.257.900,00)
7	Saldo sampai akhir tahun 2025 sebesar	51.753.390,00
8	Penyisihan Dana Bergulir Tahun 2025	(51.753.390,00)
9	Saldo Dana Bergulir Tahun 2025	0,00

Program Dana Bergulir Garda Emas dilaksanakan oleh Tim Kerja yang dibentuk dengan SK Wali Kota Bogor dengan Pelaksana Teknis diketuai oleh Direktur PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil), selain itu PINBUK ditunjuk sebagai Konsultan Pelaksanaan Program Garda Emas.

Dana bergulir tahun 2006 sampai dengan 2007 yang masih dapat ditagih sebesar Rp152.721.000,00 dan periode tahun 2008 sampai dengan 2009 terdapat pengembalian ke kas daerah sebesar Rp88.978.900,00. sehingga sisa dana bergulir yang masih dapat ditagih sampai dengan 31 Desember 2011 sebesar Rp63.742.100,00. Pada tanggal 18 Mei 2021 dilakukan pengembalian saldo Garda Emas dari rekening Perumda Bank Kota Bogor sebesar Rp11.988.710,00 sehingga sisa dana bergulir yang masih dapat ditagih adalah sebesar Rp51.753.390,00. Hasil proses pemeriksaan oleh KPKNL telah terbit 74 Surat Pernyataan Piutang Negara Sementara Belum Dapat Tertagih (PSBDT) pada tanggal 31 Oktober 2011 sebesar Rp34.754.445,00 dan 22 PSBDT pada tanggal 18 Nopember 2015 sebesar Rp16.085.083,00.

5.3.1.2.1.2 Investasi Jangka Panjang Non Permanen - Penyisihan Dana Bergulir

Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya per 31 Desember 2025 Rp51.753.390,00 dan per 31 Desember 2024 sebesar Rp51.753.390,00.

Tabel 5.3.80
Penyisihan Dana Bergulir

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Saldo awal	51.753.390,00	63.742.100,00
2	Penerimaan	0,00	0,00
3	Pengeluaran	0,00	11.988.710,00
4	Saldo Akhir	51.753.390,00	51.753.390,00

5.3.1.2.2.1 Investasi Jangka Panjang Permanen - Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Dalam pengakuan nilai penyertaan modal, digunakan metode akuntansi yang disebut Metode Biaya atau *Cost Method* dan Metode Ekuitas atau *Equity Method*.

Metode Biaya diterapkan pada Penyertaan Modal pada PT Bank Jabar sedangkan Metode Ekuitas diterapkan pada Penyertaan Modal pada PD BPR Bank Pasar, PDAM Kota Bogor, PD Jasa Transportasi, dan PD Pasar Pakuan Jaya. Perhitungan nilai penyertaan modal dengan metode ekuitas berdasarkan pada laporan keuangan perusahaan daerah yang bersangkutan.

Saldo Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada masing-masing perusahaan daerah sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp1.008.990.818.971,85 atau mengalami kenaikan sebesar Rp6.697.402.527,61 atau 0,67% dari saldo tahun lalu sebesar Rp1.002.293.416.444,24 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.81
Penyertaan Modal Pemerintah

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / (penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Modal yang telah disetor pada Bank BJB	16.078.535.753,00	16.078.535.753,00	-	-
2	Modal yang telah disetor pada PDAM Kota Bogor	582.540.247.247,85	536.282.344.004,24	46.257.903.243,61	8,63
3	Modal yang telah disetor pada BPR Bank Kota Bogor	89.387.179.661,00	87.827.113.151,00	1.560.066.510,00	1,78
4	Modal yang telah disetor pada PD Jasa Transportasi	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Modal yang disetor pada PD Pasar Pakuan Jaya	320.984.856.310,00	362.105.423.536,00	(41.120.567.226,00)	(11,36)
	Jumlah	1.008.990.818.971,85	1.002.293.416.444,24	6.697.402.527,61	0,67

(Rincian penyertaan modal disajikan pada Lampiran 6)

5.3.1.2.2.1.1 Penyertaan Modal pada PT BJB

Penyertaan modal pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten , Tbk sebesar Rp16.078.535.753,00 merupakan setoran modal tunai sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten, Tbk yang dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.3.82
Penyertaan Modal Pemerintah pada BJB

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Saldo Awal	16.078.535.753,00	16.078.535.753,00
2	Modal disetor	0,00	0,00
3	Penambah Ekuitas	0,00	0,00
4	Pembagian laba pengurang Modal Pemda	0,00	0,00
5	Saldo Akhir	16.078.535.753,00	16.078.535.753,00

Sejak tahun 2011 Pemerintah Kota Bogor tidak menambah penyertaan

modalnya kepada PT Bank Jabar Banten dengan alasan kepemilikan saham pada PT Bank Jabar Banten sudah *Go Public*.

5.3.1.2.2.1.2 Penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)

Penyertaan modal pada PDAM didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Pakuan Kota Bogor dengan modal dasar yang ditetapkan yaitu sebesar Rp100.000.000.000,00. Jumlah tersebut ditetapkan kembali dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah.

Penyertaan modal daerah kepada PDAM Tirta Pakuan diubah kembali dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 20 Tahun 2011 dan ditetapkan menjadi Rp182.000.000.000,00.

Penyertaan modal daerah kepada PDAM Tirta Pakuan diubah kembali dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2019 dan ditetapkan menjadi Rp280.132.242.000,00. Pada tahun 2024 terdapat penyertaan modal berupa Barang Milik Daerah sebesar Rp47.819.268.000,00 sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Tirta Pakuan Kota Bogor, Berita Acara Serah Terima Nomor: 000.2.3.2/BA.1043-BKAD/2024 dan Nomor: BA/03-Perumda.TPKB/2024 dan Keputusan Wali Kota Nomor 000.2.4/Kep.12-BKAD/2025 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah Kota Bogor Berupa Tanah dan Jalan, Jaringan dan Irigasi yang Telah Disertakan Modal Kepada Perusahaan Umum Daerah Tirta Pakuan Kota Bogor. Pada tahun 2025 berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2024 disalurkan penyertaan modal sebesar Rp15.000.000.000,00.

Berdasarkan persentase kepemilikan Pemerintah Kota Bogor tahun 2025 sebesar 92,17% maka jumlah penyertaan modal Pemerintah Kota Bogor sesuai dengan ekuitas pada Laporan Keuangan PDAM Kota Bogor Audited KAP tahun 2025 adalah sebesar Rp582.540.247.247,85. Berikut mutasi Penyertaan Modal PDAM Kota Bogor terdiri dari:

Tabel 5.3.83
Penyertaan Modal Pemerintah pada PDAM

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Saldo Awal	536.282.344.004,24	286.594.932.339,65
2	Koreksi	0,00	168.643.863.793,02
3	Penambah Investasi	15.000.000.000,00	47.819.268.000,00
4	Laba BUMD penambah Ekuitas	60.817.003.878,61	58.812.648.110,57
5	Pembagian laba pengurang Modal Pemda	29.559.100.635,00	25.588.368.239,00
6	Saldo Akhir (6 = 1 + 2 + 3 + 4 - 5)	582.540.247.247,85	536.282.344.004,24

5.3.1.2.2.1.3 Penyertaan Modal pada PD BPR Bank Kota Bogor

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditasi Rakyat Bank Pasar Kota Bogor, modal dasar Perumda BPR Bank Kota Bogor ditetapkan sebesar Rp54.000.000.000,00 dan telah dipenuhi secara keseluruhan dan telah tercatat dalam administrasi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan melalui surat Nomor S-145/KR.0211/2019

tanggal 16 April 2019.

Dengan persentase kepemilikan Pemerintah Kota Bogor sebesar 100%, maka jumlah penyertaan modal pada PD BPR Bank Kota Bogor sesuai dengan ekuitas pada Laporan Keuangan PD BPR Bank Kota per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp89.387.179.661,00 yang terdiri dari:

Tabel 5.3.84
Penyertaan Modal Pemerintah pada Bank Kota Bogor

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Saldo Awal	87.827.113.151,00	61.189.662.448,50
2	Koreksi	0,00	25.324.599.731,50
3	Penambah Investasi	0,00	0,00
4	Laba BUMD penambah Ekuitas	4.501.781.263,00	4.087.409.370,00
5	Pembagian laba pengurang Modal Pemda	2.941.714.753,00	2.774.558.399,00
6	Saldo Akhir (6 = 1 + 2 + 3 + 4 - 5)	89.387.179.661,00	87.827.113.151,00

5.3.1.2.2.1.4 Penyertaan modal pada PD Jasa Transportasi

Penyertaan modal pada PD Jasa Transportasi didasarkan pada Peraturan Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Jasa Transportasi dengan modal dasar yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp30.000.000.000,00. Jumlah tersebut ditetapkan kembali dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Kepada Perusahaan Daerah Jasa Transportasi Kota Bogor ditetapkan kembali modal dasar sebesar Rp35.519.390.000,00, dengan komposisi kepemilikan sebesar 100%, jumlah modal Pemerintah Kota Bogor sesuai dengan ekuitas pada Laporan Keuangan PD Jasa Transportasi Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.85
Penyertaan Modal Pemerintah pada PDJT

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Saldo Awal	0,00	5.879.112.472,10
2	Koreksi	0,00	(5.879.112.472,10)
3	Penambah Investasi	0,00	
4	Laba BUMD penambah Ekuitas	0,00	0,00
5	Pembagian laba pengurang Modal Pemda	0,00	0,00
6	Saldo Akhir (6 = 1 + 2 + 3 + 4 - 5)	0,00	(0,00)

5.3.1.2.2.1.5 Penyertaan modal pada PD Pasar Pakuan Jaya

Penyertaan modal pada PD Pasar Pakuan Jaya didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2009 tanggal 7 Juli 2009 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya, dengan modal dasar yang ditetapkan sebesar Rp241.792.583.600,00 yang terdiri dari modal disetor sebesar Rp5.000.000.000,00 dan aset daerah yang dipisahkan sebesar Rp236.792.583.600,00.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah, penyertaan

modal kepada PD Pasar Pakuan Jaya ditetapkan menjadi Rp238.279.924.240,00 berupa:

- Uang Sebesar	Rp	5.000.000.000,00
- Tanah, Bangunan serta Peralatan Mesin	Rp	233.279.924.240,00
Jumlah	Rp	238.279.924.240,00

Penyertaan modal daerah kepada PD Pasar Pakuan Jaya diubah kembali dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 20 Tahun 2011 dan ditetapkan menjadi Rp145.488.132.240,00 terdiri dari

- Uang Sebesar	Rp	5.000.000.000,00
- Tanah, Bangunan serta Peralatan Mesin	Rp	100.361.083.000,00
Jumlah	Rp	105.361.083.000,00

Penyertaan modal daerah kepada PD Pasar Pakuan Jaya diubah kembali dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2022 dan ditetapkan menjadi Rp503.111.384.240,00 dan sudah terpenuhi seluruhnya terdiri dari:

- Uang Sebesar	Rp	45.000.000.000,00
- Tanah, Bangunan serta Peralatan Mesin	Rp	458.111.384.240,00
Jumlah	Rp	503.111.384.240,00

Dengan persentase kepemilikan Pemerintah Kota Bogor sebesar 100% maka jumlah penyertaan modal pada PD Pasar Pakuan Jaya Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp320.984.856.310,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.86
Penyertaan Modal Pemerintah pada PD Pasar Pakuan Jaya

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Saldo Awal	362.105.423.536,00	465.381.602.469,50
2	Koreksi	(14.103.134.302,00)	(110.613.577.264,50)
3	Penambah Investasi	0,00	0,00
4	Laba BUMD penambah Ekuitas	(26.767.432.924,00)	8.300.122.766,00
5	Pembayaran piutang tahun 2023	250.000.000,00	962.724.435,00
6	Saldo Akhir (6 = 1 + 2 + 3 + 4 - 5)	320.984.856.310,00	362.105.423.536,00

5.3.1.3 Aset Tetap

Aset Tetap menggambarkan jumlah dan nilai perolehan Aset Tetap yang dimiliki/ dikuasai oleh Pemerintah Kota Bogor per 31 Desember 2025 dan 2024. Perolehan Aset Tetap Pemerintah Kota Bogor berasal dari kapitalisasi belanja modal dan/atau belanja lainnya yang diatribusikan dalam nilai Aset Tetap tahun anggaran berkenaan. Aset Tetap merupakan aset berwujud dan mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, dan digunakan dalam kegiatan operasional.

Tabel 5.3.87
Total Aset Tetap

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2025 (Rp)
		Tambah	Kurang	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=2+3-4)
1. Tanah	5.796.161.596.908,69	233.042.118.586,00	125.581.995.174,93	5.903.621.720.319,76
2. Peralatan dan Mesin	1.256.136.708.584,89	138.440.334.961,57	67.275.645.430,42	1.327.301.398.116,04

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2025 (Rp)
		Tambah	Kurang	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=2+3-4)
3. Gedung dan Bangunan	1.888.200.567.932,12	157.929.210.309,48	42.564.307.881,14	2.003.565.470.360,46
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.588.464.657.486,93	172.558.088.918,01	57.267.822.687,27	3.703.754.923.717,67
5. Aset Tetap Lainnya	15.088.820.384,99	14.065.954.592,00	10.309.360.601,00	18.845.414.375,99
6. KDP	15.583.780.825,00	3.293.306.845,00	1.856.257.910,00	17.020.829.760,00
Jumlah	12.559.636.132.122,60	719.329.014.212,06	304.855.389.684,76	12.974.109.756.649,90
7. Akumulasi Penyusutan	3.521.544.006.794,74	440.526.523.017,73	111.343.459.276,12	3.850.727.070.536,35
Nilai Buku	9.038.092.125.327,88	-	-	9.123.382.686.113,57

Mutasi Aset Tetap Pemerintah Kota Bogor selama tahun 2025, terdiri dari:

1. Penambahan yang merupakan perolehan aset tetap melalui pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025 dan perolehan lain yang sah seperti hibah, dan penerimaan fasilitas umum
2. Pengurangan yang merupakan nilai Aset Tetap yang dihapuskan
3. Karena perpindahan (*reclass*) antar Perangkat Daerah dan antar jenis karena adanya perubahan peraturan perundang-undangan
4. Koreksi atas pencatatan Aset Tetap sebelumnya

Rincian Aset Tetap pada masing-masing Perangkat Daerah Pemerintah Kota Bogor per 31 Desember 2025 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.3.88
Aset tetap per perangkat daerah

Uraian		31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	%
(1)		(2)	(3)	(4=2-3)	(5=4/3)
1	Dinas Pendidikan	954.678.966.660,77	868.054.962.936,16	86.624.003.724,61	9,98
2	Dinas Kesehatan	904.152.467.712,04	879.050.563.037,30	25.101.904.674,74	2,86
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.797.953.939.342,18	5.671.797.699.150,86	126.156.240.191,32	2,22
4	Dinas Perumahan dan Permukiman	1.927.571.127.804,64	1.916.666.939.084,74	10.904.188.719,90	0,57
5	Satuan Polisi Pamong Praja	9.160.159.366,59	9.439.694.261,59	(279.534.895,00)	-2,96
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	12.164.582.174,75	11.685.601.250,05	478.980.924,70	4,10
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4.138.260.581,00	3.861.884.500,00	276.376.081,00	7,16
8	Dinas Sosial	11.316.184.573,75	9.571.585.070,46	1.744.599.503,29	18,23
9	Dinas Tenaga Kerja	16.048.530.737,68	15.318.220.175,68	730.310.562,00	4,77
10	Dinas Lingkungan Hidup	192.058.552.477,72	168.464.135.660,84	23.594.416.816,88	14,01
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	20.469.838.855,53	19.580.407.828,38	889.431.027,15	4,54
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	8.967.544.571,04	8.732.493.235,04	235.051.336,00	2,69
13	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	6.271.036.039,68	6.200.416.039,68	70.620.000,00	1,14
14	Dinas Perhubungan	288.350.565.939,51	277.131.708.199,92	11.218.857.739,59	4,05
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	38.996.573.471,40	34.178.802.921,74	4.817.770.549,66	14,10
16	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	32.441.650.386,97	41.366.316.327,72	(8.924.665.940,75)	-21,57
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	10.448.762.442,40	9.285.276.887,14	1.163.485.555,26	12,53
18	Dinas Pemuda dan Olahraga	279.620.449.292,78	172.042.669.674,78	107.577.779.618,00	62,53

Uraian		31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	%
19	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	42.431.136.988,22	36.714.637.101,22	5.716.499.887,00	15,57
20	Dinas Arsip dan Perpustakaan	46.913.371.695,90	45.539.805.974,90	1.373.565.721,00	3,02
21	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	68.301.325.796,11	68.762.285.546,11	(460.959.750,00)	-0,67
22	Sekretariat Daerah	120.269.631.081,42	123.302.762.224,00	(3.033.131.142,58)	-2,46
23	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	173.022.907.990,32	170.113.713.845,64	2.909.194.144,68	1,71
24	Kecamatan Bogor Selatan	92.113.343.904,55	89.808.371.763,07	2.304.972.141,48	2,57
25	Kecamatan Bogor Timur	36.524.074.723,27	35.358.580.820,27	1.165.493.903,00	3,30
26	Kecamatan Bogor Tengah	44.059.131.839,83	43.598.810.429,83	460.321.410,00	1,06
27	Kecamatan Bogor Barat	84.203.215.725,84	74.798.834.355,83	9.404.381.370,01	12,57
28	Kecamatan Bogor Utara	50.030.584.119,34	49.533.083.180,69	497.500.938,65	1,00
29	Kecamatan Tanah Sereal	57.247.400.221,48	53.679.232.478,79	3.568.167.742,69	6,65
30	Inspektorat	10.215.459.317,72	9.169.269.136,92	1.046.190.180,80	11,41
31	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	13.600.934.567,74	12.373.489.167,74	1.227.445.400,00	9,92
32	Badan Keuangan dan Aset Daerah	32.943.355.377,17	30.326.426.664,88	2.616.928.712,29	8,63
33	Badan Pendapatan Daerah	51.975.235.801,73	48.759.609.558,48	3.215.626.243,25	6,59
34	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	9.467.393.455,77	8.956.163.560,06	511.229.895,71	5,71
35	PPKD	1.500.061.620.339,32	1.511.516.709.536,77	(11.455.089.197,45)	-0,76
36	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	25.920.441.273,76	24.894.970.535,34	1.025.470.738,42	4,12
Jumlah		12.974.109.756.649,90	12.559.636.132.122,60	414.473.624.527,30	3,30

Sedangkan Mutasi Aset Tetap Pemerintah Kota Bogor Tahun 2025 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.3.89
Mutasi Aset Tetap

URAIAN	JUMLAH (Rp)
Saldo per 31 Desember 2024	12.559.636.132.122,60
Mutasi Tambah:	
Belanja Modal Tahun Anggaran 2025	382.663.131.377,00
Kewajiban kepada Pihak ketiga TA 2024 yang asetnya Telah diakui Tahun Berjalan	381.167.999,00
Belanja Modal yang dimutasi antar Perangkat Daerah	26.422.300,00
Hibah BMD tahun berjalan	2.480.164.655,00
Belanja Modal yang di reklasifikasi antar KIB	1.284.959.280,00
Belanja operasional (BOP) yang dikapitalisasi Menjadi Aset tetap	661.123.623,00
Mutasi/Alih Status Penggunaan Antar Perangkat Daerah (Tahun berjalan)	110.597.267.538,93
Reklasifikasi antar KIB (Tahun berjalan)	106.191.739.083,55
Reklasifikasi dari aset lainnya (Tahun berjalan) :	
- Reklasifikasi dari Aset Rusak Berat	984.201.393,00
- Reklasifikasi dari Aset Lain-Lain (Penelusuran)	968.171.174,51
Hibah BMD sebelum Tahun 2025	3.425.470.544,00
BMD belum tercatat (Tahun berjalan)	3.216.070.833,07
Reklasifikasi dari aset properti investasi (tahun berjalan)	106.449.124.411,00
Jumlah Mutasi Tambah	719.329.014.212,06
Mutasi Kurang :	
Belanja Modal yang dimutasi antar Perangkat Daerah	920.888.050,00
Belanja Modal yang di reklasifikasi antar KIB	390.493.530,00
Belanja Modal yang dikapitalisasi Menjadi aset ekstrakomtabel	21.723.661.757,00

URAIAN	JUMLAH (Rp)
Belanja Modal tidak menjadi aset tetap	1.758.467.974,00
Kewajiban kepada pihak ketiga th 2024 yg asetnya telah diakui di tahun 2023	1.709.377.921,00
Mutasi/Alih Status Penggunaan Antar Perangkat Daerah (Hasil Tahun berjalan)	110.597.267.538,93
Reklasifikasi menjadi Aset Ekstrakomtabel (Tahun berjalan)	50.000.000,00
Reklasifikasi antar KIB (Tahun berjalan)	106.191.739.083,55
Reklasifikasi menjadi aset lainnya (Tahun berjalan) :	
- Reklasifikasi menjadi Aset Rusak Berat	27.000.648.320,50
- Reklasifikasi menjadi Aset Lain-Lain (Penelusuran)	55.291.318,54
BMD belum tercatat (Tahun berjalan)	
Penghapusan BMD (Tahun berjalan)	3.928.634.300,93
Reklasifikasi Kondisi BMD (Tahun berjalan)	2.363.993.565,31
Reklas ke properti investasi	28.164.926.325,00
Jumlah Mutasi Kurang	304.855.389.684,76
Total Mutasi	414.473.624.527,30
Saldo per 31 Desember 2025	12.974.109.756.649,90
Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2025	(3.850.727.070.536,35)
Nilai Buku Per 31 Desember 2025	9.123.382.686.113,57

(Rincian penambahan dan pengurangan aset tetap disajikan pada Lampiran 7)

Perubahan nilai aset tetap adalah sebesar Rp440.554.139.570,30, perubahan berupa penambahan sebesar Rp719.329.014.212,06 dan pengurangan sebesar Rp278.774.874.641,76.

5.3.1.3.1 Tanah

Saldo Aset Tetap berupa Tanah Pemerintah Kota Bogor per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp5.928.547.670.319,76 dan Rp5.796.161.596.908,69 mengalami kenaikan nilai sebesar Rp132.386.073.411,07 atau 2,28%.

Tanah yang dikelompokkan sebagai Aset Tetap adalah Tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Berikut tabel perbandingan Aset Tetap Tanah Per Perangkat Daerah pada periode Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2025.

Tabel 5.3.90
Tanah per perangkat daerah

Uraian		31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	%
(1)		(2)	(3)	(4=2-3)	(5=4/3)
1	Dinas Pendidikan	127.657.803.933,34	127.657.803.933,34	-	0,00
2	Dinas Kesehatan	32.505.405.385,00	32.292.175.450,00	213.229.935,00	0,66
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.925.649.026.586,00	2.905.396.615.386,00	20.252.411.200,00	0,70
4	Dinas Perumahan dan Permukiman	1.007.477.359.774,00	1.005.437.408.524,00	2.039.951.250,00	0,20
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	462.013.000,00	462.013.000,00	-	0,00
6	Dinas Sosial	2.300.966.000,00	1.967.398.000,00	333.568.000,00	16,95
7	Dinas Tenaga Kerja	6.553.399.812,00	6.553.399.812,00	-	0,00
8	Dinas Lingkungan Hidup	56.712.955.690,00	38.143.413.940,00	18.569.541.750,00	48,68
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	417.239.114,00	417.239.114,00	-	0,00
10	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	917.985.750,00	917.985.750,00	-	0,00
11	Dinas Perhubungan	20.245.630.397,00	20.845.615.397,00	(599.985.000,00)	-2,88
12	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	2.458.869.914,35	11.259.619.914,35	(8.800.750.000,00)	-78,16

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	%
13 Dinas Pemuda dan Olahraga	175.764.118.019,00	93.100.320.000,00	82.663.798.019,00	88,79
14 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	5.177.389.588,00	5.177.389.588,00	-	0,00
15 Dinas Arsip dan Perpustakaan	964.254.062,00	964.254.062,00	-	0,00
16 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	20.444.181.075,00	20.444.181.075,00	-	0,00
17 Sekretariat Daerah	28.642.503.804,00	28.642.503.804,00	-	0,00
18 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	47.348.887.770,00	47.348.887.770,00	-	0,00
19 Kecamatan Bogor Selatan	27.732.809.249,00	27.732.809.249,00	-	0,00
20 Kecamatan Bogor Timur	1.683.286.389,00	1.756.086.324,00	(72.799.935,00)	-4,15
21 Kecamatan Bogor Tengah	4.613.591.659,00	4.613.591.659,00	-	0,00
22 Kecamatan Bogor Barat	19.950.901.568,00	12.903.827.468,00	7.047.074.100,00	54,61
23 Kecamatan Bogor Utara	8.315.430.354,00	8.315.430.354,00	-	0,00
24 Kecamatan Tanah Sareal	5.410.543.150,00	5.550.973.150,00	(140.430.000,00)	-2,53
25 Inspektorat	133.800.000,00	133.800.000,00	-	0,00
26 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.920.000.000,00	1.920.000.000,00	-	0,00
27 Badan Keuangan dan Aset Daerah	317.196.000,00	317.196.000,00	-	0,00
28 Badan Pendapatan Daerah	798.624.000,00	798.624.000,00	-	0,00
29 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.745.600.000,00	1.745.600.000,00	-	0,00
30 PPKD	1.369.058.248.561,07	1.383.103.734.469,00	(14.045.485.907,93)	-1,02
31 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	241.699.716,00	241.699.716,00	-	0,00
Jumlah	5.903.621.720.319,76	5.796.161.596.908,69	107.460.123.411,07	1,85

Mutasi Aset Tetap berupa Tanah Pemerintah Kota Bogor Tahun 2025 dapat dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 5.3.91

Rincian Mutasi Tanah

URAIAN	JUMLAH (Rp)
Saldo per 31 Desember 2024	5.796.161.596.908,69
Mutasi Tambah:	
Belanja Modal Tahun Anggaran 2025	28.044.059.320,00
Mutasi/Alih Status Penggunaan Antar Perangkat Daerah (Tahun berjalan)	88.171.725.542,00
Reklasifikasi antar KIB (Tahun berjalan)	7.903.409.313,00
Reklasifikasi dari aset lainnya (Tahun berjalan) :	
BMD belum tercatat (Tahun berjalan)	2.473.800.000,00
Reklasifikasi dari aset properti investasi (tahun berjalan)	106.449.124.411,00
Jumlah Mutasi Tambah	233.042.118.586,00
Mutasi Kurang :	
Belanja Modal yang di reklasifikasi antar KIB	98.770.020,00
Mutasi/Alih Status Penggunaan Antar Perangkat Daerah (Hasil Tahun berjalan)	88.171.725.542,00
Reklasifikasi antar KIB (Tahun berjalan)	7.804.142.913,00
Reklasifikasi menjadi aset lainnya (Tahun berjalan) :	
BMD belum tercatat (Tahun berjalan)	
Penghapusan BMD (Tahun berjalan)	1.342.430.374,93
Reklas ke properti investasi	28.164.926.325,00
Jumlah Mutasi Kurang	125.581.995.174,93
Total Mutasi	107.460.123.411,07
Saldo per 31 Desember 2025	5.903.621.720.319,76

(Rincian penambahan dan pengurangan nilai tanah disajikan pada Lampiran 8)

Perubahan nilai aset tetap tanah senilai Rp99.050.605.325,07 perubahan berupa penambahan sebesar Rp233.042.118.586,00 dan pengurangan sebesar Rp100.656.045.174,93.

1. Tanah yang Telah Bersertifikasi

Sertifikasi aset tanah merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kota Bogor dalam rangka penatausahaan dan pengamanan aset tetap berupa tanah, baik secara administrasi maupun hukum. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Bogor.

Tabel 5.3.92

Tanah yang Telah Bersertifikasi

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	
		Jumlah bidang	Total luas (m ²)
2024	250	266	426.217
2025	250	487	627.521

Capaian sertifikasi aset tanah selama tahun anggaran 2024 dan 2025 menunjukkan realisasi yang melampaui target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2024, dari target sebanyak 250 bidang, realisasi sertifikasi mencapai 266 bidang atau sebesar 106,4% dengan total luas sebesar 426.217 m². Sementara itu, pada tahun 2025, dari target yang sama yaitu 250 bidang, realisasi meningkat signifikan menjadi 487 bidang atau sebesar 194,8% dengan total luas mencapai 627.521 m².

Hingga 31 Desember 2025 jumlah tanah yang belum bersertifikat di Kota Bogor adalah 2.198 yang tersebar pada 16 perangkat daerah.

Tabel 5.3.93

Rincian Tanah Belum Bersertifikat

Perangkat Daerah	Jumlah
DINAS KESEHATAN	5
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	3
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	2
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	5
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.650
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	1
DINAS PENDIDIKAN	12
DINAS PERHUBUNGAN	1
DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	265
KECAMATAN BOGOR BARAT	1
KECAMATAN TANAH SAREAL	1
KELURAHAN BANTARJATI	1
KELURAHAN CIBADAK	2
KELURAHAN CIBOGOR	1
KELURAHAN CILEDEK TIMUR	4
KELURAHAN CILUAR	5
KELURAHAN CIMAHPAR	3
KELURAHAN GUDANG	3
KELURAHAN KAYU MANIS	5
KELURAHAN KEBON PEDES	1
KELURAHAN KEDUNGHALANG	1
KELURAHAN KENCANA	1
KELURAHAN KERTAMAYA	2
KELURAHAN LOJI	2
KELURAHAN MARGAJAYA	1
KELURAHAN MENTENG	1
KELURAHAN MUARASARI	3
KELURAHAN PASIR KUDA	2
KELURAHAN RANCAMAYA	1
KELURAHAN SUKASARI	1
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	212
TOTAL	2.198

Pada tahun 2026 pensertifikatan ditargetkan 800 sertifikat hingga desember 2026 atau naik 220% dari target tahun 2024 dan 2025. Dari target tahun 2026, hingga pertengahan bulan April 2026 telah dilakukan 69 pensertifikatan.

Tabel 5.3.94
Rencana Aksi Tahun 2026

Rencana Aksi Sertifikasi 2026	Realisasi	
Target Triwulan I	50	50
Target Triwulan II	200	35
Target Triwulan III	300	-
Target Triwulan IV	250	-
Total	800	85

2. Aset yang Perlu Perhatian Khusus

Dalam rangka penyajian posisi aset tetap Pemerintah Daerah yang wajar dan akuntabel, terdapat 6 (enam) aset strategis yang memerlukan perhatian khusus akibat kendala administratif maupun yuridis. Masalah utama meliputi ketidakjelasan kepemilikan, dokumen pendukung yang belum lengkap, proses sertifikasi yang sedang berjalan di instansi pertanahan, serta potensi sengketa dengan pihak ketiga. Berikut adalah rincian kronologis dan kemajuan penanganan aset-aset tersebut:

a. Aset pada PDAM Tirta Pakuan (Jl. Raya Cipaku)

Pemerintah Kota Bogor memiliki aset tanah di Jl. Raya Cipaku, Kec. Bogor Selatan, yang saat ini dimanfaatkan oleh Perumda Tirta Pakuan. Landasan pemanfaatan aset didasarkan pada Surat Walikotamadya Nomor 593/958-Pem tanggal 23 Maret 1990 perihal Rekomendasi Izin Pengelolaan. Hingga saat ini, belum dilakukan pembaruan atau penyesuaian regulasi atas dasar hukum pengelolaan aset tersebut.

b. Aset Lahan Kavling Babakan Baru (Kec. Bogor Selatan)

Pemerintah Kota Bogor menguasai lahan ±35.000 m² di Babakan Baru RW 08 & RW 14, Kel. Cipaku, yang tercatat dalam Daftar Barang Milik Daerah (BMD). Lahan ini diperoleh melalui tukar-menukar dengan Ny. Masitoh Sabardiman (proses 1980-1997). Kronologi permasalahan dan dinamika sosial terkait aset ini meliputi:

- Program Relokasi 1982: Menyusul Rehabilitasi Kali Cibalok, warga direlokasi dengan kompensasi pindah Rp100.000,00 dan opsi kepemilikan kavling seharga Rp2.000,00/m² yang dicicil 2 tahun. Namun, tidak ada warga yang melunasi pembayaran sesuai ketentuan, sehingga syarat kepemilikan gugur secara hukum.
- Negosiasi Ganti Rugi 2004: Berdasarkan Laporan DPRD 2007, sempat diusulkan formula ganti rugi (NJOP + Harga Pasar) / 2 dengan estimasi nilai Rp17.500,00/m² (NJOP saat itu Rp30.000,00/m²). Upaya ini gagal karena warga menawarkan di angka Rp5.000,00/m².
- Permohonan Pengalihan Status 2010: Warga mengajukan permohonan pengalihan hak milik. Karena Permendagri No. 17/2007 melarang pengalihan BMD tanpa lelang, Pemkot menawarkan skema sewa BMD mulai 2011.
- Kondisi Terkini: Melalui kuasa hukumnya, warga saat ini menolak membayar sewa dan menuntut kepemilikan tanah sepenuhnya tanpa kompensasi apa pun kepada Pemerintah Kota.

c. Pemanfaatan BMD untuk Huntap Korban Bencana (Pamoyanan)

Sebagai langkah respons cepat penanganan bencana longsor di Bogor Selatan, Pemkot Bogor mengalokasikan tanah BMD seluas 6.295 m² di Ciranjang, Kel.

Pamoyanan untuk pembangunan Hunian Tetap (Huntap). BKAD telah mengamankan legalitas administrasi pemanfaatan lahan untuk pembangunan 38 unit Huntap. Per 31 Desember 2025, pembaruan surat perjanjian pemanfaatan telah diselesaikan bersama 30 warga terdampak.

d. Tunggakan Sewa Poliklinik Korpri Kota Bogor

Korpri Kota Bogor menyewa BMD berupa tanah (800 m²) dan bangunan (780 m²) di Jl. Pajajaran No. 12A, Kel. Baranangsiang berdasarkan Perjanjian Sewa No. 593/Perj.435-BPKAD/2018 dengan nilai sewa Rp84.048.000,00/tahun. Masa sewa telah berakhir pada 25 Desember 2019, namun hingga kini belum ada pembaruan kontrak maupun pelunasan kewajiban pembayaran.

Kemajuan Tindak Lanjut Penagihan (sd 31 Desember 2025):

Langkah Penanganan	Nomor & Tanggal Surat Teguran	Perihal
Surat Teguran I	000.2.3.2/1088-Bid.BMD (21 Maret 2025)	Teguran I Pembayaran Sewa BMD Poliklinik Korpri
Surat Teguran II	000.2.3.2/6212-Bid.BMD (1 Desember 2025)	Teguran II Pembayaran Sewa BMD Poliklinik Korpri
Surat Teguran III	000.2.3.2/6786-Bid.BMD (22 Desember 2025)	Teguran III Pembayaran Sewa BMD Poliklinik Korpri

e. Piutang Sewa Lahan Eks Taman Topi (Plasa Kapten Muslihat)

Pemkot Bogor sebelumnya mengikat kerja sama sewa lahan BMD di Plasa Kapten Muslihat / Taman Ade Irma Suryani (Kel. Pabaton) dengan mitra usaha (Rincian kontrak pada Lampiran 9). Pada pertengahan tahun 2021, lahan tersebut dialihkan untuk pembangunan Alun-Alun Kota Bogor (diresmikan 17 Desember 2021) guna menunjang tugas pokok dan fungsi Disperumkim. Pengalihan fungsi ini mengakibatkan penghentian sewa sepihak dan menyisakan 49 daftar tagihan/Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang belum tertagih pasca-berakhirnya masa sewa. (Rincian surat perjanjian sewa disajikan pada Lampiran 9)

f. Perjanjian Bangun Guna Serah (BGS) Pangrango Plasa - PT GPJ

Kerja sama awal pemanfaatan bangunan Bogor Internusa Plaza (BIP) dimulai sejak 1983 dengan PT Bogor Internusa Hotel, diubah menjadi pusat perbelanjaan (1986), dan diamandemen pada 2003 pasca-kebakaran dengan perpanjangan masa kelola s.d. 4 April 2033. Akibat kepailitan PT Bogor Internusa Plaza pada 2012, hak pengelolaan aset dilelang secara umum.

PT Girimulia Perkasa Jaya (PT GPJ) memenangkan lelang tersebut (Risalah Lelang KPKNL No. 165/2013). Tindak lanjutnya dikukuhkan melalui Perjanjian Kerja Sama No. 640/Perj.32.BPKAD/2015 tentang Renovasi dan Pengelolaan Bangunan Pangrango Plasa.

Status Hukum & Regulasi Baru:

- Putusan MA Inkrah: Putusan PN Bogor, PT Bandung, hingga Mahkamah Agung (No. 1400 K/Pdt/2020) memerintahkan Pemkot Bogor memperbarui dokumen kerja sama menjadi perjanjian Bangun Guna Serah (BGS) baru dengan jangka waktu 1 September 2015 s.d. 31 Agustus 2045.
- Permohonan Mitra: Melalui Surat No. 004/GPJA/IX/2025, PT GPJ memohon

penyesuaian waktu kontrak sesuai putusan MA sekaligus penambahan fungsi sarana pendidikan pada objek kerja sama.

- Kendala Kesepakatan: Pemkot Bogor menyetujui penambahan fungsi pendidikan dan pemenuhan putusan pengadilan (Surat No. 100.3.7/6674-BKAD). Namun, menyesuaikan terbitnya PMDN No. 19/2016 jo. PMDN No. 7/2024, Pemkot mewajibkan pembaruan substansi secara menyeluruh. PT GPJ berkeberatan dan meminta amandemen dibatasi hanya pada poin jangka waktu dan fungsi pendidikan saja.

Substansi Wajib Menurut Regulasi Baru (PMDN 7/2024):

- Penambahan fungsi sarana pendidikan.
- Perpanjangan jangka waktu kontrak formal sesuai putusan pengadilan.
- Penghitungan ulang kontribusi tetap dan pembagian keuntungan.
- Penyerahan minimal 10% hasil BGS untuk digunakan langsung menunjang tugas dan fungsi Pemkot Bogor.
- Ketentuan pembatasan penjaminan, penggadaan, atau pemindahtanganan objek/hasil kerja sama.

Kemajuan Tindak Lanjut Pembaruan Kontrak (Sd 31 Desember 2025):

- Rapat Pembahasan (9 Oktober 2025): Pertemuan di Ruang Rapat BKAD menindaklanjuti Surat Undangan No. 100.3.7/5353-BKAD untuk membahas amandemen perjanjian pasca-putusan MA.
- Penyampaian Draft Baru (27 November 2025): BKAD mengirimkan draf resmi pembaruan perjanjian BGS melalui Surat Kepala BKAD No. 000.2.3.2/6168-Bid.BMD.
- Surat Tanggapan Resmi (27 November 2025): Pemkot Bogor mengirimkan Surat No. 100.3.7/6674-BKAD sebagai respons formal atas kelanjutan hubungan kemitraan.

5.3.1.3.2 Peralatan dan Mesin

Saldo Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin Pemerintah Kota Bogor per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.327.301.398.116,04 dan Rp1.256.136.708.584,89 mengalami peningkatan sebesar Rp71.164.689.531,15 atau 5,67%.

Peralatan dan Mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai. Adapun rincian peralatan mesin per perangkat daerah sebagai berikut:

Tabel 5.3.95
Peralatan Mesin Per Perangkat Daerah

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4=2-3)	(5=4/3)
1 Dinas Pendidikan	195.387.001.644,18	176.929.378.201,09	18.457.623.443,09	10,43
2 Dinas Kesehatan	476.606.720.016,99	459.695.335.726,25	16.911.384.290,74	3,68
3 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	61.607.438.670,33	59.737.136.034,01	1.870.302.636,32	3,13
4 Dinas Perumahan dan Permukiman	29.043.944.489,93	27.719.365.292,03	1.324.579.197,90	4,78
5 Satuan Polisi Pamong Praja	8.532.322.366,59	8.811.857.261,59	(279.534.895,00)	-3,17
6 Badan Penanggulangan Bencana Daerah	11.964.708.185,75	11.680.073.750,05	284.634.435,70	2,44
7 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3.089.851.853,00	2.813.475.772,00	276.376.081,00	9,82
8 Dinas Sosial	6.072.494.970,75	4.796.652.467,46	1.275.842.503,29	26,60

Uraian		31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	%
(1)		(2)	(3)	(4=2-3)	(5=4/3)
9	Dinas Tenaga Kerja	6.325.382.274,68	6.237.872.274,68	87.510.000,00	1,40
10	Dinas Lingkungan Hidup	102.328.216.731,14	97.326.296.125,34	5.001.920.605,80	5,14
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	17.160.403.657,53	16.270.972.630,38	889.431.027,15	5,47
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4.362.486.807,04	4.127.435.471,04	235.051.336,00	5,69
13	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4.609.423.139,68	4.538.803.139,68	70.620.000,00	1,56
14	Dinas Perhubungan	51.332.284.034,80	51.349.526.123,21	(17.242.088,41)	-0,03
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	33.223.386.216,40	34.167.819.139,74	(944.432.923,34)	-2,76
16	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	14.532.540.675,36	14.656.456.616,11	(123.915.940,75)	-0,85
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	10.448.762.442,40	9.285.276.887,14	1.163.485.555,26	12,53
18	Dinas Pemuda dan Olahraga	6.334.292.916,78	4.819.194.896,78	1.515.098.020,00	31,44
19	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	7.430.557.858,90	6.924.600.858,90	505.957.000,00	7,31
20	Dinas Arsip dan Perpustakaan	9.337.433.818,55	9.607.991.649,55	(270.557.831,00)	-2,82
21	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	14.840.109.079,11	14.626.017.829,11	214.091.250,00	1,46
22	Sekretariat Daerah	66.283.762.996,42	60.178.262.571,00	6.105.500.425,42	10,15
23	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	45.773.595.781,32	42.864.401.636,64	2.909.194.144,68	6,79
24	Kecamatan Bogor Selatan	11.880.128.908,83	10.758.878.672,35	1.121.250.236,48	10,42
25	Kecamatan Bogor Timur	8.240.622.018,08	7.502.970.236,08	737.651.782,00	9,83
26	Kecamatan Bogor Tengah	9.466.222.936,81	8.378.906.173,81	1.087.316.763,00	12,98
27	Kecamatan Bogor Barat	10.199.712.321,75	9.555.698.774,74	644.013.547,01	6,74
28	Kecamatan Bogor Utara	9.523.661.419,95	9.026.160.481,30	497.500.938,65	5,51
29	Kecamatan Tanah Sareal	9.320.690.324,72	8.938.498.439,03	382.191.885,69	4,28
30	Inspektorat	6.632.136.917,72	5.761.051.760,92	871.085.156,80	15,12
31	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	7.651.565.267,74	6.424.119.867,74	1.227.445.400,00	19,11
32	Badan Keuangan dan Aset Daerah	12.114.968.183,17	10.888.301.884,88	1.226.666.298,29	11,27
33	Badan Pendapatan Daerah	21.177.581.155,73	18.623.478.915,48	2.554.102.240,25	13,71
34	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	6.381.974.543,77	5.870.744.648,06	511.229.895,71	8,71
35	PPKD	7.177.217.805,38	5.562.594.305,38	1.614.623.500,00	29,03
36	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	20.907.795.684,76	19.681.102.071,34	1.226.693.613,42	6,23
Jumlah		1.327.301.398.116,04	1.256.136.708.584,89	71.164.689.531,15	5,67

Mutasi Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin Pemerintah Kota Bogor tahun 2025 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.3.96
Mutasi Aset Tetap Peralatan Mesin

URAIAN	JUMLAH (Rp)
Saldo per 31 Desember 2025	1.256.136.708.584,89
Mutasi Tambah:	
Belanja Modal Tahun Anggaran 2025	110.067.042.014,00
Kewajiban kepada Pihak ketiga TA 2024 yang asetnya Telah diakui Tahun Berjalan	381.167.999,00
Belanja Modal yang dimutasi antar Perangkat Daerah	1.757.000,00
Hibah BMD tahun berjalan	1.987.200.026,00
Belanja Modal yang di reklasifikasi antar KIB	92.794.035,00
Belanja Operasional (BOP) yang dikapitalisasi Menjadi Aset tetap	538.740.973,00
Mutasi/Alih Status Penggunaan Antar Perangkat Daerah (Hasil Tahun berjalan)	6.524.205.654,45

URAIAN	JUMLAH (Rp)
Reklasifikasi antar KIB (Tahun berjalan)	15.584.398.229,54
Reklasifikasi dari aset lainnya (Tahun berjalan) :	
- Reklasifikasi dari Aset Rusak Berat	471.201.393,00
- Reklasifikasi dari Aset Lain-Lain (Penelusuran)	227.025.643,51
Hibah BMD sebelum Tahun 2025	1.822.531.161,00
BMD belum tercatat (Tahun berjalan)	742.270.833,07
Jumlah Mutasi Tambah	138.440.334.961,57
Mutasi Kurang :	
Belanja Modal yang dimutasi antar Perangkat Daerah	1.757.000,00
Belanja Modal yang di reklasifikasi antar KIB	65.324.880,00
Belanja Modal yang dikapitalisasi Menjadi aset ekstrakomtabel	12.948.530.585,00
Belanja Modal tidak menjadi aset tetap	603.902.931,00
Kewajiban kepada pihak ketiga th 2024 yg asetnya telah diakui di tahun 2023	1.709.377.921,00
Mutasi/Alih Status Penggunaan Antar Perangkat Daerah (Hasil Tahun berjalan)	6.524.205.654,45
Reklasifikasi menjadi Aset Ekstrakomtabel (Tahun berjalan)	50.000.000,00
Reklasifikasi antar KIB (Tahun berjalan)	15.383.175.354,54
Reklasifikasi menjadi aset lainnya (Tahun berjalan) :	
- Reklasifikasi menjadi Aset Rusak Berat	26.193.087.698,58
- Reklasifikasi menjadi Aset Lain-Lain (Penelusuran)	55.291.318,54
Penghapusan BMD (Tahun berjalan)	1.376.998.522,00
Reklasifikasi Kondisi BMD (Tahun berjalan)	2.363.993.565,31
Jumlah Mutasi Kurang	67.275.645.430,42
Total Mutasi 2025	71.164.689.531,15
Saldo per 31 Desember 2025	1.327.301.398.116,04
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	1.093.358.641.043,45
Nilai Buku per 31 Desember 2025	233.942.757.072,59

Nilai Aset Peralatan dan Mesin mengalami peningkatan sebesar Rp71.164.689.531,15 perubahan berupa penambahan sebesar Rp138.440.334.961,57 dan pengurangan sebesar Rp67.275.645.430,42.

(Rincian penambahan dan pengurangan nilai tanah disajikan pada Lampiran 10)

5.3.1.3.3 Gedung dan Bangunan

Saldo Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan Pemerintah Kota Bogor per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp2.007.539.393.366,46 dan Rp 1.888.200.567.932,12 mengalami peningkatan nilai sebesar Rp119.338.825.434,34 atau 6,32%.

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Berikut tabel perbandingan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Per Perangkat Daerah pada periode Tahun Anggaran 2025 dan 2024.

Tabel 5.3.97
Gedung Bangunan per Perangkat Daerah

Uraian		31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	%
(1)		(2)	(3)	(4=2-3)	(5=4/3)
1	Dinas Pendidikan	611.829.517.302,23	548.176.766.184,71	63.652.751.117,52	11,61
2	Dinas Kesehatan	383.994.945.740,05	376.217.655.291,05	7.777.290.449,00	2,07
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	137.247.601.505,36	138.874.488.105,36	(1.626.886.600,00)	-1,17
4	Dinas Perumahan dan Permukiman	136.430.763.946,53	130.931.504.207,53	5.499.259.739,00	4,20
5	Satuan Polisi Pamong Praja	627.837.000,00	627.837.000,00	-	0,00
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	586.395.728,00	586.395.728,00	-	0,00
8	Dinas Sosial	2.942.723.603,00	2.751.779.603,00	190.944.000,00	6,94
9	Dinas Tenaga Kerja	3.125.448.338,00	2.482.647.776,00	642.800.562,00	25,89
10	Dinas Lingkungan Hidup	17.104.323.583,16	17.614.881.214,82	(510.557.631,66)	-2,90
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.275.605.198,00	3.275.605.198,00	-	0,00
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4.187.818.650,00	4.187.818.650,00	-	0,00
13	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	743.627.150,00	743.627.150,00	-	0,00
14	Dinas Perhubungan	191.780.465.301,49	179.944.380.473,49	11.836.084.828,00	6,58
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	4.208.754.401,00	-	4.208.754.401,00	0,00
16	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	14.806.067.972,26	14.806.067.972,26	-	0,00
18	Dinas Pemuda dan Olahraga	90.912.909.259,00	67.514.025.680,00	23.398.883.579,00	34,66
19	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	29.456.482.303,65	24.245.939.416,65	5.210.542.887,00	21,49
20	Dinas Arsip dan Perpustakaan	32.120.788.874,50	32.120.788.874,50	-	0,00
21	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	28.477.654.169,00	29.152.705.169,00	(675.051.000,00)	-2,32
22	Sekretariat Daerah	23.760.599.526,00	32.899.231.094,00	(9.138.631.568,00)	-27,78
23	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	79.623.826.839,00	79.623.826.839,00	-	0,00
24	Kecamatan Bogor Selatan	24.493.988.355,00	24.153.371.769,00	340.616.586,00	1,41
25	Kecamatan Bogor Timur	17.845.789.161,00	17.903.142.313,00	(57.353.152,00)	-0,32
26	Kecamatan Bogor Tengah	17.129.610.378,00	17.946.216.153,00	(816.605.775,00)	-4,55
27	Kecamatan Bogor Barat	27.671.333.641,34	27.478.193.378,34	193.140.263,00	0,70
28	Kecamatan Bogor Utara	19.896.174.663,41	19.896.174.663,41	-	0,00
29	Kecamatan Tanah Sareal	23.243.905.383,00	22.272.721.416,00	971.183.967,00	4,36
30	Inspektorat	3.405.472.400,00	3.230.367.376,00	175.105.024,00	5,42
31	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4.029.369.300,00	4.029.369.300,00	-	0,00
32	Badan Keuangan dan Aset Daerah	20.425.499.194,00	19.035.236.780,00	1.390.262.414,00	7,30
33	Badan Pendapatan Daerah	29.999.030.646,00	29.337.506.643,00	661.524.003,00	2,25
34	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.339.818.912,00	1.339.818.912,00	-	0,00
35	PPKD	12.121.086.063,48	9.879.018.853,00	2.242.067.210,48	22,70
36	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	4.720.235.873,00	4.921.458.748,00	(201.222.875,00)	0,00
Jumlah		2.003.565.470.360,46	1.888.200.567.932,12	115.364.902.428,34	6,11

Mutasi Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan Pemerintah Kota Bogor tahun 2025 dapat dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 5.3.98
Mutasi Aset Tetap Gedung Bangunan

URAIAN	JUMLAH (Rp)
Saldo per 31 Desember 2024	1.888.200.567.932,12
Mutasi Tambah:	
Belanja Modal Tahun Anggaran 2025	114.464.370.580,00

Hibah BMD tahun berjalan	457.435.248,00
Mutasi/Alih Status Penggunaan Antar Perangkat Daerah (Hasil Tahun berjalan)	14.630.100.342,48
Reklasifikasi antar KIB (Tahun berjalan)	25.520.401.644,00
Reklasifikasi dari aset lainnya (Tahun berjalan) :	
- Reklasifikasi dari Aset Rusak Berat	513.000.000,00
- Reklasifikasi dari Aset Lain-Lain (Penelusuran)	741.145.531,00
Hibah BMD sebelum Tahun 2025	1.602.756.964,00
Jumlah Mutasi Tambah	157.929.210.309,48
Mutasi Kurang :	
Belanja Modal yang di reklasifikasi antar KIB	226.398.630,00
Mutasi/Alih Status Penggunaan Antar Perangkat Daerah (Hasil Tahun berjalan)	14.630.100.342,48
Reklasifikasi antar KIB (Tahun berjalan)	26.069.332.619,00
Reklasifikasi menjadi aset lainnya (Tahun berjalan) :	
- Reklasifikasi menjadi Aset Rusak Berat	566.195.416,66
BMD belum tercatat (Tahun berjalan)	
Penghapusan BMD (Tahun berjalan)	816.605.775,00
Jumlah Mutasi Kurang	42.564.307.881,14
Total Mutasi 2025	115.364.902.428,34
Saldo per 31 Desember 2025	2.003.565.470.360,46
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	375.629.520.714,13
Nilai Buku per 31 Desember 2025	1.627.935.949.646,33

Nilai Aset Gedung dan Bangunan mengalami peningkatan sebesar Rp115.620.577.526,34 perubahan berupa penambahan sebesar Rp157.929.210.309,48 dan pengurangan sebesar Rp42.308.632.783,14.

(Rincian penambahan dan pengurangan nilai tanah disajikan pada Lampiran 11)

5.3.1.3.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi dan Jaringan Pemerintah Kota Bogor per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp3.704.653.813.662,67 dan Rp3.588.464.657.486,93 mengalami kenaikan nilai sebesar Rp116.189.156.175,74 atau 3,24%..

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Walaupun tidak ada definisi yang universal digunakan, aset ini biasanya mempunyai karakteristik sebagai berikut: (a) Merupakan bagian dari satu sistem atau jaringan; (b) Sifatnya khusus dan tidak ada alternatif lain penggunaannya; (c) Tidak dapat dipindah-pindahkan; dan (d) Terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya.

Berikut disajikan tabel perbandingan Aset Tetap Jalan dan Irigasi Per Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025.

Tabel 5.3.99
Jaringan, Irigasi dan Jalan per Perangkat Daerah

Uraian		31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Lebih/Kurang	
				(Rp)	%
(1)		(2)	(3)	(4=2-3)	(5=4/3)
1	Dinas Pendidikan	6.450.952.246,30	4.039.355.021,30	2.411.597.225,00	59,70
2	Dinas Kesehatan	9.295.424.150,00	9.095.424.150,00	200.000.000,00	0,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.665.049.888.915,49	2.562.315.104.520,49	102.734.784.395,00	4,01
4	Dinas Perumahan dan Permukiman	754.323.718.819,18	752.325.011.061,18	1.998.707.758,00	0,27
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	199.873.989,00	5.527.500,00	194.346.489,00	0,00
6	Dinas Tenaga Kerja	44.300.313,00	44.300.313,00	-	0,00
7	Dinas Lingkungan Hidup	15.913.056.473,42	15.283.473.880,68	629.582.592,74	4,12
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	33.830.000,00	33.830.000,00	-	0,00
9	Dinas Perhubungan	24.794.536.206,22	24.794.536.206,22	-	0,00
10	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.564.432.854,00	10.983.782,00	1.553.449.072,00	14143,12
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	34.549.400,00	34.549.400,00	-	0,00
12	Dinas Pemuda dan Olahraga	678.042.823,00	678.042.823,00	-	0,00
13	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	221.632.237,67	221.632.237,67	-	0,00
14	Dinas Arsip dan Perpustakaan	62.331.600,00	62.331.600,00	-	0,00
15	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	4.508.076.473,00	4.508.076.473,00	-	0,00
16	Sekretariat Daerah	1.386.167.315,00	1.386.167.315,00	-	0,00
17	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	34.903.000,00	34.903.000,00	-	0,00
18	Kecamatan Bogor Selatan	27.899.417.551,00	27.056.312.232,00	843.105.319,00	3,12
19	Kecamatan Bogor Timur	8.750.921.032,00	8.192.925.824,00	557.995.208,00	6,81
20	Kecamatan Bogor Tengah	12.833.259.451,00	12.643.649.029,00	189.610.422,00	1,50
21	Kecamatan Bogor Barat	26.365.731.331,00	24.746.311.471,00	1.619.419.860,00	6,54
22	Kecamatan Bogor Utara	12.287.118.894,00	12.287.118.894,00	-	0,00
23	Kecamatan Tanah Sareal	19.266.980.734,00	16.911.758.844,00	2.355.221.890,00	13,93
24	PPKD	111.705.067.909,39	111.702.621.909,39	2.446.000,00	0,00
25	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	50.710.000,00	50.710.000,00	-	0,00
Jumlah		3.703.754.923.717,67	3.588.464.657.486,93	115.290.266.230,74	3,21

Mutasi Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi dan Jaringan Pemerintah Kota Bogor tahun 2025 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.3.100
Mutasi Aset Tetap Jaringan Irigasi Jalan

Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo per 31 Desember 2024	3.588.464.657.486,93
Mutasi Tambah:	
Belanja Modal Tahun Anggaran 2025	117.476.854.621,00
Mutasi/Alih Status Penggunaan Antar Perangkat Daerah (Hasil Tahun berjalan)	2.446.000,00
Reklasifikasi antar KIB (Tahun berjalan)	55.078.788.297,01
Reklasifikasi dari aset lainnya (Tahun berjalan) :	
Jumlah Mutasi Tambah	172.558.088.918,01
Mutasi Kurang :	
Belanja Modal yang dimutasi antar Perangkat Daerah	894.465.750,00
Mutasi/Alih Status Penggunaan Antar Perangkat Daerah (Hasil Tahun berjalan)	2.446.000,00
Reklasifikasi antar KIB (Tahun berjalan)	55.230.655.787,01
Reklasifikasi menjadi aset lainnya (Tahun berjalan) :	
- Reklasifikasi menjadi Aset Rusak Berat	241.365.205,26
Jumlah Mutasi Kurang	57.267.822.687,27
Total Mutasi 2025	115.290.266.230,74
Saldo per 31 Desember 2025	3.703.754.923.717,67

Uraian	Jumlah (Rp)
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	(2.381.738.908.778,77)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	1.322.016.014.938,90

Nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan mengalami Peningkatan sebesar Rp116.189.156.175,74 perubahan berupa penambahan sebesar Rp172.558.088.918,01 dan pengurangan sebesar Rp56.368.932.742,27.

(Rincian penambahan dan pengurangan nilai tanah disajikan pada Lampiran 12)

5.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap berupa Aset Tetap Lainnya Pemerintah Kota Bogor per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp18.845.414.375,99 dan Rp 15.088.820.384,99 mengalami peningkatan nilai sebesar Rp 3.756.593.991,00 atau 24,90%.

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Aset Tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Berikut tabel perbandingan Aset Tetap Lainnya Per Perangkat Daerah pada periode Tahun Anggaran 2025

Tabel 5.3.101
Aset tetap Lainnya per Perangkat Daerah

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4=2-3)	(5=4/3)
1 Dinas Pendidikan	13.353.691.534,72	9.972.481.095,(1)72	3.381.210.439,00	33,91
2 Dinas Kesehatan	4.171.500,00	4.171.500,00	-	0,00
3 Dinas Perumahan dan Permukiman	197.880.000,00	197.880.000,00	-	0,00
4 Dinas Perhubungan	147.232.500,00	147.232.500,00	-	0,00
5 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	145.075.000,00	145.075.000,00	-	0,00
6 Dinas Arsip dan Perpustakaan	4.428.563.340,85	2.784.439.788,85	1.644.123.552,00	59,05
7 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	31.305.000,00	31.305.000,00	-	0,00
8 Sekretariat Daerah	196.597.440,00	196.597.440,00	-	0,00
9 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	241.694.600,00	241.694.600,00	-	0,00
10 Kecamatan Bogor Selatan	17.733.640,72	17.733.640,72	-	0,00
11 Kecamatan Bogor Timur	3.456.123,19	3.456.123,19	-	0,00
12 Kecamatan Bogor Tengah	4.947.415,02	4.947.415,02	-	0,00
12 Kecamatan Bogor Barat	15.536.863,75	15.536.863,75	-	0,00
13 Kecamatan Bogor Utara	8.198.787,98	8.198.787,98	-	0,00
14 Kecamatan Tanah Sareal	5.280.629,76	5.280.629,76	-	0,00
15 Inspektorat	44.050.000,00	44.050.000,00	-	0,00
16 PPKD	-	1.268.740.000,00	(1.268.740.000,00)	0,00
Jumlah	18.845.414.375,99	15.088.820.384,99	3.756.593.991,00	24,90

Mutasi Aset Tetap berupa Aset Tetap Lainnya Pemerintah Kota Bogor tahun 2025 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.3.102
Mutasi Aset Tetap Lainnya

Uraian	Jumlah (Rp)
(1)	(2)
Saldo per 31 Desember 2024	15.088.820.384,99
Mutasi Tambah:	
Belanja Modal Tahun Anggaran 2025	12.610.804.842,00
Belanja Modal yang dimutasi antar Perangkat Daerah	24.665.300,00
Hibah BMD tahun berjalan	35.529.381,00
Belanja Modal yang di reklasifikasi antar KIB	3.600.000,00
Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dikapitalisasi Menjadi Aset tetap	122.382.650,00
Mutasi/Alih Status Penggunaan Antar Perangkat Daerah (Hasil Tahun berjalan)	1.268.790.000,00
Reklasifikasi dari aset lainnya (Tahun berjalan) :	
Hibah BMD sebelum Tahun 2025	182.419,00
Jumlah Mutasi Tambah	14.065.954.592,00
Mutasi Kurang :	
Belanja Modal yang dimutasi antar Perangkat Daerah	24.665.300,00
Belanja Modal yang dikapitalisasi Menjadi aset ekstrakomtabel	8.775.131.172,00
Mutasi/Alih Status Penggunaan Antar Perangkat Daerah (Hasil Tahun berjalan)	1.268.790.000,00
Reklasifikasi menjadi aset lainnya (Tahun berjalan) :	
BMD belum tercatat (Tahun berjalan)	
Penghapusan BMD (Tahun berjalan)	240.774.129,00
Jumlah Mutasi Kurang	10.309.360.601,00
Total Mutasi 2025	3.756.593.991,00
Saldo per 31 Desember 2025	18.845.414.375,99
Nilai Buku per 31 Desember 2025	18.845.414.375,99

Nilai Aset Tetap Berupa Aset Tetap Lainnya mengalami peningkatan sebesar Rp3.756.593.991,00 perubahan berupa penambahan sebesar Rp14.065.954.592,00 dan pengurangan sebesar Rp10.309.360.601,00.

(Rincian penambahan dan pengurangan nilai tanah disajikan pada Lampiran 13)

5.3.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Aset Tetap berupa Konstruksi Dalam Pengerjaan Pemerintah Kota Bogor per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp17.020.829.760,00 dan Rp 15.583.780.825,00 mengalami peningkatan nilai sebesar Rp 1.437.048.935,00 atau 9,22%.

Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup Aset Tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan Aset Tetap Lainnya, yang proses perolehannya dan/ atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

Berikut tabel perbandingan Konstruksi Dalam Pengerjaan Per Perangkat Daerah pada periode Tahun Anggaran 2025.

Tabel 5.3.103
Konstruksi Dalam Pengerjaan per Perangkat Daerah

Uraian		31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Lebih/Kurang	
				(Rp)	%
(1)		(2)	(3)	(4=2-3)	(5=4/3)
1	Dinas Pendidikan	-	1.279.178.500,00	(1.279.178.500,00)	-100,00
2	Dinas Kesehatan	1.745.800.920,00	1.745.800.920,00	-	0,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	8.399.983.665,00	5.474.355.105,00	2.925.628.560,00	53,44
4	Dinas Perumahan dan Permukiman	97.460.775,00	55.770.000,00	41.690.775,00	74,75
5	Dinas Sosial	-	55.755.000,00	(55.755.000,00)	-100,00
6	Dinas Lingkungan Hidup	-	96.070.500,00	(96.070.500,00)	-100,00
7	Dinas Perhubungan	50.417.500,00	50.417.500,00	-	0,00
8	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	609.622.425,00	609.622.425,00	-	0,00
9	Dinas Pemuda dan Olahraga	5.931.086.275,00	5.931.086.275,00	-	0,00
10	Kecamatan Bogor Selatan	89.266.200,00	89.266.200,00	-	0,00
11	Kecamatan Bogor Tengah	11.500.000,00	11.500.000,00	-	0,00
12	Kecamatan Bogor Barat	-	99.266.400,00	(99.266.400,00)	-100,00
13	Badan Keuangan dan Aset Daerah	85.692.000,00	85.692.000,00	-	0,00
Jumlah		17.020.829.760,00	15.583.780.825,00	1.437.048.935,00	9,22

Mutasi Aset Tetap berupa Konstruksi Dalam Pengerjaan Pemerintah Kota Bogor tahun 2025 dapat dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 5.3.104
Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan

URAIAN	JUMLAH
	(Rp)
(1)	(2)
Saldo per 31 Desember 2024	15.583.780.825,00
Mutasi Tambah:	
Belanja Modal yang di reklasifikasi antar KIB	1.188.565.245,00
Mutasi/Alih Status Penggunaan Antar Perangkat Daerah (Hasil Tahun berjalan)	
Reklasifikasi antar KIB (Tahun berjalan)	2.104.741.600,00
Reklasifikasi dari aset lainnya (Tahun berjalan) :	
Jumlah Mutasi Tambah	3.293.306.845,00
Mutasi Kurang :	
Reklasifikasi antar KIB (Tahun berjalan)	1.704.432.410,00
Reklasifikasi menjadi aset lainnya (Tahun berjalan) :	
BMD belum tercatat (Tahun berjalan)	
Penghapusan BMD (Tahun berjalan)	151.825.500,00
Jumlah Mutasi Kurang	1.856.257.910,00
Total Mutasi 2025	1.437.048.935,00
Saldo per 31 Desember 2025	17.020.829.760,00

Daftar Konstruksi Dalam Pengerjaan pada setiap perangkat daerah tahun 2025 dan perubahan nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sebesar Rp1.437.048.935,00 berupa penambahan dan pengurangan ini sebagaimana terlampir.

(Rincian KDP setiap perangkat daerah serta penambahan dan pengurangan nilai tanah disajikan pada Lampiran 14 dan 15)

5.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Pemerintah Kota Bogor per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp3.850.716.469.574,19 dan Rp3.521.818.179.178,74 mengalami peningkatan nilai sebesar Rp329.172.462.779,45

atau 9,35%.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Pemerintah Kota Bogor per 31 Desember 2025 dapat dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 5.3.105
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Uraian - Akumulasi Penyusutan	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4=2-3)	(5=4/3)
Peralatan dan Mesin	1.093.358.641.043,45	1.013.699.588.886,23	79.659.052.157,22	7,86
Gedung dan Bangunan	375.629.520.714,13	335.901.820.675,70	39.727.700.038,43	11,83
Jalan, Irigasi, dan jaringan	2.381.738.908.778,77	2.171.942.597.232,81	209.796.311.545,96	9,66
Jumlah	3.850.727.070.536,35	3.521.544.006.794,74	329.183.063.741,61	9,35

Tabel 5.3.106
Rincian Beban Penyusutan

Uraian	Akumulasi Penyusutan per 31 Des 2024	Akumulasi Penyusutan per 31 Des 2025	Selisih Lebih/ (Kurang)
(1)	(2)	(3)	(4=2-3)
Peralatan dan Mesin	1.013.699.588.886,23	1.093.358.641.043,45	(79.659.052.157,22)
Gedung dan Bangunan	335.901.820.675,70	375.629.520.714,13	(39.727.700.038,43)
Jalan, Irigasi, dan jaringan	2.171.942.597.232,81	2.381.738.908.778,77	(209.796.311.545,96)
Jumlah	3.521.544.006.794,74	3.850.727.070.536,35	(329.183.063.741,61)

Rincian nilai perolehan, akumulasi penyusutan, dan nilai buku kelompok aset tetap tahun 2025 dapat dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 5.3.107
Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku Aset Tetap

Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan		Nilai Buku	
		Rp	%	Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4=3/2)	(5=2-3)	(6=5/2)
Tanah	5.903.621.720.319,76	-	-	5.903.621.720.319,76	100,00
Peralatan dan Mesin	1.327.301.398.116,04	1.093.358.641.043,45	82,37	233.942.757.072,59	17,63
Gedung dan Bangunan	2.003.565.470.360,46	375.629.520.714,13	18,75	1.627.935.949.646,33	81,25
Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.703.754.923.717,67	2.381.738.908.778,77	64,31	1.322.016.014.938,90	35,69
Aset Tetap Lainnya	18.845.414.375,99	-	-	18.845.414.375,99	100,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	17.020.829.760,00	-	-	17.020.829.760,00	100,00
Jumlah	12.974.109.756.649,90	3.850.727.070.536,35	29,68	9.123.382.686.113,57	70,32

5.3.1.4 Dana Cadangan

Dana cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan Pemerintah Kota Bogor Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp8.300.000.000,00 untuk keperluan Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat XV Th 2026 dalam bentuk deposito pada Bank Syariah Indonesia, Tbk. Dana cadangan Pemerintah Kota Bogor Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp8.300.000.000,00 sedangkan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp8.398.684.760,00 terdiri dari:

Tabel 5.3.108
Dana Cadangan

No	Uraian	Saldo Awal 2025	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Dana Cadangan				
1	Pembentukan Dana Cadangan	71.336.251.300,00	8.300.000.000,00	0,00	79.636.251.300,00
2	Pencairan Dana Cadangan	64.414.571.000,00	0,00	6.921.680.300,00	71.336.251.300,00
3	Bunga	1.477.004.460,00	65.752.960,00	1.542.757.420,00	0,00
	Jumlah Dana Cadangan (1 - 2 + 3)	8.398.684.760,00	8.365.752.960	8.464.437.720	8.300.000.000,00

5.3.1.5 ASET LAINNYA

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka Panjang, aset tetap, dan dana cadangan.

Saldo Aset Lainnya Kota Bogor per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp106.084.1199.022,17 dan Rp76.403.789.787,11 mengalami kenaikan sebesar Rp29.680.409.235,06 atau 38,85%.

Tabel 5.3.109
Aset Lainnya

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / (penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Aset Lainnya				
2	Tagihan Penjualan Angsuran	750.038.672,00	770.678.122,00	(20.639.450,00)	(2,68)
3	Tuntutan Ganti Rugi	1.495.359.633,90	351.103.844,90	1.144.255.789,00	325,90
4	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	11.014.184.310,00	11.014.184.310,00	-	-
5	Aset Tak Berwujud	17.931.181.742,80	16.970.742.403,80	960.439.339,00	5,66
6	Aset Lain-lain	236.087.502.380,73	187.940.474.139,24	48.147.028.241,49	25,62
7	Akumulasi Amortisasi aset Tak Berwujud	(17.295.915.993,55)	(16.493.115.025,80)	(802.800.967,75)	4,87
8	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(143.898.151.723,71)	(131.320.042.007,03)	(12.578.109.716,68)	9,58
9	Treasury Deposit Facility (TDF)	0,00	7.169.764.000,00	(7.169.764.000,00)	(100,00)
	Jumlah	106.084.199.022,17	76.403.789.787,11	29.680.409.235,06	38,85

5.3.1.5.1 Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo tagihan jangka Panjang per 31 Desember 2025 sebesar Rp750.038.672,00 atau turun sebesar 2,68% dibanding saldo 2024 sebesar Rp770.678.122,00. Adapun tagihan jangka panjang Kota Bogor sebesar Rp750.038.672,00 terdiri dari:

Tabel 5.3.110
Tagihan Jangka Panjang

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / (penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Tagihan Penjualan Angsuran				
2	Tagihan Angsuran Penjualan Rumah Negara Golongan III	724.462.107,00	745.101.557,00	(20.639.450,00)	(2,77)
3	Tagihan Angsuran Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas	25.576.565,00	25.576.565,00	0,00	-
	Jumlah	750.038.672,00	770.678.122,00	(20.639.450,00)	(2,68)

(Rincian tagihan jangka Panjang disajikan pada lampiran 16.1 dan 16.2)

5.3.1.5.2 Tuntutan Ganti Rugi

Saldo tagihan jangka Panjang per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.495.359.633,90 atau naik sebesar Rp1.144.255.789,00 atau 325,90% dibanding saldo 2024 sebesar Rp351.103.844,90. Adapun tagihan jangka panjang Kota Bogor sebesar Rp1.495.359.633,90 terdiri dari:

Tabel 5.3.111
Tuntutan Ganti Rugi

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / (penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Tuntutan Ganti Rugi				
2	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara	0,00	0,00	-	
3	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	1.495.359.633,90	351.103.844,90	1.144.255.789,00	325,90
	Jumlah	1.495.359.633,90	351.103.844,90	1.144.255.789,00	325,90

Tabel 5.3.112
Mutasi Tuntutan Ganti Rugi

No	Uraian	2025	2024
1	Saldo Awal	351.103.844,90	334.362.178,57
2	Penambahan	17.634.000,00	26.183.333,33
3	Penambahan atas temuan kurang volume aset tetap	1.154.565.043,00	0,00
4	Pembayaran	27.943.254,00	9.441.667,00
5	Saldo Akhir (1+2+3-4)	1.495.359.633,90	351.103.844,90

5.3.1.5.3 Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Saldo kemitraan dengan pihak ketiga per 31 Desember 2025 sebesar Rp11.014.184.310,00 atau turun sebesar 0,00 atau 0,00% dibanding saldo 2024 sebesar Rp11.014.184.310,00. Adapun rincian kemitraan dengan pihak ketiga sebesar Rp11.014.184.310,00 sebagai berikut:

Tabel 5.3.113
Kemitraan dengan Pihak Ketiga

No	Lokasi	Luas	Nilai
1	Tanah Pasar Kebon Kembang Blok C & D	6.054,00	4.871.684.310,00
2	Tanah Plasa Lippo Keboen Raya (ex.Pangrango Plasa) Jl. Raya Pajajaran	12.285,00	6.142.500.000,00
	Jumlah	18.339,00	11.014.184.310,00

(Rincian kemitraan dengan pihak ketiga disajikan pada lampiran 17)

5.3.1.5.4 Aset Tak Berwujud

Saldo aset tidak berwujud per 31 Desember 2025 sebesar Rp17.931.181.742,80 atau naik sebesar Rp960.439.339,00 atau 5,66% dibanding saldo 2024 sebesar Rp16.970.742.403,80 Adapun rincian aset tidak berwujud sebesar Rp17.931.181.742,80 sebagai berikut:

Tabel 5.3.114
Aset Tidak Berwujud

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4=2-3)	(5=4/3)
1. Aset Tidak Berwujud	17.931.181.742,80	16.970.742.403,80	960.439.339,00	5,66
2. Akumulasi Amortisasi ATB	(17.295.915.993,55)	(16.493.115.025,80)	(802.800.967,75)	4,87
Nilai Buku	635.265.749,25	477.627.378,00	157.638.371,25	33,00

Nilai Aset Tetap Berupa Aset Tidak Berwujud mengalami peningkatan sebesar Rp960.439.339,00 perubahan berupa penambahan sebesar Rp960.439.339,00 ini sebagaimana terlampir.

(Rincian penambahan dan pengurangan nilai aset tidak berwujud disajikan pada Lampiran 18)

5.3.1.5.5 Aset Lain Lain

Saldo Aset lain-lain per 31 Desember 2025 sebesar Rp236.087.502.380,73 naik sebesar 25,62% dari saldo tahun 2024 sebesar Rp187.940.474.139,24. Saldo aset lain-lain sebesar Rp236.087.502.380,73 terdiri dari aset lain lain yang merupakan dana penerusan pinjaman PDAM sebesar Rp38.393.363.239,00 yang direklasifikasi dari piutang lainnya dan aset lain-lain berupa Aset Tetap yang dimaksudkan untuk

dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah sebesar Rp196.762.150.359,10.

5.3.1.5.5.1 Aset Lain-lain - Penerusan Dana Pinjaman PDAM

Aset lain lain sebesar Rp38.393.363.239,00 merupakan penerusan dana pinjaman PDAM Tirta Pakuan sebesar sesuai Naskah Perjanjian Penerusan Pinjaman (NPPP) antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Kota Bogor Nomor SLA-1226/DSMI/2009 tanggal 2 November 2009 tentang Dana Pinjaman dari International Bank for Reconstruction and Development No.7730-ID tanggal 1 September 2009 dalam rangka pembiayaan Urban Water Supply and Sanitation Project.

Tabel 5.3.115

Aset Lain-lain - Penerusan Dana Pinjaman PDAM

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Saldo Awal	0,00	0,00
2	Penerimaan (Reklasifikasi dari piutang lainnya)	43.878.129.416,00	0,00
3	Pengeluaran (bagian lancar tagihan jangka panjang)	5.484.766.177,00	0,00
4	Saldo Akhir	38.393.363.29,00	0,00

5.3.1.5.5.2 Aset Lain-lain -Lainnya

Saldo aset lain-lain - Lainnya per 31 Desember 2025 sebesar Rp196.762.150.359,10 atau naik sebesar Rp9.753.665.002,49 atau 5,19% dibanding saldo 2024 sebesar Rp187.940.474.139,24. Aset Tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau Aset Tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Adapun rincian aset lain-lain per perangkat daerah sebagai berikut:

Tabel 5.3.116
Rincian Aset Lain-lain per Perangkat Daerah

NO	Perangkat Daerah	Jumlah 31 Desember 2025	Jumlah 31 Desember 2024	Bertambah/ (Berkurang)	
				(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Dinas Pendidikan	648.454.690,00	648.454.690,00	-	0,00
2	Dinas Kesehatan	1.515.410.380,00	1.300.224.400,00	215.185.980,00	16,55
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	211.654.000,00	136.895.500,00	74.758.500,00	54,61
4	Dinas Perumahan dan Permukiman	1.851.443.350,00	1.851.443.350,00	-	0,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	0,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	394.021.000,00	394.021.000,00	-	0,00
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-	-	0,00
8	Dinas Sosial	173.582.500,00	173.582.500,00	-	0,00
9	Dinas Tenaga Kerja	44.220.000,00	44.220.000,00	-	0,00
10	Dinas Lingkungan Hidup	163.128.500,00	163.128.500,00	-	0,00
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.012.696.812,86	632.961.853,86	379.734.959,00	59,99
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	135.827.500,00	135.827.500,00	-	0,00
13	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	245.233.500,00	245.233.500,00	-	0,00
14	Dinas Perhubungan	736.158.074,94	736.158.074,94	-	0,00
15	Dinas Komunikasi dan	3.297.006.625,00	3.297.006.625,00	-	0,00

NO	Perangkat Daerah	Jumlah 31 Desember 2025	Jumlah 31 Desember 2024	Bertambah/ (Berkurang)	
				(Rp)	(%)
	Informatika				
16	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	582.093.925,00	490.093.925,00	92.000.000,00	18,77
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	911.560.000,00	911.560.000,00	-	0,00
18	Dinas Pemuda dan Olahraga	45.055.000,00	45.055.000,00	-	0,00
19	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	48.000.000,00	48.000.000,00	-	0,00
20	Dinas Arsip dan Perpustakaan	242.900.000,00	242.900.000,00	-	0,00
21	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	133.975.570,00	133.975.570,00	-	0,00
22	Sekretariat Daerah	1.355.867.632,00	1.157.107.732,00	198.759.900,00	17,18
23	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	213.315.000,00	213.315.000,00	-	0,00
24	Kecamatan Bogor Selatan	40.210.000,00	40.210.000,00	-	0,00
25	Kecamatan Bogor Timur	148.950.000,00	148.950.000,00	-	0,00
26	Kecamatan Bogor Tengah	-	-	-	0,00
27	Kecamatan Bogor Barat	-	-	-	0,00
28	Kecamatan Bogor Utara	-	-	-	0,00
29	Kecamatan Tanah Sareal	-	-	-	0,00
30	Inspektorat	99.000.000,00	99.000.000,00	-	0,00
31	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	197.657.500,00	197.657.500,00	-	0,00
32	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1.728.159.112,00	1.728.159.112,00	-	0,00
33	Badan Pendapatan Daerah	1.245.281.571,00	1.245.281.571,00	-	0,00
34	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	510.319.500,00	510.319.500,00	-	0,00
35	PPKD	-	-	-	0,00
36	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	-	-	-	0,00
Jumlah		17.931.181.742,80	16.970.742.403,80	960.439.339,00	5,66

Tabel 5.3.117

Mutasi Aset Lain-lain

URAIAN	JUMLAH (Rp)
Saldo per 31 Desember 2024	187.940.474.139,24
Mutasi Tambah:	
Mutasi/Alih Status Penggunaan Antar Perangkat Daerah (Hasil Tahun berjalan)	239.770.981,50
Reklasifikasi dari aset lainnya (Tahun berjalan) :	
- Reklasifikasi dari Aset Rusak Berat	27.000.648.320,50
- Reklasifikasi dari Aset Lain-Lain (Penelusuran)	416.319.743,42
Reklasifikasi Kondisi BMD (Tahun berjalan)	850.353.448,43
Jumlah Mutasi Tambah	28.507.092.493,85
Mutasi Kurang :	
Mutasi/Alih Status Penggunaan Antar Perangkat Daerah (Hasil Tahun berjalan)	239.770.981,50
Reklasifikasi menjadi aset lainnya (Tahun berjalan) :	
- Reklasifikasi menjadi Aset Rusak Berat	984.201.393,00
- Reklasifikasi menjadi Aset Lain-Lain (Penelusuran)	1.329.199.599,39
Penghapusan BMD (Tahun berjalan)	16.013.393.517,47
Reklasifikasi Kondisi BMD (Tahun berjalan)	186.862.000,00
Jumlah Mutasi Kurang	18.753.427.491,36
Total Mutasi 2025	9.753.665.002,49

URAIAN	JUMLAH (Rp)
Saldo per 31 Desember 2025	197.694.139.141,73
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	(143.898.151.723,71)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	53.795.987.418,02

Nilai Aset Tetap berupa Aset lain-lain mengalami kenaikan sebesar Rp9.753.665.002,49 perubahan berupa penambahan sebesar Rp28.507.092.493,85 dan pengurangan sebesar Rp18.753.427.491,36 sebagaimana terlampir.

(Rincian penambahan dan pengurangan nilai aset rusak berat dan aset lain-lain lainnya disajikan pada Lampiran 19 dan 20)

5.3.1.5.6 Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud

Saldo akumulasi amortisasi aset tak berwujud per 31 Desember 2025 sebesar Rp17.295.915.993,55 naik sebesar Rp802.800.967,75 atau 4,87% dibanding saldo 2024 sebesar Rp16.493.115.025,80. Adapun rincian Aset lain-lain sebesar Rp17.295.915.993,55 sebagai berikut:

Tabel 5.3.118
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud

No.	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Aset Tidak Berwujud	(17.295.915.993,55)	(16.493.115.025,80)	(802.800.967,75)	4,87
	Jumlah	(17.295.915.993,55)	(16.493.115.025,80)	(802.800.967,75)	4,87

Tabel 5.3.119
Mutasi Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud

URAIAN	JUMLAH (Rp)
Saldo per 31 Desember 2024	16.493.115.025,80
Mutasi Tambah:	
Beban amortisasi Aset Tidak Berwujud	802.800.967,75
Jumlah Mutasi Tambah	802.800.967,75
Mutasi Kurang :	
Koreksi Akumulasi Amortisasi karena pengurangan Aset Tidak Berwujud	-
Jumlah Mutasi Kurang	-
Total Mutasi 2025	802.800.967,75
Saldo per 31 Desember 2025	17.295.915.993,55

Nilai Amortisasi mengalami peningkatan sebesar Rp802.800.967,75 perubahan berupa penambahan dan pengurangan ini sebagaimana terlampir.

(Rincian penambahan dan pengurangan nilai amortisasi disajikan pada Lampiran 21)

5.3.1.5.7 Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain

Saldo akumulasi aset lainnya (aset rusak berat dan aset lain-lainnya) per 31 Desember 2025 sebesar Rp143.898.151.723,71 naik sebesar Rp12.578.109.716,68 atau 9,58% dibanding saldo 2024 sebesar Rp131.320.042.007,03. Adapun rincian akumulasi aset lainnya sebesar Rp143.898.151.723,71 sebagai berikut:

Tabel 5.3.120
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

No.	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Aset Lainnya (Rusak Berat dan Aset Lain-Lain Lainnya)	(143.898.151.723,71)	(131.320.042.007,03)	(12.578.109.716,68)	9,58
	Jumlah	(143.898.151.723,71)	(131.320.042.007,03)	(12.578.109.716,68)	9,58

Nilai Aset Tetap Berupa Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain mengalami peningkatan sebesar Rp12.578.109.716,68 perubahan berupa penambahan dan pengurangan ini sebagaimana terlampir.

(Rincian penambahan dan pengurangan nilai amortisasi disajikan pada Lampiran 22)

5.3.1.5.8 Dana *Transfer Treasury Deposit Facility* (TDF)

Saldo Dana Transfer Treasury Deposit Facility tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp0,00 dan Rp7.169.764.000,00 yang merupakan Dana Bagi Hasil yang disalurkan ke rekening Treasury Deposit Facility dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.121
Dana Transfer Treasury Deposit Facility

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Saldo awal TDF	7.169.764.000,00	23.768.880.000,00
2	Penambahan	0,00	7.169.764.000,00
3	Pengurangan	7.169.764.000,00	23.768.880.000,00
4	Saldo Akhir TDF	0,00	7.169.764.000,00

5.3.1.6 Properti Investasi

Sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Berbasis Akrua Nomor 17 tentang Properti Investasi dan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:

1. digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
2. dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Properti investasi menghasilkan arus kas yang sebagian besar tidak bergantung pada aset lain yang dikuasai oleh entitas. Hal ini membedakan properti investasi dari properti yang digunakan sendiri (aset tetap).

Termasuk dalam kategori properti investasi antara lain:

1. Tanah yang dikuasai dan/atau dikuasai dalam jangka panjang dengan tujuan untuk memperoleh kenaikan nilai dan bukan untuk dijual atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
2. Tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki namun belum ditentukan penggunaannya dimasa depan untuk digunakan sendiri atau dijual dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah lain dalam jangka pendek, tanah tersebut diakui sebagai tanah yang dimiliki dalam rangka peningkatan nilai.
3. Bangunan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi.
4. Bangunan yang belum terpakai yang dikuasai dan/atau dimiliki pemerintah daerah tetapi tersedia untuk disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi.
5. Properti dalam proses pembangunan atau pengembangan yang dimasa depan digunakan sebagai properti investasi.

Tidak termasuk dan bukan merupakan bagian dari definisi properti investasi aset-aset sebagai berikut:

1. Properti yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau sedang dalam proses pembangunan dan/atau pengembangan untuk

dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

2. Properti yang masih dalam proses pembangunan dan/atau pengembangan atas nama pihak ketiga.
3. Properti yang digunakan sendiri termasuk diantaranya properti yang dikuasai untuk digunakan dimasa depan sebagai properti yang digunakan sendiri.
4. Properti yang disewakan kepada entitas lain dengan cara sewa pembiayaan.
5. Properti yang dimiliki dalam rangka bantuan sosial yang menghasilkan tingkat pendapatan sewa dibawah harga pasar, misalnya pemerintah daerah membangun apartemen atau rumah susun yang disediakan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan mengenakan sewa dibawah harga pasar.
6. Properti yang digunakan untuk kegiatan operasional namun sesekali disewakan kepada pihak lain.

Properti investasi diakui sebagai aset jika:

1. Besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke entitas di masa yang akan datang dari aset properti investasi; dan
2. Biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal.

Dalam menentukan suatu properti investasi memenuhi kriteria pertama pengakuan, entitas perlu menilai tingkat kepastian yang melekat atas aliran manfaat ekonomi masa depan berdasarkan bukti yang tersedia pada waktu pengakuan awal. Kepastian bahwa entitas akan menerima manfaat ekonomi yang melekat dan risiko yang terkait dengan properti investasi tersebut.

Kriteria kedua pengakuan properti investasi biasanya telah terpenuhi dari bukti perolehan aset properti investasi tersebut. Apabila suatu properti investasi diperoleh bukan dari pembelian maka nilai perolehannya disajikan sebesar nilai wajar pada tanggal/saat perolehan.

Pada Tahun Anggaran 2025 senilai Rp148.301.209.862,00 menjadi potensi properti investasi tanah dan gedung bangunan Pemerintah Kota Bogor. Sebanyak 50 bidang tanah dan/atau bangunan tersebut dengan total nilai perolehan Rp114.965.741.776,00 rincian nilai pada properti investasi tanah serta properti investasi gedung dan bangunan sebagaimana terlampir.

(Rincian penambahan dan pengurangan nilai properti investasi tanah dan gedung bangunan disajikan pada Lampiran 23 dan 24)

5.3.1.6.1 Properti Investasi Tanah

Saldo Properti Investasi berupa Tanah Pemerintah Kota Bogor per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp110.557.255.373,00 dan Rp213.767.403.459,00 mengalami penurunan sebesar Rp103.210.148.086,00 atau 48,28%. Tanah bangunan yang termasuk dalam kategori properti investasi diantaranya yaitu:

- Tanah yang dikuasai dan/atau dikuasai dalam jangka panjang dengan tujuan untuk memperoleh kenaikan nilai dan bukan untuk dijual atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- Tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki namun belum ditentukan penggunaannya dimasa depan untuk digunakan sendiri atau dijual dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah lain dalam jangka pendek, tanah tersebut diakui sebagai tanah yang dimiliki dalam rangka peningkatan nilai.

Berikut aset properti investasi gedung bangunan Per Perangkat Daerah pada periode Tahun Anggaran 2025.

Tabel 5.3.122
Rincian Properti Investasi Tanah OPD

No.	SKPD	Jumlah	Harga
1	17.00.000 - DINAS PERHUBUNGAN	1	599.985.000,00
2	17.00.000 - DINAS PERHUBUNGAN	1	1.072.773.190,00
3	19.00.000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	1	8.800.750.000,00
4	24.00.000 - DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	1	334.162.830,00
5	38.05.000 - PEJABAT PENGELOLA KEUANGANDAERAH	1	7.799.600.000,00
6	38.05.000 - PEJABAT PENGELOLA KEUANGANDAERAH	1	8.325.600.000,00
7	38.05.000 - PEJABAT PENGELOLA KEUANGANDAERAH	1	1.200.000.000,00
8	38.05.000 - PEJABAT PENGELOLA KEUANGANDAERAH	1	1.858.000.500,00
9	38.05.000 - PEJABAT PENGELOLA KEUANGANDAERAH	1	636.552.000,00
10	38.05.000 - PEJABAT PENGELOLA KEUANGANDAERAH	1	3.115.000.000,00
11	38.05.000 - PEJABAT PENGELOLA KEUANGANDAERAH	1	8.424.000.000,00
12	38.05.000 - PEJABAT PENGELOLA KEUANGANDAERAH	1	1.326.066.000,00
13	38.05.000 - PEJABAT PENGELOLA KEUANGANDAERAH	1	1.183.896.000,00
14	38.05.000 - PEJABAT PENGELOLA KEUANGANDAERAH	1	2.439.000.000,00
15	38.05.000 - PEJABAT PENGELOLA KEUANGANDAERAH	1	6.484.480.000,00
16	38.05.000 - PEJABAT PENGELOLA KEUANGANDAERAH	1	10.292.904.000,00
17	38.05.000 - PEJABAT PENGELOLA KEUANGANDAERAH	1	17.668.101.000,00
18	38.05.000 - PEJABAT PENGELOLA KEUANGANDAERAH	1	7.000.000.000,00
19	38.05.000 - PEJABAT PENGELOLA KEUANGANDAERAH	1	3.343.137.000,00
20	38.05.000 - PEJABAT PENGELOLA KEUANGANDAERAH	1	7.348.765.930,00
21	38.05.000 - PEJABAT PENGELOLA KEUANGANDAERAH	1	357.424.970,00
22	38.05.000 - PEJABAT PENGELOLA KEUANGANDAERAH	1	1.415.700.000,00
23	38.05.000 - PEJABAT PENGELOLA KEUANGANDAERAH	1	2.493.000.000,00
24	38.05.000 - PEJABAT PENGELOLA KEUANGANDAERAH	1	2.042.883.506,00
25	38.05.000 - PEJABAT PENGELOLA KEUANGANDAERAH	1	9.717.733.377,00
26	38.05.000 - PEJABAT PENGELOLA KEUANGANDAERAH	1	2.351.756.810,00
27	38.05.000 - PEJABAT PENGELOLA KEUANGANDAERAH	1	2.340.000.000,00
28	38.05.000 - PEJABAT PENGELOLA KEUANGANDAERAH	1	490.448.000,00
29	38.05.000 - PEJABAT PENGELOLA KEUANGANDAERAH	1	368.160.000,00
30	38.05.000 - PEJABAT PENGELOLA KEUANGANDAERAH	1	1.030.000.000,00
31	38.05.000 - PEJABAT PENGELOLA KEUANGANDAERAH	1	517.600.000,00
32	38.05.000 - PEJABAT PENGELOLA KEUANGANDAERAH	1	1.078.200.000,00
33	38.05.000 - PEJABAT PENGELOLA KEUANGANDAERAH	1	1.286.500.000,00
34	38.05.000 - PEJABAT PENGELOLA KEUANGANDAERAH	1	621.892.650,00
35	38.05.000 - PEJABAT PENGELOLA KEUANGANDAERAH	1	46.492.000,00
36	38.05.000 - PEJABAT PENGELOLA KEUANGANDAERAH	1	164.500.000,00
37	38.05.000 - PEJABAT PENGELOLA KEUANGANDAERAH	1	120.499.632,00
38	38.05.000 - PEJABAT PENGELOLA KEUANGANDAERAH	1	102.900.000,00
39	38.05.000 - PEJABAT PENGELOLA KEUANGANDAERAH	1	261.910.600,00
40	38.05.000 - PEJABAT PENGELOLA KEUANGANDAERAH	1	1.163.245.000,00
41	38.05.000 - PEJABAT PENGELOLA KEUANGANDAERAH	1	188.888,00
42	38.05.000 - PEJABAT PENGELOLA KEUANGANDAERAH	1	2.638.991.325,00
43	38.05.000 - PEJABAT PENGELOLA KEUANGANDAERAH	1	5.129.019.140,00
44	38.05.000 - PEJABAT PENGELOLA KEUANGANDAERAH	1	350.982.000,00
45	38.05.000 - PEJABAT PENGELOLA KEUANGANDAERAH	1	93.717.939,00
46	38.05.000 - PEJABAT PENGELOLA KEUANGANDAERAH	1	44.000.000,00
47	38.05.000 - PEJABAT PENGELOLA KEUANGANDAERAH	1	2.686.086,00

5.3.1.6.2 Properti Investasi Gedung dan Bangunan

Saldo Properti Investasi berupa Gedung dan Bangunan Pemerintah Kota Bogor per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp4.408.486.403,00 dan Rp 4.408.486.403,00 tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya.

Gedung bangunan yang termasuk dalam kategori properti investasi diantaranya yaitu:

- Bangunan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi.
- Bangunan yang belum terpakai yang dikuasai dan/atau dimiliki pemerintah

daerah tetapi tersedia untuk disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi.

- Properti dalam proses pembangunan atau pengembangan yang dimasa depan digunakan sebagai properti investasi

Berikut aset properti investasi gedung bangunan Per Perangkat Daerah pada periode Tahun Anggaran 2025 dan 2024.

Tabel 5.3.123
Rincian Properti Investasi Gedung Bangunan OPD

No.	SKPD	Jenis Barang/ Nama Barang	Kode Barang	Jumlah	Harga	Penyusutan	Akumulasi
1	19.00.000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	Lain-Lain Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	1.3.3.01.01.12.004	1	3.845.478.403,00	70.806.727,60	800.789.116,12
2	38.05.000 - PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1.3.3.01.01.01.001	1	563.008.000,00	11.260.160,00	258.983.680,00

5.3.1.6.3 Akumulasi Penyusutan Properti Investasi

Saldo akumulasi penyusutan properti investasi (per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.059.772.796,12 naik sebesar Rp82.066.887,60 atau 8,39% dibanding saldo 2024 sebesar Rp977.705.908,52. Adapun rincian akumulasi properti investasi sebesar Rp1.059.772.796,12.

Penambahan akumulasi penyusutan properti investasi tahun 2025 senilai Rp82.066.887,60 terdiri dari :

- Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp70.806.727,60
- PPKD sebesar Rp11.260.160,00

Berikut daftar akumulasi penyusutan akumulasi property investasi pada tahun 2025 :

- Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp800.789.116,12
- PPKD sebesar Rp258.983.680,00

Tabel 5.3.124
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi

Uraian	Saldo Akhir	Akumulasi Penyusutan Rp	Nilai Buku	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4=2-3)	(5=4/2)
Properti Investasi - Tanah	135.483.205.373,00	-	135.483.205.373,00	100,00%
Properti Investasi - Gedung Bangunan	4.408.486.403,00	1.059.772.796,12	3.348.713.606,88	75,96%
Jumlah	139.891.691.776,00	1.059.772.796,12	138.831.918.979,88	99,24%

5.3.2 Kewajiban

Kewajiban merupakan salah satu pos yang termuat dalam Neraca Pemerintah Kota Bogor. Kewajiban Kota Bogor pada tahun 2025 sebesar Rp180.972.250.682,65 mengalami kenaikan sebesar Rp8.213.975.951,86 atau 4,75% dibanding dengan tahun 2024 sebesar Rp172.758.274.730,79.

Tabel 5.3.125
Kewajiban

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / (penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Kewajiban				
2	Kewajiban Jangka Pendek	128.587.308.039,65	110.091.452.175,79	18.495.855.863,86	16,80
3	Kewajiban Jangka Panjang	52.384.942.643,00	62.666.822.555,00	(10.281.879.912,00)	(16,41)
	Jumlah Kewajiban	180.972.250.682,65	172.758.274.730,79	8.213.975.951,86	4,75

5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 sebesar Rp128.588.308.039,65 mengalami kenaikan sebesar Rp18.495.855.863,86 atau 16,80% dari saldo 31 Desember 2024 sebesar Rp110.091.452.175,79 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.126
Kewajiban Jangka Pendek

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / (penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Kewajiban Jangka Pendek				
2	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	48.500.000,00	158.277.901,00	(109.777.901,00)	(69,36)
3	Utang Bunga	483.260.494,00	543.668.056,00	(60.407.562,00)	-
4	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	10.281.879.912,00	10.281.879.912,00	0,00	-
5	Pendapatan Diterima Dimuka	1.848.615.329,52	2.569.064.213,13	(720.448.883,61)	(28,04)
6	Utang Belanja	115.856.028.849,13	96.531.896.093,66	19.324.132.755,47	20,02
7	Utang Jangka Pendek Lainnya	69.023.455,00	6.666.000,00	62.357.455,00	935,46
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	128.587.308.039,65	110.091.452.175,79	18.495.855.863,86	16,80

5.3.2.1.1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Saldo utang perhitungan pihak ketiga (PFK) per 31 Desember 2025 sebesar Rp48.500.000,00 atau turun sebesar Rp109.777.901,00 atau 69,36% dibanding saldo 2024 sebesar Rp158.277.901,00. Adapun rincian utang perhitungan pihak ketiga sebagai berikut:

Tabel 5.3.127
Utang Perhitungan Pihak Ketiga

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / (penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)				
2	Utang PPN				
	- Rumah Sakit Umum Daerah - BLUD	0,00	8.777.901,00	(8.777.901,00)	-
	- Puskesmas Bogor Timur	0,00	0,00	0,00	-
3	Utang Jaminan Bongkar Reklame				
	- Badan Pendapatan Daerah	48.500.000,00	149.500.000,00	(101.000.000,00)	(67,56)
	Jumlah Utang PFK	48.500.000,00	158.277.901,00	(109.777.901,00)	(69,36)

(Rincian utang perhitungan pihak ketiga (PFK) disajikan pada lampiran 25 dan 26)

5.3.2.1.2 Utang Bunga

Saldo utang bunga per 31 Desember 2025 sebesar Rp483.260.494,00 sedangkan saldo 2024 sebesar Rp543.668.056,00. Adapun utang bunga merupakan utang bunga atas penerusan pinjaman jangka Panjang ke Lembaga Keuangan sesuai dengan Laporan Keuangan audited PDAM tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.128
Utang Bunga

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / (penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
	Utang Bunga				
1	Utang Bunga Penerusan Pinjaman Luar Negeri Negeri-Jangka Panjang	483.260.494,00	543.668.056,00	(60.407.562,00)	(11,11)
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	483.260.494,00	543.668.056,00	(60.407.562,00)	(11,11)

5.3.2.1.3 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Saldo bagian lancar utang jangka Panjang Pemerintah Kota Bogor per 31 Desember 2025 sebesar Rp10.281.879.912,00 tidak mengalami kenaikan atau penurunan dari saldo 31 Desember 2024 sebesar Rp10.281.879.912,00. Adapun rincian bagian lancar utang jangka Panjang sebagai berikut.

Tabel 5.3.129
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/(penurunan) (Rp) %	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang				
2	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang - Penerusan Pinjaman Luar Negeri - Jangka Panjang	5.484.766.176,00	5.484.766.176,00	0,00	0,00
3	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) - BUMD - Jangka Panjang	4.797.113.736,00	4.797.113.736,00	0,00	0,00
	Jumlah Bagian Lancar	10.281.879.912,00	10.281.879.912,00	0,00	0,00

Saldo bagian lancar utang jangka panjang per 31 Desember 2025 sebesar Rp10.281.879.912,00 terdiri dari bagian lancar utang atas penerusan pinjaman luar negeri berasal dari dana pinjaman sesuai Naskah Perjanjian Penerusan Pinjaman (NPPP) antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Kota Bogor Nomor: SLA-1226/DSMI/2009 tanggal 2 November 2009 tentang Dana Pinjaman dari *International Bank For Reconstruction and Development* No. 7730-10 Tanggal 1 September 2009 dalam rangka pembiayaan *Urban Water Supply and Sanitation Project* sebesar Rp5.484.766.176,00 dan bagian lancar utang jangka panjang kepada lembaga keuangan bukan bank sesuai dengan Risalah Rapat Rekonsiliasi Pinjaman Antara PT Sarana Mukti Infrastruktur (Persero) dengan Pemerintah Kota Bogor sebesar Rp4.797.879.912,00.

5.3.2.1.4 Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan diterima dimuka merupakan pos untuk mencatat pendapatan yang seharusnya belum diterima sampai dengan tanggal neraca tetapi sudah diterima didepan/dimuka, pada Tahun Anggaran 2025 ini terdapat pendapatan diterima dimuka total senilai Rp1.848.615.329,52 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.130
Pendapatan Diterima Dimuka

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / (penurunan) (Rp) %	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Pendapatan Diterima Dimuka				
2	Pendapatan Diterima Dimuka BLUD				
	- Rumah Sakit Umum Daerah - BLUD	1.671.547.171,52	2.312.520.955,64	(640.973.784,12)	(27,72)
3	Pendapatan Diterima Dimuka Retribusi Daerah				
	- Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu	0,00	256.543.257,49	(256.543.257,49)	(100,00)
	- Dinas Tenaga Kerja	177.068.158,00	0,00	177.068.158,00	-
	Jumlah Pendapatan diterima dimuka	1.848.615.329,52	2.569.064.213,13	(720.448.883,61)	(28,04)

(Rincian pendapatan diterima dimuka disajikan pada lampiran 27.1 dan 27.2)

5.3.2.1.5 Utang Belanja

Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2025 sebesar Rp115.856.028.849,13 atau naik sebesar Rp219.324.132.755,47 atau 20,02% dibanding saldo 2024 sebesar Rp96.531.896.093,66. Adapun rincian utang belanja sebagai berikut:

Tabel 5.3.131
Utang Belanja Per Objek

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / (penurunan) (Rp) %	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin				
2	Utang Belanja Pegawai	106.254.915,00	2.753.356.083,00	(2.647.101.168,00)	(96,14)
3	Utang Belanja Barang dan Jasa	115.368.605.935,13	92.069.170.089,66	23.299.435.845,47	25,31
4	Utang Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	-
5	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	381.167.999,00	1.709.369.921,00	(1.328.201.922,00)	(77,70)

6	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan (KDP)	0,00	0,00	0,00	-
7	Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	-
Jumlah Utang Belanja		115.856.028.849,13	96.531.896.093,66	19.324.132.755,47	20,02

(Rincian utang belanja per perangkat daerah disajikan pada lampiran pada lampiran 28.1 dan 28.2)

5.3.2.1.6 Utang Jangka Pendek Lainnya

Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2025 sebesar Rp69.023.455,00 yang merupakan setoran kelebihan pembayaran pendapatan diterima dimuka pada RSUD sedangkan Utang Belanja per 31 Desember 2024 sebesar Rp6.666.000,00 merupakan Utang Transfer Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi atas sisa dana Kegiatan Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2023 yang belum dikembalikan ke RKUD Provinsi. Adapun mutasi Utang Transfer Bantuan Keuangan Antar Daerah Provinsi sebagai berikut:

Tabel 5.3.132
Utang Jangka Pendek Lainnya

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / (penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
	Utang Jangka Pendek Lainnya				
1	Utang Transfer Bantuan Keuangan antar Daerah	0,00	6.666.000,00	(6.666.000,00)	(100,00)
2	Utang Jangka Pendek Lainnya	69.023.455,00	0,00	69.023.455,00	
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		69.023.455,00	6.666.000,00	62.357.455,00	935,46

5.3.2.2 Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2025 sebesar Rp52.384.942.643,00 mengalami penurunan sebesar Rp10.281.879.912,00 atau 16,41% dari saldo 31 Desember 2024 sebesar Rp62.666.822.555,00. Adapun rincian kewajiban jangka panjang sebagai berikut:

Tabel 5.3.133
Kewajiban Jangka Panjang

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / (penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Kewajiban Jangka Panjang				
2	Utang atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri				
	-Badan Keuangan dan Aset Daerah	38.393.363.243,00	43.878.129.419,00	(5.484.766.176,00)	(12,50)
3	Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) - BUMD				
	-Badan Keuangan dan Aset Daerah	13.991.579.400,00	18.788.693.136,00	(4.797.113.736,00)	(25,53)
Jumlah Utang		52.384.942.643,00	62.666.822.555,00	(10.281.879.912,00)	(16,41)

5.3.2.2.1 Utang atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri

Utang atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri berasal dari dana pinjaman sesuai Naskah Perjanjian Penerusan Pinjaman (NPPP) antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Kota Bogor Nomor: SLA-1226/DSMI/2009 tanggal 2 November 2009 tentang Dana Pinjaman dari *International Bank For Reconstruction and Development* No. 7730-10 Tanggal 1 September 2009 dalam rangka pembiayaan *Urban Water Supply and Sanitation Project*. Pemerintah Kota Bogor sebagai pihak yang menandatangani NPPP wajib menganggarkan didalam APBD Pembiayaan cicilan pinjaman yang terdiri dari atas pokok pinjaman dan bunga pinjaman, dengan mengakui adanya hutang jangka panjang terlebih dahulu. Adapun sumber dana untuk pembayaran cicilan hutang jangka panjang tersebut berasal dari PDAM Tirta Pakuan. Mekanisme penyeteroran uang pinjaman langsung dari Pusat ke PDAM dan tidak melalui rekening Kas Daerah.

Pembayaran utang pokok sesuai jadwal pembayaran dari bulan Nopember 2018 s.d. Nopember 2033 /tahunnya, sebesar Rp2.748.516.129,03 dan untuk bunganya baru dapat diketahui setelah Surat Tagihan Pembayaran Jatuh tempo dari Dirjen Perbendaharaan/ Kanwil Perbendaharaan.

Tabel 5.3.134
Utang atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri

Jenis Kewajiban	Saldo Awal (Rp)	Penambahan (Rp)	Pembayaran s/d tahun 2025 (Rp)	Saldo Akhir (Rp)	Bagian Lancar Kewajiban Jangka Panjang (Rp)	Saldo Akhir Kewajiban Jangka Panjang (Rp)
Utang Jangka Panjang atas Pinjaman World Bank No SLA-1226/DSMI/2009						
- 2017	85.013.875.740,00	0,00	0,00	85.013.875.740,00	0,00	85.013.875.740,00
- 2018		0,00	2.742.383.089,00	82.271.492.651,00	0,00	82.271.492.651,00
- 2019		0,00	5.484.766.176,00	76.786.726.475,00	5.484.766.177,00	71.301.960.298,00
- 2020		0,00	5.484.766.176,00	71.301.960.299,00	5.484.766.176,00	65.817.194.123,00
- 2021		0,00	5.484.766.176,00	65.817.194.123,00	5.484.766.176,00	60.332.427.947,00
- 2022		0,00	5.484.766.176,00	60.332.427.947,00	5.484.766.176,00	54.847.661.771,00
- 2023		0,00	5.484.766.176,00	54.847.661.771,00	5.484.766.176,00	49.362.895.595,00
- 2024		0,00	5.484.766.176,00	49.362.895.595,00	5.484.766.176,00	43.878.129.419,00
- 2025		0,00	5.484.766.176,00	43.878.129.419,00	5.484.766.176,00	38.393.363.243,00

5.3.2.2.2 Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) - BUMD

Utang kepada Lembaga keuangan bukan bank merupakan perjanjian pemberian pinjaman Nomor: 45 untuk membiayai kegiatan Peningkatan Jalan Suryakencana (Kawasan Suryakencana).

Pembayaran pokok dilakukan dengan cara pemotongan langsung terhadap penyaluran Dana Transfer Umum (DTU) yang mengacu kepada perjanjian pengelolaan pinjaman. Besaran DTU dapat diperhitungkan sesuai dengan hasil rekonsiliasi antara pihak pertama dengan DJPK. Besarnya angsuran pokok setiap bulan sebesar 1/12 dari nilai DTU yang dapat diperhitungkan di tahun berkenaan yang dibayarkan setiap akhir bulan setelah masa tenggang terakhir.

Utang atas penerusan pinjaman luar negeri per 31 Desember 2025 sebesar Rp13.991.579.400,00 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp18.788.693.136,00. Adapun mutasi utang atas penerusan pinjaman luar negeri tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 5.3.135
Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) - BUMD

No	Uraian	2025	2024
1	Saldo Awal	18.788.693.136,00	23.585.806.872,00
2	Penambahan		
3	Pengurangan	-	-
4	Saldo Akhir	18.788.693.136,00	23.585.806.872,00
5	- Reklasifikasi ke Bagian Lancar Kewajiban Jangka Panjang	4.797.113.736,00	4.797.113.736,00
6	Saldo Akhir	13.991.579.400,00	18.788.693.136,00

5.3.3 Ekuitas

Saldo Ekuitas Pemerintah Kota Bogor per 31 Desember 2025 sebesar Rp10.920.910.429.087,10 mengalami penurunan sebesar Rp51.524.413.560,13 atau sebesar 0,47% dibanding saldo 31 Desember 2024 sebesar Rp10.869.386.015.526,97. Adapun rincian ekuitas sebagai berikut:

Tabel 5.3.136
Ekuitas

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / (penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Ekuitas				
2	Ekuitas Awal	10.869.386.015.526,97	10.613.114.672.934,97	256.271.342.592,00	2,41
3	Surplus / Defisit - LO	79.421.021.198,88	73.065.023.893,87	6.355.997.305,01	8,70
4	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	(27.896.607.638,75)	183.206.318.698,13	(211.102.926.336,88)	(115,23)
5	Ekuitas Akhir	10.920.910.429.087,10	10.869.386.015.526,97	51.524.413.560,13	(0,47)

5.4 PENJELASAN ATAS POS - POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam satu periode pelaporan.

Laporan Operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (full accrual accounting cycle) sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari Pendapatan-LO, Beban, Transfer, dan Pos - Pos Luar Biasa.

Laporan Operasional Pemerintah Kota Bogor diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

5.4.1 Pendapatan Daerah - LO

Pendapatan LO adalah pendapatan yang menjadi hak Pemerintah Kota Bogor dan telah diklasifikasikan menurut asal dan jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan LO pada Tahun Anggaran 2025 dan 2024 masing masing dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.1
Pendapatan Daerah LO TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1.752.556.128.106,24	1.613.207.035.756,08	139.349.092.350,16	8,64
2	Pendapatan Transfer	1.633.233.358.434,00	1.701.821.239.565,00	(68.587.881.131,00)	(4,03)
3	Lain - Lain Pendapatan yang Sah	48.555.007.254,51	42.961.879.333,77	5.593.127.920,74	13,02
	Jumlah	3.434.344.493.794,75	3.357.990.154.654,85	76.354.339.139,90	(2,27)

Tabel di atas menunjukkan Pendapatan Daerah - LO TA 2025 sebesar Rp3.434.344.493.794,75 mengalami peningkatan sebesar Rp76.354.339.139,90 atau 2,27% dibandingkan Pendapatan - LO TA 2024 sebesar Rp3.357.990.154.654,85.

5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO

Akun ini menggambarkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Laporan Operasional untuk periode TA 2025 dan 2024, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.4.2
Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Pajak Daerah	1.216.051.506.304,00	1.250.071.165.195,00	(34.019.658.891,00)	(2,72)
2	Retribusi Daerah	425.526.925.108,63	429.458.652.647,18	(3.931.727.538,55)	(0,92)
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	65.318.785.141,61	75.711.032.790,57	(10.392.247.648,96)	(13,73)
4	Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah	45.658.911.552,00	35.444.436.153,33	10.214.475.398,67	28,82
	Jumlah	1.752.556.128.106,24	1.790.685.286.786,08	(38.129.158.679,84)	(2,13)

Tabel di atas menunjukkan Pendapatan Asli Daerah - LO TA 2025 sebesar Rp1.752.556.128.106,24 mengalami penurunan sebesar Rp38.129.158.679,84 atau 2,13% dari Pendapatan - LO TA 2024 sebesar Rp1.790.685.286.786,08.

Rincian masing-masing Pendapatan Asli Daerah dijelaskan sebagai berikut;

5.4.1.1.1 Pajak Daerah - LO

Pajak Daerah - LO adalah Pendapatan Asli Daerah yang dipungut dan dikelola Pemerintah Kota Bogor, pendapatan pajak pada Laporan Operasional disajikan dengan basis akrual, pengakuan pendapatan terjadi pada saat timbulnya hak atas pendapatan pada tahun

2025, sehingga nilai pendapatan Pajak Daerah pada Laporan Operasional adalah sebesar ketetapan yang ditetapkan

pada tahun 2025 dan bukan merupakan pembayaran atas piutang tahun sebelumnya ditambah dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang ditetapkan tahun 2025, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.4.3
Pajak Daerah - LO TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Pajak Reklame	10.430.253.196,00	10.128.298.469,00	301.954.727,00	2,98
2	Pajak Air Tanah	1.876.613.102,00	2.014.470.394,00	(137.857.292,00)	(6,84)
3	PBB P2	316.516.433.242,00	296.832.276.011,00	19.684.157.231,00	6,63
4	BPHTB	217.462.373.044,00	286.456.268.450,00	(68.993.895.406,00)	(24,09)
5	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	467.014.804.870,00	477.161.600.841,00	(10.146.795.971,00)	(2,13)
6	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	135.150.286.950,00	108.974.953.470,00	26.175.333.480,00	24,02
7	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	67.600.741.900,00	68.503.297.560,00	(902.555.660,00)	(1,32)
Jumlah		1.216.051.506.304,00	1.250.071.165.195,00	(34.019.658.891,00)	(2,72)

Tabel di atas menunjukkan PAD Pajak Daerah - LO TA 2025 sebesar Rp1.216.051.506.304,00 mengalami penurunan sebesar Rp34.019.658.891,00 atau 2,72% dari PAD Pajak Daerah - LO TA 2024 sebesar Rp1.250.071.165.195,00.

Berikut rincian PAD - Pajak Daerah per Perangkat Daerah disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.4
Rincian PAD - Pajak Daerah - LO Per Perangkat Daerah TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
	BADAN PENDAPATAN DAERAH				
1	Pajak Reklame	10.430.253.196,00	10.128.298.469,00	301.954.727,00	2,98
2	Pajak Air Tanah	1.876.613.102,00	2.014.470.394,00	(137.857.292,00)	(6,84)
3	PBB P2	316.516.433.242,00	296.832.276.011,00	19.684.157.231,00	6,63
4	BPHTB	217.462.373.044,00	286.456.268.450,00	(68.993.895.406,00)	(24,09)
5	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)				
	- PBJT-Makanan dan/atau Minuman	227.723.890.264,00	214.101.747.593,00	13.622.142.671,00	6,36
	- PBJT-Tenaga Listrik	101.043.228.390,00	95.818.548.299,00	5.224.680.091,00	5,45
	- PBJT-Jasa Perhotelan	102.322.732.079,00	128.990.798.187,00	(26.668.066.108,00)	(20,67)
	- PBJT-Jasa Parkir	8.276.286.171,00	7.965.418.166,00	310.868.005,00	3,90
	- PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	27.648.667.966,00	30.285.088.596,00	(2.636.420.630,00)	(8,71)
6	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	135.150.286.950,00	108.974.953.470,00	26.175.333.480,00	24,02
7	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	67.600.741.900,00	68.503.297.560,00	(902.555.660,00)	(1,32)
Jumlah		1.216.051.506.304,00	1.250.071.165.195,00	(34.019.658.891,00)	(2,72)

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pajak Barang dan Jasa Tertentu terdiri atas :

1. Makanan dan/atau Minuman
2. Tenaga Listrik
3. Jasa Perhotelan
4. Jasa Parkir
5. Jasa Kesenian dan Hiburan

Adapun perbandingan nilai PAD - Pajak Daerah antara LO dan LRA TA 2025 yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.5
Perbandingan Nilai PAD - Pajak Daerah pada LO dan LRA TA 2025

No	Uraian	LO	LRA	Perbedaan/Selisih
1	Pajak Reklame	10.430.253.196,00	10.345.055.499,00	85.197.697,00
2	Pajak Air Tanah	1.876.613.102,00	1.833.350.454,00	43.262.648,00
3	PBB P2	316.516.433.242,00	232.621.103.275,00	83.895.329.967,00
4	BPHTB	217.462.373.044,00	217.482.762.394,00	(20.389.350,00)
5	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	467.014.804.870,00	464.057.995.241,00	2.956.809.629,00
6	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	135.150.286.950,00	135.150.286.950,00	-
7	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	67.600.741.900,00	67.600.741.900,00	-
Jumlah		1.216.051.506.304,00	1.129.091.295.713,00	86.960.210.591,00

Selisih/perbedaan PAD - Pajak Daerah antara LO dan LRA sebesar Rp86.960.210.591,00 terdiri atas:

Tabel 5.4.6
Rincian Selisih Nilai PAD - Pajak Daerah pada LO dan LRA TA 2025

URAIAN	JUMLAH (Rp)
Saldo Pajak Daerah - LO	1.216.051.506.304,00
Mutasi Tambah:	
Pembayaran piutang Pajak Reklame tahun sebelumnya	740.573.984,00
Pembayaran piutang Pajak Air Tanah tahun sebelumnya	142.729.392,00
Pembayaran piutang PBB tahun sebelumnya	37.751.876.111,00
Pembayaran piutang BPHTB tahun sebelumnya	99.567.550,00
Pembayaran piutang PBJT tahun sebelumnya	12.353.517.297,00
Jumlah Mutasi Tambah	51.088.264.334,00
Mutasi Kurang :	
Piutang Pajak Reklame tahun 2025	825.771.681,00
Piutang Pajak Air Tanah tahun 2025	185.992.040,00
Piutang Pajak PBB tahun 2025	121.647.206.078,00
Piutang BPHTB tahun 2025	79.178.200,00
Piutang PBJT tahun 2025	15.310.326.926,00
Jumlah Mutasi Kurang	138.048.474.925,00
Saldo Pajak Daerah - LRA	1.129.091.295.713,00

5.4.1.1.2 Retribusi Daerah - LO

Retribusi Daerah - LO dipungut oleh beberapa Perangkat Daerah penghasil retribusi yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Bogor. Pendapatan Retribusi Daerah terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh Pemerintah Kota Bogor. Pemungutan Retribusi Daerah Kota Bogor didasarkan atas Perda tentang Retribusi Daerah. Pendapatan Retribusi Daerah pada Tahun 2025, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.4.7
Pendapatan Retribusi Daerah TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Retribusi Jasa Umum	405.333.635.548,14	412.636.564.581,05	(7.302.929.032,91)	(1,77)
2	Retribusi Jasa Usaha	7.906.189.712,00	8.734.683.322,00	(828.493.610,00)	(9,49)
3	Retribusi Perizinan Tertentu	12.287.099.848,49	8.087.404.744,13	4.199.695.104,36	51,93
	Jumlah	425.526.925.108,63	429.458.652.647,18	(3.931.727.538,55)	(0,92)

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan Pendapatan Retribusi Daerah - LO TA 2025 sebesar Rp425.526.925.108,63 mengalami penurunan sebesar Rp3.931.727.538,55 atau 0,92% dari PAD Retribusi Daerah - LO TA 2024 sebesar Rp429.458.652.647,18.

Adapun perbandingan nilai PAD - Retribusi Daerah antara LO dan LRA TA 2025 yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.8.
Perbandingan Nilai PAD - Retribusi Daerah pada LO dan LRA TA 2025

No	Uraian	LO	LRA	Perbedaan/Selisih
1	Retribusi Jasa Umum	405.333.635.548,14	433.149.802.834,02	(27.816.167.285,88)
2	Retribusi Jasa Usaha	7.906.189.712,00	7.586.176.146,00	320.013.566,00
3	Retribusi Perizinan Tertentu	12.287.099.848,49	12.252.017.073,00	35.082.775,49
	Jumlah	425.526.925.108,63	452.987.996.053,02	(27.461.070.944,39)

Selisih/perbedaan PAD - Retribusi Daerah antara LO dan LRA sebesar (Rp27.461.070.944,39) terdiri atas:

Tabel 5.4.9
Rincian Selisih Nilai PAD - Retribusi Daerah pada LO dan LRA TA 2025

URAIAN	JUMLAH (Rp)
Saldo Retribusi Daerah - LO	425.526.925.108,63
Mutasi Tambah:	
Pembayaran piutang tahun sebelumnya Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah	69.672.082.592,00
Pembayaran piutang tahun sebelumnya Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada Dinas Perumahan dan Permukiman	402.415.000,00
Pembayaran piutang tahun sebelumnya Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah	103.428.814,00
Pembayaran piutang tahun sebelumnya Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	243.351.339,00
Pendapatan diterima di Muka Tahun 2025 pada Dinas Tenaga Kerja	177.068.158,00
Jumlah Mutasi Tambah	70.598.345.903,00
Mutasi Kurang :	
Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah tahun 2025	41.376.539.687,00
Penerimaan pendapatan atas pendapatan diterima dimuka pada Rumah Sakit Umum Daerah	479.375.619,12
Piutang Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada Dinas Perumahan dan Permukiman tahun 2025	478.020.000,00
Piutang Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2025	347.837.380,00
Penerimaan pendapatan atas pendapatan diterima dimuka pada Dinas Tenaga Kerja	256.543.257,49
Piutang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	198.959.015,00
Jumlah Mutasi Kurang	43.137.274.958,61
Saldo Pajak Daerah - LRA	452.987.996.053,02

5.4.1.1.2.1 Retribusi Jasa Umum - LO

Retribusi Jasa Umum - LO merupakan sumber PAD yang berhubungan langsung dengan pelayanan umum pemerintah Kota Bogor. Rincian Retribusi Jasa Umum pada tabel berikut.

Tabel 5.4.10
Pendapatan Retribusi Jasa Umum TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Pelayanan Kesehatan	386.273.507.248,14	394.860.277.019,05	(8.586.769.770,91)	(2,17)
2	Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	3.090.375.000,00	2.753.673.000,00	336.702.000,00	12,23
3	Pelayanan Persampahan/Kebersihan	15.969.753.300,00	14.682.315.717,00	1.287.437.583,00	8,77
4	Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	-	39.171.500,00	(39.171.500,00)	(100,00)
5	Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	-	246.100.000,00	(246.100.000,00)	(100,00)
6	Pengolahan Limbah Cair	-	55.027.345,00	(55.027.345,00)	(100,00)
	Jumlah	405.333.635.548,14	412.636.564.581,05	(7.302.929.032,91)	(1,77)

Tabel di atas menunjukkan Pendapatan Retribusi Jasa Umum - LO TA 2025 sebesar Rp405.333.635.548,14 mengalami penurunan sebesar Rp7.302.929.032,91 atau 1,77% dari PAD Retribusi Jasa Umum - LO TA 2024 sebesar Rp412.636.564.581,05.

Rincian Pendapatan Retribusi Jasa Umum pada masing-masing Perangkat Daerah Kota Bogor Per 31 Desember 2025 dan 2024 dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.11
Pendapatan Retribusi Jasa Umum per OPD TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	DINAS KESEHATAN (semua sub unit)				
	Pelayanan Kesehatan	386.273.507.248,14	394.860.277.019,05		
	Jumlah	386.273.507.248,14	394.860.277.019,05	(8.586.769.770,91)	(2,17)
2	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
	Retribusi Pelayanan Kebersihan	297.357.300,00	-		
	Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	-	246.100.000,00		
	Pengolahan Limbah Cair	-	55.027.345,00		
	Jumlah	297.357.300,00	301.127.345,00	(3.770.045,00)	(1,25)
3	DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN				
	Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	-	39.171.500,00		
	Jumlah	-	39.171.500,00	(39.171.500,00)	(100,00)
4	DINAS LINGKUNGAN HIDUP				
	Retribusi Pelayanan Kebersihan	15.672.396.000,00	14.682.315.717,00		
	Jumlah	15.672.396.000,00	14.682.315.717,00	990.080.283,00	6,74
5	DINAS PERHUBUNGAN				
	Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	3.090.375.000,00	2.753.673.000,00		
	Jumlah	3.090.375.000,00	2.753.673.000,00	336.702.000,00	12,23
	TOTAL	405.333.635.548,14	412.636.564.581,05	(7.302.929.032,91)	(1,77)

5.4.1.1.2.2 Retribusi Jasa Usaha - LO

Retribusi Jasa Usaha - LO merupakan sumber PAD yang berhubungan dengan pemakaian aset daerah Kota Bogor. Rincian Retribusi Jasa Usaha pada tabel berikut.

Tabel 5.4.12
Pendapatan Retribusi Jasa Usaha TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	50.745.000,00	54.970.000,00	(4.225.000,00)	(7,69)
2	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan Ternak	959.534.640,00	813.828.000,00	145.706.640,00	17,90
3	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata & Olahraga	1.020.025.000,00	1.663.732.000,00	(643.707.000,00)	(38,69)
4	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	5.875.885.072,00	6.202.153.322,00	(326.268.250,00)	(5,26)
	Jumlah	7.906.189.712,00	8.734.683.322,00	(828.493.610,00)	(9,49)

Tabel di atas menunjukkan Retribusi Jasa Usaha - LO TA 2025 sebesar Rp7.906.189.712,00 mengalami penurunan sebesar Rp828.493.610,00 atau 9,49% dari PAD Retribusi Jasa Usaha - LO TA 2024 sebesar Rp8.734.683.322,00. Rincian Pendapatan Retribusi Jasa Usaha pada masing-masing Perangkat Daerah Kota Bogor Per 31 Desember 2025 dan 2024 dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.13
Rincian Pendapatan Retribusi Jasa Usaha per Perangkat Daerah TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN				
	Pemanfaatan Aset daerah	2.112.725.000,00	2.068.270.000,00		
	Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	112.110.000,00	110.430.000,00		
	Jumlah	2.224.835.000,00	2.178.700.000,00	46.135.000,00	2,12
2	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
	Pemanfaatan Aset daerah	84.000.000,00	151.750.000,00		
	Jumlah	84.000.000,00	151.750.000,00	(67.750.000,00)	(44,65)
3	DINAS PERHUBUNGAN				
	Tempat Khusus Parkir di luar Badan Jalan	50.745.000,00	54.970.000,00		
	Jumlah	50.745.000,00	54.970.000,00	(4.225.000,00)	(7,69)
4	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN				
	Rumah Potong Hewan	959.534.640,00	813.828.000,00		
	Jumlah	959.534.640,00	813.828.000,00	145.706.640,00	17,90
5	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN				
	Pemanfaatan Aset daerah	6.500.000,00	54.000.000,00		
	Jumlah	6.500.000,00	54.000.000,00	(47.500.000,00)	(87,96)
6	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH				
	Pemanfaatan Aset daerah	3.090.314.072,00	3.291.148.384,00		
	Jumlah	3.090.314.072,00	3.291.148.384,00	(200.834.312,00)	(6,10)
7	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN				
	Pemanfaatan Aset daerah	494.346.000,00	636.984.938,00		
	Jumlah	494.346.000,00	636.984.938,00	(142.638.938,00)	(22,39)
8	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA				
	Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	907.915.000,00	1.553.302.000,00		
	Pemanfaatan Aset daerah	88.000.000,00			
	Jumlah	995.915.000,00	1.553.302.000,00	(557.387.000,00)	(35,88)
	Jumlah Keseluruhan	7.906.189.712,00	8.734.683.322,00	(828.493.610,00)	(9,49)

5.4.1.1.2.3 Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu - LO

Retribusi Perizinan Tertentu merupakan sumber PAD yang berhubungan dengan fungsi Pemerintah Kota Bogor sebagai Regulator dan Otorisasi untuk

memberikan izin terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat.
Retribusi Perizinan Tertentu dirinci pada tabel berikut.

Tabel 5.4.14
Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Persetujuan Bangunan Gedung	11.851.965.269,00	7.645.206.363,00	4.206.758.906,00	55,02
2	Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	435.134.579,49	188.679.242,51	246.455.336,98	130,62
3	Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	-	253.519.138,62	(253.519.138,62)	(100,00)
	Jumlah	12.287.099.848,49	8.087.404.744,13	4.199.695.104,36	51,93

Tabel di atas menunjukkan Retribusi Perizinan Tertentu - LO TA 2025 sebesar Rp12.287.099.848,49 mengalami peningkatan sebesar Rp4.199.695.104,36 atau 51,93% dari PAD Retribusi Perizinan Tertentu - LO TA 2024 sebesar Rp8.087.404.744,13.

Rincian Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu pada masing-masing Perangkat Daerah Kota Bogor Per 31 Desember 2025 dan 2024 dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.15
Rincian Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu per Perangkat Daerah TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				
	Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	-	253.519.138,62	(253.519.138,62)	(100,00)
	Persetujuan Bangunan Gedung	-	7.645.206.363,00	(7.645.206.363,00)	(100,00)
	Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	-	188.679.242,51	(188.679.242,51)	(100,00)
	Jumlah	-	8.087.404.744,13	(8.087.404.744,13)	(100,00)
2	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
	Persetujuan Bangunan Gedung	11.851.965.269,00	-	11.851.965.269,00	100,00
	Jumlah	11.851.965.269,00	-	11.851.965.269,00	100,00
3	DINAS TENAGA KERJA				
	Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	435.134.579,49	-	435.134.579,49	100,00
	Jumlah	435.134.579,49	-	435.134.579,49	100,00
	TOTAL	12.287.099.848,49	8.087.404.744,13	4.199.695.104,36	51,93

5.4.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - LO

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah - LO yang Dipisahkan merupakan sumber PAD dari pembagian laba atas penyertaan modal Pemerintah Kota Bogor pada Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pendapatan ini diterima dan dikelola melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) dengan realisasi TA 2025 dan 2024 dapat disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.16
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	4.501.781.263,00	4.087.409.370,00	414.371.893,00	10,14

No	Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
	(Lembaga Keuangan) - LO - Bank Kota				
2	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) - LO - Bank BJB	-	4.260.852.544,00	(4.260.852.544,00)	(100,00)
3	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) - LO - PD Pasar Pakuan Jaya	-	8.550.122.766,00	(8.550.122.766,00)	(100,00)
4	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) - LO - PD Jasa Transportasi	-	-	-	-
5	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum) - LO - PERUMDA Tirta Pakuan	60.817.003.878,61	58.812.648.110,57	2.004.355.768,04	3,41
Jumlah		65.318.785.141,61	75.711.032.790,57	(10.392.247.648,96)	(13,73)

Tabel di atas menunjukkan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO TA 2025 sebesar Rp65.318.785.141,61 mengalami penurunan sebesar Rp10.392.247.648,96 atau 13,73% dari PAD Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO TA 2024 sebesar Rp75.711.032.790,57.

Adapun perbandingan nilai PAD - Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah antara LO dan LRA TA 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.17
Perbandingan Nilai PAD - Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah pada LO dan LRA TA 2025

No	Uraian	LO	LRA	Perbedaan/Selisih
1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) - LO - Bank Kota	4.501.781.263,00	2.941.714.753,00	1.560.066.510,00
2	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) - LO - Bank BJB	-	4.260.852.544,00	(4.260.852.544,00)
3	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) - LO - PD Pasar Pakuan Jaya	-	250.000.000,00	(250.000.000,00)
4	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) - LO - PD Jasa Transportasi	-	-	-
5	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum) - LO - PERUMDA Tirta Pakuan	60.817.003.878,61	29.559.100.635,00	2.004.355.768,04
Jumlah		65.318.785.141,61	37.011.667.932,00	28.307.117.209,61

Selisih/perbedaan LO dan LRA atas akun PAD - Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah sebesar Rp28.307.117.209,61 dengan rincian perhitungan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.18

Rincian selisih Nilai PAD - Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah pada LO dan LRA TA 2025

URAIAN	JUMLAH (Rp)
Saldo Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	65.318.785.141,61
Mutasi Tambah:	
Pembagian laba TA 2024 yang mengurangi modal pemerintah daerah pada Bank Kota Bogor	2.941.714.753,00
Penurunan nilai investasi jangka 255anjang permanen sesuai dengan ekuitas pada LK Audited Bank Kota Bogor Tahun 2025	172.325.747,00
Penerimaan atas Pembayaran piutang bagian laba (dividen) TA 2024	4.260.852.544,00
Penerimaan atas pembayaran piutang bagian laba TA 2024	250.000.000,00
Pembagian laba TA 2024 yang mengurangi modal pemerintah daerah pada PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor	29.559.100.635,00
Jumlah Mutasi Tambah	37.183.993.679,00
Mutasi Kurang :	
Pendapatan kekayaan yang dipisahkan atau rugi penurunan nilai investasi LO Bank Kota	4.674.107.010,00
Pendapatan kekayaan yang dipisahkan atau rugi penurunan nilai investasi LO PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor	56.287.065.165,86
Peningkatan nilai investasi jangka 255anjang permanen yang menambah nilai ekuitas sesuai LK Audited PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor TA 2025	4.529.938.712,75
Jumlah Mutasi Kurang	65.491.110.888,61
Saldo Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	37.011.667.932,00

5.4.1.1.4 Lain-lain PAD yang Sah - LO

Lain-lain PAD yang Sah - LO merupakan Pendapatan Asli Daerah selain Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang diterima Pemerintah Kota Bogor dengan realisasi TA 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.19

Lain-lain PAD yang Sah - LO TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	1.682.476.275,00	1.365.249.800,00	317.226.475,00	23,24
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan	-	12.629.016,00	(12.629.016,00)	(100,00)
3	Jasa Giro	5.570.270.122,00	4.035.307.746,00	1.534.962.376,00	38,04
4	Pendapatan Bunga	5.001.246.312,00	7.768.345.613,00	(2.767.099.301,00)	(35,62)
5	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah - LO	17.634.000,00	30.183.333,33	(12.549.333,33)	(41,58)
6	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	6.510.665.593,00	397.410.826,00	6.113.254.767,00	1.538,27
7	Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	260.857.056,00	627.473.886,00	(366.616.830,00)	(58,43)
8	Pendapatan Denda Pajak Daerah	9.998.850.075,00	16.438.061.894,00	(6.439.211.819,00)	(39,17)
9	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	94.250.168,00	112.865.276,00	(18.615.108,00)	(16,49)
10	Pendapatan dari Pengembalian	15.259.278.151,00	3.836.302.493,00	11.422.975.658,00	297,76
11	Pendapatan dari BLUD	1.250.115.130,00	813.022.806,00	437.092.324,00	53,76
12	Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan	4.718.670,00	4.481.604,00	237.066,00	5,29
13	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	8.550.000,00	3.101.860,00	5.448.140,00	175,64
	Jumlah	45.658.911.552,00	35.444.436.153,33	10.214.475.398,67	28,82

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan Lain-lain PAD yang Sah TA 2025 sebesar Rp45.658.911.552,00 mengalami peningkatan sebesar Rp10.214.475.398,67 atau 28,82% dari Lain-lain PAD yang Sah TA 2024 sebesar Rp35.444.436.153,33.

Perbandingan nilai Lain-lain PAD yang sah antara LO dan LRA TA 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.20
Perbandingan Nilai Lain-lain PAD yang Sah pada LO dan LRA TA 2025

No	Uraian	LO	LRA	Perbedaan/Selisih
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	1.682.476.275,00	1.703.115.725,00	(20.639.450,00)
2	Jasa Giro	5.570.270.122,00	5.570.270.122,00	-
3	Pendapatan Bunga	5.001.246.312,00	5.061.653.874,00	(60.407.562,00)
4	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah - LO	17.634.000,00	27.943.254,00	10.309.254,00)
5	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	6.510.665.593,00	6.510.665.593,00	-
6	Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	260.857.056,00	260.857.056,00	-
7	Pendapatan Denda Pajak Daerah	9.998.850.075,00	7.347.837.291,00	2.651.012.784,00
8	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	94.250.168,00	72.453.178,00	21.796.990,00
9	Pendapatan dari Pengembalian	15.259.278.151,00	15.259.278.151,00	-
10	Pendapatan dari BLUD	1.250.115.130,00	1.250.115.130,00	-
11	Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan	4.718.670,00	4.718.670,00	-
12	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	8.550.000,00	8.550.000,00	-
13	Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah	-	2.885.696.432,00	(2.885.696.432,00)
Jumlah		45.658.911.552,00	45.963.154.476,00	(304.242.924,00)

Selisih/perbedaan PAD - Lain-lain PAD yang Sah antara LO dan LRA sebesar Rp304.242.924,00 terdiri atas:

Tabel 5.4.21
Rincian Selisih Nilai Lain-lain PAD yang Sah pada LO dan LRA TA 2025

URAIAN	JUMLAH (Rp)
Saldo Lain-lain PAD yang Sah - LO	45.658.911.552,00
Mutasi Tambah:	
Penerimaan atas Hasil Penjualan Tanah-Tanah Persil-Tanah Bangunan Perumahan / Gedung Tempat Tinggal Tahun Anggaran 2025 yang mengurangi Pelepasan Hak Atas Tanah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah	20.639.450,00
Penerimaan atas Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah yang mengurangi Piutang Bunga TA 2024	543.668.056,00
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang mengurangi Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	27.943.254,00
Pembayaran piutang tahun sebelumnya Denda Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah	8.174.469.373,00
Pembayaran Piutang Denda Denda Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah- Pemanfaatan Aset Daerah tahun sebelumnya pada Badan Keuangan dan Aset Daerah	219.915,00
Pembayaran Piutang Denda Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-Persetujuan Bangunan Gedung tahun sebelumnya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.811.360,00
Reklasifikasi dari Kode Akun Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah ke dalam Kode Akun Pendapatan Denda Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah	2.885.696.432,00
Jumlah Mutasi Tambah	11.654.447.840,00
Mutasi Kurang :	
Penerimaan atas Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah yang menambah Piutang Bunga TA 2025	483.260.494,00
Penambahan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	17.634.000,00
Penambahan Piutang Denda Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025	7.939.785.725,00
Reklasifikasi dari Kode Akun Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah ke dalam Kode Akun Pendapatan Denda Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah	2.885.696.432,00
	23.828.265,00
Jumlah Mutasi Kurang	11.350.204.916,00
Saldo Lain-lain PAD yang Sah - LRA	45.963.154.476,00

Rincian Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah pada masing-masing Perangkat Daerah Kota Bogor Per 31 Desember 2025 dan 2024 dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.22
Lain-lain PAD yang Sah - LO per Perangkat Daerah TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	DINAS KESEHATAN				
	Denda Retribusi Daerah	-	-		
	Pendapatan dari BLUD - LO	1.250.115.130,00	813.022.806,00		
	Jumlah	1.250.115.130,00	813.022.806,00	437.092.324,00	53,76
2	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
	Denda Retribusi Daerah	33.980.594,00	2.500,00		
	Jumlah	33.980.594,00	2.500,00	33.978.094,00	1.359.123,76
3	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN				
	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain - LO	35.000,00	5.000,00		
	Denda Retribusi Daerah	39.096.362,00	45.463.975,00		
	Jumlah	39.131.362,00	45.468.975,00	(6.337.613,00)	(13,94)
4	DINAS LINGKUNGAN HIDUP				
	Denda Retribusi Daerah	2.748.030,00	1.748.337,00		
	Jumlah	2.748.030,00	1.748.337,00	999.693,00	57,18
5	DINAS PERHUBUNGAN				
	Denda Retribusi Daerah	6.239.948.835,00	-		
	Jumlah	6.239.948.835,00	-	6.239.948.835,00	100,00
6	BADAN PENDAPATAN DAERAH				
	Kerja sama Daerah	-	-		
	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	167.752.003,00	167.057.344,00		
	Denda Pajak Daerah	9.998.850.075,00	16.438.061.894,00		
	Jumlah	10.166.602.078,00	16.605.119.238,00	(6.438.517.160,00)	(38,77)
7	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH				
	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	1.682.476.275,00	1.365.249.800,00	317.226.475,00	23,24
	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	-	12.629.016,00	(12.629.016,00)	(100,00)
	Jasa Giro	5.570.270.122,00	4.035.307.746,00	1.534.962.376,00	38,04
	Pendapatan Bunga	5.001.246.312,00	7.768.345.613,00	(2.767.099.301,00)	(35,62)
	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah - LO	17.634.000,00	30.183.333,33	(12.549.333,33)	(41,58)
	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	102.929.755,00	230.348.482,00	(127.418.727,00)	(55,32)
	Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	260.857.056,00	627.473.886,00	(366.616.830,00)	(58,43)
	Denda Retribusi Daerah	18.425.182,00	17.786.906,00	638.276,00	3,59
	Pendapatan dari Pengembalian	15.259.278.151,00	3.836.302.493,00	11.422.975.658,00	297,76
	Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	4.718.670,00	4.481.604,00	237.066,00	5,29
	Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	8.550.000,00	3.101.860,00	5.448.140,00	175,64
	Jumlah	27.926.385.523,00	17.931.210.739,33	9.995.174.783,67	55,74
8	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				
	Denda Retribusi Daerah	-	47.863.558,00		
	Jumlah	-	47.863.558,00	(47.863.558,00)	(100,00)
	Jumlah Keseluruhan	45.658.911.552,00	35.444.436.153,33	10.214.475.398,67	28,82

5.4.1.2 Pendapatan Transfer - LO

Pendapatan transfer meliputi transfer pemerintah pusat, transfer pemerintah pusat - lainnya dan transfer pemerintah provinsi.

Tabel 5.4.23
Pendapatan Transfer - LO TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat :				
	Dana Perimbangan	-	-	-	-
	Insentif Fiskal	16.164.800.000,00	28.047.664.000,00	(11.882.864.000,00)	(42,37)
	Dana Bagi Hasil (DBH)	199.118.703.200,00	97.824.228.000,00	101.294.475.200,00	103,55
	Dana Alokasi Umum (DAU)	888.903.869.692,00	858.600.617.000,00	30.303.252.692,00	3,53
	Dana Alokasi Khusus (DAK)	383.079.720.111,00	373.153.244.178,00	9.926.475.933,00	2,66
2	Pendapatan Transfer Antar Daerah:				
	Pendapatan Bagi Hasil	133.878.846.902,00	304.828.525.662,00	(170.949.678.760,00)	(56,08)
	Bantuan Keuangan	12.087.418.529,00	39.366.960.725,00	(27.279.542.196,00)	(69,30)
	Jumlah	1.633.233.358.434,00	1.701.821.239.565,00	(68.587.881.131,00)	(4,03)

Tabel di atas menunjukkan Pendapatan Transfer-LO TA 2025 sebesar Rp1.633.233.358.434,00 mengalami penurunan sebesar Rp68.587.881.131,00 atau 4,03% dari Pendapatan Transfer TA 2024 sebesar Rp1.701.821.239.565,00.

Adapun perbandingan nilai Pendapatan Transfer antara LO dan LRA TA 2025, disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.24
Perbandingan Nilai Pendapatan Transfer Pusat - LO Pada LO dan LRA TA 2025

No	Uraian	LO	LRA	Perbedaan/Selisih
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat :			
	Dana Perimbangan	-	-	-
	Insentif Fiskal	16.164.800.000,00	16.164.800.000,00	-
	Dana Bagi Hasil (DBH)	199.118.703.200,00	126.979.208.200,00	72.139.495.000,00
	Dana Alokasi Umum (DAU)	888.903.869.692,00	884.106.755.956,00	4.797.113.736,00
	Dana Alokasi Khusus (DAK)	383.079.720.111,00	383.079.720.111,00	-
2	Pendapatan Transfer Antar Daerah :			
	Pendapatan Bagi Hasil	133.878.846.902,00	145.298.859.311,00	(11.420.012.409,00)
	Bantuan Keuangan	12.087.418.529,00	12.087.418.529,00	-
	Jumlah	1.633.233.358.434,00	1.567.716.762.107,00	65.516.596.327,00

Selisih/perbedaan Pendapatan Transfer Pusat, antara LO dan LRA sebesar Rp65.516.596.327,00 terdiri atas:

Tabel 5.4.25
Rician selisih Nilai Pendapatan Transfer Pusat - LO Pada LO dan LRA TA 2025

URAIAN	JUMLAH (Rp)
Saldo Pendapatan Transfer - LO	1.633.233.358.434,00
Mutasi Tambah:	
Pemindahbukuan Dana Treasury Deposit Facility tahun 2024 ke kas daerah	7.169.764.000,00
Lebih Salur Dana Bagi Hasil Pemerintah Pusat sampai dengan Tahun 2024 sesuai PMK No 120 tahun 2025	295.192.000,00
Penerimaan piutang pendapatan bagi hasil transfer antar daerah tahun 2024 (kurang salur)	12.733.735.118,00
Jumlah Mutasi Tambah	20.198.691.118,00
Mutasi Kurang :	
Kurang Salur Dana Bagi Hasil Pemerintah Pusat sampai dengan Tahun 2024 sesuai PMK No 120 tahun 2025	79.604.451.000,00

URAIAN	JUMLAH (Rp)
Pemotongan langsung Dana Alokasi Umum untuk Pembayaran cicilan pokok utang pinjaman kepada PT. SMI Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Panjang	4.797.113.736,00
Kurang Salur Dana Transfer Pemerintah Daerah sesuai dengan Keppub Jawa Barat Nomor 973/Kep.195-BPKAD/2026 tentang kurang/lebih salur bagi hasil pajak daerah provinsi Jawa Barat	1.313.722.709,00
Jumlah Mutasi Kurang	85.715.287.445,00
Saldo Pendapatan Transfer - LRA	1.567.716.762.107,00

Adapun realisasi masing-masing akun pendapatan dapat diuraikan sebagai berikut.

5.4.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO

Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat Pemerintah Kota Bogor untuk Periode TA 2025 dan TA 2024 dirinci pada tabel berikut.

Tabel 5.4.26
Transfer Pemerintah Pusat TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat :				
	Dana Perimbangan	-	-	-	-
	Insentif Fiskal	16.164.800.000,00	28.047.664.000,00	(11.882.864.000,00)	(42,37)
	Dana Bagi Hasil (DBH)	199.118.703.200,00	97.824.228.000,00	101.294.475.200,00	103,55
	Dana Alokasi Umum (DAU)	888.903.869.692,00	858.600.617.000,00	30.303.252.692,00	3,53
	Dana Alokasi Khusus (DAK)	383.079.720.111,00	373.153.244.178,00	9.926.475.933,00	2,66
	Jumlah	1.487.267.093.003,00	1.357.625.753.178,00	129.641.339.825,00	9,55

Tabel di atas menunjukkan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat TA 2025 sebesar Rp1.487.267.093.003,00 mengalami peningkatan sebesar Rp129.641.339.825,00 atau 9,55% dari Pendapatan Transfer TA 2024 sebesar Rp1.357.625.753.178,00.

5.4.1.2.1.1 Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DBH merupakan salah satu komponen dari Transfer ke Daerah (TKD)

5.4.1.2.1.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak

Dana Bagi Hasil Pajak merupakan bagian dari transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan kepada Kota Bogor untuk periode TA 2025 dan 2024, dengan rincian pada tabel berikut

Tabel 5.4.27
Dana Bagi Hasil Pajak TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	PBB	7.518.242.600,00	3.582.925.000,00	3.935.317.600,00	109,84
2	PPh Pasal 21	123.642.108.100,00	57.889.358.000,00	65.752.750.100,00	113,58
3	PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	14.834.452.500,00	7.908.567.000,00	6.925.885.500,00	87,57
4	Cukai Hasil Tembakau	10.741.471.000,00	7.956.105.000,00	2.785.366.000,00	35,01
	Jumlah	156.736.274.200,00	77.336.955.000,00	79.399.319.200,00	102,67

Perbandingan nilai Pendapatan Transfer antara LO dan LRA TA 2025, disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.28
Perbandingan Nilai Pendapatan Transfer Pusat - LO Pada LO dan LRA TA 2025

No	Uraian	LO	LRA	Perbedaan / Selisih
1	PBB	7.518.242.600,00	4.896.049.600,00	2.622.193.000,00
2	PPh Pasal 21	123.642.108.100,00	80.274.210.100,00	43.367.898.000,00
3	PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WOPDN	14.834.452.500,00	9.065.113.500,00	5.769.339.000,00
4	Cukai Hasil Tembakau	10.741.471.000,00	8.234.433.000,00	2.507.038.000,00
	Jumlah	156.736.274.200,00	102.469.806.200,00	54.266.468.000,00

Selisih/perbedaan Pendapatan Transfer Pusat, antara LO dan LRA sebesar Rp52.266.468.000,00 terdiri atas:

Tabel 5.4.29
Rincian selisih Nilai Pendapatan Transfer Pusat - LO Pada LO dan LRA TA 2025

URAIAN	JUMLAH (Rp)
Saldo Dana Bagi Hasil Pajak - LO	156.736.274.200,00
Mutasi Tambah:	
Pemindahbukuan Dana Treasury Deposit Facility -DBH PBB tahun 2024 ke kas daerah	410.962.000,00
Pemindahbukuan Dana Treasury Deposit Facility -DBH PPh 21 tahun 2024 ke kas daerah	2.991.638.000,00
Pemindahbukuan Dana Treasury Deposit Facility -DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WOPDN tahun 2024 ke kas daerah	269.908.000,00
Jumlah Mutasi Tambah	3.672.508.000,00
Mutasi Kurang :	
Kurang Salur DBH PBB sampai dengan Tahun 2024 sesuai PMK No 120 tahun 2025	3.033.155.000,00
Kurang Salur DBH PPh Pasal 21 sampai dengan Tahun 2024 sesuai PMK No 120 tahun 2025	46.359.536.000,00
Kurang Salur DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WOPDN sampai dengan Tahun 2024 sesuai PMK No 120 tahun 2025	6.039.247.000,00
Kurang Salur DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) sampai dengan Tahun 2024 sesuai PMK No 120 tahun 2025	2.507.038.000,00
Jumlah Mutasi Kurang	57.938.976.000,00
Saldo Dana Bagi Hasil Pajak - LRA	102.469.806.200,00

5.4.1.2.1.1.2 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA)

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) merupakan bagian dari transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan kepada Kota Bogor untuk periode TA 2025 dan 2024, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.4.30
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Minyak Bumi	3.637.356.000,00	3.560.692.000,00	76.664.000,00	2,15
2	Gas Bumi	975.722.000,00	1.805.424.000,00	(829.702.000,00)	(45,96)
3	Pengusahaan Panas Bumi	13.552.032.000,00	11.540.845.000,00	2.011.187.000,00	17,43
4	Mineral dan Batubara - Landrent	64.400,00	-	64.400,00	100,00
5	Mineral dan Batubara-Royalty	1.981.222.600,00	1.448.455.000,00	532.767.600,00	36,78
6	Kehutanan - PSDH	31.944.000,00	1.034.702.000,00	(1.002.758.000,00)	(96,91)
7	Perikanan	833.805.000,00	1.097.155.000,00	(263.350.000,00)	(24,00)
	Jumlah	21.012.146.000,00	20.487.273.000,00	524.873.000,00	2,56

Perbandingan nilai Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) antara LO dan LRA TA 2025, disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.31
Perbandingan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) pada LO dan LRA TA 2025

No	Uraian	LO	LRA	Perbedaan/Selisih
1	Minyak Bumi	6.241.862.000,00	3.714.407.000,00	2.527.455.000,00
2	Gas Bumi	1.343.717.000,00	1.329.313.000,00	14.404.000,00
3	Pengusahaan Panas Bumi	29.617.833.000,00	16.240.749.000,00	13.377.084.000,00
4	Mineral dan Batubara - Landrent	3.520.400,00	64.400,00	3.456.000,00

No	Uraian	LO	LRA	Perbedaan/Selisih
5	Mineral dan Batubara-Royalty	4.288.182.600,00	2.355.874.600,00	1.932.308.000,00
6	Kehutanan - PSDH	53.509.000,00	35.189.000,00	18.320.000,00
7	Perikanan	833.805.000,00	833.805.000,00	-
Jumlah		42.382.429.000,00	24.509.402.000,00	17.873.027.000,00

Selisih/perbedaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA), antara LO dan LRA sebesar Rp17.873.027.000,00 terdiri atas:

Tabel 5.4.32
Rincian selisih Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) pada LO dan LRA TA 2025

URAIAN	JUMLAH (Rp)
Saldo Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam - LO	42.382.429.000,00
Mutasi Tambah:	
Pemindahbukuan Dana Treasury Deposit Facility -DBH SDA minyak bumi tahun 2024 ke kas daerah	77.051.000,00
Pemindahbukuan Dana Treasury Deposit Facility -DBH SDA Gas Bumi tahun 2024 ke kas daerah	353.591.000,00
Lebih Salur DBH SDA Gas Bumi sampai dengan Tahun 2024 sesuai PMK No 120 tahun 2025	287.879.000,00
Pemindahbukuan Dana Treasury Deposit Facility -DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi tahun 2024 ke kas daerah	2.688.717.000,00
Lebih Salur DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi sampai dengan Tahun 2024 sesuai PMK No 120 tahun 2025	7.313.000,00
Pemindahbukuan Dana Treasury Deposit Facility - DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty tahun 2024 ke kas daerah	374.652.000,00
Pemindahbukuan Dana Treasury Deposit Facility - DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan tahun 2024 ke kas daerah	3.245.000,00
Jumlah Mutasi Tambah	3.792.448.000,00
Mutasi Kurang :	
Kurang Salur DBH SDA minyak bumi sampai dengan Tahun 2024 sesuai PMK No 120 tahun 2025	2.604.506.000,00
Kurang Salur DBH SDA Gas Bumi sampai dengan Tahun 2024 sesuai PMK No 120 tahun 2025	655.874.000,00
Kurang Salur DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi sampai dengan Tahun 2024 sesuai PMK No 120 tahun 2025	16.073.114.000,00
Kurang Salur DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent sampai dengan Tahun 2024 sesuai PMK No 120 tahun 2025	3.456.000,00
Kurang Salur DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty sampai dengan Tahun 2024 sesuai PMK No 120 tahun 2025	2.306.960.000,00
Kurang Salur DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan sampai dengan Tahun 2024 sesuai PMK No 120 tahun 2025	21.565.000,00
Jumlah Mutasi Kurang	21.665.475.000,00
Saldo Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam - LRA	24.509.402.000,00

5.4.1.2.1.2 Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan bagian dari transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan kepada Kota Bogor untuk periode TA 2025 dan 2024, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.4.33
Dana Alokasi Umum (DAU) TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Dana Alokasi Umum	756.123.937.692,00	746.216.401.000,00	9.907.536.692,00	1,33
2	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan LO	13.600.000.000,00	13.600.000.000,00	-	-
3	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja - LO	5.645.224.000,00	36.138.888.000,00	(30.493.664.000,00)	(84,38)
4	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan-LO	70.049.238.000,00	31.725.202.000,00	38.324.036.000,00	120,80
5	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan-LO	43.485.470.000,00	17.761.219.000,00	25.724.251.000,00	144,83

No	Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
6	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum-LO	-	13.158.907.000,00	(13.158.907.000,00)	(100,00)
Jumlah		888.903.869.692,00	858.600.617.000,00	30.303.252.692,00	3,53

Perbandingan nilai Pendapatan Transfer antara LO dan LRA TA 2025, disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.34

Perbandingan Dana Alokasi Umum (DAU) antara LO dan LRA TA 2025

No	Uraian	LO	LRA	Perbedaan/Selisih
1	Dana Alokasi Umum	756.123.937.692,00	751.326.823.956,00	4.797.113.736,00
2	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan - LO	13.600.000.000,00	13.600.000.000,00	-
3	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja - LO	5.645.224.000,00	5.645.224.000,00	-
4	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan-LO	70.049.238.000,00	70.049.238.000,00	-
5	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan-LO	43.485.470.000,00	43.485.470.000,00	-
Jumlah		888.903.869.692,00	884.106.755.956,00	4.797.113.736,00

Selisih/perbedaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA), antara LO dan LRA merupakan pembayaran cicilan pokok utang pinjaman kepada PT. SMI yang dipotong langsung melalui DAU sebesar Rp4.797.113.736,00.

5.4.1.2.1.3 Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan bagian dari transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan kepada Kota Bogor untuk periode TA 2025 dan 2024, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.4.35

Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Dana Alokasi Khusus Fisik	25.574.335.904,00	44.829.645.150,00	(19.255.309.246,00)	(42,95)
2	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	357.505.384.207,00	328.323.599.028,00	29.181.785.179,00	8,89
Jumlah		383.079.720.111,00	373.153.244.178,00	9.926.475.933,00	2,66

Perbandingan nilai Dana Alokasi Khusus antara LO dan LRA TA 2025, disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.36

Perbandingan Dana Alokasi Khusus (DAK) antara LO dan LRA TA 2025

No	Uraian	LO	LRA	Perbedaan/Selisih
1	Dana Alokasi Khusus Fisik	25.574.335.904,00	25.574.335.904,00	-
2	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	357.505.384.207,00	357.505.384.207,00	-
Jumlah		383.079.720.111,00	383.079.720.111,00	-

Rincian Dana Alokasi Khusus (DAK) dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.37
Rincian DAK Fisik dan DAN Non Fisik TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	DAK FISIK	25.574.335.904,00	44.829.645.150,00	(19.255.309.246,00)	(42,95)
	DAK FISIK REGULER :				
	Pendidikan - PAUD	-	204.102.129,00	(204.102.129,00)	(100,00)
	Pendidikan - SD	198.500.000,00	1.977.458.787,00	(1.778.958.787,00)	(89,96)
	Pendidikan - SMP	168.600.009,00	-	168.600.009,00	100,00
	Air Minum	545.411.907,00	-	545.411.907,00	100,00
	Kesehatan & KB: KB	-	77.707.500,00	(77.707.500,00)	(100,00)
	Sanitasi	9.693.660.000,00	9.534.780.000,00	158.880.000,00	1,67
	Kesehatan : Penguatan Sistem Kesehatan	14.968.163.988,00	33.035.596.734,00	(18.067.432.746,00)	(54,69)
	Jumlah	25.574.335.904,00	44.829.645.150,00	(19.255.309.246,00)	(42,95)
2	DAK NON FISIK	357.505.384.207,00	328.323.599.028,00	79.105.839.876,00	28,41
	BOS Regular	153.724.702.206,00	152.805.914.824,00	918.787.382,00	0,60
	BOS Kinerja	2.863.250.000,00	-	2.863.250.000,00	100,00
	TPG PNSD	142.528.915.100,00	103.382.644.000,00	39.146.271.100,00	37,87
	Tamsil Guru PNSD	973.500.000,00	3.816.547.000,00	(2.843.047.000,00)	(74,49)
	BOP PAUD Reguler	9.582.277.279,00	9.076.914.900,00	505.362.379,00	5,57
	BOKKB BOK	-	8.036.889.807,00	(8.036.889.807,00)	(100,00)
	Fasilitasi Penanaman Modal	-	354.633.800,00	(354.633.800,00)	(100,00)
	Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-	406.000.000,00	(406.000.000,00)	(100,00)
	Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	-	520.000.000,00	(520.000.000,00)	(100,00)
	Dana BOSP-BOS Kinerja-LO	45.000.000,00	2.335.000.000,00	(2.290.000.000,00)	(98,07)
	Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja-LO	-	90.000.000,00	(90.000.000,00)	(100,00)
	Dana BOSP-BOP Kesenjangan Reguler-LO	17.018.452.735,00	15.616.122.000,00	1.402.330.735,00	8,98
	Dana BOSP-BOP Kesenjangan Kinerja-LO	270.000.000,00	180.000.000,00	90.000.000,00	50,00
	Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota-LO	8.771.025.936,00	15.174.498.103,00	(6.403.472.167,00)	(42,20)
	Dana BOK-BOK Puskesmas-LO	14.105.565.292,00	16.528.434.594,00	(2.422.869.302,00)	(14,66)
	Bantuan Operasional Keluarga Berencana	6.971.956.659,00	-	6.971.956.659,00	100,00
	Pengawasan Obat dan Makanan	564.099.000,00	-	564.099.000,00	100,00
	Fisik-Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian	86.640.000,00	-	86.640.000,00	100,00
	Jumlah	357.505.384.207,00	328.323.599.028,00	29.181.785.179,00	8,89
	Total	383.079.720.111,00	373.153.244.178,00	9.926.475.933,00	2,66

5.4.1.2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

5.4.1.2.2.1 Insentif Fiskal

Insentif Fiskal adalah dana yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagai bentuk penghargaan atas kinerja yang dicapai. Insentif ini diberikan berdasarkan kriteria tertentu, seperti: Pengelolaan keuangan daerah, Pelayanan umum pemerintahan, Pelayanan dasar, Dukungan terhadap kebijakan nasional. Berikut rincian Insentif Fiskal.

Tabel 5.4.38
Insentif Fiskal TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Insentif Fiskal-LO	16.164.800.000,00	28.047.664.000,00	(11.882.864.000,00)	(42,37)
	Jumlah	16.164.800.000,00	28.047.664.000,00	(11.882.864.000,00)	(42,37)

5.4.1.2.2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah antar Daerah - LO

Pendapatan Transfer Antar Daerah merupakan transfer Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dialokasikan pada Pemerintah Kota Bogor untuk dikelola oleh pemerintah daerah, dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah. Pendapatan ini meliputi Pendapatan Bagi Hasil - LO dan Bantuan Keuangan dan Bantuan Keuangan - LO.

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Pemerintah Kota Bogor untuk Periode TA 2025 dan TA 2024 dirinci pada tabel berikut.

Tabel 5.4.39
Transfer Pemerintah antar Daerah TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
	Pendapatan Transfer Antar Daerah :				
1	Pendapatan Bagi Hasil	145.298.859.311,00	304.828.525.662,00	(159.529.666.351,00)	(52,33)
2	Bantuan Keuangan	12.087.418.529,00	39.366.960.725,00	(27.279.542.196,00)	(69,30)
	Jumlah	157.386.277.840,00	344.195.486.387,00	(186.809.208.547,00)	(54,27)

Tabel di atas menunjukkan Pendapatan Transfer Pemerintah antar Daerah TA 2025 sebesar Rp157.386.277.840,00 mengalami penurunan sebesar Rp186.809.208.547,00 atau 54,27% dari Pendapatan Transfer TA 2024 sebesar Rp344.195.486.387,00.

5.4.1.2.2.2.1 Pendapatan Bagi Hasil

Penerimaan Transfer Pemerintah Antar Daerah - Pendapatan Bagi Hasil Pemerintah Kota Bogor untuk Periode TA 2025 dan TA 2024 dirinci pada tabel berikut.

Tabel 5.4.40
Pendapatan Bagi Hasil TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Pendapatan Bagi Hasil - LO	145.298.859.311,00	304.828.525.662,00	(159.529.666.351,00)	(52,33)
	Jumlah	145.298.859.311,00	304.828.525.662,00	(159.529.666.351,00)	(52,33)

Rincian Pendapatan Bagi Hasil dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.41
Rincian Pendapatan Bagi Hasil - LO TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor - LO	935.573.880,00	108.974.953.470,00	(133.878.846.902,00)	(99,14)
2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor - LO	350.180.250,00	68.503.297.560,00	(68.153.117.310,00)	(99,49)
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LO	69.774.538.758,00	66.022.909.185,00	3.751.629.573,00	5,68
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan - LO	210.444.299,00	211.792.750,00	(1.348.451,00)	(0,64)

No	Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok - LO	62.608.109.715,00	61.115.572.697,00	1.492.537.018,00	2,44
	Jumlah	133.878.846.902,00	304.828.525.662,00	(170.949.678.760,00)	(56,08)

Tabel di atas menunjukkan Pendapatan Bagi Hasil - LO TA 2025 sebesar Rp133.878.846.902,00 mengalami penurunan sebesar Rp170.949.678.760,00 atau 56,08% dari Pendapatan Bagi Hasil - LO TA 2024 sebesar Rp304.828.525.662,00. Penurunan disebabkan oleh implementasi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, berupa pemberlakuan opsen pajak yaitu tambahan pungutan pajak daerah meliputi Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) menjadi komponen pendapatan Pajak Daerah pada Pendapatan Asli Daerah.

Perbandingan nilai Pendapatan Bagi Hasil antara LO dan LRA TA 2025, disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.42
Perbandingan Pendapatan Bagi Hasil-LO antara LO dan LRA TA 2025

No	Uraian	LO	LRA	Perbedaan/Selisih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor - LO	935.573.880,00	5.174.285.040,00	(4.238.711.160,00)
2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor - LO	350.180.250,00	4.666.803.750,00	(4.316.623.500,00)
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LO	69.774.538.758,00	71.067.683.322,00	(1.293.144.564,00)
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan - LO	210.444.299,00	199.105.801,00	11.338.498,00
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok - LO	62.608.109.715,00	64.190.981.398,00	(1.582.871.683,00)
	Jumlah	133.878.846.902,00	145.298.859.311,00	(11.420.012.409,00)

Selisih/perbedaan Pendapatan Bagi Hasil-LO, antara LO dan LRA sebesar Rp11.420.012.409,00 merupakan adanya penerimaan kekurangan salur pendapatan bagi hasil TA 2024 sesuai Lampiran I Surat dari Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 dengan nomor 8255/HK.02.03/BPKAD sebesar Rp12.733.735.118,00 dan piutang salur TA 2025 sesuai Keputusan Gubernur Jawa Barat 973/Kep.195-BPKAD/2026 sebesar Rp1.313.722.709,00, terdiri atas:

Tabel 5.4.43
Rincian Selisih Pendapatan Bagi Hasil-LO antara LO dan LRA TA 2025

URAIAN	JUMLAH (Rp)
Saldo Pendapatan Bagi Hasil - LO	133.878.846.902,00
Mutasi Tambah:	
Penerimaan atas Piutang Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2024	5.174.285.040,00
Penerimaan atas Piutang Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2024	4.666.803.750,00
Penerimaan atas Piutang Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Tahun 2024	1.295.204.745,00
Penerimaan atas Piutang Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan Tahun 2024	14.569.900,00
Penerimaan atas Piutang Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok Tahun 2024	1.582.871.683,00
Jumlah Mutasi Tambah	12.733.735.118,00
Mutasi Kurang :	

URAIAN	JUMLAH (Rp)
Penambahan Piutang Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2025 sesuai dengan Kepgub Jawa Barat Nomor 973/Kep.195-BPKAD/2026 tentang kurang/lebih salur bagi hasil pajak daerah provinsi Jawa Barat	935.573.880,00
Penambahan Piutang Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2025 sesuai dengan Kepgub Jawa Barat Nomor 973/Kep.195-BPKAD/2026 tentang kurang/lebih salur bagi hasil pajak daerah provinsi Jawa Barat	350.180.250,00
Penambahan Piutang Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Tahun 2025 sesuai dengan Kepgub Jawa Barat Nomor 973/Kep.195-BPKAD/2026 tentang kurang/lebih salur bagi hasil pajak daerah provinsi Jawa Barat	2.060.181,00
Penambahan Piutang Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan Tahun 2025 sesuai dengan Kepgub Jawa Barat Nomor 973/Kep.195-BPKAD/2026 tentang kurang/lebih salur bagi hasil pajak daerah provinsi Jawa Barat	25.908.398,00
Jumlah Mutasi Kurang	1.313.722.709,00
Saldo Pendapatan Bagi Hasil - LRA	145.298.859.311,00

5.4.1.2.2.2.2 Bantuan Keuangan

Penerimaan Transfer Pemerintah Antar Daerah - Bantuan Keuangan Pemerintah Kota Bogor untuk periode TA 2025 dan TA 2024 dirinci pada tabel berikut.

Tabel 5.4.44
Bantuan Keuangan TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Bantuan Keuangan - LO	12.087.418.529,00	39.366.960.725,00	(27.279.542.196,00)	(69,30)
	Jumlah	12.087.418.529,00	39.366.960.725,00	(27.279.542.196,00)	(69,30)

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan Bantuan Keuangan-LO TA 2025 sebesar Rp12.087.418.529,00 mengalami penurunan sebesar Rp27.279.542.196,00 atau 69,30% dari Bantuan Keuangan - LO TA 2024 sebesar Rp39.366.960.725,00.

5.4.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LO

5.4.1.3.1 Pendapatan Hibah - LO

Penerimaan Pendapatan Hibah - LO Pemerintah Kota Bogor untuk periode TA 2025 dan 2024, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.4.45
Pendapatan Hibah - LO TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Pendapatan Hibah	48.555.007.254,51	42.961.879.333,77	5.593.127.920,74	13,02
	Jumlah	48.555.007.254,51	42.961.879.333,77	5.593.127.920,74	13,02

Tabel di atas menunjukkan Pendapatan Hibah - LO TA 2025 sebesar Rp48.555.007.254,51 mengalami peningkatan sebesar Rp5.593.127.920,74 atau 13,02% dari Bantuan Keuangan - LO TA 2024 sebesar Rp42.961.879.333,77.

Rincian Pendapatan Hibah - LO dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.46
Rincian Pendapatan Hibah - LO TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	42.805.743.264,81	41.235.040.882,17	1.570.702.382,64	3,81
2	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya	338.214.800,00	154.925.460,00	183.289.340,00	100,00
3	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/ Perorangan Dalam Negeri	125.985.136,55	-	125.985.136,55	100,00

No	Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
4	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga /Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	5.285.064.053,15	-	5.285.064.053,15	100,00
5	Pendapatan Hibah dari Badan/ Lembaga / Organisasi Dalam Negeri	-	303.172.991,60	(303.172.991,60)	(100,00)
6	Pendapatan Hibah dari Lembaga / Organisasi Swasta Dalam Negeri	-	1.268.740.000,00	(1.268.740.000,00)	(100,00)
	Jumlah	48.555.007.254,51	42.961.879.333,77	5.593.127.920,74	13,02

Pendapatan Hibah - LO sebesar Rp48.555.007.254,51 per Perangkat Daerah terdiri atas:

Tabel 5.4.47

Rincian Pendapatan Hibah - LO TA 2025 dan 2024 Per Perangkat Daerah

No	Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Dinas Pendidikan				
	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	6.513.496.288,00	-		
	Pendapatan Hibah dari Badan / Lembaga / Organisasi Dalam Negeri	-	208.715.916,00		
	Jumlah	6.513.496.288,00	208.715.916,00	6.304.780.372,00	3.020,75
2	Dinas Kesehatan				
	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	33.315.684.277,81	31.268.494.837,18		
	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya	5.794.800,00	-		
	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat / Perorangan Dalam Negeri	125.985.136,55	-		
	Pendapatan Hibah dari Badan / Lembaga / Organisasi Dalam Negeri	4.489.075.381,00	-		
	Pendapatan Hibah dari Lembaga / Organisasi Swasta Dalam Negeri	693.988.672,15	-		
	Jumlah	38.630.528.267,51	31.268.494.837,18	7.362.033.430,33	23,54
3	Rumah Sakit Umum Daerah				
	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	-	8.162.788,99		
	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya	-	10.143.460,00		
	Pendapatan Hibah dari Badan / Lembaga / Organisasi Dalam Negeri	-	79.485.075,60		
	Jumlah	-	97.791.324,59	(97.791.324,59)	(100,00)
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah				
	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya	296.000.000,00	144.782.000,00		
	Jumlah	296.000.000,00	144.782.000,00	151.218.000,00	104,45
5	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil				
	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	1.333.842.000,00	1.298.728.523,00		
	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya	15.120.000,00	-		
	Jumlah	1.348.962.000,00	1.298.728.523,00	50.233.477,00	3,87
6	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	372.959.555,00	434.994.894,00		
	Jumlah	372.959.555,00	434.994.894,00	(62.035.339,00)	(14,26)
7	Dnas Arsip dan Perpustakaan				
	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	62.611.144,00	-		
	Jumlah	62.611.144,00	-	62.611.144,00	100,00
8	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	-	4.702.371.323,00		

No	Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
	Jumlah	-	4.702.371.323,00	(4.702.371.323,00)	(100,00)
9	Kecamatan Bogor Tengah				
	Pendapatan Hibah dari Badan / Lembaga / Organisasi Dalam Negeri	102.000.000,00	-		
	Jumlah	102.000.000,00	-	102.000.000,00	100,00
10	Badan Keuangan dan Aset Daerah (SKPKD)				
	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	1.207.150.000,00	3.522.288.516,00		
	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya	21.300.000,00	-		
	Pendapatan Hibah dari Lembaga / Organisasi Swasta Dalam Negeri	-	1.268.740.000,00		
	Jumlah	1.228.450.000,00	4.791.028.516,00	(3.562.578.516,00)	(74,36)
11	Badan Pendapatan Daerah				
	Pendapatan Hibah dari Badan / Lembaga / Organisasi Dalam Negeri	-	14.972.000,00		
	Jumlah	-	14.972.000,00	(14.972.000,00)	(100,00)
	TOTAL	48.555.007.254,51	42.961.879.333,77	5.593.127.920,74	13,02

5.4.2 Beban Daerah

5.4.2.1 Beban Operasi

Beban Operasi merupakan belanja atau beban yang telah benar-benar dimanfaatkan dan terjadi pada tahun berkenaan yang digunakan untuk menunjang operasional kegiatan Pemerintah Kota Bogor, dengan realisasi pada TA 2025 dan 2024 pada tabel sebagai berikut.

Tabel 5.4.48
Beban Operasi TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Beban Pegawai	1.239.422.847.923,00	1.242.262.790.024,00	(2.839.942.101,00)	(0,23)
2	Beban Persediaan	398.819.152.251,79	361.655.139.056,65	37.164.013.195,14	10,28
3	Beban Jasa	817.895.657.735,72	763.459.300.802,48	54.436.356.933,24	7,13
4	Beban Pemeliharaan	200.667.467.236,00	146.011.452.259,00	54.656.014.977,00	37,43
5	Beban Perjalanan Dinas	63.463.101.473,00	94.617.582.922,00	(31.154.481.449,00)	(32,93)
6	Beban Bunga	4.968.539.728,00	7.571.414.651,00	(2.602.874.923,00)	(34,38)
7	Beban Hibah	151.099.258.419,00	176.519.335.387,00	(25.420.076.968,00)	(14,40)
8	Beban Bantuan Sosial	34.749.774.500,00	43.580.019.500,00	(8.830.245.000,00)	(20,26)
9	Beban Penyusutan dan Amortisasi	354.613.768.511,29	373.846.048.605,39	(19.232.280.094,10)	(5,14)
10	Beban Penyisihan Piutang	48.230.195.616,33	62.607.181.457,02	(14.376.985.840,69)	(22,96)
11	Beban Lain-Lain	-	23.335.696.382,00	(23.335.696.382,00)	(100,00)
	Jumlah	3.313.929.763.394,13	3.295.465.961.046,54	18.463.802.347,59	0,56

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan Beban Operasi TA 2025 sebesar Rp3.313.929.763.394,13 mengalami peningkatan sebesar Rp18.463.802.347,59 atau 0,56% jika dibandingkan dari Belanja Operasi TA 2024 sebesar Rp3.295.465.961.046,54.

Berikut penjelasan rincian masing-masing Beban Operasi.

5.4.2.1.1 Beban Pegawai

Beban Pegawai adalah beban Pemerintah Kota Bogor dalam pengeluaran yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah Kota Bogor yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Beban pegawai Kota Bogor TA 2025 sebesar Rp1.239.422.847.923,00 mengalami penurunan sebesar Rp2.839.942.101,00 atau 0,23% dari TA 2024 sebesar Rp1.242.262.790.024,00. Berikut beban pegawai disajikan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 5.4.49

Beban Pegawai TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1.	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	578.380.763.752,00	572.966.490.524,00	5.414.273.228,00	0,94
2.	Beban Tambahan Penghasilan ASN	535.076.847.502,00	393.260.379.090,00	141.816.468.412,00	36,06
3.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	26.362.227,00	148.688.467.311,00	(148.662.105.084,00)	(99,98)
4.	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	49.255.633.478,00	47.141.457.844,00	2.114.175.634,00	4,48
5.	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	776.919.319,00	64.134.616,00	712.784.703,00	1.111,39
6.	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	2.977.288.820,00	2.329.008.000,00	648.280.820,00	27,84
7.	Beban Pegawai BLUD	72.929.032.825,00	77.812.852.639,00	(4.883.819.814,00)	(6,28)
	Jumlah	1.239.422.847.923,00	1.242.262.790.024,00	(2.839.942.101,00)	(0,23)

Adapun perbandingan nilai Beban Pegawai antara LO dan LRA TA 2025 yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.50

Perbandingan Nilai Beban Pegawai pada LO dan LRA Tahun 2025

No	Uraian	LO	LRA	Selisih/Perbedaan
1.	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	578.380.763.752,00	578.380.763.752,00	0,00
2.	Beban Tambahan Penghasilan ASN	535.076.847.502,00	534.996.954.814,00	79.892.688,00
3.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	26.362.227,00	0,00	26.362.227,00
4.	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	49.255.633.478,00	49.255.633.478,00	0,00
5.	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	776.919.319,00	776.919.319,00	0,00
6.	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	2.977.288.820,00	2.977.288.820,00	0,00
7.	Beban Pegawai BLUD	72.929.032.825,00	75.662.933.924,00	(2.733.901.099,00)
	Jumlah	1.239.422.847.923,00	1.242.050.494.107,00	(2.627.646.184,00)

Selisih/perbedaan Beban Pegawai antara LO dan LRA sebesar Rp2.627.184,00 merupakan Utang belanja pegawai BLUD pada UPTD Puskesmas dan pembayaran utang belanja pegawai pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) - BLUD yang timbul pada periode TA 2025.

5.4.2.1.2 Beban Persediaan

Beban Persediaan adalah beban pemakaian persediaan atau konsumsi persediaan barang tertentu untuk menunjang operasional kegiatan Pemerintah Kota Bogor, pada TA 2025 terdapat Beban Persediaan sebesar Rp398.407.442.529,59. Jika dibandingkan dengan beban persediaan TA 2024 sebesar Rp361.655.139.056,65 maka mengalami peningkatan sebesar Rp36.752.303.472,94 atau 10,16%.

Berikut beban persediaan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.51

Beban Persediaan TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
	BEBAN PERSEDIAAN				
1	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	25.149.104.678,07	26.019.025.651,60	(869.920.973,53)	(3,34)
2	Beban Bahan-Bahan Kimia	5.304.265.872,49	4.214.346.014,11	1.089.919.858,38	25,86
3	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	21.228.955.397,00	23.480.239.414,00	(2.251.284.017,00)	(9,59)

No	Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
4	Beban Bahan-Bahan Baku	94.179.700,00	36.376.006,00	57.803.694,00	158,91
5	Beban Bahan-Bahan / Bibit Tanaman	2.299.808.997,00	1.613.783.572,00	686.025.425,00	42,51
6	Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	73.105.545,00	115.183.899,00	(42.078.354,00)	(36,53)
7	Beban Bahan-Isi Tabung Gas	148.336.644,00	140.423.631,00	7.913.013,00	5,64
8	Beban Bahan-Bahan / Bibit Ternak / Bibit Ikan	72.200.000,00	84.456.100,00	(12.256.100,00)	(14,51)
9	Beban Bahan-Bahan Lainnya	9.205.585.720,68	12.271.520.628,09	(3.065.934.907,41)	(24,98)
10	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	5.148.908.958,00	6.088.531.212,00	(939.622.254,00)	(15,43)
11	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	400.188.892,00	1.005.456.300,00	(605.267.408,00)	(60,20)
12	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	989.976.294,00	3.270.422.569,00	(2.280.446.275,00)	(69,73)
13	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	30.585.808,00	213.277.720,00	(182.691.912,00)	(85,66)
14	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	13.600.000,00	-	13.600.000,00	100,00
15	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	869.349.685,00	469.134.002,00	400.215.683,00	85,31
16	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	16.364.400,00	4.935.500,00	11.428.900,00	231,57
17	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	13.836.806,00	110.013.207,00	(96.176.401,00)	(87,42)
18	Beban Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	20.687.161.191,27	22.622.384.472,55	(1.935.223.281,28)	(8,55)
19	Beban Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	6.007.180.562,31	5.478.611.089,30	528.569.473,01	9,65
20	Beban Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	715.775.311,00	1.530.743.055,00	(814.967.744,00)	(53,24)
21	Beban Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	145.544.970,00	181.379.040,00	(35.834.070,00)	(19,76)
22	Beban Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	11.560.309.735,05	7.384.340.891,00	4.175.968.844,05	56,55
23	Beban Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	6.969.812.438,73	6.390.899.411,88	578.913.026,85	9,06
24	Beban Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	18.411.630.097,58	12.734.035.408,47	5.677.594.689,11	44,59
25	Beban Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	10.268.123.984,00	3.508.598.290,00	6.759.525.694,00	192,66
26	Beban Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olah Raga	1.038.281.537,00	1.721.910.966,00	(683.629.429,00)	(39,70)
27	Beban Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir / Cendera Mata	2.221.319.724,00	1.657.432.852,00	563.886.872,00	34,02
28	Beban Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	5.361.392.728,89	3.989.915.503,10	1.371.477.225,79	34,37
29	Beban Obat-Obatan-Obat	78.879.404.735,30	54.812.443.046,51	24.066.961.688,79	43,91
30	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	65.214.548.371,70	58.108.454.272,72	7.106.094.098,98	12,23
31	Beban Barang untuk Dijual / Diserahkan kepada Masyarakat	53.883.321.720,06	81.468.616.560,84	(27.585.294.840,78)	(33,86)
32	Beban Natura dan Pakan-Natura	6.543.508.618,66	7.279.299.394,48	(735.790.775,82)	(10,11)
33	Beban Natura dan Pakan-Pakan	107.264.545,00	180.019.250,00	(72.754.705,00)	(40,41)
34	Beban Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	145.718.800,00	4.218.000,00	141.500.800,00	3.354,69
35	Beban Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Lainnya	13.259.400,00	11.878.624,00	1.380.776,00	11,62
36	Beban Komponen-Komponen Peralatan	484.112.525,00	358.487.170,00	125.625.355,00	35,04
37	Beban Komponen-Komponen Rambu-Rambu	16.404.587.942,00	13.085.459.723,00	3.319.128.219,00	25,37
38	Beban Komponen-Komponen Lainnya	17.838.060,00	2.356.610,00	15.481.450,00	100,00
39	Beban Pipa-Pipa Baja	11.211.000,00	-	11.211.000,00	100,00
40	Beban Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	139.221.300,00	-	139.221.300,00	100,00
41	Beban Pipa-Pipa Lainnya	-	6.530.000,00	(6.530.000,00)	100,00
42	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	4.975.000,00	-	4.975.000,00	100,00
43	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Peralatan Intelijen	26.307.000,00	-	26.307.000,00	100,00

No	Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
44	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	5.045.119,00	-	5.045.119,00	100,00
45	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat BengkelBermesin-Perkakas Bengkel Service	449.550,00	-	449.550,00	100,00
46	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel TakBermesin-Perkakas Standard (Standard Tools)	6.680.000,00	-	6.680.000,00	100,00
47	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-AlatUkur/Pembanding	1.290.000,00	-	1.290.000,00	100,00
48	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-AlatTimbangan/Biara	1.020.000,00	-	1.020.000,00	100,00
49	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-AlatPenyimpan Perlengkapan Kantor	75.525.000,00	-	75.525.000,00	100,00
50	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-AlatKantor Lainnya	495.647.451,00	-	495.647.451,00	100,00
51	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat RumahTangga-Mebel	12.175.457.632,00	-	12.175.457.632,00	100,00
52	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat RumahTangga-Alat Pembersih	6.000.000,00	-	6.000.000,00	100,00
53	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat RumahTangga-Alat Pendingin	181.275.801,00	-	181.275.801,00	100,00
54	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat RumahTangga-Alat Dapur	6.646.200,00	-	6.646.200,00	100,00
55	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat RumahTangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	216.590.750,00	-	216.590.750,00	100,00
56	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat RumahTangga-Alat Pemadam Kebakaran	18.560.858,00	-	18.560.858,00	100,00
57	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-AlatStudio-Peralatan Studio Audio	3.628.200,00	-	3.628.200,00	100,00
58	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-AlatStudio-Alat Studio Lainnya	1.420.000,00	-	1.420.000,00	100,00
59	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-AlatKomunikasi-Alat Komunikasi Telephone	28.500.005,00	-	28.500.005,00	100,00
60	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-AlatKomunikasi-Alat Komunikasi Radio SSB	2.400.000,00	-	2.400.000,00	100,00
61	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	7.510.500,00	-	7.510.500,00	100,00
62	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi	999.000,00	-	999.000,00	100,00
63	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	2.497.500,00	-	2.497.500,00	100,00
64	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat KesehatanUmum-Alat Kesehatan Olahraga	669.000,00	-	669.000,00	100,00
65	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-AlatLaboratorium Umum	3.050.000,00	-	3.050.000,00	100,00

No	Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
66	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-AlatLaboratorium Fisika	3.000.000,00	-	3.000.000,00	100,00
67	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-AlatLaboratorium Elektronika dan Daya	2.000.000,00	-	2.000.000,00	100,00
68	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-AlatLaboratorium Biologi	2.850.000,00	-	2.850.000,00	100,00
69	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Matematika	18.350.000,00	-	18.350.000,00	100,00
70	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar	33.478.460,00	-	33.478.460,00	100,00
71	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah	173.800.009,00	-	173.800.009,00	100,00
72	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPS	20.208.400,00	-	20.208.400,00	100,00
73	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Kesenian	3.440.000,00	-	3.440.000,00	100,00
74	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Olahraga	146.314.550,00	-	146.314.550,00	100,00
75	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	24.425.000,00	-	24.425.000,00	100,00
76	Beban Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	11.737.000,00	-	11.737.000,00	100,00
77	Beban Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	9.567.800,00	-	9.567.800,00	100,00
78	Beban Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-PeralatanJaringan	4.627.600,00	-	4.627.600,00	100,00
79	Beban Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	28.195.000,00	-	28.195.000,00	100,00
80	Beban Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-PeralatanOlahraga Atletik	1.000.000,00	-	1.000.000,00	100,00
81	Beban Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan PerpustakaanTercetak-Buku Umum	2.030.495.422,00	-	2.030.495.422,00	100,00
82	Beban Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan PerpustakaanTercetak-Buku Filsafat	145.655.500,00	-	145.655.500,00	100,00
83	Beban Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan PerpustakaanTercetak-Buku Agama	499.242.050,00	-	499.242.050,00	100,00
84	Beban Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan PerpustakaanTercetak-Buku Ilmu Sosial	368.244.900,00	-	368.244.900,00	100,00
85	Beban Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan PerpustakaanTercetak-Buku Ilmu Bahasa	3.332.045.900,00	-	3.332.045.900,00	100,00
86	Beban Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan PerpustakaanTercetak-Buku Matematika dan Pengetahuan Alam	1.424.837.500,00	-	1.424.837.500,00	100,00

No	Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
87	Beban Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan PerpustakaanTercetak-Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	80.139.200,00	-	80.139.200,00	100,00
88	Beban Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan PerpustakaanTercetak-Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga	783.437.700,00	-	783.437.700,00	100,00
89	Beban Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan PerpustakaanTercetak-Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah	111.033.000,00	-	111.033.000,00	100,00
Jumlah		398.819.152.251,79	361.655.139.056,65	37.164.013.195,14	10,28

5.4.2.1.3 Beban Jasa

Beban Jasa merupakan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas. Pada TA 2025 terdapat beban jasa sebesar Rp817.895.657.735,72 jika dibandingkan dengan beban jasa TA 2024 sebesar Rp763.459.300.802,48 maka mengalami peningkatan sebesar Rp54.436.356.933,24 atau 7,13% disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.52
Beban Jasa TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Beban Makanan dan Minuman	56.086.147.647,00	53.682.898.848,00	2.403.248.799,00	4,48
2	Beban Pakaian Dinas	954.067.949,00	3.198.398.489,00	(2.244.330.540,00)	(70,17)
3	Beban Jasa Kantor	493.704.461.173,88	478.503.096.959,61	15.201.364.214,27	3,18
4	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	101.958.319.440,53	96.645.980.490,38	5.312.338.950,15	5,50
5	Beban Sewa Tanah	283.400.000,00	356.097.800,00	(72.697.800,00)	(20,42)
6	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	31.403.960.703,00	6.296.625.379,00	25.107.335.324,00	398,74
7	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	2.576.590.375,31	2.842.682.109,49	(266.091.734,18)	(9,36)
8	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	155.111.400,00	171.295.200,00	(16.183.800,00)	(9,45)
9	Beban Sewa Aset Tidak Berwujud	55.649.999,00	-	55.649.999,00	100,00
10	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	31.877.741.946,00	23.959.911.450,00	7.917.830.496,00	33,05
11	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	12.047.490.563,00	9.532.646.909,00	2.514.843.654,00	26,38
12	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	25.065.153.400,00	39.415.058.975,00	(14.349.905.575,00)	(36,41)
13	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	185.500.000,00	215.000.000,00	(29.500.000,00)	(13,72)
14	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	5.581.302.952,00	2.024.814.164,00	3.576.288.788,00	175,65
15	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	43.741.542.002,00	34.959.181.016,00	8.782.360.986,00	25,12
16	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/pihak Lain/Masyarakat	12.219.218.185,00	11.655.613.013,00	543.805.172,00	4,84
Jumlah		817.895.657.735,72	763.459.300.802,48	54.436.356.933,24	7,13

Adapun perbandingan nilai Beban Jasa antara LO dan LRA TA 2025 yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.53
Perbandingan Beban Jasa TA 2025 antara LO dan LRA

No	Uraian	LO	LRA	Selisih/Perbedaan
1	Beban Makanan dan Minuman	56.086.147.647,00	34.073.071.081,00	22.013.076.566,00
2	Beban Pakaian Dinas	954.067.949,00	1.392.262.236,00	(438.194.287,00)

No	Uraian	LO	LRA	Selisih/Perbedaan
3	Beban Jasa Kantor	493.704.461.173,88	279.973.351.655,00	213.731.109.518,88
4	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	101.958.319.440,53	94.927.709.854,00	7.030.609.586,53
5	Beban Sewa Tanah	283.400.000,00	159.800.000,00	123.600.000,00
6	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	31.403.960.703,00	30.508.358.603,00	895.602.100,00
7	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	2.576.590.375,31	2.192.017.478,00	384.572.897,31
8	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	155.111.400,00	155.111.400,00	-
9	Beban Sewa Aset Tidak Berwujud	55.649.999,00	55.649.999,00	-
10	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	31.877.741.946,00	31.833.957.996,00	43.783.950,00
11	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	12.047.490.563,00	11.941.864.443,00	105.626.120,00
12	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	25.065.153.400,00	-	25.065.153.400,00
13	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	185.500.000,00	179.500.000,00	6.000.000,00
14	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	5.581.302.952,00	4.739.401.930,00	841.901.022,00
15	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	43.741.542.002,00	43.511.326.799,00	230.215.203,00
16	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	12.219.218.185,00	12.124.147.904,00	95.070.281,00
Jumlah		817.895.657.735,72	547.767.531.378,00	270.128.126.357,72

Selisih/perbedaan Beban Jasa antara LO dan LRA sebesar Rp270.128.126.357,72 dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.54

Rincian Selisih Perbandingan Beban Jasa TA 2025 antara LO dan LRA

URAIAN	JUMLAH (Rp)
Saldo Beban Jasa - LO	817.895.657.735,72
Mutasi Tambah:	
Reklasifikasi Beban Pakaian Dinas menjadi Beban Perlengkapan Dinas	945.944.869
Utang Beban Barang dan Jasa yang bersumber dari beban jasa	4.557.745.173
Reklasifikasi Beban Iuran Jaminan/Asuransi Menjadi beban Dibayar Dimuka	509.194.504
Reklasifikasi Beban Sewa Gedung dan Bangunan Menjadi beban Dibayar Dimuka pada Kecamatan Bogor Selatan	4.947.103
Jumlah Mutasi Tambah	6.017.831.648,69
Mutasi Kurang :	
Reklasifikasi Beban Barang dan Jasa BOSP menjadi Beban Makanan dan Minuman pada Dinas Pendidikan	1.950.858.500,00
Reklasifikasi Beban Barang dan Jasa BOK menjadi Beban Makanan dan Minuman pada Dinas Kesehatan	5.408.888.660,00
Reklasifikasi Beban Barang dan Jasa BLUD menjadi Beban Makanan dan Minuman pada Dinas Kesehatan	14.653.329.406,00
Reklasifikasi Beban Barang dan Jasa BOSP menjadi Beban Pakaian Dinas pada Dinas Pendidikan	18.000.000,00
Reklasifikasi Beban Barang dan Jasa BLUD menjadi Beban Pakaian Dinas pada Dinas Kesehatan	489.750.582,00
Reklasifikasi Beban Barang dan Jasa BOSP menjadi Beban Jasa pada Dinas Pendidikan	35.703.005.422,00
Pengakuan Utang Beban Barang dan Jasa yang bersumber dari Beban Jasa	4.152.269.162,53
Reklasifikasi Beban Dibayar Dimuka menjadi Beban jasa atas Asuransi akibat bencana pohon tumbang pada Dinas Perumahan dan Permukiman	87.671.232,88
Reklasifikasi Beban Barang dan Jasa BOK menjadi Beban Jasa pada Dinas Kesehatan	48.894.000,00
Reklasifikasi Beban Barang dan Jasa BLUD menjadi Beban Jasa pada Dinas Kesehatan	178.297.014.875,00
Reklasifikasi Beban Barang dan Jasa BLUD menjadi Beban Iuran Jaminan/Asuransi pada Dinas Kesehatan	7.539.804.090,00
Reklasifikasi Beban Barang dan Jasa BLUD menjadi Beban Sewa Tanah pada Dinas Kesehatan	123.600.000,00
Reklasifikasi Beban Barang dan Jasa BOSP menjadi Beban Sewa Peralatan dan Mesin pada Dinas Pendidikan	105.827.100,00
Reklasifikasi Beban Barang dan Jasa BLUD menjadi Beban Sewa Peralatan dan Mesin pada Dinas Kesehatan	789.775.000,00
Reklasifikasi Beban Barang dan Jasa BOSP menjadi Beban Sewa Gedung dan Bangunan pada Dinas Pendidikan	1.750.000,00
Reklasifikasi Beban Barang dan Jasa BLUD menjadi Beban Sewa Gedung dan Bangunan pada Dinas Kesehatan	387.770.000,00
pencatatan utang belanja barang jasa atas pekerjaan konsultan pembangunan gapura jalan kresna raya sesuai dengan surat hasil reviu inspektorat pada Disperumkim	43.783.950,00
Reklasifikasi Beban Barang dan Jasa BLUD menjadi Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi pada Dinas Kesehatan	105.626.120,00
Reklasifikasi Beban Barang dan Jasa BLUD menjadi Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) pada Dinas Kesehatan	25.065.153.400,00

URAIAN	JUMLAH (Rp)
Reklasifikasi Beban Barang dan Jasa BLUD menjadi Beban Beasiswa Pendidikan PNS pada Dinas Kesehatan	6.000.000,00
Reklasifikasi Beban Barang dan Jasa BOSP menjadi Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan pada Dinas Pendidikan	474.832.000,00
Reklasifikasi Beban Barang dan Jasa BLUD menjadi Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan pada Dinas Kesehatan	367.069.022,00
Reklasifikasi Beban Barang dan Jasa BLUD menjadi Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat pada Dinas Kesehatan	230.215.203,00
Reklasifikasi Beban Barang dan Jasa BLUD menjadi Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat pada Dinas Kesehatan	95.070.281,00
Jumlah Mutasi Kurang	276.145.958.006,41
Saldo Belanja Jasa - LRA	547.767.531.378,00

5.4.2.1.4 Beban Pemeliharaan

Beban yang dikeluarkan untuk perbaikan atau pemeliharaan untuk menjaga aset tetap agar terjaga nilai ekonominya. Pada TA 2025 terdapat beban pemeliharaan sebesar Rp200.667.467.236,00 jika dibandingkan dengan beban pemeliharaan TA 2024 sebesar Rp146.011.452.259,00 maka mengalami penurunan sebesar Rp54.656.014.977,00 atau 37,43% disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.55
Beban Pemeliharaan TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1.	Beban Pemeliharaan Tanah	-	100.835.984,00	(100.835.984,00)	(100,00)
2.	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	31.568.731.340,00	28.491.055.567,00	3.077.675.773,00	10,80
3.	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	86.847.239.777,00	51.731.467.969,00	35.115.771.808,00	67,88
4.	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	77.983.685.024,00	65.296.933.439,00	12.686.751.585,00	19,43
5.	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	10.286.250,00	10.928.800,00	(642.550,00)	(5,88)
6.	Beban Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	4.257.524.845,00	380.230.500,00	3.877.294.345,00	1.019,72
	Jumlah	200.667.467.236,00	146.011.452.259,00	54.656.014.977,00	37,43

Adapun perbandingan nilai Beban Pemeliharaan antara LO dan LRA TA 2025 yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.56
Perbandingan Nilai Beban Pemeliharaan pada LO dan LRA tahun 2025

No	Uraian	LO	LRA	Selisih/Perbedaan
1.	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	31.568.731.340,00	23.432.529.661,00	8.136.201.679,00
2.	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	86.847.239.777,00	69.057.301.291,00	17.789.938.486,00
3.	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	77.983.685.024,00	77.699.803.316,00	283.881.708,00
4.	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	10.286.250,00	-	10.286.250,00
5.	Beban Pemeliharaan Aset Tidak berwujud	4.257.524.845,00	4.257.524.845,00	-
	Jumlah	200.667.467.236,00	174.447.159.113,00	26.220.308.123,00

Selisih/perbedaan LO dan LRA atas akun Beban Pemeliharaan adalah sebesar Rp26.220.308.123,00 dengan rincian perhitungan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.57
Rincian Selisih Nilai Beban Pemeliharaan pada LO dan LRA tahun 2025

URAIAN	JUMLAH (Rp)
Saldo Beban Pemeliharaan - LO	200.667.467.236,00
Mutasi Tambah:	
Reklasifikasi Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kota menjadi Beban Bahan-Bahan Baku pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	71.228.700
Jumlah Mutasi Tambah	71.228.700,00
Mutasi Kurang :	
Reklasifikasi Beban Barang dan Jasa BOSP menjadi Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin pada Dinas Pendidikan	1.443.984.300,00
Reklasifikasi Beban Barang dan Jasa BLUD menjadi Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin pada Dinas Kesehatan	6.692.217.379,00

URAIAN	JUMLAH (Rp)
Reklasifikasi Beban Barang dan Jasa BOSP menjadi Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan pada Dinas Pendidikan	12.162.926.632,00
Reklasifikasi Beban Barang dan Jasa BLUD menjadi Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan pada Dinas Kesehatan	5.627.011.854,00
Reklasifikasi Beban Barang dan Jasa BOSP menjadi Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi pada Dinas Pendidikan	103.352.000,00
Reklasifikasi Beban Barang dan Jasa BLUD menjadi Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi pada Dinas Kesehatan	251.758.408,00
Reklasifikasi Beban Barang dan Jasa BOSP menjadi Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya pada Dinas Pendidikan	10.286.250,00
Jumlah Mutasi Kurang	26.291.536.823,00
Saldo Belanja Pemeliharaan - LRA	174.447.159.113,00

5.4.2.1.5 Beban Perjalanan dinas

Beban Perjalanan dinas Pemerintah Kota Bogor pada Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp63.463.101.473,00, sedangkan pada tahun 2024 sebesar Rp94.617.582.922,00. Terdapat penurunan sebesar Rp31.154.481.449,00 atau 32,93%. Disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.58
Beban Perjalanan Dinas TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Beban Perjalanan Dinas Biasa	41.651.324.407,00	58.247.062.579,00	(16.595.738.172,00)	(28,49)
2	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	10.808.608.239,00	14.506.888.709,00	(3.698.280.470,00)	(25,49)
3	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	8.293.341.154,00	15.809.716.287,00	(7.516.375.133,00)	(47,54)
4	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	2.457.512.300,00	3.763.324.809,00	(1.305.812.509,00)	(34,70)
5	Beban Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	252.315.373,00	2.290.590.538,00	(2.038.275.165,00)	(88,98)
	Jumlah	63.463.101.473,00	94.617.582.922,00	(31.154.481.449,00)	(32,93)

Adapun perbandingan nilai Beban Perjalanan Dinas antara LO dan LRA TA 2025 yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.59
Perbandingan Nilai Beban Perjalanan Dinas pada LO dan LRA Tahun 2025

No	Uraian	LO	LRA	Selisih/Perbedaan
1	Beban Perjalanan Dinas Biasa	41.651.324.407,00	41.158.086.527,00	493.237.880,00
2	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	10.808.608.239,00	3.577.815.000,00	7.230.793.239,00
3	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	8.293.341.154,00	8.286.981.654,00	6.359.500,00
4	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	2.457.512.300,00	2.457.512.300,00	-
5	Beban Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	252.315.373,00	252.315.373,00	-
	Jumlah	63.463.101.473,00	55.732.710.854,00	7.730.390.619,00

Selisih/perbedaan Beban Perjalanan Dinas antara LO dan LRA sebesar Rp7.730.390.619,00 terdiri atas:

Tabel 5.4.60
Rincian selisih Nilai Beban Perjalanan Dinas pada LO dan LRA Tahun 2025

URAIAN	JUMLAH (Rp)
Saldo Beban Perjalanan Dinas - LO	63.463.101.473,00
Mutasi Tambah:	
Jumlah Mutasi Tambah	-
Mutasi Kurang :	
Reklasifikasi Beban Barang dan Jasa BOSP menjadi Beban Perjalanan Dinas Biasa pada Dinas Pendidikan	108.412.916,00

URAIAN	JUMLAH (Rp)
Reklasifikasi Beban Barang dan Jasa BLUD menjadi Beban Perjalanan Dinas Biasa pada Dinas Kesehatan	374.624.964,00
Reklasifikasi Beban Barang dan Jasa BOK menjadi Beban Perjalanan Dinas Biasa pada Dinas Kesehatan	10.200.000,00
Reklasifikasi Beban Barang dan Jasa BOSP menjadi Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota pada Dinas Pendidikan	1.161.640.239,00
Reklasifikasi Beban Barang dan Jasa BOK menjadi Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota pada Dinas Kesehatan	5.026.148.000,00
Reklasifikasi Beban Barang dan Jasa BLUD menjadi Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota pada Dinas Kesehatan	1.043.005.000,00
Reklasifikasi Beban Barang dan Jasa BOSP menjadi Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota pada Dinas Pendidikan	6.359.500,00
Jumlah Mutasi Kurang	7.730.390.619,00
Saldo Belanja Perjalanan Dinas - LRA	55.732.710.854,00

5.4.2.1.6 Beban Bunga

Beban ini merupakan beban bunga yang harus dibayarkan/ dikeluarkan akibat dari peminjaman uang kepada pihak lain, pada TA 2025 terdapat beban bunga sebesar Rp4.968.539.728,00 jika dibandingkan dengan beban bunga TA 2024 sebesar Rp7.571.414.651,00 maka mengalami penurunan sebesar Rp2.602.874.923,00 atau 34,38% pada tabel berikut.

Tabel 5.4.61
Beban Bunga TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1.	Beban Bunga Utang kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri- Jangka Panjang	4.359.834.790,00	6.035.551.928,00	(1.675.717.138,00)	(27,76)
2.	Beban Bunga Utang kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri- Jangka Panjang	483.260.494,00	543.668.056,00	(60.407.562,00)	11,11
3.	Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB) - BUMN - Jangka Pendek	125.444.444,00	992.194.667,00	(866.750.223,00)	(87,36)
	Jumlah	4.968.539.728,00	7.571.414.651,00	(2.602.874.923,00)	(34,38)

Adapun perbandingan nilai Beban Bunga antara LO dan LRA TA 2025 yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.62
Perbandingan Nilai Beban Bunga pada LO dan LRA Tahun 2025

No	Uraian	LO	LRA	Selisih/Perbedaan
1.	Beban Bunga Utang kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri- Jangka Panjang	4.359.834.790,00	4.903.502.846,00	(543.668.056,00)
2.	Beban Bunga Utang kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri- Jangka Panjang	483.260.494,00	-	483.260.494,00
3.	Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB) - BUMN - Jangka Pendek	125.444.444,00	125.444.444,00	-
	Jumlah	4.968.539.728,00	5.028.947.290,00	(60.407.562,00)

Selisih/perbedaan Beban bunga antara LO dan LRA sebesar Rp60.407.562,00 dapat dijelaskan pada table berikut.

Tabel 5.4.63
Rincian Selisih Nilai Beban Bunga pada LO dan LRA Tahun 2025

URAIAN	JUMLAH (Rp)
Saldo Beban Bunga - LO	4.968.539.728,00
Mutasi Tambah:	
Pembayaran Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor TA 2024 (Pinjaman World Bank)	543.668.056
Jumlah Mutasi Tambah	543.668.056,00
Mutasi Kurang :	
Utang Bunga Pinjaman sesuai Laporan Keuangan PDAM Kota Bogor (Audited) TA 2025	483.260.494
Jumlah Mutasi Kurang	483.260.494,00
Saldo Belanja Bunga - LRA	5.028.947.290,00

5.4.2.1.7 Beban Hibah

Beban Hibah adalah beban Pemerintah Kota Bogor dalam bentuk uang/ barang atau jasa kepada pemerintah daerah lainnya/masyarakat yang timbul karena adanya perikatan, pada TA 2025 terdapat beban hibah sebesar Rp151.099.258.419,00. Jika dibandingkan dengan beban hibah TA 2024 sebesar Rp176.519.335.387,00 mengalami penurunan sebesar Rp25.420.076.968,00 atau 14,40%, beban hibah disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.64
Beban Hibah TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Beban Hibah Kepada Pemerintah Pusat	26.561.439.150,00	64.853.633.758,00	(38.292.194.608,00)	(59,04)
	- Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	21.445.290.489,00	53.933.637.450,00	(32.488.346.961,00)	(60,24)
	- Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	5.116.148.661,00	10.919.996.308,00	(5.803.847.647,00)	(53,15)
2	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	48.349.691.124,00	38.968.786.299,00	9.380.904.825,00	24,07
	- Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	32.472.661.124,00	18.128.279.189,00	14.344.381.935,00	79,13
	- Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	575.000.000,00	486.350.000,00	88.650.000,00	18,23
	- Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	14.467.030.000,00	20.314.157.110,00	(5.847.127.110,00)	(28,78)
	- Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	835.000.000,00	-	835.000.000,00	100,00
	- Beban Hibah Uang kepada Koperasi	-	40.000.000,00	(40.000.000,00)	(100,00)
3	Beban Hibah Dana BOS	46.404.570.000,00	44.978.226.430,00	1.426.343.570,00	3,17
	- Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	46.404.570.000,00	44.978.226.430,00	1.426.343.570,00	3,17
4	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	3.616.338.000,00	3.397.282.000,00	219.056.000,00	6,45
	- Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	3.616.338.000,00	3.397.282.000,00	219.056.000,00	6,45
5	Beban Hibah Dana BOSP	26.167.220.145,00	24.321.406.900,00	1.845.813.245,00	100,00
	- Beban Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	9.216.007.410,00	8.812.864.900,00	403.142.510,00	100,00

No	Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
	- Beban Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	16.951.212.735,00	15.508.542.000,00	1.442.670.735,00	100,00
	Jumlah	151.099.258.419,00	176.519.335.387,00	(25.420.076.968,00)	(14,40)

Adapun perbandingan nilai Beban Hibah antara LO dan LRA TA 2025 yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.65
Perbandingan Nilai Beban Hibah pada LO dan LRA Tahun 2025

No	Uraian	LO	LRA	Perbedaan /Selisih
1	Beban Hibah Kepada Pemerintah Pusat	26.561.439.150,00	26.561.439.150,00	-
2	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	48.349.691.124,00	48.349.691.124,00	-
3	Beban Hibah Dana BOS	46.404.570.000,00	46.404.570.000,00	-
4	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	3.616.338.000,00	3.616.338.000,00	-
5	Beban Hibah Dana BOSP	26.167.220.145,00	26.167.220.145,00	-
	Jumlah	151.099.258.419,00	151.099.258.419,00	-

5.4.2.1.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial adalah beban Pemerintah Kota Bogor dalam bentuk uang/barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, pada TA 2025 beban bantuan sosial sebesar Rp34.749.774.500,00 apabila dibandingkan dengan TA 2024 sebesar Rp43.580.019.500,00 mengalami penurunan sebesar Rp8.830.245.000,00 atau 20,26%.

Tabel 5.4.66
Beban Bantuan Sosial TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	26.592.060.500,00	33.118.435.000,00	(6.526.374.500,00)	(19,71)
2	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya	8.157.714.000,00	10.461.584.500,00	(2.303.870.500,00)	(22,02)
	Jumlah	34.749.774.500,00	43.580.019.500,00	(8.830.245.000,00)	(20,26)

Adapun perbandingan nilai Beban Bantuan Sosial antara LO dan LRA TA 2025 yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.67
Perbandingan Nilai Beban Bantuan Sosial pada LO dan LRA Tahun 2025

No	Uraian	LO	LRA	Perbedaan / selisih
1	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	26.592.060.500,00	26.592.060.500,00	-
2	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya	8.157.714.000,00	8.157.714.000,00	-
	Jumlah	34.749.774.500,00	34.749.774.500,00	-

5.4.2.1.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama manfaat aset yang ada pada Kota Bogor. Beban penyusutan TA 2025 sebesar Rp358.786.226.789,03. Jika dibandingkan dengan beban

penyusutan TA 2024 sebesar Rp373.846.048.605,39 maka mengalami penurunan sebesar Rp15.059.821.816,36 atau 4,03%.

Beban Penyusutan tersebut disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.68
Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	106.278.580.392,37	121.272.053.305,14	(14.993.472.912,77)	(12,36)
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	39.998.238.618,81	36.659.773.287,72	3.338.465.331,09	9,11
3	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	211.832.506.962,50	215.277.266.080,06	(3.444.759.117,56)	(1,60)
4	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	594.833.927,75	504.069.349,25	90.764.578,50	18,01
5	Beban Penyusutan Aset Lain - Lain	-	50.819.695,62	(50.819.695,62)	(100,00)
6	Beban Penyusutan Properti Investasi	82.066.887,60	82.066.887,60	-	-
	Jumlah	358.786.226.789,03	373.846.048.605,39	(15.059.821.816,36)	(4,03)

Penjelasan terkait penurunan Beban Penyusutan dan Amortisasi dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.69
Penurunan Beban Penyusutan Peralatan Mesin pada TA 2025

URAIAN	JUMLAH (Rp)
Beban Penyusutan Peralatan Mesin TA 2025	
Mutasi Tambah:	
Beban Penyusutan Peralatan Mesin TA 2025	106.492.767.702,92
Jumlah Mutasi Tambah	106.492.767.702,92
Mutasi Kurang :	
Reklas aset tetap dibawah nilai kapitalisasi menjadi beban barjas	82.613.556,61
Reklas aset tetap yang menjadi Aset Rusak Berat	41.347.575,18
koreksi Hasil Inventarisasi	90.226.178,76
Jumlah Mutasi Kurang	214.187.310,55
Saldo akhir Beban Penyusutan Peralatan Mesin TA 2025	106.278.580.392,37

Tabel 5.4.70
Penurunan Beban Penyusutan Jalan Irigasi dan Jaringan pada TA 2025

URAIAN	JUMLAH (Rp)
Beban Penyusutan Jalan Irigasi dan Jaringan TA 2025	
Mutasi Tambah:	
Beban Penyusutan Jalan Irigasi dan Jaringan TA 2025	213.163.061.225,12
Jumlah Mutasi Tambah	213.163.061.225,12
Mutasi Kurang :	
Reklasifikasi akibat koreksi kurang volume (temuan)	1.231.550.587,62
Reklasifikasi Jalan Irigasi Jaringan ke KDP pada dinas PUPR tahun 2025	99.003.675,00
Jumlah Mutasi Kurang	1.330.554.262,62
Beban Penyusutan JIJ TA 2025	211.832.506.962,50

5.4.2.1.10 Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang merupakan taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa yang akan datang dari entitas lain, penghitungan beban penyisihan piutang tergantung jenis piutang dan sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Kota Bogor tentang Akuntansi Piutang. Pada tahun 2025 beban penyisihan piutang sebesar Rp48.230.195.616,33. Jika dibandingkan dengan beban penyisihan pada TA 2024 sebesar Rp62.607.181.457,02 maka mengalami penurunan sebesar Rp14.376.985.840,69 atau 22,96%. Pada tahun 2025 terdapat penurunan Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang yang disebabkan oleh adanya reklasifikasi ke aset lain-lain, dan terdapat

penurunan piutang Pajak Hotel dan Pajak Air Tanah yang berpengaruh terhadap beban penyisihan piutang.

Beban penyisihan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.71
Beban Penyisihan Piutang TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	31.844.042.368,00	40.037.270.138,00	(8.193.227.770,00)	(20,46)
2	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	505.556.956,90	702.963.994,06	(197.407.037,16)	(28,08)
3	Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	16.127.410.769,43	21.945.225.793,96	(5.817.815.024,53)	(26,51)
4	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	(246.814.478,00)	(78.278.469,00)	(168.536.009,00)	215,30
	Jumlah	48.230.195.616,33	62.607.181.457,02	(14.376.985.840,69)	(22,96)

Adapun perangkat daerah yang memiliki beban penyisihan piutang tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.4.72
Beban Penyisihan Piutang TA 2025 dan 2024 Per Perangkat Daerah

No	Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	DINAS KESEHATAN (Rumah Sakit Umum Daerah)				
	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD	610.092.474,82	1.996.623.748,00	(1.386.531.273,18)	(69,44)
	Jumlah	610.092.474,82	1.996.623.748,00	(1.386.531.273,18)	(69,44)
2	DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN				
	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha	53.330.225,00	173.450.800,00	(120.120.575,00)	(69,25)
	Jumlah	53.330.225,00	173.450.800,00	(120.120.575,00)	(69,25)
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
	Penyisihan Piutang Retribusi Perizinan Tertentu	56.627.463,65	-	56.627.463,65	100,00
	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Daerah	11.038.210,11	-	11.038.210,11	100,00
	Jumlah	67.665.673,76	-	67.665.673,76	100,00
4	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				
	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum	-	98.415.000,00	(98.415.000,00)	(100,00)
	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha	-	17.569.908,75	(17.569.908,75)	(100,00)
	Penyisihan Piutang Retribusi Perizinan Tertentu	-	(43.211.545,89)	43.211.545,89	(100,00)
	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Daerah	-	16.585.508,96	(16.585.508,96)	(100,00)
	Jumlah	-	89.358.871,82	(89.358.871,82)	(100,00)
5	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH				
	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha	395.599.268,25	456.739.831,20	(61.140.562,95)	(13,39)
	Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang	(246.814.478,00)	(78.278.469,00)	(168.536.009,00)	215,30
	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Daerah	65.974,50	-	65.974,50	100,00
	Jumlah	148.850.764,75	378.461.362,20	(229.610.597,45)	(60,670)
6	BADAN PENDAPATAN DAERAH				
	Penyisihan Piutang PBJT :				
	- Penyisihan Piutang Pajak Hotel	(4.507.322.578,00)	4.552.782.227,00	(9.060.104.805,00)	(199,00)
	- Penyisihan Pajak Restoran	1.320.225.550,00	44.611.918,00	1.275.613.632,00	2.859,36
	- Penyisihan Pajak Hiburan	173.066.890,00	259.847.423,00	(86.780.533,00)	(33,40)
	- Penyisihan Piutang Pajak Parkir	59.899.599,00	5.565.117,00	54.334.482,00	976,34
	Penyisihan Pajak Reklame	27.390.088,00	10.021.388,00	17.368.700,00	173,32
	Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah	(4.491.071,00)	67.533.093,00	(72.024.164,00)	(106,65)

No	Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
	Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)	34.775.375.837,00	35.096.806.779,00	(321.430.942,00)	(0,92)
	Beban Penyisihan Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	(101.947,00)	102.193,00	(204.140,00)	(199,76)
	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah	15.506.214.110,00	19.932.016.537,00	(4.425.802.427,00)	(22,20)
	Jumlah	47.350.256.478,00	59.969.286.675,00	(12.619.030.197,00)	(21,04)
	TOTAL	48.230.195.616,33	62.607.181.457,02	(14.376.985.840,69)	(22,96)

5.4.2.1.11 Beban Lain-Lain

Beban lain-lain merupakan beban yang tidak termasuk beban pegawai, beban barang dan jasa, beban transfer dan beban hibah. Beban lain-lain ini sebagian besar adalah beban reklasifikasi Belanja Modal yang tidak dapat dikapitalisasi menjadi aset karena harga beli dibawah nilai minimum kapitalisasi, pada TA 2025 tidak terdapat beban lain-lain dibandingkan TA 2024 sebesar Rp46.577.077.724,00 dikarenakan pada TA 2025 Belanja Modal yang tidak dapat dikapitalisasi menjadi aset karena harga beli dibawah nilai minimum kapitalisasi direklasifikasi menjadi Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi yang terbagi ke dalam kode rekening Beban Peralatan dan Mesin serta Beban Aset Tetap lainnya. Beban lain-lain disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.73
Beban Lain-lain TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Beban Lain-Lain	-	23.288.538.862,00	(23.288.538.862,00)	(100,00)
	- Reklas dari Peralatan Mesin	-	14.422.688.725,00	(14.422.688.725,00)	(100,00)
	- Reklas dari Aset Tetap Lainnya	-	8.865.850.137,00	(8.865.850.137,00)	(100,00)
	Jumlah	-	46.577.077.724,00	(46.577.077.724,00)	(100,00)

5.4.2.2 Beban Transfer

Beban transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh suatu peraturan perundang-undangan.

Beban Transfer pada TA 2025 sebesar Rp3.660.750.000,00 mengalami peningkatan dari beban transfer pada TA 2024 yaitu sebesar Rp1.660.750.000,00. Beban Transfer disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.74
Beban Transfer TA 2025 dan 2024

No	Keterangan	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1.	Beban Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi	2.000.000.000,00	-	2.000.000.000,00	100,00
2.	Beban Bantuan Keuangan umum antar Daerah Kabupaten/Kota	1.660.750.000,00	1.660.750.000,00	-	-
	Jumlah	3.660.750.000,00	1.660.750.000,00	2.000.000.000,00	120,43

Adapun rincian beban transfer bantuan keuangan TA 2025 dijelaskan sebagai berikut:

1. Bantuan keuangan kepada Provinsi Nangroe Aceh Darussalam dalam rangka penanganan masyarakat yang terdampak bencana alam sebesar Rp1.000.000.000,00

2. Bantuan keuangan kepada Provinsi Sumatera Barat dalam rangka penanganan masyarakat yang terdampak bencana alam sebesar Rp500.000.000,00
3. Bantuan keuangan kepada Provinsi Sumatera Utara dalam rangka penanganan masyarakat yang terdampak bencana alam sebesar Rp500.000.000,00
4. Bantuan Keuangan kepada Desa Galuga Kabupaten Bogor dalam rangka Kompensasi dampak lingkungan terhadap masyarakat disekitar TPAS Galuga sebesar Rp913.412.500,00.
5. Bantuan Keuangan kepada Desa Cijujung Kabupaten Bogor dalam rangka Kompensasi dampak lingkungan terhadap masyarakat disekitar TPAS Galuga sebesar Rp498.225.000,00.
6. Bantuan Keuangan kepada Desa Dukuh Kabupaten Bogor dalam rangka Kompensasi dampak lingkungan terhadap masyarakat disekitar TPAS Galuga sebesar Rp249.112.500,00.

Adapun perbandingan nilai Beban transfer antara LO dan LRA TA 2025 yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.75
Perbandingan Nilai Beban Transfer pada LO dan LRA Tahun 2025

No	Uraian	LO	LRA	Perbandingan/selisih
1.	Beban Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	-
2.	Bantuan Keuangan umum antar Daerah Kabupaten/Kota	1.660.750.000,00	1.660.750.000,00	-
	Jumlah	3.660.750.000,00	3.660.750.000,00	-

5.4.3 Surplus/ (Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional

5.4.3.1 Surplus Dari Kegiatan Non Operasional - LO

5.4.3.1.1 Surplus Penjualan / Pertukaran / Pelepasan Aset Non Lancar - LO

Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas kegiatan non operasional yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Pada TA 2025 terdapat Surplus Pelepasan Penyertaan Modal - LO sebesar Rp0,00 dan TA 2024 sebesar Rp14.388.624.170,56. Adapun Surplus Pelepasan Penyertaan Modal - LO merupakan selisih lebih atas pelepasan aset tetap dari Pemerintah Daerah Kota Bogor kepada Perusahaan Daerah Air Minum (BUMD) Kota Bogor.

5.4.3.2 Defisit Dari Kegiatan Non Operasional - LO

5.4.3.2.1 Defisit Penjualan / Pertukaran / Pelepasan Aset Non Lancar - LO

Digunakan untuk mencatat selisih kurang dari kegiatan non operasional lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. Defisit dari kegiatan non operasional lainnya - LO Tahun 2025 sebesar Rp0,00.

5.4.3.2.2 Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya- LO

Digunakan untuk mencatat selisih kurang dari kegiatan non operasional lainnya seperti penurunan nilai ekuitas pemerintah akibat aktivitas di luar operasional utama, terutama penurunan nilai investasi permanen pada BUMD, sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. Defisit dari kegiatan non operasional lainnya - LO Tahun 2025 tercatat sebesar Rp27.017.432.924,00. Nilai ini merupakan penurunan nilai investasi jangka panjang permanen sesuai dengan ekuitas pada LKPD Pasar Pakuan Jaya Audited Tahun 2025.

5.4.4 Pos Luar Biasa

5.4.4.1 Pendapatan Luar Biasa - LO

5.4.4.1.1 Pendapatan Luar Biasa - LO

Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pendapatan luar biasa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Pada TA 2025 dan 2024 Pemerintah Kota Bogor tidak memiliki pendapatan luar biasa - LO.

5.4.4.2 Beban Luar Biasa - LO

5.4.4.2.1. Beban Luar Biasa - LO

Penurunan ekuitas akibat peristiwa luar biasa yaitu kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada diluar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan. Beban luar biasa ini terdiri atas beban tidak terduga dan beban luar biasa lainnya.

Beban Luar Biasa - LO Tahun 2025 sebesar Rp6.143.068.000,00 mengalami peningkatan Rp3.956.024.115,00 atau 180,88% dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp2.187.043.885,00 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.76
Rincian Beban Luar Biasa TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Beban Tidak Terduga	6.143.068.000,00	2.187.043.885,00	3.956.024.115,00	180,88
	Jumlah	6.143.068.000,00	2.187.043.885,00	3.956.024.115,00	180,88

Adapun realisasi penggunaan beban tidak terduga tahun anggaran 2025 merupakan:

1. Pengembalian Sisa Bantuan Keuangan Provinsi Periode Tahun 2024 sebesar Rp6.666.000,00
2. Pengembalian dana kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing sebesar Rp19.068.000,00.
3. Bantuan tidak terduga dan bantuan sosial tidak terencana sebesar Rp6.124.000.000,00.

5.4.5. Surplus/Defisit - LO

Surplus/Defisit-LO adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa.

Surplus/Defisit-LO Kota Bogor Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp79.421.021.198,88 mengalami peningkatan dibandingkan Surplus/Defisit-LO Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp73.065.023.893,87.

5.5 PENJELASAN POS-POS ARUS KAS

5.5.1 Tujuan Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas bertujuan memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Informasi ini disajikan untuk pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan.

5.5.2 Definisi Arus Kas

1. Arus Kas adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas pada Bendahara Umum Daerah.
2. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah.
3. Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

5.5.3 Aktivitas Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan dan non anggaran.

1. Aktivitas Operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi. Penerimaan aktivitas operasi antara lain berupa penerimaan perpajakan, penerimaan bukan pajak, penerimaan hibah, penerimaan bagian laba BUMD, investasi lainnya dan penerimaan transfer, sedangkan pengeluaran aktivitas operasi antara lain berupa belanja pegawai, belanja barang.
2. Aktivitas investasi aset non keuangan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap dan aset non keuangan lainnya. Arus masuk kas dari aktivitas investasi aset non keuangan terdiri dari penjualan aset tetap dan penjualan aset lainnya. Sedangkan arus keluar kas terdiri dari perolehan aset tetap dan perolehan aset lainnya.
3. Aktivitas Pembiayaan adalah aktivitas penerimaan kas yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran kas yang akan diterima kembali yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi investasi jangka panjang, piutang jangka panjang, dan utang pemerintah sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran. Arus masuk kas dari aktivitas pembiayaan antara lain penerimaan pinjaman, penerimaan hasil penjualan surat utang Negara, penerimaan dari divestasi, penerimaan kembali pinjaman dan pencairan dana cadangan. Sedangkan arus keluar kas antara lain penyertaan modal pemerintah, pembayaran pokok pinjaman, dan pembentukan dana cadangan.
4. Aktivitas nonanggaran adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan pemerintah. Arus masuk kas dari aktivitas nonanggaran meliputi penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan kiriman uang masuk. Arus keluar kas dari aktivitas non anggaran meliputi pengeluaran PFK dan kiriman uang keluar. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar rekening di Kas Daerah.

5.5.4 Posisi Kas

Posisi saldo awal kas pada Laporan Arus Kas tahun 2025 sebesar Rp85.093.869.587,38 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.1
Rincian Saldo Awal Kas Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No	Rincian SiLPA	Saldo Awal 2025	Saldo Awal 2024
		(Rp)	(Rp)
1	2	3	4
1	Kas di Kas Daerah	79.503.327.898,00	33.520.359.707,00
2	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	922.000,00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	1.260.000,00
4	Kas di BLUD	2.153.130.596,38	17.674.821.168,14
5	Kas Lainnya	1.012.808.839,00	1.108.045.406,00
6	Kas Dana BOS	947.597.794,00	1.649.723.756,00
7	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	0,00	0,00
8	Bunga Dana Cadangan	1.477.004.460,00	555.364.458,00
Total		85.093.869.587,38	54.510.496.495,14

Posisi Kas pada 31 Desember 2025 sebesar Rp73.295.009.632,40 mengalami penurunan sebesar Rp11.798.859.954,98 dibandingkan saldo kas pada tahun 2024 Rp85.093.869.587,38 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.2
Arus Kas Masuk Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
		(Rp)	(Rp)
1	Aktivitas Operasi	3.231.067.760.556,02	3.169.108.210.680,24
2	Aktivitas Investasi	8.624.796.025,00	40.038.160.475,00
3	Aktivitas Pembiayaan	148.984.766.177,00	132.184.766.176,00
4	Aktivitas Transitoris	234.131.060.054,89	240.850.026.337,48
Jumlah		3.622.808.382.812,91	3.582.181.163.668,72

Tabel 5.5.3
Arus Kas Keluar Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
		(Rp)	(Rp)
1	Aktivitas Operasi	2.844.810.544.430,00	2.778.098.747.514,00
2	Aktivitas Investasi	406.574.926.236,00	400.367.986.619,00
3	Aktivitas Pembiayaan	148.984.766.176,00	132.184.766.176,00
4	Aktivitas Transitoris	234.237.005.925,89	240.946.290.267,48
Jumlah		3.634.607.242.676,89	3.551.597.790.576,48

Tabel 5.5.4
Kenaikan/ (Penurunan Kas) Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
		(Rp)	(Rp)
1	Arus Kas Masuk	3.622.808.382.812,91	3.582.181.163.668,72
2	Arus Kas Keluar	3.634.607.242.676,89	3.551.597.790.576,48
Arus Kas Bersih		(11.798.859.863,98)	30.583.373.092,24

5.5.5 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Kas bersih dari Aktivitas Operasi tahun 2025 adalah sebesar Rp 386.257.216.126,02 sedangkan tahun 2024 sebesar Rp391.009.463.166,24 yang diperoleh dari selisih antara arus masuk kas dengan arus keluar kas sebagai berikut:

Tabel 5.5.5
Arus Kas dari Aktivitas Operasi Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
		(Rp)	(Rp)
1	Arus Kas Masuk	3.231.067.760.556,02	3.169.108.210.680,24
2	Arus Kas Keluar	2.844.810.544.430,00	2.778.098.747.514,00
	Arus Kas Bersih	386.257.216.126,02	391.009.463.166,24

5.5.5.1 Arus Masuk Kas

Arus masuk kas dari Aktivitas Operasi tahun 2025 sebesar Rp3.231.067.760.556,02 sedangkan tahun 2024 sebesar Rp3.169.108.210.680,24 terdiri dari:

Tabel 5.5.6
Arus masuk kas dari Aktivitas Operasi Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
		(Rp)	(Rp)
1	Penerimaan Pajak Daerah	1.129.091.295.713,00	973.768.860.850,00
2	Penerimaan Retribusi Daerah	452.987.996.053,02	417.445.452.990,24
3	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	37.011.667.932,00	34.287.163.763,00
4	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	44.260.038.751,00	31.728.557.279,00
5	Penerimaan Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	126.979.208.200,00	114.423.344.000,00
6	Penerimaan Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	884.106.755.956,00	853.803.503.264,00
7	Penerimaan Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	25.574.335.904,00	44.829.645.150,00
8	Penerimaan Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	357.505.384.207,00	328.323.599.028,00
9	Penerimaan Insentif Fiskal	16.164.800.000,00	28.047.664.000,00
10	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil	145.298.859.311,00	303.076.793.631,00
11	Penerimaan Bantuan Keuangan	12.087.418.529,00	39.373.626.725,00
	Jumlah	3.231.067.760.556,02	3.169.108.210.680,24

Arus masuk kas dari Penerimaan Pajak Daerah tahun 2025 sebesar Rp 1.129.091.295.713 sedangkan 2024 sebesar Rp973.768.860.850,00 terdiri dari:

Tabel 5.5.7
Arus masuk kas dari Penerimaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
		(Rp)	(Rp)
1	Pajak Reklame	10.345.055.499,00	9.736.486.534,00
2	Pajak Air Tanah	1.833.350.454,00	1.924.708.540,00
3	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	232.621.103.275,00	210.911.617.241,00
4	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	217.482.762.394,00	286.435.829.900,00
5	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	221.822.999.895,00	208.515.593.649,00
6	PBJT-Tenaga Listrik	101.043.228.390,00	95.818.548.299,00
7	PBJT-Jasa Perhotelan	105.426.536.368,00	123.207.802.097,00
8	PBJT-Jasa Parkir	8.075.688.877,00	7.859.694.368,00
9	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	27.689.541.711,00	29.358.580.222,00
10	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	135.150.286.950,00	0,00
11	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	67.600.741.900,00	0,00
	Jumlah	1.129.091.295.713,00	973.768.860.850,00

Arus masuk kas dari Penerimaan Retribusi Daerah tahun 2025 sebesar Rp452.987.996.053,02 sedangkan tahun 2024 sebesar Rp417.445.452.990,24 terdiri dari:

Tabel 5.5.8
Arus masuk kas dari Penerimaan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
		(Rp)	(Rp)
1	Retribusi Jasa Umum	433.149.802.834,02	400.997.137.220,24
2	Retribusi Jasa Usaha	7.586.176.146,00	7.953.316.342,00
3	Retribusi Perizinan Tertentu	12.252.017.073,00	8.494.999.428,00
Jumlah		452.987.996.053,02	417.445.452.990,24

Arus masuk kas dari Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tahun 2025 sebesar Rp37.011.667.932,00 sedangkan tahun 2024 sebesar Rp34.287.163.763,00 terdiri dari:

Tabel 5.5.9
Arus masuk kas dari Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
		(Rp)	(Rp)
1	Bagian Laba PDAM Kota Bogor	29.559.100.635,00	25.588.368.239,00
2	Bagian Laba PT Bank Jabar Banten	4.260.852.544,00	4.750.663.159,00
3	Bagian Laba Bank Kota Bogor	2.941.714.753,00	2.774.558.399,00
4	Bagian Laba PD Pasar Pakuan Jaya	250.000.000,00	1.173.573.966,00
Jumlah		37.011.667.932,00	34.287.163.763,00

Arus masuk kas dari Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah tahun 2025 sebesar Rp44.260.038.751,00 sedangkan tahun 2024 Rp31.728.557.279,00 terdiri dari:

Tabel 5.5.10
Arus masuk kas dari Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
		(Rp)	(Rp)
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	12.629.016,00
2	Jasa Giro	5.570.270.122,00	4.035.307.746,00
3	Pendapatan Bunga	5.061.653.874,00	7.224.677.557,00
4	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	27.943.254,00	13.441.667,00
5	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	6.510.665.593,00	397.410.914,00
6	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	260.857.056,00	627.473.886,00
7	Pendapatan Denda Pajak Daerah	7.347.837.291,00	14.649.420.176,00
8	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	72.453.178,00	111.287.554,00
9	Pendapatan dari Pengembalian	15.259.278.151,00	3.836.302.493,00
10	Pendapatan BLUD	1.250.115.130,00	813.022.806,00
11	Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan	4.718.670,00	4.481.604,00
12	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	8.550.000,00	3.101.860,00
13	Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah	2.885.696.432,00	0,00
Jumlah		44.260.038.751,00	31.728.557.279,00

Arus masuk kas dari Penerimaan Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar tahun 2025 Rp126.979.208.200,00 sedangkan tahun 2024 sebesar Rp114.423.344.000,00 terdiri dari:

Tabel 5.5.11
Arus masuk kas dari Penerimaan Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
		(Rp)	(Rp)
1	DBH PBB	4.896.049.600,00	14.620.813.000,00
2	DBH PPh Pasal 21	80.274.210.100,00	54.897.720.000,00
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	9.065.113.500,00	8.471.478.000,00
4	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	8.234.433.000,00	7.956.105.000,00
5	DBH SDA Minyak Bumi	3.714.407.000,00	14.970.852.000,00
6	DBH SDA Gas Bumi	1.329.313.000,00	1.451.833.000,00
7	DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi	16.240.749.000,00	8.852.128.000,00
8	DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent	64.400,00	0,00
9	DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty	2.355.874.600,00	1.073.803.000,00
10	DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	35.189.000,00	1.031.457.000,00
11	DBH SDA Perikanan	833.805.000,00	1.097.155.000,00
Jumlah		126.979.208.200,00	114.423.344.000,00

Arus masuk Kas dari Penerimaan Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2025 sebesar Rp884.106.755.956,00 sedangkan tahun 2024 sebesar Rp853.803.503.264,00.

Arus masuk kas dari Penerimaan Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik tahun 2025 sebesar Rp 25.574.335.904,00 sedangkan tahun 2024 sebesar Rp44.829.645.150,00 merupakan Bagi Hasil dari:

Tabel 5.5.12
Penerimaan Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
		(Rp)	(Rp)
1	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	0,00	204.102.129,00
2	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	198.500.000,00	1.977.458.787
3	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	168.600.009,00	0,00
4	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem dan Kapasitas Pelayanan Kesehatan	14.968.163.988,00	0,00
5	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Layanan Dasar	545.411.907,00	0,00
6	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Layanan Dasar	9.693.660.000,00	9.534.780.000,00
7	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	0,00	77.707.500,00
8	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	0,00	33.035.596.734,00
Jumlah		25.574.335.904,00	44.829.645.150,00

Arus masuk kas dari Penerimaan Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik tahun 2025 sebesar Rp357.505.384.207,00 sedangkan tahun 2024 sebesar Rp328.323.599.028,00 merupakan Bagi Hasil dari:

Tabel 5.5.13
Arus masuk Kas dari Penerimaan Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
		(Rp)	(Rp)
1	DAK Non Fisik-BOS Reguler	0,00	152.805.914.824,00
2	DAK Non Fisik-TPG PNSD	142.528.915.100,00	103.382.644.000,00
3	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	973.500.000,00	3.816.547.000,00
4	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler	153.724.702.206,00	0,00
5	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja	2.863.250.000,00	2.335.000.000,00
6	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	9.582.277.279,00	9.076.914.900,00
7	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	45.000.000,00	90.000.000,00
8	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesenjangan Reguler	17.018.452.735,00	15.616.122.000,00
9	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesenjangan Kinerja	270.000.000,00	180.000.000,00
10	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	8.771.025.936,00	15.174.498.103,00
11	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	14.105.565.292,00	16.528.434.594,00
12	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana	6.971.956.659,00	8.036.889.807,00
13	DAK Non Fisik-BOK-BOK Pengawasan Obat dan Makanan	564.099.000,00	0,00
14	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian	86.640.000,00	0,00
15	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	0,00	354.633.800,00
16	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	0,00	406.000.000,00
17	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00	520.000.000,00
Jumlah		357.505.384.207,00	328.323.599.028,00

Arus masuk Kas dari Penerimaan Insentif Fiskal tahun 2025 sebesar Rp16.164.800.000,00 sedangkan tahun 2024 sebesar Rp28.047.664.000,00.

Arus Masuk dari Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil tahun 2025 sebesar Rp145.298.859.311,00 sedangkan tahun 2024 sebesar Rp303.076.793.631,00

Tabel 5.5.14
Arus masuk Kas dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
		(Rp)	(Rp)
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	5.174.285.040,00	107.078.086.620,00
2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	4.666.803.750,00	66.162.370.710,00
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	71.067.683.322,00	70.084.028.487,00
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	199.105.801,00	219.606.800,00
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	64.190.981.398,00	59.532.701.014,00
Jumlah		145.298.859.311,00	303.076.793.631,00

Arus Masuk dari Penerimaan Bantuan Keuangan tahun 2025 sebesar Rp12.087.418.529,00 sedangkan tahun 2024 sebesar Rp39.373.626.725,00

5.5.5.2 Arus Keluar Kas

Arus keluar kas untuk Aktivitas Operasi tahun 2025 adalah sebesar Rp2.844.810.544.430,00 sedangkan tahun 2024 sebesar Rp2.778.098.747.514,00. Jumlah tersebut merupakan pengeluaran-pengeluaran dalam kaitannya dengan pengeluaran untuk aktivitas operasional, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.15
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
		(Rp)	(Rp)
1	Belanja Pegawai	1.242.050.494.107,00	1.242.957.964.907,00
2	Belanja Barang dan Jasa	1.402.071.586.114,00	1.304.164.987.240,00
3	Belanja Bunga	5.028.947.290,00	7.027.746.595,00
4	Belanja Hibah	151.099.258.419,00	176.519.335.387,00
5	Belanja Bantuan Sosial	34.749.774.500,00	43.580.019.500,00
6	Belanja Tidak Terduga	6.149.734.000,00	2.187.943.885,00
7	Belanja Bantuan Keuangan	3.660.750.000,00	1.660.750.000,00
Jumlah		2.844.810.544.430,00	2.778.098.747.514,00

5.5.6 Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Penurunan Arus Kas bersih dari Aktivitas Investasi tahun 2025 adalah sebesar Rp397.950.130.211,00 sedangkan tahun 2024 sebesar Rp398.978.568.744,00 yang merupakan selisih antara arus masuk kas dengan arus keluar kas sebagai berikut:

Tabel 5.5.16
Arus Kas bersih dari Aktivitas Investasi Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
		(Rp)	(Rp)
1	Arus Masuk Kas	8.624.796.025,00	40.038.160.475,00
2	Arus Keluar Kas	406.574.926.236,00	400.367.986.619,00
Arus Kas Bersih		(397.950.130.211,00)	(360.329.826.144,00)

5.5.6.1 Arus Masuk Kas

Arus masuk kas dari Aktivitas Investasi tahun 2025 sebesar Rp8.624.796.025,00 sedangkan tahun 2024 sebesar Rp40.038.160.475,00 Arus masuk tersebut diperoleh dari:

Tabel 5.5.17
Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
		(Rp)	(Rp)
1	Pencairan Dana Cadangan	6.921.680.300,00	38.648.742.600,00
2	Penjualan atas Tanah	20.639.450,00	24.168.075,00
3	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	227.897.000,00	40.529.200,00
4	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
5	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00
6	Pendapatan Penjualan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
7	Pendapatan Penjualan Aset Lainnya	0,00	0,00
8	Pendapatan Penjualan Aset Lain-Lain	1.454.579.275,00	1.324.720.600,00
Arus Kas Bersih		8.624.796.025,00	40.038.160.475,00

5.5.6.2 Arus Keluar Kas

Arus kas keluar dari Aktivitas Investasi tahun 2025 sebesar 406.574.926.236,00 sedangkan tahun 2024 sebesar Rp400.367.986.619,00 yang merupakan belanja modal/aset tetap yang dilaksanakan pada Dinas/Kantor/Badan Pemerintah Kota Bogor, yang terdiri dari:

Tabel 5.5.18
Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
		(Rp)	(Rp)
1	Pembentukan Dana Cadangan	8.300.000.000,00	0,00
2	Perolehan Tanah	28.044.059.320,00	2.477.717.100,00
3	Perolehan Peralatan dan Mesin	110.067.042.014,00	133.226.642.367,00
4	Perolehan Gedung dan Bangunan	114.464.370.580,00	141.166.601.172,00
5	Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	117.476.854.621,00	112.729.496.656,00
6	Perolehan Aset Tetap Lainnya	12.610.804.842,00	10.693.173.754,00
7	Perolehan Aset Lainnya	611.794.859,00	74.355.570,00
8	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	15.000.000.000,00	0,00
Arus Kas Bersih		406.574.926.236,00	400.367.986.619,00

5.5.7 Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan

Arus Kas bersih dari Aktivitas Pembiayaan tahun 2025 sebesar Rp1,00 sedangkan tahun 2024 sebesar Rp0,00 yang merupakan selisih antara arus masuk kas dengan arus keluar kas sebagai berikut:

Tabel 5.5.19
Arus Kas bersih dari Aktivitas Pembiayaan Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
		(Rp)	(Rp)
1	Arus Kas masuk	148.984.766.177,00	132.184.766.176,00
2	Arus Kas Keluar	148.984.766.176,00	132.184.766.176,00
Arus Kas Bersih		1,00	0,00

5.5.7.1 Arus Masuk Kas

Arus masuk kas dari aktivitas pembiayaan tahun 2025 adalah sebesar Rp148.984.766.177,00 sedangkan tahun 2024 sebesar Rp132.184.766.176,00 terdiri dari:

Tabel 5.5.20
Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pembiayaan Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
		(Rp)	(Rp)
1	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	143.500.000.000,00	126.700.000.000,00
2	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	5.484.766.177,00	5.484.766.176,00
Arus Kas Bersih		148.984.766.177,00	132.184.766.176,00

5.5.7.2 Arus Keluar Kas

Arus keluar kas dari aktivitas pembiayaan tahun 2025 adalah sebesar Rp148.984.766.176,00 sedangkan tahun 2024 sebesar Rp132.184.766.176,00 yang terdiri dari penyertaan modal pmda dan pemberian pinjaman daerah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.21
Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pembiayaan Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
		(Rp)	(Rp)
1	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	5.484.766.176,00	5.484.766.176,00
2	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	143.500.000.000,00	126.700.000.000,00
Arus Kas Bersih		148.984.766.176,00	132.184.766.176,00

5.5.8. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus Kas bersih dari Aktivitas Transitoris tahun 2025 adalah sebesar Rp(105.945.871,00) sedangkan tahun 2024 sebesar (Rp96.263.930,00) Rincian arus masuk dan keluar kas adalah sebagai berikut:

Tabel 5.5.22
Arus Kas bersih dari Aktivitas Transitoris Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
		(Rp)	(Rp)
1	Arus Kas masuk	234.131.060.054,89	240.850.026.337,48
2	Arus Kas Keluar	234.237.005.925,89	240.946.290.267,48
Arus Kas Bersih		(105.945.871,00)	(96.263.930,00)

5.5.8.1 Arus Masuk Kas

Arus masuk kas dari Aktivitas Transitoris tahun 2025 adalah sebesar Rp234.131.060.054,89 sedangkan tahun 2024 sebesar Rp240.850.026.337,48 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.23
Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
		(Rp)	(Rp)
1	Utang Taspen	664.537.129,00	527.485.149,00
2	Utang Iuran Jaminan Kesehatan	34.518.067.035,00	32.767.962.848,00
3	Utang Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	827.673.787,00	821.437.502,00
4	Utang Iuran Jaminan Kematian	2.477.579.703,00	2.464.307.763,00
5	Utang PPh Pusat	77.147.993.237,89	88.426.580.829,29
6	Utang PPN Pusat	82.447.302.494,00	79.276.207.939,19
7	Utang Iuran Wajib Pegawai	36.020.074.639,00	36.531.994.307,00
8	Uang Jaminan	24.000.000,00	28.500.000,00
9	Koreksi SiLPA	3.832.030,00	5.550.000,00
Jumlah		234.131.060.054,89	240.850.026.337,48

5.5.8.2 Arus Keluar Kas

Arus keluar kas dari Aktivitas Transitoris tahun 2025 adalah sebesar Rp234.176.005.925,89 sedangkan tahun 2024 sebesar Rp240.946.290.267,48 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.24
Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
		(Rp)	(Rp)
1	Utang Taspen	664.537.129,00	527.485.149,00
2	Utang Iuran Jaminan Kesehatan	34.518.067.035,00	32.767.962.848,00
3	Utang Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	827.673.787,00	821.437.502,00
4	Utang Iuran Jaminan Kematian	2.477.579.703,00	2.464.307.763,00
5	Utang PPh Pusat	77.147.993.237,89	88.437.631.725,29
6	Utang PPN Pusat	82.456.080.395,00	79.267.430.038,19
7	Utang Iuran Wajib Pegawai	36.020.074.639,00	36.531.994.307,00
8	Utang Jaminan Bongkar	125.000.000,00	128.000.000,00
9	Koreksi SILPA	0,00	40.935,00
Jumlah		234.237.005.925,89	240.946.290.267,48

5.5.9 Saldo Akhir Kas

Saldo Akhir Kas pada 31 Desember 2025 sebesar Rp 73.295.009.632,40 sedangkan pada 31 Desember 2024 sebesar Rp83.616.865.127,38 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.25
Rincian Saldo Akhir Kas Tahun Anggaran Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
		(Rp)	(Rp)
1	Saldo Akhir Kas di BUD	56.718.328.310,00	79.503.327.898,00
2	Saldo Kas Di BLUD	15.610.395.136,40	2.153.130.596,38
3	Saldo Kas di Bendahara BOS	616.566.724,00	947.597.794,00
4	Saldo Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
5	Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
6	Saldo Kas Lainnya	48.870.128,00	1.012.808.839,00
7	Kas Dana BOK Puskesmas	300.849.334,00	0,00
Jumlah		73.295.009.632,40	83.616.865.127,38

5.6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/(defisit) - LO, koreksi dan ekuitas akhir, dimana ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo Ekuitas per 31 Desember 2025 berasal dari Saldo Ekuitas Awal ditambah/dikurang dengan Surplus/(Defisit) LO dan Perubahan ekuitas lainnya.

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Saldo awal ekuitas Tahun 2025 sebesar Rp10.869.386.015.526,97 Surplus/(Defisit) - LO sebesar Rp79.421.021.198,88 merupakan defisit atas kegiatan operasional yang mengurangi nilai ekuitas pada Neraca Pemerintah Kota Bogor. Dampak kumulatif karena perubahan kebijakan atau kesalahan mendasar sebesar Rp(27.896.607.638,75) sehingga Ekuitas Akhir Tahun 2025 sebesar Rp10.920.910.429.087,10 dapat dirinci sebagai berikut.

5.6.1 Ekuitas Awal

Ekuitas awal pada tahun 2025 sebesar Rp10.869.386.015.526,97 sedangkan pada tahun 2024 sebesar Rp10.613.114.672.934,97 sehingga mengalami peningkatan sebesar Rp256.271.342.592,00 atau 2,41%.

5.6.2 Surplus/Defisit - LO

Surplus/Defisit - LO TA 2025 sebesar Rp79.421.021.198,88 sedangkan pada tahun 2024 sebesar Rp73.065.023.893,87 mengalami kenaikan sebesar 6.355.997.305,01 atau sebesar (8,70%)

5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Dampak kumulatif merupakan kumpulan dari dampak-dampak yang terjadi akibat dari adanya perubahan kebijakan akuntansi ataupun kegiatan-kegiatan pada periode sebelumnya, saat ini dan yang diperkirakan akan terjadi di masa mendatang.

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp(27.896.607.638,75) sedangkan pada tahun 2024 sebesar Rp183.206.318.698,13, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.6.1
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar TA 2025

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
		(Rp)	(Rp)
1	2	3	4
1	Koreksi Nilai Persediaan	(591.939.014,93)	25.303.013,44
2	Hasil Inventarisasi - Aset Tetap (Tanah)	1.230.636.025,07	73.815.713.760,00
3	Hasil Inventarisasi - Aset Tetap (Peralatan dan Mesin)	(28.201.577.198,85)	(6.852.682.613,17)
4	Hasil Inventarisasi - Aset Tetap (Gedung dan Bangunan)	(3.306.841.078,66)	(509.028.026,00)
5	Hasil Inventarisasi - Aset Tetap (Jalan Irigasi dan Jaringan)	(185.595.205,26)	2.734.814.178,00
6	Hasil Inventarisasi - Aset Tetap (Aset Tetap Lainnya)	(240.774.129,00)	677.492.474,15
7	Hasil Inventarisasi - Aset Lainnya	10.102.309.482,49	(12.075.219.301,50)
8	Hasil Inventarisasi - Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	28.892.161.976,44	9.643.553.427,56
9	Hasil Inventarisasi - Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(12.751.976.501,05)	11.679.490.047,73
10	Koreksi Ekuitas Lainnya	(22.843.011.995,00)	104.066.881.737,92
	Jumlah	(27.896.607.638,75)	183.206.318.698,13

5.6.3.1. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar - Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi nilai persediaan pada tahun 2025 sebesar Rp(591.939.014,93) sedangkan pada tahun 2024 sebesar Rp25.303.013,44 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.6.2 Koreksi
Nilai Persediaan

No	Uraian	Saldo TA 2025			Saldo TA 2024
		Penambahan	Pengurangan	Saldo	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5	6
1	Dinas Pendidikan	0,00	0,00	0,00	13.960.087,99
2	Dinas Kesehatan	11.261.740.310,25	11.261.740.310,19	0,06	(411.860.636,31)
3	Rumah Sakit Umum Daerah	0,00	0,00	0,00	421.392.374,75
4	Dinas Tenaga Kerja	0,00	0,00	0,00	1.086.187,00
5	Dinas Perhubungan	0,01	0,00	0,01	
6	Badan Pendapatan Daerah	199.100,00	592.138.115,00	(591.939.015,00)	
7	Kecamatan Bogor Utara	0,00	0,00	0,00	725.000,00
8	Kecamatan Tanah Sareal	0,00	0,00	0,00	0,01
	Jumlah	11.261.939.410,26	11.853.878.425,19	(591.939.014,93)	25.303.013,44

5.6.3.2. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar - Selisih Revaluasi Aktiva Tetap

Selisih revaluasi aktiva tetap pada tahun 2025 sebesar Rp0,00 dan pada tahun 2024 juga sebesar Rp0,00.

5.6.3.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar - Koreksi Aset Tetap

Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar - lain lain tahun anggaran 2025 sebesar (Rp4.461.656.628,82) sedangkan pada tahun 2024 sebesar Rp79.114.133.947,76 mengalami penurunan sebesar Rp74.652.477.317,94 atau sebesar (94,36%).

Tabel 5.6.3
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar - Aset Tetap

No	Uraian	Saldo TA 2025			Saldo TA 2024
		Penambahan	Pengurangan	Saldo	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5	6
1	Hasil Inventarisasi - Aset Tetap (Tanah)	93.272.671.055,00	92.042.035.029,93	1.230.636.025,07	73.815.713.760,00
2	Hasil Inventarisasi - Aset Tetap (Peralatan dan Mesin)	8.537.626.651,03	36.739.203.849,88	(28.201.577.198,85)	(6.852.682.613,17)
3	Hasil Inventarisasi - Aset Tetap (Gedung dan Bangunan)	18.207.118.215,48	21.513.959.294,14	(3.306.841.078,66)	(509.028.026,00)
4	Hasil Inventarisasi - Aset Tetap (Jalan Irigasi dan Jaringan)	58.216.000,00	243.811.205,26	(185.595.205,26)	2.734.814.178,00
5	Hasil Inventarisasi - Aset Tetap (Aset Tetap Lainnya)	1.268.790.000,00	1.509.564.129,00	(240.774.129,00)	677.492.474,15
6	Hasil Inventarisasi - Aset Lainnya	31.655.195.223,80	21.552.885.741,31	10.102.309.482,49	12.075.219.301,50)
7	Hasil Inventarisasi - Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	44.126.534.439,91	15.234.372.463,47	28.892.161.976,44	9.643.553.427,55
8	Hasil Inventarisasi - Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	16.629.561.411,70	29.381.537.912,75	(12.751.976.501,05)	11.679.490.047,73
	Jumlah	213.755.712.996,92	218.217.369.625,74	(4.461.656.628,82)	79.114.133.946,76

Salah satu faktor terjadinya perubahan ekuitas melalui inventarisasi karena adanya perubahan batasan nilai kapitalisasi sesuai dengan Peraturan Wali Kota Bogor No. 14 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bogor No. 12 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

5.6.3.4. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar - Koreksi Ekuitas Lainnya

Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar - Koreksi Ekuitas Lainnya tahun anggaran 2025 sebesar (Rp22.843.011.995,00) sedangkan pada tahun 2024 sebesar Rp104.066.881.737,92 mengalami penurunan sebesar Rp125.874.693.732,92 atau sebesar (120,96%).

Tabel 5.6.4
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar - Koreksi Ekuitas Lainnya

No	Uraian	Saldo TA 2025			Saldo TA 2024
		Penambahan	Pengurangan	Saldo	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5	6
1	Koreksi Ekuitas Lainnya	840.357.287,49	774.332.145,49	66.025.142,00	0,00
2	Koreksi Kas	1.294.094.489,00	1.290.262.459,00	3.832.030,00	5.000.000,00
3	Koreksi Piutang	42.163.686.992,00	50.826.595.925,00	(8.662.908.933,00)	29.523.274.561,00
4	Koreksi Penyisihan Piutang	3.874.922.935,04	3.265.343.970,04	609.578.965,00	0,00
5	Koreksi atas Kontruksi Dalam Pengerjaan	0,00	1.411.790.974,00	(1.411.790.974,00)	(3.037.896.140,00)
6	Koreksi Investasi	0,00	14.103.134.302,00	(14.103.134.302,00)	77.475.773.787,92
7	Koreksi Utang	655.386.077,00	0,00	655.386.077,00	100.729.529,00
Jumlah		48.828.447.780,53	71.671.459.775,53	(22.843.011.995,00)	104.066.881.737,92

Koreksi ekuitas lainnya tahun 2025 sebesar Rp66.025.142,00 merupakan koreksi atas rekalkulasi saldo pendapatan diterima dimuka pada RSUD.

5.6.4 Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir pada tahun 2025 sebesar Rp10.920.910.429.087,10 pada tahun 2024 sebesar Rp10.869.386.015.526,97 sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp51.524.413.560,20 atau sebesar 0,47%. Ekuitas Akhir merupakan jumlah dari Ekuitas Awal, Surplus/Defisit-LO serta Koreksi Ekuitas.

BAB VI

INFORMASI TAMBAHAN

6.1. Visi dan Misi Kota Bogor

Rencana pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan yang mampu meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat, membuka kesempatan kerja dan berusaha, serta memperluas akses terhadap pelayanan publik dan daya saing daerah yang merupakan langkah strategis Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dalam rangka mewujudkan visi dan misi kepala daerah.

Wali Kota Bogor periode 2025-2030, Kota Bogor memiliki Visi Jangka Menengah yaitu “Bogor Beres, Bogor Maju”, dengan 4 Misi yaitu:

- 1) Bogor Cerdas
Memastikan ketersediaan fasilitas dan perluasan akses pendidikan yang merata, terjangkau, berkelanjutan, berkeadilan untuk seluruh lapisan masyarakat. Serta memperdayakan Lembaga Pendidikan formal dan non formal.
- 2) Bogor Sehat
Memastikan setiap warga kota bogor mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang memadai dan berkualitas untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia.
- 3) Bogor Sejahtera
Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
- 4) Bogor Lancar
Menjadikan Kota Bogor sebagai Kota yang nyaman, modern, dan siap menghadapi tantangan masa depan dengan mengatasi kemacetan lalu lintas serta mengoptimalkan fasilitas publik

Visi dan misi tersebut diturunkan ke dalam Program Kerja strategis, di antaranya:

1. Harmonisasi Anggaran: Penyelarasan visi-misi agar program-program janji kampanye dapat segera diintervensi melalui anggaran perubahan.
2. Digitalisasi Tata Kelola: Memperkuat pelayanan publik berbasis digital untuk transparansi dan efisiensi birokrasi.
3. Penyelesaian Isu Transportasi: Melanjutkan proyek-proyek strategis infrastruktur transportasi yang telah dirintis sebelumnya

6.2 Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor

Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi pegawai yang bekerja pada instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, Komposisi Pegawai: ASN terdiri dari dua kategori utama, yaitu:

1. Pegawai Negeri Sipil (PNS): Pegawai yang diangkat sebagai pegawai tetap dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional.
2. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK): Pegawai yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

Jumlah Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Bogor pada tahun 2025 adalah sejumlah 7.643 orang dengan rincian jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin adalah 3.078 Laki-laki dan 4.566 Perempuan, adapun rincian jumlah pegawai setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bogor terdapat dalam tabel sebagai berikut

Tabel 6.2.1

Rekapitulasi Jumlah Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor

No	Perangkat Daerah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bogor	26	24	50
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bogor	20	4	24
3	Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor	25	20	45
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor	17	5	22
5	Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor	55	29	84
6	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bogor	24	22	46
7	Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bogor	9	22	31
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor	29	18	47
9	Dinas Kesehatan Kota Bogor	124	854	978
10	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bogor	33	34	67
11	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor	33	27	60
12	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor	38	21	59
13	Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor	207	25	232
14	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor	19	15	34
15	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor	87	20	107
16	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bogor	63	2	62
17	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bogor	11	20	31
18	Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bogor	31	13	44
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor	27	12	39
20	Dinas Pendidikan Kota Bogor	1.107	2.809	3.916
21	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bogor	8	19	28
22	Dinas Perhubungan Kota Bogor	195	20	216
23	Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor	78	17	95
24	Dinas Sosial Kota Bogor	26	14	40
25	Dinas Tenaga Kerja Kota Bogor	25	9	34
26	Inspektorat Daerah Kota Bogor	27	27	54
27	Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor	65	52	117
28	Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor	78	43	121
29	Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor	56	31	87
30	Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor	40	15	55
31	Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor	44	27	71
32	Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor	46	39	85
33	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor	69	144	213
34	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor	194	9	203
35	Sekretariat Daerah Kota Bogor	108	82	190
36	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor	34	22	56
TOTAL		3.078	4.566	7.643

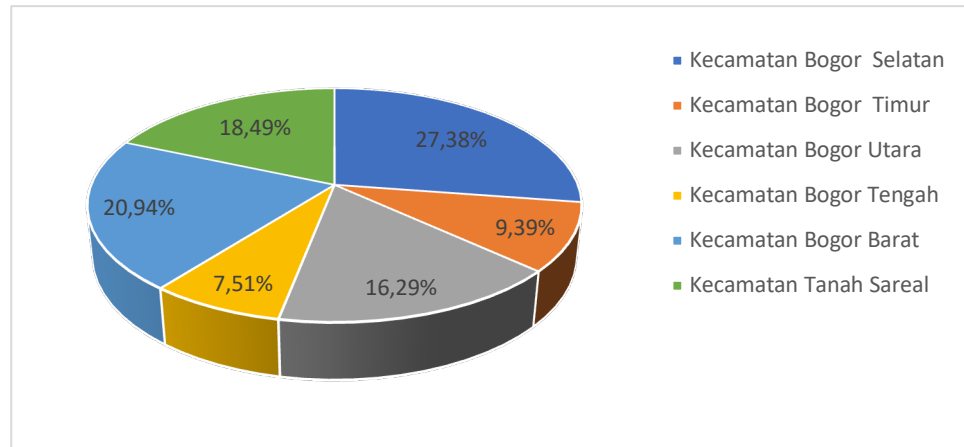
6.3 Kondisi Geografis

Secara geografis Kota Bogor terletak di antara 106°48' BT dan 6°26' LS. Posisi geografis Kota Bogor di tengah wilayah Kabupaten Bogor serta lokasinya sangat dekat dengan Ibukota Negara, merupakan potensi yang strategis bagi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi. Kota Bogor mempunyai rata-rata ketinggian minimum 190 m dan maksimum 330 m dari permukaan laut.

Luas Wilayah Kota Bogor sebesar 111,39 km² terdiri dari 6 kecamatan dan 68 kelurahan. Luas wilayah masing-masing kecamatan, yaitu: Kecamatan Bogor Selatan (30,50 km²), Kecamatan Bogor Timur (10,46 km²), Kecamatan Bogor Utara (18,14 km²), Kecamatan Bogor Tengah (8,37 km²), Kecamatan Bogor Barat (23,32 km²) dan Kecamatan Tanah Sareal (20,60 km²).

Jika dilihat dari persentase luas wilayah kecamatan terhadap luas wilayah Kota Bogor, Kecamatan Bogor Selatan merupakan Kecamatan terluas yakni sebesar 27,38 persen dan Kecamatan terkecil yakni Kecamatan Bogor Tengah sebesar 7,51 persen.

Tabel 6.3.1
Luas daerah per kecamatan (%)



Tabel 6.3.2
Luas Daerah menurut Kecamatan

Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas Area (km ²)	Persentase terhadap Luas Kota
1	2	3	4
Kecamatan Bogor Selatan	Empang	30,50	27,38%
Kecamatan Bogor Timur	Baranangsiang	10,46	9,39%
Kecamatan Bogor Utara	Tegal Gundil	18,14	16,29%
Kecamatan Bogor Tengah	Pabaton	8,37	7,51%
Kecamatan Bogor Barat	Loji	23,32	20,94%
Kecamatan Tanah Sareal	Kebonpedes	20,60	18,49%
Kota Bogor	Bogor Tengah - Pabaton	111,39	100,00%

Suhu rata-rata tiap bulan 25,8°-26,70°C dengan suhu terendah 19,9°-22,1°C dan suhu tertinggi 32,2°-35,0°C. Kelembaban udara rata-rata antara 82,0%-87,0%. Kota Bogor dijuluki kota hujan, karena banyaknya hari hujan di setiap bulannya. Tahun 2025 rata-rata jumlah hari hujan sebesar 20 hari per bulan.

Curah hujan tertinggi pada tahun 2025 terjadi pada bulan Agustus dan Desember masing-masing tercatat sebesar 536 mm/bulan dan 448 mm/bulan, sedangkan curah hujan terendah pada bulan Januari dan Februari tercatat sebesar 24,11 mm/bulan dan 148 mm/bulan.



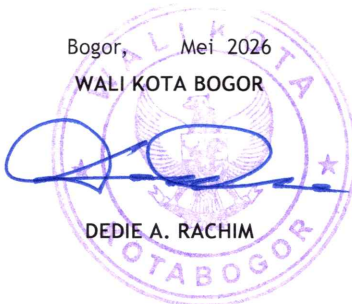
BAB VII PENUTUP

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan karena berisi penjelasan dari pos-pos Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Saldo (LP-SAL), Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, serta kebijakan akuntansinya.

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 ini, dapat dijadikan bahan evaluasi atas pelaksanaan APBD Pemerintah Daerah Kota Bogor dalam rangka pelayanan kepada masyarakat Kota Bogor. Serta, dapat dijadikan pijakan dalam pengambilan kebijakan-kebijakan baru di tahun-tahun berikutnya. Untuk mewujudkan visi dan misi Kota Bogor.

Bogor, Mei 2026
WALI KOTA BOGOR

DEDIE A. RACHIM



PEMERINTAH KOTA BOGOR
REALISASI BOS APBN TAHUN ANGGARAN 2025
DINAS PENDIDIKAN KOTA BOGOR

NO	NAMA SEKOLAH	SALDO BOS Tahun 2024	KOREKSI SALDO AWAL	JUMLAH PENDAPATAN TAHUN 2025	JUMLAH BELANJA TAHUN 2025	Penerimaan Pengembalian Belanja BOS APBN	SALDO AKHIR TAHUN 2025	Pengembalian Dana BOSP	Pengembalian Jasa giro	SALDO KAS DANA BOSP TAHUN 2025
1	SDN BALUNGBANG JAYA 1	2.296.299	-	344.203.701,00	346.311.787,00		188.213,00			188.213,00
2	SDN BALUNGBANG JAYA 3	3.769.147	-	276.730.853,00	279.930.652,00		569.348,00			569.348,00
3	SDN BUBULAK 1	313.752	-	468.286.248,00	458.633.700,00		9.966.300,00			9.966.300,00
4	SDN BUBULAK 2	214.184	-	259.885.816,00	260.089.963,00		10.037,00			10.037,00
5	SDN BUBULAK 3	44.943	-	280.955.057,00	280.978.130,00		21.870,00			21.870,00
6	SDN CEMPLANG	1.770.056	-	296.829.944,00	297.453.000,00		1.147.000,00			1.147.000,00
7	SDN CIBALAGUNG 1	8.863.415	-	197.336.585,00	121.036.133,00		85.163.867,00	85.163.867,00		-
8	SDN CIBALAGUNG 2	4.068.289	-	188.431.711,00	98.089.647,00		94.410.353,00	94.410.353,00		-
9	SDN CIBALAGUNG 3	3.541.972	-	295.058.028,00	298.268.235,00		331.765,00			331.765,00
10	SDN CIBALAGUNG 4	780.521	-	257.119.479,00	257.664.352,00		235.648,00			235.648,00
11	SDN CIBALAGUNG 5	658.791	-	363.441.209,00	364.082.792,00		17.208,00			17.208,00
12	SDN CIIAHE CURUG	152.979	-	266.047.021,00	265.929.460,00		270.540,00			270.540,00
13	SDN CILENDEK 1	1.124.695	-	510.375.305,00	510.776.590,00		723.410,00			723.410,00
14	SDN CILENDEK 2	2.881.080	-	224.818.920,00	227.582.456,00		117.544,00			117.544,00
15	SDN CILENDEK 4	650.718	-	335.949.282,00	336.130.153,00		469.847,00			469.847,00
16	SDN CILENDEK TIMUR 1	3.272.090	-	700.627.910,00	702.972.440,00		927.560,00			927.560,00
17	SDN CILENDEK TIMUR 2	525.701	-	248.074.299,00	247.544.928,00		1.055.072,00			1.055.072,00
18	SDN CURUG 1	612.338	-	338.187.662,00	337.994.644,00		805.356,00			805.356,00
19	SDN CURUG 3	7.924.558	-	289.075.442,00	296.776.625,00		223.375,00			223.375,00
20	SDN GUNUNG BATU 1	416.714	-	728.883.286,00	729.054.252,00		245.748,00			245.748,00
21	SDN GUNUNG BATU 2	3.217.943	-	751.382.057,00	754.598.000,00		2.000,00			2.000,00
22	SDN LOJI 1	443.692	-	285.556.308,00	285.944.661,00		55.339,00			55.339,00
23	SDN LOJI 2	2.887.507	-	271.012.493,00	272.780.000,00		1.120.000,00			1.120.000,00
24	SDN LOJI 3	405.438	-	187.094.562,00	187.494.132,00		5.868,00			5.868,00
25	SDN MARGAJAYA 1	2.051.813	-	574.348.187,00	576.397.784,00		2.216,00			2.216,00
26	SDN MARGAJAYA 2	2.523.687	-	472.676.313,00	474.735.167,00		464.833,00			464.833,00
27	SDN MARGAJAYA 3	12.192	-	390.487.808,00	390.415.280,00		84.720,00			84.720,00
28	SDN MARGAJAYA 4	164.866	-	466.235.134,00	466.355.572,00		44.428,00			44.428,00
29	SDN MENTENG	354.690	-	349.945.310,00	349.698.122,00		601.878,00			601.878,00
30	SDN MERDEKA	1.101.469	-	345.398.531,00	346.500.000,00		-			-
31	SDN NEGLASARI BOGOR BARAT	7.684.308	3.832.030	472.215.692,00	476.991.637,00		6.740.393,00			6.740.393,00
32	SDN PABUARAN CILENDEK	420.835	-	267.379.165,00	267.414.920,00		385.080,00			385.080,00
33	SDN PURBASARI	1.605.474	-	729.894.526,00	731.180.150,00		319.850,00			319.850,00
34	SDN SELAKOPI	1.696.764	-	285.403.236,00	286.905.160,00		194.840,00			194.840,00
35	SDN SEMERU 1	1.646.473	-	671.553.527,00	672.487.837,00		712.163,00			712.163,00
36	SDN SEMERU 5	1.113.555	-	182.586.445,00	91.872.200,00		91.827.800,00	91.827.800,00		-
37	SDN SEMERU 6	4.611.897	-	187.888.103,00	192.299.528,00		200.472,00			200.472,00
38	SDN SEMPLAK 1	1.261.705	-	765.938.295,00	766.830.028,00		369.972,00			369.972,00
39	SDN SEMPLAK 2	957.192	-	863.042.808,00	863.469.730,00		530.270,00			530.270,00
40	SDN SINDANG BARANG 1	229.614	-	311.070.386,00	311.254.405,00		45.595,00			45.595,00
41	SDN SINDANG BARANG 2	1.928.887	-	403.971.113,00	405.870.831,00		29.169,00			29.169,00
42	SDN SINDANG BARANG 3	350.682	-	326.349.318,00	326.072.267,00		627.733,00			627.733,00
43	SDN SINDANG BARANG 4	55.719	-	177.044.281,00	176.932.532,00		167.468,00			167.468,00
44	SDN SINDANGGRASA BOGOR BARAT	6.646.418	-	243.053.582,00	249.454.343,00		245.657,00			245.657,00
45	SDN SITUGEDE 1	1.331.324	-	245.068.676,00	246.259.028,00		140.972,00			140.972,00
46	SDN SITUGEDE 2	19.300	-	346.480.700,00	346.338.790,00		161.210,00			161.210,00

NO	NAMA SEKOLAH	SALDO BOS Tahun 2024	KOREKSI SALDO AWAL	JUMLAH PENDAPATAN TAHUN 2025	JUMLAH BELANJA TAHUN 2025	Penerimaan Pengembalian Belanja BOS APBN	SALDO AKHIR TAHUN 2025	Pengembalian Dana BOSP	Pengembalian Jasa giro	SALDO KAS DANA BOSP TAHUN 2025
47	SDN SITUGEDE 3	411.600	-	406.588.400,00	406.481.711,00		518.289,00			518.289,00
48	SDN SITUGEDE 4	1.200	-	573.098.800,00	573.020.882,00		79.118,00			79.118,00
49	SDN SITUGEDE 5	-	-	283.800.000,00	283.664.743,00		135.257,00			135.257,00
50	SDN BATUTULIS 1	1.641.400	-	546.158.600,00	547.592.500,00		207.500,00			207.500,00
51	SDN BATUTULIS 2	11.564.192	-	298.635.808,00	309.101.344,00		1.098.656,00			1.098.656,00
52	SDN BATUTULIS 3	233.422	-	360.566.578,00	360.673.128,00		126.872,00			126.872,00
53	SDN BOJONG KERTA	79.800	-	471.820.200,00	471.897.470,00		2.530,00			2.530,00
54	SDN BONDONGAN	837.706	-	612.962.294,00	612.931.359,00		868.641,00			868.641,00
55	SDN CIBEUREUM 1	17.686.368	-	757.213.632,00	774.292.128,00		607.872,00			607.872,00
56	SDN CIBEUREUM 2	1.779.700	-	458.020.300,00	459.134.850,00		665.150,00			665.150,00
57	SDN CIBEUREUM 4	9.537.588	-	415.062.412,00	424.558.560,00		41.440,00			41.440,00
58	SDN CIKARET 1	3.055.212	-	798.844.788,00	801.518.410,00		381.590,00			381.590,00
59	SDN CIKARET 2	7.679.502	-	432.320.498,00	438.644.400,00		1.355.600,00			1.355.600,00
60	SDN CIPAKU 1	8.370.700	-	373.829.300,00	382.200.000,00		-			-
61	SDN CIPAKU 2	937.636	-	241.562.364,00	242.254.600,00		245.400,00			245.400,00
62	SDN CIPAKU 4	68.862	-	406.931.138,00	406.955.860,00		44.140,00			44.140,00
63	SDN CIPAKU PERUMDA	51.000	-	640.149.000,00	638.692.091,00		1.507.909,00			1.507.909,00
64	SDN CIRANJIANG	300.888	-	144.899.112,00	145.162.108,00		37.892,00			37.892,00
65	SDN GENTENG	970.634	-	442.329.366,00	443.257.139,00		42.861,00			42.861,00
66	SDN HARIASARI 1	3.608.591	-	655.291.409,00	658.874.185,00		25.815,00			25.815,00
67	SDN HARIASARI 2	4.440.420	-	334.359.580,00	338.682.400,00		117.600,00			117.600,00
68	SDN KERTAMAYA	16.534.608	-	630.265.392,00	646.267.641,00		532.359,00			532.359,00
69	SDN LAWANG GINTUNG 1	5.528.131	-	378.371.869,00	383.701.980,00		198.020,00			198.020,00
70	SDN LAWANG GINTUNG 2	9.457.460	-	288.642.540,00	297.767.280,00		332.720,00			332.720,00
71	SDN LAWANG GINTUNG 4	56.128	-	245.243.872,00	244.779.980,00		520.020,00			520.020,00
72	SDN LAYUNGSARI 1	5.033.504	-	364.566.496,00	369.244.865,00		355.135,00			355.135,00
73	SDN LAYUNGSARI 2	2.778.361	-	365.721.639,00	367.973.010,00		526.990,00			526.990,00
74	SDN MUARASARI 1	421.509	-	286.678.491,00	287.057.407,00		42.593,00			42.593,00
75	SDN MUARASARI 2	6.923.544	-	383.576.456,00	390.420.960,00		79.040,00			79.040,00
76	SDN MUARASARI 3	2.032.881	-	500.667.119,00	502.358.734,00		341.266,00			341.266,00
77	SDN MULYAHARIA 1	3.576.348	-	341.823.652,00	344.412.182,00		987.818,00			987.818,00
78	SDN MULYAHARIA 2	1.243.444	-	376.056.556,00	376.588.912,00		711.088,00			711.088,00
79	SDN PABUARAN	2.352.389	-	571.847.611,00	574.064.309,00		135.691,00			135.691,00
80	SDN PAKUAN	1.436.632	-	571.663.368,00	572.771.007,00		328.993,00			328.993,00
81	SDN PAMOYANAN 1	2.775.150	-	362.424.850,00	363.532.792,00		1.667.208,00			1.667.208,00
82	SDN PAMOYANAN 2	975.725	-	553.424.275,00	553.693.610,00		706.390,00			706.390,00
83	SDN PAMOYANAN 3	2.922.850	-	521.777.150,00	523.671.128,00		1.028.872,00			1.028.872,00
84	SDN RANCAMAYA 1	2.492.888	-	480.407.112,00	482.170.448,00		729.552,00			729.552,00
85	SDN RANCAMAYA 2	95.018	-	526.804.982,00	526.884.377,00		15.623,00			15.623,00
86	SDN RANGGA MEKAR	12.563.799	-	309.736.201,00	320.614.460,00		1.685.540,00			1.685.540,00
87	SDN BABAKAN	4.207.007	-	440.192.993,00	443.710.873,00		689.127,00			689.127,00
88	SDN BARANANGSIANG	100.280	-	368.899.720,00	368.997.250,00		2.750,00			2.750,00
89	SDN CIMANGGU KECIL	4.461.341	-	442.138.659,00	446.441.740,00		158.260,00			158.260,00
90	SDN DEWI SARTIKA 1	1.191.556	-	150.608.444,00	72.093.367,00		79.706.633,00	79.706.633,00		-
91	SDN DEWI SARTIKA 2	430.291	-	211.869.709,00	212.178.480,00		121.520,00			121.520,00
92	SDN DEWI SARTIKA 3	189.180	-	134.010.820,00	67.183.178,00		67.016.822,00	67.016.822,00		-
93	SDN EMPANG 1	345.993	-	555.154.007,00	555.372.544,00		127.456,00			127.456,00
94	SDN EMPANG 2	1.682.813	-	438.317.187,00	439.984.670,00		15.330,00			15.330,00
95	SDN GANG AUT	458.505	-	393.341.495,00	393.456.700,00		343.300,00			343.300,00
96	SDN GUNUNG GEDE	1.661.573	-	499.938.427,00	501.599.894,00		106,00			106,00
97	SDN KAMPUNG RAMBUTAN	1.865.979	-	264.834.021,00	266.528.652,00		171.348,00			171.348,00
98	SDN KEBON KOPI	2.879.384	-	253.420.616,00	255.163.952,00		1.136.048,00			1.136.048,00
99	SDN MALABAR	903.746	-	274.096.254,00	274.528.634,00		471.366,00			471.366,00

NO	NAMA SEKOLAH	SALDO BOS Tahun 2024	KOREKSI SALDO AWAL	JUMLAH PENDAPATAN TAHUN 2025	JUMLAH BELANJA TAHUN 2025	Penerimaan Pengembalian Belanja BOS APBN	SALDO AKHIR TAHUN 2025	Pengembalian Dana BOSP	Pengembalian Jasa giro	SALDO KAS DANA BOSP TAHUN 2025
100	SDN PABRIK ES	493.425	-	120.506.575,00	120.983.974,00		16.026,00			16.026,00
101	SDN PANARAGAN 1	1.856.472	-	543.743.528,00	545.541.996,00		58.004,00			58.004,00
102	SDN PANARAGAN 2	4.360.812	-	457.639.188,00	461.956.926,00		43.074,00			43.074,00
103	SDN PANARAGAN 3	8.138.133	-	224.461.867,00	232.024.000,00		576.000,00			576.000,00
104	SDN PANARAGAN KIDUL	689.226	-	241.310.774,00	241.846.557,00		153.443,00			153.443,00
105	SDN PAPANDAYAN	1.431.395	-	814.768.605,00	815.579.327,00		620.673,00			620.673,00
106	SDN PENGADILAN 1	7.064	-	351.992.936,00	351.992.647,00		7.353,00			7.353,00
107	SDN PENGADILAN 2	158.248	-	352.341.752,00	175.586.148,00		176.913.852,00	176.913.852,00		-
108	SDN PENGADILAN 3	3.294	-	169.396.706,00	84.551.160,00		84.848.840,00	84.848.840,00		-
109	SDN PENGADILAN 5	334.323	-	412.165.677,00	412.377.714,00		122.286,00			122.286,00
110	SDN PERWIRA	2.732.037	-	148.467.963,00	151.191.477,00		8.523,00			8.523,00
111	SDN POLISI 1	377.368	-	892.822.632,00	893.030.678,00		169.322,00			169.322,00
112	SDN POLISI 2	339.857	-	277.960.143,00	278.299.258,00		742,00			742,00
113	SDN POLISI 4	5.319.439	-	836.180.561,00	841.313.037,00		186.963,00			186.963,00
114	SDN POLISI 5	732.721	-	243.467.279,00	244.192.409,00		7.591,00			7.591,00
115	SDN RODA	12.963	-	257.387.037,00	257.280.918,00		119.082,00			119.082,00
116	SDN SEMPUR KALER	1.598.076	-	220.601.924,00	112.092.928,00		110.107.072,00	110.107.072,00		-
117	SDN SEMPUR KIDUL	1.267.300	-	161.532.700,00	162.792.163,00		7.837,00			7.837,00
118	SDN SINDANGSARI BOGOR TENGAH	3.643.960	-	305.956.040,00	309.586.747,00		13.253,00			13.253,00
119	SDN TEGALLEGA 1	772.600	-	314.927.400,00	315.352.752,00		347.248,00			347.248,00
120	SDN TEGALLEGA 2	219.389	-	339.080.611,00	339.265.769,00		34.231,00			34.231,00
121	SDN BABAKAN ASEM	605.719	-	163.794.281,00	164.283.242,00		116.758,00			116.758,00
122	SDN BANGKA 3	3.276.650	-	693.023.350,00	696.090.720,00		209.280,00			209.280,00
123	SDN BANTARKEMANG 1	53.868	-	202.346.132,00	202.390.302,00		9.698,00			9.698,00
124	SDN BANTARKEMANG 2	151.820	-	182.448.180,00	91.390.673,00		91.209.327,00	91.209.327,00		-
125	SDN BANTARKEMANG 3	14.003	-	371.785.997,00	371.786.199,00		13.801,00			13.801,00
126	SDN BANTARKEMANG 6	4.440.757	-	518.059.243,00	522.500.000,00		-			-
127	SDN CIHEULEUT 1	2.035.167	-	334.564.833,00	165.022.814,00		171.577.186,00	171.577.186,00		-
128	SDN CIHEULEUT 2	255.373	-	390.244.627,00	390.393.255,00		106.745,00			106.745,00
129	SDN DUTA PAKUAN	2.044	-	395.997.956,00	394.559.300,00		1.440.700,00			1.440.700,00
130	SDN KATULAMPA 1	7.000	-	472.393.000,00	472.376.800,00		23.200,00			23.200,00
131	SDN KATULAMPA 2	191.340	-	278.108.660,00	277.877.449,00		422.551,00			422.551,00
132	SDN KATULAMPA 3	-	-	284.900.000,00	284.896.439,00		3.561,00			3.561,00
133	SDN KATULAMPA 5	2.082.707	-	468.717.293,00	470.612.050,00		187.950,00			187.950,00
134	SDN OTISTA	416.050	-	328.983.950,00	329.022.682,00		377.318,00			377.318,00
135	SDN PAJAJARAN	821.908	-	379.178.092,00	378.819.999,00		1.180.001,00			1.180.001,00
136	SDN SINDANGGRASA BOGOR TIMUR	1.295.220	-	569.604.780,00	566.217.799,00		4.682.201,00			4.682.201,00
137	SDN SINDANGSARI 1	624.142	-	300.775.858,00	151.005.885,00		150.394.115,00	150.394.115,00		-
138	SDN SINDANGSARI 2	7.459.311	-	343.440.689,00	350.883.692,00		16.308,00			16.308,00
139	SDN SUKASARI	1.518.561	-	622.181.439,00	620.028.558,00		3.671.442,00			3.671.442,00
140	SDN TAJUR 1	750.000	-	428.250.000,00	428.645.930,00		354.070,00			354.070,00
141	SDN TAJUR 2	1.382.585	-	370.417.415,00	371.465.665,00		334.335,00			334.335,00
142	SDN TAJUR 3	1.026.744	-	240.973.256,00	241.671.556,00		328.444,00			328.444,00
143	SDN BANTARIATI 1	2.191.643	-	345.408.357,00	347.182.676,00		417.324,00			417.324,00
144	SDN BANTARIATI 5	1.239.905	-	509.160.095,00	509.620.534,00		779.466,00			779.466,00
145	SDN BANTARIATI 6	699.380	-	290.800.620,00	290.295.330,00		1.204.670,00			1.204.670,00
146	SDN BANTARIATI 7	262.229	-	172.937.771,00	86.113.408,00		87.086.592,00	87.086.592,00		-
147	SDN BANTARIATI 8	318.010	-	340.681.990,00	340.823.842,00		176.158,00			176.158,00
148	SDN BANTARIATI 9	4.084.150	-	415.015.850,00	418.503.400,00		596.600,00			596.600,00
149	SDN BHAYANGKARI	46.000	-	221.554.000,00	221.576.000,00		24.000,00			24.000,00
150	SDN BOGOR BARU	175.095	-	213.724.905,00	213.723.230,00		176.770,00			176.770,00
151	SDN CEGER 1	994.696	-	259.705.304,00	260.682.442,00		17.558,00			17.558,00
152	SDN CEGER 2	1.987.500	-	191.612.500,00	193.531.450,00		68.550,00			68.550,00

NO	NAMA SEKOLAH	SALDO BOS Tahun 2024	KOREKSI SALDO AWAL	JUMLAH PENDAPATAN TAHUN 2025	JUMLAH BELANJA TAHUN 2025	Penerimaan Pengembalian Belanja BOS APBN	SALDO AKHIR TAHUN 2025	Pengembalian Dana BOSP	Pengembalian Jasa giro	SALDO KAS DANA BOSP TAHUN 2025
153	SDN CIBULUH 1	22.138.049	-	566.361.951,00	584.147.638,00		4.352.362,00			4.352.362,00
154	SDN CIBULUH 2	3.992.510	-	412.907.490,00	414.604.130,00		2.295.870,00			2.295.870,00
155	SDN CIBULUH 3	3.910.571	-	371.189.429,00	374.110.349,00		989.651,00			989.651,00
156	SDN CIBULUH 4	19.019.590	-	480.380.410,00	485.032.260,00		14.367.740,00			14.367.740,00
157	SDN CIBULUH 6	4.388.499	-	341.011.501,00	344.356.040,00		1.043.960,00			1.043.960,00
158	SDN CILUAR 1	13.030.880	-	391.769.120,00	402.634.240,00		2.165.760,00			2.165.760,00
159	SDN CILUAR 2	374.555	-	594.125.445,00	591.573.213,00		2.926.787,00			2.926.787,00
160	SDN CILUAR 3	3.986.664	-	489.313.336,00	493.281.104,00		18.896,00			18.896,00
161	SDN CIMAHPAR 1	60.400	-	575.239.600,00	575.231.430,00		68.570,00			68.570,00
162	SDN CIMAHPAR 2	629.192	-	608.170.808,00	608.768.000,00		32.000,00			32.000,00
163	SDN CIMAHPAR 3	401.600	-	355.998.400,00	356.400.000,00		-			-
164	SDN CIMAHPAR 4	1.582.800	-	313.017.200,00	314.314.200,00		285.800,00			285.800,00
165	SDN CIMAHPAR 5	489.362	-	239.810.638,00	236.269.530,00		4.030.470,00			4.030.470,00
166	SDN CIPARIGI	4.380.865	-	514.819.135,00	516.519.870,00		2.680.130,00			2.680.130,00
167	SDN KAMPUNG SAWAH	2.859.762	-	417.340.238,00	415.871.080,00		4.328.920,00			4.328.920,00
168	SDN KAUMSARI	407.330	-	229.992.670,00	230.178.780,00		221.220,00			221.220,00
169	SDN KAWUNGUWUK	15.759.768	-	699.240.232,00	713.608.720,00		1.391.280,00			1.391.280,00
170	SDN KEDUNG HALANG 1	5.536.345	-	460.863.655,00	466.000.880,00		399.120,00			399.120,00
171	SDN KEDUNG HALANG 2	2.930.948	-	352.369.052,00	354.624.258,00		675.742,00			675.742,00
172	SDN KEDUNG HALANG 3	329.503	-	380.270.497,00	380.397.592,00		202.408,00			202.408,00
173	SDN KEDUNG HALANG 5	1.490.150	-	412.109.850,00	413.526.728,00		73.272,00			73.272,00
174	SDN NEGLASARI	3.902	-	255.196.098,00	255.198.191,00		1.809,00			1.809,00
175	SDN SELAAWI	2.510.855	-	414.389.145,00	409.163.078,00		7.736.922,00			7.736.922,00
176	SDN SINDANGSARI BOGOR UTARA	4.641.690	-	690.558.310,00	694.225.940,00		974.060,00			974.060,00
177	SDN TUNGILIS	685.539	-	173.114.461,00	173.503.294,00		296.706,00			296.706,00
178	SDN BUBULAK	1.465.816	-	206.434.184,00	207.723.856,00		176.144,00			176.144,00
179	SDN CIBADAK	2.890.160	-	371.609.840,00	360.733.590,00		13.766.410,00			13.766.410,00
180	SDN CIMANGGU	474.800	-	734.325.200,00	734.756.447,00		43.553,00			43.553,00
181	SDN JULANG	15.114.985	-	482.085.015,00	495.859.296,00		1.340.704,00			1.340.704,00
182	SDN KAYUMANIS 1	597.261	-	735.802.739,00	736.361.500,00		38.500,00			38.500,00
183	SDN KAYUMANIS 2	1.891.751	-	259.908.249,00	260.942.392,00		857.608,00			857.608,00
184	SDN KEBON PEDES 1	3.538.830	-	736.761.170,00	739.513.880,00		786.120,00			786.120,00
185	SDN KEBON PEDES 3	1.510.732	-	767.889.268,00	769.353.100,00		46.900,00			46.900,00
186	SDN KEBON PEDES 5	29.624	-	711.670.376,00	711.691.463,00		8.537,00			8.537,00
187	SDN KEBON PEDES 7	6.346.822	-	345.653.178,00	351.520.000,00		480.000,00			480.000,00
188	SDN KEDUNG BADAK 1	7.574.100	-	355.425.900,00	362.518.661,00		481.339,00			481.339,00
189	SDN KEDUNG BADAK 2	4.961.952	-	305.238.048,00	310.128.185,00		71.815,00			71.815,00
190	SDN KEDUNG BADAK 3	91.988	-	151.708.012,00	151.114.240,00		685.760,00			685.760,00
191	SDN KEDUNG BADAK 4	726.175	-	455.773.825,00	454.938.690,00		1.561.310,00			1.561.310,00
192	SDN KEDUNG JAYA 1	1.050.224	-	297.049.776,00	297.409.339,00		690.661,00			690.661,00
193	SDN KEDUNG JAYA 2	1.878.103,00	-	412.821.897,00	413.864.998,00		835.002,00			835.002,00
194	SDN KEDUNG WARINGIN	7.178.095,00	-	385.521.905,00	392.612.310,00		87.690,00			87.690,00
195	SDN KENCANA 1	2.678.220,00	-	516.521.780,00	519.013.050,00		186.950,00			186.950,00
196	SDN KENCANA 2	786.465,00	-	650.413.535,00	650.809.185,00		390.815,00			390.815,00
197	SDN KENCANA 3	18.851.850,00	-	498.148.150,00	516.230.360,00		769.640,00			769.640,00
198	SDN KUKUPU 1	22.699.225,00	-	419.500.775,00	438.315.680,00		3.884.320,00			3.884.320,00
199	SDN KUKUPU 2	3.847.190,00	-	516.452.810,00	519.493.657,00		806.343,00			806.343,00
200	SDN KUKUPU 3	100.202,00	-	354.099.798,00	353.899.680,00		300.320,00			300.320,00
201	SDN PONDOK RUMPUT	1.345.891,00	-	723.554.109,00	724.408.780,00		491.220,00			491.220,00
202	SDN SITUPETE	435.830,00	-	427.464.170,00	420.045.985,00		7.854.015,00			7.854.015,00
203	SDN SUKADAMAI 1	633.134,00	-	379.966.866,00	380.241.096,00		358.904,00			358.904,00
204	SDN SUKADAMAI 2	4.481.236,00	-	574.118.764,00	578.001.525,00		598.475,00			598.475,00
205	SDN SUKADAMAI 3	2.108.175,00	-	853.691.825,00	855.207.464,00		592.536,00			592.536,00

NO	NAMA SEKOLAH	SALDO BOS Tahun 2024	KOREKSI SALDO AWAL	JUMLAH PENDAPATAN TAHUN 2025	JUMLAH BELANJA TAHUN 2025	Penerimaan Pengembalian Belanja BOS APBN	SALDO AKHIR TAHUN 2025	Pengembalian Dana BOSP	Pengembalian Jasa giro	SALDO KAS DANA BOSP TAHUN 2025
206	SDN SUKARESMI	6.060.977,00	-	329.439.023,00	334.968.676,00		531.324,00			531.324,00
207	SDN TANAH SAREAL 1	2.916.752,00	-	289.683.248,00	291.999.901,00		600.099,00			600.099,00
208	SDN TANAH SAREAL 4	7.037.156,00	-	304.262.844,00	310.866.558,00		433.442,00			433.442,00
209	SDN KENCANA 04	-	-	90.200.000,00	89.397.216,00		802.784,00			802.784,00
JUMLAH JENJANG SD NEGERI		583.182.853,00	3.832.030,00	83.954.617.147,00	83.086.970.138,00	-	1.454.661.892,00	1.290.262.459,00		164.399.433,00
210	SMP NEGERI 1	4.059.856,00	-	1.282.340.144,00	1.275.041.207,00		11.358.793,00			11.358.793,00
211	SMP NEGERI 2	8.896.316,00	-	1.335.123.684,00	1.335.470.175,00	2.600.000,00	11.149.825,00			11.149.825,00
212	SMP NEGERI 3	23.217.020,00	-	1.363.512.980,00	1.352.091.892,00		34.638.108,00			34.638.108,00
213	SMP NEGERI 4	7.100.189,00	-	1.422.509.811,00	1.409.489.514,00		20.120.486,00			20.120.486,00
214	SMP NEGERI 5	7.945.297,00	-	1.467.294.703,00	1.470.758.567,00	2.600.000,00	7.081.433,00			7.081.433,00
215	SMP NEGERI 6	200.097,00	-	1.351.859.903,00	1.347.073.718,00	2.600.000,00	7.586.282,00			7.586.282,00
216	SMP NEGERI 7	19.626.140,00	-	1.339.293.860,00	1.315.240.861,00		43.679.139,00			43.679.139,00
217	SMP NEGERI 8	21.703.945,00	-	1.322.316.055,00	1.314.608.347,00	2.600.000,00	32.011.653,00			32.011.653,00
218	SMP NEGERI 9	30.938.893,00	-	1.279.581.107,00	1.308.631.692,00	2.600.000,00	4.488.308,00			4.488.308,00
219	SMP NEGERI 10	13.677.410,00	-	1.141.402.590,00	1.147.509.328,00		7.570.672,00			7.570.672,00
220	SMP NEGERI 11	64.128.272,00	-	1.249.071.728,00	1.302.938.992,00	2.600.000,00	12.861.008,00			12.861.008,00
221	SMP NEGERI 12	1.655.231,00	-	1.410.534.769,00	1.376.389.646,00		35.800.354,00			35.800.354,00
222	SMP NEGERI 13	202.067,00	-	1.035.617.933,00	1.035.040.272,00	1.600.000,00	2.379.728,00			2.379.728,00
223	SMP NEGERI 14	81.685.305,00	-	1.285.274.695,00	1.241.057.188,00		125.902.812,00			125.902.812,00
224	SMP NEGERI 15	11.959.552,00	-	1.429.710.448,00	1.433.295.396,00		8.374.604,00			8.374.604,00
225	SMP NEGERI 16	12.376.747,00	-	1.539.343.253,00	1.541.566.716,00		10.153.284,00			10.153.284,00
226	SMP NEGERI 17	7.421.210,00	-	1.059.218.790,00	1.056.388.212,00		10.251.788,00			10.251.788,00
227	SMP NEGERI 18	24.293.897,00	-	1.255.406.103,00	1.264.110.133,00		15.589.867,00			15.589.867,00
228	SMP NEGERI 19	5.615.311,00	-	1.299.544.689,00	1.296.928.984,00		8.231.016,00			8.231.016,00
229	SMP NEGERI 20	17.712.186,00	-	1.114.587.814,00	1.122.464.823,00	2.600.000,00	12.435.177,00			12.435.177,00
230	SMP NEGERI 21	-	-	245.220.000,00	214.767.497,00	-	30.452.503,00	-	50.451,00	30.402.052,00
JUMLAH SMP NEGERI		364.414.941,00	-	26.228.765.059,00	26.160.863.160,00	19.800.000,00	452.116.840,00	-	50.451,00	452.167.291,00
JUMLAH JENJANG SD NEGERI DAN SMP NEGERI		947.597.794,00	3.832.030,00	110.183.382.206,00	109.247.833.298,00	19.800.000,00	1.906.778.732,00	1.290.262.459,00	50.451,00	616.566.724,00

PEMERINTAH KOTA BOGOR
BADAN PENDAPATAN DAERAH
DAFTAR PENYISIHAN PIUTANG POKOK PAJAK
PER 31 DESEMBER 2025

NO	JENIS PAJAK	PIUTANG	KRITERIA KUALITAS PIUTANG				PENYISIHAN PIUTANG				JUMLAH PENYISIHAN	JUMLAH PENYISIHAN TA 2025
			LANCAR	KURANG LANCAR	DIRAGUKAN	MACET	LANCAR (0,5%)	KURANG LANCAR (10%)	DIRAGUKAN (50%)	MACET (100%)		
1	Pajak Hotel	11.519.393.214,00	2.350.424.435,00	4.718.275.459,00	1.721.574.999,00	2.729.118.321,00	11.752.122,18	471.827.545,90	860.787.499,50	2.729.118.321,00	4.073.485.488,58	4.073.485.489,00
	PBJT -Hotel	10.451.675.880,00	1.503.574.418,00	4.624.077.446,00	1.634.601.994,00	2.689.422.022,00	7.517.872,09	462.407.744,60	817.300.997,00	2.689.422.022,00	3.976.648.635,69	3.976.648.636,00
	PBJT -Motel	89.289.635,00	22.404.629,00	32.206.012,00	10.729.065,00	23.949.929,00	112.023,15	3.220.601,20	5.364.532,50	23.949.929,00	32.647.085,85	32.647.086,00
	PBJT-Losmen	947.153.329,00	815.545.388,00	52.064.001,00	76.243.940,00	3.300.000,00	4.077.726,94	5.206.400,10	38.121.970,00	3.300.000,00	50.706.097,04	50.706.097,00
	PBJT-Wisma Pariwisata	31.274.370,00	8.900.000,00	9.928.000,00	-	12.446.370,00	44.500,00	992.800,00	-	12.446.370,00	13.483.670,00	13.483.670,00
		-					-	-	-	-	-	-
2	Pajak Restoran	18.416.839.127,00	7.943.877.110,00	6.092.985.332,00	1.942.599.897,00	2.437.376.788,00	39.719.385,55	609.298.533,20	971.299.948,50	2.437.376.788,00	4.057.694.655,25	4.057.694.656,00
	PBJT - Pajak Restoran dan Sejenisnya	11.903.198.288,00	7.047.392.605,00	3.592.828.542,00	764.116.631,00	498.860.510,00	35.236.963,03	359.282.854,20	382.058.315,50	498.860.510,00	1.275.438.642,73	1.275.438.643,00
	PBJT - Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	3.461.821.644,00	770.248.457,00	1.669.311.796,00	432.697.164,00	589.564.227,00	3.851.242,29	166.931.179,60	216.348.582,00	589.564.227,00	976.695.230,89	976.695.231,00
	PBJT - Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	1.873.291.093,00	117.092.878,00	788.436.631,00	718.976.497,00	248.785.087,00	585.464,39	78.843.663,10	359.488.248,50	248.785.087,00	687.702.462,99	687.702.463,00
	PBJT - Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	1.178.528.102,00	9.143.170,00	42.408.363,00	26.809.605,00	1.100.166.964,00	45.715,85	4.240.836,30	13.404.802,50	1.100.166.964,00	1.117.858.318,65	1.117.858.319,00
		-										
3	Pajak Reklame	2.045.523.692,00	849.991.743,00	58.202.150,00	87.232.988,00	1.050.096.811,00	4.249.958,72	5.820.215,00	43.616.494,00	1.050.096.811,00	1.103.783.478,72	1.103.783.479,00
	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	1.704.921.038,00	799.294.152,00	48.160.925,00	68.602.917,00	788.863.044,00	3.996.470,76	4.816.092,50	34.301.458,50	788.863.044,00	831.977.065,76	831.977.066,00
	Pajak Reklame Kain	239.342.341,00	28.822.591,00	2.166.225,00	16.505.071,00	191.848.454,00	144.112,96	216.622,50	8.252.535,50	191.848.454,00	200.461.724,96	200.461.725,00
	Pajak Reklame Melekat/Stiker	1.500.000,00	-	-	-	1.500.000,00	-	-	-	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	Pajak Reklame Berjalan	94.260.313,00	16.375.000,00	7.875.000,00	2.125.000,00	67.885.313,00	81.875,00	787.500,00	1.062.500,00	67.885.313,00	69.817.188,00	69.817.188,00
	Pajak Reklame Udara	5.500.000,00	5.500.000,00				27.500,00	-	-	-	27.500,00	27.500,00
		-					-	-	-	-	-	-
4	Pajak Parkir	473.636.477,00	123.151.108,00	159.015.976,00	51.810.860,00	139.658.533,00	615.755,54	15.901.597,60	25.905.430,00	139.658.533,00	182.081.316,14	182.081.316,00
		-					-	-	-	-	-	-
5	Pajak Hiburan	959.301.065,00	119.998.750,00	233.141.090,00	321.338.362,00	284.822.863,00	599.993,75	23.314.109,00	160.669.181,00	284.822.863,00	469.406.146,75	469.406.146,00
	PBJT-Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual Lainnya yang Dipertontonkan secara Langsung di Suatu Lokasi Tertentu	49.541.249,00	2.000.000,00	47.186.364,00	-	354.885,00	10.000,00	4.718.636,40	-	354.885,00	5.083.521,40	5.083.521,00
	PBJT-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana	1.318.750,00	-	100.000,00	1.147.500,00	71.250,00	-	10.000,00	573.750,00	71.250,00	655.000,00	655.000,00
	PBJT-Permainan Ketangkasan	737.611.710,00	69.765.245,00	148.335.044,00	308.667.966,00	210.843.455,00	348.826,23	14.833.504,40	154.333.983,00	210.843.455,00	380.359.768,63	380.359.769,00
	PBJT-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran	126.544.917,00	46.593.427,00	19.151.020,00	3.598.196,00	57.202.274,00	232.967,14	1.915.102,00	1.799.098,00	57.202.274,00	61.149.441,14	61.149.441,00
	PBJT-Panti Pijat dan Pijat Refleksi	8.373.162,00	400.000,00	7.855.662,00	-	117.500,00	2.000,00	785.566,20	-	117.500,00	905.066,20	905.066,00
	PBJT-Distrotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa	35.911.277,00	1.240.078,00	10.513.000,00	7.924.700,00	16.233.499,00	6.200,39	1.051.300,00	3.962.350,00	16.233.499,00	21.253.349,39	21.253.349,00
		-					-	-	-	-	-	-
6	Pajak Air Tanah	394.294.550,00	185.992.040,00	13.471.354,00	130.494.243,00	64.336.913,00	929.960,20	1.347.135,40	65.247.121,50	64.336.913,00	131.861.130,10	131.861.130,00
7	BPHTB	79.579.200,00	79.579.200,00				397.896,00	-	-	-	397.896,00	397.896,00
8	PBB	647.535.409.065,00	109.992.059.551,00	171.874.810.589,00	141.254.401.960,00	224.414.136.965,00	549.960.297,76	17.187.481.058,90	70.627.200.980,00	224.414.136.965,00	312.778.779.301,66	312.778.779.302,00
	JUMLAH	681.423.976.390,00	121.645.073.937,00	183.149.901.950,00	145.509.453.309,00	231.119.547.194,00	608.225.369,69	18.314.990.195,00	72.754.726.654,50	231.119.547.194,00	322.797.489.413,19	322.797.489.414,00

PEMERINTAH KOTA BOGOR
Data Piutang dan Penyisihan Retribusi Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah
(Yang dipungut oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor)
Per 31 Desember 2025

Pendapatan dan Piutang 2025											PENYISIHAN PIUTANG 2025										
No.	Hunian	Nama Jenis Retribusi	Tarif	Tanggal Masuk	Tanggal Keluar	Saldo Awal Piutang Denda per 31 Desember 2024	Penerimaan Tahun Berjalan	Pembayaran Piutang s/d Tahun 2025	Penambahan Piutang 2025	Saldo Akhir Piutang 2025	Umur Piutang	Kriteria Piutang					Penyisihan Piutang				
												lancar	kurang lancar	diragukan	macet	Jumlah	0,5 %	10 %	50 %	100 %	Jumlah
1	A.Lt. Dsr	RSUD	4.500.000	2 Jan 2023		-	54.000.000	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	A. I. 1	Yanti Priyanti	300.000	5 Jul 2021		-	3.600.000	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	A. I. 2	Erza Frahmadika	300.000	11 Sep 2021		1.200.000	2.400.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	4	-	-	1.200.000	-	1.200.000	-	-	600.000	-	600.000
4	A. I. 3	Evy Syarifah	300.000	02/01/10		1.200.000	-	1.200.000	3.600.000	3.600.000	12	-	-	-	3.600.000	3.600.000	-	-	-	3.600.000	3.600.000
5	A. I. 4	Rumsiah	300.000	08/05/17		-	3.600.000	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	A. I. 5	RSUD	300.000			-	3.600.000	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	A. I. 6	Khaerus Sobar	300.000	03/12/15		900.000	2.400.000	900.000	1.200.000	1.200.000	4	-	-	1.200.000	-	1.200.000	-	-	600.000	-	600.000
8	A. I. 7	Yanti Mayasari	300.000	01/10/11		600.000	3.000.000	600.000	600.000	600.000	2	-	600.000	-	-	600.000	-	60.000	-	-	60.000
9	A. I. 8	Diki Tiandi	300.000	21/01/22		900.000	3.300.000	900.000	300.000	300.000	1	300.000	-	-	-	300.000	1.500	-	-	-	1.500
10	A. I. 9	Linah Lianti	300.000	5 Oct 2021		-	3.600.000	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	A. I. 10	Husin Hamid	300.000	19/07/13		300.000	3.300.000	300.000	300.000	300.000	1	300.000	-	-	-	300.000	1.500	-	-	-	1.500
12	A. I. 11	Achmad Sandy Sopian	300.000			-	3.600.000	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	A. I. 12	R Sofiawati	300.000	10 Des 2024		-	3.600.000	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	A. I. 13	Iqbal Maulana Alfarien	300.000	24 Maret 2025		-	1.500.000	-	1.500.000	1.500.000	5	-	-	1.500.000	-	1.500.000	-	-	750.000	-	750.000
15	A. I. 14	Ari Ardiyansyah	300.000	24 oktober 2022		3.600.000	600.000	3.600.000	3.000.000	3.000.000	10	-	-	-	3.000.000	3.000.000	-	-	-	3.000.000	3.000.000
16	A. I. 15	R Hardjadinata	300.000	03/02/17		-	3.600.000	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	A. I. 16	Dessy (Program Pemerintah)	300.000			-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	A. I. 16	Riknal Zupri	300.000	5 Agustus 2025		-	900.000	-	600.000	600.000	2	-	600.000	-	-	600.000	-	60.000	-	-	60.000
19	A. I. 17	Ryan Taufik	300.000		Tahun 2021	1.200.000	-	-	-	1.200.000	52	-	-	-	1.200.000	1.200.000	-	-	-	1.200.000	1.200.000
20	A. I. 17	R Widiatnoko	300.000	21 Januari 2022		-	3.600.000	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	A. I. 18	Raden Dwiansyah	300.000	1 Nov 2021		600.000	3.600.000	600.000	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	A. I. 19	Fitri Windar	300.000	15/03/17		-	3.600.000	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	A. I. 20	Badriyah Nurjanah	300.000	07/03/14		600.000	3.600.000	600.000	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	A. II. 1	Deki Firmansyah	275.000	12/08/15		1.100.000	1.925.000	1.100.000	1.375.000	1.375.000	5	-	-	1.375.000	-	1.375.000	-	-	687.500	-	687.500
25	A. II. 2	Firdaus	275.000	07/01/20		2.200.000	1.925.000	2.200.000	1.375.000	1.375.000	5	-	-	1.375.000	-	1.375.000	-	-	687.500	-	687.500
26	A. II. 3	Ridwan Sopian	275.000	9 Aug 2021		2.200.000	1.650.000	2.200.000	1.650.000	1.650.000	6	-	-	1.650.000	-	1.650.000	-	-	825.000	-	825.000
27	A. II. 4	Restu Rizkiana	275.000	4 Feb 2021		550.000	2.475.000	550.000	825.000	825.000	3	-	825.000	-	-	825.000	-	82.500	-	-	82.500
28	A. II. 5	Anisa Sri Andini	275.000	29 Mei 2023		-	3.300.000	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	A. II. 6	Tiara Putri	275.000			-	3.300.000	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	A. II. 7	Chandra Irawan	275.000			-	3.300.000	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	A. II. 8	Handy Rizky	275.000	25 Mei 2023		-	3.300.000	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	A. II. 9	Rinto Supriyadi	275.000	08/04/17		4.400.000	-	4.400.000	3.300.000	3.300.000	12	-	-	-	3.300.000	3.300.000	-	-	-	3.300.000	3.300.000
33	A. II. 10	Suherman	275.000	15 Agustus 2024		-	3.300.000	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	A. II. 11	Lukman	275.000	16/09/22	31 Juli 2025	275.000	1.925.000	275.000	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	A. II. 12	Susanto	275.000	02/11/15		550.000	2.750.000	550.000	550.000	550.000	2	-	550.000	-	-	550.000	-	55.000	-	-	55.000
36	A. II. 13	Abdul Aziz	275.000		Januari 2022	1.650.000	-	-	-	1.650.000	17	-	-	-	1.650.000	1.650.000	-	-	-	1.650.000	1.650.000
37	A. II. 13	Gilang Rachmat	275.000	11 Mar 2022		-	3.300.000	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	A. II. 14	Aini Fatmawati	275.000	23/05/18		275.000	3.025.000	275.000	275.000	275.000	1	275.000	-	-	-	275.000	1.375	-	-	-	1.375
39	A. II. 15	Oki Oktafiana	275.000	24/09/19	Kabur Maret 2023	5.775.000	-	-	-	5.775.000	30	-	-	-	5.775.000	5.775.000	-	-	-	5.775.000	5.775.000
40	A. II. 15	Muhammad Syachroni	275.000	06 Juni 2023		-	3.025.000	-	275.000	275.000	1	275.000	-	-	-	275.000	1.375	-	-	-	1.375
41	A. II. 16	Nursanti	275.000	04/02/20	Kabur Maret 2023	3.850.000	-	-	-	3.850.000	23	-	-	-	3.850.000	3.850.000	-	-	-	3.850.000	3.850.000
42	A. II. 16	A. Jeffri Ricardo (Program Pemerintah)	275.000	16 Juni 2023		2.475.000	-	-	-	2.475.000	9	-	-	-	2.475.000	2.475.000	-	-	-	2.475.000	2.475.000
43	A. II. 17	Herna Rismawati Gultom	275.000	16/02/17		-	3.300.000	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	A. II. 18	Adhi Deka Mulyono	225.000		Tahun 2020	675.000	-	-	-	675.000	63	-	-	-	675.000	675.000	-	-	-	675.000	675.000
45	A. II. 18	Burhanudin	275.000	17/04/17		-	3.300.000	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	A. II. 19	Renaldy R.Y (Rendy Rizki Yadi)	275.000	18/05/20		4.125.000	-	4.125.000	3.300.000	3.300.000	12	-	-	-	3.300.000	3.300.000	-	-	-	3.300.000	3.300.000
47	A. II. 20	Agus Setiadi	275.000	14/02/17		550.000	3.300.000	550.000	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	A. III.1	Cecep Sobari	225.000	08/05/17		900.000	1.350.000	900.000	1.350.000	1.350.000	6	-	-	1.350.000	-	1.350.000	-	-	675.000	-	675.000
49	A. III. 2	Junaidi Toha	225.000	01/08/18	24 Marety 2025	675.000	225.000	675.000	450.000	450.000	11	-	-	-	450.000	450.000	-	-	-	450.000	450.000
50	A. III. 2	M Irfan Ardiansyah Lestaluhu	225.000	1 Agustus 2025		-	1.125.000	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	A. III.3	Wahyu Sugih Rahayu	225.000	02/02/18		225.000	2.475.000	225.000	225.000	225.000	1	225.000	-	-	-	225.000	1.125	-	-	-	1.125
52	A. III.4	Batara Sutarnas	225.000	05/02/18	ndah 03-4-2023 (c.1.1)	675.000	-	400.000	-	275.000	1	275.000	-	-	-	275.000	1.375	-	-	-	1.375
53	A. III.4	Yusuf	225.000	14 Maret 2024		675.000	1.350.000	675.000	1.350.000	1.350.000	6	-	-	1.350.000	-	1.350.000	-	-	675.000	-	675.000
54	A. III.5	Abdulloh	225.000	02/03/17		675.000	1.350.000	675.000	1.350.000	1.350.000	6	-	-	1.350.000	-	1.350.000	-	-	675.000	-	675.000
55	A. III.6	Roy Afrio	225.000	13/06/19		2.025.000	-	-	2.700.000	4.725.000	21	-	-	-	4.725.000	4.725.000	-	-			

Pendapatan dan Piutang 2025											PENYISIHAN PIUTANG 2025										
No.	Hunian	Nama Jenis Retribusi	Tarif	Tanggal Masuk	Tanggal Keluar	Saldo Awal Piutang Denda per 31 Desember 2024	Penerimaan Tahun Berjalan	Pembayaran Piutang s/d Tahun 2025	Penambahan Piutang 2025	Saldo Akhir Piutang 2025	Umur Piutang	Kriteria Piutang					Penyisihan Piutang				
												lancar	kurang lancar	diragukan	macet	Jumlah	0,5 %	10 %	50 %	100 %	Jumlah
67	A. III.17	Ani Santika	225.000	13/02/16		2.475.000	1.125.000	2.475.000	1.575.000	1.575.000	7	-	-	-	1.575.000	1.575.000	-	-	-	1.575.000	1.575.000
68	A. III.18	Sery Elister Tarigan	225.000	02/03/17		-	2.700.000	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69	A. III.19	Ani	225.000	18/04/17		450.000	2.025.000	450.000	675.000	675.000	3	-	675.000	-	-	675.000	-	67.500	-	-	67.500
70	A. III.20	Riko Rama Danu	225.000	13/02/17		225.000	2.700.000	225.000	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	A. IV. 1	ABDURAHMAN HAMID	200.000	Desember 2024		-	2.400.000	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	A. IV. 2	Onizar	175.000		Tahun 2020	5.425.000	-	-	-	5.425.000	91	-	-	-	5.425.000	5.425.000	-	-	-	5.425.000	5.425.000
73	A. IV. 2	Maryani	200.000	01/10/20		800.000	1.000.000	800.000	1.400.000	1.400.000	7	-	-	-	1.400.000	1.400.000	-	-	-	1.400.000	1.400.000
74	A. IV. 3	Neni Yuliani	200.000	18/12/20		200.000	1.800.000	200.000	600.000	600.000	3	-	600.000	-	-	600.000	-	60.000	-	-	60.000
75	A. IV. 4	Riknal Zupri	200.000	07/10/21	5 Agustus 2025 pindah	-	-	-	1.400.000	1.400.000	11	-	-	-	1.400.000	1.400.000	-	-	-	1.400.000	1.400.000
76	A. IV. 4	YATI SETIAWATI	200.000	Nopember 2025		-	400.000	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77	A. IV. 5	Sudarma	200.000	08/03/17		-	2.400.000	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78	A. IV. 6	Ahmad Yusuf	200.000	19/09/19		400.000	2.000.000	400.000	400.000	400.000	2	-	400.000	-	-	400.000	-	40.000	-	-	40.000
79	A. IV. 7	Ratih Prihatin	200.000	3 Jan 2022		-	2.400.000	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80	A. IV. 8	Agus Suyatman	200.000	17 April 2024		-	2.400.000	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	A. IV. 9	Ahmad Sadehy	200.000	02/03/20		-	2.000.000	-	400.000	400.000	2	-	400.000	-	-	400.000	-	40.000	-	-	40.000
82	A. IV. 10	Darso (Program Pemerintah)	200.000	26/02/21		3.600.000	-	-	-	3.600.000	18	-	-	-	3.600.000	3.600.000	-	-	-	3.600.000	3.600.000
83	A. IV. 12	Yati	200.000	13 Oct 2021		-	2.400.000	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84	A. IV. 13	Danu	200.000	16/11/20		2.200.000	-	1.600.000	2.400.000	3.000.000	13	-	-	-	3.000.000	3.000.000	-	-	-	3.000.000	3.000.000
85	A. IV. 14	Iwan Setiawan	200.000	7 Jun 2022		-	2.400.000	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86	A. IV. 15	Suherman	200.000	6 Apr 2022		-	2.400.000	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87	A. IV. 16	Ujang Jaswli	200.000	09/01/21		600.000	2.000.000	600.000	400.000	400.000	2	-	400.000	-	-	400.000	-	40.000	-	-	40.000
88	A. IV. 17	Abdullah Nursin	200.000	02/09/19	2 Agustus 2024	800.000	-	-	-	800.000	20	-	-	-	800.000	800.000	-	-	-	800.000	800.000
89	A. IV. 17	Rima Yantisyah	200.000	9 Agustus 2024	30 Mei 2025 (kabur)	400.000	-	200.000	1.000.000	1.200.000	13	-	-	-	1.200.000	1.200.000	-	-	-	1.200.000	1.200.000
90	A. IV. 17	NANDA ADE HIDAYAT	200.000	12 November 2025		-	400.000	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91	A. IV. 18	Ahmad Ardhi Faisal	200.000	6 Oct 2021		-	1.800.000	-	600.000	600.000	3	-	600.000	-	-	600.000	-	60.000	-	-	60.000
92	A. IV. 19	Sadikin	200.000	12/08/20		1.000.000	1.600.000	1.000.000	800.000	800.000	4	-	-	800.000	-	800.000	-	400.000	-	-	400.000
93	A. IV. 20	Pamor Anugrah Indrakila	200.000	10/10/19		3.000.000	-	2.800.000	2.400.000	2.600.000	13	-	-	-	2.600.000	2.600.000	-	-	-	2.600.000	2.600.000
94	B. I. 1	Wawan Gunawan (Program Pemerinta	300.000			4.800.000	-	-	-	4.800.000	16	-	-	-	4.800.000	4.800.000	-	-	-	4.800.000	4.800.000
95	B. I. 2	Natalia Wienda	300.000	17/02/17		-	3.600.000	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96	B. I. 3	Kuswana	300.000	10/03/20		300.000	3.300.000	300.000	300.000	300.000	1	300.000	-	-	-	300.000	1.500	-	-	-	1.500
97	B. I. 4	Poppy Amelia	300.000	01/12/22		3.300.000	-	2.700.000	3.600.000	4.200.000	14	-	-	-	4.200.000	4.200.000	-	-	-	4.200.000	4.200.000
98	B. I. 5	Endang Sukardi	300.000		Tahun 2021	5.100.000	-	-	-	5.100.000	65	-	-	-	5.100.000	5.100.000	-	-	-	5.100.000	5.100.000
99	B. I. 5	Mohamad Rusydi	300.000	03/01/23		-	3.300.000	-	300.000	300.000	1	300.000	-	-	-	300.000	1.500	-	-	-	1.500
100	B. I. 6	Andi Kurnia	300.000	01/12/11		2.700.000	2.400.000	2.700.000	1.200.000	1.200.000	4	-	-	1.200.000	-	1.200.000	-	600.000	-	-	600.000
101	B. I. 7	Achmad Ishak	300.000	06/04/17		600.000	3.300.000	600.000	300.000	300.000	1	300.000	-	-	-	300.000	1.500	-	-	-	1.500
102	B. I. 8	Hadi Sucipto	300.000	18/09/20		-	3.600.000	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103	B. I. 9	Aldian Saputra	300.000	15/09/20		-	3.600.000	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104	B.I.10	Edy Suyanto	300.000	03/04/23		-	3.600.000	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105	B. I. 11	Sri Elia Tuti	300.000	13/02/17		600.000	3.000.000	600.000	600.000	600.000	2	-	600.000	-	-	600.000	-	60.000	-	-	60.000
106	B. I. 12	Nana Supriatna	300.000	28 juli 2022		-	3.600.000	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
107	B. I. 13	Mimie Sudarmi	300.000	23/09/19		900.000	2.700.000	900.000	900.000	900.000	3	-	900.000	-	-	900.000	-	90.000	-	-	90.000
108	B. I. 14	Wawan Gunawan	300.000	14/02/17		600.000	3.000.000	600.000	600.000	600.000	2	-	600.000	-	-	600.000	-	60.000	-	-	60.000
109	B. I. 15	Denny Setiawan	300.000	02/11/21		-	3.600.000	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110	B. I. 16	M Rochmat	300.000	15 Mei 2024		-	3.600.000	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
111	B. I. 17	Anceu Lunin	300.000	05/09/22		-	3.600.000	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
112	B. I. 18	Taufik Walhidayat	300.000	06/03/17		1.800.000	2.400.000	1.800.000	1.200.000	1.200.000	4	-	-	1.200.000	-	1.200.000	-	600.000	-	-	600.000
113	B. I. 19	Widi Sofianto	300.000	02/04/20		2.100.000	1.500.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	7	-	-	-	2.100.000	2.100.000	-	-	-	2.100.000	2.100.000
114	B. I. 20	Ida Rosida	300.000	01/02/10		1.200.000	3.300.000	1.200.000	300.000	300.000	1	300.000	-	-	-	300.000	1.500	-	-	-	1.500
115	B. II. 1	Khairul Saleh	275.000	20/02/17		-	3.025.000	-	275.000	275.000	1	275.000	-	-	-	275.000	1.375	-	-	-	1.375
116	B. II. 2	Afi' Hamdhan Ramadan	275.000	18 Apr 2023		-	2.750.000	-	550.000	550.000	2	-	550.000	-	-	550.000	-	55.000	-	-	55.000
117	B. II. 3	Yeti Mulyati	275.000	20/10/20		-	1.375.000	-	1.925.000	1.925.000	7	-	-	-	1.925.000	1.925.000	-	-	-	1.925.000	1.925.000
118	B. II. 4	Rizal Jaconiah Elias	275.000	30/07/12		550.000	2.475.000	550.000	825.000	825.000	3	-	825.000	-	-	825.000	-	82.500	-	-	82.500
119	B. II. 5	Satim	275.000	27/08/15		1.650.000	2.475.000	1.650.000	825.000	825.000	3	-	825.000	-	-	825.000	-	82.500	-	-	82.500
120	B. II. 6	Muhammad Yofi	275.000	17/02/17		-	3.300.000	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
121	B. II. 7	Supriyanto	275.000	04/05/17		550.000	2.750.000	550.000	550.000	550.000	2	-	550.000	-	-	550.000	-	55.000	-	-	55.000
122	B. II. 8	Nining Juningsih	275.000	04/01/19	5 Nopember 2023	275.000	-	-	-	275.000	26	-	-	-	275.000	275.000	-	-	-	275.000	275.000
123	B. II. 8	Agus Fauzi	275.000			-	3.300.000	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
124	B. II. 9	Erwin M. Malik	275.000	13/10/17		3.025.000	275.000	3.025.000	3.025.000	3.025.000	11	-	-	-	3.025.000	3.025.000	-	-	-	3.025.000	3.025.000
125	B. II. 10	Ismet Sudrajat	275.000	03/02/17		-	3.300.000	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
126	B. II. 11	Ade Hatta	275.000	01/09/21		-	3.300.000	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
127	B. II. 12	Rizki Abdurahman	275.000	20/03/17		1.925.000	1.650.000	1.925.000	1.650.000	1.650.000	6	-	-	1.650.000	-	1.650.000	-	825.000	-	-	825.000
128	B. II. 13	Tita Saputra	275.000	27/04/17		275.000	2.750.000	275.000	550.000	550.000	2	-	550.000	-	-	550.000	-	55.000	-	-	55.000
129	B. II. 14	Dewi Ardiani	275.000	06/02/17		-	3.300.000	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
130	B. II. 15	Achmad Kosasih	275.000	10/05/17		1.375.000	1.100.000	1.375.000	2.200.000	2.200.000	8	-	-	-	2.200.000	2.200.000	-	-	-	2.200.000	2.200.000
131	B. II. 16	Edi Kusnadi	275.000	27/05/16	27 Sep 2025	1.650.000	825.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	9	-	-	-	1.650.000	1.650.000	-	-	-	1.650.000	1.650.000
132</																					

Pendapatan dan Piutang 2025											PENYISIHAN PIUTANG 2025										
No.	Hunian	Nama Jenis Retribusi	Tarif	Tanggal Masuk	Tanggal Keluar	Saldo Awal Piutang Denda per 31 Desember 2024	Penerimaan Tahun Berjalan	Pembayaran Piutang s/d Tahun 2025	Penambahan Piutang 2025	Saldo Akhir Piutang 2025	Umur Piutang	Kriteria Piutang					Penyisihan Piutang				
												lancar	kurang lancar	diragukan	macet	Jumlah	0,5 %	10 %	50 %	100 %	Jumlah
139	B. III. 3	Yana Suryana	225.000	02/07/15		225.000	2.475.000	225.000	225.000	225.000	1	225.000	-	-	-	225.000	1.125	-	-	-	1.125
140	B. III. 4	Sasmito	225.000	13/02/19		675.000	2.025.000	675.000	675.000	675.000	3	-	675.000	-	-	675.000	-	67.500	-	-	67.500
141	B. III. 5	Dadi Marhadi	225.000	07/03/17		900.000	1.575.000	900.000	1.125.000	1.125.000	5	-	-	1.125.000	-	1.125.000	-	-	562.500	-	562.500
142	B. III. 6	Emang Sulaeman	225.000	27/05/16		675.000	2.025.000	675.000	675.000	675.000	3	-	675.000	-	-	675.000	-	67.500	-	-	67.500
143	B. III. 7	Febri Ardiansyah	225.000	11 nov 2017		5.625.000	-	4.275.000	2.700.000	4.050.000	18	-	-	-	4.050.000	4.050.000	-	-	-	4.050.000	4.050.000
144	B. III. 8	Derris	225.000	09/02/17		-	2.700.000	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
145	B. III. 9	Erpan Handoko	225.000	05/05/17		225.000	2.475.000	225.000	225.000	225.000	1	225.000	-	-	-	225.000	1.125	-	-	-	1.125
146	B. III. 10	Mulyadi	225.000	04/05/17		450.000	2.250.000	450.000	450.000	450.000	2	-	450.000	-	-	450.000	-	45.000	-	-	45.000
147	B. III. 11	Fathul Hayat	225.000	06/02/17	25 Mei 2025	450.000	675.000	450.000	450.000	450.000	9	-	-	-	450.000	450.000	-	-	-	450.000	450.000
148	B. III. 12	Sofyan Aji Wahid	225.000	28/04/17		-	2.025.000	-	675.000	675.000	3	-	675.000	-	-	675.000	-	67.500	-	-	67.500
149	B. III. 13	Mukri	225.000	16/03/17		1.350.000	1.575.000	1.350.000	1.125.000	1.125.000	5	-	-	1.125.000	-	1.125.000	-	-	562.500	-	562.500
150	B. III. 14	Emi Suhaemi	225.000	1 Oct 2021		450.000	2.250.000	450.000	450.000	450.000	2	-	450.000	-	-	450.000	-	45.000	-	-	45.000
151	B. III. 15	Ahmad Nur	225.000		maret 2022	1.800.000	-	-	-	1.800.000	53	-	-	-	1.800.000	1.800.000	-	-	-	1.800.000	1.800.000
152	B.III.15	Merlia Delany K.	225.000	13 Sep 2023		-	2.700.000	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
153	B. III. 16	Iin Nur Indahsari	225.000	1 Jan 2021		450.000	450.000	450.000	2.250.000	2.250.000	10	-	-	-	2.250.000	2.250.000	-	-	-	2.250.000	2.250.000
154	B. III. 17	Novita Andriani	225.000	4 nop 2022		900.000	1.800.000	900.000	900.000	900.000	4	-	-	900.000	-	900.000	-	-	450.000	-	450.000
155	B. III. 18	Neni Nuraeni	225.000			900.000	2.025.000	900.000	675.000	675.000	3	-	675.000	-	-	675.000	-	67.500	-	-	67.500
156	B. III. 19	Rini Eka Ps	225.000	01/08/11		900.000	1.350.000	900.000	1.350.000	1.350.000	6	-	-	1.350.000	-	1.350.000	-	-	675.000	-	675.000
157	B. III. 20	Ema Salamah	225.000	02/07/15		1.350.000	1.800.000	1.350.000	900.000	900.000	4	-	-	900.000	-	900.000	-	-	450.000	-	450.000
158	B. IV. 1	Agus Mulyadi	200.000	28/04/17		1.000.000	1.600.000	1.000.000	800.000	800.000	4	-	-	800.000	-	800.000	-	-	400.000	-	400.000
159	B.IV.2	Rendi Permana	200.000	Nopember 2023		-	2.200.000	-	200.000	200.000	1	200.000	-	-	-	200.000	1.000	-	-	-	1.000
160	B.IV.3	Yani Rahmawati	200.000	11 Januari 2024		200.000	2.200.000	200.000	200.000	200.000	1	200.000	-	-	-	200.000	1.000	-	-	-	1.000
161	B. IV. 4	Mulyana	200.000	25/01/22	Kabur	1.200.000	-	-	-	1.200.000	18	-	-	-	1.200.000	1.200.000	-	-	-	1.200.000	1.200.000
162	B. IV. 4	Isa Sondara	200.000	6 Maret 2024		-	2.400.000	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
163	B.IV.5	Lilis Holisah	200.000	1 Nopember 2023		-	2.000.000	-	400.000	400.000	2	-	400.000	-	-	400.000	-	40.000	-	-	40.000
164	B. IV. 6	Burhan Suryadi	200.000	2012		800.000	2.200.000	800.000	200.000	200.000	1	200.000	-	-	-	200.000	1.000	-	-	-	1.000
165	B. IV. 7	Insan Kamil	175.000		keluar 2020	2.975.000	-	-	-	2.975.000	77	-	-	-	2.975.000	2.975.000	-	-	-	2.975.000	2.975.000
166	B. IV. 7	Dewi Yulianingrum	200.000	12 Apr 2021		1.600.000	1.800.000	1.600.000	600.000	600.000	3	-	600.000	-	-	600.000	-	60.000	-	-	60.000
167	B. IV. 8	Mas'ud Al Rahman	200.000	20/02/20		600.000	1.800.000	600.000	600.000	600.000	3	-	600.000	-	-	600.000	-	60.000	-	-	60.000
168	B. IV. 9	Dewi Henny	200.000	10 Feb 2022		200.000	2.200.000	200.000	200.000	200.000	1	200.000	-	-	-	200.000	1.000	-	-	-	1.000
169	B. IV. 10	Nanjar Wahyudi	200.000	02/04/18		600.000	1.800.000	600.000	600.000	600.000	3	-	600.000	-	-	600.000	-	60.000	-	-	60.000
170	B. IV. 11	Agus Setia Budi	175.000		keluar 2020	1.750.000	-	-	-	1.750.000	70	-	-	-	1.750.000	1.750.000	-	-	-	1.750.000	1.750.000
171	B. IV. 12	Rana Saca Kusumah	200.000	09/05/17		600.000	1.800.000	600.000	600.000	600.000	3	-	600.000	-	-	600.000	-	60.000	-	-	60.000
172	B.IV.13	Iis Susilawati	200.000	6 Nopember 2023		-	2.400.000	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
173	B. IV. 14	Iskandar	200.000	20/02/17		200.000	2.000.000	200.000	400.000	400.000	2	-	400.000	-	-	400.000	-	40.000	-	-	40.000
174	B. IV. 15	Yayan Ahmad	200.000	06/07/20		600.000	1.600.000	600.000	800.000	800.000	4	-	-	800.000	-	800.000	-	-	400.000	-	400.000
175	B. IV. 16	Lufti Tirta Saputra	200.000	03/03/17		1.200.000	1.400.000	1.200.000	1.000.000	1.000.000	5	-	-	1.000.000	-	1.000.000	-	-	500.000	-	500.000
176	B. IV. 17	Junidar	200.000	01/08/18		400.000	1.600.000	400.000	800.000	800.000	4	-	-	800.000	-	800.000	-	-	400.000	-	400.000
177	B. IV. 18	Ade Mukhtar	200.000		keluar 2021	5.125.000	-	-	-	5.125.000	73	-	-	-	5.125.000	5.125.000	-	-	-	5.125.000	5.125.000
178	B. IV. 18	Adi Jumadi	200.000	01/01/2022 (Pindahan)		600.000	1.800.000	600.000	600.000	600.000	3	-	600.000	-	-	600.000	-	60.000	-	-	60.000
179	B. IV. 19	Abidin	200.000			600.000	1.800.000	600.000	600.000	600.000	3	-	600.000	-	-	600.000	-	60.000	-	-	60.000
180	B. IV. 20	Abdul Rohman	200.000	13/07/17	3 Agustus 2023	2.000.000	-	-	-	2.000.000	38	-	-	-	2.000.000	2.000.000	-	-	-	2.000.000	2.000.000
181	B. IV. 20	Reka Lestari	200.000	10 Agustus 2023		-	2.200.000	-	200.000	200.000	1	200.000	-	-	-	200.000	1.000	-	-	-	1.000
182	Gd SBG	RSUD	#####			-	120.000.000	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
183	C. I. 1	Deri Aria Agustian	400.000	01-02-2021		5.200.000	-	2.400.000	4.800.000	7.600.000	19	-	-	-	7.600.000	7.600.000	-	-	-	7.600.000	7.600.000
184	C. I. 2	Erwan Hermawan	400.000	02-02-2017		-	4.800.000	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
185	C. I. 3	Lukman Nur hakim	400.000	06-04-2017		-	4.400.000	-	400.000	400.000	1	400.000	-	-	-	400.000	2.000	-	-	-	2.000
186	C. I. 4	Upi Raudathul Jannah	400.000	23-02-2017		2.000.000	3.600.000	2.000.000	1.200.000	1.200.000	3	-	1.200.000	-	-	1.200.000	-	120.000	-	-	120.000
187	C. I. 5	Indra Irvani Ischak	400.000	10/																	

Pendapatan dan Piutang 2025											PENYISIHAN PIUTANG 2025										
No.	Hunian	Nama Jenis Retribusi	Tarif	Tanggal Masuk	Tanggal Keluar	Saldo Awal Piutang Denda per 31 Desember 2024	Penerimaan Tahun Berjalan	Pembayaran Piutang s/d Tahun 2025	Penambahan Piutang 2025	Saldo Akhir Piutang 2025	Umur Piutang	Kriteria Piutang					Penyisihan Piutang				
												lancar	kurang lancar	diragukan	macet	Jumlah	0,5 %	10 %	50 %	100 %	Jumlah
211	C. II. 3	Jalaludin	375.000	1 Nov 2021	30 Juli 2025	-	2.625.000	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
212	C. II. 3	Ida Purwantini	375.000	1 Agustus 2025			1.875.000	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
213	C. II. 4	M Iqbal Saefulloh	375.000	3 Mei 2024	17 Juni 2025	-	2.250.000	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
214	C. II. 4	Sania Lutfiah Ismail	375.000	8 Juli 2025			2.250.000	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215	C. II. 5	Ivan Wed Tiendy	375.000	16-09-2020	25 Juli 2025 / kabur	6.375.000	-	2.625.000	2.625.000	6.375.000	22	-	-	-	6.375.000	6.375.000	-	-	-	6.375.000	6.375.000
216	C. II. 6	Uci Sanusi	375.000	21/03/17		375.000	4.125.000	375.000	375.000	1	375.000	-	-	-	-	375.000	1.875	-	-	-	1.875
217	C. II. 7	Setyo Purnomo	375.000	3 Dec 2021	5 Apr 2023	1.875.000	-	-	-	1.875.000	37	-	-	-	1.875.000	1.875.000	-	-	-	1.875.000	1.875.000
218	C. II. 7	Apriyani	375.000	14/01/25			3.375.000	-	1.125.000	1.125.000	3	-	1.125.000	-	-	1.125.000	-	112.500	-	-	112.500
219	C. II. 8	Dede Yusuf	375.000	11 Nov 2021	18 Maret 2025	375.000	1.125.000	375.000	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
220	C. II. 8	Lia Apriani	375.000	25 Maret 2025			3.000.000	-	750.000	750.000	2	-	750.000	-	-	750.000	-	75.000	-	-	75.000
221	C. II. 9	Nurhadi Siregar	375.000	30-12-2019		-	4.500.000	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
222	C. II. 10	Iwan Suherman	375.000	04/12/12		750.000	3.750.000	750.000	750.000	750.000	2	-	750.000	-	-	750.000	-	75.000	-	-	75.000
223	C. II. 11	Budi Juniorsyah	375.000	19/10/17		7.875.000	-	1.500.000	4.500.000	10.875.000	29	-	-	-	10.875.000	10.875.000	-	-	-	10.875.000	10.875.000
224	C. II. 12	Lani Zaelani	375.000	4 nov 2015		375.000	4.500.000	375.000	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
225	C. II. 13	Nur Ikhsan Hikmahtiar	375.000			-	4.500.000	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
226	C. II. 14	Halim	375.000	18/09/17		-	4.500.000	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
227	C. II. 15	Muhamad Muslim	375.000	13/03/17		-	4.500.000	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
228	C. II. 16	Jamaludin	375.000	23/04/16		-	4.500.000	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
229	C. II. 17	Deviyanti Putri	375.000	11 Apr 2022		3.750.000	1.125.000	3.750.000	3.375.000	3.375.000	9	-	-	-	3.375.000	3.375.000	-	-	-	3.375.000	3.375.000
230	C. II. 18	Ii Syafrillah	375.000	03-08-2020		10.875.000	-	-	4.500.000	15.375.000	41	-	-	-	15.375.000	15.375.000	-	-	-	15.375.000	15.375.000
231	C. II. 19	Hendra Kariyawan	375.000	08/03/19		2.625.000	-	2.625.000	4.500.000	4.500.000	12	-	-	-	4.500.000	4.500.000	-	-	-	4.500.000	4.500.000
232	C. II. 20	Sunaryo	375.000	02/09/24		-	4.500.000	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
233	C. III. 1	Amanto Nugroho	325.000	22-Jan-19		325.000	3.575.000	325.000	325.000	325.000	1	325.000	-	-	-	325.000	1.625	-	-	-	1.625
234	C. III. 2	Sudarlina	325.000	01-09-2020		1.300.000	2.275.000	1.300.000	1.625.000	1.625.000	5	-	-	1.625.000	-	1.625.000	-	-	812.500	-	812.500
235	C. III. 3	Jakaria	325.000	20 Jan 2022	19 Mei 2025	325.000	1.625.000	325.000	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
236	C. III. 3	RIZAL AZIZ	325.000	16 Juni 2025			2.275.000	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
237	C. III. 4	Sujihaddin	325.000	10 Nov 2021		-	3.900.000	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
238	C. III. 5	Harun Suwandi	325.000	03-02-2017		-	3.900.000	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
239	C. III. 6	Dudi Setiawan s	325.000	02-01-2016		-	3.575.000	-	325.000	325.000	1	325.000	-	-	-	325.000	1.625	-	-	-	1.625
240	C. III. 7	Raditino	325.000	1 Dec 2021		325.000	3.900.000	325.000	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
241	C. III. 8	Threis Joke	325.000	06-11-2020		1.300.000	2.600.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	4	-	-	1.300.000	-	1.300.000	-	-	650.000	-	650.000
242	C. III. 9	Ahmad Hamdi	325.000	li 2024 / pindahan C.I.9			3.900.000	-	-	-	0	-	-	1.300.000	-	-	-	-	650.000	-	650.000
243	C. III. 10	Rangga Firdaus	325.000	11-03-2020		4.875.000	325.000	4.875.000	3.575.000	3.575.000	11	-	-	-	3.575.000	3.575.000	-	-	-	3.575.000	3.575.000
244	C. III. 11	Romi	325.000	21-09-2019	30 Januari 2024	1.625.000	-	-	-	1.625.000	28	-	-	-	1.625.000	1.625.000	-	-	-	1.625.000	1.625.000
245	C. III. 11	Zahra Amelia	325.000	2 Mei 2024		-	3.900.000	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
246	C. III. 12	Satrio Putranto	325.000	12 Aug 2021		-	975.000	-	2.925.000	2.925.000	9	-	-	-	2.925.000	2.925.000	-	-	-	2.925.000	2.925.000
247	C. III. 13	Herman Setiawan	325.000	04-06-2019		9.100.000	-	2.275.000	3.900.000	10.725.000	33	-	-	-	10.725.000	10.725.000	-	-	-	10.725.000	10.725.000
248	C. III. 14	Brasto Sapto Nugroho	325.000	1 Dec 2021		325.000	3.250.000	325.000	650.000	650.000	2	-	650.000	-	-	650.000	-	65.000	-	-	65.000
249	C. III. 15	Iswatun Hasanah	325.000	02-04-2020	11 Pebruari 2024	7.150.000	-	-	-	7.150.000	44	-	-	-	7.150.000	7.150.000	-	-	-	7.150.000	7.150.000
250	C. III. 15	Suhanda	325.000	Baru		-	3.575.000	-	325.000	325.000	1	325.000	-	-	-	325.000	1.625	-	-	-	1.625
251	C. III. 16	Indra Irvani	325.000	21 Feb 2021	Pindah 10-3-2022	325.000	-	-	-	325.000	46	-	-	-	325.000	325.000	-	-	-	325.000	325.000
252	C. III. 16	Yohana	325.000	01-04-2022		-	3.900.000	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
253	C. III. 17	Fauziah Casmita Hassan	325.000	1 Agustus 2024		-	3.575.000	-	325.000	325.000	1	325.000	-	-	-	325.000	1.625	-	-	-	1.625
254	C. III. 18	Marlinah	325.000	02-11-2020		1.625.000	1.950.000	1.625.000	1.950.000	1.950.000	6	-	-	1.950.000	-	1.950.000	-	-	975.000	-	975.000
255	C. III. 19	Budi Susanto	325.000	11-11-2019	23-10-2024 (kabur)	4.875.000	-	-	-	4.875.000	29	-	-	-	4.875.000	4.875.000	-	-	-	4.875.000	4.875.000
256	C. III. 19	Cahyani Lestari	325.000	05/12/24		-	3.900.000	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
257	C. III. 20	Hendra Saputra	325.000	20-11-2019		6.500.000	-	4.550.000	3.900.000	5.850.000	18	-	-	-	5.850.000	5.850.000	-	-	-	5.850.000	5.850.000
258	C.IV.1	Ruswandi	300.000	1 Jun 2021	Nopember 2023	2.400.000	-	-	-	2.400.000	33	-	-	-	2.400.000	2.400.000	-	-	-	2.400.000	2.400.000
259	C.IV.1	Indra Sopian	300.000	1 desember 2023		600.000	2.400.000	600.000	1.200.000	1.200.000	4	-	-	1.200.000	-	1.200.000	-	-	600.000	-	600.000
260	C. IV. 2	Afriadi Chandra	300.000	16/10/18		300.000	3.300.000	300.000	300.000	300.000	1	300.000	-	-	-	300.000	1.500	-	-	-	1.500
261	C. IV. 3	Rizal Efendi	300.000	01/12/22		-	3.300.000	-	300.000	300.000	1	300.000	-	-	-	300.000	1.500	-	-	-	1.500
262	C. IV. 4	Andri Zulfikfar																			

Pendapatan dan Piutang 2025											PENYISIHAN PIUTANG 2025										
No.	Hunian	Nama Jenis Retribusi	Tarif	Tanggal Masuk	Tanggal Keluar	Saldo Awal Piutang Denda per 31 Desember 2024	Penerimaan Tahun Berjalan	Pembayaran Piutang s/d Tahun 2025	Penambahan Piutang 2025	Saldo Akhir Piutang 2025	Umur Piutang	Kriteria Piutang				Penyisihan Piutang					
												lancar	kurang lancar	diragukan	macet	Jumlah	0,5 %	10 %	50 %	100 %	Jumlah
283	D. I. 2	Hamzah Dhiyaul Islam	400.000	16 Maret 2023	17 Jan 2025	-	400.000	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
284	D. I. 2	Johan Tanamal	400.000	11 Pebruari 2025			4.400.000	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
285	D. I. 3	Rita Susanah	400.000	09/05/17		-	4.400.000	-	400.000	400.000	1	400.000	-	-	-	400.000	2.000	-	-	-	2.000
286	D.I.4	Deni Rahman	200.000	10/07/18		5.800.000	-	-	2.400.000	8.200.000	41	-	-	-	8.200.000	8.200.000	-	-	-	8.200.000	8.200.000
287	D.I.5	Muhammad Sani Rafsanjani	400.000	27 Nopember 2023		-	4.800.000	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
288	D.I.6	Ruslan A	400.000	01/01/17		2.400.000	3.600.000	2.400.000	1.200.000	1.200.000	3	-	1.200.000	-	-	1.200.000	-	120.000	-	-	120.000
289	D. I. 7	Ratih Vuji Puspitasari	400.000	23/10/13		-	4.400.000	-	400.000	400.000	1	400.000	-	-	-	400.000	2.000	-	-	-	2.000
290	D. I. 8	Widiar Wahyudi	400.000	18/04/17		-	4.800.000	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
291	D. I. 9	Nining Sri Ningsih	400.000	23/05/15		800.000	4.000.000	800.000	800.000	800.000	2	-	800.000	-	-	800.000	-	80.000	-	-	80.000
292	D. I. 10	Lukman	400.000	09/05/17		6.000.000	-	2.800.000	4.800.000	8.000.000	20	-	-	8.000.000	-	8.000.000	-	-	-	8.000.000	8.000.000
293	D. I. 11	Cristian Iskandar	400.000	09/05/17		5.200.000	-	5.200.000	4.800.000	4.800.000	12	-	-	-	4.800.000	4.800.000	-	-	-	4.800.000	4.800.000
294	D. I. 12	Inayah	400.000	8 Agustus 2023		-	4.400.000	-	400.000	400.000	1	400.000	-	-	-	400.000	2.000	-	-	-	2.000
295	D. I. 13	Agus Dirhamsayah	400.000	02/04/18	Januari 2025	-	400.000	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
296	D. I. 13	Usman Sungkar	400.000	11 Pebruari 2025		-	4.000.000	-	400.000	400.000	1	400.000	-	-	-	400.000	2.000	-	-	-	2.000
297	D. I. 14	Sae'ul Anwar	400.000	24/07/15		-	4.800.000	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
298	D. I. 15	Bastian	400.000	11/08/16		400.000	4.000.000	400.000	800.000	800.000	2	-	800.000	-	-	800.000	-	80.000	-	-	80.000
299	D. I. 16	Rosdiana	400.000	09/05/17		400.000	4.800.000	400.000	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
300	D. I. 17	Adi Mulyadi	400.000	25/02/19		-	4.800.000	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
301	D. I. 19	Jejen Suhardi	400.000	01/11/16		2.000.000	3.200.000	2.000.000	1.600.000	1.600.000	4	-	-	1.600.000	-	1.600.000	-	800.000	-	-	800.000
302	D. I. 20	Sri Budhi Nata	400.000	01/08/22	21 Apr 2025	-	1.200.000	-	400.000	400.000	9	-	-	-	400.000	400.000	-	-	-	400.000	400.000
303	D. I. 20	Apriyanti	400.000	2 Juli 2025		-	2.400.000	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
304	D. II. 1	Toni Dwi P	375.000		keluar 2020	6.500.000	-	-	-	6.500.000	77	-	-	-	6.500.000	6.500.000	-	-	-	6.500.000	6.500.000
305	D. II. 1	Tabagus Achmad	375.000		16 Juli 2025 / kabur	8.250.000	-	2.625.000	2.625.000	8.250.000	27	-	-	-	8.250.000	8.250.000	-	-	-	8.250.000	8.250.000
306	D. II. 1	Ari Wibowo	375.000	4 Agustus 2025		-	1.875.000	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
307	D. II. 2	Amal Adri	375.000	13/09/18		4.125.000	-	3.750.000	4.500.000	4.875.000	13	-	-	-	4.875.000	4.875.000	-	-	-	4.875.000	4.875.000
308	D. II. 3	R Rinal Wiyasa	375.000	01/07/20		750.000	3.750.000	750.000	750.000	750.000	2	-	750.000	-	-	750.000	-	75.000	-	-	75.000
309	D. II. 4	Enny Afriani	375.000	01/10/20	23 Oktober 2025	-	3.750.000	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
310	D. II. 4	MIRA ASMARASARI	375.000	07/11/25		-	750.000	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
311	D. II. 5	Adi Rochman	375.000	12 Jun 2021	9 Desember 2024 / kabur	2.625.000	-	-	-	2.625.000	19	-	-	-	2.625.000	2.625.000	-	-	-	2.625.000	2.625.000
312	D. II. 5	Dhea Revian Wahab	375.000	20 Pebruari 2025		-	3.375.000	-	750.000	750.000	2	-	750.000	-	-	750.000	-	75.000	-	-	75.000
313	D. II. 6	Erik	375.000	2016		13.500.000	-	-	4.500.000	18.000.000	48	-	-	-	18.000.000	18.000.000	-	-	-	18.000.000	18.000.000
314	D. II. 7	Cep Topik	375.000	20/04/18	22 Apr 2025	5.250.000	-	-	1.500.000	6.750.000	26	-	-	-	6.750.000	6.750.000	-	-	-	6.750.000	6.750.000
315	D. II. 7	Wira Prihatin	375.000	2 Mei 2025		-	2.625.000	-	375.000	375.000	1	375.000	-	-	-	375.000	1.875	-	-	-	1.875
316	D. II. 8	Mardianti	375.000	05/02/12		1.875.000	2.625.000	1.875.000	1.875.000	1.875.000	5	-	-	1.875.000	-	1.875.000	-	-	937.500	-	937.500
317	D. II. 9	Puri Febrina Rohmani	375.000	09/02/18		2.250.000	2.625.000	2.250.000	1.875.000	1.875.000	5	-	-	1.875.000	-	1.875.000	-	-	937.500	-	937.500
318	D. II. 10	Dwi Mulya Subardini	375.000	01/01/19		2.250.000	3.000.000	2.250.000	1.500.000	1.500.000	4	-	-	-	1.500.000	1.500.000	-	-	750.000	-	750.000
319	D. II. 11	Suwito	375.000	06/05/19		4.125.000	750.000	4.125.000	3.750.000	3.750.000	10	-	-	-	3.750.000	3.750.000	-	-	-	3.750.000	3.750.000
320	D. II. 12	Arif Prabowo	375.000	21/03/13	30-10-2024 (kabur)	6.750.000	-	-	-	6.750.000	32	-	-	-	6.750.000	6.750.000	-	-	-	6.750.000	6.750.000
321	D. II. 12	Galih Aditya	375.000	03/01/25		-	4.125.000	-	375.000	375.000	1	375.000	-	-	-	375.000	1.875	-	-	-	1.875
322	D. II. 13	Ferni Overking / bantuan pemerintah	375.000	01/09/19		-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
323	D. II. 14	Widyy Nur Fadillah	375.000	29 Mar 2022		-	4.500.000	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
324	D. II. 15	Moch. Ferdiansyah	375.000	05/04/12		10.125.000	-	-	4.500.000	14.625.000	39	-	-	-	14.625.000	14.625.000	-	-	-	14.625.000	14.625.000
325	D. II. 16	Ruslan B	375.000	01/01/17		2.625.000	3.000.000	2.625.000	1.500.000	1.500.000	4	-	-	1.500.000	-	1.500.000	-	-	750.000	-	750.000
326	D. II. 17	Awaludin	375.000	19/08/14		750.000	3.375.000	750.000	1.125.000	1.125.000	3	-	1.125.000	-	-	1.125.000	-	112.500	-	-	112.500
327	D. II. 18	Djaenudin Sape'i	375.000	01/12/21		375.000	4.125.000	375.000	375.000	375.000	1	375.000	-	-	-	375.000	1.875	-	-	-	1.875
328	D. II. 19	Agmi Indra Nadhi	375.000	05/04/12		1.125.000	3.375.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000	3	-	1.125.000	-	-	1.125.000	-	112.500	-	-	112.500
329	D. II. 20	Arnie Sulistianto	375.000	14/09/17	3 Juli 2023	375.000	-	-	-	375.000	30	-	-	-	375.000	375.000	-	-	-	375.000	375.000
330	D.II.20	Novita Abimanyu	375.000	25/09/23		-	4.125.000	-	375.000	375.000	1	375.000	-	-	-	375.000	1.875	-	-	-	1.875
331	D. III. 1	Sihar Naibaho	325.000	13-02-2017		975.000	3.250.000	975.000	650.000	650.000	2	-	650.000	-	-	650.000	-	65.000	-	-	65.000
332	D. III. 2	Tedi Suryadi	325.000	26-10-2018	2 Jan 2025	1.950.000	-	325.000	-	1.625.000	16	-	-	-	1.625.000	1.625.000	-	-	-		

Pendapatan dan Piutang 2025											PENYISIHAN PIUTANG 2025										
No.	Hunian	Nama Jenis Retribusi	Tarif	Tanggal Masuk	Tanggal Keluar	Saldo Awal Piutang Denda per 31 Desember 2024	Penerimaan Tahun Berjalan	Pembayaran Piutang s/d Tahun 2025	Penambahan Piutang 2025	Saldo Akhir Piutang 2025	Umur Piutang	Kriteria Piutang					Penyisihan Piutang				
												lancar	kurang lancar	diragukan	macet	Jumlah	0,5 %	10 %	50 %	100 %	Jumlah
355	D. III. 20	Elis Kurnia	325.000	18 Desember 2024	15 Sep 2025	-	2.925.000	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
356	D. III. 20	Erfan Supriadi	325.000	1 Oktober 2025			975.000	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
357	D. IV. 1	Km. Tousin	300.000	09/04/18		900.000	2.400.000	900.000	1.200.000	1.200.000	4	-	-	1.200.000	-	1.200.000	-	-	600.000	-	600.000
358	D. IV.2	Trisno F	300.000	26/07/19		2.400.000	1.200.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	8	-	-	-	2.400.000	2.400.000	-	-	-	2.400.000	2.400.000
359	D. IV.3	Arif Firmansyah	300.000	2 April 2024		-	3.600.000	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
360	D. IV. 4	Jhon Madestan	300.000	2 Jun 2022		1.800.000	1.500.000	1.800.000	2.100.000	2.100.000	7	-	-	-	2.100.000	2.100.000	-	-	-	2.100.000	2.100.000
361	D. IV. 5	M Nurhendi Yusup	300.000	1 Sep 2022	Agustus 2024	6.000.000	-	-	-	6.000.000	32	-	-	-	6.000.000	6.000.000	-	-	-	6.000.000	6.000.000
362	D. IV. 5	Riko Andili	300.000	3 Sep 2024		-	3.300.000	-	300.000	300.000	1	300.000	-	-	-	300.000	1.500	-	-	-	1.500
363	D. IV. 6	Ahmad Fauzi	300.000	10/08/20		300.000	3.000.000	300.000	600.000	600.000	2	-	600.000	-	-	600.000	-	60.000	-	-	60.000
364	D. IV. 7	Widya Gardika	300.000	05/01/23		-	3.600.000	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
365	D. IV. 8	Jejen Jaenudin	300.000	10 Agustus 2022		-	1.800.000	-	1.800.000	1.800.000	6	-	-	1.800.000	-	1.800.000	-	-	900.000	-	900.000
366	D. IV. 9	Ellayana Budi Suliasih	300.000	05 oktober 2020		-	3.300.000	-	300.000	300.000	1	300.000	-	-	-	300.000	1.500	-	-	-	1.500
367	D. IV. 10	Sarah Yulianti	300.000	23 Desember 2024		-	3.300.000	-	300.000	300.000	1	300.000	-	-	-	300.000	1.500	-	-	-	1.500
368	D. IV. 11	Rahmat	300.000	01 Mei 2021		300.000	3.300.000	300.000	300.000	300.000	1	300.000	-	-	-	300.000	1.500	-	-	-	1.500
369	D. IV. 12	Eri Irawan	300.000	09 Januari 2020	9 Apr 2025	2.400.000	-	2.400.000	1.200.000	1.200.000	12	-	-	-	1.200.000	1.200.000	-	-	-	1.200.000	1.200.000
370	D. IV. 12	Ester Marina Sidabutar	300.000	23 Apr 2025		-	2.700.000	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
371	D. IV. 13	Hendro Sulistio	300.000	1 Nov 2021		-	3.600.000	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
372	D. IV. 14	Mulya Wijaya	300.000	06 Februari 2017		300.000	3.300.000	300.000	300.000	300.000	1	300.000	-	-	-	300.000	1.500	-	-	-	1.500
373	D. IV. 15	Ahmad Fauzi	300.000	14 Sep 2018	kabur - Juli 2024	4.500.000	-	-	-	4.500.000	32	-	-	-	4.500.000	4.500.000	-	-	-	4.500.000	4.500.000
374	D. IV. 15	Bob Buchari	300.000	11 Juli 2024		-	3.600.000	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
375	D. IV. 16	Yudith Supratman	300.000	20 Februari 2017		-	3.300.000	-	300.000	300.000	1	300.000	-	-	-	300.000	1.500	-	-	-	1.500
376	D. IV. 17	Siti Martini	300.000	1 juni 2021		-	3.300.000	-	300.000	300.000	1	300.000	-	-	-	300.000	1.500	-	-	-	1.500
377	D. IV. 18	Yayan Sopian Alwi	300.000	28 Maret 2019		2.100.000	1.500.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	7	-	-	-	2.100.000	2.100.000	-	-	-	2.100.000	2.100.000
378	D. IV. 19	Lilis Rahmawati	300.000	15 mei 2018		3.000.000	300.000	3.000.000	3.300.000	3.300.000	11	-	-	-	3.300.000	3.300.000	-	-	-	3.300.000	3.300.000
379	D. IV. 20	Maradona Supratman	300.000	2 februari 2016		3.300.000	1.200.000	3.300.000	2.400.000	2.400.000	8	-	-	-	2.400.000	2.400.000	-	-	-	2.400.000	2.400.000
380	K.7.A	Ariadi	360.000			1.440.000	1.800.000	1.440.000	2.520.000	2.520.000	7	-	-	-	2.520.000	2.520.000	-	-	-	2.520.000	2.520.000
381	K.4.D	Inayah	360.000			-	3.960.000	-	360.000	360.000	1	360.000	-	-	-	360.000	1.800	-	-	-	1.800
382	K.8.A	Linah Lianti	360.000			360.000	360.000	360.000	3.960.000	3.960.000	11	-	-	-	3.960.000	3.960.000	-	-	-	3.960.000	3.960.000
383	K.6.A	Prajna Paramitha	360.000	Januari 2023		2.880.000	2.160.000	2.880.000	2.160.000	2.160.000	6	-	-	2.160.000	-	2.160.000	-	-	1.080.000	-	1.080.000
384	K.2.A	Sumarni	360.000			360.000	3.960.000	360.000	360.000	360.000	1	360.000	-	-	-	360.000	1.800	-	-	-	1.800
385	L.2.A	Lilis Holisah	180.000	Pebruari 2024		-	1.620.000	-	540.000	540.000	3	-	540.000	-	-	540.000	-	54.000	-	-	54.000
386	L.8.A	Iwan M. Ridwan	180.000			540.000	1.260.000	540.000	900.000	900.000	5	-	-	900.000	-	900.000	-	-	450.000	-	450.000
387	L.9.A	Iwan M. Ridwan	180.000			540.000	1.260.000	540.000	900.000	900.000	5	-	-	900.000	-	900.000	-	-	450.000	-	450.000
388	L.3.A	BUDI HENDRAWINATA	180.000	Juli 2025	14 Oktober 2025		900.000	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
389	L.4.A	Yena	180.000	18-11-2024	2 Jan 2025	180.000	180.000	180.000	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
390	L.4.A	Suandi Bin Sainin	180.000	4 Sep 2025		180.000	-	-	540.000	540.000	3	-	540.000	-	-	540.000	-	54.000	-	-	54.000
391	K.9.D	Mia Rosmiati	720.000			1.440.000	8.640.000	1.440.000	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
392	K.8.D	Tri sulisyarningsih	360.000	Pebruari 2023		-	4.320.000	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
393	K.1.D	Dr. Rosdiana Rasyidi	360.000			-	4.320.000	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
394	K.1.D	Ferian Syahrul	360.000	11 Juli 2023		-	4.320.000	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
395	L.5.A	Neneng Sri Rahayu	180.000		30 Aug 2025	-	540.000	-	900.000	900.000	5	-	-	900.000	-	900.000	-	-	450.000	-	450.000
396	K.3.D	Saeul anwar	360.000			-	3.600.000	-	720.000	720.000	2	-	720.000	-	-	720.000	-	72.000	-	-	72.000
397	K.3.A	Yudhi malapsa	360.000	Februari 2023		360.000	2.160.000	360.000	2.160.000	2.160.000	6	-	-	2.160.000	-	2.160.000	-	-	1.080.000	-	1.080.000
398	K.2.D	Puri Febrina Rohmani	360.000	8 Mei 2023		-	3.960.000	-	360.000	360.000	1	360.000	-	-	-	360.000	1.800	-	-	-	1.800
399	K.5.D	Meydi Yusman	360.000	9 Januari 2024		360.000	4.320.000	360.000	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
400	K.6.D	Rahmidian	360.000	16 oktober 2023		-	4.320.000	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
401	K.1.A	Erlina	360.000	18 Juli 2023	Juni 2025	-	2.160.000	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
402	K.5.A	Lilis Rahmawati	360.000	15 Nopember 2023		3.960.000	-	-	4.320.000	8.280.000	23	-	-	-	-	8.280.000	-	-	-	8.280.000	8.280.000
403	K.4.A	Evy Pajriani	360.000	5 Maret 2024	30 Januari 2025	-	360.000	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
404	K.4.A	Priska Hutabalian	360.000	5 Pebruari 2025		-	3.600.000	-	360.000	360.000	1	360.000	-	-	-	360.000	1.800	-	-	-	1.800
405	L.1.A	Linah Lianti	180.000	Januari 2023		2.160.000	-	1.080.000	2.160.000	3.240.000	18	-	-	-	3.240.000	3.240.000	-	-	-	3.240.000	3.240.000
406	A. D. 1	Kosong	400.000			-															

Pendapatan dan Piutang 2025											PENYISIHAN PIUTANG 2025										
No.	Hunian	Nama Jenis Retribusi	Tarif	Tanggal Masuk	Tanggal Keluar	Saldo Awal Piutang Denda per 31 Desember 2024	Penerimaan Tahun Berjalan	Pembayaran Piutang s/d Tahun 2025	Penambahan Piutang 2025	Saldo Akhir Piutang 2025	Umur Piutang	Kriteria Piutang					Penyisihan Piutang				
												lancar	kurang lancar	diragukan	macet	Jumlah	0,5 %	10 %	50 %	100 %	Jumlah
427	A. I. 12	Isnaeni Haryadi	400.000	20 Januari 2022		900.000	3.600.000	800.000,00	1.200.000	1.300.000	3	-	1.300.000	-	-	1.300.000	-	130.000	-	-	130.000
428	A. I. 13	Syukur Waluya / bantuan pemerintah	400.000	16 April 2018		16.200.000	-	-	-	16.200.000	40	-	-	-	16.200.000	16.200.000	-	-	-	16.200.000	16.200.000
429	A. I. 14	Abdurahman Shahab	400.000	6 Agustus 2022		-	4.800.000	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
430	A. I. 15	Enok Pipin Sopiah	400.000	13 April 2018	19/01/23	18.000.000	-	-	-	18.000.000	80	-	-	-	18.000.000	18.000.000	-	-	-	18.000.000	18.000.000
431	A. I. 15	Nani Sumarni	400.000	20 Januari 2023	30 April 2024	450.000	-	-	-	450.000	21	-	-	-	450.000	450.000	-	-	-	450.000	450.000
432	A. I. 15	Irvan Verdian	400.000	7 Mei 2024		-	4.800.000	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
433	A. I. 16	Tim Tim Yanziona	400.000	01 Juli 2021		4.000.000	-	3.600.000,00	4.800.000	5.200.000	13	-	-	-	5.200.000	5.200.000	-	-	-	5.200.000	5.200.000
434	A. I. 17	Nani Karningsih / bantuan pemerintah	400.000	2 Agustus 2021		5.400.000	-	-	-	5.400.000	13	-	-	-	5.400.000	5.400.000	-	-	-	5.400.000	5.400.000
435	A. I. 18	Sunarno	400.000	20 Januari 2018	1 Juli 2022	10.350.000	-	-	-	10.350.000	66	-	-	-	10.350.000	10.350.000	-	-	-	10.350.000	10.350.000
436	A. I. 18	Aninda Ludvu Siswanti	400.000	2 Mei 2024		-	4.800.000	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
437	A. I. 19	Siti Ramlah Ali	400.000	15 Januari 2019		4.150.000	800.000	4.000.000,00	4.000.000	4.150.000	10	-	-	-	4.150.000	4.150.000	-	-	-	4.150.000	4.150.000
438	A. I. 20	Tiurma Carolina	400.000	03 April 2021		14.700.000	-	-	4.800.000	19.500.000	48	-	-	-	19.500.000	19.500.000	-	-	-	19.500.000	19.500.000
439	A. I. 21	Erman Soeid BSC	400.000	28 Januari 2018		400.000	4.800.000	400.000,00	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
440	A. I. 22	Endang Sri	400.000		Tahun 2021	17.100.000	-	-	-	17.100.000	90	-	-	-	17.100.000	17.100.000	-	-	-	17.100.000	17.100.000
441	A. I. 22	Amprung Qodratulah	400.000	31 Juli 2023		-	4.800.000	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
442	A. I. 23	Tiominar Siahaan	400.000	15 Februari 2021	23 Juni 2025 Kabur	7.050.000	-	850.000,00	2.400.000	8.600.000	28	-	-	-	8.600.000	8.600.000	-	-	-	8.600.000	8.600.000
443	A. I. 23	Yongki Setiawan	400.000	7 Oktober 2025		-	1.200.000	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
444	A. I. 24	Fauzi Hendra Wijaya	375.000	20 Januari 2018	1 nop 23 / Kabur	4.050.000	-	-	-	4.050.000	35	-	-	-	4.050.000	4.050.000	-	-	-	4.050.000	4.050.000
445	A.I.24	Hendarsih Yusep	400.000	21 Nopember 2023		-	2.800.000	-	2.000.000	2.000.000	5	-	-	2.000.000	-	2.000.000	-	1.000.000	-	-	1.000.000
446	A. II. 1	Nugraha Surya Sumantri	375.000	20 Pebruari 2018	30 Agustus 2022	2.975.000	-	-	-	2.975.000	47	-	-	-	2.975.000	2.975.000	-	-	-	2.975.000	2.975.000
447	A. II. 1	Elka Kastolani	375.000	11 Agustus 2025		-	1.875.000	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
448	A. II. 2	Arif Zulfie	375.000	20 Juli 2019		4.375.000	2.625.000	4.125.000,00	1.875.000	2.125.000	5	-	-	2.125.000	-	2.125.000	-	-	1.062.500	-	1.062.500
449	A. II. 3	Dolly Indriawan	375.000	1 Desember 2023		375.000	4.125.000	375.000,00	375.000	375.000	1	375.000	-	-	-	-	1.875	-	-	-	1.875
450	A. II. 4	Katmiati	375.000	1 Maret 2019		1.275.000	3.375.000	1.125.000,00	1.125.000	1.275.000	3	-	1.275.000	-	-	1.275.000	-	127.500	-	-	127.500
451	A. II. 5	Anindia Ponto	375.000	01 Mei 2021		3.100.000	3.750.000	3.000.000,00	750.000	850.000	2	-	850.000	-	-	850.000	-	85.000	-	-	85.000
452	A. II. 6	Yayat Fadillah	375.000	Mart 2021		1.175.000	4.125.000	1.125.000,00	375.000	425.000	1	425.000	-	-	-	425.000	2.125	-	-	-	2.125
453	A. II. 7	Lie Goan An	375.000	4 Mei 2018		6.075.000	-	4.875.000,00	4.500.000	5.700.000	15	-	-	-	5.700.000	5.700.000	-	-	-	5.700.000	5.700.000
454	A. II. 8	Mahendra	375.000	20 Januari 2018	19 Nopember 2021	15.725.000	-	-	-	15.725.000	90	-	-	-	15.725.000	15.725.000	-	-	-	15.725.000	15.725.000
455	A. II. 8	Yulio Mariem Putra	375.000	16 Maret 2022		1.275.000	3.375.000	1.125.000,00	1.125.000	1.275.000	3	-	1.275.000	-	-	1.275.000	-	127.500	-	-	127.500
456	A. II. 9	Nerpi Boru	375.000	19 Nopember 2018	29/12/22	6.800.000	-	-	-	6.800.000	54	-	-	-	6.800.000	6.800.000	-	-	-	6.800.000	6.800.000
457	A. II. 9	Selvina Latushamallo	375.000	2 Des 2024		-	4.500.000	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
458	A. II. 10	Alfred	375.000	8 Januari 2018	Tahun 2021	10.200.000	-	-	-	10.200.000	75	-	-	-	10.200.000	10.200.000	-	-	-	10.200.000	10.200.000
459	A. II. 10	Martha H Maitha	375.000	12 Desember 2022		4.500.000	-	3.750.000,00	4.500.000	5.250.000	14	-	-	-	5.250.000	5.250.000	-	-	-	5.250.000	5.250.000
460	A.II.11	Nofi Latushamallo	375.000	2 Agustus 2021	30 Juni 2025 kabur	8.750.000	-	850.000,00	2.250.000	10.150.000	33	-	-	-	10.150.000	10.150.000	-	-	-	10.150.000	10.150.000
461	A.II.11	Rafel Maita	375.000	22 Oktober 2025		-	1.125.000	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
462	A. II. 12	Omar Bawmenewi	375.000	04 September 2018		4.175.000	-	3.750.000,00	4.500.000	4.925.000	13	-	-	-	4.925.000	4.925.000	-	-	-	4.925.000	4.925.000
463	A. II. 13	Ida Hamda	375.000	4 Nopember 2019		4.325.000	1.500.000	4.125.000,00	3.000.000	3.200.000	8	-	-	-	3.200.000	3.200.000	-	-	-	3.200.000	3.200.000
464	A. II. 14	Mochamad Naufal	375.000	19 Pebruari 2021		1.700.000	2.250.000	1.500.000,00	2.250.000	2.450.000	6	-	-	2.450.000	-	2.450.000	-	1.225.000	-	-	1.225.000
465	A. II. 15	RANO HARISANDI MANUHUTU	375.000	Desember 2024		-	3.750.000	-	750.000	750.000	2	-	750.000	-	-	750.000	-	75.000	-	-	75.000
466	A. II. 16	Iik Kresna	375.000	6 Agustus 2018	8 Agustus 2020	8.500.000	-	-	-	8.500.000	86	-	-	-	8.500.000	8.500.000	-	-	-	8.500.000	8.500.000
467	A. II. 16	Sondang Ulyy	375.000	2 Desember 2021	23 Pebruari 2024	850.000	-	-	-	850.000	23	-	-	-	850.000	850.000	-	-	-	850.000	850.000
468	A. II. 16	Theresianti Gobel	375.000	8 Maret 2024		-	4.500.000	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
469	A. II. 17	Abdul Latif	375.000	13 Oktober 2021	Kabur - Agustus 2023	5.100.000	-	-	-	5.100.000	41	-	-	-	5.100.000	5.100.000	-	-	-	5.100.000	5.100.000
470	A. II. 17	Wulan Cahya Dwi	375.000	1 Desember 2023		-	3.375.000	-	1.125.000	1.125.000	3	-	1.125.000	-	-	1.125.000	-	112.500	-	-	112.500
471	A. II. 18	Fero Febrianto	375.000	01 Maret 2021		1.225.000	3.750.000	1.125.000,00	750.000	850.000	2	-	850.000	-	-	850.000	-	85.000	-	-	85.000
472	A. II. 19	Dedi Sunarya/Titin Sutini	375.000	26 Maret 2018	25 Agustus 2025	22.350.000	-	4.675.000,00	3.000.000	20.675.000	59	-	-	-	20.675.000	20.675.000	-	-	-	20.675.000	20.675.000
473	A. II. 20	Nuryati	375.000	9 Nopember 2022	Kabur / Agustus 2023	2.550.000	-	-	-	2.550.000	34	-	-	-	2.550.000	2.550.000	-	-	-	2.550.000	2.550.000
474	A. II. 20	Ira Nurhayati (Korban Bencana)	375.000			-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-					

Pendapatan dan Piutang 2025											PENYISIHAN PIUTANG 2025												
No.	Hunian	Nama Jenis Retribusi	Tarif	Tanggal Masuk	Tanggal Keluar	Saldo Awal Piutang Denda per 31 Desember 2024	Penerimaan Tahun Berjalan	Pembayaran Piutang s/d Tahun 2025	Penambahan Piutang 2025	Saldo Akhir Piutang 2025	Umur Piutang	Kriteria Piutang					Penyisihan Piutang						
												lancar	kurang lancar	diragukan	macet	Jumlah	0,5 %	10 %	50 %	100 %	Jumlah		
499	A. III. 13	DOMINGGUS LATUIHAMALLO	325.000	23 Januari 2025			3.575.000	-	325.000	325.000	1	325.000	-	-	-	-	325.000	1.625	-	-	-	-	1.625
500	A. III. 14	Kosong	325.000			-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
501	A. III. 15	Kosong	325.000			-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
502	A. III. 16	Kosong	325.000			-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
503	A. III. 17	Muhamad Dhoiri	325.000	6 Januari 2020	1 mei 2021	8.400.000	-	-	-	8.400.000	80	-	-	-	-	8.400.000	8.400.000	-	-	-	8.400.000	8.400.000	-
504	A. III. 17	Hani Rahayu (Korban Bencana)	325.000				-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
505	A. III. 17	Jeffry D Holderman , MA	325.000	09/09/25			1.300.000	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
506	A. III. 18	Lucky Indria Rahayu	325.000	20 Januari 2023	25 Maret 2025	6.300.000	-	-	975.000	7.275.000	31	-	-	-	-	7.275.000	7.275.000	-	-	-	7.275.000	7.275.000	-
507	A. III. 18	Erwin Darsa Permana	325.000	2 Juni 2025		400.000	3.575.000	325.000,00	325.000	400.000	1	400.000	-	-	-	-	400.000	2.000	-	-	-	-	2.000
508	A. III. 19	Rizki Rief Dianto	325.000	15 Oktober 2018		2.800.000	1.300.000	2.600.000,00	2.600.000	2.800.000	8	-	-	-	-	2.800.000	2.800.000	-	-	-	2.800.000	2.800.000	-
509	A. III. 20	Tika Rahayu Puspita Sari	325.000	6 Oktober 2022		400.000	3.250.000	325.000,00	650.000	725.000	2	-	-	725.000	-	-	725.000	-	72.500	-	-	-	72.500
510	A.III.21	Siti Latifah	325.000	16 Mei 2023	31 Juli 2025	-	2.275.000	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
511	A.III.21	Muhammad Faisal	325.000	19 Agustus 2025		-	1.625.000	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
512	A. III. 22	Luthfi Andriyan Saputra	325.000	24 Maret 2020	31 Mei 2024	800.000	-	-	-	800.000	21	-	-	-	-	800.000	800.000	-	-	-	800.000	800.000	-
513	A. III. 22	Deti Wihartati	325.000	1 Juli 2024		-	3.575.000	-	325.000	325.000	1	325.000	-	-	-	-	325.000	1.625	-	-	-	-	1.625
514	A. III. 23	Madhany Biantihar Idris	325.000	18 September 2022	30 Mei 2023	2.800.000	-	-	-	2.800.000	39	-	-	-	-	2.800.000	2.800.000	-	-	-	2.800.000	2.800.000	-
515	A. III. 23	Vidya Ariska Paramita Budianta	325.000	'05 Juni 2023		-	3.900.000	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
516	A. III. 24	Yuliah Akhriyani	325.000	01 Oktober 2019	1 Maret 2024	800.000	-	-	-	800.000	23	-	-	-	-	800.000	800.000	-	-	-	800.000	800.000	-
517	A. III. 24	Dedi Sumardi	325.000	7 Agustus 2025		-	1.300.000	-	325.000	325.000	1	325.000	-	-	-	-	325.000	1.625	-	-	-	-	1.625
518	A. IV. 1	Marfans Lainsamputty	300.000	25 September 2018		18.600.000	-	-	3.600.000	22.200.000	74	-	-	-	-	22.200.000	22.200.000	-	-	-	22.200.000	22.200.000	-
519	A. IV. 2	Kosong	300.000			-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
520	A. IV. 3	Kosong	300.000			-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
521	A. IV. 4	Kosong	300.000			-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
522	A. IV. 5	Kosong	300.000			-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
523	A. IV. 6	Kosong	300.000			-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
524	A. IV. 7	Kosong	300.000			-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
525	A. IV. 8	Kosong	300.000			-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
526	A. IV. 9	Kosong	300.000			-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
527	A. IV. 10	Kosong	300.000			-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
528	A. IV. 11	Kosong	300.000			-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
529	A. IV. 12	Kosong	300.000			-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
530	A. IV. 13	Ferdy	300.000	21 April 2020	Tahun 2021	6.750.000	-	-	-	6.750.000	70	-	-	-	-	6.750.000	6.750.000	-	-	-	6.750.000	6.750.000	-
531	A. IV. 13	Minci Selvia Delinna	300.000	15 Desember 2023		2.700.000	1.800.000	2.700.000,00	1.800.000	1.800.000	6	-	-	1.800.000	-	1.800.000	-	-	900.000	-	900.000	-	900.000
532	A. IV. 14	Berlied	300.000	01 Maret 2021	kabur 2022	8.625.000	-	-	-	8.625.000	64	-	-	-	-	8.625.000	8.625.000	-	-	-	8.625.000	8.625.000	-
533	A. IV. 15	Kosong	300.000			-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
534	A. IV. 16	Kosong	300.000			-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
535	A. IV. 17	Noegroho	300.000	7 Pebruari 2020	Tahun 2021	5.625.000	-	-	-	5.625.000	66	-	-	-	-	5.625.000	5.625.000	-	-	-	5.625.000	5.625.000	-
536	A. IV. 17	Nur Cholis	300.000	7 Desember 2022	keluar sep 2023	4.500.000	-	-	-	4.500.000	42	-	-	-	-	4.500.000	4.500.000	-	-	-	4.500.000	4.500.000	-
537	A. IV. 17	Yoga Hartadi	300.000	Desember 2024		-	3.000.000	-	600.000	600.000	2	-	-	600.000	-	-	600.000	-	60.000	-	-	-	60.000
538	A. IV. 18	Kosong	300.000			-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
539	A. IV. 19	Kosong	300.000			-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
540	A. IV. 20	Kosong	300.000			-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
541	A. IV. 21	Kosong	300.000			-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
542	A. IV. 22	Kosong	300.000			-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
543	A. IV. 23	Kosong	300.000			-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
544	A. IV. 24	Kosong	300.000			-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
545	B.D.1	Kosong	400.000			-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
546	B.D.2	Kosong	400.000			-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
547	B.D.3	Mohamad Zaclani	400.000			900.000	4.000.000	800.000,00	800.000	900.000	2	-	900.000	-	-	-	900.000	-	90.000	-	-	-	90.000
548	B. I. 1	Iwan Riadi	400.000	29 Januari 2018		1.700.000	4.000.000	1.600.000,00	800.000	900.000	2	-	900.000	-	-	-	900.000	-	90.000	-	-	-	90.000
549	B. I. 2	Cepi As'ri	400.000	29 Januari 2018		2.250.000	2.800.000	2.000.000,00	2.000.000	2.250.000	5	-	-	-	2.250.000	-	2.250.000	-	-	1.125.000	-	-	1.125.000
550	B. I. 3	Komariah / bantuan pemerintah	400.000	26 Pebruari 2018	Pindah BD2 / 3 okt	8.100.000	-	-	-	8.100.000	29	-	-	-	-	8.100.000	8.100.000	-	-	-	8.100.000	8.100.000	-
551	B. I. 3	Sunarni	400.000	19 Oktober 2023	18-Apr-25	1.600.000	1.200.000	1.600.000,00	400.000	400.000	1	400.000	-	-	-	-	400.000	2.000	-	-	-	-	2.000
552	B. I. 3	Sisca Riati S	400.000	5 Mei 2025	2 Desember 2025	-	2.800.000	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
553	B. I. 4	Ya'man Bawameweni	400.000	06 April 2018		2.950.000	2.400.000	2.800.000,00	2.400.000	2.550.000	6	-	-	2.550.000	-	2.550.000	-	-	1.275.000	-	-	-	1.275.000
554	B. I. 5	Rizcky Isonika	400.000	6 Mei 2018	01-Apr-21	9.450.000	-	-	-	9.450.000	79	-	-	-	-	9.450.000	9.450.000	-	-	-	9.450.000	9.450.000	-
555	B. I. 5	Deni Taryadi	400.000	4 Oktober 2021	29 Maret 2024	3.600.000	-	-	-	3.600.000	30	-	-	-	-	3.600.000	3.600.000	-	-	-	3.600.000	3.600.000	-
556	B. I. 5	Pachrudin Aziz	400.000	2 April 2024		400.000	3.200.000	400.000,00	1.600.000	1.600.000	4	-	-	1.600.000	-	1.600.000	-	-	800.000	-	-	-	800.000
557	B. I. 6	Hendrik Wijaya	400.000	6 Nopember 2018		4.500.000	400.000	4.400.000,00	4.400.000	4.500.000	11	-	-	-	-	4.500.000	4.500.000	-	-	-	4.500.000	4.500.000	-
558	B. I. 7	UlfaIda	400.000	8 Agustus 2018	22 Mei 2023	10.350.000	-	-	-	10.350.000	56	-	-	-	-	10.350.000	10.350.000	-	-	-	10.350.000	10.350.000	-
559	B. I. 7	Sumi Puj astuti	400.000	17 Juli 2023	1 Juli 2025	-	2.400.000	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
560	B. I. 7	Rani Nur Kenzi	400.000	1 Agustus 2025		-	2.000.000	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
561	B. I. 8	Amirudin	400.000	11 September 2020	pindah B.IV.18 / 1 okt	8.550.000	-	-	-	8.550.000	23	-	-	-	-	8.550.000	8.550.000	-	-	-	8.550.000	8.550.000	-
562	B. I. 8	Siti Juariah	400.000	1 Oktober 2023		-	4.800.000	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
563	B. I. 9	Asep M Ramdan	400.000	21 Juli 2023		-	4.800.000	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
564	B. I. 10	Yuliah Oktaria	400.000	1 Maret 2019		1.750.000	3.600.000	1.600.000,00	1.200.000	1.350.000	3	-	1.350.000	-	-	1.350.000	-	135.000	-	-	-	135.000	
565	B. I. 11	Zulkarnaen	400.000	25-Apr-18	Kabur 22 Mei 2023	14.850.000	-	-	-	14.850.000	68	-	-	-	-	14.850.000	14.850.						

Pendapatan dan Piutang 2025											PENYISIHAN PIUTANG 2025										
No.	Hunian	Nama Jenis Retribusi	Tarif	Tanggal Masuk	Tanggal Keluar	Saldo Awal Piutang Denda per 31 Desember 2024	Penerimaan Tahun Berjalan	Pembayaran Piutang s/d Tahun 2025	Penambahan Piutang 2025	Saldo Akhir Piutang 2025	Umur Piutang	Kriteria Piutang				Penyisihan Piutang					
												lancar	kurang lancar	diragukan	macet	Jumlah	0,5 %	10 %	50 %	100 %	Jumlah
571	B. I. 14	Agus Salim	400.000	11 Desember 2019	Desember 2024	4.700.000	-	-	-	4.700.000	23	-	-	-	4.700.000	4.700.000	-	-	-	4.700.000	4.700.000
572	B. I. 14	Periyono Simanjuntak	400.000	10/01/25			4.400.000	-	400.000	400.000	1	400.000	-	-	-	400.000	2.000	-	-	-	2.000
573	B. I. 15	Nurlaela	400.000	16-Apr-18	12-Sep-19	5.400.000	-	-	-	5.400.000	88	-	-	-	5.400.000	5.400.000	-	-	-	5.400.000	5.400.000
574	B. I. 15	Kustini (Korban Bencana)	400.000	13 Pebruari 2020		14.400.000	-	800.000,00	-	13.600.000	34	-	-	-	13.600.000	13.600.000	-	-	-	13.600.000	13.600.000
575	B. I. 16	Dina Amelia	400.000	3 Maret 2025		-	3.600.000	-	400.000	400.000	1	400.000	-	-	-	400.000	2.000	-	-	-	2.000
576	B. I. 17	Suprpti	400.000	2 Okt 2021	13 Sept 2024	2.900.000	-	-	-	2.900.000	22	-	-	-	2.900.000	2.900.000	-	-	-	2.900.000	2.900.000
577	B.I.17	Rahmat Heryana	400.000	11/11/2024		-	4.400.000	-	400.000	400.000	1	400.000	-	-	-	400.000	2.000	-	-	-	2.000
578	B. I. 18	Siti Musripah	400.000	01-Apr-18		1.350.000	3.600.000	1.200.000,00	1.200.000	1.350.000	3	-	1.350.000	-	-	1.350.000	-	135.000	-	-	135.000
579	B. I. 19	Hariawan Santoso	400.000	18 Pebruari 2019		-	3.600.000	-	1.200.000	1.200.000	3	-	1.200.000	-	-	1.200.000	-	120.000	-	-	120.000
580	B. I. 20	Wahyu Fitriyanto	400.000	1 Desember 2021		2.250.000	2.400.000	2.000.000,00	2.400.000	2.650.000	6	-	-	2.650.000	-	2.650.000	-	-	1.325.000	-	1.325.000
581	B. I. 21	Rini Krisna Oktaviani	400.000	15 Agustus 2018		-	4.800.000	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
582	B. I. 22	Umi Sarini	400.000	April 2021		1.300.000	3.600.000	1.200.000,00	1.200.000	1.300.000	3	-	1.300.000	-	-	1.300.000	-	130.000	-	-	130.000
583	B. I. 23	Hari Kusumo	400.000	19 Pebruari 2018	14 Agustus 2022	10.350.000	-	-	-	10.350.000	65	-	-	-	-	10.350.000	-	-	-	-	10.350.000
584	B. I. 23	Yovie Yoviansah	400.000	7 Nopember 2022		800.000	4.400.000	800.000,00	400.000	400.000	1	400.000	-	-	-	400.000	2.000	-	-	-	2.000
585	B. I. 24	Erwin Koswara	400.000	2 Juli 2018		2.250.000	2.000.000	2.000.000,00	2.800.000	3.050.000	7	-	-	-	3.050.000	3.050.000	-	-	-	-	3.050.000
586	B. II. 1	Nyayu Nancy Akib	375.000	23 Nopember 2018		375.000	3.375.000	3.375.000,00	1.125.000	1.125.000	3	-	1.125.000	-	-	1.125.000	-	112.500	-	-	112.500
587	B. II. 2	Widiandono Sayekti Putro	375.000	9 Juli 2018	30 April 2024	2.125.000	-	-	-	2.125.000	25	-	-	-	2.125.000	2.125.000	-	-	-	-	2.125.000
588	B. II. 2	Wirogo	375.000	Baru / Juni 2024	22-Sep-25	-	3.375.000	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
589	B. II. 2	Rina Apriani	375.000	1 Oktober 2025		-	1.125.000	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
590	B. II. 3	Irvan Hasyraf Masri	375.000	3 Pebruari 2025		-	3.750.000	-	375.000	375.000	1	375.000	-	-	-	375.000	1.875	-	-	-	1.875
591	B. II. 4	Didimus Kamutap	375.000	9 Mei 2019		1.700.000	2.250.000	1.500.000,00	2.250.000	2.450.000	6	-	-	2.450.000	-	2.450.000	-	-	1.225.000	-	1.225.000
592	B. II. 5	Rachmat Jayeng	375.000	15 Januari 2020	Desember 2022	9.350.000	-	-	-	9.350.000	60	-	-	-	-	9.350.000	-	-	-	-	9.350.000
593	B.II.5	Muthia Dwi Novawaty	375.000	Juli 2023		-	4.500.000	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
594	B. II. 6	Aditya Ramandhani	375.000	3 Pebruari 2020	3 Januari 2023	425.000	-	-	-	425.000	36	-	-	-	-	425.000	-	-	-	-	425.000
595	B. II. 6	Allan Desandi Liman	375.000	23-Feb-23		-	4.125.000	-	375.000	375.000	1	375.000	-	-	-	375.000	1.875	-	-	-	1.875
596	B. II. 7	Marlina	375.000	16 Januari 2019	17 Juli 2021	2.975.000	-	-	-	2.975.000	60	-	-	-	-	2.975.000	-	-	-	-	2.975.000
597	B. II. 7	RR Netty Trisna Herawati	375.000	15 Juni 2022		1.275.000	3.000.000	1.125.000,00	1.500.000	1.650.000	4	-	-	1.650.000	-	1.650.000	-	-	825.000	-	825.000
598	B. II. 8	Rafela Soultan	375.000	24 Agustus 2018		17.250.000	-	#####	4.500.000	9.025.000	24	-	-	-	-	9.025.000	-	-	-	-	9.025.000
599	B. II. 9	Mia Alamanda	375.000	24 Agustus 2018		2.875.000	2.625.000	2.625.000,00	1.875.000	2.125.000	5	-	-	2.125.000	-	2.125.000	-	-	1.062.500	-	1.062.500
600	B. II. 10	Aditiya Putra Nugraha	375.000	8 Nopember 2019	Kabur Mei 2023	5.100.000	-	-	-	5.100.000	44	-	-	-	-	5.100.000	-	-	-	-	5.100.000
601	B. II. 10	Angga Kusuma	375.000	7 Mei 2024	17 Septeber 2025	-	3.375.000	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
602	B. II. 11	Nisa Agniatun Nisa	375.000	5 Pebruari 2021		425.000	4.125.000	375.000,00	375.000	425.000	1	425.000	-	-	-	425.000	2.125	-	-	-	2.125
603	B. II. 12	Donni Muharram	375.000	21-Sep-21		800.000	4.125.000	750.000,00	375.000	425.000	1	425.000	-	-	-	425.000	2.125	-	-	-	2.125
604	B. II. 13	Dani Raditoyo Gumilar	375.000	14 Desember 2018	1 Mei 2025	1.275.000	375.000	1.125.000,00	1.125.000	1.275.000	10	-	-	-	1.275.000	1.275.000	-	-	-	-	1.275.000
605	B. II. 13	Khairiyah Putri Pasai / relokasi	375.000	4 Juni 2025		-	1.500.000	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
606	B. II. 14	Kosong	375.000			-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
607	B. II. 15	Mohamad Aliyudin / bantuan pemerin	375.000	12 Mei 2020		9.350.000	-	-	-	9.350.000	14	-	-	-	-	9.350.000	-	-	-	-	9.350.000
608	B. II. 16	Ery Nugraha	375.000	1 Mei 2021		850.000	3.750.000	750.000,00	750.000	850.000	2	-	850.000	-	-	850.000	-	85.000	-	-	85.000
609	B. II. 17	Syarifudin	375.000	18 Pebruari 2019	3 Januari 2023	425.000	-	-	-	425.000	36	-	-	-	-	425.000	-	-	-	-	425.000
610	B. II. 17	Ilham Hakim	375.000	31-Jan-23		3.425.000	2.625.000	3.375.000,00	1.875.000	1.925.000	5	-	-	1.925.000	-	1.925.000	-	-	962.500	-	962.500
611	B. II. 18	Tedy Tangkas	375.000	Apr-21	4-11-2025 kabur	1.225.000	750.000	1.125.000,00	3.375.000	3.475.000	10	-	-	-	-	3.475.000	-	-	-	-	3.475.000
612	B. II. 19	Sarah Amani Umar	375.000	24 Agustus 2018		1.275.000	3.375.000	1.125.000,00	1.125.000	1.275.000	3	-	1.275.000	-	-	1.275.000	-	127.500	-	-	127.500
613	B. II. 20	Afriansyah	375.000	10 desember 2022	3 Juni 2024	1.125.000	-	-	-	1.125.000	21	-	-	-	-	1.125.000	-	-	-	-	1.125.000
614	B. II. 20	Yana Muzayanah	375.000	Baru / Juni 2024		-	4.500.000	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
615	B. II. 21	Irvan Ismu Wardhana	375.000	10 Maret 2022		850.000	3.750.000	750.000,00	750.000	850.000	2	-	850.000	-	-	850.000	-	85.000	-	-	85.000
616	B. II. 22	Deni Restiono Kurniawan	375.000	5 Juli 2019		1.700.000	3.000.000	1.500.000,00	1.500.000	1.700.000	4	-	-	1.700.000	-	1.700.000	-	-	850.000	-	850.000
617	B. II. 23	Arief Wahyudin	375.000	15-Apr-19		1.275.000	3.000.000	1.125.000,00	1.500.000	1.650.000	4	-	-	1.650.000	-	1.650.000	-	-	825.000	-	825.000
618	B. II. 24	Arie Herdianto	375.000	31 Juli 2023		-	3.750.000	-	750.000	750.000	2	-	750.000	-	-	750.000	-	75.000	-	-	75.000
619	B.III.1	Esti Nurzein	325.000	7 Juli 2023		-	3.900.000	-	-	-	0	-</									

Pendapatan dan Piutang 2025											PENYISIHAN PIUTANG 2025										
No.	Hunian	Nama Jenis Retribusi	Tarif	Tanggal Masuk	Tanggal Keluar	Saldo Awal Piutang Denda per 31 Desember 2024	Penerimaan Tahun Berjalan	Pembayaran Piutang s/d Tahun 2025	Penambahan Piutang 2025	Saldo Akhir Piutang 2025	Umur Piutang	Kriteria Piutang					Penyisihan Piutang				
												lancar	kurang lancar	diragukan	macet	Jumlah	0,5 %	10 %	50 %	100 %	Jumlah
643	B.III.17	Wulandari	325.000	08-Sep-20	16 Januari 2023	400.000	-	-	-	400.000	36	-	-	-	400.000	400.000	-	-	-	400.000	400.000
644	B.III.17	Aria Afriandi Nur Isaeni	325.000	3 Maret 2023		-	3.900.000	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
645	B.III.18	Rubino	325.000	10 Februari 2020		1.200.000	2.925.000	975.000,00	975.000	1.200.000	3	-	1.200.000	-	-	1.200.000	-	120.000	-	-	120.000
646	B.III.19	Agus Suherman	325.000	25 Nopember 2019		1.200.000	2.925.000	975.000,00	975.000	1.200.000	3	-	1.200.000	-	-	1.200.000	-	120.000	-	-	120.000
647	B.III.20	Elfan August Timothy Koan	325.000	5 Juni 2023		-	3.900.000	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
648	B.III.21	Yacob A Ismail	325.000	20 Juni 2021	Kabur / Sept 2023	8.000.000	-	-	-	8.000.000	51	-	-	-	8.000.000	8.000.000	-	-	-	8.000.000	8.000.000
649	B.III.21	DEJUS KARTIKA	325.000	13-Januari 2025	31 Oktober 2025	-	3.250.000	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
650	B.III.21	NOVELINA DIANA DARNELY	325.000	03 November 2025		650.000	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
651	B.III.22	Galang Rambu Anarki	325.000	20 Pebruari 2020	Kabur Juli 2023	7.200.000	-	-	-	7.200.000	51	-	-	-	7.200.000	7.200.000	-	-	-	7.200.000	7.200.000
652	B.III.22	Siti Maesroh	325.000	Sep-24		-	3.900.000	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
653	B.III.23	Evi Virdayanti	325.000	3 Juli 2020		800.000	2.925.000	650.000,00	975.000	1.125.000	3	-	1.125.000	-	-	1.125.000	-	112.500	-	-	112.500
654	B.III.24	Enjang Eadi Kurnia	325.000	April 2021	12 Januari 2022	400.000	-	-	-	400.000	48	-	-	-	400.000	400.000	-	-	-	400.000	400.000
655	B.III.24	Chris Richard Oberto Nassa	325.000	3 Februari 2022		2.000.000	1.950.000	1.950.000,00	1.950.000	2.000.000	6	-	-	2.000.000	-	2.000.000	-	-	1.000.000	-	1.000.000
656	B.IV.1	Nurjanah	300.000	16 Agustus 2021		3.150.000	2.100.000	3.000.000,00	1.500.000	1.650.000	5	-	-	1.650.000	-	1.650.000	-	-	825.000	-	825.000
657	B.IV.2	Yulius Jambornias	300.000	1 Nopember 2022		-	3.300.000	-	300.000	300.000	1	300.000	-	-	-	300.000	1.500	-	-	-	1.500
658	B.IV.3	Rina Sari	300.000	8 September 2022	Kabur Mei 2023	750.000	-	-	-	750.000	33	-	-	-	750.000	750.000	-	-	-	750.000	750.000
659	B.IV.4	Sutisna	300.000	Nov-21	kabur	7.500.000	-	-	-	7.500.000	37	-	-	-	7.500.000	7.500.000	-	-	-	7.500.000	7.500.000
660	B.IV.4	Amelinda Deta Aprilyani	300.000	2 Juli 2025		-	1.800.000	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
661	B.IV.5	Andi Supriadi / relokasi	300.000			-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
662	B.IV.6	Elmus Hutabarat	300.000	18 Nopember 2021	10/02/23	4.125.000	-	-	-	4.125.000	47	-	-	-	4.125.000	4.125.000	-	-	-	4.125.000	4.125.000
663	B.IV.6	Widiana	300.000	10/02/23		900.000	1.800.000	900.000,00	1.800.000	1.800.000	6	-	-	1.800.000	-	1.800.000	-	-	900.000	-	900.000
664	B.IV.7	Nurlaely	300.000	3 Nopember 2021	25 Maret 2025	8.475.000	-	-	900.000	9.375.000	40	-	-	-	9.375.000	9.375.000	-	-	-	9.375.000	9.375.000
665	B.IV.7	Tatan Muhtadin / relokasi	300.000	10 Juni 2025		-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
666	B.IV.8	Agus Firmansyah	300.000	16 Agustus 2022	30 Juni 2025 kabur	-	1.200.000	-	600.000	600.000	8	-	-	-	600.000	600.000	-	-	-	600.000	600.000
667	B.IV.9	Relokasi (Korban Bencana)	300.000			-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
668	B.IV.10	Restiani Puji Permatasari	300.000	19 desember 2022	8 Sept 2024 / kabur	300.000	-	-	-	300.000	16	-	-	-	300.000	300.000	-	-	-	300.000	300.000
669	B.IV.10	Vivia / prog pem	300.000	30 Oktober 2024	20 Mei 2025	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
670	B.IV.11	Relokasi (Korban Bencana)	300.000			-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
671	B.IV.11	Ratna	300.000	20 Mei 2025		-	2.400.000	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
672	B.IV.12	Muhamad Rizki	300.000	18/01/23		1.200.000	2.700.000	1.200.000,00	900.000	900.000	3	-	900.000	-	-	900.000	-	90.000	-	-	90.000
673	B.IV.13	Nova Roslinawati	300.000	1 oktober 2022		-	3.600.000	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
674	B.IV.14	Oekty Fitri Vianty	300.000	1 Mei 2021	16 Mei 2025 / kabur	10.725.000	-	-	1.500.000	12.225.000	47	-	-	-	12.225.000	12.225.000	-	-	-	12.225.000	12.225.000
675	B.IV.14	R. MOCH TAUFAN NOVIANDI	300.000	09 Desember 2025		-	300.000	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
676	B.IV.15	Juwita	300.000	9 Agustus 2022		750.000	3.000.000	600.000,00	600.000	750.000	2	-	750.000	-	-	750.000	-	75.000	-	-	75.000
677	B.IV.16	Dani Permana	300.000	12 Agustus 2021	10 nop 2025	1.050.000	2.700.000	900.000,00	600.000	750.000	3	-	750.000	-	-	750.000	-	75.000	-	-	75.000
678	B.IV.17	Nadda Nurkhalita	300.000	5 Nopember 2022		-	3.600.000	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
679	B.IV.18	Muhammad Gosemal Setyo Wibowo	300.000	1 Oktober 2020	Sep-23	2.625.000	-	-	-	2.625.000	35	-	-	-	2.625.000	2.625.000	-	-	-	2.625.000	2.625.000
680	B.IV.18	Amirudin	300.000	1 Oktober 2023	30 Juni 2025 kabur	4.725.000	-	-	1.800.000	6.525.000	27	-	-	-	6.525.000	6.525.000	-	-	-	6.525.000	6.525.000
681	B.IV.18	Herni Hendriani	300.000	1 Agustus 2025		-	1.500.000	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
682	B.IV.19	Ellya	300.000	19 Pebruari 2021		4.725.000	-	2.625.000,00	3.600.000	5.700.000	19	-	-	-	5.700.000	5.700.000	-	-	-	5.700.000	5.700.000
683	B.IV.20	Romy Yahya	300.000	19 Oktober 2021	17 Oktober 2022	1.875.000	-	-	-	1.875.000	44	-	-	-	1.875.000	1.875.000	-	-	-	1.875.000	1.875.000
684	B.IV.20	Rusdiawan	300.000	7 Nopember 2023		-	3.600.000	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
685	B.IV.21	Agun Gunawan	300.000	1 Juli 2024		-	3.600.000	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
686	B.IV.22	Relokasi (Korban Bencana)	300.000			-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
687	B.IV.22	Yati Kusmiati	300.000	2 Mei 2025		-	2.100.000	-	300.000	300.000	1	300.000	-	-	-	300.000	1.500	-	-	-	1.500
688	B.IV.23	Mizharun Muhamad Sastra	300.000	6 Oktober 2021	5 Nopember 2023	750.000	-	-	-	750.000	27	-	-	-	750.000	750.000	-	-	-	750.000	750.000
689	B.IV.23	Relokasi (Korban Bencana)	300.000			-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
690	B.IV.23	Reni Purwanti	300.000	2 Mei 2025		-	2.400.000	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
691	B.IV.24	Putri Ayu Lestari	300.000	6 Agustus 2021	5 Nopember 2023	750.000	-	-	-	750.000	27	-	-	-	750.000	750.000	-	-	-	750.000	750.000
692	B.IV.24	Iman Mutakin	300.000	30 April 2025		-	2.400.000	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
693	K.3.A	Abdurahman Shahab	390.000	3 Juli 2025		-	2.340.000	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
694	K.4.A	Irwan Ismu Wardhana	390.000	Juli 2025	02-Sep-25	-	780.000	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
695	AULA	JIHAN SARMILA	1.000.000			-	1.000.000	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		JUMLAH				1.113.355.000	1.634.705.000	402.415.000	478.020.000	1.188.960.000		24.790.000	81.300.000	110.570.000	972.300.000	1.188.960.000	123.950	8.130.000	55.285.000	972.300.000	1.035.838.950

PEMERINTAH KOTA BOGOR
Penyisihan Piutang Retribusi Daerah
(Yang dipungut oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor)
Per 31 Desember 2025

No.	Nama Jenis Retribusi	Saldo Awal 31 Desember 2025	Progres Penyelesaian Piutang Pokok	Koreksi Piutang Tahun Sebelumnya	Piutang 2025	Saldo Akhir per 31 Desember 2025	Kriteria Kualitas Piutang				Penyisihan Piutang				Jumlah Penyisihan Piutang
							Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Lancar 0.5%	Kurang Lancar 10%	Diragukan 50%	Macet 100%	
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)														
	Tahun 2009	51.142.345,00				51.142.345,00				51.142.345,00				51.142.345,00	51.142.345,00
	Tahun 2010	60.480.365,00				60.480.365,00				60.480.365,00				60.480.365,00	60.480.365,00
	Tahun 2011	40.396.240,00				40.396.240,00				40.396.240,00				40.396.240,00	40.396.240,00
	Tahun 2012	51.275.140,00				51.275.140,00				51.275.140,00				51.275.140,00	51.275.140,00
	Tahun 2013	214.732.458,00				214.732.458,00				214.732.458,00				214.732.458,00	214.732.458,00
	Tahun 2014	1.173.203.259,00				1.173.203.259,00				1.173.203.259,00				1.173.203.259,00	1.173.203.259,00
	Tahun 2015	46.322.219,00				46.322.219,00				46.322.219,00				46.322.219,00	46.322.219,00
	Tahun 2016	41.488.028,00	-			41.488.028,00				41.488.028,00				41.488.028,00	41.488.028,00
	Tahun 2017	155.611.252,00	-			155.611.252,00				155.611.252,00				155.611.252,00	155.611.252,00
	Tahun 2018	73.280.452,00				73.280.452,00	-	-	-	73.280.452,00				73.280.452,00	73.280.452,00
	Tahun 2019	91.440.224,00	-			91.440.224,00				91.440.224,00				91.440.224,00	91.440.224,00
	Tahun 2020	90.733.581,00	1.755.337,00		-	88.978.244,00	-	-	-	88.978.244,00	-	-	-	88.978.244,00	88.978.244,00
	Tahun 2021	62.219.934,00	-		-	62.219.934,00				62.219.934,00	-	-	-	62.219.934,00	62.219.934,00
	Tahun 2022	39.099.917,00	-	(39.099.917,00)	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	2.191.425.414,00	1.755.337,00		-	2.150.570.160,00	-	-	-	2.150.570.160,00	-	-	-	2.150.570.160,00	2.150.570.160,00
2	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)														
	Tahun 2022		32.762.651,00	39.099.917,00		6.337.266,00				6.337.266,00	-			6.337.266,00	6.337.266,00
	Tahun 2023	723.282.153,00	707.683.137,00		-	15.599.016,00			3.143.090,00	12.455.926,00	-	-	1.571.545,00	12.455.926,00	14.027.471,00
	Tahun 2024		198.959.015,00		337.630.560,00	138.671.545,00	54.712.074,00	15.015.696,00	68.943.775,00		2.735.603,70	1.501.569,60	34.471.887,50	-	38.709.060,80
	Tahun 2025	-	-	-	154.566.691,00	154.566.691,00	12.114.482,00	41.679.033,00	100.773.176,00		605.724,10	4.167.903,30	50.386.588,00	-	55.160.215,40
	Jumlah	723.282.153,00	939.404.803,00	39.099.917,00	492.197.251,00	315.174.518,00	66.826.556,00	56.694.729,00	172.860.041,00	18.793.192,00	3.341.327,80	5.669.472,90	86.430.020,50	18.793.192,00	114.234.013,20

PEMERINTAH KOTA BOGOR
LAPORAN PENYISIHAN PIUTANG RETRIBUSI
PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
TAHUN 2025

No	Subjek Nama	Tahun	TgLSKRD	Kode Bayar	Pinang	Penyisihan Pinang										
					Saldo Akhir2025	Tunggakan	Kriteria Pinang				Penyisihan Pinang Tidak Tertagh					
							Lancar (0 sd 1 Bulan)	Kurang Lancar (1 sd 3 Bulan)	Diragukan (3 sd 12 Bulan)	Macet (Lebih dari 12 Bulan)	Jumlah	KuaBas Lancar(0,5 %)	KuaBas Kurang Lancar (10 %)	KuaBas Diragukan (50 %)	KuaBas Macet (100 %)	Jumlah
1	YUSTANTO ANDRIADY	2024	2024-01-23	3271244020000115	989.280,00	24	0,00	0,00	0,00	989.280,00	989.280,00	0,00	0,00	0,00	989.280,00	989.280,00
2	MAYLIANA	2024	2024-01-23	3271244020000136	1.176.144,00	24	0,00	0,00	0,00	1.176.144,00	1.176.144,00	0,00	0,00	0,00	1.176.144,00	1.176.144,00
3	HJ.FATIMAH	2025	2025-01-23	3271254020000011	2.265.000,00	12	0,00	0,00	2.265.000,00	0,00	2.265.000,00	0,00	0,00	1.132.500,00	0,00	1.132.500,00
4	OMAH	2025	2025-01-23	3271254020000012	2.265.000,00	12	0,00	0,00	2.265.000,00	0,00	2.265.000,00	0,00	0,00	1.132.500,00	0,00	1.132.500,00
5	EVI SUPRIYANTI	2025	2025-01-23	3271254020000013	2.265.000,00	12	0,00	0,00	2.265.000,00	0,00	2.265.000,00	0,00	0,00	1.132.500,00	0,00	1.132.500,00
6	RIZZAL FEBRILIYAN	2025	2025-01-23	3271254020000014	2.265.000,00	12	0,00	0,00	2.265.000,00	0,00	2.265.000,00	0,00	0,00	1.132.500,00	0,00	1.132.500,00
7	SUSANTI	2025	2025-01-23	3271254020000016	2.265.000,00	12	0,00	0,00	2.265.000,00	0,00	2.265.000,00	0,00	0,00	1.132.500,00	0,00	1.132.500,00
8	RIMA HANDAYUNI	2025	2025-01-23	3271254020000017	2.265.000,00	12	0,00	0,00	2.265.000,00	0,00	2.265.000,00	0,00	0,00	1.132.500,00	0,00	1.132.500,00
9	MAMAN SUDAMA	2025	2025-01-23	3271254020000019	2.025.000,00	12	0,00	0,00	2.025.000,00	0,00	2.025.000,00	0,00	0,00	1.012.500,00	0,00	1.012.500,00
10	TB.TAUFIQ MUHARAM	2025	2025-01-23	3271254020000020	2.025.000,00	12	0,00	0,00	2.025.000,00	0,00	2.025.000,00	0,00	0,00	1.012.500,00	0,00	1.012.500,00
11	DJENAB/KARTIKA GAYATRI	2025	2025-01-23	3271254020000021	2.025.000,00	12	0,00	0,00	2.025.000,00	0,00	2.025.000,00	0,00	0,00	1.012.500,00	0,00	1.012.500,00
12	ULI	2025	2025-01-23	3271254020000022	2.025.000,00	12	0,00	0,00	2.025.000,00	0,00	2.025.000,00	0,00	0,00	1.012.500,00	0,00	1.012.500,00
13	UTIS SUTISNA	2025	2025-01-23	3271254020000023	2.025.000,00	12	0,00	0,00	2.025.000,00	0,00	2.025.000,00	0,00	0,00	1.012.500,00	0,00	1.012.500,00
14	ENIH ROHAYANI	2025	2025-01-23	3271254020000025	2.025.000,00	12	0,00	0,00	2.025.000,00	0,00	2.025.000,00	0,00	0,00	1.012.500,00	0,00	1.012.500,00
15	MASHUDIN	2025	2025-01-23	3271254020000026	2.025.000,00	12	0,00	0,00	2.025.000,00	0,00	2.025.000,00	0,00	0,00	1.012.500,00	0,00	1.012.500,00
16	LILIS ATIKAH	2025	2025-01-23	3271254020000027	2.025.000,00	12	0,00	0,00	2.025.000,00	0,00	2.025.000,00	0,00	0,00	1.012.500,00	0,00	1.012.500,00
17	MUHAMMAD RIFKI	2025	2025-01-23	3271254020000028	2.025.000,00	12	0,00	0,00	2.025.000,00	0,00	2.025.000,00	0,00	0,00	1.012.500,00	0,00	1.012.500,00
18	RULLY SUHARTA	2025	2025-01-23	3271254020000029	2.718.000,00	12	0,00	0,00	2.718.000,00	0,00	2.718.000,00	0,00	0,00	1.359.000,00	0,00	1.359.000,00
19	HENDRA	2025	2025-01-23	3271254020000033	2.718.000,00	12	0,00	0,00	2.718.000,00	0,00	2.718.000,00	0,00	0,00	1.359.000,00	0,00	1.359.000,00
20	DARNO SUJOTO	2023	2023-07-12	3271234020000379	495.504,00	30	0,00	0,00	0,00	495.504,00	495.504,00	0,00	0,00	0,00	495.504,00	495.504,00
21	Rudolf Simanungsih	2024	2024-02-20	3271244020000242	1.177.848,00	23	0,00	0,00	0,00	1.177.848,00	1.177.848,00	0,00	0,00	0,00	1.177.848,00	1.177.848,00
22	BANTA CUT,SE	2021	2021-12-03	3271214020001287	648.528,00	49	0,00	0,00	0,00	648.528,00	648.528,00	0,00	0,00	0,00	648.528,00	648.528,00
23	BANTA CUT,SE	2021	2021-01-01	3271214020001506	648.528,00	60	0,00	0,00	0,00	648.528,00	648.528,00	0,00	0,00	0,00	648.528,00	648.528,00
24	BANTA CUT,SE	2018	2018-11-26	20184020100452	648.528,00	86	0,00	0,00	0,00	648.528,00	648.528,00	0,00	0,00	0,00	648.528,00	648.528,00
25	BANTA CUT,SE	2021	2021-01-29	20214020100424	648.528,00	60	0,00	0,00	0,00	648.528,00	648.528,00	0,00	0,00	0,00	648.528,00	648.528,00
26	BANTA CUT,SE	2021	2021-01-13	20214020100425	648.528,00	60	0,00	0,00	0,00	648.528,00	648.528,00	0,00	0,00	0,00	648.528,00	648.528,00
27	Dina Widianingsih	2024	2024-02-20	3271244020000286	1.570.464,00	23	0,00	0,00	0,00	1.570.464,00	1.570.464,00	0,00	0,00	0,00	1.570.464,00	1.570.464,00
28	Suhardi	2024	2024-02-20	3271244020000288	1.033.200,00	23	0,00	0,00	0,00	1.033.200,00	1.033.200,00	0,00	0,00	0,00	1.033.200,00	1.033.200,00
29	DARNO SUJOTO	2021	2021-12-03	3271214020001411	395.712,00	49	0,00	0,00	0,00	395.712,00	395.712,00	0,00	0,00	0,00	395.712,00	395.712,00
30	DARNO SUJOTO	2021	2021-12-13	3271214020001412	857.376,00	49	0,00	0,00	0,00	857.376,00	857.376,00	0,00	0,00	0,00	857.376,00	857.376,00

No	Subjek Nama	Tahun	Tgl SKRD	Kode Bayar	Pinang	Penyisihan Pinang										
					Sakdo Akhir2025	Tunggakan	Kriteria Pinang					Penyisihan Pinang Tidak Tertagih				
							Lancar (0 sd 1 Bulan)	Kurang Lancar (1 sd 3 Bulan)	Diragukan (3 sd 12 Bulan)	Macet (Lebih dari 12 Bulan)	Jumhh	Kualitas Lancar (0,5 %)	Kualitas Kurang Lancar (10 %)	Kualitas Diragukan (50 %)	Kualitas Macet (100 %)	Jumlah
31	DARNO SUJOTO	2018	2018-11-26	20184020100495	395.712,00	86	0,00	0,00	0,00	395.712,00	395.712,00	0,00	0,00	0,00	395.712,00	395.712,00
32	DARNO SUJOTO	2021	2021-09-21	2021402010000862	395.712,00	52	0,00	0,00	0,00	395.712,00	395.712,00	0,00	0,00	0,00	395.712,00	395.712,00
33	DARNO SUJOTO	2021	2021-09-21	2021402010000868	857.376,00	52	0,00	0,00	0,00	857.376,00	857.376,00	0,00	0,00	0,00	857.376,00	857.376,00
34	DARNO SUJOTO	2021	2021-02-01	20214020100510	395.712,00	59	0,00	0,00	0,00	395.712,00	395.712,00	0,00	0,00	0,00	395.712,00	395.712,00
35	DARNO SUJOTO	2021	2021-02-01	20214020100511	395.712,00	59	0,00	0,00	0,00	395.712,00	395.712,00	0,00	0,00	0,00	395.712,00	395.712,00
36	Paryo	2024	2024-02-20	3271244020000364	2.830.968,00	23	0,00	0,00	0,00	2.830.968,00	2.830.968,00	0,00	0,00	0,00	2.830.968,00	2.830.968,00
37	PARYO	2021	2021-12-13	3271214020001402	1.505.904,00	49	0,00	0,00	0,00	1.505.904,00	1.505.904,00	0,00	0,00	0,00	1.505.904,00	1.505.904,00
38	PARYO	2018	2018-11-26	20184020100566	1.505.904,00	86	0,00	0,00	0,00	1.505.904,00	1.505.904,00	0,00	0,00	0,00	1.505.904,00	1.505.904,00
39	PARYO	2021	2021-09-22	20214020100001018	1.505.904,00	52	0,00	0,00	0,00	1.505.904,00	1.505.904,00	0,00	0,00	0,00	1.505.904,00	1.505.904,00
40	PARYO	2021	2021-02-01	20214020100649	1.505.904,00	59	0,00	0,00	0,00	1.505.904,00	1.505.904,00	0,00	0,00	0,00	1.505.904,00	1.505.904,00
41	PARYO	2021	2021-02-01	20214020100650	1.505.904,00	59	0,00	0,00	0,00	1.505.904,00	1.505.904,00	0,00	0,00	0,00	1.505.904,00	1.505.904,00
42	PARYO	2023	2023-07-12	3271234020000319	1.885.668,00	30	0,00	0,00	0,00	1.885.668,00	1.885.668,00	0,00	0,00	0,00	1.885.668,00	1.885.668,00
43	Darma	2024	2024-02-20	3271244020000327	1.095.192,00	23	0,00	0,00	0,00	1.095.192,00	1.095.192,00	0,00	0,00	0,00	1.095.192,00	1.095.192,00
44	DARMA	2021	2021-12-02	3271214020001359	582.576,00	49	0,00	0,00	0,00	582.576,00	582.576,00	0,00	0,00	0,00	582.576,00	582.576,00
45	DARMA	2021	2021-09-22	2021402010000960	582.576,00	52	0,00	0,00	0,00	582.576,00	582.576,00	0,00	0,00	0,00	582.576,00	582.576,00
46	DARMA	2021	2021-02-01	20214020100580	582.576,00	59	0,00	0,00	0,00	582.576,00	582.576,00	0,00	0,00	0,00	582.576,00	582.576,00
47	DARMA	2023	2023-07-12	3271234020000279	729.492,00	30	0,00	0,00	0,00	729.492,00	729.492,00	0,00	0,00	0,00	729.492,00	729.492,00
48	Rukanto	2024	2024-02-20	3271244020000284	3.368.232,00	23	0,00	0,00	0,00	3.368.232,00	3.368.232,00	0,00	0,00	0,00	3.368.232,00	3.368.232,00
49	TITI.	2021	2021-01-01	3271214020001532	5.550.960,00	60	0,00	0,00	0,00	5.550.960,00	5.550.960,00	0,00	0,00	0,00	5.550.960,00	5.550.960,00
50	AGATHA SUKARDYAH	2021	2021-12-03	3271214020001304	1.308.048,00	49	0,00	0,00	0,00	1.308.048,00	1.308.048,00	0,00	0,00	0,00	1.308.048,00	1.308.048,00
51	AGATHA SUKARDYAH	2021	2021-01-29	20214020100460	1.308.048,00	60	0,00	0,00	0,00	1.308.048,00	1.308.048,00	0,00	0,00	0,00	1.308.048,00	1.308.048,00
52	AGATHA SUKARDYAH	2021	2021-01-29	20214020100461	1.308.048,00	60	0,00	0,00	0,00	1.308.048,00	1.308.048,00	0,00	0,00	0,00	1.308.048,00	1.308.048,00
53	Surianto	2024	2024-02-20	3271244020000260	2.706.984,00	23	0,00	0,00	0,00	2.706.984,00	2.706.984,00	0,00	0,00	0,00	2.706.984,00	2.706.984,00
54	AGATHA SUKARDYAH	2023	2023-07-12	3271234020000270	1.637.916,00	30	0,00	0,00	0,00	1.637.916,00	1.637.916,00	0,00	0,00	0,00	1.637.916,00	1.637.916,00
55	TITI	2023	2023-07-12	3271234020000361	1.390.164,00	30	0,00	0,00	0,00	1.390.164,00	1.390.164,00	0,00	0,00	0,00	1.390.164,00	1.390.164,00
56	ABDUL ROJAK	2023	2023-09-06	3271234020000618	1.366.560,00	28	0,00	0,00	0,00	1.366.560,00	1.366.560,00	0,00	0,00	0,00	1.366.560,00	1.366.560,00
57	HJ. MARIANI PANE	2025	2025-04-22	3271254020000067	7.183.800,00	9	0,00	0,00	7.183.800,00	0,00	7.183.800,00	0,00	0,00	3.591.900,00	0,00	3.591.900,00
58	HJ. AMINAH	2023	2023-09-06	3271234020000622	1.810.692,00	28	0,00	0,00	0,00	1.810.692,00	1.810.692,00	0,00	0,00	0,00	1.810.692,00	1.810.692,00
59	NICO SURYADI	2021	2021-12-02	3271214020001224	294.120,00	49	0,00	0,00	0,00	294.120,00	294.120,00	0,00	0,00	0,00	294.120,00	294.120,00
60	NICO SURYADI	2021	2021-01-01	3271214020001523	1.176.480,00	60	0,00	0,00	0,00	1.176.480,00	1.176.480,00	0,00	0,00	0,00	1.176.480,00	1.176.480,00
61	NICO SURYADI	2024	2024-01-23	3271244020000160	945.312,00	24	0,00	0,00	0,00	945.312,00	945.312,00	0,00	0,00	0,00	945.312,00	945.312,00
62	Nico Suryadi	2024	2024-08-13	3271244020000570	945.312,00	17	0,00	0,00	0,00	945.312,00	945.312,00	0,00	0,00	0,00	945.312,00	945.312,00
63	TUSNO SLAMET	2021	2021-01-01	3271214020001530	273.600,00	60	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00
64	TUSNO SLAMET	2021	2021-01-07	20214020100271	273.600,00	60	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00
65	TUSNO SLAMET	2023	2023-07-10	3271234020000237	589.440,00	30	0,00	0,00	0,00	589.440,00	589.440,00	0,00	0,00	0,00	589.440,00	589.440,00

No	Subjek Nama	Tahun	Tgl SKRD	Kode Bayar	Pinang	Penyisihan Pinang										
					Sakdo Akhir2025	Tunggakan	Kriteria Pinang					Penyisihan Pinang Tidak Tertagih				
							Lancar (0 sd 1 Bulan)	Kurang Lancar (1 sd 3 Bulan)	Diragukan (3 sd 12 Bulan)	Macet (Lebih dari 12 Bulan)	Jumhh	Kualitas Lancar (0,5 %)	Kualitas Kurang Lancar (10 %)	Kualitas Diragukan (50 %)	Kualitas Macet (100 %)	Jumlah
66	TUSNO SLAMET	2024	2024-01-23	3271244020000148	879.360,00	24	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00
67	Tusno Slamet	2024	2024-08-13	3271244020000558	879.360,00	17	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00
68	MARIAM	2024	2024-01-23	3271244020000175	791.424,00	24	0,00	0,00	0,00	791.424,00	791.424,00	0,00	0,00	0,00	791.424,00	791.424,00
69	Mariam	2024	2024-08-13	3271244020000585	791.424,00	17	0,00	0,00	0,00	791.424,00	791.424,00	0,00	0,00	0,00	791.424,00	791.424,00
70	SENTANI	2021	2021-12-02	3271214020001226	287.280,00	49	0,00	0,00	0,00	287.280,00	287.280,00	0,00	0,00	0,00	287.280,00	287.280,00
71	SENTANI	2018	2018-07-09	20184020100240	287.280,00	90	0,00	0,00	0,00	287.280,00	287.280,00	0,00	0,00	0,00	287.280,00	287.280,00
72	SENTANI	2021	2021-09-21	2021402010000874	287.280,00	52	0,00	0,00	0,00	287.280,00	287.280,00	0,00	0,00	0,00	287.280,00	287.280,00
73	SENTANI	2021	2021-01-07	20214020100333	287.280,00	60	0,00	0,00	0,00	287.280,00	287.280,00	0,00	0,00	0,00	287.280,00	287.280,00
74	SENTANI	2021	2021-01-07	20214020100334	287.280,00	60	0,00	0,00	0,00	287.280,00	287.280,00	0,00	0,00	0,00	287.280,00	287.280,00
75	SENTANI	2023	2023-07-10	3271234020000210	618.912,00	30	0,00	0,00	0,00	618.912,00	618.912,00	0,00	0,00	0,00	618.912,00	618.912,00
76	SENTANI	2024	2024-01-23	3271244020000164	923.328,00	24	0,00	0,00	0,00	923.328,00	923.328,00	0,00	0,00	0,00	923.328,00	923.328,00
77	Sentani	2024	2024-08-13	3271244020000574	923.328,00	17	0,00	0,00	0,00	923.328,00	923.328,00	0,00	0,00	0,00	923.328,00	923.328,00
78	Siti Hodi jah	2023	2023-09-25	3271234020000687	956.592,00	28	0,00	0,00	0,00	956.592,00	956.592,00	0,00	0,00	0,00	956.592,00	956.592,00
79	Ependi Su beman	2023	2023-09-25	3271234020000689	956.592,00	28	0,00	0,00	0,00	956.592,00	956.592,00	0,00	0,00	0,00	956.592,00	956.592,00
80	Ach Sukarsih	2023	2023-09-25	3271234020000690	1.275.456,00	28	0,00	0,00	0,00	1.275.456,00	1.275.456,00	0,00	0,00	0,00	1.275.456,00	1.275.456,00
81	Ijah.	2023	2023-09-25	3271234020000691	535.236,00	28	0,00	0,00	0,00	535.236,00	535.236,00	0,00	0,00	0,00	535.236,00	535.236,00
82	H. Zaenal	2023	2023-09-25	3271234020000693	398.580,00	28	0,00	0,00	0,00	398.580,00	398.580,00	0,00	0,00	0,00	398.580,00	398.580,00
83	Warsimin	2023	2023-09-25	3271234020000694	854.100,00	28	0,00	0,00	0,00	854.100,00	854.100,00	0,00	0,00	0,00	854.100,00	854.100,00
84	Dahlan	2023	2023-09-25	3271234020000696	1.275.456,00	28	0,00	0,00	0,00	1.275.456,00	1.275.456,00	0,00	0,00	0,00	1.275.456,00	1.275.456,00
85	Tan.	2023	2023-09-25	3271234020000698	740.220,00	28	0,00	0,00	0,00	740.220,00	740.220,00	0,00	0,00	0,00	740.220,00	740.220,00
86	Muklis	2023	2023-09-25	3271234020000703	4.327.440,00	28	0,00	0,00	0,00	4.327.440,00	4.327.440,00	0,00	0,00	0,00	4.327.440,00	4.327.440,00
87	Asti Hastuti	2023	2023-09-25	3271234020000699	1.617.096,00	28	0,00	0,00	0,00	1.617.096,00	1.617.096,00	0,00	0,00	0,00	1.617.096,00	1.617.096,00
88	Dra. Sukmawati	2021	2021-01-01	3271214020001533	1.368.000,00	60	0,00	0,00	0,00	1.368.000,00	1.368.000,00	0,00	0,00	0,00	1.368.000,00	1.368.000,00
89	SUKMAWATI, Dra	2023	2023-07-10	3271234020000221	589.440,00	30	0,00	0,00	0,00	589.440,00	589.440,00	0,00	0,00	0,00	589.440,00	589.440,00
90	M. Junaedi	2021	2021-01-01	3271214020001561	748.800,00	60	0,00	0,00	0,00	748.800,00	748.800,00	0,00	0,00	0,00	748.800,00	748.800,00
91	AGUS TURIYONO	2024	2024-01-23	3271244020000094	659.520,00	24	0,00	0,00	0,00	659.520,00	659.520,00	0,00	0,00	0,00	659.520,00	659.520,00
92	AGUS TURIYONO	2024	2024-01-23	3271244020000101	450.672,00	24	0,00	0,00	0,00	450.672,00	450.672,00	0,00	0,00	0,00	450.672,00	450.672,00
93	Agus Turiyono	2024	2024-08-13	3271244020000504	659.520,00	17	0,00	0,00	0,00	659.520,00	659.520,00	0,00	0,00	0,00	659.520,00	659.520,00
94	Agus Turiyono	2024	2024-08-13	3271244020000511	450.672,00	17	0,00	0,00	0,00	450.672,00	450.672,00	0,00	0,00	0,00	450.672,00	450.672,00
95	Yurniza	2024	2024-02-20	3271244020000258	4.360.104,00	23	0,00	0,00	0,00	4.360.104,00	4.360.104,00	0,00	0,00	0,00	4.360.104,00	4.360.104,00
96	YUNIMAN LAROSA	2021	2021-01-29	20214020100456	1.747.728,00	60	0,00	0,00	0,00	1.747.728,00	1.747.728,00	0,00	0,00	0,00	1.747.728,00	1.747.728,00
97	BAMBANG IRAWAN	2019	2019-04-08	20194020100053	6.741.000,00	81	0,00	0,00	0,00	6.741.000,00	6.741.000,00	0,00	0,00	0,00	6.741.000,00	6.741.000,00
98	BAMBANG IRAWAN	2019	2019-04-08	20194020100054	720.000,00	81	0,00	0,00	0,00	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	720.000,00
99	DODY AHDIAT.SOS/ KETUA DEWAN PENGURUS KORPRI KOTA BOGOR	2021	2021-11-09	3271214020001090	84.048.000,00	50	0,00	0,00	0,00	84.048.000,00	84.048.000,00	0,00	0,00	0,00	84.048.000,00	84.048.000,00

No	Subjek Nama	Tahun	Tgl SKRD	Kode Bayar	Pinang	Penyisihan Pinang										
					Sakto Akhir2025	Tunggakan	Kriteria Pinang					Penyisihan Pinang Tidak Tertagih				
							Lancar (0 sd 1 Bulan)	Kurang Lancar (1 sd 3 Bulan)	Diragukan (3 sd 12 Bulan)	Macet (Lebih dari 12 Bulan)	Jumhh	Kualitas Lancar(0,5 %)	Kualitas Kurang Lancar (10 %)	Kualitas Diragukan (50 %)	Kualitas Macet (100 %)	Jumlah
100	PT Moyo Sarana Usaha	2021	2021-01-01	3271214020001491	89.458.776,00	60	0,00	0,00	0,00	89.458.776,00	89.458.776,00	0,00	0,00	0,00	89.458.776,00	89.458.776,00
101	SUJOTO SUTEDIA	2024	2024-01-23	3271244020000065	879.360,00	24	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00
102	IR. EKO BUDI RAHARJO	2024	2024-11-06	3271244020000658	14.205.312,00	14	0,00	0,00	0,00	14.205.312,00	14.205.312,00	0,00	0,00	0,00	14.205.312,00	14.205.312,00
103	Godjoh Zakaria	2021	2021-01-01	3271214020001457	4.725.600,00	60	0,00	0,00	0,00	4.725.600,00	4.725.600,00	0,00	0,00	0,00	4.725.600,00	4.725.600,00
104	H. Mumu Hermana	2021	2021-01-01	3271214020001461	2.860.050,00	60	0,00	0,00	0,00	2.860.050,00	2.860.050,00	0,00	0,00	0,00	2.860.050,00	2.860.050,00
105	YUSUF	2023	2023-07-12	3271234020000372	963.480,00	30	0,00	0,00	0,00	963.480,00	963.480,00	0,00	0,00	0,00	963.480,00	963.480,00
106																
107	RIZA MUHARMAN	2025	2025-04-22	3271254020000057	515.760,00	9	0,00	0,00	515.760,00	0,00	515.760,00	0,00	0,00	257.880,00	0,00	257.880,00
108	Maman Sudama	2022	2022-09-09	3271224020000098	503.250,00	40	0,00	0,00	0,00	503.250,00	503.250,00	0,00	0,00	0,00	503.250,00	503.250,00
109	Maman Sudama	2023	2023-08-24	3271234020000577	2.025.000,00	29	0,00	0,00	0,00	2.025.000,00	2.025.000,00	0,00	0,00	0,00	2.025.000,00	2.025.000,00
110	Suyami	2021	2021-01-01	3271214020001453	9.326.250,00	60	0,00	0,00	0,00	9.326.250,00	9.326.250,00	0,00	0,00	0,00	9.326.250,00	9.326.250,00
111	Harikah	2021	2021-01-01	3271214020001485	331.600,00	60	0,00	0,00	0,00	331.600,00	331.600,00	0,00	0,00	0,00	331.600,00	331.600,00
112	Daud Maulana	2021	2021-01-01	3271214020001479	165.800,00	60	0,00	0,00	0,00	165.800,00	165.800,00	0,00	0,00	0,00	165.800,00	165.800,00
113	Asnaria Gulom	2023	2023-12-04	3271234020000847	1.183.752,00	25	0,00	0,00	0,00	1.183.752,00	1.183.752,00	0,00	0,00	0,00	1.183.752,00	1.183.752,00
114	Mariyah	2021	2021-01-01	3271214020001465	1.492.200,00	60	0,00	0,00	0,00	1.492.200,00	1.492.200,00	0,00	0,00	0,00	1.492.200,00	1.492.200,00
115	Mariyah	2021	2021-01-01	3271214020001466	1.492.200,00	60	0,00	0,00	0,00	1.492.200,00	1.492.200,00	0,00	0,00	0,00	1.492.200,00	1.492.200,00
116	Karini	2021	2021-01-01	3271214020001475	497.400,00	60	0,00	0,00	0,00	497.400,00	497.400,00	0,00	0,00	0,00	497.400,00	497.400,00
117	Karini	2021	2021-01-01	3271214020001535	497.400,00	60	0,00	0,00	0,00	497.400,00	497.400,00	0,00	0,00	0,00	497.400,00	497.400,00
118	H. Fauzi Djarmuji	2021	2021-01-01	3271214020001459	3.108.750,00	60	0,00	0,00	0,00	3.108.750,00	3.108.750,00	0,00	0,00	0,00	3.108.750,00	3.108.750,00
119	MULYADI	2021	2021-01-01	3271214020001522	88.920,00	60	0,00	0,00	0,00	88.920,00	88.920,00	0,00	0,00	0,00	88.920,00	88.920,00
120	MULYADI	2023	2023-05-02	3271234020000029	537.864,00	32	0,00	0,00	0,00	537.864,00	537.864,00	0,00	0,00	0,00	537.864,00	537.864,00
121	MULHADI	2021	2021-09-21	2021402010000891	249.660,00	52	0,00	0,00	0,00	249.660,00	249.660,00	0,00	0,00	0,00	249.660,00	249.660,00
122	MULHADI	2021	2021-09-21	2021402010001034	205.200,00	52	0,00	0,00	0,00	205.200,00	205.200,00	0,00	0,00	0,00	205.200,00	205.200,00
123	MULHADI	2021	2021-01-06	20214020100157	205.200,00	60	0,00	0,00	0,00	205.200,00	205.200,00	0,00	0,00	0,00	205.200,00	205.200,00
124	MULHADI	2021	2021-01-07	20214020100249	249.660,00	60	0,00	0,00	0,00	249.660,00	249.660,00	0,00	0,00	0,00	249.660,00	249.660,00
125	MULHADI	2021	2021-01-07	20214020100250	249.660,00	60	0,00	0,00	0,00	249.660,00	249.660,00	0,00	0,00	0,00	249.660,00	249.660,00
126	Apdi Suryadi	2021	2021-01-01	3271214020001501	994.800,00	60	0,00	0,00	0,00	994.800,00	994.800,00	0,00	0,00	0,00	994.800,00	994.800,00
127	Samsul Bahri	2021	2021-01-01	3271214020001468	1.554.375,00	60	0,00	0,00	0,00	1.554.375,00	1.554.375,00	0,00	0,00	0,00	1.554.375,00	1.554.375,00
128	Hj. Sunyami/Ram Purnawan	2024	2024-02-20	3271244020000306	3.202.920,00	23	0,00	0,00	0,00	3.202.920,00	3.202.920,00	0,00	0,00	0,00	3.202.920,00	3.202.920,00
129	Sartono	2021	2021-01-01	3271214020001568	497.400,00	60	0,00	0,00	0,00	497.400,00	497.400,00	0,00	0,00	0,00	497.400,00	497.400,00
130	Sudarp	2021	2021-01-01	3271214020001462	2.487.000,00	60	0,00	0,00	0,00	2.487.000,00	2.487.000,00	0,00	0,00	0,00	2.487.000,00	2.487.000,00
131	Yulianti	2021	2021-01-01	3271214020001467	870.450,00	60	0,00	0,00	0,00	870.450,00	870.450,00	0,00	0,00	0,00	870.450,00	870.450,00
132	NINA HERLINA	2023	2023-09-06	3271234020000626	1.047.696,00	28	0,00	0,00	0,00	1.047.696,00	1.047.696,00	0,00	0,00	0,00	1.047.696,00	1.047.696,00
133	Samran	2021	2021-01-01	3271214020001473	124.350,00	60	0,00	0,00	0,00	124.350,00	124.350,00	0,00	0,00	0,00	124.350,00	124.350,00
134	Rully Suharta	2023	2023-09-05	3271234020000607	2.718.000,00	28	0,00	0,00	0,00	2.718.000,00	2.718.000,00	0,00	0,00	0,00	2.718.000,00	2.718.000,00

No	Subjek Nama	Tahun	Tgl SKRD	Kode Bayar	Pinang	Penyisihan Pinang										
					Sakto Akhir2025	Tunggakan	Kriteria Pinang					Penyisihan Pinang Tidak Tertagih				
							Lancar (0 sd 1 Bulan)	Kurang Lancar (1 sd 3 Bulan)	Diragukan (3 sd 12 Bulan)	Macet (Lebih dari 12 Bulan)	Jumhh	Kualitas Lancar (0,5 %)	Kualitas Kurang Lancar (10 %)	Kualitas Diragukan (50 %)	Kualitas Macet (100 %)	Jumlah
135																
136	Cucun	2021	2021-01-01	3271214020001477	829.000,00	60	0,00	0,00	0,00	829.000,00	829.000,00	0,00	0,00	0,00	829.000,00	829.000,00
137	Mad Turo	2024	2024-02-20	3271244020000246	1.405.152,00	23	0,00	0,00	0,00	1.405.152,00	1.405.152,00	0,00	0,00	0,00	1.405.152,00	1.405.152,00
138	Uis Sutisna	2023	2023-08-29	3271234020000606	2.025.000,00	29	0,00	0,00	0,00	2.025.000,00	2.025.000,00	0,00	0,00	0,00	2.025.000,00	2.025.000,00
139	Sudarya	2021	2021-01-01	3271214020001490	393.225,00	60	0,00	0,00	0,00	393.225,00	393.225,00	0,00	0,00	0,00	393.225,00	393.225,00
140	H. Tutang S AliGozenri	2021	2021-01-01	3271214020001463	2.238.300,00	60	0,00	0,00	0,00	2.238.300,00	2.238.300,00	0,00	0,00	0,00	2.238.300,00	2.238.300,00
141	Odji Sastra	2024	2024-02-20	3271244020000301	2.190.384,00	23	0,00	0,00	0,00	2.190.384,00	2.190.384,00	0,00	0,00	0,00	2.190.384,00	2.190.384,00
142	KOKO RAHMAT	2021	2021-12-03	3271214020001342	879.360,00	49	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00
143	KOKO RAHMAT	2021	2021-09-22	2021402010000912	879.360,00	52	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00
144	KOKO RAHMAT	2021	2021-02-01	20214020100540	879.360,00	59	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00
145	KOKO RAHMAT	2021	2021-02-01	20214020100541	879.360,00	59	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00
146	AMIN.	2021	2021-12-30	3271214020001449	342.000,00	49	0,00	0,00	0,00	342.000,00	342.000,00	0,00	0,00	0,00	342.000,00	342.000,00
147	AMIN	2024	2024-01-23	3271244020000023	1.099.200,00	24	0,00	0,00	0,00	1.099.200,00	1.099.200,00	0,00	0,00	0,00	1.099.200,00	1.099.200,00
148	Amin	2024	2024-08-13	3271244020000433	1.099.200,00	17	0,00	0,00	0,00	1.099.200,00	1.099.200,00	0,00	0,00	0,00	1.099.200,00	1.099.200,00
149	Sri Gesnawati	2021	2021-01-01	3271214020001482	497.400,00	60	0,00	0,00	0,00	497.400,00	497.400,00	0,00	0,00	0,00	497.400,00	497.400,00
150	YUSTANTO ANDRIADY	2021	2021-12-02	3271214020001192	307.800,00	49	0,00	0,00	0,00	307.800,00	307.800,00	0,00	0,00	0,00	307.800,00	307.800,00
151	YUSTANTO ANDRIADY	2021	2021-01-01	3271214020001531	307.800,00	60	0,00	0,00	0,00	307.800,00	307.800,00	0,00	0,00	0,00	307.800,00	307.800,00
152	YUSTANTO ANDRIADY	2018	2018-07-09	20184020100201	307.800,00	90	0,00	0,00	0,00	307.800,00	307.800,00	0,00	0,00	0,00	307.800,00	307.800,00
153	YUSTANTO ANDRIADY	2021	2021-01-07	20214020100232	307.800,00	60	0,00	0,00	0,00	307.800,00	307.800,00	0,00	0,00	0,00	307.800,00	307.800,00
154	YUSTANTO ANDRIADY	2023	2023-07-10	3271234020000247	663.120,00	30	0,00	0,00	0,00	663.120,00	663.120,00	0,00	0,00	0,00	663.120,00	663.120,00
155	SUSWATI	2018	2018-07-09	20184020100216	273.600,00	90	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00
156	SUSWATI	2021	2021-01-07	20214020100191	273.600,00	60	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00
157	SUSWATI	2021	2021-01-07	20214020100193	273.600,00	60	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00
158	SRI MULYANI	2021	2021-01-01	3271214020001502	6.741.000,00	60	0,00	0,00	0,00	6.741.000,00	6.741.000,00	0,00	0,00	0,00	6.741.000,00	6.741.000,00
159	Ida Bagus Made Astwa	2024	2024-02-20	3271244020000330	2.128.392,00	23	0,00	0,00	0,00	2.128.392,00	2.128.392,00	0,00	0,00	0,00	2.128.392,00	2.128.392,00
160	ENDA RUHENDA	2021	2021-12-02	3271214020001276	533.520,00	49	0,00	0,00	0,00	533.520,00	533.520,00	0,00	0,00	0,00	533.520,00	533.520,00
161	ENDA RUHENDA	2021	2021-09-22	2021402010001005	533.520,00	52	0,00	0,00	0,00	533.520,00	533.520,00	0,00	0,00	0,00	533.520,00	533.520,00
162	ENDA RUHENDA	2021	2021-01-07	20214020100353	533.520,00	60	0,00	0,00	0,00	533.520,00	533.520,00	0,00	0,00	0,00	533.520,00	533.520,00
163	ENDA RUHENDA	2021	2021-01-07	20214020100354	533.520,00	60	0,00	0,00	0,00	533.520,00	533.520,00	0,00	0,00	0,00	533.520,00	533.520,00
164																
165	ENCA RUHENDA	2023	2023-07-10	3271234020000148	1.149.408,00	30	0,00	0,00	0,00	1.149.408,00	1.149.408,00	0,00	0,00	0,00	1.149.408,00	1.149.408,00
166	ENCA RUHENDA	2024	2024-01-23	3271244020000223	1.714.752,00	24	0,00	0,00	0,00	1.714.752,00	1.714.752,00	0,00	0,00	0,00	1.714.752,00	1.714.752,00
167	Enca Ruhenda	2024	2024-08-13	3271244020000633	1.714.752,00	17	0,00	0,00	0,00	1.714.752,00	1.714.752,00	0,00	0,00	0,00	1.714.752,00	1.714.752,00
168	UDJANG SAEPUDIN	2021	2021-12-02	3271214020001150	106.020,00	49	0,00	0,00	0,00	106.020,00	106.020,00	0,00	0,00	0,00	106.020,00	106.020,00
169	UDJANG SAEPUDIN	2018	2018-07-09	20184020100156	106.020,00	90	0,00	0,00	0,00	106.020,00	106.020,00	0,00	0,00	0,00	106.020,00	106.020,00

No	Subjek Nama	Tahun	Tgl SKRD	Kode Bayar	Pinang	Penyisihan Pinang										
					Sakdo Akhir2025	Tunggakan	Kriteria Pinang					Penyisihan Pinang Tidak Tertagih				
							Lancar (0 sd 1 Bulan)	Kurang Lancar (1 sd 3 Bulan)	Diragukan (3 sd 12 Bulan)	Macet (Lebih dari 12 Bulan)	Jumlah	Kualitas Lancar (0,5 %)	Kualitas Kurang Lancar (10 %)	Kualitas Diragukan (50 %)	Kualitas Macet (100 %)	Jumlah
170	UDJANG SAEPUDIN	2023	2023-07-10	3271234020000238	228.408,00	30	0,00	0,00	0,00	228.408,00	228.408,00	0,00	0,00	0,00	228.408,00	228.408,00
171	UDJANG SAEPUDIN	2024	2024-01-23	3271244020000068	340.752,00	24	0,00	0,00	0,00	340.752,00	340.752,00	0,00	0,00	0,00	340.752,00	340.752,00
172	Udjang Saepudin	2024	2024-08-13	3271244020000478	340.752,00	17	0,00	0,00	0,00	340.752,00	340.752,00	0,00	0,00	0,00	340.752,00	340.752,00
173	TATANG EPENDI BIN SOHIB	2023	2023-07-10	3271234020000230	589.440,00	30	0,00	0,00	0,00	589.440,00	589.440,00	0,00	0,00	0,00	589.440,00	589.440,00
174	TATANG EPENDI BIN SOHIB	2024	2024-01-23	3271244020000077	879.360,00	24	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00
175	Tatang Ependi Bin Sohīb	2024	2024-08-13	3271244020000487	879.360,00	17	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00
176	BIBIN TUNGGAL	2018	2018-07-09	20184020100242	287.280,00	90	0,00	0,00	0,00	287.280,00	287.280,00	0,00	0,00	0,00	287.280,00	287.280,00
177	M.ALI	2021	2021-12-02	3271214020001126	273.600,00	49	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00
178	M.ALI	2021	2021-09-21	2021402010000884	273.600,00	52	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00
179	M.Ali	2024	2024-08-13	3271244020000454	879.360,00	17	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00
180	NANO DJOHANA	2021	2021-12-02	3271214020001257	300.960,00	49	0,00	0,00	0,00	300.960,00	300.960,00	0,00	0,00	0,00	300.960,00	300.960,00
181	NANO DJOHANA	2018	2018-07-09	20184020100276	300.960,00	90	0,00	0,00	0,00	300.960,00	300.960,00	0,00	0,00	0,00	300.960,00	300.960,00
182	NANO DJOHANA	2023	2023-07-10	3271234020000190	648.384,00	30	0,00	0,00	0,00	648.384,00	648.384,00	0,00	0,00	0,00	648.384,00	648.384,00
183	NANO DJOHANA	2024	2024-01-23	3271244020000199	967.296,00	24	0,00	0,00	0,00	967.296,00	967.296,00	0,00	0,00	0,00	967.296,00	967.296,00
184	Nano Djohana	2024	2024-08-13	3271244020000609	967.296,00	17	0,00	0,00	0,00	967.296,00	967.296,00	0,00	0,00	0,00	967.296,00	967.296,00
185	ROHMAN	2021	2021-12-02	3271214020001133	331.740,00	49	0,00	0,00	0,00	331.740,00	331.740,00	0,00	0,00	0,00	331.740,00	331.740,00
186	ROHMAN	2018	2018-07-09	20184020100137	331.740,00	90	0,00	0,00	0,00	331.740,00	331.740,00	0,00	0,00	0,00	331.740,00	331.740,00
187	ROHMAN	2021	2021-09-21	2021402010000916	331.740,00	52	0,00	0,00	0,00	331.740,00	331.740,00	0,00	0,00	0,00	331.740,00	331.740,00
188	ROHMAN	2021	2021-01-06	20214020100076	331.740,00	60	0,00	0,00	0,00	331.740,00	331.740,00	0,00	0,00	0,00	331.740,00	331.740,00
189	ROHMAN	2021	2021-01-06	20214020100077	331.740,00	60	0,00	0,00	0,00	331.740,00	331.740,00	0,00	0,00	0,00	331.740,00	331.740,00
190	ROHMAN	2023	2023-07-10	3271234020000203	714.696,00	30	0,00	0,00	0,00	714.696,00	714.696,00	0,00	0,00	0,00	714.696,00	714.696,00
191	ROHMAN	2024	2024-01-23	3271244020000051	1.066.224,00	24	0,00	0,00	0,00	1.066.224,00	1.066.224,00	0,00	0,00	0,00	1.066.224,00	1.066.224,00
192	Rohman	2024	2024-08-13	3271244020000461	1.066.224,00	17	0,00	0,00	0,00	1.066.224,00	1.066.224,00	0,00	0,00	0,00	1.066.224,00	1.066.224,00
193																
194	DIYANTO	2021	2021-01-01	3271214020001508	228.480,00	60	0,00	0,00	0,00	228.480,00	228.480,00	0,00	0,00	0,00	228.480,00	228.480,00
195	DIYANTO	2023	2023-07-10	3271234020000142	825.216,00	30	0,00	0,00	0,00	825.216,00	825.216,00	0,00	0,00	0,00	825.216,00	825.216,00
196	DIYANTO	2024	2024-01-23	3271244020000217	1.231.104,00	24	0,00	0,00	0,00	1.231.104,00	1.231.104,00	0,00	0,00	0,00	1.231.104,00	1.231.104,00
197	Diyanto	2024	2024-08-13	3271244020000627	1.231.104,00	17	0,00	0,00	0,00	1.231.104,00	1.231.104,00	0,00	0,00	0,00	1.231.104,00	1.231.104,00
198	TOLIP BACHTIAR	2021	2021-01-01	3271214020001558	273.600,00	60	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00
199	TOLIP BACHTIAR	2023	2023-07-10	3271234020000235	589.440,00	30	0,00	0,00	0,00	589.440,00	589.440,00	0,00	0,00	0,00	589.440,00	589.440,00
200	TOLIP BACHTIAR	2024	2024-01-23	3271244020000108	879.360,00	24	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00
201	Tolip Bachtiar	2024	2024-08-13	3271244020000518	879.360,00	17	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00
202	HARADI BOGORIND	2023	2023-07-10	3271234020000155	736.800,00	30	0,00	0,00	0,00	736.800,00	736.800,00	0,00	0,00	0,00	736.800,00	736.800,00
203	JEJEN	2021	2021-12-02	3271214020001188	437.760,00	49	0,00	0,00	0,00	437.760,00	437.760,00	0,00	0,00	0,00	437.760,00	437.760,00
204	JEJEN	2021	2021-01-01	3271214020001516	437.760,00	60	0,00	0,00	0,00	437.760,00	437.760,00	0,00	0,00	0,00	437.760,00	437.760,00

No	Subjek Nama	Tahun	Tgl SKRD	Kode Bayar	Pinang	Penyisihan Pinang										
					Sakdo Akhir2025	Tunggakan	Kriteria Pinang					Penyisihan Pinang Tidak Tertagih				
							Lancar (0 sd 1 Bulan)	Kurang Lancar (1 sd 3 Bulan)	Diragukan (3 sd 12 Bulan)	Macet (Lebih dari 12 Bulan)	Jumhh	Kualitas Lancar (0,5 %)	Kualitas Kurang Lancar (10 %)	Kualitas Diragukan (50 %)	Kualitas Macet (100 %)	Jumlah
205	JEJEN	2021	2021-09-21	2021402010000731	437.760,00	52	0,00	0,00	0,00	437.760,00	437.760,00	0,00	0,00	0,00	437.760,00	437.760,00
206	JEJEN	2021	2021-01-07	20214020100213	437.760,00	60	0,00	0,00	0,00	437.760,00	437.760,00	0,00	0,00	0,00	437.760,00	437.760,00
207	JEJEN	2024	2024-01-23	3271244020000111	1.406.976,00	24	0,00	0,00	0,00	1.406.976,00	1.406.976,00	0,00	0,00	0,00	1.406.976,00	1.406.976,00
208	Jjen	2024	2024-08-13	3271244020000521	1.406.976,00	17	0,00	0,00	0,00	1.406.976,00	1.406.976,00	0,00	0,00	0,00	1.406.976,00	1.406.976,00
209	SAMGUNAWAN	2024	2024-01-23	3271244020000062	879.360,00	24	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00
210	Sam Gunawan	2024	2024-08-13	3271244020000472	879.360,00	17	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00
211	UJANG JAENUDIN	2018	2018-07-09	20184020100205	448.020,00	90	0,00	0,00	0,00	448.020,00	448.020,00	0,00	0,00	0,00	448.020,00	448.020,00
212	UJANG JAENUDIN	2024	2024-01-23	3271244020000119	1.439.952,00	24	0,00	0,00	0,00	1.439.952,00	1.439.952,00	0,00	0,00	0,00	1.439.952,00	1.439.952,00
213	Ujang Jaenudin	2024	2024-08-13	3271244020000529	1.439.952,00	17	0,00	0,00	0,00	1.439.952,00	1.439.952,00	0,00	0,00	0,00	1.439.952,00	1.439.952,00
214	Tasmidi	2024	2024-02-20	3271244020000369	1.446.480,00	23	0,00	0,00	0,00	1.446.480,00	1.446.480,00	0,00	0,00	0,00	1.446.480,00	1.446.480,00
215	TASMIDI	2021	2021-12-03	3271214020001397	769.440,00	49	0,00	0,00	0,00	769.440,00	769.440,00	0,00	0,00	0,00	769.440,00	769.440,00
216	TASMIDI	2018	2018-11-26	20184020100571	769.440,00	86	0,00	0,00	0,00	769.440,00	769.440,00	0,00	0,00	0,00	769.440,00	769.440,00
217	TASMIDI	2021	2021-09-22	2021402010001033	769.440,00	52	0,00	0,00	0,00	769.440,00	769.440,00	0,00	0,00	0,00	769.440,00	769.440,00
218	TASMIDI	2021	2021-02-01	20214020100657	769.440,00	59	0,00	0,00	0,00	769.440,00	769.440,00	0,00	0,00	0,00	769.440,00	769.440,00
219	TASMIDI	2021	2021-02-01	20214020100658	769.440,00	59	0,00	0,00	0,00	769.440,00	769.440,00	0,00	0,00	0,00	769.440,00	769.440,00
220	MANSYURASWIN	2024	2024-01-23	3271244020000049	879.360,00	24	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00
221	Mansyur Aswin	2024	2024-08-13	3271244020000459	879.360,00	17	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00
222																
223	DANIEL JOHAR	2021	2021-12-02	3271214020001255	290.700,00	49	0,00	0,00	0,00	290.700,00	290.700,00	0,00	0,00	0,00	290.700,00	290.700,00
224	DANIEL JOHAR	2018	2018-07-09	20184020100274	290.700,00	90	0,00	0,00	0,00	290.700,00	290.700,00	0,00	0,00	0,00	290.700,00	290.700,00
225	DANIEL JOHAR	2023	2023-07-10	3271234020000139	626.280,00	30	0,00	0,00	0,00	626.280,00	626.280,00	0,00	0,00	0,00	626.280,00	626.280,00
226	DANIEL JOHAR	2024	2024-01-23	3271244020000197	934.320,00	24	0,00	0,00	0,00	934.320,00	934.320,00	0,00	0,00	0,00	934.320,00	934.320,00
227	Daniel Johar	2024	2024-08-13	3271244020000607	934.320,00	17	0,00	0,00	0,00	934.320,00	934.320,00	0,00	0,00	0,00	934.320,00	934.320,00
228	MULHADI	2024	2024-01-23	3271244020000172	802.416,00	24	0,00	0,00	0,00	802.416,00	802.416,00	0,00	0,00	0,00	802.416,00	802.416,00
229	Mulhadi	2024	2024-08-13	3271244020000582	802.416,00	17	0,00	0,00	0,00	802.416,00	802.416,00	0,00	0,00	0,00	802.416,00	802.416,00
230	CAHYADI	2021	2021-12-02	3271214020001109	273.600,00	49	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00
231	CAHYADI	2018	2018-07-09	20184020100115	273.600,00	90	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00
232	CAHYADI	2021	2021-09-21	2021402010000805	273.600,00	52	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00
233	CAHYADI	2021	2021-01-05	202140201000036	273.600,00	60	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00
234	CAHYADI	2021	2021-01-05	202140201000037	273.600,00	60	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00
235	CAHYADI	2023	2023-07-10	3271234020000135	589.440,00	30	0,00	0,00	0,00	589.440,00	589.440,00	0,00	0,00	0,00	589.440,00	589.440,00
236	CAHYADI	2024	2024-01-23	3271244020000025	879.360,00	24	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00
237	Cahyadi	2024	2024-08-13	3271244020000435	879.360,00	17	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00
238	MALIKI	2021	2021-12-02	3271214020001101	465.120,00	49	0,00	0,00	0,00	465.120,00	465.120,00	0,00	0,00	0,00	465.120,00	465.120,00
239	MALIKI	2021	2021-09-21	2021402010000770	465.120,00	52	0,00	0,00	0,00	465.120,00	465.120,00	0,00	0,00	0,00	465.120,00	465.120,00

No	Subjek Nama	Tahun	Tgl SKRD	Kode Bayar	Putang	Penyisihan Putang										
					Sakdo Akhir2025	Tunggakan	Kriteria Putang					Penyisihan Putang Tidak Tertagih				
							Lancar (0 sd 1 Bulan)	Kurang Lancar (1 sd 3 Bulan)	Diragukan (3 sd 12 Bulan)	Macet (Lebih dari 12 Bulan)	Jumhh	Kualitas Lancar(0,5 %)	Kualitas Kurang Lancar (10 %)	Kualitas Diragukan (50 %)	Kualitas Macet (100 %)	Jumlah
240	MALIKI	2021	2021-01-05	20214020100020	465.120,00	60	0,00	0,00	0,00	465.120,00	465.120,00	0,00	0,00	0,00	465.120,00	465.120,00
241	MALIKI	2021	2021-01-05	20214020100021	465.120,00	60	0,00	0,00	0,00	465.120,00	465.120,00	0,00	0,00	0,00	465.120,00	465.120,00
242	MALIKI	2023	2023-07-10	3271234020000180	1.002.048,00	30	0,00	0,00	0,00	1.002.048,00	1.002.048,00	0,00	0,00	0,00	1.002.048,00	1.002.048,00
243	MALIKI	2024	2024-01-23	3271244020000016	1.494.912,00	24	0,00	0,00	0,00	1.494.912,00	1.494.912,00	0,00	0,00	0,00	1.494.912,00	1.494.912,00
244	Maliki	2024	2024-08-13	3271244020000426	1.494.912,00	17	0,00	0,00	0,00	1.494.912,00	1.494.912,00	0,00	0,00	0,00	1.494.912,00	1.494.912,00
245	BIBIN TUNGGAL	2024	2024-01-23	3271244020000166	923.328,00	24	0,00	0,00	0,00	923.328,00	923.328,00	0,00	0,00	0,00	923.328,00	923.328,00
246	Bbin Tunggal	2024	2024-08-13	3271244020000576	923.328,00	17	0,00	0,00	0,00	923.328,00	923.328,00	0,00	0,00	0,00	923.328,00	923.328,00
247	DODO ALI MURTADO	2021	2021-12-02	3271214020001176	136.800,00	49	0,00	0,00	0,00	136.800,00	136.800,00	0,00	0,00	0,00	136.800,00	136.800,00
248	DODO ALI MURTADO	2021	2021-01-06	20214020100162	136.800,00	60	0,00	0,00	0,00	136.800,00	136.800,00	0,00	0,00	0,00	136.800,00	136.800,00
249	DODO ALI MURTADO	2021	2021-01-06	20214020100163	136.800,00	60	0,00	0,00	0,00	136.800,00	136.800,00	0,00	0,00	0,00	136.800,00	136.800,00
250	DODO ALI MURTADO	2023	2023-07-10	3271234020000143	294.720,00	30	0,00	0,00	0,00	294.720,00	294.720,00	0,00	0,00	0,00	294.720,00	294.720,00
251																
252	HOLIL	2024	2024-01-23	3271244020000061	879.360,00	24	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00
253	Hoil	2024	2024-08-13	3271244020000471	879.360,00	17	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00
254	TOMMY IMANUEL	2021	2021-12-02	3271214020001130	273.600,00	49	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00
255	TOMMY IMANUEL	2018	2018-07-09	20184020100134	273.600,00	90	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00
256	TOMMY IMANUEL	2021	2021-01-06	20214020100071	273.600,00	60	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00
257	TOMMY IMANUEL	2023	2023-07-10	3271234020000236	589.440,00	30	0,00	0,00	0,00	589.440,00	589.440,00	0,00	0,00	0,00	589.440,00	589.440,00
258	TOMMY IMANUEL	2024	2024-01-23	3271244020000048	879.360,00	24	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00
259	Tommy Imanuel	2024	2024-08-13	3271244020000458	879.360,00	17	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00
260	BENNY ACHAN T	2024	2024-01-23	3271244020000202	879.360,00	24	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00
261	Benny Achan T	2024	2024-08-13	3271244020000612	879.360,00	17	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00
262	JUNAEDI	2021	2021-12-28	3271214020001430	273.600,00	49	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00
263	JUNAEDI	2021	2021-12-28	3271214020001431	140.220,00	49	0,00	0,00	0,00	140.220,00	140.220,00	0,00	0,00	0,00	140.220,00	140.220,00
264	JUNAEDI	2018	2018-07-09	20184020100187	140.220,00	90	0,00	0,00	0,00	140.220,00	140.220,00	0,00	0,00	0,00	140.220,00	140.220,00
265	JUNAEDI	2021	2021-09-21	2021402010001045	140.220,00	52	0,00	0,00	0,00	140.220,00	140.220,00	0,00	0,00	0,00	140.220,00	140.220,00
266	JUNAEDI	2021	2021-01-06	20214020100151	273.600,00	60	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00
267	JUNAEDI	2021	2021-01-06	20214020100152	273.600,00	60	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00
268	JUNAEDI	2021	2021-01-07	20214020100168	140.220,00	60	0,00	0,00	0,00	140.220,00	140.220,00	0,00	0,00	0,00	140.220,00	140.220,00
269	JUNAEDI	2021	2021-01-07	20214020100169	140.220,00	60	0,00	0,00	0,00	140.220,00	140.220,00	0,00	0,00	0,00	140.220,00	140.220,00
270	JUNAEDI	2023	2023-07-10	3271234020000172	302.088,00	30	0,00	0,00	0,00	302.088,00	302.088,00	0,00	0,00	0,00	302.088,00	302.088,00
271	JUNAEDI	2024	2024-01-23	3271244020000091	879.360,00	24	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00
272	Junaedi	2024	2024-08-13	3271244020000501	879.360,00	17	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00
273	Dani Gunawan	2024	2024-08-13	3271244020000429	967.296,00	17	0,00	0,00	0,00	967.296,00	967.296,00	0,00	0,00	0,00	967.296,00	967.296,00
274	AGUS SN	2023	2023-07-18	3271234020000539	451.080,00	30	0,00	0,00	0,00	451.080,00	451.080,00	0,00	0,00	0,00	451.080,00	451.080,00

No	Subjek Nama	Tahun	TglSKRD	Kode Bayar	Pinang	Penyisihan Pinang										
					Saldo Akhir 2025	Tunggakan	Kriteria Pinang					Penyisihan Pinang Tidak Tertagih				
							Lancar (0 sd 1 Bulan)	Kurang Lancar (1 sd 3 Bulan)	Diragukan (3 sd 12 Bulan)	Macet (Lebih dari 12 Bulan)	Jumlah	Kualitas Lancar (0,5 %)	Kualitas Kurang Lancar (10 %)	Kualitas Diragukan (50 %)	Kualitas Macet (100 %)	Jumlah
275	Agus Sad'jun Nasir	2023	2023-12-04	3271234020000836	2.021.040,00	25	0,00	0,00	0,00	2.021.040,00	2.021.040,00	0,00	0,00	0,00	2.021.040,00	2.021.040,00
276	SURYA	2021	2021-01-01	3271214020001562	290.700,00	60	0,00	0,00	0,00	290.700,00	290.700,00	0,00	0,00	0,00	290.700,00	290.700,00
277	SURYA	2023	2023-07-10	3271234020000227	626.280,00	30	0,00	0,00	0,00	626.280,00	626.280,00	0,00	0,00	0,00	626.280,00	626.280,00
278	SURYA	2024	2024-01-23	3271244020000191	934.320,00	24	0,00	0,00	0,00	934.320,00	934.320,00	0,00	0,00	0,00	934.320,00	934.320,00
279	Surya	2024	2024-08-13	3271244020000601	934.320,00	17	0,00	0,00	0,00	934.320,00	934.320,00	0,00	0,00	0,00	934.320,00	934.320,00
280																
281	ALEXANDER REZA	2024	2024-01-23	3271244020000122	1.989.552,00	24	0,00	0,00	0,00	1.989.552,00	1.989.552,00	0,00	0,00	0,00	1.989.552,00	1.989.552,00
282	Alexander Reza	2024	2024-08-13	3271244020000532	1.989.552,00	17	0,00	0,00	0,00	1.989.552,00	1.989.552,00	0,00	0,00	0,00	1.989.552,00	1.989.552,00
283	SUJANA LATIF ISKANDAR	2018	2018-07-09	20184020100179	273.600,00	90	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00
284	SUPARMAN	2024	2024-01-23	3271244020000132	879.360,00	24	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00
285	Suparman	2024	2024-08-13	3271244020000542	879.360,00	17	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00
286	O MA	2021	2021-12-30	3271214020001448	273.600,00	49	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00
287	OMA	2018	2018-07-09	20184020100297	273.600,00	90	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00
288	OMA	2023	2023-07-10	3271234020000200	589.440,00	30	0,00	0,00	0,00	589.440,00	589.440,00	0,00	0,00	0,00	589.440,00	589.440,00
289	OMA	2024	2024-01-23	3271244020000222	879.360,00	24	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00
290	Oma	2024	2024-08-13	3271244020000632	879.360,00	17	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00
291	TJA WENIO	2021	2021-01-01	3271214020001529	872.100,00	60	0,00	0,00	0,00	872.100,00	872.100,00	0,00	0,00	0,00	872.100,00	872.100,00
292	Tja Wenio	2024	2024-08-13	3271244020000604	934.320,00	17	0,00	0,00	0,00	934.320,00	934.320,00	0,00	0,00	0,00	934.320,00	934.320,00
293	BAMBANG	2018	2018-07-09	20184020100285	273.600,00	90	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00
294	BAMBANG	2021	2021-01-07	20214020100371	273.600,00	60	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00
295	BAMBANG	2021	2021-01-07	20214020100372	273.600,00	60	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00
296	BANGBANG	2024	2024-01-23	3271244020000209	879.360,00	24	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00
297	Bangbang	2024	2024-08-13	3271244020000619	879.360,00	17	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00
298	NGADIYO	2024	2024-01-23	3271244020000032	549.600,00	24	0,00	0,00	0,00	549.600,00	549.600,00	0,00	0,00	0,00	549.600,00	549.600,00
299	Ngadiyo	2024	2024-08-13	3271244020000442	549.600,00	17	0,00	0,00	0,00	549.600,00	549.600,00	0,00	0,00	0,00	549.600,00	549.600,00
300	JAKARIA	2023	2023-07-10	3271234020000165	589.440,00	30	0,00	0,00	0,00	589.440,00	589.440,00	0,00	0,00	0,00	589.440,00	589.440,00
301	JAKARIA	2023	2023-07-10	3271234020000166	294.720,00	30	0,00	0,00	0,00	294.720,00	294.720,00	0,00	0,00	0,00	294.720,00	294.720,00
302	JAKARIA	2024	2024-01-23	3271244020000183	439.680,00	24	0,00	0,00	0,00	439.680,00	439.680,00	0,00	0,00	0,00	439.680,00	439.680,00
303	Jakaria	2024	2024-08-13	3271244020000593	439.680,00	17	0,00	0,00	0,00	439.680,00	439.680,00	0,00	0,00	0,00	439.680,00	439.680,00
304	JUNAEDI	2024	2024-01-23	3271244020000100	450.672,00	24	0,00	0,00	0,00	450.672,00	450.672,00	0,00	0,00	0,00	450.672,00	450.672,00
305	Junardi	2024	2024-08-13	3271244020000510	450.672,00	17	0,00	0,00	0,00	450.672,00	450.672,00	0,00	0,00	0,00	450.672,00	450.672,00
306	ACANG KURNIAWAN	2024	2024-01-23	3271244020000162	923.328,00	24	0,00	0,00	0,00	923.328,00	923.328,00	0,00	0,00	0,00	923.328,00	923.328,00
307	Acng Kurniawan	2024	2024-08-13	3271244020000572	923.328,00	17	0,00	0,00	0,00	923.328,00	923.328,00	0,00	0,00	0,00	923.328,00	923.328,00
308	SUKARNO	2021	2021-12-02	3271214020001205	256.800,00	49	0,00	0,00	0,00	256.800,00	256.800,00	0,00	0,00	0,00	256.800,00	256.800,00
309																

No	Subjek Nama	Tahun	Tgl SKRD	Kode Bayar	Pinang	Penyisihan Pinang										
					Sakdo Akhir2025	Tunggakan	Kriteria Pinang					Penyisihan Pinang Tidak Tertagih				
							Lancar (0 sd 1 Bulan)	Kurang Lancar (1 sd 3 Bulan)	Diragukan (3 sd 12 Bulan)	Macet (Lebih dari 12 Bulan)	Jumhh	Kualitas Lancar (0,5 %)	Kualitas Kurang Lancar (10 %)	Kualitas Diragukan (50 %)	Kualitas Macet (100 %)	Jumlah
310	SUKARNO	2021	2021-01-01	3271214020001526	770.400,00	60	0,00	0,00	0,00	770.400,00	770.400,00	0,00	0,00	0,00	770.400,00	770.400,00
311	SUKARNO	2021	2021-09-21	2021402010000796	256.800,00	52	0,00	0,00	0,00	256.800,00	256.800,00	0,00	0,00	0,00	256.800,00	256.800,00
312	SUKARNO	2023	2023-07-10	3271234020000219	788.376,00	30	0,00	0,00	0,00	788.376,00	788.376,00	0,00	0,00	0,00	788.376,00	788.376,00
313	LEPI GUNAWAN	2021	2021-12-02	3271214020001547	506.160,00	49	0,00	0,00	0,00	506.160,00	506.160,00	0,00	0,00	0,00	506.160,00	506.160,00
314	LEPI GUNAWAN	2021	2021-09-21	2021402010001001	506.160,00	52	0,00	0,00	0,00	506.160,00	506.160,00	0,00	0,00	0,00	506.160,00	506.160,00
315	LEPI GUNAWAN	2024	2024-01-23	3271244020000082	1.626.816,00	24	0,00	0,00	0,00	1.626.816,00	1.626.816,00	0,00	0,00	0,00	1.626.816,00	1.626.816,00
316	Mla Nopiyanti	2024	2024-08-13	3271244020000439	879.360,00	17	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00
317	Muhyidin	2024	2024-08-13	3271244020000444	879.360,00	17	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00
318	MRana	2024	2024-08-13	3271244020000453	879.360,00	17	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00
319	HarjadiBogorind	2024	2024-08-13	3271244020000465	1.099.200,00	17	0,00	0,00	0,00	1.099.200,00	1.099.200,00	0,00	0,00	0,00	1.099.200,00	1.099.200,00
320	Lay Oen Niang	2024	2024-08-13	3271244020000469	879.360,00	17	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00
321	Jojen Jaenal	2024	2024-08-13	3271244020000476	879.360,00	17	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00
322	Sinta	2024	2024-08-13	3271244020000480	879.360,00	17	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00
323	LepiGunawan	2024	2024-08-13	3271244020000492	1.626.816,00	17	0,00	0,00	0,00	1.626.816,00	1.626.816,00	0,00	0,00	0,00	1.626.816,00	1.626.816,00
324	Padmussri Penny	2024	2024-08-13	3271244020000493	1.703.760,00	17	0,00	0,00	0,00	1.703.760,00	1.703.760,00	0,00	0,00	0,00	1.703.760,00	1.703.760,00
325	Suprindi	2024	2024-08-13	3271244020000514	879.360,00	17	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00
326	Jaji	2024	2024-08-13	3271244020000517	901.344,00	17	0,00	0,00	0,00	901.344,00	901.344,00	0,00	0,00	0,00	901.344,00	901.344,00
327	M.Yahya Suherman	2024	2024-08-13	3271244020000522	1.099.200,00	17	0,00	0,00	0,00	1.099.200,00	1.099.200,00	0,00	0,00	0,00	1.099.200,00	1.099.200,00
328	Yustanto Andriady	2024	2024-08-13	3271244020000525	989.280,00	17	0,00	0,00	0,00	989.280,00	989.280,00	0,00	0,00	0,00	989.280,00	989.280,00
329	Suswati	2024	2024-08-13	3271244020000539	879.360,00	17	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00
330	Maylana	2024	2024-08-13	3271244020000546	1.176.144,00	17	0,00	0,00	0,00	1.176.144,00	1.176.144,00	0,00	0,00	0,00	1.176.144,00	1.176.144,00
331	Erika, Se	2024	2024-08-13	3271244020000551	2.110.464,00	17	0,00	0,00	0,00	2.110.464,00	2.110.464,00	0,00	0,00	0,00	2.110.464,00	2.110.464,00
332	APITHAPIFUDIN	2021	2021-12-02	3271214020001154	136.800,00	49	0,00	0,00	0,00	136.800,00	136.800,00	0,00	0,00	0,00	136.800,00	136.800,00
333	APITHAPIFUDIN	2021	2021-09-21	2021402010000979	136.800,00	52	0,00	0,00	0,00	136.800,00	136.800,00	0,00	0,00	0,00	136.800,00	136.800,00
334	APITHAPIFUDIN	2021	2021-01-06	20214020100117	136.800,00	60	0,00	0,00	0,00	136.800,00	136.800,00	0,00	0,00	0,00	136.800,00	136.800,00
335	APITHAPIFUDIN	2021	2021-01-06	20214020100118	136.800,00	60	0,00	0,00	0,00	136.800,00	136.800,00	0,00	0,00	0,00	136.800,00	136.800,00
336	APITHAPIFUDIN	2024	2024-01-23	3271244020000072	439.680,00	24	0,00	0,00	0,00	439.680,00	439.680,00	0,00	0,00	0,00	439.680,00	439.680,00
337	Ap#Hapifudin	2024	2024-08-13	3271244020000482	439.680,00	17	0,00	0,00	0,00	439.680,00	439.680,00	0,00	0,00	0,00	439.680,00	439.680,00
338																
339	WAHYU HIDAYAT	2021	2021-12-02	3271214020001098	437.760,00	49	0,00	0,00	0,00	437.760,00	437.760,00	0,00	0,00	0,00	437.760,00	437.760,00
340	WAHYU HIDAYAT	2018	2018-07-09	20184020100103	437.760,00	90	0,00	0,00	0,00	437.760,00	437.760,00	0,00	0,00	0,00	437.760,00	437.760,00
341	WAHYU HIDAYAT	2021	2021-09-21	2021402010000757	437.760,00	52	0,00	0,00	0,00	437.760,00	437.760,00	0,00	0,00	0,00	437.760,00	437.760,00
342	WAHYU HIDAYAT	2021	2021-01-05	20214020100014	437.760,00	60	0,00	0,00	0,00	437.760,00	437.760,00	0,00	0,00	0,00	437.760,00	437.760,00
343	WAHYU HIDAYAT	2021	2021-01-05	20214020100015	437.760,00	60	0,00	0,00	0,00	437.760,00	437.760,00	0,00	0,00	0,00	437.760,00	437.760,00
344	WAHYU HIDAYAT	2023	2023-07-10	3271234020000240	943.104,00	30	0,00	0,00	0,00	943.104,00	943.104,00	0,00	0,00	0,00	943.104,00	943.104,00

No	Subjek Nama	Tahun	Tgl SKRD	Kode Bayar	Pinang	Penyisihan Pinang										
					Sakdo Akhir2025	Tunggakan	Kriteria Pinang					Penyisihan Pinang Tidak Tertagih				
							Lancar (0 sd 1 Bulan)	Kurang Lancar (1 sd 3 Bulan)	Diragukan (3 sd 12 Bulan)	Macet (Lebih dari 12 Bulan)	Jumhh	Kualitas Lancar (0,5 %)	Kualitas Kurang Lancar (10 %)	Kualitas Diragukan (50 %)	Kualitas Macet (100 %)	Jumlah
345	WAHYU HIDAYAT	2024	2024-01-23	3271244020000013	1.406.976,00	24	0,00	0,00	0,00	1.406.976,00	1.406.976,00	0,00	0,00	0,00	1.406.976,00	1.406.976,00
346	Wahyu Hidayat	2024	2024-08-13	3271244020000423	1.406.976,00	17	0,00	0,00	0,00	1.406.976,00	1.406.976,00	0,00	0,00	0,00	1.406.976,00	1.406.976,00
347	IDRIS	2021	2021-01-07	20214020100306	273.600,00	60	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00
348	IDRIS	2021	2021-01-07	20214020100308	273.600,00	60	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00
349	IDRIS	2024	2024-01-23	3271244020000188	879.360,00	24	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00
350	Idris	2024	2024-08-13	3271244020000598	879.360,00	17	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00
351	SITI LESTARI	2021	2021-12-02	3271214020001112	273.600,00	49	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00
352	SITI LESTARI	2021	2021-09-21	2021402010000820	273.600,00	52	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00
353	SITI LESTARI	2021	2021-01-05	20214020100040	273.600,00	60	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00
354	SITI LESTARI	2023	2023-07-10	3271234020000211	589.440,00	30	0,00	0,00	0,00	589.440,00	589.440,00	0,00	0,00	0,00	589.440,00	589.440,00
355	SITI LESTARI	2024	2024-01-23	3271244020000028	879.360,00	24	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00
356	Siti Lestari	2024	2024-08-13	3271244020000438	879.360,00	17	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00
357	S. MULYANA	2021	2021-12-02	3271214020001232	192.000,00	49	0,00	0,00	0,00	192.000,00	192.000,00	0,00	0,00	0,00	192.000,00	192.000,00
358	S. MULYANA	2023	2023-05-02	3271234020000036	589.440,00	32	0,00	0,00	0,00	589.440,00	589.440,00	0,00	0,00	0,00	589.440,00	589.440,00
359	S. MULYANA	2018	2018-07-09	20184020100245	192.000,00	90	0,00	0,00	0,00	192.000,00	192.000,00	0,00	0,00	0,00	192.000,00	192.000,00
360	S. MULYANA	2021	2021-09-21	2021402010000886	192.000,00	52	0,00	0,00	0,00	192.000,00	192.000,00	0,00	0,00	0,00	192.000,00	192.000,00
361	S. MULYANA	2021	2021-01-07	20214020100245	192.000,00	60	0,00	0,00	0,00	192.000,00	192.000,00	0,00	0,00	0,00	192.000,00	192.000,00
362	S. MULYANA	2021	2021-01-07	20214020100246	192.000,00	60	0,00	0,00	0,00	192.000,00	192.000,00	0,00	0,00	0,00	192.000,00	192.000,00
363	S. MULYANA	2024	2024-01-23	3271244020000170	879.360,00	24	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00
364	S. Mulyana	2024	2024-08-13	3271244020000580	879.360,00	17	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00
365	YUDI WIJAYA	2021	2021-12-02	3271214020001264	273.600,00	49	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00
366	YUDI WIJAYA	2021	2021-09-22	2021402010000927	273.600,00	52	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00
367																
368	YUDI WIJAYA	2021	2021-01-07	20214020100366	273.600,00	60	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00
369	YUDI WIJAYA	2023	2023-07-10	3271234020000245	589.440,00	30	0,00	0,00	0,00	589.440,00	589.440,00	0,00	0,00	0,00	589.440,00	589.440,00
370	YUDI WIJAYA	2024	2024-01-23	3271244020000206	879.360,00	24	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00
371	Yudi Wijaya	2024	2024-08-13	3271244020000616	879.360,00	17	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00
372	SUPRIADI	2021	2021-12-02	3271214020001181	273.600,00	49	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00
373	DAMS	2023	2023-07-10	3271234020000138	589.440,00	30	0,00	0,00	0,00	589.440,00	589.440,00	0,00	0,00	0,00	589.440,00	589.440,00
374	ICAH	2024	2024-01-23	3271244020000168	725.472,00	24	0,00	0,00	0,00	725.472,00	725.472,00	0,00	0,00	0,00	725.472,00	725.472,00
375	DAMS	2024	2024-01-23	3271244020000169	879.360,00	24	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00
376	Icah	2024	2024-08-13	3271244020000578	725.472,00	17	0,00	0,00	0,00	725.472,00	725.472,00	0,00	0,00	0,00	725.472,00	725.472,00
377	Damis	2024	2024-08-13	3271244020000579	879.360,00	17	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00
378	Hotben Gulom	2023	2023-12-04	32712340200000811	1.443.600,00	25	0,00	0,00	0,00	1.443.600,00	1.443.600,00	0,00	0,00	0,00	1.443.600,00	1.443.600,00
379	MIHARJA	2024	2024-01-23	3271244020000015	1.406.976,00	24	0,00	0,00	0,00	1.406.976,00	1.406.976,00	0,00	0,00	0,00	1.406.976,00	1.406.976,00

No	Subjek Nama	Tahun	Tgl SKRD	Kode Bayar	Pinang	Penyisihan Pinang										
					Sakdo Akhir2025	Tunggakan	Kriteria Pinang					Penyisihan Pinang Tidak Tertagih				
							Lancar (0 sd 1 Bulan)	Kurang Lancar (1 sd 3 Bulan)	Diragukan (3 sd 12 Bulan)	Macet (Lebih dari 12 Bulan)	Jumlah	Kualitas Lancar (0,5 %)	Kualitas Kurang Lancar (10 %)	Kualitas Diragukan (50 %)	Kualitas Macet (100 %)	Jumlah
380	Miharja	2024	2024-08-13	3271244020000425	1.406.976,00	17	0,00	0,00	0,00	1.406.976,00	1.406.976,00	0,00	0,00	0,00	1.406.976,00	1.406.976,00
381	RONY BADRU KAMAL	2021	2021-12-02	3271214020001190	376.200,00	49	0,00	0,00	0,00	376.200,00	376.200,00	0,00	0,00	0,00	376.200,00	376.200,00
382	RONY BADRU KAMAL	2021	2021-01-01	3271214020001543	376.200,00	60	0,00	0,00	0,00	376.200,00	376.200,00	0,00	0,00	0,00	376.200,00	376.200,00
383	RONY BADRU KAMAL	2021	2021-09-21	2021402010000741	376.200,00	52	0,00	0,00	0,00	376.200,00	376.200,00	0,00	0,00	0,00	376.200,00	376.200,00
384	RONY BADRU KAMAL	2021	2021-01-07	20214020100227	376.200,00	60	0,00	0,00	0,00	376.200,00	376.200,00	0,00	0,00	0,00	376.200,00	376.200,00
385	RONY BADRU KAMAL	2021	2021-01-07	20214020100228	376.200,00	60	0,00	0,00	0,00	376.200,00	376.200,00	0,00	0,00	0,00	376.200,00	376.200,00
386	RONY BADRUL KAMAL	2023	2023-07-10	3271234020000205	810.480,00	30	0,00	0,00	0,00	810.480,00	810.480,00	0,00	0,00	0,00	810.480,00	810.480,00
387	RONY BADRUL KAMAL	2024	2024-01-23	3271244020000113	1.209.120,00	24	0,00	0,00	0,00	1.209.120,00	1.209.120,00	0,00	0,00	0,00	1.209.120,00	1.209.120,00
388	Rony BadrulKamal	2024	2024-08-13	3271244020000523	1.209.120,00	17	0,00	0,00	0,00	1.209.120,00	1.209.120,00	0,00	0,00	0,00	1.209.120,00	1.209.120,00
389	JAJI	2018	2018-07-09	20184020100193	280.440,00	90	0,00	0,00	0,00	280.440,00	280.440,00	0,00	0,00	0,00	280.440,00	280.440,00
390	AGUS BUNYAMIN	2021	2021-12-02	3271214020001211	287.280,00	49	0,00	0,00	0,00	287.280,00	287.280,00	0,00	0,00	0,00	287.280,00	287.280,00
391	AGUS BUNYAMIN	2018	2018-07-09	20184020100228	287.280,00	90	0,00	0,00	0,00	287.280,00	287.280,00	0,00	0,00	0,00	287.280,00	287.280,00
392	AGUS BUNYAMIN	2021	2021-09-21	2021402010000824	287.280,00	52	0,00	0,00	0,00	287.280,00	287.280,00	0,00	0,00	0,00	287.280,00	287.280,00
393	AGUS BUNYAMIN	2021	2021-01-07	20214020100223	287.280,00	60	0,00	0,00	0,00	287.280,00	287.280,00	0,00	0,00	0,00	287.280,00	287.280,00
394	AGUS BUNYAMIN	2021	2021-01-07	20214020100224	287.280,00	60	0,00	0,00	0,00	287.280,00	287.280,00	0,00	0,00	0,00	287.280,00	287.280,00
395	AGUS BUNYAMIN	2023	2023-07-10	3271234020000126	618.912,00	30	0,00	0,00	0,00	618.912,00	618.912,00	0,00	0,00	0,00	618.912,00	618.912,00
396																
397	AGUS BUNYAMIN	2024	2024-01-23	3271244020000142	923.328,00	24	0,00	0,00	0,00	923.328,00	923.328,00	0,00	0,00	0,00	923.328,00	923.328,00
398	Agus Bunyamin	2024	2024-08-13	3271244020000552	923.328,00	17	0,00	0,00	0,00	923.328,00	923.328,00	0,00	0,00	0,00	923.328,00	923.328,00
399	SURIYA WAMSITI HAWA	2021	2021-12-02	3271214020001221	359.100,00	49	0,00	0,00	0,00	359.100,00	359.100,00	0,00	0,00	0,00	359.100,00	359.100,00
400	SURIYA WAMSITI HAWA	2018	2018-07-09	20184020100235	359.100,00	90	0,00	0,00	0,00	359.100,00	359.100,00	0,00	0,00	0,00	359.100,00	359.100,00
401	SURIYA WAMSITI HAWA	2021	2021-09-21	2021402010000861	359.100,00	52	0,00	0,00	0,00	359.100,00	359.100,00	0,00	0,00	0,00	359.100,00	359.100,00
402	SURIYA WAMSITI HAWA	2021	2021-01-07	20214020100301	359.100,00	60	0,00	0,00	0,00	359.100,00	359.100,00	0,00	0,00	0,00	359.100,00	359.100,00
403	SURIYA WAMSITI HAWA	2021	2021-01-07	20214020100307	359.100,00	60	0,00	0,00	0,00	359.100,00	359.100,00	0,00	0,00	0,00	359.100,00	359.100,00
404	SURIYA WAN /SUKARNA	2023	2023-07-10	3271234020000226	773.640,00	30	0,00	0,00	0,00	773.640,00	773.640,00	0,00	0,00	0,00	773.640,00	773.640,00
405	SURIYA WAN /SUKARNA	2024	2024-01-23	3271244020000157	1.154.160,00	24	0,00	0,00	0,00	1.154.160,00	1.154.160,00	0,00	0,00	0,00	1.154.160,00	1.154.160,00
406	Sukarna	2024	2024-08-13	3271244020000567	1.154.160,00	17	0,00	0,00	0,00	1.154.160,00	1.154.160,00	0,00	0,00	0,00	1.154.160,00	1.154.160,00
407	JAMALUDIN	2021	2021-12-02	3271214020001114	273.600,00	49	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00
408	JAMALUDIN	2018	2018-07-09	20184020100117	273.600,00	90	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00
409	JAMALUDIN	2021	2021-09-21	2021402010000830	273.600,00	52	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00
410	JAMALUDIN	2021	2021-01-05	20214020100044	273.600,00	60	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00
411	JAMALUDIN	2021	2021-01-05	20214020100045	273.600,00	60	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00
412	JAMALUDIN	2023	2023-07-10	3271234020000167	589.440,00	30	0,00	0,00	0,00	589.440,00	589.440,00	0,00	0,00	0,00	589.440,00	589.440,00
413	JAMALUDIN	2024	2024-01-23	3271244020000030	879.360,00	24	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00
414	Jamaldin	2024	2024-08-13	3271244020000440	879.360,00	17	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00

No	Subjek Nama	Tahun	Tgl SKRD	Kode Bayar	Putang	Penyisihan Putang										
					Sakdo Akhir2025	Tunggakan	Kriteria Putang					Penyisihan Putang Tidak Tertagih				
							Lancar (0 sd 1 Bulan)	Kurang Lancar (1 sd 3 Bulan)	Diragukan (3 sd 12 Bulan)	Macet (Lebih dari 12 Bulan)	Jumhh	Kualitas Lancar (0,5 %)	Kualitas Kurang Lancar (10 %)	Kualitas Diragukan (50 %)	Kualitas Macet (100 %)	Jumlah
415	ICAH/WAHYUDIN	2021	2021-12-02	3271214020001231	192.000,00	49	0,00	0,00	0,00	192.000,00	192.000,00	0,00	0,00	0,00	192.000,00	192.000,00
416	ICAH/WAHYUDIN	2021	2021-09-21	2021402010000883	192.000,00	52	0,00	0,00	0,00	192.000,00	192.000,00	0,00	0,00	0,00	192.000,00	192.000,00
417	ICAH	2023	2023-07-10	3271234020000160	486.288,00	30	0,00	0,00	0,00	486.288,00	486.288,00	0,00	0,00	0,00	486.288,00	486.288,00
418	INDRA DJAYA DINATA	2023	2023-07-10	3271234020000162	589.440,00	30	0,00	0,00	0,00	589.440,00	589.440,00	0,00	0,00	0,00	589.440,00	589.440,00
419	INDRA DJAJA DINATA	2024	2024-01-23	3271244020000109	879.360,00	24	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00
420	Indra Djaja Dinata	2024	2024-08-13	3271244020000519	879.360,00	17	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00
421	HAMIDAN	2021	2021-12-02	3271214020001229	506.160,00	49	0,00	0,00	0,00	506.160,00	506.160,00	0,00	0,00	0,00	506.160,00	506.160,00
422	HAMIDAN	2018	2018-07-09	20184020100243	506.160,00	90	0,00	0,00	0,00	506.160,00	506.160,00	0,00	0,00	0,00	506.160,00	506.160,00
423	HAMIDAN	2021	2021-09-21	2021402010000879	506.160,00	52	0,00	0,00	0,00	506.160,00	506.160,00	0,00	0,00	0,00	506.160,00	506.160,00
424	HAMIDAN	2021	2021-01-07	20214020100239	506.160,00	60	0,00	0,00	0,00	506.160,00	506.160,00	0,00	0,00	0,00	506.160,00	506.160,00
425																
426	HAMIDAN	2021	2021-01-07	20214020100240	506.160,00	60	0,00	0,00	0,00	506.160,00	506.160,00	0,00	0,00	0,00	506.160,00	506.160,00
427	HAMIDAN	2023	2023-07-10	3271234020000154	1.090.464,00	30	0,00	0,00	0,00	1.090.464,00	1.090.464,00	0,00	0,00	0,00	1.090.464,00	1.090.464,00
428	HAMIDAN	2024	2024-01-23	3271244020000167	1.626.816,00	24	0,00	0,00	0,00	1.626.816,00	1.626.816,00	0,00	0,00	0,00	1.626.816,00	1.626.816,00
429	Hamidan	2024	2024-08-13	3271244020000577	1.626.816,00	17	0,00	0,00	0,00	1.626.816,00	1.626.816,00	0,00	0,00	0,00	1.626.816,00	1.626.816,00
430	SUTRISNO	2024	2024-01-23	3271244020000182	439.680,00	24	0,00	0,00	0,00	439.680,00	439.680,00	0,00	0,00	0,00	439.680,00	439.680,00
431	HOK TJUI	2021	2021-12-02	3271214020001120	273.600,00	49	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00
432	HOK TJUI	2021	2021-01-05	20214020100052	273.600,00	60	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00
433	HOK TJUI	2021	2021-01-05	20214020100053	273.600,00	60	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00
434	HOK TJUI	2024	2024-01-23	3271244020000037	879.360,00	24	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00
435	Hok Tjui	2024	2024-08-13	3271244020000447	879.360,00	17	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00
436	SUKIRJO	2023	2023-07-10	3271234020000220	663.120,00	30	0,00	0,00	0,00	663.120,00	663.120,00	0,00	0,00	0,00	663.120,00	663.120,00
437	SUKIRJO	2024	2024-01-23	3271244020000156	989.280,00	24	0,00	0,00	0,00	989.280,00	989.280,00	0,00	0,00	0,00	989.280,00	989.280,00
438	Sukirjo	2024	2024-08-13	3271244020000566	989.280,00	17	0,00	0,00	0,00	989.280,00	989.280,00	0,00	0,00	0,00	989.280,00	989.280,00
439	AGUNG WIRJANTO	2024	2024-01-23	3271244020000085	879.360,00	24	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00
440	Agung Wirjanto	2024	2024-08-13	3271244020000495	879.360,00	17	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00
441	LULUS WIDINUGROHO	2021	2021-12-02	3271214020001161	273.600,00	49	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00
442	LULUS WIDINUGROHO	2021	2021-01-01	3271214020001519	273.600,00	60	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00
443	LULUS WIDINUGROHO	2023	2023-07-10	3271234020000176	589.440,00	30	0,00	0,00	0,00	589.440,00	589.440,00	0,00	0,00	0,00	589.440,00	589.440,00
444	LULUS WIDINUGROHO	2024	2024-01-23	3271244020000079	879.360,00	24	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00
445	Lulus Widinugroho	2024	2024-08-13	3271244020000489	879.360,00	17	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00
446	PADOLLY	2023	2023-05-02	3271234020000045	817.848,00	32	0,00	0,00	0,00	817.848,00	817.848,00	0,00	0,00	0,00	817.848,00	817.848,00
447	PADOLLY	2024	2024-01-23	3271244020000140	1.220.112,00	24	0,00	0,00	0,00	1.220.112,00	1.220.112,00	0,00	0,00	0,00	1.220.112,00	1.220.112,00
448	Padolly	2024	2024-08-13	3271244020000550	1.220.112,00	17	0,00	0,00	0,00	1.220.112,00	1.220.112,00	0,00	0,00	0,00	1.220.112,00	1.220.112,00
449	HASBULLAH	2024	2024-01-23	3271244020000181	439.680,00	24	0,00	0,00	0,00	439.680,00	439.680,00	0,00	0,00	0,00	439.680,00	439.680,00

No	Subjek Nama	Tahun	Tgl SKRD	Kode Bayar	Pinang	Penyisihan Pinang										
					Sakto Akhir2025	Tunggakan	Kriteria Pinang					Penyisihan Pinang Tidak Tertagih				
							Lancar (0 sd 1 Bulan)	Kurang Lancar (1 sd 3 Bulan)	Diragukan (3 sd 12 Bulan)	Macet (Lebih dari 12 Bulan)	Jumhh	Kualitas Lancar(0,5 %)	Kualitas Kurang Lancar (10 %)	Kualitas Diragukan (50 %)	Kualitas Macet (100 %)	Jumlah
450	Hasbullah	2024	2024-08-13	3271244020000591	439.680,00	17	0,00	0,00	0,00	439.680,00	439.680,00	0,00	0,00	0,00	439.680,00	439.680,00
451	FERRY HERMAN	2021	2021-12-02	3271214020001248	290.700,00	49	0,00	0,00	0,00	290.700,00	290.700,00	0,00	0,00	0,00	290.700,00	290.700,00
452	FERRY HERMAN	2021	2021-01-01	3271214020001513	290.700,00	60	0,00	0,00	0,00	290.700,00	290.700,00	0,00	0,00	0,00	290.700,00	290.700,00
453	FERRY HERMAN	2018	2018-07-09	20184020100267	290.700,00	90	0,00	0,00	0,00	290.700,00	290.700,00	0,00	0,00	0,00	290.700,00	290.700,00
454																
455	FERRY HERMAN	2023	2023-07-10	3271234020000152	626.280,00	30	0,00	0,00	0,00	626.280,00	626.280,00	0,00	0,00	0,00	626.280,00	626.280,00
456	FERRY HERMAN	2024	2024-01-23	3271244020000189	934.320,00	24	0,00	0,00	0,00	934.320,00	934.320,00	0,00	0,00	0,00	934.320,00	934.320,00
457	Ferry Herman	2024	2024-08-13	3271244020000599	934.320,00	17	0,00	0,00	0,00	934.320,00	934.320,00	0,00	0,00	0,00	934.320,00	934.320,00
458	YUDIE HARIYANTO	2021	2021-12-02	3271214020001275	273.600,00	49	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00
459	YUDIE HARIYANTO	2023	2023-07-10	3271234020000246	589.440,00	30	0,00	0,00	0,00	589.440,00	589.440,00	0,00	0,00	0,00	589.440,00	589.440,00
460	YUDIE HARIYANTO	2024	2024-01-23	3271244020000221	879.360,00	24	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00
461	Yudie Hariyanto	2024	2024-08-13	3271244020000631	879.360,00	17	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00
462	Bambang Guntawan	2024	2024-08-13	3271244020000509	901.344,00	17	0,00	0,00	0,00	901.344,00	901.344,00	0,00	0,00	0,00	901.344,00	901.344,00
463	ISKANDARDK	2021	2021-12-02	3271214020001097	218.880,00	49	0,00	0,00	0,00	218.880,00	218.880,00	0,00	0,00	0,00	218.880,00	218.880,00
464	ISKANDARDK	2018	2018-07-09	20184020100102	218.880,00	90	0,00	0,00	0,00	218.880,00	218.880,00	0,00	0,00	0,00	218.880,00	218.880,00
465	ISKANDARDK	2021	2021-01-05	20214020100012	218.880,00	60	0,00	0,00	0,00	218.880,00	218.880,00	0,00	0,00	0,00	218.880,00	218.880,00
466	ISKANDARDK	2021	2021-01-05	20214020100013	218.880,00	60	0,00	0,00	0,00	218.880,00	218.880,00	0,00	0,00	0,00	218.880,00	218.880,00
467	MSNANDAR DARMA KUSUMAH	2024	2024-01-23	3271244020000011	703.488,00	24	0,00	0,00	0,00	703.488,00	703.488,00	0,00	0,00	0,00	703.488,00	703.488,00
468	Msnandar Darna Kusumah	2024	2024-08-13	3271244020000421	703.488,00	17	0,00	0,00	0,00	703.488,00	703.488,00	0,00	0,00	0,00	703.488,00	703.488,00
469	ISKANDARDK	2023	2023-07-10	3271234020000164	471.552,00	30	0,00	0,00	0,00	471.552,00	471.552,00	0,00	0,00	0,00	471.552,00	471.552,00
470	UJANG RUHIYAT	2021	2021-12-02	3271214020001272	232.560,00	49	0,00	0,00	0,00	232.560,00	232.560,00	0,00	0,00	0,00	232.560,00	232.560,00
471	UJANG RUHIYAT	2021	2021-01-07	20214020100379	232.560,00	60	0,00	0,00	0,00	232.560,00	232.560,00	0,00	0,00	0,00	232.560,00	232.560,00
472	UJANG RUHIYAT	2021	2021-01-07	20214020100380	232.560,00	60	0,00	0,00	0,00	232.560,00	232.560,00	0,00	0,00	0,00	232.560,00	232.560,00
473	UJANG RUHIYAT	2023	2023-07-10	3271234020000239	501.024,00	30	0,00	0,00	0,00	501.024,00	501.024,00	0,00	0,00	0,00	501.024,00	501.024,00
474	UJANG RUHIYAT	2024	2024-01-23	3271244020000218	747.456,00	24	0,00	0,00	0,00	747.456,00	747.456,00	0,00	0,00	0,00	747.456,00	747.456,00
475	Ujang Ruhiyat	2024	2024-08-13	3271244020000628	747.456,00	17	0,00	0,00	0,00	747.456,00	747.456,00	0,00	0,00	0,00	747.456,00	747.456,00
476	RONIH RUDIANTO	2024	2024-01-23	3271244020000064	879.360,00	24	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00
477	Ronih Rudianto	2024	2024-08-13	3271244020000474	879.360,00	17	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00
478	ANTA SASMITA	2021	2021-12-02	3271214020001100	437.760,00	49	0,00	0,00	0,00	437.760,00	437.760,00	0,00	0,00	0,00	437.760,00	437.760,00
479	DEDE PERMANA	2018	2018-07-09	20184020100101	218.880,00	90	0,00	0,00	0,00	218.880,00	218.880,00	0,00	0,00	0,00	218.880,00	218.880,00
480	DEDE PERMANA	2023	2023-07-10	3271234020000140	471.552,00	30	0,00	0,00	0,00	471.552,00	471.552,00	0,00	0,00	0,00	471.552,00	471.552,00
481	DEDE PERMANA	2024	2024-01-23	3271244020000012	703.488,00	24	0,00	0,00	0,00	703.488,00	703.488,00	0,00	0,00	0,00	703.488,00	703.488,00
482	Dede Permana	2024	2024-08-13	3271244020000422	703.488,00	17	0,00	0,00	0,00	703.488,00	703.488,00	0,00	0,00	0,00	703.488,00	703.488,00
483																
484	F.V. PARIAN	2021	2021-09-21	2021402010001024	273.600,00	52	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00

No	Subjek Nama	Tahun	Tgl SKRD	Kode Bayar	Putang	Penyisihan Putang										
					Sakdo Akhir2025	Tunggakan	Kriteria Putang					Penyisihan Putang Tidak Tertagih				
							Lancar (0 sd 1 Bulan)	Kurang Lancar (1 sd 3 Bulan)	Diragukan (3 sd 12 Bulan)	Macet (Lebih dari 12 Bulan)	Jumhh	Kualitas Lancar (0,5 %)	Kualitas Kurang Lancar (10 %)	Kualitas Diragukan (50 %)	Kualitas Macet (100 %)	Jumlah
485	ZAENAL ALIPIN	2024	2024-01-23	3271244020000105	879.360,00	24	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00
486	Zaenal Alipin	2024	2024-08-13	3271244020000515	879.360,00	17	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00
487	HERNAWATI	2021	2021-12-02	3271214020001165	342.000,00	49	0,00	0,00	0,00	342.000,00	342.000,00	0,00	0,00	0,00	342.000,00	342.000,00
488	HERNAWATI	2021	2021-01-01	3271214020001554	18.000,00	60	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
489	HERNAWATI	2018	2018-07-09	20184020100171	342.000,00	90	0,00	0,00	0,00	342.000,00	342.000,00	0,00	0,00	0,00	342.000,00	342.000,00
490	HERNAWATI	2021	2021-09-21	2021402010001013	324.000,00	52	0,00	0,00	0,00	324.000,00	324.000,00	0,00	0,00	0,00	324.000,00	324.000,00
491	HERNAWATI	2021	2021-01-06	20214020100139	342.000,00	60	0,00	0,00	0,00	342.000,00	342.000,00	0,00	0,00	0,00	342.000,00	342.000,00
492	HERNAWATI	2021	2021-01-06	20214020100140	342.000,00	60	0,00	0,00	0,00	342.000,00	342.000,00	0,00	0,00	0,00	342.000,00	342.000,00
493	HERNAWATI	2023	2023-07-10	3271234020000158	736.800,00	30	0,00	0,00	0,00	736.800,00	736.800,00	0,00	0,00	0,00	736.800,00	736.800,00
494	HERNAWATI	2024	2024-01-23	3271244020000084	1.099.200,00	24	0,00	0,00	0,00	1.099.200,00	1.099.200,00	0,00	0,00	0,00	1.099.200,00	1.099.200,00
495	Hernawati	2024	2024-08-13	3271244020000494	1.099.200,00	17	0,00	0,00	0,00	1.099.200,00	1.099.200,00	0,00	0,00	0,00	1.099.200,00	1.099.200,00
496	JAKARIA	2021	2021-12-02	3271214020001168	273.600,00	49	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00
497	JAKARIA	2021	2021-01-01	3271214020001515	136.800,00	60	0,00	0,00	0,00	136.800,00	136.800,00	0,00	0,00	0,00	136.800,00	136.800,00
498	JAKARIA	2021	2021-01-06	20214020100147	273.600,00	60	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00
499	JAKARIA	2021	2021-01-06	20214020100148	273.600,00	60	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00
500	JAKARIA	2021	2021-01-07	20214020100287	136.800,00	60	0,00	0,00	0,00	136.800,00	136.800,00	0,00	0,00	0,00	136.800,00	136.800,00
501	JAKARIA	2021	2021-01-07	20214020100288	136.800,00	60	0,00	0,00	0,00	136.800,00	136.800,00	0,00	0,00	0,00	136.800,00	136.800,00
502	JAKARIA	2024	2024-01-23	3271244020000088	879.360,00	24	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00
503	Jakaria	2024	2024-08-13	3271244020000498	879.360,00	17	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00
504	SYAFRUDIN ZULKARNAEN	2024	2024-01-23	3271244020000095	1.000.272,00	24	0,00	0,00	0,00	1.000.272,00	1.000.272,00	0,00	0,00	0,00	1.000.272,00	1.000.272,00
505	Sutrisno	2024	2024-02-20	3271244020000311	1.549.800,00	23	0,00	0,00	0,00	1.549.800,00	1.549.800,00	0,00	0,00	0,00	1.549.800,00	1.549.800,00
506	Roni Setiawan	2024	2024-08-13	3271244020000620	879.360,00	17	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00
507	JOHAN MANAJANG	2024	2024-01-23	3271244020000031	879.360,00	24	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00
508	Johan Manajang	2024	2024-08-13	3271244020000441	879.360,00	17	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00
509	Hisar Tampubolon	2023	2023-12-04	3271234020000814	1.443.600,00	25	0,00	0,00	0,00	1.443.600,00	1.443.600,00	0,00	0,00	0,00	1.443.600,00	1.443.600,00
510	YAYASAN BARAYA BANGUN BANGSA	2021	2021-01-01	3271214020001492	11.469.600,00	60	0,00	0,00	0,00	11.469.600,00	11.469.600,00	0,00	0,00	0,00	11.469.600,00	11.469.600,00
511	M. RAHMAT	2021	2021-12-02	3271214020001244	136.800,00	49	0,00	0,00	0,00	136.800,00	136.800,00	0,00	0,00	0,00	136.800,00	136.800,00
512																
513	M. RAHMAT	2018	2018-07-09	20184020100260	136.800,00	90	0,00	0,00	0,00	136.800,00	136.800,00	0,00	0,00	0,00	136.800,00	136.800,00
514	MARIANI/ZULSAAD	2021	2021-12-02	3271214020001250	290.700,00	49	0,00	0,00	0,00	290.700,00	290.700,00	0,00	0,00	0,00	290.700,00	290.700,00
515	MARIANI/ZULSAAD	2018	2018-07-09	20184020100269	290.700,00	90	0,00	0,00	0,00	290.700,00	290.700,00	0,00	0,00	0,00	290.700,00	290.700,00
516	MARIANI/ZULSAAD	2021	2021-09-21	2021402010000851	290.700,00	52	0,00	0,00	0,00	290.700,00	290.700,00	0,00	0,00	0,00	290.700,00	290.700,00
517	MARIANI/ZULSAAD	2021	2021-01-07	20214020100319	290.700,00	60	0,00	0,00	0,00	290.700,00	290.700,00	0,00	0,00	0,00	290.700,00	290.700,00
518	MARIANI	2023	2023-07-10	3271234020000182	626.280,00	30	0,00	0,00	0,00	626.280,00	626.280,00	0,00	0,00	0,00	626.280,00	626.280,00
519	MARIANI	2024	2024-01-23	3271244020000192	934.320,00	24	0,00	0,00	0,00	934.320,00	934.320,00	0,00	0,00	0,00	934.320,00	934.320,00

No	Subjek Nama	Tahun	Tgl SKRD	Kode Bayar	Putang	Penyisihan Putang										
					Sakdo Akhir2025	Tunggakan	Kriteria Putang					Penyisihan Putang Tidak Tertagih				
							Lancar (0 sd 1 Bulan)	Kurang Lancar (1 sd 3 Bulan)	Diragukan (3 sd 12 Bulan)	Macet (Lebih dari 12 Bulan)	Jumhh	Kualitas Lancar (0,5 %)	Kualitas Kurang Lancar (10 %)	Kualitas Diragukan (50 %)	Kualitas Macet (100 %)	Jumlah
520	Merini	2024	2024-08-13	3271244020000602	934.320,00	17	0,00	0,00	0,00	934.320,00	934.320,00	0,00	0,00	0,00	934.320,00	934.320,00
521	LUKMAN HERIYANTO	2024	2024-01-23	3271244020000161	923.328,00	24	0,00	0,00	0,00	923.328,00	923.328,00	0,00	0,00	0,00	923.328,00	923.328,00
522	Lukman Heriyanto	2024	2024-08-13	3271244020000571	923.328,00	17	0,00	0,00	0,00	923.328,00	923.328,00	0,00	0,00	0,00	923.328,00	923.328,00
523	Hinsa Tambunan	2023	2023-12-04	3271234020000825	2.396.376,00	25	0,00	0,00	0,00	2.396.376,00	2.396.376,00	0,00	0,00	0,00	2.396.376,00	2.396.376,00
524	NURLELA	2021	2021-09-21	2021402010001051	485.640,00	52	0,00	0,00	0,00	485.640,00	485.640,00	0,00	0,00	0,00	485.640,00	485.640,00
525	NURLELA	2023	2023-07-10	3271234020000198	1.046.256,00	30	0,00	0,00	0,00	1.046.256,00	1.046.256,00	0,00	0,00	0,00	1.046.256,00	1.046.256,00
526	NA KIMSIONG	2024	2024-01-23	3271244020000046	879.360,00	24	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00
527	KARIM	2018	2018-07-09	20184020100298	300.960,00	90	0,00	0,00	0,00	300.960,00	300.960,00	0,00	0,00	0,00	300.960,00	300.960,00
528	KARIM	2024	2024-01-23	3271244020000224	967.296,00	24	0,00	0,00	0,00	967.296,00	967.296,00	0,00	0,00	0,00	967.296,00	967.296,00
529	Karim	2024	2024-08-13	3271244020000634	967.296,00	17	0,00	0,00	0,00	967.296,00	967.296,00	0,00	0,00	0,00	967.296,00	967.296,00
530	WARDINATA TASMIDI	2018	2018-07-09	20184020100252	318.060,00	90	0,00	0,00	0,00	318.060,00	318.060,00	0,00	0,00	0,00	318.060,00	318.060,00
531	WARDINATA TASMIDI	2023	2023-07-10	3271234020000242	685.224,00	30	0,00	0,00	0,00	685.224,00	685.224,00	0,00	0,00	0,00	685.224,00	685.224,00
532	WATDINATA TARMIDI	2024	2024-01-23	3271244020000178	1.022.256,00	24	0,00	0,00	0,00	1.022.256,00	1.022.256,00	0,00	0,00	0,00	1.022.256,00	1.022.256,00
533	Watdinata Tarmidi	2024	2024-08-13	3271244020000588	1.022.256,00	17	0,00	0,00	0,00	1.022.256,00	1.022.256,00	0,00	0,00	0,00	1.022.256,00	1.022.256,00
534	Bosur H Tambunan	2023	2023-12-04	3271234020000807	2.482.992,00	25	0,00	0,00	0,00	2.482.992,00	2.482.992,00	0,00	0,00	0,00	2.482.992,00	2.482.992,00
535	ARIE AGUSTINUS	2023	2023-05-02	3271234020000064	766.272,00	32	0,00	0,00	0,00	766.272,00	766.272,00	0,00	0,00	0,00	766.272,00	766.272,00
536	ARIE AGUSTINUS	2024	2024-01-23	3271244020000124	1.143.168,00	24	0,00	0,00	0,00	1.143.168,00	1.143.168,00	0,00	0,00	0,00	1.143.168,00	1.143.168,00
537	Arie Agustinus	2024	2024-08-13	3271244020000534	1.143.168,00	17	0,00	0,00	0,00	1.143.168,00	1.143.168,00	0,00	0,00	0,00	1.143.168,00	1.143.168,00
538	JIMMY ARYAMARDA	2021	2021-12-02	3271214020001177	136.800,00	49	0,00	0,00	0,00	136.800,00	136.800,00	0,00	0,00	0,00	136.800,00	136.800,00
539	JIMY ARYAMARDA	2024	2024-01-23	3271244020000098	439.680,00	24	0,00	0,00	0,00	439.680,00	439.680,00	0,00	0,00	0,00	439.680,00	439.680,00
540	Jiny Aryamarda	2024	2024-08-13	3271244020000508	439.680,00	17	0,00	0,00	0,00	439.680,00	439.680,00	0,00	0,00	0,00	439.680,00	439.680,00
541																
542	MISBAH	2018	2018-07-09	20184020100251	246.240,00	90	0,00	0,00	0,00	246.240,00	246.240,00	0,00	0,00	0,00	246.240,00	246.240,00
543	MISBAH	2024	2024-01-23	3271244020000177	791.424,00	24	0,00	0,00	0,00	791.424,00	791.424,00	0,00	0,00	0,00	791.424,00	791.424,00
544	Misbah	2024	2024-08-13	3271244020000587	791.424,00	17	0,00	0,00	0,00	791.424,00	791.424,00	0,00	0,00	0,00	791.424,00	791.424,00
545	MUCH AFANDI	2021	2021-01-01	3271214020001521	283.860,00	60	0,00	0,00	0,00	283.860,00	283.860,00	0,00	0,00	0,00	283.860,00	283.860,00
546	MUCH AFANDI	2018	2018-07-09	20184020100287	283.860,00	90	0,00	0,00	0,00	283.860,00	283.860,00	0,00	0,00	0,00	283.860,00	283.860,00
547	MUCH AFANDI	2021	2021-09-22	2021402010000946	283.860,00	52	0,00	0,00	0,00	283.860,00	283.860,00	0,00	0,00	0,00	283.860,00	283.860,00
548	MUCH AFANDI	2021	2021-01-07	20214020100377	283.860,00	60	0,00	0,00	0,00	283.860,00	283.860,00	0,00	0,00	0,00	283.860,00	283.860,00
549	MUCH AFANDI	2021	2021-01-07	20214020100378	283.860,00	60	0,00	0,00	0,00	283.860,00	283.860,00	0,00	0,00	0,00	283.860,00	283.860,00
550	MUCH AFNGADI	2023	2023-07-10	3271234020000187	611.544,00	30	0,00	0,00	0,00	611.544,00	611.544,00	0,00	0,00	0,00	611.544,00	611.544,00
551	MUCH AFNGADI	2024	2024-01-23	3271244020000211	912.336,00	24	0,00	0,00	0,00	912.336,00	912.336,00	0,00	0,00	0,00	912.336,00	912.336,00
552	IWAN SALMAN RIDWAN	2024	2024-01-23	3271244020000018	1.330.032,00	24	0,00	0,00	0,00	1.330.032,00	1.330.032,00	0,00	0,00	0,00	1.330.032,00	1.330.032,00
553	Iwan Salman Ridwan	2024	2024-08-13	3271244020000428	1.330.032,00	17	0,00	0,00	0,00	1.330.032,00	1.330.032,00	0,00	0,00	0,00	1.330.032,00	1.330.032,00
554	WALDY	2021	2021-12-02	3271214020001270	779.760,00	49	0,00	0,00	0,00	779.760,00	779.760,00	0,00	0,00	0,00	779.760,00	779.760,00

No	Subjek Nama	Tahun	Tgl SKRD	Kode Bayar	Putang	Penyisihan Putang										
					Sakdo Akhir2025	Tunggakan	Kriteria Putang					Penyisihan Putang Tidak Tertagih				
							Lancar (0 sd 1 Bulan)	Kurang Lancar (1 sd 3 Bulan)	Diragukan (3 sd 12 Bulan)	Macet (Lebih dari 12 Bulan)	Jumhh	Kualitas Lancar(0,5 %)	Kualitas Kurang Lancar (10 %)	Kualitas Diragukan (50 %)	Kualitas Macet (100 %)	Jumlah
555	WALDY	2018	2018-07-09	20184020100289	779.760,00	90	0,00	0,00	0,00	779.760,00	779.760,00	0,00	0,00	0,00	779.760,00	779.760,00
556	WALDY	2021	2021-09-22	2021402010000959	779.760,00	52	0,00	0,00	0,00	779.760,00	779.760,00	0,00	0,00	0,00	779.760,00	779.760,00
557	WALDY	2021	2021-01-07	20214020100339	779.760,00	60	0,00	0,00	0,00	779.760,00	779.760,00	0,00	0,00	0,00	779.760,00	779.760,00
558	WALDY	2021	2021-01-07	20214020100340	779.760,00	60	0,00	0,00	0,00	779.760,00	779.760,00	0,00	0,00	0,00	779.760,00	779.760,00
559	WALIDI	2023	2023-07-10	3271234020000241	1.679.904,00	30	0,00	0,00	0,00	1.679.904,00	1.679.904,00	0,00	0,00	0,00	1.679.904,00	1.679.904,00
560	WALDY	2024	2024-01-23	3271244020000213	2.506.176,00	24	0,00	0,00	0,00	2.506.176,00	2.506.176,00	0,00	0,00	0,00	2.506.176,00	2.506.176,00
561	Waldy	2024	2024-08-13	3271244020000623	2.506.176,00	17	0,00	0,00	0,00	2.506.176,00	2.506.176,00	0,00	0,00	0,00	2.506.176,00	2.506.176,00
562	NICO POLIS	2021	2021-12-02	3271214020001110	273.600,00	49	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00
563	NICO POLIS	2018	2018-07-09	20184020100116	273.600,00	90	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00
564	NICO POLIS	2021	2021-01-05	20214020100038	273.600,00	60	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00
565	NICO POLIS	2021	2021-01-05	20214020100039	273.600,00	60	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00
566	NICO POLIS	2023	2023-07-10	3271234020000192	589.440,00	30	0,00	0,00	0,00	589.440,00	589.440,00	0,00	0,00	0,00	589.440,00	589.440,00
567	NICO POLIS	2024	2024-01-23	3271244020000026	879.360,00	24	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00
568	Nico Polis	2024	2024-08-13	3271244020000436	879.360,00	17	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00
569	H.ABDUROQMAN	2021	2021-01-01	3271214020001559	273.600,00	60	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00
570	TOHIRSALIM															
571	ISHAK	2021	2021-12-02	3271214020001235	300.960,00	49	0,00	0,00	0,00	300.960,00	300.960,00	0,00	0,00	0,00	300.960,00	300.960,00
572	ISHAK	2018	2018-07-09	20184020100247	300.960,00	90	0,00	0,00	0,00	300.960,00	300.960,00	0,00	0,00	0,00	300.960,00	300.960,00
573	ISHAK	2021	2021-01-07	20214020100251	300.960,00	60	0,00	0,00	0,00	300.960,00	300.960,00	0,00	0,00	0,00	300.960,00	300.960,00
574	ISHAK	2021	2021-01-07	20214020100252	300.960,00	60	0,00	0,00	0,00	300.960,00	300.960,00	0,00	0,00	0,00	300.960,00	300.960,00
575	ISHAK	2024	2024-01-23	3271244020000173	967.296,00	24	0,00	0,00	0,00	967.296,00	967.296,00	0,00	0,00	0,00	967.296,00	967.296,00
576	Ishak	2024	2024-08-13	3271244020000583	967.296,00	17	0,00	0,00	0,00	967.296,00	967.296,00	0,00	0,00	0,00	967.296,00	967.296,00
577	SOLEHUDIN	2024	2024-01-23	3271244020000097	439.680,00	24	0,00	0,00	0,00	439.680,00	439.680,00	0,00	0,00	0,00	439.680,00	439.680,00
578	Solehudin	2024	2024-08-13	3271244020000507	439.680,00	17	0,00	0,00	0,00	439.680,00	439.680,00	0,00	0,00	0,00	439.680,00	439.680,00
579	DUDUNG	2021	2021-12-02	3271214020001157	273.600,00	49	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00
580	DUDUNG	2023	2023-09-06	3271234020000642	660.504,00	28	0,00	0,00	0,00	660.504,00	660.504,00	0,00	0,00	0,00	660.504,00	660.504,00
581	DUDUNG	2018	2018-07-09	20184020100162	273.600,00	90	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00
582	DUDUNG	2021	2021-01-06	20214020100123	273.600,00	60	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00
583	DUDUNG	2021	2021-01-06	20214020100124	273.600,00	60	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00
584	DUDUNG	2023	2023-07-10	3271234020000146	589.440,00	30	0,00	0,00	0,00	589.440,00	589.440,00	0,00	0,00	0,00	589.440,00	589.440,00
585	DUDUNG	2024	2024-01-23	3271244020000075	879.360,00	24	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00
586	Dudung	2024	2024-08-13	3271244020000485	879.360,00	17	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00
587	DRS. R. WALUYOJATI, S	2021	2021-12-02	3271214020001204	365.940,00	49	0,00	0,00	0,00	365.940,00	365.940,00	0,00	0,00	0,00	365.940,00	365.940,00
588	Drs. R. WALUYOJATI, S	2023	2023-07-10	3271234020000144	788.376,00	30	0,00	0,00	0,00	788.376,00	788.376,00	0,00	0,00	0,00	788.376,00	788.376,00
589	Drs. R. WALUYOJATI, S	2024	2024-01-23	3271244020000135	1.176.144,00	24	0,00	0,00	0,00	1.176.144,00	1.176.144,00	0,00	0,00	0,00	1.176.144,00	1.176.144,00

No	Subjek Nama	Tahun	Tgl SKRD	Kode Bayar	Pinang	Penyisihan Pinang										
					Sakdo Akhir2025	Tunggakan	Kriteria Pinang					Penyisihan Pinang Tidak Tertagih				
							Lancar (0 sd 1 Bulan)	Kurang Lancar (1 sd 3 Bulan)	Diragukan (3 sd 12 Bulan)	Macet (Lebih dari 12 Bulan)	Jumhh	Kualitas Lancar(0,5 %)	Kualitas Kurang Lancar (10 %)	Kualitas Diragukan (50 %)	Kualitas Macet (100 %)	Jumlah
590	Drs. R. Wahyopati, S	2024	2024-08-13	3271244020000545	1.176.144,00	17	0,00	0,00	0,00	1.176.144,00	1.176.144,00	0,00	0,00	0,00	1.176.144,00	1.176.144,00
591	YAHYA WIRO SUDARMO	2021	2021-12-02	3271214020001162	273.600,00	49	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00
592	YAHYA WIRO SUDARMO	2021	2021-12-28	3271214020001429	273.600,00	49	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00
593	YAHYA WIRO SUDARMO	2021	2021-01-01	3271214020001552	547.200,00	60	0,00	0,00	0,00	547.200,00	547.200,00	0,00	0,00	0,00	547.200,00	547.200,00
594	YAYAH WIRO SUDARMO	2023	2023-07-10	3271234020000261	589.440,00	30	0,00	0,00	0,00	589.440,00	589.440,00	0,00	0,00	0,00	589.440,00	589.440,00
595	LULUS WIDINUGROHO	2024	2024-01-23	3271244020000080	879.360,00	24	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00
596	Lulus Widinugroho	2024	2024-08-13	3271244020000490	879.360,00	17	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00
597	IR.DAUD AMEN	2021	2021-01-01	3271214020001514	290.700,00	60	0,00	0,00	0,00	290.700,00	290.700,00	0,00	0,00	0,00	290.700,00	290.700,00
598	Ir.DAUD AMEN	2023	2023-07-10	3271234020000254	626.280,00	30	0,00	0,00	0,00	626.280,00	626.280,00	0,00	0,00	0,00	626.280,00	626.280,00
599																
600	Ir.DAUD AMEN	2023	2023-07-10	3271234020000253	626.280,00	30	0,00	0,00	0,00	626.280,00	626.280,00	0,00	0,00	0,00	626.280,00	626.280,00
601	Ir.DAUD AMEN	2024	2024-01-23	3271244020000195	934.320,00	24	0,00	0,00	0,00	934.320,00	934.320,00	0,00	0,00	0,00	934.320,00	934.320,00
602	Ir.DAUD AMEN	2024	2024-01-23	3271244020000196	934.320,00	24	0,00	0,00	0,00	934.320,00	934.320,00	0,00	0,00	0,00	934.320,00	934.320,00
603	Ir.Daud Amen	2024	2024-08-13	3271244020000605	934.320,00	17	0,00	0,00	0,00	934.320,00	934.320,00	0,00	0,00	0,00	934.320,00	934.320,00
604	Ir.Daud Amen	2024	2024-08-13	3271244020000606	934.320,00	17	0,00	0,00	0,00	934.320,00	934.320,00	0,00	0,00	0,00	934.320,00	934.320,00
605	SONGKO	2021	2021-12-02	3271214020001274	273.600,00	49	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00
606	SONGKO	2021	2021-01-07	20214020100357	273.600,00	60	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00
607	SONGKO	2023	2023-07-10	3271234020000214	589.440,00	30	0,00	0,00	0,00	589.440,00	589.440,00	0,00	0,00	0,00	589.440,00	589.440,00
608	SONGKO	2024	2024-01-23	3271244020000220	879.360,00	24	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00
609	Songko	2024	2024-08-13	3271244020000630	879.360,00	17	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00
610	HARRY	2018	2018-07-09	20184020100288	338.580,00	90	0,00	0,00	0,00	338.580,00	338.580,00	0,00	0,00	0,00	338.580,00	338.580,00
611	Harry	2024	2024-08-13	3271244020000622	1.088.208,00	17	0,00	0,00	0,00	1.088.208,00	1.088.208,00	0,00	0,00	0,00	1.088.208,00	1.088.208,00
612	BOWO PRAYOGO	2024	2024-01-23	3271244020000131	1.989.552,00	24	0,00	0,00	0,00	1.989.552,00	1.989.552,00	0,00	0,00	0,00	1.989.552,00	1.989.552,00
613	Bowo Prayogo	2024	2024-08-13	3271244020000541	1.989.552,00	17	0,00	0,00	0,00	1.989.552,00	1.989.552,00	0,00	0,00	0,00	1.989.552,00	1.989.552,00
614	USEP SUPENDI	2024	2024-01-23	3271244020000042	879.360,00	24	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00
615	Usep Supendi	2024	2024-08-13	3271244020000452	879.360,00	17	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00
616	DEDY	2018	2018-07-09	20184020100223	235.980,00	90	0,00	0,00	0,00	235.980,00	235.980,00	0,00	0,00	0,00	235.980,00	235.980,00
617	DEDY	2024	2024-01-23	3271244020000137	758.448,00	24	0,00	0,00	0,00	758.448,00	758.448,00	0,00	0,00	0,00	758.448,00	758.448,00
618	Dety	2024	2024-08-13	3271244020000547	758.448,00	17	0,00	0,00	0,00	758.448,00	758.448,00	0,00	0,00	0,00	758.448,00	758.448,00
619	MUHAMAD JUNAEDI	2021	2021-01-01	3271214020001560	633.600,00	60	0,00	0,00	0,00	633.600,00	633.600,00	0,00	0,00	0,00	633.600,00	633.600,00
620	MUHAMAD JUNAEDI	2023	2023-05-02	3271234020000033	648.384,00	32	0,00	0,00	0,00	648.384,00	648.384,00	0,00	0,00	0,00	648.384,00	648.384,00
621	MUHAMMAD DJUNAEDI	2024	2024-01-23	3271244020000214	967.296,00	24	0,00	0,00	0,00	967.296,00	967.296,00	0,00	0,00	0,00	967.296,00	967.296,00
622	MUHAMMAD DJUNAEDI	2024	2024-01-23	3271244020000216	857.376,00	24	0,00	0,00	0,00	857.376,00	857.376,00	0,00	0,00	0,00	857.376,00	857.376,00
623	Muhammad Djunaedi	2024	2024-08-13	3271244020000624	967.296,00	17	0,00	0,00	0,00	967.296,00	967.296,00	0,00	0,00	0,00	967.296,00	967.296,00
624	Muhammad Djunaedi	2024	2024-08-13	3271244020000626	857.376,00	17	0,00	0,00	0,00	857.376,00	857.376,00	0,00	0,00	0,00	857.376,00	857.376,00

No	Subjek Nama	Tahun	Tgl SKRD	Kode Bayar	Pinang	Penyisihan Pinang										
					Sakdo Akhir2025	Tunggakan	Kriteria Pinang					Penyisihan Pinang Tidak Tertagih				
							Lancar (0 sd 1 Bulan)	Kurang Lancar (1 sd 3 Bulan)	Diragukan (3 sd 12 Bulan)	Macet (Lebih dari 12 Bulan)	Jumhh	Kualitas Lancar (0,5 %)	Kualitas Kurang Lancar (10 %)	Kualitas Diragukan (50 %)	Kualitas Macet (100 %)	Jumlah
625	M.YAHYA SUHERMAN	2021	2021-12-02	3271214020001189	342.000,00	49	0,00	0,00	0,00	342.000,00	342.000,00	0,00	0,00	0,00	342.000,00	342.000,00
626	Baharudin	2023	2023-12-04	3271234020000809	1.674.576,00	25	0,00	0,00	0,00	1.674.576,00	1.674.576,00	0,00	0,00	0,00	1.674.576,00	1.674.576,00
627	JEJEN JAENAL	2021	2021-12-02	3271214020001148	273.600,00	49	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00
628																
629	JEJEN JAENAL	2018	2018-07-09	20184020100153	273.600,00	90	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00
630	JEJEN JAENAL	2021	2021-09-21	2021402010000967	273.600,00	52	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00
631	JEJEN JAENAL	2021	2021-01-06	20214020100105	273.600,00	60	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00
632	JEJEN JAENAL	2021	2021-01-06	20214020100106	273.600,00	60	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00
633	JEJEN JAENAL	2023	2023-07-10	3271234020000168	589.440,00	30	0,00	0,00	0,00	589.440,00	589.440,00	0,00	0,00	0,00	589.440,00	589.440,00
634	JEJEN JAENAL	2024	2024-01-23	3271244020000066	879.360,00	24	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00
635	SUPIAH	2023	2023-07-10	3271234020000224	589.440,00	30	0,00	0,00	0,00	589.440,00	589.440,00	0,00	0,00	0,00	589.440,00	589.440,00
636	SUPIAH	2024	2024-01-23	3271244020000203	879.360,00	24	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00
637	Supiah	2024	2024-08-13	3271244020000613	879.360,00	17	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00
638	SAMSIYAH	2021	2021-12-02	3271214020001201	619.020,00	49	0,00	0,00	0,00	619.020,00	619.020,00	0,00	0,00	0,00	619.020,00	619.020,00
639	SAMSIYAH	2021	2021-01-01	3271214020001524	619.020,00	60	0,00	0,00	0,00	619.020,00	619.020,00	0,00	0,00	0,00	619.020,00	619.020,00
640	SAMSIYAH	2021	2021-09-21	2021402010000784	619.020,00	52	0,00	0,00	0,00	619.020,00	619.020,00	0,00	0,00	0,00	619.020,00	619.020,00
641	SAMSIYAH	2021	2021-01-07	20214020100200	619.020,00	60	0,00	0,00	0,00	619.020,00	619.020,00	0,00	0,00	0,00	619.020,00	619.020,00
642	SAMSIYAH	2021	2021-01-07	20214020100202	619.020,00	60	0,00	0,00	0,00	619.020,00	619.020,00	0,00	0,00	0,00	619.020,00	619.020,00
643	ERNA	2021	2021-01-01	3271214020001512	820.800,00	60	0,00	0,00	0,00	820.800,00	820.800,00	0,00	0,00	0,00	820.800,00	820.800,00
644	Lina	2024	2024-08-13	3271244020000503	329.760,00	17	0,00	0,00	0,00	329.760,00	329.760,00	0,00	0,00	0,00	329.760,00	329.760,00
645	SUMANAH	2021	2021-12-02	3271214020001163	324.900,00	49	0,00	0,00	0,00	324.900,00	324.900,00	0,00	0,00	0,00	324.900,00	324.900,00
646	SUMANAH	2021	2021-09-21	2021402010000998	324.900,00	52	0,00	0,00	0,00	324.900,00	324.900,00	0,00	0,00	0,00	324.900,00	324.900,00
647	SUMANAH	2023	2023-07-10	3271234020000222	699.960,00	30	0,00	0,00	0,00	699.960,00	699.960,00	0,00	0,00	0,00	699.960,00	699.960,00
648	SUMANAH	2024	2024-01-23	3271244020000081	1.044.240,00	24	0,00	0,00	0,00	1.044.240,00	1.044.240,00	0,00	0,00	0,00	1.044.240,00	1.044.240,00
649	Sumanah	2024	2024-08-13	3271244020000491	1.044.240,00	17	0,00	0,00	0,00	1.044.240,00	1.044.240,00	0,00	0,00	0,00	1.044.240,00	1.044.240,00
650	Law LieHa	2024	2024-08-13	3271244020000548	835.392,00	17	0,00	0,00	0,00	835.392,00	835.392,00	0,00	0,00	0,00	835.392,00	835.392,00
651	Law LieHa	2024	2024-08-13	3271244020000549	791.424,00	17	0,00	0,00	0,00	791.424,00	791.424,00	0,00	0,00	0,00	791.424,00	791.424,00
652	Sutin ah	2023	2023-12-04	3271234020000788	1.443.600,00	25	0,00	0,00	0,00	1.443.600,00	1.443.600,00	0,00	0,00	0,00	1.443.600,00	1.443.600,00
653	SUMARNI	2021	2021-12-02	3271214020001132	273.600,00	49	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00
654	SUMARNI	2018	2018-07-09	20184020100136	273.600,00	90	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00
655	SUMARNI	2021	2021-01-06	20214020100074	273.600,00	60	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00
656	SUMARNI	2021	2021-01-06	20214020100075	273.600,00	60	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00
657																
658	SUMARNI	2024	2024-01-23	3271244020000050	879.360,00	24	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00
659	Sumarni	2024	2024-08-13	3271244020000460	879.360,00	17	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00

No	Subjek Nama	Tahun	Tgl SKRD	Kode Bayar	Pinang	Penyisihan Pinang										
					Sakdo Akhir2025	Tunggakan	Kriteria Pinang					Penyisihan Pinang Tidak Tertagih				
							Lancar (0 sd 1 Bulan)	Kurang Lancar (1 sd 3 Bulan)	Diragukan (3 sd 12 Bulan)	Macet (Lebih dari 12 Bulan)	Jumhh	Kualitas Lancar (0,5 %)	Kualitas Kurang Lancar (10 %)	Kualitas Diragukan (50 %)	Kualitas Macet (100 %)	Jumlah
660	BENNY ACHAN T	2021	2021-12-02	3271214020001260	273.600,00	49	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00
661	BENNY ACHAN T	2018	2018-07-09	20184020100279	273.600,00	90	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00
662	BENNY ACHAN T	2021	2021-01-07	20214020100346	273.600,00	60	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00
663	IJAH	2024	2024-01-23	3271244020000204	879.360,00	24	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00
664	Ijah	2024	2024-08-13	3271244020000614	879.360,00	17	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00
665	AISAH	2021	2021-12-02	3271214020001124	273.600,00	49	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00
666	AISAH	2021	2021-12-02	3271214020001198	355.680,00	49	0,00	0,00	0,00	355.680,00	355.680,00	0,00	0,00	0,00	355.680,00	355.680,00
667	AISAH	2018	2018-07-09	20184020100215	355.680,00	90	0,00	0,00	0,00	355.680,00	355.680,00	0,00	0,00	0,00	355.680,00	355.680,00
668	AISAH	2021	2021-09-21	2021402010000776	355.680,00	52	0,00	0,00	0,00	355.680,00	355.680,00	0,00	0,00	0,00	355.680,00	355.680,00
669	AISAH	2021	2021-01-07	20214020100187	355.680,00	60	0,00	0,00	0,00	355.680,00	355.680,00	0,00	0,00	0,00	355.680,00	355.680,00
670	AISAH	2021	2021-01-07	20214020100189	355.680,00	60	0,00	0,00	0,00	355.680,00	355.680,00	0,00	0,00	0,00	355.680,00	355.680,00
671	AISAH	2023	2023-07-10	3271234020000128	766.272,00	30	0,00	0,00	0,00	766.272,00	766.272,00	0,00	0,00	0,00	766.272,00	766.272,00
672	PURWATI	2021	2021-12-02	3271214020001245	136.800,00	49	0,00	0,00	0,00	136.800,00	136.800,00	0,00	0,00	0,00	136.800,00	136.800,00
673	PURWATI	2018	2018-07-09	20184020100261	136.800,00	90	0,00	0,00	0,00	136.800,00	136.800,00	0,00	0,00	0,00	136.800,00	136.800,00
674	PURWATI	2021	2021-09-21	2021402010000810	136.800,00	52	0,00	0,00	0,00	136.800,00	136.800,00	0,00	0,00	0,00	136.800,00	136.800,00
675	PURWATI	2021	2021-01-07	20214020100299	136.800,00	60	0,00	0,00	0,00	136.800,00	136.800,00	0,00	0,00	0,00	136.800,00	136.800,00
676	PURWATI	2021	2021-01-07	20214020100300	136.800,00	60	0,00	0,00	0,00	136.800,00	136.800,00	0,00	0,00	0,00	136.800,00	136.800,00
677	PURWATI	2023	2023-07-10	3271234020000201	294.720,00	30	0,00	0,00	0,00	294.720,00	294.720,00	0,00	0,00	0,00	294.720,00	294.720,00
678	PURWATI	2024	2024-01-23	3271244020000186	439.680,00	24	0,00	0,00	0,00	439.680,00	439.680,00	0,00	0,00	0,00	439.680,00	439.680,00
679	Purwati	2024	2024-08-13	3271244020000596	439.680,00	17	0,00	0,00	0,00	439.680,00	439.680,00	0,00	0,00	0,00	439.680,00	439.680,00
680	NANI NURAENI	2021	2021-12-02	3271214020001243	136.800,00	49	0,00	0,00	0,00	136.800,00	136.800,00	0,00	0,00	0,00	136.800,00	136.800,00
681	NANI NURAENI	2021	2021-09-21	2021402010000795	136.800,00	52	0,00	0,00	0,00	136.800,00	136.800,00	0,00	0,00	0,00	136.800,00	136.800,00
682	NANI NURAENI	2023	2023-07-10	3271234020000189	294.720,00	30	0,00	0,00	0,00	294.720,00	294.720,00	0,00	0,00	0,00	294.720,00	294.720,00
683	NANI NURAENI	2024	2024-01-23	3271244020000184	439.680,00	24	0,00	0,00	0,00	439.680,00	439.680,00	0,00	0,00	0,00	439.680,00	439.680,00
684	Nani Nuraeni	2024	2024-08-13	3271244020000594	439.680,00	17	0,00	0,00	0,00	439.680,00	439.680,00	0,00	0,00	0,00	439.680,00	439.680,00
685	M.Rahmat	2024	2024-08-13	3271244020000595	439.680,00	17	0,00	0,00	0,00	439.680,00	439.680,00	0,00	0,00	0,00	439.680,00	439.680,00
686	DRS. SUMIATI	2021	2021-01-07	20214020100212	365.940,00	60	0,00	0,00	0,00	365.940,00	365.940,00	0,00	0,00	0,00	365.940,00	365.940,00
687	Sumiati	2024	2024-08-13	3271244020000544	1.176.144,00	17	0,00	0,00	0,00	1.176.144,00	1.176.144,00	0,00	0,00	0,00	1.176.144,00	1.176.144,00
688	TITIN	2021	2021-12-02	3271214020001233	201.600,00	49	0,00	0,00	0,00	201.600,00	201.600,00	0,00	0,00	0,00	201.600,00	201.600,00
689	TITIN	2021	2021-01-07	20214020100247	201.600,00	60	0,00	0,00	0,00	201.600,00	201.600,00	0,00	0,00	0,00	201.600,00	201.600,00
690	TITIN	2021	2021-01-07	20214020100248	201.600,00	60	0,00	0,00	0,00	201.600,00	201.600,00	0,00	0,00	0,00	201.600,00	201.600,00
691	TITIN	2024	2024-01-23	3271244020000171	923.328,00	24	0,00	0,00	0,00	923.328,00	923.328,00	0,00	0,00	0,00	923.328,00	923.328,00
692	Tin	2024	2024-08-13	3271244020000581	923.328,00	17	0,00	0,00	0,00	923.328,00	923.328,00	0,00	0,00	0,00	923.328,00	923.328,00
693	ENCAH	2021	2021-12-02	3271214020001167	273.600,00	49	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00
694	ENCAH	2021	2021-01-06	20214020100145	273.600,00	60	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00

No	Subjek Nama	Tahun	Tgl SKRD	Kode Bayar	Pinang	Penyisihan Pinang										
					Sakdo Akhir2025	Tunggakan	Kriteria Pinang					Penyisihan Pinang Tidak Tertagih				
							Lancar (0 sd 1 Bulan)	Kurang Lancar (1 sd 3 Bulan)	Diragukan (3 sd 12 Bulan)	Macet (Lebih dari 12 Bulan)	Jumhh	Kualitas Lancar (0,5 %)	Kualitas Kurang Lancar (10 %)	Kualitas Diragukan (50 %)	Kualitas Macet (100 %)	Jumlah
695	ENCAH	2021	2021-01-06	20214020100146	273.600,00	60	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00
696	ENCAH	2023	2023-07-10	3271234020000149	589.440,00	30	0,00	0,00	0,00	589.440,00	589.440,00	0,00	0,00	0,00	589.440,00	589.440,00
697	ENCAH	2024	2024-01-23	3271244020000087	879.360,00	24	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00
698	Encah	2024	2024-08-13	3271244020000497	879.360,00	17	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00
699	ANNA/AMALIA	2021	2021-12-02	3271214020001259	273.600,00	49	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00
700	ANNA/AMALIA	2021	2021-01-07	20214020100362	273.600,00	60	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00
701	ANNA	2024	2024-01-23	3271244020000201	879.360,00	24	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00
702	Anna	2024	2024-08-13	3271244020000611	879.360,00	17	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00
703	SUSILAWATI	2024	2024-01-23	3271244020000033	329.760,00	24	0,00	0,00	0,00	329.760,00	329.760,00	0,00	0,00	0,00	329.760,00	329.760,00
704	Susilawati	2024	2024-08-13	3271244020000443	329.760,00	17	0,00	0,00	0,00	329.760,00	329.760,00	0,00	0,00	0,00	329.760,00	329.760,00
705	NURHAYATI	2021	2021-12-02	3271214020001179	430.920,00	49	0,00	0,00	0,00	430.920,00	430.920,00	0,00	0,00	0,00	430.920,00	430.920,00
706	NURHAYATI	2021	2021-01-01	3271214020001541	861.840,00	60	0,00	0,00	0,00	861.840,00	861.840,00	0,00	0,00	0,00	861.840,00	861.840,00
707	NURHAYATI	2021	2021-01-01	3271214020001542	237.360,00	60	0,00	0,00	0,00	237.360,00	237.360,00	0,00	0,00	0,00	237.360,00	237.360,00
708	NURHAYATI	2021	2021-09-21	2021402010001049	430.920,00	52	0,00	0,00	0,00	430.920,00	430.920,00	0,00	0,00	0,00	430.920,00	430.920,00
709	NURHAYATI	2023	2023-07-10	3271234020000197	928.368,00	30	0,00	0,00	0,00	928.368,00	928.368,00	0,00	0,00	0,00	928.368,00	928.368,00
710	NURHAYATI	2024	2024-01-23	3271244020000102	1.384.992,00	24	0,00	0,00	0,00	1.384.992,00	1.384.992,00	0,00	0,00	0,00	1.384.992,00	1.384.992,00
711	Nurhayati	2024	2024-08-13	3271244020000512	1.384.992,00	17	0,00	0,00	0,00	1.384.992,00	1.384.992,00	0,00	0,00	0,00	1.384.992,00	1.384.992,00
712	Tjoe Soan Nio	2024	2024-08-13	3271244020000553	1.055.232,00	17	0,00	0,00	0,00	1.055.232,00	1.055.232,00	0,00	0,00	0,00	1.055.232,00	1.055.232,00
713	MARIAM	2021	2021-12-02	3271214020001145	273.600,00	49	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00
714	MILA NOPIYANTI	2024	2024-01-23	3271244020000029	879.360,00	24	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00
715	ENDANG KARTIWA/EHA JULAEHA	2021	2021-12-02	3271214020001194	588.240,00	49	0,00	0,00	0,00	588.240,00	588.240,00	0,00	0,00	0,00	588.240,00	588.240,00
716	ENDANG KARTIWA/EHA JULAEHA	2018	2018-07-09	20184020100207	588.240,00	90	0,00	0,00	0,00	588.240,00	588.240,00	0,00	0,00	0,00	588.240,00	588.240,00
717	ENDANG KARTIWA/EHA JULAEHA	2021	2021-09-21	2021402010000764	588.240,00	52	0,00	0,00	0,00	588.240,00	588.240,00	0,00	0,00	0,00	588.240,00	588.240,00
718	ENDANG KARTIWA	2023	2023-07-10	3271234020000150	1.267.296,00	30	0,00	0,00	0,00	1.267.296,00	1.267.296,00	0,00	0,00	0,00	1.267.296,00	1.267.296,00
719	ENDANG KARTIWA	2024	2024-01-23	3271244020000121	1.890.624,00	24	0,00	0,00	0,00	1.890.624,00	1.890.624,00	0,00	0,00	0,00	1.890.624,00	1.890.624,00
720	Endang Kartiwa	2024	2024-08-13	3271244020000531	1.890.624,00	17	0,00	0,00	0,00	1.890.624,00	1.890.624,00	0,00	0,00	0,00	1.890.624,00	1.890.624,00
721	MSKI MILAH	2021	2021-12-02	3271214020001182	273.600,00	49	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00
722	MSKI MILAH	2018	2018-07-09	20184020100191	273.600,00	90	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00
723	MSKI MILAH	2021	2021-09-21	2021402010000723	273.600,00	52	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00
724	MSKI MILAH	2021	2021-01-07	20214020100192	273.600,00	60	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00
725	MSKI MILAH	2021	2021-01-07	20214020100194	273.600,00	60	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00
726	MANAH	2021	2021-01-01	3271214020001520	328.320,00	60	0,00	0,00	0,00	328.320,00	328.320,00	0,00	0,00	0,00	328.320,00	328.320,00
727	MANAH	2024	2024-01-23	3271244020000147	1.055.232,00	24	0,00	0,00	0,00	1.055.232,00	1.055.232,00	0,00	0,00	0,00	1.055.232,00	1.055.232,00
728	Manah	2024	2024-08-13	3271244020000557	1.055.232,00	17	0,00	0,00	0,00	1.055.232,00	1.055.232,00	0,00	0,00	0,00	1.055.232,00	1.055.232,00

No	Subjek Nama	Tahun	Tgl SKRD	Kode Bayar	Putang	Penyisihan Putang										
					Sakdo Akhir2025	Tunggakan	Kriteria Putang					Penyisihan Putang Tidak Tertagih				
							Lancar (0 sd 1 Bulan)	Kurang Lancar (1 sd 3 Bulan)	Diragukan (3 sd 12 Bulan)	Macet (Lebih dari 12 Bulan)	Jumhh	Kualitas Lancar (0,5 %)	Kualitas Kurang Lancar (10 %)	Kualitas Diragukan (50 %)	Kualitas Macet (100 %)	Jumlah
729	SUKAESIH	2018	2018-07-09	20184020100127	273.600,00	90	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00
730	KARNINGSIH	2018	2018-07-09	20184020100192	290.700,00	90	0,00	0,00	0,00	290.700,00	290.700,00	0,00	0,00	0,00	290.700,00	290.700,00
731	KARNINGSIH	2024	2024-01-23	3271244020000106	934.320,00	24	0,00	0,00	0,00	934.320,00	934.320,00	0,00	0,00	0,00	934.320,00	934.320,00
732	YEN HOA.2	2021	2021-01-01	3271214020001549	259.920,00	60	0,00	0,00	0,00	259.920,00	259.920,00	0,00	0,00	0,00	259.920,00	259.920,00
733	YEN HOA.3	2021	2021-01-01	3271214020001550	259.920,00	60	0,00	0,00	0,00	259.920,00	259.920,00	0,00	0,00	0,00	259.920,00	259.920,00
734	GOUW YEN HOA	2024	2024-01-23	3271244020000116	989.280,00	24	0,00	0,00	0,00	989.280,00	989.280,00	0,00	0,00	0,00	989.280,00	989.280,00
735	GOUW YEN HOA	2024	2024-01-23	3271244020000117	835.392,00	24	0,00	0,00	0,00	835.392,00	835.392,00	0,00	0,00	0,00	835.392,00	835.392,00
736	GOUW YEN HOA	2024	2024-01-23	3271244020000118	835.392,00	24	0,00	0,00	0,00	835.392,00	835.392,00	0,00	0,00	0,00	835.392,00	835.392,00
737	Gouw Ym Hoa	2024	2024-08-13	3271244020000526	989.280,00	17	0,00	0,00	0,00	989.280,00	989.280,00	0,00	0,00	0,00	989.280,00	989.280,00
738	Gouw Ym Hoa	2024	2024-08-13	3271244020000527	835.392,00	17	0,00	0,00	0,00	835.392,00	835.392,00	0,00	0,00	0,00	835.392,00	835.392,00
739	Gouw Ym Hoa	2024	2024-08-13	3271244020000528	835.392,00	17	0,00	0,00	0,00	835.392,00	835.392,00	0,00	0,00	0,00	835.392,00	835.392,00
740	LUKMAN	2021	2021-01-01	3271214020001517	1.077.300,00	60	0,00	0,00	0,00	1.077.300,00	1.077.300,00	0,00	0,00	0,00	1.077.300,00	1.077.300,00
741	HERIYANTO/ERLINAW ATY															
742	LUKMAN HERIYANTO/ERLINAW ATY	2021	2021-01-01	3271214020001518	790.020,00	60	0,00	0,00	0,00	790.020,00	790.020,00	0,00	0,00	0,00	790.020,00	790.020,00
743	LUKMAN HERIYANTO/ERLINAW ATY	2021	2021-09-21	2021402010000863	359.100,00	52	0,00	0,00	0,00	359.100,00	359.100,00	0,00	0,00	0,00	359.100,00	359.100,00
744	LUKMAN HERIYANTO/ERLINAW ATY	2021	2021-01-07	20214020100304	359.100,00	60	0,00	0,00	0,00	359.100,00	359.100,00	0,00	0,00	0,00	359.100,00	359.100,00
745	LUKMAN HERIYANTO	2023	2023-07-10	3271234020000174	773.640,00	30	0,00	0,00	0,00	773.640,00	773.640,00	0,00	0,00	0,00	773.640,00	773.640,00
746	LUKMAN HERIYANTO	2023	2023-07-10	3271234020000175	618.912,00	30	0,00	0,00	0,00	618.912,00	618.912,00	0,00	0,00	0,00	618.912,00	618.912,00
747	LUKMAN HERIYANTO	2024	2024-01-23	3271244020000158	1.154.160,00	24	0,00	0,00	0,00	1.154.160,00	1.154.160,00	0,00	0,00	0,00	1.154.160,00	1.154.160,00
748	Lukman Heriyanto	2024	2024-08-13	3271244020000568	1.154.160,00	17	0,00	0,00	0,00	1.154.160,00	1.154.160,00	0,00	0,00	0,00	1.154.160,00	1.154.160,00
749	SUSANNAWATI ADIWANA	2021	2021-12-02	3271214020001227	287.280,00	49	0,00	0,00	0,00	287.280,00	287.280,00	0,00	0,00	0,00	287.280,00	287.280,00
750	SUSANNAWATI ADIWANA	2018	2018-07-09	20184020100241	287.280,00	90	0,00	0,00	0,00	287.280,00	287.280,00	0,00	0,00	0,00	287.280,00	287.280,00
751	SUSANNAWATI ADIWANA	2021	2021-01-13	20214020100388	287.280,00	60	0,00	0,00	0,00	287.280,00	287.280,00	0,00	0,00	0,00	287.280,00	287.280,00
752	SUSANNA WATI ADIWANA	2024	2024-01-23	3271244020000165	923.328,00	24	0,00	0,00	0,00	923.328,00	923.328,00	0,00	0,00	0,00	923.328,00	923.328,00
753	Susanna Wati Adiwana	2024	2024-08-13	3271244020000575	923.328,00	17	0,00	0,00	0,00	923.328,00	923.328,00	0,00	0,00	0,00	923.328,00	923.328,00
754	Suminten	2024	2024-02-20	3271244020000326	1.033.200,00	23	0,00	0,00	0,00	1.033.200,00	1.033.200,00	0,00	0,00	0,00	1.033.200,00	1.033.200,00
755	SUMINTEN	2023	2023-07-18	3271234020000477	688.200,00	30	0,00	0,00	0,00	688.200,00	688.200,00	0,00	0,00	0,00	688.200,00	688.200,00
756	SUMINTEN	2021	2021-09-22	2021402010000958	549.600,00	52	0,00	0,00	0,00	549.600,00	549.600,00	0,00	0,00	0,00	549.600,00	549.600,00
757	SUMINTEN	2021	2021-02-01	20214020100577	549.600,00	59	0,00	0,00	0,00	549.600,00	549.600,00	0,00	0,00	0,00	549.600,00	549.600,00
758	SUMINTEN	2021	2021-02-01	20214020100578	549.600,00	59	0,00	0,00	0,00	549.600,00	549.600,00	0,00	0,00	0,00	549.600,00	549.600,00
759	ROTUA ULIWATI	2023	2023-07-10	3271234020000207	302.088,00	30	0,00	0,00	0,00	302.088,00	302.088,00	0,00	0,00	0,00	302.088,00	302.088,00

No	Subjek Nama	Tahun	Tgl SKRD	Kode Bayar	Putang	Penyisihan Putang										
					Sakdo Akhir2025	Tunggakan	Kriteria Putang					Penyisihan Putang Tidak Tertagih				
							Lancar (0 sd 1 Bulan)	Kurang Lancar (1 sd 3 Bulan)	Diragukan (3 sd 12 Bulan)	Macet (Lebih dari 12 Bulan)	Jumhh	Kualitas Lancar (0,5 %)	Kualitas Kurang Lancar (10 %)	Kualitas Diragukan (50 %)	Kualitas Macet (100 %)	Jumlah
760	FATIMAH	2024	2024-01-23	3271244020000017	1.406.976,00	24	0,00	0,00	0,00	1.406.976,00	1.406.976,00	0,00	0,00	0,00	1.406.976,00	1.406.976,00
761	Fatimah	2024	2024-08-13	3271244020000427	1.406.976,00	17	0,00	0,00	0,00	1.406.976,00	1.406.976,00	0,00	0,00	0,00	1.406.976,00	1.406.976,00
762	FATIMAH	2021	2021-12-02	3271214020001169	273.600,00	49	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00
763	FATIMAH	2018	2018-07-09	20184020100176	273.600,00	90	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00
764	FATIMAH	2021	2021-09-21	2021402010001020	273.600,00	52	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00
765	FATIMAH	2021	2021-01-06	20214020100149	273.600,00	60	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00
766	FATIMAH	2021	2021-01-06	20214020100150	273.600,00	60	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00
767	FATIMAH	2023	2023-07-10	3271234020000151	589.440,00	30	0,00	0,00	0,00	589.440,00	589.440,00	0,00	0,00	0,00	589.440,00	589.440,00
768	FATIMAH	2024	2024-01-23	3271244020000089	879.360,00	24	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00
769	Fatimah	2024	2024-08-13	3271244020000499	879.360,00	17	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00
770	F.V.Parlan	2024	2024-08-13	3271244020000500	879.360,00	17	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00
771	Roside Gulhom	2023	2023-12-04	3271234020000808	1.154.880,00	25	0,00	0,00	0,00	1.154.880,00	1.154.880,00	0,00	0,00	0,00	1.154.880,00	1.154.880,00
772	TIJONG KIMNIO	2018	2018-07-09	20184020100144	273.600,00	90	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00
773	Tjong Kim Nio	2024	2024-08-13	3271244020000468	879.360,00	17	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00
774	ASTRIED AZRA	2024	2024-01-23	3271244020000020	978.288,00	24	0,00	0,00	0,00	978.288,00	978.288,00	0,00	0,00	0,00	978.288,00	978.288,00
775	Astried Azra	2024	2024-08-13	3271244020000430	978.288,00	17	0,00	0,00	0,00	978.288,00	978.288,00	0,00	0,00	0,00	978.288,00	978.288,00
776	GOUW KWI SAN/TIJONG LIAN NIO	2018	2018-07-09	20184020100142	307.800,00	90	0,00	0,00	0,00	307.800,00	307.800,00	0,00	0,00	0,00	307.800,00	307.800,00
777	ARAH	2021	2021-12-30	3271214020001444	273.600,00	49	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00
778	ARAH	2018	2018-07-09	20184020100254	273.600,00	90	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00
779	ARAH	2021	2021-01-07	20214020100275	273.600,00	60	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00
780	ARAH	2021	2021-01-07	20214020100276	273.600,00	60	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00
781	ARAH	2024	2024-01-23	3271244020000180	879.360,00	24	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00
782	Arah	2024	2024-08-13	3271244020000590	879.360,00	17	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00
783	MINAH	2021	2021-12-02	3271214020001102	437.760,00	49	0,00	0,00	0,00	437.760,00	437.760,00	0,00	0,00	0,00	437.760,00	437.760,00
784	MINAH	2021	2021-09-21	2021402010000775	437.760,00	52	0,00	0,00	0,00	437.760,00	437.760,00	0,00	0,00	0,00	437.760,00	437.760,00
785	MINAH	2021	2021-01-05	202140201000022	437.760,00	60	0,00	0,00	0,00	437.760,00	437.760,00	0,00	0,00	0,00	437.760,00	437.760,00
786	MINAH	2021	2021-01-05	202140201000023	437.760,00	60	0,00	0,00	0,00	437.760,00	437.760,00	0,00	0,00	0,00	437.760,00	437.760,00
787	MINAH	2023	2023-07-10	3271234020000184	943.104,00	30	0,00	0,00	0,00	943.104,00	943.104,00	0,00	0,00	0,00	943.104,00	943.104,00
788	TIJONG ELLY	2023	2023-07-10	3271234020000232	589.440,00	30	0,00	0,00	0,00	589.440,00	589.440,00	0,00	0,00	0,00	589.440,00	589.440,00
789	ANITA SUSANTI ZAKARIA.BUDI DHARMA	2021	2021-01-01	3271214020001504	352.260,00	60	0,00	0,00	0,00	352.260,00	352.260,00	0,00	0,00	0,00	352.260,00	352.260,00
790	ANITA SUSANTI ZAKARIA.BUDI DHARMA	2021	2021-01-01	3271214020001505	352.260,00	60	0,00	0,00	0,00	352.260,00	352.260,00	0,00	0,00	0,00	352.260,00	352.260,00
791	ANITA SUSANTI ZAKARIA.BUDI DHARMA	2018	2018-07-09	20184020100319	352.260,00	90	0,00	0,00	0,00	352.260,00	352.260,00	0,00	0,00	0,00	352.260,00	352.260,00
792	ANITA SUSANTI ZAKARIA.BUDI DHARMA	2018	2018-07-09	20184020100320	352.260,00	90	0,00	0,00	0,00	352.260,00	352.260,00	0,00	0,00	0,00	352.260,00	352.260,00
793	ANITA SUSANTI ZAKARIA	2023	2023-07-10	3271234020000248	758.904,00	30	0,00	0,00	0,00	758.904,00	758.904,00	0,00	0,00	0,00	758.904,00	758.904,00

No	Subjek Nama	Tahun	Tgl SKRD	Kode Bayar	Pinang	Penyisihan Pinang										
					Sakdo Akhir2025	Tunggakan	Kriteria Pinang					Penyisihan Pinang Tidak Tertagih				
							Lancar (0 sd 1 Bulan)	Kurang Lancar (1 sd 3 Bulan)	Diragukan (3 sd 12 Bulan)	Macet (Lebih dari 12 Bulan)	Jumhh	Kualitas Lancar(0,5 %)	Kualitas Kurang Lancar (10 %)	Kualitas Diragukan (50 %)	Kualitas Macet (100 %)	Jumlah
794	ANITA SUSANTI ZAKARIA	2023	2023-07-10	3271234020000249	758.904,00	30	0,00	0,00	0,00	758.904,00	758.904,00	0,00	0,00	0,00	758.904,00	758.904,00
795	ANITA SUSANTI ZAKARIA	2024	2024-01-23	3271244020000007	1.132.176,00	24	0,00	0,00	0,00	1.132.176,00	1.132.176,00	0,00	0,00	0,00	1.132.176,00	1.132.176,00
796	ANITA SUSANTI ZAKARIA	2024	2024-01-23	3271244020000008	1.132.176,00	24	0,00	0,00	0,00	1.132.176,00	1.132.176,00	0,00	0,00	0,00	1.132.176,00	1.132.176,00
797	Anita Susanti Zakaria	2024	2024-08-13	3271244020000417	1.132.176,00	17	0,00	0,00	0,00	1.132.176,00	1.132.176,00	0,00	0,00	0,00	1.132.176,00	1.132.176,00
798	Anita Susanti Zakaria	2024	2024-08-13	3271244020000418	1.132.176,00	17	0,00	0,00	0,00	1.132.176,00	1.132.176,00	0,00	0,00	0,00	1.132.176,00	1.132.176,00
799	SURYANAH	2021	2021-12-02	3271214020001214	348.840,00	49	0,00	0,00	0,00	348.840,00	348.840,00	0,00	0,00	0,00	348.840,00	348.840,00
800	SURYANAH	2021	2021-01-01	3271214020001527	348.840,00	60	0,00	0,00	0,00	348.840,00	348.840,00	0,00	0,00	0,00	348.840,00	348.840,00
801	SURYANAH	2023	2023-07-10	3271234020000228	751.536,00	30	0,00	0,00	0,00	751.536,00	751.536,00	0,00	0,00	0,00	751.536,00	751.536,00
802	SURYANAH	2024	2024-01-23	3271244020000146	1.121.184,00	24	0,00	0,00	0,00	1.121.184,00	1.121.184,00	0,00	0,00	0,00	1.121.184,00	1.121.184,00
803	Suryanah	2024	2024-08-13	3271244020000556	1.121.184,00	17	0,00	0,00	0,00	1.121.184,00	1.121.184,00	0,00	0,00	0,00	1.121.184,00	1.121.184,00
804	SITI SUTARSIH	2021	2021-12-02	3271214020001136	386.460,00	49	0,00	0,00	0,00	386.460,00	386.460,00	0,00	0,00	0,00	386.460,00	386.460,00
805	SITI SUTARSIH	2021	2021-09-21	2021402010000930	386.460,00	52	0,00	0,00	0,00	386.460,00	386.460,00	0,00	0,00	0,00	386.460,00	386.460,00
806	SITI SUTARSIH	2021	2021-01-06	202140201000082	386.460,00	60	0,00	0,00	0,00	386.460,00	386.460,00	0,00	0,00	0,00	386.460,00	386.460,00
807	SITI SUTARSIH	2021	2021-01-06	202140201000083	386.460,00	60	0,00	0,00	0,00	386.460,00	386.460,00	0,00	0,00	0,00	386.460,00	386.460,00
808	SITI SUTARSIH	2023	2023-07-10	3271234020000212	832.584,00	30	0,00	0,00	0,00	832.584,00	832.584,00	0,00	0,00	0,00	832.584,00	832.584,00
809	SITI SUTARSIH	2024	2024-01-23	3271244020000054	1.242.096,00	24	0,00	0,00	0,00	1.242.096,00	1.242.096,00	0,00	0,00	0,00	1.242.096,00	1.242.096,00
810	Siti Sutarsi	2024	2024-08-13	3271244020000464	1.242.096,00	17	0,00	0,00	0,00	1.242.096,00	1.242.096,00	0,00	0,00	0,00	1.242.096,00	1.242.096,00
811	MULYAWATI	2021	2021-12-02	3271214020001122	273.600,00	49	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00
812	MULYAWATI	2021	2021-09-21	2021402010000867	273.600,00	52	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00
813	MULYAWATI	2021	2021-01-06	202140201000056	273.600,00	60	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00
814	MULYAWATI	2021	2021-01-06	202140201000057	273.600,00	60	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00
815	MULYAWATI	2024	2024-01-23	3271244020000040	879.360,00	24	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00
816	Mulyawati	2024	2024-08-13	3271244020000450	879.360,00	17	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00
817	EFA NOFIANTI	2021	2021-12-02	3271214020001121	143.640,00	49	0,00	0,00	0,00	143.640,00	143.640,00	0,00	0,00	0,00	143.640,00	143.640,00
818	EFA NOFIANTI	2021	2021-01-01	3271214020001511	143.640,00	60	0,00	0,00	0,00	143.640,00	143.640,00	0,00	0,00	0,00	143.640,00	143.640,00
819	EFA NOFIANTI	2021	2021-01-01	3271214020001551	718.200,00	60	0,00	0,00	0,00	718.200,00	718.200,00	0,00	0,00	0,00	718.200,00	718.200,00
820	EKA NOFIANTI	2018	2018-07-09	20184020100124	143.640,00	90	0,00	0,00	0,00	143.640,00	143.640,00	0,00	0,00	0,00	143.640,00	143.640,00
821	EKA NOFIANTI	2018	2018-07-09	20184020100125	143.640,00	90	0,00	0,00	0,00	143.640,00	143.640,00	0,00	0,00	0,00	143.640,00	143.640,00
822	EKA NOFIANTI	2021	2021-01-06	202140201000054	143.640,00	60	0,00	0,00	0,00	143.640,00	143.640,00	0,00	0,00	0,00	143.640,00	143.640,00
823	EFA NOFIANTI	2024	2024-01-23	3271244020000038	461.664,00	24	0,00	0,00	0,00	461.664,00	461.664,00	0,00	0,00	0,00	461.664,00	461.664,00
824	EFA NOFIANTI	2024	2024-01-23	3271244020000039	461.664,00	24	0,00	0,00	0,00	461.664,00	461.664,00	0,00	0,00	0,00	461.664,00	461.664,00
825	Efa Nofianti	2024	2024-08-13	3271244020000448	461.664,00	17	0,00	0,00	0,00	461.664,00	461.664,00	0,00	0,00	0,00	461.664,00	461.664,00
826	Efa Nofianti	2024	2024-08-13	3271244020000449	461.664,00	17	0,00	0,00	0,00	461.664,00	461.664,00	0,00	0,00	0,00	461.664,00	461.664,00
827	PADMASARI PENNY	2024	2024-01-23	3271244020000083	1.703.760,00	24	0,00	0,00	0,00	1.703.760,00	1.703.760,00	0,00	0,00	0,00	1.703.760,00	1.703.760,00
828	LENNY HENDRIANI HS.	2024	2024-01-23	3271244020000047	879.360,00	24	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00

No	Subjek Nama	Tahun	Tgl SKRD	Kode Bayar	Putang	Penyisihan Putang										
					Sakdo Akhir2025	Tunggakan	Kriteria Putang					Penyisihan Putang Tidak Tertagih				
							Lancar (0 sd 1 Bulan)	Kurang Lancar (1 sd 3 Bulan)	Diragukan (3 sd 12 Bulan)	Macet (Lebih dari 12 Bulan)	Jumhh	Kualitas Lancar(0,5 %)	Kualitas Kurang Lancar (10 %)	Kualitas Diragukan (50 %)	Kualitas Macet (100 %)	Jumlah
829	AAS	2021	2021-12-02	3271214020001246	273.600,00	49	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00
830	AAS	2021	2021-01-07	20214020100303	273.600,00	60	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00
831	AAS	2021	2021-01-07	20214020100305	273.600,00	60	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00
832	AAS	2023	2023-07-10	3271234020000123	589.440,00	30	0,00	0,00	0,00	589.440,00	589.440,00	0,00	0,00	0,00	589.440,00	589.440,00
833	AAS	2024	2024-01-23	3271244020000187	879.360,00	24	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00
834	Aas	2024	2024-08-13	3271244020000597	879.360,00	17	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00
835	MEY SUN	2021	2021-12-02	3271214020001258	273.600,00	49	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00
836	MEY SUN	2018	2018-07-09	20184020100277	273.600,00	90	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00
837	MEY SUN	2021	2021-09-21	2021402010000893	273.600,00	52	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00
838	MEY SUN	2021	2021-01-07	20214020100343	273.600,00	60	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00
839	MEY SUN	2021	2021-01-07	20214020100344	273.600,00	60	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00
840	MEY SUN	2023	2023-07-10	3271234020000183	589.440,00	30	0,00	0,00	0,00	589.440,00	589.440,00	0,00	0,00	0,00	589.440,00	589.440,00
841	MEY SUN	2024	2024-01-23	3271244020000200	879.360,00	24	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00
842	Mey Sun	2024	2024-08-13	3271244020000610	879.360,00	17	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00
843	SRI MULYATI	2021	2021-12-02	3271214020001094	383.040,00	49	0,00	0,00	0,00	383.040,00	383.040,00	0,00	0,00	0,00	383.040,00	383.040,00
844	SRI MULYATI	2018	2018-07-09	20184020100099	383.040,00	90	0,00	0,00	0,00	383.040,00	383.040,00	0,00	0,00	0,00	383.040,00	383.040,00
845	SRI MULYATI	2021	2021-09-21	2021402010000742	383.040,00	52	0,00	0,00	0,00	383.040,00	383.040,00	0,00	0,00	0,00	383.040,00	383.040,00
846	SRI MULYATI	2024	2024-01-23	3271244020000009	1.231.104,00	24	0,00	0,00	0,00	1.231.104,00	1.231.104,00	0,00	0,00	0,00	1.231.104,00	1.231.104,00
847	SriMulyati	2024	2024-08-13	3271244020000419	1.231.104,00	17	0,00	0,00	0,00	1.231.104,00	1.231.104,00	0,00	0,00	0,00	1.231.104,00	1.231.104,00
848	YOHANA	2021	2021-12-02	3271214020001151	249.660,00	49	0,00	0,00	0,00	249.660,00	249.660,00	0,00	0,00	0,00	249.660,00	249.660,00
849	YOHANA	2018	2018-07-09	20184020100155	249.660,00	90	0,00	0,00	0,00	249.660,00	249.660,00	0,00	0,00	0,00	249.660,00	249.660,00
850	YOHANA	2021	2021-09-21	2021402010000974	249.660,00	52	0,00	0,00	0,00	249.660,00	249.660,00	0,00	0,00	0,00	249.660,00	249.660,00
851	YOHANA	2021	2021-01-06	20214020100111	249.660,00	60	0,00	0,00	0,00	249.660,00	249.660,00	0,00	0,00	0,00	249.660,00	249.660,00
852	YOHANA	2021	2021-01-06	20214020100112	249.660,00	60	0,00	0,00	0,00	249.660,00	249.660,00	0,00	0,00	0,00	249.660,00	249.660,00
853	YOHANA	2023	2023-07-10	3271234020000244	537.864,00	30	0,00	0,00	0,00	537.864,00	537.864,00	0,00	0,00	0,00	537.864,00	537.864,00
854	YOHANA	2024	2024-01-23	3271244020000069	802.416,00	24	0,00	0,00	0,00	802.416,00	802.416,00	0,00	0,00	0,00	802.416,00	802.416,00
855	Yohana	2024	2024-08-13	3271244020000479	802.416,00	17	0,00	0,00	0,00	802.416,00	802.416,00	0,00	0,00	0,00	802.416,00	802.416,00
856	SUMIJATI	2018	2018-07-09	20184020100237	287.280,00	90	0,00	0,00	0,00	287.280,00	287.280,00	0,00	0,00	0,00	287.280,00	287.280,00
857	CECEP HIDAYATLALA NURLAELA	2021	2021-12-02	3271214020001196	434.340,00	49	0,00	0,00	0,00	434.340,00	434.340,00	0,00	0,00	0,00	434.340,00	434.340,00
858	CECEP HIDAYATLALA NURLAELA	2021	2021-09-21	2021402010000766	434.340,00	52	0,00	0,00	0,00	434.340,00	434.340,00	0,00	0,00	0,00	434.340,00	434.340,00
859	CECEP HIDAYATLALA NURLAELA	2021	2021-01-07	20214020100174	434.340,00	60	0,00	0,00	0,00	434.340,00	434.340,00	0,00	0,00	0,00	434.340,00	434.340,00
860	SHANTI KAMELIA	2021	2021-12-02	3271214020001187	273.600,00	49	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00
861	SHANTI KAMELIA	2018	2018-07-09	20184020100196	273.600,00	90	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00
862	SHANTI KAMELIA	2021	2021-09-21	2021402010000729	273.600,00	52	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00

No	Subjek Nama	Tahun	Tgl SKRD	Kode Bayar	Pinang	Penyisihan Pinang										
					Saldo Akhir 2025	Tunggakan	Kriteria Pinang					Penyisihan Pinang Tidak Tertagih				
							Lancar (0 sd 1 Bulan)	Kurang Lancar(1 sd 3 Bulan)	Diragukan (3 sd 12 Bulan)	Macet (Lebih dari 12 Bulan)	Jumlah	Kualitas Lancar (0,5 %)	Kualitas Kurang Lancar (10 %)	Kualitas Diragukan (50 %)	Kualitas Macet (100 %)	Jumlah
863	SHANTI KAMELIA	2021	2021-01-07	20214020100210	273.600,00	60	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00
864	SHANTI KAMELIA	2021	2021-01-07	20214020100211	273.600,00	60	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00
865	SANTI KAMELIA	2023	2023-07-10	3271234020000209	589.440,00	30	0,00	0,00	0,00	589.440,00	589.440,00	0,00	0,00	0,00	589.440,00	589.440,00
866	SANTI KAMELIA	2024	2024-01-23	3271244020000110	879.360,00	24	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00
867	Santi Kamelin	2024	2024-08-13	3271244020000520	879.360,00	17	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00
868	TATI KUSWATI	2024	2024-01-23	3271244020000021	483.648,00	24	0,00	0,00	0,00	483.648,00	483.648,00	0,00	0,00	0,00	483.648,00	483.648,00
869	Tati Kuswati	2024	2024-08-13	3271244020000431	483.648,00	17	0,00	0,00	0,00	483.648,00	483.648,00	0,00	0,00	0,00	483.648,00	483.648,00
870	SITI MUNIGAR	2024	2024-01-23	3271244020000035	439.680,00	24	0,00	0,00	0,00	439.680,00	439.680,00	0,00	0,00	0,00	439.680,00	439.680,00
871	Siti Munigar	2024	2024-08-13	3271244020000445	439.680,00	17	0,00	0,00	0,00	439.680,00	439.680,00	0,00	0,00	0,00	439.680,00	439.680,00
872	CUCUN SUSANTI	2021	2021-12-02	3271214020001160	273.600,00	49	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00
873	CUCUN SUSANTI	2018	2018-07-09	20184020100165	273.600,00	90	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00
874	CUCUN SUSANTI	2023	2023-07-10	32712340200000137	589.440,00	30	0,00	0,00	0,00	589.440,00	589.440,00	0,00	0,00	0,00	589.440,00	589.440,00
875	CUCUN SUSANTI	2024	2024-01-23	3271244020000078	879.360,00	24	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00
876	Cucun Susanti	2024	2024-08-13	3271244020000488	879.360,00	17	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00
877	Selly Sardiani	2025	2025-01-23	3271254020000004	1.822.500,00	12	0,00	0,00	1.822.500,00	0,00	1.822.500,00	0,00	0,00	911.250,00	0,00	911.250,00
878	SRI HARTATI	2021	2021-12-02	3271214020001238	246.240,00	49	0,00	0,00	0,00	246.240,00	246.240,00	0,00	0,00	0,00	246.240,00	246.240,00
879	SRI HARTATI	2023	2023-07-10	32712340200000215	530.496,00	30	0,00	0,00	0,00	530.496,00	530.496,00	0,00	0,00	0,00	530.496,00	530.496,00
880	SRI HARTATI	2024	2024-01-23	3271244020000176	791.424,00	24	0,00	0,00	0,00	791.424,00	791.424,00	0,00	0,00	0,00	791.424,00	791.424,00
881	Sri Hartati	2024	2024-08-13	3271244020000586	791.424,00	17	0,00	0,00	0,00	791.424,00	791.424,00	0,00	0,00	0,00	791.424,00	791.424,00
882	TATI HERAWATI	2024	2024-01-23	3271244020000036	439.680,00	24	0,00	0,00	0,00	439.680,00	439.680,00	0,00	0,00	0,00	439.680,00	439.680,00
883	Tati Herawati	2024	2024-08-13	3271244020000446	439.680,00	17	0,00	0,00	0,00	439.680,00	439.680,00	0,00	0,00	0,00	439.680,00	439.680,00
884	Yani Mulyani	2024	2024-08-13	3271244020000434	879.360,00	17	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00
885	ERIKA, SE	2021	2021-12-02	3271214020001193	448.020,00	49	0,00	0,00	0,00	448.020,00	448.020,00	0,00	0,00	0,00	448.020,00	448.020,00
886	ERIKA, SE	2023	2023-07-10	32712340200000252	965.208,00	30	0,00	0,00	0,00	965.208,00	965.208,00	0,00	0,00	0,00	965.208,00	965.208,00
887	ERIKA, SE	2024	2024-01-23	3271244020000141	2.110.464,00	24	0,00	0,00	0,00	2.110.464,00	2.110.464,00	0,00	0,00	0,00	2.110.464,00	2.110.464,00
888	Imas Pupah	2023	2023-12-04	32712340200000828	1.905.552,00	25	0,00	0,00	0,00	1.905.552,00	1.905.552,00	0,00	0,00	0,00	1.905.552,00	1.905.552,00
889	NANI MARYANI	2018	2018-07-09	20184020100158	273.600,00	90	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00
890	NANI MARYANI	2024	2024-01-23	3271244020000071	879.360,00	24	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00
891	Nani Maryani	2024	2024-08-13	3271244020000481	879.360,00	17	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00
892	EHA JULAEHA	2024	2024-01-23	3271244020000073	439.680,00	24	0,00	0,00	0,00	439.680,00	439.680,00	0,00	0,00	0,00	439.680,00	439.680,00
893	Eha Julaha	2024	2024-08-13	3271244020000483	439.680,00	17	0,00	0,00	0,00	439.680,00	439.680,00	0,00	0,00	0,00	439.680,00	439.680,00
894	SUKMAWATI, Dra	2024	2024-01-23	3271244020000151	879.360,00	24	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00
895	Sukmawati, Dra	2024	2024-08-13	3271244020000561	879.360,00	17	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00
896	NOVIE EKA PERMATA SARI	2021	2021-12-02	32712140200001135	376.200,00	49	0,00	0,00	0,00	376.200,00	376.200,00	0,00	0,00	0,00	376.200,00	376.200,00
897	Novie Eka Permata Sari	2024	2024-08-13	3271244020000463	1.209.120,00	17	0,00	0,00	0,00	1.209.120,00	1.209.120,00	0,00	0,00	0,00	1.209.120,00	1.209.120,00

No	Subjek Nama	Tahun	Tgl SKRD	Kode Bayar	Pinang	Penyisihan Pinang										
					Sakdo Akhir2025	Tunggakan	Kriteria Pinang					Penyisihan Pinang Tidak Tertagih				
							Lancar (0 sd 1 Bulan)	Kurang Lancar (1 sd 3 Bulan)	Diragukan (3 sd 12 Bulan)	Macet (Lebih dari 12 Bulan)	Jumhh	Kualitas Lancar (0,5 %)	Kualitas Kurang Lancar (10 %)	Kualitas Diragukan (50 %)	Kualitas Macet (100 %)	Jumlah
898	SriRahayu Kurnia	2024	2024-02-20	3271244020000362	1.880.424,00	23	0,00	0,00	0,00	1.880.424,00	1.880.424,00	0,00	0,00	0,00	1.880.424,00	1.880.424,00
899	SriRahayu Kurnia	2024	2024-02-20	3271244020000365	1.694.448,00	23	0,00	0,00	0,00	1.694.448,00	1.694.448,00	0,00	0,00	0,00	1.694.448,00	1.694.448,00
900	SUMNARTI	2024	2024-01-23	3271244020000215	890.352,00	24	0,00	0,00	0,00	890.352,00	890.352,00	0,00	0,00	0,00	890.352,00	890.352,00
901	Suminarti	2024	2024-08-13	3271244020000625	890.352,00	17	0,00	0,00	0,00	890.352,00	890.352,00	0,00	0,00	0,00	890.352,00	890.352,00
902	ROSTINIRIDWAN	2021	2021-12-02	3271214020001156	273.600,00	49	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00
903	ROSTINIRIDWAN	2018	2018-07-09	20184020100161	273.600,00	90	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00
904	ROSTINIRIDWAN	2021	2021-09-21	2021402010000985	273.600,00	52	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00
905	ROSTINIRIDWAN	2021	2021-01-06	20214020100121	273.600,00	60	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00
906	ROSTINIRIDWAN	2021	2021-01-06	20214020100122	273.600,00	60	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00
907	ROSTINI/ RIDWAN	2023	2023-07-10	3271234020000206	589.440,00	30	0,00	0,00	0,00	589.440,00	589.440,00	0,00	0,00	0,00	589.440,00	589.440,00
908	ROSTINI/ RIDWAN	2024	2024-01-23	3271244020000074	879.360,00	24	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00
909	Ridwan	2024	2024-08-13	3271244020000484	879.360,00	17	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00
910	Restu Damaryanti	2023	2023-12-04	3271234020000840	1.818.936,00	25	0,00	0,00	0,00	1.818.936,00	1.818.936,00	0,00	0,00	0,00	1.818.936,00	1.818.936,00
911	YANI NURHAYANI	2021	2021-12-02	3271214020001191	205.200,00	49	0,00	0,00	0,00	205.200,00	205.200,00	0,00	0,00	0,00	205.200,00	205.200,00
912	YANI NURHAYANI	2021	2021-01-01	3271214020001546	205.200,00	60	0,00	0,00	0,00	205.200,00	205.200,00	0,00	0,00	0,00	205.200,00	205.200,00
913	YANI NURHAYANI	2018	2018-07-09	20184020100200	205.200,00	90	0,00	0,00	0,00	205.200,00	205.200,00	0,00	0,00	0,00	205.200,00	205.200,00
914	YANI NURHAYANI	2021	2021-01-07	20214020100229	205.200,00	60	0,00	0,00	0,00	205.200,00	205.200,00	0,00	0,00	0,00	205.200,00	205.200,00
915	YANI NURHAYANI	2021	2021-01-07	20214020100230	205.200,00	60	0,00	0,00	0,00	205.200,00	205.200,00	0,00	0,00	0,00	205.200,00	205.200,00
916	Mu ly ati	2023	2023-12-04	3271234020000848	1.097.136,00	25	0,00	0,00	0,00	1.097.136,00	1.097.136,00	0,00	0,00	0,00	1.097.136,00	1.097.136,00
917	YANI NURHAYANI	2023	2023-07-10	3271234020000243	442.080,00	30	0,00	0,00	0,00	442.080,00	442.080,00	0,00	0,00	0,00	442.080,00	442.080,00
918	YANI NURHAYANI	2024	2024-01-23	3271244020000114	659.520,00	24	0,00	0,00	0,00	659.520,00	659.520,00	0,00	0,00	0,00	659.520,00	659.520,00
919	YaniNurhayani	2024	2024-08-13	3271244020000524	659.520,00	17	0,00	0,00	0,00	659.520,00	659.520,00	0,00	0,00	0,00	659.520,00	659.520,00
920	Imakulata Sri Maryati	2024	2024-08-13	3271244020000563	1.242.096,00	17	0,00	0,00	0,00	1.242.096,00	1.242.096,00	0,00	0,00	0,00	1.242.096,00	1.242.096,00
921	OEY LAK NIO	2021	2021-12-02	3271214020001263	273.600,00	49	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00
922	OEY LAK NIO	2021	2021-01-07	20214020100364	273.600,00	60	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00
923	OEY LAK NIO	2023	2023-07-10	3271234020000199	589.440,00	30	0,00	0,00	0,00	589.440,00	589.440,00	0,00	0,00	0,00	589.440,00	589.440,00
924	OEY LAK NIO	2024	2024-01-23	3271244020000205	879.360,00	24	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00
925	Oey Lak Nio	2024	2024-08-13	3271244020000615	879.360,00	17	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00
926	NINA MARTINI	2021	2021-12-02	3271214020001202	88.920,00	49	0,00	0,00	0,00	88.920,00	88.920,00	0,00	0,00	0,00	88.920,00	88.920,00
927	NINA MARTINI	2024	2024-01-23	3271244020000133	285.792,00	24	0,00	0,00	0,00	285.792,00	285.792,00	0,00	0,00	0,00	285.792,00	285.792,00
928	Nina Martini	2024	2024-08-13	3271244020000543	285.792,00	17	0,00	0,00	0,00	285.792,00	285.792,00	0,00	0,00	0,00	285.792,00	285.792,00
929	NENAH	2021	2021-12-02	3271214020001236	300.960,00	49	0,00	0,00	0,00	300.960,00	300.960,00	0,00	0,00	0,00	300.960,00	300.960,00
930	NENAH	2018	2018-07-09	20184020100248	300.960,00	90	0,00	0,00	0,00	300.960,00	300.960,00	0,00	0,00	0,00	300.960,00	300.960,00
931	NENAH	2021	2021-01-07	20214020100253	300.960,00	60	0,00	0,00	0,00	300.960,00	300.960,00	0,00	0,00	0,00	300.960,00	300.960,00
932	NENAH	2021	2021-01-07	20214020100257	300.960,00	60	0,00	0,00	0,00	300.960,00	300.960,00	0,00	0,00	0,00	300.960,00	300.960,00

No	Subjek Nama	Tahun	Tgl SKRD	Kode Bayar	Pinang	Penyisihan Pinang										
					Sakdo Akhir2025	Tunggakan	Kriteria Pinang					Penyisihan Pinang Tidak Tertagih				
							Lancar (0 sd 1 Bulan)	Kurang Lancar (1 sd 3 Bulan)	Diragukan (3 sd 12 Bulan)	Macet (Lebih dari 12 Bulan)	Jumhh	Kualitas Lancar (0,5 %)	Kualitas Kurang Lancar (10 %)	Kualitas Diragukan (50 %)	Kualitas Macet (100 %)	Jumlah
933	NENAH	2023	2023-07-10	3271234020000191	648.384,00	30	0,00	0,00	0,00	648.384,00	648.384,00	0,00	0,00	0,00	648.384,00	648.384,00
934	NENAH	2024	2024-01-23	3271244020000174	967.296,00	24	0,00	0,00	0,00	967.296,00	967.296,00	0,00	0,00	0,00	967.296,00	967.296,00
935	Nenah	2024	2024-08-13	3271244020000584	967.296,00	17	0,00	0,00	0,00	967.296,00	967.296,00	0,00	0,00	0,00	967.296,00	967.296,00
936	Rosita	2024	2024-08-13	3271244020000496	879.360,00	17	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00
937	AMINAH	2024	2024-01-23	3271244020000130	1.341.024,00	24	0,00	0,00	0,00	1.341.024,00	1.341.024,00	0,00	0,00	0,00	1.341.024,00	1.341.024,00
938	ABRAHAMTALLA/ANA JULIANA	2021	2021-12-02	3271214020001149	273.600,00	49	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00
939	ABRAHAMTALLA/ANA JULIANA	2018	2018-07-09	20184020100154	273.600,00	90	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00
940	ABRAHAMTALLA	2023	2023-07-10	3271234020000124	589.440,00	30	0,00	0,00	0,00	589.440,00	589.440,00	0,00	0,00	0,00	589.440,00	589.440,00
941	ANA JULIANA TALLA	2024	2024-01-23	3271244020000067	879.360,00	24	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00
942	Ana Juliana Talla	2024	2024-08-13	3271244020000477	879.360,00	17	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00
943	NURLELA	2021	2021-12-02	3271214020001180	485.640,00	49	0,00	0,00	0,00	485.640,00	485.640,00	0,00	0,00	0,00	485.640,00	485.640,00
944	NURLELA	2021	2021-09-21	2021402010001054	485.640,00	52	0,00	0,00	0,00	485.640,00	485.640,00	0,00	0,00	0,00	485.640,00	485.640,00
945	NURLELA	2024	2024-01-23	3271244020000103	1.560.864,00	24	0,00	0,00	0,00	1.560.864,00	1.560.864,00	0,00	0,00	0,00	1.560.864,00	1.560.864,00
946	Nurlela	2024	2024-08-13	3271244020000513	1.560.864,00	17	0,00	0,00	0,00	1.560.864,00	1.560.864,00	0,00	0,00	0,00	1.560.864,00	1.560.864,00
947	MELIYANA	2024	2024-01-23	3271244020000123	1.395.984,00	24	0,00	0,00	0,00	1.395.984,00	1.395.984,00	0,00	0,00	0,00	1.395.984,00	1.395.984,00
948	Melyana	2024	2024-08-13	3271244020000533	1.395.984,00	17	0,00	0,00	0,00	1.395.984,00	1.395.984,00	0,00	0,00	0,00	1.395.984,00	1.395.984,00
949	HERAWATI	2024	2024-01-23	3271244020000022	417.696,00	24	0,00	0,00	0,00	417.696,00	417.696,00	0,00	0,00	0,00	417.696,00	417.696,00
950	Herawati	2024	2024-08-13	3271244020000432	417.696,00	17	0,00	0,00	0,00	417.696,00	417.696,00	0,00	0,00	0,00	417.696,00	417.696,00
951	AISAH	2024	2024-01-23	3271244020000128	1.143.168,00	24	0,00	0,00	0,00	1.143.168,00	1.143.168,00	0,00	0,00	0,00	1.143.168,00	1.143.168,00
952	Aisah	2024	2024-08-13	3271244020000538	1.143.168,00	17	0,00	0,00	0,00	1.143.168,00	1.143.168,00	0,00	0,00	0,00	1.143.168,00	1.143.168,00
953	TJO KIMYAN	2021	2021-12-02	3271214020001251	290.700,00	49	0,00	0,00	0,00	290.700,00	290.700,00	0,00	0,00	0,00	290.700,00	290.700,00
954	TJO KIMYAN	2018	2018-07-09	20184020100270	290.700,00	90	0,00	0,00	0,00	290.700,00	290.700,00	0,00	0,00	0,00	290.700,00	290.700,00
955	TJO KIMYAN	2021	2021-09-21	2021402010000855	290.700,00	52	0,00	0,00	0,00	290.700,00	290.700,00	0,00	0,00	0,00	290.700,00	290.700,00
956	TJO KIMYAN	2021	2021-01-07	20214020100322	290.700,00	60	0,00	0,00	0,00	290.700,00	290.700,00	0,00	0,00	0,00	290.700,00	290.700,00
957	TJO KIMYAN	2023	2023-07-10	3271234020000233	626.280,00	30	0,00	0,00	0,00	626.280,00	626.280,00	0,00	0,00	0,00	626.280,00	626.280,00
958	TJO KIMYAN	2024	2024-01-23	3271244020000193	934.320,00	24	0,00	0,00	0,00	934.320,00	934.320,00	0,00	0,00	0,00	934.320,00	934.320,00
959	Tjo Kim Yan	2024	2024-08-13	3271244020000603	934.320,00	17	0,00	0,00	0,00	934.320,00	934.320,00	0,00	0,00	0,00	934.320,00	934.320,00
960	HARIADI BOGORIND	2024	2024-01-23	3271244020000055	1.099.200,00	24	0,00	0,00	0,00	1.099.200,00	1.099.200,00	0,00	0,00	0,00	1.099.200,00	1.099.200,00
961	Lilis Yulisawati	2024	2024-02-20	3271244020000272	2.417.688,00	23	0,00	0,00	0,00	2.417.688,00	2.417.688,00	0,00	0,00	0,00	2.417.688,00	2.417.688,00
962	DAIK	2021	2021-09-22	2021402010000814	978.288,00	52	0,00	0,00	0,00	978.288,00	978.288,00	0,00	0,00	0,00	978.288,00	978.288,00
963	DAIK	2023	2023-07-12	3271234020000278	1.224.996,00	30	0,00	0,00	0,00	1.224.996,00	1.224.996,00	0,00	0,00	0,00	1.224.996,00	1.224.996,00
964	Yusuf	2024	2024-02-20	3271244020000319	1.446.480,00	23	0,00	0,00	0,00	1.446.480,00	1.446.480,00	0,00	0,00	0,00	1.446.480,00	1.446.480,00
965	Yusuf	2021	2021-12-03	3271214020001351	769.440,00	49	0,00	0,00	0,00	769.440,00	769.440,00	0,00	0,00	0,00	769.440,00	769.440,00
966	YUSUF	2018	2018-11-26	20184020100521	769.440,00	86	0,00	0,00	0,00	769.440,00	769.440,00	0,00	0,00	0,00	769.440,00	769.440,00
967	Yusuf	2021	2021-09-22	2021402010000943	769.440,00	52	0,00	0,00	0,00	769.440,00	769.440,00	0,00	0,00	0,00	769.440,00	769.440,00

No	Subjek Nama	Tahun	Tgl SKRD	Kode Bayar	Pinang	Penyisihan Pinang										
					Sakdo Akhir2025	Tunggakan	Kriteria Pinang					Penyisihan Pinang Tidak Tertagih				
							Lancar (0 sd 1 Bulan)	Kurang Lancar (1 sd 3 Bulan)	Diragukan (3 sd 12 Bulan)	Macet (Lebih dari 12 Bulan)	Jumhh	Kualitas Lancar (0,5 %)	Kualitas Kurang Lancar (10 %)	Kualitas Diragukan (50 %)	Kualitas Macet (100 %)	Jumlah
968	Yusuf	2021	2021-02-01	20214020100563	769.440,00	59	0,00	0,00	0,00	769.440,00	769.440,00	0,00	0,00	0,00	769.440,00	769.440,00
969	Yusuf	2021	2021-02-01	20214020100564	769.440,00	59	0,00	0,00	0,00	769.440,00	769.440,00	0,00	0,00	0,00	769.440,00	769.440,00
970	ANNEODI GUNAWAN	2021	2021-12-02	3271214020001266	273.600,00	49	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00
971	ANNEODI GUNAWAN	2018	2018-07-09	20184020100284	273.600,00	90	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00
972	ANNEODI GUNAWAN	2021	2021-09-22	2021402010000935	273.600,00	52	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00
973	ANNEODI GUNAWAN	2021	2021-01-07	20214020100369	273.600,00	60	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00
974	ANNEODI GUNAWAN	2021	2021-01-07	20214020100370	273.600,00	60	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00
975	ANNE	2023	2023-07-10	3271234020000130	589.440,00	30	0,00	0,00	0,00	589.440,00	589.440,00	0,00	0,00	0,00	589.440,00	589.440,00
976	ANNE	2024	2024-01-23	3271244020000208	879.360,00	24	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00
977	Anne	2024	2024-08-13	3271244020000618	879.360,00	17	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00
978	BUDIMAN	2021	2021-09-22	2021402010001025	1.000.272,00	52	0,00	0,00	0,00	1.000.272,00	1.000.272,00	0,00	0,00	0,00	1.000.272,00	1.000.272,00
979	MUKRI	2023	2023-11-20	3271234020000745	1.262.040,00	26	0,00	0,00	0,00	1.262.040,00	1.262.040,00	0,00	0,00	0,00	1.262.040,00	1.262.040,00
980	Torang Simanjuntak	2024	2024-02-20	3271244020000358	971.208,00	23	0,00	0,00	0,00	971.208,00	971.208,00	0,00	0,00	0,00	971.208,00	971.208,00
981	TORANG SIMANJUNTAK	2021	2021-12-03	3271214020001384	516.624,00	49	0,00	0,00	0,00	516.624,00	516.624,00	0,00	0,00	0,00	516.624,00	516.624,00
982	TORANG SIMANJUNTAK	2021	2021-09-22	2021402010001008	516.624,00	52	0,00	0,00	0,00	516.624,00	516.624,00	0,00	0,00	0,00	516.624,00	516.624,00
983	TORANG SIMANJUNTAK	2021	2021-02-01	20214020100638	516.624,00	59	0,00	0,00	0,00	516.624,00	516.624,00	0,00	0,00	0,00	516.624,00	516.624,00
984	Guntari	2024	2024-02-20	3271244020000348	557.928,00	23	0,00	0,00	0,00	557.928,00	557.928,00	0,00	0,00	0,00	557.928,00	557.928,00
985	GUNTARI	2021	2021-12-03	3271214020001377	296.784,00	49	0,00	0,00	0,00	296.784,00	296.784,00	0,00	0,00	0,00	296.784,00	296.784,00
986	GUNTARI	2021	2021-09-22	2021402010001017	296.784,00	52	0,00	0,00	0,00	296.784,00	296.784,00	0,00	0,00	0,00	296.784,00	296.784,00
987	GUNTARI	2021	2021-02-01	20214020100620	296.784,00	59	0,00	0,00	0,00	296.784,00	296.784,00	0,00	0,00	0,00	296.784,00	296.784,00
988	GUNTARI	2023	2023-07-12	3271234020000288	371.628,00	30	0,00	0,00	0,00	371.628,00	371.628,00	0,00	0,00	0,00	371.628,00	371.628,00
989	Mijan	2024	2024-02-20	3271244020000343	1.053.864,00	23	0,00	0,00	0,00	1.053.864,00	1.053.864,00	0,00	0,00	0,00	1.053.864,00	1.053.864,00
990	Mijan	2024	2024-02-20	3271244020000353	929.880,00	23	0,00	0,00	0,00	929.880,00	929.880,00	0,00	0,00	0,00	929.880,00	929.880,00
991	MIJAN	2021	2021-12-03	3271214020001372	560.592,00	49	0,00	0,00	0,00	560.592,00	560.592,00	0,00	0,00	0,00	560.592,00	560.592,00
992	MIJAN	2021	2021-12-13	3271214020001404	494.640,00	49	0,00	0,00	0,00	494.640,00	494.640,00	0,00	0,00	0,00	494.640,00	494.640,00
993	MIJAN	2021	2021-10-04	2021402010001064	494.640,00	51	0,00	0,00	0,00	494.640,00	494.640,00	0,00	0,00	0,00	494.640,00	494.640,00
994	MIJAN	2021	2021-02-01	20214020100609	560.592,00	59	0,00	0,00	0,00	560.592,00	560.592,00	0,00	0,00	0,00	560.592,00	560.592,00
995	MIJAN	2021	2021-02-01	20214020100610	560.592,00	59	0,00	0,00	0,00	560.592,00	560.592,00	0,00	0,00	0,00	560.592,00	560.592,00
996	MIJAN	2021	2021-02-16	20214020100674	494.640,00	59	0,00	0,00	0,00	494.640,00	494.640,00	0,00	0,00	0,00	494.640,00	494.640,00
997	MIJAN	2021	2021-02-16	20214020100675	494.640,00	59	0,00	0,00	0,00	494.640,00	494.640,00	0,00	0,00	0,00	494.640,00	494.640,00
998	Carli Larosa	2024	2024-02-20	3271244020000244	1.136.520,00	23	0,00	0,00	0,00	1.136.520,00	1.136.520,00	0,00	0,00	0,00	1.136.520,00	1.136.520,00
999	CARITO	2021	2021-12-03	3271214020001289	604.560,00	49	0,00	0,00	0,00	604.560,00	604.560,00	0,00	0,00	0,00	604.560,00	604.560,00
1000	CARITO	2018	2018-11-26	20184020100454	604.560,00	86	0,00	0,00	0,00	604.560,00	604.560,00	0,00	0,00	0,00	604.560,00	604.560,00
1001	CARITO	2021	2021-01-29	20214020100428	604.560,00	60	0,00	0,00	0,00	604.560,00	604.560,00	0,00	0,00	0,00	604.560,00	604.560,00
1002	CARITO	2021	2021-01-29	20214020100429	604.560,00	60	0,00	0,00	0,00	604.560,00	604.560,00	0,00	0,00	0,00	604.560,00	604.560,00

No	Subjek Nama	Tahun	Tgl SKRD	Kode Bayar	Putang	Penyisihan Putang										
					Sakdo Akhir2025	Tunggakan	Kriteria Putang					Penyisihan Putang Tidak Tertagih				
							Lancar (0 sd 1 Bulan)	Kurang Lancar (1 sd 3 Bulan)	Diragukan (3 sd 12 Bulan)	Macet (Lebih dari 12 Bulan)	Jumhh	Kualitas Lancar (0,5 %)	Kualitas Kurang Lancar (10 %)	Kualitas Diragukan (50 %)	Kualitas Macet (100 %)	Jumlah
1003	Budi mto	2024	2024-02-20	3271244020000336	2.397.024,00	23	0,00	0,00	0,00	2.397.024,00	2.397.024,00	0,00	0,00	0,00	2.397.024,00	2.397.024,00
1004	BUDIYANTO	2021	2021-12-03	3271214020001365	1.879.632,00	49	0,00	0,00	0,00	1.879.632,00	1.879.632,00	0,00	0,00	0,00	1.879.632,00	1.879.632,00
1005	BUDIYANTO	2018	2018-11-26	20184020100539	1.879.632,00	86	0,00	0,00	0,00	1.879.632,00	1.879.632,00	0,00	0,00	0,00	1.879.632,00	1.879.632,00
1006	BUDIYANTO	2021	2021-09-22	2021402010000980	1.879.632,00	52	0,00	0,00	0,00	1.879.632,00	1.879.632,00	0,00	0,00	0,00	1.879.632,00	1.879.632,00
1007	BUDIYANTO	2021	2021-02-01	20214020100597	1.879.632,00	59	0,00	0,00	0,00	1.879.632,00	1.879.632,00	0,00	0,00	0,00	1.879.632,00	1.879.632,00
1008	BUDIYANTO	2021	2021-02-01	20214020100598	1.879.632,00	59	0,00	0,00	0,00	1.879.632,00	1.879.632,00	0,00	0,00	0,00	1.879.632,00	1.879.632,00
1009	Janan Rosyid	2024	2024-02-20	3271244020000368	640.584,00	23	0,00	0,00	0,00	640.584,00	640.584,00	0,00	0,00	0,00	640.584,00	640.584,00
1010	JANAN ROSYID	2021	2021-12-03	3271214020001393	340.752,00	49	0,00	0,00	0,00	340.752,00	340.752,00	0,00	0,00	0,00	340.752,00	340.752,00
1011	JANAN ROSYID	2018	2018-11-26	20184020100570	340.752,00	86	0,00	0,00	0,00	340.752,00	340.752,00	0,00	0,00	0,00	340.752,00	340.752,00
1012	JANAN ROSYID	2021	2021-09-22	2021402010001031	340.752,00	52	0,00	0,00	0,00	340.752,00	340.752,00	0,00	0,00	0,00	340.752,00	340.752,00
1013	JANAN ROSYID	2021	2021-02-01	20214020100655	340.752,00	59	0,00	0,00	0,00	340.752,00	340.752,00	0,00	0,00	0,00	340.752,00	340.752,00
1014	JANAN ROSYID	2021	2021-02-01	20214020100656	340.752,00	59	0,00	0,00	0,00	340.752,00	340.752,00	0,00	0,00	0,00	340.752,00	340.752,00
1015	RISA SAMUEL SUNATDI	2021	2021-12-03	3271214020001319	736.464,00	49	0,00	0,00	0,00	736.464,00	736.464,00	0,00	0,00	0,00	736.464,00	736.464,00
1016	RISA SAMUEL SUNATDI	2018	2018-11-26	20184020100485	736.464,00	86	0,00	0,00	0,00	736.464,00	736.464,00	0,00	0,00	0,00	736.464,00	736.464,00
1017	RISA SAMUEL SUNATDI	2021	2021-09-22	2021402010000826	736.464,00	52	0,00	0,00	0,00	736.464,00	736.464,00	0,00	0,00	0,00	736.464,00	736.464,00
1018	RISA SAMUEL SUNATDI	2021	2021-02-01	20214020100490	736.464,00	59	0,00	0,00	0,00	736.464,00	736.464,00	0,00	0,00	0,00	736.464,00	736.464,00
1019	RISA SAMUEL SUNATDI	2021	2021-02-01	20214020100491	736.464,00	59	0,00	0,00	0,00	736.464,00	736.464,00	0,00	0,00	0,00	736.464,00	736.464,00
1020	Adang	2024	2024-02-20	3271244020000345	991.872,00	23	0,00	0,00	0,00	991.872,00	991.872,00	0,00	0,00	0,00	991.872,00	991.872,00
1021	ADANG	2021	2021-12-03	3271214020001374	527.616,00	49	0,00	0,00	0,00	527.616,00	527.616,00	0,00	0,00	0,00	527.616,00	527.616,00
1022	ADANG	2021	2021-09-22	2021402010001000	527.616,00	52	0,00	0,00	0,00	527.616,00	527.616,00	0,00	0,00	0,00	527.616,00	527.616,00
1023	ADANG	2021	2021-02-01	20214020100613	527.616,00	59	0,00	0,00	0,00	527.616,00	527.616,00	0,00	0,00	0,00	527.616,00	527.616,00
1024	ADANG	2021	2021-02-01	20214020100614	527.616,00	59	0,00	0,00	0,00	527.616,00	527.616,00	0,00	0,00	0,00	527.616,00	527.616,00
1025	ADANG	2023	2023-07-12	3271234020000269	660.672,00	30	0,00	0,00	0,00	660.672,00	660.672,00	0,00	0,00	0,00	660.672,00	660.672,00
1026	ODANG SOBARI	2021	2021-12-03	3271214020001394	549.600,00	49	0,00	0,00	0,00	549.600,00	549.600,00	0,00	0,00	0,00	549.600,00	549.600,00
1027	ODANG SOBARI	2021	2021-12-03	3271214020001401	65.952,00	49	0,00	0,00	0,00	65.952,00	65.952,00	0,00	0,00	0,00	65.952,00	65.952,00
1028	Rasman	2024	2024-02-20	3271244020000361	1.384.488,00	23	0,00	0,00	0,00	1.384.488,00	1.384.488,00	0,00	0,00	0,00	1.384.488,00	1.384.488,00
1029	RASMAN	2021	2021-12-03	3271214020001386	736.464,00	49	0,00	0,00	0,00	736.464,00	736.464,00	0,00	0,00	0,00	736.464,00	736.464,00
1030	RASMAN	2018	2018-11-26	20184020100563	736.464,00	86	0,00	0,00	0,00	736.464,00	736.464,00	0,00	0,00	0,00	736.464,00	736.464,00
1031	RASMAN	2021	2021-09-22	2021402010001011	736.464,00	52	0,00	0,00	0,00	736.464,00	736.464,00	0,00	0,00	0,00	736.464,00	736.464,00
1032	RASMAN	2021	2021-02-01	20214020100643	736.464,00	59	0,00	0,00	0,00	736.464,00	736.464,00	0,00	0,00	0,00	736.464,00	736.464,00
1033	RASMAN	2021	2021-02-01	20214020100644	736.464,00	59	0,00	0,00	0,00	736.464,00	736.464,00	0,00	0,00	0,00	736.464,00	736.464,00
1034	RASMAN	2023	2023-07-12	3271234020000323	922.188,00	30	0,00	0,00	0,00	922.188,00	922.188,00	0,00	0,00	0,00	922.188,00	922.188,00
1035	Sudaman	2024	2024-02-20	3271244020000309	3.140.928,00	23	0,00	0,00	0,00	3.140.928,00	3.140.928,00	0,00	0,00	0,00	3.140.928,00	3.140.928,00
1036	SUDIAMAN	2021	2021-12-03	3271214020001344	1.670.784,00	49	0,00	0,00	0,00	1.670.784,00	1.670.784,00	0,00	0,00	0,00	1.670.784,00	1.670.784,00
1037	SUDIAMAN	2021	2021-02-01	20214020100545	1.670.784,00	59	0,00	0,00	0,00	1.670.784,00	1.670.784,00	0,00	0,00	0,00	1.670.784,00	1.670.784,00

No	Subjek Nama	Tahun	Tgl SKRD	Kode Bayar	Pinang	Penyisihan Pinang										
					Sakdo Akhir2025	Tunggakan	Kriteria Pinang					Penyisihan Pinang Tidak Tertagih				
							Lancar (0 sd 1 Bulan)	Kurang Lancar (1 sd 3 Bulan)	Diragukan (3 sd 12 Bulan)	Macet (Lebih dari 12 Bulan)	Jumhh	Kualitas Lancar (0,5 %)	Kualitas Kurang Lancar (10 %)	Kualitas Diragukan (50 %)	Kualitas Macet (100 %)	Jumlah
1038	Baziduhu Waruwu	2024	2024-02-20	3271244020000322	3.719.520,00	23	0,00	0,00	0,00	3.719.520,00	3.719.520,00	0,00	0,00	0,00	3.719.520,00	3.719.520,00
1039	Sarumi	2024	2024-02-20	3271244020000298	1.756.440,00	23	0,00	0,00	0,00	1.756.440,00	1.756.440,00	0,00	0,00	0,00	1.756.440,00	1.756.440,00
1040	SURADI	2021	2021-12-03	3271214020001339	824.400,00	49	0,00	0,00	0,00	824.400,00	824.400,00	0,00	0,00	0,00	824.400,00	824.400,00
1041	SURADI	2021	2021-09-22	2021402010000901	824.400,00	52	0,00	0,00	0,00	824.400,00	824.400,00	0,00	0,00	0,00	824.400,00	824.400,00
1042	Hamsari	2024	2024-02-20	3271244020000325	1.735.776,00	23	0,00	0,00	0,00	1.735.776,00	1.735.776,00	0,00	0,00	0,00	1.735.776,00	1.735.776,00
1043	HAMSARI	2021	2021-12-03	3271214020001357	923.328,00	49	0,00	0,00	0,00	923.328,00	923.328,00	0,00	0,00	0,00	923.328,00	923.328,00
1044	HAMSARI	2018	2018-11-26	20184020100527	923.328,00	86	0,00	0,00	0,00	923.328,00	923.328,00	0,00	0,00	0,00	923.328,00	923.328,00
1045	HAMSARI	2021	2021-09-22	2021402010000957	923.328,00	52	0,00	0,00	0,00	923.328,00	923.328,00	0,00	0,00	0,00	923.328,00	923.328,00
1046	HAMSARI	2021	2021-02-01	20214020100575	923.328,00	59	0,00	0,00	0,00	923.328,00	923.328,00	0,00	0,00	0,00	923.328,00	923.328,00
1047	HAMSARI	2021	2021-02-02	20214020100576	923.328,00	59	0,00	0,00	0,00	923.328,00	923.328,00	0,00	0,00	0,00	923.328,00	923.328,00
1048	HAMSARI	2023	2023-07-12	3271234020000289	1.156.176,00	30	0,00	0,00	0,00	1.156.176,00	1.156.176,00	0,00	0,00	0,00	1.156.176,00	1.156.176,00
1049	Nurhayati	2024	2024-02-20	3271244020000238	1.033.200,00	23	0,00	0,00	0,00	1.033.200,00	1.033.200,00	0,00	0,00	0,00	1.033.200,00	1.033.200,00
1050	Ida Hapsah	2024	2024-02-20	3271244020000250	5.889.240,00	23	0,00	0,00	0,00	5.889.240,00	5.889.240,00	0,00	0,00	0,00	5.889.240,00	5.889.240,00
1051	A. SARJONO	2021	2021-12-03	3271214020001283	604.560,00	49	0,00	0,00	0,00	604.560,00	604.560,00	0,00	0,00	0,00	604.560,00	604.560,00
1052	A. SARJONO	2021	2021-01-01	3271214020001503	1.165.152,00	60	0,00	0,00	0,00	1.165.152,00	1.165.152,00	0,00	0,00	0,00	1.165.152,00	1.165.152,00
1053	A. SARJONO	2023	2023-07-18	3271234020000480	757.020,00	30	0,00	0,00	0,00	757.020,00	757.020,00	0,00	0,00	0,00	757.020,00	757.020,00
1054	A. SARJONO	2023	2023-07-18	3271234020000481	1.458.984,00	30	0,00	0,00	0,00	1.458.984,00	1.458.984,00	0,00	0,00	0,00	1.458.984,00	1.458.984,00
1055	A. SARJONO	2018	2018-11-12	20184020100446	604.560,00	86	0,00	0,00	0,00	604.560,00	604.560,00	0,00	0,00	0,00	604.560,00	604.560,00
1056	A. SARJONO	2018	2018-11-26	20184020100460	1.165.152,00	86	0,00	0,00	0,00	1.165.152,00	1.165.152,00	0,00	0,00	0,00	1.165.152,00	1.165.152,00
1057	A. SARJONO	2021	2021-09-22	2021402010000728	604.560,00	52	0,00	0,00	0,00	604.560,00	604.560,00	0,00	0,00	0,00	604.560,00	604.560,00
1058	A. SARJONO	2021	2021-09-22	2021402010000750	1.165.152,00	52	0,00	0,00	0,00	1.165.152,00	1.165.152,00	0,00	0,00	0,00	1.165.152,00	1.165.152,00
1059	A. SARJONO	2021	2021-01-29	20214020100416	604.560,00	60	0,00	0,00	0,00	604.560,00	604.560,00	0,00	0,00	0,00	604.560,00	604.560,00
1060	A. SARJONO	2021	2021-01-29	20214020100417	604.560,00	60	0,00	0,00	0,00	604.560,00	604.560,00	0,00	0,00	0,00	604.560,00	604.560,00
1061	A. SARJONO	2021	2021-01-29	20214020100440	1.165.152,00	60	0,00	0,00	0,00	1.165.152,00	1.165.152,00	0,00	0,00	0,00	1.165.152,00	1.165.152,00
1062	A. SARJONO	2021	2021-01-29	20214020100441	1.165.152,00	60	0,00	0,00	0,00	1.165.152,00	1.165.152,00	0,00	0,00	0,00	1.165.152,00	1.165.152,00
1063	RUHENDA	2021	2021-12-03	3271214020001346	1.890.624,00	49	0,00	0,00	0,00	1.890.624,00	1.890.624,00	0,00	0,00	0,00	1.890.624,00	1.890.624,00
1064	RUHENDA	2021	2021-09-22	2021402010000923	1.890.624,00	52	0,00	0,00	0,00	1.890.624,00	1.890.624,00	0,00	0,00	0,00	1.890.624,00	1.890.624,00
1065	RUHENDA	2021	2021-02-01	20214020100548	1.890.624,00	59	0,00	0,00	0,00	1.890.624,00	1.890.624,00	0,00	0,00	0,00	1.890.624,00	1.890.624,00
1066	RUHENDA	2021	2021-02-01	20214020100549	1.890.624,00	59	0,00	0,00	0,00	1.890.624,00	1.890.624,00	0,00	0,00	0,00	1.890.624,00	1.890.624,00
1067	Handayani	2024	2024-02-20	3271244020000300	826.560,00	23	0,00	0,00	0,00	826.560,00	826.560,00	0,00	0,00	0,00	826.560,00	826.560,00
1068	ODJI SASTRA	2021	2021-12-03	3271214020001341	1.165.152,00	49	0,00	0,00	0,00	1.165.152,00	1.165.152,00	0,00	0,00	0,00	1.165.152,00	1.165.152,00
1069	ODJI SASTRA	2021	2021-09-22	2021402010000905	1.165.152,00	52	0,00	0,00	0,00	1.165.152,00	1.165.152,00	0,00	0,00	0,00	1.165.152,00	1.165.152,00
1070	ODJI SASTRA	2021	2021-02-01	20214020100538	1.165.152,00	59	0,00	0,00	0,00	1.165.152,00	1.165.152,00	0,00	0,00	0,00	1.165.152,00	1.165.152,00
1071	ODJI SASTRA	2021	2021-02-01	20214020100539	1.165.152,00	59	0,00	0,00	0,00	1.165.152,00	1.165.152,00	0,00	0,00	0,00	1.165.152,00	1.165.152,00
1072	ODJI SASTRA	2023	2023-07-12	3271234020000316	1.458.984,00	30	0,00	0,00	0,00	1.458.984,00	1.458.984,00	0,00	0,00	0,00	1.458.984,00	1.458.984,00

No	Subjek Nama	Tahun	Tgl SKRD	Kode Bayar	Pinang	Penyisihan Pinang										
					Sakdo Akhir2025	Tunggakan	Kriteria Pinang					Penyisihan Pinang Tidak Tertagih				
							Lancar (0 sd 1 Bulan)	Kurang Lancar (1 sd 3 Bulan)	Diragukan (3 sd 12 Bulan)	Macet (Lebih dari 12 Bulan)	Jumhh	Kualitas Lancar(0,5 %)	Kualitas Kurang Lancar (10 %)	Kualitas Diragukan (50 %)	Kualitas Macet (100 %)	Jumlah
1073	H. SURAHMAT	2025	2025-04-22	3271254020000063	884.160,00	9	0,00	0,00	884.160,00	0,00	884.160,00	0,00	0,00	442.080,00	0,00	442.080,00
1074	Sarin	2024	2024-02-20	3271244020000269	2.851.632,00	23	0,00	0,00	0,00	2.851.632,00	2.851.632,00	0,00	0,00	0,00	2.851.632,00	2.851.632,00
1075	ASEP HARYADI	2021	2021-12-03	3271214020001313	494.640,00	49	0,00	0,00	0,00	494.640,00	494.640,00	0,00	0,00	0,00	494.640,00	494.640,00
1076	ASEP HARYADI	2018	2018-11-26	20184020100478	494.640,00	86	0,00	0,00	0,00	494.640,00	494.640,00	0,00	0,00	0,00	494.640,00	494.640,00
1077	ASEP HARYADI	2021	2021-02-01	20214020100478	494.640,00	59	0,00	0,00	0,00	494.640,00	494.640,00	0,00	0,00	0,00	494.640,00	494.640,00
1078	ASEP HARYADI	2021	2021-02-01	20214020100479	494.640,00	59	0,00	0,00	0,00	494.640,00	494.640,00	0,00	0,00	0,00	494.640,00	494.640,00
1079	Agatha Sukardyah	2024	2024-02-20	3271244020000261	2.459.016,00	23	0,00	0,00	0,00	2.459.016,00	2.459.016,00	0,00	0,00	0,00	2.459.016,00	2.459.016,00
1080	YANUARI TALAUMBANUA	2021	2021-12-03	3271214020001305	1.824.672,00	49	0,00	0,00	0,00	1.824.672,00	1.824.672,00	0,00	0,00	0,00	1.824.672,00	1.824.672,00
1081	YANUARI TALAUMBANUA	2021	2021-09-22	2021402010000788	1.824.672,00	52	0,00	0,00	0,00	1.824.672,00	1.824.672,00	0,00	0,00	0,00	1.824.672,00	1.824.672,00
1082	YANUARI TALAUMBANUA	2021	2021-01-29	20214020100462	1.824.672,00	60	0,00	0,00	0,00	1.824.672,00	1.824.672,00	0,00	0,00	0,00	1.824.672,00	1.824.672,00
1083	YANUARI TALAUMBANUA	2021	2021-01-29	20214020100463	1.824.672,00	60	0,00	0,00	0,00	1.824.672,00	1.824.672,00	0,00	0,00	0,00	1.824.672,00	1.824.672,00
1084	YANUARI TALAUMBANUA	2023	2023-07-12	3271234020000368	2.284.824,00	30	0,00	0,00	0,00	2.284.824,00	2.284.824,00	0,00	0,00	0,00	2.284.824,00	2.284.824,00
1085	Nado	2024	2024-02-20	3271244020000329	4.442.760,00	23	0,00	0,00	0,00	4.442.760,00	4.442.760,00	0,00	0,00	0,00	4.442.760,00	4.442.760,00
1086	NADO	2021	2021-12-03	3271214020001360	2.363.280,00	49	0,00	0,00	0,00	2.363.280,00	2.363.280,00	0,00	0,00	0,00	2.363.280,00	2.363.280,00
1087	NADO	2018	2018-11-26	20184020100531	2.363.280,00	86	0,00	0,00	0,00	2.363.280,00	2.363.280,00	0,00	0,00	0,00	2.363.280,00	2.363.280,00
1088	NADO	2021	2021-09-22	2021402010000964	2.363.280,00	52	0,00	0,00	0,00	2.363.280,00	2.363.280,00	0,00	0,00	0,00	2.363.280,00	2.363.280,00
1089	NADO	2021	2021-02-01	20214020100583	2.363.280,00	59	0,00	0,00	0,00	2.363.280,00	2.363.280,00	0,00	0,00	0,00	2.363.280,00	2.363.280,00
1090	NADO	2021	2021-02-01	20214020100584	2.363.280,00	59	0,00	0,00	0,00	2.363.280,00	2.363.280,00	0,00	0,00	0,00	2.363.280,00	2.363.280,00
1091	Idim	2024	2024-02-20	3271244020000371	847.224,00	23	0,00	0,00	0,00	847.224,00	847.224,00	0,00	0,00	0,00	847.224,00	847.224,00
1092	IDIM	2021	2021-12-03	3271214020001398	450.672,00	49	0,00	0,00	0,00	450.672,00	450.672,00	0,00	0,00	0,00	450.672,00	450.672,00
1093	IDIM	2018	2018-11-26	20184020100573	450.672,00	86	0,00	0,00	0,00	450.672,00	450.672,00	0,00	0,00	0,00	450.672,00	450.672,00
1094	IDIM	2021	2021-09-22	2021402010001041	450.672,00	52	0,00	0,00	0,00	450.672,00	450.672,00	0,00	0,00	0,00	450.672,00	450.672,00
1095	IDIM	2021	2021-02-01	20214020100661	450.672,00	59	0,00	0,00	0,00	450.672,00	450.672,00	0,00	0,00	0,00	450.672,00	450.672,00
1096	IDIM	2021	2021-02-01	20214020100662	450.672,00	59	0,00	0,00	0,00	450.672,00	450.672,00	0,00	0,00	0,00	450.672,00	450.672,00
1097	IDIM	2023	2023-07-12	3271234020000299	564.324,00	30	0,00	0,00	0,00	564.324,00	564.324,00	0,00	0,00	0,00	564.324,00	564.324,00
1098	Katiman	2024	2024-02-20	3271244020000339	1.942.416,00	23	0,00	0,00	0,00	1.942.416,00	1.942.416,00	0,00	0,00	0,00	1.942.416,00	1.942.416,00
1099	KATIMAN	2021	2021-12-03	3271214020001368	1.033.248,00	49	0,00	0,00	0,00	1.033.248,00	1.033.248,00	0,00	0,00	0,00	1.033.248,00	1.033.248,00
1100	KATIMAN	2021	2021-09-22	2021402010000984	1.033.248,00	52	0,00	0,00	0,00	1.033.248,00	1.033.248,00	0,00	0,00	0,00	1.033.248,00	1.033.248,00
1101	MOCH TARBA	2021	2021-12-02	3271214020001241	273.600,00	49	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00
1102	MOCH TARBA	2018	2018-07-09	20184020100253	273.600,00	90	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00
1103	MOCH TARBA	2021	2021-09-21	2021402010000914	273.600,00	52	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00
1104	MOCH TARBA	2021	2021-01-07	20214020100270	273.600,00	60	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00
1105	MOCH TARBA	2021	2021-01-07	20214020100272	273.600,00	60	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00
1106	MOCH TARBA	2023	2023-07-10	3271234020000186	589.440,00	30	0,00	0,00	0,00	589.440,00	589.440,00	0,00	0,00	0,00	589.440,00	589.440,00
1107	MUHAMMAD TARBA	2024	2024-01-23	3271244020000179	879.360,00	24	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00

No	Subjek Nama	Tahun	Tgl SKRD	Kode Bayar	Putang	Penyisihan Putang										
					Sakdo Akhir2025	Tunggakan	Kriteria Putang					Penyisihan Putang Tidak Tertagih				
							Lancar (0 sd 1 Bulan)	Kurang Lancar (1 sd 3 Bulan)	Diragukan (3 sd 12 Bulan)	Macet (Lebih dari 12 Bulan)	Jumhh	Kualitas Lancar(0,5 %)	Kualitas Kurang Lancar (10 %)	Kualitas Diragukan (50 %)	Kualitas Macet (100 %)	Jumlah
1108	Muhammad Tarba	2024	2024-08-13	3271244020000589	879.360,00	17	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00
1109	Suhardi	2024	2024-02-20	3271244020000374	227.304,00	23	0,00	0,00	0,00	227.304,00	227.304,00	0,00	0,00	0,00	227.304,00	227.304,00
1110	Darno Sujoto	2024	2024-02-20	3271244020000287	743.904,00	23	0,00	0,00	0,00	743.904,00	743.904,00	0,00	0,00	0,00	743.904,00	743.904,00
1111	SUHARDI	2021	2021-12-03	3271214020001395	120.912,00	49	0,00	0,00	0,00	120.912,00	120.912,00	0,00	0,00	0,00	120.912,00	120.912,00
1112	SUHARDI	2021	2021-12-03	3271214020001413	549.600,00	49	0,00	0,00	0,00	549.600,00	549.600,00	0,00	0,00	0,00	549.600,00	549.600,00
1113	SUHARDI	2021	2021-09-22	2021402010000864	549.600,00	52	0,00	0,00	0,00	549.600,00	549.600,00	0,00	0,00	0,00	549.600,00	549.600,00
1114	SUHARDI	2021	2021-09-22	2021402010001046	120.912,00	52	0,00	0,00	0,00	120.912,00	120.912,00	0,00	0,00	0,00	120.912,00	120.912,00
1115	SUHARDI	2021	2021-02-01	20214020100665	120.912,00	59	0,00	0,00	0,00	120.912,00	120.912,00	0,00	0,00	0,00	120.912,00	120.912,00
1116	SUHARDI	2021	2021-01-14	20214020100666	120.912,00	60	0,00	0,00	0,00	120.912,00	120.912,00	0,00	0,00	0,00	120.912,00	120.912,00
1117	SUHARDI	2023	2023-07-12	3271234020000374	151.404,00	30	0,00	0,00	0,00	151.404,00	151.404,00	0,00	0,00	0,00	151.404,00	151.404,00
1118	LUKMAN	2021	2021-12-02	3271214020001217	273.600,00	49	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00
1119	LUKMAN	2021	2021-01-07	20214020100273	273.600,00	60	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00
1120	LUKMAN	2023	2023-07-10	3271234020000173	589.440,00	30	0,00	0,00	0,00	589.440,00	589.440,00	0,00	0,00	0,00	589.440,00	589.440,00
1121	LUKMAN	2024	2024-01-23	3271244020000149	879.360,00	24	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00
1122	Lukman	2024	2024-08-13	3271244020000559	879.360,00	17	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00
1123	Hj.Sunyani/LukRinaldi	2024	2024-02-20	3271244020000304	3.161.592,00	23	0,00	0,00	0,00	3.161.592,00	3.161.592,00	0,00	0,00	0,00	3.161.592,00	3.161.592,00
1124	Suyono	2024	2024-02-20	3271244020000340	826.560,00	23	0,00	0,00	0,00	826.560,00	826.560,00	0,00	0,00	0,00	826.560,00	826.560,00
1125	SUYONO	2021	2021-12-03	3271214020001369	439.680,00	49	0,00	0,00	0,00	439.680,00	439.680,00	0,00	0,00	0,00	439.680,00	439.680,00
1126	SUYONO	2021	2021-09-22	2021402010000986	439.680,00	52	0,00	0,00	0,00	439.680,00	439.680,00	0,00	0,00	0,00	439.680,00	439.680,00
1127	SUYONO	2021	2021-02-01	20214020100604	439.680,00	59	0,00	0,00	0,00	439.680,00	439.680,00	0,00	0,00	0,00	439.680,00	439.680,00
1128	Slamet Riyadi	2024	2024-02-20	3271244020000351	1.033.200,00	23	0,00	0,00	0,00	1.033.200,00	1.033.200,00	0,00	0,00	0,00	1.033.200,00	1.033.200,00
1129	SLAMETRIYADI	2021	2021-12-03	3271214020001379	549.600,00	49	0,00	0,00	0,00	549.600,00	549.600,00	0,00	0,00	0,00	549.600,00	549.600,00
1130	Supari	2024	2024-02-20	3271244020000321	516.600,00	23	0,00	0,00	0,00	516.600,00	516.600,00	0,00	0,00	0,00	516.600,00	516.600,00
1131	Triono	2024	2024-02-20	3271244020000341	1.260.504,00	23	0,00	0,00	0,00	1.260.504,00	1.260.504,00	0,00	0,00	0,00	1.260.504,00	1.260.504,00
1132	TRONO	2021	2021-12-03	3271214020001370	670.512,00	49	0,00	0,00	0,00	670.512,00	670.512,00	0,00	0,00	0,00	670.512,00	670.512,00
1133	TRIONO	2021	2021-12-03	3271214020001400	2.682.048,00	49	0,00	0,00	0,00	2.682.048,00	2.682.048,00	0,00	0,00	0,00	2.682.048,00	2.682.048,00
1134	MUHAMAD IDWAN	2023	2023-11-20	3271234020000732	1.203.792,00	26	0,00	0,00	0,00	1.203.792,00	1.203.792,00	0,00	0,00	0,00	1.203.792,00	1.203.792,00
1135	Dedeh Nurseha	2024	2024-02-20	3271244020000266	3.719.520,00	23	0,00	0,00	0,00	3.719.520,00	3.719.520,00	0,00	0,00	0,00	3.719.520,00	3.719.520,00
1136	SUPARDI	2021	2021-12-03	3271214020001310	879.360,00	49	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00
1137	SUPARDI	2018	2018-11-26	20184020100475	879.360,00	86	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00
1138	SUPARDI	2021	2021-09-22	2021402010000801	879.360,00	52	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00
1139	SUPARDI	2021	2021-01-29	20214020100472	879.360,00	60	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00
1140	SUPARDI	2021	2021-02-01	20214020100473	879.360,00	59	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00
1141	SUMARNO	2021	2021-12-03	3271214020001382	241.824,00	49	0,00	0,00	0,00	241.824,00	241.824,00	0,00	0,00	0,00	241.824,00	241.824,00
1142	SUMARNO	2021	2021-02-28	20214020100631	241.824,00	59	0,00	0,00	0,00	241.824,00	241.824,00	0,00	0,00	0,00	241.824,00	241.824,00

No	Subjek Nama	Tahun	Tgl SKRD	Kode Bayar	Putang	Penyisihan Putang										
					Sakdo Akhir2025	Tunggakan	Kriteria Putang					Penyisihan Putang Tidak Tertagih				
							Lancar (0 sd 1 Bulan)	Kurang Lancar (1 sd 3 Bulan)	Diragukan (3 sd 12 Bulan)	Macet (Lebih dari 12 Bulan)	Jumhh	Kualitas Lancar(0,5 %)	Kualitas Kurang Lancar (10 %)	Kualitas Diragukan (50 %)	Kualitas Macet (100 %)	Jumlah
1143	SUMARNO	2021	2021-02-01	20214020100632	241.824,00	59	0,00	0,00	0,00	241.824,00	241.824,00	0,00	0,00	0,00	241.824,00	241.824,00
1144	Sutino	2024	2024-02-20	3271244020000352	743.904,00	23	0,00	0,00	0,00	743.904,00	743.904,00	0,00	0,00	0,00	743.904,00	743.904,00
1145	Desy Listya Sunarya	2024	2024-02-20	3271244020000292	1.012.536,00	23	0,00	0,00	0,00	1.012.536,00	1.012.536,00	0,00	0,00	0,00	1.012.536,00	1.012.536,00
1146	Jemi Siswanto	2024	2024-02-20	3271244020000314	1.756.440,00	23	0,00	0,00	0,00	1.756.440,00	1.756.440,00	0,00	0,00	0,00	1.756.440,00	1.756.440,00
1147	JEMI SISWANTO	2021	2021-12-03	3271214020001348	934.320,00	49	0,00	0,00	0,00	934.320,00	934.320,00	0,00	0,00	0,00	934.320,00	934.320,00
1148	JEMI SISWANTO	2021	2021-09-22	2021402010000929	934.320,00	52	0,00	0,00	0,00	934.320,00	934.320,00	0,00	0,00	0,00	934.320,00	934.320,00
1149	JEMI SISWANTO	2021	2021-02-01	20214020100553	934.320,00	59	0,00	0,00	0,00	934.320,00	934.320,00	0,00	0,00	0,00	934.320,00	934.320,00
1150	JEMI SISWANTO	2021	2021-02-01	20214020100554	934.320,00	59	0,00	0,00	0,00	934.320,00	934.320,00	0,00	0,00	0,00	934.320,00	934.320,00
1151	Suryadi	2024	2024-02-20	3271244020000360	764.568,00	23	0,00	0,00	0,00	764.568,00	764.568,00	0,00	0,00	0,00	764.568,00	764.568,00
1152	SURYADI	2021	2021-12-03	3271214020001385	406.704,00	49	0,00	0,00	0,00	406.704,00	406.704,00	0,00	0,00	0,00	406.704,00	406.704,00
1153	SURYADI	2021	2021-09-22	2021402010001010	406.704,00	52	0,00	0,00	0,00	406.704,00	406.704,00	0,00	0,00	0,00	406.704,00	406.704,00
1154	SURYADI	2021	2021-02-01	20214020100641	406.704,00	59	0,00	0,00	0,00	406.704,00	406.704,00	0,00	0,00	0,00	406.704,00	406.704,00
1155	SURYADI	2021	2021-02-01	20214020100642	406.704,00	59	0,00	0,00	0,00	406.704,00	406.704,00	0,00	0,00	0,00	406.704,00	406.704,00
1156	SURYADI	2023	2023-07-12	3271234020000349	509.268,00	30	0,00	0,00	0,00	509.268,00	509.268,00	0,00	0,00	0,00	509.268,00	509.268,00
1157	Erlend Remdry	2021	2021-01-01	3271214020001500	1.492.200,00	60	0,00	0,00	0,00	1.492.200,00	1.492.200,00	0,00	0,00	0,00	1.492.200,00	1.492.200,00
1158	WAWANG JUANDI	2021	2021-12-03	3271214020001296	483.648,00	49	0,00	0,00	0,00	483.648,00	483.648,00	0,00	0,00	0,00	483.648,00	483.648,00
1159	WAWANG JUANDI	2018	2018-11-26	20184020100462	483.648,00	86	0,00	0,00	0,00	483.648,00	483.648,00	0,00	0,00	0,00	483.648,00	483.648,00
1160	WAWANG JUANDI	2021	2021-09-22	2021402010000756	483.648,00	52	0,00	0,00	0,00	483.648,00	483.648,00	0,00	0,00	0,00	483.648,00	483.648,00
1161	WAWANG JUANDI	2021	2021-01-29	20214020100444	483.648,00	60	0,00	0,00	0,00	483.648,00	483.648,00	0,00	0,00	0,00	483.648,00	483.648,00
1162	WAWANG JUANDI	2021	2021-01-29	20214020100445	483.648,00	60	0,00	0,00	0,00	483.648,00	483.648,00	0,00	0,00	0,00	483.648,00	483.648,00
1163	Komarudin	2024	2024-02-20	3271244020000363	1.921.752,00	23	0,00	0,00	0,00	1.921.752,00	1.921.752,00	0,00	0,00	0,00	1.921.752,00	1.921.752,00
1164	KOMARUDIN	2021	2021-12-03	3271214020001388	1.022.256,00	49	0,00	0,00	0,00	1.022.256,00	1.022.256,00	0,00	0,00	0,00	1.022.256,00	1.022.256,00
1165	KOMARUDIN	2021	2021-09-22	2021402010001014	1.022.256,00	52	0,00	0,00	0,00	1.022.256,00	1.022.256,00	0,00	0,00	0,00	1.022.256,00	1.022.256,00
1166	KOMARUDIN	2021	2021-02-01	20214020100648	1.022.256,00	59	0,00	0,00	0,00	1.022.256,00	1.022.256,00	0,00	0,00	0,00	1.022.256,00	1.022.256,00
1167	Delfin Sahertian	2022	2022-09-09	3271224020000109	723.900,00	40	0,00	0,00	0,00	723.900,00	723.900,00	0,00	0,00	0,00	723.900,00	723.900,00
1168	Delfin Sahertian	2023	2023-09-05	3271234020000608	2.718.000,00	28	0,00	0,00	0,00	2.718.000,00	2.718.000,00	0,00	0,00	0,00	2.718.000,00	2.718.000,00
1169	Lisanin Firdyati Larosa	2024	2024-02-20	3271244020000248	4.566.744,00	23	0,00	0,00	0,00	4.566.744,00	4.566.744,00	0,00	0,00	0,00	4.566.744,00	4.566.744,00
1170	INyoman Gunadi	2024	2024-02-20	3271244020000328	4.132.800,00	23	0,00	0,00	0,00	4.132.800,00	4.132.800,00	0,00	0,00	0,00	4.132.800,00	4.132.800,00
1171	INYOMAN GUNADI	2021	2021-12-03	3271214020001366	2.198.400,00	49	0,00	0,00	0,00	2.198.400,00	2.198.400,00	0,00	0,00	0,00	2.198.400,00	2.198.400,00
1172	Yuniman Larosa	2024	2024-02-20	3271244020000259	3.285.576,00	23	0,00	0,00	0,00	3.285.576,00	3.285.576,00	0,00	0,00	0,00	3.285.576,00	3.285.576,00
1173	SURIANTO	2021	2021-12-03	3271214020001303	1.439.952,00	49	0,00	0,00	0,00	1.439.952,00	1.439.952,00	0,00	0,00	0,00	1.439.952,00	1.439.952,00
1174	SURIANTO	2018	2018-11-26	20184020100468	1.439.952,00	86	0,00	0,00	0,00	1.439.952,00	1.439.952,00	0,00	0,00	0,00	1.439.952,00	1.439.952,00
1175	SURIANTO	2021	2021-09-22	2021402010000785	1.439.952,00	52	0,00	0,00	0,00	1.439.952,00	1.439.952,00	0,00	0,00	0,00	1.439.952,00	1.439.952,00
1176	SURIANTO	2021	2021-01-29	20214020100458	1.439.952,00	60	0,00	0,00	0,00	1.439.952,00	1.439.952,00	0,00	0,00	0,00	1.439.952,00	1.439.952,00
1177	SURIANTO	2021	2021-01-29	20214020100459	1.439.952,00	60	0,00	0,00	0,00	1.439.952,00	1.439.952,00	0,00	0,00	0,00	1.439.952,00	1.439.952,00

No	Subjek Nama	Tahun	Tgl SKRD	Kode Bayar	Pinang	Penyisihan Pinang										
					Sakdo Akhir2025	Tunggakan	Kriteria Pinang					Penyisihan Pinang Tidak Tertagih				
							Lancar (0 sd 1 Bulan)	Kurang Lancar (1 sd 3 Bulan)	Diragukan (3 sd 12 Bulan)	Macet (Lebih dari 12 Bulan)	Jumhh	Kualitas Lancar (0,5 %)	Kualitas Kurang Lancar (10 %)	Kualitas Diragukan (50 %)	Kualitas Macet (100 %)	Jumlah
1178	SURIANTO	2023	2023-07-12	3271234020000348	1.803.084,00	30	0,00	0,00	0,00	1.803.084,00	1.803.084,00	0,00	0,00	0,00	1.803.084,00	1.803.084,00
1179	SUJADI HADI SUCIPTO	2021	2021-12-03	3271214020001387	1.000.272,00	49	0,00	0,00	0,00	1.000.272,00	1.000.272,00	0,00	0,00	0,00	1.000.272,00	1.000.272,00
1180	SUJADI HADI SUCIPTO	2021	2021-12-13	3271214020001399	901.344,00	49	0,00	0,00	0,00	901.344,00	901.344,00	0,00	0,00	0,00	901.344,00	901.344,00
1181	SUJADI HADI SUCIPTO	2018	2018-11-26	20184020100564	1.000.272,00	86	0,00	0,00	0,00	1.000.272,00	1.000.272,00	0,00	0,00	0,00	1.000.272,00	1.000.272,00
1182	SUJADI HADI SUCIPTO	2021	2021-09-22	2021402010001012	1.000.272,00	52	0,00	0,00	0,00	1.000.272,00	1.000.272,00	0,00	0,00	0,00	1.000.272,00	1.000.272,00
1183	SUJADI HADI SUCIPTO	2021	2021-02-01	20214020100645	1.000.272,00	59	0,00	0,00	0,00	1.000.272,00	1.000.272,00	0,00	0,00	0,00	1.000.272,00	1.000.272,00
1184	SUJADI HADI SUCIPTO	2021	2021-02-01	20214020100646	1.000.272,00	59	0,00	0,00	0,00	1.000.272,00	1.000.272,00	0,00	0,00	0,00	1.000.272,00	1.000.272,00
1185	Titi Yanto	2024	2024-02-20	3271244020000240	1.115.856,00	23	0,00	0,00	0,00	1.115.856,00	1.115.856,00	0,00	0,00	0,00	1.115.856,00	1.115.856,00
1186	HENDRI JONES SIMANJUNTAK	2021	2021-12-03	3271214020001285	703.488,00	49	0,00	0,00	0,00	703.488,00	703.488,00	0,00	0,00	0,00	703.488,00	703.488,00
1187	HENDRI JONES SIMANJUNTAK	2021	2021-09-22	2021402010000732	703.488,00	52	0,00	0,00	0,00	703.488,00	703.488,00	0,00	0,00	0,00	703.488,00	703.488,00
1188	HENDRI JONES SIMANJUNTAK	2023	2023-07-12	3271234020000291	880.896,00	30	0,00	0,00	0,00	880.896,00	880.896,00	0,00	0,00	0,00	880.896,00	880.896,00
1189	Suwarno	2024	2024-02-20	3271244020000346	1.177.848,00	23	0,00	0,00	0,00	1.177.848,00	1.177.848,00	0,00	0,00	0,00	1.177.848,00	1.177.848,00
1190	SUWARNO	2021	2021-12-03	3271214020001375	626.544,00	49	0,00	0,00	0,00	626.544,00	626.544,00	0,00	0,00	0,00	626.544,00	626.544,00
1191	SUWARNO	2021	2021-01-01	3271214020001528	626.544,00	60	0,00	0,00	0,00	626.544,00	626.544,00	0,00	0,00	0,00	626.544,00	626.544,00
1192	SUWARNO	2021	2021-02-01	20214020100616	626.544,00	59	0,00	0,00	0,00	626.544,00	626.544,00	0,00	0,00	0,00	626.544,00	626.544,00
1193	Ricky Effendi Simanjuntak	2024	2024-02-20	3271244020000344	1.921.752,00	23	0,00	0,00	0,00	1.921.752,00	1.921.752,00	0,00	0,00	0,00	1.921.752,00	1.921.752,00
1194	Ricky Effendi Simanjuntak	2024	2024-02-20	3271244020000359	1.239.840,00	23	0,00	0,00	0,00	1.239.840,00	1.239.840,00	0,00	0,00	0,00	1.239.840,00	1.239.840,00
1195	RICKY EFFENDI SIMANJUNTAK	2021	2021-12-03	3271214020001373	1.022.256,00	49	0,00	0,00	0,00	1.022.256,00	1.022.256,00	0,00	0,00	0,00	1.022.256,00	1.022.256,00
1196	RICKY EFFENDI SIMANJUNTAK	2021	2021-12-13	3271214020001406	659.520,00	49	0,00	0,00	0,00	659.520,00	659.520,00	0,00	0,00	0,00	659.520,00	659.520,00
1197	RICKY EFFENDI SIMANJUNTAK	2021	2021-09-22	2021402010000997	1.022.256,00	52	0,00	0,00	0,00	1.022.256,00	1.022.256,00	0,00	0,00	0,00	1.022.256,00	1.022.256,00
1198	RICKY EFFENDI SIMANJUNTAK	2021	2021-09-22	2021402010001009	659.520,00	52	0,00	0,00	0,00	659.520,00	659.520,00	0,00	0,00	0,00	659.520,00	659.520,00
1199	RICKY EFFENDI SIMANJUNTAK	2021	2021-02-01	20214020100612	1.022.256,00	59	0,00	0,00	0,00	1.022.256,00	1.022.256,00	0,00	0,00	0,00	1.022.256,00	1.022.256,00
1200	RICKY EFFENDI SIMANJUNTAK	2021	2021-02-01	20214020100640	659.520,00	59	0,00	0,00	0,00	659.520,00	659.520,00	0,00	0,00	0,00	659.520,00	659.520,00
1201	Gino	2024	2024-02-20	3271244020000356	351.288,00	23	0,00	0,00	0,00	351.288,00	351.288,00	0,00	0,00	0,00	351.288,00	351.288,00
1202	GINO	2021	2021-12-03	3271214020001383	186.864,00	49	0,00	0,00	0,00	186.864,00	186.864,00	0,00	0,00	0,00	186.864,00	186.864,00
1203	Muhammad Badrusalam	2024	2024-02-20	3271244020000370	1.033.200,00	23	0,00	0,00	0,00	1.033.200,00	1.033.200,00	0,00	0,00	0,00	1.033.200,00	1.033.200,00
1204	Muhammad Badrusalam	2024	2024-02-20	3271244020000375	123.984,00	23	0,00	0,00	0,00	123.984,00	123.984,00	0,00	0,00	0,00	123.984,00	123.984,00
1205	Subagio	2024	2024-02-20	3271244020000320	1.363.824,00	23	0,00	0,00	0,00	1.363.824,00	1.363.824,00	0,00	0,00	0,00	1.363.824,00	1.363.824,00
1206	SUBAGIO	2021	2021-12-03	3271214020001352	725.472,00	49	0,00	0,00	0,00	725.472,00	725.472,00	0,00	0,00	0,00	725.472,00	725.472,00
1207	SUBAGIO	2021	2021-09-22	2021402010000944	725.472,00	52	0,00	0,00	0,00	725.472,00	725.472,00	0,00	0,00	0,00	725.472,00	725.472,00
1208	SUBAGIO	2021	2021-02-01	20214020100565	725.472,00	59	0,00	0,00	0,00	725.472,00	725.472,00	0,00	0,00	0,00	725.472,00	725.472,00
1209	SUBAGIO	2021	2021-02-01	20214020100566	725.472,00	59	0,00	0,00	0,00	725.472,00	725.472,00	0,00	0,00	0,00	725.472,00	725.472,00
1210	SUBAGIO	2023	2023-07-12	3271234020000336	908.424,00	30	0,00	0,00	0,00	908.424,00	908.424,00	0,00	0,00	0,00	908.424,00	908.424,00

No	Subjek Nama	Tahun	Tgl SKRD	Kode Bayar	Pinang	Penyisihan Pinang										
					Sakto Akhir2025	Tunggakan	Kriteria Pinang					Penyisihan Pinang Tidak Tertagih				
							Lancar (0 sd 1 Bulan)	Kurang Lancar (1 sd 3 Bulan)	Diragukan (3 sd 12 Bulan)	Macet (Lebih dari 12 Bulan)	Jumhh	Kualitas Lancar(0,5 %)	Kualitas Kurang Lancar (10 %)	Kualitas Diragukan (50 %)	Kualitas Macet (100 %)	Jumlah
1211	Mdi	2024	2024-02-20	3271244020000316	826.560,00	23	0,00	0,00	0,00	826.560,00	826.560,00	0,00	0,00	0,00	826.560,00	826.560,00
1212	MIDI	2018	2018-11-26	20184020100518	439.680,00	86	0,00	0,00	0,00	439.680,00	439.680,00	0,00	0,00	0,00	439.680,00	439.680,00
1213	MIDI	2021	2021-09-22	2021402010000934	439.680,00	52	0,00	0,00	0,00	439.680,00	439.680,00	0,00	0,00	0,00	439.680,00	439.680,00
1214	MIDI	2021	2021-02-01	20214020100557	439.680,00	59	0,00	0,00	0,00	439.680,00	439.680,00	0,00	0,00	0,00	439.680,00	439.680,00
1215	MIDI	2021	2021-02-01	20214020100558	439.680,00	59	0,00	0,00	0,00	439.680,00	439.680,00	0,00	0,00	0,00	439.680,00	439.680,00
1216	Muhammad Izroil	2024	2024-02-20	3271244020000315	1.115.856,00	23	0,00	0,00	0,00	1.115.856,00	1.115.856,00	0,00	0,00	0,00	1.115.856,00	1.115.856,00
1217	MUHAMMAD IZROIL	2021	2021-12-03	3271214020001349	593.568,00	49	0,00	0,00	0,00	593.568,00	593.568,00	0,00	0,00	0,00	593.568,00	593.568,00
1218	MUHAMMAD IZROIL	2021	2021-09-22	2021402010000931	593.568,00	52	0,00	0,00	0,00	593.568,00	593.568,00	0,00	0,00	0,00	593.568,00	593.568,00
1219	MUHAMMAD IZROIL	2021	2021-02-01	20214020100556	593.568,00	59	0,00	0,00	0,00	593.568,00	593.568,00	0,00	0,00	0,00	593.568,00	593.568,00
1220	Agus Setiawan Wicaksana	2024	2024-02-20	3271244020000256	1.839.096,00	23	0,00	0,00	0,00	1.839.096,00	1.839.096,00	0,00	0,00	0,00	1.839.096,00	1.839.096,00
1221	RUJIMAN MANUNRUNG	2021	2021-01-01	3271214020001565	1.406.976,00	60	0,00	0,00	0,00	1.406.976,00	1.406.976,00	0,00	0,00	0,00	1.406.976,00	1.406.976,00
1222	Hendri Jones Simanjuntak	2024	2024-02-20	3271244020000241	1.322.496,00	23	0,00	0,00	0,00	1.322.496,00	1.322.496,00	0,00	0,00	0,00	1.322.496,00	1.322.496,00
1223	RUDOLF SIMATUPANG	2021	2021-12-03	3271214020001286	626.544,00	49	0,00	0,00	0,00	626.544,00	626.544,00	0,00	0,00	0,00	626.544,00	626.544,00
1224	RUDOLF SIMATUPANG	2018	2018-11-26	20184020100451	626.544,00	86	0,00	0,00	0,00	626.544,00	626.544,00	0,00	0,00	0,00	626.544,00	626.544,00
1225	RUDOLF SIMATUPANG	2021	2021-09-22	2021402010000733	626.544,00	52	0,00	0,00	0,00	626.544,00	626.544,00	0,00	0,00	0,00	626.544,00	626.544,00
1226	RUDOLF SIMATUPANG	2021	2021-01-29	20214020100422	626.544,00	60	0,00	0,00	0,00	626.544,00	626.544,00	0,00	0,00	0,00	626.544,00	626.544,00
1227	RUDOLF SIMATUPANG	2021	2021-01-29	20214020100423	626.544,00	60	0,00	0,00	0,00	626.544,00	626.544,00	0,00	0,00	0,00	626.544,00	626.544,00
1228	Hadlyanto	2024	2024-02-20	3271244020000313	2.004.408,00	23	0,00	0,00	0,00	2.004.408,00	2.004.408,00	0,00	0,00	0,00	2.004.408,00	2.004.408,00
1229	Carlo	2024	2024-02-20	3271244020000245	1.136.520,00	23	0,00	0,00	0,00	1.136.520,00	1.136.520,00	0,00	0,00	0,00	1.136.520,00	1.136.520,00
1230	MAD TURO	2018	2018-11-26	20184020100455	747.456,00	86	0,00	0,00	0,00	747.456,00	747.456,00	0,00	0,00	0,00	747.456,00	747.456,00
1231	MAD TURO	2021	2021-01-29	20214020100430	747.456,00	60	0,00	0,00	0,00	747.456,00	747.456,00	0,00	0,00	0,00	747.456,00	747.456,00
1232	MAD TURO	2021	2021-01-29	20214020100431	747.456,00	60	0,00	0,00	0,00	747.456,00	747.456,00	0,00	0,00	0,00	747.456,00	747.456,00
1233	MAD TURO	2023	2023-07-12	3271234020000310	935.952,00	30	0,00	0,00	0,00	935.952,00	935.952,00	0,00	0,00	0,00	935.952,00	935.952,00
1234	Darno Sujoto	2024	2024-02-20	3271244020000289	1.611.792,00	23	0,00	0,00	0,00	1.611.792,00	1.611.792,00	0,00	0,00	0,00	1.611.792,00	1.611.792,00
1235	SUTRISNO WIDODO	2021	2021-12-03	3271214020001330	1.472.928,00	49	0,00	0,00	0,00	1.472.928,00	1.472.928,00	0,00	0,00	0,00	1.472.928,00	1.472.928,00
1236	SUTRISNO WIDODO	2021	2021-09-22	2021402010000872	1.472.928,00	52	0,00	0,00	0,00	1.472.928,00	1.472.928,00	0,00	0,00	0,00	1.472.928,00	1.472.928,00
1237	SUTRISNO WIDODO	2021	2021-02-01	20214020100516	1.472.928,00	59	0,00	0,00	0,00	1.472.928,00	1.472.928,00	0,00	0,00	0,00	1.472.928,00	1.472.928,00
1238	SUTRISNO WIDODO	2021	2021-02-01	20214020100517	1.472.928,00	59	0,00	0,00	0,00	1.472.928,00	1.472.928,00	0,00	0,00	0,00	1.472.928,00	1.472.928,00
1239	Parno	2024	2024-02-20	3271244020000338	1.405.152,00	23	0,00	0,00	0,00	1.405.152,00	1.405.152,00	0,00	0,00	0,00	1.405.152,00	1.405.152,00
1240	Ida Sudarti	2024	2024-02-20	3271244020000283	1.797.768,00	23	0,00	0,00	0,00	1.797.768,00	1.797.768,00	0,00	0,00	0,00	1.797.768,00	1.797.768,00
1241	RUKANTO	2021	2021-12-03	3271214020001328	1.791.696,00	49	0,00	0,00	0,00	1.791.696,00	1.791.696,00	0,00	0,00	0,00	1.791.696,00	1.791.696,00
1242	RUKANTO	2018	2018-11-26	20184020100492	1.791.696,00	86	0,00	0,00	0,00	1.791.696,00	1.791.696,00	0,00	0,00	0,00	1.791.696,00	1.791.696,00
1243	RUKANTO	2021	2021-09-22	2021402010000852	1.791.696,00	52	0,00	0,00	0,00	1.791.696,00	1.791.696,00	0,00	0,00	0,00	1.791.696,00	1.791.696,00
1244	RUKANTO	2021	2021-02-01	20214020100506	1.791.696,00	59	0,00	0,00	0,00	1.791.696,00	1.791.696,00	0,00	0,00	0,00	1.791.696,00	1.791.696,00
1245	RUKANTO	2021	2021-02-01	20214020100507	1.791.696,00	59	0,00	0,00	0,00	1.791.696,00	1.791.696,00	0,00	0,00	0,00	1.791.696,00	1.791.696,00

No	Subjek Nama	Tahun	Tgl SKRD	Kode Bayar	Putang	Penyisihan Putang										
					Sakdo Akhir2025	Tunggakan	Kriteria Putang					Penyisihan Putang Tidak Tertagih				
							Lancar (0 sd 1 Bulan)	Kurang Lancar (1 sd 3 Bulan)	Diragukan (3 sd 12 Bulan)	Macet (Lebih dari 12 Bulan)	Jumhh	Kualitas Lancar (0,5 %)	Kualitas Kurang Lancar (10 %)	Kualitas Diragukan (50 %)	Kualitas Macet (100 %)	Jumlah
1246	RUKANTO	2023	2023-07-12	3271234020000330	2.243.532,00	30	0,00	0,00	0,00	2.243.532,00	2.243.532,00	0,00	0,00	0,00	2.243.532,00	2.243.532,00
1247	Hj.ZahroulAini	2024	2024-02-20	3271244020000264	3.347.568,00	23	0,00	0,00	0,00	3.347.568,00	3.347.568,00	0,00	0,00	0,00	3.347.568,00	3.347.568,00
1248	YANDI RACHYANDI	2021	2021-12-03	3271214020001308	846.384,00	49	0,00	0,00	0,00	846.384,00	846.384,00	0,00	0,00	0,00	846.384,00	846.384,00
1249	YANDI RACHYANDI	2021	2021-09-22	2021402010000798	846.384,00	52	0,00	0,00	0,00	846.384,00	846.384,00	0,00	0,00	0,00	846.384,00	846.384,00
1250	YANDI RACHYANDI	2021	2021-01-29	20214020100468	846.384,00	60	0,00	0,00	0,00	846.384,00	846.384,00	0,00	0,00	0,00	846.384,00	846.384,00
1251	YANDI RACHYANDI	2021	2021-01-29	20214020100469	846.384,00	60	0,00	0,00	0,00	846.384,00	846.384,00	0,00	0,00	0,00	846.384,00	846.384,00
1252	Sukimin	2024	2024-02-20	3271244020000350	1.839.096,00	23	0,00	0,00	0,00	1.839.096,00	1.839.096,00	0,00	0,00	0,00	1.839.096,00	1.839.096,00
1253	SUKIMIN	2021	2021-12-03	3271214020001378	978.288,00	49	0,00	0,00	0,00	978.288,00	978.288,00	0,00	0,00	0,00	978.288,00	978.288,00
1254	SUKIMIN	2021	2021-09-22	2021402010001021	978.288,00	52	0,00	0,00	0,00	978.288,00	978.288,00	0,00	0,00	0,00	978.288,00	978.288,00
1255	SUKIMIN	2021	2021-02-01	20214020100623	978.288,00	59	0,00	0,00	0,00	978.288,00	978.288,00	0,00	0,00	0,00	978.288,00	978.288,00
1256	SUKIMIN	2023	2023-07-12	3271234020000339	1.224.996,00	30	0,00	0,00	0,00	1.224.996,00	1.224.996,00	0,00	0,00	0,00	1.224.996,00	1.224.996,00
1257	Bantu Cut,Se	2024	2024-02-20	3271244020000243	1.219.176,00	23	0,00	0,00	0,00	1.219.176,00	1.219.176,00	0,00	0,00	0,00	1.219.176,00	1.219.176,00
1258	CARLI LAROSA	2021	2021-12-03	3271214020001288	604.560,00	49	0,00	0,00	0,00	604.560,00	604.560,00	0,00	0,00	0,00	604.560,00	604.560,00
1259	CARLI LAROSA	2021	2021-09-22	2021402010000736	604.560,00	52	0,00	0,00	0,00	604.560,00	604.560,00	0,00	0,00	0,00	604.560,00	604.560,00
1260	CARLI LAROSA	2021	2021-01-29	20214020100426	604.560,00	60	0,00	0,00	0,00	604.560,00	604.560,00	0,00	0,00	0,00	604.560,00	604.560,00
1261	CARLI LAROSA	2021	2021-01-29	20214020100427	604.560,00	60	0,00	0,00	0,00	604.560,00	604.560,00	0,00	0,00	0,00	604.560,00	604.560,00
1262	Tuti Traningah	2024	2024-02-20	3271244020000294	1.756.440,00	23	0,00	0,00	0,00	1.756.440,00	1.756.440,00	0,00	0,00	0,00	1.756.440,00	1.756.440,00
1263	ABIH BIN HASAN	2021	2021-12-03	3271214020001335	934.320,00	49	0,00	0,00	0,00	934.320,00	934.320,00	0,00	0,00	0,00	934.320,00	934.320,00
1264	ABIH BIN HASAN	2021	2021-09-22	2021402010000890	934.320,00	52	0,00	0,00	0,00	934.320,00	934.320,00	0,00	0,00	0,00	934.320,00	934.320,00
1265	ABIH BIN HASAN	2023	2023-07-12	3271234020000268	1.169.940,00	30	0,00	0,00	0,00	1.169.940,00	1.169.940,00	0,00	0,00	0,00	1.169.940,00	1.169.940,00
1266	Si Asah	2024	2024-02-20	3271244020000279	1.570.464,00	23	0,00	0,00	0,00	1.570.464,00	1.570.464,00	0,00	0,00	0,00	1.570.464,00	1.570.464,00
1267	RAHMAT JAELANI	2021	2021-12-03	3271214020001323	1.000.272,00	49	0,00	0,00	0,00	1.000.272,00	1.000.272,00	0,00	0,00	0,00	1.000.272,00	1.000.272,00
1268	RAHMAT JAELANI	2018	2018-11-26	20184020100488	1.000.272,00	86	0,00	0,00	0,00	1.000.272,00	1.000.272,00	0,00	0,00	0,00	1.000.272,00	1.000.272,00
1269	RAHMAT JAELANI	2021	2021-09-22	2021402010000842	1.000.272,00	52	0,00	0,00	0,00	1.000.272,00	1.000.272,00	0,00	0,00	0,00	1.000.272,00	1.000.272,00
1270	RAHMAT JAELANI	2021	2021-02-01	20214020100498	1.000.272,00	59	0,00	0,00	0,00	1.000.272,00	1.000.272,00	0,00	0,00	0,00	1.000.272,00	1.000.272,00
1271	RAHMAT JAELANI	2021	2021-02-01	20214020100499	1.000.272,00	59	0,00	0,00	0,00	1.000.272,00	1.000.272,00	0,00	0,00	0,00	1.000.272,00	1.000.272,00
1272	RAHMAT JAELANI	2023	2023-07-12	3271234020000320	1.252.524,00	30	0,00	0,00	0,00	1.252.524,00	1.252.524,00	0,00	0,00	0,00	1.252.524,00	1.252.524,00
1273	Yanuari Tabumbanua	2024	2024-02-20	3271244020000262	3.430.224,00	23	0,00	0,00	0,00	3.430.224,00	3.430.224,00	0,00	0,00	0,00	3.430.224,00	3.430.224,00
1274	TAN PENG LEN	2021	2021-12-03	3271214020001306	934.320,00	49	0,00	0,00	0,00	934.320,00	934.320,00	0,00	0,00	0,00	934.320,00	934.320,00
1275	TAN PENG LEN	2018	2018-11-26	20184020100471	934.320,00	86	0,00	0,00	0,00	934.320,00	934.320,00	0,00	0,00	0,00	934.320,00	934.320,00
1276	TAN PENG LEN	2021	2021-01-29	20214020100464	934.320,00	60	0,00	0,00	0,00	934.320,00	934.320,00	0,00	0,00	0,00	934.320,00	934.320,00
1277	TAN PENG LEN	2021	2021-01-29	20214020100465	934.320,00	60	0,00	0,00	0,00	934.320,00	934.320,00	0,00	0,00	0,00	934.320,00	934.320,00
1278	Roni Mulyani	2024	2024-02-20	3271244020000268	1.673.784,00	23	0,00	0,00	0,00	1.673.784,00	1.673.784,00	0,00	0,00	0,00	1.673.784,00	1.673.784,00
1279	SARTIN	2021	2021-02-01	20214020100477	1.516.896,00	59	0,00	0,00	0,00	1.516.896,00	1.516.896,00	0,00	0,00	0,00	1.516.896,00	1.516.896,00
1280	Asep Haryadi	2024	2024-02-20	3271244020000270	929.880,00	23	0,00	0,00	0,00	929.880,00	929.880,00	0,00	0,00	0,00	929.880,00	929.880,00

No	Subjek Nama	Tahun	Tgl SKRD	Kode Bayar	Pinang	Penyisihan Pinang										
					Sakdo Akhir2025	Tunggakan	Kriteria Pinang					Penyisihan Pinang Tidak Tertagih				
							Lancar (0 sd 1 Bulan)	Kurang Lancar (1 sd 3 Bulan)	Diragukan (3 sd 12 Bulan)	Macet (Lebih dari 12 Bulan)	Jumhh	Kualitas Lancar(0,5 %)	Kualitas Kurang Lancar (10 %)	Kualitas Diragukan (50 %)	Kualitas Macet (100 %)	Jumlah
1281	EMPAT FATIMAH	2021	2021-12-03	3271214020001314	1.890.624,00	49	0,00	0,00	0,00	1.890.624,00	1.890.624,00	0,00	0,00	0,00	1.890.624,00	1.890.624,00
1282	EMPAT FATIMAH	2021	2021-09-22	2021402010000809	1.890.624,00	52	0,00	0,00	0,00	1.890.624,00	1.890.624,00	0,00	0,00	0,00	1.890.624,00	1.890.624,00
1283	EMPAT FATIMAH	2021	2021-02-01	20214020100480	1.890.624,00	59	0,00	0,00	0,00	1.890.624,00	1.890.624,00	0,00	0,00	0,00	1.890.624,00	1.890.624,00
1284	EMPAT FATIMAH	2021	2021-02-01	20214020100481	1.890.624,00	59	0,00	0,00	0,00	1.890.624,00	1.890.624,00	0,00	0,00	0,00	1.890.624,00	1.890.624,00
1285	Karjinh	2024	2024-02-20	3271244020000297	1.405.152,00	23	0,00	0,00	0,00	1.405.152,00	1.405.152,00	0,00	0,00	0,00	1.405.152,00	1.405.152,00
1286	SARUMI	2021	2021-12-03	3271214020001338	934.320,00	49	0,00	0,00	0,00	934.320,00	934.320,00	0,00	0,00	0,00	934.320,00	934.320,00
1287	SARUMI	2021	2021-01-01	3271214020001564	912.336,00	60	0,00	0,00	0,00	912.336,00	912.336,00	0,00	0,00	0,00	912.336,00	912.336,00
1288	SARUMI	2021	2021-09-22	2021402010000898	934.320,00	52	0,00	0,00	0,00	934.320,00	934.320,00	0,00	0,00	0,00	934.320,00	934.320,00
1289	SARUMI	2021	2021-02-01	20214020100533	934.320,00	59	0,00	0,00	0,00	934.320,00	934.320,00	0,00	0,00	0,00	934.320,00	934.320,00
1290	Rahmat Jaclmi	2024	2024-02-20	3271244020000280	1.880.424,00	23	0,00	0,00	0,00	1.880.424,00	1.880.424,00	0,00	0,00	0,00	1.880.424,00	1.880.424,00
1291	MINARSIH	2021	2021-12-03	3271214020001324	384.720,00	49	0,00	0,00	0,00	384.720,00	384.720,00	0,00	0,00	0,00	384.720,00	384.720,00
1292	MINARSIH	2021	2021-09-22	2021402010000844	384.720,00	52	0,00	0,00	0,00	384.720,00	384.720,00	0,00	0,00	0,00	384.720,00	384.720,00
1293	MINARSIH	2021	2021-02-01	20214020100500	384.720,00	59	0,00	0,00	0,00	384.720,00	384.720,00	0,00	0,00	0,00	384.720,00	384.720,00
1294	MINARSIH	2021	2021-02-01	20214020100501	384.720,00	59	0,00	0,00	0,00	384.720,00	384.720,00	0,00	0,00	0,00	384.720,00	384.720,00
1295	H. T. Suryana	2024	2024-02-20	3271244020000293	3.099.600,00	23	0,00	0,00	0,00	3.099.600,00	3.099.600,00	0,00	0,00	0,00	3.099.600,00	3.099.600,00
1296	HENI SURYANI	2023	2023-11-20	3271234020000737	679.560,00	26	0,00	0,00	0,00	679.560,00	679.560,00	0,00	0,00	0,00	679.560,00	679.560,00
1297	Hj. Sunyami/DewiReniWiduri	2024	2024-02-20	3271244020000307	2.479.680,00	23	0,00	0,00	0,00	2.479.680,00	2.479.680,00	0,00	0,00	0,00	2.479.680,00	2.479.680,00
1298	Ong Alen	2024	2024-02-20	3271244020000310	2.521.008,00	23	0,00	0,00	0,00	2.521.008,00	2.521.008,00	0,00	0,00	0,00	2.521.008,00	2.521.008,00
1299	ONG ALEN	2023	2023-07-12	3271234020000317	1.679.208,00	30	0,00	0,00	0,00	1.679.208,00	1.679.208,00	0,00	0,00	0,00	1.679.208,00	1.679.208,00
1300	Rakjcn	2024	2024-02-20	3271244020000282	867.888,00	23	0,00	0,00	0,00	867.888,00	867.888,00	0,00	0,00	0,00	867.888,00	867.888,00
1301	IDA SUDARTI	2021	2021-12-03	3271214020001327	956.304,00	49	0,00	0,00	0,00	956.304,00	956.304,00	0,00	0,00	0,00	956.304,00	956.304,00
1302	IDA SUDARTI	2018	2018-11-26	20184020100491	956.304,00	86	0,00	0,00	0,00	956.304,00	956.304,00	0,00	0,00	0,00	956.304,00	956.304,00
1303	IDA SUDARTI	2021	2021-09-22	2021402010000849	956.304,00	52	0,00	0,00	0,00	956.304,00	956.304,00	0,00	0,00	0,00	956.304,00	956.304,00
1304	IDA SUDARTI	2021	2021-02-01	20214020100504	956.304,00	59	0,00	0,00	0,00	956.304,00	956.304,00	0,00	0,00	0,00	956.304,00	956.304,00
1305	IDA SUDARTI	2021	2021-02-01	20214020100505	956.304,00	59	0,00	0,00	0,00	956.304,00	956.304,00	0,00	0,00	0,00	956.304,00	956.304,00
1306	IDA SUDARTI	2023	2023-07-12	3271234020000298	1.197.468,00	30	0,00	0,00	0,00	1.197.468,00	1.197.468,00	0,00	0,00	0,00	1.197.468,00	1.197.468,00
1307	FANNY SARI WIJAYANTI	2024	2024-01-23	3271244020000027	879.360,00	24	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00
1308	Fanny Sari Wijyanti	2024	2024-08-13	3271244020000437	879.360,00	17	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00
1309	A. Sarjono	2024	2024-02-20	3271244020000239	1.136.520,00	23	0,00	0,00	0,00	1.136.520,00	1.136.520,00	0,00	0,00	0,00	1.136.520,00	1.136.520,00
1310	TITI YANTO	2021	2021-12-03	3271214020001284	593.568,00	49	0,00	0,00	0,00	593.568,00	593.568,00	0,00	0,00	0,00	593.568,00	593.568,00
1311	TITI YANTO	2018	2018-11-26	20184020100449	593.568,00	86	0,00	0,00	0,00	593.568,00	593.568,00	0,00	0,00	0,00	593.568,00	593.568,00
1312	TITI YANTO	2021	2021-09-22	2021402010000730	593.568,00	52	0,00	0,00	0,00	593.568,00	593.568,00	0,00	0,00	0,00	593.568,00	593.568,00
1313	TITI YANTO	2021	2021-01-29	20214020100418	593.568,00	60	0,00	0,00	0,00	593.568,00	593.568,00	0,00	0,00	0,00	593.568,00	593.568,00
1314	TITI YANTO	2021	2021-01-29	20214020100419	593.568,00	60	0,00	0,00	0,00	593.568,00	593.568,00	0,00	0,00	0,00	593.568,00	593.568,00
1315	TITI YANTO	2023	2023-07-12	3271234020000362	743.256,00	30	0,00	0,00	0,00	743.256,00	743.256,00	0,00	0,00	0,00	743.256,00	743.256,00

No	Subjek Nama	Tahun	Tgl SKRD	Kode Bayar	Putang	Penyisihan Putang										
					Sakdo Akhir2025	Tunggakan	Kriteria Putang					Penyisihan Putang Tidak Tertagih				
							Lancar (0 sd 1 Bulan)	Kurang Lancar (1 sd 3 Bulan)	Diragukan (3 sd 12 Bulan)	Macet (Lebih dari 12 Bulan)	Jumhh	Kualitas Lancar(0,5 %)	Kualitas Kurang Lancar (10 %)	Kualitas Diragukan (50 %)	Kualitas Macet (100 %)	Jumlah
1316	Minarsih	2024	2024-02-20	3271244020000281	723.240,00	23	0,00	0,00	0,00	723.240,00	723.240,00	0,00	0,00	0,00	723.240,00	723.240,00
1317	Surisno Widodo	2024	2024-02-20	3271244020000290	2.768.976,00	23	0,00	0,00	0,00	2.768.976,00	2.768.976,00	0,00	0,00	0,00	2.768.976,00	2.768.976,00
1318	Tan Peng Len	2024	2024-02-20	3271244020000263	1.756.440,00	23	0,00	0,00	0,00	1.756.440,00	1.756.440,00	0,00	0,00	0,00	1.756.440,00	1.756.440,00
1319	HJ.ZAHROTUL AINI	2023	2023-07-12	3271234020000294	2.229.768,00	30	0,00	0,00	0,00	2.229.768,00	2.229.768,00	0,00	0,00	0,00	2.229.768,00	2.229.768,00
1320	Wawang Juandi	2024	2024-02-20	3271244020000253	909.216,00	23	0,00	0,00	0,00	909.216,00	909.216,00	0,00	0,00	0,00	909.216,00	909.216,00
1321	TETI ASWATI	2021	2021-12-03	3271214020001297	637.536,00	49	0,00	0,00	0,00	637.536,00	637.536,00	0,00	0,00	0,00	637.536,00	637.536,00
1322	TETI ASWATI	2018	2018-11-26	20184020100463	637.536,00	86	0,00	0,00	0,00	637.536,00	637.536,00	0,00	0,00	0,00	637.536,00	637.536,00
1323	TETI ASWATI	2021	2021-01-29	20214020100446	637.536,00	60	0,00	0,00	0,00	637.536,00	637.536,00	0,00	0,00	0,00	637.536,00	637.536,00
1324	TETI ASWATI	2021	2021-01-29	20214020100447	637.536,00	60	0,00	0,00	0,00	637.536,00	637.536,00	0,00	0,00	0,00	637.536,00	637.536,00
1325	R.Suharim dini	2024	2024-02-20	3271244020000323	2.851.632,00	23	0,00	0,00	0,00	2.851.632,00	2.851.632,00	0,00	0,00	0,00	2.851.632,00	2.851.632,00
1326	R.Suharim dini	2024	2024-02-20	3271244020000349	1.735.776,00	23	0,00	0,00	0,00	1.735.776,00	1.735.776,00	0,00	0,00	0,00	1.735.776,00	1.735.776,00
1327	Hj.Sunyani/Herlin Mardiani	2024	2024-02-20	3271244020000303	4.050.144,00	23	0,00	0,00	0,00	4.050.144,00	4.050.144,00	0,00	0,00	0,00	4.050.144,00	4.050.144,00
1328	Hj.Sunyani/Herlin Mardiani	2024	2024-02-20	3271244020000308	2.087.064,00	23	0,00	0,00	0,00	2.087.064,00	2.087.064,00	0,00	0,00	0,00	2.087.064,00	2.087.064,00
1329	Ramelan	2024	2024-02-20	3271244020000332	1.797.768,00	23	0,00	0,00	0,00	1.797.768,00	1.797.768,00	0,00	0,00	0,00	1.797.768,00	1.797.768,00
1330	RAMELAN	2021	2021-12-03	3271214020001363	956.304,00	49	0,00	0,00	0,00	956.304,00	956.304,00	0,00	0,00	0,00	956.304,00	956.304,00
1331	RAMELAN	2021	2021-09-22	2021402010000973	956.304,00	52	0,00	0,00	0,00	956.304,00	956.304,00	0,00	0,00	0,00	956.304,00	956.304,00
1332	RAMELAN	2021	2021-02-01	20214020100591	956.304,00	59	0,00	0,00	0,00	956.304,00	956.304,00	0,00	0,00	0,00	956.304,00	956.304,00
1333	RAMELAN	2021	2021-02-01	20214020100592	956.304,00	59	0,00	0,00	0,00	956.304,00	956.304,00	0,00	0,00	0,00	956.304,00	956.304,00
1334	RAMELAN	2023	2023-07-12	3271234020000322	1.197.468,00	30	0,00	0,00	0,00	1.197.468,00	1.197.468,00	0,00	0,00	0,00	1.197.468,00	1.197.468,00
1335	HariSetiono	2024	2024-02-20	3271244020000324	3.864.168,00	23	0,00	0,00	0,00	3.864.168,00	3.864.168,00	0,00	0,00	0,00	3.864.168,00	3.864.168,00
1336	Rujiman Manurung	2024	2024-02-20	3271244020000257	2.644.992,00	23	0,00	0,00	0,00	2.644.992,00	2.644.992,00	0,00	0,00	0,00	2.644.992,00	2.644.992,00
1337	YURNIZA	2021	2021-01-13	20214020100455	2.319.312,00	60	0,00	0,00	0,00	2.319.312,00	2.319.312,00	0,00	0,00	0,00	2.319.312,00	2.319.312,00
1338	Suratni	2024	2024-02-20	3271244020000337	1.136.520,00	23	0,00	0,00	0,00	1.136.520,00	1.136.520,00	0,00	0,00	0,00	1.136.520,00	1.136.520,00
1339	Daik	2024	2024-02-20	3271244020000273	1.839.096,00	23	0,00	0,00	0,00	1.839.096,00	1.839.096,00	0,00	0,00	0,00	1.839.096,00	1.839.096,00
1340	Maria Lambok	2023	2023-12-04	3271234020000789	1.732.320,00	25	0,00	0,00	0,00	1.732.320,00	1.732.320,00	0,00	0,00	0,00	1.732.320,00	1.732.320,00
1341	Suradi	2024	2024-02-20	3271244020000299	1.549.800,00	23	0,00	0,00	0,00	1.549.800,00	1.549.800,00	0,00	0,00	0,00	1.549.800,00	1.549.800,00
1342	HANDAYANI	2021	2021-12-03	3271214020001340	439.680,00	49	0,00	0,00	0,00	439.680,00	439.680,00	0,00	0,00	0,00	439.680,00	439.680,00
1343	HANDAYANI	2021	2021-09-22	2021402010000903	439.680,00	52	0,00	0,00	0,00	439.680,00	439.680,00	0,00	0,00	0,00	439.680,00	439.680,00
1344	Jem	2024	2024-02-20	3271244020000354	1.012.536,00	23	0,00	0,00	0,00	1.012.536,00	1.012.536,00	0,00	0,00	0,00	1.012.536,00	1.012.536,00
1345	JIEM	2021	2021-12-03	3271214020001381	538.608,00	49	0,00	0,00	0,00	538.608,00	538.608,00	0,00	0,00	0,00	538.608,00	538.608,00
1346	JIEM	2021	2021-09-22	2021402010001029	538.608,00	52	0,00	0,00	0,00	538.608,00	538.608,00	0,00	0,00	0,00	538.608,00	538.608,00
1347	JIEM	2021	2021-02-01	20214020100630	538.608,00	59	0,00	0,00	0,00	538.608,00	538.608,00	0,00	0,00	0,00	538.608,00	538.608,00
1348	Yandi Rachyandi	2024	2024-02-20	3271244020000265	1.591.128,00	23	0,00	0,00	0,00	1.591.128,00	1.591.128,00	0,00	0,00	0,00	1.591.128,00	1.591.128,00
1349	DEDEH NURSEHA	2021	2021-01-29	20214020100470	1.978.560,00	60	0,00	0,00	0,00	1.978.560,00	1.978.560,00	0,00	0,00	0,00	1.978.560,00	1.978.560,00
1350	Abih Bin Hasan	2024	2024-02-20	3271244020000295	1.756.440,00	23	0,00	0,00	0,00	1.756.440,00	1.756.440,00	0,00	0,00	0,00	1.756.440,00	1.756.440,00

No	Subjek Nama	Tahun	Tgl SKRD	Kode Bayar	Pinang	Penyisihan Pinang										
					Sakdo Akhir2025	Tunggakan	Kriteria Pinang					Penyisihan Pinang Tidak Tertagih				
							Lancar (0 sd 1 Bulan)	Kurang Lancar (1 sd 3 Bulan)	Diragukan (3 sd 12 Bulan)	Macet (Lebih dari 12 Bulan)	Jumhh	Kualitas Lancar(0,5 %)	Kualitas Kurang Lancar (10 %)	Kualitas Diragukan (50 %)	Kualitas Macet (100 %)	Jumlah
1351	SUPARMi	2021	2021-12-03	3271214020001336	1.000.272,00	49	0,00	0,00	0,00	1.000.272,00	1.000.272,00	0,00	0,00	0,00	1.000.272,00	1.000.272,00
1352	SUPARMi	2018	2018-11-26	20184020100504	1.000.272,00	86	0,00	0,00	0,00	1.000.272,00	1.000.272,00	0,00	0,00	0,00	1.000.272,00	1.000.272,00
1353	SUPARMi	2021	2021-09-22	2021402010000892	1.000.272,00	52	0,00	0,00	0,00	1.000.272,00	1.000.272,00	0,00	0,00	0,00	1.000.272,00	1.000.272,00
1354	SUPARMi	2021	2021-02-01	20214020100528	1.000.272,00	59	0,00	0,00	0,00	1.000.272,00	1.000.272,00	0,00	0,00	0,00	1.000.272,00	1.000.272,00
1355	SUPARMi	2021	2021-02-01	20214020100529	1.000.272,00	59	0,00	0,00	0,00	1.000.272,00	1.000.272,00	0,00	0,00	0,00	1.000.272,00	1.000.272,00
1356	SUPARMi	2023	2023-07-12	3271234020000346	1.252.524,00	30	0,00	0,00	0,00	1.252.524,00	1.252.524,00	0,00	0,00	0,00	1.252.524,00	1.252.524,00
1357	Sumarti	2024	2024-02-20	3271244020000373	1.033.200,00	23	0,00	0,00	0,00	1.033.200,00	1.033.200,00	0,00	0,00	0,00	1.033.200,00	1.033.200,00
1358	SUMARTI	2021	2021-12-03	3271214020001396	549.600,00	49	0,00	0,00	0,00	549.600,00	549.600,00	0,00	0,00	0,00	549.600,00	549.600,00
1359	NURHAYATI	2021	2021-01-07	20214020100185	430.920,00	60	0,00	0,00	0,00	430.920,00	430.920,00	0,00	0,00	0,00	430.920,00	430.920,00
1360	NURHAYATI	2021	2021-01-07	20214020100186	430.920,00	60	0,00	0,00	0,00	430.920,00	430.920,00	0,00	0,00	0,00	430.920,00	430.920,00
1361	NURHAYATI	2023	2023-07-12	3271234020000315	688.200,00	30	0,00	0,00	0,00	688.200,00	688.200,00	0,00	0,00	0,00	688.200,00	688.200,00
1362	Eva Mellyana	2024	2024-02-20	3271244020000291	2.686.320,00	23	0,00	0,00	0,00	2.686.320,00	2.686.320,00	0,00	0,00	0,00	2.686.320,00	2.686.320,00
1363	Tintawati	2024	2024-02-20	3271244020000333	1.570.464,00	23	0,00	0,00	0,00	1.570.464,00	1.570.464,00	0,00	0,00	0,00	1.570.464,00	1.570.464,00
1364	TINTAWATI	2021	2021-12-03	3271214020001364	835.392,00	49	0,00	0,00	0,00	835.392,00	835.392,00	0,00	0,00	0,00	835.392,00	835.392,00
1365	TINTAWATI	2021	2021-01-01	3271214020001563	835.392,00	60	0,00	0,00	0,00	835.392,00	835.392,00	0,00	0,00	0,00	835.392,00	835.392,00
1366	TINTAWATI	2018	2018-11-26	20184020100536	835.392,00	86	0,00	0,00	0,00	835.392,00	835.392,00	0,00	0,00	0,00	835.392,00	835.392,00
1367	TINTAWATI	2021	2021-02-01	20214020100593	835.392,00	59	0,00	0,00	0,00	835.392,00	835.392,00	0,00	0,00	0,00	835.392,00	835.392,00
1368	TINTAWATI	2021	2021-02-01	20214020100594	835.392,00	59	0,00	0,00	0,00	835.392,00	835.392,00	0,00	0,00	0,00	835.392,00	835.392,00
1369	Supardi	2024	2024-02-20	3271244020000267	1.653.120,00	23	0,00	0,00	0,00	1.653.120,00	1.653.120,00	0,00	0,00	0,00	1.653.120,00	1.653.120,00
1370	RONI MULYANI	2021	2021-12-03	3271214020001311	890.352,00	49	0,00	0,00	0,00	890.352,00	890.352,00	0,00	0,00	0,00	890.352,00	890.352,00
1371	Suparmi	2024	2024-02-20	3271244020000296	1.880.424,00	23	0,00	0,00	0,00	1.880.424,00	1.880.424,00	0,00	0,00	0,00	1.880.424,00	1.880.424,00
1372	KARINAH	2021	2021-12-03	3271214020001337	747.456,00	49	0,00	0,00	0,00	747.456,00	747.456,00	0,00	0,00	0,00	747.456,00	747.456,00
1373	KARINAH	2021	2021-09-22	2021402010000894	747.456,00	52	0,00	0,00	0,00	747.456,00	747.456,00	0,00	0,00	0,00	747.456,00	747.456,00
1374	KARINAH	2021	2021-02-01	20214020100530	747.456,00	59	0,00	0,00	0,00	747.456,00	747.456,00	0,00	0,00	0,00	747.456,00	747.456,00
1375	KARINAH	2021	2021-02-01	20214020100531	747.456,00	59	0,00	0,00	0,00	747.456,00	747.456,00	0,00	0,00	0,00	747.456,00	747.456,00
1376	SITI SALMAH	2023	2023-11-20	3271234020000768	737.808,00	26	0,00	0,00	0,00	737.808,00	737.808,00	0,00	0,00	0,00	737.808,00	737.808,00
1377	Doretea Rin	2024	2024-02-20	3271244020000331	1.963.080,00	23	0,00	0,00	0,00	1.963.080,00	1.963.080,00	0,00	0,00	0,00	1.963.080,00	1.963.080,00
1378	DORETEA RIRIN	2021	2021-12-03	3271214020001362	1.044.240,00	49	0,00	0,00	0,00	1.044.240,00	1.044.240,00	0,00	0,00	0,00	1.044.240,00	1.044.240,00
1379	DORETEA RIRIN	2021	2021-09-22	2021402010000971	1.044.240,00	52	0,00	0,00	0,00	1.044.240,00	1.044.240,00	0,00	0,00	0,00	1.044.240,00	1.044.240,00
1380	DORETEA RIRIN	2021	2021-02-01	20214020100589	1.044.240,00	59	0,00	0,00	0,00	1.044.240,00	1.044.240,00	0,00	0,00	0,00	1.044.240,00	1.044.240,00
1381	DORETEA RIRIN	2021	2021-02-01	20214020100590	1.044.240,00	59	0,00	0,00	0,00	1.044.240,00	1.044.240,00	0,00	0,00	0,00	1.044.240,00	1.044.240,00
1382	Ekye Takalalumang	2024	2024-02-20	3271244020000367	2.045.736,00	23	0,00	0,00	0,00	2.045.736,00	2.045.736,00	0,00	0,00	0,00	2.045.736,00	2.045.736,00
1383	ELSYE TAKALALUMANG	2021	2021-12-03	3271214020001392	1.088.208,00	49	0,00	0,00	0,00	1.088.208,00	1.088.208,00	0,00	0,00	0,00	1.088.208,00	1.088.208,00
1384	ELSYE TAKALALUMANG	2021	2021-09-22	2021402010001028	1.088.208,00	52	0,00	0,00	0,00	1.088.208,00	1.088.208,00	0,00	0,00	0,00	1.088.208,00	1.088.208,00
1385	ELSYE TAKALALUMANG	2021	2021-02-01	20214020100654	1.088.208,00	59	0,00	0,00	0,00	1.088.208,00	1.088.208,00	0,00	0,00	0,00	1.088.208,00	1.088.208,00

No	Subjek Nama	Tahun	Tgl SKRD	Kode Bayar	Pinang	Penyisihan Pinang										
					Sakdo Akhir2025	Tunggakan	Kriteria Pinang					Penyisihan Pinang Tidak Tertagih				
							Lancar (0 sd 1 Bulan)	Kurang Lancar (1 sd 3 Bulan)	Diragukan (3 sd 12 Bulan)	Macet (Lebih dari 12 Bulan)	Jumlah	Kualitas Lancar (0,5 %)	Kualitas Kurang Lancar (10 %)	Kualitas Diragukan (50 %)	Kualitas Macet (100 %)	Jumlah
1386	Dr.IDA MARIATI HUTABARAT	2021	2021-01-29	20214020100434	2.429.232,00	60	0,00	0,00	0,00	2.429.232,00	2.429.232,00	0,00	0,00	0,00	2.429.232,00	2.429.232,00
1387	Dr.IDA MARIATI HUTABARAT	2021	2021-01-29	20214020100435	2.429.232,00	60	0,00	0,00	0,00	2.429.232,00	2.429.232,00	0,00	0,00	0,00	2.429.232,00	2.429.232,00
1388	Tsi	2024	2024-02-20	3271244020000285	2.087.064,00	23	0,00	0,00	0,00	2.087.064,00	2.087.064,00	0,00	0,00	0,00	2.087.064,00	2.087.064,00
1389	DIANA WIDIANINGSIH	2021	2021-12-03	3271214020001329	835.392,00	49	0,00	0,00	0,00	835.392,00	835.392,00	0,00	0,00	0,00	835.392,00	835.392,00
1390	DIANA WIDIANINGSIH	2021	2021-09-22	2021402010000859	835.392,00	52	0,00	0,00	0,00	835.392,00	835.392,00	0,00	0,00	0,00	835.392,00	835.392,00
1391	DIANA WIDIANINGSIH	2021	2021-02-01	20214020100508	835.392,00	59	0,00	0,00	0,00	835.392,00	835.392,00	0,00	0,00	0,00	835.392,00	835.392,00
1392	DIANA WIDIANINGSIH	2021	2021-02-01	20214020100509	835.392,00	59	0,00	0,00	0,00	835.392,00	835.392,00	0,00	0,00	0,00	835.392,00	835.392,00
1393	Suwanto	2024	2024-02-20	3271244020000249	2.169.720,00	23	0,00	0,00	0,00	2.169.720,00	2.169.720,00	0,00	0,00	0,00	2.169.720,00	2.169.720,00
1394	IDA HAPSAH	2021	2021-12-03	3271214020001294	3.132.720,00	49	0,00	0,00	0,00	3.132.720,00	3.132.720,00	0,00	0,00	0,00	3.132.720,00	3.132.720,00
1395	IDA HAPSAH	2023	2023-07-18	3271234020000474	3.922.740,00	30	0,00	0,00	0,00	3.922.740,00	3.922.740,00	0,00	0,00	0,00	3.922.740,00	3.922.740,00
1396	IDA HAPSAH	2018	2018-11-26	20184020100459	3.132.720,00	86	0,00	0,00	0,00	3.132.720,00	3.132.720,00	0,00	0,00	0,00	3.132.720,00	3.132.720,00
1397	IDA HAPSAH	2021	2021-09-22	2021402010000747	3.132.720,00	52	0,00	0,00	0,00	3.132.720,00	3.132.720,00	0,00	0,00	0,00	3.132.720,00	3.132.720,00
1398	IDA HAPSAH	2021	2021-01-29	20214020100438	3.132.720,00	60	0,00	0,00	0,00	3.132.720,00	3.132.720,00	0,00	0,00	0,00	3.132.720,00	3.132.720,00
1399	IDA HAPSAH	2021	2021-01-29	20214020100439	3.132.720,00	60	0,00	0,00	0,00	3.132.720,00	3.132.720,00	0,00	0,00	0,00	3.132.720,00	3.132.720,00
1400	Sianny	2024	2024-02-20	3271244020000312	826.560,00	23	0,00	0,00	0,00	826.560,00	826.560,00	0,00	0,00	0,00	826.560,00	826.560,00
1401	SIANNY	2021	2021-09-22	2021402010000926	439.680,00	52	0,00	0,00	0,00	439.680,00	439.680,00	0,00	0,00	0,00	439.680,00	439.680,00
1402	SIANNY	2021	2021-02-01	20214020100551	439.680,00	59	0,00	0,00	0,00	439.680,00	439.680,00	0,00	0,00	0,00	439.680,00	439.680,00
1403	SIANNY	2021	2021-02-01	20214020100552	439.680,00	59	0,00	0,00	0,00	439.680,00	439.680,00	0,00	0,00	0,00	439.680,00	439.680,00
1404	AriHaruna	2024	2024-02-20	3271244020000271	3.554.208,00	23	0,00	0,00	0,00	3.554.208,00	3.554.208,00	0,00	0,00	0,00	3.554.208,00	3.554.208,00
1405	LILIS YULISTIAWATI	2021	2021-12-03	3271214020001315	1.286.064,00	49	0,00	0,00	0,00	1.286.064,00	1.286.064,00	0,00	0,00	0,00	1.286.064,00	1.286.064,00
1406	LILIS YULISTIAWATI	2018	2018-11-26	20184020100480	1.286.064,00	86	0,00	0,00	0,00	1.286.064,00	1.286.064,00	0,00	0,00	0,00	1.286.064,00	1.286.064,00
1407	LILIS YULISTIAWATI	2021	2021-02-01	20214020100482	1.286.064,00	59	0,00	0,00	0,00	1.286.064,00	1.286.064,00	0,00	0,00	0,00	1.286.064,00	1.286.064,00
1408	LILIS YULISTIAWATI	2021	2021-02-01	20214020100483	1.286.064,00	59	0,00	0,00	0,00	1.286.064,00	1.286.064,00	0,00	0,00	0,00	1.286.064,00	1.286.064,00
1409	Yuningsih	2024	2024-02-20	3271244020000277	702.576,00	23	0,00	0,00	0,00	702.576,00	702.576,00	0,00	0,00	0,00	702.576,00	702.576,00
1410	TATI MULYATI	2021	2021-12-03	3271214020001321	131.904,00	49	0,00	0,00	0,00	131.904,00	131.904,00	0,00	0,00	0,00	131.904,00	131.904,00
1411	TATI MULYATI	2021	2021-09-22	2021402010000833	131.904,00	52	0,00	0,00	0,00	131.904,00	131.904,00	0,00	0,00	0,00	131.904,00	131.904,00
1412	TATI MULYATI	2021	2021-02-01	20214020100494	131.904,00	59	0,00	0,00	0,00	131.904,00	131.904,00	0,00	0,00	0,00	131.904,00	131.904,00
1413	TATI MULYATI	2021	2021-02-01	20214020100495	131.904,00	59	0,00	0,00	0,00	131.904,00	131.904,00	0,00	0,00	0,00	131.904,00	131.904,00
1414	ErnaMaryana	2024	2024-02-20	3271244020000247	1.219.176,00	23	0,00	0,00	0,00	1.219.176,00	1.219.176,00	0,00	0,00	0,00	1.219.176,00	1.219.176,00
1415	Koko Rachmat	2024	2024-02-20	3271244020000302	1.653.120,00	23	0,00	0,00	0,00	1.653.120,00	1.653.120,00	0,00	0,00	0,00	1.653.120,00	1.653.120,00
1416	HJ.SUNYANI	2021	2021-12-03	3271214020001343	8.145.072,00	49	0,00	0,00	0,00	8.145.072,00	8.145.072,00	0,00	0,00	0,00	8.145.072,00	8.145.072,00
1417	HJ.SUNYANI	2021	2021-09-22	2021402010000915	8.145.072,00	52	0,00	0,00	0,00	8.145.072,00	8.145.072,00	0,00	0,00	0,00	8.145.072,00	8.145.072,00
1418	HJ.SUNYANI	2021	2021-02-01	20214020100543	8.145.072,00	59	0,00	0,00	0,00	8.145.072,00	8.145.072,00	0,00	0,00	0,00	8.145.072,00	8.145.072,00
1419	Jella Tambunan	2023	2023-12-04	3271234020000850	1.183.752,00	25	0,00	0,00	0,00	1.183.752,00	1.183.752,00	0,00	0,00	0,00	1.183.752,00	1.183.752,00
1420	Tei Aswari	2024	2024-02-20	3271244020000254	1.198.512,00	23	0,00	0,00	0,00	1.198.512,00	1.198.512,00	0,00	0,00	0,00	1.198.512,00	1.198.512,00

No	Subjek Nama	Tahun	Tgl SKRD	Kode Bayar	Pinang	Penyisihan Pinang										
					Sakdo Akhir2025	Tunggakan	Kriteria Pinang					Penyisihan Pinang Tidak Tertagih				
							Lancar (0 sd 1 Bulan)	Kurang Lancar (1 sd 3 Bulan)	Diragukan (3 sd 12 Bulan)	Macet (Lebih dari 12 Bulan)	Jumlah	Kualitas Lancar (0,5 %)	Kualitas Kurang Lancar (10 %)	Kualitas Diragukan (50 %)	Kualitas Macet (100 %)	Jumlah
1421	SITI SARAH NURJANAH	2021	2021-12-03	3271214020001298	846.384,00	49	0,00	0,00	0,00	846.384,00	846.384,00	0,00	0,00	0,00	846.384,00	846.384,00
1422	SITI SARAH NURJANAH	2018	2018-11-26	20184020100464	846.384,00	86	0,00	0,00	0,00	846.384,00	846.384,00	0,00	0,00	0,00	846.384,00	846.384,00
1423	SITI SARAH NURJANAH	2021	2021-09-22	2021402010000763	846.384,00	52	0,00	0,00	0,00	846.384,00	846.384,00	0,00	0,00	0,00	846.384,00	846.384,00
1424	SITI SARAH NURJANAH	2021	2021-01-29	20214020100448	846.384,00	60	0,00	0,00	0,00	846.384,00	846.384,00	0,00	0,00	0,00	846.384,00	846.384,00
1425	SITI SARAH NURJANAH	2021	2021-01-29	20214020100449	846.384,00	60	0,00	0,00	0,00	846.384,00	846.384,00	0,00	0,00	0,00	846.384,00	846.384,00
1426	SITI SARAH NURJANAH	2023	2023-07-12	3271234020000334	1.059.828,00	30	0,00	0,00	0,00	1.059.828,00	1.059.828,00	0,00	0,00	0,00	1.059.828,00	1.059.828,00
1427	Risa Samuel Sunardi	2024	2024-02-20	3271244020000276	1.384.488,00	23	0,00	0,00	0,00	1.384.488,00	1.384.488,00	0,00	0,00	0,00	1.384.488,00	1.384.488,00
1428	YUNINGSIH	2021	2021-12-03	3271214020001320	373.728,00	49	0,00	0,00	0,00	373.728,00	373.728,00	0,00	0,00	0,00	373.728,00	373.728,00
1429	YUNINGSIH	2018	2018-11-26	20184020100484	373.728,00	86	0,00	0,00	0,00	373.728,00	373.728,00	0,00	0,00	0,00	373.728,00	373.728,00
1430	YUNINGSIH	2021	2021-09-22	2021402010000829	373.728,00	52	0,00	0,00	0,00	373.728,00	373.728,00	0,00	0,00	0,00	373.728,00	373.728,00
1431	YUNINGSIH	2021	2021-02-01	20214020100492	373.728,00	59	0,00	0,00	0,00	373.728,00	373.728,00	0,00	0,00	0,00	373.728,00	373.728,00
1432	YUNINGSIH	2021	2021-02-01	20214020100493	373.728,00	59	0,00	0,00	0,00	373.728,00	373.728,00	0,00	0,00	0,00	373.728,00	373.728,00
1433	YUNINGSIH	2023	2023-07-12	3271234020000370	467.976,00	30	0,00	0,00	0,00	467.976,00	467.976,00	0,00	0,00	0,00	467.976,00	467.976,00
1434	Ratih Ratunahati	2021	2021-01-01	3271214020001450	22.486.625,00	60	0,00	0,00	0,00	22.486.625,00	22.486.625,00	0,00	0,00	0,00	22.486.625,00	22.486.625,00
1435	A. Sarjono	2024	2024-02-20	3271244020000251	2.190.384,00	23	0,00	0,00	0,00	2.190.384,00	2.190.384,00	0,00	0,00	0,00	2.190.384,00	2.190.384,00
1436	Siti Aisah	2024	2024-02-20	3271244020000334	1.053.864,00	23	0,00	0,00	0,00	1.053.864,00	1.053.864,00	0,00	0,00	0,00	1.053.864,00	1.053.864,00
1437	Siti Aisah	2024	2024-02-20	3271244020000335	578.592,00	23	0,00	0,00	0,00	578.592,00	578.592,00	0,00	0,00	0,00	578.592,00	578.592,00
1438	SITI AISAH	2021	2021-12-03	3271214020001322	835.392,00	49	0,00	0,00	0,00	835.392,00	835.392,00	0,00	0,00	0,00	835.392,00	835.392,00
1439	SITI AISAH	2021	2021-12-03	3271214020001409	560.592,00	49	0,00	0,00	0,00	560.592,00	560.592,00	0,00	0,00	0,00	560.592,00	560.592,00
1440	SITI AISAH	2021	2021-01-01	3271214020001548	1.231.104,00	60	0,00	0,00	0,00	1.231.104,00	1.231.104,00	0,00	0,00	0,00	1.231.104,00	1.231.104,00
1441	SITI AISAH	2018	2018-11-26	20184020100487	835.392,00	86	0,00	0,00	0,00	835.392,00	835.392,00	0,00	0,00	0,00	835.392,00	835.392,00
1442	SITI AISAH	2021	2021-09-22	2021402010000839	835.392,00	52	0,00	0,00	0,00	835.392,00	835.392,00	0,00	0,00	0,00	835.392,00	835.392,00
1443	SITI AISAH	2021	2021-09-22	2021402010000977	560.592,00	52	0,00	0,00	0,00	560.592,00	560.592,00	0,00	0,00	0,00	560.592,00	560.592,00
1444	SITI AISAH	2021	2021-02-01	20214020100496	835.392,00	59	0,00	0,00	0,00	835.392,00	835.392,00	0,00	0,00	0,00	835.392,00	835.392,00
1445	SITI AISAH	2021	2021-02-01	20214020100497	835.392,00	59	0,00	0,00	0,00	835.392,00	835.392,00	0,00	0,00	0,00	835.392,00	835.392,00
1446	SITI AISAH	2021	2021-02-01	20214020100595	560.592,00	59	0,00	0,00	0,00	560.592,00	560.592,00	0,00	0,00	0,00	560.592,00	560.592,00
1447	SITI AISAH	2021	2021-02-01	20214020100596	560.592,00	59	0,00	0,00	0,00	560.592,00	560.592,00	0,00	0,00	0,00	560.592,00	560.592,00
1448	K. SUMPENA	2023	2023-09-06	3271234020000669	1.446.276,00	28	0,00	0,00	0,00	1.446.276,00	1.446.276,00	0,00	0,00	0,00	1.446.276,00	1.446.276,00
1449	CEP NURDIN	2024	2024-01-09	3271244020000002	9.858.720,00	24	0,00	0,00	0,00	9.858.720,00	9.858.720,00	0,00	0,00	0,00	9.858.720,00	9.858.720,00
1450	ALI SUHENDAR	2023	2023-09-06	3271234020000644	637.728,00	28	0,00	0,00	0,00	637.728,00	637.728,00	0,00	0,00	0,00	637.728,00	637.728,00
1451	PARTA SUANDA	2023	2023-09-05	3271234020000612	1.366.560,00	28	0,00	0,00	0,00	1.366.560,00	1.366.560,00	0,00	0,00	0,00	1.366.560,00	1.366.560,00
1452	Didi Junaidi	2023	2023-09-06	3271234020000705	1.571.544,00	28	0,00	0,00	0,00	1.571.544,00	1.571.544,00	0,00	0,00	0,00	1.571.544,00	1.571.544,00
1453	Ir. Mardius Haji Tulis	2023	2023-09-25	3271234020000686	1.514.604,00	28	0,00	0,00	0,00	1.514.604,00	1.514.604,00	0,00	0,00	0,00	1.514.604,00	1.514.604,00
1454	ABUN SIDIK	2025	2025-04-22	3271254020000064	3.684.000,00	9	0,00	0,00	3.684.000,00	0,00	3.684.000,00	0,00	0,00	1.842.000,00	0,00	1.842.000,00
1455	NURJAMAN	2023	2023-09-06	3271234020000623	455.520,00	28	0,00	0,00	0,00	455.520,00	455.520,00	0,00	0,00	0,00	455.520,00	455.520,00

No	Subjek Nama	Tahun	Tgl SKRD	Kode Bayar	Putang	Penyisihan Putang										
					Sakdo Akhir2025	Tunggakan	Kriteria Putang					Penyisihan Putang Tidak Tertagih				
							Lancar (0 sd 1 Bulan)	Kurang Lancar (1 sd 3 Bulan)	Diragukan (3 sd 12 Bulan)	Macet (Lebih dari 12 Bulan)	Jumhh	Kualitas Lancar (0,5 %)	Kualitas Kurang Lancar (10 %)	Kualitas Diragukan (50 %)	Kualitas Macet (100 %)	Jumlah
1456	H. AHMAD WAHID	2023	2023-09-05	3271234020000616	2.881.164,00	28	0,00	0,00	0,00	2.881.164,00	2.881.164,00	0,00	0,00	0,00	2.881.164,00	2.881.164,00
1457	H. AHMAD WAHID	2023	2023-09-05	3271234020000617	967.980,00	28	0,00	0,00	0,00	967.980,00	967.980,00	0,00	0,00	0,00	967.980,00	967.980,00
1458	DeniHerdiyanto	2021	2021-01-01	3271214020001499	994.800,00	60	0,00	0,00	0,00	994.800,00	994.800,00	0,00	0,00	0,00	994.800,00	994.800,00
1459	Djunaedi	2023	2023-09-25	3271234020000704	1.184.352,00	28	0,00	0,00	0,00	1.184.352,00	1.184.352,00	0,00	0,00	0,00	1.184.352,00	1.184.352,00
1460	GOW TJENG TIANG	2021	2021-12-02	3271214020001249	290.700,00	49	0,00	0,00	0,00	290.700,00	290.700,00	0,00	0,00	0,00	290.700,00	290.700,00
1461	GOW TJENG TIANG	2021	2021-09-21	2021402010000835	290.700,00	52	0,00	0,00	0,00	290.700,00	290.700,00	0,00	0,00	0,00	290.700,00	290.700,00
1462	GOW TJENG TIANG	2021	2021-01-07	20214020100312	290.700,00	60	0,00	0,00	0,00	290.700,00	290.700,00	0,00	0,00	0,00	290.700,00	290.700,00
1463	GOUW TJING TIANG	2023	2023-07-10	3271234020000153	626.280,00	30	0,00	0,00	0,00	626.280,00	626.280,00	0,00	0,00	0,00	626.280,00	626.280,00
1464	GOUW TJING TIANG	2024	2024-01-23	3271244020000190	934.320,00	24	0,00	0,00	0,00	934.320,00	934.320,00	0,00	0,00	0,00	934.320,00	934.320,00
1465	Gouw Tjing Tung	2024	2024-08-13	3271244020000600	934.320,00	17	0,00	0,00	0,00	934.320,00	934.320,00	0,00	0,00	0,00	934.320,00	934.320,00
1466	ROSITA APOLINA R	2019	2019-04-08	20194020100049	11.235.000,00	81	0,00	0,00	0,00	11.235.000,00	11.235.000,00	0,00	0,00	0,00	11.235.000,00	11.235.000,00
1467	ROSITA APOLINA R	2019	2019-04-08	20194020100050	1.200.000,00	81	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
1468	SUJOTO SUTEDJA	2021	2021-12-02	3271214020001147	273.600,00	49	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00
1469	SUJOTO SUTEDJA	2021	2021-01-01	3271214020001525	273.600,00	60	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00
1470	SUJOTO SUTEDJA	2021	2021-09-21	2021402010000965	273.600,00	52	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00
1471	JUMINTA	2023	2023-09-06	3271234020000620	626.340,00	28	0,00	0,00	0,00	626.340,00	626.340,00	0,00	0,00	0,00	626.340,00	626.340,00
1472	Adjun	2021	2021-01-01	3271214020001472	663.200,00	60	0,00	0,00	0,00	663.200,00	663.200,00	0,00	0,00	0,00	663.200,00	663.200,00
1473	SUPARDI	2023	2023-09-06	3271234020000667	933.816,00	28	0,00	0,00	0,00	933.816,00	933.816,00	0,00	0,00	0,00	933.816,00	933.816,00
1474	H. MAKSUMHENDRAWAN	2023	2023-09-06	3271234020000627	1.537.380,00	28	0,00	0,00	0,00	1.537.380,00	1.537.380,00	0,00	0,00	0,00	1.537.380,00	1.537.380,00
1475	Muhammad Rifki	2022	2022-09-09	3271224020000107	503.250,00	40	0,00	0,00	0,00	503.250,00	503.250,00	0,00	0,00	0,00	503.250,00	503.250,00
1476	Muhammad Rifki	2023	2023-08-29	3271234020000605	2.025.000,00	29	0,00	0,00	0,00	2.025.000,00	2.025.000,00	0,00	0,00	0,00	2.025.000,00	2.025.000,00
1477	BAGJA SUBAGJADI	2023	2023-09-06	3271234020000647	922.428,00	28	0,00	0,00	0,00	922.428,00	922.428,00	0,00	0,00	0,00	922.428,00	922.428,00
1478	WARDI	2023	2023-09-06	3271234020000634	364.416,00	28	0,00	0,00	0,00	364.416,00	364.416,00	0,00	0,00	0,00	364.416,00	364.416,00
1479	BAMBANG.	2021	2021-12-02	3271214020001267	273.600,00	49	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00	0,00	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00
1480	Bambang S	2023	2023-09-25	3271234020000684	808.548,00	28	0,00	0,00	0,00	808.548,00	808.548,00	0,00	0,00	0,00	808.548,00	808.548,00
1481	WAHYU YULIARTO	2025	2025-04-22	3271254020000061	4.236.600,00	9	0,00	0,00	4.236.600,00	0,00	4.236.600,00	0,00	0,00	2.118.300,00	0,00	2.118.300,00
1482	AGUS SADIKIN	2023	2023-09-06	3271234020000648	979.368,00	28	0,00	0,00	0,00	979.368,00	979.368,00	0,00	0,00	0,00	979.368,00	979.368,00
1483	WARSADI,SPD	2025	2025-04-22	3271254020000060	736.800,00	9	0,00	0,00	736.800,00	0,00	736.800,00	0,00	0,00	368.400,00	0,00	368.400,00
1484	DEDY CAHYADI	2023	2023-03-06	3271234020000021	9.080.400,00	34	0,00	0,00	0,00	9.080.400,00	9.080.400,00	0,00	0,00	0,00	9.080.400,00	9.080.400,00
1485	Nining	2023	2023-09-25	3271234020000685	1.218.516,00	28	0,00	0,00	0,00	1.218.516,00	1.218.516,00	0,00	0,00	0,00	1.218.516,00	1.218.516,00
1486	TUTI ATIKAH	2023	2023-09-06	3271234020000646	284.700,00	28	0,00	0,00	0,00	284.700,00	284.700,00	0,00	0,00	0,00	284.700,00	284.700,00
1487	Herlina	2021	2021-01-01	3271214020001481	994.800,00	60	0,00	0,00	0,00	994.800,00	994.800,00	0,00	0,00	0,00	994.800,00	994.800,00
1488	BARTIKA	2023	2023-09-06	3271234020000636	1.104.636,00	28	0,00	0,00	0,00	1.104.636,00	1.104.636,00	0,00	0,00	0,00	1.104.636,00	1.104.636,00
1489	EnSuryani	2021	2021-01-01	3271214020001480	994.800,00	60	0,00	0,00	0,00	994.800,00	994.800,00	0,00	0,00	0,00	994.800,00	994.800,00
1490	HODIJAH	2023	2023-09-06	3271234020000631	945.204,00	28	0,00	0,00	0,00	945.204,00	945.204,00	0,00	0,00	0,00	945.204,00	945.204,00

No	Subjek Nama	Tahun	Tgl SKRD	Kode Bayar	Putang	Penyisihan Putang										
					Sakdo Akhir2025	Tunggakan	Kriteria Putang					Penyisihan Putang Tidak Tertagih				
							Lancar (0 sd 1 Bulan)	Kurang Lancar (1 sd 3 Bulan)	Diragukan (3 sd 12 Bulan)	Macet (Lebih dari 12 Bulan)	Jumhh	Kualitas Lancar(0,5 %)	Kualitas Kurang Lancar (10 %)	Kualitas Diragukan (50 %)	Kualitas Macet (100 %)	Jumlah
1491	KUSYATIN	2023	2023-09-06	3271234020000630	990.756,00	28	0,00	0,00	0,00	990.756,00	990.756,00	0,00	0,00	0,00	990.756,00	990.756,00
1492	SITI NURHASANAH	2025	2025-04-22	3271254020000068	1.068.360,00	9	0,00	0,00	1.068.360,00	0,00	1.068.360,00	0,00	0,00	534.180,00	0,00	534.180,00
1493	D. RODIAH	2023	2023-09-06	3271234020000672	1.423.500,00	28	0,00	0,00	0,00	1.423.500,00	1.423.500,00	0,00	0,00	0,00	1.423.500,00	1.423.500,00
1494	DWI HANDAYANI	2025	2025-04-22	3271254020000056	1.105.200,00	9	0,00	0,00	1.105.200,00	0,00	1.105.200,00	0,00	0,00	552.600,00	0,00	552.600,00
1495	NY. EKA PUSPITASARI	2023	2023-09-06	3271234020000625	1.787.916,00	28	0,00	0,00	0,00	1.787.916,00	1.787.916,00	0,00	0,00	0,00	1.787.916,00	1.787.916,00
1496	TATI SUGIARTI	2023	2023-09-06	3271234020000664	717.444,00	28	0,00	0,00	0,00	717.444,00	717.444,00	0,00	0,00	0,00	717.444,00	717.444,00
1497	NINA SARMINAH	2023	2023-09-06	3271234020000673	1.434.888,00	28	0,00	0,00	0,00	1.434.888,00	1.434.888,00	0,00	0,00	0,00	1.434.888,00	1.434.888,00
1498	HJ. SURASTIKA	2023	2023-09-06	3271234020000654	2.642.016,00	28	0,00	0,00	0,00	2.642.016,00	2.642.016,00	0,00	0,00	0,00	2.642.016,00	2.642.016,00
1499	HJ. SUKARSIH	2023	2023-09-06	3271234020000677	1.548.768,00	28	0,00	0,00	0,00	1.548.768,00	1.548.768,00	0,00	0,00	0,00	1.548.768,00	1.548.768,00
1500	HJ. SUKARSIH	2023	2023-09-06	3271234020000678	2.858.388,00	28	0,00	0,00	0,00	2.858.388,00	2.858.388,00	0,00	0,00	0,00	2.858.388,00	2.858.388,00
1501	HJ. SUKARSIH	2023	2023-09-25	3271234020000679	1.275.456,00	28	0,00	0,00	0,00	1.275.456,00	1.275.456,00	0,00	0,00	0,00	1.275.456,00	1.275.456,00
1502	HJ. SUKARSIH	2023	2023-09-25	3271234020000680	3.143.088,00	28	0,00	0,00	0,00	3.143.088,00	3.143.088,00	0,00	0,00	0,00	3.143.088,00	3.143.088,00
1503	NyaiSuryati	2021	2021-01-01	3271214020001476	829.000,00	60	0,00	0,00	0,00	829.000,00	829.000,00	0,00	0,00	0,00	829.000,00	829.000,00
1504	Ria Widharuti	2021	2021-01-01	3271214020001471	455.950,00	60	0,00	0,00	0,00	455.950,00	455.950,00	0,00	0,00	0,00	455.950,00	455.950,00
1505	Ria Widharuti	2021	2021-01-01	3271214020001484	994.800,00	60	0,00	0,00	0,00	994.800,00	994.800,00	0,00	0,00	0,00	994.800,00	994.800,00
1506	NOFIE EKA SUDARYANDTI	2023	2023-09-06	3271234020000656	1.138.800,00	28	0,00	0,00	0,00	1.138.800,00	1.138.800,00	0,00	0,00	0,00	1.138.800,00	1.138.800,00
1507	NITI SUNDARI	2023	2023-09-06	3271234020000655	1.981.512,00	28	0,00	0,00	0,00	1.981.512,00	1.981.512,00	0,00	0,00	0,00	1.981.512,00	1.981.512,00
1508	H. SUKAESIH	2023	2023-09-06	3271234020000628	2.015.676,00	28	0,00	0,00	0,00	2.015.676,00	2.015.676,00	0,00	0,00	0,00	2.015.676,00	2.015.676,00
1509	Tutik Irawati	2021	2021-01-01	3271214020001497	3.108.750,00	60	0,00	0,00	0,00	3.108.750,00	3.108.750,00	0,00	0,00	0,00	3.108.750,00	3.108.750,00
1510	SRI MULYANI	2025	2025-12-16	3271254020000113	12.080.640,00	1	12.080.640,00	0,00	0,00	0,00	12.080.640,00	60.403,20	0,00	0,00	0,00	60.403,20
1511	Ikin Sodikin	2021	2021-01-01	3271214020001452	9.409.150,00	60	0,00	0,00	0,00	9.409.150,00	9.409.150,00	0,00	0,00	0,00	9.409.150,00	9.409.150,00
1512	Yayasan Islamic Centre Raudhotun Nur	2025	2025-10-23	3271254020000110	122.293.800,00	3	0,00	122.293.800,00	0,00	0,00	122.293.800,00	0,00	12.229.380,00	0,00	0,00	12.229.380,00
1513	Hendra	2023	2023-09-05	3271234020000778	2.718.000,00	28	0,00	0,00	0,00	2.718.000,00	2.718.000,00	0,00	0,00	0,00	2.718.000,00	2.718.000,00
1514	Aryanto	2021	2021-01-01	3271214020001488	224.700,00	60	0,00	0,00	0,00	224.700,00	224.700,00	0,00	0,00	0,00	224.700,00	224.700,00
1515	Soeroso	2021	2021-01-01	3271214020001487	505.575,00	60	0,00	0,00	0,00	505.575,00	505.575,00	0,00	0,00	0,00	505.575,00	505.575,00
1516	Wahyu Subehi	2021	2021-01-01	3271214020001489	337.050,00	60	0,00	0,00	0,00	337.050,00	337.050,00	0,00	0,00	0,00	337.050,00	337.050,00
1517	Soegandi	2024	2024-08-13	3271244020000617	879.360,00	17	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00
1518	Suhaedi	2024	2024-04-30	3271244020000400	2.717.100,00	21	0,00	0,00	0,00	2.717.100,00	2.717.100,00	0,00	0,00	0,00	2.717.100,00	2.717.100,00
1519	Abdul Rochim	2021	2021-01-01	3271214020001474	337.050,00	60	0,00	0,00	0,00	337.050,00	337.050,00	0,00	0,00	0,00	337.050,00	337.050,00
1520	The Thing Nien	2024	2024-08-13	3271244020000506	934.320,00	17	0,00	0,00	0,00	934.320,00	934.320,00	0,00	0,00	0,00	934.320,00	934.320,00
1521	H. Suprudin	2021	2021-01-01	3271214020001567	3.108.750,00	60	0,00	0,00	0,00	3.108.750,00	3.108.750,00	0,00	0,00	0,00	3.108.750,00	3.108.750,00
1522	Herry Bachaki	2021	2021-01-01	3271214020001456	4.970.700,00	60	0,00	0,00	0,00	4.970.700,00	4.970.700,00	0,00	0,00	0,00	4.970.700,00	4.970.700,00
1523	Herry Bachaki	2021	2021-01-01	3271214020001469	1.150.242,00	60	0,00	0,00	0,00	1.150.242,00	1.150.242,00	0,00	0,00	0,00	1.150.242,00	1.150.242,00
1524	Herry Bachaki	2021	2021-01-01	3271214020001470	777.192,00	60	0,00	0,00	0,00	777.192,00	777.192,00	0,00	0,00	0,00	777.192,00	777.192,00
1525	DAHLIA ARYANTI	2023	2023-05-25	3271234020000101	4.155.400,00	32	0,00	0,00	0,00	4.155.400,00	4.155.400,00	0,00	0,00	0,00	4.155.400,00	4.155.400,00

No	Subjek Nama	Tahun	Tgl SKRD	Kode Bayar	Pinang	Penyisihan Pinang										
					Sakdo Akhir2025	Tunggakan	Kriteria Pinang					Penyisihan Pinang Tidak Tertagih				
							Lancar (0 sd 1 Bulan)	Kurang Lancar (1 sd 3 Bulan)	Diragukan (3 sd 12 Bulan)	Macet (Lebih dari 12 Bulan)	Jumhh	Kualitas Lancar (0,5 %)	Kualitas Kurang Lancar (10 %)	Kualitas Diragukan (50 %)	Kualitas Macet (100 %)	Jumlah
1526	Riki Sapitri Aryanu	2025	2025-01-23	3271254020000009	1.822.500,00	12	0,00	0,00	1.822.500,00	0,00	1.822.500,00	0,00	0,00	911.250,00	0,00	911.250,00
1527	Atik Suryati	2021	2021-01-01	3271214020001478	165.800,00	60	0,00	0,00	0,00	165.800,00	165.800,00	0,00	0,00	0,00	165.800,00	165.800,00
1528	Asep Permana	2021	2021-01-01	3271214020001498	994.800,00	60	0,00	0,00	0,00	994.800,00	994.800,00	0,00	0,00	0,00	994.800,00	994.800,00
1529	Rizal Febriyati	2022	2022-09-09	3271224020000095	603.250,00	40	0,00	0,00	0,00	603.250,00	603.250,00	0,00	0,00	0,00	603.250,00	603.250,00
1530	Rizal Febriyati	2023	2023-08-29	3271234020000593	2.265.000,00	29	0,00	0,00	0,00	2.265.000,00	2.265.000,00	0,00	0,00	0,00	2.265.000,00	2.265.000,00
1531	Jaenudin	2021	2021-01-01	3271214020001495	1.492.200,00	60	0,00	0,00	0,00	1.492.200,00	1.492.200,00	0,00	0,00	0,00	1.492.200,00	1.492.200,00
1532	Jaenudin	2021	2021-01-01	3271214020001496	186.525,00	60	0,00	0,00	0,00	186.525,00	186.525,00	0,00	0,00	0,00	186.525,00	186.525,00
1533	TB. Taufiq Muharam	2022	2022-09-09	3271224020000099	503.250,00	40	0,00	0,00	0,00	503.250,00	503.250,00	0,00	0,00	0,00	503.250,00	503.250,00
1534	TB. Taufiq Muharam	2023	2023-08-24	3271234020000578	2.025.000,00	29	0,00	0,00	0,00	2.025.000,00	2.025.000,00	0,00	0,00	0,00	2.025.000,00	2.025.000,00
1535	Jaja Sudrajat	2024	2024-04-30	3271244020000403	4.075.650,00	21	0,00	0,00	0,00	4.075.650,00	4.075.650,00	0,00	0,00	0,00	4.075.650,00	4.075.650,00
1536	Hakim Hadi	2024	2024-04-30	3271244020000396	2.717.100,00	21	0,00	0,00	0,00	2.717.100,00	2.717.100,00	0,00	0,00	0,00	2.717.100,00	2.717.100,00
1537	Rama Handayani	2023	2023-08-29	3271234020000596	2.265.000,00	29	0,00	0,00	0,00	2.265.000,00	2.265.000,00	0,00	0,00	0,00	2.265.000,00	2.265.000,00
1538	Lilis Atukah	2023	2023-08-29	3271234020000604	2.025.000,00	29	0,00	0,00	0,00	2.025.000,00	2.025.000,00	0,00	0,00	0,00	2.025.000,00	2.025.000,00
1539	TK SBBBAITUL MU'NIN/IRMA WIDYANTI	2021	2021-01-01	3271214020001494	1.843.387,00	60	0,00	0,00	0,00	1.843.387,00	1.843.387,00	0,00	0,00	0,00	1.843.387,00	1.843.387,00
1540	Siti Nurachman	2021	2021-01-01	3271214020001458	4.145.000,00	60	0,00	0,00	0,00	4.145.000,00	4.145.000,00	0,00	0,00	0,00	4.145.000,00	4.145.000,00
1541	Siti Nurachman	2021	2021-01-01	3271214020001486	746.100,00	60	0,00	0,00	0,00	746.100,00	746.100,00	0,00	0,00	0,00	746.100,00	746.100,00
1542	Hj. Ina Harnita	2021	2021-01-01	3271214020001451	15.854.625,00	60	0,00	0,00	0,00	15.854.625,00	15.854.625,00	0,00	0,00	0,00	15.854.625,00	15.854.625,00
1543	YETTY SUHARTINI	2019	2019-04-08	20194020100059	6.741.000,00	81	0,00	0,00	0,00	6.741.000,00	6.741.000,00	0,00	0,00	0,00	6.741.000,00	6.741.000,00
1544	Ester Noviri	2024	2024-02-20	3271244020000342	1.405.152,00	23	0,00	0,00	0,00	1.405.152,00	1.405.152,00	0,00	0,00	0,00	1.405.152,00	1.405.152,00
1545	ESTERNOVITRI	2021	2021-12-03	3271214020001371	747.456,00	49	0,00	0,00	0,00	747.456,00	747.456,00	0,00	0,00	0,00	747.456,00	747.456,00
1546	ESTERNOVITRI	2023	2023-07-18	3271234020000472	935.952,00	30	0,00	0,00	0,00	935.952,00	935.952,00	0,00	0,00	0,00	935.952,00	935.952,00
1547	ESTERNOVITRI	2021	2021-09-22	2021402010000992	747.456,00	52	0,00	0,00	0,00	747.456,00	747.456,00	0,00	0,00	0,00	747.456,00	747.456,00
1548	ESTERNOVITRI	2021	2021-02-01	20214020100607	747.456,00	59	0,00	0,00	0,00	747.456,00	747.456,00	0,00	0,00	0,00	747.456,00	747.456,00
1549	ESTERNOVITRI	2021	2021-02-01	20214020100608	747.456,00	59	0,00	0,00	0,00	747.456,00	747.456,00	0,00	0,00	0,00	747.456,00	747.456,00
1550	Tut Supriyanti	2021	2021-01-01	3271214020001454	6.217.500,00	60	0,00	0,00	0,00	6.217.500,00	6.217.500,00	0,00	0,00	0,00	6.217.500,00	6.217.500,00
1551	Hj. Fatimah	2023	2023-08-29	3271234020000590	2.265.000,00	29	0,00	0,00	0,00	2.265.000,00	2.265.000,00	0,00	0,00	0,00	2.265.000,00	2.265.000,00
1552	SURATI SUWARNI	2023	2023-09-06	3271234020000640	170.820,00	28	0,00	0,00	0,00	170.820,00	170.820,00	0,00	0,00	0,00	170.820,00	170.820,00
1553	Endah Jubedah	2021	2021-01-01	3271214020001464	1.989.600,00	60	0,00	0,00	0,00	1.989.600,00	1.989.600,00	0,00	0,00	0,00	1.989.600,00	1.989.600,00
1554	Suheris	2024	2024-04-30	3271244020000404	2.717.100,00	21	0,00	0,00	0,00	2.717.100,00	2.717.100,00	0,00	0,00	0,00	2.717.100,00	2.717.100,00
1555	WILIAM GUNAWAN/SURJADI SOHAN	2021	2021-12-02	3271214020001437	355.680,00	49	0,00	0,00	0,00	355.680,00	355.680,00	0,00	0,00	0,00	355.680,00	355.680,00
1556	WILIAM GUNAWAN/SURJADI SOHAN	2021	2021-01-01	3271214020001536	1.313.280,00	60	0,00	0,00	0,00	1.313.280,00	1.313.280,00	0,00	0,00	0,00	1.313.280,00	1.313.280,00
1557	WILIAM GUNAWAN/SURJADI SOHAN	2021	2021-01-01	3271214020001540	1.368.000,00	60	0,00	0,00	0,00	1.368.000,00	1.368.000,00	0,00	0,00	0,00	1.368.000,00	1.368.000,00

No	Subjek Nama	Tahun	Tgl SKRD	Kode Bayar	Putang	Penyisihan Putang										
					Sakdo Akhir2025	Tunggakan	Kriteria Putang					Penyisihan Putang Tidak Tertagih				
							Lancar (0 sd 1 Bulan)	Kurang Lancar (1 sd 3 Bulan)	Diragukan (3 sd 12 Bulan)	Macet (Lebih dari 12 Bulan)	Jumhh	Kualitas Lancar (0,5 %)	Kualitas Kurang Lancar (10 %)	Kualitas Diragukan (50 %)	Kualitas Macet (100 %)	Jumlah
1558	WILIAM GUNAWAN/SURJADI SOHAN 2	2021	2021-12-02	3271214020001438	355.680,00	49	0,00	0,00	0,00	355.680,00	355.680,00	0,00	0,00	0,00	355.680,00	355.680,00
1559	WILIAM GUNAWAN/SURJADI SOHAN 2	2021	2021-01-01	3271214020001537	1.067.040,00	60	0,00	0,00	0,00	1.067.040,00	1.067.040,00	0,00	0,00	0,00	1.067.040,00	1.067.040,00
1560	WILIAMGUNAWAN	2023	2023-07-10	3271234020000258	766.272,00	30	0,00	0,00	0,00	766.272,00	766.272,00	0,00	0,00	0,00	766.272,00	766.272,00
1561	WILIAM GUNAWAN/SURJADI SOHAN 3	2021	2021-12-02	3271214020001439	355.680,00	49	0,00	0,00	0,00	355.680,00	355.680,00	0,00	0,00	0,00	355.680,00	355.680,00
1562	WILIAM GUNAWAN/SURJADI SOHAN 3	2021	2021-01-01	3271214020001538	1.067.040,00	60	0,00	0,00	0,00	1.067.040,00	1.067.040,00	0,00	0,00	0,00	1.067.040,00	1.067.040,00
1563	WILIAMGUNAWAN	2023	2023-07-10	3271234020000259	766.272,00	30	0,00	0,00	0,00	766.272,00	766.272,00	0,00	0,00	0,00	766.272,00	766.272,00
1564	WILIAM GUNAWAN/SURJADI SOHAN 4	2021	2021-01-01	3271214020001539	649.800,00	60	0,00	0,00	0,00	649.800,00	649.800,00	0,00	0,00	0,00	649.800,00	649.800,00
1565	WILIAM GUNAWAN/SURJADI SOHAN 4	2018	2018-07-09	20184020100318	417.240,00	90	0,00	0,00	0,00	417.240,00	417.240,00	0,00	0,00	0,00	417.240,00	417.240,00
1566	WILIAMGUNAWAN	2023	2023-07-10	3271234020000257	766.272,00	30	0,00	0,00	0,00	766.272,00	766.272,00	0,00	0,00	0,00	766.272,00	766.272,00
1567	WILIAMGUNAWAN	2024	2024-01-23	3271244020000125	1.143.168,00	24	0,00	0,00	0,00	1.143.168,00	1.143.168,00	0,00	0,00	0,00	1.143.168,00	1.143.168,00
1568	WILIAMGUNAWAN	2024	2024-01-23	3271244020000126	1.143.168,00	24	0,00	0,00	0,00	1.143.168,00	1.143.168,00	0,00	0,00	0,00	1.143.168,00	1.143.168,00
1569	WILIAMGUNAWAN	2024	2024-01-23	3271244020000127	1.143.168,00	24	0,00	0,00	0,00	1.143.168,00	1.143.168,00	0,00	0,00	0,00	1.143.168,00	1.143.168,00
1570	Wiliam Gunawan	2024	2024-08-13	3271244020000535	1.143.168,00	17	0,00	0,00	0,00	1.143.168,00	1.143.168,00	0,00	0,00	0,00	1.143.168,00	1.143.168,00
1571	Wiliam Gunawan	2024	2024-08-13	3271244020000536	1.143.168,00	17	0,00	0,00	0,00	1.143.168,00	1.143.168,00	0,00	0,00	0,00	1.143.168,00	1.143.168,00
1572	Wiliam Gunawan	2024	2024-08-13	3271244020000537	1.143.168,00	17	0,00	0,00	0,00	1.143.168,00	1.143.168,00	0,00	0,00	0,00	1.143.168,00	1.143.168,00
1573	Wiliam Gunawan	2024	2024-08-13	3271244020000560	879.360,00	17	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00
1574	Wiliam Gunawan	2024	2024-08-13	3271244020000562	1.341.024,00	17	0,00	0,00	0,00	1.341.024,00	1.341.024,00	0,00	0,00	0,00	1.341.024,00	1.341.024,00
1575	SURYO SUBIAKTO	2024	2024-01-23	3271244020000092	879.360,00	24	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00
1576	Suryo Subiacto	2024	2024-08-13	3271244020000502	879.360,00	17	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00
1577	Siti Maesaroh	2023	2023-08-29	3271234020000584	1.822.500,00	29	0,00	0,00	0,00	1.822.500,00	1.822.500,00	0,00	0,00	0,00	1.822.500,00	1.822.500,00
1578	NURHALIMAH	2021	2021-12-02	3271214020001213	328.320,00	49	0,00	0,00	0,00	328.320,00	328.320,00	0,00	0,00	0,00	328.320,00	328.320,00
1579	NURHALIMAH	2018	2018-07-09	20184020100230	328.320,00	90	0,00	0,00	0,00	328.320,00	328.320,00	0,00	0,00	0,00	328.320,00	328.320,00
1580	NURHALIMAH	2021	2021-09-21	2021402010000831	328.320,00	52	0,00	0,00	0,00	328.320,00	328.320,00	0,00	0,00	0,00	328.320,00	328.320,00
1581	NURHALIMAH	2021	2021-01-07	20214020100254	328.320,00	60	0,00	0,00	0,00	328.320,00	328.320,00	0,00	0,00	0,00	328.320,00	328.320,00
1582	NURHALIMAH	2021	2021-01-07	20214020100255	328.320,00	60	0,00	0,00	0,00	328.320,00	328.320,00	0,00	0,00	0,00	328.320,00	328.320,00
1583	NURHALIMAH	2023	2023-07-10	3271234020000196	707.328,00	30	0,00	0,00	0,00	707.328,00	707.328,00	0,00	0,00	0,00	707.328,00	707.328,00
1584	NURHALIMAH	2024	2024-01-23	3271244020000144	1.055.232,00	24	0,00	0,00	0,00	1.055.232,00	1.055.232,00	0,00	0,00	0,00	1.055.232,00	1.055.232,00
1585	Nurhalmah	2024	2024-08-13	3271244020000554	1.055.232,00	17	0,00	0,00	0,00	1.055.232,00	1.055.232,00	0,00	0,00	0,00	1.055.232,00	1.055.232,00
1586	Rukiah	2025	2025-01-23	3271254020000005	1.822.500,00	12	0,00	0,00	1.822.500,00	0,00	1.822.500,00	0,00	0,00	911.250,00	0,00	911.250,00
1587	Enih Rohayani	2022	2022-09-09	3271224020000104	503.250,00	40	0,00	0,00	0,00	503.250,00	503.250,00	0,00	0,00	0,00	503.250,00	503.250,00

No	Subjek Nama	Tahun	Tgl SKRD	Kode Bayar	Pinang	Penyisihan Pinang										
					Saklo Akhir2025	Tunggakan	Kriteria Pinang					Penyisihan Pinang Tidak Tertagih				
							Lancar (0 sd 1 Bulan)	Kurang Lancar (1 sd 3 Bulan)	Diragukan (3 sd 12 Bulan)	Macet (Lebih dari 12 Bulan)	Jumhh	Kualitas Lancar (0,5 %)	Kualitas Kurang Lancar (10 %)	Kualitas Diragukan (50 %)	Kualitas Macet (100 %)	Jumlah
1588	Mrsim	2024	2024-08-13	3271244020000608	934.320,00	17	0,00	0,00	0,00	934.320,00	934.320,00	0,00	0,00	0,00	934.320,00	934.320,00
1589	Joppy Kusuma	2021	2021-01-01	3271214020001455	5.512.850,00	60	0,00	0,00	0,00	5.512.850,00	5.512.850,00	0,00	0,00	0,00	5.512.850,00	5.512.850,00
1590	HARY ANTO	2024	2024-01-23	3271244020000155	1.055.232,00	24	0,00	0,00	0,00	1.055.232,00	1.055.232,00	0,00	0,00	0,00	1.055.232,00	1.055.232,00
1591	Haryanto	2024	2024-08-13	3271244020000565	1.055.232,00	17	0,00	0,00	0,00	1.055.232,00	1.055.232,00	0,00	0,00	0,00	1.055.232,00	1.055.232,00
1592	LAY OEN NIANG	2024	2024-01-23	3271244020000059	879.360,00	24	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00
1593	SINTA	2024	2024-01-23	3271244020000070	879.360,00	24	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00
1594	SUPRIADI	2024	2024-01-23	3271244020000104	879.360,00	24	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00	0,00	0,00	0,00	879.360,00	879.360,00
1595	M. RAHMAT	2024	2024-01-23	3271244020000185	439.680,00	24	0,00	0,00	0,00	439.680,00	439.680,00	0,00	0,00	0,00	439.680,00	439.680,00
1596	ARDIANSAH FEBRIANTOKO	2021	2021-12-27	3271214020001426	23.146.000,00	49	0,00	0,00	0,00	23.146.000,00	23.146.000,00	0,00	0,00	0,00	23.146.000,00	23.146.000,00
1597	MOH.MAHSUS	2023	2023-11-20	3271234020000743	388.320,00	26	0,00	0,00	0,00	388.320,00	388.320,00	0,00	0,00	0,00	388.320,00	388.320,00
1598	Widati Wulandari	2021	2021-01-01	3271214020001534	17.272.000,00	60	0,00	0,00	0,00	17.272.000,00	17.272.000,00	0,00	0,00	0,00	17.272.000,00	17.272.000,00
1599	Siti Sarah Nurjanah	2024	2024-02-20	3271244020000255	1.591.128,00	23	0,00	0,00	0,00	1.591.128,00	1.591.128,00	0,00	0,00	0,00	1.591.128,00	1.591.128,00
1600	AGUS SETIAWAN WICAKSANA	2021	2021-12-03	3271214020001299	978.288,00	49	0,00	0,00	0,00	978.288,00	978.288,00	0,00	0,00	0,00	978.288,00	978.288,00
1601	AGUS SETIAWAN WICAKSANA	2018	2018-11-26	20184020100465	978.288,00	86	0,00	0,00	0,00	978.288,00	978.288,00	0,00	0,00	0,00	978.288,00	978.288,00
1602	AGUS SETIAWAN WICAKSANA	2021	2021-09-22	2021402010000774	978.288,00	52	0,00	0,00	0,00	978.288,00	978.288,00	0,00	0,00	0,00	978.288,00	978.288,00
1603	AGUS SETIAWAN WICAKSANA	2021	2021-01-29	20214020100450	978.288,00	60	0,00	0,00	0,00	978.288,00	978.288,00	0,00	0,00	0,00	978.288,00	978.288,00
1604	AGUS SETIAWAN WICAKSANA	2021	2021-01-29	20214020100451	978.288,00	60	0,00	0,00	0,00	978.288,00	978.288,00	0,00	0,00	0,00	978.288,00	978.288,00
1605	AGUS SETIAWAN WICAKSANA	2023	2023-07-12	3271234020000271	1.224.996,00	30	0,00	0,00	0,00	1.224.996,00	1.224.996,00	0,00	0,00	0,00	1.224.996,00	1.224.996,00
1606	ACMAD SYAHRONI	2023	2023-10-27	3271234020000714	5.288.400,00	27	0,00	0,00	0,00	5.288.400,00	5.288.400,00	0,00	0,00	0,00	5.288.400,00	5.288.400,00
1607	ACMAD SYAHRONI	2025	2025-04-22	3271254020000065	1.436.760,00	9	0,00	0,00	1.436.760,00	0,00	1.436.760,00	0,00	0,00	718.380,00	0,00	718.380,00
1608	PT. Pilar Artha Mandiri	2021	2021-02-16	20214020100673	145.260.000,00	59	0,00	0,00	0,00	145.260.000,00	145.260.000,00	0,00	0,00	0,00	145.260.000,00	145.260.000,00
1609	ACANG KURNIAWAN	2023	2023-07-10	3271234020000125	618.912,00	30	0,00	0,00	0,00	618.912,00	618.912,00	0,00	0,00	0,00	618.912,00	618.912,00
1610	CV Roemah Sakola Kopi	2025	2025-05-28	3271254020000079	149.893.000,00	8	0,00	0,00	149.893.000,00	0,00	149.893.000,00	0,00	0,00	74.946.500,00	0,00	74.946.500,00
1611	SARIP	2023	2023-11-20	3271234020000742	1.359.120,00	26	0,00	0,00	0,00	1.359.120,00	1.359.120,00	0,00	0,00	0,00	1.359.120,00	1.359.120,00
1612	H. MAHRUS	2023	2023-11-20	3271234020000746	1.359.120,00	26	0,00	0,00	0,00	1.359.120,00	1.359.120,00	0,00	0,00	0,00	1.359.120,00	1.359.120,00
1613	SOFIAN	2023	2023-11-20	3271234020000749	1.320.288,00	26	0,00	0,00	0,00	1.320.288,00	1.320.288,00	0,00	0,00	0,00	1.320.288,00	1.320.288,00
1614	MSAHIR	2023	2023-11-20	3271234020000750	757.224,00	26	0,00	0,00	0,00	757.224,00	757.224,00	0,00	0,00	0,00	757.224,00	757.224,00
1615	MSAHIR	2023	2023-11-20	3271234020000752	601.896,00	26	0,00	0,00	0,00	601.896,00	601.896,00	0,00	0,00	0,00	601.896,00	601.896,00
1616	A. BADERI	2023	2023-11-20	3271234020000753	601.896,00	26	0,00	0,00	0,00	601.896,00	601.896,00	0,00	0,00	0,00	601.896,00	601.896,00
1617	ENDANG SUHENDAR	2023	2023-11-20	3271234020000760	1.572.696,00	26	0,00	0,00	0,00	1.572.696,00	1.572.696,00	0,00	0,00	0,00	1.572.696,00	1.572.696,00
1618	RUSLAN	2023	2023-11-20	3271234020000763	1.048.464,00	26	0,00	0,00	0,00	1.048.464,00	1.048.464,00	0,00	0,00	0,00	1.048.464,00	1.048.464,00
1619	Hj. MARIANI	2023	2023-11-20	3271234020000764	2.757.072,00	26	0,00	0,00	0,00	2.757.072,00	2.757.072,00	0,00	0,00	0,00	2.757.072,00	2.757.072,00
1620	M.YUSUP	2023	2023-11-20	3271234020000767	465.984,00	26	0,00	0,00	0,00	465.984,00	465.984,00	0,00	0,00	0,00	465.984,00	465.984,00

No	Subjek Nama	Tahun	TglSKRD	Kode Bayar	Pinang	Penyisihan Pinang										
					Saldo Akhir2025	Tunggakan	Kriteria Pinang					Penyisihan Pinang Tidak Tertagih				
							Lancar (0 sd 1 Bulan)	Kurang Lancar (1 sd 3 Bulan)	Diragukan (3 sd 12 Bulan)	Macet (Lebih dari 12 Bulan)	Jumlah	Kualitas Lancar(0,5 %)	Kualitas Kurang Lancar (10 %)	Kualitas Diragukan (50 %)	Kualitas Macet (100 %)	Jumlah
1621	GRACENURANI ADI LAKSANA	2023	2023-11-20	3271234020000770	1.378.536,00	26	0,00	0,00	0,00	1.378.536,00	1.378.536,00	0,00	0,00	0,00	1.378.536,00	1.378.536,00
1622	SRI REJEKI	2023	2023-11-20	3271234020000774	2.446.416,00	26	0,00	0,00	0,00	2.446.416,00	2.446.416,00	0,00	0,00	0,00	2.446.416,00	2.446.416,00
1623	OMI	2023	2023-11-20	3271234020000776	951.384,00	26	0,00	0,00	0,00	951.384,00	951.384,00	0,00	0,00	0,00	951.384,00	951.384,00
1624	Suhandi SaputraNoviEka Sudaryati	2023	2023-09-06	3271234020000629	1.730.976,00	28	0,00	0,00	0,00	1.730.976,00	1.730.976,00	0,00	0,00	0,00	1.730.976,00	1.730.976,00
1625	Lilis Haryati	2023	2023-09-06	3271234020000638	671.892,00	28	0,00	0,00	0,00	671.892,00	671.892,00	0,00	0,00	0,00	671.892,00	671.892,00
1626	Neneng (Zaini)	2023	2023-09-06	3271234020000668	888.264,00	28	0,00	0,00	0,00	888.264,00	888.264,00	0,00	0,00	0,00	888.264,00	888.264,00
1627	PPTR	2025			195.981.026,00											157.415.366,00
JUMLAH					2.450.791.789,00	67.559,00	12.080.640,00	122.293.800,00	213.462.940,00	1.906.973.383,00	2.254.810.763,00	60.403,20	12.229.380,00	106.731.470,00	1.906.973.383,00	2.183.410.002,20

DAFTAR PIUTANG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BOGOR
Per 31 Desember 2025

Nama	Saldo Awal	Penyesuaian	Pembayaran 2024	Penambahan Piutang 2025	Pembayaran Piutang 2025	Saldo Akhir 2025
Ad Medika Aca Insurance	838.098,00	-	838.098,00	2.213.191,00	1.951.037,00	262.154,00
Ad Medika Ish Project	82.000,00	-	-	-	-	82.000,00
Ad Medika Yankesga	-	-	-	-	-	-
Ad Medika Bintang	94.100,00	-	-	-	-	94.100,00
Ad Medika AXA Fin.Indonesia	-	-	-	2.069.053,00	2.069.053,00	-
Ad Medika Bulog	-	-	-	-	-	-
Ad Medika Megalife	277.197,00	-	135.670,00	2.256.550,00	-	2.398.077,00
Ad Medika Adira	-	-	-	-	-	-
Ad Medika AIA Financial	1.032.000,00	-	-	1.862.797,00	1.862.797,00	1.032.000,00
Ad Medika BNI Life	18.897.414,00	-	18.859.067,00	19.628.538,00	19.124.240,00	542.645,00
Ad Medika Generali Indonesia	233.482,00	-	208.021,00	52.788.470,00	52.788.470,00	25.461,00
Ad Medika Inhealth	1.829.570,00	-	-	40.118.871,00	36.297.654,00	5.650.787,00
Ad Medika MNC life	-	-	-	1.980.003,00	1.980.003,00	-
Ad Medika Manulife	-	-	-	-	-	-
Ad Medika Pacific International	898.557,00	-	898.557,00	3.768.855,00	3.115.759,00	653.096,00
Ad Medika Pan Pacific	-	-	-	698.487,00	-	698.487,00
Ad Medika Reliance	81.477.882,00	-	88.155.158,00	36.331.597,00	17.383.786,00	12.270.535,00
Ad Medika TMS	255.700,00	-	-	-	-	255.700,00
Asuransi Abda	12.309.010,00	-	-	-	-	12.309.010,00
Asuransi AIA Financial	-	-	-	-	-	-
Asuransi Inhealth	30.467.994,00	-	9.663.907,00	380.744.625,00	387.628.618,00	13.920.094,00
Asuransi BPJS Kesehatan I	11.371.699.324,00	-	11.371.699.324,00	256.413.261.411,00	256.063.406.775,00	349.854.636,00
Asuransi BPJS Kesehatan II	55.356.026.566,00	-	56.135.250.350,00	40.350.996.924,00	-	39.571.773.140,00
Dinkes Kota Bogor (JAMKOT)	20.033.600,00	-	-	281.908.284,00	301.941.884,00	-
Jamkesda Kabupaten (JAMKAB)	711.594.900,00	-	730.457.500,00	18.862.600,00	-	-
Jamsostek/BPJS Ketenagakerjaan	275.654.129,00	-	237.703.490,00	1.250.724.485,00	1.213.318.970,00	75.356.154,00
Asuransi Jiwa Recapital	3.071.400,00	-	-	-	-	3.071.400,00
Asuransi Jasa Raharja - Akhmad Yani	178.363.145,00	-	306.482.523,00	572.264.713,00	380.665.014,00	63.480.321,00
Asuransi Jasa Raharja - Cibinong	-	-	-	-	-	-
Asuransi Reliance	9.726.173,00	-	-	16.998.218,00	17.494.830,00	9.229.561,00
Asuransi Pan pacific	-	-	-	-	-	-
Asuransi Sinar Mas	2.658.123,00	-	231.394,00	6.506.948,00	5.108.147,00	3.825.530,00
Bank BRI - Cabang Pamulang	-	-	-	-	-	-
PT.Ande Kerta Sejahtera	5.581.750,00	-	-	-	-	5.581.750,00
PT.Sierad Produce	-	-	-	-	-	-
PDAM Tirta Pakuan Bogor	10.966.072,00	-	-	-	-	10.966.072,00
Surveyor	-	-	-	-	-	-
Sepatu Mas Idaman	4.108.500,00	-	-	-	-	4.108.500,00
Ad Medika YKP Antam	-	-	-	354.936,00	354.936,00	-
Yayasan Pusri Medika	-	-	-	-	-	-
Adhi Karya - RSUD Kota Bogor	340.700,00	-	-	-	-	340.700,00
FWD Group Ad-Medika	851.837,00	-	512.377,00	384.706,00	384.706,00	339.460,00
Goodyear,PT	-	-	-	-	-	-
Jasa Marga - Plaza tol TMII	-	-	-	-	-	-
Takaful Ad-Medika	1.106.830,00	-	47.058,00	25.107.654,00	24.897.102,00	1.270.324,00
TMS Asuransi	-	-	-	-	-	-
Monfori Nusantara,PT	-	-	-	-	-	-
TUGU MANDIRI A.J	227.000,00	-	-	-	-	227.000,00
Ad Medika Bumida	-	-	-	5.487.722,00	5.199.560,00	288.162,00
Ad Medika CAR	3.845.249,00	-	377.250,00	17.843.230,00	15.315.536,00	5.995.693,00
Ad Medika HLGPR/Hanwa	1.800.000,00	-	1.800.000,00	1.389.414,00	1.389.414,00	-
Ad Medika TMLI	-	-	-	8.901.065,00	8.901.065,00	-
Kereta Api	11.966.976,00	-	2.470.595,00	112.466.547,00	92.072.745,00	29.890.183,00
A.J Sinarmas MSIG	-	-	-	1.638.500,00	1.638.500,00	-
RS Karyabhakti Pratiwi	-	-	-	-	-	-
Ad Medika Askrida	-	-	-	-	-	-
Ad Medika Somo	160.000,00	160.000,00	-	1.058.542,00	1.058.542,00	-
Ad Medika Astra Buana	-	-	-	419.170,00	419.170,00	-
Ad Medika Equity	-	-	-	4.069.469,00	4.069.469,00	-
RS Pasutri Bogor	-	-	-	-	-	-
Graha Wisata Kencana	9.127.324,00	-	-	-	-	9.127.324,00
Bayer Indonesia	-	-	-	-	-	-
Great Eastern Ad-Medika	-	-	-	4.218.050,00	4.218.050,00	-
Telkomedia	-	-	-	-	-	-
Ramayana Ad Medika	118.992.741,00	-	-	18.562.039,00	-	137.554.780,00
Fullerton Health Indonesia	14.762.138,00	-	729.308,00	8.435.711,00	7.971.756,00	14.496.785,00
Pusat Penelitian Dan Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat	-	-	-	-	-	-
Bank Permata	-	-	-	-	-	-
Aplikansa Lintasarta/Owlexa	2.344.049,00	-	-	3.651.160,00	3.619.160,00	2.376.049,00
Takeda	-	-	-	-	-	-
Bank Mandiri	-	5.600.000,00	-	62.160.000,00	56.560.000,00	-
Universitas Indonesia (Fakultas Ilmu Keperawatan)	-	-	-	19.810.000,00	19.810.000,00	-
PB PORDA XIII JAWABARAT TAHUN 2018	-	-	-	-	-	-
Tugu Pratama	-	-	-	-	-	-
Sekretariat Dprd Kota Bogor	-	52.500,00	-	37.039.320,00	36.986.820,00	-
Jamkesda Kabupaten (Tangerang)	-	-	-	-	-	-
Owlexa Healthcare	-	-	-	-	-	-
Pertamina Hulu Energi Ad-Medika	166.600,00	166.600,00	-	-	-	-
Ispe Hap Grp Ad-Medika	2.038.159,00	-	-	468.520,00	190.000,00	2.316.679,00
Trikenca Sakti Utama	6.345.950,00	-	-	-	-	6.345.950,00
Jamkesda Kabupaten (JAMKAB) Jampersal	9.967.500,00	-	-	-	-	9.967.500,00
Prudencial Ad-Medika	-	-	-	-	-	-
Pertamina Ad-Medika	-	-	-	-	-	-
Ad Medika BRI Life	24.821,00	-	-	191.750.998,00	178.862.349,00	12.913.470,00
Abadi Smilynks	-	-	-	1.029.666,00	1.029.666,00	-
RS Umni	831.300,00	831.300,00	-	-	-	-
Magna Sehat Ad-Medika	-	-	-	-	-	-

Nama	Saldo Awal	Penyesuaian	Pembayaran 2024	Penambahan Piutang 2025	Pembayaran Piutang 2025	Saldo Akhir 2025
Sequis Life Ad-Medika	187.038,00	-	187.038,00	2.717.667,00	2.395.341,00	322.326,00
Piutang Pasien Umum	-	-	-	-	-	-
Taspen	166.065,00	-	-	20.281.382,00	20.281.382,00	166.065,00
Icon Ad-Medika	-	-	-	-	-	-
Id Surya Ad-Medika	-	-	-	-	-	-
Kemenkes (Covid 19)	-	-	-	-	-	-
PT.PP (Persero) TBK	-	-	-	-	-	-
Mitracom Solusindo	-	-	-	-	-	-
Sentinel Mitra Adiyaksa	-	-	-	-	-	-
Personil Alih Daya Persada	-	-	-	-	-	-
Asuransi Jiwa Syariah	-	-	-	-	-	-
BCA Life Medika	2.486.170,00	-	2.486.170,00	4.472.296,00	4.472.296,00	-
Yakespen Utama Medika	147.000,00	147.000,00	-	-	-	-
BNI Syariah Ad medika	-	-	-	8.398.046,00	8.398.046,00	-
Indo Surya Life Ad-Medika	-	-	-	-	-	-
Graha Agung Wibawa,Pt	450.000,00	450.000,00	-	-	-	-
Yogya Junction	-	-	-	-	-	-
Tirta Guna Persada	-	-	-	-	-	-
Usaha Sukses Bersama	-	-	-	-	-	-
Chubb Life Ad-Medika	-	-	-	4.460.386,00	4.047.366,00	413.020,00
Bina Nusantara Ad-Medika	-	-	-	-	-	-
PLN	-	-	-	-	-	-
Bumdes Megamendung	1.200.000,00	-	-	-	-	1.200.000,00
Indonesia Wacoal	3.000.000,00	-	-	-	-	3.000.000,00
Magic Metro Media	-	-	-	-	-	-
Aa International Indonesia	-	-	-	10.728.734,00	10.728.734,00	-
Sucofindo	-	-	-	-	-	-
Pyramid Raya Persada	8.010.000,00	-	-	-	-	8.010.000,00
Puslitbang Kehutanan	-	-	-	-	-	-
Perumda Tirta Pakuan	-	-	-	-	-	-
Politeknik Aka Bogor	-	-	-	-	-	-
Patrask Ad-Medika	-	-	-	-	-	-
KEMENKES (COVID 19) II	69.487.000,00	-	-	-	69.487.000,00	-
Astragraphia	-	-	-	-	-	-
Medika Plaza	722.000,00	722.000,00	-	-	-	-
Coats Rejo Indonesia,Pt	-	-	-	-	-	-
Medco Ad-Medika	-	-	-	-	-	-
Lippo General Insurance	-	-	-	21.859.730,00	18.519.415,00	3.340.315,00
Waterland Nusantara	-	-	-	-	-	-
RS Azra Bogor	8.534.315,00	8.534.315,00	-	-	-	-
Astra Life Ad-Medika	576.945,00	-	-	1.677.093,00	1.667.093,00	586.945,00
Gereja Kristen Indonesia	-	-	-	-	-	-
PT Essity	-	-	-	-	-	-
Cigna Indonesia Ad-Medika	363.520,00	-	363.520,00	5.183.572,00	5.183.572,00	-
Bkpsdm Kota Bogor	-	-	-	28.547.500,00	28.547.500,00	-
RSL Khusus COVID 19 Kota Bogor	216.828.250,00	-	-	-	-	216.828.250,00
Bank BNI	-	8.476.636,00	-	93.243.000,00	84.766.364,00	-
Mapactv Ad-Medika	-	-	-	-	-	-
Novartis	500.000,00	500.000,00	-	-	-	-
Java Smartindo	209.300,00	209.300,00	-	-	-	-
Perumda Bpr Bank Kota Bogor	-	-	-	-	-	-
Cws Indonesia	-	-	-	-	-	-
Admedika Pectpyr	-	-	-	-	-	-
CV Pandu Agung Karya	2.195.471,00	-	-	-	-	2.195.471,00
Ad Medika Avrist Insurance	1.117.276,00	-	1.117.276,00	3.250.781,00	3.250.781,00	-
PT Finusolprima Farma International	500.000,00	-	-	-	-	500.000,00
Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana(Dppkb)	-	-	-	-	-	-
Puslitbang Biomedis Dan Teknologi Dasar Kesehatan	-	-	-	-	-	-
Ad Medika Jmas	-	-	-	666.745,00	666.745,00	-
Ad Medika Acphlt	-	-	-	1.626.132,00	1.626.132,00	-
Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	-	-	-	-	-	-
Tirta Medical Centre	192.329,00	192.329,00	-	-	-	-
Ad Medika Ilgsk	-	-	-	-	-	-
PT. Novonordisk Indonesia	-	-	-	-	-	-
Ad Medika Petrochina Permanen	-	-	-	-	-	-
PT Ferron Par Pharmaceuticals	-	-	-	-	-	-
Stikes Bani Saleh	-	-	-	-	-	-
Ad Medika Medicilin	4.564.534,00	-	-	110.640.838,00	34.950.278,00	80.255.094,00
Admedika Magi	587.558,00	-	-	-	-	587.558,00
Admedika Jasa Marga	1.153.504,00	-	839.188,00	35.669.626,00	34.901.533,00	1.082.409,00
Astrazeneca Indonesia	-	-	-	-	-	-
RS Marzuki Mahdi Bogor	-	-	-	2.280.000,00	1.520.000,00	760.000,00
Ikatan Ahli Urologi Indonesia (Iau)	-	-	-	-	-	-
RS Azra Bogor	1.276.155,00	-	-	-	-	1.276.155,00
Admedika Pt. Pelabuhan Indonesia 2	-	-	-	-	-	-
Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor	-	-	-	3.330.000,00	3.330.000,00	-
Global Fund Atm Komponen Aids	-	-	-	-	-	-
BTT Provinsi Jabar	-	-	-	-	-	-
Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Perekonomian	-	-	-	-	-	-
Intra Asia Ad-Medika	-	-	-	160.000,00	160.000,00	-
Jasa Indo Ad-Medika	310.000,00	-	-	-	-	310.000,00
Admedika Kci	-	-	-	-	-	-
Admedika Acaprm	-	-	-	1.081.870,00	905.110,00	176.760,00
PT Kartika Bina Medikatama	288.000,00	-	-	950.000,00	950.000,00	288.000,00
Asuransi Halodoc	9.740.350,00	-	1.970.993,00	3.103.483,00	3.103.483,00	7.769.357,00
Ad Medika Kcl	-	-	-	-	-	-
Asuransi Asyiki (Asuransi Syariah Keluarga Indonesia)	-	-	-	-	-	-
Admedika Bri Psn	-	-	-	-	-	-
Admedika-Kskii	-	-	-	-	-	-
PT Suprima Mitra Adihusada	-	-	-	-	-	-
Dpc Partai Persatuan Pembangunan Kota Bogor	13.500.000,00	-	-	-	-	13.500.000,00
Ad Medika Pevicgr	-	-	-	-	-	-
Ad Medika Sunday Insurance	1.200.209,00	-	1.200.209,00	5.490.041,00	4.508.669,00	981.372,00
DPPKB	-	-	-	-	-	-
Ad Medika Ilgasp	-	-	-	-	-	-
Ad Medika Maximus Insurance	-	-	-	-	-	-

Nama	Saldo Awal	Penyesuaian	Pembayaran 2024	Penambahan Piutang 2025	Pembayaran Piutang 2025	Saldo Akhir 2025
PT Transfarma Medica Indah	-	-	-	-	-	-
PKSPL IPB	1.465.000,00	-	-	-	-	1.465.000,00
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat	115.455.593,00	-	115.455.593,00	562.502.084,00	562.502.084,00	-
PT Global Scholarship Services Indonesia	-	-	-	-	-	-
Admedika Rspbode	-	-	-	-	-	-
Admedika Peralife Insurance	-	-	-	13.416.570,00	668.800,00	12.747.770,00
Global Fund	13.106.722,00	13.106.722,00	-	-	-	-
Kpp Pratama Bogor	-	-	-	-	-	-
PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk	1.807.941,00	-	829.049,00	-	-	978.892,00
Admedika Ptsmmed	-	-	-	2.084.095,00	2.084.095,00	-
Admedika Bosowa	591.500,00	-	591.500,00	2.395.844,00	1.705.844,00	690.000,00
Admedika Binus	-	-	-	-	-	-
Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian (Bbpsip)	-	-	-	-	-	-
Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DPPKB)	-	-	-	-	-	-
Unhan	5.608.000,00	5.608.000,00	-	-	-	-
Yayasan Cita Wadah Swadaya (Yews)	-	-	-	4.136.688,00	2.509.584,00	1.627.104,00
Ad Medika Clife	-	-	-	21.002.270,00	20.513.427,00	488.843,00
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	-	-	-	6.600.000,00	6.600.000,00	-
PT Bank Bjb - Cabang Bogor	-	-	-	-	-	-
PT Amerta Indah Otsuka	1.428.000,00	2.465.838,00	-	11.520.000,00	10.482.162,00	-
PT Sr12 Herbal Perkasa	-	-	-	-	-	-
Admedika Rsppl2	1.921.500,00	-	1.921.500,00	-	-	-
PT Denisa Media Utama	20.030.347,00	-	20.030.347,00	-	-	-
PT Teknologi Pamadya Analitika (Meditap)	-	-	-	1.530.593,00	1.530.593,00	-
Admedika Dayin	-	-	-	3.903.398,00	3.159.621,00	743.777,00
PT Biodiversitas Bioteknologi Indonesia	-	-	-	16.201.500,00	16.201.500,00	-
PT Unicharm Trading Indonesia	-	-	-	24.570.528,00	22.803.363,00	1.767.165,00
Homjuice Cold Pressed Juice Healty Bar	-	-	-	-	-	-
PT.Penta Putra Propertindo (Grand Manzil Bogor)	-	-	-	1.295.000,00	1.295.000,00	-
RS Graha Medika Bogor	-	-	-	3.167.483,00	220.000,00	2.947.483,00
Koperasi Karyawan (Kopkar) Rsud Kota Bogor	-	-	-	101.500.000,00	101.500.000,00	-
Fk Uhamka	-	-	-	37.006.000,00	-	37.006.000,00
ATM BNI	-	-	-	93.243.000,00	93.243.000,00	-
Weekday	100.000.000,00	-	85.000.000,00	16.937.500,00	31.937.500,00	-
Roti'O	121.157.658,00	-	-	-	87.157.658,00	34.000.000,00
Koperasi	6.500,00	-	-	-	6.500,00	-
Piutang Pasien Umum	8.975.828.744,00	9.954.594,00	391.163.140,00	329.203.787,00	53.140.612,00	8.850.774.184,80
Piutang Pasien Umum (Pegawai)	189.986.910,00	-	142.407.422,00	514.827.387,00	403.840.235,00	158.566.639,90
JUMLAH	78.180.963.264,00	57.177.134,00	69.672.082.592,00	302.119.093.688,00	260.742.554.001,00	49.828.243.224,70

ANALISIS UMUR PIUTANG
PIUTANG PASIEN UMUM/PERORANGAN
PER 31 DESEMBER 2025

Usia Piutang	Kurang dari 1 bulan	1-5 bulan	6- 12 bulan	13-24bulan	Diatas 24 Bulan	Jumlah
Piutang Tahun 2014	-	-	-	-	186.189.481,00	186.189.481,00
Piutang Tahun 2015	-	-	-	-	543.648.085,00	543.648.085,00
Piutang Tahun 2016	-	-	-	-	545.093.284,00	545.093.284,00
Piutang Tahun 2017	-	-	-	-	337.754.224,00	337.754.224,00
Piutang Tahun 2018	-	-	-	-	526.410.158,00	526.410.158,00
Piutang Tahun 2019	-	-	-	-	465.204.169,00	465.204.169,00
Piutang Tahun 2020	-	-	-	-	379.437.040,00	379.437.040,00
Piutang Tahun 2021	-	-	-	-	754.466.982,00	754.466.982,00
Piutang Tahun 2022	-	-	-	-	1.580.075.054,00	1.580.075.054,00
Piutang Tahun 2023	-	-	-	-	2.045.089.140,00	2.045.089.140,00
Piutang Tahun 2024	-	-	-	1.211.343.393,00	-	1.211.343.393,00
Piutang Tahun 2025	-	60.010.127,00	216.053.048,00	-	-	276.063.175,00
Jumlah	-	60.010.127,00	216.053.048,00	1.211.343.393,00	7.363.367.617,00	8.850.774.185,00

Piutang	0,05	0,2	0,5	0,94	1	
Cadangan 2025	-	12.002.025,40	108.026.524,00	1.138.662.789,42	7.363.367.617,00	8.622.058.955,82
Pengakuan 2024	-	-	-	-	-	8.011.966.481,00
Beban penyisihan 2025	-	-	-	-	-	610.092.474,82

PEMERINTAH KOTA BOGOR
BADAN PENDAPATAN DAERAH
DAFTAR PENYISIHAN PIUTANG DENDA PAJAK
31 DESEMBER TAHUN 2025

Lampiran 4.1

NO	JENIS PAJAK	PIUTANG	KRITERIA KUALITAS PIUTANG				PENYISIHAN PIUTANG				JUMLAH PENYISIHAN	PENYISIHAN PIUTANG DENDA PAJAK 2025
			LANCAR	KURANG LANCAR	DIRAGUKAN	MACET	LANCAR	KURANG LANCAR	DIRAGUKAN	MACET		
1	PBJT - Pajak Hotel	4.128.934.771,00	63.710.359,00	647.683.560,00	-	3.417.540.852,00	318.551,80	64.768.356,00	-	3.417.540.852,00	3.482.627.759,80	34.826.277.560,00
	PBJT - Hotel	4.016.819.319,00	44.688.880,00	634.873.993,00		3.337.256.446,00	223.444,40	63.487.399,30	-	3.337.256.446,00	3.400.967.289,70	3.400.967.290,00
	PBJT - Motel	27.258.369,00	1.543.506,00	7.485.752,00		18.229.111,00	7.717,53	748.575,20	-	18.229.111,00	18.985.403,73	18.985.404,00
	PBJT - Losmen	8.809.118,00	843.000,00	1.991.860,00		5.974.258,00	4.215,00	199.186,00	-	5.974.258,00	6.177.659,00	6.177.659,00
	PBJT - Wisma Pariwisata	76.047.965,00	16.634.973,00	3.331.955,00		56.081.037,00	83.174,87	333.195,50	-	56.081.037,00	56.497.407,37	56.497.407,00
							-	-	-	-	-	-
2	Pajak Restoran	4.362.041.239,00	461.356.089,00	1.064.439.649,00	-	2.836.245.501,00	2.306.780,45	106.443.964,90	-	2.836.245.501,00	2.944.996.246,35	2.944.996.246,00
	PBJT - Pajak Restoran dan Sejenisnya	1.826.271.769,00	403.221.417,00	587.720.606,00		835.329.746,00	2.016.107,09	58.772.060,60	-	835.329.746,00	896.117.913,69	896.117.914,00
	PBJT - Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	1.097.733.963,00	49.102.102,00	294.935.999,00		753.695.862,00	245.510,51	29.493.599,90	-	753.695.862,00	783.434.972,41	783.434.972,00
	PBJT - Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	881.996.322,00	8.239.570,00	172.779.742,00		700.977.010,00	41.197,85	17.277.974,20	-	700.977.010,00	718.296.182,05	718.296.182,00
	PBJT - Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	556.039.185,00	793.000,00	9.003.302,00		546.242.883,00	3.965,00	900.330,20	-	546.242.883,00	547.147.178,20	547.147.178,00
							-	-	-	-	-	-
3	Pajak Reklame	583.199.162,00	79.152.693,00	-	-	504.046.469,00	395.763,47	-	-	504.046.469,00	504.442.232,47	504.442.232,00
	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	444.283.880,00	65.629.619,00			378.654.261,00	328.148,10	-	-	378.654.261,00	378.982.409,10	378.982.409,00
	Pajak Reklame Kain	101.339.082,00	9.251.824,00			92.087.258,00	46.259,12	-	-	92.087.258,00	92.133.517,12	92.133.517,00
	Pajak Reklame Melekat/Stiker	720.000,00				720.000,00	-	-	-	720.000,00	720.000,00	720.000,00
	Pajak Reklame Berjalan	36.801.200,00	4.216.250,00			32.584.950,00	21.081,25	-	-	32.584.950,00	32.606.031,25	32.606.031,00
	Pajak Reklame Udara	55.000,00	55.000,00				275,00	-	-	-	275,00	275,00
							-	-	-	-	-	-
4	PBJT - Pajak Parkir	150.124.472,00	7.920.467,00	39.293.491,00		102.910.514,00	39.602,34	3.929.349,10	-	102.910.514,00	106.879.465,44	106.879.465,00
							-	-	-	-	-	-
5	PBJT - Pajak Hiburan	442.484.467,00	11.174.168,00	34.153.700,00	-	397.156.599,00	55.870,84	3.415.370,00	-	397.156.599,00	400.627.839,84	400.627.840,00
	PBJT-Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual Lainnya yang Dipertontonkan secara Langsung di Suatu Lokasi Tertentu	7.578.299,00	210.000,00	7.197.955,00		170.344,00	1.050,00	719.795,50	-	170.344,00	891.189,50	891.190,00
	PBJT-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana	633.000,00				633.000,00	-	-	-	633.000,00	633.000,00	633.000,00
	PBJT-Permainan Ketangkasan	317.025.446,00	2.668.687,00	9.025.909,00		305.330.850,00	13.343,44	902.590,90	-	305.330.850,00	306.246.784,34	306.246.784,00
	PBJT-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran	98.834.544,00	8.215.181,00	14.314.836,00		76.304.527,00	41.075,91	1.431.483,60	-	76.304.527,00	77.777.086,51	77.777.087,00
	PBJT-Panti Pijat dan Pijat Refleksi	2.644.594,00	30.000,00	1.939.000,00		675.594,00	150,00	193.900,00	-	675.594,00	869.644,00	869.644,00
	PBJT-Distrotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa	15.768.584,00	50.300,00	1.676.000,00		14.042.284,00	251,50	167.600,00	-	14.042.284,00	14.210.135,50	14.210.136,00
6	Pajak Air Tanah	102.454.214,00	3.719.841,00	2.998.948,00		95.735.425,00	18.599,21	299.894,80	-	95.735.425,00	96.053.919,01	96.053.919,00
							-	-	-	-	-	-
7	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	180.794.489.476,00	6.557.889.816,00	54.158.171.487,00	66.357.202.816,00	53.721.225.357,00	32.789.449,08	5.415.817.148,70	33.178.601.408,00	53.721.225.357,00	92.348.433.362,78	92.348.433.363,00
	JUMLAH	190.563.727.801,00	7.184.923.433,00	55.946.740.835,00	66.357.202.816,00	61.074.860.717,00	35.924.617,17	5.594.674.083,50	33.178.601.408,00	61.074.860.717,00	99.884.060.825,67	99.884.060.826,00

PEMERINTAH KOTA BOGOR
Penyisihan Piutang Denda Retribusi Daerah
(Yang dipungut oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor)
Per 31 Desember 2025

No.	Nama Jenis Retribusi	Saldo Awal 31 Desember 2025	Progres Penyelesaian Piutang Denda 2025	Koreksi Piutang Tahun Sebelumnya	Penambahan Piutang Denda 2025	Saldo Akhir per 31 Desember 2025	Kriteria Kualitas Piutang Denda				Penyisihan Piutang Denda				Jumlah Penyisihan Piutang Denda
							Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Lancar 0.5%	Kurang Lancar 10%	Diragukan 50%	Macet 100%	
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)														
	Tahun 2009	1.138.000,00	-		-	1.138.000,00	-	-	-	1.138.000,00	-	-	-	1.138.000,00	1.138.000,00
	Tahun 2010	1.387.107,00	-		-	1.387.107,00	-	-	-	1.387.107,00	-	-	-	1.387.107,00	1.387.107,00
	Tahun 2011	1.163.296,00	-		-	1.163.296,00	-	-	-	1.163.296,00	-	-	-	1.163.296,00	1.163.296,00
	Tahun 2012	22.019.458,00	-		-	22.019.458,00	-	-	-	22.019.458,00	-	-	-	22.019.458,00	22.019.458,00
	Tahun 2013	118.687.425,00	-		-	118.687.425,00	-	-	-	118.687.425,00	-	-	-	118.687.425,00	118.687.425,00
	Tahun 2014	440.935.944,00	-		-	440.935.944,00	-	-	-	440.935.944,00	-	-	-	440.935.944,00	440.935.944,00
	Tahun 2015	22.234.665,00	-		-	22.234.665,00	-	-	-	22.234.665,00	-	-	-	22.234.665,00	22.234.665,00
	Tahun 2016	19.914.254,00	-		-	19.914.254,00	-	-	-	19.914.254,00	-	-	-	19.914.254,00	19.914.254,00
	Tahun 2017	74.693.401,00	-		-	74.693.401,00	-	-	-	74.693.401,00	-	-	-	74.693.401,00	74.693.401,00
	Tahun 2018	35.174.617,00			-	35.174.617,00	-	-	-	35.174.617,00	-	-	-	35.174.617,00	35.174.617,00
	Tahun 2019	43.891.308,00			-	43.891.308,00	-	-	-	43.891.308,00	-	-	-	43.891.308,00	43.891.308,00
	Tahun 2020	39.561.922,00	842.561,00		-	38.719.361,00	-	-	-	38.719.361,00	-	-	-	38.719.361,00	38.719.361,00
	Tahun 2021	5.984.151,00	-		-	5.984.151,00	-	-	-	5.984.151,00	-	-	-	5.984.151,00	5.984.151,00
	Tahun 2022	(2.536.165,00)	-	2.536.165,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	824.249.383,00	842.561,00	2.536.165,00	-	825.942.987,00	-	-	-	825.942.987,00	-	-	-	825.942.987,00	825.942.987,00
2	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)														
	Tahun 2022	-	12.512.295,00	-	15.554.183,00	3.041.888,00				3.041.888,00				3.041.888,00	3.041.888,00
	Tahun 2023	12.462.825,00	23.638.716,00		15.113.398,00	3.937.507,00	-	-	-	3.937.507,00	-	-	-	3.937.507,00	3.937.507,00
	Tahun 2024		1.811.360,00		9.175.405,00	7.364.045,00	769.128,00	738.296,00	5.816.441,00		38.456,40	73.829,60	2.908.220,50	-	3.020.506,50
	Tahun 2025				23.828.265,00	23.828.265,00	43.373,00	2.204.394,00	21.580.498,00		2.168,65	220.439,40	10.790.249,00	-	11.012.857,05
	Jumlah	12.462.825,00	37.962.371,00	-	63.671.251,00	38.171.705,00	812.501,00	2.942.690,00	27.396.939,00	6.979.395,00	40.625,05	294.269,00	13.698.469,50	6.979.395,00	21.012.758,55

**REKAPITULASI PIUTANG DENDA DAN PENYISIHAN PIUTANG DENDA RETRIBUSI PEMANFAATAN ASET DAERAH
PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
TAHUN 2025**

Lampiran 4.3

NO	No Pendaftaran	Pemohon	No SKRD	Tgl SKRD	Jatuh Tempo SKRD	Piutang Denda	Penambahan denda	Pembayaran Denda	Sisa Denda	SISA DENDA KOREKSI	Lancar 0,5%	Kurang Lancar 10%	Diragukan 50%	Macet 100%	Jumlah Penyisihan Piutang
2010						(91.126,00)			(91.126,00)	(91.126,00)				(91.126,00)	(91.126)
1	110400002011	Henny CH Akman	201141203070001	08 Agustus 2011	08-Sep-11	10.125,00			10.125,00	10.125,00				10.125,00	10.125,00
2	210400002011	Patahul hasan	201141203070002	08 Agustus 2011	08-Sep-11	10.125,00			10.125,00	10.125,00				10.125,00	10.125,00
3	310400002011	S. Budhi haerdjo	201141203070003	23-Sep-11	23 Oktober 2011	7.056,00			7.056,00	7.056,00				7.056,00	7.056,00
4	410400002011	So Wee Ming	201141203070004	08 Agustus 2011	08-Sep-11	1.611,00			1.611,00	1.611,00				1.611,00	1.611,00
5	510400002011	Titl Endang purwanti	201141203070005	18 Juli 2011	18 Agustus 2011	7.020,00			7.020,00	7.020,00				7.020,00	7.020,00
6	610400002011	Bambang harianto/PT. Metro batavia	201141203070006	20 Oktober 2011	20-Nov-11	10.125,00			10.125,00	10.125,00				10.125,00	10.125,00
7	710400002011	Syafel	201141203070007	21 Oktober 2011	21-Nov-11	10.125,00			10.125,00	10.125,00				10.125,00	10.125,00
8	910400002011	Boedi Soetrisno	201141203070009	08 Agustus 2011	08-Sep-11	8.496,00			8.496,00	8.496,00				8.496,00	8.496,00
9	1010400002011	Boedi Soetrisno	201141203070010	08 Agustus 2011	08-Sep-11	5.166,00			5.166,00	5.166,00				5.166,00	5.166,00
10	1110400002011	Jusup Karunia Mulia	201141203070011	13-Sep-11	13 Oktober 2011	8.496,00			8.496,00	8.496,00				8.496,00	8.496,00
11	1210400002011	Yennie yohanes	201141203070012	13-Sep-11	13 Oktober 2011	44.073,00			44.073,00	44.073,00				44.073,00	44.073,00
12	1310400002011	Yennie yohanes	201141203070013	13-Sep-11	13 Oktober 2011	44.073,00			44.073,00	44.073,00				44.073,00	44.073,00
13	1510400002011	Ramli	201141203070015	27 Desember 2011	27 Januari 2012	4.248,00			4.248,00	4.248,00				4.248,00	4.248,00
14	1610400002011	Drg. Rini utari	201141203070016	05-Sep-11	05 Oktober 2011	110.074,00			110.074,00	110.074,00				110.074,00	110.074,00
15	1710400002011	Benediet	201141203070017	08 Juli 2011	08 Agustus 2011	36.703,00			36.703,00	36.703,00				36.703,00	36.703,00
16	1810400002011	Hadi prahono	201141203070018	15 Desember 2011	15 Januari 2012	194.746,00			194.746,00	194.746,00				194.746,00	194.746,00
17	1910400002011	Hendri wiharsa	201141203070019	15 Desember 2011	15 Januari 2012	29.722,00			29.722,00	29.722,00				29.722,00	29.722,00
18	2010400002011	Yenny iswarno	201141203070020	22 Juni 2011	22 Juli 2011	99.641,00			99.641,00	99.641,00				99.641,00	99.641,00
19	2110400002011	Ridwan Sudjono	201141203070021	03 Mei 2011	03 Juni 2011	388.800,00			388.800,00	388.800,00				388.800,00	388.800,00
2011						1.030.425,00	-	-	1.030.425,00		-	-	-	1.030.425,00	1.030.425
1	2210400002012	LITA REGINA MARIA	201241203070022	18 Desember 2012	18 Januari 2013	216.990,00			216.990,00	216.990,00				216.990,00	216.990,00
2	2310400002012	Drs. MULYAMAN SUPARDI	201241203070023	06 Maret 2012	06-Apr-12	10.776,00			10.776,00	10.776,00				10.776,00	10.776,00
3	2410400002012	MEI LIEN LIM	201241203070024	05-Apr-12	05 Mei 2012	10.125,00			10.125,00	10.125,00				10.125,00	10.125,00
4	2510400002012	WINARDO,SE	201241203070025	11 Oktober 2012	11-Nov-12	10.125,00			10.125,00	10.125,00				10.125,00	10.125,00
5	2610400002012	DAHLIA PUSPITA	201241203070026	11 Juni 2012	11 Juli 2012	10.125,00			10.125,00	10.125,00				10.125,00	10.125,00
6	2910400002012	ANDANG JAMAL	201241203070029	05-Apr-12	05 Mei 2012	2.406,00			2.406,00	2.406,00				2.406,00	2.406,00
7	3010400002012	FAIZ HILMY	201241203070030	24 Februari 2012	24 Maret 2012	8.496,00			8.496,00	8.496,00				8.496,00	8.496,00
8	3110400002012	ROSALINAWATY ARIFIN	201241203070031	14 Februari 2012	14 Maret 2012	4.248,00			4.248,00	4.248,00				4.248,00	4.248,00
9	3210400002012	AKBAR ARIEF PRAMUGIYANTO	201241203070032	06 Maret 2012	06-Apr-12	6.528,00			6.528,00	6.528,00				6.528,00	6.528,00
10	3510400002012	TUNG TIAN	201241203070035	20-Sep-12	20 Oktober 2012	13.163,00			13.163,00	13.163,00				13.163,00	13.163,00
2012						292.982,00	-	-	292.982,00		-	-	-	292.982,00	292.982,00
1	3910400002013	Antonius Tunggal Pujiantoro	201341203070039	18 Juli 2013	03 Agustus 2013	302.000,00			302.000,00	302.000,00				302.000,00	302.000,00
2	4110400002013	PT.Pratama Internusa	201341203070041	18 Juli 2013	03 Agustus 2013	697.950,00			697.950,00	697.950,00				697.950,00	697.950,00
3	4310400002013	Firdaus Uwanjaya	201341203070043	27 Maret 2013	12-Apr-13	506.250,00			506.250,00	506.250,00				506.250,00	506.250,00
4	4510400002013	Budi Mulyono	201341203070045	13 Mei 2013	28 Mei 2013	506.250,00			506.250,00	506.250,00				506.250,00	506.250,00
5	4610400002013	Antonius Tunggal Pujiantoro	201341203070046	28-Sep-13	13 Oktober 2013	376.200,00			376.200,00	376.200,00				376.200,00	376.200,00
6	4710400002013	PT.Trikartama Advertising	201341203070047	27 Maret 2013	12-Apr-13	212.400,00			212.400,00	212.400,00				212.400,00	212.400,00
7	4810400002013	Jaenal Mutagin	201341203070048	19 Desember 2013	04 Januari 2014	506.250,00			506.250,00	506.250,00				506.250,00	506.250,00
8	4910400002013	Julius Octavianus Ruslan	201341203070049	19 Desember 2013	04 Januari 2014	12.038.400,00			12.038.400,00	12.038.400,00				12.038.400,00	12.038.400,00
9	5110400002013	Mia Fitriani/ PT.Sot Indosaurcing	201341203070051	17 Desember 2013	02 Januari 2014	424.800,00			424.800,00	424.800,00				424.800,00	424.800,00
10	5210400002013	Hj. Suryati	201341203070052	28 Juni 2013	12 Juli 2013	212.400,00			212.400,00	212.400,00				212.400,00	212.400,00
11	5310400002013	Ahmad Koimah	201341203070053	29 Juli 2013	13 Agustus 2013	316.492,00			316.492,00	316.492,00				316.492,00	316.492,00
12	5510400002013	Almansyah	201341203070055	11 Februari 2013	26 Maret 2013	1.394.400,00			1.394.400,00	1.394.400,00				1.394.400,00	1.394.400,00
13	5610400002013	Wawan Soebandi	201341203070056	05-Apr-13	20-Apr-13	190.080,00			190.080,00	190.080,00				190.080,00	190.080,00
2013						17.683.872,00	-	-	17.683.872,00		-	-	-	17.683.872,00	17.683.872
1	5710400002014	Erni Yunaeni	201441203070057	21 Januari 2014	05 Februari 2014	229.392,00			229.392,00	229.392,00				229.392,00	229.392,00
2	5810400002014	Iman Firmansyah	201441203070058	17 Februari 2014	04 Maret 2014	280.944,00			280.944,00	280.944,00				280.944,00	280.944,00
3	5910400002014	Danni Setiawan	201441203070059	18 Februari 2014	05 Maret 2014	486.000,00			486.000,00	486.000,00				486.000,00	486.000,00
4	6010400002014	CV. Eagle	201441203070060	18 Februari 2014	05 Maret 2014	279.000,00			279.000,00	279.000,00				279.000,00	279.000,00
5	6110400002014	Ir. Hendrianto Soemono	201441203070061	27 Februari 2014	14 Maret 2014	495.000,00			495.000,00	495.000,00				495.000,00	495.000,00
6	6210400002014	Drg. Femi Fatimah	201441203070062	12 Mei 2014	27 Mei 2014	243.000,00			243.000,00	243.000,00				243.000,00	243.000,00
7	6310400002014	Tina Natalia	201441203070063	12 Mei 2014	27 Mei 2014	190.080,00			190.080,00	190.080,00				190.080,00	190.080,00
8	6410400002014	Sundari	201441203070064	26 Mei 2014	10 Juni 2014	243.000,00			243.000,00	243.000,00				243.000,00	243.000,00
9	6510400002014	Cahya Indra Yudha	201441203070065	04 Juni 2014	19 Juni 2014	101.953,00			101.953,00	101.953,00				101.953,00	101.953,00
10	6610400002014	Ir. Badrun Rahman	201441203070066	04 Juni 2014	19 Juni 2014	4.624.156,00			4.624.156,00	4.624.156,00				4.624.156,00	4.624.156,00
11	6710400002014	Ir. Badrun Rahman	201441203070067	04 Juni 2014	19 Juni 2014	4.624.156,00			4.624.156,00	4.624.156,00				4.624.156,00	4.624.156,00
12	6810400002014	R. ahmdah Kustandi	201441203070068	26 Juni 2014	11 Juli 2014	495.000,00			495.000,00	495.000,00				495.000,00	495.000,00
13	6910400002014	Elvira Y Zebu	201441203070069	11 Juli 2014	26 Juli 2014	495.000,00			495.000,00	495.000,00				495.000,00	495.000,00
14	7010400002014	Riena Yulvindravati	201441203070070	11 Juli 2014	26 Juli 2014	495.000,00			495.000,00	495.000,00				495.00	

REKAPITULASI PIUTANG DENDA DAN PENYISIHAN PIUTANG DENDA RETRIBUSI PEMANFAATAN ASET DAERAH
PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
TAHUN 2025

Lampiran 4.3

NO	No Pendaftaran	Pemohon	No SKRD	Tgl SKRD	Jatuh Tempo SKRD	Piutang Denda	Penambahan denda	Pembayaran Denda	Sisa Denda	SISA DENDA KOREKSI	Lancar 0,5%	Kurang Lancar 10%	Diragukan 50%	Macet 100%	Jumlah Penyisihan Piutang
2014						16.971.465,00	-	-	16.971.465,00		-	-	-	16.971.465,00	Lampiran 4.3
1	8410400002015	Suherman	201541203070084	23-Apr-15	23 Mei 2015	243.000,00			243.000,00	243.000,00				243.000,00	243.000,00
2	8510400002015	Arif Istanto	201541203070085	03-Maret-15	03-Apr-15	495.000,00			495.000,00	495.000,00				495.000,00	495.000,00
3	8610400002015	Dra.DedeH Soeria Atmaja	201541203070086	10-Maret-15	10-Apr-15	1.944.000,00			1.944.000,00	1.944.000,00				1.944.000,00	1.944.000,00
4	8810400002015	Billy S Tirta Mulya	201541203070299	02-Oktober-15	02-Nov-15	74.304,00			74.304,00	74.304,00				74.304,00	74.304,00
5	8910400002015	Billy S Tirta Mulya	201541203070089	02-Oktober-15	02-Nov-15	243.000,00			243.000,00	243.000,00				243.000,00	243.000,00
6	9010400002015	Erni Yunaeni	201541203070090	06-Oktober-15	06-Nov-15	446.400,00			446.400,00	446.400,00				446.400,00	446.400,00
7	9110400002015	Erni Yunaeni	201541203070091	06-Oktober-15	06-Nov-15	480.960,00			480.960,00	480.960,00				480.960,00	480.960,00
8	9210400002015	Erni Yunaeni	201541203070092	06-Oktober-15	06-Nov-15	223.200,00			223.200,00	223.200,00				223.200,00	223.200,00
9	9310400002015	Erni Yunaeni	201541203070093	06-Oktober-15	06-Nov-15	232.200,00			232.200,00	232.200,00				232.200,00	232.200,00
10	9410400002015	Billy Tirta Mulya	201541203070300	06-Oktober-15	06-Nov-15	502.200,00			502.200,00	502.200,00				502.200,00	502.200,00
11	9510400002015	Billy S Tirta Mulya	201541203070301	06-Oktober-15	06-Nov-15	101.952,00			101.952,00	101.952,00				101.952,00	101.952,00
12	9610400002015	Billy S Tirta Mulya	201541203070304	06-Oktober-15	06-Nov-15	101.952,00			101.952,00	101.952,00				101.952,00	101.952,00
13	9810400002015	Ir. Badrun Rachman (2015)	201541203070305	02-Nov-15	02-Nov-15	1.800.792,00			1.800.792,00	1.800.792,00				1.800.792,00	1.800.792,00
14	9710400002015	Ir. Badrun Rachman (2014)	201541203070303	02-Nov-15	02-Desember-15	1.800.792,00			1.800.792,00	1.800.792,00				1.800.792,00	1.800.792,00
2015						8.689.752,00	-	-	8.689.752,00		-	-	-	8.689.752,00	8.689.752,00
1	20151222.PPTR.02109	BENNY TRISNAWAN	201641203070005	21-Januari-16	11-Februari-16	502.200,00			502.200,00	502.200,00				502.200,00	502.200,00
2	20160322.PPTR.02623	IR. HUSDI KARYONO	201641203070068	04-Apr-16	25-Apr-16	683.438,00			683.438,00	683.438,00				683.438,00	683.438,00
3	20160425.PPTR.04060	DADANG ROHENDI, SH	201641203070095	28-Apr-16	19-Mei-16	101.952,00			101.952,00	101.952,00				101.952,00	101.952,00
4	20160524.PPTR.04896	MULYADI	201641203070123	03-Juni-16	24-Juni-16	243.000,00			243.000,00	243.000,00				243.000,00	243.000,00
5	20160524.PPTR.04896	MULYADI	201641203070121	03-Juni-16	24-Juni-16	243.000,00			243.000,00	243.000,00				243.000,00	243.000,00
6	20160524.PPTR.04896	MULYADI	201641203070122	03-Juni-16	24-Juni-16	243.000,00			243.000,00	243.000,00				243.000,00	243.000,00
7	20160324.PPTR.02806	DEBYANITA JULIANI	201641203070116	02-Juni-16	23-Juni-16	91.728,00			91.728,00	91.728,00				91.728,00	91.728,00
8	20160324.PPTR.02801	DEBYANITA JULIANI	201641203070115	02-Juni-16	23-Juni-16	243.000,00			243.000,00	243.000,00				243.000,00	243.000,00
9	20160609.PPTR.05410	LUKYTA SURAWIYA	201641203070147	16-Juni-16	07-Juli-16	261.676,00			261.676,00	261.676,00				261.676,00	261.676,00
10	20160627.PPTR.05893	DERMARIA SIANTURI	201641203070185	11-Agustus-16	204.150,00	204.150,00			204.150,00	204.150,00				204.150,00	204.150,00
11	20160328.PPTR.02887	IRVING HEIN ALEX NAJOAN	201641203070224	17-Oktober-16	07-Nov-16	122.400,00			122.400,00	122.400,00				122.400,00	122.400,00
12	20160914.PPTR.07205	LUKMAN NURHAKIM	201641203070236	03-Nov-16	24-Nov-16	243.000,00			243.000,00	243.000,00				243.000,00	243.000,00
2016						3.182.544,00	-	-	3.182.544,00		-	-	-	3.182.544,00	3.182.544,00
1	210204.IPT/PPTR.00038	YOGIE BASUKI	202141203070021	08-Februari-2021	01-Maret-2021	549.813,00			549.813,00	549.813,00				549.813,00	549.813,00
2	210205.IPT/PPTR.00039	YOGIE BASUKI	202141203070022	08-Februari-2021	01-Maret-2021	331.560,00			331.560,00	331.560,00				331.560,00	331.560,00
3	210205.IPT/PPTR.00056	DEPKAHARDI	202141203070029	19-Februari-2021	12-Maret-2021	269.640,00	-	269.640,00	-	-	-	-	-	-	-
2021						1.151.013,00	-	269.640,00	881.373,00		-	-	-	881.373,00	881.373,00
1	221123.IPT/PPTR.00186	MIRA YULIAWATI	202241203070089	25-Nov-22	16-Desember-2022	17.550,00			17.550,00	17.550,00				17.550,00	17.550,00
2022						17.550,00	-	-	17.550,00		-	-	-	17.550,00	17.550,00
1	230227.IPT/PPTR.00030	FREDESWINDA NINA ROSITA	3271232120000104	07-Maret-2023	28-Maret-2023	167.265,00		#REF!	#REF!	(91.126,00)				-	-
2	230227.IPT/PPTR.00031	FREDESWINDA NINA ROSITA	3271232120000105	07-Maret-2023	28-Maret-2023	167.265,00			167.265,00	167.265,00				167.265,00	167.265,00
3	230301.IPT/PPTR.00039	FREDESWINDA NINA ROSITA	3271232120000107	07-Maret-2023	28-Maret-2023	167.265,00			167.265,00	167.265,00				167.265,00	167.265,00
4	230301.IPT/PPTR.00040	FREDESWINDA NINA ROSITA	3271232120000108	07-Maret-2023	28-Maret-2023	137.565,00			137.565,00	137.565,00				137.565,00	137.565,00
5	230529.IPT/PPTR.00062	HANDOKO MIWIBOWO	3271232120000307	05-Juni-2023	26-Juni-2023	860.479,00		1.864.372,00	(1.864.372,00)	(1.864.372,00)				(1.864.372,00)	(1.864.372,00)
6	231120.IPT/PPTR.00141	MAHESA ALMEIDA PRATASIK	3271232120000888	22-Nov-23	13-Desember-2023	124.530,00			124.530,00	124.530,00				124.530,00	124.530,00
7	231124.IPT/PPTR.00146	Balthia Zahra yang bertindak untuk dan atas nama	3271232120000934	30-Nov-23	21-Desember-2023	28.935,00			28.935,00	28.935,00				28.935,00	28.935,00
8	231219.IPT/PPTR.00156	ANDI MULIA	32712321200001000	21-Desember-2023	11-Januari-2024	-			-	-				-	-
9	231220.IPT/PPTR.00158	Hadjianto Husen	32712321200001001	21-Desember-2023	11-Januari-2024	-			-	-				-	-
10	231220.IPT/PPTR.00157	IR. KRISWANDONO	32712321200001002	21-Desember-2023	11-Januari-2024	-		13.815,00	(13.815,00)	(13.815,00)				(13.815,00)	(13.815,00)
11	231220.IPT/PPTR.00159	Ir. Hadjianto Husen	32712321200001003	22-Desember-2023	12-Januari-2024	-			-	-				-	-
12	231222.IPT/PPTR.00161	Balthia Zahra yang bertindak untuk dan atas nama	32712321200001056	28-Desember-2023	18-Januari-2024	-			-	-				-	-
2023						1.653.304,00	-	1.878.187,00	(224.883,00)					(224.883,00)	(224.883,00)
1	241016.IPT/PPTR.00127	Anisa Adyithia Rahayu	32712421200001097	18-Oktober-2024	08-Nov-24	439.830,00		219.915,00	219.915,00				109.957,50		109.957,50
2	241011.IPT/PPTR.00124	SHABUDIN yang bertindak untuk dan atas nama	32712421200001155	24-Oktober-2024	14-Nov-24	24.930,00			24.930,00	24.930,00		2.493,00			2.493,00
3	241028.IPT/PPTR.00139	ANDI MULIA	32712421200001175	01-Nov-24	22-Nov-24	659.745,00			659.745,00	659.745,00		65.974,50			65.974,50
4	241111.IPT/PPTR.00152	Dwi Wahyu Sejati	32712421200001213	12-Nov-24	03-Desember-2024	15.285,00			15.285,00	15.285,00	76,43				76,43
5	241121.IPT/PPTR.00157	SAID SUGENG WIBOWO	32712421200001330	25-Nov-24	16-Desember-2024	151.875,00			151.875,00	151.875,00	759,38				759,38
6	241212.IPT/PPTR.00170	Hadjianto Husen	32712421200001426	16-Desember-2024	06-Januari-2025	-			-	-				-	-
7	241217.IPT/PPTR.00172	Rhendie Arindra Ferdian	32712421200001427	19-Desember-2024	09-Januari-2025	-			-	-				-	-
8	241217.IPT/PPTR.00173	Rhendie Arindra Ferdian	32712421200001432	24-Desember-2024	14-Januari-2025	-			-	-				-	-
9	241220.IPT/PPTR.00174	Sugianto	32712421200001453	27-Desember-2024		-			-	-				-	-
10	241223.IPT/PPTR.00175	BUDI SETIAWAN	32712421200001454	27-Desember-2024	17-Januari-2025	-			-	-				-	-
2024						1.291.665,00	-	219.915,00	1.071.750,00		835,80	68.467,50	109.957,50	-	179.260,80
TOTAL KESELURUHAN						51.873.446,00	-	2.367.742,00	49.505.704,00		835,80	68.467,50	109.957,50	48.433.954,00	48.613.214,80

Lampiran 5

PEMERINTAH KOTA BOGOR
Beban di Bayar di Muka
Per 31 Desember 2025

1 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (BLUD)

NO	NAMA PERUSAHAAN	PEMEGANG POLIS	NO POLIS	JENIS POLIS	JANGKA WAKTU PERTANGGUNGAN	JUMLAH HARI PERTANGGUNGAN	JUMLAH HARI YANG BELUM JATUH TEMPO	NILAI PREMI (Rp)	SISA YANG BELUM JATUH TEMPO (Rp)
1	PT Asuransi Central Asia (ACA Asuransi)	RSUD Kota Bogor	102020125100000395	Asuransi Kendaraan Bermotor	25 Oktober 2025 sd 25 Oktober 2026	365	297	7.632.600,00	6.210.636,16
								7.632.600,00	6.210.636,16

2. DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

NO	NAMA PERUSAHAAN	PEMEGANG POLIS	NO POLIS	JENIS POLIS	JANGKA WAKTU PERTANGGUNGAN	JUMLAH HARI PERTANGGUNGAN	JUMLAH HARI YANG BELUM JATUH TEMPO	NILAI PREMI (Rp)	SISA YANG BELUM JATUH TEMPO (Rp)
1	Asuransi Bumida Bumiputra	Dinas Perumahan dan Permukiman	1017090125050001	Asuransi Tanggung Jawab Publik	09 Juni 2025 sd 09 Juni 2026	365	159	220.000.000,00	95.835.616,40
								220.000.000,00	95.835.616,40

3 KECAMATAN BOGOR SELATAN

NO	NAMA PEMILIK	NAMA PELANGGAN	PERJANJIAN	JENIS LAYANAN	JANGKA WAKTU PERTANGGUNGAN	JUMLAH HARI PERTANGGUNGAN	JUMLAH HARI YANG BELUM JATUH TEMPO	NILAI PREMI (Rp)	SISA YANG BELUM JATUH TEMPO (Rp)
1	Djoni Kustari, SE	Kelurahan Pakuan	027/001/SP/Sewa.KP/Bosel/XI/2025 tanggal 17 November 2025	Sewa Gedung Bangunan Kantor Kelurahan Pakuan	17 November 2025 s.d 16 November 2026	364	320	112.035.000,00	98.492.307,65
								112.035.000,00	98.492.307,65

4 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

[illegible]

Penyertaan Modal Pemda
(Pencatatan Berdasarkan Metode Biaya dan Metode Ekuitas)
Per 31 Desember 2025

audited

No.	Nama Rekening	Metode Pencatatan	Ekuitas Perusahaan Daerah (Berdasarkan Laporan Keuangan Perusahaan Daerah 2025) Unaudited							Saldo Akhir Per 31 Desember 2025
			Saldo Investasi Akhir 31 Desember 2024	Koreksi	Saldo Awal setelah koreksi	Penambahan Investasi Tahun 2025	Pendapatan kekayaan yang dipisahkan atau rugi penurunan Nilai Investasi (LO)	Pembagian Laba yang mengurangi Modal pemda	Jumlah Ekuitas Pemda di neraca BUMD 2025	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11=5+6+7+9-10	12 = 11
1	Penyertaan Modal pada Bank Jabar	Biaya	16.078.535.753,00		16.078.535.753,00				16.078.535.753,00	16.078.535.753,00
2	Penyertaan Modal pada PDAM Kota Bogor	Ekuitas	536.282.344.004,24		536.282.344.004,24	15.000.000.000,00	60.817.003.878,61	29.559.100.635,00	582.540.247.247,85	582.540.247.247,85
3	Penyertaan Modal pada BPR Bank Kota Bogor	Ekuitas	87.827.113.151,00		87.827.113.151,00		4.501.781.263,00	2.941.714.753,00	89.387.179.661,00	89.387.179.661,00
4	Penyertaan Modal pada PD Jasa Transportasi	Ekuitas	(0,00)		(0,00)				(0,00)	(0,00)
5	Penyertaan Modal pada PD Pasar Pakuan	Ekuitas	362.105.423.536,00	(14.103.134.302,00)	348.002.289.234,00		(26.767.432.924,00)	250.000.000,00	320.984.856.310,00	320.984.856.310,00
Jumlah			1.002.293.416.444,24	(14.103.134.302,00)	988.190.282.142,24	15.000.000.000,00	38.551.352.217,61	32.750.815.388,00	1.008.990.818.971,85	1.008.990.818.971,85

PEMERINTAH KOTA BOGOR

Tabel Mutasi Barang Milik Daerah - Tanah

Per 31 Desember 2025

Lampiran 8

No.	OPD	Golongan Barang	SALDO AWAL (31 Desember 2024)	PENAMBAHAN ASET TETAP ATAS BELANJA 2025	PENAMBAHAN ASET TETAP ATAS TAHUN BERJALAN				JUMLAH MUTASI TAMBAH	PENGURANGAN ASET TETAP ATAS BELANJA 2025	PENGURANGAN ASET TETAP ATAS TAHUN BERJALAN				JUMLAH MUTASI KURANG	SALDO AKHIR (31 Desember 2025)	
				REALISASI BELANJA MODAL (+) ASET TETAP	MUTASI DARI PD ASET TETAP	REKLAS ANTAR ASET TETAP	ASET YANG ASET TETAP	REKLAS DARI/KE ASET TETAP		BELANJA MODAL YANG DIREKLAS ANTAR	MUTASI KE PD ASET TETAP	REKLAS ANTAR ASET TETAP	ASET YANG ASET TETAP	REKLAS DARI/KE ASET TETAP			
1	Dinas Pendidikan	Tanah	127.657.803.933,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	127.657.803.933,34	
2	Dinas Kesehatan	Tanah	32.292.175.450,00	-	1.015.989.133,00	84.099.925,00	-	-	1.100.089.058,00	-	802.759.198,00	84.099.925,00	-	-	886.859.123,00	32.505.405.385,00	
3	Rumah Sakit Umum Daerah (PD)	Tanah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD)	Tanah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tanah	2.905.396.615.386,00	21.096.251.620,00	-	-	-	-	21.096.251.620,00	98.770.020,00	745.070.400,00	-	-	-	843.840.420,00	2.925.649.026.586,00	
6	Dinas Perumahan dan Permukiman	Tanah	1.005.437.408.524,00	-	745.070.400,00	2.216.289.600,00	-	1.294.880.850,00	4.256.240.850,00	-	-	2.216.289.600,00	-	-	2.216.289.600,00	1.007.477.359.774,00	
7	Satuan Polisi Pamong Praja	Tanah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Tanah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Tanah	462.013.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	462.013.000,00	
10	Dinas Sosial	Tanah	1.967.398.000,00	-	333.568.000,00	-	-	-	333.568.000,00	-	-	-	-	-	-	2.300.966.000,00	
11	Dinas Tenaga Kerja	Tanah	6.553.399.812,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.553.399.812,00	
12	Dinas Lingkungan Hidup	Tanah	38.143.413.940,00	-	-	-	-	18.569.541.750,00	18.569.541.750,00	-	-	-	-	-	-	56.712.955.690,00	
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Tanah	Tanah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	Tanah	417.239.114,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	417.239.114,00	
15	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Tanah	917.985.750,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	917.985.750,00	
16	Dinas Perhubungan	Tanah	20.845.615.397,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	599.985.000,00	599.985.000,00	20.245.630.397,00	
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	Tanah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	Tanah	11.259.619.914,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.800.750.000,00	8.800.750.000,00	2.458.869.914,35	
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PI - Tanah	Tanah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	Dinas Pemuda dan Olahraga	Tanah	93.100.320.000,00	-	84.364.798.019,00	-	-	-	84.364.798.019,00	-	1.701.000.000,00	-	-	-	1.701.000.000,00	175.764.118.019,00	
21	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Tanah	5.177.389.588,00	-	-	227.489.588,00	-	-	227.489.588,00	-	-	227.489.588,00	-	-	227.489.588,00	5.177.389.588,00	
22	Dinas Arsip dan Perpustakaan	Tanah	964.254.062,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	964.254.062,00	
23	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Tanah	20.444.181.075,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.444.181.075,00	
24	Sekretariat Daerah	Tanah	28.642.503.804,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.642.503.804,00	
25	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Tanah	47.348.887.770,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47.348.887.770,00	
26	Kecamatan Bogor Selatan	Tanah	27.732.809.249,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.732.809.249,00	
27	Kecamatan Bogor Timur	Tanah	1.756.086.324,00	-	11.299.990,00	-	-	-	11.299.990,00	-	84.099.925,00	-	-	-	84.099.925,00	1.683.286.389,00	
28	Kecamatan Bogor Tengah	Tanah	4.613.591.659,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.613.591.659,00	
29	Kecamatan Bogor Barat	Tanah	12.903.827.468,00	6.947.807.700,00	-	1.702.224.400,00	-	-	8.650.032.100,00	-	-	1.602.958.000,00	-	-	1.602.958.000,00	19.950.901.568,00	
30	Kecamatan Bogor Utara	Tanah	8.315.430.354,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.315.430.354,00	
31	Kecamatan Tanah Sareal	Tanah	5.550.973.150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	140.430.000,00	-	-	140.430.000,00	5.410.543.150,00	
32	Inspektorat	Tanah	133.800.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	133.800.000,00	
33	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Tanah	1.920.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.920.000.000,00	
34	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Tanah	317.196.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	317.196.000,00	
35	Badan Pendapatan Daerah	Tanah	798.624.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	798.624.000,00	
36	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur	Tanah	1.745.600.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.745.600.000,00	
37	PPKD	Tanah	1.383.103.734.469,00	-	1.701.000.000,00	3.673.305.800,00	2.473.800.000,00	86.584.701.811,00	94.432.807.611,00	-	84.698.366.019,00	3.673.305.800,00	1.342.430.374,93	18.764.191.325,00	108.478.293.518,93	1.369.058.248.561,07	
38	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Tanah	241.699.716,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	241.699.716,00	
JUMLAH TOTAL			5.796.161.596.908,69	28.044.059.320,00	88.171.725.542,00	7.903.409.313,00	2.473.800.000,00	106.449.124.411,00	233.042.118.586,00	-	98.770.020,00	88.171.725.542,00	7.804.142.913,00	1.342.430.374,93	28.164.926.325,00	125.581.995.174,93	5.903.621.720.319,76

PEMERINTAH KOTA BOGOR

Nomor Surat Perjanjian Sewa BMD Poliklinik Korpri

Lampiran 9

Per 31 Desember 2025

NO	NAMA	LUAS	SATUAN	ALAMAT	JANGKA WAKTU	WAKTU MULAI SEWA	WAKTU BERAKHIR	JENIS KEGIATAN	JENIS PEMANFAATAN	NOMOR PERJANJUAN	TANGGAL	PELAKSANA PEMANFAATAN	CLUSTER
1	Ahmad Yani	3	m2	Plaza Taman Topi, Jl. Kapten Muslihat, Kel. Pabaton, Kec. Bogor Tengah, Kota Bogor	1 Tahun	2 Januari 2019	1 Januari 2020	Usaha	Sebagian Tanah	593/614-BPKAD	13 Februari 2019	Dinas Perumahan dan Permukiman	Taman Topi
2	Atjam	16	m2	Plaza Taman Topi, Jl. Kapten Muslihat, Kel. Pabaton, Kec. Bogor Tengah, Kota Bogor	1 Tahun	2 Januari 2019	1 Januari 2020	Usaha	Sebagian Tanah	593/588-BPKAD	12 Februari 2019	Dinas Perumahan dan Permukiman	Taman Topi
3	H. Fauzi Djarnuji	50	m2	Plaza Taman Topi, Jl. Kapten Muslihat, Kel. Pabaton, Kec. Bogor Tengah, Kota Bogor	1 Tahun	2 Januari 2019	1 Januari 2020	Usaha	Sebagian Tanah	593/537-BPKAD	8 Februari 2019	Dinas Perumahan dan Permukiman	Taman Topi
4	H. Ikin S	227	m2	Plaza Taman Topi, Jl. Kapten Muslihat, Kel. Pabaton, Kec. Bogor Tengah, Kota Bogor	1 Tahun	2 Januari 2019	1 Januari 2020	Usaha	Sebagian Tanah	593/563-BPKAD	11 Februari 2019	Dinas Perumahan dan Permukiman	Taman Topi
5	H. Mumu H	47	m2	Plaza Taman Topi, Jl. Kapten Muslihat, Kel. Pabaton, Kec. Bogor Tengah, Kota Bogor	1 Tahun	2 Januari 2019	1 Januari 2020	Usaha	Sebagian Tanah	593/590-BPKAD	12 Februari 2019	Dinas Perumahan dan Permukiman	Taman Topi
6	H. Tahang	36	m2	Plaza Taman Topi, Jl. Kapten Muslihat, Kel. Pabaton, Kec. Bogor Tengah, Kota Bogor	1 Tahun	2 Januari 2019	1 Januari 2020	Usaha	Sebagian Tanah	593/589-BPKAD	12 Februari 2019	Dinas Perumahan dan Permukiman	Taman Topi
7	Herry B	12,5	m2	Plaza Taman Topi, Jl. Kapten Muslihat, Kel. Pabaton, Kec. Bogor Tengah, Kota Bogor	1 Tahun	2 Januari 2019	1 Januari 2020	Usaha	Sebagian Tanah	593/556-BPKAD	11 Februari 2019	Dinas Perumahan dan Permukiman	Taman Topi
8	Herry Bae	12,5	m2	Plaza Taman Topi, Jl. Kapten Muslihat, Kel. Pabaton, Kec. Bogor Tengah, Kota Bogor	1 Tahun	2 Januari 2019	1 Januari 2020	Usaha	Sebagian Tanah	593/556-BPKAD	11 Februari 2019	Dinas Perumahan dan Permukiman	Taman Topi
9	Hj. Ina H	85	m2	Plaza Taman Topi, Jl. Kapten Muslihat, Kel. Pabaton, Kec. Bogor Tengah, Kota Bogor	1 Tahun	2 Januari 2019	1 Januari 2020	Usaha	Sebagian Tanah	593/536-BPKAD	8 Februari 2019	Dinas Perumahan dan Permukiman	Taman Topi
10	Ivan Fadila	100	m2	Plaza Taman Topi, Jl. Kapten Muslihat, Kel. Pabaton, Kec. Bogor Tengah, Kota Bogor	1 Tahun	2 Januari 2019	1 Januari 2020	Usaha	Sebagian Tanah	593/557-BPKAD	11 Februari 2019	Dinas Perumahan dan Permukiman	Taman Topi
11	Jaenudin	3	m2	Plaza Taman Topi, Jl. Kapten Muslihat, Kel. Pabaton, Kec. Bogor Tengah, Kota Bogor	1 Tahun	2 Januari 2019	1 Januari 2020	Usaha	Sebagian Tanah	593/612-BPKAD	13 Februari 2019	Dinas Perumahan dan Permukiman	Taman Topi
12	Joppy Kusuma	133	m2	Plaza Taman Topi, Jl. Kapten Muslihat, Kel. Pabaton, Kec. Bogor Tengah, Kota Bogor	1 Tahun	2 Januari 2019	1 Januari 2020	Usaha	Sebagian Tanah	593/561-BPKAD	11 Februari 2019	Dinas Perumahan dan Permukiman	Taman Topi
13	Muklis	16	m2	Plaza Taman Topi, Jl. Kapten Muslihat, Kel. Pabaton, Kec. Bogor Tengah, Kota Bogor	1 Tahun	2 Januari 2019	1 Januari 2020	Usaha	Sebagian Tanah	593/587-BPKAD	12 Februari 2019	Dinas Perumahan dan Permukiman	Taman Topi
14	Qisti Aulia	7	m2	Plaza Taman Topi, Jl. Kapten Muslihat, Kel. Pabaton, Kec. Bogor Tengah, Kota Bogor	1 Tahun	2 Januari 2019	1 Januari 2020	Usaha	Sebagian Tanah	593/559-BPKAD	11 Februari 2019	Dinas Perumahan dan Permukiman	Taman Topi
15	Ratih Ratunahati	217	m2	Plaza Taman Topi, Jl. Kapten Muslihat, Kel. Pabaton, Kec. Bogor Tengah, Kota Bogor	1 Tahun	2 Januari 2019	1 Januari 2020	Usaha	Sebagian Tanah	593/538-BPKAD	8 Februari 2019	Dinas Perumahan dan Permukiman	Taman Topi
16	Saman	3	m2	Plaza Taman Topi, Jl. Kapten Muslihat, Kel. Pabaton, Kec. Bogor Tengah, Kota Bogor	1 Tahun	2 Januari 2019	1 Januari 2020	Usaha	Sebagian Tanah	593/592-BPKAD	12 Februari 2019	Dinas Perumahan dan Permukiman	Taman Topi
17	Siti Nurahmania	18	m2	Plaza Taman Topi, Jl. Kapten Muslihat, Kel. Pabaton, Kec. Bogor Tengah, Kota Bogor	1 Tahun	2 Januari 2019	1 Januari 2020	Usaha	Sebagian Tanah	593/517-BPKAD	7 Februari 2019	Dinas Perumahan dan Permukiman	Taman Topi
18	Suyatni	75	m2	Plaza Taman Topi, Jl. Kapten Muslihat, Kel. Pabaton, Kec. Bogor Tengah, Kota Bogor	1 Tahun	2 Januari 2019	1 Januari 2020	Usaha	Sebagian Tanah	593/536-BPKAD	8 Februari 2019	Dinas Perumahan dan Permukiman	Taman Topi
19	Syahril Kamil	314	m2	Plaza Taman Topi, Jl. Kapten Muslihat, Kel. Pabaton, Kec. Bogor Tengah, Kota Bogor	1 Tahun	2 Januari 2019	1 Januari 2020	Usaha	Sebagian Tanah	593/562-BPKAD	11 Februari 2019	Dinas Perumahan dan Permukiman	Taman Topi
20	Syamsu Bahri	25	m2	Plaza Taman Topi, Jl. Kapten Muslihat, Kel. Pabaton, Kec. Bogor Tengah, Kota Bogor	1 Tahun	2 Januari 2019	1 Januari 2020	Usaha	Sebagian Tanah	593/542-BPKAD	8 Februari 2019	Dinas Perumahan dan Permukiman	Taman Topi
21	Tati Supriyanti	100	m2	Plaza Taman Topi, Jl. Kapten Muslihat, Kel. Pabaton, Kec. Bogor Tengah, Kota Bogor	1 Tahun	2 Januari 2019	1 Januari 2020	Usaha	Sebagian Tanah	593/558-BPKAD	11 Februari 2019	Dinas Perumahan dan Permukiman	Taman Topi
22	Atik Suryati	8	m2	Taman Ade Irma Taman Topi, Jl. Kapten Muslihat, Kel. Pabaton, Kec. Bogor Tengah, Kota Bogor	1 Tahun	2 Januari 2019	1 Januari 2020	Usaha	Sebagian Tanah	593/493-BPKAD	6 Februari 2019	Dinas Perumahan dan Permukiman	Taman Topi
23	Cucun	20	m2	Taman Ade Irma Taman Topi, Jl. Kapten Muslihat, Kel. Pabaton, Kec. Bogor Tengah, Kota Bogor	1 Tahun	2 Januari 2019	1 Januari 2020	Usaha	Sebagian Tanah	593/492-BPKAD	6 Februari 2019	Dinas Perumahan dan Permukiman	Taman Topi
24	David Maulana	8	m2	Taman Ade Irma Taman Topi, Jl. Kapten Muslihat, Kel. Pabaton, Kec. Bogor Tengah, Kota Bogor	1 Tahun	2 Januari 2019	1 Januari 2020	Usaha	Sebagian Tanah	593/494-BPKAD	6 Februari 2019	Dinas Perumahan dan Permukiman	Taman Topi
25	Eti Suryati	8	m2	Taman Ade Irma Taman Topi, Jl. Kapten Muslihat, Kel. Pabaton, Kec. Bogor Tengah, Kota Bogor	1 Tahun	2 Januari 2019	1 Januari 2020	Usaha	Sebagian Tanah	593/495-BPKAD	6 Februari 2019	Dinas Perumahan dan Permukiman	Taman Topi
26	Hartikah	8	m2	Taman Ade Irma Taman Topi, Jl. Kapten Muslihat, Kel. Pabaton, Kec. Bogor Tengah, Kota Bogor	1 Tahun	2 Januari 2019	1 Januari 2020	Usaha	Sebagian Tanah	593/513-BPKAD	7 Februari 2019	Dinas Perumahan dan Permukiman	Taman Topi
27	Herlina	8	m2	Taman Ade Irma Taman Topi, Jl. Kapten Muslihat, Kel. Pabaton, Kec. Bogor Tengah, Kota Bogor	1 Tahun	2 Januari 2019	1 Januari 2020	Usaha	Sebagian Tanah	593/496-BPKAD	6 Februari 2019	Dinas Perumahan dan Permukiman	Taman Topi
28	Kartini	8	m2	Taman Ade Irma Taman Topi, Jl. Kapten Muslihat, Kel. Pabaton, Kec. Bogor Tengah, Kota Bogor	1 Tahun	2 Januari 2019	1 Januari 2020	Usaha	Sebagian Tanah	593/511-BPKAD	7 Februari 2019	Dinas Perumahan dan Permukiman	Taman Topi
29	Mariyah	8	m2	Taman Ade Irma Taman Topi, Jl. Kapten Muslihat, Kel. Pabaton, Kec. Bogor Tengah, Kota Bogor	1 Tahun	2 Januari 2019	1 Januari 2020	Usaha	Sebagian Tanah	593/514-BPKAD	7 Februari 2019	Dinas Perumahan dan Permukiman	Taman Topi
30	Mariyah - 2	8	m2	Taman Ade Irma Taman Topi, Jl. Kapten Muslihat, Kel. Pabaton, Kec. Bogor Tengah, Kota Bogor	1 Tahun	2 Januari 2019	1 Januari 2020	Usaha	Sebagian Tanah	593/515-BPKAD	7 Februari 2019	Dinas Perumahan dan Permukiman	Taman Topi
31	Nyai Suryati	20	m2	Taman Ade Irma Taman Topi, Jl. Kapten Muslihat, Kel. Pabaton, Kec. Bogor Tengah, Kota Bogor	1 Tahun	2 Januari 2019	1 Januari 2020	Usaha	Sebagian Tanah	593/490-BPKAD	6 Februari 2019	Dinas Perumahan dan Permukiman	Taman Topi
32	Rita Widhihartati	8	m2	Taman Ade Irma Taman Topi, Jl. Kapten Muslihat, Kel. Pabaton, Kec. Bogor Tengah, Kota Bogor	1 Tahun	2 Januari 2019	1 Januari 2020	Usaha	Sebagian Tanah	593/512-BPKAD	7 Februari 2019	Dinas Perumahan dan Permukiman	Taman Topi
33	Sartono	8	m2	Taman Ade Irma Taman Topi, Jl. Kapten Muslihat, Kel. Pabaton, Kec. Bogor Tengah, Kota Bogor	1 Tahun	2 Januari 2019	1 Januari 2020	Usaha	Sebagian Tanah	593/498-BPKAD	6 Februari 2019	Dinas Perumahan dan Permukiman	Taman Topi
34	Siti Nurahmania - 2	100	m2	Taman Ade Irma Taman Topi, Jl. Kapten Muslihat, Kel. Pabaton, Kec. Bogor Tengah, Kota Bogor	1 Tahun	2 Januari 2019	1 Januari 2020	Usaha	Sebagian Tanah	593/540-BPKAD	8 Februari 2019	Dinas Perumahan dan Permukiman	Taman Topi
35	Sri Gesnawati	8	m2	Taman Ade Irma Taman Topi, Jl. Kapten Muslihat, Kel. Pabaton, Kec. Bogor Tengah, Kota Bogor	1 Tahun	2 Januari 2019	1 Januari 2020	Usaha	Sebagian Tanah	593/497-BPKAD	6 Februari 2019	Dinas Perumahan dan Permukiman	Taman Topi
36	Sudarji	40	m2	Taman Ade Irma Taman Topi, Jl. Kapten Muslihat, Kel. Pabaton, Kec. Bogor Tengah, Kota Bogor	1 Tahun	2 Januari 2019	1 Januari 2020	Usaha	Sebagian Tanah	593/491-BPKAD	6 Februari 2019	Dinas Perumahan dan Permukiman	Taman Topi
37	Sudarya	3	m2	Taman Ade Irma Taman Topi, Jl. Kapten Muslihat, Kel. Pabaton, Kec. Bogor Tengah, Kota Bogor	1 Tahun	2 Januari 2019	1 Januari 2020	Usaha	Sebagian Tanah	593/532-BPKAD	8 Februari 2019	Dinas Perumahan dan Permukiman	Taman Topi
38	Suroso	3	m2	Taman Ade Irma Taman Topi, Jl. Kapten Muslihat, Kel. Pabaton, Kec. Bogor Tengah, Kota Bogor	1 Tahun	2 Januari 2019	1 Januari 2020	Usaha	Sebagian Tanah	593/532-BPKAD	8 Februari 2019	Dinas Perumahan dan Permukiman	Taman Topi
39	Wahyu Subehi	3	m2	Taman Ade Irma Taman Topi, Jl. Kapten Muslihat, Kel. Pabaton, Kec. Bogor Tengah, Kota Bogor	1 Tahun	2 Januari 2019	1 Januari 2020	Usaha	Sebagian Tanah	593/534-BPKAD	8 Februari 2019	Dinas Perumahan dan Permukiman	Taman Topi

PEMERINTAH KOTA BOGOR
Tabel Mutasi Barang Milik Daerah - Peralatan dan Mesin
Per 31 Desember 2025

Lampiran 10

No.	OPD	Gedung Berang	SALDO AWAL (31 Desember 2024)	PENAMBAHAN ASET TETAP ATAS BELANJA 2025										PENAMBAHAN ASET TETAP ATAS TAHUN BERJALAN										PENGURANGAN ASET TETAP ATAS TAHUN BERJALAN										Jumlah Mutasi Ruang	SALDO AKHIR (31 Desember 2025)		
				REALISASI BELANJA MODAL (+)		BELANJA MODAL YANG DIMUTASI ANTAR KIB (+)	BELANJA BARANG DAN JASA (+)	BELANJA MODAL YANG DIMUTASI DARI P0 LAIN (+)	HIRAH TAHUN BERJALAN YANG DIMUTASI DARI P0 LAIN (+)	KEMULAIAN PINJAK KETIGA YANG ASITWA DARI TAHUN BERJALAN (+)	MUTASI DARI P0 LAIN TAHUN BERJALAN (+)	BELAKS ANTAR KIB TAHUN BERJALAN (+)	BELAKS DARIKES BANG BERTAHUN BERJALAN (+)	BELAKS KE ASET LAIN TAHUN BERJALAN (+)	HIRAH TAHUN BERJALAN YANG DIMUTASI DARI P0 LAIN (+)	ASET YANG BELUN TERCATAT (+)	BELANJA MODAL YANG DIMUTASI KE P0 LAIN (+)	BELANJA MODAL YANG DIMUTASI KE EXTRACOMPATIBLE (+)	BELANJA MODAL YANG DIMUTASI KE ASET J (+)	KEMULAIAN PINJAK KETIGA YANG ASITWA DARI TAHUN BERJALAN (+)	MUTASI KE P0 LAIN TAHUN BERJALAN (+)	+ KAPIT - Tambahan (+)	BELAKS ANTAR KIB TAHUN BERJALAN (+)	BELAKS DARIKES BANG BERTAHUN BERJALAN (+)	BELAKS KE ASET LAIN TAHUN BERJALAN (+)	ASET YANG DIMASUKKAN CATAT (+)	BELAKS KONDISI TAHUN BERJALAN (+)										
				ASET TETAP	ASET TETAP	ASET TETAP	ASET TETAP	ASET TETAP	ASET TETAP	ASET TETAP	ASET TETAP	ASET TETAP	ASET TETAP	ASET TETAP	ASET TETAP	ASET TETAP	ASET TETAP	ASET TETAP	ASET TETAP	ASET TETAP	ASET TETAP	ASET TETAP	ASET TETAP	ASET TETAP	ASET TETAP	ASET TETAP	ASET TETAP	ASET TETAP									
1	Dinas Pendidikan	Peralatan dan Mesin	176.929.378.201,09	31.037.899.553,00	-	-	-	-	807.365.693,09	260.234.425,59	-	10.000.000,00	-	-	-	31.675.490.628,59	-	3.400.000,00	12.301.198.325,00	370.394.459,00	-	-	-	-	-	286.790.000,00	5.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	11.218.367.91,50	195.387.801.434,18
2	Dinas Kesehatan	Peralatan dan Mesin	409.498.335.726,25	24.831.232.071,20	-	20.116.880,00	32.469.583,00	-	1.590.735.032,00	381.167.999,00	-	-	-	196.081.169,00	-	27.521.573.283,14	1.757.000,00	3.176.880,00	121.683.113,00	1.709.377.507,00	-	-	-	-	-	98.460.000,00	40.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	10.609.638.190,40	436.638.720.043,99
3	Rumah Sakit Umum Daerah (RSU)	Peralatan dan Mesin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peralatan dan Mesin	59.737.136.034,01	2.853.228.450,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Dinas Perumahan dan Pemukiman	Peralatan dan Mesin	27.719.365.292,00	2.141.314.499,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Satuan Polisi Pemang Praja	Peralatan dan Mesin	8.811.857.261,59	150.750.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Peralatan dan Mesin	11.680.073.750,00	159.840.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Badan Kestasiun Rangka dan Petak	Peralatan dan Mesin	2.815.475.772,00	285.415.191,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	Dinas Sosial	Peralatan dan Mesin	4.796.652.467,40	1.433.667.111,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	Dinas Tenaga Kerja	Peralatan dan Mesin	6.237.872.274,68	83.760.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	Dinas Lingkungan Hidup	Peralatan dan Mesin	97.326.296.125,34	10.073.776.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Tapan	Peralatan dan Mesin	16.270.972.630,38	1.434.392.494,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perompangan dan Perlindungan Anak	Peralatan dan Mesin	4.127.435.471,04	235.051.336,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	Dinas Pengendalian Pertukuk dan Kelangka Berencana	Peralatan dan Mesin	4.538.803.139,68	70.620.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	Dinas Perhubungan	Peralatan dan Mesin	51.349.526.123,21	416.102.370,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	Peralatan dan Mesin	34.167.819.139,74	2.462.080.947,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	Dinas Koperasi, Saku Kaci, Bersekap, Perlindungan dan Perlindungan	Peralatan dan Mesin	14.606.456.616,11	1.860.853.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	Dinas Perencanaan, Infrak dan Pelaksana Terpadu, Saku W - Tapanak	Peralatan dan Mesin	9.385.276.887,14	3.441.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	Dinas Pemadam dan Obangk	Peralatan dan Mesin	4.819.194.896,78	1.496.956.228,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	Dinas Perumahan dan Kerkabuan	Peralatan dan Mesin	6.504.600.859,98	130.940.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	Dinas Anjak dan Perputakaan	Peralatan dan Mesin	9.607.991.649,55	291.221.300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Peralatan dan Mesin	14.626.017.829,11	285.728.750,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	Sekretariat Daerah	Peralatan dan Mesin	60.178.262.571,00	8.416.993.787,00	55.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Peralatan dan Mesin	42.864.401.636,44	5.781.784.886,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26	Kecamatan Beger Galatan	Peralatan dan Mesin	10.730.879.472,11	1.060.819.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27	Kecamatan Beger Tapan	Peralatan dan Mesin	7.520.970.236,00	865.148.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
28	Kecamatan Beger Tapan	Peralatan dan Mesin	8.378.966.173,81	1.268.528.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
29	Kecamatan Beger Beger	Peralatan dan Mesin	9.555.498.774,74	5.807.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	Kecamatan Beger Uluak	Peralatan dan Mesin	9.026.160.481,30	680.882.280,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31	Kecamatan Tapan Senuk	Peralatan dan Mesin	8.938.498.439,03	340.943.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
32	Impekorat	Peralatan dan Mesin	5.761.051.760,52	717.460.300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
33	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Peralatan dan Mesin	6.404.119.867,74	1.232.271.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
34	Badan Kerkangan dan Aset Daerah	Peralatan dan Mesin	10.888.301.884,08	1.245.562.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
35	Badan Perencanaan Daerah	Peralatan dan Mesin	18.621.428.915,48	3.000.910.027,00	3.158.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
36	Badan Kerkangan dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur	Peralatan dan Mesin	5.870.744.648,00	1.033.171.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
37	PPSD	Peralatan dan Mesin	5.562.594.305,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
38	Dinas Pemadam Kerkangan dan Penyelamatan	Peralatan dan Mesin	19.681.02.071,34	2.115.826.002,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL			1.256.136.708.584,99	110.087.042.014,00	92.794.035,00	538.740.973,00	1.757.000,00	1.987.200.026,00	381.167.999,00	6.524.205.654,45	15.584.198.229,54	471.201.393,00	227.025.643,51	1.822.531.161,00	742.270.833,07	138.440.334.961,07	1.757.000,00	63.324.880,00	12.948.530.585,00	603.902.931,00	1.709.377.507,00	6.524.205.654,45	50.000.000,00	15.385.175.354,54	26.193.087.498,98	95.291.318,54	1.376.998.522,00	2.363.993.563,31	67.275.645.450,42	1.327.305.388.116,04							

PEMERINTAH KOTA BOGOR
Tabel Mutasi Barang Milik Daerah - Gedung dan Bangunan
Per 31 Desember 2025

Lampiran 11

No.	OPD	Golongan Barang	SALDO AWAL (31 Desember 2024)	PENAMBAHAN ASET TETAP ATAS BELANJA 2025		PENAMBAHAN ASET TETAP ATAS TAHUN BERJALAN						JUMLAH MUTASI TAMBAH	PENGURANGAN ASET TETAP ATAS BELANJA 2025		PENGURANGAN ASET TETAP ATAS TAHUN BERJALAN					JUMLAH MUTASI KURANG	SALDO AKHIR (31 Desember 2025)
				REALISASI BELANJA MODAL (+)	HIBAH TAHUN PEROLEHAN BERJALAN (+)	MUTASI DARI PD LAIN TAHUN BERJALAN (+)	REKLAS ANTAR KIB TAHUN BERJALAN (+)	REKLAS DARI/KE RUSAK BERAT TAHUN BERJALAN (+)	REKLAS KE ASET LAIN-LAIN TAHUN BERJALAN (+)	HIBAH TAHUN PEROLEHAN SEBELUM 2025 (+)	BELANJA MODAL YANG DIREKLAS ANTAR KIB (-)		BELANJA MODAL TIDAK JADI ASET (-)	MUTASI KE PD LAIN TAHUN BERJALAN (-)	REKLAS ANTAR KIB TAHUN BERJALAN (-)	REKLAS DARI/KE RUSAK BERAT TAHUN BERJALAN (-)	ASET YANG DIHAPUS/DIOUBL E CATAT (-)				
				ASET TETAP	ASET TETAP	ASET TETAP	ASET TETAP	ASET TETAP	ASET TETAP	ASET TETAP	ASET TETAP		ASET TETAP	ASET TETAP	ASET TETAP	ASET TETAP	ASET TETAP				
1	Dinas Pendidikan	Gedung Bangunan	548.176.766.184,71	61.261.021.171,00	-	-	1.279.178.500,00	-	646.829.531,00	1.602.756.964,00	64.789.786.166,00	-	-	-	1.137.035.048,48	-	-	-	1.137.035.048,48	611.829.517.302,23	
2	Dinas Kesehatan	Gedung Bangunan	376.217.655.291,05	7.012.157.642,00	-	1.633.115.532,00	17.496.047.001,00	-	-	-	26.141.320.175,00	26.000.000,00	26.780.593,00	815.202.132,00	17.496.047.001,00	-	-	-	18.364.029.726,00	383.994.945.740,05	
3	Rumah Sakit Umum Daerah (PD)	Gedung Bangunan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD)	Gedung Bangunan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Gedung Bangunan	138.874.488.105,36	97.868.700,00	-	-	-	-	-	-	97.868.700,00	97.868.700,00	-	-	1.626.886.600,00	-	-	-	1.724.755.300,00	137.247.601.505,36	
6	Dinas Perumahan dan Permukiman	Gedung Bangunan	130.931.504.207,53	5.596.720.514,00	-	-	-	-	-	-	5.596.720.514,00	97.460.775,00	-	-	-	-	-	-	97.460.775,00	136.430.763.946,53	
7	Satuan Polisi Pamong Praja	Gedung Bangunan	627.837.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	627.837.000,00	
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Gedung Bangunan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Gedung Bangunan	586.395.728,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	586.395.728,00	
10	Dinas Sosial	Gedung Bangunan	2.751.779.603,00	-	-	190.944.000,00	-	-	-	-	190.944.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2.942.723.603,00	
11	Dinas Tenaga Kerja	Gedung Bangunan	2.482.647.776,00	-	-	642.800.562,00	-	-	-	-	642.800.562,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3.125.448.338,00	
12	Dinas Lingkungan Hidup	Gedung Bangunan	17.614.881.214,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	510.557.631,66	-	510.557.631,66	17.104.323.583,16	
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan SIPI - Tanah	Gedung Bangunan	3.275.605.198,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.275.605.198,00	
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	Gedung Bangunan	4.187.818.650,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.187.818.650,00	
15	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Gedung Bangunan	743.627.150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	743.627.150,00	
16	Dinas Perhubungan	Gedung Bangunan	179.944.380.473,49	11.940.469.237,00	-	-	-	-	-	-	11.940.469.237,00	-	104.384.409,00	-	-	-	-	-	104.384.409,00	191.780.465.301,49	
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	Gedung Bangunan	-	-	-	4.208.754.401,00	-	-	-	-	4.208.754.401,00	-	-	-	-	-	-	-	-	4.208.754.401,00	
18	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	Gedung Bangunan	14.806.067.972,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.806.067.972,26	
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PI - Tanah	Gedung Bangunan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	Dinas Pemuda dan Olahraga	Gedung Bangunan	67.514.025.680,00	23.508.383.880,00	-	-	-	-	-	-	23.508.383.880,00	-	109.500.301,00	-	-	-	-	-	109.500.301,00	90.912.909.259,00	
21	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Gedung Bangunan	24.245.939.416,65	280.665.720,00	-	4.929.877.167,00	-	-	-	-	5.210.542.887,00	-	-	-	-	-	-	-	-	29.456.482.303,65	
22	Dinas Arsip dan Perpustakaan	Gedung Bangunan	32.120.788.874,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.120.788.874,50	
23	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Gedung Bangunan	29.152.705.169,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.477.654.169,00	
24	Sekretariat Daerah	Gedung Bangunan	32.899.231.094,00	-	-	-	-	-	-	-	3.030.724.421,00	-	-	-	675.051.000,00	-	-	-	675.051.000,00	33.574.982.515,00	
25	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Gedung Bangunan	79.623.826.839,00	-	-	-	-	-	-	-	3.030.724.421,00	-	-	-	9.138.631.568,00	3.030.724.421,00	-	-	12.169.355.989,00	91.763.658.339,00	
26	Kecamatan Bogor Selatan	Gedung Bangunan	24.153.371.769,00	342.508.488,00	-	-	-	-	-	-	342.508.488,00	-	1.891.902,00	-	-	-	-	-	1.891.902,00	24.495.880.257,00	
27	Kecamatan Bogor Timur	Gedung Bangunan	17.903.142.313,00	-	-	296.386.368,00	296.386.368,00	-	-	-	592.772.736,00	-	-	-	353.739.520,00	296.386.368,00	-	-	650.125.888,00	17.845.789.161,00	
28	Kecamatan Bogor Tengah	Gedung Bangunan	17.946.216.153,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	816.605.775,00	17.129.610.378,00	19.762.816.928,00	
29	Kecamatan Bogor Barat	Gedung Bangunan	27.478.193.378,34	197.780.067,00	-	-	-	-	-	-	197.780.067,00	-	4.639.804,00	-	-	-	-	-	4.639.804,00	27.675.983.441,34	
30	Kecamatan Bogor Utara	Gedung Bangunan	19.896.174.663,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.896.174.663,41	
31	Kecamatan Tanah Sereal	Gedung Bangunan	22.272.721.416,00	2.033.512.780,00	-	-	-	-	-	-	2.033.512.780,00	-	8.478.089,00	-	1.053.850.724,00	-	-	-	1.062.328.813,00	23.243.905.383,00	
32	Inspektorat	Gedung Bangunan	3.230.367.376,00	180.174.179,00	-	-	3.157.842.378,00	-	-	-	3.338.016.557,00	5.069.155,00	-	-	-	3.157.842.378,00	-	-	3.162.911.533,00	3.405.472.400,00	
33	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Gedung Bangunan	4.029.369.300,00	-	-	-	14.932.500,00	-	-	-	14.932.500,00	-	-	-	-	14.932.500,00	-	-	4.029.369.300,00	4.044.301.800,00	
34	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Gedung Bangunan	19.035.236.780,00	2.013.108.202,00	-	-	-	-	-	-	2.013.108.202,00	-	-	-	622.845.788,00	-	-	-	622.845.788,00	20.423.499.194,00	
35	Badan Pendapatan Daerah	Gedung Bangunan	29.337.506.643,00	-	-	622.845.788,00	-	-	-	94.316.000,00	717.161.788,00	-	-	-	-	-	55.637.785,00	-	55.637.785,00	29.999.030.646,00	
36	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur	Gedung Bangunan	1.339.818.912,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.339.818.912,00	
37	PPKD	Gedung Bangunan	9.879.018.853,00	-	457.435.248,00	2.105.376.524,48	245.290.476,00	513.000.000,00	-	-	3.321.102.248,48	-	-	-	833.744.562,00	245.290.476,00	-	-	1.079.035.038,00	12.121.086.063,48	
38	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Gedung Bangunan	4.921.458.748,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	201.222.875,00	-	-	201.222.875,00	4.720.235.873,00	
Total		Gedung Bangunan	1.888.200.567.932,12	114.464.370.580,00	457.435.248,00	14.630.100.342,48	25.520.401.644,00	513.000.000,00	741.145.531,00	1.602.756.964,00	157.929.210.309,48	226.398.630,00	255.675.098,00	14.630.100.342,48	26.069.332.619,00	566.195.416,66	816.605.775,00	42.564.307.881,14	2.003.565.470.360,46		

PEMERINTAH KOTA BOGOR

Lampiran 12

Tabel Mutasi Barang Milik Daerah - Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Per 31 Desember 2025

No.	OPD	Golongan Barang	SALDO AWAL (31 Desember 2024)	PENAMBAHAN ASET TETAP ATAS BELANJA 2025	PENAMBAHAN ASET TETAP ATAS TAHUN BERJALAN		JUMLAH MUTASI TAMBAH	PENGURANGAN ASET TETAP ATAS BELANJA 2025		PENGURANGAN ASET TETAP ATAS TAHUN BERJALAN			JUMLAH MUTASI KURANG	SALDO AKHIR (31 Desember 2025)
				REALISASI BELANJA	MUTASI	REKLAS ANTAR		BELANJA	BELANJA	MUTASI KE	REKLAS ANTAR	REKLAS		
			ASET TETAP	ASET TETAP	ASET TETAP	ASET TETAP	ASET TETAP			ASET TETAP	ASET TETAP	ASET TETAP	ASET TETAP	ASET TETAP
1	Dinas Pendidikan	Jalan, Irigasi dan Jaringan	4.039.355.021,30	2.437.074.619,00	-	-	2.437.074.619,00	-	23.031.394,00	2.446.000,00	-	-	25.477.394,00	6.450.952.246,30
2	Dinas Kesehatan	Jalan, Irigasi dan Jaringan	9.095.424.150,00	200.000.000,00	-	-	200.000.000,00	-	-	-	-	-	-	9.295.424.150,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah (PD)	Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD)	Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.562.315.104.520,49	104.712.746.186,00	-	55.023.018.297,01	159.735.764.483,01	894.465.750,00	875.858.551,00	-	55.230.655.787,01	-	57.000.980.088,01	2.665.049.888.915,49
6	Dinas Perumahan dan Permukiman	Jalan, Irigasi dan Jaringan	752.325.011.061,18	1.942.937.758,00	-	55.770.000,00	1.998.707.758,00	-	-	-	-	-	-	754.323.718.819,18
7	Satuan Polisi Pamong Praja	Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.527.500,00	194.346.489,00	-	-	194.346.489,00	-	-	-	-	-	-	199.873.989,00
9	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Dinas Sosial	Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Dinas Tenaga Kerja	Jalan, Irigasi dan Jaringan	44.300.313,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.300.313,00
12	Dinas Lingkungan Hidup	Jalan, Irigasi dan Jaringan	15.283.473.880,68	870.947.798,00	-	-	870.947.798,00	-	-	-	-	241.365.205,26	241.365.205,26	15.913.056.473,42
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Tanah	Jalan, Irigasi dan Jaringan	33.830.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.830.000,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Dinas Perhubungan	Jalan, Irigasi dan Jaringan	24.794.536.206,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.794.536.206,22
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jalan, Irigasi dan Jaringan	10.983.782,00	1.553.449.072,00	-	-	1.553.449.072,00	-	-	-	-	-	-	1.564.432.854,00
18	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	Jalan, Irigasi dan Jaringan	34.549.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.549.400,00
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PI - Tanah	Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Dinas Pemuda dan Olahraga	Jalan, Irigasi dan Jaringan	678.042.823,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	678.042.823,00
21	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Jalan, Irigasi dan Jaringan	221.632.237,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	221.632.237,67
22	Dinas Arsip dan Perpustakaan	Jalan, Irigasi dan Jaringan	62.331.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62.331.600,00
23	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Jalan, Irigasi dan Jaringan	4.508.076.473,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.508.076.473,00
24	Sekretariat Daerah	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.386.167.315,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.386.167.315,00
25	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Jalan, Irigasi dan Jaringan	34.903.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.903.000,00
26	Kecamatan Bogor Selatan	Jalan, Irigasi dan Jaringan	27.056.312.232,00	843.105.319,00	-	-	843.105.319,00	-	-	-	-	-	-	27.899.417.551,00
27	Kecamatan Bogor Timur	Jalan, Irigasi dan Jaringan	8.192.925.824,00	557.995.208,00	-	-	557.995.208,00	-	-	-	-	-	-	8.750.921.032,00
28	Kecamatan Bogor Tengah	Jalan, Irigasi dan Jaringan	12.643.649.029,00	189.610.422,00	-	-	189.610.422,00	-	-	-	-	-	-	12.833.259.451,00
29	Kecamatan Bogor Barat	Jalan, Irigasi dan Jaringan	24.746.311.471,00	1.619.419.860,00	-	-	1.619.419.860,00	-	-	-	-	-	-	26.365.731.331,00
30	Kecamatan Bogor Utara	Jalan, Irigasi dan Jaringan	12.287.118.894,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.287.118.894,00
31	Kecamatan Tanah Sereal	Jalan, Irigasi dan Jaringan	16.911.758.844,00	2.355.221.890,00	-	-	2.355.221.890,00	-	-	-	-	-	-	19.266.980.734,00
32	Inspektorat	Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Badan Pendapatan Daerah	Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur	Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	PPKD	Jalan, Irigasi dan Jaringan	111.702.621.909,39	-	2.446.000,00	-	2.446.000,00	-	-	-	-	-	-	111.705.067.909,39
38	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Jalan, Irigasi dan Jaringan	50.710.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.710.000,00
39	Total	Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.588.464.657.486,93	117.476.854.621,00	2.446.000,00	55.078.788.297,01	172.558.088.918,01	894.465.750,00	898.889.945,00	2.446.000,00	55.230.655.787,01	241.365.205,26	57.267.822.687,27	3.703.754.923.717,67

PEMERINTAH KOTA BOGOR
Tabel Mutasi Barang Milik Daerah - Aset Tetap Lainnya
Per 31 Desember 2025

Lampiran 13

No.	OPD	Golongan Barang	SALDO AWAL (31 Desember 2024)	PENAMBAHAN ASET TETAP ATAS BELANJA 2025					PENAMBAHAN ASET TETAP ATAS TAHUN BERJALAN		JUMLAH MUTASI TAMBAH	PENGURANGAN ASET TETAP ATAS BELANJA 2025		PENGURANGAN ASET TETAP ATAS TAHUN BERJALAN		JUMLAH MUTASI KURANG	SALDO AKHIR (31 Desember 2025)
				REALISASI BELANJA MODAL (+)	BELANJA MODAL YANG DIREKLAS ANTAR KIB (+)	BOP (+)	BELANJA MODAL YANG DIMUTASI DARI PD LAIN (+)	HIBAH TAHUN PEROLEHAN BERJALAN (+)	MUTASI DARI PD LAIN TAHUN BERJALAN (+)	HIBAH TAHUN PEROLEHAN SEBELUM 2025 (+)		BELANJA MODAL YANG DIMUTASI KE PD LAIN (-)	BELANJA MODAL YANG DIREKLAS KE EXTRACOMPTABLE (-)	MUTASI KE PD LAIN TAHUN BERJALAN (-)	ASET YANG DIHAPUS/DOUBLE CATAT (-)		
				ASET TETAP	ASET TETAP	ASET TETAP	ASET TETAP	ASET TETAP	ASET TETAP	ASET TETAP		ASET TETAP		ASET TETAP	ASET TETAP	ASET TETAP	ASET TETAP
1	Dinas Pendidikan	Aset Tetap Lainnya	9.972.481.095,72	12.368.800.440,00	3.600.000,00	-	24.665.300,00	-	50.000,00	-	12.397.115.740,00	-	8.775.131.172,00	-	240.774.129,00	9.015.905.301,00	13.353.691.534,72
2	Dinas Kesehatan	Aset Tetap Lainnya	4.171.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.171.500,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah (PD)	Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD)	Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Dinas Perumahan dan Permukiman	Aset Tetap Lainnya	197.880.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	197.880.000,00
7	Satuan Polisi Pamong Praja	Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Dinas Sosial	Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Dinas Tenaga Kerja	Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Dinas Lingkungan Hidup	Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Tanah	Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Dinas Perhubungan	Aset Tetap Lainnya	147.232.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	147.232.500,00
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PI - Tanah	Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Dinas Pemuda dan Olahraga	Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Aset Tetap Lainnya	145.075.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	145.075.000,00
22	Dinas Arsip dan Perpustakaan	Aset Tetap Lainnya	2.784.439.788,85	242.004.402,00	-	122.382.650,00	-	35.529.381,00	1.268.740.000,00	182.419,00	1.668.838.852,00	24.665.300,00	-	50.000,00	-	24.715.300,00	4.428.563.340,85
23	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Aset Tetap Lainnya	31.305.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.305.000,00
24	Sekretariat Daerah	Aset Tetap Lainnya	196.597.440,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	196.597.440,00
25	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Aset Tetap Lainnya	241.694.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	241.694.600,00
26	Kecamatan Bogor Selatan	Aset Tetap Lainnya	17.733.640,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.733.640,72
27	Kecamatan Bogor Timur	Aset Tetap Lainnya	3.456.123,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.456.123,19
28	Kecamatan Bogor Tengah	Aset Tetap Lainnya	4.947.415,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.947.415,02
29	Kecamatan Bogor Barat	Aset Tetap Lainnya	15.536.863,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.536.863,75
30	Kecamatan Bogor Utara	Aset Tetap Lainnya	8.198.787,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.198.787,98
31	Kecamatan Tanah Sereal	Aset Tetap Lainnya	5.280.629,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.280.629,76
32	Inspektorat	Aset Tetap Lainnya	44.050.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.050.000,00
33	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Badan Pendapatan Daerah	Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur	Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	PPKD	Aset Tetap Lainnya	1.268.740.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.268.740.000,00	-	1.268.740.000,00	-
38	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Total	Aset Tetap Lainnya	15.088.820.384,99	12.610.804.842,00	3.600.000,00	122.382.650,00	24.665.300,00	35.529.381,00	1.268.790.000,00	182.419,00	14.065.954.592,00	24.665.300,00	8.775.131.172,00	1.268.790.000,00	240.774.129,00	10.309.360.601,00	18.845.414.375,99

PEMERINTAH KOTA BOGOR
Tabel Konstruksi Dalam Pengerjaan
Per 31 Desember 2025

Lampiran 14

No.	Perangkat Daerah	Nama /Jenis Barang	Letak/Lokasi Alamat	Dokumen		Tanggal, Bulan, Tahun Mulai	Asal Usul Pembiayaan	Luas (m²)	Nilai Kontrak (Rp.)
				Tanggal	Nomor				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	DINAS KESEHATAN	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Gang Aut	2022-12-05	-	2020	APBD		58.915.000,00
2	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (SKPD)	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Dr. Sumere No 120	2017-06-22	25/SP/DED.RSUD/V1/2017	2017	APBD		821.164.960,00
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (SKPD)	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Dr. Sumere No 120	2017-06-22	25/SP/DED.RSUD/V1/2017	2017	APBD		821.164.960,00
4	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (BLUD)	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Jl. Dr. Semere No.120	2017-10-20	244.4/SPK.KONSUL-PERC/PPK/VIII/2017	2018	APBD		44.556.000,00
5	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Dalam Pengerjaan	Perencanaan Kampung Sawah	21/05/21	602/SPK/DED-KP.SAWAH R3/PPK/APBD/2021	2021	APBD		356.895.200,00
6	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jalan Irigasi dan jaringan Dalam Pengerjaan	Pembesahan Inner Ring Road (Muarasari-Wangun) Kel Muarasari -	12/05/26	-	2010	APBD		84.732.300,00
7	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Konsultansi Perencanaan Pembangunan Jembatan Pakel 1	2024-06-06	640.6/02-SP/DED-Katulampa/DPU/PR/VI/2024	2024	APBD		1.626.886.600,00
8	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jalan Irigasi dan jaringan Dalam Pengerjaan	Perencanaan Pembangunan Tadah DAS Ciasudne di RW. 15 Kelurahan Cipika Kecamatan Bogor Selatan	2017-01-01	-	2017	APBD		26.510.000,00
9	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jalan Irigasi dan jaringan Dalam Pengerjaan	Pembangunan Jalan Inner Ring Road	2026-05-12	-	2014	APBD		478.964.600,00
10	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Dalam Pengerjaan	Perencanaan Pembesahan Lahan R2 Cibuluh	2022-11-04	602/SPK/DPPFT R2 Cibuluh/PPK/APBD/2022	2022	APBD		73.926.000,00
11	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Konsultansi Perencanaan Pembangunan Jembatan Pakel 3	2024-06-06	610/SPK/Pemb.kembatanPaket1/V/2024	2024	APBD		94.544.250,00
12	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Dalam Pengerjaan	Perencanaan Pembesahan Lahan R2 Tanah Baru	2022-11-04	602/SPK/DPPFT R2 Tanah Baru/PPK/APBD/2022	2022	APBD		98.235.000,00
13	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jalan Irigasi dan jaringan Dalam Pengerjaan	perencanaan Pembangunan septic tank individu di Kota Bogor	2017-01-01	610/02-SPK/AIR-STS/III/2017	2017	APBD		49.450.000,00
14	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jalan Irigasi dan jaringan Dalam Pengerjaan	Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup IPAL dan IPLT IPAL dan IPLT Tegal Ganduli	2017-01-01	621/SPK-02/IPAL & IPLT/IX/2017	2017	APBD		279.158.000,00
15	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jalan Irigasi dan jaringan Dalam Pengerjaan	DED Perencanaan Perkantoran Terpadu Katulampa	2024-05-17	SPK.610/SPK/Pemb.JembatanPaket3/V/2024	2024	APBD		92.878.250,00
16	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jalan Irigasi dan jaringan Dalam Pengerjaan	Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi Jembatan Paket 4	2023-11-17	610/SPK/JembatanPaket4/ABT/XI/2023	2023	APBD		97.513.500,00
17	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Dalam Pengerjaan	Dokumen Perencanaan Pengaduan Lahan Jalan Babadak	2022-11-04	602/SPK/DPPFT Jalan Babadak/PPK/APBD	2022	APBD		98.124.000,00
18	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Dalam Pengerjaan	DPPFT Underpass Kebon Pedes (jalan kebun pedes)	2025-10-07	602.1/SPK/DPPFT-KB.PDS/PPK/DPU/PR/2025	2025	APBD		98.770.020,00
19	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jalan Irigasi dan jaringan Dalam Pengerjaan				2023	APBD		97.680.000,00
20	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jalan Irigasi dan jaringan Dalam Pengerjaan	Perencanaan Pembangunan Tadah di RW.04 Babakan Pasar Kec. Bogor Tengah	2017-01-01	-	2017	APBD		17.380.000,00
21	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jalan Irigasi dan jaringan Dalam Pengerjaan	Penyusunan Laporan Monev IPAL dan IPLT IPAL dan IPLT Tegal Ganduli	2017-01-01	621/SPK-02/IPAL & IPLT/IX/2017	2017	APBD		48.922.500,00
22	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jalan Irigasi dan jaringan Dalam Pengerjaan				2024	APBD		95.238.000,00
23	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jalan Irigasi dan jaringan Dalam Pengerjaan	DED Simpang Semplak Tidak Sebidang Jalan Abdullah Bin Nuh	2023-09-01	602.1/SP/SP.TS_ABD.BIN.NUH/PPK/DPU/PR/2023	2023	APBD		474.853.560,00
24	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jalan Irigasi dan jaringan Dalam Pengerjaan	DED Peningkatan Trottoir Jalan Pahlawan & Jalan R. Shaleh Syarif Bustaman Kota Bogor	2020-04-29	602/SPK/PRCBM_PKT.03/PPK/APBD/2020	2020	APBD		91.222.121,00
25	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jalan Irigasi dan jaringan Dalam Pengerjaan	DED Peningkatan Trottoir Jalan Raya Pajajaran (Elakokasari s.d. Terminal Barmungstang) Kota Bogor	2020-04-29	602/SPK/PRCBM_PKT.02/PPK/APBD/2020	2020	APBD		91.332.727,00
26	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jalan Irigasi dan jaringan Dalam Pengerjaan	DED Simpang Tidak Sebidang Warung Jambu KS. Tuban Abaswijaya	2022-01-01	-	2022	APBD		466.680.500,00
27	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jalan Irigasi dan jaringan Dalam Pengerjaan	DED Jalan R3 Katulampa Tajur	2022-06-22	602/SP/DED JALAN R3 KATULAMPA-TAJUR/PPK/APBD/2022	2022	APBD		283.926.500,00
28	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Dalam Pengerjaan	Dokumen Perencanaan Pengaduan Lahan Paket 1 Kampung Sawah	2022-03-16	602/SPK/DPPFT Paket 1/PPK/APBD/2022	2022	APBD		100.238.360,00
29	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Dalam Pengerjaan	Perencanaan Pembesahan Lahan R2 Cimulpar	2022-11-04	602/SPK/DPPFT R2 Cimulpar/PPK/APBD/2022	2022	APBD		98.290.500,00
30	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Dalam Pengerjaan	Perencanaan Pembesahan Lahan R2 Cihur	2022-11-04	602/SPK/DPPFT R2 Cihur/PPK/APBD/2022	2022	APBD		49.228.500,00
31	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jalan Irigasi dan jaringan Dalam Pengerjaan	PS Pembangunan Simpang Tidak Sebidang Kebon Pedes Kota Bogor	2020-06-15	602/SPK/PRC_PKT.04/PPK/APBD/2020	2020	APBD		72.960.873,00
32	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Pk. Penyusunan DED Pemantauan Lahan Kantor Pemerintah Terpadu Kota Bogor	2025-09-30	640.6/02-SPK/DED PLKPT/IX/2025	2025	APBD		97.868.700,00
33	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jalan Irigasi dan jaringan Dalam Pengerjaan				2025	APBD		83.916.000,00
34	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jalan Irigasi dan jaringan Dalam Pengerjaan	Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan, Jembatan, Trottoir dan Drainase Paket 1	2020-06-15	602/SPK/PRC_PKT.01/PPK/APBD/2020	2020	APBD		73.293.144,00
35	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jalan Irigasi dan jaringan Dalam Pengerjaan	PS Pembangunan/Peningkatan Jembatan Satu Duit Kota Bogor	2020-06-15	602/SPK/PRC_PKT.02/PPK/APBD/2020	2020	APBD		73.403.900,00
36	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jalan Irigasi dan jaringan Dalam Pengerjaan	Konsultansi perencanaan Rekonstruksi Jalan Paket 3	2025-05-21	610/SPK.KonsultansiPerencRekonJalanPaket3/V/2025	2025	APBD		94.488.750,00
37	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jalan Irigasi dan jaringan Dalam Pengerjaan	Redesign DED Tidak Sebidang Jalan MA Salmin	2023-09-01	602.1/SP/SP.TS_MA.SALMIN/PPK/DPU/PR/2023	2023	APBD		475.080.000,00
38	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jalan Irigasi dan jaringan Dalam Pengerjaan	Peningkatan Jalan Sumur Wangi	2023-09-22	602/SPK/PRC TEKNIS PAKET 04/PPK/APBD/2023	2023	APBD		99.085.260,00
39	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jalan Irigasi dan jaringan Dalam Pengerjaan	Konsultansi perencanaan Rekonstruksi Jalan Paket 2	2025-05-26	610/SPK.KonsultansiPerencRekonJalanPaket2/V/2025	2025	APBD		92.490.750,00
40	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jalan Irigasi dan jaringan Dalam Pengerjaan	Konsultansi perencanaan Rekonstruksi Jalan Paket 1	2025-05-21	610/SPK.KonsultansiPerencRekonJalanPaket1/V/2025	2025	APBD		94.100.250,00
41	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jalan Irigasi dan jaringan Dalam Pengerjaan	Review DED Jalan Akses Ipi Kaymanis	2023-08-04	602.1/SPK/PRC TEKNIS PAKET 08/PPK/DPU/PR/2023	2023	APBD		99.362.760,00
42	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jalan Irigasi dan jaringan Dalam Pengerjaan	Perencanaan teknis Paket 12, Pembangunan JPO Bata Tulis (Sky Bridge)	2023-11-13	602/SPK/PRC TEKNIS PAKET 12/PPK/APBD/2023	2023	APBD		98.042.970,00
43	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jalan Irigasi dan jaringan Dalam Pengerjaan	Konsultansi perencanaan Rekonstruksi Jalan Paket 6	2025-09-02	610/SPK.KonsultansiPerencRekonJalanPaket6/IX/2025	2025	APBD		91.963.500,00
44	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jalan Irigasi dan jaringan Dalam Pengerjaan	Konsultansi perencanaan Rekonstruksi Jalan Paket 4	02/09/25	610/SPK.KonsultansiPerencRekonJalanPaket4/IX/2025	2025	APBD		92.352.000,00
45	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jalan Irigasi dan jaringan Dalam Pengerjaan	Peningkatan Jalan Dadali	18/09/23	602/SPK/PRC TEKNIS PAKET 05/PPK/APBD/2023	2023	APBD		98.918.760,00
46	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jalan Irigasi dan jaringan Dalam Pengerjaan	Jalan Perumahan Darat Babaturan	2023-09-18	602/SPK/PRC TEKNIS PAKET 10/PPK/APBD/2023	2023	APBD		99.418.260,00
47	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jalan Irigasi dan jaringan Dalam Pengerjaan	Peningkatan Jalan Veteran	2023-09-22	602/SPK/PRC TEKNIS PAKET 07/PPK/APBD/2023	2023	APBD		99.206.250,00
48	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jalan Irigasi dan jaringan Dalam Pengerjaan	Boulevard Villa Bogor Indah	2023-09-18	602.1/SPK/PRC TEKNIS PAKET 10/PPK/DPU/PR/2023	2023	APBD		99.196.260,00
49	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jalan Irigasi dan jaringan Dalam Pengerjaan	Review DED Frontage R2	2024-10-13	602.1/SPK/PRC TEKNIS PAKET 13/PPK/DPU/PR/2023	2023	APBD		90.674.790,00
50	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jalan Irigasi dan jaringan Dalam Pengerjaan	Konsultansi perencanaan Rekonstruksi Jalan Paket 7	2025-09-03	610/SPK.KonsultansiPerencRekonJalanPaket7/IX/2025	2025	APBD		92.907.000,00
51	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jalan Irigasi dan jaringan Dalam Pengerjaan	Konsultansi Perencanaan Rekonstruksi Jalan Paket 10	2025-10-14	610/SPK.KonsultansiPerencRekonJalanPaket10/IX/2025	2025	APBD		64.824.000,00
52	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jalan Irigasi dan jaringan Dalam Pengerjaan	Konsultansi perencanaan Rekonstruksi Jalan Paket 5	2025-09-03	610/SPK.KonsultansiPerencRekonJalanPaket5/IX/2025	2025	APBD		91.075.500,00
53	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jalan Irigasi dan jaringan Dalam Pengerjaan				2025	APBD		96.348.000,00
54	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jalan Irigasi dan jaringan Dalam Pengerjaan	DED Simpang Tidak Sebidang Kebon Pedes	2024-08-22	-	2022	APBD		457.424.000,00
55	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Penyusunan DED Penataan Ruang Publik Nyi Raja Permas Kel. Cibogor Kec. Bogor Tengah	2025-10-03	602/SPK/PRC-DEDRUANGPUBLIKNRP-X/DPP/2025	2025	APBD		97.460.775,00
56	DINAS PERHUBUNGAN	Peralatan dan Meisi Dalam Pengerjaan	Depan Kampus UIKA Jalan Sholeh Iskandar	2020-03-16	027/03/PRC-PLCN-CRSSNG/PPK/III/2020	2020	APBD		32.400.000,00
57	DINAS PERHUBUNGAN	Jalan Irigasi dan jaringan Dalam Pengerjaan	KOT A BOGOR SEPUTARAN SSA Konsultansi Perencanaan Pemasangan Jangka Highway	2020-02-03	027/05/SPK DISPERUMKIM II/2020	2020	APBD		18.017.500,00
58	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Jl. Achmad Adhawiwijaya Kec. Bogor Utara	2014-07-21	027/336/SPK.KUMKM/2014	2014	APBD		609.622.425,00
59	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Perencanaan Penyusunan Dokumen DED Pembangunan Front Office Komplek Atlet Kota Bogor (Lokasi Kawasan terpadu Olahraga Kaymanis) SPK Nomor : 027/DED Pembangunan Lapangan Tembok Komplek Atlet/e-kontrak/SP-IX/2021	2021-01-05	-	2021	APBD		367.194.300,00
60	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Jl. Pemuda No. 4 Tanah sareal Bogor	10/11/16	931.001480/LS/2016	2016	APBD		1.170.080.000,00
61	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Perencanaan Penyusunan Dokumen DED Pembangunan Wisma Atlet Komplek Atlet Kota Bogor (Kawasan Olahraga Terpadu Kaymanis) SPK Nomor : 027/DED Pembangunan Wisma Atlet Komplek Atlet/e-kontrak/SP-VIII/2021	05/01/21	-	2021	APBD		2.480.557.200,00
62	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Perencanaan Penyusunan Dokumen DED Pembangunan Lapangan Tembok Komplek Atlet Kota Bogor (Kawasan Olahraga Terpadu Kaymanis) SPK Nomor : 027/DED Pembangunan Lapangan Tembok Komplek Atlet/e-kontrak/SP-IX/2021	05/01/21	-	2021	APBD		1.084.132.500,00
63	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Kota Bogor	20/11/20	027/PRC-ANDALALIN/SPK/XI/2020	2020	APBD		100.770.000,00
64	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Perencanaan Sarana Prasarana Olahraga di Kecamatan Bogor Barat SPK Nomor : 027/DED Sarpras OR K. Bobar/e-kontrak/VIII/2021	05/01/21	-	2021	APBD		276.452.275,00
65	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Kota Bogor	26/10/20	027/KAJIAN SARPRAS KE/E KONTRAK/X/2020	2020	APBD		451.900.000,00
66	KECAMATAN BOGOR SELATAN	Tanah Dalam Pengerjaan	jalan arter IV kelurahan Pakuan Kecamatan Bogor Selatan	27/12/23	602.1/K.DPPFT/PPK.BOSEL/SPK/XII/2023	2023	APBD		29.581.500,00
67	KECAMATAN BOGOR SELATAN	Tanah Dalam Pengerjaan	kelurahan pakuan kecamatan bogor selatan	11/04/23	02/03/PS-PL-PPK.BOSEL/IV/2023	2023	APBD		59.684.700,00
68	Kelurahan Sempur	Jalan Irigasi dan jaringan Dalam Pengerjaan	Konsultansi perencana pengaman sungai; Jn. Sempur Kaler Rl.004/Rw.002 Kel. Sempur	01/01/19	-	2019	DAU		11.500.000,00
69	DINAS KESEHATAN	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Gang Aut	2022-12-05	-	2022,04/1967	APBD		58.915.000,01

PEMERINTAH KOTA BOGOR

Tabel Mutasi Barang Milik Daerah - Konstruksi Dalam Pengerjaan

Per 31 Desember 2025

Lampiran 15

No.	OPD	Golongan Barang	SALDO AWAL (31 Desember 2024)	PENAMBAHAN ASET TETAP ATAS BELANJA 2025	PENAMBAHAN ASET TETAP ATAS TAHUN BERJALAN	JUMLAH MUTASI TAMBAH	PENGURANGAN ASET TETAP ATAS TAHUN BERJALAN		JUMLAH MUTASI KURANG	SALDO AKHIR (31 Desember 2025)
				BELANJA MODAL YANG DIREKLAS ANTAR KIB (+)	REKLAS ANTAR KIB TAHUN BERJALAN (+)		REKLAS ANTAR KIB TAHUN BERJALAN (-)	ASET YANG DIHAPUS/DOUBLE CATAT (-)		
			ASET TETAP	ASET TETAP	ASET TETAP	ASET TETAP	ASET TETAP	ASET TETAP	ASET TETAP	ASET TETAP
1	Dinas Pendidikan	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.279.178.500,00	-	-	-	1.279.178.500,00	-	1.279.178.500,00	-
2	Dinas Kesehatan	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.745.800.920,00	-	-	-	-	-	-	1.745.800.920,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah (PD)	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD)	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.474.355.105,00	1.091.104.470,00	2.104.741.600,00	3.195.846.070,00	270.217.510,00	-	270.217.510,00	8.399.983.665,00
6	Dinas Perumahan dan Permukiman	Konstruksi Dalam Pengerjaan	55.770.000,00	97.460.775,00	-	97.460.775,00	55.770.000,00	-	55.770.000,00	97.460.775,00
7	Satuan Polisi Pamong Praja	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Dinas Sosial	Konstruksi Dalam Pengerjaan	55.755.000,00	-	-	-	-	55.755.000,00	55.755.000,00	-
11	Dinas Tenaga Kerja	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Dinas Lingkungan Hidup	Konstruksi Dalam Pengerjaan	96.070.500,00	-	-	-	-	96.070.500,00	96.070.500,00	-
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Tanah	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Dinas Perhubungan	Konstruksi Dalam Pengerjaan	50.417.500,00	-	-	-	-	-	-	50.417.500,00
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	Konstruksi Dalam Pengerjaan	609.622.425,00	-	-	-	-	-	-	609.622.425,00
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Tanah	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Dinas Pemuda dan Olahraga	Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.931.086.275,00	-	-	-	-	-	-	5.931.086.275,00
21	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Dinas Arsip dan Perpustakaan	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Sekretariat Daerah	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Kecamatan Bogor Selatan	Konstruksi Dalam Pengerjaan	89.266.200,00	-	-	-	-	-	-	89.266.200,00
27	Kecamatan Bogor Timur	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Kecamatan Bogor Tengah	Konstruksi Dalam Pengerjaan	11.500.000,00	-	-	-	-	-	-	11.500.000,00
29	Kecamatan Bogor Barat	Konstruksi Dalam Pengerjaan	99.266.400,00	-	-	-	99.266.400,00	-	99.266.400,00	-
30	Kecamatan Bogor Utara	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Kecamatan Tanah Sereal	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Inspektorat	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Konstruksi Dalam Pengerjaan	85.692.000,00	-	-	-	-	-	-	85.692.000,00
35	Badan Pendapatan Daerah	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-	-	-	-	-	-
37	PPKD	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-	-	-	-	-	-
Total		Konstruksi Dalam Pengerjaan	15.583.780.825,00	1.188.565.245,00	2.104.741.600,00	3.293.306.845,00	1.704.432.410,00	151.825.500,00	1.856.257.910,00	17.020.829.760,00

PEMERINTAH KOTA BOGOR
Tabel Mutasi Barang Milik Daerah - Aset Tidak Berwujud
Per 31 Desember 2025

Lampiran 16

No.	OPD	Golongan Barang	SALDO AWAL (31 Desember 2024)	PENAMBAHAN ASET TETAP ATAS BELANJA 2025	PENAMBAHAN ASET TETAP ATAS TAHUN BERJALAN	JUMLAH MUTASI TAMBAH	SALDO AKHIR (31 Desember 2025)
				REALISASI BELANJA MODAL (+)	ASET YANG BELUM TERCATAT (+)		
			ASET TETAP	ASET TETAP	ASET TETAP	ASET TETAP	ASET TETAP
1	Dinas Pendidikan	Aset tidak berwujud	648.454.690,00	-	-	-	648.454.690,00
2	Dinas Kesehatan	Aset tidak berwujud	1.300.224.400,00	33.300.000,00	181.885.980,00	215.185.980,00	1.515.410.380,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah (PD)	Aset tidak berwujud	-	-	-	-	-
4	Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD)	Aset tidak berwujud	-	-	-	-	-
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Aset tidak berwujud	136.895.500,00	-	74.758.500,00	74.758.500,00	211.654.000,00
6	Dinas Perumahan dan Permukiman	Aset tidak berwujud	1.851.443.350,00	-	-	-	1.851.443.350,00
7	Satuan Polisi Pamong Praja	Aset tidak berwujud	-	-	-	-	-
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Aset tidak berwujud	394.021.000,00	-	-	-	394.021.000,00
9	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Aset tidak berwujud	-	-	-	-	-
10	Dinas Sosial	Aset tidak berwujud	173.582.500,00	-	-	-	173.582.500,00
11	Dinas Tenaga Kerja	Aset tidak berwujud	44.220.000,00	-	-	-	44.220.000,00
12	Dinas Lingkungan Hidup	Aset tidak berwujud	163.128.500,00	-	-	-	163.128.500,00
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Tanahl	Aset tidak berwujud	632.961.853,86	379.734.959,00	-	379.734.959,00	1.012.696.812,86
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	Aset tidak berwujud	135.827.500,00	-	-	-	135.827.500,00
15	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Aset tidak berwujud	245.233.500,00	-	-	-	245.233.500,00
16	Dinas Perhubungan	Aset tidak berwujud	736.158.074,94	-	-	-	736.158.074,94
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	Aset tidak berwujud	3.297.006.625,00	-	-	-	3.297.006.625,00
18	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	Aset tidak berwujud	490.093.925,00	-	92.000.000,00	92.000.000,00	582.093.925,00
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PI - Tanahntu	Aset tidak berwujud	911.560.000,00	-	-	-	911.560.000,00
20	Dinas Pemuda dan Olahraga	Aset tidak berwujud	45.055.000,00	-	-	-	45.055.000,00
21	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Aset tidak berwujud	48.000.000,00	-	-	-	48.000.000,00
22	Dinas Arsip dan Perpustakaan	Aset tidak berwujud	242.900.000,00	-	-	-	242.900.000,00
23	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Aset tidak berwujud	133.975.570,00	-	-	-	133.975.570,00
24	Sekretariat Daerah	Aset tidak berwujud	1.157.107.732,00	198.759.900,00	-	198.759.900,00	1.355.867.632,00
25	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Aset tidak berwujud	213.315.000,00	-	-	-	213.315.000,00
26	Kecamatan Bogor Selatan	Aset tidak berwujud	40.210.000,00	-	-	-	40.210.000,00
27	Kecamatan Bogor Timur	Aset tidak berwujud	148.950.000,00	-	-	-	148.950.000,00
28	Kecamatan Bogor Tengah	Aset tidak berwujud	-	-	-	-	-
29	Kecamatan Bogor Barat	Aset tidak berwujud	-	-	-	-	-
30	Kecamatan Bogor Utara	Aset tidak berwujud	-	-	-	-	-
31	Kecamatan Tanah Sareal	Aset tidak berwujud	-	-	-	-	-
32	Inspektorat	Aset tidak berwujud	99.000.000,00	-	-	-	99.000.000,00
33	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Aset tidak berwujud	197.657.500,00	-	-	-	197.657.500,00
34	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Aset tidak berwujud	1.728.159.112,00	-	-	-	1.728.159.112,00
35	Badan Pendapatan Daerah	Aset tidak berwujud	1.245.281.571,00	-	-	-	1.245.281.571,00
36	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur	Aset tidak berwujud	510.319.500,00	-	-	-	510.319.500,00
37	PPKD	Aset tidak berwujud	-	-	-	-	-
38	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Aset tidak berwujud	-	-	-	-	-
Total			16.970.742.403,80	611.794.859,00	348.644.480,00	960.439.339,00	17.931.181.742,80

PEMERINTAH KOTA BOGOR

Tabel Mutasi Barang Milik Daerah - Aset Rusak Berat

Per 31 Desember 2025

Lampiran 17

No.	OPD	Golongan Barang	SALDO AWAL (31 Desember 2024)	PENAMBAHAN ASET TETAP ATAS TAHUN BERJALAN					JUMLAH MUTASI TAMBAH	PENGURANGAN ASET TETAP ATAS TAHUN BERJALAN				JUMLAH MUTASI KURANG	SALDO AKHIR (31 Desember 2025)
				MUTASI DARI PD LAIN TAHUN BERJALAN (+)	REKLAS DARI/KE RUSAK BERAT TAHUN BERJALAN (+)	REKLAS KE ASET LAIN-LAIN TAHUN BERJALAN (+)	REKLAS KONDISI TAHUN BERJALAN (+)	REKLAS DARI/KE PROPERTI INVESTASI (+)		MUTASI KE PD LAIN TAHUN BERJALAN (-)	REKLAS DARI/KE RUSAK BERAT TAHUN BERJALAN (-)	ASET YANG DIHAPUS/DOUBLE CATAT (-)	REKLAS KONDISI TAHUN BERJALAN (-)		
				ASET TETAP	ASET TETAP	ASET TETAP	ASET TETAP	ASET TETAP		ASET TETAP	ASET TETAP	ASET TETAP	ASET TETAP		
1	Dinas Pendidikan	Aset Rusak Bera	36.823.256.064,43	-	51.124.401,50	6.130.000,00	77.243.259,90	-	134.497.661,40	-	10.000.000,00	942.034.201,60	-	952.034.201,60	36.005.719.524,23
2	Dinas Kesehatan	Aset Rusak Bera	18.308.427.994,12	-	8.153.976.879,72	11.218.000,00	231.917.756,23	-	8.397.112.635,95	-	-	8.254.668.126,76	-	8.254.668.126,76	18.450.872.503,31
3	Rumah Sakit Umum Daerah (PD)	Aset Rusak Bera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD)	Aset Rusak Bera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Aset Rusak Bera	8.000.421.142,15	-	1.275.799.798,00	34.672.000,00	-	-	1.310.471.798,00	-	-	62.747.000,00	-	62.747.000,00	9.248.145.940,15
6	Dinas Perumahan dan Permukiman	Aset Rusak Bera	1.795.474.360,63	-	570.095.301,10	4.293.000,00	-	-	574.388.301,10	-	-	629.079.479,69	-	629.079.479,69	1.740.783.182,04
7	Satuan Polisi Pamong Praja	Aset Rusak Bera	3.334.261.385,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.334.261.385,41
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Aset Rusak Bera	81.693.955,76	-	209.324.850,00	-	-	-	209.324.850,00	-	-	-	-	-	291.018.805,76
9	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Aset Rusak Bera	64.376.583,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64.376.583,00
10	Dinas Sosial	Aset Rusak Bera	891.820.843,58	-	148.824.607,71	-	-	-	148.824.607,71	-	-	-	-	-	1.040.645.451,29
11	Dinas Tenaga Kerja	Aset Rusak Bera	375.455.216,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	375.455.216,99
12	Dinas Lingkungan Hidup	Aset Rusak Bera	5.501.450.416,15	-	5.927.778.231,12	90.400.000,00	76.144.033,10	-	6.094.322.264,22	-	-	-	-	-	11.595.772.680,37
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Tanahl	Aset Rusak Bera	799.343.346,67	-	1.085.450.051,31	-	3.591.671,48	-	1.089.041.722,79	-	-	-	-	-	1.888.385.069,46
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perliri	Aset Rusak Bera	594.776.652,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	594.776.652,20
15	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Aset Rusak Bera	2.264.495.272,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.264.495.272,08
16	Dinas Perhubungan	Aset Rusak Bera	3.012.679.226,52	-	433.344.458,41	-	83.352.032,97	-	516.696.491,38	-	-	1.206.980.896,89	-	1.206.980.896,89	2.322.394.821,01
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	Aset Rusak Bera	1.931.058.705,71	-	1.047.648.349,36	8.277.500,00	9.304.354,00	-	1.065.230.203,36	-	-	69.666.797,20	-	69.666.797,20	2.926.622.111,87
18	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Industri	Aset Rusak Bera	980.511.688,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	980.511.688,16
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Aset Rusak Bera	1.076.761.564,70	-	454.181.239,12	-	-	-	454.181.239,12	6.170.981,50	25.211.875,00	-	-	31.382.856,50	1.499.559.947,32
20	Dinas Pemuda dan Olahraga	Aset Rusak Bera	623.744.563,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	623.744.563,52
21	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Aset Rusak Bera	3.622.346.268,35	-	-	-	-	-	-	-	296.433.000,00	-	-	296.433.000,00	3.325.913.268,35
22	Dinas Arsip dan Perpustakaan	Aset Rusak Bera	572.135.661,19	-	543.357.175,00	-	7.778.000,00	-	551.135.175,00	-	-	-	1.082.000,00	1.082.000,00	1.122.188.836,19
23	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Aset Rusak Bera	3.323.446.560,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.323.446.560,20
24	Sekretariat Daerah	Aset Rusak Bera	27.897.761.205,61	-	916.091.427,80	21.000.000,00	-	-	937.091.427,80	50.000.000,00	-	-	-	50.000.000,00	28.784.852.633,41
25	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Aset Rusak Bera	178.701.819,00	-	1.522.074.764,32	-	53.490.481,00	-	1.575.565.245,32	-	-	483.353.374,00	-	483.353.374,00	1.270.913.690,32
26	Kecamatan Bogor Selatan	Aset Rusak Bera	1.499.861.299,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.499.861.299,89
27	Kecamatan Bogor Timur	Aset Rusak Bera	779.809.207,00	-	143.514.118,00	-	-	-	143.514.118,00	-	-	-	-	-	923.323.325,00
28	Kecamatan Bogor Tengah	Aset Rusak Bera	1.660.643.278,45	6.170.981,50	407.792.325,77	-	-	-	413.963.307,27	-	-	416.800.000,00	-	416.800.000,00	1.657.806.585,72
29	Kecamatan Bogor Barat	Aset Rusak Bera	905.118.862,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	905.118.862,84
30	Kecamatan Bogor Utara	Aset Rusak Bera	475.797.358,00	-	291.658.668,12	-	46.200.850,00	-	337.859.518,12	-	-	-	-	-	813.656.876,12
31	Kecamatan Tanah Sareal	Aset Rusak Bera	951.902.028,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	951.902.028,01
32	Inspektorat	Aset Rusak Bera	248.882.288,34	-	164.172.558,54	-	5.487.300,96	-	169.659.859,50	-	-	-	1.470.000,00	1.470.000,00	417.072.147,84
33	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Aset Rusak Bera	1.671.441.276,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.671.441.276,53
34	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Aset Rusak Bera	2.410.129.893,51	-	158.659.125,25	-	-	-	158.659.125,25	-	-	2.409.560.893,51	569.000,00	2.410.129.893,51	158.659.125,25
35	Badan Pendapatan Daerah	Aset Rusak Bera	1.717.092.724,80	-	1.347.394.566,33	185.037.924,88	50.243.708,79	-	1.582.676.200,00	-	35.556.518,00	192.629.118,00	141.000,00	228.326.636,00	3.071.442.288,80
36	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Aset Rusak Bera	631.506.120,08	-	191.891.304,29	-	-	-	191.891.304,29	-	-	497.535.524,37	-	497.535.524,37	325.861.900,00
37	PPKD	Aset Rusak Bera	2.747.753.052,00	50.000.000,00	861.915.000,00	-	183.600.000,00	-	1.095.515.000,00	-	617.000.000,00	712.788.273,00	-	1.329.788.273,00	2.513.479.779,00
38	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Aset Rusak Bera	859.065.454,41	-	1.094.579.119,73	-	-	-	1.116.579.119,73	-	-	-	-	-	1.975.644.574,14
39	Total	Aset Rusak Bera	138.613.403.339,99	56.170.981,50	27.000.648.320,50	361.028.424,88	850.353.448,43	-	28.268.201.175,31	56.170.981,50	984.201.393,00	15.877.843.685,02	3.262.000,00	16.921.478.059,52	149.960.126.455,78

PEMERINTAH KOTA BOGOR

Tabel Mutasi Barang Milik Daerah - Aset lain-lain lainnya

Per 31 Desember 2025

Lampiran 18

No.	OPD	Golongan Barang	SALDO AWAL (31 Desember 2024)	PENAMBAHAN ASET TETAP ATAS TAHUN		JUMLAH MUTASI TAMBAH	PENGURANGAN ASET TETAP ATAS TAHUN BERJALAN				JUMLAH MUTASI KURANG	SALDO AKHIR (31 Desember 2025)
				MUTASI DARI PD LAIN TAHUN BERJALAN (+)	REKLAS KE ASET LAIN- LAIN TAHUN BERJALAN (+)		MUTASI KE PD LAIN TAHUN BERJALAN (-)	REKLAS KE ASET LAIN-LAIN TAHUN BERJALAN (-)	ASET YANG DIHAPUS/DOUB LE CATAT (-)	REKLAS KONDISI TAHUN BERJALAN (-)		
			ASET TETAP	ASET TETAP	ASET TETAP	ASET TETAP	ASET TETAP	ASET TETAP	ASET TETAP	ASET TETAP	ASET TETAP	ASET TETAP
1	Dinas Pendidikan	Aset lain-lain lainnya	13.467.232.160,13	-	-	-	-	652.959.531,00	57.685.832,45	-	710.645.363,45	12.756.586.796,68
2	Dinas Kesehatan	Aset lain-lain lainnya	732.440.175,98	-	13.538.461,54	13.538.461,54	-	11.218.000,00	77.864.000,00	-	89.082.000,00	656.896.637,52
3	Rumah Sakit Umum Daerah (PD)	Aset lain-lain lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD)	Aset lain-lain lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Aset lain-lain lainnya	1.448.611.076,51	-	-	-	-	34.672.000,00	-	-	34.672.000,00	1.413.939.076,51
6	Dinas Perumahan dan Permukiman	Aset lain-lain lainnya	3.078.093.360,35	-	-	-	-	4.293.000,00	-	-	4.293.000,00	3.073.800.360,35
7	Satuan Polisi Pamong Praja	Aset lain-lain lainnya	157.391.700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	157.391.700,00
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Aset lain-lain lainnya	2.098.971.764,90	-	-	-	-	-	-	-	-	2.098.971.764,90
9	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Aset lain-lain lainnya	146.984.127,00	-	-	-	-	-	-	-	-	146.984.127,00
10	Dinas Sosial	Aset lain-lain lainnya	646.224.521,01	-	-	-	-	-	-	-	-	646.224.521,01
11	Dinas Tenaga Kerja	Aset lain-lain lainnya	64.320.749,33	-	-	-	-	-	-	-	-	64.320.749,33
12	Dinas Lingkungan Hidup	Aset lain-lain lainnya	9.211.860.693,91	-	-	-	-	194.400.000,00	-	-	194.400.000,00	9.017.460.693,91
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Tanah	Aset lain-lain lainnya	330.396.327,56	-	-	-	-	-	-	-	-	330.396.327,56
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Pertindungan	Aset lain-lain lainnya	160.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	160.000.000,00
15	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Aset lain-lain lainnya	62.106.598,40	-	-	-	-	-	-	-	-	62.106.598,40
16	Dinas Perhubungan	Aset lain-lain lainnya	631.757.744,00	-	-	-	-	-	-	-	-	631.757.744,00
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	Aset lain-lain lainnya	352.014.554,00	-	-	-	-	8.277.500,00	-	-	8.277.500,00	343.737.054,00
18	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perind	Aset lain-lain lainnya	1.060.869.853,80	-	-	-	-	-	-	-	-	1.060.869.853,80
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Aset lain-lain lainnya	-	-	41.752.857,00	41.752.857,00	-	-	-	-	-	41.752.857,00
20	Dinas Pemuda dan Olahraga	Aset lain-lain lainnya	12.009.905,00	-	-	-	-	-	-	-	-	12.009.905,00
21	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Aset lain-lain lainnya	2.493.247.211,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2.493.247.211,00
22	Dinas Arsip dan Perpustakaan	Aset lain-lain lainnya	756.127.210,92	-	-	-	-	-	-	-	-	756.127.210,92
23	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Aset lain-lain lainnya	1.274.574.076,50	-	-	-	-	-	-	-	-	1.274.574.076,50
24	Sekretariat Daerah	Aset lain-lain lainnya	6.620.353.562,91	-	-	-	27.600.000,00	21.000.000,00	-	-	48.600.000,00	6.571.753.562,91
25	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Aset lain-lain lainnya	660.116.000,00	-	-	-	75.000.000,00	-	-	-	75.000.000,00	585.116.000,00
26	Kecamatan Bogor Selatan	Aset lain-lain lainnya	331.943.052,00	-	-	-	-	-	-	-	-	331.943.052,00
27	Kecamatan Bogor Timur	Aset lain-lain lainnya	45.114.700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	45.114.700,00
28	Kecamatan Bogor Tengah	Aset lain-lain lainnya	488.490.503,09	-	-	-	-	-	-	-	-	488.490.503,09
29	Kecamatan Bogor Barat	Aset lain-lain lainnya	90.632.967,00	-	-	-	-	-	-	-	-	90.632.967,00
30	Kecamatan Bogor Utara	Aset lain-lain lainnya	528.020.021,00	-	-	-	-	-	-	-	-	528.020.021,00
31	Kecamatan Tanah Sareal	Aset lain-lain lainnya	738.838.966,00	-	-	-	81.000.000,00	-	-	-	81.000.000,00	657.838.966,00
32	Inspektorat	Aset lain-lain lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Aset lain-lain lainnya	23.805.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	23.805.000,00
34	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Aset lain-lain lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Badan Pendapatan Daerah	Aset lain-lain lainnya	901.927.219,14	-	-	-	-	402.379.568,39	-	-	402.379.568,39	499.547.650,75
36	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur	Aset lain-lain lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	PPKD	Aset lain-lain lainnya	651.938.000,00	183.600.000,00	-	183.600.000,00	-	-	-	183.600.000,00	183.600.000,00	651.938.000,00
38	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Aset lain-lain lainnya	60.656.997,81	-	-	-	-	-	-	-	-	60.656.997,81
39	Total	Aset lain-lain lainnya	49.327.070.799,25	183.600.000,00	55.291.318,54	238.891.318,54	183.600.000,00	1.329.199.599,39	135.549.832,45	183.600.000,00	1.831.949.431,84	47.734.012.685,95

PEMERINTAH KOTA BOGOR

Lampiran 19

Tabel Mutasi Barang Milik Daerah - Amortisasi

Per 31 Desember 2025

No.	OPD	Golongan Barang	AKUMULASI PENYUSUTAN 2024	PENAMBAHAN ASET TETAP ATAS BELANJA 2025			BESUT SELAIN BM 2025	Penambahan Akumulasi	Akumulasi Penyusutan 2025
				REALISASI BELANJA MODAL (+)	ASET YANG BELUM TERCATAT (+)				
				BESUT	KOREKSI ASUT	BESUT			
1	Dinas Pendidikan	Amortisasi	508.841.017,50	-	-	-	139.613.672,50	139.613.672,50	648.454.690,00
2	Dinas Kesehatan	Amortisasi	1.242.291.650,00	8.325.000,00	78.587.790,00	45.471.495,00	57.932.750,00	190.317.035,00	1.432.608.685,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah (PD)	Amortisasi	-	-	-	-	-	-	-
4	Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD)	Amortisasi	-	-	-	-	-	-	-
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Amortisasi	111.650.125,00	-	37.379.250,00	18.689.625,00	15.411.375,00	71.480.250,00	183.130.375,00
6	Dinas Perumahan dan Permukiman	Amortisasi	1.826.842.975,00	-	-	-	24.600.375,00	24.600.375,00	1.851.443.350,00
7	Satuan Polisi Pamong Praja	Amortisasi	-	-	-	-	-	-	-
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Amortisasi	288.238.000,00	-	-	-	52.891.500,00	52.891.500,00	341.129.500,00
9	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Amortisasi	-	-	-	-	-	-	-
10	Dinas Sosial	Amortisasi	173.582.500,00	-	-	-	-	-	173.582.500,00
11	Dinas Tenaga Kerja	Amortisasi	44.220.000,00	-	-	-	-	-	44.220.000,00
12	Dinas Lingkungan Hidup	Amortisasi	163.128.500,00	-	-	-	-	-	163.128.500,00
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan SiPI - Tanah	Amortisasi	615.991.853,86	94.933.739,75	-	-	16.970.000,00	111.903.739,75	727.895.593,61
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	Amortisasi	135.827.500,00	-	-	-	-	-	135.827.500,00
15	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Amortisasi	245.233.500,00	-	-	-	-	-	245.233.500,00
16	Dinas Perhubungan	Amortisasi	736.158.074,94	-	-	-	-	-	736.158.074,94
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	Amortisasi	3.297.006.625,00	-	-	-	-	-	3.297.006.625,00
18	Dinas Koperasi. Usaha Kecil Menengah. Perdagangan dan Perindustrian	Amortisasi	490.093.925,00	-	92.000.000,00	-	-	92.000.000,00	582.093.925,00
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Amortisasi	911.560.000,00	-	-	-	-	-	911.560.000,00
20	Dinas Pemuda dan Olahraga	Amortisasi	45.055.000,00	-	-	-	-	-	45.055.000,00
21	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Amortisasi	36.000.000,00	-	-	-	12.000.000,00	12.000.000,00	48.000.000,00
22	Dinas Arsip dan Perpustakaan	Amortisasi	242.900.000,00	-	-	-	-	-	242.900.000,00
23	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Amortisasi	78.208.892,50	-	-	-	18.588.892,50	18.588.892,50	96.797.785,00
24	Sekretariat Daerah	Amortisasi	1.157.107.732,00	49.689.975,00	-	-	-	49.689.975,00	1.206.797.707,00
25	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Amortisasi	213.315.000,00	-	-	-	-	-	213.315.000,00
26	Kecamatan Bogor Selatan	Amortisasi	40.210.000,00	-	-	-	-	-	40.210.000,00
27	Kecamatan Bogor Timur	Amortisasi	148.950.000,00	-	-	-	-	-	148.950.000,00
28	Kecamatan Bogor Tengah	Amortisasi	-	-	-	-	-	-	-
29	Kecamatan Bogor Barat	Amortisasi	-	-	-	-	-	-	-
30	Kecamatan Bogor Utara	Amortisasi	-	-	-	-	-	-	-
31	Kecamatan Tanah Sareal	Amortisasi	-	-	-	-	-	-	-
32	Inspektorat	Amortisasi	99.000.000,00	-	-	-	-	-	99.000.000,00
33	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Amortisasi	197.657.500,00	-	-	-	-	-	197.657.500,00
34	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Amortisasi	1.713.368.584,00	-	-	-	14.790.528,00	14.790.528,00	1.728.159.112,00
35	Badan Pendapatan Daerah	Amortisasi	1.220.356.571,00	-	-	-	24.925.000,00	24.925.000,00	1.245.281.571,00
36	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur	Amortisasi	510.319.500,00	-	-	-	-	-	510.319.500,00
37	PPKD	Amortisasi	-	-	-	-	-	-	-
38	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Amortisasi	-	-	-	-	-	-	-
39	Total	Amortisasi	16.493.115.025,80	152.948.714,75	207.967.040,00	64.161.120,00	377.724.093,00	802.800.967,75	17.295.915.993,55

PEMERINTAH KOTA BOGOR
Tabel Mutasi Barang Milik Daerah - Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lainnya
Per 31 Desember 2025

No.	PERANGKAT DAERAH	Golongan Barang	AKUMULASI PENYUSUTAN 2024	PENAMBAHAN ASET TETAP ATAS TAHUN BERJALAN								REBAN PENYUSUTAN SELAIN BM TAHUN 2025	Penambahan Akumulasi Penyusutan	PENGURANGAN ASET TETAP ATAS TAHUN BERJALAN					KOREKSI SALDO AWAL ASUT	Pengurangan Akumulasi Penyusutan	Akumulasi Penyusutan Akhir	Beban Penyusutan
				MUTASI DARI PD LAIN TAHUN BERJALAN (+)		REKLAS DARI/KE RUSAK BERAT TAHUN BERJALAN (+)		REKLAS KE ASET LAIN-LAIN TAHUN BERJALAN (+)		MUTASI KE PD LAIN TAHUN BERJALAN (+)				REKLAS DARI/KE RUSAK BERAT TAHUN BERJALAN (-)		REKLAS KE ASET LAIN- LAIN TAHUN BERJALAN (-)						
				KOREKSI ASUT	BESUT	AKUMULASI RUSAK BERAT (REBAN + AKM 47)	KOREKSI ASUT	BESUT	KOREKSI ASUT	BESUT	KOREKSI ASUT			KOREKSI ASUT	KOREKSI ASUT	KOREKSI ASUT						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1	Dinas Pendidikan	Aset rusak berat dan aset lain-lain lainnya	29.725.301.151,23	-	-	50.964.386,35	3.712.500,00	-	2.014.512,00	-	-	56.691.398,35	-	-	10.000.000,00	135.088.178,14	459.792.026,47	-	604.880.204,61	29.177.112.344,97	-	
2	Dinas Kesehatan	Aset rusak berat dan aset lain-lain lainnya	15.392.400.362,21	-	-	8.119.168.610,24	22.336.461,54	-	140.884.904,98	-	-	8.282.389.976,76	-	-	-	8.798.000,00	6.320.205.219,88	-	5.000.000,05	6.324.003.219,83	17.350.787.119,14	
3	Rumah Sakit Umum Daerah (PD)	Aset rusak berat dan aset lain-lain lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD)	Aset rusak berat dan aset lain-lain lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Aset rusak berat dan aset lain-lain lainnya	6.728.168.768,64	-	-	1.275.799.798,00	34.672.000,00	-	-	-	-	1.310.471.798,00	-	-	-	34.672.000,00	62.747.000,00	-	97.419.000,00	7.941.221.566,64	-	
6	Dinas Pemukiman dan Permukiman	Aset rusak berat dan aset lain-lain lainnya	3.329.183.818,67	-	-	560.794.626,18	4.293.000,00	-	-	-	-	565.087.626,18	-	-	-	4.293.000,00	607.699.845,69	-	611.992.845,69	3.282.278.599,16	-	
7	Satuan Polisi Pamong Praja	Aset rusak berat dan aset lain-lain lainnya	3.266.240.528,24	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	3.266.240.528,24	-	
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Aset rusak berat dan aset lain-lain lainnya	1.586.208.232,90	-	-	204.815.600,00	-	-	-	-	-	204.815.600,00	-	-	-	-	-	-	-	1.791.023.832,90	-	
9	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Aset rusak berat dan aset lain-lain lainnya	198.580.710,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	198.580.710,00	-	
10	Dinas Sosial	Aset rusak berat dan aset lain-lain lainnya	1.503.169.892,73	-	-	148.824.607,71	-	-	-	-	-	148.824.607,71	-	-	-	-	-	-	-	1.651.994.500,44	-	
11	Dinas Tenaga Kerja	Aset rusak berat dan aset lain-lain lainnya	396.495.018,06	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	396.495.018,06	-	
12	Dinas Lingkungan Hidup	Aset rusak berat dan aset lain-lain lainnya	8.874.553.538,98	-	-	5.484.419.532,69	90.400.000,00	-	30.205.000,00	-	-	5.605.024.532,69	-	-	-	194.400.000,00	-	-0,06	194.399.999,94	14.285.178.071,73	-	
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Tanah	Aset rusak berat dan aset lain-lain lainnya	1.103.674.156,37	-	-	1.085.450.051,31	-	-	3.220.421,00	-	-	1.088.670.472,31	-	-	-	-	-	-0,32	-0,32	2.192.344.629,00	-	
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	Aset rusak berat dan aset lain-lain lainnya	679.923.941,57	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	679.923.941,57	-	
15	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Aset rusak berat dan aset lain-lain lainnya	2.306.466.528,82	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	2.306.466.528,82	-	
16	Dinas Perhubungan	Aset rusak berat dan aset lain-lain lainnya	3.086.064.331,21	-	-	433.344.458,41	-	-	83.352.021,81	-	-	516.696.480,22	-	-	-	-	1.178.157.504,81	-	1.178.157.504,81	2.424.603.306,62	-	
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	Aset rusak berat dan aset lain-lain lainnya	2.197.652.097,41	-	-	1.047.648.349,35	4.966.500,00	-	4.147.954,00	-	-	1.056.762.803,35	-	-	-	4.966.500,00	69.666.797,20	-	74.633.297,20	3.179.781.603,56	-	
18	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	Aset rusak berat dan aset lain-lain lainnya	1.730.234.821,75	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	1.730.234.821,75	-	
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Tanah	Aset rusak berat dan aset lain-lain lainnya	1.045.992.780,12	-	-	454.181.239,12	41.752.857,00	-	-	-	-	495.934.096,12	6.170.981,50	25.211.875,00	-	-	-	-	31.382.856,50	1.510.544.019,74	-	
20	Dinas Pemuda dan Olahraga	Aset rusak berat dan aset lain-lain lainnya	586.779.465,35	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	586.779.465,35	-	
21	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Aset rusak berat dan aset lain-lain lainnya	5.463.388.878,48	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	296.433.000,00	-	-	296.433.000,00	5.166.955.878,48	-	
22	Dinas Arsip dan Perpustakaan	Aset rusak berat dan aset lain-lain lainnya	1.180.073.055,38	-	-	543.357.175,00	-	-	7.627.600,00	-	-	550.984.775,00	-	-	-	-	1.082.000,00	-	1.082.000,00	1.729.975.830,38	-	
23	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Aset rusak berat dan aset lain-lain lainnya	4.211.729.979,96	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	4.211.729.979,96	-	
24	Sekretariat Daerah	Aset rusak berat dan aset lain-lain lainnya	18.180.651.270,95	-	-	916.091.427,76	21.000.000,00	-	-	-	-	937.091.427,76	77.600.000,00	-	-	21.000.000,00	-	-	98.600.000,00	19.019.142.698,71	-	
25	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Aset rusak berat dan aset lain-lain lainnya	838.817.819,00	-	-	1.522.074.764,32	-	-	48.587.921,00	-	-	1.570.662.685,32	75.000.000,00	-	-	-	483.353.374,00	-	558.353.374,00	1.851.127.130,32	-	
26	Kecamatan Bogor Selatan	Aset rusak berat dan aset lain-lain lainnya	1.744.427.683,71	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	1.744.427.683,71	-	
27	Kecamatan Bogor Timur	Aset rusak berat dan aset lain-lain lainnya	732.000.513,29	-	-	143.514.118,00	-	-	-	-	-	143.514.118,00	-	-	-	-	-	-	-	875.514.631,29	-	
28	Kecamatan Bogor Tengah	Aset rusak berat dan aset lain-lain lainnya	1.824.991.510,24	6.170.981,50	-	364.997.324,27	-	-	-	-	-	371.168.305,77	-	-	-	416.800.000,00	-	-1,50	416.799.998,50	1.779.359.817,51	-	
29	Kecamatan Bogor Barat	Aset rusak berat dan aset lain-lain lainnya	942.785.770,02	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	942.785.770,02	-	
30	Kecamatan Bogor Utara	Aset rusak berat dan aset lain-lain lainnya	551.963.244,40	-	-	291.658.668,12	-	-	-	-	-	291.658.668,12	-	-	-	-	-	-	-	843.621.912,52	-	
31	Kecamatan Tanah Sereal	Aset rusak berat dan aset lain-lain lainnya	1.652.800.607,31	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	81.000.000,00	-	-	-	-	-	81.000.000,00	1.571.800.607,31	-	
32	Inspektorat	Aset rusak berat dan aset lain-lain lainnya	245.298.368,31	-	-	164.172.558,53	-	-	2.876.100,00	-	-	167.048.658,53	-	-	-	-	1.470.000,00	-	1.470.000,00	410.877.026,84	-	
33	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Aset rusak berat dan aset lain-lain lainnya	1.571.450.671,95	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	1.571.450.671,95	-	
34	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Aset rusak berat dan aset lain-lain lainnya	2.349.510.010,27	-	-	158.659.125,25	-	-	-	-	-	158.659.125,25	-	-	-	2.349.510.010,27	-	-	2.349.510.010,27	158.659.125,25	-	
35	Badan Pendapatan Daerah	Aset rusak berat dan aset lain-lain lainnya	2.467.007.407,51	-	-	1.307.562.060,01	182.882.924,88	-	13.794.458,50	-	-	1.504.039.443,39	-	35.556.518,00	-	333.215.588,39	190.446.260,85	141.000,00	-	559.359.367,24	3.411.687.483,66	-
36	Badan Pengawasan dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur	Aset rusak berat dan aset lain-lain lainnya	536.353.357,73	-	-	191.891.304,26	-	-	-	-	-	191.891.304,26	-	-	-	436.097.497,73	-	-	436.097.497,73	292.147.164,26	-	
37	PPKD	Aset rusak berat dan aset lain-lain lainnya	2.269.524.086,84	233.600.000,00	-	861.915.000,00	-	-	183.600.000,00	-	-	1.279.115.000,00	-	227.120.000,00	-	709.378.130,14	183.600.000,00	-	1.120.098.130,14	2.428.540.956,70	-	
38	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Aset rusak berat dan aset lain-lain lainnya	820.177.627,42	-	-	1.094.579.119,73	-	-	22.000.000,00	-	-	1.116.579.119,73	-	-	-	-	-	-	-	1.936.756.747,15	-	
	Total		131.320.042.007,03	239.770.981,50	-	26.425.883.904,61	405.816.243,42	-	542.310.893,29	-	-	27.613.782.022,82	239.770.981,50	594.321.393,00	736.433.266,53	13.283.853.667,04	186.293.000,00	-5.000.001,93	15.035.672.306,14	143.898.151.723,71	-	

PEMERINTAH KOTA BOGOR

Lampiran 21

Tabel Mutasi Barang Milik Daerah - Properti Investasi Tanah

Per 31 Desember 2025

No.	OPD	Golongan Barang	SALDO AWAL (31 Desember 2024)	PENAMBAHAN ASET TETAP ATAS TAHUN		JUMLAH MUTASI TAMBAH	PENGURANGAN ASET TETAP ATAS		JUMLAH MUTASI KURANG	SALDO AKHIR (31 Desember 2025)
				MUTASI DARI PD LAIN TAHUN BERJALAN (+)	REKLAS DARI/KE PROPERTI INVESTASI (+)		MUTASI KE PD LAIN TAHUN BERJALAN (-)	REKLAS DARI/KE PROPERTI INVESTASI (-)		
			ASET TETAP	ASET TETAP	ASET TETAP	ASET TETAP	ASET TETAP	ASET TETAP	ASET TETAP	ASET TETAP
1	2	3	4	24		52	61		76	78
1	Dinas Pendidikan	Pi Tanah	517.788.888,00	-	-	-	517.788.888,00	-	-	517.788.888,00
2	Dinas Kesehatan	Pi Tanah	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Rumah Sakit Umum Daerah (PD)	Pi Tanah	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD)	Pi Tanah	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pi Tanah	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Dinas Perumahan dan Permukiman	Pi Tanah	1.294.880.850,00	-	-	-	-	1.294.880.850,00	-	1.294.880.850,00
7	Satuan Polisi Pamong Praja	Pi Tanah	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pi Tanah	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pi Tanah	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Dinas Sosial	Pi Tanah	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Dinas Tenaga Kerja	Pi Tanah	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Dinas Lingkungan Hidup	Pi Tanah	18.569.541.750,00	-	-	-	-	18.569.541.750,00	-	18.569.541.750,00
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Tanahl	Pi Tanah	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	Pi Tanah	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pi Tanah	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Dinas Perhubungan	Pi Tanah	1.072.773.190,00	-	599.985.000,00	599.985.000,00	-	-	-	1.672.758.190,00
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	Pi Tanah	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	Pi Tanah	-	-	8.800.750.000,00	8.800.750.000,00	-	-	-	8.800.750.000,00
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pi Tanah	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Dinas Pemuda dan Olahraga	Pi Tanah	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Pi Tanah	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Dinas Arsip dan Perpustakaan	Pi Tanah	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pi Tanah	334.162.830,00	-	-	-	-	-	-	334.162.830,00
24	Sekretariat Daerah	Pi Tanah	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Pi Tanah	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Kecamatan Bogor Selatan	Pi Tanah	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Kecamatan Bogor Timur	Pi Tanah	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Kecamatan Bogor Tengah	Pi Tanah	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Kecamatan Bogor Barat	Pi Tanah	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Kecamatan Bogor Utara	Pi Tanah	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Kecamatan Tanah Sereal	Pi Tanah	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Inspektorat	Pi Tanah	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Pi Tanah	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Pi Tanah	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Badan Pendapatan Daerah	Pi Tanah	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur	Pi Tanah	-	-	-	-	-	-	-	-
37	PPKD	Pi Tanah	191.978.255.951,00	517.788.888,00	18.764.191.325,00	19.281.980.213,00	-	86.584.701.811,00	86.584.701.811,00	124.675.534.353,00
38	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Pi Tanah	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Total	Pi Tanah	213.767.403.459,00	517.788.888,00	28.164.926.325,00	28.682.715.213,00	517.788.888,00	106.449.124.411,00	106.966.913.299,00	155.865.416.861,00

PEMERINTAH KOTA BOGOR

Lampiran 22

Tabel Mutasi Barang Milik Daerah - Properti Investasi Gedung dan Bangunan

Per 31 Desember 2025

No.	OPD	Golongan Barang	SALDO AWAL (31 Desember 2024)	JUMLAH MUTASI TAMBAH	JUMLAH MUTASI KURANG	SALDO AKHIR (31 Desember 2025)
			ASET TETAP	ASET TETAP	ASET TETAP	ASET TETAP
1	Dinas Pendidikan	PI GB	-	-	-	-
2	Dinas Kesehatan	PI GB	-	-	-	-
3	Rumah Sakit Umum Daerah (PD)	PI GB	-	-	-	-
4	Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD)	PI GB	-	-	-	-
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PI GB	-	-	-	-
6	Dinas Perumahan dan Permukiman	PI GB	-	-	-	-
7	Satuan Polisi Pamong Praja	PI GB	-	-	-	-
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	PI GB	-	-	-	-
9	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	PI GB	-	-	-	-
10	Dinas Sosial	PI GB	-	-	-	-
11	Dinas Tenaga Kerja	PI GB	-	-	-	-
12	Dinas Lingkungan Hidup	PI GB	-	-	-	-
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Tanah	PI GB	-	-	-	-
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	PI GB	-	-	-	-
15	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	PI GB	-	-	-	-
16	Dinas Perhubungan	PI GB	-	-	-	-
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	PI GB	-	-	-	-
18	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	PI GB	3.845.478.403,00	-	-	3.845.478.403,00
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	PI GB	-	-	-	-
20	Dinas Pemuda dan Olahraga	PI GB	-	-	-	-
21	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	PI GB	-	-	-	-
22	Dinas Arsip dan Perpustakaan	PI GB	-	-	-	-
23	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	PI GB	-	-	-	-
24	Sekretariat Daerah	PI GB	-	-	-	-
25	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	PI GB	-	-	-	-
26	Kecamatan Bogor Selatan	PI GB	-	-	-	-
27	Kecamatan Bogor Timur	PI GB	-	-	-	-
28	Kecamatan Bogor Tengah	PI GB	-	-	-	-
29	Kecamatan Bogor Barat	PI GB	-	-	-	-
30	Kecamatan Bogor Utara	PI GB	-	-	-	-
31	Kecamatan Tanah Sereal	PI GB	-	-	-	-
32	Inspektorat	PI GB	-	-	-	-
33	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	PI GB	-	-	-	-
34	Badan Keuangan dan Aset Daerah	PI GB	-	-	-	-
35	Badan Pendapatan Daerah	PI GB	-	-	-	-
36	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur	PI GB	-	-	-	-
37	PPKD	PI GB	563.008.000,00	-	-	563.008.000,00
38	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	PI GB	-	-	-	-
39	Total	PI GB	4.408.486.403,00	-	-	4.408.486.403,00

PEMERINTAH KOTA BOGOR
Tagihan Penjualan Angsuran
Per 31 Desember 2025

No	Uraian	Nilai (Rp)
	TAGIHAN PENJUALAN ANGSURAN	
1	Penjualan Rumah Golongan III	5.491.595,00
2	Penjualan Kendaraan Roda Dua	4.642.470,00
3	Penjualan Kendaraan Roda Empat	15.442.500,00
	Jumlah I	25.576.565,00
4	Penjualan Tanah Eks Tanah Sewa :	
	- Kelurahan Kebon Pedes	39.394.531,00
	- Kelurahan Babakan Pasar	75.467.167,00
	- Kelurahan Sukasari	609.600.409,00
	Jumlah II	724.462.107,00
	J u m l a h (I dan II)	750.038.672,00

**KERTAS KERJA PENDAPATAN HASIL PENJUALAN TANAH
TAHUN ANGGARAN 2020 s.d 2025**

NO	NAMA	ALAMAT	NO SK PELEPASAN HAK	2025					SALDO AKHIR
				SALDO AWAL	POKOK	DENDA	JUMLAH	NO STS	
1	Naniek Sri Mulyani	KEBON PEDES	593.1.45-234/2001	1.368.000,00					1.368.000,00
2	Suwantoro	KEBON PEDES	593.1.45-234/2001	1.260.000,00					1.260.000,00
3	Suparman	KEBON PEDES	593.1.45-234/2001	1.078.000,00					1.078.000,00
4	Suparmi	KEBON PEDES	593.1.45-234/2001	-					-
5	Kusnadi bin Tahir	KEBON PEDES	593.1.45-234/2001	916.441,00					916.441,00
6	Suparmi binti Atmowirejo	KEBON PEDES	593.1.45-234/2001	2.085.950,00					2.085.950,00
7	Saiful Fikri	KEBON PEDES	593.1.45-234/2001	6.994.550,00					6.994.550,00
8	Sani binti Inan	KEBON PEDES	593.1.45-234/2001	900.000,00					900.000,00
9	Kristiantoro	KEBON PEDES	593.1.45-234/2001	618.700,00					618.700,00
10	Marnas binti Saaran	KEBON PEDES	593.1.45-234/2001	4.777.000,00					4.777.000,00
11	Junaedi bin Suharja	KEBON PEDES	593.1.45-234/2001	731.400,00					731.400,00
12	Usman bin Sanusi	KEBON PEDES	593.1.45-234/2001	2.226.000,00					2.226.000,00
13	Sarmijo bin Maryo	KEBON PEDES	593.1.45-234/2001	-					-
14	Agustinus Mulyadi	KEBON PEDES	593.1.45-234/2001	4.054.300,00					4.054.300,00
15	Ujang Suratman	KEBON PEDES	593.1.45-234/2001	1.927.000,00					1.927.000,00
16	Dadang	KEBON PEDES	593.1.45-234/2001	2.073.000,00					2.073.000,00
17	H. Yusep Supriatna	KEBON PEDES	593.1.45-234/2001	1.915.130,00					1.915.130,00
18	R. Suhartono. HS	KEBON PEDES	593.1.45-234/2001	1.383.200,00					1.383.200,00
19	Siti Djuhaeni	KEBON PEDES	593.1.45-234/2001	1.121.950,00					1.121.950,00
20	Ismiyati Soeroso	KEBON PEDES	593.1.45-234/2001	1.120.000,00					1.120.000,00
21	Suwandi	KEBON PEDES	593.1.45-234/2001	1.054.500,00					1.054.500,00
22	Mista	KEBON PEDES	593.1.45-234/2001	948.000,00					948.000,00
23	Woro Gontoro	KEBON PEDES	593.1.45-234/2001	770.000,00					770.000,00
24	Maemunah	KEBON PEDES	593.1.45-234/2001	71.410,00					71.410,00
25	Obay Sobari	BABAKAN PASAR	593.1-45-164/2002	3.398.900,00					3.398.900,00
26	Udin Saepudin	BABAKAN PASAR	593.1-45-164/2002	-					-
27	Yuliah	BABAKAN PASAR	593.1-45-164/2002	1.881.000,00					1.881.000,00

NO	NAMA	ALAMAT	NO SK PELEPASAN HAK						SALDO AKHIR
				2025					
				SALDO AWAL	POKOK	DENDA	JUMLAH	NO STS	
28	Maja	BABAKAN PASAR	<u>593.1-45-164/2002</u>	-					-
29	Ocah	BABAKAN PASAR	<u>593.1-45-164/2002</u>	-					-
30	Idris	BABAKAN PASAR	<u>593.1-45-164/2002</u>	43.900,00					43.900,00
31	M. Yusuf	BABAKAN PASAR	<u>593.1-45-164/2002</u>	-					-
32	Soleh Maison	BABAKAN PASAR	<u>593.1-45-164/2002</u>	905.600,00					905.600,00
33	Komarudin	BABAKAN PASAR	<u>593.1-45-164/2002</u>	-					-
34	Achmad Sapei	BABAKAN PASAR	<u>593.1-45-164/2002</u>	4.503.000,00					4.503.000,00
35	Nijar	BABAKAN PASAR	<u>593.1-45-164/2002</u>	-					-
36	Romsah	BABAKAN PASAR	<u>593.1-45-164/2002</u>	-					-
37	Ajum	BABAKAN PASAR	<u>593.1-45-164/2002</u>	1.196.000,00					1.196.000,00
38	Eros	BABAKAN PASAR	<u>593.1-45-164/2002</u>	-					-
39	Alik	BABAKAN PASAR	<u>593.1-45-164/2002</u>	-					-
40	Suminta	BABAKAN PASAR	<u>593.1-45-164/2002</u>	-					-
41	Suhadi	BABAKAN PASAR	<u>593.1-45-164/2002</u>	-					-
42	Rohati	BABAKAN PASAR	<u>593.1-45-164/2002</u>	-					-
43	Sudarsih	BABAKAN PASAR	<u>593.1-45-164/2002</u>	3.328.000,00					3.328.000,00
44	Udin Samsudin SP	BABAKAN PASAR	<u>593.1-45-164/2002</u>	-					-
45	Dede Samsiah	BABAKAN PASAR	<u>593.1-45-164/2002</u>	1.456.000,00					1.456.000,00
46	Ridwan	BABAKAN PASAR	<u>593.1-45-164/2002</u>	-					-
47	Jariato	BABAKAN PASAR	<u>593.1-45-164/2002</u>	-					-
48	Iyoh	BABAKAN PASAR	<u>593.1-45-164/2002</u>	643.000,00					643.000,00
49	A.Adang	BABAKAN PASAR	<u>593.1-45-164/2002</u>	949.400,00					949.400,00
50	Hiroh	BABAKAN PASAR	<u>593.1-45-164/2002</u>	-					-
51	Nyai Sanih	BABAKAN PASAR	<u>593.1-45-164/2002</u>	1.081.000,00					1.081.000,00
52	Aan Rasiah	BABAKAN PASAR	<u>593.1-45-164/2002</u>	4.912.450,00	4.912.450,00	1.225.500,00	6.137.950		-
53	Tacis	BABAKAN PASAR	<u>593.1-45-164/2002</u>	-					-
54	Maryani	BABAKAN PASAR	<u>593.1-45-164/2002</u>	-					-
55	Mad Isak	BABAKAN PASAR	<u>593.1-45-164/2002</u>	273.000,00					273.000,00
56	Wawang Anwar	BABAKAN PASAR	<u>593.1-45-164/2002</u>	-					-
57	Darma	BABAKAN PASAR	<u>593.1-45-164/2002</u>	-					-
58	Ujang Juma	BABAKAN PASAR	<u>593.1-45-164/2002</u>	-					-

NO	NAMA	ALAMAT	NO SK PELEPASAN HAK						SALDO AKHIR
				2025					
				SALDO AWAL	POKOK	DENDA	JUMLAH	NO STS	
59	Suhaman	BABAKAN PASAR	593.1-45-164/2002	615.000,00					615.000,00
60	Martinah	BABAKAN PASAR	593.1-45-164/2002	768.000,00					768.000,00
61	Edy Maryadi	BABAKAN PASAR	593.1-45-164/2002	468.000,00					468.000,00
62	Panali	BABAKAN PASAR	593.1-45-164/2002	1.580.800,00					1.580.800,00
63	Hardani	BABAKAN PASAR	593.1-45-164/2002	1.560.000,00					1.560.000,00
64	Iyah	BABAKAN PASAR	593.1-45-164/2002	-					-
65	Sopiah	BABAKAN PASAR	593.1-45-164/2002	(140.000,00)					(140.000,00)
66	Minarti	BABAKAN PASAR	593.1-45-164/2002	-					-
67	Doni Hadni	BABAKAN PASAR	593.1-45-164/2002	1.042.700,00					1.042.700,00
68	Juarsah	BABAKAN PASAR	593.1-45-164/2002	650.600,00					650.600,00
69	Lisnawati	BABAKAN PASAR	593.1-45-164/2002	5.947.000,00					5.947.000,00
70	Mariah	BABAKAN PASAR	593.1-45-164/2002	3.933.000,00					3.933.000,00
71	Karwita	BABAKAN PASAR	593.1-45-164/2002	-					-
72	Turinah	BABAKAN PASAR	593.1-45-164/2002	2.337.000,00					2.337.000,00
73	Jenab	BABAKAN PASAR	593.1-45-164/2002	-					-
74	Acih	BABAKAN PASAR	593.1-45-164/2002	-					-
75	Amta	BABAKAN PASAR	593.1-45-164/2002	1.145.317,00					1.145.317,00
76	Oma Suminta	BABAKAN PASAR	593.1-45-164/2002	1.000.000,00					1.000.000,00
77	Apendi	BABAKAN PASAR	593.1-45-164/2002	-					-
78	Sugandi	BABAKAN PASAR	593.1-45-164/2002	2.274.300,00					2.274.300,00
79	Aras	BABAKAN PASAR	593.1-45-164/2002	3.411.450,00					3.411.450,00
80	Eneng	BABAKAN PASAR	593.1-45-164/2002	5.963.000,00					5.963.000,00
81	Dedi Supriadi	BABAKAN PASAR	593.1-45-164/2002	852.000,00					852.000,00
82	Titin De Giok Tin	BABAKAN PASAR	593.1-45-164/2002	2.337.000,00					2.337.000,00
83	Iyos Rusyadi	BABAKAN PASAR	593.1-45-164/2002	1.490.200,00					1.490.200,00
84	Rudiawan	BABAKAN PASAR	593.1-45-164/2002	-					-
85	Komariah	BABAKAN PASAR	593.1-45-164/2002	1.289.800,00					1.289.800,00
86	S. Hasim	BABAKAN PASAR	593.1-45-164/2002	3.363.000,00					3.363.000,00
87	Samiun	BABAKAN PASAR	593.1-45-164/2002	-					-
88	Enih	BABAKAN PASAR	593.1-45-164/2002	-					-
89	B. Suminta	BABAKAN PASAR	593.1-45-164/2002	-					-

NO	NAMA	ALAMAT	NO SK PELEPASAN HAK						SALDO AKHIR
				2025					
				SALDO AWAL	POKOK	DENDA	JUMLAH	NO STS	
90	Ujang Tirta	BABAKAN PASAR	<u>593.1-45-164/2002</u>	2.288.000,00					2.288.000,00
91	Mahati	BABAKAN PASAR	<u>593.1-45-164/2002</u>	1.086.800,00					1.086.800,00
92	Rustini	BABAKAN PASAR	<u>593.1-45-164/2002</u>	1.508.000,00					1.508.000,00
93	Husen	BABAKAN PASAR	<u>593.1-45-164/2002</u>	-					-
94	Atika. S	BABAKAN PASAR	<u>593.1-45-164/2002</u>	1.037.400,00					1.037.400,00
95	Ramli	BABAKAN PASAR	<u>593.1-45-164/2002</u>	912.000,00					912.000,00
96	Thio Ong Nio	BABAKAN PASAR	<u>593.1-45-164/2002</u>	-					-
97	Djadja Dinata Budiman	BABAKAN PASAR	<u>593.1-45-164/2002</u>	-					-
98	Mimin Sumintarsih	BABAKAN PASAR	<u>593.1-45-164/2002</u>	7.088.000,00					7.088.000,00
99	Asik	SUKASARI	<u>593.45-141/2003</u>	-					-
100	Unayani Raharja	SUKASARI	<u>593.45-141/2003</u>	1.500.000,00					1.500.000,00
101	Tuti Haryani	SUKASARI	<u>593.45-141/2003</u>	3.370.650,00					3.370.650,00
102	Titi Asilan	SUKASARI	<u>593.45-141/2003</u>	4.629.800,00					4.629.800,00
103	Nunung Nurhayati	SUKASARI	<u>593.45-141/2003</u>	1.114.800,00					1.114.800,00
104	Nipan	SUKASARI	<u>593.45-141/2003</u>	5.574.800,00					5.574.800,00
105	Darhi	SUKASARI	<u>593.45-141/2003</u>	-					-
106	Asyiah Sopandi	SUKASARI	<u>593.45-141/2003</u>	1.998.772,00					1.998.772,00
107	Asyiah Sopandi	SUKASARI	<u>593.45-141/2003</u>	3.704.200,00					3.704.200,00
108	Siti Mariyam	SUKASARI	<u>593.45-141/2003</u>	5.249.600,00					5.249.600,00
109	Priono	SUKASARI	<u>593.45-141/2003</u>	7.695.000,00					7.695.000,00
110	Ujang Misja	SUKASARI	<u>593.45-141/2003</u>	3.311.100,00	3.311.100,00	-	3.311.100		-
111	Anang	SUKASARI	<u>593.45-141/2003</u>	5.876.000,00					5.876.000,00
112	Marsani	SUKASARI	<u>593.45-141/2003</u>	2.707.495,00					2.707.495,00
113	Drs. Anwar Sanusi	SUKASARI	<u>593.45-141/2003</u>	-					-
114	Rd. Yoyo Soraya	SUKASARI	<u>593.45-141/2003</u>	879.600,00					879.600,00
115	Maemunah	SUKASARI	<u>593.45-141/2003</u>	1.290.900,00					1.290.900,00
116	Dede Herni	SUKASARI	<u>593.45-141/2003</u>	(195.300,00)					(195.300,00)
117	Rasil	SUKASARI	<u>593.45-141/2003</u>	(320.400,00)					(320.400,00)
118	Zaenal Abidin	SUKASARI	<u>593.45-141/2003</u>	11.149.350,00					11.149.350,00
119	Cicih	SUKASARI	<u>593.45-141/2003</u>	3.053.600,00					3.053.600,00
120	Fauzi Abli	SUKASARI	<u>593.45-141/2003</u>	3.352.300,00					3.352.300,00

NO	NAMA	ALAMAT	NO SK PELEPASAN HAK						SALDO AKHIR
				2025					
				SALDO AWAL	POKOK	DENDA	JUMLAH	NO STS	
121	Herpandi Fauzi	SUKASARI	<u>593.45-141/2003</u>	2.470.000,00					2.470.000,00
122	Hj. Ning Tresnaningsih	SUKASARI	<u>593.45-141/2003</u>	6.580.400,00					6.580.400,00
123	Sekarmiati	SUKASARI	<u>593.45-141/2003</u>	1.155.000,00	1.155.000,00	721.600,00	1.876.600	3271254020000046	-
124	Hendi Nata Prawira	SUKASARI	<u>593.45-141/2003</u>	3.334.000,00					3.334.000,00
125	Jhony Candra Lingga	SUKASARI	<u>593.45-141/2003</u>	2.915.000,00					2.915.000,00
126	Narsih	SUKASARI	<u>593.45-141/2003</u>	713.230,00					713.230,00
127	Eman Sulaeman	SUKASARI	<u>593.45-141/2003</u>	-					-
128	Amuh	SUKASARI	<u>593.45-141/2003</u>	9.165.600,00					9.165.600,00
129	M. Yusuf	SUKASARI	<u>593.45-141/2003</u>	-					-
130	Canang	SUKASARI	<u>593.45-141/2003</u>	3.120.000,00					3.120.000,00
131	Johanes Simauw	SUKASARI	<u>593.45-141/2003</u>	2.913.000,00					2.913.000,00
132	Naim Kusnadi	SUKASARI	<u>593.45-141/2003</u>	9.981.700,00					9.981.700,00
133	Oma Suramiharja	SUKASARI	<u>593.45-141/2003</u>	1.388.750,00					1.388.750,00
134	Adip Madsahri	SUKASARI	<u>593.45-141/2003</u>	(306.210,00)					(306.210,00)
135	E. Sukarsih	SUKASARI	<u>593.45-141/2003</u>	13.333.000,00					13.333.000,00
136	Harris Wibawa	SUKASARI	<u>593.45-141/2003</u>	1.290.100,00					1.290.100,00
137	Amirudin	SUKASARI	<u>593.45-141/2003</u>	5.379.000,00					5.379.000,00
138	Agus Rahman	SUKASARI	<u>593.45-141/2003</u>	4.972.700,00					4.972.700,00
139	Endang Hidayat	SUKASARI	<u>593.45-141/2003</u>	5.988.000,00					5.988.000,00
140	Isak Gievan Eljapa	SUKASARI	<u>593.45-141/2003</u>	1.185.600,00					1.185.600,00
141	Monica Herawati Soekanto	SUKASARI	<u>593.45-141/2003</u>	20.683.000,00					20.683.000,00
142	Kasiyanto	SUKASARI	<u>593.45-141/2003</u>	2.906.600,00					2.906.600,00
143	Afendi	SUKASARI	<u>593.45-141/2003</u>	4.680.000,00					4.680.000,00
144	Samsu	SUKASARI	<u>593.45-141/2003</u>	1.366.100,00					1.366.100,00
145	Etty. S	SUKASARI	<u>593.45-141/2003</u>	1.449.600,00					1.449.600,00
146	Didin Tarmidi	SUKASARI	<u>593.45-141/2003</u>	4.709.800,00					4.709.800,00
147	Nani	SUKASARI	<u>593.45-141/2003</u>	7.014.800,00					7.014.800,00
148	Multini Senggani	SUKASARI	<u>593.45-141/2003</u>	-					-
149	Taryati	SUKASARI	<u>593.45-141/2003</u>	12.255.000,00					12.255.000,00
150	Dicky Sugiri Herlambang	SUKASARI	<u>593.45-141/2003</u>	3.264.000,00	3.264.000,00	955.320,00	4.219.320		-
151	Ani	SUKASARI	<u>593.45-141/2003</u>	5.927.450,00					5.927.450,00

NO	NAMA	ALAMAT	NO SK PELEPASAN HAK						SALDO AKHIR
				2025					
				SALDO AWAL	POKOK	DENDA	JUMLAH	NO STS	
152	Nancy Sahertian	SUKASARI	593.45-141/2003	12.026.000,00					12.026.000,00
153	H. Thomas Hidayat,Smhk	SUKASARI	593.45-141/2003	12.750.000,00					12.750.000,00
154	Indriyati Pradewi	SUKASARI	593.45-141/2003	3.904.950,00					3.904.950,00
155	Yuliana	SUKASARI	593.45-141/2003	7.533.500,00					7.533.500,00
156	Ade Rohendi	SUKASARI	593.45-141/2003	1.424.150,00					1.424.150,00
157	Tabrani	SUKASARI	593.45-141/2003	1.359.850,00					1.359.850,00
158	Selamet Eryadi	SUKASARI	593.45-141/2003	13.449.550,00					13.449.550,00
159	Yunus Ramdani Sasmita	SUKASARI	593.45-141/2003	1.427.400,00					1.427.400,00
160	Mas Muharam Somasasmita	SUKASARI	593.45-141/2003	1.539.425,00					1.539.425,00
161	Hanan	SUKASARI	593.45-141/2003	5.155.575,00					5.155.575,00
162	Usman Bin Iming	SUKASARI	593.45-141/2003	1.566.550,00					1.566.550,00
163	Eka Mulyadi	SUKASARI	593.45-141/2003	1.787.375,00					1.787.375,00
164	Suyati	SUKASARI	593.45-141/2003	2.735.025,00					2.735.025,00
165	Hj. Hindun	SUKASARI	593.45-141/2003	1.063.300,00					1.063.300,00
166	H. Kosasih	SUKASARI	593.45-141/2003	-					-
167	Jajuli Alamsyah	SUKASARI	593.45-141/2003	1.118.725,00					1.118.725,00
168	Goenawan	SUKASARI	593.45-141/2003	1.113.600,00					1.113.600,00
169	Surniawati	SUKASARI	593.45-141/2003	1.632.000,00					1.632.000,00
170	Andi Tirta Kustaryo	SUKASARI	593.45-141/2003	2.380.200,00					2.380.200,00
171	Kumala Ningsih	SUKASARI	593.45-141/2003	1.198.150,00					1.198.150,00
172	Cyntia Indra	SUKASARI	593.45-141/2003	2.677.000,00					2.677.000,00
173	Anna	SUKASARI	593.45-141/2003	4.857.600,00					4.857.600,00
174	Tjoa Leng Eng	SUKASARI	593.45-141/2003	(307.520,00)					(307.520,00)
175	Maksum Muhanip	SUKASARI	593.45-141/2003	1.718.650,00					1.718.650,00
176	Romlah	SUKASARI	593.45-141/2003	3.275.075,00					3.275.075,00
177	Rukiah	SUKASARI	593.45-141/2003	6.290.000,00					6.290.000,00
178	Wahyudin	SUKASARI	593.45-141/2003	7.836.200,00	7.996.900,00	1.816.250,00	9.813.150		(160.700,00)
179	M. Rifai	SUKASARI	593.45-141/2003	3.592.340,00					3.592.340,00
180	Tjoa Enih	SUKASARI	593.45-141/2003	-					-
181	Tuti Rusmiati	SUKASARI	593.45-141/2003	2.562.000,00					2.562.000,00
182	Karmilah	SUKASARI	593.45-141/2003	-					-

NO	NAMA	ALAMAT	NO SK PELEPASAN HAK	2025					SALDO AKHIR
				SALDO AWAL	POKOK	DENDA	JUMLAH	NO STS	
183	Uriyah	SUKASARI	<u>593.45-141/2003</u>	1.128.500,00					1.128.500,00
184	Naning Dulgani	SUKASARI	<u>593.45-141/2003</u>	8.279.250,00					8.279.250,00
185	Supardi	SUKASARI	<u>593.45-141/2003</u>	1.575.200,00					1.575.200,00
186	Rudi Supandi	SUKASARI	<u>593.45-141/2003</u>	175.000,00					175.000,00
187	Husen	SUKASARI	<u>593.45-141/2003</u>	637.450,00					637.450,00
188	Atma Wiguna	SUKASARI	<u>593.45-141/2003</u>	823.500,00					823.500,00
189	Romli	SUKASARI	<u>593.45-141/2003</u>	1.098.000,00					1.098.000,00
190	Kasyati	SUKASARI	<u>593.45-141/2003</u>	1.376.850,00					1.376.850,00
191	Iwan Suryadi	SUKASARI	<u>593.45-141/2003</u>	1.912.350,00					1.912.350,00
192	R Oy	SUKASARI	<u>593.45-141/2003</u>	1.014.125,00					1.014.125,00
193	Eri Wihaningsih	SUKASARI	<u>593.45-141/2003</u>	2.346.975,00					2.346.975,00
194	Kemed	SUKASARI	<u>593.45-141/2003</u>	1.151.850,00					1.151.850,00
195	Acih	SUKASARI	<u>593.45-141/2003</u>	927.150,00					927.150,00
196	Titin	SUKASARI	<u>593.45-141/2003</u>	1.372.500,00					1.372.500,00
197	Anda Suhandana	SUKASARI	<u>593.45-141/2003</u>	785.125,00					785.125,00
198	Nari	SUKASARI	<u>593.45-141/2003</u>	118.170,00					118.170,00
199	Anwar Rudi	SUKASARI	<u>593.45-141/2003</u>	4.389.000,00					4.389.000,00
200	Mad Soleh	SUKASARI	<u>593.45-141/2003</u>	-					-
201	Ita Rosita	SUKASARI	<u>593.45-141/2003</u>	138.275,00					138.275,00
202	Supendi	SUKASARI	<u>593.45-141/2003</u>	858.159,00					858.159,00
203	Atma Senjaya	SUKASARI	<u>593.45-141/2003</u>	1.796.450,00					1.796.450,00
204	Acep Warta	SUKASARI	<u>593.45-141/2003</u>	165.200,00					165.200,00
205	Arifin	SUKASARI	<u>593.45-141/2003</u>	287.999,00					287.999,00
206	Moch. Kahfi	SUKASARI	<u>593.45-141/2003</u>	300.000,00					300.000,00
207	Madsa	SUKASARI	<u>593.45-141/2003</u>	1.030.000,00					1.030.000,00
208	Rasmini	SUKASARI	<u>593.45-141/2003</u>	1.259.675,00					1.259.675,00
209	Moch. Adih	SUKASARI	<u>593.45-141/2003</u>	300.000,00					300.000,00
210	Fery Arisnurdin	SUKASARI	<u>593.45-141/2003</u>	631.400,00					631.400,00
211	Padulianawati	SUKASARI	<u>593.45-141/2003</u>	3.586.000,00					3.586.000,00
212	Soleh	SUKASARI	<u>593.45-141/2003</u>	1.152.200,00					1.152.200,00
213	H. Madjmunasir	SUKASARI	<u>593.45-141/2003</u>	477.675,00					477.675,00

NO	NAMA	ALAMAT	NO SK PELEPASAN HAK						SALDO AKHIR
				2025					
				SALDO AWAL	POKOK	DENDA	JUMLAH	NO STS	
214	Mamah Ati	SUKASARI	593.45-141/2003	8.165.000,00					8.165.000,00
215	Sopiah	SUKASARI	593.45-141/2003	1.390.800,00					1.390.800,00
216	Hodijah	SUKASARI	593.45-141/2003	854.000,00					854.000,00
217	Mama	SUKASARI	593.45-141/2003	18.000,00					18.000,00
218	Erlina	SUKASARI	593.45-141/2003	31.550,00					31.550,00
219	Juju Juariah	SUKASARI	593.45-141/2003	546.700,00					546.700,00
220	A. Syahroni	SUKASARI	593.45-141/2003	88.140,00					88.140,00
221	Hj. Yayah Komariah	SUKASARI	593.45-141/2003	1.767.475,00					1.767.475,00
222	Sirod	SUKASARI	593.45-141/2003	10.000,00					10.000,00
223	Sirod	SUKASARI	593.45-141/2003	110.501,00					110.501,00
224	Sopiah	SUKASARI	593.45-141/2003	187.500,00					187.500,00
225	Widarti	SUKASARI	593.45-141/2003	2.760.450,00					2.760.450,00
226	Heniawati	SUKASARI	593.45-141/2003	670.400,00					670.400,00
227	Mimi Suwarmi	SUKASARI	593.45-141/2003	176.000,00					176.000,00
228	Rukiah	SUKASARI	593.45-141/2003	535.000,00					535.000,00
229	Yayang Uriah	SUKASARI	593.45-141/2003	19.365,00					19.365,00
230	Sukarsah	SUKASARI	593.45-141/2003	148.075,00					148.075,00
231	Salmah	SUKASARI	593.45-141/2003	14.700,00					14.700,00
232	Siti Sriasih	SUKASARI	593.45-141/2003	553.100,00					553.100,00
233	Gunawan Hidayat	SUKASARI	593.45-141/2003	227.500,00					227.500,00
234	Leny Silawaty	SUKASARI	593.45-141/2003	3.075.600,00					3.075.600,00
235	A. Supriatna	SUKASARI	593.45-141/2003	10.742.250,00					10.742.250,00
236	Hj. Ema Setiawati	SUKASARI	593.45-141/2003	2.479.250,00					2.479.250,00
237	Boeng Suhendi	SUKASARI	593.45-141/2003	1.387.750,00					1.387.750,00
238	Achmad Suwarta	SUKASARI	593.45-141/2003	429.600,00					429.600,00
239	Hj. Siti Sarah	SUKASARI	593.45-141/2003	1.685.900,00					1.685.900,00
240	H. Madjmunasir	SUKASARI	593.45-141/2003	3.662.500,00					3.662.500,00
241	Sudirja	SUKASARI	593.45-141/2003	1.500.000,00					1.500.000,00
242	H. Sulaeman Suwarta	SUKASARI	593.45-141/2003	6.615.650,00					6.615.650,00
243	Hj. Siti Sarah	SUKASARI	593.45-141/2003	161.100,00					161.100,00
244	M. Supri	SUKASARI	593.45-141/2003	-					-

NO	NAMA	ALAMAT	NO SK PELEPASAN HAK						SALDO AKHIR
				2025					
				SALDO AWAL	POKOK	DENDA	JUMLAH	NO STS	
245	Kartini	SUKASARI	<u>593.45-141/2003</u>	3.853.675,00					3.853.675,00
246	Jubaedah	SUKASARI	<u>593.45-141/2003</u>	467.075,00					467.075,00
247	M. Sapri	SUKASARI	<u>593.45-141/2003</u>	665.400,00					665.400,00
248	Iding. S	SUKASARI	<u>593.45-141/2003</u>	1.525.000,00					1.525.000,00
249	Nanah Marnah	SUKASARI	<u>593.45-141/2003</u>	147.000,00					147.000,00
250	Chandrawati	SUKASARI	<u>593.45-141/2003</u>	-					-
251	Alfiah	SUKASARI	<u>593.45-141/2003</u>	1.303.875,00					1.303.875,00
252	Zueni	SUKASARI	<u>593.45-141/2003</u>	811.300,00					811.300,00
253	Saiman	SUKASARI	<u>593.45-141/2003</u>	1.728.400,00					1.728.400,00
254	Thomas Huri	SUKASARI	<u>593.45-141/2003</u>	956.175,00					956.175,00
255	Yani Wijaya	SUKASARI	<u>593.45-141/2003</u>	1.339.300,00					1.339.300,00
256	Nining Yuharningsih	SUKASARI	<u>593.45-141/2003</u>	1.342.000,00					1.342.000,00
257	Syarifah	SUKASARI	<u>593.45-141/2003</u>	862.000,00					862.000,00
258	Sutrisna	SUKASARI	<u>593.45-141/2003</u>	521.550,00					521.550,00
259	Enoh Hermawan	SUKASARI	<u>593.45-141/2003</u>	6.907.875,00					6.907.875,00
260	H. Hasan	SUKASARI	<u>593.45-141/2003</u>	1.022.000,00					1.022.000,00
261	Nawawi	SUKASARI	<u>593.45-141/2003</u>	3.371.400,00					3.371.400,00
262	Hiana Liman	SUKASARI	<u>593.45-141/2003</u>	419.400,00					419.400,00
263	Enjuh Junaedi	SUKASARI	<u>593.45-141/2003</u>	2.282.125,00					2.282.125,00
264	Dodo Sunardi	SUKASARI	<u>593.45-141/2003</u>	4.258.095,00					4.258.095,00
265	Han. S	SUKASARI	<u>593.45-141/2003</u>	166.900,00					166.900,00
266	Yeyen Yuhaemi	SUKASARI	<u>593.45-141/2003</u>	231.800,00					231.800,00
267	Supardi	SUKASARI	<u>593.45-141/2003</u>	1.060.800,00					1.060.800,00
268	Siti Tutianah	SUKASARI	<u>593.45-141/2003</u>	368.000,00					368.000,00
269	Achmad Dana	SUKASARI	<u>593.45-141/2003</u>	4.942.750,00					4.942.750,00
270	Farida	SUKASARI	<u>593.45-141/2003</u>	91.300,00					91.300,00
271	Rogoyah	SUKASARI	<u>593.45-141/2003</u>	284.490,00					284.490,00
272	Achmad Halimi	SUKASARI	<u>593.45-141/2003</u>	(465.445,00)					(465.445,00)
273	Hindun	SUKASARI	<u>593.45-141/2003</u>	(796.465,00)					(796.465,00)
274	Eha	SUKASARI	<u>593.45-141/2003</u>	211.000,00					211.000,00
275	Toing	SUKASARI	<u>593.45-141/2003</u>	539.710,00					539.710,00

NO	NAMA	ALAMAT	NO SK PELEPASAN HAK						SALDO AKHIR
				2025					
				SALDO AWAL	POKOK	DENDA	JUMLAH	NO STS	
276	Holisah	SUKASARI	<u>593.45-141/2003</u>	1.402.725,00					1.402.725,00
277	Saroh	SUKASARI	<u>593.45-141/2003</u>	-					-
278	Hamim Yoly	SUKASARI	<u>593.45-141/2003</u>	630.000,00					630.000,00
279	Ujang Suryadi	SUKASARI	<u>593.45-141/2003</u>	94.800,00					94.800,00
280	Endjang	SUKASARI	<u>593.45-141/2003</u>	402.000,00					402.000,00
281	Uceng Supriadi	SUKASARI	<u>593.45-141/2003</u>	823.500,00					823.500,00
282	Anda Suhandana	SUKASARI	<u>593.45-141/2003</u>	147.765,00					147.765,00
283	Neneng Juhana	SUKASARI	<u>593.45-141/2003</u>	434.625,00					434.625,00
284	Dra. Mariam Herawati	SUKASARI	<u>593.45-141/2003</u>	8.107.000,00					8.107.000,00
285	Memed Bin Saroji	SUKASARI	<u>593.45-141/2003</u>	624.000,00					624.000,00
286	Moch Yusuf	SUKASARI	<u>593.45-141/2003</u>	39.400,00					39.400,00
287	Yaya	SUKASARI	<u>593.45-141/2003</u>	294.000,00					294.000,00
288	Aja	SUKASARI	<u>593.45-141/2003</u>	24.000,00					24.000,00
289	Erlih	SUKASARI	<u>593.45-141/2003</u>	172.000,00					172.000,00
290	Abdurahman	SUKASARI	<u>593.45-141/2003</u>	440.425,00					440.425,00
291	Suparja	SUKASARI	<u>593.45-141/2003</u>	3.158.275,00					3.158.275,00
292	Dadang Suryadi	SUKASARI	<u>593.45-141/2003</u>	237.370,00					237.370,00
293	H. Sirodjudin	SUKASARI	<u>593.45-141/2003</u>	64.050,00					64.050,00
294	Sentosa Lonardi	SUKASARI	<u>593.45-141/2003</u>	300.000,00					300.000,00
295	Imam Bayudi	SUKASARI	<u>593.45-141/2003</u>	637.450,00					637.450,00
296	Imam Wahyudi	SUKASARI	<u>593.45-141/2003</u>	514.350,00					514.350,00
297	Acun Jayadi	SUKASARI	<u>593.45-141/2003</u>	8.505.000,00					8.505.000,00
298	H. Nursyamsi	SUKASARI	<u>593.45-141/2003</u>	9.000,00					9.000,00
299	Dra. Hj. Mariam Herawati	SUKASARI	<u>593.45-141/2003</u>	12.390.000,00					12.390.000,00
300	Eni Nuraeni	SUKASARI	<u>593.45-141/2003</u>	211.525,00					211.525,00
301	Mad Kosih	SUKASARI	<u>593.45-141/2003</u>	86.100,00					86.100,00
302	Wahyudin	SUKASARI	<u>593.45-141/2003</u>	673.300,00					673.300,00
303	Herni Sutini	SUKASARI	<u>593.45-141/2003</u>	218.400,00					218.400,00
304	Hj. Siti Maemunah	SUKASARI	<u>593.45-141/2003</u>	805.100,00					805.100,00
305	Taufik Jaya. K	SUKASARI	<u>593.45-141/2003</u>	1.703.400,00					1.703.400,00
306	Yuyuh Murdianti	SUKASARI	<u>593.45-141/2003</u>	(1.614.535,00)					(1.614.535,00)

NO	NAMA	ALAMAT	NO SK PELEPASAN HAK	2025					SALDO AKHIR
				SALDO AWAL	POKOK	DENDA	JUMLAH	NO STS	
307	Hendriati	SUKASARI	<u>593.45-141/2003</u>	750.200,00					750.200,00
308	Hio Giok Hwa	SUKASARI	<u>593.45-141/2003</u>	518.700,00					518.700,00
309	Mimi. S	SUKASARI	<u>593.45-141/2003</u>	26.000,00					26.000,00
310	Ujang Wawan	SUKASARI	<u>593.45-141/2003</u>	1.130.400,00					1.130.400,00
311	Hasiro Bunyamin	SUKASARI	<u>593.45-141/2003</u>	1.421.190,00					1.421.190,00
312	Sumartini	SUKASARI	<u>593.45-141/2003</u>	549.700,00					549.700,00
313	Halimi	SUKASARI	<u>593.45-141/2003</u>	105.000,00					105.000,00
314	Mad Tasik	SUKASARI	<u>593.45-141/2003</u>	160.000,00					160.000,00
315	Supriharno	SUKASARI	<u>593.45-141/2003</u>	420.400,00					420.400,00
316	M. Jamil Sulaeman Asaf,Sh	SUKASARI	<u>593.45-141/2003</u>	1.371.000,00					1.371.000,00
317	H. Karna Raipa	SUKASARI	<u>593.45-141/2003</u>	96.140,00					96.140,00
318	Atu. S	SUKASARI	<u>593.45-141/2003</u>	214.000,00					214.000,00
319	Suparti	SUKASARI	<u>593.45-141/2003</u>	456.000,00					456.000,00
320	Chodijah	SUKASARI	<u>593.45-141/2003</u>	235.700,00					235.700,00
321	Euis Mardianah	SUKASARI	<u>593.45-141/2003</u>	100.000,00					100.000,00
322	Djuarsih	SUKASARI	<u>593.45-141/2003</u>	128.000,00					128.000,00
323	Hj. Rukmanah	SUKASARI	<u>593.45-141/2003</u>	240.800,00					240.800,00
324	Manah Awing	SUKASARI	<u>593.45-141/2003</u>	11.513,00					11.513,00
325	Gana Bunyamin	SUKASARI	<u>593.45-141/2003</u>	211.200,00					211.200,00
326	Imong	SUKASARI	<u>593.45-141/2003</u>	1.494.500,00					1.494.500,00
327	Kokor	SUKASARI	<u>593.45-141/2003</u>	2.090.000,00					2.090.000,00
328	Wawan Danu Irawan	SUKASARI	<u>593.45-141/2003</u>	1.187.975,00					1.187.975,00
329	Titim Fatimah	SUKASARI	<u>593.45-141/2003</u>	2.030.400,00					2.030.400,00
330	Eman Sunarya	SUKASARI	<u>593.45-141/2003</u>	3.427.600,00					3.427.600,00
331	Muchtar Sujana	SUKASARI	<u>593.45-141/2003</u>	149.000,00					149.000,00
332	Supandi	SUKASARI	<u>593.45-141/2003</u>	414.525,00					414.525,00
333	H. Abing Madais	SUKASARI	<u>593.45-141/2003</u>	102.200,00					102.200,00
334	Mali	SUKASARI	<u>593.45-141/2003</u>	234.000,00					234.000,00
335	Erry Erwany Kasmi	SUKASARI	<u>593.45-141/2003</u>	174.000,00					174.000,00
336	H. Nait	SUKASARI	<u>593.45-141/2003</u>	1.973.000,00					1.973.000,00
337	Ramlan	SUKASARI	<u>593.45-141/2003</u>	564.350,00					564.350,00

NO	NAMA	ALAMAT	NO SK PELEPASAN HAK						SALDO AKHIR
				2025					
				SALDO AWAL	POKOK	DENDA	JUMLAH	NO STS	
338	Apendi Arie	SUKASARI	<u>593.45-141/2003</u>	823.500,00					823.500,00
339	Yetty Kobtiah	SUKASARI	<u>593.45-141/2003</u>	1.675.800,00					1.675.800,00
340	Sudiman Lbn Toruan	SUKASARI	<u>593.45-141/2003</u>	10.200.200,00					10.200.200,00
341	H. Aep Saepudin	SUKASARI	<u>593.45-141/2003</u>	29.258.000,00					29.258.000,00
342	Lilie Wuhardja	SUKASARI	<u>593.45-141/2003</u>	7.481.250,00					7.481.250,00
343	Lilie Wuhardja	SUKASARI	<u>593.45-141/2003</u>	2.188.800,00					2.188.800,00
344	Lilie Wuhardja	SUKASARI	<u>593.45-141/2003</u>	3.769.600,00					3.769.600,00
345	Lilie Wuhardja	SUKASARI	<u>593.45-141/2003</u>	(720.325,00)					(720.325,00)
346	Lilie Wuhardja	SUKASARI	<u>593.45-141/2003</u>	3.769.600,00					3.769.600,00
347	Unayani Raharja	SUKASARI	<u>593.45-141/2003</u>	29.190.000,00					29.190.000,00
348	H. Kosasih	SUKASARI	<u>593.45-141/2003</u>	653.800,00					653.800,00
349	Gunawan	SUKASARI	<u>593.45-141/2003</u>	8.461.740,00					8.461.740,00
350	Widaya Prawira	SUKASARI	<u>593.45-141/2003</u>	477.000,00					477.000,00
351	Atty Somadikarya	SUKASARI	<u>593.45-141/2003</u>	2.520.000,00					2.520.000,00
352	H. Ence Mumuh	SUKASARI	<u>593.45-141/2003</u>	4.120.000,00					4.120.000,00
353	Ratnawati Rangkuti	SUKASARI	<u>593.45-141/2003</u>	3.582.500,00					3.582.500,00
354	Tjiu Sen Lep	SUKASARI	<u>593.45-141/2003</u>	4.410.000,00					4.410.000,00
355	Grace Setiawati	SUKASARI	<u>593.45-141/2003</u>	152.500,00					152.500,00
356	Atty Somadikarya	SUKASARI	<u>593.45-141/2003</u>	1.268.400,00					1.268.400,00
357	Edy Ardy	SUKASARI	<u>593.45-141/2003</u>	1.580.000,00					1.580.000,00
358	Edy Ardy	SUKASARI	<u>593.45-141/2003</u>	1.972.000,00					1.972.000,00
JUMLAH				745.101.557	20.639.450	4.718.670	25.358.120		724.462.107

PEMERINTAH KOTA BOGOR
TANAH YANG DIMANFAATKAN PIHAK KETIGA
BANGUN, GUNA, SERAH (BGS)
PER 31 DESEMBER 2025

NO	LOKASI	TANAH MILIK PEMERINTAH KOTA BOGOR SEBAGAI OBJEK BANGUN, GUNA, SERAH (BGS)		BANGUNAN YANG DIKELOLA OLEH PIHAK KETIGA		PERJANJIAN KERJASAMA		JANGKA WAKTU PERJANJIAN	BATAS AKHIR PERJANJIAN
		LUAS TANAH	NILAI TANAH (Rp.)	LUAS BANGUNAN	NILAI BANGUNAN	MITRA BGS	NOMOR DAN TANGGAL PERJANJIAN		
1.	Tanah Pasar Kebon Kembang	6.054	4.871.684.310,00	13.806		PT. PROPINDO MULIA	1. Perjanjian Kerjasama Bagi Temnat Usaha	30 TAHUN	24/09/2027
						PT. PROPINDO MULIA	2. Addendum Perjanjian Kerjasama Bagi Temnat		
						PT. PROPINDO MULIA	3. Addendum Kedua Perjanjian Kerjasama Bagi		
						PT. PROPINDO MULIA	4. Addendum Ketiga Perjanjian Kerjasama		
						PT. PROPINDO MULIA	5. Addendum Keempat Perjanjian Kerjasama		
2.	Tanah Plaza Lippo Kebon Bawa	12.285	6.142.500.000,00	65.710		PT. BOGOR INTERNUSA	No. 511/21/Peri.01/Huk/2003 tentang	30 TAHUN	04/04/33
						PT. GIRIMULIA PERKASA	No. 640/Peri.32-BPKAD/2015 dan Nomor.001/LGL		
JUMLAH		18.339	11.014.184.310						

PEMERINTAH KOTA BOGOR
UTANG PERHITUNGAN PIHAK KETIGA
Per 31 Desember 2025

(Dalam Rp)

No	Nama SKPD	URAIAN	Saldo Utang per 31 Desember 2024	Penambahan 2024	Pengurangan / Pembayaran	Saldo Utang Per 31 Desember 2025
1	Rumah Sakit umum Daerah (BLUD)	Taspen	0,00	0,00	0,00	0,00
		Iuran Jaminan Kesehatan	0,00	0,00	0,00	0,00
		PPH Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00
		PPN Pusat	8.777.901,00	11.707.505.910,00	11.716.283.811,00	0,00
		Taperum	0,00	0,00	0,00	0,00
		Iuran Wajib Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00
		Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
		JUMLAH	8.777.901,00	11.707.505.910,00	11.716.283.811,00	0,00
2	Badan Pendapatan Daerah	Taspen	0,00	0,00	0,00	0,00
		Iuran Jaminan Kesehatan	0,00	0,00	0,00	0,00
		PPH Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00
		PPN Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taperum	0,00	0,00	0,00	0,00
		Iuran Wajib Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00
		Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
		Utang Jaminan	149.500.000	24.000.000,00	125.000.000,00	48.500.000,00
		JUMLAH	149.500.000,00	24.000.000,00	125.000.000,00	48.500.000,00
TOTAL			158.277.901,00	11.731.505.910,00	11.841.283.811,00	48.500.000,00

REKAPITULASI SURAT KETETAPAN UANG JAMINAN BONGKAR (SKLJB) PADA WEB-REGISTER TAHUN 2022

NO.	IPR TAHUN 2022		NAMA WAJIB PAJAK	NASKAH REKLAME	LOKASI REKLAME	PERIODE IPR	KETETAPAN SKLJB	NOMOR BAYAR SKLJB
	NOMER	TANGGAL						
1	503-1024-IPR/2022	15 Agustus 2022	Mulyadi H.	Produk SAMSUNG	Jl. Pajajaran - Tegallaga / RTH	18 Agustus 2022 - 17 Agustus 2023	Rp. 25.000.000	32712340400000004
2	503-1208-IPR/2022	10 Oktober 2022	Mulyadi H.	(Petunjuk Arah) BANK PANIN	Jl. Padi / RTH	05 November 2022 - 04 November 2023	Rp. 2.000.000	32712340400000025
3	503-1412-IPR/2022	03 November 2022	M. Husen Aldirus	(Petunjuk Arah) SKI / TAS TAJUR	Jl. Durian Raya / SLT	25 November 2022 - 24 November 2023	Rp. 2.000.000	32712340400000054
4	503-1500-IPR/2022	22 November 2022	Ranji Al Rafsanjani	(Petunjuk Arah) BEBEK TEPI SAWAH	Jl. Kantor Pos / RTH	22 November 2022 - 21 November 2023	Rp. 2.000.000	32712340400000064
							Rp. 31.000.000	

PERPANJANGAN IPR TAHUN 2024			PERPANJANGAN IPR TAHUN 2025			KETERANGAN	UANG JAMINAN BONGKAR
NOMER IPR	TANGGAL IPR	PERIODE IPR	NOMER IPR	TANGGAL IPR	PERIODE IPR		
503-0871-IPR/2024	11 Juli 2024	18 Agustus 2024 - 17 Agustus 2025				Tidak melakukan perpanjangan IPR	Rp. 25.000.000
503-1330-IPR/2024	25 Oktober 2024	05 November 2024 - 04 November 2025	503-2013-IPR/2025	14 November 2024	05 November 2025 - 04 November 2026	Perpanjangan IPR sebelum periode IPR berakhir	Rp. -
503-1372-IPR/2024	08 November 2024	25 November 2024 - 24 November 2025				Tidak melakukan perpanjangan IPR	Rp. 2.000.000
503-1487-IPR/2024	21 November 2024	22 November 2024 - 21 November 2025				Tidak melakukan perpanjangan IPR	Rp. 2.000.000
							Rp. 29.000.000

REKAPITULASI SURAT KETETAPAN UANG JAMINAN BONGKAR (SKLJB) PADA WEB-REGISTER TAHUN 2023

NO.	IPR TAHUN 2023		NAMA WAJIB PAJAK	NASKAH REKLAME	LOKASI REKLAME	PERIODE IPR	KETETAPAN SKLJB	NOMOR BAYAR SKLJB
	NOMER	TANGGAL						
1	503-0061-IPR/2023	17 Januari 2023	Nabila Hasiba Abidin	(Petunjuk Arah) CSY	Jl. Tumenggung Wiradiredja / RTH	13 Januari 2023 - 12 Januari 2024	Rp. 2.000.000	32712340400000002
2	503-0093-IPR/2023	25 Januari 2023	Surjanto Widjaja	RM. RUMUNG GILI GILI	Jl. Pajajaran - Baranangsiang / RTH	24 Januari 2023 - 23 Januari 2024	Rp. 2.000.000	32712340400000005
3	503-0118-IPR/2023	30 Januari 2023	Ir. Hudi Karyono	Perumahan RANCAMAYA	Jl. Raya Sukabumi - Ciawi / RTH	30 Januari 2023 - 29 Januari 2024	Rp. 25.500.000	32712340400000007
4	503-0197-IPR/2023	21 Februari 2023	Ir. Hadjanto Husen	(Petunjuk Arah) BANK PANIN	Jl. Pekuan / RTH	10 Januari 2023 - 09 Januari 2024	Rp. 2.000.000	32712340400000014
5	503-0197-IPR/2023	21 Februari 2023	Ir. Hadjanto Husen	(Petunjuk Arah) BANK PANIN	Jl. Binamarga / RTH	10 Januari 2023 - 09 Januari 2024	Rp. 2.000.000	32712340400000015
6	503-0373-IPR/2023	27 Maret 2023	Ir. Hudi Karyono	GRAND PAJAJARAN RESIDENCE	Jl. Pajajaran - Smpang Bale Binarum / RTH	02 Maret 2023 - 01 Maret 2024	Rp. 15.000.000	32712340400000022
7	503-0421-IPR/2023	31 Maret 2023	Franky Ibrahim	(Petunjuk Arah) HIGHLAND PARK RESORT	Jl. Rd. Aria Suralaga / RTH	20 Maret 2023 - 19 Maret 2024	Rp. 2.000.000	32712340400000027
8	503-0538-IPR/2023	14 April 2023	Ir. Yuliant Hayuningthias	BOTANI SQUARE / Edufun Fast	Jl. Pajajaran (Area Botani Square)	01 Juli 2023 - 30 Juni 2024	Rp. 7.500.000	32712340400000031
9	503-0636-IPR/2023	16 Mei 2023	Ir. Hudi Karyono	PT. AVINDO BANGUN GEMILANG	Jl. A. Suralaga - Smpang Pair Kuda / RTH	12 Mei 2023 - 11 Mei 2024	Rp. 2.000.000	32712340400000034
10	503-0683-IPR/2023	24 Mei 2023	Ir. Hudi Karyono	MOVILEX / CENDANA PANTS	Jl. Pajajaran (Area Bale Binarum)	24 Mei 2023 - 23 Mei 2024	Rp. 15.000.000	32712340400000038
11	503-1096-IPR/2023	09 Agustus 2023	Agus Suparman	LED / Media Promosi PT. Vista Aeta Perdana	JPO Warung Jambu - Jl. Pajajaran	02 Agustus 2023 - 01 Agustus 2024	Rp. 15.000.000	32712340400000049
12	503-1746-IPR/2023	15 Desember 2023	Andi Mulla	PEPSIDENT	Jl. KS. Tubun - Taman W. Jambu / RTH	14 Desember 2023 - 13 Desember 2024	Rp. 15.000.000	32712340400000049
							Rp. 105.000.000	

PERPANJANGAN IPR TAHUN 2024			PERPANJANGAN IPR TAHUN 2025			KETERANGAN	UANG JAMINAN BONGKAR
NOMER IPR	TANGGAL IPR	PERIODE IPR	NOMER IPR	TANGGAL IPR	PERIODE IPR		
503-0090-IPR/2024	22 Januari 2024	13 Januari 2024 - 12 Januari 2025				Tidak melakukan perpanjangan IPR	Rp. 2.000.000
503-0032-IPR/2024	09 Januari 2024	24 Januari 2024 - 22 Januari 2025				Tidak melakukan perpanjangan IPR	Rp. 2.000.000
503-0134-IPR/2024	02 Februari 2024	30 Januari 2024 - 29 Januari 2025				Tidak melakukan perpanjangan IPR	Rp. 25.500.000
503-0047-IPR/2024	11 Januari 2024	10 Januari 2024 - 09 Januari 2025	503-0086-IPR/2025	16 Januari 2025	10 Januari 2025 - 09 Januari 2026	Perpanjangan IPR sebelum periode IPR berakhir	Rp. -
503-0047-IPR/2024	11 Januari 2024	10 Januari 2024 - 09 Januari 2025	503-0086-IPR/2025	16 Januari 2025	10 Januari 2025 - 09 Januari 2026	Perpanjangan IPR sebelum periode IPR berakhir	Rp. -
503-0369-IPR/2024	21 Maret 2024	02 Maret 2024 - 01 Maret 2025				Tidak melakukan perpanjangan IPR	Rp. 15.000.000
503-0426-IPR/2024	01 April 2024	20 Maret 2024 - 19 Maret 2025				Tidak melakukan perpanjangan IPR	Rp. 2.000.000
	-	-		-	-	Reklame pada lahan swasta	Rp. -
503-0630-IPR/2024	16 Mei 2024	12 Mei 2024 - 11 Mei 2025				Tidak melakukan perpanjangan IPR	Rp. 2.000.000
	-	-		-	-	Reklame pada lahan swasta	Rp. -
503-1011-IPR/2024	05 Agustus 2024	02 Agustus 2024 - 01 Agustus 2025	503-0853-IPR/2025	03 Juli 2025	02 Agustus 2025 - 01 Agustus 2026	Perpanjangan IPR sebelum periode IPR berakhir	Rp. -
						Tidak melakukan perpanjangan IPR (pembayaran jabong tahun 2025)	Rp. 15.000.000
							Rp. 63.500.000

REKAPITULASI SURAT KETETAPAN UANG JAMINAN BONGKAR (SKLJB) PADA WEB-REGISTER TAHUN 2024

NO.	IPR TAHUN 2024		NAMA WAJIB PAJAK	NASKAH REKLAME	LOKASI REKLAME	PERIODE IPR	KETETAPAN SKLJB	NOMOR BAYAR SKLJB
	NOMER	TANGGAL						
1	503-0088-IPR/2024	22 Januari 2024	Ir. Kriwendono	SANA HILLS	Jl. Padi - Baranangsiang / RTH	22 Januari 2024 - 21 Januari 2025	Rp. 2.000.000	32712440400000001
2	503-0972-IPR/2024	25 Juli 2024	Nia Susanti	HANJAWAR	Jl. Pajajaran - Babakan / RTH	25 Juli 2024 - 24 Juli 2025	Rp. 2.000.000	32712440400000011
3	503-1287-IPR/2024	15 Oktober 2024	Yohanes Samuel	D' SAWAH	Jl. Cilfor - Smpang Dramaga / RTH	14 Oktober 2024 - 13 Oktober 2025	Rp. 2.000.000	32712440400000019
4	503-1353-IPR/2024	01 November 2024	Arlin Kurniawan	LED	Jl. Jend. Sudirman - Depan Denpom / RTH	01 November 2024 - 31 Oktober 2025	Rp. 15.000.000	32712440400000020
5	503-1370-IPR/2024	06 November 2024	Diky Purnama	T - BENE	Jl. Dadali / RTH	01 November 2024 - 31 Oktober 2025	Rp. 2.000.000	32712440400000021
6	503-1370-IPR/2024	06 November 2024	Diky Purnama	T - BENE / 50m Lagi	Jl. Dadali / RTH	01 November 2024 - 31 Oktober 2025	Rp. 2.000.000	32712440400000022
7	503-1440-IPR/2024	15 November 2024	PT. Reggy Pratama Adv.	Provider Property Perbankan Consumer Goods	Jl. Siliwangi - Batutulis / RTH	14 November 2024 - 13 November 2025	Rp. 7.500.000	32712440400000023
							Rp. 32.500.000	

						KETERANGAN	UANG JAMINAN BONGKAR
						Tidak melakukan perpanjangan IPR	Rp. 2.000.000
						Tidak melakukan perpanjangan IPR	Rp. 2.000.000
						Tidak melakukan perpanjangan IPR	Rp. 2.000.000
						Tidak melakukan perpanjangan IPR	Rp. 15.000.000
						Tidak melakukan perpanjangan IPR (Pembayaran Jabong th 2025)	Rp. 2.000.000
						Tidak melakukan perpanjangan IPR (Pembayaran Jabong th 2025)	Rp. 2.000.000
						Tidak melakukan perpanjangan IPR	Rp. 7.500.000
							Rp. 32.500.000

REKAPITULASI SURAT KETETAPAN UANG JAMINAN BONGKAR (SKLJB) PADA WEB-REGISTER TAHUN 2025

NO.	IPR TAHUN 2025		NAMA WAJIB PAJAK	NASKAH REKLAME	LOKASI REKLAME	PERIODE IPR	KETETAPAN SKLJB	NOMOR BAYAR SKLJB
	NOMER	TANGGAL						
1	503-0098-IPR/2025	21 Januari 2025	Budi Rahardjo	SAIPOERNA PENDIDIKAN INTERNASIONAL	Jl. Padi - Baranangsiang / RTH	20 Januari 2025 - 19 Januari 2026	Rp. 5.000.000	32712540400000002
							Rp. 5.000.000	

						KETERANGAN	UANG JAMINAN BONGKAR
						Periode IPR belum berakhir	-

REKAPITULASI SURAT KETETAPAN UANG JAMINAN BONGKAR (SKLJB) PADA WEB-REGISTER TAHUN 2022, 2023, 2024&2025

	Saldo Awal 2025	Penambahan 2025	SKLJB s/d 2025	Pemindahbukuan	Sisa Jabong
- Sisa Tahun 2022	Rp. 31.000.000	Rp. -	Rp. -	31.000.000	29.000.000
- Sisa Tahun 2023	Rp. 90.000.000	Rp. 15.000.000	Rp. 105.000.000	63.500.000	41.500.000
- Sisa Tahun 2024	Rp. 28.500.000	Rp. 4.000.000	Rp. 32.500.000	32.500.000	-
- Tahun 2025		Rp. 5.000.000	Rp. 5.000.000	-	5.000.000
Total	Rp. 149.500.000	Rp. 24.000.000	Rp. 173.500.000	Rp. 125.000.000	Rp. 48.500.000

**PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
TAHUN 2025**

Nama Tenant	Tanggal Mulai	Tanggal Berakhir	Jumlah	Masa Berlaku (Bulan)	Jumlah Bulan Sisa	Pendapatan Diterima Dimuka
Roti O	12/7/2024	11/7/2027	448.200.000,00	36	18	224.100.000,00
Venus	28/8/2024	27/08/27	40.540.541,00	36	16	22.522.522,78
Indomart	15/9/2024	14/09/29	983.362.307,00	60	16	721.132.358,47
Koperasi	28/6/2024	27/06/25	62.169.823,00	12	12	-
Koperasi 2	26/6/2025	26/06/26	86.000.000,00	36	18	43.000.000,00
Kursi Pijat Koperasi	09/01/2025	August 2026	15.500.000,00	366	122	10.333.333,33
BJB	01/11/24	01/11/29	717.881.590,00	60	14	550.375.885,67
ATM BNI	25/04/25	24/04/28	84.766.364,00	36	8	65.929.394,22
ATM MANDIRI	31/10/24	30/10/26	56.560.000,00	24	14	23.566.666,67
Hom Juice			19.615.528,00	12	6	10.587.011,00
TOTAL						1.671.547.172,14

DINAS TENAGA KERJA KOTA BOGOR
RINCIAN PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA TENAGA KERJA ASING (TKA)
JANUARI S.D DESEMBER 2025

Lampiran 27.2

No.	No. SKRD	Uraian						Penerima Retribusi TKA Tahun 2025	Masa Berlaku (hari)	Batas tahun 2025	Jumlah Hari Tahun 2025	Jumlah Hari Tahun 2026	Pendapatan Diterima dimuka Tahun 2025
		Kode IMTA	Tanggal Bayar	Nama Tenaga Asing	Alamat	Nama Perusahaan	Asal Tenaga Asing						
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n = m/j x i
1	001/Disnaker/I/2025	3271251140000001	01/01/25	ALDRIN CARO BUCAL	JL. PEMUDA NO. 27, KEL. KEBON PEDES, KEC. TANAH SAREAL, KOTA BOGOR	PT GOODYEAR INDONESIA	PHILIPPINA	19.236.000	365	31/12/25	364	1	52.701,37
2	002/Disnaker/III/2025	3271251140000002	11/03/25	NAKATSU FUMIHIDE	JL. KAUM SARI NO. 1 RT 01 RW 05 KEL. TANAH BARU KEC. BOGOR UTARA KOTA BOGOR	PT ONE SENTRAL BOGOR	JEPANG	19.542.000	365	31/12/25	295	70	3.747.780,82
3	003/Disnaker/IV/2025	3271251140000003	16/04/25	SELVAKUMAR GUNASEKAR	JL. PEMUDA NO. 27, KEL. KEBON PEDES, KEC. TANAH SAREAL, KOTA BOGOR	PT GOODYEAR INDONESIA	INDIA	20.022.000	365	31/12/25	259	106	5.814.608,22
4	004/Disnaker/IV/2025	3271251140000004	23/04/25	JULIAN JACKSON CRAWSHA	DESTARATA VI NO. 66 TEGALGUNDIL BOGOR UTARA KOTA BOGOR	PT HIJAU DAUN KOSULTAN	AUSTRALIA	20.064.000	365	31/12/25	252	113	6.211.594,52
5	005/Disnaker/V/2025	3271251140000005	07/05/25	CHRISTOPHER JOSEPH THOMPSON	PERUMAHAN BUKIT CIMANGGU VILLA CC4 NO. 3A MEKARWANGI TANAH SAREAL KOTA BOGOR	YAYASAN DANASHA	INGGRIS	19.650.000	365	31/12/25	238	127	6.837.123,29
6	006/Disnaker/V/2025	3271251140000006	28/05/25	SUMEDHA THILINA DE TISSERA	TAMAN YASMIN CLUSTER MAWAR JL. MAWAR I MO. 17 CURUG MEKAR BOGOR BARAT KOTA BOGOR	PT INDONESIA TEA TRADER	SRI LANKA	19.392.000	365	31/12/25	217	148	7.863.057,53
7	007/Disnaker/VI/2025	3271251140000007	19/06/25	TERUSHIGE NAKANISHI	JL RAYA TAJUR NO. 1 SINDANGGRASA BOGOR TIMUR KOTA BOGOR	PT UNITEX	JEPANG	19.818.000	365	31/12/25	195	170	9.230.301,37
8	008/Disnaker/VI/2025	3271251140000008	23/06/25	SUDHIR MAHENDRA VAJANAPURKAR	JL RAYA TAJUR NO. 1 SINDANGGRASA BOGOR TIMUR KOTA BOGOR	PT UNITEX	JEPANG	19.578.000	365	31/12/25	191	174	9.333.073,97
9	009/Disnaker/VI/2025	3271251140000009	24/06/25	SHINGO SAKAMOTO	JL TAMAN PAJAJARAN BLOK A1 NO 1A LT 2 RT 003 RW 007 KEL BARANANGSIANG KEC BOGOR TIMUR KOTA BOGOR	PT. TEX CHEM GLOBAL	INDIA	19.494.000	365	31/12/25	190	175	9.346.438,36
10	010/Disnaker/VI/2025	3271251140000010	25/06/25	SUMEDHA THILINA DE TISSERA	TAMAN YASMIN CLUSTER MAWAR JL. MAWAR I MO. 17 CURUG MEKAR BOGOR BARAT KOTA BOGOR	PT SYSTEMS ASIAN TEKNOLOGI	SRI LANKA	19.362.000	365	31/12/25	189	176	9.336.197,26
11	011/Disnaker/VII/2025	3271251140000011	04/07/25	IMELDA HERNANDO PAMANDANAN	PERUMAHAN DANAU BOGOR RAYA, KOTA BOGOR,JAWA BARAT, BOGOR	YAYASAN DANASHA	PHILIPPINA	19.632.000	365	31/12/25	180	185	9.950.465,75
12	012/Disnaker/VII/2025	3271251140000012	16/07/25	BRYAN FAIGAO GREGORIA	PERUMAHAN DANAU BOGOR RAYA, KOTA BOGOR,JAWA BARAT, BOGOR	YAYASAN DANASHA	PHILIPPINA	20.307.480	365	31/12/25	168	197	10.960.475,51
13	013/Disnaker/VII/2025	3271251140000013	22/07/25	JANG JONGKEUN	SITU BEUREUM RT. 002 RW. 001 KEL. BOJONGKERTA, KEC. BOGOR SELATAN, KOTA BOGOR, BOGOR	PT AGUNG CIPTA INDAH	KOREA SELATAN	19.752.000	365	31/12/25	162	203	10.985.358,90
14	014/Disnaker/VII/2025	3271251140000014	22/07/25	MARTIN GREGORY BOWCHER	PERUMAHAN DANAU BOGOR RAYA, KOTA BOGOR,JAWA BARAT, BOGOR	YAYASAN DANASHA	INGGRIS	19.752.000	365	31/12/25	162	203	10.985.358,90
15	015/Disnaker/X/2025	3271251140000015	13/10/25	LEE BYUNG NAM	JL. RAYA PAJAJARAN RT 03 RW 05 BANTARJATI BOGOR UTARA KOTA BOGOR	PT SUKSES NADA PRIMA	KOREA SELATAN	20.058.000	365	31/12/25	79	286	15.716.679,45
16	016/Disnaker/X/2025	3271251140000016	14/10/25	RAMACHANDRAN SUBRAMANIAM	JL KUWUNG KUWUNG NO. 32 BARANANGSIANG BOGOR TIMUR KOTA BOGOR	TMS FASHION (HK) LTD	SRI LANKA	20.058.000	365	31/12/25	78	287	15.771.632,88
17	017/Disnaker/X/2025	3271251140000017	30/10/25	BIAUW LOK KWEE	JL. DUMILAH NO. 20 RT 04 RW 04 BARANANGSIANG BOGOR TIMUR KOTA BOGOR	PT MURNI MOTOR	BELANDA	19.776.000	365	31/12/25	62	303	16.416.789,04
18	018/Disnaker/XII/2025	3271251140000018	01/12/25	RYO NAKAMURA	JL ACHMAD ADNAWIJAYA NO. 76 TEGALGUNDIL BOGOR UTARA KOTA BOGOR	PT SANUBARI AMERTA ELO	JEPANG	20.166.000	365	31/12/25	30	335	18.508.520,55
JUMLAH								355.659.480					177.068.157,70

Mengetahui,
Kepala Dinas

ADI NOVAN, S.STP.
NIP. 19761113 199602 1 002

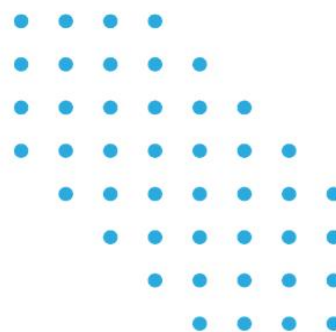
PEMERINTAH KOTA BOGOR
UTANG BELANJA
PERIODE 31 DESEMBER 2025

No.	Nama SKPD	Utang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Pelayanan Umum	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kesehatan	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kebersihan	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Keamanan	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Supir	Telepon	Air	Listrik	Surat Kabar	Internet	Utang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Disehkan Kepada Masyarakat	Utang Belanja Jasa Konsultansi	Total
1	Dinas Pendidikan							4.996.288,00	69.551.200,00	198.900.345,00	2.550.000,00	172.922.566,00				448.920.399
2	Dinas Kesehatan							2.603.672,00	12.554.200,00	48.967.168,00						64.125.040
3	Puskesmas Bogor Selatan	13.510.816,00	2.268.284,00					53.391,00	575.500,00	3.106.971,00		1.764.900,00				21.279.862
4	Puskesmas Cipaku							52.530,00	1.662.100,00	6.828.679,00		1.358.740,00				9.902.049
5	Puskesmas Bondongan								375.300,00	1.845.900,00		914.840,00				3.136.040
6	Puskesmas Lawang Gintung															-
7	Puskesmas Bogor Timur							395.936,00	1.409.000,00	5.430.762,00		1.487.400,00				8.723.098
8	Puskesmas Pulo Armyn							41.736,00	643.300,00	3.471.797,00		936.840,00				5.093.673
9	Puskesmas Bogor Tengah								791.800,00	3.711.510,00		537.240,00				5.040.550
10	Puskesmas Sempur															-
11	Puskesmas Gang Auit							61.050,00				571.650,00				632.700
12	Puskesmas Belong											925.740,00				925.740
13	Puskesmas Merdeka								984.800,00	3.396.220,00		1.776.000,00				6.159.020
14	Puskesmas Semplak								951.300,00	4.095.963,00						5.047.263
15	Puskesmas Pancasan	12.851.411,00	6.073.730,00						159.900,00	2.865.195,00		738.705,00	772.500			23.461.441
16	Puskesmas Pasir Mulya								600.150,00	4.000.969,00		280.941,00				4.882.060
17	Puskesmas Gang Kelor								2.229.400,00	2.311.252,00		921.300,00				5.511.952
18	Puskesmas Sindang Barang							53.391,00	924.500,00	5.310.349,00		1.198.800,00				7.487.040
19	Puskesmas Bogor Utara							56.191,00	2.103.500,00	5.878.766,00						8.038.407
20	Puskesmas Tegai Gundil	79.892.688,00	410.391,00	2.702.084,00	273.881,00	1.364.204,00	281.184,00		1.189.400,00	3.614.949,00		792.540,00				90.521.321
21	Puskesmas Wanung Jambu							4.742.697,00	731.485,00	3.661.355,00						9.135.537
22	Puskesmas Tanah Sereal							58.941,00	1.980.800,00	5.438.565,00						7.478.306
23	Puskesmas Pondok Rumput											638.250,00				638.250
24	Puskesmas Kedung Badak							31.857,00	1.002.900,00	4.017.329,00		877.677,00				5.929.763
25	Puskesmas Kayu Manis								412.600,00	4.801.567,00		953.500,00				6.167.667
26	Puskesmas Melkarwangi							266.400,00	476.300,00	4.022.263,00		1.208.790,00				5.973.753
27	Puskesmas Mulyaharja								1.602.360,00							1.602.360
28	UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah								567.000,00	11.278.455,00		394.050,00				12.239.505
29	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang							2.754.909,00	3.898.600,00	22.263.015,00						28.916.524
30	Dinas Perumahan Dan Permukiman							868.353,00	18.053.100,00	52.036.160,00		3.882.780,00		164.140.631	43.783.950	282.764.974
31	Badan Penanggulangan Bencana Daerah							216.450,00	169.300,00	8.402.696,00						8.788.446
32	Satuan Polisi Pamong Praja							31.857,00	1.415.300,00	9.119.685,00						10.566.842
33	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan							70.041,00	2.712.900,00	5.867.981,00		974.580,00				9.625.502
34	Dinas Sosial							797.535,00	4.011.800,00	11.820.253,00						16.629.588
35	Dinas Tenaga Kerja							347.430,00	1.249.100,00	7.091.884,00		738.150,00				9.426.564
36	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Perlindungan Anak							189.255,00	1.069.300,00	7.403.213,00						8.661.768
37	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian							1.905.870,00	1.728.600,00	23.353.156,00						26.987.626
38	Dinas Lingkungan Hidup							53.391,00	10.650.200,00	14.052.889,00		754.800,00				25.511.280
39	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil							96.348,00	2.082.300,00	18.282.667,00						20.461.315
40	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana							92.907,00	597.600,00	6.182.110,00						6.872.617
41	Dinas Perhubungan							61.941,00	3.090.550,00	3.005.402.982,00						3.008.635.473
42	Dinas Komunikasi Dan Informatika							248.307,00								248.307
43	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan Dan Industri							242.535,00	1.540.200,00	16.882.002,00						18.664.737
44	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu							31.857,00	501.800,00							533.657
45	Dinas Pemuda Dan Olah Raga								25.142.500,00	39.947.666,00		402.100,00				65.492.266
46	Dinas Arsip Dan Perpustakaan							685.314,00	2.236.100,00	26.737.336,00						29.658.750
47	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan							37.962,00	851.400,00	10.940.990,00		937.950,00				12.768.302
48	Sekretariat Daerah							1.452.657,00	59.341.900,00	119.144.210,00						179.938.767
49	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah								12.413.600,00	169.886.783,00						182.300.383
50	Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah							37.407,00	1.632.800,00	11.012.417,00						12.682.624
51	Badan Keuangan Dan Aset Daerah							53.391,00								53.391
52	Badan Pendapatan Daerah							208.003,00	9.967.300,00	56.092.253,00						66.267.556
53	Badan Kepengawasan Dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur							102.342,00	4.170.300,00	9.172.740,00						13.445.382
54	Inspektorat							99.117,00	777.300,00	9.361.766,00						10.238.183
55	Kecamatan Bogor Utara							806.859,00	4.120.700,00	16.587.615,00		688.200,00				22.203.374
56	Kecamatan Bogor Selatan							3.418.323,00	8.953.200,00	14.930.597,00						27.302.120
57	Kecamatan Bogor Timur							3.996.444,00	2.452.300,00	9.164.664,00						15.613.408
58	Kecamatan Bogor Barat							1.149.960,00	14.064.200,00	15.098.522,00						30.312.682
59	Kecamatan Bogor Tengah							807.525,00	8.630.100,00	13.444.141,00						22.881.766
60	Kecamatan Tanah Sareal							462.870,00	4.190.100,00	16.327.766,00						20.980.736
61	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik								436.300,00	2.702.627,00		141.414,00				3.280.341
	Jumlah (I)	106.254.915	8.752.405	2.702.084	273.881	1.364.204	281.184	34.741.240	314.077.185	4.087.353.475	2.550.000	199.720.443	772.500	164.140.631	43.783.950	4.966.768.097
No.	Nama SKPD			Utang Belanja Pegawai					Utang Belanja Barang dan Jasa			Utang Belanja Modal				
1	Rumah Sakit Umum Daerah - BLUD									110.508.092.753		381.167.999				110.889.260.752,13
																115.856.028.849,13

PEMERINTAH KOTA BOGOR
UTANG BELANJA BARANG DAN JASA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (BLUD)
TAHUN ANGGARAN 2025

Kode Rekening	Uraian	Nilai (Rp)
2.1.06.02.01.0015	Utang Belanja Barang Pakai Habis- Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	56.697.100,00
2.1.06.02.01.0036	Utang Belanja barang Pakai Habis-Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	122.000,00
2.1.06.02.01.0037	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Obat-Obatan-Obat-Obatan	19.650.799.299,00
2.1.06.02.01.0038	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	49.669.594.625,99
2.1.06.02.01.0043	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Natura dan Pakan-Natura	292.069.561,14
2.1.06.02.01.0052	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman Rapat	
2.1.06.02.01.0056	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	7.199.213.000,00
2.1.06.02.02.0003	Utang Belanja Jasa Kantor-Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	11.800.000,00
2.1.06.02.02.0004	Utang Belanja Jasa Kantor-Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	35.518.900,00
2.1.06.02.02.0011	Utang Belanja Jasa Kantor-Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	22.752.000,00
2.1.06.02.02.0014	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kesehatan	14.501.976.845,00
2.1.06.02.02.0029	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Ahli	4.741.935,00
2.1.06.02.02.0050	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Kalibrasi	403.500.651,00
2.1.06.02.02.0059	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	6.117.186,00
2.1.06.02.02.0060	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	29.445.700,00
2.1.06.02.02.0061	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	393.908.239,00
2.1.06.02.02.0071	Utang Belanja Jasa Kantor-Lembur	147.625.680,00
2.1.06.02.02.0959	Utang Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) -Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika	3.208.731.205,00
2.1.06.02.02.0968	Utang Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) -Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Kesehatan	10.587.334.547,00
2.1.06.02.02.1028	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN	2.338.161.964,00
2.1.06.02.03.0272	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum Lainnya	1.947.982.315,00
2.1.06.07.07.0001	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	67.018.000,00
2.1.06.07.07.0004	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah	69.600.000,00
2.1.06.07.07.0008	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	2.399.999,00
2.1.06.07.07.0014	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Jantung	226.550.000,00
2.1.06.07.07.0034	Utang Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	15.600.000,00
		110.889.260.752,13

Perumda BPR Bank Kota Bogor
Laporan Keuangan
31 Desember 2025
dan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
Serta Laporan Auditor Independen



DAFTAR ISI

Surat Pernyataan Direksi Tentang Tanggung Jawab Atas Laporan Keuangan

Laporan Auditor Independen

Halaman

Laporan Keuangan

Laporan Posisi Keuangan	1
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif	3
Laporan Perubahan Ekuitas	4
Laporan Arus Kas	5
Catatan atas Laporan Keuangan	7



No. : 00011/2.0923/AU.8/07/1531-3/1/II/2026

Laporan Auditor Independen

Direksi dan Pemegang Saham
Perumda BPR Bank Kota Bogor

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan Perumda BPR Bank Kota Bogor (“BPR”), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2025, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan BPR tanggal 31 Desember 2025, dan kinerja keuangan, serta arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP).

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan BPR dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan BPR.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Perusahaan.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan (Lanjutan)

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kantor Akuntan Publik Sabar & Rekan



Darwansah, SE., M.Ak., Ak., CA., CPA., CFI.
Ijin Akuntan Publik No. AP.1531
Ijin Usaha No. Kep. 1038/KM.1/2012

6 Februari 2026



PERUMDA BPR BANK KOTA BOGOR
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 Desember 2025

A S E T

	Catatan	2 0 2 5	2 0 2 4
		Rp	Rp
Kas	4	2.041.526.200	1.106.438.700
Penempatan pada bank lain :	3b,3d 3e,5		
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa		-	-
Pihak ketiga		109.710.526.465	106.078.227.638
Jumlah penempatan pada bank lain		109.710.526.465	106.078.227.638
Cadangan kerugian penurunan nilai		(185.909.364)	(181.224.602)
Jumlah bersih		109.524.617.101	105.897.003.036
Kredit yang diberikan	3b,3f,6		
Jumlah kredit yang diberikan		183.003.098.761	164.871.989.517
Provisi belum diamortisasi		(4.381.650.974)	(4.157.432.957)
Biaya transaksi		3.129.011	9.292.895
Pendapatan bunga yang ditangguhkan			
Dalam rangka restrukturisasi		(35.179.544)	(38.933.458)
Cadangan kerugian restrukturisasi		(94.445.087)	(108.146.433)
Cadangan kerugian penurunan nilai		(15.861.413.672)	(13.213.003.037)
Jumlah bersih		162.633.538.495	147.363.766.527
Agunan yang diambil alih	7	883.830.364	883.830.364
Aset tetap bersih	3h,8	5.089.600.070	5.644.536.011
Aset tidak berwujud	9	-	-
Aset lain-lain	10	2.811.893.727	2.138.578.124
Aset pajak tangguhan	16,c	65.008.131	-
JUMLAH ASET		283.050.014.088	263.034.152.762

PERUMDA BPR BANK KOTA BOGOR
LAPORAN POSISI KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2025

KEWAJIBAN DAN EKUITAS

	Catatan	2 0 2 5	2 0 2 4
		Rp	Rp
KEWAJIBAN			
Liabilitas segera	3m,11	291.030.847	2.673.976.081
Utang pajak	16,b	792.996.606	824.210.638
Simpanan	3k,12	149.064.401.001	143.729.790.406
Simpanan dari bank lain	13	2.000.000.000	2.000.000.000
Liabilitas lainnya	14	437.913.994	285.531.770
Kewajiban imbalan kerja	3l,15	424.639.810	–
Pinjaman yang diterima	17	40.651.852.169	25.693.530.716
Jumlah liabilitas		193.662.834.427	175.207.039.611
EKUITAS			
Modal			
Modal disetor	18	54.000.000.000	54.000.000.000
Saldo laba			
Cadangan	19	29.548.255.329	28.478.540.873
Belum ditentukan tujuannya		5.838.924.332	5.348.572.278
Jumlah ekuitas		89.387.179.661	87.827.113.151
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		283.050.014.088	263.034.152.762

PERUMDA BPR BANK KOTA BOGOR
LAPORAN LABA RUGI dan PENGHASILAN KOMPREHENSIF
Untuk tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2025

	Catatan	2 0 2 5 Rp	2 0 2 4 Rp
Pendapatan Operasional :			
Pendapatan bunga	3o,21	35.809.049.168	30.876.807.664
Pendapatan provisi	3o,21	1.995.497.959	2.443.381.944
Biaya transaksi	3o,21	(100.452.630)	(99.053.443)
Pendapatan operasional lainnya	3o,22	2.962.741.102	2.887.484.748
Jumlah pendapatan operasional		40.666.835.599	36.108.620.913
Beban operasional :			
Beban bunga	3o,23	(8.909.093.438)	(8.119.287.159)
Beban kerugian restrukturisasi kredit		–	–
Beban kerugian penurunan nilai	24	(4.845.841.732)	(3.460.091.940)
Beban pemasaran	25	(128.976.000)	(109.646.940)
Beban penelitian dan pengembangan	26	(70.000.000)	–
Beban administrasi dan umum	27	(18.564.137.815)	(15.959.166.020)
Beban lainnya	28	(587.668.882)	(1.552.907.710)
Jumlah beban operasional		(33.105.717.867)	(29.201.099.769)
Laba operasional		7.561.117.732	6.907.521.144
Pendapatan (beban) non operasional			
Pendapatan non operasional	29	109.367.410	148.856.377
Beban non operasional	30	(83.977.100)	(81.947.500)
Jumlah pendapatan (beban) non operasional		25.390.310	66.908.877
Laba sebelum pajak penghasilan		7.586.508.042	6.974.430.021
Taksiran pajak penghasilan :			
Pajak kini	3m 16a	(1.812.591.841)	(1.625.857.743)
Pajak tangguhan	16c	65.008.131	–
Jumlah laba bersih		5.838.924.332	5.348.572.278
Penghasilan komprehensif lain :		–	–
Jumlah Laba dan penghasilan komprehensif		5.838.924.332	5.348.572.278

PERUMDA BPR BANK KOTA BOGOR
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk tahun yang berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2025

	Modal saham	Saldo Laba		Saldo laba – belum ditentukan tujuan	Jumlah ekuitas
		Cadangan Umum	Cadangan tujuan		
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Saldo per 31 Desember 2023	54.000.000.000	14.477.713.833	12.991.896.712	5.044.651.636	86.514.262.181
Penggunaan laba :					
Dividen	—	—	—	(2.774.558.400)	(2.774.558.400)
Pembentukan cadangan	—	504.465.164	504.465.164	(1.008.930.328)	—
Penggunaan jasa produksi	—	—	—	(403.572.130)	(403.572.130)
Penggunaan dana kesejahteraan	—	—	—	(504.465.164)	(504.465.164)
Penggunaan dana social dan lingkungan	—	—	—	(151.339.549)	(151.339.549)
Tantiem	—	—	—	(201.786.065)	(201.786.065)
Laba bersih	—	—	—	5.348.572.278	5.348.572.278
Saldo per 31 Desember 2024	54.000.000.000	14.982.178.997	13.496.361.876	5.348.572.278	87.827.113.151
Penggunaan laba :					
Dividen	—	—	—	(2.941.714.753)	(2.941.714.753)
Pembentukan cadangan	—	534.857.228	534.857.228	(1.069.714.456)	—
Penggunaan jasa produksi	—	—	—	(427.885.782)	(427.885.782)
Penggunaan dana kesejahteraan	—	—	—	(534.857.228)	(534.857.228)
Penggunaan dana sosial dan lingkungan	—	—	—	(160.457.168)	(160.457.168)
Tantiem	—	—	—	(213.942.891)	(213.942.891)
Laba bersih	—	—	—	5.838.924.332	5.838.924.332
Saldo per 31 Desember 2025	54.000.000.000	15.517.036.225	14.031.219.104	5.838.924.332	89.387.179.661

PERUMDA BPR BANK KOTA BOGOR
LAPORAN ARUS KAS
Untuk tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2025

	2 0 2 5	2 0 2 4
	Rp	Rp
Arus kas dari aktivitas operasi		
Penerimaan pendapatan bunga	35.709.024.242	30.488.730.574
Penerimaan pendapatan provisi dan jasa transaksi	1.895.045.329	2.344.328.501
Penerimaan atas aset keuangan yang telah hapusbukukan	-	8.369.700
Pendapatan operasional lainnya	2.962.741.102	2.887.484.748
Pembayaran beban bunga	(8.909.093.438)	(8.119.287.159)
Beban gaji dan tunjangan	(13.019.535.852)	(11.132.581.429)
Beban umum dan administrasi	(4.749.861.816)	(3.973.579.011)
Beban operasional lainnya	(5.453.200.650)	(4.037.744.460)
Pendapatan non operasional lainnya	109.367.410	148.856.377
Beban non operasional lainnya	(83.977.101)	(81.947.500)
Pembayaran pajak penghasilan	(1.812.591.841)	(1.625.857.743)
Penyesuaian lainnya atas pendapatan dan beban	2.184.032.671	2.083.116.932
 Arus kas sebelum perubahan dalam aset dan Liabilitas operasi	 8.831.950.056	 8.989.889.530
 (kenaikan) penurunan aset operasi :		
Penempatan pada bank lain	14.531.317.120	(38.444.010.364)
Kredit yang diberikan	(17.918.182.603)	(14.508.794.477)
Agunan yang diambil alih	-	(589.986.664)
Aset lain-lain	(673.315.602)	840.130.756
Penyesuaian lainnya atas aset operasional	(65.008.131)	-
Kenaikan (penurunan) liabilitas operasi :		
Liabilitas segera	(2.382.945.234)	2.435.428.710)
Tabungan	(2.472.781.095)	9.700.740.135)
Deposito	7.807.391.690	4.072.370.000
Simpanan dari bank lain	-	(3.200.000.000)
Pinjaman yang diterima	14.958.321.453	5.349.338.094
Liabilitas imbalan kerja	424.639.810	-
Liabilitas lain-lain	152.382.224	(119.799.074)
Penyesuaian lainnya atas liabilitas operasional	(31.214.032)	296.500.231
 Kas bersih diperoleh dari (digunakan) untuk aktivitas operasi	 23.162.555.656	 (25.178.193.123)

PERUMDA BPR BANK KOTA BOGOR
LAPORAN ARUS KAS (Lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2025

	2 0 2 5	2 0 2 4
	Rp	Rp
Arus kas dari aktivitas investasi		
Pembelian/penjualan aset tetap dan inventaris	(52.423.000)	(1.597.327.820)
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	(52.423.000)	(1.597.327.820)
Arus kas dari aktivitas pendanaan		
Pembayaran dividen	(2.941.714.753)	(2.774.558.400)
Penyesuaian lainnya	(1.069.714.456)	(1.261.162.909)
Kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan	(4.011.429.209)	(4.035.721.309)
Kenaikan (penurunan) bersih arus kas	19.098.703.447	(30.811.242.252)
Kas dan setara kas pada awal tahun	12.536.838.706	43.348.080.958
Kas dan setara kas pada akhir tahun	31.635.542.153	12.536.838.706
Kas dan setara kas terdiri dari :		
Kas	2.041.526.200	1.106.438.700
Giro pada bank lain	29.594.015.953	11.430.400.006
Kas dan setara kas pada akhir tahun	31.635.542.153	12.536.838.706

PERUMDA BPR BANK KOTA BOGOR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025

1. U M U M

Perumda BPR Bank Kota Bogor (untuk selanjutnya disebut BPR), didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat II Bogor Nomor 12 tahun 1985 tentang pembentukan Perusahaan Daerah BPR Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor. Setelah dilakukan peninjauan serta perubahan modal BPR mengalami dua kali perubahan. Pada tahun 1995 atas dasar Peraturan Daerah Tingkat II Bogor untuk pertama kalinya mengalami perubahan atas Modal Dasar BPR serta beberapa ketentuan, yang kemudian pada tahun 2004 atas dasar Peraturan Daerah Tingkat II Bogor Nomor 03 tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah BPR Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor, BPR kembali mengalami perubahan atas modal dasar serta beberapa ketentuannya. BPR telah mendapat izin usaha dari Direktorat Jendral Moneter Departemen Keuangan Republik Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam surat No. S.Ket-529/DJM/III.3/7/1975 tanggal 3 Juli 1975 berdasarkan pertimbangan Direksi Bank Indonesia No. 8/15 UPBP/PPTR, tanggal 23 Juni 1975.

Berdasarkan Salinan Keputusan Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 2 Jawa Barat Nomor KEP-66/KR.02/2017 tanggal 26 September 2017 tentang Penggunaan izin usaha atas nama PD Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Bogor menjadi izin Usaha Atas Nama Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kota Bogor. Kegiatan utama BPR adalah dalam bidang perbankan dengan usaha menghimpun dana dari pemerintah dan masyarakat dalam bentuk simpanan, berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan, memberikan kredit termasuk kredit usaha rakyat dan/atau kredit usaha rakyat daerah, serta melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha usaha mikro kecil dan menengah, melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan dan lembaga lainnya, menempatkan dananya pada lembaga keuangan lainnya, membantu pemerintah daerah dalam optimalisasi penyaluran dana untuk program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan pelayanan kas keliling (kas mobil, *mobile phone*, kantor Bank Kota Bogor nonpermanen), *payment point*, dan kegiatan layanan dengan menggunakan kartu Automated Teller Machine (Anjungan Tunai Mandiri)/ tidak menggunakan kartu (*cardless*) dan/atau kartu debit, serta menjalankan jenis usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta memberikan pinjaman jangka pendek kepada pedagang kecil dan pengusaha di pasar-pasar dan tempat lain. BPR berkedudukan di jalan RE Martadinata No. 45, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat. Jumlah pegawai pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebanyak 59 dan 63 orang.

PERUMDA BPR BANK KOTA BOGOR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2025

1. U M U M (Lanjutan)

Susunan Dewan Pengawas dan Direksi BPR per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

	2 0 2 5	2 0 2 4
Dewan Pengawas :		
Ketua	: -----	-----
Anggota	: -----	Euis Risnawati, SE
Anggota	: Dani Rahadian, S.T., M.M	Dani Rahadian, S.T., M.M
Direksi		
Direktur Utama	: Tommy Indra Gunawan, S.E., M.M	Tommy Indra Gunawan, S.E., M.M
Direktur Operasional	: Bhima Irsi Faliandri	Bhima Irsi Faliandri
Direktur Kepatuhan	: Anjas Asmara	Anjas Asmara

2. PERNYATAAN KEPATUHAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan BPR telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Privat (SAK EP) dan mencerminkan kepatuhan penuh terhadap seluruh ketentuan dalam SAK EP. Tahun buku ini merupakan periode penerapan pertama kali SAK EP oleh BPR.

3. DASAR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

a. Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan BPR disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) yang berlaku di Indonesia. Penerapan SAK EP ini merupakan penerapan pertama kali oleh BPR

Sebelum penerapan SAK EP, Entitas menyusun laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP).

Laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, yang disajikan sebagai angka pembandingan, telah disajikan kembali agar sesuai dengan penerapan SAK EP untuk tujuan perbandingan.

Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep biaya historis, kecuali untuk akun-akun tertentu yang diukur dengan dasar lain sebagaimana diungkapkan dalam kebijakan akuntansi terkait.

Laporan keuangan disusun dengan menggunakan dasar akrual, kecuali laporan arus kas yang disusun berdasarkan arus kas masuk dan keluar selama periode pelaporan.

PERUMDA BPR BANK KOTA BOGOR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2025

3. DASAR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DAN KEBIJAKAN AKUNTANSI
(Lanjutan)

a. Penyusunan Laporan Keuangan (Lanjutan)

Dasar Penyusunan laporan keuangan, kecuali untuk laporan arus kas, adalah dasar akrual. Mata uang pelaporan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan adalah mata uang Rupiah, yang pengukurannya disusun berdasarkan nilai historis.

Laporan arus kas menyajikan informasi perubahan historis atas kas dan setara kas entitas, yang menunjukkan secara terpisah perubahan yang terjadi selama satu periode dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Investasi umumnya diklasifikasikan sebagai setara kas hanya jika akan segera jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

b. Instrumen Keuangan

Aset keuangan adalah kas, piutang, atau instrumen kontraktual yang memberikan hak kontraktual untuk menerima kas atau aset keuangan lain dari entitas lain. Liabilitas keuangan adalah kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada entitas lain.

Klasifikasi Instrumen Keuangan

- 1) Aset keuangan diklasifikasikan sebagai:
 - a. Kas dan setara kas diukur sebesar nilai nominal.
 - b. Piutang usaha dan pinjaman yang diberikan diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai (jika ada)
 - c. Investasi jangka pendek/efek yang diperdagangkan diukur pada nilai wajar jika dapat ditentukan dengan andal.
- 2) Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai:
 - a. Utang usaha dan utang lain-lain diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi.
 - b. Pinjaman bank dan utang obligasi diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan metode suku bunga efektif.

Pengakuan Aset dan Liabilitas Keuangan

Entitas mengakui aset keuangan dan liabilitas keuangan hanya jika entitas menjadi salah satu pihak dalam ketentuan kontraktual instrumen keuangan.

Pengukuran Awal

Mensyaratkan model biaya perolehan diamortisasi untuk seluruh instrumen keuangan dasar. Pada pengakuan awal aset keuangan dan liabilitas keuangan, entitas mengukurnya pada nilai wajar, yang umumnya merupakan harga transaksi.

PERUMDA BPR BANK KOTA BOGOR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2025

3. DASAR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DAN KEBIJAKAN AKUNTANSI
(Lanjutan)

b. Instrumen Keuangan (Lanjutan)

Pengukuran Selanjutnya

- 1) Aset dan liabilitas keuangan dasar: diukur dengan biaya perolehan diamortisasi dengan metode suku bunga efektif.
- 2) Investasi ekuitas publik : nilai wajar dapat diukur secara andal.
- 3) Instrumen kompleks (derivatif, sekuritisasi): mengukur seluruh instrumen keuangan berdasarkan nilai wajar dan mengakui perubahan nilai wajar di laba rugi.
- 4) Ekuitas yang tidak diperdagangkan secara publik dan nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal diukur pada biaya perolehan dikurangi penurunan nilai.

Penurunan Nilai

Pada setiap akhir periode pelaporan, entitas menilai apakah terdapat bukti objektif penurunan nilai aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan atau biaya perolehan diamortisasi. Jika terdapat bukti objektif penurunan nilai, entitas langsung mengakui kerugian penurunan nilai dalam laba rugi.

Bukti objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset mengalami penurunan nilai mencakup data observasian, yang menjadi perhatian pemegang aset, mengenai peristiwa kerugian berikut:

- 1) Kesulitan keuangan signifikan dari penerbit atau obligor;
- 2) Pelanggaran kontrak, seperti gagal bayar atau keterlambatan dalam pembayaran bunga atau pokok;
- 3) Kreditor memberikan konsesi kepada debitur, yang tidak akan dipertimbangkan oleh kreditor jika bukan, karena alasan ekonomik atau legal yang terkait dengan kesulitan keuangan debitur;
- 4) Terdapat kemungkinan besar debitur akan mengalami kebangkrutan atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya; atau
- 5) Data observasian mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur dalam estimasi arus kas masa depan dari kelompok aset keuangan sejak pengakuan awal aset tersebut, walaupun penurunan belum dapat diidentifikasi dengan aset keuangan individual dalam kelompok, seperti kondisi ekonomik nasional atau lokal yang memburuk atau perubahan yang memburuk dalam kondisi industri

Faktor lain dapat juga menjadi bukti penurunan nilai, termasuk perubahan signifikan dengan dampak merugikan yang terjadi dalam teknologi, pasar, lingkungan ekonomik atau legal di mana penerbit beroperasi.

Penghentian Pengakuan

- 1) Penghentian Pengakuan Aset Keuangan
Entitas menghentikan pengakuan aset keuangan hanya ketika salah satu dari:
 - a. Hak kontraktual atas arus kas dari aset keuangan kedaluwarsa atau diselesaikan
 - b. Entitas mengalihkan kepada pihak lain secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset keuangan, atau
- 2) Penghentian Pengakuan Liabilitas Keuangan

PERUMDA BPR BANK KOTA BOGOR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2025

3. DASAR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DAN KEBIJAKAN AKUNTANSI
(Lanjutan)

Penghentian Pengakuan (Lanjutan)

Entitas menghentikan pengakuan liabilitas keuangan (atau bagian dari liabilitas keuangan) hanya ketika liabilitas tersebut berakhir yaitu:

- a) Ketika kewajiban yang ditentukan dalam kontrak dilepaskan, dibatalkan atau kedaluwarsa.
- b) Jika peminjam dan pemberi pinjaman mengganti instrumen keuangan dengan syarat yang berbeda secara substansial, maka entitas peminjam dan pemberi pinjaman mencatat transaksi tersebut sebagai pengakhiran liabilitas keuangan orisinal dan pengakuan liabilitas keuangan baru.
- c) Entitas mengakui dalam laba rugi selisih antara jumlah tercatat liabilitas keuangan (atau bagian dari liabilitas keuangan) yang dihapuskan atau yang dialihkan kepada pihak lain dan imbalan yang dibayarkan, termasuk aset non kas yang dialihkan atau liabilitas yang diambil alih.

c. Transaksi Dengan Pihak-pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa

Dalam usahanya, Bank melakukan transaksi-transaksi dengan beberapa pihak yang mempunyai hubungan istimewa, sesuai dengan SAK EP, yang dianggap sebagai pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah sebagai berikut :

- i. Dua entitas yang memiliki satu direktur atau anggota personel manajemen kunci secara umum.
- ii. Dua ventura karena mereka berbagi pengendalian bersama atas joint venture.
- iii. Pihak-pihak berikut dalam pelaksanaan urusan normal dengan entitas (meskipun pihak-pihak tersebut dapat mempengaruhi kebebasan entitas atau ikut serta dalam proses pengambilan keputusan).
 1. Penyandang dana
 2. Serikat dagang
 3. Departemen dan instansi pemerintahan.

Hubungan istimewa yang berkenaan dengan beberapa akun dalam laporan keuangan yaitu kredit yang diberikan, tabungan, deposito berjangka, dan sewa. Transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa diperlakukan sama dengan transaksi dengan pihak ketiga.

PERUMDA BPR BANK KOTA BOGOR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2025

3. DASAR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DAN KEBIJAKAN AKUNTANSI
(Lanjutan)

d. Kas dan setara kas

Kas dan setara kas mencakup kas, simpanan yang sewaktu-waktu bisa dicairkan dan investasi likuid jangka pendek lainnya dengan jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang.

Kas yang penggunaannya dibatasi karena peraturan atau karena perjanjian atau karena telah dimaksudkan untuk tujuan-tujuan tertentu oleh pengurus/manajemen, tidak dikelompokkan dalam kas dan setara kas

e. Pendapatan Bunga Yang Akan Diterima

Pendapatan bunga yang akan diterima adalah pendapatan bunga dari kredit dengan kualitas lancar (*performing*) yang telah diakui sebagai pendapatan tetapi belum diterima pembayarannya. Termasuk dalam pengertian ini adalah pengakuan pendapatan bunga dari penempatan pada bank lain.

f. Giro Pada Bank Lain

Transaksi giro pada bank lain diakui sebesar nilai nominal. Giro pada bank lain disajikan di neraca sebesar nilai bruto tagihan bank.

g. Penempatan Pada Bank Lain

Penempatan Pada Bank lain adalah penempatan/ tagihan atau simpanan milik BPR pada bank lain dengan maksud untuk menunjang kelancaran aktivitas operasional, dalam rangka memperoleh penghasilan, dan sebagai *secondary reserve*.

1. Tabungan Pada Bank lain adalah rekening tabungan BPR pada bank umum dan BPR lain dalam mata uang rupiah dengan tujuan untuk menunjang aktivitas operasional.
2. Deposito Pada Bank lain adalah Penempatan dana BPR pada bank umum dan BPR lain dalam bentuk deposito berjangka dengan tujuan untuk memperoleh penghasilan.
3. Sertifikat Deposito pada Bank umum adalah penempatan dana BPR dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindah tangankan dengan tujuan untuk memperoleh penghasilan.

h. Kredit Yang Diberikan

Kredit yang diberikan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Bank dengan debitur yang mewajibkan debitur untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bunga. Kredit dinyatakan sebesar pokok kredit ditambah biaya transaksi dikurangi dengan CKPN kredit dan provisi kredit.

PERUMDA BPR BANK KOTA BOGOR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2025

3. DASAR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DAN KEBIJAKAN AKUNTANSI
(Lanjutan)

Pemberian dan penyaluran

Kredit disajikan sebesar pokok kredit/ baki debit dikurangi provisi ditambah biaya transaksi yang belum diamortisasi. Biaya transaksi adalah semua biaya tambahan yang terkait secara langsung dengan pemberian kredit yang ditanggung oleh BPR. Bunga kredit adalah imbalan yang dibayarkan oleh debitur atas kredit yang diterimanya. Provisi kredit adalah biaya yang harus dibayarkan debitur pada saat kredit disetujui.

Kualitas aset produktif

Penggolongan kualitas aset produktif dan pembentukan penyisihan penghapusan aset produktif oleh BPR telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.03/2024 Tentang Kualitas Aset Bank Perekonomian Rakyat. Kualitas Aset Produktif dalam bentuk kredit ditetapkan dalam 5 golongan, yaitu Lancar, Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan dan Macet.

BPR wajib menetapkan Kualitas Aset Produktif yang sama terhadap beberapa rekening aktiva produktif untuk 1 debitur pada BPR yang sama.

Dalam hal terdapat perbedaan kualitas Aset produktif terhadap beberapa rekening aktiva 1 debitur pada BPR yang sama, BPR wajib menetapkan kualitas masing-masing Aset Produktif mengikuti kualitas aktiva produktif yang paling rendah.

Penyisihan aset produktif

Aset produktif terdiri dari penanaman dana bank dalam bentuk penempatan pada bank lain dan kredit yang diberikan. Penyisihan aset dibentuk berdasarkan manajemen terhadap masing-masing kualitas aset produktif pada setiap tanggal minimum penyisihan kerugian sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang penggolongan Aset Produktif (Lancar, Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan dan Macet) dan Pembentukan Penyisihan Aktiva Produktif.

Penghitungan kewajiban penyisihan aktiva produktif yang dibentuk oleh BPR sesuai dengan ketentuan POJK No 1 Tahun 2024 tanggal 10 Januari 2024, tentang Kualitas Aset Bank Perekonomian Rakyat, dengan rincian sebagai berikut :

PPKA Umum

Aktiva Produktif memiliki Kualitas Lancar : 0,5%

PPKA Khusus

Aktiva Produktif memiliki Kualitas Dalam Perhatian Khusus : 3%
Aktiva Produktif memiliki Kualitas Kurang Lancar : 10%
Aktiva Produktif memiliki Kualitas Diragukan : 50%
Aktiva Produktif memiliki Kualitas Macet : 100%

PERUMDA BPR BANK KOTA BOGOR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2025

3. DASAR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DAN KEBIJAKAN AKUNTANSI
(Lanjutan)

h. Kredit Yang Diberikan (Lanjutan)

Penyisihan aset produktif (lanjutan)

Persentase penyisihan penghapusan di atas diterapkan terhadap saldo aktiva produktif setelah nilai agunan sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan kecuali untuk aset produktif yang diklasifikasikan lancar yang diterapkan terhadap saldo aktiva produktif tersebut.

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)

Mulai 1 Januari 2025, BPR wajib membentuk CKPN sesuai dengan SAK EP yang menggantikan SAK ETAP. Kriteria evaluasi penurunan nilai ditentukan dengan individual dan kolektif. CKPN dihitung berdasarkan pendekatan *expected credit loss* (kerugian kredit ekspektasian) yang disederhanakan berupa hasil perkalian antara *Probability of Default* (PD) dan *Loss Given Default* (LGD) per grup data.

Pada tahun 2025, BPR telah membuat Kebijakan terkait CKPN melalui Keputusan Direksi Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kota Bogor Nomor 26 Tahun 2024 tanggal 10 Desember 2024 tentang Penetapan Metode Perhitungan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Tahun 2025. Dalam Keputusan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Penetapan metode perhitungan Cadangan kerugian penurunan nilai tahun 2025
2. Perhitungan Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) untuk tahun 2025 menggunakan metode individual assessment dan collective assessment.
3. Kriteria debitur untuk perhitungan dengan metode individual assessment Adalah 25 debitur terbesar dengan kriteria :
 - a. Debitur yang memiliki kualitas dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet;
 - b. Debitur yang masa pembayarannya belum masuk jatuh tempo; dan
 - c. Debitur yang memiliki bukti obyektif penurunan nilai
4. Perhitungan menggunakan collective assessment menggunakan metode Probability of Default (PD) migration, dengan kriteria :
 - a. Ditetapkan berdasarkan produk kredit; dan
 - b. Debitur yang tidak termasuk dalam kategori individual assessment
5. Standar operasional dan prosedur perhitungan Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN)
6. Pengecualian atas Keputusan ini harus mendapat persetujuan dari Direksi
7. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan diadakan perubahan serta perbaikan Kembali sebagaimana mestinya.

PERUMDA BPR BANK KOTA BOGOR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2025

3. DASAR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DAN KEBIJAKAN AKUNTANSI
(Lanjutan)

i. Agunan Yang Diambil Alih (AYDA)

Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) merupakan aset BPR yang diperoleh sehubungan dengan penyelesaian kredit bermasalah. Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) dinilai dengan harga taksiran pada saat pengambilalihan, nilai yang disajikan cukup wajar.

j. Aset Tetap

Aset tetap disajikan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai. Biaya perolehan meliputi harga beli aset tetap termasuk biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang siap digunakan serta estimasi awal biaya pembongkaran aset, biaya pemindahan aset dan biaya restorasi relokasi. Pajak-pajak yang dapat dikreditkan dan semua diskon dikurangkan dalam menentukan biaya perolehan. Penyusutan dimulai pada saat aset tetap tersedia untuk digunakan dan berhenti ketika aset tetap dihapuskan atau dijual. Penyusutan tidak berhenti ketika aset tidak digunakan. Penyusutan diakui sebagai beban dalam laporan laba rugi, kecuali memenuhi syarat untuk dikapitalisasi sebagai perolehan suatu aset berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK Entitas Privat) yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, menggantikan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang sebelumnya digunakan.

Aset tetap disajikan sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai.

Tarif penyusutan aset tetap dihitung dengan menggunakan metode garis lurus (*straight line method*) berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap dengan rincian sebagai berikut :

	Masa manfaat tahun	% per tahun
Bangunan	20	5
Inventaris kantor	4 dan 8	12,5 dan 25
Kendaraan	4 dan 8	12,5 dan 25

Pengeluaran untuk perbaikan dan pemeliharaan dibebankan pada laporan laba rugi pada saat terjadinya. Pengeluaran yang memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja dikapitalisasi.

Tanah dinyatakan sebesar biaya perolehan dan tidak disusutkan. Biaya perpanjangan hak pemilikan tanah ditangguhkan dan diamortisasi sepanjang periode hak atas tanah dan umur ekonomis tanah.

PERUMDA BPR BANK KOTA BOGOR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2025

3. DASAR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DAN KEBIJAKAN AKUNTANSI
(Lanjutan)

j. Aset Tetap (Lanjutan)

Aset tetap yang sudah tidak digunakan atau dijual, dikeluarkan dari kelompok aset tetap yang bersangkutan, dan laba atau rugi yang timbul dikreditkan atau dibebankan pada operasi tahun berjalan.

k. Biaya Dibayar Dimuka

Biaya dibayar dimuka diamortisasi berdasarkan periode penggunaannya dengan metode garis lurus (*straight line method*).

l. Beban Ditangguhkan

Beban yang ditangguhkan diamortisasi selama masa manfaatnya dengan menggunakan metode garis lurus (*straight line method*).

m. Simpanan

Giro, tabungan dan deposito dinyatakan sebesar nilai kewajiban Bank kepada nasabah. Sertifikasi deposito dinyatakan sebesar nilai nominal.

n. Kewajiban Segera

Kewajiban segera dicatat pada saat timbulnya kewajiban atau diterima perintah dari pemberi amanat, baik dari masyarakat maupun dari bank lain. Kewajiban segera disajikan sebesar jumlah kewajiban bank.

o. Pajak Penghasilan

BPR mengakui kewajiban atas seluruh pajak penghasilan periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar. Jika jumlah yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode sebelumnya melebihi jumlah yang terutang untuk periode tersebut, Perusahaan harus mengakui kelebihan tersebut sebagai aset.

Pajak Penghasilan Kini (*Current Tax*)

Beban pajak penghasilan kini dihitung berdasarkan laba kena pajak untuk periode berjalan sesuai dengan tarif pajak yang berlaku berdasarkan peraturan perpajakan di Indonesia. Kewajiban pajak kini diakui sebesar jumlah pajak yang masih harus dibayar atas laba kena pajak periode berjalan. Jika pembayaran pajak yang telah dilakukan melebihi jumlah pajak yang terutang, maka selisih tersebut diakui sebagai aset pajak kini. Kewajiban atau aset pajak kini dicatat sebesar jumlah yang diharapkan akan dibayar kepada/diterima dari otoritas pajak, dengan menggunakan tarif pajak dan peraturan perpajakan yang berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

PERUMDA BPR BANK KOTA BOGOR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2025

3. DASAR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DAN KEBIJAKAN AKUNTANSI
(Lanjutan)

o. Pajak Penghasilan (Lanjutan)

Pajak Tangguhan (*Deferred Tax*)

Pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajaknya, kecuali untuk *goodwill* yang tidak dapat dikurangkan pajak dan pengakuan awal aset/liabilitas dari transaksi non-bisnis.

Aset pajak tangguhan diakui sepanjang besar kemungkinan bahwa laba kena pajak di masa depan akan tersedia untuk dimanfaatkan dengan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan dan diharapkan berlaku pada saat aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan disajikan dalam laporan posisi keuangan sebagai aset atau liabilitas tidak lancar. Pajak tangguhan diakui dalam laporan laba rugi, kecuali apabila pajak tangguhan tersebut berasal dari transaksi yang langsung diakui ke ekuitas, maka dampaknya juga diakui langsung ke ekuitas.

p. Imbalan Kerja

Kewajiban imbalan kerja sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan PP Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja .

Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja serta Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik Bab 23 tentang “Imbalan Kerja”. Dalam ketentuan tersebut BPR diwajibkan untuk membayarkan imbalan kerja kepada karyawannya pada saat mereka berhenti bekerja dalam hal mengundurkan diri, pensiun normal, meninggal dunia dan cacat tetap. Besarnya imbalan pasca kerja tersebut terutama berdasarkan lamanya masa kerja dan kompensasi karyawan pada saat penyelesaian hubungan kerja. Pada dasarnya imbalan kerja berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13/2003 adalah program imbalan pasti.

q. Pengakuan Pendapatan dan Beban Bunga

Pendapatan dan beban bunga diakui secara akrual, kecuali pendapatan bunga atas kredit dan aktiva produktif lainnya yang diklasifikasikan sebagai kurang lancar, diragukan dan macet (*non-performing*). Pendapatan bunga yang diakui tetapi belum tertagih harus dibatalkan pada saat

PERUMDA BPR BANK KOTA BOGOR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2025

3. DASAR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DAN KEBIJAKAN AKUNTANSI
(Lanjutan)

q. Pengakuan Pendapatan dan Beban Bunga (Lanjutan)

kredit diklasifikasikan *non-performing*. Pendapatan bunga atas aktiva *non-performing* yang belum diterima dilaporkan sebagai tagihan kontijensi dalam akun administratif.

Pendapatan bunga atas kredit yang diklasifikasikan sebagai aktiva produktif lainnya yang diklasifikasikan *non performing* diakui pada saat pendapatan tersebut telah diterima. Seluruh penerimaan yang berhubungan dengan kredit *non-performing* yang diklasifikasikan diragukan dan macet diakui terlebih dahulu sebagai pengurang pokok kredit.

Kelebihan penerimaan dari pokok kredit diakui sebagai pendapatan bunga dalam laporan laba rugi tahun berjalan.

Pendapatan bunga yang ditangguhkan dari kredit yang direstrukturisasi diakui sebagai pendapatan secara proporsional pada saat diterima pembayaran angsuran pokok.

4. K A S

	2 0 2 5 Rp	2 0 2 4 Rp
Uang tunai	<u>2.041.526.200</u>	<u>1.106.438.700</u>

Kas diasuransikan pada PT Asuransi Jasa Indonesia terhadap risiko kebongkaran dengan nilai pertanggungan yang memadai, manajemen menyatakan bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian yang akan terjadi.

5. PENEMPATAN PADA BANK LAIN

	2 0 2 5 Rp	2 0 2 4 Rp
Giro pada bank lain :		
Pihak ketiga :		
PT BPD Jawa Barat dan Banten, Tbk	7.981.075.657	1.329.129.910
PT KB Bukopin, Tbk	6.137.336.035	677.157.279
PT Bank Permata, Tbk	5.929.640.666	5.715.284.642
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk	5.212.992.071	545.609.818
PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk	1.692.793.319	229.474.648
PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk	1.597.657.219	856.483.539
PT Bank Danamon Indonesia, Tbk	781.270.970	2.066.260.170
PT BPD Banten	205.151.128	-
PT Bank Permata Syariah	41.606.034	11.000.000
PT Bank MNC Internasional	14.492.854	-
Jumlah giro pada bank lain	<u>29.594.015.953</u>	<u>11.430.400.006</u>

PERUMDA BPR BANK KOTA BOGOR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2025

5. PENEMPATAN PADA BANK LAIN (Lanjutan)

	2 0 2 5 Rp	2 0 2 4 Rp
Giro pada bank lain	<u>29.594.015.953</u>	<u>11.430.400.006</u>
Tabungan dan deposito :		
Tabungan :		
Pihak ketiga :		
PT BPRS Botani Bina Rahmah	301.125.000	-
PT BPR Dana Mandiri	203.928.452	-
PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk	59.582.717	678.704.203
PT BPR Rama Ganda	40.000.000	-
PT BPR Karyajatnika Sadaya	125.571	373.429
Tabungan	<u>604.761.740</u>	<u>679.077.632</u>
Deposito :		
Pihak ketiga :		
PT BPD Banten (Perseroda), Tbk	12.000.000.000	10.000.000.000
PT KB Bank Bukopin, Tbk	5.042.998.772	11.000.000.000
PT BPD Jawa Barat, Tbk	3.668.750.000	4.668.750.000
PD BPR Artha Galunggung	3.000.000.000	3.000.000.000
Perumda BPR Garut	2.000.000.000	4.000.000.000
PT BPR Bank Jombang (Perseroda)	2.000.000.000	2.000.000.000
PT BPR Nusumma Jatim	2.000.000.000	2.000.000.000
PT BPR Kerta Raharja Gemilang	2.000.000.000	4.000.000.000
PT BPR Kredit Mandiri Indonesia	2.000.000.000	2.000.000.000
PT BPRS Bakti Artha Sejahtera Sampang	2.000.000.000	2.000.000.000
PT BPR Subang Gemi Nastiti (Perseroda)	2.000.000.000	2.000.000.000
PT BPRS Bandar Lampung	2.000.000.000	2.000.000.000
PT BPR Majatama	2.000.000.000	2.000.000.000
PT BPR Hitamajaya Argamandiri	2.000.000.000	2.000.000.000
PT BPR Eka Bumi Artha	2.000.000.000	2.000.000.000
PT BPRS Jam Gadang (Perseroda)	2.000.000.000	2.000.000.000
Perumda BPR Bank Daerah Kab. Madiun	2.000.000.000	2.000.000.000
PT BPR Dana Pensiun TASPEN	2.000.000.000	500.000.000
Perumda BPR Purwarkarta	2.000.000.000	2.000.000.000
PT BPR Arthatama Sejahtera	2.000.000.000	-
PT BPR Dassa	2.000.000.000	-
PT BPR Jwalita Trenggalek	2.000.000.000	2.000.000.000
PT.BPR Surya Artha Utama	2.000.000.000	-
Perumda BPR Kota Sukabumi	2.000.000.000	-
PT BPR Lebak Sejahtera	<u>2.000.000.000</u>	<u>-</u>
Jumlah deposito pihak ketiga dilanjutkan	65.711.748.772	63.168.750.000

PERUMDA BPR BANK KOTA BOGOR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2025

5. PENEMPATAN PADA BANK LAIN (Lanjutan)

	2 0 2 5 Rp	2 0 2 4 Rp
Giro pada bank lain	<u>29.594.015.953</u>	<u>11.430.400.006</u>
Tabungan dan deposito :		
Tabungan	<u>604.761.740</u>	<u>679.077.632</u>
Deposito :		
Pihak ketiga :		
Lanjutan (lanjutan)	65.711.748.772	63.168.750.000
PT Bank Depo Mitra Mandiri	2.000.000.000	-
Perumda BPR Kuningan	2.000.000.000	-
Perumda BPR Bintan	2.000.000.000	-
PT BPR Dana Mandiri Bogor	1.800.000.000	-
PT BPR Berkah (Perseroda)	1.500.000.000	2.000.000.000
PT BPR Mustaqim Aceh (Perseroda)	1.000.000.000	2.000.000.000
PT BPR Hitamajaya Argamandiri	1.000.000.000	1.000.000.000
PT BPR Siliwangi Tasikmalaya	1.000.000.000	1.000.000.000
PT BPR Pekanbaru Madani	500.000.000	500.000.000
PT BPR Kota Pasuruan	500.000.000	500.000.000
PT BPR Baturaja (Perseroda)	500.000.000	500.000.000
PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk	-	5.000.000.000
Perumda BPR Bank Sumedang	-	2.000.000.000
PT BPR Bank Sleman (Perseroda)	-	2.000.000.000
PT BPR Indra Candra	-	2.000.000.000
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk	-	1.000.000.000
PT BPR KAS Indonesia	-	2.000.000.000
PT BPR Bahteramas Konawe	-	500.000.000
PT BPRS Botani Bina Rahmah	-	2.000.000.000
PT BPR Kutai Timur	-	2.000.000.000
PT BPR Hariarta Sedana	-	2.000.000.000
PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk	<u>-</u>	<u>2.800.000.000</u>
Jumlah deposito	79.511.748.772	93.968.750.000
Jumlah tabungan dan deposito	80.116.510.512	94.647.827.632
Jumlah penempatan pada bank lain	109.710.526.465	106.078.227.638
Dikurangi :		
Cadangan penurunan nilai penempatan pada bank lain	(185.909.364)	(181.224.602)
Jumlah	<u><u>109.524.617.101</u></u>	<u><u>105.897.003.036</u></u>

PERUMDA BPR BANK KOTA BOGOR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2025

5. PENEMPATAN PADA BANK LAIN (Lanjutan)

Tingkat suku bunga tabungan selama tahun 2025 dan 2024 berkisar antara 1,50% – 6,00% (2025), dan 1,50% – 4,50% (2024).

Tingkat suku bunga deposito pada tahun 2025 dan 2024 berkisar antara 5,00% – 6,75 (2025) dan 2,25% – 7,25 (2024).

Pada tahun 2025 terdapat deposito berjangka yang dijadikan jaminan ke PT BPD Jawa Barat, Tbk Rp 5.668.750.000 (3 bilyet)

Perubahan Cadangan kerugian penurunan nilai penempatan pada bank lain adalah sebagai berikut :

	2 0 2 5	2 0 2 4
	Rp	Rp
Saldo awal tahun	181.224.602	254.222.593
Cadangan kerugian tahun berjalan	132.309.131	42.490.037
Pemulihan kerugian tahun berjalan	(127.624.369)	(115.488.028)
Saldo akhir tahun	<u>185.909.364</u>	<u>181.224.602</u>

Berdasarkan hasil evaluasi manajemen BPR, kolektibilitas atas seluruh penempatan pada bank lain tanggal 31 Desember 2024 digolongkan lancar. Manajemen BPR menyatakan bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai penempatan pada bank lain cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya penempatan pada bank lain tersebut.

6. KREDIT YANG DIBERIKAN

a. Berdasarkan jenis kredit

	2 0 2 5	2 0 2 4
	Rp	Rp
Konsumsi	173.402.814.008	153.915.724.373
Modal kerja	6.720.397.653	8.076.378.044
Investasi	<u>2.879.887.100</u>	<u>2.879.887.100</u>
Jumlah	183.003.098.761	164.871.989.517
Provisi, Administrasi, Pend.bunga ditangguhkan	(4.413.701.507)	(4.187.073.520)
Cadangan restrukturisasi	<u>(94.445.087)</u>	<u>(108.146.433)</u>
Jumlah kredit yang diberikan	178.494.952.167	160.576.769.564
Dikurangi :		
Cadangan kerugian penurunan nilai	(15.861.413.672)	(13.213.003.037)
Jumlah bersih	<u>162.633.538.495</u>	<u>147.363.766.527</u>

PERUMDA BPR BANK KOTA BOGOR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2025

6. KREDIT YANG DIBERIKAN (Lanjutan)

b. Berdasarkan kolektibilitas

	2 0 2 5 Rp	2 0 2 4 Rp
Lancar	162.094.520.036	146.095.554.968
Dalam Perhatian Khusus	1.467.557.864	1.336.314.663
Kurang lancar	1.216.436.983	754.402.119
Diragukan	1.360.764.929	4.399.355.858
Macet	<u>16.863.818.949</u>	<u>12.286.361.909</u>
Jumlah	183.003.098.761	164.871.989.517
Provisi, Administrasi, Pend.bunga ditangguhkan	(4.413.701.507)	(4.187.073.520)
Cadangan restrukturisasi	<u>(94.445.087)</u>	<u>(108.146.433)</u>
Jumlah kredit yang diberikan	178.494.952.167	160.576.769.564
Dikurangi :		
Cadangan kerugian penurunan nilai	(15.861.413.672)	(13.213.003.037)
Jumlah bersih	<u><u>162.633.538.495</u></u>	<u><u>147.363.766.527</u></u>

c. Berdasarkan sektor ekonomi

	2 0 2 5 Rp	2 0 2 4 Rp
Pendidikan	2.666.665.600	2.666.665.600
Industri pengolahan	323.336.877	242.998.400
Perdagangan besar dan eceran	5.795.183.080	6.713.406.744
Jasa-jasa	815.099.196	1.333.194.400
Kegiatan usaha lainnya	<u>173.402.814.008</u>	<u>153.915.724.373</u>
Jumlah	183.003.098.761	164.871.989.517
Provisi, Administrasi, Pend.bunga ditangguhkan	(4.413.701.507)	(4.187.073.520)
Cadangan restrukturisasi	<u>(94.445.087)</u>	<u>(108.146.433)</u>
Jumlah kredit yang diberikan	178.494.952.167	160.576.769.564
Dikurangi :		
Cadangan kerugian penurunan nilai	(15.861.413.672)	(13.213.003.037)
Jumlah bersih	<u><u>162.633.538.495</u></u>	<u><u>147.363.766.527</u></u>

PERUMDA BPR BANK KOTA BOGOR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2025

6. KREDIT YANG DIBERIKAN (Lanjutan)

d. Berdasarkan jangka waktu

	2 0 2 5 Rp	2 0 2 4 Rp
Kurang dari 1 tahun	5.808.067.965	8.036.136.896
Lebih dari 1 tahun sampai dengan 2 tahun	3.180.490.413	2.926.138.305
Lebih dari 2 tahun	<u>174.014.540.383</u>	<u>153.909.714.316</u>
Jumlah	183.003.098.761	164.871.989.517
Provisi, Administrasi, Pend.bunga ditangguhkan	(4.413.701.507)	(4.187.073.520)
Cadangan restrukturisasi	<u>(94.445.087)</u>	<u>(108.146.433)</u>
Jumlah kredit yang diberikan	178.494.952.167	160.576.769.564
Dikurangi :		
Cadangan kerugian penurunan nilai	(15.861.413.672)	(13.213.003.037)
Jumlah bersih	<u><u>162.633.538.495</u></u>	<u><u>147.363.766.527</u></u>

e. Berdasarkan pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan pihak ketiga

	2 0 2 5 Rp	2 0 2 4 Rp
Kredit :		
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	-	2.127.177.400
Pihak ketiga	<u>183.003.098.761</u>	<u>162.744.812.117</u>
Jumlah	183.003.098.761	164.871.989.517
Provisi, Administrasi, Pend.bunga ditangguhkan	(4.413.701.507)	(4.187.073.520)
Cadangan restrukturisasi	<u>(94.445.087)</u>	<u>(108.146.433)</u>
Jumlah kredit yang diberikan	178.494.952.167	160.576.769.564
Dikurangi :		
Cadangan kerugian penurunan nilai	(15.861.413.672)	(13.213.003.037)
Jumlah	<u><u>162.633.538.495</u></u>	<u><u>147.363.766.527</u></u>

f. Kredit bermasalah

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 rincian kredit bermasalah dan cadangan kerugian Penurunan nilai menurut sektor ekonomi dan jenis penggunaan kredit.

PERUMDA BPR BANK KOTA BOGOR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2025

6. KREDIT YANG DIBERIKAN (Lanjutan)

f. Kredit bermasalah

Sektor ekonomi :

	DPK Rp	Kurang lancar Rp	2 0 2 5 Diragukan Rp	Macet Rp	Jumlah Rp
Perdagangan besar dan eceran	15.014.591	-	-	5.106.234.867	5.121.249.458
Pendidikan	-	-	-	2.666.665.600	2.666.665.600
Jasa-jasa	-	-	-	217.808.900	217.808.900
Industri pengolahan	-	-	-	177.681.800	177.681.800
Kegiatan usaha lainnya	1.452.543.273	1.216.436.983	1.360.764.929	8.695.427.782	12.725.172.967
Jumlah	1.467.557.864	1.216.436.983	1.360.764.929	8.695.818.949	20.908.578.725
Provisi, Pend.bunga ditangguhkan					(198.188.068)
Cadangan restrukturisasi					(50.150.796)
Cadangan kerugian penurunan nilai					(15.848.346.083)
Jumlah bersih					<u>4.811.893.778</u>

	DPK Rp	Kurang lancar Rp	2 0 2 4 Diragukan Rp	Macet Rp	Jumlah Rp
Perdagangan besar dan eceran	34.802.700	24.948.153	3.620.000	5.144.545.098	5.207.915.951
Pendidikan	-	-	2.666.665.600	-	2.666.665.600
Jasa-jasa	-	-	-	213.221.500	213.221.500
Kegiatan usaha lainnya	1.301.511.963	729.453.966	1.729.070.258	6.928.595.311	10.688.631.498
Jumlah	1.336.314.663	754.402.119	4.399.355.858	12.286.361.909	18.776.434.549
Provisi, Pend.bunga ditangguhkan					(234.540.409)
Cadangan restrukturisasi					(60.954.163)
Cadangan kerugian penurunan nilai					(12.489.618.432)
Jumlah bersih					<u>5.991.321.545</u>

Jenis kredit :

	DPK Rp	Kurang lancar Rp	2 0 2 5 Diragukan Rp	Macet Rp	Jumlah Rp
Investasi	-	-	-	2.879.887.100	2.879.887.100
Modal kerja	130.785.726	-	-	5.288.504.067	5.419.289.793
Kredit konsumsi	1.336.772.138	1.216.436.983	1.360.764.929	8.695.427.782	12.609.401.832
Jumlah	1.467.557.864	1.216.436.983	1.360.764.929	16.863.818.949	20.908.578.725
Provisi, Pend.bunga ditangguhkan					(198.188.068)
Cadangan restrukturisasi					(50.150.796)
Cadangan kerugian penurunan nilai					(15.848.346.083)
Jumlah bersih					<u>4.811.893.778</u>

PERUMDA BPR BANK KOTA BOGOR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2025

6. KREDIT YANG DIBERIKAN (Lanjutan)

f. Kredit bermasalah (Lanjutan)

Jenis kredit : (Lanjutan)

	DPK Rp	Kurang lancar Rp	2 0 2 4 Diragukan Rp	Macet Rp	Jumlah Rp
Investasi		-	2.666.665.600	213.221.500	2.879.887.100
Modal kerja	277.801.100	24.948.153	3.620.000	5.144.545.098	5.450.914.351
Kredit konsumsi	1.058.513.563	729.453.966	1.729.070.258	6.928.595.311	10.445.633.098
Jumlah	1.336.314.663	754.402.119	4.399.355.858	12.286.361.909	18.776.434.549
Provisi, Pend.bunga ditangguhkan					(234.540.409)
Cadangan restrukturisasi					(60.954.163)
Cadangan kerugian penurunan nilai					(12.489.618.432)
Jumlah bersih					<u>5.991.321.545</u>

Rasio *Non Performing Loan* (NPL) pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

	2 0 2 5 %	2 0 2 4 %
NPL Gross	6,64	10,58
NPL Net	1,51	3,02

g. Cadangan kerugian penurunan nilai yang diberikan

Cadangan kerugian penurunan nilai berdasarkan kolektibilitas sebagai berikut:

	2 0 2 5 Rp	2 0 2 4 Rp
Lancar	9.808.209	720.125.225
Dalam perhatian khusus	1.011.622.529	32.293.937
Kurang lancar	871.162.085	72.945.397
Diragukan	643.528.867	1.793.645.210
Macet	13.325.291.982	10.593.993.268
Jumlah bersih	<u>15.861.413.672</u>	<u>13.213.003.037</u>

PERUMDA BPR BANK KOTA BOGOR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2025

6. KREDIT YANG DIBERIKAN (Lanjutan)

g. Cadangan kerugian penurunan nilai yang diberikan (Lanjutan)

Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai kredit yang diberikan adalah sebagai berikut :

	2 0 2 5	2 0 2 4
	Rp	Rp
Saldo awal tahun	13.213.003.037	10.889.180.639
Cadangan kerugian selama tahun berjalan	3.933.532.601	3.417.601.903
Pemulihan selama tahun berjalan	(1.542.746.335)	(1.093.779.505)
Penerimaan kredit yang dihapusbuku	(10.125.000)	-
Penyesuaian CKPN	267.749.369	-
Saldo akhir tahun	<u>15.861.413.672</u>	<u>13.213.003.037</u>

Cadangan kerugian penurunan nilai kredit dibentuk berdasarkan hasil penelaahan manajemen BPR terhadap kualitas masing-masing akun kredit yang diberikan pada akhir tahun. Manajemen BPR menyatakan bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai kredit cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya kredit tersebut.

Berikut adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan kredit yang diberikan :

- a. Tingkat suku bunga per tahun untuk kredit yang diberikan rata-rata sebesar 13,82% (2025) dan 15,00% (2024).
- b. Pendapatan bunga kredit yang diberikan selama tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp 31.027.071.566 dan Rp 25.487.655.198 (lihat Catatan 24).
- c. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) yang diperkenankan Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut :

	2 0 2 5
	Rp
Pihak Terkait	9.031.606.361
Pihak Tidak Terkait	18.063.212.722
Kelompok Peminjam Pihak Tidak Terkait	27.094.819.083

Pada tanggal 31 Desember 2025 tidak ada kredit yang melampaui Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, BPR membentuk cadangan kerugian penurunan nilai kredit yang diberikan dengan penjelasan sebagai berikut :

	2 0 2 5	2 0 2 4
	Rp	Rp
Cadangan kerugian penurunan nilai yang wajib dibentuk sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	15.861.413.672	13.213.003.037
Cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk Bank	15.858.154.292	13.213.003.037
Kelebihan (kekurangan) pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai	<u>3.259.380</u>	<u>-</u>

PERUMDA BPR BANK KOTA BOGOR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2025

7. AGUNAN YANG DIAMBIL ALIH

	2 0 2 5 Rp	2 0 2 4 Rp
Kredit yang diberikan	<u>883.830.364</u>	<u>883.830.364</u>

Agunan yang diambil alih terdiri dari sebagai berikut:

No	Nama Debitur	Tanggal AYDA	Jaminan	Nilai AYDA
				Rp
1	Wawan Suherman	30-07-2024	SHM atas nama debitur – APHT dibawah tangan	259.810.950
2	Catra Daendra ND	29-12-2023	Tanah dan bangunan - APHT	293.843.700
3	PT Media Dimensi Teknologi Indonesia	26-09-2024	SHM - APHT	330.175.706
				<u>883.830.356</u>

8. ASET TETAP

	Saldo awal Rp	2 0 2 5 Penambahan Rp	Pengurangan Rp	Saldo akhir Rp
Biaya perolehan :				
Tanah	2.444.700.000	-	-	2.444.700.000
Bangunan	1.856.228.289	-	-	1.856.228.289
Inventaris Golongan I	1.532.127.170	52.423.000	-	1.584.550.170
Inventaris Golongan II	618.263.388	-	-	618.263.388
Kendaraan	2.126.560.600	-	-	2.126.560.600
Jumlah	<u>8.577.879.447</u>	<u>52.423.000</u>	<u>-</u>	<u>8.630.302.447</u>
Akumulasi penyusutan :				
Bangunan	801.033.738	88.880.814	-	889.914.552
Inventaris Golongan I	1.024.358.205	207.004.214	-	1.231.362.419
Inventaris Golongan II	427.719.933	45.653.850	-	473.373.783
Kendaraan	680.231.560	265.820.063	-	946.051.623
Jumlah	<u>2.933.343.436</u>	<u>607.358.941</u>	<u>-</u>	<u>3.540.702.377</u>
Nilai buku	<u>5.644.536.011</u>			<u>5.089.600.070</u>

PERUMDA BPR BANK KOTA BOGOR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2025

8. ASET TETAP (Lanjutan)

	Saldo awal Rp	2024 Penambahan Rp	Pengurangan Rp	Saldo akhir Rp
Biaya perolehan :				
Tanah	2.444.700.000	-	-	2.444.700.000
Bangunan	1.856.228.289	-	-	1.856.228.289
Inventaris Golongan I	1.268.983.350	263.143.820	-	1.532.127.170
Inventaris Golongan II	553.929.388	64.334.000	-	618.263.388
Kendaraan	856.710.600	1.269.850.000	-	2.126.560.600
Jumlah	<u>6.980.551.627</u>	<u>1.597.327.820</u>	<u>-</u>	<u>8.577.879.447</u>
Akumulasi penyusutan :				
Bangunan	708.222.324	92.811.414	-	801.033.738
Inventaris Golongan I	818.163.458	206.194.747	-	1.024.358.205
Inventaris Golongan II	376.481.676	51.238.257	-	427.719.933
Kendaraan	452.823.458	227.408.102	-	680.231.560
Jumlah	<u>2.355.690.916</u>	<u>577.652.520</u>	<u>-</u>	<u>2.933.343.436</u>
Nilai buku	<u>4.624.860.711</u>			<u>5.644.536.011</u>

Kendaraan diasuransikan kepada PT Asuransi Sinar Mas terhadap risiko kehilangan dan risiko lainnya dan bangunan diasuransikan kepada PT Asuransi Artarindo terhadap risiko kebakaran dan risiko lainnya dengan nilai pertanggungan yang memadai. Manajemen menyatakan bahwa nilai pertanggungan asuransi tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian yang akan terjadi.

Beban penyusutan aset tetap yang dibebankan pada beban umum dan administrasi masing-masing sebesar Rp 607.358.941 untuk tahun 2025 dan Rp 577.652.520 untuk tahun 2024.

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap aset tetap pada tanggal 31 Desember 2025, manajemen BPR menyatakan bahwa tidak terdapat indikasi adanya penurunan nilai, oleh karena itu BPR tidak membentuk cadangan kerugian penurunan nilai aset tetap.

9. ASET TIDAK BERWUJUD

	2025 Rp	2024 Rp
Software	302.005.000	302.005.000
Akumulasi amortisasi	(302.005.000)	(302.005.000)
Jumlah	<u>-</u>	<u>-</u>

PERUMDA BPR BANK KOTA BOGOR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2025

10. ASET LAIN-LAIN

	2 0 2 5 Rp	2 0 2 4 Rp
Pendapatan bunga yang akan diterima :		
Kredit yang diberikan	1.693.800.119	240.968.151
Penempatan pada bank yang lain	664.436.741	1.056.259.206
	<u>2.358.236.860</u>	<u>1.297.227.357</u>
Biaya dibayar dimuka :		
Sewa	240.691.712	315.699.809
Premi asuransi	26.517.390	11.481.574
Pemeliharaan	-	123.252.840
Lainnya	20.833.332	222.197.940
	<u>288.042.434</u>	<u>672.632.163</u>
Aset keuangan lainnya :		
Piutang ganti rugi	650.000.000	-
Cadangan kerugian penurunan nilai piutang ganti rugi	(650.000.000)	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
Jumlah aset keuangan lainnya		
Lainnya :		
Persediaan barang cetakan	55.345.110	32.720.350
Lainnya	110.269.323	135.998.254
	<u>165.614.433</u>	<u>168.718.604</u>
Jumlah lainnya		
Jumlah	<u>2.811.893.727</u>	<u>2.138.578.124</u>

11. LIABILITAS SEGERA

	2 0 2 5 Rp	2 0 2 4 Rp
Titipan nasabah :		
Titipan asuransi	283.046.411	392.250.380
Titipan angsuran kredit	1.957.804	5.029.200
Titipan potongan tunjangan kinerja	-	2.216.226.430
Deposito telah jatuh tempo	-	1.000.000
Lainnya	6.026.632	59.470.071
	<u>291.030.847</u>	<u>2.673.976.081</u>
Jumlah liabilitas segera		

PERUMDA BPR BANK KOTA BOGOR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2025

12. SIMPANAN

	2 0 2 5 Rp	2 0 2 4 Rp
Tabungan		
Tabungan Prima	65.649.336.369	69.382.133.890
Tabungan Simple Prima	1.511.892.380	1.298.159.008
Tabungan Berjangka Prima	1.061.020.562	1.054.247.508
Tabungan Simarmas Prima	1.324.760.000	285.250.000
Jumlah tabungan	<u>69.547.009.311</u>	<u>72.019.790.406</u>
Deposito berjangka		
Menurut jangka waktu :		
1 bulan	4.237.800.000	2.960.800.000
3 bulan	10.714.500.000	2.677.700.000
6 bulan	9.398.749.999	15.685.000.000
9 bulan	1.535.000.000	1.605.000.000
12 bulan	53.631.341.691	48.781.500.000
Jumlah deposito berjangka - bersih	<u>79.517.391.690</u>	<u>71.710.000.000</u>
Jumlah simpanan	<u>149.064.401.001</u>	<u>143.729.790.406</u>

Tingkat suku bunga tabungan rata-rata untuk tahun 2025 dan 2024 masing – masing sebesar 2,65 % dan 3,20% per tahun. Beban bunga yang dibayarkan selama tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp 1.527.997.531 dan Rp 1.989.309.963 (lihat Catatan 25).

Tingkat suku bunga deposito rata-rata untuk tahun 2025 dan 2024 masing – masing sebesar 5,17 % (2025) dan 6,00 (2024). Beban bunga yang dibayarkan selama tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp 3.924.200.464 dan Rp 3.971.684.460 (lihat Catatan 25).

Simpanan berdasarkan pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan pihak ketiga :

	2 0 2 5 Rp	2 0 2 4 Rp
Tabungan :		
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	1.184.187.302	856.201.590
Pihak ketiga	68.362.822.009	71.163.588.816
Jumlah	<u>69.547.009.311</u>	<u>72.019.790.406</u>
Deposito berjangka :		
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	1.776.500.000	2.190.500.000
Pihak ketiga	77.740.891.690	69.519.500.000
Jumlah - bersih	<u>79.517.391.690</u>	<u>71.710.000.000</u>
Jumlah simpanan	<u>149.064.401.001</u>	<u>143.729.790.406</u>

PERUMDA BPR BANK KOTA BOGOR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2025

13. SIMPANAN DARI BANK LAIN

	2 0 2 5 Rp	2 0 2 4 Rp
Perumda BPR Bank Kulon Progo	1.000.000.000	2.000.000.000
Perumda BPR Majalengka	1.000.000.000	-
Jumlah	<u>2.000.000.000</u>	<u>2.000.000.000</u>

Simpanan dari bank lain merupakan simpanan dalam bentuk deposito berjangka waktu 3 (tiga) bulan sebanyak 2 (dua) bilyet masing-masing Rp 500.000.000 dan 6 (enam) bulan sebanyak 1(satu) bilyet sebesar Rp 1.000.000.000, dengan perpanjangan otomatis. Tingkat suku bunga rata-rata deposito dari bank lain sebesar 5,83% (2025) dan 5,50% (2024) per tahun.

14. LIABILITAS LAIN_LAIN

	2 0 2 5 Rp	2 0 2 4 Rp
Utang bunga deposito yang belum jatuh tempo	165.248.947	169.087.378
Cadangan dana pendidikan	133.804.662	22.910.895
Jasa produksi	40.390.407	-
Dana kesejahteraan	22.603.532	-
UB Simpanan dari Bank lain belum jatuh tempo	11.720.431	33.711.528
Utang bunga deposito yang sudah jatuh tempo	279.415	-
UB Pinjaman yang diterima dari Bank	-	49.249.554
Lainnya	63.866.600	10.227.914
Jumlah	<u>437.913.994</u>	<u>285.187.270</u>

15. LIABILITAS IMBALAN KERJA

Penghitungan liabilitas imbalan kerja mengacu kepada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, serta Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Privat Bab 28 tentang “Imbalan Kerja,”

Berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah serta Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik tersebut di atas besarnya Liabilitas Imbalan Kerja, dihitung berdasarkan masa kerja, tingkat diskonto, dan ekspektasi tingkat kenaikan gaji pada tanggal pelaporan.

PERUMDA BPR BANK KOTA BOGOR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2025

15. LIABILITAS IMBALAN KERJA (Lanjutan)

Berikut ini adalah mutasi kewajiban imbalan kerja untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 :

	2 0 2 5 Rp	2 0 2 4 Rp
Saldo awal tahun lalu	-	215.083.062
Penggunaan cadangan umum	187.200.030	321.017.788
Pembentukan tahun berjalan	295.491.505	-
Pengurangan	(58.051.725)	(536.100.850)
Saldo pada akhir tahun	<u>424.639.810</u>	<u>-</u>

Perhitungan kewajiban imbalan kerja BPR terakhir dihitung oleh Kantor Konsultan Aktuaria Hendri dengan nomor laporan: 003/SAK-ETAP/KKA-HD/I/2026 tanggal 06 Januari 2026. Kewajiban imbalan kerja dihitung dengan menggunakan asumsi sebagai berikut :

Jumlah pegawai tetap	:	47
Tingkat diskonto	:	7,22%
Umur pensiun normal	:	56 tahun
Kenaikan salary per tahun	:	3%

BPR telah mengikutsertakan pegawainya pada program pensiun Dana Pensiun Lembaga Keuangan. Jumlah iuran dan pengembangan keikutsertaan program pensiun pada DPLK PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk per 31 Desember 2025 sebesar Rp 3.045.815.850 Manajemen BPR berkeyakinan bahwa saldo imbalan kerja tersebut cukup untuk memenuhi imbalan minimum sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku pada tanggal pelaporan.

PERUMDA BPR BANK KOTA BOGOR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2025

16. PERPAJAKAN

a. Taksiran perhitungan pajak penghasilan

Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan dengan hasil perhitungan laba menurut laporan keuangan sebelum pajak penghasilan dan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut :

	2 0 2 5 Rp	2 0 2 4 Rp
Laba sebelum pajak penghasilan	<u>7.586.508.041</u>	<u>6.974.430.022</u>
Perbedaan waktu	<u>295.491.505</u>	<u>215.083.062</u>
Perbedaan tetap :		
Beban yang tidak dapat dikurangkan :		
Jamuan tamu	8.824.264	18.960.139
Tunjangan pajak pph 21	931.903.976	758.571.644
Jumlah perbedaan tetap	<u>940.728.240</u>	<u>777.531.783</u>
Penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final		
Sewa	(68.413.400)	(52.920.000)
	<u>(68.413.400)</u>	<u>(52.920.000)</u>
Laba fiskal	<u>8.754.314.386</u>	<u>7.914.124.867</u>
Taksiran pajak penghasilan badan	<u>1.812.591.841</u>	<u>1.625.857.743</u>

Taksiran Perhitungan Pajak Penghasilan Badan tahun 2025 dan 2024, dihitung berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Bab III Pajak Penghasilan Pasal 17 ayat 1b dan Undang-Undang No. 36 tahun 2008 tentang Perubahan keempat atas Undang-Undang No.7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, pasal 31E ayat (1).

Penghitungan pajak penghasilan badan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 di atas adalah suatu estimasi penghitungan yang dibuat untuk tujuan akuntansi dan dapat berubah pada waktu BPR menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak ("SPT") Badan atau pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Direktur Jenderal Pajak.

PERUMDA BPR BANK KOTA BOGOR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2025

16. PERPAJAKAN (Lanjutan)

b. Utang pajak

	2 0 2 5 Rp	2 0 2 4 Rp
Taksiran pajak penghasilan badan	1.812.591.841	1.625.857.743
Dikurangi : Pajak dibayar dimuka	1.569.628.722	1.439.223.288
Pajak Penghasilan pasal 29	<u>242.963.119</u>	<u>186.634.455</u>
Utang pajak lainnya :		
PPh pasal 21	156.600.716	130.502.656
PPh pasal 23	2.914.263	1.849.782
PPh pasal 23 bunga deposito	64.775.334	69.735.463
PPh pasal 23 bunga tabungan	23.797.816	27.987.258
PPh pasal 25	301.945.358	407.501.024
Jumlah	<u>792.996.606</u>	<u>824.210.638</u>

c. Pajak Tangguhan

	2 0 2 5		2 0 2 4
	1 Januari 2025 Rp	Dikreditkan ke laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Rp	31 Desember 2025 Rp
Aset (liabilitas) pajak tangguhan :			
Liabilitas imbalan kerja	—	65.008.131	65.008.131
Jumlah	<u>—</u>	<u>65.008.131</u>	<u>65.008.131</u>
	1 Januari 2024 Rp	Dikreditkan ke laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Rp	31 Desember 2024 Rp
Aset (liabilitas) pajak tangguhan :			
Liabilitas imbalan kerja	—	—	—
Jumlah	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>

PERUMDA BPR BANK KOTA BOGOR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2025

16. PERPAJAKAN (Lanjutan)

c. Pajak Tangguhan (Lanjutan)

Rekonsiliasi antara jumlah beban pajak dan jumlah yang dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut :

	2 0 2 5 Rp	2 0 2 4 Rp
Laba sebelum pajak penghasilan	7.586.508.041	—
Pajak pada tarif yang berlaku	1.669.031.769	—
Pengaruh pajak atas beban yang tidak diperkenankan / penghasilan tidak kena pajak :		
Beban yang tidak diperkenankan	206.960.213	—
Penghasilan yang dikenakan Pajak penghasilan bersifat final	(11.475.926)	—
Penyesuaian	(116.932.346)	—
	<u>1.747.583.710</u>	<u>—</u>

d. Penghasilan (beban) pajak

	2 0 2 5 Rp	2 0 2 4 Rp
Pajak penghasilan	(1.812.591.841)	—
Penghasilan (beban) pajak tangguhan	65.008.131	—
Penghasilan (beban) pajak	<u>(1.747.583.710)</u>	<u>—</u>

e. Administrasi

Berdasarkan peraturan perpajakan Indonesia, Perusahaan menghitung, menetapkan dan membayar secara sendiri pajak penghasilannya. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat menetapkan atau mengubah liabilitas pajak dalam batas waktu lima tahun sejak saat terutangnya pajak.

Berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia, Perusahaan menerapkan sistem *self-assessment*, di mana entitas menghitung, menetapkan, dan membayar sendiri Pajak Penghasilan yang terutang.

Direktorat Jenderal Pajak berwenang untuk melakukan pemeriksaan serta menetapkan atau mengubah jumlah liabilitas pajak Perusahaan dalam jangka waktu paling lama lima tahun sejak saat terutangnya pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

PERUMDA BPR BANK KOTA BOGOR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2025

17. PINJAMAN YANG DITERIMA

	2 0 2 5 Rp	2 0 2 4 Rp
PT Bank KB Bukopin, Tbk		
Kredit Baki Debet	29.168.842.987	11.098.448.819
PT BPD Jabar Banten, Tbk :		
Kredit Baki Debet - pokok	500.000.000	3.000.000.000
PT Sarana Multigriya Finansial		
Kredit Baki Debet - pokok	10.024.615.216	11.291.875.045
PT Bank Permata, Tbk		
Kredit Baki Debet - pokok	958.393.966	448.754.100
Jumlah	40.651.852.169	25.839.077.964
Dikurangi : Biaya provisi dan transaksi	-	(145.547.248)
Jumlah	<u>40.651.852.169</u>	<u>25.693.530.716</u>

PT Bank KB Bukopin, Tbk:

Berdasarkan akta perjanjian kredit atau pinjaman nomor 09 tanggal 6 Juni 2024, BPR memperoleh fasilitas Pinjaman modal kerja dari PT Bank KB Bukopin, Tbk, dengan bentuk kredit *installment* dan sifak kredit *uncommitted loan*. Jumlah plafond pinjaman sebesar Rp 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah), dengan tingkat suku bunga sebesar 8,75%/tahun, berlaku selama 2 (dua) tahun pertama, selanjutnya sesuai ALCO (*asset dan liability committee*). Jangka waktu 60 (enam puluh) bulan terhitung sejak tanggal pencairan kredit pertama.

PT Bank Jabar Banten, Tbk:

Berdasarkan addendum perjanjian kredit No. 009/BOG-CC/PK/IV/2021 tanggal 23 April 2021, BPR memperoleh fasilitas Pinjaman modal kerja dari PT Bank Jabar Banten Tbk, jumlah fasilitas kredit sebesar Rp 7.000.000.000 (tujuh milyar rupiah), dengan tingkat suku bunga sebesar 0,85% diatas suku bunga deposito yang menjadi jaminan yaitu sebesar 8,50%. per tahun, jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan. Pola pengembalian yang berikan dari PT Bank Jabar Banten, Tbk adalah pola pengembalian sekaligus, sehingga BPR wajib melunasi bunga kredit dengan cara diangsur setiap bulan dan melunasi pokok fasilitas kredit secara sekaligus pada tanggal 28 April 2025

PT Bank Permata, Tbk

Berdasarkan surat perubahan ketiga perjanjian pemberian fasilitas perbankan ("Perubahan ketiga ketentuan khusus") dengan perjanjian Nomor SKU/25/165005/AMD/EBB tanggal 30 Juli 2025 BPR memperoleh fasilitas pinjaman rekening koran dari PT Bank Permata, Tbk sebesar Rp 5.000.000.000 (lima milyar rupiah), dengan Tingkat suku bunga sebesar 1,85% di atas suku bunga rekening giro yang dijaminakan di bank per tahun. Jangka waktu 12 bulan (dua belas bulan) sampai dengan jangka waktu fasilitas sampai dengan tanggal 05 Agustus 2026.

PERUMDA BPR BANK KOTA BOGOR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2025

17. PINJAMAN YANG DITERIMA (Lanjutan)

PT Sarana Multigriya Finansial

Berdasarkan akta perjanjian pemberian *uncommitted facility line* dari PT Sarana Multigriya Financial (PERSERO) kepada PERUMDA BPR Bank Kota Bogor nomor 06 tanggal 18 Mei 2022 BPR memperoleh fasilitas Pinjaman modal kerja dengan limit sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).

18. MODAL

Komposisi kepemilikan modal BPR per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Pemegang saham	Persentase kepemilikan %	Jumlah Rp
Pemerintah Kota Bogor	<u>100</u>	<u>54.000.000.000</u>

19. CADANGAN

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor 900.1.13.2/Kep.66-Ekon/2025 tanggal 18 Februari 2025 tentang Pengesahan Laporan Tahunan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kota Bogor tahun 2024, BPR telah menambah cadangan umum sebesar Rp 534.857.228 dan cadangan tujuan sebesar Rp 534.857.228 sehingga saldo cadangan pada tanggal 31 Desember 2025 menjadi sebesar Rp 29.548.255.329.

20. DIVIDEN

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor 900.1.13.2/Kep.66-Ekon/2025 tanggal 18 Februari 2025 tentang Pengesahan Laporan Tahunan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kota Bogor tahun 2023, penetapan pembagian deviden tahun 2024, BPR telah membagikan laba untuk Pemerintah Daerah yang berasal dari laba tahun 2024 sebesar 55% dari Laba bersih setelah dikurangi pajak atau sebesar Rp 2.941.714.753.

PERUMDA BPR BANK KOTA BOGOR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2025

21. PENDAPATAN BUNGA

	2 0 2 5 Rp	2 0 2 4 Rp
Penempatan pada bank lain :		
Deposito berjangka	4.664.877.321	4.960.260.519
Giro	100.024.926	388.077.090
Tabungan	17.075.355	40.814.857
Jumlah	<u>4.781.977.602</u>	<u>5.389.152.466</u>
Kredit yang diberikan :		
Kredit Konsumsi	30.342.776.144	24.641.188.837
Kredit Modal Kerja	401.016.595	510.104.411
Kredit Konsumsi Plus	283.278.827	336.361.950
Jumlah	<u>31.027.071.566</u>	<u>25.487.655.198</u>
Jumlah pendapatan bunga	<u>35.809.049.168</u>	<u>30.876.807.664</u>
Pendapatan provisi :		
Provisi kredit	<u>1.995.497.959</u>	<u>2.443.381.944</u>
Biaya transaksi :		
Transaksi kredit	<u>(100.452.630)</u>	<u>(99.053.443)</u>
Jumlah	<u>37.704.094.497</u>	<u>33.221.136.165</u>

22. PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA

	2 0 2 5 Rp	2 0 2 4 Rp
Pemulihan CKPN	1.542.746.335	1.209.267.533
Administrasi tabungan	894.353.555	1.003.769.863
Administrasi kredit	367.883.500	371.803.000
Pendapatan <i>fee</i>	69.610.450	199.127.032
Pendapatan jasa transaksi	67.114.169	66.814.107
<i>Pinalty</i> deposito	10.891.794	18.142.948
Penerimaan kredit yang dihapus buku	10.125.000	18.548.123
Pendapatan operasional lainnya	16.299	12.142
Jumlah	<u>2.962.741.102</u>	<u>2.887.484.748</u>

PERUMDA BPR BANK KOTA BOGOR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2025

23. BEBAN BUNGA

	2 0 2 5 Rp	2 0 2 4 Rp
Bunga bank lain :		
Bunga pinjaman dari bank lain	2.097.633.125	694.940.231
Bunga simpanan dari bank lain	84.258.896	226.484.879
Jumlah bunga bank lain	<u>2.181.892.021</u>	<u>921.425.110</u>
Bunga simpanan :		
Deposito berjangka	3.924.200.464	3.971.684.460
Tabungan	1.527.997.531	1.989.309.963
Jumlah simpanan	<u>5.452.197.995</u>	<u>5.960.994.423</u>
Bunga bukan bank		
Pinjaman pihak ketiga bukan bank	787.559.493	871.477.858
Provisi / transaksi	218.229.824	98.554.196
Lainnya	269.214.105	266.835.572
Jumlah bunga bukan bank	<u>1.275.003.422</u>	<u>1.236.867.626</u>
Jumlah	<u>8.909.093.438</u>	<u>8.119.287.159</u>

24. BEBAN CADANGAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI

	2 0 2 5 Rp	2 0 2 4 Rp
Cadangan kerugian penurunan nilai kredit yang diberikan	3.933.532.601	3.417.601.903
Cadangan kerugian penurunan nilai penempatan pada bank lain	132.309.131	42.490.037
Kerugian aset keuangan lainnya	780.000.000	-
Jumlah	<u>4.845.841.732</u>	<u>3.460.091.940</u>

25. BEBAN PEMASARAN

	2 0 2 5 Rp	2 0 2 4 Rp
Beban pemasaran	<u>128.976.000</u>	<u>109.646.940</u>

PERUMDA BPR BANK KOTA BOGOR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2025

26. BEBAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

	2 0 2 5 Rp	2 0 2 4 Rp
Beban penelitian dan pengembangan	<u>70.000.000</u>	<u>-</u>

27. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

	2 0 2 5 Rp	2 0 2 4 Rp
Gaji dan tunjangan	13.019.535.852	11.132.581.429
Premi asuransi	1.002.884.829	1.156.263.897
Sewa	894.196.137	864.003.223
Penyusutan	607.358.918	577.652.520
Pendidikan dan pelatihan	566.672.950	385.000.000
Listrik, telepon, internet, pos, fax, materai, dan koran	529.328.978	453.022.746
Pemeliharaan dan perbaikan	490.478.938	498.799.046
Barang cetakan, stensil, fotocopy	411.221.240	276.233.290
Pajak	200.191.754	61.040.619
Alat tulis dan kantor	193.755.356	185.839.775
Administrasi antar bank	132.290.436	121.479.312
Perjalanan dinas	129.865.198	124.339.588
Seragam dinas	117.886.425	1.025.000
Kebersihan dan keamanan kantor	103.920.804	63.035.575
<i>Profesional fee</i>	39.850.000	58.850.000
Lainnya	124.700.000	-
Jumlah dilanjutkan	<u>18.564.137.815</u>	<u>15.959.166.020</u>

28. BEBAN OPERASIONAL LAINNYA

	2 0 2 5 Rp	2 0 2 4 Rp
Rapat, pertemuan dan kegiatan lainnya	389.463.008	330.729.220
Iuran OJK dan asosiasi	187.443.569	138.739.090
Jamuan	8.824.264	18.960.139
Promosi	-	141.391.455
Denda dan saksi	-	1.306.135
Lainnya	1.938.041	921.781.671
	<u>587.668.882</u>	<u>1.552.907.710</u>

PERUMDA BPR BANK KOTA BOGOR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2025

29. PENDAPATAN NON OPERASIONAL

	2 0 2 5 Rp	2 0 2 4 Rp
Agunan yang diambil alih (AYDA)	-	11.914.875
Laba penjualan aset tetap	-	-
Lainnya	109.367.410	136.941.502
Jumlah	<u>109.367.410</u>	<u>148.856.377</u>

30. BEBAN NON OPERASIONAL

	2 0 2 5 Rp	2 0 2 4 Rp
Iuran dan sumbangan	38.256.500	53.641.500
Lainnya	45.720.601	28.306.000
	<u>83.977.101</u>	<u>81.947.500</u>

31. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK-PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA

Pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah perusahaan dan perorangan yang memiliki keterkaitan kepemilikan atau kepengurusan secara langsung atau tidak langsung.

Dalam kegiatan usaha normal periode 31 Desember 2025, BPR melakukan transaksi usaha dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa diantaranya yaitu :

- a. Kredit yang diberikan sebesar Nihil (Lihat Catatan 7).
- b. Simpanan deposito berjangka sebesar Rp 1.184.187.302 dan Tabungan sebesar Rp 1.776.500.000 (Lihat Catatan 15).

32. JAMINAN PEMERINTAH TERHADAP KEWAJIBAN PEMBAYARAN BANK PERKREDITAN RAKYAT

Pada tanggal 22 September 2004, Presiden Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang No. 24 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Berdasarkan Undang-Undang tersebut, LPS berfungsi menjamin simpanan nasabah sampai dengan 100.000.000 (nilai penuh) dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Undang-Undang tersebut berlaku efektif sejak tanggal 22 September 2005 dan sejak tanggal tersebut LPS resmi beroperasi.

Pada tanggal 13 Oktober 2008, Presiden Republik Indonesia menetapkan Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2008 tentang besaran nilai simpanan yang dijamin LPS. Berdasarkan peraturan tersebut, nilai simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank yang semula

PERUMDA BPR BANK KOTA BOGOR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2025

32. JAMINAN PEMERINTAH TERHADAP KEWAJIBAN PEMBAYARAN BANK PERKREDITAN RAKYAT (Lanjutan)

berdasarkan Undang-Undang No. 24 tahun 2004 ditetapkan maksimum Rp 100.000.000 (nilai penuh) diubah menjadi maksimum Rp 2.000.000.000 (nilai penuh).

Berdasarkan Peraturan LPS No. 1 Tahun 2023 tentang Program Penjaminan Simpanan, simpanan pada Bank konvensional yang dijamin berbentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu

Nilai Simpanan yang dijamin LPS mencakup saldo yang tercatat pada pembukuan Bank pada tanggal pencabutan izin usaha Bank. Saldo yang dijamin untuk setiap Nasabah Penyimpan pada satu Bank paling banyak Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah).

Berdasarkan Undang-undang No. 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan (PLPS) No. 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan No 2/PLPS/2010 tentang Program Penjaminan simpanan, LPS menetapkan tingkat bunga penjaminan 3 (tiga) kali dalam satu tahun yaitu pada minggu kedua bulan Januari, Mei dan September, kecuali terjadi perubahan pada kondisi perekonomian dan perbankan yang signifikan. Untuk bulan-bulan di luar periode penetapan tersebut, dilakukan evaluasi terhadap tingkat bunga penjaminan. Berkenaan dengan hal tersebut, LPS menetapkan tingkat bunga yang wajar untuk simpanan di Bank Perkreditan Rakyat periode 1 Oktober 2025 – 31 Januari 2026 adalah sebesar 6,00%.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, BPR adalah peserta dari program penjaminan tersebut. Beban premi penjaminan LPS yang dibayar selama tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp 269.214.105 dan Rp 266.835.572 .

34. RASIO KECUKUPAN MODAL

BPR diwajibkan untuk memenuhi persyaratan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR) yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No 05/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat bahwa BPR wajib menyediakan modal minimum yang dihitung dengan menggunakan rasio KPMM paling rendah sebesar 12% dari ATMR. *Capital Adequacy Ratio* Bank pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar 46,45% dan 58,94%.

PERUMDA BPR BANK KOTA BOGOR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2025

34. RASIO KECUKUPAN MODAL (Lanjutan)

Tabel berikut ini menunjukkan modal dan rasio kecukupan modal (KPMM) atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

	2025 Rp
I. ASET TERTIMBANG MENURUT RESIKO (ATMR)	
1. ASET NERACA	
1.1. Kas	—
1.2. Surat berharga yang diterbitkan Bank Indonesia	—
1.3. Surat berharga yang diterbitkan Pemerintah	—
1.4. Surat berharga yang diterbitkan Pemerintah Daerah	—
1.5. Kredit yang diberikan dengan agunan tunai sesuai POJK KA BPR, sebesar nilai terendah antara agunan dan baki debit.	—
1.6. Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) yang telah melampaui 1 (satu) tahun sejak tanggal pengambilalihan.	—
1.7. Properti terbengkalai yang telah melampaui 1 (satu) tahun sejak tanggal penetapan.	—
1.8. Kredit yang diberikan dengan agunan berupa emas perhiasan	—
1.9. Penempatan pada bank lain dalam bentuk giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan tagihan lainnya kepada Bank lain.	21.941.950.408
1.10. Kredit kepada atau yang dijamin oleh Bank lain atau Pemerintah Daerah	—
1.11. Bagian dari Kredit yang dijamin oleh Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/BUMD) yang melakukan usaha sebagai penjamin kredit.	—
1.12. Kredit dengan agunan berupa tanah dan/atau bangunan yang memiliki sertifikat yang dibebani dengan hak tanggungan atau fidusia	833.277.927
1.13. Kredit Kepada BUMN/BUMD	—
1.14. Bagian kredit yang dijamin oleh BUMN/BUMD	—
1.15. Bagian kredit yang dijamin asuransi kredit oleh perusahaan asuransi swasta dengan persyaratan tertentu.	—
1.16. Kredit kepada pegawai atau pensiunan yang memenuhi persyaratan.	—
1.17. Kredit dengan agunan berupa tanah dan/atau bangunan yang memiliki Sertipikat namun tidak dibebani dengan hak tanggungan atau fidusia.	747.927.911
1.18. Kredit yang diberikan kepada usaha mikro dan kecil yang memenuhi seluruh kriteria.	159.095.701.727
1.19. Kredit dengan agunan berupa kendaraan bermotor, kapal atau perahu bermotor, alat berat, dan/atau mesin yang menjadi satu kesatuan dengan tanah.	—
1.20. Penyertaan Modal	—
1.21. Tagihan atau kredit lain yang tidak memenuhi kriteria bobot risiko di atas.	160.132.216
1.22. Tagihan atau kredit yang telah jatuh tempo atau dengan kualitas macet.	3.490.641.842
1.23. Aset Tetap, Inventaris dan aset tidak berwujud.(nilai buku).	5.112.370.493
1.24. Agunan yang diambil alih (AYDA) yang belum melampaui 1 (satu) tahun sejak tanggal pengambilalihan.	—
1.25. Properti Terbengkalai yang belum melampaui 1 (satu) tahun sejak tanggal penetapan.	—
1.26. Aset lain, selain angka 1 s.d angka 25	2.906.175.797
Jumlah ATMR	<u>194.288.178.321</u>

PERUMDA BPR BANK KOTA BOGOR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2025

34. RASIO KECUKUPAN MODAL (Lanjutan)

	2024 Rp
II. ASET TERTIMBANG MENURUT RESIKO (ATMR)	
2. ASET NERACA	
1.4. Kas	-
1.5. Sertifikat Bank Indonesia (SBI)	-
1.6. Kredit yang diberikan dengan agunan bersifat liquid berupa SBI, surat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, tabungan dan/atau deposito yang diblokir pada BPR yang bersangkutan berdasarkan perjanjian antara BPR dan nasabah disertai dengan surat Kuasa pencairan, dan logam mulia, sebesar nilai terendah antara agunan dan baki debet; dan	-
1.4. Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) yang telah melampaui 1 (satu) tahun sejak tanggal pengambilalihan.	-
1.7. Kredit yang diberikan dengan agunan berupa emas perhiasan yang disimpan atau dibawah pengawasan BPR.	-
1.8. Penempatan pada bank lain dalam bentuk giro, deposito berjangka, tabungan, dan tagihan lainnya kepada bank lain	21.215.645.528
1.27. Kredit kepada atau yang dijamin oleh bank lain atau Pemerintah Daerah	-
1.28. Bagian dari kredit yang dijamin oleh Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/BUMD) yang melakukan usaha sebagai penjamin kredit.	-
1.29. Kredit dengan agunan berupa tanah dan rumah tinggal/rumah toko/ rumah kantor yang diikat oleh hak tanggungan pertama.	734.180.836
1.30. Kredit kepada BUMN/BUMD atau kredit yang dijamin oleh BUMN/ BUMD yang melakukan usaha penjaminan kredit namun tidak memenuhi persyaratan untuk diberikan bobot risiko sebesar 20% (dua puluh persen) sebagaimana tersebut di atas.	-
1.31. Kredit kepada Pegawai/Pensiunan	-
1.32. Kredit dengan agunan berupa tanah dan rumah tinggal/rumah toko Yang memiliki sertifikat yang dikuasai oleh BPR dan didukung dengan Surat kuasa menjual namun tidak diikat dengan hak tanggungan pertama.	1.874.424.915
1.33. Kredit yang diberikan kepada usaha mikro dan kecil	91.230.860
1.34. Kredit dengan agunan berupa kendaraan bermotor, kapal atau perahu bermotor yang disertai dengan bukti kepemilikan dan telah dilakukan pengikatan secara fidusia sesuai peraturan perundang-undangan.	-
1.35. Tagihan atau kredit lainnya yang tidak memenuhi kriteria bobot risiko diatas.	142.264.992.432
1.36. Tagihan atau kredit yang telah jatuh tempo atau dengan kualitas macet.	1.705.013.771
1.37. Aset tetap dan inventaris (nilai buku) dan aset tidak berwujud	5.644.535.984
1.38. Agunan yang diambil alih (AYDA) yang belum melampaui 1 (satu) tahun sejak tanggal pengambilalihan	1.237.600.000
1.39. Aset lainnya selain tersebut diatas	2.138.578.124
Jumlah ATMR	<u>176.906.202.450</u>

PERUMDA BPR BANK KOTA BOGOR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2025

34. RASIO KECUKUPAN MODAL (Lanjutan)

	2 0 2 5 Rp	2 0 2 4 Rp
I. MODAL		
1.1. Modal Inti Utama		
1.1.1. Modal disetor	54.000.000.000	54.000.000.000
1.1.2. Cadangan Tambahan Modal	—	—
1.1.2.1. Agio	—	—
1.1.2.2. Dana setoran modal	—	—
1.1.2.3. Modal sumbangan	—	—
1.1.2.4. Cadangan umum	15.517.036.226	14.982.178.998
1.1.2.5. Cadangan tujuan	14.031.219.103	13.496.361.875
1.1.2.6. Laba tahun-tahun lalu	—	—
1.1.2.7. Laba tahun berjalan setelah dikurangi kekurangan PPKA (50%)	5.838.924.332	2.674.286.139
1.1.2.8. Pajak tangguhan (<i>deferred tax</i>)	65.008.131	—
1.1.2.9. <i>Goodwill</i>	—	—
1.1.2.10. Disagio	—	—
1.1.2.11. AYDA yang telah melampaui jangka waktu 1 (satu) tahun sejak pengambilalihan sebesar nilai yang tercatat pada neraca BPR	—	—
1.1.2.11.1 Melampaui jangka waktu 1 s.d. 3 tahun sejak pengambilalihan sebesar nilai tercatat pada laporan posisi keuangan BPR -/-	(132.574.555)	—
Jumlah modal inti utama	<u>89.319.613.237</u>	<u>85.152.827.012</u>
1.2 Modal Inti Tambahan	—	—
1.3 Modal Inti Tambahan	—	—
2. Modal Pelengkap		
2.1. Komponen modal yang memenuhi persyaratan tertentu (paling tinggi sebesar 50% dari modal inti)	—	—
2.2. Surplus revaluasi aset tetap	—	—
2.3. Penyisihan penghapusan aktiva produktif umum (Max. 1,25% dari ATMR)	996.450.374	936.950.645
Jumlah modal pelengkap	<u>996.450.374</u>	<u>936.950.645</u>
Jumlah modal	<u>90.316.063.611</u>	<u>86.089.777.657</u>
II. Modal Minimum (12% dari ATMR)	23.314.581.399	21.228.744.294
III. Jumlah Kelebihan (Kekurangan) modal	67.001.482.212	64.861.033.363
IV. Rasio Modal (CAR) (Jumlah modal / ATMR) x 100%	46,45%	48,66%
Rasio Modal Inti = (Jumlah Modal Inti / ATMR) x 100%	45,94%	48,13%
V. MIAPB (Rasio Modal Inti Terhadap Aset Produktif Bermasalah Neto) = (Jumlah modal inti/ aset produktif bermasalah) x 100%	6.408,30%	488,26%

PERUMDA BPR BANK KOTA BOGOR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2025

34. RASIO KECUKUPAN MODAL (Lanjutan)

	2025	2024
VI. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)		
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa : 10% x Jumlah modal	9.031.606.361	8.608.977.766
Pihak ketiga : 20% x Jumlah modal	18.063.212.722	17.217.955.531
Kelompok pihak ketiga : 30% x Jumlah modal	27.094.819.083	25.826.933.297

35. INFORMASI LAINNYA

	2025 %	2024 %
Rasio		
I. Permodalan		
Rasio kecukupan modal	46,45	48,13
II. Aktiva Produktif		
<i>Non Performing Loan</i>	1,51	3,02
Pemenuhan PPAP	101,19	100
III. Rentabilitas		
<i>Return On Assets (ROA)</i>	2,92	2,82
<i>Return On Equity (ROE)</i>	6,75	6,28
<i>Net Interest Margin (NIM)</i>	10,80	10,05
Beban Operasi terhadap pendapatan (BOPO)	81,41	80,87
IV. Likuiditas		
<i>Cash Rasio</i>	21,47	36,45

35. MANAJEMEN RISIKO

Pengelolaan risiko mengacu kepada kepentingan strategis BPR secara keseluruhan. Pengelolaan risiko juga bukan semata-mata pemantauan, pelaporan dan evaluasi risiko-risiko yang telah terjadi, namun juga mendeteksi dan mengantisipasi risiko-risiko yang mungkin terjadi di masa mendatang. Per 31 Desember 2025 Perumda BPR Bank Kota Bogor mengelola 6 jenis risiko dengan nilai Profil Risiko peringkat 1 (sangat rendah). Mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan, kemungkinan kerugian yang dihadapi dari risiko inheren tergolong sangat rendah. Rata-rata kualitas Penerapan Manajemen Risiko sangat memadai. Dalam hal terdapat kelemahan minor, kelemahan tersebut tidak berdampak signifikan.

PERUMDA BPR BANK KOTA BOGOR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2025

35. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

Risiko Kredit

Risiko kredit adalah Risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada BPR. Risiko kredit pada umumnya terdapat pada seluruh aktivitas BPR yang kinerjanya bergantung pada kinerja pihak lawan (bank dan non bank). Risiko kredit juga dapat diakibatkan oleh terkonsentrasinya penyediaan dana pada debitur, wilayah geografis, produk, jenis pembiayaan, atau sektor ekonomi tertentu. Risiko ini lazim disebut Risiko konsentrasi kredit dan diperhitungkan dalam penilaian Risiko inheren. Per 31 Desember 2025 Tingkat Risiko Kredit Perumda BPR Bank Kota Bogor berada pada Peringkat 1 (Sangat Rendah)

a. Risiko Inheren Kredit berada pada peringkat 2 (rendah)

Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Bank Kota Bogor, kemungkinan kerugian yang dihadapi dari risiko kredit tergolong sedang dengan karakteristik sebagai berikut :

- Rasio aset produktif terhadap total aset berisiko sedang karena memiliki rasio sebesar 103,43% dengan komponen aset produktif memiliki eksposur risiko kredit moderat ($OJK \leq 95\%$).
- Rasio kredit yang diberikan terhadap total aset produktif berisiko sangat rendah karena memiliki rasio sebesar 62,52% dengan skema kredit yang diberikan adalah skema kredit yang sederhana dan variasi produk masih sesuai dengan ukuran dan skala usaha ($OJK \leq 75\%$).
- Rasio 25 debitur terbesar terhadap total kredit yang diberikan berisiko sangat rendah karena memiliki rasio sebesar 11,45% dengan target pasar tidak berubah selama jangka waktu lama ($OJK \leq 20\%$).
- Rasio kredit persektor ekonomi terhadap total kredit yang diberikan berisiko rendah karena memiliki rasio sebesar 95,89% dimana kredit tersebut berasal dari 3 sektor ekonomi terbesar dan tidak berubah selama jangka waktu yang sangat lama ($OJK \leq 85\%$).
- Rasio aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif berisiko sangat rendah karena memiliki rasio sebesar 6,64% ($OJK \leq 7\%$).
- Rasio kredit bermasalah neto terhadap total kredit yang diberikan berisiko sangat rendah karena memiliki rasio sebesar 2,42% ($OJK \leq 5\%$).
- Rasio kredit kualitas rendah dengan total kredit yang diberikan berisiko tinggi karena memiliki rasio sebesar 11,57% dengan kredit restrukturisasi signifikan dan komponen aset produktif bermasalah sebagian besar merupakan kredit ($OJK \leq 7\%$).

PERUMDA BPR BANK KOTA BOGOR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2025

35. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

Risiko Kredit (Lanjutan)

- a. Risiko Inheren Kredit berada pada peringkat 2 (rendah) (Lanjutan)
- Pertumbuhan kredit Bank Kota Bogor per 31 Desember 2025 adalah sebesar 11%, berada di atas pertumbuhan kredit nasional dan sebagian besar disalurkan kepada sektor ekonomi yang dikuasai.
- b. Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Kredit berada pada Peringkat 1 (Sangat Memadai)
Bank Kota Bogor termasuk dalam tingkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Kredit yang Sangat Memadai:
- Dewan Pengawas memberikan persetujuan&melakukan evaluasi kebijakan Manajemen Risiko Kredit:Sangat Memadai
 - Dewan Pengawas melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko kredit&memastikan tindak lanjut:Sangat Memadai
 - Direksi menyusun, melaksanakan kebijakan Manajemen Risiko Kredit&melakukan pengkinian secara berkala:Memadai
 - Direksi mengambil tindakan mitigasi Risiko Kredit&melakukan komunikasi kepada seluruh jenjang organisasi:Memadai
 - Memiliki kecukupan organisasi Fungsi Kredit dan Fungsi Manajemen Risiko Kredit:Sangat Memadai
 - Direksi menerapkan kebijakan pengelolaan SDM dalam penerapan Manajemen Risiko Kredit:Memadai
 - Memiliki kebijakan Manajemen Risiko Kredit yang Sangat Memadai&disusun dengan mempertimbangkan visi,misi,skala usaha dan kompleksitas bisnis,serta kecukupan SDM
 - Memiliki, melaksanakan prosedur Manajemen Risiko Kredit dan penetapan limit Risiko Kredit yang ditetapkan oleh Direksi secara konsisten, serta melakukan evaluasi&pengkinian terhadap prosedur Manajemen Risiko kredit dan penetapan limit Risiko kredit secara berkala:Sangat Memadai
 - Memiliki kebijakan&prosedur penerbitan produk dan/ atau pelaksanaan aktivitas baru yang mencakup identifikasi&mitigasi Risiko Kredit sesuai ketentuan:Sangat Memadai

PERUMDA BPR BANK KOTA BOGOR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2025

35. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

Risiko Kredit (Lanjutan)

b. Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Kredit berada pada Peringkat 1 (Sangat Memadai)

- Melaksanakan proses Manajemen Risiko kredit yang melekat pada kegiatan usaha BPR terkait Risiko Kredit:Memadai
- Memiliki SIMR yang mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan terkait Risiko Kredit serta telah dilaporkan kepada Direksi secara berkala:Sangat Memadai
- SKAI melaksanakan audit secara berkala terhadap penerapan Manajemen Risiko Kredit, menyampaikan laporan hasil audit intern,dan memastikan tindak lanjut atas temuan:Memadai
- Sistem pengendalian intern terhadap Risiko Kredit telah dilaksanakan oleh seluruh jenjang organisasi:Memadai

Risiko Operasional

Risiko operasional adalah Risiko yang antara lain disebabkan adanya ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses intern, kesalahan SDM, kegagalan sistem, dan/atau adanya masalah ekstern yang memengaruhi operasional BPR. Per 31 Desember 2025 Tingkat Risiko Operasional Perumda BPR Bank Kota Bogor berada pada Peringkat 1 (Sangat Rendah)

Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan adalah Risiko akibat BPR tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain termasuk Risiko akibat kelemahan aspek hukum. Risiko kepatuhan dapat disebabkan antara lain oleh perilaku hukum yang meliputi tiga unsur yaitu kesengajaan, kelalaian, dan dapat dipertanggungjawabkan serta perilaku keorganisasian yang dipengaruhi oleh faktor profil bisnis, faktor ekonomi, faktor psikologis, dan faktor sosiologis. Per 31 Desember 2025 Tingkat Risiko Kepatuhan Perumda BPR Bank Kota Bogor berada pada Peringkat 1 (Sangat Rendah)

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah Risiko akibat ketidakmampuan BPR untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan/atau kondisi keuangan BPR. Per 31 Desember 2025 Tingkat Risiko Likuiditas Perumda BPR Bank Kota Bogor berada pada Peringkat 1 (Sangat Rendah)

PERUMDA BPR BANK KOTA BOGOR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2025

35. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

Risiko Reputasi

Risiko reputasi adalah Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan yang bersumber dari persepsi negatif mengenai BPR. Per 31 Desember 2025 Tingkat Risiko Reputasi Perumda BPR Bank Kota Bogor berada pada Peringkat 1 (Sangat Rendah)

Risiko Inheren:

Risiko Strategik

Risiko strategik adalah Risiko akibat ketidaktepatan BPR dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan BPR dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Per 31 Desember 2025 Tingkat Risiko Strategik Perumda BPR Bank Kota Bogor berada pada Peringkat 2 (Rendah)

a. Risiko Inheren Strategik berada pada peringkat 2 (rendah)

Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Bank Kota Bogor, kerugian yang dihadapi dari Risiko Strategik tergolong Rendah:

- Penetapan strategi bisnis berisiko Rendah karena Pada semester ini kerjasama Bank Kota Bogor dengan MNC Bank sedang dalam proses pembuatan mobile banking
- Pertimbangan faktor eksternal dan internal dalam menyusun rencana dan model bisnis berisiko Rendah karena Penyusunan strategi (rencana dan model bisnis) BPR telah mempertimbangkan seluruh faktor yang memengaruhi lingkungan bisnis BPR baik faktor internal maupun faktor eksternal, namun terdapat beberapa kelemahan; dan/ atau.
- Tingkat kecepatan respon BPR terhadap perubahan faktor internal tergolong sedang, antara lain untuk pencapaian realisasi kredit mencapai 101,10%, pencapaian laba mencapai 104,87%, realisasi penghimpunan dana sebesar 107,79% dan realisasi total aset sebesar 101,36%.
- Keunggulan kompetitif dan ancaman dari kompetitor berisiko rendah karena Bank Kota Bogor memiliki keunggulan kompetitif yang moderat namun terdapat ancaman dari kompetitor yang tidak memengaruhi Bank Kota Bogor (per 31 Desember 2025 pertumbuhan kredit dan dana pihak ketiga (DPK) berada di atas target RBB).
- Perbandingan realisasi dan target indikator keuangan utama sesuai ketentuan rencana bisnis, khususnya untuk faktor permodalan, kualitas aset, kredit, likuiditas, penyaluran kredit kepada UMKM, dan rentabilitas berisiko Rendah karena Bank Kota Bogor mencapai sebagian besar target kualitatif dengan deviasi rendah dari target kuantitatif yang ditetapkan.
- Secara historis, Bank Kota Bogor memiliki rekam jejak yang baik dalam menerapkan keputusan strategis terkait keempat faktor penilaian rekam jejak kecuali keputusan strategis terkait tingkat keberhasilan investasi strategis, penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan belum pernah dilakukan oleh Bank Kota Bogor

PERUMDA BPR BANK KOTA BOGOR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2025

35. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

Risiko Strategik (Lanjutan)

- b. Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Strategik berada pada Peringkat 2 (Memadai)
Tingkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Strategik Bank Kota Bogor adalah Memadai:
- Dewan Pengawas memberikan persetujuan kebijakan Manajemen Risiko Strategik & melakukan evaluasi serta memastikan tindak lanjut:Sangat Memadai
 - Direksi menyusun kebijakan Manajemen Risiko Strategik,melaksanakan secara konsisten&melakukan pengkinian:Memadai
 - Direksi mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka mitigasi Risiko Strategik&melakukan komunikasi kepada seluruh Pegawai:Memadai
 - Memiliki kecukupan organisasi yang menangani Fungsi Strategik&fungsi Manajemen Risiko Strategik:Sangat Memadai
 - Direksi menerapkan kebijakan pengelolaan SDM dalam rangka penerapan Manajemen Risiko Strategik:Memadai
 - Memiliki kebijakan Manajemen Risiko strategik yang Sangat Memadai&disusun dengan mempertimbangkan visi, misi, skala usaha&kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM
 - Memiliki&melaksanakan prosedur Manajemen Risiko strategik&penetapan limit Risiko Strategik yang ditetapkan oleh Direksi secara konsisten serta melakukan evaluasi&pengkinian terhadap prosedur Manajemen Risiko Strategik&penetapan limit Risiko Strategik secara berkala:Sangat Memadai
 - Memiliki kebijakan&prosedur penerbitan produk dan/ atau pelaksanaan aktivitas baru yang mencakup identifikasi dan mitigasi Risiko Strategik sesuai dengan ketentuan:Sangat Memadai
 - Melaksanakan proses Manajemen Risiko Strategik yang melekat pada kegiatan usaha BPR:Memadai
 - Memiliki sistem informasi Manajemen Risiko yang mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan terkait Risiko Strategik&telah dilaporkan kepada Direksi secara berkala:Memadai
 - SKAI telah melaksanakan audit secara berkala terhadap penerapan Manajemen Risiko strategik, menyampaikan laporan hasil audit intern&memastikan tindak lanjut atas temuan:Memadai
 - Sistem pengendalian intern terhadap Risiko strategik telah dilaksanakan oleh seluruh jenjang organisasi:Memadai

PERUMDA BPR BANK KOTA BOGOR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2025

36. PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME

Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme merupakan program yang wajib diterapkan dalam melakukan hubungan usaha dengan calon nasabah dan pengguna jasa Bank (Nasabah atau *Walk In Customer*) yang dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 tahun 2023 tentang penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU PPT dan PPPSPM) di Sektor Jasa Keuangan.

Tujuan penerapan program APU PPT dan PPPSPM adalah untuk mencegah dan memitigasi risiko Bank digunakan oleh pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT), dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPSPM) sebagai sarana melakukan kejahatan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Secara operasional dalam penerapannya, Unit Kerja dan seluruh Pegawai pada Bank Kota Bogor telah mengacu pada Standar Operasional Prosedur APU PPT dan PPPSPM yang telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas. Penerapan Program APU PPT dan PPPSPM sedikitnya mencakup:

1. Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris.
2. Kebijakan prosedur.
3. Pengendalian intern.
4. Sumber daya manusia dan pelatihan.

Penilaian Risiko Bank Kota Bogor terhadap TPPU, TPPT dan PPPSPM selama Tahun 2025 berada pada Peringkat 1 (Rendah) dengan karakteristik antara lain sebagai berikut:

1. Dengan mempertimbangkan pencegahan dan mitigasi yang dilakukan Perumda BPR Bank Kota Bogor, kemungkinan risiko TPPU, TPPT dan PPPSPM yang dihadapi Perumda BPR Bank Kota Bogor dari Risiko inheren rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.
2. Kualitas Penerapan Program APU PPT dan PPPSPM cukup memadai. Meskipun persyaratan minimum terpenuhi, terdapat beberapa kelemahan yang membutuhkan perhatian manajemen dan perbaikan.

PERUMDA BPR BANK KOTA BOGOR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2025

37. TAGIHAN KOMITMEN DAN KONTIJENSI

	2 0 2 5 Rp	2 0 2 4 Rp
Aset komitmen :		
Fasilitas pinjaman yang diterima yang belum ditarik	29.434.000.000	47.974.245.900
Aset kontijensi :		
Pendapatan bunga dalam penyelesaian	9.304.537.338	6.805.600.784
Aset produktif yang dihapusbukukan	1.799.081.884	1.806.401.341
Lan-lain yang bersifat administratif	1.159.856.008	1.162.691.008
Jumlah	<u>41.697.475.230</u>	<u>57.748.939.033</u>

38. PERJANJIAN PENTING

- a. Pada tanggal 6 Juli 2021 telah ditandatangani Perjanjian Kerja Sama antara Perumda BPR Bank Kota Bogor dengan Pemerintah Daerah Kota Bogor tentang Pemberian Fasilitas Kredit bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Kontrak Waktu Tertentu (PKWT). No. perjanjian: 119 – 320/BKB dan nomor 119/Perj.40-Bag.Pem/2021. Perjanjian tersebut berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Perjanjian Kerja Sama ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan Para Pihak.
- b. Pada tanggal 4 Mei 2022 telah ditandatangani Perjanjian Kerja Sama antara PT Multipilar Balantika dengan Perumda BPR Bank Kota Bogor tentang Lisensi dan Dukungan Layanan *Core Banking System* dengan no perjanjian : 005/PKS.IT/PTMB/V/2022 dan nomor 19.7/119-BKB. Jangka waktu perjanjian tersebut minimal 2(dua) tahun.
- c. Pada tanggal 12 Desember 2023 telah ditandatangani Perjanjian sewa bangunan rumah toko (Ruko) dikenal sebagai Jalan Sukasari I No. 16-A Bogor, dihadapan Notaris Thomas Rudy Hartawan Widjoyo, S.H Notaris di Kota Bogor. Jangka waktu sewa 3 (tiga) tahun dan akan berakhir pada tanggal 13 Desember 2026.
- d. Pada tanggal 05 Juni 2024 telah ditandatangani Perjanjian sewa tanah antara Pemerintah Daerah Kota Bogor dengan Perumda BPR Bank Kota Bogor tentang sewa tanah milik Pemerintah Kota Daerah Kota Bogor yang terletak di Jl. Sawojajar No. 8 Kelurahan Pabaton, Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor. Jangka waktu sewa 3 (tiga) tahun dan akan berakhir pada tanggal 4 Juni 2027.
- e. Pada tanggal 08 April 2025 telah ditandatangani Perjanjian Kerja Sama antara Perumda BPR Kota Bogor dengan Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk tentang Dana Kompensasi Pasca Kerja, dengan nomor perjanjian 13/119/BKB/IV/2005 dan No. 051/PSF/PKS/2025.

PERUMDA BPR BANK KOTA BOGOR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2025

38. PERJANJIAN PENTING (Lanjutan)

- f. Pada tanggal 30 April 2025 telah ditandatangani Perjanjian Kerja Sama antara PT Bank MNC International Tbk dengan Perumda BPR Kota Bogor tentang Intergrasi layanan dan aplikasi perbankan, dengan nomor perjanjian PT Bank MNC International Tbk : 093/MB-PBB/PKS/IV/2025 dan nomor Perumda BPR Bank Kota Bogor : 181/119/BKB/IV/2025.

39. TANGGAL PENYELESAIAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Direksi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan per 31 Desember 2025 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Privat (SAK EP), yang telah diselesaikan dan diotorisasi untuk diterbitkan oleh Direksi pada tanggal 6 Februari 2026

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH
PASAR PAKUAN JAYA KOTA BOGOR
LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2025
SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

***FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2025
AND FOR THE YEAR ENDED
AND INDEPENDENT AUDITORS' REPORT***

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH
PASAR PAKUAN JAYA KOTA BOGOR
LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2025
SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH
PASAR PAKUAN JAYA KOTA BOGOR
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2025
AND FOR THE YEAR ENDED
AND INDEPENDENT AUDITORS'
REPORT**

Daftar Isi	Halaman/ Pages	Table of Contents
Surat Pernyataan Direksi		 <i>Board of Director's Statement</i>
Laporan Posisi Keuangan	1	 <i>Statement of Financial Position</i>
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan		 <i>Statement of Profit or Loss and Other</i>
Komprehensif Lain	2	 <i>Comprehensive Income</i>
Laporan Perubahan Ekuitas	3	 <i>Statement of Changes in Equity</i>
Laporan Arus Kas	4	 <i>Statement of Cash Flows</i>
Catatan atas Laporan Keuangan	5	 <i>Notes to the Financial Statements</i>

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR PAKUAN JAYA KOTA BOGOR LAPORAN POSISI KEUANGAN Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)				PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR PAKUAN JAYA KOTA BOGOR STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION For The Year Ended December 31, 2025 and 2024 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)			
				31 Desember 2024 / December 31, 2024			
	Catatan / Notes	31 Desember 2025/ December 31, 2025	(Disajikan Kembali/ restatement (catatan/note 4)	Audit			
ASET				ASSETS			
Aset Lancar				Current Assets			
Kas dan setara kas	2d,5	3.115.565.543	2.836.268.840	2.836.268.840		Cash and cash equivalent	
Deposito	2e,6	3.000.000.000	-	9.400.000.000		Deposits	
Piutang usaha:	2g,7					Account receivable:	
Pihak ketiga		4.373.022.395	7.827.964.005	7.827.964.005		Third parties	
Persediaan	2s,8	327.884.278	-	-		Inventory	
Uang Muka		95.000.000	-	-		Down Payment	
Biaya dibayar dimuka	2h,9	25.301.904	16.000.000	16.000.000		Prepaid expenses	
Pajak Dibayar Dimuka	2n,11a	23.673.243	19.960.633	19.960.633		Prepaid taxes	
Jumlah Aset Lancar		10.960.447.363	10.700.193.478	20.100.193.478		Total Current Assets	
Aset Tidak Lancar				Non-Current Assets			
Aset tetap - bersih	2j,12	314.942.049.256	412.059.134.964	339.784.635.465		Fixed assets - net	
Aset takberwujud	13	152.622.486	215.805.093	215.805.093		Intangible assets	
Deposito yang dibatasi penggunaannya	14	9.400.000.000	9.400.000.000	-		Restricted Deposits	
Aset pajak tangguhan	2n,11d	710.278.062	2.127.399.161	-		Deferred tax assets	
Aset tetap tersedia untuk dijual	15	-	-	2.004.789.500		Fixed assets available for sale	
Jumlah Aset Tidak Lancar		325.204.949.804	423.802.339.218	342.005.230.058		Total Non-Current Assets	
JUMLAH ASET		336.165.397.167	434.502.532.696	362.105.423.536		TOTAL ASSETS	
LIABILITAS DAN EKUITAS				LIABILITIES AND EQUITY			
Liabilitas Lancar				Current Liabilities			
Utang usaha:						Account payables:	
Pihak ketiga	2l,16	234.035.415	234.035.415	234.035.415		Third parties	
Pihak berelasi	2f,16,28	64.887.500	-	-		Related parties	
Utang lainnya:						Others payable:	
Pihak ketiga	17	1.883.535.998	1.020.815.401	1.020.815.401		Third parties	
Pihak berelasi	2f,17,28	-	250.000.000	250.000.000		Related parties	
Biaya yang masih harus dibayar	18	316.621.008	362.190.686	362.190.686		Accrued expenses	
Utang pajak	2n,11b	2.632.453.953	2.459.702.494	2.459.702.494		Taxes payable	
Pendapatan diterima dimuka	19	572.404.945	106.394.121	106.394.121		Unearned revenues	
Jumlah Liabilitas Lancar		5.703.938.819	4.433.138.117	4.433.138.117		Total Current Liabilities	
Liabilitas Jangka Panjang				Long Term Liabilities			
Imbalan pasca kerja	2o,20	9.476.602.038	9.669.996.185	9.669.996.185		Employee benefit	
Jumlah Liabilitas		15.180.540.857	14.103.134.302	14.103.134.302		Total Liabilities	
Ekuitas				Equity			
Modal	1d,21	503.111.384.240	503.111.384.240	503.111.384.240		Capital	
Cadangan umum	22,29b	3.226.069.774	-	1.751.110.933		General allowance	
Pengukuran kembali aset tetap	23, 29a	-	-	(70.269.710.000)		Fixed asset remeasurement	
Saldo rugi		(185.352.597.704)	(82.711.985.846)	(86.590.495.939)		Retained earnings	
Jumlah Ekuitas		320.984.856.310	420.399.398.394	348.002.289.234		Total Equity	
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas		336.165.397.167	434.502.532.696	362.105.423.536		Total Liabilities and Equity	

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR PAKUAN JAYA KOTA BOGOR LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)			PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR PAKUAN JAYA KOTA BOGOR STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME For The Year Ended December 31, 2025 and 2024 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)		
	31 Desember 2025/ December 31, 2025	Catatan/ Notes	31 Desember 2024 / December 31, 2024		
Pendapatan	23.130.834.362	2m,22	34.102.658.494	Revenues	
Beban operasional	(34.964.238.147)	2m,23	(32.371.746.448)	Operating expenses	
Laba (rugi) Usaha	(11.833.403.785)		1.730.912.046	Operating profit (loss)	
Pendapatan (Beban) Lain-Lain				Other Incomes (Expenses)	
Pendapatan lain-lain	1.501.559.153	2m,24	1.588.255.311	Other incomes	
Beban lain-lain	(87.665.576.353)	2m,25	(136.091.353)	Other expenses	
Jumlah Pendapatan (Beban) Lain-Lain - bersih	(86.164.017.200)		1.452.163.958	Total Other Income (Expenses) - net	
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	(97.997.420.986)		3.183.076.004	Profit (Loss) Before Income Tax	
Beban Pajak				Tax Expenses	
Pajak Kini	-	2n,10c	652.475.890	Current Tax	
Pajak Tangguhan	1.417.121.098	2n,10c	-	Deffered Tax Expenses	
Jumlah Beban Pajak	1.417.121.098		652.475.890	Total Tax Expenses	
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	(99.414.542.084)		2.530.600.114	Current Year Profit (Loss)	
Penghasilan Komprehensif Lain	-		-	Other comprehensive income	
Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan	(99.414.542.084)		2.530.600.114	Profit (Loss) Comprehensive for the Current Year	

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH
PASAR PAKUAN JAYA KOTA BOGOR
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH
PASAR PAKUAN JAYA KOTA BOGOR
STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
For The Year Ended
December 31, 2025 and 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

	Catatan/ Notes	Modal disetor/ fully paid capital	Cadangan Umum/ General Allowance	Pengukuran kembali aset tetap/ Fixed Asset Remeasurements	Saldo Rugi/ Retained earnings	Jumlah Ekuitas / Total equity	
Saldo 31 Desember 2023		503.111.384.240	1.420.367.906	(70.269.710.000)	(87.577.628.591)	346.684.413.555	Balance as of December 31, 2023
Pembagian laba		-	-	-	(330.743.027)	(330.743.027)	Profit Sharing
Dividen		-	-	-	(1.212.724.435)	(1.212.724.435)	Dividend
Cadangan umum		-	330.743.027	-	-	330.743.027	General allowance
Laba bersih tahun berjalan		-	-	-	2.530.600.114	2.530.600.114	Net profit for the Year
Saldo 31 Desember 2024		503.111.384.240	1.751.110.933	(70.269.710.000)	(86.590.495.939)	348.002.289.234	Balance as of December 31, 2024
Koreksi saldo awal:							Beginning balance correction:
Aset Pajak Tangguhan	11d,4	-	-	-	2.127.399.160	2.127.399.160	Deferred Tax Asset
Pengukuran kembali aset tetap	29a	-	-	70.269.710.000	-	70.269.710.000	Fixed Asset Remeasurements
Cadangan umum	29a	-	(1.751.110.933)	-	1.751.110.933	-	General Allowance
Saldo 1 Januari 2025		503.111.384.240	-	-	(82.711.985.846)	420.399.398.394	Balance as of January 1, 2025
Pembagian laba dan cadangan umum Tahun 2024		-	-	-	(3.226.069.774)	(3.226.069.774)	Distribution of profit and general Allowance for year 2024
Cadangan umum	29b	-	4.281.711.047	-	-	4,281,711,047	General allowance
Penggunaan cadangan umum	29b	-	(1.055.641.273)	-	-	(1.055.641.273)	Use of general allowance
Rugi bersih tahun berjalan		-	-	-	(99.414.542.084)	(99.414.542.084)	Net loss for the year
Saldo 31 Desember 2025	1d,20	503.111.384.240	3.226.069.774	-	(185.352.597.704)	320.984.856.310	Balance as of December 31, 2025

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR PAKUAN JAYA KOTA BOGOR LAPORAN ARUS KAS Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)			PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR PAKUAN JAYA KOTA BOGOR STATEMENT OF CASH FLOW For The Year Ended December 31, 2025 and 2024 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)		
	31 Desember 2025/ December 31, 2025	Catatan/ Notes	31 Desember 2024 / December 31, 2024		
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES	
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan	(99.414.542.084)		2.530.600.114	Net Profit (Loss) for The Year	
Penyesuaian untuk: Saldo rugi	2.510.719.746		-	Adjustment for: Retained earnings	
Rugi pelepasan aset tetap	83.763.963.578		-	Loss on disposal of fixed assets	
Cadangan piutang tak tertagih	3.054.941.609		-	Allowance for bad debts	
Penyusutan dan amortisasi	5.915.544.738	12,13	4.194.176.007	Depreciation and amortization	
Laba (rugi) Operasi Sebelum Perubahan Dalam Aktivasi Operasi	(4.169.372.413)		6.724.776.121	Operating Income Before Changes in Operating Activities	
Perubahan Modal Kerja:				Changes in Working Capital:	
Piutang usaha	(400.000.000)		(1.033.507.568)	Account receivables	
Persediaan	(327.884.278)		-	Inventory	
Uang Muka	(95.000.000)		-	Down Payment	
Biaya dibayar dimuka	-		42.753.920	Prepaid expenses	
Pajak dibayar dimuka	(3.712.610)		181.918.527	Prepaid taxes	
Aset pajak tangguhan	1.417.121.099		-	Deferred tax assets	
Utang usaha	-		-	Account payables	
Utang pajak	170.481.189		(1.207.594.454)	Taxes payable	
Biaya yang masih harus dibayar	(45.569.678)		(8.452.001)	Accrued expenses	
Titipan retribusi	-		(7.156.800.000)	Deposit of retribution	
Utang lainnya	612.720.597		75.632.912	Others payable	
Pendapatan diterima Dimuka	(466.010.826)		(498.273.538)	Unearned revenues	
Imbalan pasca kerja	(193.394.147)		171.377.334	Employee benefit	
Arus Kas Bersih Digunakan Untuk Aktivitas Operasi	(2.698.350.797)		(2.708.168.747)	Net Cash Flow Used For Operating Activities	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES	
Perolehan aset tetap	(50.640.000)	12	(597.497.726)	Acquisition of fixed assets	
Deposito	3.000.000.000		900.000.000	Deposit	
Aset tak berwujud	(36.600.000)		(90.000.000)	Intangible assets	
Arus Kas Bersih Diperoleh Dari Aktivitas Investasi	2.912.760.000		212.502.274	Net Cash Flow Provided From Investing Activities	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES	
Utang pihak berelasi	64.887.500		39.150.469	Loan related parties	
Dividen	-		(1.212.724.435)	Dividend	
Arus Kas Bersih Digunakan Untuk Aktivitas Pendanaan	64.887.500		(1.173.573.966)	Net Cash Flow Used For Financing Activities	
Kenaikan/(Penurunan) Bersih Kas dan Bank	279.296.703		(3.669.240.439)	Increase/(Decrease) in Net Cash and Bank	
Kas dan Bank Awal Tahun	2.836.268.840		6.505.509.279	Cash and Bank at the Beginning of the Year	
Kas dan Bank Akhir Tahun	3.115.565.543	5	2.836.268.840	Cash and Bank at the End o f the Year	

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PERUSAHAAN UMUM DAERAH
PASAR PAKUAN JAYA KOTA BOGOR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025
Serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1 UMUM

a Latar Belakang

Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor ("Perusahaan") yang sebelumnya bernama Perusahaan Daerah (PD) Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor didirikan di Bogor pada tanggal 7 Juli 2009, berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Bogor Nomor 4 tahun 2009 tanggal 7 Juli 2009 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya dan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor Tanggal 15 Oktober 2019.

Laporan Keuangan Perusahaan disajikan dalam mata uang Rupiah.

b Dewan Pengawas dan Dewan Direksi

Struktur organisasi Perusahaan dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Bogor No.27 tahun 2009 tanggal 2 November 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Pasar Pakuan Jaya kota Bogor dengan susunan sebagai berikut:

Dewan Pengawas

Susunan Dewan Pengawas berdasarkan Keputusan Walikota Bogor Nomor 900.1.13.2/Kep.329-Bag.Ekon/2024 tanggal 1 Okt 2024 tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Dewan Pengawas Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor Periode 2024 - 2028 dan 900.1.13.2/Kep.363-Bag. Ekon/2025 Tanggal 30 Oktober 2025 sebagai anggota Dewan Pengawas Perumda Pasar Pakuan Jaya Periode 2025-2029 adalah sebagai berikut

Ketua
Anggota

Ir. H. Gatut Susanta, MM.
Rd. I Muaayana Jaya Sumpena

Head of Commisioners
Member

Susunan Direksi berdasarkan pada Surat Keputusan Walikota Bogor No. 900.1.13.3/KEP.89-Bag.Ekon/2024 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Periode 2024-2029 adalah sebagai berikut:

Dewan Direksi

Direktur Utama
Direktur Operasional
Direktur Umum

Jenal Abidin, S.It., M.P.
Dr. Abdul Haris Maraden, S.E., M.M
Samsudin, S.Hut., M.S,

Head of Commisioners
Operational Director
General Director

PERUSAHAAN UMUM DAERAH
PASAR PAKUAN JAYA KOTA BOGOR
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
And For The Year Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1 GENERAL

a Background

The Company regional of public (Perumda) Pasar Pakuan Jaya in Bogor City ("The Company") previously known as Regional Company (PD) Pasar Pakuan Jaya Bogor City was established in Bogor on July 7, 2009, based on the Bogor City Regulation No. 4 of 2009 dated July 7, 2009 concerning Establishment of Pasar Pakuan Jaya Regional Company and Regulation of Bogor City No. 18 of 2019 concerning Establishment the Company regional of public (Perumda) Pasar Pakuan Jaya in Bogor City dated October 15, 2019.

The Financial Statements of Company is expressed in Rupiah.

b Board of Supervisor and Directors

The Company's organization structural was formed based on Bogor Mayor Regulation No. 27 pf 2009 dated November 2, 2009 concerning the Organization and Work Procedures of the Perusahaan Umum Daerah Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor in the composition of the city as follows:

Board of Supervisor

The composition of the Board of Supervisors is based on the Mayor of Bogor Decree No. 900.1.13.2/Kep.329-Bag.Ekon/2024 dated October 1, 2024, concerning the Determination of the Membership Structure of the Board of Supervisors of Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor for the 2024–2028 Period, and Decree No. 900.1.13.2/Kep.363-Bag.Ekon/2025 dated October 30, 2025, concerning the appointment of members of the Board of Supervisors of Perumda Pasar Pakuan Jaya for the 2025–2029 Period, as follows:

The composition of the Directors is based on Bogor Mayor Decree No. 900.1.13.3/KEP.89-Bag.Ekon/2024 concerning the Appointment of Directors of the Company, the 2024-2029 period is as follows:

Board of Directors

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH
PASAR PAKUAN JAYA KOTA BOGOR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025
Serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH
PASAR PAKUAN JAYA KOTA BOGOR
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
And For The Year Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

1 UMUM (lanjutan)

b Dewan Pengawas dan Dewan Direksi (lanjutan)

Dalam pelaksanaan tugasnya Direksi dibantu oleh 6 (enam) bagian, 1 (satu) satuan pengawas intern, 2 (dua) staff ahli dan 9 (sembilan) unit pasar yakni:

- Bagian Umum & Kepegawaian
- Bagian Hukum & Humas
- Bagian Keuangan
- Bagian Usaha Jasa
- Bagian Teknik Pemeliharaan & Pembangunan
- Bagian Keamanan, Ketertiban & Kebersihan
- Satuan Pengawas Intern
- Staff Ahli
- Unit Pasar

Jumlah pegawai dan Pengurus Perusahaan periode 31 Desember 2025 dan 2024 sebanyak 123 orang dan 127 orang, dengan komposisi sebagai berikut:

Status Kepegawaian

	2025	2024
Pengurus	5	6
Pegawai Tetap	116	117
Kontrak	2	4
Jumlah	123	127

Komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan adalah sebagai berikut:

Tingkat Pendidikan

	2025	2024
Sarjana (S1 dan S2)	67	71
Sarjana Muda (D III)	15	15
SLTA	41	41
Jumlah	123	127

c Tujuan Pendirian

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Bogor Nomor 18 tahun 2019 Pasal 5 maksud dan tujuan Perusahaan adalah:

Tujuan Perusahaan:

- Membangun dan mengembangkan pasar dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- Turut serta dalam pembangunan daerah, menunjang kebijakan serta program Pemerintah Daerah Kota Bogor di bidang ekonomi dan perdagangan serta membantu terciptanya ketahanan pangan dan perlindungan konsumen di Daerah Kota;
- Menyediakan sarana dan prasarana pasar yang aman, nyaman, bersih dan teratur;
- Mendorong perekonomian Daerah Kota;

1 GENERAL (continued)

b Board of Supervisor and Directors (continued)

In carrying out its duties the Board of Directors is assisted by 6 (six) division, 1 (one) unit, 2 (two) professionals, and 9 (nine) markets namely:

- General & Staff Division
- Law & PR Division
- Finance Division
- Service Business Division
- Maintenance & Development Division
- Safety, Cleanliness, and Order Division
- Internal Control Unit
- Professional
- Unit Markets

Number of staff and management Company for the period 31 December 2025 and 2024 is 123 people and 127 people, with the following composition:

Employment Status

6	Manager
117	Permanent Employee
4	Contract
127	Total

The composition of employees based on their level of education is as follows:

Education

71	Bachelor's Degree
15	Associate Degree
41	Senior High School
127	Total

c Objectives

Based on the Regional Regulation (Perda) of Bogor City Number 4 of 2009 Article 4 and Article 6 the objectives and business fields of Company are:

The objectives of establishment

- Improve the market services and infrastructure that are comfortable, clean and orderly
- participate in developer regional, support policy and government of bogor city program in economics and trade and help create food security and protection consument in regional city
- provide facilities and infrastrucur that safe, comfortable, clean and regular
- Drive the Regional Economy

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH
PASAR PAKUAN JAYA KOTA BOGOR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025
Serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH
PASAR PAKUAN JAYA KOTA BOGOR
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
And For The Year Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

1 UMUM (lanjutan)

c Tujuan Pendirian (lanjutan)

Tujuan Perusahaan (lanjutan):

- Menunjang pembangunan Daerah Kota;
- Meningkatkan profesionalitas dan efisiensi pengelolaan pasar; dan
- Meningkatkan pendapatan asli daerah

Bidang usaha Perusahaan:

- Perusahaan menyelenggarakan usaha pengelolaan dan penyewaan sarana dan prasarana pasar, seperti tempat berdagang, parkir, tempat bongkar muat, pengelolaan kebersihan. Mandi Cuci Kakus (MCK), serta usaha lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan pasar.
- Jenis usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Walikota atas usulan Direksi.

Pasar yang dikelola oleh Perusahaan:

- a. Pasar Baru Bogor
- b. Pasar Kebon Kembang Blok A dan B
- c. Pasar Kebon Kembang Blok F dan G
- d. Pasar Merdeka
- e. Pasar Sukasari
- f. Pasar Gunung Batu
- g. Pasar Jambu Dua
- h. Pasar Padasuka
- i. Plaza Bogor
- j. Pasar Devris
- k. Pasar Taman Kencana
- l. Pasar Pamoyanan
- m. Pasar Tanah Baru
- n. Pasar Induk Kemang (Tekum)

d Modal Perusahaan

Modal dasar Perusahaan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 18 Tahun 2019 adalah:

- 1 Uang sebesar Rp45.000.000.000 (Empat puluh lima milyar rupiah) dan telah dipenuhi seluruhnya.
- 2 Tanah, bangunan serta peralatan dan mesin senilai Rp218.756.732.240 (Dua Ratus Delapan Belas Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Dua Ratus Empat Puluh Rupiah).
 - a. Tanah dan bangunan senilai Rp218.629.683.000 (Dua ratus delapan belas miliar enam ratus dua puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).
 - b. Peralatan dan mesin senilai Rp127.049.240 (Seratus Dua Puluh Tujuh Juta Empat Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Empat Puluh Rupiah).

1 GENERAL (continued)

c Objectives (continued)

The objectives of establishment (continued)

- Support regional development
- Improve the professionalism and efficiency of market management
- Increase local revenue

The Company's line of business:

- Company are conducts business of managing and leasing market facilities and infrastructure, such as trading places, parking lots, loading and unloading places, cleaning management as well as other businesses related to market operations.
- Other types of business as referred to in paragraph (1) shall be regulated by the Mayor upon the proposal of the Board of Directors.

The markets that are managed by Company's

- a. Pasar Baru Bogor
- b. Pasar Kebon Kembang Blok A and B
- c. Pasar Kebon Kembang Blok F and G
- d. Pasar Merdeka
- e. Pasar Sukasari
- f. Pasar Gunung Batu
- g. Pasar Jambu Dua
- h. Pasar Padasuka
- i. Plaza Bogor
- j. Pasar Devris
- k. Pasar Taman Kencana
- l. Pasar Pamoyanan
- m. Pasar Tanah Baru
- n. Pasar Induk Kemang (Tekum)

d Company Capital

The authorized capital of the Company based on Bogor City Regulation Number 18 of 2019 is:

- 1 Money of IDR 45,000,000,000 (forty five billion rupiah) and has been fulfilled entirely.
- 2 Land, buildings and equipment and machinery valued at Rp 218,756,732,240 (Two Hundred Eighteen Billion Seven Hundred Fifty Six Million Seven Hundred Thirty Two Thousand Two Hundred Forty Rupiah).
 - a. Land and buildings valued at Rp.218,629,683,000 (Two Hundred Eighteen Billion Six Hundred Twenty Nine Million Six Hundred Eighty Three Thousand Rupiah).
 - b. Equipment and machinery valued at Rp 127,049,240 (One Hundred Twenty-Seven Million Forty-Nine Thousand Two Hundred Forty-Rupiah).

PERUSAHAAN UMUM DAERAH
PASAR PAKUAN JAYA KOTA BOGOR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025
Serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUSAHAAN UMUM DAERAH
PASAR PAKUAN JAYA KOTA BOGOR
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
And For The Year Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1 UMUM (lanjutan)

d Modal Perusahaan (lanjutan)

Rincian penyertaan modal dasar berupa uang:

1. Modal dasar disetor sampai dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan tahun 2010-2016 sejumlah Rp40.000.000.000 (empat puluh milyar rupiah).
2. Modal Dasar yang disetor sebesar Rp5.000.000.000 (lima milyar rupiah).

Rincian penyertaan modal berupa tanah, gedung dan bangunan serta peralatan dan mesin:

	Luas/ Large (m ²)	Nilai/ Value
Pasar Gunung Batu		
Tanah	2.495	3.261.960.000
Gedung	2.778	1.998.700.000
Peralatan & Mesin	-	23.059.000
Jumlah		5.283.719.000
Pasar Sukasari		
Tanah	5.450	21.342.200.000
Gedung	4.702	3.025.180.000
Peralatan & Mesin	-	19.323.330
Jumlah		24.386.703.330
Pasar Taman Kencana		
Tanah	104	368.698.000
Gedung	104	88.800.000
Jumlah		457.498.000
Pasar Kebon Kembang		
Tanah	9.665	24.713.405.000
Gedung	15.560	19.793.000.000
Peralatan & Mesin	-	28.328.330
Jumlah		44.534.733.330
Pasar Padasuka		
Tanah	2.168	3.154.440.000
Gedung	1.282	738.400.000
Peralatan & Mesin	-	426.000
Jumlah		3.893.266.000
Pasar Devris		
Tanah	400	906.800.000
Gedung	160	47.100.000
Jumlah		953.900.000
Pasar Jambu Dua		
Tanah	6.124	17.006.300.000
Gedung	3.844	3.916.100.000
Peralatan & Mesin	-	700.000
Jumlah		20.923.100.000

1 GENERAL (continued)

d Company Capital (continued)

Details of equity participation in the form of money:

1. Authorized capital is paid up to the Bogor City Regulation Number 7 of 2015 concerning Amendments to the Bogor City Regulation Number 8 of 2013 concerning Regional Capital Participation to Company in 2010-2016 amounting to Rp40,000,000,000 (forty billion rupiah).
2. The authorized capital to be paid up is IDR 5,000,000,000 (five billion rupiah).

Details of equity participation in the form of land, buildings and buildings as well as equipment and machinery:

Pasar Gunung Batu
Land
Building
Equipment & Vechile
Total
Pasar Sukasari
Land
Building
Equipment & Vechile
Total
Pasar Taman Kencana
Land
Building
Total
Pasar Kebon Kembang
Land
Building
Equipment & Vechile
Total
Pasar Padasuka
Land
Building
Equipment & Vechile
Total
Pasar Devris
Land
Building
Total
Pasar Jambu Dua
Land
Building
Equipment & Vechile
Total

PERUSAHAAN UMUM DAERAH
PASAR PAKUAN JAYA KOTA BOGOR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025
Serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUSAHAAN UMUM DAERAH
PASAR PAKUAN JAYA KOTA BOGOR
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
And For The Year Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1 UMUM (lanjutan)

1 GENERAL (continued)

d Modal Perusahaan (lanjutan)

d Company Capital (continued)

	Luas/ Large (m ²)	Nilai/ Value	
Pasar Baru Bogor			Pasar Baru Bogor
Tanah	7.367	25.739.000.000	Land
Gedung	27.594	35.869.700.000	Building
Peralatan & Mesin	-	48.353.580	Equipment & Vechile
Jumlah		61.657.053.580	Total
Pasar Merdeka			Pasar Merdeka
Tanah	5.985	14.034.000.000	Land
Gedung	6.290	8.311.000.000	Building
Peralatan & Mesin	-	6.859.000	Equipment & Vechile
Jumlah		22.351.859.000	Total
Pasar Pamoyanan			Pasar Pamoyanan
Tanah	2.700	2.643.000.000	Land
Gedung	294	26.800.000	Building
Jumlah		2.669.800.000	Total
Pasar Tanah Baru			Pasar Tanah Baru
Tanah	2.404	3.109.000.000	Land
Gedung	695	23.600.000	Building
Jumlah		3.132.600.000	Total
Pasar Kebon Kembang Blok F			Pasar Kebon Kembang Blok F
Tanah	4.800	17.483.000.000	Land
Gedung	6.081	9.128.600.000	Building
Jumlah		26.611.600.000	Total
Pasar Kebon Kembang Blok G			Pasar Kebon Kembang Blok G
Tanah	480	1.854.000.000	Land
Gedung	384	46.900.000	Building
Jumlah		1.900.900.000	Total
Pasar Jambu Dua			Pasar Jambu Dua
Tanah	7.302	44.884.663.000	Land
Pasar Taman Kencana			Pasar Taman Kencana
Tanah	2.584	22.786.392.000	Land
Plaza Bogor			Plaza Bogor
Tanah	7.320	99.284.907.000	Land
Gedung	25.709	72.398.690.000	Building
Jumlah		171.683.597.000	Total
JUMLAH		458.111.384.240	TOTAL

e Penyelesaian Laporan Keuangan

e Completion of the Financial Statements

Manajemen Perusahaan, yang diwakili oleh Jenal Abidin, S.Pt, M.P Direktur Utama, bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang telah diselesaikan dan disetujui untuk diterbitkan oleh manajemen Perusahaan pada tanggal 9 April 2026

The management of the Company, represented by Jenal Abidin, S.Pt, M.P President Director, is responsible for the preparation and presentation of these financial statements, which were completed and authorized by the Company's management for issue on April 9, 2026.

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH
PASAR PAKUAN JAYA KOTA BOGOR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025
Serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

2 IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

a Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat

Berdasarkan persyaratan dan kriteria dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP), Perusahaan memenuhi kriteria sebagai Perusahaan entitas privat. Oleh karena itu manajemen Perusahaan memutuskan untuk menerapkan SAK EP sebagai basis dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan Perusahaan efektif tahun buku 1 Januari 2025.

Apabila dibandingkan dengan persyaratan dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku dan diterapkan oleh Perusahaan untuk tahun-tahun buku sebelumnya maka persyaratan dalam SAK EP lebih sederhana. Demikian juga apabila dibandingkan dengan perkembangan terkini SAK yang saat ini sedang dalam proses konvergensi dengan International Financial Reporting Standard (IFRS), maka persyaratan dalam SAK EP juga lebih sederhana.

Perusahaan memilih untuk menerapkan SAK EP, dengan pertimbangan bahwa informasi yang disajikan dalam laporan keuangan berdasarkan SAK EP masih mampu mencerminkan substansi ekonomi dari kegiatan operasi dan bisnis perusahaan. Pertimbangan lainnya adalah biaya dan manfaat dalam penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK EP lebih efisien bagi perusahaan.

Meskipun persyaratan dalam SAK EP lebih sederhana dibandingkan dengan SAK yang diterapkan sebelumnya maupun perkembangan terkini SAK tersebut, namun Perusahaan tetap mengedepankan penyajian wajar dan pengungkapan secara penuh atas informasi keuangan yang relevan dan andal bagi pemakai sebagaimana disyaratkan oleh standar tersebut. Oleh karena itu, tujuan penyajian laporan keuangan bagi sebagian besar pemakai tetap terpenuhi.

b Pernyataan Kepatuhan terhadap SAK EP

Manajemen Perusahaan menyatakan bahwa laporan keuangan tahun 2025 dengan angka komparatif 2024 telah disajikan sesuai dengan SAK EP dan telah memenuhi semua persyaratannya.

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH
PASAR PAKUAN JAYA KOTA BOGOR
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
And For The Year Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

2 SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

a Application of Financial Accounting Standards for Private Entities

Based on the requirements and criteria in the Financial Accounting Standards for Private Entities (SAK EP), the Company meets the criteria as a Company without public accountability. Therefore, the Company's management decided to implement SAK EP as the basis for preparing and presenting the Company's financial reports effective for the financial year 1 January 2025.

When compared with statements under Financial Accounting Standards (SAK) which has been implemented by The Company in the previous years, statements under SAK EP is more modest. Even when compared to the current development of SAK which is in the middle of a convergence with International Financial Reporting Standard (IFRS), SAK EP is still deemed to be more modest with its regulations.

The Company decided to implement SAK EP, with considerations that the informations presented in the financial statements using SAK EP is still able to present the economic substances in its operational and business activities fairly. Other consideration includes SAK EP which is deemed to make less expenditures and more benefits in efficiency to The Company.

Despite the modesty of SAK EP compared with the previously implemented, SAK and its current development, The Company still puts fair and complete presentation of relevant financial information upfront, as required by the standards. Therefore, the objective of financial statements presentation for its users are fulfilled.

b Statement of obedience to SAK EP

Management of The Company stated that the financial statements of year 2025 with the comparative value of year 2024 are presented in accordance with SAK EP and has fulfilled all of its requirements.

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH
PASAR PAKUAN JAYA KOTA BOGOR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025
Serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

2 IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

c Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan Perusahaan terdiri atas Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Perusahaan tidak menyusun laporan laba rugi dan saldo laba, sebagaimana yang diijinkan oleh SAK EP, karena terdapat transaksi yang diakui langsung dalam perubahan ekuitas.

Laporan keuangan disusun berdasarkan basis berkesinambungan usaha dan biaya historis. Laporan keuangan juga disusun berdasarkan basis akrual, kecuali laporan arus kas yang disusun berdasarkan basis kas.

Laporan arus kas menyajikan informasi perubahan historis atas kas dan setara kas yang menunjukkan prestasi terpisah perubahan yang terjadi selama satu periode dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Investasi umumnya diklasifikasikan sebagai setara kas hanya jika akan segera jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang sejak tanggal perolehan.

Laporan keuangan disajikan dalam mata uang Rupiah, masa pembukuan adalah 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

d Kas dan Bank

Kas dan bank mencakup kas, simpanan yang sewaktu-waktu bisa dicairkan dan investasi likuid jangka pendek lainnya dengan jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang.

e Deposito

Deposito mencakup simpanan yang hanya bisa di cairkan pada saat jatuh tempo. Investasi ini bersifat jangka pendek dengan jangka waktu kurang dari atau sama dengan satu tahun.

f Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi

Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang tertentu sebagai transaksi hubungan istimewa sebagaimana diatur SAK EP Bab 33, "Pengungkapan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa". Semua transaksi-transaksi signifikan dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan persyaratan dan kondisi yang sama atau berbeda apabila dilakukan dengan pihak ketiga telah diungkapkan dalam laporan keuangan.

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH
PASAR PAKUAN JAYA KOTA BOGOR
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
And For The Year Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

2 SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c Basis of Completion of Financial Statement

The Company's financial statements consist of Statements of Financial Position, Income Statement, Statement of Changes in Equity, Statements of Cash Flows, and Notes to Financial Statements. The company does not prepare an income statement and retained earnings, as permitted by SAK EP, because there are transactions that are recognized directly in changes in equity.

The surrounding financial statements use the basis of going concern of business and historical costs. The financial statements are also made in accordance with the accrual basis, excluding the statement of cash flow which uses the cash basis.

The cash flow statement presents information on historical changes in the entity's cash and cash equivalents, which shows the separate achievements of changes that occurred during one period of operating, investing and financing activities. Investments are generally classified as cash equivalents only if they are due within three months or less from the date of acquisition.

The financial statements are presented in Rupiah, the bookkeeping period is 1 January to 31 December.

d Cash and Bank

Cash and bank include cash, deposits which can be withdrawn at any time and other short-term liquid investments with maturities of three months or less.

e Deposit

Deposits include deposits that can only be disbursed when due. This investment is short term with a period of less than or equal to one year.

f Transaction with Related Parties

The Company conducts transactions with certain parties as special relationship transactions as stipulated in SAK EP Chapter 33, "Disclosures of parties that have special relationships". All significant transactions with parties that have a special relationship with the same or different terms and conditions if done with third parties have been disclosed in the financial statements.

PERUSAHAAN UMUM DAERAH
PASAR PAKUAN JAYA KOTA BOGOR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025
Serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUSAHAAN UMUM DAERAH
PASAR PAKUAN JAYA KOTA BOGOR
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
And For The Year Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2 IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

2 SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

g Piutang Usaha

Piutang usaha disajikan sebesar jumlah netto setelah dikurangi dengan penyisihan piutang tak tertagih berdasarkan review individual masing-masing saldo piutang pada akhir tahun. Piutang usaha dibedakan menjadi piutang pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan piutang pada pihak ketiga.

g Accounts Receivable

Accounts receivable are presented in net value after deduction from impairment of doubtful accounts. Impairments are valued with consideration of empirical judgment, business and industrial prospects, financial position with emphasis on cash flows, solvability, and managed collaterals. Accounts receivable are segmented under related and third parties.

h Biaya Dibayar Di Muka

Biaya dibayar di muka diamortisasi berdasarkan metode penggunaannya dengan metode garis lurus.

h Prepaid Expenses

Prepaid expenses are amortized based on its period using straight-line method.

i Pendapatan Yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang sudah di tangan, tetapi belum dibukukan. Biasanya terjadi pada akhir bulan atau akhir periode pembukuan antara tanggal 27 s/d 31 setiap bulannya.

i Accrued Income

Revenue that has been hand in hand, but has not yet been recorded. Usually occurs at the end of the month or the end of the accounting period between the 27th to the 31st of every month.

j Aset Tetap dan Penyusutannya

Aset tetap dicatat berdasarkan harga perolehannya yaitu harga beli termasuk semua biaya yang dikeluarkan sampai aset tersebut siap untuk digunakan. Aset dibangun sendiri dicatat sebesar seluruh nilai beban / peralatan yang digunakan, biaya pengerjaan, beban bunga bank, serta biaya umum yang timbul dalam masa pembangunan. Pengeluaran untuk memperoleh aset tetap berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun harus dibebankan sebagai biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan dengan cara mengalokasikan pengeluaran selama masa manfaat aset tersebut melalui penyusutan. Pengeluaran-pengeluaran untuk memperoleh tanah hak milik, termasuk tanah yang berstatus hak guna bangunan, hak guna dan hak pakai yang pertama kali tidak boleh disusutkan. Kecuali tanah, penyajian aset tetap didasarkan pada harga perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan. Pengelompokan aset dan penyusutannya dihitung dengan mengacu pada Keputusan Direksi PERUMDA Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor Nomor 900/Kep.09.1-PDPPJ/2011 tanggal 16 Februari 2011 tentang Kebijakan Akuntansi aset untuk Pengeluaran Barang Modal, aset Tetap dan penyusutannya. Metode penyusutan menggunakan metode garis lurus (*straight line method*) berdasarkan manfaat ekonomis aset tetap yang bersangkutan, yaitu sebagai berikut:

j Fixed Assets and Depreciation

Fixed assets are recorded at cost, which is the purchase price including all costs incurred until the asset is ready for use. Assets built by themselves are recorded at the total value of the expenses / equipment used, construction costs, bank interest expenses, and general costs incurred during the construction period. Expenditures to obtain tangible fixed assets that have a useful life of more than 1 (one) year must be charged as a cost to obtain, collect and maintain income by allocating expenses over the useful life of the asset through depreciation. expenses for acquiring land, including land with building rights, usufruct and usufructuary rights, must not be depreciated for the first time. Except for land, the presentation of fixed assets is based on the acquisition cost after accumulated depreciation. The grouping of assets and their depreciation is calculated by referring to the Decree of the Directors of PERUMDA of Pakuan Jaya Market in Bogor City Number 900 / Kep.09.1-PDPPJ / 2011 dated February 16, 2011 concerning the Accounting Policies on assets for the Expenditures of Capital Goods, Fixed Assets and their depreciation. Depreciation method uses the straight line method (*straight line method*) based on the economic benefits of the relevant fixed assets, namely as follows:

Bangunan:

Permanen
Tidak Permanen

Bukan Bangunan:

Kelompok I
Kelompok II

Tarif/Tarif

5%
10%

25%
12.5%

Building:

Permanent
Non-permanent

Non-Building

Category I
Category II

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH
PASAR PAKUAN JAYA KOTA BOGOR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025
Serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**2 IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

j Aset Tetap dan Penyusutannya (lanjutan)

Kapitalisasi Beban Menjadi Aset Tetap

Kapitalisasi adalah penentuan nilai pembukuan terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai untuk meningkatkan kapasitas, efisiensi dan / atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai aset yang bersangkutan. Setelah diperoleh, masih terdapat biaya-biaya yang muncul selama penggunaan aset tetap seperti biaya pemeliharaan (*maintenance*), penambahan (*additions*), penggantian (*replacement*) atau perbaikan (*repairs*).

Pengeluaran barang modal adalah pengeluaran untuk pembelian barang siap pakai atau dibangun lebih dulu atau pengeluaran pengedaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi dan restorasi. Barang - barang tersebut tidak dimaksudkan untuk dijual melainkan untuk digunakan dalam kegiatan normal perusahaan dengan batasan jumlah harga.

Nilai Satuan Minimum Pengeluaran Barang Modal dan Kapitalisasi Aset Tetap meliputi:

Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan diatas 10% dari nilai perolehan gedung dan bangunan tersebut. Dikecualikan atas hal tersebut (tetap diakui sebagai beban atau tidak dikapitalisasi) adalah pengeluaran untuk gedung dan bangunan oleh Perusahaan, seperti biaya penataan, perbaikan, rehab dan sejenisnya.

Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin adalah sebagai berikut:

1. Alat-alat besar yang sama dengan atau lebih dari Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)
2. Alat angkutan yang sama dengan atau lebih dari Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)
3. Alat bengkel, alat ukur, alat keamanan yang sama dengan atau lebih dari Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
4. Alat kantor dan rumah tangga yang sama atau lebih dari Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)
5. Alat studio dan komunikasi yang sama atau lebih dari Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
6. Pengeluaran untuk persatuan aset tetap lainnya berupa buku-buku koleksi / referensi yang sama dengan atau lebih dari Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah)

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH
PASAR PAKUAN JAYA KOTA BOGOR
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
And For The Year Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2 SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

j Fixed Assets and Depreciation (continued)

Expenses Capitalization Become Fixed Assets

Capitalization is the determination of the accounting value of all expenses to obtain fixed assets until they are ready to use to increase capacity, efficiency and / or extend their technical life in order to increase the value of the assets concerned. Once obtained, there are still costs that arise during the use of fixed assets such as maintenance costs, additions, replacements or repairs.

Capital expenditures are expenditures for the purchase of ready-made or pre-built goods or expenditures for new deductions and the addition of fixed assets from the results of development, reclassification, renovation and restoration. These items are not intended to be sold but rather to be used in normal company activities with a limited amount of price.

The Minimum Unit Value for Capital Expenditures and Capitalization of Fixed Assets includes:

Expenditures for buildings and buildings that are equal to or more than Rp 10,000,000 (ten million rupiah) and above 10% of the acquisition value of the buildings and buildings. Excluded for that matter (still recognized as an expense or not capitalized) are expenditures for buildings and buildings by Company, such as the costs of structuring, repairs, rehabilitation and the like.

Expenditures for per unit of equipment and machinery are as follows:

1. Large equipment equal to or more than Rp. 1,000,000.00 (one million rupiah)
2. Transport means which are equal to or more than Rp. 1,000,000.00 (one million rupiah)
3. Workshop tools, measuring tools, security devices that are equal to or more than Rp. 500,000.00 (five hundred thousand rupiah)
4. Office and household appliances which are the same or more than Rp. 200,000.00 (two hundred thousand rupiah)
5. The same studio and communication equipment or more than Rp. 500,000.00 (five hundred thousand rupiah)
6. Expenditures for each unit of other fixed assets in the form of collection / reference books that are equal to or more than Rp 100,000.00 (one hundred thousand rupiah)

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH
PASAR PAKUAN JAYA KOTA BOGOR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025
Serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH
PASAR PAKUAN JAYA KOTA BOGOR
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
And For The Year Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

2 IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

k Aset lain-Lain

Aset lain-lain meliputi biaya-biaya yang berhubungan dengan pendirian Perusahaan, pra operasi termasuk biaya-biaya yang memberi manfaat untuk jangka waktu lebih dari satu tahun seperti biaya Riset dan Pengembangan. Terhadap biaya-biaya tersebut dilakukan amortisasi dengan estimasi masa manfaat ditetapkan tiga tahun.

l Liabilitas/Utang

Utang dinyatakan dengan lengkap agar laporan keuangan dapat menggambarkan seluruh kewajiban Perusahaan yang terutang pada akhir tahun. Semua kewajiban / hutang yang diketahui harus dicatat tanpa memperhatikan apakah jumlahnya sudah dapat ditentukan secara tepat atau tidak. Jika kewajiban yang telah terjadi belum dapat ditentukan secara pasti jumlahnya maka dapat dinilai dengan taksiran yang wajar.

m Pengakuan Pendapatan dan Beban

Seluruh pendapatan, baik pendapatan usaha maupun diluar usaha diakui pada saat timbulnya transaksi dan/atau pada saat prestasi dinikmati walaupun penerimaan uangnya terjadi kemudian atau pada saat penerimaan uang untuk transaksi tunai. Beban diakui pada saat terjadinya (basis akrual).

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan tangguhan. Beban pajak diakui dalam laba atau rugi kecuali untuk transaksi yang berhubungan dengan transaksi diakui langsung ke ekuitas, dalam hal ini diakui sebagai penghasilan komprehensif lainnya.

n Pajak Penghasilan

Pajak Kini

Beban pajak kini dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku pada tanggal pelaporan keuangan, dan ditetapkan berdasarkan taksiran laba kena pajak tahun berjalan. Manajemen secara periodik mengevaluasi posisi yang dilaporkan di Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sehubungan dengan situasi dimana aturan pajak yang berlaku membutuhkan interpretasi. Jika perlu, manajemen menentukan provisi berdasarkan jumlah yang diharapkan akan dibayar kepada otoritas pajak.

Kekurangan atau kelebihan pembayaran pajak penghasilan badan dicatat sebagai bagian dari beban pajak kini dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Koreksi terhadap liabilitas perpajakan diakui pada saat surat ketetapan pajak diterima. Jika Perusahaan mengajukan keberatan, Perusahaan mempertimbangkan apakah besar kemungkinan otoritas pajak akan menerima keberatan tersebut dan merefleksikan dampaknya terhadap liabilitas perpajakan Perusahaan.

2 SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

k Other Assets

Other assets include costs related to the Company's establishment, pre-operations including costs that provide benefits for more than one year, such as Research and Development costs. Amortization of these costs is carried out with an estimated useful life of three years.

l Liability/Payables

Liabilities are stated in full so that the financial statements can reflect all of the Company's outstanding liabilities at the end of the year. All known obligations / debts must be recorded regardless of whether the amount can be determined precisely or not. If the obligations that have occurred cannot be determined with certainty then the amount can be assessed with a reasonable estimate.

m Recognition of Revenue and Expense

All revenues, both operating income and non-business income are recognized when the transaction arises and / or when the achievement is enjoyed even if the receipt of the money occurs later or when the money is received for cash transactions. Expenses are recognized when incurred (accrual basis).

Income tax expense consists of current tax and deferred tax. Income tax expense is recognized in profit or loss, except for transactions that are recognized directly in equity, in which case the related tax is recognized in other comprehensive income.

n Income Tax

Current Tax

Current tax expense is calculated using the tax rates prevailing at the reporting date and is determined based on the estimated taxable income for the current year. Management periodically evaluates the positions reported in the Annual Tax Return (SPT) in situations where the applicable tax regulations require interpretation. Where necessary, management establishes provisions based on the amounts expected to be paid to the tax authorities.

Underpayments or overpayments of corporate income tax are recorded as part of current tax expense in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

Corrections to tax liabilities are recognized when a tax assessment letter is received. If the Company files an objection, the Company considers whether it is probable that the tax authorities will accept the objection and reflects the impact accordingly on the Company's tax liabilities.

PERUSAHAAN UMUM DAERAH
PASAR PAKUAN JAYA KOTA BOGOR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025
Serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2 IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

n Pajak Penghasilan (lanjutan)

Pajak Tangguhan

Pajak tangguhan diukur dengan metode liabilitas atas beda waktu pada tanggal pelaporan antara dasar pengenaan pajak untuk aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya untuk tujuan pelaporan keuangan. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dengan beberapa pengecualian. Aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan rugi fiskal apabila terdapat kemungkinan besar bahwa jumlah laba kena pajak pada masa mendatang akan memadai untuk mengkompensasi perbedaan temporer dan rugi fiskal.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan dikaji ulang pada akhir periode pelaporan, dan mengurangi jumlah tercatat jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasi sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan yang belum diakui dinilai kembali pada setiap akhir periode pelaporan dan diakui sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak mendatang akan memungkinkan aset pajak tangguhan tersedia untuk dipulihkan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan dihitung berdasarkan tarif yang akan dikenakan pada periode saat aset direalisasikan atau liabilitas tersebut diselesaikan, berdasarkan undang-undang pajak yang berlaku atau berlaku secara substantif pada akhir periode laporan keuangan. Pengaruh pajak terkait dengan penyisihan dan/atau pemulihan semua perbedaan temporer selama tahun berjalan, termasuk pengaruh perubahan tarif pajak, dikreditkan atau dibebankan pada periode operasi berjalan, kecuali untuk transaksi - transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan disajikan secara saling hapus saat hak yang dapat dipaksakan secara hukum ada untuk saling hapus aset pajak kini dan liabilitas pajak kini, atau aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan berkaitan dengan Perusahaan kena pajak yang sama, atau Perusahaan bermaksud untuk menyelesaikan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto.

o Imbalan Pasca Kerja

Perusahaan mengakui kewajiban imbalan pasca kerja sebagaimana diatur dalam SAK EP bab 28 "imbalan kerja". Pengakuan kewajiban tersebut didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 6/2023. Dalam ketentuan tersebut Perusahaan diwajibkan untuk membayarkan imbalan kerja kepada karyawannya pada saat mereka berhenti bekerja dalam hal mengundurkan diri, pensiun normal, meninggal dunia dan cacat tetap. Besarnya imbalan pasca kerja tersebut terutama berdasarkan lamanya masa kerja dan kompensasi karyawan pada saat penyelesaian hubungan kerja. Pada dasarnya imbalan kerja berdasarkan UU Ketenagakerjaan No. 6/2023 adalah imbalan pasti.

Keuntungan/kerugian aktuarial diakui langsung di laporan laba rugi tahun berjalan.

PERUSAHAAN UMUM DAERAH
PASAR PAKUAN JAYA KOTA BOGOR
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
And For The Year Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2 SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

n Income Tax (continued)

Deferred Tax

Deferred tax is measured using the liability method on temporary differences at the reporting date between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts for financial reporting purposes. Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences, subject to certain exceptions. Deferred tax assets are recognized for deductible temporary differences and fiscal losses to the extent that it is probable that future taxable profits will be available against which the temporary differences and fiscal losses can be utilized.

The carrying amount of deferred tax assets is reviewed at the end of each reporting period and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow all or part of the deferred tax assets to be utilized. Unrecognized deferred tax assets are reassessed at the end of each reporting period and are recognized to the extent that it becomes probable that future taxable profits will allow the deferred tax assets to be recovered.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates expected to apply in the period when the assets are realized or the liabilities are settled, based on tax laws that have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period. The tax effects relating to the recognition and/or reversal of all temporary differences during the year, including the effects of changes in tax rates, are credited or charged to the current period's operations, except for transactions that were previously charged or credited directly to equity.

Deferred tax assets and deferred tax liabilities are presented on a net basis when there is a legally enforceable right to offset current tax assets against current tax liabilities, or when the deferred tax assets and deferred tax liabilities relate to the same taxable entity, or when the Company intends to settle current tax assets and liabilities on a net basis.

o Post-Employment Benefits

The company recognizes post-employment benefit obligations as stipulated in SAK EP chapter 28 "employee benefits". Recognition of these obligations is based on the provisions of Labor Law No. 6/2023. Under these provisions the Company is required to pay employee benefits to employees when they stop working in the case of resignation, normal retirement, death and permanent disability. The amount of post-employment benefits is mainly based on the length of service and compensation of employees at the time of the completion of the employment relationship. Basically, employee benefits are based on Labor Law No. 6/2023 is a definite reward.

Actuarial gains / losses are recognized immediately in the statement of income for the year.

PERUSAHAAN UMUM DAERAH
PASAR PAKUAN JAYA KOTA BOGOR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025
Serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2 IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

p Instrumen Keuangan

Instrumen keuangan adalah setiap kontrak yang memberikan aset keuangan bagi satu entitas dan liabilitas keuangan atau ekuitas bagi entitas lain.

Aset Keuangan

Perusahaan mengklasifikasikan aset keuangannya dalam kategori (a) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, (b) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lainnya, dan (c) aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

- 1) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi ("FVTPL")

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi kecuali tes model bisnis dan tes arus kas kontraktual menunjukkan bahwa aset keuangan masuk ke dalam klasifikasi diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Klasifikasi ini ditujukan untuk instrumen keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan atau pada saat pengakuan awal telah ditetapkan oleh Perusahaan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Aset keuangan yang dikategorikan sebagai dimiliki untuk diperdagangkan jika diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat atau jika merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek yang terkini.

- 2) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ("FVOCI")

Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang tujuannya akan terpenuhi dengan mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan dan persyaratan kontraktual dari aset keuangan yang pada tanggal tertentu meningkatkan arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga (*solely payments of principal and interest*) dari jumlah pokok terutang.

Pada saat pengakuan awalnya, instrumen utang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi.

Selanjutnya diukur pada nilai wajarnya dimana keuntungan atau kerugian atas perubahan nilai wajar, keuntungan atau kerugian atas selisih kurs, dan kerugian penurunan nilai, diakui sebagai penghasilan komprehensif lain. Dividen dari instrumen ekuitas diakui di dalam pos laba rugi.

Kerugian kredit ekspektasian diakui sebagai penambah dari penghasilan komprehensif lainnya di dalam laporan posisi keuangan (tidak mengurangi jumlah tercatat aset keuangan dalam laporan keuangan). Pendapatan bunga dihitung menggunakan metode suku bunga efektif.

PERUSAHAAN UMUM DAERAH
PASAR PAKUAN JAYA KOTA BOGOR
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
And For The Year Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2 SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

p Financial Instrument

A financial instrument is any contract that gives rise to a financial asset of one entity and a financial liability or equity instrument of another entity.

Financial Assets

The Company classifies its financial assets into the following categories: (a) financial assets measured at fair value through profit or loss, (b) financial assets measured at fair value through other comprehensive income, and (c) financial assets measured at amortized cost.

- 1) Financial assets measured at fair value through profit or loss ("FVTPL")

Financial assets are measured at fair value through profit or loss unless the business model test and the contractual cash flow test indicate that the financial assets qualify for classification as measured at amortized cost or at fair value through other comprehensive income.

This classification applies to financial instruments that are held for trading or that, upon initial recognition, have been designated by the Company to be measured at fair value through profit or loss.

Financial assets are classified as held for trading if they are acquired or held principally for the purpose of selling or repurchasing them in the near term, or if they form part of a portfolio of identified financial instruments that are managed together and for which there is evidence of a recent actual pattern of short-term profit-taking.

- 2) Financial assets measured at fair value through other comprehensive income ("FVOCI")

Financial assets are managed under a business model whose objective is achieved by both collecting contractual cash flows and selling the financial assets, and the contractual terms of the financial assets give rise, on specified dates, to cash flows that are solely payments of principal and interest (SPPI) on the principal amount outstanding. At initial recognition, debt instruments measured at fair value through other comprehensive income are recognized at their fair value plus transaction costs.

Subsequently, they are measured at fair value, with gains or losses arising from changes in fair value, foreign exchange differences, and impairment losses recognized in other comprehensive income. Dividends from equity instruments are recognized in profit or loss.

Expected credit losses are recognized as an addition to other comprehensive income in the statement of financial position (and do not reduce the carrying amount of the financial assets in the financial statements). Interest income is calculated using the effective interest rate method.

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH
PASAR PAKUAN JAYA KOTA BOGOR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025
Serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**2 IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

p Instrumen Keuangan (lanjutan)

- 3) Aset Keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi

Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual dan persyaratan kontraktual dari aset keuangan yang pada tanggal tertentu meningkatkan arus kontraktual dan persyaratan kontraktual dari aset keuangan yang pada tanggal tertentu meningkatkan arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga (*solely payments of principal and interest*) dari jumlah pokok terutang.

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan suku bunga efektif.

Pendapatan bunga dari aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dicatat dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan diakui sebagai "Pendapatan bunga". Ketika penurunan nilai terjadi, kerugian penurunan nilai diakui sebagai pengurang dari nilai tercatat aset keuangan dan diakui didalam laporan keuangan sebagai "Pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai".

- 4) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi termasuk aset keuangan untuk diperdagangkan dan aset keuangan yang ditetapkan pada saat pengakuan awal untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Aset keuangan diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan jika mereka diperoleh untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat. Aset derivatif juga diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan kecuali mereka ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai efektif. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi ditetapkan pada nilai wajar dalam laporan posisi keuangan dengan perubahan nilai wajar diakui sebagai pendapatan keuangan atau biaya keuangan dalam laba rugi.

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH
PASAR PAKUAN JAYA KOTA BOGOR
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
And For The Year Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2 SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

p Financial Instrument (Continued)

- 3) *Financial Assets Measured at Amortized Cost*

Financial assets are measured at amortized cost if they are managed under a business model whose objective is to hold the financial assets in order to collect contractual cash flows, and the contractual terms of the financial assets give rise, on specified dates, to cash flows that are solely payments of principal and interest (SPPI) on the principal amount outstanding.

Upon initial recognition, financial assets measured at amortized cost are recognized at their fair value plus transaction costs and are subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate method.

Interest income from financial assets measured at amortized cost is recorded in the statement of profit or loss and other comprehensive income and recognized as "Interest income." When impairment occurs, the impairment loss is recognized as a reduction of the carrying amount of the financial asset and is recognized in the financial statements as "Provision for impairment losses."

- 4) *Financial assets measured at fair value through profit or loss*

Financial assets measured at fair value through profit or loss include financial assets held for trading and financial assets designated upon initial recognition to be measured at fair value through profit or loss.

Financial assets are classified as held for trading if they are acquired for the purpose of selling or repurchasing them in the near term. Derivative assets are also classified as held for trading unless they are designated as effective hedging instruments. Financial assets measured at fair value through profit or loss are stated at fair value in the statement of financial position, with changes in fair value recognized as finance income or finance costs in profit or loss.

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH
PASAR PAKUAN JAYA KOTA BOGOR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025**

Serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH
PASAR PAKUAN JAYA KOTA BOGOR
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025**

And For The Year Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2 IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

p Instrumen Keuangan (lanjutan)

Perusahaan mengevaluasi aset keuangan untuk diperdagangkan, selain derivatif, untuk menentukan apakah niat untuk menjualnya dalam waktu dekat masih sesuai. Ketika Perusahaan tidak mampu untuk memperdagangkan aset keuangan karena pasar tidak aktif dan niat manajemen untuk menjualnya di masa mendatang secara signifikan berubah, Perusahaan dapat memilih untuk mereklasifikasi aset keuangan, dalam kondisi yang jarang terjadi.

Reklasifikasi ke pinjaman yang diberikan dan piutang, tersedia untuk dijual atau dimiliki hingga jatuh tempo tergantung pada sifat aset tersebut. Evaluasi ini tidak mempengaruhi aset keuangan yang ditetapkan pada nilai wajar melalui laba rugi menggunakan opsi nilai wajar pada saat penentuan.

Setelah pengakuan awal, aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi ditetapkan pada nilai wajar dalam laporan posisi keuangan. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar aset keuangan diakui melalui laba rugi.

5) Pinjaman yang diberikan dan piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan nonderivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif.

Setelah pengakuan awal, aset keuangan tersebut dicatat pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif kecuali jika dampak diskonto tidak material, maka dinyatakan pada biaya perolehan.

Keuntungan atau kerugian diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain ketika aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, dan melalui proses amortisasi.

6) Aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo

Aset keuangan dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan, serta Perusahaan mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo, kecuali:

- aset keuangan yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;
- aset keuangan yang ditetapkan oleh Perusahaan dalam kelompok tersedia untuk dijual; dan
- aset keuangan yang memiliki definisi pinjaman yang diberikan dan piutang.

**2 SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

p Financial Instrument (Continued)

The Company evaluates financial assets held for trading, other than derivatives, to determine whether the intention to sell them in the near term remains appropriate. When the Company is no longer able to trade the financial assets due to an inactive market and management's intention to sell them in the foreseeable future has significantly changed, the Company may elect to reclassify the financial assets in rare circumstances.

Reclassification to loans and receivables, available-for-sale, or held-to-maturity categories depends on the nature of the financial asset. This evaluation does not affect financial assets designated at fair value through profit or loss using the fair value option at initial recognition.

Subsequent to initial recognition, financial assets measured at fair value through profit or loss are carried at fair value in the statement of financial position. Gains or losses arising from changes in the fair value of the financial assets are recognized in profit or loss.

5) Loans and receivables

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market.

Subsequent to initial recognition, such financial assets are carried at amortized cost using the effective interest rate method, unless the effect of discounting is immaterial, in which case they are stated at cost.

Gains or losses are recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income when the financial assets are derecognized or impaired, as well as through the amortization process.

6) Held-to-maturity financial assets

Financial assets classified as held-to-maturity are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments and fixed maturities, for which the Company has the positive intention and ability to hold them to maturity, except for:

- financial assets that, upon initial recognition, are designated as financial assets measured at fair value through profit or loss;
- financial assets that are designated by the Company as available-for-sale; and
- financial assets that meet the definition of loans and receivables.

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH
PASAR PAKUAN JAYA KOTA BOGOR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025
Serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

2 IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

p Instrumen Keuangan (lanjutan)

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan suku bunga efektif.

Pendapatan bunga dari aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo dicatat dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan diakui sebagai "Pendapatan bunga". Ketika penurunan nilai terjadi, kerugian penurunan nilai diakui sebagai pengurang dari nilai tercatat investasi dan diakui di dalam laporan keuangan sebagai "Pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai".

7) Aset keuangan tersedia untuk dijual

Aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual adalah aset keuangan yang ditetapkan untuk dimiliki untuk periode tertentu dimana akan dijual dalam rangka pemenuhan likuiditas atau perubahan suku bunga, valuta asing atau yang tidak diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan atau piutang, aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok dimiliki.

hingga jatuh tempo atau aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Pada saat pengakuan awalnya, aset keuangan tersedia untuk dijual diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada nilai wajarnya dimana keuntungan atau kerugian atas perubahan nilai wajar diakui sebagai penghasilan komprehensif lain kecuali untuk kerugian penurunan nilai dan laba rugi selisih kurs untuk instrumen utang.

Untuk instrumen ekuitas, laba rugi selisih kurs diakui sebagai bagian laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, hingga aset keuangan dihentikan pengakuannya. Jika aset keuangan tersedia untuk dijual mengalami penurunan nilai, akumulasi keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar, yang sebelumnya diakui sebagai penghasilan komprehensif lain diakui di laba rugi. Pendapatan bunga dihitung menggunakan metode suku bunga efektif.

Metode suku bunga efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari instrumen keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga selama periode yang relevan.

Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi penerimaan kas di masa datang (mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan dan diterima yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi dan premium dan diskonto lainnya) selama perkiraan umur instrumen keuangan, atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih aset keuangan pada saat pengakuan awal.

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH
PASAR PAKUAN JAYA KOTA BOGOR
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
And For The Year Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

2 SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

p Financial Instrument (Continued)

Upon initial recognition, held-to-maturity financial assets are recognized at their fair value plus transaction costs and are subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate method.

Interest income from held-to-maturity financial assets is recorded in the statement of profit or loss and other comprehensive income and recognized as "Interest income." When impairment occurs, the impairment loss is recognized as a reduction of the carrying amount of the investment and is recognized in the financial statements as "Provision for impairment losses."

7) Available-for-sale financial assets

Financial assets classified as available-for-sale are financial assets that are designated to be held for an indefinite period and may be sold in response to liquidity needs or changes in interest rates or foreign exchange rates, and that are not classified as loans and receivables or as financial assets classified as held-to-maturity.

held-to-maturity financial assets or financial assets measured at fair value through profit or loss.

Upon initial recognition, available-for-sale financial assets are recognized at their fair value plus transaction costs and are subsequently measured at fair value, with gains or losses arising from changes in fair value recognized in other comprehensive income, except for impairment losses and foreign exchange gains or losses on debt instruments.

For equity instruments, foreign exchange gains or losses are recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income until the financial assets are derecognized. If available-for-sale financial assets become impaired, the cumulative unrealized gains or losses arising from changes in fair value that were previously recognized in other comprehensive income are reclassified to profit or loss. Interest income is calculated using the effective interest rate method.

Effective interest rate method

The effective interest rate method is the method used to calculate the amortized cost of a financial instrument and to allocate interest income over the relevant period.

The effective interest rate is the rate that exactly discounts the estimated future cash receipts (including all fees and other amounts paid or received that are an integral part of the effective interest rate, transaction costs, and any other premiums or discounts) over the expected life of the financial instrument, or, where appropriate, a shorter period, to the net carrying amount of the financial asset at initial recognition.

PERUSAHAAN UMUM DAERAH
PASAR PAKUAN JAYA KOTA BOGOR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025

Serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2 IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(lanjutan)

p Instrumen Keuangan (lanjutan)

Pendapatan diakui berdasarkan suku bunga efektif untuk instrumen keuangan selain dari aset keuangan FVTPL.

Penurunan nilai aset keuangan

Aset keuangan, selain aset keuangan FVTPL, dievaluasi terhadap indikator penurunan nilai pada setiap akhir periode pelaporan. Aset keuangan diturunkan nilainya bila terdapat bukti objektif, sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan, dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal.

Penerapan PSAK 71 "Instrumen Keuangan" telah mengubah metode perhitungan kerugian penurunan nilai dari pendekatan kerugian yang telah terjadi (*incurred loss*) sesuai PSAK 55 "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran" dengan pendekatan kerugian kredit ekspektasian (*expected credit loss*). Perusahaan menerapkan pendekatan yang disederhanakan (*simplified*) dalam menghitung kerugian kredit ekspektasian yaitu kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur (*life time*).

Untuk kelompok aset keuangan tertentu, seperti piutang, aset yang dinilai tidak akan diturunkan secara individual akan dievaluasi penurunan nilainya secara kolektif. Bukti objektif dari penurunan nilai portofolio piutang dapat termasuk pengalaman Perusahaan atas tertagihnya piutang di masa lalu, peningkatan keterlambatan penerimaan pembayaran piutang dari rata-rata periode kredit, dan juga pengamatan atas perubahan kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan gagal bayar atas piutang.

Untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, jumlah kerugian penurunan nilai merupakan selisih antara jumlah tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa depan yang didiskontokan menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan. Kecuali instrumen ekuitas AFS, jika, pada periode berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai berkurang dan pengurangan dapat dikaitkan secara objektif dengan sebuah peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai tersebut diakui, kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui dipulihkan melalui laba rugi hingga nilai tercatat investasi pada tanggal pemulihan penurunan nilai sepanjang nilainya tidak melebihi biaya perolehan diamortisasi sebelum pengakuan kerugian penurunan nilai dilakukan.

PERUSAHAAN UMUM DAERAH
PASAR PAKUAN JAYA KOTA BOGOR
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
And For The Year Ended

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2 SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

p Financial Instrument (Continued)

Interest income is recognized using the effective interest rate method for financial instruments other than financial assets measured at FVTPL.

Impairment of Financial Assets

Financial assets, other than financial assets measured at FVTPL, are assessed for indicators of impairment at the end of each reporting period. A financial asset is considered impaired if there is objective evidence of impairment as a result of one or more events that occurred after the initial recognition of the asset, and that event(s) have an impact on the estimated future cash flows of the financial asset that can be reliably estimated.

The adoption of PSAK 71 "Financial Instruments" has changed the method of calculating impairment losses from the incurred loss approach under PSAK 55 "Financial Instruments: Recognition and Measurement" to the expected credit loss (ECL) approach. The Company applies the simplified approach in calculating expected credit losses, which measures expected credit losses over the lifetime of the financial asset.

For certain categories of financial assets, such as receivables, assets that are not individually assessed for impairment are evaluated collectively for impairment. Objective evidence of impairment for a portfolio of receivables may include the Company's historical experience of collectability, an increase in the number of delayed payments beyond the average credit period, and observations of changes in national or local economic conditions that are correlated with defaults on the receivables.

For financial assets measured at amortized cost, the amount of the impairment loss is the difference between the asset's carrying amount and the present value of estimated future cash flows discounted at the asset's original effective interest rate. Except for AFS equity instruments, if, in a subsequent period, the amount of the impairment loss decreases and the decrease can be objectively related to an event occurring after the impairment was recognized, the previously recognized impairment loss is reversed through profit or loss to the extent that the carrying amount of the investment at the date of the impairment reversal does not exceed the amortized cost that would have been determined had no impairment loss been recognized.

PERUSAHAAN UMUM DAERAH
PASAR PAKUAN JAYA KOTA BOGOR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025
Serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2 IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(lanjutan)

p Instrumen Keuangan (lanjutan)

Penurunan nilai aset keuangan

Dalam hal efek ekuitas AFS, kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui dalam laba rugi tidak boleh dipulihkan melalui laba rugi. Setiap kenaikan nilai wajar setelah penurunan nilai diakui secara langsung ke penghasilan komprehensif lain. Sehubungan dengan efek utang AFS, kerugian penurunan nilai dibalik melalui laba rugi jika kenaikan nilai wajar investasi dapat dikaitkan secara objektif dengan peristiwa yang terjadi setelah pengakuan kerugian penurunan nilai

Perusahaan menggunakan pendekatan yang disederhanakan dalam menghitung ECL untuk piutang lain-lain dan aset kontrak yang tidak mengandung komponen pembiayaan yang signifikan. Perusahaan menerapkan cara praktis untuk menghitung ECL menggunakan matriks provisi dan menggunakan matriks provisi untuk menghitung tunjangan penurunan nilai saat ini. Perusahaan menganggap informasi saat ini dan ke depan mungkin memengaruhi tingkat gagal bayar historis pelanggan mereka. Perusahaan mengakui tunjangan berdasarkan ECL 12 bulan. Perusahaan harus menilai apakah telah terjadi peningkatan risiko kredit yang signifikan sejak pengakuan awal yang membutuhkan pengakuan ECL sepanjang waktu.

Liabilitas Keuangan

Klasifikasi sebagai liabilitas atau ekuitas

Instrumen keuangan dan ekuitas yang diterbitkan oleh Perusahaan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan atau ekuitas sesuai dengan substansi perjanjian kontraktual dan definisi liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas

Pengakuan dan pengukuran awal

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi atau liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi. Perusahaan menentukan klasifikasi liabilitas keuangan mereka pada saat pengakuan awal.

Liabilitas keuangan awalnya diukur sebesar nilai wajarnya. Biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan liabilitas keuangan (selain liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi) ditambahkan atau dikurangkan dari nilai wajar liabilitas keuangan, yang sesuai, pada pengakuan awal. Biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi langsung diakui dalam laba rugi.

PERUSAHAAN UMUM DAERAH
PASAR PAKUAN JAYA KOTA BOGOR
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
And For The Year Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2 SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

p Financial Instrument (Continued)

Impairment of Financial Assets

In the case of AFS equity securities, impairment losses previously recognized in profit or loss cannot be reversed through profit or loss. Any subsequent increase in fair value after an impairment is recognized directly in other comprehensive income. For AFS debt securities, impairment losses are reversed through profit or loss if the increase in the fair value of the investment can be objectively related to an event occurring after the impairment loss was recognized.

The Company applies the simplified approach in calculating ECL for other receivables and contract assets that do not contain a significant financing component. The Company uses a practical method to calculate ECL by applying a provision matrix and utilizes the provision matrix to determine the current allowance for impairment. The Company considers that current and forward-looking information may affect the historical default rates of its customers. The Company recognizes the allowance based on a 12-month ECL. It is required to assess whether a significant increase in credit risk has occurred since initial recognition, which would require recognition of a lifetime ECL.

Financial Liabilities

Classification as Liabilities or Equity

Financial instruments and equity issued by the Company are classified as financial liabilities or equity in accordance with the substance of the contractual arrangement and the definitions of a financial liability and an equity instrument.

Initial Recognition and Measurement

Financial liabilities are classified as financial liabilities measured at fair value through profit or loss or financial liabilities measured at amortized cost. The Company determines the classification of its financial liabilities at initial recognition.

Financial liabilities are initially measured at their fair value. Transaction costs directly attributable to the acquisition of a financial liability (except for financial liabilities measured at fair value through profit or loss) are added to or deducted from the fair value of the financial liability, as appropriate, at initial recognition. Transaction costs directly attributable to the acquisition of financial liabilities measured at fair value through profit or loss are recognized directly in profit or loss.

PERUSAHAAN UMUM DAERAH
PASAR PAKUAN JAYA KOTA BOGOR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025
Serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUSAHAAN UMUM DAERAH
PASAR PAKUAN JAYA KOTA BOGOR
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
And For The Year Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2 IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

2 SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

p Instrumen Keuangan (lanjutan)

p Financial Instrument (Continued)

Liabilitas keuangan Perusahaan meliputi utang lainnya, dan biaya yang masih harus dibayar yang diklasifikasikan menjadi liabilitas keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi.

The Company's financial liabilities include other payables and accrued expenses, which are classified as financial liabilities measured at amortized cost.

Perusahaan tidak memiliki liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

The Company does not have any financial liabilities measured at fair value through profit or loss.

Pengukuran selanjutnya

Subsequent Measurement

Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi

Financial Liabilities at Amortized Cost

Setelah pengukuran awal, liabilitas diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan diskonto atau premium atas biaya perolehan dan transaksi yang merupakan bagian integral dari suku bunga efektif. Amortisasi diakui dalam laba rugi.

After initial recognition, financial liabilities are measured at amortized cost using the effective interest rate method. Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium on acquisition and transactions that are an integral part of the effective interest rate. The amortization is recognized in profit or loss.

Penghentian pengakuan liabilitas keuangan

Derecognition of Financial Liabilities

Perusahaan menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas Perusahaan telah dilepaskan, dibatalkan, atau kadaluarsa. Selisih antara jumlah tercatat liabilitas keuangan yang dihentikan pengakuannya dan imbalan yang dibayarkan dan utang diakui dalam laba rugi.

The Company derecognizes a financial liability only when the liability has been discharged, canceled, or has expired. The difference between the carrying amount of the financial liability derecognized and the consideration paid and payable is recognized in profit or loss.

Instrumen ekuitas

Equity Instruments

Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset Perusahaan setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya. Instrumen ekuitas dicatat sebesar hasil penerimaan bersih setelah dikurangi biaya penerbitan langsung.

An equity instrument is any contract that provides a residual interest in the assets of the Company after deducting all its liabilities. Equity instruments are recorded at the proceeds received, net of directly attributable issuance costs.

Reklasifikasi instrumen keuangan

Reclassification of Financial Instruments

Perusahaan diperkenankan untuk melakukan reklasifikasi atas aset keuangan yang dimiliki jika Perusahaan mengubah model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan dan Perusahaan tidak diperkenankan untuk melakukan reklasifikasi atas liabilitas keuangan.

The Company is permitted to reclassify financial assets if it changes the business model for managing the financial assets, but the Company is not allowed to reclassify financial liabilities.

Perubahan model bisnis sifatnya harus berdampak secara signifikan terhadap kegiatan operasional Perusahaan seperti memperoleh, melepaskan, atau mengakhiri suatu lini bisnis. Selain itu, Perusahaan perlu membuktikan adanya perubahan tersebut kepada pihak eksternal.

A change in the business model must have a significant impact on the Company's operations, such as acquiring, disposing of, or discontinuing a line of business. In addition, the Company must be able to demonstrate the change to external parties.

Perusahaan akan mereklasifikasi seluruh aset keuangan yang terkena dampak dari perubahan model bisnis. Perubahan tujuan model bisnis Perusahaan harus berdampak sebelum tanggal reklasifikasi.

The Company will reclassify all financial assets affected by the change in the business model. The change in the Company's business model must take effect before the reclassification date.

PERUSAHAAN UMUM DAERAH
PASAR PAKUAN JAYA KOTA BOGOR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025
Serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUSAHAAN UMUM DAERAH
PASAR PAKUAN JAYA KOTA BOGOR
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
And For The Year Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2 IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

2 SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

p Instrumen Keuangan (lanjutan)

p Financial Instrument (Continued)

Yang bukan merupakan perubahan model bisnis adalah: (a) Perubahan intensi berkaitan dengan aset keuangan tertentu (bahkan dalam situasi perubahan signifikan dalam kondisi pasar), (b) Hilangnya sementara pasar tertentu untuk aset keuangan, dan (c) Pengalihan aset keuangan antara bagian dari Perusahaan dengan model bisnis berbeda.

The following do not constitute a change in the business model: (a) a change in intention regarding a particular financial asset (even in the event of significant changes in market conditions), (b) the temporary loss of a particular market for a financial asset, and (c) the transfer of financial assets between parts of the Company with different business models.

Saling hapus instrumen keuangan

Offsetting of Financial Instruments

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika Perusahaan memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui; dan berintens untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan. Hak saling hapus harus ada pada saat ini daripada bersifat kontingen atas terjadinya suatu peristiwa di masa depan dan harus dieksekusi oleh pihak lawan, baik dalam situasi bisnis normal dan dalam peristiwa gagal bayar, peristiwa kepailitan, atau kebangkrutan.

Financial assets and financial liabilities are offset and presented on a net basis in the statement of financial position when the Company has a legally enforceable right to set off the recognized amounts and intends either to settle on a net basis or to realize the asset and settle the liability simultaneously. The right of set-off must be currently enforceable, rather than contingent on a future event, and must be exercisable by the counterparty in the normal course of business as well as in the event of default, insolvency, or bankruptcy.

Perusahaan tidak akan mengklasifikasikan kembali instrumen keuangan dari atau ke klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi saat diterbitkan atau dikeluarkan.

The Company will not reclassify financial instruments into or out of the fair value through profit or loss category at the time of issuance or initial recognition.

q Pengukuran Nilai Wajar

q Fair Value Measurement

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur di antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Pengukuran nilai wajar didasarkan pada asumsi bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas akan terjadi:

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date. Fair value measurement is based on the assumption that the transaction to sell the asset or transfer the liability would take place:

- 1) di pasar utama untuk aset atau liabilitas tersebut atau;
- 2) jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut

- 1) in the principal market for the asset or liability; or
- 2) If there is no principal market, the most advantageous market for the asset or liability should be used.

Perusahaan harus memiliki akses ke pasar utama atau pasar yang paling menguntungkan.

if there is no principal market, in the most advantageous market for the asset or liability.

Nilai wajar aset atau liabilitas diukur menggunakan asumsi yang akan digunakan pelaku pasar ketika menentukan harga aset atau liabilitas tersebut, dengan asumsi bahwa pelaku pasar bertindak dalam kepentingan ekonomi terbaiknya.

The fair value of an asset or liability is measured using the assumptions that market participants would use when pricing the asset or liability, assuming that market participants act in their best economic interest.

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH
PASAR PAKUAN JAYA KOTA BOGOR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025
Serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

2 IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

q Pengukuran Nilai Wajar (Lanjutan)

Pengukuran nilai wajar aset nonkeuangan memperhitungkan kemampuan pelaku pasar untuk menghasilkan manfaat ekonomis dengan menggunakan aset dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya, atau dengan menjualnya kepada pelaku pasar lain yang akan menggunakan aset tersebut dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya, dan terbaiknya, atau dengan menjualnya kepada pelaku pasar lain yang akan menggunakan aset tersebut dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya.

Perusahaan menggunakan teknik penilaian yang sesuai dalam keadaan dan dimana data yang memadai tersedia untuk mengukur nilai wajar, memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

Seluruh aset dan liabilitas, baik yang diukur pada nilai wajar, atau dimana nilai wajar aset atau liabilitas tersebut diungkapkan, dikategorikan dalam hirarki nilai wajar, berdasarkan tingkat input terendah yang signifikan terhadap keseluruhan pengukuran, sebagai berikut:

- 1) Tingkat 1 - Harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;
- 2) Tingkat 2 - Teknik penilaian dimana tingkat input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar dapat diobservasi, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- 3) Tingkat 3 - Teknik penilaian dimana tingkat input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar tidak dapat diobservasi.

Untuk aset dan liabilitas yang diukur pada nilai wajar secara berulang dalam laporan keuangan, maka Perusahaan menentukan apakah telah terjadi transfer di antara tingkat hirarki nilai wajar dengan cara menilai kembali pengkategorian tingkat nilai wajar (berdasarkan tingkat input terendah yang signifikan terhadap keseluruhan pengukuran) pada setiap akhir periode pelaporan.

r Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan

Peristiwa setelah akhir periode yang memerlukan penyesuaian dan menyediakan informasi Perusahaan pada tanggal pelaporan tercermin dalam laporan keuangan.

Peristiwa setelah akhir periode yang tidak memerlukan penyesuaian diungkapkan dalam laporan keuangan apabila material.

s Persediaan

Persediaan dinyatakan dengan biaya atau nilai realisasi bersih mana yang lebih rendah. Penilaian biaya ditentukan berdasarkan metode FIFO (*First In First Out*).

Nilai realisasi bersih ditentukan berdasarkan urutan waktu perolehan barang, dimana barang yang pertama kali masuk kedalam persediaan dianggap sebagai barang yang pertama kali di keluarkan atau dijual.

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH
PASAR PAKUAN JAYA KOTA BOGOR
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
And For The Year Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

2 SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

q Fair Value Measurement (Continued)

The fair value measurement of a non-financial asset takes into account the ability of market participants to generate economic benefits by using the asset in its highest and best use, or by selling it to other market participants who would use the asset in its highest and best use.

The Company uses valuation techniques that are appropriate in the circumstances and for which sufficient data are available to measure fair value, maximizing the use of relevant observable inputs and minimizing the use of unobservable inputs.

All assets and liabilities, whether measured at fair value or for which the fair value of such assets or liabilities is disclosed, are categorized within the fair value hierarchy based on the lowest level input that is significant to the overall measurement, as follows:

- 1) Level 1 – Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities;
- 2) Level 2 – Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is observable, either directly or indirectly;
- 3) Level 3 – Valuation techniques in which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is unobservable.

For assets and liabilities that are measured at fair value on a recurring basis in the financial statements, the Company determines whether transfers have occurred between levels of the fair value hierarchy by reassessing the fair value level classification (based on the lowest level input that is significant to the overall measurement) at the end of each reporting period.

r Events After the Reporting Date

Events after the end of the period that require adjustment and provide information about the Company's condition at the reporting date are reflected in the financial statements.

Events after the end of the period that do not require adjustment are disclosed in the financial statements if they are material.

s Inventory

Inventories are stated at cost or net realizable value, whichever is lower. Cost valuation is determined using the FIFO (*First In, First Out*) method.

Net realizable value is determined based on the time sequence of acquisition of goods, where the goods that are first entered into inventory are considered to be the goods that are first issued or sold.

PERUSAHAAN UMUM DAERAH
PASAR PAKUAN JAYA KOTA BOGOR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025

Serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUSAHAAN UMUM DAERAH
PASAR PAKUAN JAYA KOTA BOGOR
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2025

And For The Year Ended

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3 PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI

Penyusunan laporan keuangan Perusahaan mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari pendapatan, beban, aset dan liabilitas, dan pengungkapan atas liabilitas kontinjensi, pada akhir periode pelaporan. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam tahun pelaporan berikutnya.

Pertimbangan

Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan, manajemen telah membuat keputusan berikut, yang memiliki pengaruh paling signifikan terhadap jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

Penyisihan atas Penurunan Nilai Piutang Usaha

Perusahaan mengevaluasi akun tertentu jika terdapat informasi bahwa pelanggan yang bersangkutan tidak dapat memenuhi liabilitas keuangannya. Dalam hal tersebut, entitas mempertimbangkan, berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas pada, jangka waktu hubungan dengan pelanggan dan status kredit dari pelanggan berdasarkan catatan kredit dari pihak ketiga dan faktor pasar yang telah diketahui, untuk mencatat provisi yang spesifik atas jumlah piutang pelanggan guna mengurangi jumlah piutang yang diharapkan dapat diterima oleh perusahaan. Provisi yang spesifik ini dievaluasi kembali dan disesuaikan jika tambahan informasi yang diterima mempengaruhi jumlah cadangan penurunan nilai piutang.

Klasifikasi Instrumen Keuangan

Perusahaan menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan bila definisi yang ditetapkan PSAK 55 dipenuhi dan persyaratan pengungkapan dalam BAB 11 dan 12 SAK EP. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Perusahaan seperti diungkapkan pada Catatan 2p.

Penentuan Mata Uang Fungsional

Mata uang fungsional perusahaan adalah mata uang dari lingkungan ekonomi primer tempat perusahaan beroperasi. Mata uang tersebut adalah mata uang yang mempengaruhi penjualan dan beban dari produk yang diberikan. Berdasarkan penilaian manajemen perusahaan, mata uang fungsional perusahaan adalah Rupiah.

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk periode berikutnya diungkapkan di bawah ini. Perusahaan mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Perusahaan. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

3 USE OF JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS

The preparation of the Company's financial statements requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenues, expenses, assets and liabilities, and the disclosure of contingent liabilities, at the end of the reporting period. Uncertainty about these assumptions and estimates could result in outcomes that require a material adjustment to the carrying amount of the asset and liability affected in future periods.

Judgments

In the process of applying the Company's accounting policies, management has made the following decisions, which have the most significant effect on the amounts recognized in the financial statements:

Allowance for impairment of trade receivables

The Company evaluates specific accounts where it has information that certain customers are unable to meet their financial obligations. In these cases, the Company uses judgment, based on the best available facts and circumstances, including but not limited to, the length of its relationship with the customer and the customer's current credit status based on third party credit reports and known market factors, to record specific provisions for customers against amounts due to reduce its receivable amounts that the Company expects to collect. These specific provisions are re-evaluated and adjusted as additional information received affects the amounts of allowance for impairment of trade receivables.

Classification of Financial Instruments

The Company classifies certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by considering whether the definitions set forth in PSAK 55 are met and the disclosure requirements under Chapters 11 and 12 of SAK EP. Accordingly, financial assets and financial liabilities are recognized in accordance with the Company's accounting policies as disclosed in Note 2p.

Determination of Functional Currency

The Company's functional currency is the currency of the primary economic environment in which the Company operates. It is the currency that influences the sales and costs of the products provided. Based on the Company's management assessment, the Company's functional currency is Rupiah.

Estimates and Assumptions

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date, that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial period are disclosed below. The Company based its assumptions and estimates on parameters available when the financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments may change due to market changes or circumstances arising beyond the control of the Company. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH
PASAR PAKUAN JAYA KOTA BOGOR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025
Serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH
PASAR PAKUAN JAYA KOTA BOGOR
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
And For The Year Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

3 PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI (lanjutan)

Penilaian Instrumen Keuangan

Perusahaan mencatat aset dan liabilitas keuangan tertentu pada nilai wajar, yang mengharuskan penggunaan estimasi akuntansi. Sementara komponen signifikan atas pengukuran nilai wajar ditentukan menggunakan bukti objektif yang dapat diverifikasi, jumlah perubahan nilai wajar dapat berbeda bila Perusahaan menggunakan metodologi penilaian yang berbeda. Perubahan nilai wajar aset dan liabilitas keuangan tersebut dapat mempengaruhi secara langsung laba atau rugi Perusahaan. Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan diungkapkan pada Catatan 2q dan 2p.

Penurunan Nilai Aset Nonkeuangan

Penelaahan atas penurunan nilai dilakukan apabila terdapat indikasi penurunan nilai aset tertentu. Penentuan nilai wajar aset membutuhkan estimasi arus kas yang diharapkan akan dihasilkan dari pemakaian berkelanjutan dan pelepasan akhir atas aset tersebut. Perubahan signifikan dalam asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan nilai wajar dapat berdampak signifikan pada nilai terpulihkan dan jumlah kerugian penurunan nilai yang terjadi mungkin berdampak material pada hasil operasi Perusahaan.

Pajak Penghasilan

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan penyisihan atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti dalam kegiatan usaha normal. Perusahaan mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan.

4 PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN

Setelah penerbitan laporan keuangan tahun yang berakhir 31 Desember 2024, Perusahaan telah menyajikan kembali laporan keuangan sehubungan dengan adanya penerapan Satandar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) yang menggantikan Satndar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dan koreksi atas rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2024 serta rekomendasi atas laporan hasil review inspektorat kota Bogor tahun 2025, sehingga manajemen melakukan koreksi atas saldo awal tahun 2025 antara lain sebagai berikut:

	1 Januari 2025/ (Setelah penyesuaian/ After adjustment)	January 1, 2025 (Before adjustment)
Aset tetap	412.059.134.964	339.784.635.465
Aset pajak tangguhan	2.127.399.161	-
Pengukuran Kembali aset tetap	-	(70.269.710.000)
Aset tetap tersedia untuk dijual	-	2.004.789.500
Cadangan umum	-	1.751.110.933
Saldo rugi	(82.711.985.846)	(86.590.495.939)

3 USE OF JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

Valuation of Financial Instruments

The Company records certain financial assets and financial liabilities at fair value, which requires the use of accounting estimates. While significant components of the fair value measurement are determined using verifiable objective evidence, the amount of changes in fair value may differ if the Company uses different valuation methodologies. Changes in the fair value of these financial assets and financial liabilities may directly affect the Company's profit or loss. The fair values of financial assets and financial liabilities are disclosed in Notes 2q and 2p.

Impairment of Non-Financial Assets

A review for impairment is performed when there is an indication of impairment of certain assets. The determination of an asset's fair value requires estimates of cash flows expected to be generated from its continuing use and ultimate disposal. Significant changes in the assumptions used to determine fair value may have a significant impact on the recoverable amount, and the amount of impairment loss incurred may have a material impact on the Company's results of operations.

Income Tax

Significant judgment is involved in determining the provision for corporate income tax. There are certain transactions and computation for which the ultimate tax determination is uncertain during the ordinary course of business. The Company recognizes liabilities for expected corporate income tax issues based on estimates of whether additional corporate income tax will be due.

4 RESTATEMENT OF FINANCIAL STATEMENTS

Following the issuance of the financial statements for the year ending December 31, 2024, the Company has restated its financial statements in connection with the implementation of the Financial Accounting Standards for Private Entities (SAK EP) which replaces the Financial Accounting Standards for Entities Without Public Accountability (SAK ETAP) and corrections to the recommendations of the Audit Board (BPK) in 2024 and recommendations on the review report of the Bogor City Inspectorate in 2025, so that management made corrections to the opening balance in 2025, including the following:

Fixed assets
Deferred tax assets
Remeasurement of fixed assets
Fixed assets available for sale
General allowance
Retained earnings

PERUSAHAAN UMUM DAERAH
PASAR PAKUAN JAYA KOTA BOGOR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025

Serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUSAHAAN UMUM DAERAH
PASAR PAKUAN JAYA KOTA BOGOR
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025

And For The Year Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

5 KAS DAN BANK

Kas dan Bank terdiri dari:

	31 Desember 2025/ December 31, 2025
Kas	90.645.095
Bank:	
PT Bank Pembangunan Daerah	
Jawa barat dan Banten, Tbk	1.252.149.458
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk	764.614.421
Perumda Bank Kota Bogor	628.299.527
PT Bank Central Asia Tbk	258.725.737
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	40.373.831
PT Bank Nasional Indonesia Tbk	27.210.752
PT Bank Syariah Indonesia	24.781.142
PT Bank Tabungan Negara Tbk	22.465.342
PT Bank Danamon Indonesia, Tbk	1.963.335
PT Bank Mega, Tbk	1.746.703
PT Bank Mega Syariah	1.642.700
PT Bank DKI	947.500
Jumlah	3.115.565.543

6 DEPOSITO

Deposito terdiri dari:

	31 Desember 2025/ December 31, 2025
Perumda Bank Kota Bogor	3.000.000.000
Jumlah	3.000.000.000

Suku bunga deposito sebesar 6.25% dengan jangka waktu 3 bulan dan berakhir tanggal 24 maret 2026 dan 11 maret 2026.

7 PIUTANG USAHA

Piutang usaha terdiri dari:

	31 Desember 2025/ December 31, 2025
PT Fortunindo Artha Perkasa	3.481.699.750
PT Bogor Artha Makmur	2.200.864.254
CV Purnabri	1.745.400.000
Cadangan piutang tak terdagih	(3.054.941.609)
Jumlah	4.373.022.395

Manajemen berkeyakinan bahwa semua piutang dapat terdagih, sehingga penyisihan penurunan nilai nihil.

Umur piutang usaha adalah sebagai berikut:

	Umur Piutang/ Aging of Receivable		
	1-30 Hari/ Day	31-60 Hari/ Day	91-> 1 Tahun/ Year
PT Fortunindo Artha Perkasa	-	-	3.481.699.750
PT Bogor Artha Makmur	-	-	2.200.864.254
CV Purnabri	-	-	1.745.400.000
Jumlah	-	-	7.427.964.004

5 CASH AND BANKS

Cash and Banks consist of

	31 Desember 2024/ December 31, 2024
Cash on hand	234.426.965
Banks:	
PT Bank Pembangunan Daerah	
Jawabarat dan Banten, Tbk	261.833.272
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk	214.801.877
Perumda Bank Kota Bogor	703.190.117
PT Bank Central Asia Tbk	232.609.777
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	774.678.741
PT Bank Nasional Indonesia Tbk	149.969.727
PT Bank Syariah Indonesia	130.795.713
PT Bank Tabungan Negara Tbk	72.540.747
PT Bank Danamon Indonesia, Tbk	1.953.520
PT Bank Mega, Tbk	27.745.054
PT Bank Mega Syariah	30.893.330
PT Bank DKI	830.000
Total	2.836.268.840

6 DEPOSITS

Deposits consist of

	31 Desember 2024/ December 31, 2024
Perumda Bank Kota Bogor	-
Total	-

The deposit interest rate is 65% with a term of 3 months and ends on March 24 2026 and march 11 2026.

7 ACCOUNT RECEIVABLES

Account receivables consist of

	31 Desember 2024/ December 31, 2024
PT Fortunindo Artha Perkasa	3.481.699.749
PT Bogor Artha Makmur	2.600.864.256
CV Purnabri	1.745.400.000
Allowance for doubtful accounts	-
Total	7.827.964.005

Management believes that all receivables are collectible; therefore, no allowance for impairment is provided.

The aging of trade receivables is as follows:

PT Fortunindo Artha Perkasa
PT Bogor Artha Makmur
CV Purnabri
Total

PERUSAHAAN UMUM DAERAH
PASAR PAKUAN JAYA KOTA BOGOR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025
Serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUSAHAAN UMUM DAERAH
PASAR PAKUAN JAYA KOTA BOGOR
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
And For The Year Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

8 UANG MUKA

Uang muka per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 terdiri dari:

	31 Desember 2025/ December 31, 2025
Pembelian "Minyak Kita"	95.000.000
Jumlah	95.000.000

8 DOWN PAYMENT

Down payment as of December 31 and 2025 and December 31, 2024 consist of:

	31 Desember 2024/ December 31, 2024	
	-	Purchase of "Minyak Kita"
Jumlah	-	Total

9 PERSEDIAAN

Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 terdiri dari:

	31 Desember 2025/ December 31, 2025
UB Mart	327.884.278
Jumlah	327.884.278

9 INVENTORY

Inventory as of December 31, 2025 and December 31, 2024 consist of:

	31 Desember 2024/ December 31, 2024	
	-	UB Mart
Jumlah	-	Total

10 BIAYA DIBAYAR DIMUKA

Biaya dibayar dimuka terdiri dari:

	31 Desember 2025/ December 31, 2025
Dana pengembangan	16.000.000
Lain-lain	9.301.904
Jumlah	25.301.904

10 PREPAID EXPENSES

Prepaid expenses consist of

	31 Desember 2024/ December 31, 2024	
	16.000.000	Development Fund
	-	Others
Jumlah	16.000.000	Total

11 PERPAJAKAN

Terdiri dari:

a. Pajak dibayar dimuka

	31 Desember 2025/ December 31, 2025
Pajak Pertambahan Nilai	23.673.243
Pajak penghasilan pasal 21	-
Jumlah	23.673.243

11 TAXATION

Consist of

a. Prapaid tax

	31 Desember 2024/ December 31, 2024	
	18.715.497	Value Added Tax
	1.245.136	Income tax article 21
Jumlah	19.960.633	Total

b. Utang pajak

	31 Desember 2025/ December 31, 2025
Denda	1.100.000.000
Pajak Pertambahan Nilai	1,080,423,073
Pajak penghasilan pasal 21	433.517.187
Pajak penghasilan pasal 23	10.440.733
Pajak Penghasilan Pasal 22	7.764.324
Pajak parkir	308.636
Pajak penghasilan pasal 29	-
Pajak penghasilan pasal 25	-
Pajak penghasilan pasal 4 (2)	-
Jumlah	2.632.453.953

b. Taxes payable

	31 Desember 2024/ December 31, 2024	
	2.158.536.085	Penalty
	-	Value Added Tax
	-	Income tax article 21
	3.292.334	Income tax article 23
	-	Income tax article 22
	30.877.273	Parking tax
	223.741.483	Income tax article 29
	42.440.629	Income tax article 25
	814.690	Income tax article 4 (2)
Jumlah	2.459.702.494	Total

Pajak pertambahan nilai merupakan pajak atas bongkaran pasar plaza bogor, pasar baru bogor dan pajak atas penjualan UB Mart yang belum disetorkan. Manajemen menyetorkan pajak atas bongkaran pasar pada januari 2026.

Value-added tax represents the unpaid tax on the demolition of the Plaza Bogor Market, Pasar Baru Bogor Market, and the sales tax on UB Mart. Management remitted the tax on the market demolition in January 2026.

PERUSAHAAN UMUM DAERAH
PASAR PAKUAN JAYA KOTA BOGOR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025
Serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUSAHAAN UMUM DAERAH
PASAR PAKUAN JAYA KOTA BOGOR
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
And For The Year Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

11 PERPAJAKAN (lanjutan)

Terdiri dari:

c. Beban pajak

	31 Desember 2025/ December 31, 2025
Pajak tangguhan	1.417.121.098
Pajak kini	-
Jumlah	1.417.121.098

Rekonsiliasi laba sebelum taksiran pajak penghasilan, seperti yang disajikan dalam laporan laba rugi, dengan taksiran penghasilan kena pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 sebagai berikut:

	31 Desember 2025/ December 31, 2025
Laba (Rugi) sebelum pajak	(97.997.420.986)
Koreksi fiskal	
Beda tetap	
Rugi penghapusan aset tetap	84.598.643.578
Pendapatan final	(262.024.287)
Tunjangan pajak	457.983.990
Kesejahteraan pegawai	52.883.702
Beban representasi	921.280.000
Beban kendaraan	102.100.511
Beban unit bisnis	-
Beban umum lain-lain	9.356.700
Beban promosi	52.379.100
Beban iklan	24.450.000
Beban pajak	341.404.713
Pendapatan bunga	(465.591.810)
Beban lain-lain	-
Beda waktu	
Imbalan kerja	2.203.386.215
Pembayaran pesangon	(2.396.780.362)
Penyisihan piutang tak tertagih	3.054.941.609
Penghasilan kena pajak	(9.303.007.327)
Pembulatan	(9.303.007.000)

**Beban pajak penghasilan:
Tarif PPh pasal 31E**

Kena fasilitas	-
Tidak kena fasilitas	-
Jumlah	-

Kredit pajak:

Pajak penghasilan pasal 25	-
Pajak penghasilan pasal 23	-

Utang Pajak	-
--------------------	----------

11 TAXATION (continued)

Consist of

c. Tax expense

	31 Desember 2024/ December 31, 2024
	-
	652.475.890
Jumlah	652.475.890

Reconciliation between earnings before estimated income taxes, as presented in the statement of profit or loss, with the taxed income for the years ended December 31, 2025 and 2024 is as follows:

	31 Desember 2024/ December 31, 2024
Laba (Rugi) sebelum pajak	3.183.076.004
Koreksi fiskal	
Beda tetap	
Rugi penghapusan aset tetap	-
Pendapatan final	(1.040.679.350)
Tunjangan pajak	405.651.516
Kesejahteraan pegawai	180.647.500
Beban representasi	1.130.462.250
Beban kendaraan	165.447.846
Beban unit bisnis	376.758.690
Beban umum lain-lain	18.871.897
Beban promosi	56.051.100
Beban iklan	24.900.000
Beban pajak	109.383.882
Pendapatan bunga	(500.444.965)
Beban lain-lain	118.110.044
Beda waktu	
Imbalan kerja	1.703.363.321
Pembayaran pesangon	-
Penyisihan piutang tak tertagih	-
Penghasilan kena pajak	5.931.599.735
Pembulatan	5.931.599.000

Correction fiscal:
Permanent difference
Loss on write-off of fixed assets
Final incomes
Tax benefits
Employee welfare
Rerepresentation expenses
Vehicle expenses
Unit business expenses
Other general expenses
Promotion expenses
Advertising expenses
Taxes expense
Interest incomes
Others expense

Temporary difference
Employee benefits expense
Severance pay
Allowance for doubtful accounts
Taxable income

Rounded

Income tax expense:
Tariff Wht art 31E
Hit the facility
Not subject facility
Total

Tax credit:
Withholding tax art 25
Withholding tax art 25

Tax Payable

PERUSAHAAN UMUM DAERAH
PASAR PAKUAN JAYA KOTA BOGOR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025
Serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUSAHAAN UMUM DAERAH
PASAR PAKUAN JAYA KOTA BOGOR
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
And For The Year Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

11 PERPAJAKAN (lanjutan)

d. Aset Pajak Tangguhan

11 TAXATION (continued)

d. Deferred tax assets

	2025				
	Saldo awal/ Beginning Balance	Dikreditkan (dibebankan) ke laporan laba rugi/ Credited (charged) to profit or loss	Dibebankan ke laba komprehensif lain/ Charged to other comprehensive income	Saldo akhir/ Ending balance	
Provisi atas kewajiban imbalan kerja	2.127.399.161	(42.546.713)	-	2.084.852.448	Provision of post-Employment benefit obligations
Penyisihan piutang Usaha tak tertagih	-	672.087,154	-	672.087,154	Allowance for bad debts
Laba (Rugi) Fiskal		(2.046.661.540)		(2.046.661.540)	
Aset pajak tangguhan Perusahaan	2.127.399.161	(1.417.121.098)	-	710.278.062	Deferred tax assets of the Company

12 ASET TETAP

Terdiri dari:

12 FIXED ASSETS

Consist of

	31 Desember 2024/ December 31, 2025					
	1 Januari 2024/ Januari 1, 2024	Penambahan/ Addition	Pengurang/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassification	31 Desember 2025 December 31, 2025	
Harga perolehan:						Acquisition cost:
Perolehan:						
Tanah	302.571.765.000	-	-	-	302.571.765.000	Land
Bangunan	148.191.589.029	-	123.754.733.883	-	24.436.855.146	Building
Kendaraan	2.243.917.273	32.640.000	-	-	2.276.557.273	Vehicle
Mebeulair	644.222.691	-	-	-	644.222.691	Furniture
Peralatan	2.070.557.962	18.000.000	-	-	2.088.557.962	Equipment
Jumlah	455.722.051.955	50.640.000	123.754.733.883	-	332.017.958.072	Total
Akumulasi penyusutan						Accumulated Depreciation
Bangunan	39.334.992.824	5.575.446.016	32.402.770.305	-	12.507.668.535	Building
Kendaraan	1.726.471.247	176.393.526	-	-	1.902.864.773	Vehicle
Mebeulair	636.620.313	2.335.159	-	-	638.955.472	Furniture
Peralatan	1.964.832.607	61.587.429	-	-	2.026.420.036	Equipment
Jumlah	43.662.916.991	5.815.762.130	32.402.770.305	-	17.075.908.816	Total
Pengukuran kembali aset tetap	-				-	Fixed Asset Remeasurement
Nilai Buku	412.059.134.964				314.942.049.256	Book Value

	31 Desember 2024/ December 31, 2024					
	1 Januari 2024/ Januari 1, 2024	Penambahan/ Addition	Pengurang/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassification	31 Desember 2024 December 31, 2024	
Harga perolehan:						Acquisition cost:
Perolehan:						
Tanah	302.571.765.000	-	-	-	302.571.765.000	Land
Bangunan	75.242.283.308	550.615.721	-	72.398.690.000	148.191.589.029	Building
Kendaraan	2.243.917.273	-	-	-	2.243.917.273	Vehicle
Mebeulair	638.423.691	5.799.000	-	-	644.222.691	Furniture
Peralatan	2.029.474.957	41.083.005	-	-	2.070.557.962	Equipment
Jumlah	382.725.864.229	597.497.726	-	72.398.690.000	455.722.051.955	Total
Akumulasi penyusutan						Accumulated Depreciation
Bangunan	35.414.335.505	3.796.466.819	-	124.190.500	39.334.992.824	Building
Kendaraan	1.515.963.743	210.507.504	-	-	1.726.471.247	Vehicle
Mebeulair	630.690.259	5.930.054	-	-	636.620.313	Furniture
Peralatan	1.886.756.862	78.075.745	-	-	1.964.832.607	Equipment
Jumlah	39.447.746.369	4.090.980.122	-	124.190.500	43.662.916.991	Total
Pengukuran kembali aset tetap	-				-	Fixed Asset Remeasurement
Nilai Buku	343.278.117.860				412.059.134.964	Book Value

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH
PASAR PAKUAN JAYA KOTA BOGOR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025
Serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH
PASAR PAKUAN JAYA KOTA BOGOR
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
And For The Year Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

12 ASET TETAP (lanjutan)

Berdasarkan surat Wali Kota Bogor No. 640/459-BKAD tanggal 30 Januari 2023 tentang persetujuan penghapusan dan pembongkaran barang daerah yang dipisahkan berupa aset bangunan pasar baru bogor, plaza bogor, jambu dua dan pasar Merdeka.

Jumlah beban penyusutan yang terdapat dalam beban operasional pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp5.815.762.130 dan Rp4.090.980.122 (catatan no.25)

Perusahaan tidak mengasuransikan aset tetap terhadap risiko kebakaran, pencurian, penjarahan dan huru hara, bencana alam serta kecelakaan. Aset tetap Perusahaan tidak dijadikan jaminan atas pinjaman.

Berdasarkan penelaahan manajemen, nilai buku bersih aset tetap setelah dikurangi dengan penyisihan penurunan nilai mencerminkan nilai yang dapat diperoleh kembali.

Pada tahun 2025 manajemen telah melakukan penghapusan 3 bangunan pasar yaitu plaza bogor, pasar baru bogor dan pasar merdeka, kerugian atas penghapusan bangunan tersebut sebesar Rp84.598.643.578 dicatat sebagai beban lain-lain (Catatan no.27)

12 FIXED ASSETS (continued)

Based on the letter of the Mayor of Bogor No. 640/459-BKAD dated January 30, 2023 concerning the approval of the elimination and demolition of separated regional goods in the form of assets of the new Bogor market building, Bogor plaza, Jambu Dua and Merdeka market.

The total depreciation expense included in operating expenses on December 31, 2025 and December 31, 2024 was Rp5,815,762,130 and Rp4,090,980,122, respectively (note 25).

The Company does not insure its property and equipment against risks of fire, theft, looting and civil unrest, natural disasters, and accidents. The Company's property and equipment are not pledged as collateral for any loans.

Based on management's review, the net carrying amount of property and equipment, after deducting the allowance for impairment losses, reflects their recoverable amount.

In 2025, management derecognized three market buildings, namely Plaza Bogor, Pasar Baru Bogor, and Pasar Merdeka. The loss on derecognition of these buildings amounting to Rp84,598,643,578 was recognized as other expenses (Note 27).

13 ASET TAK BERWUJUD

Terdiri dari:

13 INTANGIBLE ASSETS

Consist of

31 Desember 2025/ December 31, 2025					
	1 Januari 2025/ January 1, 2025	Penambahan/ Addition	Pengurang/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassification	31 Desember 2025 December 31, 2025
Harga perolehan:					
Perolehan:					
Perangkat lunak	1.380.072.309	36.600.000	-	-	1.416.672.309
Jumlah	1.380.072.309	36.600.000	-	-	1.416.672.309
Akumulasi amortisasi					
Perangkat lunak	1.164.267.216	99.782.607	-	-	1.264.049.823
Jumlah	1.164.267.216	99.782.607	-	-	1.264.049.823
Nilai Buku	215.805.093				152.622.486
31 Desember 2024/ December 31, 2024					
	1 Januari 2024/ January 1, 2024	Penambahan/ Addition	Pengurang/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassification	31 Desember 2024 December 31, 2024
Harga perolehan:					
Perolehan:					
Perangkat lunak	1.290.072.309	90.000.000	-	-	1.380.072.309
Jumlah	1.290.072.309	90.000.000	-	-	1.380.072.309
Akumulasi amortisasi					
Perangkat lunak	1.061.071.330	103.195.886	-	-	1.164.267.216
Jumlah	1.061.071.330	103.195.886	-	-	1.164.267.216
Nilai Buku	229.000.979				215.805.093

Acquisition cost:
Software

Total

Accumulated Amortization
Software

Total

Book Value

Acquisition cost:
Software

Total

Accumulated Amortization
Software

Total

Book Value

PERUSAHAAN UMUM DAERAH
PASAR PAKUAN JAYA KOTA BOGOR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025
Serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUSAHAAN UMUM DAERAH
PASAR PAKUAN JAYA KOTA BOGOR
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
And For The Year Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

14 DEPOSITO YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA

Terdiri dari:

	31 Desember 2025/ December 31, 2025
Perumda Bank Kota Bogor	9.400.000.000
Jumlah	9.400.000.000

Deposito yang dibatasi penggunaannya merupakan penyertaan modal pemerintah yang hanya digunakan untuk revitalisasi atau pembangunan pasar.

14 RESTRICTED DEPOSIT

Consist of

	31 Desember 2024/ December 31, 2024	
	9.400.000.000	Perumda Bank Kota Bogor
Jumlah	9.400.000.000	Total

Restricted time deposits represent government capital contributions that are designated solely for market revitalization or construction.

15 ASET TERSEDIA UNTUK DIJUAL

Terdiri dari:

	31 Desember 2025/ December 31, 2025
Bangunan Plaza Bogor	-
Akumulasi penyusutan	-
Penurunan nilai	-
Reklasifikasi ke aset tetap	-
Jumlah	-

15 AVAILABLE FOR SALE

Consist of

	31 Desember 2024/ December 31, 2024	
	72.398.690.000	Plaza Bogor Building
	(124.190.500)	Accumulated depreciation
	(70.269.710.000)	Impairment
	(2.004.789.500)	Reclassification to fixed assets
Jumlah	-	Total

16 UTANG USAHA

Terdiri dari:

	31 Desember 2025/ December 31, 2025
Pihak ketiga:	
CV. Dharmawangsa	97.164.144
CV. Kinarya Teknik	45.000.001
CV. Marga Jaya	21.154.546
Intan Selaras Consultant	14.000.000
CV. Minora	12.600.000
lain-lain (dibawah 10 juta)	44.116.724
Jumlah	234.035.415

Pihak berelasi:
Dinas Lingkungan Hidup (catatan no.28)

Jumlah	298.922.915
---------------	--------------------

16 ACCOUNT PAYABLE

Consist of

	31 Desember 2024/ December 31, 2024
CV. Dharmawangsa	97.164.144
CV. Kinarya Teknik	45.000.001
CV. Marga Jaya	21.154.546
Intan Selaras Consultant	14.000.000
CV. Minora	12.600.000
lain-lain (dibawah 10 juta)	44.116.724
Jumlah	234.035.415

Third parties:
CV. Dharmawangsa
CV. Kinarya Teknik
CV. Marga Jaya
Intan Selaras Consultant
CV. Minora
Others (below 10 Million)

Related parties:
Environmental Service (note 28)

Total

17 UTANG LAINNYA

Terdiri dari:

	31 Desember 2025/ December 31, 2025
Pihak ketiga:	
Titipan	1.883.535.998
Jamsostek	-
Koperasi	-
Jumlah	1.883.535.998

Pihak berelasi:
Pemerintah kota Bogor (catatan no.28)

Jumlah	1.883.535.998
---------------	----------------------

17 OTHERS PAYABLE

Consist of

	31 Desember 2024/ December 31, 2024
Deposits	881.113.442
Social security	78.797.710
Koperasi	60.904.249
Jumlah	1.020.815.401

Third parties:
Deposits
Social security
Koperasi
Total

Related parties:
Bogor city goverment (note 28)

Total

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH
PASAR PAKUAN JAYA KOTA BOGOR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025
Serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH
PASAR PAKUAN JAYA KOTA BOGOR
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
And For The Year Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

18 BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR

Terdiri dari:

	31 Desember 2025/ December 31, 2025
Listrik	177.160.651
Air	133.038.700
Telepon	5.671.657
Lain-lain	750.000
Jumlah	316.621.008

18 ACCRUED EXPENSES

Consist of

	31 Desember 2024/ December 31, 2024	
	229.707.889	Electricity
	24.874.700	Water
	6.858.097	Telephone
	100.750.000	Others
Total	362.190.686	

19 PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA

Pendapatan diterima dimuka pada tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp572.404.945 dan Rp106.394.121

19 UNEARNED REVENUE

Unearned revenue in 2025 and 2024 amounted to Rp572.404.945 dan Rp106.394.121 respectively.

20 IMBALAN PASCA KERJA

Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia No.13/2003 tentang ketenagakerjaan, Perusahaan wajib memberikan imbalan pasca-kerja kepada karyawannya pada saat pemutusan hubungan kerja atau pada saat karyawan pensiun. Imbalan kerja ini diberikan berdasarkan masa kerja dan kompensasi karyawan pada saat pemutusan hubungan kerja atau pensiun.

Perhitungan atas utang imbalan pasca kerja per 31 Desember 2025 dan 2024 dilakukan oleh PT. Padma Radya Aktuaria sebagai aktuaris independen dengan asumsi utama sebagai berikut:

	31 Desember 2025/ December 31, 2025
Tingkat diskonto	5,50% dan 6,50%
Tingkat kenaikan gaji	5%
Tabel mortalitas	100% TMI3
Tingkat catat	5% TMI3
Tingkat pengunduran diri	3% per tahun sampai usia 35 tahun kemudian menurun secara linier sampai 0% di usia 56
Tingkat ekspektasi imbal hasil aset	N/A
Tkt. pengembalian pensiun normal	100%
Tingkat PHK Lainnya	Nil
Usia pensiun normal	57

Saldo Imbalan Pasca Kerja per 31 Desember 2025 dan 2024, terdiri dari:

Rekonsiliasi Saldo Awal dan Saldo Akhir dari Nilai Kini Kewajiban Imbalan Pasti (NKKIP)

20 EMPLOYEE BENEFIT

In accordance with the Law of the Republic of Indonesia No.13 / 2003 concerning employment, the Company is required to provide post-employment benefits to its employees at the time of termination of employment or when employees retire. Employee benefits are based on length of service and employee compensation at the time of termination of employment or retirement.

The calculation of employee benefits debts per December 31, 2025 and 2024 by PT Padma Radya Aktuaria as of the independent actuarial with principle assumption consists of:

	31 Desember 2024/ December 31, 2024	
	7%	Discount Rate
	5%	Yearly Salaries Escalation Rate
	100% TMI3	Mortality Table
	5% TMI3	Disabled Rate
	3% per tahun sampai usia 35 tahun kemudian menurun secara linier sampai 0% di usia 56	Resigned Rate
	N/A	Early retirement age
	100%	The proportion of taking a normal
	Nil	Others Level of Layoffs
	57	Normal Pension Years Old

The Balance of Employee Benefits as of December 31, 2025 and 2024 consist of:

Reconciliation of Initial Balance and Final Balance of the Present Value of a Defined Benefit Obligation (NKKIP)

PERUSAHAAN UMUM DAERAH
PASAR PAKUAN JAYA KOTA BOGOR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025
Serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUSAHAAN UMUM DAERAH
PASAR PAKUAN JAYA KOTA BOGOR
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
And For The Year Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

20 IMBALAN PASCA KERJA (lanjutan)

20 EMPLOYEE BENEFIT (continued)

	31 Desember 2025/ December 31, 2025	31 Desember 2024/ December 31, 2024	
Nilai Kini Kewajiban Imbalan			The Present Value of the Post-
Pasti awal periode	9.669.996.185	9.498.618.851	Employment Benefit
Biaya Jasa Kini	1.418.434.583	1.375.440.095	Current service cost
Biaya Bunga	524.894.283	442.275.322	Interest cost
Biaya Jasa Lalu	-	358.811.907	Past service costs
Pembayaran Manfaat	(2.396.780.362)	(1.531.985.987)	Payment of benefits
Keuntungan(Rugi) Aktuarial	260.057.349	(473.164.003)	Profit (Loss) Actuarial
Nilai Kini Kewajiban Imbalan			Present Value of Defined Benefit
Pasti Akhir Periode	9.476.602.038	9.669.996.185	Obligation at Period End

Rekonsiliasi Beban yang diakui di Laporan Laba/Rugi

Reconciliation of expenses recognized in the Profit/Loss Statement.

Beban bersih yang diakui di Laporan Laba/Rugi

Recognized net expense in the profit(loss)

	31 Desember 2025/ December 31, 2025	31 Desember 2024/ December 31, 2024	
Biaya Jasa Kini	1.418.434.583	1.375.440.095	Current service cost
Biaya Bunga	524.894.283	442.275.322	Interest cost
Biaya Jasa Lalu	-	358.811.907	Past service costs
Keuntungan(Rugi) Aktuarial	260.057.349	(473.164.003)	Profit (Loss) Actuarial
Jumlah Beban Imbalan Pasca Kerja	2.203.386.215	1.703.363.321	Total Post-Employee Benefits

21 MODAL

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor No.18 tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Pakuan Jaya Kota Bogor. Modal perusahaan terdiri atas:

21 CAPITAL

Based on the Bogor City Regulation No.18 of 2019 concerning the inclusion of Regional Capital To the Bogor City Pakuan Jaya Regional Corporation. The company's capital consists of:

	31 Desember 2025/ December 31, 2025	31 Desember 2024/ December 31, 2024	
Aset (catatan 1d)	458.111.384.240	458.111.384.240	Assets (note 1d)
Uang	45.000.000.000	45.000.000.000	Money
Jumlah	503.111.384.240	503.111.384.240	Total

22 CADANGAN UMUM

Cadangan umum per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 merupakan penggunaan laba tahun sebelumnya sesuai dengan Peraturan Daerah No.4 tahun 2009 pasal 43 yaitu sebesar masing-masing 10%. Untuk cadangan umum 2025 mengacu pada laporan reviu inspektorat (catatan no. 29b).

22 GENERAL RESERVES

General reserves as of December 31, 2025 and December 31, 2024 are the use of previous year's profits in accordance with Regional Regulation No. 4 of 2009, Article 43, which is 10% each. For general reserves 2025 refer to the inspectorate review report (note 29b).

	31 Desember 2025/ December 31, 2025	31 Desember 2024/ December 31, 2024	
Cadangan umum	3.226.069.774	-	General reserves
Jumlah	3.226.069.774	-	Total

Pada tahun 2025 perusahaan telah menggunakan dana cadangan umum untuk membayar denda pajak sebesar Rp1.055.641.273

In 2025, the company used general reserve funds to pay tax penalties amounting to Rp1,055,641,273.

PERUSAHAAN UMUM DAERAH
PASAR PAKUAN JAYA KOTA BOGOR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025

Serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUSAHAAN UMUM DAERAH
PASAR PAKUAN JAYA KOTA BOGOR
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025

And For The Year Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

23 PENGUKURAN KEMBALI ASET TETAP

Saldo pengukuran kembali aset tetap menurut PUPR (640/2545-PUPR-PRB) pada tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0

Berdasarkan rekomendasi laporan hasil pemeriksaan BPK pengukuran kembali aset tetap dikoreksi kembali menjadi aset tetap sesuai dengan nilai yang diserahkan pemerintah kota bogor (catatan no. 29a)

23 FIXED ASSET REMEASUREMENTS

The balance fixed asset remeasurements according to PUPR (640/2545-PUPR-PRB) in 2025 and 2024 is Rp 0 dan Rp0

Based on the recommendations of the BPK audit report, the re-measurement of fixed assets was corrected back to fixed assets in accordance with the value submitted by the Bogor City Government (note 29a).

24 PENDAPATAN

Terdiri dari:

	31 Desember 2025/ December 31, 2025
Kontribusi pihak ketiga	6.689.710.811
Pengelolaan pasar	5.765.456.745
Parkir	5.308.314.149
Unit bisnis	2.047.858.946
Listrik	1.237.673.501
Perijinan	626.263.848
Pengelolaan MCK	590.254.732
Sewa	493.560.847
Sewa ruang	255.688.314
Pengelolaan air	65.255.000
Kebersihan dan ketertiban	46.717.469
Bongkar muat	4.080.000
Jumlah	23.130.834.362

24 REVENUE

Consist of:

	31 Desember 2024/ December 31, 2024	
15.895.999.187		Third party contribution
7.497.916.644		Market management
5.666.532.362		Parking
258.271.580		Business unit
1.180.076.442		Electricity
1.264.002.382		Licensing
626.563.649		MCK management
1.218.946.944		Rent
237.433.027		Room rent
2.700.000		Water management
50.261.413		Cleanliness
203.954.864		Unloading & Loading
34.102.658.494		Total

25 BEBAN OPERASIONAL

Terdiri dari:

	31 Desember 2025/ December 31, 2025
Beban pegawai	15.020.924.858
Beban penyusutan (catatan no.12)	5.915.544.738
Beban umum	4.930.090.702
Beban kantor	2.294.340.313
Beban bangunan dan prasarana	1.933.541.714
Beban pajak	1.120.256.225
Beban kebersihan	922.999.758
Beban representasi	921.280.000
Beban tenaga ahli	619.949.865
Beban sosialisasi	398.488.869
Beban promosi	344.903.293
Beban kendaraan	204.201.022
Beban pelatihan	168.750.000
Beban sewa	75.000.000
Beban kesejahteraan pegawai	52.883.702
Beban Inventaris kantor	25.451.747
Beban perjalanan dinas	15.631.341
Jumlah	34.964.238.147

25 OPERATING EXPENSES

Consist of:

	31 Desember 2024/ December 31, 2024	
15.191.004.910		Employee expense
4.194.176.007		Depreciation expense (note 12)
3.899.420.132		General expense
1.878.700.580		Office expense
1.741.404.193		Building and infrastructure expense
608.056.382		Tax expense
617.523.515		Cleanig expense
1.130.462.250		Representation expense
993.014.117		Professional fee
482.808.243		Socialization expense
370.541.754		Promotion expense
330.895.692		Vehicle expense
421.149.000		Training expense
75.000.000		Rent expese
180.647.500		Employee welfare expense
63.424.296		Equipment office expense
193.517.878		Official travel expense
32.371.746.448		Total

26 PENDAPATAN LAIN-LAIN

Terdiri dari:

	31 Desember 2025/ December 31, 2025
Bunga	465.591.810
Lain-lain	1.035.967.343
Jumlah	1.501.559.153

26 OTHERS INCOME

Consist of:

	31 Desember 2024/ December 31, 2024	
500.444.965		Interest
1.087.810.346		Others
1.588.255.311		Total

PERUSAHAAN UMUM DAERAH
PASAR PAKUAN JAYA KOTA BOGOR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025
Serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUSAHAAN UMUM DAERAH
PASAR PAKUAN JAYA KOTA BOGOR
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
And For The Year Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

27 BEBAN LAIN-LAIN

Terdiri dari:

	31 Desember 2025/ December 31, 2025
Rugi pelepasan aset tetap	84.598.643.578
Administrasi bank	11.991.166
Lain-lain	3.054.941.609
Jumlah	87.665.576.353

27 OTHERS EXPENSES

Consist of:

	31 Desember 2024/ December 31, 2024	
-	-	Loss on disposal of fixed assets
17.981.309	17.981.309	Bank administration
118.110.044	118.110.044	Others
136.091.353	136.091.353	Total

28 SIFAT, SALDO, DAN TRANSAKSI HUBUNGAN BERELASI

Dalam kegiatan usaha normal, Perusahaan melakukan transaksi usaha dan keuangan dengan pihak - pihak berelasi, berdasarkan persyaratan yang disetujui kedua belah pihak

Rincian sifat hubungan dan jenis transaksi yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

28 NATURE, BALANCES, AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

In the normal course of business, the Company entered into business and financial transactions with related parties, which are conducted based on the agreed terms and conditions by both parties.

The nature of the relationship with the related parties are as follows:

Pihak-pihak berelasi/ Related parties	Sifat dan hubungan/ Nature and relationship	Sifat transaksi/ Nature of transaction
Pemerintah Kota Bogor	Pemilik/Owner	Setoran modal, utang lain-lain pihak berelasi/ Paid in capital
Dinas Lingkungan Hidup	Entitas Sepengendali/ User Common Control	Utang usaha / Account Payable

Saldo dan transaksi dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

Balances and transactions with related parties are as follows:

a. Utang Usaha

a. Account Payable

	31 Desember 2025/ December 31, 2025	31 Desember 2024/ December 31, 2024	
Dinas Lingkungan Hidup	64.887.500	-	Environmental services
Jumlah	64.887.500	-	Total
Persentase	0,43%	-	Percentage

*) Persentase terhadap total utang/Percentage to total payable

b. Utang lain-lain pihak berelasi

b. Other payable related parties

	31 Desember 2025/ December 31, 2025	31 Desember 2024/ December 31, 2024	
Pemerintah Kota Bogor	-	250.000.000	Bogor City Government
Jumlah	-	250.000.000	Total
Persentase	-	1,77%	Percentage

*) Persentase terhadap total utang/Percentage to total payable

PERUSAHAAN UMUM DAERAH
PASAR PAKUAN JAYA KOTA BOGOR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025
Serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUSAHAAN UMUM DAERAH
PASAR PAKUAN JAYA KOTA BOGOR
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
And For The Year Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

29 INFORMASI LAINNYA

a Laporan Hasil Reviu Badan Pemeriksaan keuangan Republik Indonesia

Berdasarkan surat Walikota Bogor nomor 700.1.2.1/2774-Itda tanggal 19 Juni 2025 menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Barat nomor 20.B/LHP/XVIII.BDG/05/2025 tanggal 22 Mei 2025 atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor tahun anggaran 2024, dengan temuan bahwa pembagian laba pada Perumda Pasar Pakuan Jaya (PPJ) tidak sesuai ketentuan dan penyajian modal disetor pemerintah daerah berupa bangunan plaza bogor sebesar Rp 2.004.789.500 tidak wajar. Pemerintah Kota Bogor menginstruksikan Perusahaan Umum Daerah Pasar Pakuan Jaya untuk melaporkan penurunan nilai asset bangunan plaza bogor berdasarkan kondisi fisik bangunan.

BPK merekomendasikan Wali Kota Bogor menginstruksikan :

1. Kepala satuan polisi pamong praja sebagai dewan pengawas dari unsur pemerintah Kota Bogor, kepala BKAD dan kepala bagian perekonomian sekretariat daerah berkoordinasi dengan direktur Perumda PPJ menyelesaikan penyajian penurunan nilai investasi pemerintah kota bogor pada perumda PPJ dan Keputusan pembagian dividen sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
2. Direktur perumda PPJ melaporkan penurunan nilai asset bangunan plaza bogor berdasarkan kondisi fisik bangunan.

b Laporan Hasil Reviu Pemerintah Daerah Kota Bogor Inspektorat Daerah

Berdasarkan surat Pemerintah Kota Bogor Inspektorat Daerah nomor 700/197/XI-LHR/2025/Itda tanggal 12 November 2025 Pemerintah Kota Bogor telah menerbitkan laporan hasil reviu pembentukan dan penggunaan dana cadangan atas perolehan laba tahun 2024 pada Perusahaan Umum Daerah Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor.

Inspektorat merekomendasikan kepada direktur utama perumda PPJ Kota Bogor agar :

1. Perumda PPJ Kota Bogor Menyusun aturan lebih lanjut terkait pengelolaan dan penggunaan dana Cadangan
2. Dana Cadangan dibuat rekening tersendiri
3. Seluruh dana Cadangan yang masih dalam bentuk piutang agar terus dilakukan penagihan
4. Melakukan jurnal koreksi atas penghapusan dana Cadangan sebesar Rp 1.751.110.933 yang telah dilakukan pada bulan Juli 2025. Selanjutnya jurnal penyesuaian atas perolehan dana Cadangan sebagai pengurang akumulasi saldo laba/rugi dilakukan secara bertahap, sebagai berikut :
 - a. Jurnal penyesuaian terlebih dahulu dilakukan untuk dana Cadangan yang berbentuk kas sebesar Rp 908.548.727 dan selanjutnya untuk dana Cadangan dalam bentuk piutang sebesar Rp 842.562.206 jurnal penyesuaian dilakukan setelah piutang tersebut tertagih baik Sebagian atau seluruhnya.

29 ANOTHER INFORMATION

a Review Report of the Audit Board of the Republic of Indonesia

Based on the letter from the Mayor of Bogor No. 700.1.2.1/2774-Itda dated 19 June 2025, following up on the Audit Report of the Supreme Audit Agency of the Republic of Indonesia, West Java Provincial Representative Office No. 20.B/LHP/XVIII.BDG/05/2025 dated 22 May 2025 on the Financial Statements of the Bogor City Government for Fiscal Year 2024, it was found that the profit distribution at Perumda Pasar Pakuan Jaya (PPJ) was not in accordance with the applicable regulations and that the presentation of the regional government's paid-in capital in the form of the Plaza Bogor building amounting to Rp 2,004,789,500 was not fairly stated. Therefore, the Bogor City Government instructed the Regional Public Company Pasar Pakuan Jaya to report the impairment of the Plaza Bogor building asset based on the physical condition of the building.

The Audit Board recommends that the Mayor of Bogor instruct:

1. The Head of the Civil Service Police Unit, serving as a member of the supervisory board from the Bogor City Government, along with the Head of BKAD and the Head of the Economic Affairs Division of the Regional Secretariat, to coordinate with the Director of Perumda PPJ to finalize the presentation of the impairment of the Bogor City Government's investment in Perumda PPJ and the determination of dividend distribution in accordance with applicable regulations; and
2. The Director of Perumda PPJ to report the impairment of the Plaza Bogor building assets based on the physical condition of the building.

b Review Report of the Bogor City Government Regional Inspectorate

Based on the letter from the Regional Inspectorate of the Bogor City Government No. 700/197/XI-LHR/2025/Itda dated 12 November 2025, the Bogor City Government has issued a review report on the establishment and utilization of reserve funds derived from the profit earned in 2024 at the Regional Public Company Pasar Pakuan Jaya, Bogor City.

The Inspectorate recommends that the President Director of Perumda PPJ Kota Bogor:

1. Establish further regulations regarding the management and utilization of reserve funds;
2. Maintain the reserve funds in a separate bank account;
3. Continue collection efforts for all reserve funds that are still in the form of receivables;
4. Record correcting journal entries for the write-off of reserve funds amounting to IDR 1,751,110,933 made in July 2025. Furthermore, adjusting journal entries for the recognition of reserve funds as a reduction to accumulated profit/loss balance should be carried out gradually, as follows:
 - a. Adjusting journal entries should first be made for reserve funds in the form of cash amounting to IDR 908,548,727, followed by reserve funds in the form of receivables amounting to IDR 842,562,206, with adjustments recorded after the receivables are collected, either partially or in full;

PERUSAHAAN UMUM DAERAH
PASAR PAKUAN JAYA KOTA BOGOR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025
Serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUSAHAAN UMUM DAERAH
PASAR PAKUAN JAYA KOTA BOGOR
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
And For The Year Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

29 INFORMASI LAINNYA (Lanjutan)

b Laporan Hasil Reviu Pemerintah Daerah Kota Bogor
Inspektorat Daerah (Lanjutan)

- b. Setelah dilakukan jurnal penyesuaian untuk dana Cadangan dalam bentuk kas maka dana kas tersebut harus disusun rencana penggunaannya dan dituangkan dalam rencana kerja dan anggaran Perusahaan. Demikian juga untuk dana Cadangan dalam bentuk piutang, setelah tertagih dan dilakukan jurnal penyesuaian, maka dana kas tersebut harus disusun rencana penggunaannya dan dituangkan dalam rencana kerja dan anggaran Perusahaan.
- c. Untuk proses penyesuaian dana Cadangan seperti tersebut diatas, agar dilakukan pengungkapan didalam catatan atas laporan keuangan (CALK)
5. Proses jurnal enyesuaian dana Cadangan seperti pada point 4 tersebut diatas, berlaku juga untuk dana Cadangan atas perolehan laba tahun 2024
6. Melakukan evaluasi atas jumlah rekening bank yang digunakan
7. Membuat register penutupan kas untuk seluruh kas yang ada di pasar unit pada setiap akhir bulan
8. Lebih cermat dalam melakukan pencatatan atas saldo kas dan bank sesuai dengan bukti pendukungnya

Memastikan saldo akumulasi rugi yang tercatat pada laporan neraca sesuai dengan yang tercatat pada laporan ekuitas.

30 MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Tingkat probabilitas risiko yang sangat potensial terjadi dari instrumen keuangan Perusahaan adalah risiko pasar (yaitu risiko mata uang asing dan tingkat suku bunga), risiko kredit dan risiko likuiditas. Kebijakan akan pentingnya mengelola tingkat risiko ini telah meningkat secara signifikan dengan mempertimbangkan beberapa parameter perubahan dan volatilitas pasar keuangan baik di Indonesia maupun internasional. Direksi Perusahaan menelaah dan menyetujui kebijakan risiko yang mencakup toleransi risiko dalam strategi mengelola risiko-risiko yang dirangkum di bawah ini.

Risiko Pasar

Risiko Suku Bunga

Risiko suku bunga adalah risiko dalam hal nilai wajar atau arus kas kontraktual masa datang dari suatu instrumen keuangan akan terpengaruh akibat perubahan suku bunga pasar. Eksposur Perusahaan yang terpengaruh risiko suku bunga terutama terkait dengan bank dan deposito.

Perusahaan memonitor secara ketat fluktuasi suku bunga pasar dan ekspektasi pasar sehingga dapat mengambil langkah-langkah yang paling menguntungkan Perusahaan secara tepat waktu. Manajemen tidak menganggap perlunya melakukan swap suku bunga saat ini.

Tabel berikut adalah nilai tercatat, berdasarkan jatuh temponya, atas aset dan liabilitas keuangan Perusahaan yang terkait risiko suku bunga

29 ANOTHER INFORMATION (Continued)

b Review Report of the Bogor City Government
Regional Inspectorate (Continued)

- b. After the adjustment for reserve funds in the form of cash is recorded, a utilization plan for such funds must be prepared and included in the Company's work plan and budget. Similarly, for reserve funds in the form of receivables, once collected and adjusted, the resulting cash must be planned for use and included in the Company's work plan and budget;
- c. The process of adjusting reserve funds as described above must be disclosed in the Notes to the Financial Statements (CALK);
5. The adjustment process for reserve funds as stated in point 4 also applies to reserve funds derived from the 2024 profit;
6. Evaluate the number of bank accounts used;
7. Prepare a cash closing register for all cash held at market units at the end of each month;
8. Exercise greater accuracy in recording cash and bank balances in accordance with supporting documents;

Ensure that the accumulated loss balance reported in the statement of financial position is consistent with that reported in the statement of equity.

30 FINANCIAL RISK MANAGEMENT

The highly probable risks associated with the Company's financial instruments include market risk (i.e., foreign currency and interest rate risk), credit risk, and liquidity risk. The importance of managing these risks has been significantly enhanced by considering several parameters of financial market changes and volatility, both in Indonesia and internationally. The Company's Board of Directors reviews and approves a risk policy that incorporates risk tolerance into its risk management strategy, summarized below.

Market Risk

Interest Rate Risk

Interest rate risk is the risk that the fair value or future contractual cash flows of a financial instrument will be affected by changes in market interest rates. The Company's exposures to interest rate risk primarily relate to banks and deposits.

The Company closely monitors market interest rate fluctuations and market expectations to ensure timely and optimal action. Management does not consider an interest rate swap necessary at this time.

The following table sets out the carrying amounts, by maturity, of the Company's financial assets and liabilities related to interest rate risk.

PERUSAHAAN UMUM DAERAH
PASAR PAKUAN JAYA KOTA BOGOR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025
Serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUSAHAAN UMUM DAERAH
PASAR PAKUAN JAYA KOTA BOGOR
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
And For The Year Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

30 MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)
Risiko Pasar (lanjutan)

Risiko Suku Bunga (lanjutan)

30 FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)
Market Risk (continued)

Interest Rate Risk (continued)

31 Desember 2025					
Rata - rata Suku Bunga Efektif/ Average Effective Interest Rate	Jatuh Tempo dalam Satu (1) Tahun/ Due in One (1) Year	Jatuh Tempo dalam Dua (2) Tahun/ Due in One (2) Year	Jatuh Tempo Pada Tahun ke – 3/ Due in One (3) Year	Total	
Aset					Assets
Kas di bank	0,25%	3.024.920.449		3.024.920.449	Cash in bank
Deposito	6,25%	12.400.000.000		12.400.000.000	Deposit

31 Desember 2024					
Rata - rata Suku Bunga Efektif/ Average Effective Interest Rate	Jatuh Tempo dalam Satu (1) Tahun/ Due in One (1) Year	Jatuh Tempo dalam Dua (2) Tahun/ Due in One (2) Year	Jatuh Tempo Pada Tahun ke – 3/ Due in One (3) Year	Total	
Aset					Assets
Kas di bank	0,25%	2.601.841.874		2.601.841.874	Cash in bank
Deposito	6,25%	9.400.000.000		9.400.000.000	Deposit

Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko dalam hal pihak ketiga tidak akan memenuhi liabilitasnya berdasarkan instrumen keuangan atau kontrak pelanggan, yang menyebabkan kerugian keuangan. Perusahaan dihadapkan pada risiko kredit dari kegiatan operasi dan dari aktivitas pendanaan, termasuk bank, dan instrumen keuangan lainnya. Risiko kredit terutama berasal dari bank deposito.

Risiko kredit juga timbul dari kas di bank. Untuk memitigasi risiko kredit, Perusahaan menempatkan kas di bank pada institusi keuangan yang terpercaya.

Tabel berikut ini memberikan informasi mengenai maksimum kredit yang dihadapi oleh Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024.

	31 Desember 2025/ December 31, 2025	31 Desember 2024/ December 31, 2024	
Kas di bank	3.024.920.449	2.601.841.874	Cash in bank
Deposito	12.400.000.000	9.400.000.000	Deposit
Piutang usaha	4.373.022.395	7.827.964.005	Account receivable
Jumlah	19.797.942.844	19.829.805.879	Total

Tabel berikut memberikan kualitas kredit dan analisis umur aset keuangan Perusahaan sesuai dengan peringkat kredit debitur Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024.

Credit Risk

Credit risk is the risk that a third party will not fulfill its obligations under a financial instrument or customer contract, resulting in a financial loss. Companies are exposed to credit risk from operating and financing activities, including banking and other financial instruments. Credit risk primarily arises from bank deposits.

Credit risk also arises from cash in banks. To mitigate credit risk, the Company places cash in banks with reputable financial institutions.

The following table provides information regarding the maximum credit faced by the Company as of December 31, 2025 and December 31, 2024.

The following table provides the credit quality and aging analysis of the Company's financial assets according to the credit ratings of the Company's debtors as of December 31, 2025 and December 31, 2024.

PERUSAHAAN UMUM DAERAH
PASAR PAKUAN JAYA KOTA BOGOR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025
Serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUSAHAAN UMUM DAERAH
PASAR PAKUAN JAYA KOTA BOGOR
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
And For The Year Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

30 MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)
Risiko Kredit (lanjutan)

30 FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)
Credit Risk (continued)

31 Desember 2025						
Telah Jatuh Tempo Tetapi Belum Diturunkan Nilainya						
	Belum Jatuh Tempo Dan Tidak Ada Penurunan Nilainya	1Tahun	Lebih dari 2 tahun	Telah jatuh tempo dan mengalami penurunan nilai	Total	
Aset						Assets
Kas di bank	3.024.920.449	-	-	-	3.024.920.449	Cash in bank
Deposito	12.400.000.000	-	-	-	12.400.000.000	Deposit Account receivable
Piutang usaha	-	1.745.400.000	5.682.564.005	-	7.427.964.005	
Jumlah	15.424.920.449	1.745.400.000	5.682.564.005	-	19.429.805.879	Total
31 Desember 2024						
Telah Jatuh Tempo Tetapi Belum Diturunkan Nilainya						
	Belum Jatuh Tempo Dan Tidak Ada Penurunan Nilainya/	1Tahun	Lebih dari 2 tahun	Telah jatuh tempo dan mengalami penurunan nilai	Total	
Aset						Assets
Kas di bank	2.601.841.874	-	-	-	2.601.841.874	Cash in bank
Deposito	9.400.000.000	-	-	-	9.400.000.000	Deposit Account receivable
Piutang usaha	-	1.642.496.266	5.402.275.853	-	7.044.772.119	
Jumlah	12.001.841.874	1.642.496.266	5.402.275.853	-	22.469.692.568	Total

Risiko likuiditas

Risiko likuiditas merupakan risiko dalam hal Perusahaan tidak bisa memenuhi liabilitas pada saat jatuh tempo. Manajemen melakukan evaluasi dan pengawasan yang ketat atas arus kas masuk (*cash-in*) dan kas keluar (*cash-out*) untuk memastikan tersedianya dana untuk memenuhi kebutuhan pembayaran liabilitas yang jatuh tempo

Tabel di bawah merupakan profil jatuh tempo liabilitas keuangan Perusahaan berdasarkan pembayaran kontraktual yang tidak terdiskonto pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024:

Liquidity risk

Liquidity risk is the risk that a company will be unable to meet its obligations when they fall due. Management closely evaluates and monitors cash inflows and outflows to ensure the availability of funds to meet the payment requirements for maturing liabilities.

The table below represents the maturity profile of the Company's financial liabilities based on undiscounted contractual payments as of December 31, 2025 and December 31, 2024:

31 Desember 2025/ 31 December 2025						
	<=1 tahun/ 1 Year	2-5 tahun/ 2-5 Year	>5 tahun/ >5 Year	Jumlah/ Total	Nilai wajar/ Fair value	
Liabilitas						
Utang usaha	64.887.500	-	234.035.415	298.922.915	298.922.915	
Biaya yang masih harus dibayar	316.621.008	-	-	316.621.008	316.621.008	Liabilities
Utang jangka pendek lainnya	1.883.535.998	-	-	1.883.535.998	1.883.535.998	Accounts payable
Jumlah	2.265.044.506	-	234.035.415	2.499.079.921	2.499.079.921	Accrued expenses
						Other short-term liabilities
						Total

PERUSAHAAN UMUM DAERAH
PASAR PAKUAN JAYA KOTA BOGOR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025
Serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUSAHAAN UMUM DAERAH
PASAR PAKUAN JAYA KOTA BOGOR
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
And For The Year Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

30 MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)
Risiko likuiditas (lanjutan)

30 FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)
Liquidity risk (continued)

31 Desember 2024/ 31 December 2024						
	<=1 tahun/ 1 Year	2-5 tahun/ 2- 5 Year	>5 tahun/ >5 Year	Jumlah/ Total	Nilai wajar/ Fair value	
Liabilitas						Liabilities
Utang usaha	-	-	234.035.415	234.035.415	234.035.415	Accounts payable
Biaya yang masih harus dibayar	362.190.686	-	-	362.190.686	362.190.686	Accrued expenses
Utang jangka pendek lainnya	1.270.815.401	-	-	1.270.815.401	1.270.815.401	Other short-term liabilities
Jumlah	1.633.006.087	-	234.035.415	1.867.041.502	1.867.041.502	Total

31 MANAJEMEN MODAL

31 CAPITAL MANAGEMENT

Tujuan utama dari pengelolaan modal Perusahaan adalah untuk memastikan bahwa pemeliharaan peringkat kredit yang tinggi dan rasio modal yang sehat dalam rangka mendukung bisnis dan memaksimalkan nilai pemegang saham. Perusahaan tidak diwajibkan untuk memenuhi syarat-syarat modal tertentu.

The primary objective of the Company's capital management is to ensure the maintenance of a high credit rating and healthy capital ratios in order to support the business and maximize shareholder value. The Company is not required to meet any specific capital requirements.

Manajemen Perusahaan mengelola struktur permodalan dan melakukan penyesuaian, berdasarkan perubahan kondisi ekonomi. Untuk memelihara dan menyesuaikan struktur permodalan, Perusahaan dapat memilih menyesuaikan pembayaran dividen kepada pemegang saham atau menerbitkan saham baru. Tidak ada perubahan yang dibuat dalam tujuan, kebijakan, atau proses selama periode yang disajikan

The Company's management manages its capital structure and makes adjustments based on changing economic conditions. To maintain and adjust its capital structure, the Company may choose to adjust dividend payments to shareholders or issue new shares. No changes were made in objectives, policies, or processes during the periods presented.

Kebijakan Perusahaan adalah untuk menjaga rasio modal yang sehat dalam rangka untuk mengamankan pembiayaan pada biaya yang wajar

The Company's policy is to maintain healthy capital ratios in order to secure financing at a reasonable cost.

Sebagaimana praktik yang berlaku umum, Perusahaan mengevaluasi struktur permodalan melalui rasio pinjaman terhadap modal (*gearing ratio*) yang dihitung melalui pembagian antara pinjaman bersih dengan modal. Pinjaman bersih adalah jumlah liabilitas sebagaimana disajikan di dalam laporan posisi keuangan dikurangi dengan jumlah kas dan setara kas, investasi lainnya dan deposito yang dibatasi penggunaannya. Sedangkan modal meliputi seluruh komponen ekuitas dalam laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024, perhitungan rasio adalah sebagai berikut:

As is generally accepted practice, the Company evaluates its capital structure through the gearing ratio, which is calculated by dividing net debt by equity. Net debt is the total liabilities as presented in the statement of financial position minus cash and cash equivalents, other investments, and restricted deposits. Capital includes all equity components in the statement of financial position as of December 31, 2025, and December 31, 2024. The ratio is calculated as follows:

	31 Desember 2025/ December 31, 2025	31 Desember 2024/ December 31, 2024	
Total liabilitas berbunga	-	-	Total interest-bearing liabilities
Dikurangi bank dan deposito	15.515.565.543	12.236.268.840	Minus bank and time deposits
Liabilitas neto	15.515.565.543	12.236.268.840	Net liabilities
Jumlah ekuitas	320.984.856.310	420.399.398.394	Total equity
Rasio liabilitas neto terhadap modal	0,05	0,03	Net liabilities to equity ratio

PERUSAHAAN UMUM DAERAH
PASAR PAKUAN JAYA KOTA BOGOR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025
Serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUSAHAAN UMUM DAERAH
PASAR PAKUAN JAYA KOTA BOGOR
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
And For The Year Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

32 INSTRUMEN KEUANGAN

Tabel di bawah ini adalah perbandingan nilai tercatat dan nilai wajar instrumen keuangan Perusahaan yang dicatat di laporan keuangan :

32 FINANCIAL INSTRUMENTS

The table below compares the carrying value and fair value of the Company's financial instruments recorded in the financial statements:

	31 Desember 2025/31 December 2025 Nilai tercatat/ Carrying value	Nilai wajar/ fair value	
Aset Keuangan			Financial Assets
Kas di bank	3.024.920.449	3.024.920.449	Cash in Bank
Deposito	12.400.000.000	12.400.000.000	Deposits
Piutang usaha	4.373.022.395	7.044.772.119	Accounts Receivable
Jumlah Aset Keuangan	19.797.942.844	22.469.692.568	Total Financial Assets
Liabilitas Keuangan			Financial Liabilities
Utang usaha	298.922.915	298.922.915	Accounts Payable
Biaya yang masih harus dibayar	316.621.008	316.621.008	Accrued Expenses
Utang jangka pendek lainnya	1.883.535.998	1.883.535.998	Other Short-Term Debts
Jumlah Liabilitas Keuangan	2.499.079.921	2.499.079.921	Total Financial Liabilities
	31 Desember 2024/31 December 2024 Nilai tercatat/ Carrying value	Nilai wajar/ fair value	
Aset Keuangan			Financial Assets
Kas di bank	2.601.841.874	2.601.841.874	Cash in Bank
Deposito	9.400.000.000	9.400.000.000	Deposits
Piutang usaha	7.827.964.005	7.827.964.005	Accounts Receivable
Jumlah Aset Keuangan	19.829.805.879	19.829.805.879	Total Financial Assets
Liabilitas Keuangan			Financial Liabilities
Utang usaha	234.035.415	234.035.415	Accounts Payable
Biaya yang masih harus dibayar	362.190.686	362.190.686	Accrued Expenses
Utang jangka pendek lainnya	1.270.815.401	1.270.815.401	Other Short-Term Debts
Jumlah Liabilitas Keuangan	1.867.041.502	1.867.041.502	Total Financial Liabilities

Berikut metode dan asumsi yang digunakan untuk mengestimasi nilai wajar:

1. Kas di bank dan deposito mendekati nilai tercatatnya karena bersifat jangka pendek yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan.
2. Nilai wajar utang pihak dicatat sebesar biaya historis karena nilai wajarnya tidak dapat diukur secara handal. Tidak praktis untuk mengestimasi nilai wajar aset dan liabilitas tersebut karena tidak ada jangka waktu penerimaan/pembayaran yang pasti walaupun tidak diharapkan untuk diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah tanggal laporan posisi keuangan.

The following methods and assumptions are used to estimate fair value:

1. Cash in banks and deposits are close to their recorded value because they are short-term in nature and will mature within 12 months.
2. The fair value of the party's debt is recorded at historical cost because its fair value cannot be measured reliably. It is not practical to estimate the fair value of these assets and liabilities because there is no definite period of receipt/payment even though it is not expected to be settled within 12 months after the statement of financial position date.

33 PERJANJIAN SIGNIFIKAN

Cv Purnabri

Pada tanggal 25 Agustus 2023 Perusahaan Umum Daerah Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor melakukan perjanjian Kerjasama dengan Cv Purnabri tentang revitalisasi pasar sukasari dengan nomor perjanjian 645.1/PKS.178-PPJ/2023 dengan jangka waktu 5 tahun.

33 SIGNIFICANT AGREEMENT

Cv Purnabri

On August 25, 2023, the Regional Public Company of Pakuan Jaya Market, Bogor City, entered into a cooperation agreement with CV Purnabri regarding the revitalization of Sukasari Market with agreement number 645.1/PKS.178-PPJ/2023 with a term of 5 years.

PERUSAHAAN UMUM DAERAH
PASAR PAKUAN JAYA KOTA BOGOR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025

Serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

33 PERJANJIAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

PT Bogor Artha Makmur dan PT Pelita Sinarindo Ekatama Kso

Pada tanggal 12 Juni 2023 Perusahaan Umum Daerah Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor melakukan perjanjian Kerjasama dengan PT Bogor Artha Makmur dan PT Pelita Sinarindo Ekatama Kso tentang revitalisasi pasar Jambu dua dengan nomor perjanjian 645.1/PKS.103-PPJ/2023 dengan jangka waktu 5 tahun.

PT Fortunindo Artha Perkasa

Pada tanggal 19 Desember 2018 Perusahaan Umum Daerah Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor melakukan perjanjian Kerjasama dengan PT Fortunindo Artha Perkasa tentang revitalisasi Blok G Pasar Kebon Kembang dengan nomor perjanjian 645.1/PKS.127-PDPPJ/2018 dengan jangka waktu 1 tahun.

PT Mulyagiri Kerjasama Operasional dan PT Maya Saribakti Utama

Pada tanggal 11 Oktober 2017 Perusahaan Umum Daerah Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor melakukan perjanjian Kerjasama dengan PT Mulyagiri Kerjasama Operasional dan PT Maya Saribakti Utama tentang revitalisasi Blok F Pasar Kebon Kembang sesuai dengan akta notaris Agus Surachman SH nomor 02,- jangka waktu perjanjian selama 5 tahun. Perjanjian tersebut telah di addendum dengan nomor 645.1/ADD.125-PPJ/2020 tanggal 01 Desember 2020 dengan jangka waktu 6 tahun.

34 KELANGSUNGAN USAHA

Perusahaan pada tahun 2025 telah mengalami kerugian sebesar Rp 99.414.542.084 sehingga mengakibatkan saldo akumulasi rugi sampai tahun 2025 sebesar Rp 185.352.597.704. Kerugian tahun 2025 dipengaruhi oleh penghapusan bangunan Pasar Plaza Bogor, Pasar Baru Bogor Dan Pasar Merdeka. Selain itu, arus kas operasi perusahaan selama 3 tahun terakhir terus mengalami defisit atau pendapatan Perusahaan belum bisa menutupi biaya operasi kegiatan Perusahaan.

Selain hal tersebut di atas pendapatan Perusahaan pada tahun 2025 telah mengalami penurunan sebesar Rp 10.971.824.132. Penurunan tersebut juga dipengaruhi oleh penutupan Pasar Plaza Bogor Dan Pasar Baru Bogor yang akan dilakukan pembongkaran atau revitalisasi. Sampai dengan proses audit selesai Langkah-langkah perbaikan atau rencana dari Kuasa Pemilik Modal (KPM) atas kelangsungan usaha Perusahaan belum diperoleh.

PERUSAHAAN UMUM DAERAH
PASAR PAKUAN JAYA KOTA BOGOR
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2025

And For The Year Ended

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

33 SIGNIFICANT AGREEMENT (continued)

PT Bogor Artha Makmur and PT Pelita Sinarindo Ekatama Kso

On June 12, 2023, the Bogor City Pakuan Jaya Market Regional Public Company entered into a Cooperation Agreement with PT Bogor Artha Makmur and PT Pelita Sinarindo Ekatama Kso regarding the revitalization of Jambu Dua Market with agreement number 645.1/PKS.103-PPJ/2023 for a period of 5 years.

PT Fortunindo Artha Perkasa

On December 19, 2018, the Regional Public Company of Pakuan Jaya Market, Bogor City, entered into a cooperation agreement with PT Fortunindo Artha Perkasa regarding the revitalization of Block G of Kebon Kembang Market with agreement number 645.1/PKS.127-PDPPJ/2018 for a period of 1 year.

PT Mulyagiri Kerjasama Operasional and PT Maya Saribakti Utama

On October 11, 2017, the Regional Public Company of Pakuan Jaya Market, Bogor City, entered into a Cooperation Agreement with PT Mulyagiri Operational Cooperation and PT Maya Saribakti Utama regarding the revitalization of Block F of Kebon Kembang Market in accordance with the notarial deed of Agus Surachman SH number 02,- the term of the agreement is 5 years. The agreement has been added with number 645.1 / ADD.125-PPJ / 2020 dated December 1, 2020 with a term of 6 years.

34 GOING CONCERN

The company in 2025 has experienced a loss of Rp 99.414.542.084 resulting in an accumulated loss balance until 2025 of Rp 185.352.597.704. The 2025 loss was affected by the elimination of the Pasar Plaza Bogor, Pasar Baru Bogor and Pasar Merdeka buildings. In addition, the company's operating cash flow for the past 3 years has continued to experience a deficit or the Company's income has not been able to cover the Company's operating costs.

In addition to the above, the Company's revenue in 2025 decreased by Rp 10.971.824.132. This decrease was also influenced by the closure of Pasar Plaza Bogor and Pasar Baru Bogor, which will be demolished or revitalized. Until the audit process is completed, corrective measures or plans from the Authorized Capital Owner (KPM) regarding the Company's business continuity have not been obtained.

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH
TRANSPORTASI PAKUAN KOTA BOGOR
LAPORAN KEUANGAN**

Pada dan Untuk Tahun yang Berakhir
Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

dan

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH
TRANSPORTASI PAKUAN KOTA BOGOR**

DAFTAR ISI

Halaman

SURAT PERNYATAAN DIREKSI

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

LAPORAN KEUANGAN

Tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

LAPORAN POSISI KEUANGAN	1-2
LAPORAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF DAN LAPORAN LABA RUGI	3
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	4
LAPORAN ARUS KAS	5
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	6-20



PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR
PERUMDA TRANSPORTASI PAKUAN

Jl. Ir. H. Juanda No.10 Kota Bogor – 16121

Email : perumdatranspakuan@gmail.com

SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025
PERUSAHAAN UMUM DAERAH TRANSPORTASI PAKUAN KOTA BOGOR

Kami yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Rachma Nissa Fadliya, S.E.Ak, M.Si
Jabatan : Direktur
Alamat Domisili : Cimahpar Stoneyard Blok I.7 Kp. Bojong Jl. Guru Muchtar RT 003
RW 004 Kel Cimahpar Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor
Telepon : 0811-212-264

Menyatakan bahwa :

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Perusahaan Umum Daerah Transportasi Pakuan Kota Bogor (Perusahaan).
2. Laporan Keuangan Perusahaan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Entitas Privat (SAK-EP)
3. a. Semua informasi dalam Laporan Keuangan telah dimuat secara lengkap dan benar.
b. Laporan Keuangan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Bogor, 31 Maret 2026



(Rachma Nissa Fadliya, S.E.Ak, M.Si)
Direktur



LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

No.: 00063/2.1353/AU.8/05/1632-1/1/III/2026

Kepada

**Pemilik Modal, Dewan Pengawas dan Direksi
Perumda Transportasi Pakuan Bogor**

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan Perumda Transportasi Pakuan Bogor ("Perusahaan"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2025, serta laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, Laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK-EP) di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas laporan keuangan pada laporan kami.

Kami independen terhadap Perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk memberikan basis bagi opini kami.

Hal Lain

Laporan keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut diaudit oleh auditor independen lain dengan laporan Nomor 0123/2.0923/AU.2/06/1531-3/1/V/2025 tanggal 7 Mei 2025 yang menyatakan Opini Wajar Tanpa Modifikasi.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK-EP) di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.



Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi pelaporan keuangan Perusahaan.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan pengguna basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.



KANTOR AKUNTAN PUBLIK
RONI PUPUNG

IZIN USAHA : KMK RI NO. 1258/KM.1/2021

Assurance Service, Non Assurance Services, Tax Consulting, Management Consulting

- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi-transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengkomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

KAP RONI PUPUNG



Ade Suryana, CPA.

AP. 1632



Jakarta, 31 Maret 2026

PERUMDA TRANSPORTASI PAKUAN KOTA BOGOR
LAPORAN POSISI KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2025	2024
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan setara kas	3,5	229.550.976	271.247.443
Piutang usaha	3,6	9.715.113	71.991.073
Pajak dibayar di muka	3,12a	-	462.207.600
Jumlah aset lancar		239.266.089	805.446.116
ASET TIDAK LANCAR			
Aset tetap bersih	3,7	14.393.803	69.392.694
Aset pajak tangguhan	3,12d	299.021.332	-
Jumlah aset tidak lancar		313.415.135	69.392.694
JUMLAH ASET		552.681.224	874.839.080

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

PERUMDA TRANSPORTASI PAKUAN KOTA BOGOR
LAPORAN POSISI KEUANGAN (lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2025	2024
KEWAJIBAN DAN EKUITAS			
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang usaha	3,8	121.807.659	63.184.519
Utang pajak	3,12b	3.965.696	-
Biaya yang masih harus dibayar	3,9	2.384.320.997	1.310.220.298
Utang sewa pembiayaan jangka pendek	3,10	-	-
Pendapatan diterima di muka		-	462.207.600
Utang bank	3,11	60.000.000	-
Jumlah kewajiban jangka pendek		<u>2.570.094.352</u>	<u>1.835.612.417</u>
Kewajiban Jangka Panjang			
Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun			
Utang bank	3,11	<u>240.000.000</u>	<u>-</u>
Jumlah kewajiban jangka panjang		<u>240.000.000</u>	<u>-</u>
JUMLAH KEWAJIBAN		<u>2.810.094.352</u>	<u>1.835.612.417</u>
EKUITAS			
Modal Dasar	13	35.519.390.000	35.519.390.000
Saldo laba		<u>(37.776.803.128)</u>	<u>(36.480.163.337)</u>
JUMLAH EKUITAS		<u>(2.257.413.128)</u>	<u>(960.773.337)</u>
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		<u>552.681.224</u>	<u>874.839.080</u>

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

PERUMDA TRANSPORTASI PAKUAN KOTA BOGOR
LAPORAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF DAN LAPORAN LABA RUGI

Tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2025	2024
Pendapatan	3,14	2.593.248.259	2.908.250.458
Beban usaha	3,15	(2.124.880.818)	(1.897.551.611)
Laba kotor		468.367.441	1.010.698.847
Beban administrasi dan umum	3,16	(2.137.359.007)	(934.738.099)
Laba (rugi) usaha		(1.668.991.566)	75.960.748
Pendapatan (beban) lain-lain:			
Pendapatan lain-lain	3,17	89.746.159	142.014.354
Beban lain-lain	3,17	(16.415.716)	(56.276.399)
Jumlah pendapatan lain-lain neto		73.330.443	85.737.955
Laba (rugi) sebelum pajak		(1.595.661.123)	161.698.703
Pajak kini	3,12c	-	-
Pajak tangguhan	3,12d	299.021.332	-
Manfaat (beban) pajak penghasilan		299.021.332	-
Laba (rugi) bersih setelah pajak		(1.296.639.791)	161.698.703

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

PERUMDA TRANSPORTASI PAKUAN KOTA BOGOR
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Modal	Saldo Defisit	Defisiensi Modal
Saldo 1 Januari 2024	35.519.390.000	(36.641.862.040)	(1.122.472.040)
Laba (rugi) tahun berjalan	-	161.698.703	161.698.703
Saldo pada 31 Desember 2024	35.519.390.000	(36.480.163.337)	(960.773.337)
Laba (rugi) tahun berjalan	-	(1.296.639.791)	(1.296.639.791)
Saldo pada 31 Desember 2025	35.519.390.000	(37.776.803.128)	(2.257.413.128)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

PERUMDA TRANSPORTASI PAKUAN KOTA BOGOR
LAPORAN ARUS KAS

Tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2025	2024
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan	(1.595.661.123)	161.698.703
Penyesuaian untuk:		
Estimasi imbalan pasca kerja karyawan		
Penyusutan aset tetap	54.999.161	14.603.898
Laba operasi sebelum perubahan modal kerja	(1.540.661.962)	176.302.601
Perubahan dalam modal kerja		
Piutang usaha	62.275.960	(63.671.598)
Hutang usaha	58.623.140	(35.994.863)
Hutang pajak	3.965.696	-
Biaya yang masih harus dibayar	1.074.100.699	(406.855.852)
Kas yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	(341.696.467)	(330.219.712)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Perolehan aset tetap	-	(17.994.080)
Kas yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi	-	(17.994.080)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Pinjaman bank	300.000.000	-
Kas yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	300.000.000	-
Kenaikan (penurunan) kas dan bank	(41.696.467)	(348.213.792)
Kas dan bank - awal tahun	271.247.443	619.461.235
Kas dan bank - akhir tahun	229.550.976	271.247.443

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

PERUMDA TRANSPORTASI PAKUAN KOTA BOGOR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM

Pendirian Perusahaan

Perumda Transportasi Pakuan Kota Bogor didirikan dengan nama Perusahaan Daerah Jasa Transportasi Kota Bogor (PDJT) berdasarkan Peraturan Daerah No. 5 tahun 2007 tanggal 12 April 2007 tentang Peraturan Daerah Jasa Transportasi Kota Bogor yang kemudian diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor No. 11 tahun 2008 tanggal 24 Desember 2008. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor No. 3 Tahun 2022 tertanggal 21 Maret 2022 berubah menjadi Perusahaan Umum Daerah Transportasi Pakuan Kota Bogor (Perumda). Perumda Transportasi Pakuan Kota Bogor berkedudukan di Kantor Kesekretariatan Wali Kota Bogor.

Perusahaan bergerak dalam bidang pelayanan umum kebutuhan transportasi masyarakat. Sesuai Perda No. 3 tahun 2022 bab V pasal 6 kegiatan usaha meliputi: angkutan umum, angkutan wisata, bengkel umum, kendaraan derek, perparkiran, periklanan, stasiun pengisian bahan bakar dan jenis usaha lainnya di bidang transportasi. Perusahaan telah terdaftar sebagai wajib pajak dengan NPWP 0026-4735-4640-4000.

Perumda Transportasi Pakuan Kota Bogor (Perusahaan) berdomisili di Jl. Ir. H. Djuanda No 10, Desa/Kelurahan Bubulak, Kec. Bogor Barat, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos: 16115.

Dewan Pengawas dan Direksi

Susunan Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Dewan Pengawas : Marse Hendra Saputra, S.STP

Direktur Utama : Rachma Nissa Fadliya, S.E.Ak, M.Si

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Perusahaan memiliki 46 dan 24 orang karyawan tidak tetap (tidak diaudit).

2. PERNYATAAN KEPATUHAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Direksi Perusahaan menyatakan bahwa laporan keuangan tahun 2025 dengan informasi komparatif pendekatan angka koresponding untuk tahun 2024 telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP). Laporan keuangan disajikan dalam satuan mata uang rupiah (Rp).

Dasar penyusunan laporan keuangan, kecuali untuk laporan arus kas, adalah dasar akrual. Mata uang pelaporan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan adalah mata uang Rupiah, yang pengukurannya disusun berdasarkan nilai historis.

Laporan arus kas disusun berdasarkan metode tidak langsung, dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

PERUMDA TRANSPORTASI PAKUAN KOTA BOGOR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN-lanjutan
Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING YANG DITERAPKAN

Penerapan dan penyesuaian Standar Akuntansi Keuangan Privat (SAK EP)

Perusahaan telah menerapkan secara dini Standar Akuntansi Entitas Privat (SAK EP) pada 1 Januari 2025. Penerapan atas amandemen dan penyesuaian SAK EP tidak menghasilkan perubahan yang mendasar atas kebijakan akuntansi Perusahaan dan tidak mempunyai dampak material atas nilai yang dilaporkan pada periode keuangan tahun berjalan dan tahun sebelumnya.

Instrumen Keuangan

Efektif tanggal 1 Januari 2025, Perusahaan menerapkan SAK EP Bab 11 “Instrumen Keuangan Dasar” dan SAK EP Bab 12 “Isu terkait instrumen keuangan lainnya”.

Kedua Bab mengatur pengakuan, penghentian pengakuan, pengukuran dan pengungkapan instrumen keuangan (aset keuangan dan liabilitas keuangan). Bab 11 diterapkan terhadap instrumen keuangan dasar dan relevan untuk seluruh entitas. Bab 12 diterapkan untuk instrumen keuangan dan transaksi lain yang lebih kompleks. Jika entitas hanya mengadakan transaksi instrumen keuangan dasar, maka Bab 12 tidak diterapkan. Akan tetapi, bahkan entitas dengan hanya instrumen keuangan dasar mempertimbangkan ruang lingkup dari Bab 12 untuk memastikan bahwa entitas dikecualikan darinya.

Penerapan SAK tersebut dilakukan secara prospektif.

Instrumen keuangan adalah kontrak yang menimbulkan aset keuangan pada satu entitas dan liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas pada entitas lainnya.

Entitas mencatat instrumen keuangan berikut sebagai instrumen keuangan dasar:

- a. Kas;
- b. Instrumen utang (seperti piutang dan utang, wesel tagih atau wesel bayar atau pinjaman diberikan atau pinjaman diterima);
- c. Komitmen untuk menerima pinjaman yang:
 - i. tidak dapat diselesaikan secara neto dengan kas; dan
 - ii. ketika komitmen dilaksanakan
- d. Investasi dalam saham preferen yang tidak dapat dikonversi dan saham biasa tanpa opsi jual atau saham preferen tanpa opsi jual.

Pengakuan Awal Aset dan Liabilitas Keuangan

Entitas mengakui aset keuangan atau liabilitas keuangan hanya jika entitas menjadi salah satu pihak dalam ketentuan kontraktual instrumen tersebut.

Pengukuran Awal

Pada pengakuan awal aset keuangan atau liabilitas keuangan, entitas mengukurnya pada harga transaksi (termasuk biaya transaksi kecuali dalam pengukuran awal aset keuangan dan liabilitas keuangan yang setelah pengakuan awal diukur pada nilai wajar melalui laba rugi) kecuali dalam pengaturan (*arrangement*) ditetapkan, pada dasarnya, merupakan transaksi pembiayaan baik untuk entitas (sebagai liabilitas keuangan) atau pihak lawan (sebagai aset keuangan) di dalam pengaturannya.

PERUMDA TRANSPORTASI PAKUAN KOTA BOGOR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN-lanjutan
Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING YANG DITERAPKAN (lanjutan)

Instrumen Keuangan (lanjutan)

Pengukuran Selanjutnya

Pada akhir setiap periode pelaporan, entitas mengukur instrumen keuangan sebagai berikut, tanpa pengurangan biaya transaksi yang mungkin terjadi pada penjualan atau pelepasan lainnya:

- a. Instrumen utang yang memenuhi ketentuan diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif.
- b. Komitmen untuk menerima pinjaman yang memenuhi ketentuan diukur pada biaya perolehan (yang terkadang nihil) dikurangi penurunan nilai.
- c. Investasi dalam saham preferen yang tidak dapat dikonversi dan saham biasa tanpa opsi jual atau saham preferen tanpa opsi jual diukur sebagai berikut:
 - i. Jika saham diperdagangkan secara publik atau nilai wajar saham tersebut dapat diukur secara andal tanpa biaya atau upaya yang berlebihan, investasi diukur pada nilai wajar dengan perubahan nilai wajar diakui dalam laba rugi; dan
 - ii. Seluruh bentuk investasi lainnya diukur pada biaya perolehan dikurangi penurunan nilai.

Metode Biaya Perolehan Diamortisasi dan Suku Bunga Efektif

Biaya perolehan diamortisasi aset keuangan atau liabilitas keuangan pada setiap tanggal pelaporan adalah nilai bersih dari jumlah berikut ini:

- a. Jumlah di mana aset keuangan atau liabilitas keuangan diukur pada pengakuan awal;
- b. Dikurangi setiap pelunasan pokok;
- c. Ditambah atau dikurangi amortisasi kumulatif dengan menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara jumlah pada pengakuan awal dan jumlah jatuh temponya;
- d. Dikurangi, dalam hal aset keuangan, setiap pengurangan (secara langsung atau melalui penggunaan akun penyisihan) untuk penurunan nilai atau nilai yang tidak dapat ditagih.

Penghentian Pengakuan Aset Keuangan

Entitas menghentikan pengakuan aset keuangan hanya ketika salah satu dari:

- a. Hak kontraktual atas arus kas dari aset keuangan kedaluwarsa atau diselesaikan;
- b. Entitas mengalihkan kepada pihak lain secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset keuangan; atau
- c. Entitas, meskipun telah mempertahankan beberapa risiko dan manfaat kepemilikan yang signifikan, telah mengalihkan pengendalian aset ke pihak lain dan pihak lain tersebut memiliki kemampuan praktis untuk menjual seluruh aset kepada pihak ketiga yang tidak berelasi dan dapat melaksanakan kemampuan tersebut secara unilateral dan tanpa perlu memberlakukan batasan tambahan atas pengalihan dalam kasus ini, entitas:
 - i. Menghentikan pengakuan aset; dan
 - ii. Mengakui secara terpisah hak dan kewajiban yang dipertahankan atau dihasilkan dari pengalihan.

PERUMDA TRANSPORTASI PAKUAN KOTA BOGOR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN-lanjutan
Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING YANG DITERAPKAN (lanjutan)

Penghentian Pengakuan Liabilitas Keuangan

Entitas menghentikan pengakuan liabilitas keuangan (atau bagian dari liabilitas keuangan) hanya ketika liabilitas tersebut berakhir - yaitu ketika kewajiban yang ditentukan dalam kontrak dilepaskan, dibatalkan atau kedaluwarsa.

Jika peminjam dan pemberi pinjaman mengganti instrumen keuangan dengan syarat yang berbeda secara substansial, maka entitas peminjam dan pemberi pinjaman mencatat transaksi tersebut sebagai pengakhiran liabilitas keuangan orisinal dan pengakuan liabilitas keuangan baru. Serupa dengan hal tersebut, entitas mencatat modifikasi substansial atas persyaratan liabilitas keuangan yang saat ini berlaku atau bagian darinya (terlepas ada atau tidak ada keterkaitan dengan kesulitan keuangan debitur) sebagai pengakhiran liabilitas keuangan orisinal dan pengakuan liabilitas keuangan baru.

Entitas mengakui dalam laba rugi selisih antara jumlah tercatat liabilitas keuangan (atau bagian dari liabilitas keuangan) yang dihapuskan atau yang dialihkan kepada pihak lain dan imbalan yang dibayarkan, termasuk aset nonkas yang dialihkan atau liabilitas yang diambil alih.

Pengungkapan

Pengungkapan berikut menjadi acuan untuk pengungkapan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Entitas yang hanya memiliki instrumen keuangan dasar (dan oleh karena itu tidak menerapkan Bab 12) tidak memiliki liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan oleh karena itu tidak perlu menyediakan pengungkapan tersebut.

Laporan Posisi Keuangan - Kategori Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Entitas mengungkapkan jumlah tercatat setiap kategori aset keuangan dan liabilitas keuangan berikut pada tanggal pelaporan, dalam total jumlah, baik dalam laporan posisi keuangan atau dalam catatan atas laporan keuangan:

- a. Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;
- b. Aset keuangan yang merupakan instrumen utang diukur pada biaya perolehan diamortisasi;
- c. Aset keuangan yang merupakan instrumen ekuitas diukur pada biaya perolehan dikurangi penurunan nilai;
- d. Liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;
- e. Liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi; dan
- f. Komitmen pinjaman diukur pada biaya perolehan dikurangi penurunan nilai.

Entitas mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi signifikansi instrumen keuangan untuk posisi keuangan dan kinerjanya. Sebagai contoh, untuk utang jangka panjang informasi tersebut umumnya mencakup syarat dan ketentuan instrumen utang (seperti suku bunga, jatuh tempo, jadwal pelunasan, dan pembatasan instrumen utang yang membebani entitas).

Untuk semua aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar, entitas mengungkapkan dasar penentuan nilai wajar, sebagai contoh, harga pasar kuotasi dalam pasar aktif atau teknik penilaian. Ketika teknik penilaian digunakan, entitas mengungkapkan asumsi yang diterapkan dalam menentukan nilai wajar setiap kelas aset keuangan atau liabilitas keuangan. Sebagai contoh, jika dapat diterapkan, entitas mengungkapkan informasi mengenai asumsi terkait tingkat pembayaran di muka, tingkat kerugian kredit estimasian, dan suku bunga atau tingkat diskonto.

PERUMDA TRANSPORTASI PAKUAN KOTA BOGOR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN-lanjutan

Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING YANG DITERAPKAN (lanjutan)

Pengungkapan-lanjutan

Jika ukuran nilai wajar yang andal tidak lagi tersedia, atau tidak tersedia tanpa biaya atau upaya yang berlebihan ketika pengecualian tersebut diberikan, untuk setiap instrumen keuangan yang seharusnya disyaratkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi sesuai dengan Standar ini entitas mengungkapkan:

- a. Fakta tersebut;
- b. Jumlah tercatat instrumen keuangan tersebut; dan
- c. apabila pengecualian biaya atau upaya yang berlebihan telah digunakan, alasan mengapa pengukuran nilai wajar yang andal melibatkan biaya atau upaya yang berlebihan tersebut.

Penghentian pengakuan

Jika entitas mengalihkan aset keuangan kepada pihak lain dalam transaksi yang tidak memenuhi syarat penghentian pengakuan, entitas mengungkapkan berikut ini untuk setiap kelas aset keuangan:

- a. Sifat aset;
- b. Sifat risiko dan manfaat atas kepemilikan yang entitas tetap terekspos; dan
- c. Jumlah tercatat aset dan liabilitas terkait yang tetap diakui entitas.

Item Penghasilan, Beban, Keuntungan atau Kerugian

Entitas mengungkapkan item penghasilan, beban, keuntungan atau kerugian berikut:

- a. Penghasilan, beban, keuntungan atau kerugian, termasuk perubahan nilai wajar, yang diakui atas:
 - i. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;
 - ii. Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;
 - iii. Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi; dan
 - iv. Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.
- b. Total penghasilan bunga dan total beban bunga (dihitung menggunakan metode suku bunga efektif) untuk aset keuangan atau liabilitas keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi; dan
- c. Jumlah kerugian penurunan nilai untuk setiap kelas aset keuangan.

Pengakuan pendapatan dan biaya

Pendapatan dari penjualan barang dan jasa diakui ketika barang dan jasa telah diserahkan dan hak kepemilikan telah dialihkan. Pendapatan diukur pada nilai wajar imbalan yang diterima atau dapat diterima, setelah dikurangi diskon dan pajak terkait penjualan yang ditagihkan. Beban diakui saat terjadinya (*accrual basis*).

Pajak Penghasilan

Beban pajak penghasilan merupakan jumlah dari pajak kini yang terutang dan pajak tangguhan.

Pajak kini yang terutang didasarkan pada laba kena pajak untuk tahun yang bersangkutan.

Pajak tangguhan diakui atas selisih antara jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam laporan keuangan dan dasar pengenaan pajaknya (yang dikenal sebagai perbedaan temporer). Liabilitas pajak tangguhan umumnya diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang akan mengakibatkan jumlah kena pajak dalam menentukan laba kena pajak (rugi pajak) periode mendatang ketika jumlah yang tercatat aset atau liabilitas dipulihkan atau diselesaikan (perbedaan temporer kena pajak).

PERUMDA TRANSPORTASI PAKUAN KOTA BOGOR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN-lanjutan
Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING YANG DITERAPKAN (lanjutan)

Pajak Penghasilan-lanjutan

Aset pajak tangguhan umumnya diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang akan menghasilkan jumlah yang dapat dikurangkan dalam menentukan laba kena pajak (rugi pajak) periode mendatang ketika jumlah tercatat pada aset atau liabilitas tersebut dipulihkan atau diselesaikan (perbedaan temporer yang dapat dikurangkan) – tetapi hanya sepanjang terdapat kemungkinan besar bahwa laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer yang dapat dikurangkan tersebut dapat dimanfaatkan.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah setiap tanggal pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan penilaian kini terhadap laba kena pajak di masa depan. Setiap penyesuaian diakui dalam laba rugi.

Pajak tangguhan dihitung pada tarif pajak yang diperkirakan berlaku atas laba kena pajak (rugi pajak) pada periode di mana entitas memperkirakan aset pajak tangguhan direalisasikan atau liabilitas pajak tangguhan diselesaikan, berdasarkan tarif pajak yang telah berlaku atau secara substansial telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

Aset Tetap

Aset tetap disajikan sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai. Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus (*straight line method*) berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap sebagai berikut:

	Masa manfaat (Tahun)	Penyusutan/Tahun
Bangunan	20	5 %
Kendaraan	4-8	12,5-25 %
Peralatan	4	25 %
Inventaris Kantor	4	25 %

Masa manfaat ekonomi, nilai residu dan metode penyusutan aset tetap ditelaah setiap akhir tahun dan pengaruh dari setiap perubahan estimasi akuntansi tersebut berlaku prospektif.

Aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau tidak ada manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset tetap) diakui dalam laba rugi pada tahun aset tersebut itu dihentikan pengakuannya.

Penurunan nilai aset

Pada setiap tanggal pelaporan, aset tetap, aset tak berwujud dan investasi pada entitas asosiasi ditelaah kembali untuk menentukan apakah terdapat indikasi bahwa aset tersebut telah mengalami kerugian penilaian nilai. Jika terdapat indikasi kemungkinan penurunan nilai, jumlah yang terpulihkan dari aset yang terpengaruh (atau kelompok aset terkait) diestimasi dan dibandingkan dengan jumlah tercatatnya. Jika jumlah yang terpulihkan estimasian adalah lebih rendah, maka jumlah tercatat akan dikurangi ke jumlah terpulihkan estimasian dan kerugian nilai segera diakui laba rugi.

Jika suatu kerugian penurunan nilai kemudian dibalik, maka jumlah tercatat aset (atau kelompok aset terkait) ditingkatkan ke estimasi atas jumlah terpulihkan (harga jual dikurangi biaya untuk menyelesaikan dan menjual, dalam kasus persediaan), tetapi tidak melebihi jumlah yang akan ditentukan seandainya tidak ada kerugian penurunan nilai yang diakui untuk aset tersebut (kelompok aset terkait) pada tahun-tahun sebelumnya. Pembalikan kerugian penurunan nilai segera diakui dalam laba rugi.

PERUMDA TRANSPORTASI PAKUAN KOTA BOGOR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN-lanjutan
Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING YANG DITERAPKAN (lanjutan)

Imbalan Kerja

Perusahaan belum mengakui kewajiban imbalan kerja sebagaimana diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat Bab 28 "Imbalan Kerja". Pengakuan kewajiban tersebut didasarkan pada ketentuan Undang-Undang UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dalam ketentuan tersebut, perusahaan diwajibkan untuk membayar imbalan kerja kepada karyawannya pada saat mereka berhenti bekerja dalam hal mengundurkan diri, pensiun normal, meninggal dunia, dan cacat tetap. Besarnya imbalan kerja tersebut berdasarkan lamanya masa kerja dan kompensasi karyawan pada penyelesaian hubungan kerja.

Transaksi Hubungan Istimewa

Perusahaan melakukan transaksi dengan beberapa pihak yang mempunyai hubungan istimewa seperti yang dinyatakan dalam Satuan Akuntansi Keuangan Entitas Privat Bab 33 "Pengungkapan Pihak berelasi".

4. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG PENTING

Penyusunan laporan keuangan mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang akan mempengaruhi jumlah-jumlah pendapatan, beban, aset dan liabilitas yang dilaporkan serta pengungkapan liabilitas kontinjensi pada tiap-tiap akhir periode laporan keuangan. Pertimbangan dan estimasi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan ditelaah secara berkala berdasarkan pengalaman historis dan faktor-faktor lainnya, termasuk ekspektasi dari kejadian-kejadian di masa depan yang mungkin terjadi. Namun, hasil aktual dapat berbeda dengan jumlah yang diestimasi.

Ketidakpastian atas asumsi serta estimasi tersebut dapat menimbulkan hasil yang memerlukan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset atau liabilitas yang terpengaruh di masa depan.

Sumber Estimasi Ketidakpastian

Asumsi utama terkait masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko bagi penyesuaian yang material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas untuk tahun berikutnya, diungkapkan di bawah ini. Perusahaan mendasarkan asumsi dan estimasi pada acuan yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Situasi saat ini dan asumsi mengenai perkembangan di masa depan, dapat berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Perusahaan. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi yang terkait pada saat terjadinya.

Pajak Penghasilan

Perusahaan selaku wajib pajak menghitung liabilitas perpajakannya secara *self assessment* berdasarkan pada peraturan pajak yang berlaku. Perhitungan tersebut dianggap benar selama belum terdapat ketetapan dari Direktorat Jenderal Pajak atas jumlah pajak yang terhutang atau ketika sampai dengan jangka waktu lima (5) tahun (masa daluarsa pajak) tidak terdapat ketetapan pajak yang diterbitkan. Perbedaan jumlah pajak yang terhutang dapat disebabkan oleh beberapa hal seperti pemeriksaan pajak, penemuan bukti-bukti pajak baru dan perbedaan interpretasi antara manajemen dan pejabat kantor pajak terhadap peraturan pajak tertentu. Perbedaan hasil aktual dan jumlah tercatat tersebut dapat mempengaruhi jumlah tagihan pajak, utang pajak, dan beban pajak.

PERUMDA TRANSPORTASI PAKUAN KOTA BOGOR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN-lanjutan
Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5. KAS DAN SETARA KAS

Akun ini merupakan saldo kas dan bank pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, dengan rincian sebagai berikut:

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Kas		
Kas besar	12.624.149	34.178.488
Kas kecil	<u>500.000</u>	<u>500.000</u>
Sub jumlah kas	<u>13.124.149</u>	<u>34.678.488</u>
Bank		
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	73.525.530	-
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.916.993	130.195.758
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	-	1.232.251
Perumda BPR Bank Kota Bogor	<u>984.304</u>	<u>5.140.946</u>
Sub jumlah bank	<u>76.426.827</u>	<u>136.568.955</u>
Deposito		
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	90.000.000	-
Perumda BPR Bank Kota Bogor	<u>50.000.000</u>	<u>100.000.000</u>
Sub jumlah deposito	<u>140.000.000</u>	<u>100.000.000</u>
Jumlah	<u>229.550.976</u>	<u>271.247.443</u>

6. PIUTANG USAHA

Akun ini merupakan saldo piutang usaha pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, dengan rincian sebagai berikut:

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Piutang penjualan karcis	9.467.365	5.684.761
Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor	-	56.306.312
Lain-lain	<u>247.748</u>	<u>10.000.000</u>
Sub jumlah	9.715.113	71.991.073
Dikurangi:		
Penyisihan penurunan nilai	<u>-</u>	<u>-</u>
Jumlah	<u>9.715.113</u>	<u>71.991.073</u>

Seluruh piutang usaha tersebut diperkirakan dapat diterima pembayarannya sehingga manajemen berpendapat tidak membuat penyisihan piutang ragu-ragu dan tidak terdapat risiko yang terkonsentrasi secara signifikan atas piutang usaha ini.

PERUMDA TRANSPORTASI PAKUAN KOTA BOGOR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN-lanjutan
Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. ASET TETAP

Mutasi atas aset tetap

	2025			
	Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo akhir
<i>Biaya Perolehan:</i>				
Bangunan	186.832.900	-	-	186.832.900
Kendaraan	2.795.361.289	-	2.342.761.289	452.600.000
Peralatan dan perlengkapan	-	-	-	-
Inventaris kantor	31.644.080	-	-	31.644.080
Jumlah	3.013.838.269	-	2.342.761.289	671.076.980
<i>Akumulasi Penyusutan:</i>				
Bangunan	140.588.482	46.244.411	-	186.832.893
Kendaraan	2.795.361.241	-	2.342.761.289	452.599.952
Peralatan dan perlengkapan	-	-	-	-
Inventaris kantor	8.495.582	8.754.750	-	17.250.332
Jumlah	2.944.445.305	54.999.161	2.342.761.289	656.683.177
Nilai buku	69.392.964			14.393.803

	2024			
	Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo akhir
<i>Biaya Perolehan:</i>				
Bangunan	186.832.900	-	-	186.832.900
Kendaraan	6.257.714.520	-	3.462.353.231	2.795.361.289
Peralatan dan perlengkapan	199.519.000	-	199.519.000	-
Inventaris kantor	548.187.400	17.994.080	534.537.400	31.644.080
Jumlah	7.192.253.820	17.994.080	4.196.409.631	3.013.838.269
<i>Akumulasi Penyusutan:</i>				
Bangunan	131.246.837	9.341.648	-	140.588.482
Kendaraan	6.257.714.472	-	3.462.353.231	2.795.361.241
Peralatan dan perlengkapan	199.519.000	-	199.519.000	-
Inventaris kantor	537.770.729	5.262.253	534.537.400	8.495.582
Jumlah	7.126.251.038	14.603.898	4.196.409.631	2.944.445.305
Nilai buku	66.002.785			69.392.964

Alokasi beban penyusutan selama 31 Desember 2025 dan 2024 dicatat pada beban umum dan administrasi, dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
Beban umum dan administrasi	54.999.161	14.603.898

PERUMDA TRANSPORTASI PAKUAN KOTA BOGOR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN-lanjutan
Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

8. UTANG USAHA

Akun ini merupakan saldo utang usaha pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
Manajemen Pengelola (operasional)	48.137.921	-
Sparepart	42.200.000	42.200.000
Pegawai MP	25.385.238	-
CV Sumber Rezeki	1.839.500	1.839.500
Service AC bis	1.245.000	1.245.000
Lainnya	3.000.000	17.900.019
Jumlah	121.807.659	63.184.519

9. BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR

	2025	2024
Gaji	2.044.017.869	967.069.351
BPJS	295.075.578	295.075.578
Pesangon	45.227.550	45.227.550
Lainnya	-	2.847.819
Jumlah	2.384.320.997	1.310.220.298

10. UANG MUKA YANG DITERIMA

Akun ini merupakan saldo uang muka yang diterima pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
Uang muka proyek	-	462.207.600
Jumlah	-	462.207.600

11. UTANG BANK

Akun ini merupakan saldo utang bank pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
Utang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	-	-
Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun	60.000.000	-
Jumlah	60.000.000	-

PERUMDA TRANSPORTASI PAKUAN KOTA BOGOR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN-lanjutan
Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

11. UTANG BANK (lanjutan)

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk

Berdasarkan Perjanjian dengan nomor 074/PKS.2-PTP/IX/2025 tanggal 24 September 2025. Perusahaan Umum Daerah Transportasi Pakuan Kota Bogor memperoleh pembiayaan dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. Jenis Kredit | : KMKK Transaksional |
| 2. Jumlah plafond pinjaman | : Rp 300.000.000 |
| 3. Tujuan pembiayaan | : Tambahan modal kerja untuk proyek Sumber pelunasan kredit berasal dari proyek pekerjaan Pemasangan Iklan pada Media Bus dan Media di Halte Bus Perumda Transportasi Pakuan berdasarkan perjanjian Kerjasama nomor PTP: 074/PKS.2-PTP/IX/2025 dan Nomor PDAM: 690/SP.85-PERUMDA.TPKB/2025 tanggal 24 September 2025 dengan nilai kontrak Rp. 125.000.000 setiap tahunnya selama 5 tahun |
| 4. Jangka waktu | : 5 tahun |
| 5. Suku bunga | : 13,5 % |
| 6. Provisi | : Rp. 2.750.000 |
| 7. Biaya cadangan | : sejumlah tertentu |
| 8. Biaya Denda | : 3% |
| 9. Jaminan | : - <i>Fixed Asset</i> : Bilyet Deposito nomot seri A 651965 Referensi nomor 0013-DEP-0013250000152 An. Perumda Transportasi Pakuan Kota Bogor sebesar Rp. 90.000.000.
- <i>Non-Fixed Asset</i> : Piutang Proyek Perusahaan Umum Daerah Transportasi Pakuan Kota Bogor Adalah proyek Pemasangan Iklan pada Media Bus dan Media di Halte Bus Perumda Transportasi Pakuan berdasarkan Perjanjian Kerjasama nomor PTP: 074/PKS.2-PTP/IX/2025 dan Nomor PDAM: 690/SP.85-PERUMDA.TPKB/2025 tanggal 24 September 2025 dengan nilai kontrak Rp. 125.000.000 setiap tahunnya selama 5 tahun. |

12. PERPAJAKAN

a. Pajak dibayar di muka

Akun ini merupakan saldo pajak dibayar pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, dengan rincian sebagai berikut:

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Pajak Pertambahan Nilai	-	462.207.600
Jumlah	<u>-</u>	<u>462.207.600</u>

PERUMDA TRANSPORTASI PAKUAN KOTA BOGOR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN-lanjutan
Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

12. PERPAJAKAN (lanjutan)

b. Utang pajak

Akun ini merupakan saldo utang pajak pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
PPH Pasal 23	3.581.081	-
PPH Pasal 21	384.615	-
Jumlah	3.965.696	-

c. Taksiran perhitungan pajak penghasilan

Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan dengan hasil perhitungan laba (rugi) menurut laporan keuangan sebelum pajak penghasilan dan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

	2025	2024
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan	(1.595.661.123)	161.698.703
Beda tetap		
Pendapatan lain-lain	(89.746.159)	(13.496.522)
Bantuan dan Sumbangan	8.216.000	
Entertain	27.830.381	-
Lain-lain	290.173.030	38.301.536
Jumlah beda tetap	236.473.252	24.805.014
Laba (rugi) fiskal	(1.359.187.871)	186.503.717
Kompensasi kerugian fiskal	-	(186.503.717)
Laba (rugi) fiskal	(1.359.187.871)	-

d. Pajak tangguhan

	1 Januari 2025	Beban pajak tangguhan yang dibebankan pada laba rugi	Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan Tangguhan Yang Dibebankan Pada Pendapatan Komprehensif Lainnya	31 Desember 2025
Rugi fiskal	-	299.021.332	-	299.021.332
Aset (liabilitas) pajak tangguhan	-	299.021.332	-	299.021.332

PERUMDA TRANSPORTASI PAKUAN KOTA BOGOR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN-lanjutan
Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

13. MODAL

Komposisi kepemilikan modal dasar berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor No.5 tahun 2007, yang kemudian diubah dengan Peraturan Daerah No. 11 tahun 2008 merupakan penyertaan modal Pemerintah Kota Bogor sebagai kekayaan Pemerintah Kota Bogor. Rincian modalnya adalah sebagai berikut:

Pemegang saham	Persentase kepemilikan %	Jumlah
Pemerintah Kota Bogor	100	35.519.390.000

14. PENDAPATAN

Akun ini merupakan saldo pendapatan dari periode 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
Penjualan tiket	1.771.755.000	2.492.832.827
Pendapatan lain-lain	821.493.259	415.417.631
Jumlah	2.593.248.259	2.908.250.458

15. BIAYA USAHA

Akun ini merupakan saldo biaya usaha dari periode 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
<u>Biaya Langsung Jasa Usaha</u>		
Bahan bakar solar	449.448.556	422.658.627
Gaji pegawai	447.823.087	403.834.094
Pemeliharaan/perawatan bis	101.339.481	133.421.611
Ban	60.485.000	67.060.000
Pelumas	39.934.000	37.053.000
Perpanjangan	10.501.750	26.216.800
Lain-lain	241.351.605	230.638.276
Sub jumlah	1.350.883.479	1.320.882.408
<u>Biaya Langsung Jasa Derek dan Jasa Pariwisata</u>		
Pemeliharaan	-	1.544.000
Bahan bakar dan pelumas	-	152.000
Sub jumlah	-	1.696.000
<u>Biaya Langsung Jasa Lainnya</u>		
Gaji pegawai	596.718.700	234.705.000
Bahan bakar solar	76.200.000	172.900.000
Biaya kantor	44.778.924	-
Biaya perawatan	23.021.600	5.092.595
Pajak advertising	872.406	5.948.780
Honor trainer biskita	-	15.925.000
Biaya konsumsi	-	10.353.500
Lain-lain	32.405.709	130.048.328
Sub jumlah	773.997.339	574.973.203
Jumlah biaya usaha	2.124.880.818	1.897.551.611

PERUMDA TRANSPORTASI PAKUAN KOTA BOGOR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN-lanjutan
Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

16. BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI

Akun ini merupakan saldo beban administrasi dan umum dari periode 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
Provisi tuntutan hukuman (catatan 18)	1.370.229.363	-
Gaji pegawai dan direksi	327.494.598	409.297.021
Konsultan	102.814.615	127.320.000
Adiministrasi kantor	79.437.865	111.750.044
Perjalanan dinas	20.949.000	77.394.034
Perijinan dan pajak	76.093.063	11.459.746
Penyusutan	54.999.161	14.603.898
Biaya pembina dan badan pengawas	36.962.334	50.189.922
Biaya pimpinan	27.830.381	32.550.001
BBM, tol dan parkir	10.978.573	23.264.728
Pemeliharaan	9.775.000	7.270.330
Bantuan dan sumbangan	8.216.000	23.395.276
Kesejahteraan karyawan	7.712.374	16.713.615
Biaya langganan	3.866.680	17.416.500
Pembinaan karyawan	-	10.560.494
Biaya iuran/langganan mass media	-	1.552.490
Jumlah	2.137.359.007	934.738.099

17. PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN

Akun ini merupakan saldo pendapatan (beban) lain-lain dari periode 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
Pendapatan lain-lain		
Lain-lain	17.921.952	128.517.832
Jasa giro	3.907.507	13.496.522
Laba atas penjualan aset tetap	67.916.700	-
Sub jumlah pendapatan lain-lain	89.746.159	142.014.354
Biaya lain-lain		
Biaya bunga bank	(8.876.250)	-
Pajak & administrasi bank	(4.476.466)	(1.770.034)
Lain-lain	(3.063.000)	(54.506.365)
Sub jumlah biaya lain-lain	(16.415.716)	(56.276.399)
Jumlah	73.330.443	85.737.955

PERUMDA TRANSPORTASI PAKUAN KOTA BOGOR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN-lanjutan
Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

18. LIABILITAS KONTIJENSI

Perusahaan merupakan Tergugat I dalam perkara perselisihan hubungan industrial yang diajukan oleh 39 orang mantan karyawan melalui Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, sebagaimana terdaftar dalam perkara No. 16/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Bdg tanggal 31 Mei 2023. Gugatan tersebut berkaitan dengan tuntutan pembayaran kompensasi pemutusan hubungan kerja, upah yang belum dibayarkan, serta denda keterlambatan pembayaran upah.

Atas putusan tingkat sebelumnya, Perusahaan telah mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Juni 2023, disertai memori kasasi pada tanggal 26 Juni 2023. Para penggugat kemudian mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 11 Juli 2023.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1014 K/Pdt.Sus-PHI/2023 tanggal 26 September 2023, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Perusahaan serta memperbaiki putusan sebelumnya dengan menetapkan bahwa hubungan kerja antara para penggugat dan Perusahaan telah berakhir. Putusan tersebut juga menetapkan kewajiban Perusahaan untuk membayar hak-hak para penggugat dalam jumlah yang telah disesuaikan sesuai amar putusan, dan membebaskan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada Perusahaan.

Berdasarkan putusan tersebut, Perusahaan memiliki kewajiban pembayaran kepada 39 mantan karyawan sebesar Rp1.770.229.363.

19. PENERBITAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan ini telah diotorisasi untuk diterbitkan oleh Dewan Direksi Perusahaan, selaku pihak yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyelesaian laporan keuangan pada tanggal 31 Maret 2026.

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH TIRTA PAKUAN
KOTA BOGOR**

LAPORAN KEUANGAN / *FINANCIAL STATEMENTS*
PER 31 DESEMBER 2025 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
TANGGAL TERSEBUT/
AS OF DECEMBER 31, 2025 AND FOR THE YEAR THEN ENDED

BESERTA / *WITH*

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN /
INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

BADAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH



**PERUSAHAAN UMUM DAERAH
TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR
LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2025
SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

***FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2025
AND FOR THE YEAR ENDED
AND INDEPENDENT AUDITORS' REPORT***

Perusahaan Umum Daerah Tirta Pakuan Kota Bogor

Jl. Siliwangi No. 121 Kota Bogor 16142 – Jawa Barat – Indonesia

Telp: (0251) 8324111 (Hunting) Fax: (0251) 8321575

Website: <https://www.tirtapakuan.co.id>



The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH
TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR
LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2025
SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH
TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2025
AND FOR THE YEAR ENDED
AND INDEPENDENT AUDITORS' REPORT**

**Halaman/
Pages**

Daftar Isi

Table of Contents

Surat Pernyataan Direksi		Board of Director's Statement
Laporan Posisi Keuangan	1-2	Statement of Financial Position
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif lain.....	3	Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income
Laporan Perubahan Ekuitas	4	Statement of Changes in Equity
Laporan Arus Kas	6	Statement of Cash Flows
Catatan atas Laporan Keuangan.....	7	Notes to the Financial Statements

Perusahaan Umum Daerah Tirta Pakuan Kota Bogor

Jl. Siliwangi No. 121 Kota Bogor 16142 – Jawa Barat – Indonesia

Telp: (0251) 8324111 (Hunting) Fax: (0251) 8321575

Website: <https://www.tirtapakuan.co.id>

SURAT PERNYATAN DIREKSI

Directors' Statement Letter

BADAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH



PERUSAHAAN UMUM DAERAH (PERUMDA) TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR

Jln. Siliwangi No. 121 Bogor 16142 Telp. (0251) 8324111 Fax. 8321575
e-mail : corporate@tirtapakuan.co.id web : www.tirtapakuan.co.id

SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 PERUSAHAAN UMUM DAERAH TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR

DIRECTORS' STATEMENT LETTER RELATING TO THE RESPONSIBILITY ON THE FINANCIAL STATEMENTS AS OF AND FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2025 PERUSAHAAN UMUM DAERAH TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

We, the undersigned :

1 Nama	:	Rino Indra Gusniawan	:	Name 1
Alamat kantor	:	Jl. Siliwangi No.121, RT.07/RW.02, Sukasari, Kec. Bogor Tim., Kota Bogor, Jawa Barat 16142	:	Office address
Alamat domisili sesuai KTP	:	Jl. Puspabangsa Blok W-XIII No 12 Tm.Cimanggu Rt 007/009 Kel Kedungwaringin Kec Tanah Sareal	:	Domicile as stated in ID Card
Nomor telepon	:	08111182123	:	Phone Number
Jabatan	:	Direktur Utama/President Director	:	Position

Menyatakan bahwa :

State that:

- | | |
|--|--|
| 1 Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Perusahaan. | 1 We are responsible for the preparation and presentation of the financial statements of the Company; |
| 2 Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat di Indonesia; | 2 The financial statements have been prepared and presented in accordance with the Indonesian Financial Accounting Standards for Private Entities; |
| 3 a Semua informasi dalam laporan keuangan telah dimuat secara lengkap dan benar; | 3 a All information contained in the financial statements is complete and correct; |
| b Laporan keuangan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; | b The financial statements do not contain misleading material information or facts, and do not omit material information and facts; |
| 4 Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Perusahaan. | 4 We are responsible for the Company internal control system. |

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement letter is made truthfully.

Bogor, 10 April 2026 / April 10, 2026

Direktur Utama/
President Director

Rino Indra Gusniawan

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Independent Auditors' Report

BADAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN/INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

Nomor/Number: 00013/2.1522/AU.8/05/1948-2/1/IV/2026

Dewan Pengawas dan Direksi/ Board of Supervisors and Directors

PERUSAHAAN UMUM DAERAH TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan **Perusahaan Umum Daerah Tirta Pakuan Kota Bogor ("Perusahaan")** terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2025, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk periode tahun yang berakhir pada tanggal tersebut serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Kami menarik perhatian pada catatan 44 atas laporan keuangan yang menjelaskan bahwa Perusahaan telah menerapkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat pada tanggal 1 Januari 2025, dengan tanggal transisi 1 Januari 2024. Sebagaimana dijelaskan dalam catatan 44, angka-angka komparatif untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 telah disajikan kembali (*restated*) untuk mencerminkan penerapan standar baru tersebut. Opini kami tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal tersebut.

Opinion

We have audited the financial statements of **Perusahaan Umum Daerah Tirta Pakuan Kota Bogor ("the Company")**, which comprise the statement of financial position as at December 31, 2025 and the statements of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity, and statement of cash flows for the year then ended and notes to the financial statement, including information on material accounting policies.

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Company as of December 31, 2025, and their financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Financial Accounting Standards for Private Entity.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Company in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

We draw attention to Note 44 to the financial statements, which explains that the Company has adopted the Financial Accounting Standards for Private Entity as of January 1, 2025, with a transition date of January 1, 2024. As described in Note 44, the comparative figures for the year ended December 31, 2024, have been restated to reflect the adoption of the new standards. Our opinion is not modified in respect of this matter.

GUNAWAN, IKHWAN, ABDURAHMAN DAN REKAN
KMK 240/MK/SK/2025

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggungjawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggungjawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggungjawab atas tata kelola bertanggungjawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspetasikan secara wajar akan mempengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit, kami juga:

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with Indonesian Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Company ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Company financial reporting process.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatements, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance but is not guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgement and maintain professional skepticism throughout the audit, we are also:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau mengabaikan pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Perusahaan.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketetapan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.
- *Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override internal control.*
- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Company internal control.*
- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*
- *Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.*
- *Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*

Kami mengkomunikasikan kepada pihak yang bertanggungjawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap definisi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

GUNAWAN IKHWAN ABDURAHMAN DAN REKAN



Paraf:

Maman Abdurahman Ak., CPA.

Nomor Izin Akuntan Publik : AP.1948 /

Public Accountant License Number : AP.1948

10 April 2026 / April 10, 2026



GUNAWAN, IKHWAN, ABDURAHMAN DAN REKAN

KMK 240/MK/SK/2025

LAPORAN KEUANGAN

Financial Statements

BADAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH
TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH
TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
As of December 31, 2025
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

		31 Desember 2024 / December 31, 2024			
		(Disajikan Kembali/ restatement (catatan/ note 44)			
	Catatan/ Notes	31 Desember 2025/ December 31, 2025		Audit	
ASET					ASSETS
Aset Lancar					Current Assets
Kas dan bank	2d, 4	78.454.282.878	79.138.902.313	79.138.902.313	Cash and bank
Deposito	2e, 5	84.000.000.000	73.000.000.000	73.000.000	Deposits
Piutang usaha bersih	2f, 6	42.527.988.125	38.702.981.531	38.702.981.531	Account receivables Net
Piutang lain-lain	7	528.471.512	262.826.211	262.826.211	Others receivables
Pendapatan yang akan diterima	8	63.137.619	55.291.043	55.291.043	Accrued revenue
Persediaan	2g, 9	16.615.190.581	21.062.416.272	22.558.555.730	Inventory
Biaya dibayar dimuka	10a	408.878.154	988.886.150	988.886.150	Prepaid expenses
Jumlah Aset Lancar		222.597.948.869	213.211.303.520	214.707.442.978	Total Current Assets
Aset Tidak Lancar					Non-Current Assts
Biaya dibayar dimuka	2p, 10b	557.348.358	1.007.952.727	1.007.952.727	Prepaid expenses
Aset tetap – bersih	2h, 11	598.029.896.690	571.706.724.930	571.706.724.930	Fixed assets - net
Aset tak berwujud - Bersih	2j, 12	1.437.109.798	799.617.680	799.617.680	Intangible assets net
Aset dalam penyelesaian	2k, 13	1.236.804.181	2.214.461.619	2.214.461.619	Contruction in Progress
Aset pajak tangguhan		14.494.710.035	13.527.605.943	-	Deferred tax assets
Uang jaminan	14	409.877.449	409.877.449	409.877.449	Security deposit
Properti investasi	2i, 15	55.316.520	62.303.870	62.303.870	Investment property
Investasi asosiasi		67.500.000	-	-	Investment
Aset lain-lain		304.064.600	1.496.139.458	-	Other assets
Jumlah Aset Lancar		616.592.627.631	591.224.683.676	576.200.938.275	Total Current Assets
JUMLAH ASET		839.190.576.500	804.435.987.196	790.908.381.253	TOTAL ASSETS

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH
TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH
TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
As of December 31, 2025
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

		31 Desember 2024 / December 31, 2024		
		(Disajikan Kembali/ restatement (catatan/ note 44)		Audit
Catatan/ Notes	31 Desember 2025/ December 31, 2025			
LIABILITAS DAN EKUITAS				LIABILITIES AND EQUITY
Liabilitas Lancar				Current Liabilities
Utang usaha	2o, 16	3.641.466.392	5.180.097.441	5.180.097.441
Utang lain-lain	17	483.260.494	544.215.456	544.215.456
Biaya yang masih harus dibayar	18	45.546.112.317	34.500.567.931	34.500.567.931
Utang pajak	2t, 19a	8.655.977.914	11.281.316.810	11.281.316.810
Titipan retribusi	2u, 20,41	1.196.585.500	412.727.100	412.727.100
Pendapatan diterima dimuka	21	502.533.179	1.339.555.339	1.339.555.339
Utang jangka panjang yang jatuh tempo	23a	10.870.553.310	10.870.553.304	10.870.553.304
Utang jangka pendek lainnya	22	17.147.423.113	18.269.038.128	18.269.038.128
Jumlah Liabilitas Lancar		88.043.910.019	82.398.071.509	82.398.071.509
Liabilitas Jangka Panjang				Long Term Liabilities
Utang bank	23b	70.708.085.965	81.578.639.269	81.578.639.269
Jaminan pelanggan	24	2.903.832.025	2.899.950.175	2.899.950.175
Imbalan pasca kerja	2n, 25	45.506.703.275	42.335.796.102	43.159.561.266
Total Liabilitas Jangka Panjang		119.118.621.265	126.814.385.546	127.638.150.710
Jumlah Liabilitas		207.162.533.484	209.212.457.055	210.036.222.219
Ekuitas				Equity
Modal pemerintah kota bogor	26	342.951.510.000	327.951.510.000	327.951.510.000
Modal pemerintah pusat	26	29.120.142.000	29.120.142.000	29.120.142.000
Cadangan umum	27	68.912.783.973	53.542.051.643	53.542.051.643
Komponen ekuitas lainnya		(11.421.735.344)	(6.288.838.128)	-
Saldo laba	28	143.307.970.305	133.175.889.593	111.140.254.122
Laba tahun berjalan	29	59.157.372.082	57.722.775.033	59.118.201.269
Jumlah Ekuitas		632.028.043.016	595.223.530.141	580.872.159.034
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		839.190.576.500	804.435.987.196	790.908.381.253
				TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH
TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN
Tanggal 31 Desember 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH
TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR
STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER
COMPREHENSIVE INCOME
As of December 31, 2025
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

		31 Desember 2024 / December 31, 2024	(Disajikan Kembali/ restatement (catatan/ note 44)	Audit	
	Catatan /Notes	31 Desember 2025/ December 31, 2025			
Pendapatan					Incomes
Penjualan air	2q, 30	384.005.995.620	375.897.597.995	375.897.597.995	Water Sales
Penjualan non air	2q, 31	23.126.552.908	23.878.496.064	23.878.496.064	Non water sales
Jumlah Pendapatan		407.132.548.528	399.776.094.059	399.776.094.059	Total Incomes
Harga Pokok Pendapatan					Cost Of Revenues
Beban sumber air	2q, 32	10.981.599.381	11.614.029.850	20.613.561.397	Water Source Expense
Beban pengolahan air	2q, 33	60.468.162.175	55.932.072.030	46.932.540.483	Water Treatment Expense
Beban transmisi dan distribusi	2q, 34	97.454.370.651	87.100.765.059	87.100.765.059	Transmission and Distribution Expense
Beban perpompaan	2q, 35	4.806.069.273	3.691.722.819	3.691.722.819	Pumping Expense
Beban perencanaan teknik	2q, 36	8.317.006.778	7.917.702.228	7.917.702.228	Technical Planning Expense
Jumlah Harga Pokok Pendapatan		182.027.208.258	166.256.291.986	166.256.291.986	Total Cost Of Revenues
Laba Kotor		225.105.340.270	233.519.802.073	233.519.802.073	Gross profit
Beban Usaha					Operating Expenses
Beban administrasi dan umum	2q, 37	115.811.763.875	128.436.279.990	128.436.279.990	General and administrative expenses
Beban hubungan pelanggan	2q, 38	37.879.103.272	37.642.326.140	37.642.326.140	Customer relations expenses
Jumlah Beban Usaha		153.690.867.147	166.078.606.130	166.078.606.130	Total Operating expenses
Laba Usaha		71.414.473.123	67.441.195.943	67.441.195.943	Operating Income
Pendapatan (Beban) Lain-Lain					Others Income (Expense)
Pendapatan lain-lain	2q, 39	9.171.819.692	12.095.158.947	12.095.158.947	Other incomes
Beban lain-lain	2q, 40	(1.202.426.365)	(107.417.901)	(107.417.901)	Other expenses
Jumlah Pendapatan Lain-Lain - Bersih		7.969.393.327	11.987.741.046	11.987.741.046	Total Other Income - net
Laba sebelum pajak		79.383.866.450	79.428.936.989	79.428.936.989	Profit Before Tax
Beban Pajak					Tax Expense
Pajak kini	2t, 19b	(19.745.858.220)	(20.310.735.720)	(20.310.735.720)	Current tax
Pajak tangguhan	2t, 19b	(480.636.148)	(1.395.426.236)	-	Deferred tax expense
Jumlah Beban Pajak		(20.226.494.368)	(21.706.161.956)	(20.310.735.720)	Total Tax Expense
Laba Bersih		59.157.372.082	57.722.775.033	59.118.201.269	Net Profit
Penghasilan Komprehensif Lain:					Other Comprehensive Income:
Pengukuran kembali imbalan pasca kerja		6.580.637.456	8.062.612.985	-	Remeasurement of Post-employment benefits
Pajak terkait		(1.447.740.240)	(1.773.774.857)	-	Related tax effects
Jumlah Penghasilan Komprehensif Lain		5.132.897.216	6.288.838.128	-	Total Other Comprehensive Income
Laba Komprehensif Tahun Berjalan		54.024.474.866	51.433.936.905	59.118.201.269	Comprehensive Income for the Year

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH
TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH
TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR
STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
For The Year Ended December 31, 2025
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

	Modal Pemerintah / Government Equity		Komponen Ekuitas lainnya / Other components of Equity	Cadangan umum / General Allowance	Saldo Laba / Retained earnings	Laba Tahun Berjalan / Profit for the Year	Jumlah Ekuitas / Total equity	
	Pusat / Central	Kota Bogor / Bogor City						
Saldo 31 Desember 2023	32.762.894.200	280.132.242.000	-	35.630.193.876	106.522.708.315	51.176.736.477	506.224.774.868	Balance as of December 31, 2023
Pembagian Saldo laba 2023	-	-	-	-	-	(51.176.736.477)	(51.176.736.477)	Appropriation of retained earnings for 2023
Cadangan Umum Belum ditentukan penggunaannya	-	-	-	17.911.857.767	-	-	17.911.857.767	General reserve Unappropriated retained earning
Tambahan Modal Modal pemerintah pusat ditetapkan statusnya	-	47.819.268.000	-	-	4.617.545.807	-	4.617.545.807	Additional capital Central government capital with determined Status
Laba Tahun berjalan	(3.642.752.200)	-	-	-	-	59.118.201.269	(3.642.752.200)	Profit for the year
Saldo 31 Desember 2024	29.120.142.000	327.951.510.000	-	53.542.051.643	111.140.254.122	59.118.201.269	580.872.159.034	Balance as of December 31, 2024

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH
TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH
TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR
STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
For The Year Ended December 31, 2025
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

	Modal Pemerintah / Government Equity		Komponen Ekuitas lainnya/ Other components of Equity	Cadangan umum /General Allowance	Saldo Laba /Retained earnings	Lab a Tahun Berjalan / Profit for the Year	Jumlah Ekuitas / Total equity	
	Pusat / Central	Kota Bogor / Bogor City						
Saldo 31 Desember 2024	29.120.142.000	327.951.510.000	-	53.542.051.643	111.140.254.122	59.118.201.269	580.872.159.034	Balance as of December 31, 2024
Koreksi atas penerapan Standar Akuntansi Keuangan baru:								<i>Correction of the Application of Standards New Financial Accounting Standards :</i>
Pajak tangguhan					13.149.257.322		13.149.257.322	<i>Deferred tax</i>
Pengukuran kembali imbalan pasca kerja	-	-	-	-	8.886.378.149	-	8.886.378.149	<i>Remeasurement of post employment benefits</i>
Manfaat pajak tangguhan	-	-	-	-	-	(1.395.426.236)	(1.395.426.236)	<i>Deferred tax benefit</i>
Penghasilan komprehensif lainnya	-	-	(6.288.838.128)	-	-	-	(6.288.838.128)	<i>Other comprehensive income</i>
Saldo 1 Januari 2025	29.120.142.000	327.951.510.000	(6.288.838.128)	53.542.051.643	133.175.889.593	57.722.775.033	595.223.530.141	Balance as of January 1, 2025
Pembagian laba	-	-	-	-	-	(57.722.775.033)	(57.722.775.033)	<i>Profit sharing:</i>
Cadangan umum	-	-	-	15.370.732.330	-	-	15.370.732.330	<i>General reserve</i>
Belum ditentukan penggunaannya	-	-	-	-	10.132.080.712	-	10.132.080.712	<i>Unappropriated retained earning</i>
Tambahan modal	1b	15.000.000.000	-	-	-	-	15.000.000.000	<i>Additional capital</i>
Lab a tahun berjalan	-	-	-	-	-	59.157.372.082	59.157.372.082	<i>Profit for the year</i>
Penghasilan komprehensif lain	-	-	(5.132.897.216)	-	-	-	(5.132.897.216)	<i>Other comprehensive income</i>
Saldo 31 Desember 2025	29.120.142.000	342.951.510.000	(11.421.735.344)	68.912.783.973	143.307.970.305	59.157.372.082	632.028.043.016	Balance as of December 31, 2025

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH
TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun yang Berakhir
Tanggal 31 Desember 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH
TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR
STATEMENT OF CASH FLOWS
For The Year Ended
December 31, 2025
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

	2025	Catatan/ Notes	2024	
Laba Bersih Tahun Berjalan	59.157.372.082		57.722.775.033	Net Profit for The Year
Penyesuaian untuk:				Adjustment for:
Penyusutan dan amortisasi	71.542.557.953	11	64.047.829.949	Depreciation and amortization
Penurunan nilai aset lain-lain	1.192.074.858		-	Impairment of other assets
Laba Operasi Sebelum Perubahan Dalam Aktivitas Operasi	131.892.004.893		121.867.343.530	Profit Operation Before Changing in Activity
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Kenaikan (Penurunan) untuk:				Increase (Decrease) for:
Piutang usaha	(3.825.006.594)		745.636.688	Account receivables
Piutang lain-lain	(265.645.301)		165.541.451	Others account receivables
Pendapatan yang akan diterima	(7.846.576)		6.643.343	Accrued revenues
Persediaan	4.447.225.691		(3.135.370.869)	Inventory
Biaya dibayar dimuka	580.007.996		(455.602.707)	Prepaid expenses
Sewa dibayar dimuka	450.604.369		243.773.737	Prepaid rent
Aset pajak tangguhan	(967.104.092)		-	Deferred tax assets
Utang usaha	(1.538.631.049)		2.049.479.676	Trade payables
Utang lain-lain	(60.954.962)		(98.997.100)	Other payables
Biaya yang masih harus dibayar	11.045.544.386		(13.121.001.957)	Accrued expense
Pendapatan diterima dimuka	(837.022.160)		247.130.732	Unearned revenue
Utang pajak	(2.625.338.896)		2.043.267.876	Taxes payable
Titipan retribusi	783.858.400		(207.706.600)	Collected retribution deposits
Utang jangka pendek lainnya	(1.121.615.015)		7.055.090.761	Other short-term liabilities
Uang jaminan pelanggan	3.881.850		(15.436.350)	Customer security deposits
Imbalan kerja	3.170.907.173		5.337.245.982	Employee benefits
Arus Kas Bersih Diperoleh Dari Aktivitas Operasi	141.124.870.113		122.630.299.645	Net Cash Flows Provided by Operating Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Kenaikan (Penurunan) untuk:				Increase (Decrease) for:
Perolehan aset tetap	(97.627.410.481)	11	(140.956.060.993)	Acquisition of fixed assets
Penjualan aset tetap	-		7.243.510.320	Sale of fixed assets
Perolehan aset tak berwujud	(868.824.000)		(852.925.525)	Acquisition of intangible assets
Aset dalam penyelesaian	977.657.438		7.972.037.405	Construction in progress
Deposito	(11.000.000.000)		(8.000.000.000)	Deposits
Investasi asosiasi	(67.500.000)		-	Investment
Arus Kas Bersih Digunakan Untuk Aktivitas Investasi	(108.586.077.043)		(134.593.438.793)	Net Cash Flows Used in Investing Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Kenaikan (Penurunan) untuk:				Increase (Decrease) for:
Utang bank	(10.870.553.298)		(10.870.553.301)	Bank Loans
Modal dikurangi laba tahun berjalan	(22.352.859.207)		15.529.182.897	Capital less profit for the year
Arus Kas Bersih Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Pendanaan	(33.223.412.505)		4.658.629.596	Net Cash Flows Provided by (Used in) Financing Activities
PENURUNAN BERSIH KAS DAN BANK	(684.619.435)		(7.304.509.552)	NET DECREASE CASH IN BANK
Kas dan bank awal tahun	79.138.902.313		86.443.411.865	Cash and bank at beginning of the year
KAS DAN BANK AKHIR TAHUN	78.454.282.878	4	79.138.902.313	CASH AND BANK AT END OF YEAR

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Notes to Financial Statements

BADAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH
TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025**

**Serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH
TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025**

**And For The Year Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

1 UMUM

a Pendirian dan Informasi Umum

Perusahaan Umum Daerah Tirta Pakuan Kota Bogor ("Perusahaan") didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Bogor No. 5 Tahun 1977 tanggal 31 Maret 1977 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Dati II Bogor No. 07 Tahun 1977 seri D dan perubahan No. 4 Tahun 1990 tanggal 10 Januari 1990, Perda No. 04 tahun 2008 tanggal 28 April 2008 tentang Perusahaan Umum Daerah Tirta Pakuan Kota Bogor, kemudian Perda No. 16 tahun 2011 tanggal 07 Desember 2011 tentang Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Pakuan Kota Bogor dan terakhir Peraturan Daerah Kota Bogor, Nomor 21 Tahun 2019, tentang Perusahaan Umum Daerah Tirta Pakuan Kota Bogor.

Maksud, tujuan kegiatan usaha Perusahaan sesuai dengan Peraturan Daerah No. 21 tahun 2019 pasal 6, 7 dan 8 adalah Perusahaan memiliki maksud untuk turut melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program Pemerintah Daerah di bidang ekonomi dan pembangunan daerah, terutama di bidang penyediaan pelayanan Air Minum kepada masyarakat, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya air berdasarkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.

Perusahaan memiliki tujuan untuk:

- Memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah;
- Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan pelayanan air minum untuk pemenuhan hajat hidup masyarakat; dan
- Memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Kegiatan usaha perusahaan adalah:

- Dalam melaksanakan maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dan pasal 7, Perusahaan melakukan kegiatan usaha utama yaitu penyediaan air minum.
- Penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyelenggaraan SPAM.
- Dalam menyelenggarakan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlandaskan:
 - Kebijakan dan strategi penyelenggaraan SPAM; dan
 - Rencana induk SPAM
- SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan dengan tujuan:
 - Tersedianya pelayanan air minum untuk memenuhi hak rakyat atas air minum;
 - terwujudnya pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga yang terjangkau;

1 GENERAL

a Establishment and General Information

Perusahaan Umum Daerah Tirta Pakuan Kota Bogor ("Company") was established based on regulation of Bogor Municipal no.5, year 1977 dated March 31 1977 and regulation of published in Bogor no.07 year 1977 D Series and was change no.4 year 1990, dated January 10, 1990. Regional Regulation No. 04 of 2008 dated April 28, 2008 concerning Perusahaan Umum Daerah Tirta Pakuan Kota Bogor, which was subsequently amended by Regional Regulation No. 16 of 2011 dated December 7, 2011 concerning the Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Pakuan Kota Bogor, and most recently by Bogor City Regional Regulation No. 21 of 2019 concerning the Perusahaan Umum Daerah Tirta Pakuan Kota Bogor.

The purpose and objective of the Company's business activities in accordance with Regional Regulation No. 21 of 2019, articles 6, 7 and 8, is that the Company has the objective of participating in implementing and supporting Regional Government policies and programs in the field of regional economics and development, especially in the field of providing Drinking Water services to the community, as well as optimizing the use of water resources based on Good Corporate Governance.

The Company has the following objectives:

- To contribute to the development of the regional economy;
- To provide public benefits through the provision of drinking water services to meet the essential needs of the community; and
- To generate profit and/or earnings.

Business Activities

- In carrying out the purposes and objectives as referred to in Articles 6 and 7, Company conducts its principal business activity in the provision of drinking water
- The provision of drinking water as referred to in paragraph (1) is carried out through the implementation of a Drinking Water Supply System (Sistem Penyediaan Air Minum or "SPAM").
- The implementation of SPAM as referred to in paragraph (2) is based on:
 - Policies and strategies for the implementation of SPAM; and
 - The SPAM master plan.
- The implementation of SPAM as referred to in paragraph (2) aims to:
 - Ensure the availability of drinking water services to fulfill the public's right to drinking water;
 - Achieve quality drinking water management and services at affordable prices;

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH
TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025
Serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH
TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
And For The Year Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

1 UMUM (Lanjutan)

a Pendirian dan Informasi Umum (Lanjutan)

- c. Tercapainya kepentingan yang seimbang antara Perusahaan dan pemangku kepentingan; dan
- d. Tercapainya penyelenggaraan air minum yang efektif dan efisien untuk memperluas cakupan pelayanan air minum.
5. Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sepanjang mendukung secara finansial terhadap kegiatan usaha utama, Perusahaan dapat melaksanakan kegiatan usaha dalam rangka optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya yang sudah dimiliki dan/atau dikuasai Perusahaan.
6. Wilayah operasional Perusahaan adalah wilayah administrasi Kota Bogor, namun dapat dikembangkan ke wilayah lain di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Walikota berdasarkan usulan Direksi.

Lokasi kantor Perusahaan berada di Jl. Siliwangi No. 121, Bogor 16142

Visi dan Misi:

Sesuai keputusan Direksi PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor No.060/Kep.70/PDAM/2001 tanggal 21 Nopember 2001, visi dan misi Perusahaan sebagai berikut:

Visi : Perusahaan sehat melalui tata kelola yang baik (Good Corporate Governance) dalam mewujudkan pelayanan prima kepada pelanggan.

Misi : Meningkatkan cakupan pelayanan dengan terpenuhinya kualitas, kuantitas, dan kontinuitas untuk mencapai masyarakat sehat, dan; Meningkatkan kinerja melalui pengelolaan yang efektif, efisien, dan berwawasan lingkungan dengan SDM yang berkualitas.

Moto Perusahaan adalah **"Handal dalam pekerjaan prima dalam pelayanan"**

b Permodalan

Modal perusahaan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2023 tanggal 18 April 2024 tentang penyertaan modal daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Tirta Pakuan Kota Bogor pasal 3 modal dasar Perusahaan berupa uang dan barang sebesar Rp 1.000.000.000.000, modal disetor Pemerintah Daerah sampai dengan 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp 280.132.242.000 berupa uang dan barang dengan rincian sebagai berikut:

1 GENERAL (Continued)

a Establishment and General Information (Continued)

- c. Maintain a balanced interest between Company and its stakeholders; and
- d. Ensure effective and efficient drinking water services to expand service coverage.
5. In addition to its principal business activity as referred to in paragraph (1), and insofar as it financially supports the principal business activity, Company may conduct other business activities to optimize the utilization of resources already owned and/or controlled by the Company.
6. The operational area of Company covers the administrative area of Bogor City and may be expanded to other regions within the Republic of Indonesia.
7. Business development as referred to in paragraph (5) shall be determined by the Mayor upon the proposal of the Board of Directors.

The Company's office is located at Jl. Siliwangi No. 121, Bogor 16142.

Vision and Mission:

Based on the Decree of the Board of Directors of Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor No. 060/KEP.70/PERUMDA/2001 dated November 21, 2001, the Company's vision and mission are as follows:

Vision : A healthy company through good corporate governance in realizing excellent service to customers.

Mision : Increasing service coverage by fulfilling quality, quantity, and continuity to achieve a healthy society, and; Improving performance through effective, efficient, and environmentally friendly management with quality human resources.

The Company's motto is: **"Reliable in Work, Excellent in Service."**

b Capital

The company's capital is in accordance with Bogor City Regional Regulation Number 3 of 2023 dated April 18, 2024 concerning regional capital participation in the Perusahaan Umum Daerah Tirta Pakuan Kota Bogor, article 3, the Company's authorized capital in the form of money and goods amounting to Rp 1,000,000,000,000, the paid-in capital of the Regional Government up to December 31, 2020, amounting to Rp 280,132,242,000 in the form of money and goods with the following details:

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH
TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025
Serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH
TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
And For The Year Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

1 UMUM (Lanjutan)

b Permodalan (Lanjutan)

- a. sampai dengan tahun 2010 sebesar Rp65.608.665.588,83 (enam puluh lima miliar enam ratus delapan juta enam ratus enam puluh lima ribu lima ratus delapan puluh delapan koma delapan tiga rupiah);
- b. Tahun 2011 sebesar Rp19.377.701.000,00 (sembilan belas miliar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus satu ribu rupiah);
- c. Tahun 2012 sebesar Rp29.708.435.000,00 (dua puluh sembilan miliar tujuh ratus delapan juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- d. Tahun 2013 sebesar Rp25.310.640.294,00 (dua puluh lima miliar tiga ratus sepuluh juta enam ratus empat puluh ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah);
- e. Tahun 2014 sebesar Rp31.073.447.956,00 (tiga puluh satu miliar tujuh puluh tiga juta empat ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah);
- f. Tahun 2015 sebesar Rp10.921.110.161,17 (sepuluh miliar sembilan ratus dua puluh satu juta seratus sepuluh ribu seratus enam puluh satu koma satu tujuh rupiah);
- g. Tahun 2016 sebesar Rp52.898.242.000,00 (lima puluh dua miliar delapan ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah);
- h. Tahun 2017 sebesar Rp10.934.000.000,00 (sepuluh miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta rupiah);
- i. Tahun 2019 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); dan
- j. Tahun 2020 sebesar Rp24.300.000.000,00 (dua puluh empat miliar tiga ratus juta rupiah).

Berdasarkan pasal 4 Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2023 tanggal 18 April 2024 Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini dilakukan Penyertaan Modal dalam Bentuk Uang dan Penyertaan Modal atas Barang Milik Daerah kepada Perusahaan sebesar Rp180.955.268.000,00 (seratus delapan puluh miliar sembilan ratus lima puluh lima juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- a. Penyertaan Modal dalam Bentuk Uang yaitu sebesar Rp133.136.000.000,00 (seratus tiga puluh tiga miliar seratus tiga puluh enam juta rupiah);
- b. Penyertaan Modal atas Barang Milik Daerah dengan nilai Rp47.819.268.000,00 (empat puluh tujuh miliar delapan ratus sembilan belas juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah).

1 GENERAL (Continued)

b Capital (Continued)

- a. Up to 2010 amounted to Rp65,608,665,588.83 (sixty-five billion six hundred eight million six hundred sixty-five thousand five hundred eighty-eight point eight three rupiah);
- b. In 2011 amounted to Rp19,377,701,000.00 (nineteen billion three hundred seventy-seven million seven hundred one thousand rupiah);
- c. In 2012 amounted to Rp29,708,435,000.00 (twenty-nine billion seven hundred eight million four hundred thirty-five thousand rupiah);
- d. In 2013 amounted to Rp25,310,640,294.00 (twenty-five billion three hundred ten million six hundred forty thousand two hundred ninety-four rupiah);
- e. In 2014 amounted to Rp31,073,447,956.00 (thirty-one billion seventy-three million four hundred forty-seven thousand nine hundred fifty-six rupiah);
- f. In 2015 amounted to Rp10,921,110,161.17 (ten billion nine hundred twenty-one million one hundred ten thousand one hundred sixty-one point one seven rupiah);
- g. In 2016 amounted to Rp52,898,242,000.00 (fifty-two billion eight hundred ninety-eight million two hundred forty-two thousand rupiah);
- h. In 2017 amounted to Rp10,934,000,000.00 (ten billion nine hundred thirty-four million rupiah);
- i. In 2019 amounted to Rp10,000,000,000.00 (ten billion rupiah); and
- j. In 2020 amounted to Rp24,300,000,000.00 (twenty-four billion three hundred million rupiah).

Based on to Article 4 of Regional Regulation No. 3 of 2023 dated April 18, 2024, additional capital participation in the form of cash and regional government assets was made to Company amounting to Rp180,955,268,000.00 (one hundred eighty billion nine hundred fifty-five million two hundred sixty-eight thousand rupiah), with details as follows:

- a. Capital Participation in the Form of Cash amounting to Rp133,136,000,000.00 (one hundred thirty-three billion one hundred thirty-six million rupiah);
- b. Capital Participation in the Form of Regional Government Assets amounting to Rp47,819,268,000.00 (forty-seven billion eight hundred nineteen million two hundred sixty-eight thousand rupiah).

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH
TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025
Serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH
TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
And For The Year Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

1 UMUM (Lanjutan)

b Permodalan (Lanjutan)

Pemenuhan Penyertaan Modal dalam Bentuk Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan secara bertahap sampai dengan Tahun 2027 sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp35.271.000.000,00 (tiga puluh lima miliar dua ratus tujuh puluh satu juta rupiah);
- b. Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp16.500.000.000,00 (enam belas miliar lima ratus juta rupiah); dan
- c. Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp81.365.000.000,00 (delapan puluh satu miliar tiga ratus enam puluh lima juta rupiah).

Total penyertaan modal Pemerintah Kota Bogor yang telah disetor:

Sampai dengan tahun 2020

Tahun 2024

Tahun 2025

Jumlah

280.132.242.000

47.819.268.000

15.000.000.000

342.951.510.000

Up to 2020

Year 2024

Year 2025

Total

Modal Pemerintah Pusat Yang Belum Ditetapkan Statusnya

Adanya pengakuan penyertaan modal Pemerintah Pusat yang belum ada Berita Acara Serah Terima ke PEMDA Kota Bogor, dimana aset tersebut dioperasikan/digunakan sebesar Rp29.120.142.200 terdiri dari:

Pemasangan Pipa HDPE tahun 2010

12.885.773.000

Installation of HDPE Pipes in 2010

Instalasi Pengolahan Air Palsari tahun 2010

3.642.752.200

Palsari Water Treatment Plant Installation in 2010

Bangunan Prasedimentasi & Saluran Trandist

16.234.369.000

Pre-sedimentation Building & Trandist Channel

Ditetapkan statusnya

(3.642.752.200)

Status determined

Jumlah

29.120.142.000

Total

c Pembagian Laba

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 21 Tahun 2019 tanggal 07 Desember 2019 tentang Pengelolaan PERUMDA Tirta Pakuan Kota Bogor Pasal 72 ayat (2) menetapkan penggunaan laba bersih setelah Pajak Penghasilan sebagai berikut:

- Pemenuhan dana cadangan peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perusahaan;
- Dividen yang menjadi hak daerah tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas; dan

1 GENERAL (Continued)

b Capital (Continued)

Fulfillment of Capital Participation in the Form of Cash as referred to in Article 4 letter a shall be carried out in stages up to Fiscal Year 2027 in accordance with the financial capability of the Region, with details as follows:

- a. Budget Year 2025 amounting to Rp35,271,000,000.00 (thirty-five billion two hundred seventy-one million rupiah);
- b. Budget Year 2026 amounting to Rp16,500,000,000.00 (sixteen billion five hundred million rupiah); and
- c. Budget Year 2027 amounting to Rp81,365,000,000.00 (eighty-one billion three hundred sixty-five million rupiah).

Total capital participation of the Bogor City Government that has been paid in:

Up to 2020

Year 2024

Year 2025

Total

Central Government Capital Whose Status Has Not Yet Been Determined

There is recognition of Central Government capital participation for which a Handover Official Report (Berita Acara Serah Terima) has not yet been issued to the Regional Government of Bogor City, where the assets have been operated/used amounting to Rp29,120,142,200 consisting of:

Installation of HDPE Pipes in 2010

Palsari Water Treatment Plant Installation in 2010

Pre-sedimentation Building & Trandist Channel

Status determined

c Profit Sharing

Based on Regional Regulation Number 21 of 2019 dated December 7, 2019 concerning the Management of PERUMDA Tirta Pakuan Kota Bogor, Article 72 paragraph (2) stipulates the use of net profit after Income Tax as follows:

- Fulfillment of reserve funds for increasing the quantity, quality, and continuity of public services, public services, basic services, and pioneering business of Company;
- Dividends which become the right of the region and tantiem for members of the Board of Directors and the Board of Supervisors; and

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH
TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025
Serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH
TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
And For The Year Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

1 UMUM (Lanjutan)

c Pembagian Laba (Lanjutan)

- Bonus untuk pegawai ; dan / atau penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pembagian laba tahun 2024 ditetapkan berdasarkan keputusan Walikota Bogor Nomor 900.1.13.2/Kep.226-Bag.Ekon/2025 tentang penggunaan laba Perusahaan Umum Daerah Kota Bogor Tahun Buku 2024 tanggal 8 Juli 2024.

d Susunan Direksi, Dewan Pengawas dan Pegawai

Perusahaan merupakan perusahaan daerah milik Pemerintah Kota Bogor. Dalam menjalankan aktivitas perusahaan dilaksanakan oleh Dewan Pengawas dan Direksi.

Dewan Pengawas

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Pakuan Kota Bogor Bagian Ketiga Dewan Pengawas Pasal 19 ayat (1) & (2) menyatakan bahwa anggota Dewan Pengawas Perusahaan dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan unsur lainnya dapat terdiri dari pejabat Pemerintah pusat dan pejabat pemerintah daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.

Keputusan Walikota Bogor Nomor : 900.1.13.2/Kep.80-Bag.Ekon/2024 Tahun 2024 tanggal 27 Februari 2024 tentang Susunan Keanggotaan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Tirta Pakuan Kota Bogor Periode 2024-2028; dan Keputusan Walikota Bogor Nomor : 900.1.13.2/Kep.330-Bag.Ekon/2024 Tahun 2024 tanggal 1 Oktober 2024 memutuskan dan menetapkan Susunan Keanggotaan Dewan Pengawas Perusahaan periode 2020-2028 sebagai berikut :

Ketua	Dr. Ir. Hj. Syarifah Sofiah Dwikorawati, M.Si
Anggota	Dr. Hendra Setiawan, SE., MM., CMA., CSRS
Anggota	Drs. Hanafi, M.Si

Dewan Direksi

Keputusan Walikota Bogor Nomor : 900.1.13.2/Kep.393.-Bag.Ekon/2025 tanggal 27 November 2025 tentang pengangkatan kembali saudara Rino Indra Gusniawan, ST., MM sebagai Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Tirta Pakuan Kota Bogor Periode 2025-2030, susunan Direksi sebagai berikut:

1 GENERAL (Continued)

c Profit Sharing (Continued)

- Bonuses for employees; and/or other uses of profit in accordance with the provisions of laws and regulations.

The distribution of profit for 2024 was determined based on the Decree of the Mayor of Bogor Number 900.1.13.2/Kep.226-Bag.Ekon/2025 concerning the use of profit of Perusahaan Umum Daerah Kota Bogor for Fiscal Year 2024 dated July 8, 2024.

d Composition of the Board of Directors, Board of Supervisors and Employees

Company is a regional company owned by the Government of Bogor City. In carrying out its business activities, the Company is managed by the Board of Supervisors and the Board of Directors.

Board of Supervisors

Based on Bogor City Regional Regulation Number 21 of 2019 concerning the Management of Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Pakuan of Bogor City, Part Three Board of Supervisors Article 19 paragraphs (1) & (2) states that members of the Board of Supervisors of Company may consist of independent elements and other elements in accordance with the provisions of laws and regulations. Other elements may consist of Central Government officials and Regional Government officials who are not assigned to carry out public services.

Decree of the Mayor of Bogor Number: 900.1.13.2/Kep.80-Bag.Ekon/2024 of 2024 dated February 27, 2024 concerning the Composition of the Board of Supervisors of the Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Tirta Pakuan of Bogor City for the 2024–2028 Period; and Decree of the Mayor of Bogor Number: 900.1.13.2/Kep.330-Bag.Ekon/2024 of 2024 dated October 1, 2024 resolved and determined the Composition of the Board of Supervisors of Company for the 2020–2028 period as follows:

Chairman
Member
Member

Board of Directors

Decree of the Mayor of Bogor Number: 900.1.13.2/Kep.393.-Bag.Ekon/2025 dated November 27, 2025 concerning the reappointment of Mr. Rino Indra Gusniawan, ST., MM as President Director of the Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Tirta Pakuan kota Bogor for the 2025–2030 Period, the composition of the Board of Directors is as follows:

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH
TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025
Serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH
TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
And For The Year Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

1 UMUM (Lanjutan)

d Susunan Direksi, Dewan Pengawas dan Pegawai (lanjutan)

31 Desember 2025

Direktur Utama
Direktur Umum
Direktur Teknik

H. Rino Indira Gusniawan
-
-

Keputusan Walikota Bogor Nomor : 539.45-849 Tahun 2020 tentang pengangkatan Direksi Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Tirta Pakuan Kota Bogor Periode 2020-2025; memutuskan dan menetapkan mengangkat Direksi Perusahaan periode 2020-2025 sebagai berikut:

31 Desember 2024

Direktur Utama
Direktur Umum
Direktur Teknik

H. Rino Indira Gusniawan
H. Rivelino Rizky
Ardani Yusuf

Direktur Utama membawahi:

1. Direktur Teknik
2. Direktur Umum
3. Manajer Satuan Pengawasan Internal
4. Manajer QHSE
5. Sekretaris Perusahaan
6. Manajer Perencanaan & Pengembangan

Direktur Teknik membawahi 3 Departemen, terdiri dari:

1. Manajer Produksi
2. Manajer NRW Dan Transmisi dan Distribusi.
3. Manajer Perawatan

Direktur Umum membawahi 4 Departemen, terdiri dari:

1. Manajer Keuangan
2. Manajer Sumber Daya Manusia
3. Manajer Humas Dan Pelayanan Pelanggan
4. Manajer Perlengkapan

Dalam tahun 2025 dan 2024 Jumlah karyawan Perusahaan sebanyak 651 dan 661 orang, yang terdiri dari:

<u>Status</u>	<u>2025</u>
Pegawai Tetap	414
PKWT	8
Pegawai Outsourcing	229
Jumlah	651

e Penyelesaian Laporan Keuangan

Manajemen Perusahaan, yang diwakili oleh H. Rino Indira Gusniawan, Direktur Utama, bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang telah diselesaikan dan disetujui untuk diterbitkan oleh manajemen Perusahaan pada tanggal 9 April 2026.

1 GENERAL (Continued)

d Composition of the Board of Directors, Board of Supervisors and Employees (continued)

31 December 2025

President Director
Director of General Affairs
Technical Director

Decree of the Mayor of Bogor Number: 539.45-849 of 2020 concerning the appointment of the Board of Directors of the Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Tirta Pakuan kota Bogor for the 2020-2025 Period; resolved and determined the appointment of the Board of Directors of Company for the 2020-2025 period as follows:

31 December 2024

President Director
Director of General Affairs
Technical Director

The President Director supervises:

1. Technical Director
2. General Director
3. Internal Supervisory Unit Manager
4. QHSE Manager
5. Corporate Secretary
6. Planning & Development Manager

The Technical Director supervises 3 Departments, consisting of:

1. Production Manager
2. NRW and Transmission and Distribution Manager.
3. Maintenance Manager

The Director of General Affairs oversees four departments, consisting of:

1. Finance Manager
2. Human Resources Manager
3. Public Relations and Customer Service Manager
4. Equipment Manager

In 2025 and 2024, the Company's total number of employees will be 651 and 661 people, consisting of:

<u>2025</u>	<u>2024</u>	
414	415	Permanent Employees
8	23	PKWT
229	223	Outsourcing Employees
651	661	Total

e Completion of the Financial Statements

The Company's Management, represented by H. Rino Indira Gusniawan, President Director, is responsible for the preparation and presentation of the financial statements which have been completed and approved for issuance by the Company's management on April 9, 2026.

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH
TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025
Serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH
TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
And For The Year Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

1 UMUM (Lanjutan)

f Pernyataan Kepatuhan Penyusunan Laporan Keuangan

Direksi Perusahaan menyatakan bahwa laporan keuangan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 dengan informasi komparatif pendekatan angka koresponden untuk tahun 2024 disajikan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK-EP) dan telah memenuhi persyaratannya.

2 IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

a Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan entitas privat (SAK EP), yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK)

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan adalah selaras dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Laporan keuangan, kecuali untuk laporan arus kas, disusun berdasarkan dasar akrual dengan menggunakan konsep harga perolehan, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan adalah Rupiah, yang juga merupakan mata uang fungsional Perusahaan.

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan entitas privat mengharuskan penggunaan estimasi dan asumsi. Hal tersebut juga mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan. Area yang kompleks atau memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau area dimana asumsi dan estimasi dapat berdampak signifikan terhadap laporan keuangan diungkapkan di Catatan 3

b Periode Pembukuan

Periode Pembukuan adalah tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

1 GENERAL (Continued)

f Statement of Compliance in the Preparation of the Financial Statements

The Board of Company states that the financial statements for the year ended December 31, 2025 with comparative information using the corresponding figures approach for the year 2024 have been presented in accordance with the Financial Accounting Standards for Private Entities (SAK-EP) and have fulfilled the requirements.

2 SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

a Basis of Preparation of the Financial Statements

The financial statements have been presented in accordance with the financial accounting standards for private entities (SAK EP), issued by the Financial Accounting Standards Board of the Indonesian Institute of Accountants (DSAK).

The accounting policies applied in the preparation of the financial statements are consistent with the accounting policies applied in the preparation of the financial statements for the years ended December 31, 2025.

The financial statements, except for the statement of cash flows, are prepared on the accrual basis using the historical cost concept, except for certain accounts which are prepared based on other measurements as described in the accounting policies of each respective account.

The statement of cash flows is prepared using the direct method by classifying cash flows into operating, investing and financing activities.

The reporting currency used in the preparation of the financial statements is Rupiah, which is also the functional currency of the Company.

The preparation of financial statements in accordance with financial accounting standards for entities private accountability requires the use of estimates and assumptions. It also requires management to make judgments in the process of applying the Company's accounting policies. Areas that are complex or require a higher level of judgment or areas where assumptions and estimates may have a significant impact on the financial statements are disclosed in Note 3.

b Accounting Period

The Accounting Period is from January 1 to December 31.

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH
TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025
Serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH
TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
And For The Year Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2 IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(Lanjutan)**

c Klasifikasi Lancar dan Tidak Lancar

Perusahaan menyajikan aset dan liabilitas dalam laporan posisi keuangan berdasarkan klasifikasi lancar/tak lancar. Suatu aset disajikan lancar bila:

1. akan direalisasi, dijual atau dikonsumsi dalam siklus operasi normal;
2. untuk diperdagangkan; atau
3. akan direalisasi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan, atau kas atau setara kas kecuali yang dibatasi penggunaannya atau akan digunakan untuk melunasi suatu liabilitas dalam paling lambat 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Seluruh aset lain diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar

Suatu liabilitas disajikan lancar bila:

1. akan dilunasi dalam siklus operasi normal;
2. untuk diperdagangkan;
3. akan dilunasi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan; atau
4. tidak ada hak tanpa syarat untuk menangguhkan pelunasannya dalam paling tidak 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Seluruh liabilitas lain diklasifikasikan sebagai liabilitas tidak lancar.

d Kas dan Bank

Kas dan bank terdiri dari kas di tangan dan bank dan tidak digunakan sebagai jaminan atas pinjaman, serta tidak dibatasi penggunaannya

e Deposito yang Dibatasi Penggunaannya

Deposito yang dibatasi penggunaannya merupakan deposito berjangka dengan jatuh tempo lebih dari tiga bulan sejak tanggal penempatan dan digunakan sebagai jaminan serta dibatasi penggunaannya.

f Piutang Usaha

Piutang disajikan dengan nilai wajar yang dapat direalisasikan. Pada setiap tanggal pelaporan dilakukan penyisihan kerugian piutang secara kolektif/kelompok pelanggan (Pelanggan rumah tangga, niaga, sosial, industri, instansi pemerintah, dan lain-lain), yang dibentuk untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul. Besarnya penyisihan kerugian piutang ditentukan berdasarkan rata-rata piutang tak tertagih untuk tiga tahun terakhir pada masing-masing kelompok pelanggan.

Piutang yang telah berumur lebih dari dua tahun dicadangkan penyisihannya sebesar 100% dan diusulkan kepada Dewan Pengawas untuk dihapusbukukan (Write-off). Penurunan nilai atau pemulihan penurunan nilai piutang diakui pada masing-masing kelompok pelanggan.

**2 SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (Continued)**

c Current and Non-Current Classification

The Company presents assets and liabilities in the statement of financial position based on current/non-current classification. An asset is presented as current if:

1. it will be realized, sold or consumed in the normal operating cycle;
2. it is held for trading; or
3. it will be realized within 12 months after the reporting date, or is cash or cash equivalents unless restricted in use or to be used to settle a liability at the latest 12 months after the reporting date.

All other assets are classified as non-current assets.

A liability is presented as current if:

1. it will be settled in the normal operating cycle;
2. it is held for trading;
3. it will be settled within 12 months after the reporting date; or
4. there is no unconditional right to defer its settlement for at least 12 months after the reporting date.

All other liabilities are classified as non-current liabilities.

d Cash and Bank

Cash and banks consist of cash on hand and banks and are not used as collateral for loans, and are not restricted in use.

e Restricted Time Deposits

Restricted time deposits are time deposits with maturities of more than three months from the date of placement and are used as collateral and are restricted in use.

f Accounts Receivable

Receivables are presented at fair value that can be realized. At each reporting date, an allowance for receivable losses is made collectively/by customer group (household customers, commercial, social, industrial, government agencies, and others), which is established to cover possible losses that may arise. The amount of allowance for receivable losses is determined based on the average uncollectible receivables for the last three years in each customer group.

Receivables that have been outstanding for more than two years are fully provided with an allowance of 100% and proposed to the Board of Supervisors to be written off (Write-off). Impairment or recovery of impairment of receivables is recognized in each customer group.

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH
TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025
Serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH
TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
And For The Year Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2 IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(Lanjutan)**

g Persediaan

Persediaan merupakan aset dalam bentuk bahan dan perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa.

Persediaan dikelompokkan ke dalam 2 (dua) jenis yaitu: 1.) Persediaan bahan operasi yang terdiri dari persediaan bahan kimia dan bahan operasi lainnya. 2.) Persediaan bahan instalasi yang terdiri dari pipa, meter air, dan perlengkapan lapangan.

Persediaan diukur pada biaya perolehannya yang meliputi seluruh beban pembelian dan beban yang dapat dibebankan secara langsung serta beban lainnya untuk membawa persediaan ke kondisi dan lokasi sekarang.

Metode pencatatan yang dianut terhadap persediaan bahan instalasi adalah *Perpetual Inventory Method*, sedangkan persediaan bahan operasi menggunakan *Physical Inventory Method*.

Barang/bahan yang dibeli untuk keperluan investasi termasuk pemeliharaan instalasi dikelompokkan kedalam bahan instalasi. Pembebanan pemakaian bahan instalasi dan bahan kimia ke dalam pos beban dicatat dengan metode *First in First Out (FIFO)*.

Alokasi persediaan ke aset tetap yang diakui sebagai beban selama umur manfaat aset tersebut dan menambah nilai aset hanya jika memenuhi kondisi sebagai berikut : memperpanjang umur ekonomis, meningkatkan kapasitas, mutu atau meningkatkan standar kerja.

Pada setiap tanggal pelaporan terhadap persediaan dilakukan penilaian kemungkinan terjadinya penurunan nilai persediaan, misalnya karena rusak atau usang. Persediaan yang menurun nilainya diukur pada harga jual dikurangi biaya untuk menyelesaikan dan menjual serta mengakui kerugian penurunan nilai dalam pos "kerugian penurunan nilai persediaan".

h Aset Tetap dan Penyusutan

Aset tetap disajikan sebesar biaya perolehan yang meliputi harga beli, biaya hukum, dan broker, biaya impor, dan pajak pembelian yang tidak boleh dikreditkan, serta biaya-biaya yang dapat dibebankan langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi siap digunakan sesuai dengan maksud manajemen. Sedangkan penyusutannya dilakukan berdasarkan Undang-undang Perpajakan (Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994) yang secara rinci diatur dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 82/KMK.04/1994 (telah disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 dengan ketentuan mengenai penyusutan atas harta berwujud yang dimiliki dan digunakan dalam bidang usaha tertentu diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.03/2009 tanggal 15 Mei 2009).

2 SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

g Inventory

Inventory are assets in the form of materials and supplies to be used in the production process or rendering of services.

Inventory are grouped into 2 (two) types, namely:
1.) Operating material inventories consisting of chemical materials and other operating materials.
2.) Installation material inventories consisting of pipes, water meters, and field equipment.

Inventory are measured at acquisition cost which includes all purchase costs and costs directly attributable as well as other costs to bring the inventory to their present condition and location.

The recording method adopted for installation material inventories is the *Perpetual Inventory Method*, while operating material inventories use the *Physical Inventory Method*.

Goods/materials purchased for investment purposes including installation maintenance are classified as installation materials. The charging of usage of installation materials and chemical materials to expense accounts is recorded using the *First in First Out (FIFO)* method.

Allocation of inventories to fixed assets is recognized as expense during the useful life of the asset and increases the value of the asset only if it meets the following conditions: extending the economic life, increasing capacity, quality or improving work standards.

At each reporting date, inventories are assessed for possible impairment, for example due to damage or obsolescence. Inventories that have declined in value are measured at selling price less costs to complete and sell and recognize impairment losses in the account "inventory impairment loss".

h Fixed Assets and Depreciation

Fixed assets are presented at acquisition cost which includes purchase price, legal and broker fees, import costs, and non-creditable purchase taxes, as well as costs that are directly attributable to bringing the asset to the location and condition ready for use in accordance with management's intention. Meanwhile, depreciation is carried out based on the Taxation Law (Law Number 10 of 1994) which is regulated in detail in the Decree of the Minister of Finance Number 82/KMK.04/1994 (has been refined by Law Number 36 of 2008 with provisions regarding depreciation of tangible assets owned and used in certain business fields regulated in the Regulation of the Minister of Finance Number 96/PMK.03/2009 dated May 15, 2009).

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH
TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025
Serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH
TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
And For The Year Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2 IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(Lanjutan)**

**2 SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (Continued)**

h Aset Tetap dan Penyusutan (Lanjutan)

h Fixed Assets and Depreciation (Continued)

Pada setiap tanggal pelaporan terhadap aset tetap dilakukan penilaian kemungkinan terjadi penurunan nilai aset. Aset tetap yang mengalami penurunan diestimasi sesuai dengan nilai wajar dikurangi dengan biaya untuk menjual aset tersebut.

At each reporting date, fixed assets are assessed for possible impairment. Fixed assets that experience impairment are estimated in accordance with fair value less costs to sell the asset.

Penurunan nilai aset diakui sebagai beban laba rugi tahun berjalan dan dicatat dalam pos beban penurunan nilai aset.

Impairment of assets is recognized as an expense in the current year's profit or loss and recorded in the asset impairment expense account.

Tarif penyusutan aset tetap dihitung dengan menggunakan metode garis lurus (*Straight Line Methode*) berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap dengan rincian sebagai berikut:

Depreciation rates of fixed assets are calculated using the straight-line method (*Straight Line Method*) based on the estimated economic useful lives of fixed assets with details as follows:

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat /Useful Life	Tarif Penyusutan /Depreciation Rate	Tangible Asset Groups
I. Bukan Bangunan			I. Non-Buildings
Kelompok 1	4 Tahun/ Year	25%	Group 1
Kelompok 2	8 Tahun/ Year	12,50%	Group 2
Kelompok 3	16 Tahun/ Year	6,25%	Group 3
Kelompok 4	20 Tahun/ Year	5%	Group 4
II. Bangunan			II. Buildings
Permanen	20 Tahun/ Year	5%	Permanent
Tidak Permanen	10 tahun/ Year	10%	Non-Permanent

i Pengeluaran Barang Modal/Aset Tetap

i Capital Expenditures/Fixed Assets

Pengeluaran-pengeluaran untuk pembelian barang-barang berwujud dalam bentuk siap pakai atau dibangun terlebih dahulu untuk digunakan dalam operasi perusahaan dengan Jumlah diatas Rp2.000.000,00 dan mempunyai manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dimasukkan sebagai pengeluaran untuk modal /aset tetap (dikapitalisasi).

Expenditures for the purchase of tangible goods in ready-to-use form or constructed in advance to be used in company operations with an amount above Rp2,000,000.00 and having a useful life of more than 1 (one) year are classified as capital expenditures/fixed assets (capitalized).

j Aset Tidak Berwujud

j Intangible Assets

Aset tidak berwujud adalah aset non moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik. Aset tidak berwujud dapat diakui hanya jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

Intangible assets are identifiable non-monetary assets without physical substance. Intangible assets can be recognized only if they meet the following criteria:

1. Kemungkinan Perusahaan akan memperoleh manfaat ekonomis masa yang akan datang dari aset tersebut
2. Biaya perolehan aset atau nilai aset tersebut dapat diukur dengan handal.

1. It is probable that Company will obtain future economic benefits from the asset.
2. The acquisition cost of the asset or the value of the asset can be measured reliably.

Aset dapat diidentifikasi sebagai aset tidak berwujud jika:

An asset can be identified as an intangible asset if:

1. Dapat dipisahkan, yaitu kemampuannya untuk menjadi terpisah/terbagi dari perusahaan dan dijual, dialihkan, dilisensikan, disewakan atau ditukarkan melalui satu kontrak terkait aset atau kewajiban secara individual atau secara bersama, atau;

1. It can be separated, namely its ability to be separated/divided from the company and sold, transferred, licensed, rented or exchanged through a contract related to the asset or liability individually or together; or

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH
TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025
Serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH
TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
And For The Year Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2 IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(Lanjutan)**

j Aset Tidak Berwujud (Lanjutan)

2. Muncul dari hak kontraktual atau hak hukum lainnya, terlepas apakah hak tersebut dapat dialihkan atau dapat dipisahkan dari perusahaan atau dari hak dan kewajiban lainnya.

Aset tidak berwujud diukur sebesar biaya perolehan, yang meliputi harga beli, bea impor dan pajak yang tidak dapat dikreditkan, serta biaya lainnya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam rangka mempersiapkan aset sehingga siap digunakan sesuai dengan tujuan manajemen.

Aset tidak berwujud diamortisasi sesuai dengan umur manfaatnya, umur manfaat aset tidak berwujud yang berasal dari hak kontraktual atau hak hukum lainnya tidak boleh melebihi periode hak kontraktual atau hak hukum tersebut, tetapi mungkin lebih pendek tergantung pada lamanya periode ekspektasi penggunaan aset tersebut. Jika hak kontraktual atau hak hukum lainnya untuk masa yang terbatas dapat diperbarui, maka umur manfaatnya termasuk periode yang diperbarui hanya jika terdapat bukti yang mendukung pembaruan hak tersebut yang dilakukan oleh Perusahaan tanpa biaya yang signifikan. Aset tidak berwujud yang tidak dapat diestimasi umur manfaatnya, maka umur manfaatnya dianggap 10 tahun.

K Aset Tetap Dalam Penyelesaian

Aset tetap dalam penyelesaian merupakan akumulasi pengeluaran dalam rangka pembangunan aset tetap yang sedang dalam proses pengerjaan. Pada saat pekerjaan selesai, jumlah yang terakumulasi dalam perkiraan ini dipindahkan ke perkiraan aset tetap masing-masing.

l Properti Investasi

Properti investasi diakui sebagai aset pada saat diperoleh. Pada pengakuan awal, properti investasi diukur pada biaya perolehan. Biaya perolehan termasuk harga pembelian dan biaya yang dapat diatribusikan langsung untuk memperoleh properti tersebut.

Pada setiap tanggal pelaporan perusahaan akan melakukan penilaian apakah terdapat indikasi penurunan nilai properti investasi.

m Aset Lain-lain

Pos-pos yang tidak dapat secara layak digolongkan dalam aset tetap, aset lancar, investasi/penyertaan maupun aset tidak berwujud, disajikan dalam kelompok aset lain-lain.

**2 SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (Continued)**

j Intangible Assets (Continued)

2. It arises from contractual rights or other legal rights, regardless of whether those rights can be transferred or separated from the company or from other rights and obligations.

Intangible assets are measured at acquisition cost, which includes purchase price, import duties and non-creditable taxes, as well as other costs that are directly attributable in preparing the asset so that it is ready for use in accordance with management's objectives.

Intangible assets are amortized over their useful lives, the useful lives of intangible assets arising from contractual rights or other legal rights should not exceed the period of the contractual rights or legal rights, but may be shorter depending on the length of the expected period of use of the asset. If contractual rights or other legal rights are for a limited period and can be renewed, then the useful life includes the renewed period only if there is evidence to support the renewal of such rights carried out by the Company without significant costs. Intangible assets whose useful lives cannot be estimated, then the useful life is assumed to be 10 years.

k Construction in Progress

Construction in progress represents the accumulation of expenditures in the construction of fixed assets that are still in the process of completion. When the work is completed, the accumulated amount in this account is transferred to the respective fixed asset account.

l Investment Property

Investment property is recognized as an asset when acquired. At initial recognition, investment property is measured at acquisition cost. Acquisition cost includes purchase price and costs directly attributable to acquiring the property.

At each reporting date the company will assess whether there is any indication of impairment of investment property.

m Other Assets

Items that cannot reasonably be classified as fixed assets, current assets, investments/participations or intangible assets, are presented in the other assets group.

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH
TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025
Serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**2 IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(Lanjutan)**

n Imbalan Pasca Kerja

Program pensiun pegawai Perusahaan diterapkan berdasarkan Keputusan Pendiri DAPENMA PAMSI No. 842/Kep.60-PDAM/2007 tanggal 16 Juli 2007 yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Kep. 174/KM.10/2007 tanggal 12 September 2007. Jumlah iuran normal dan iuran tambahan ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan perhitungan liabilitas iuran sementara.

Imbalan Pasca Kerja pegawai lainnya mendapat uang penghargaan sesuai Surat Keputusan Direksi dan diikutsertakan dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sesuai dengan UU Nomor 3 tahun 1992. Seluruh imbalan kerja yang menjadi hak pekerja akibat dari jasa yang diberikan kepada perusahaan selama periode pelaporan diakui dan dicatat sebagai biaya.

Program Imbalan pasti, diberlakukan kepada Direksi dan seluruh karyawan, adalah program imbalan pasca kerja dimana Perusahaan menyediakan imbalan yang telah disepakati kepada pekerja atau mantan pekerja, dan risiko aktuarial serta risiko investasi secara substantif berada pada perusahaan dan kerugian aktuarial diakui selama periode berjalan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Imbalan pasca kerja diakui sebagai liabilitas dan beban dalam laporan keuangan ketika karyawan telah memberikan jasanya dan perusahaan memiliki kewajiban hukum atau konstruktif untuk memberikan imbalan pasca kerja di masa depan. Jenis imbalan pasca kerja yang umum mencakup pensiun, tunjangan kesehatan setelah pensiun, atau imbalan lainnya yang diberikan setelah masa kerja berakhir.

Kewajiban imbalan pasca kerja diukur menggunakan metode *Projected Unit Credit*. Metode ini mempertimbangkan jasa yang telah diberikan oleh karyawan hingga tanggal pelaporan serta asumsi keuangan seperti tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji, dan tingkat pengembalian aset program

o Pencatatan Utang/Liabilitas

Liabilitas jangka pendek dicatat sebesar kas/setara kas yang diterima atau sebesar nilai wajar dari aset non kas yang diterima sebagai penukar dari liabilitas pada saat terjadinya. Liabilitas jangka panjang diakui dalam neraca jika kemungkinan pengeluaran sumber data yang mengandung manfaat ekonomis akan dilakukan untuk menyelesaikan liabilitas yang jatuh tempo lebih dari satu tahun dan jumlah yang harus diselesaikan dapat dikur dengan andal.

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH
TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
And For The Year Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2 SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (Continued)**

n Post-Employment Benefits

The Company's employee pension program is implemented based on the Decree of DAPENMA PAMSI No. 842/Kep.60-PDAM/2007 dated July 16, 2007 which has been approved by the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number Kep. 174/KM.10/2007 dated September 12, 2007. The amount of normal contributions and additional contributions is determined based on the results of the calculation of temporary contribution liabilities.

Other Post-Employment Benefits employees receive a service award in accordance with the Decree of the Board of Directors and are included in the Labor Social Security program in accordance with Law Number 3 of 1992. All employee benefits that become the rights of workers as a result of services provided to the company during the reporting period are recognized and recorded as expenses.

The defined benefit program, applied to the Board of Directors and all employees, is a post-employment benefit program in which governance provides agreed benefits to workers or former workers, and actuarial risk and investment risk substantively rest with governance and actuarial losses are recognized during the current period in the income statement and other comprehensive income.

Post-employment benefits are recognized as liabilities and expenses in the financial statements when employees have rendered their services and the company has a legal or constructive obligation to provide post-employment benefits in the future. Types of post-employment benefits generally include pensions, post-retirement health benefits, or other benefits provided after the employment period ends.

Post-employment benefit obligations are measured using the Projected Unit Credit method. This method considers services that have been rendered by employees up to the reporting date as well as financial assumptions such as discount rate, salary increase rate, and return on plan assets.

o Recording of Payables/Liabilities

Short-term liabilities are recorded at the amount of cash/cash equivalents received or at the fair value of non-cash assets received as exchange for the liabilities at the time incurred. Long-term liabilities are recognized in the balance sheet if it is probable that an outflow of resources containing economic benefits will be required to settle liabilities due more than one year and the amount to be settled can be measured reliably.

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH
TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025
Serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH
TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
And For The Year Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2 IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(Lanjutan)**

o Pencatatan Utang/Liabilitas (Lanjutan)

liabilitas bunga atas liabilitas jangka panjang yang timbul selama masa tenggang yang tidak akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun mendatang dicatat dalam perkiraan liabilitas bunga masa tenggang.

Liabilitas jangka panjang dicatat sebesar kas/setara kas yang diterima atau sebesar nilai wajar dari aset non kas yang diterima sebagai penukar dari liabilitas pada saat terjadinya. Liabilitas jangka panjang dicatat berdasarkan realisasi perubahan dan ditambah dengan bunga masa tenggang yang tidak jatuh tempo dalam waktu satu tahun mendatang.

p Kewajiban Diestimasi dan Kontijensi

Kewajiban diestimasi diakui didalam neraca sebagai kewajiban dan sebagai beban di dalam laporan laba rugi, apabila kemungkinan terjadi perusahaan akan disyaratkan untuk mentransfer manfaat ekonomis pada masa yang akan datang dengan jumlah kewajiban yang dapat diestimasi secara handal. Termasuk di dalam liabilitas diestimasi adalah pembayaran pesangon, uang penghargaan, jasa pengabdian, uang kompensasi dan pembayaran lainnya yang diberikan kepada karyawan dan Direksi pada saat yang bersangkutan berhenti atau berakhir masa jabatannya.

Kewajiban kontijensi merupakan liabilitas potensial yang belum pasti atau liabilitas kini yang tidak diakui karena tidak memenuhi salah satu atau kedua kondisi berikut : - Kemungkinan (lebih mungkin dibandingkan tidak mungkin) terjadi bahwa perusahaan akan disyaratkan untuk mentransfer manfaat ekonomis pada saat penyelesaian, - jumlah kewajiban dapat diestimasi dengan handal.

q Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan penjualan air diakui, dicatat, dan dilaporkan tiap-tiap bulan berdasarkan rekening tagihan air yang diterbitkan pada bulan yang bersangkutan, walaupun penerimaan uangnya baru terjadi kemudian, atau pada saat penerimaan uang untuk transaksi penjualan tunai.

Pendapatan sambungan baru dan pendapatan non air lainnya diakui dan dicatat seluruhnya sebagai pendapatan tahun berjalan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- Jika menurut prosedur yang berlaku pelanggan/calon pelanggan diisyaratkan membayar liabilitasnya secara tunai, maka pendapatan dicatat dan diakui pada saat pembayarannya.

2 SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

o Recording of Payables/Liabilities (Continued)

Interest liabilities on long-term liabilities arising during the grace period that will not mature within one year are recorded in the grace period interest liability account.

Long-term liabilities are recorded at the amount of cash/cash equivalents received or at the fair value of non-cash assets received as exchange for the liabilities at the time incurred. Long-term liabilities are recorded based on realization changes and added with grace period interest that does not mature within one year.

p Estimated and Contingent Liabilities

Estimated liabilities are recognized in the balance sheet as liabilities and as expenses in the income statement, if it is probable that the company will be required to transfer economic benefits in the future with the amount of the obligation that can be reliably estimated. Included in estimated liabilities are severance payments, service awards, long service awards, compensation payments and other payments granted to employees and the Board of Directors when the concerned parties resign or their term of office ends.

Contingent liabilities are potential liabilities that are uncertain or present liabilities that are not recognized because they do not meet one or both of the following conditions: - It is probable (more likely than not) that the company will be required to transfer economic benefits at the time of settlement. - The amount of the obligation can be reliably estimated.

q Revenue and Expense Recognition

Water sales revenue is recognized, recorded, and reported each month based on water billing invoices issued in the respective month, although the cash receipt occurs later, or at the time cash is received for cash sales transactions.

New connection revenue and other non-water revenue are recognized and recorded entirely as revenue of the current year by observing the following provisions:

- If according to the applicable procedures customers/prospective customers are required to pay their liabilities in cash, then revenue is recorded and recognized at the time of payment.

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH
TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025
Serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH
TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
And For The Year Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2 IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(Lanjutan)**

**2 SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (Continued)**

q Pengakuan Pendapatan dan Beban (Lanjutan)

**q Revenue and Expense Recognition
(Continued)**

- Jika menurut ketentuan yang berlaku pelanggan dapat memenuhi liabilitasnya dengan cara mengangsur, maka pengakuan serta pencatatan pendapatan dan piutang dilakukan penyesuaian hanya pendapatan piutang dan pendapatan pada tahun berjalan saja.
- Pendapatan atas keterlambatan pembayaran oleh pelanggan dicatat pada saat denda tersebut diterima (Cash Basis).
- Pengakuan pendapatan jasa giro diakui secara Accrual Basis.

Beban diakui dan dicatat dalam periode terjadinya transaksi.

- If according to applicable provisions customers can fulfill their liabilities by installments, then the recognition and recording of revenue and receivables are adjusted only for receivable revenue and revenue in the current year.
- Revenue from late payment penalties by customers is recorded when the penalty is received (Cash Basis).
- Recognition of current account service revenue is recognized on an Accrual Basis. Expenses are recognized and recorded in the period in which the transaction occurs.

r Beban yang Ditangguhkan

r Deferred Expenses

Beban yang ditangguhkan merupakan biaya-biaya yang berhubungan dengan kegiatan operasi Perusahaan yang mempunyai manfaat untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun.

Deferred expenses are costs related to the Company's operational activities that have benefits for a period of more than 1 (one) year.

s Kelangsungan Hidup Perusahaan

s Going Concern

Laporan keuangan ini disusun dengan anggapan bahwa Perusahaan akan melanjutkan usahanya secara berkesinambungan. Tidak terdapat ketidakpastian yang material terkait dengan peristiwa atau kondisi yang mengakibatkan keraguan signifikan terhadap kemampuan Perusahaan untuk melanjutkan usaha.

These financial statements are prepared on the assumption that the Company will continue its operations as a going concern. There are no material uncertainties related to events or conditions that cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern.

t Pajak Penghasilan

t Income Tax

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan tangguhan. Beban pajak diakui dalam laba atau rugi kecuali untuk transaksi yang berhubungan dengan transaksi diakui langsung ke ekuitas, dalam hal ini diakui sebagai penghasilan komprehensif lainnya.

Tax expense consists of current and deferred tax. Tax expense is recognized in profit or loss except for transactions that are related to transactions recognized directly in equity, in which case it is recognized as other comprehensive income.

Pajak Kini

Current Tax

Beban pajak kini dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku pada tanggal pelaporan keuangan, dan ditetapkan berdasarkan taksiran laba kena pajak tahun berjalan. Manajemen secara periodik mengevaluasi posisi yang dilaporkan di Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sehubungan dengan situasi dimana aturan pajak yang berlaku membutuhkan interpretasi. Jika perlu, manajemen menentukan provisi berdasarkan jumlah yang diharapkan akan dibayar kepada otoritas pajak.

Current tax expense is calculated using tax rates applicable at the financial reporting date, and is determined based on the estimated taxable income for the current year. Management periodically evaluates positions reported in the Annual Tax Return (SPT) in relation to situations where applicable tax regulations require interpretation. If necessary, management determines provisions based on amounts expected to be paid to the tax authorities.

Kekurangan atau kelebihan pembayaran pajak penghasilan badan dicatat sebagai bagian dari beban pajak kini dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Underpayment or overpayment of corporate income tax is recorded as part of current tax expense in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH
TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025
Serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH
TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
And For The Year Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2 IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(Lanjutan)**

t Pajak Penghasilan (Lanjutan)

Koreksi terhadap liabilitas perpajakan diakui pada saat surat ketetapan pajak diterima. Jika Perusahaan mengajukan keberatan, Perusahaan mempertimbangkan apakah besar kemungkinan otoritas pajak akan menerima keberatan tersebut dan merefleksikan dampaknya terhadap liabilitas perpajakan Perusahaan.

Pajak Tangguhan

Pajak tangguhan diukur dengan metode liabilitas atas beda waktu pada tanggal pelaporan antara dasar pengenaan pajak untuk aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya untuk tujuan pelaporan keuangan. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dengan beberapa pengecualian. Aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan rugi fiskal apabila terdapat kemungkinan besar bahwa jumlah laba kena pajak pada masa mendatang akan memadai untuk mengkompensasi perbedaan temporer dan rugi fiskal.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan dikaji ulang pada akhir periode pelaporan, dan mengurangi jumlah tercatat jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasi sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan yang belum diakui dinilai kembali pada setiap akhir periode pelaporan dan diakui sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak mendatang akan memungkinkan aset pajak tangguhan tersedia untuk dipulihkan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan dihitung berdasarkan tarif yang akan dikenakan pada periode saat aset direalisasikan atau liabilitas tersebut diselesaikan, berdasarkan undang-undang pajak yang berlaku atau berlaku secara substantif pada akhir periode laporan keuangan. Pengaruh pajak terkait dengan penyisihan dan/atau pemulihan semua perbedaan temporer selama tahun berjalan, termasuk pengaruh perubahan tarif pajak, dikreditkan atau dibebankan pada periode operasi berjalan, kecuali untuk transaksi - transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan disajikan secara saling hapus saat hak yang dapat dipaksakan secara hukum ada untuk saling hapus aset pajak kini dan liabilitas pajak kini, atau aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan berkaitan dengan Perusahaan kena pajak yang sama, atau Perusahaan bermaksud untuk menyelesaikan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto.

**2 SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (Continued)**

t Income Tax (Continued)

Corrections to tax liabilities are recognized when a tax assessment letter is received. If the Company files an objection, the Company considers whether it is probable that the tax authorities will accept the objection and reflects its impact on the Company's tax liabilities.

Deferred Tax

Deferred tax is measured using the liability method on temporary differences at the reporting date between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts for financial reporting purposes. Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences with certain exceptions. Deferred tax assets are recognized for deductible temporary differences and fiscal losses to the extent that it is probable that future taxable income will be available to offset the temporary differences and fiscal losses.

The carrying amount of deferred tax assets is reviewed at the end of each reporting period, and reduced if it is probable that sufficient taxable income will no longer be available to compensate part or all of the deferred tax assets. Unrecognized deferred tax assets are reassessed at each end of the reporting period and are recognized to the extent that it is probable that future taxable income will allow the deferred tax assets to be recovered.

Deferred tax assets and liabilities are calculated based on tax rates that will be applied in the period when the asset is realized or the liability is settled, based on tax laws that have been enacted or substantively enacted at the end of the financial reporting period. The tax effects relating to the provision and/or reversal of all temporary differences during the year, including the effect of changes in tax rates, are credited or charged to the current operating period, except for transactions that were previously directly charged or credited to equity.

Deferred tax assets and liabilities are presented on a net basis when there is a legally enforceable right to offset current tax assets against current tax liabilities, or deferred tax assets and deferred tax liabilities relate to the same taxable Company, or the Company intends to settle current tax assets and liabilities on a net basis.

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH
TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025
Serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**2 IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(Lanjutan)**

u Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau Perusahaan yang terkait dengan Perusahaan:

A. Orang atau anggota keluarga dekatnya yang mempunyai relasi dengan Perusahaan jika orang tersebut:

- (i) memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas Entitas pelapor;
- (ii) memiliki pengaruh signifikan atas Entitas pelapor; atau
- (iii) personel manajemen kunci Entitas pelapor atau Entitas induk pelapor.

B. Suatu Entitas berelasi dengan Entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:

- (i) Entitas dan Perusahaan adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya Entitas induk, Entitas anak, dan Entitas anak berikutnya saling berelasi dengan Entitas lainnya).
- (ii) satu Entitas adalah Entitas asosiasi atau ventura bersama dari Entitas lain (atau Entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana Entitas lain tersebut adalah anggotanya).
- (iii) kedua Entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
- (iv) satu Entitas adalah ventura bersama dari Entitas ketiga dan Entitas yang lain adalah Entitas asosiasi dari Entitas ketiga.
- (v) Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu Perusahaan pelapor atau Entitas yang terkait dengan Entitas pelapor.
- (vi) Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf A).
- (vii) orang yang diidentifikasi dalam huruf A) i) memiliki pengaruh signifikan atas Entitas atau merupakan personel manajemen kunci Entitas (atau Entitas induk dari Entitas).
- (viii) Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana Entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personel manajemen kunci kepada Entitas pelapor atau kepada Entitas pelapor dari Entitas Induk

Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan dan kondisi yang disetujui oleh kedua belah pihak. Beberapa persyaratan dan kondisi tersebut mungkin tidak sama dengan persyaratan yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi.

Seluruh transaksi dan saldo dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH
TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
And For The Year Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2 SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (Continued)**

u Transactions with Related Parties

Related parties are persons or Companies related to the Company:

A. A person or a close member of that person's family is related to the Company if that person:

- (i) has control or joint control over the reporting Entity;*
- (ii) has significant influence over the reporting Entity; or*
- (iii) is key management personnel of the reporting Entity or of a parent of the reporting Entity.*

B. An Entity is related to the reporting Entity if any of the following conditions applies:

- (i) The Entity and the Company are members of the same business group (meaning that each parent Entity, subsidiary, and fellow subsidiary is related to the others).*
- (ii) One Entity is an associate or joint venture of the other Entity (or an associate or joint venture of a member of a business group of which the other Entity is a member).*
- (iii) Both Entities are joint ventures of the same third party.*
- (iv) One Entity is a joint venture of a third Entity and the other Entity is an associate of the third Entity.*
- (v) The Entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting Company or an Entity related to the reporting Entity.*
- (vi) The Entity is controlled or jointly controlled by a person identified in point A).*
- (vii) The person identified in point A) (i) has significant influence over the Entity or is key management personnel of the Entity (or of a parent of the Entity).*
- (viii) The Entity, or any member of a group of which it is a part, provides key management personnel services to the reporting Entity or to the parent of the reporting Entity.*

These transactions are carried out based on terms and conditions agreed by both parties. Some of these terms and conditions may not be the same as those conducted with non-related parties.

All transactions and balances with related parties are disclosed in the notes to the financial statements.

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH
TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025
Serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**2 IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(Lanjutan)**

v Sewa

Sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika persyaratan sewa mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset sewaan kepada Perusahaan. Seluruh sewa lainnya diklasifikasikan sebagai sewa operasi.

Hak atas aset yang dimiliki dalam sewa pembiayaan diakui sebagai aset Perusahaan pada nilai wajar aset sewaan (atau, jika lebih rendah, pada nilai kini pembayaran sewa minimum) pada inisiasi sewa. Liabilitas kepada penyewa tercakup dalam laporan posisi keuangan sebagai kewajiban sewa pembiayaan. Pembayaran sewa dialokasikan antara biaya keuangan dan pengurang kewajiban sewa sehingga tercapai tingkat bunga konstan atas sisa saldo liabilitas. Beban keuangan dikurangkan dalam mengukur laba atau rugi. Aset yang dikuasai dalam sewa pembiayaan termasuk dalam aset tetap, didepresiasi dan dinilai untuk kerugian penurunan nilai dengan cara yang sama seperti aset yang dimiliki. Utang sewa dalam sewa operasi dibebankan ke laba rugi.

Sewa operasi dan Pengakuan awal: Dalam sewa operasi, penyewa tidak mengakui aset dan liabilitas sewa di laporan posisi keuangan. Sebagai gantinya, sewa dibayar secara periodik dan biaya sewa diakui sebagai beban dalam laporan laba rugi selama periode sewa;

w Penurunan Nilai Aset Non Keuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan, Perusahaan menilai apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut atau pada saat pengujian penurunan nilai aset diperlukan, maka Perusahaan membuat estimasi formal jumlah terpulihkan aset tersebut.

Jumlah terpulihkan yang ditentukan untuk aset individual adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset atau Unit Penghasil Kas (UPK) dikurangi biaya untuk menjual dengan nilai pakainya, kecuali aset tersebut tidak menghasilkan arus kas masuk yang sebagian besar independen dari aset atau kelompok aset lain. Jika nilai tercatat aset lebih besar daripada nilai terpulihkannya, maka aset tersebut mengalami penurunan nilai dan nilai tercatat aset diturunkan menjadi sebesar nilai terpulihkannya.

Dalam menghitung nilai pakai, estimasi arus kas masa depan bersih didiskontokan ke nilai kini dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar terkini atas nilai waktu dari uang dan risiko spesifik dari aset. Dalam menentukan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, digunakan harga penawaran pasar terakhir, jika tersedia.

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH
TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
And For The Year Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2 SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (Continued)**

v Leases

Leases are classified as finance leases if the lease terms substantially transfer all risks and rewards of ownership of the leased asset to the Company. All other leases are classified as operating leases.

Rights to assets held under finance leases are recognized as the Company's assets at the fair value of the leased assets (or, if lower, at the present value of the minimum lease payments) at the inception of the lease, with the corresponding liability to the lessor recognized as a finance lease obligation in the statement of financial position. Lease payments are allocated between finance charges and the reduction of the lease obligation so as to achieve a constant rate of interest on the remaining balance of the liability, with finance charges recognized in profit or loss. Assets held under finance leases are included in property, plant and equipment, and are depreciated and assessed for impairment in the same manner as owned assets, while lease payments under operating leases are recognized as an expense in profit or loss.

Operating leases and Initial recognition: In an operating lease, the lessee does not recognize lease assets and liabilities in the statement of financial position. Instead, lease payments are made periodically and lease expense is recognized as an expense in the income statement over the lease term;

w Impairment of Non-Financial Assets

At the end of each reporting period, the Company assesses whether there is any indication that an asset may be impaired. If any such indication exists or when impairment testing for an asset is required, the Company makes a formal estimate of the recoverable amount of the asset.

The recoverable amount determined for an individual asset is the higher of the fair value of the asset or Cash Generating Unit (CGU) less costs to sell and its value in use, unless the asset does not generate cash inflows that are largely independent of those from other assets or groups of assets. If the carrying amount of the asset exceeds its recoverable amount, the asset is considered impaired and the carrying amount of the asset is reduced to its recoverable amount.

In calculating value in use, the estimated future net cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the specific risks of the asset. In determining fair value less costs to sell, recent market transaction prices are used, if available.

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH
TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025
Serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH
TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
And For The Year Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2 IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(Lanjutan)**

**2 SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (Continued)**

w Penurunan Nilai Aset Non Keuangan (Lanjutan)

**w Impairment of Non-Financial Assets
(Continued)**

Jika tidak terdapat transaksi tersebut, Perusahaan menggunakan model penilaian yang sesuai untuk menentukan nilai wajar aset. Perhitungan-perhitungan ini dikuatkan oleh penilaian berganda atau indikasi nilai wajar yang tersedia.

If no such transactions exist, the Company uses an appropriate valuation model to determine the fair value of the asset. These calculations are corroborated by valuation multiples or other available fair value indicators.

Kerugian penurunan nilai dari operasi yang dilanjutkan, jika ada, diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain sesuai dengan kategori beban yang konsisten dengan fungsi dari aset yang diturunkan nilainya.

Impairment losses from continuing operations, if any, are recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income in expense categories consistent with the function of the impaired asset.

Penilaian dilakukan pada akhir setiap periode pelaporan apakah terdapat indikasi bahwa rugi penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya untuk suatu aset mungkin tidak ada lagi atau mungkin telah menurun. Jika indikasi dimaksud ditemukan, maka Perusahaan mengestimasi jumlah terpulihkan aset tersebut.

An assessment is made at the end of each reporting period as to whether there is any indication that an impairment loss previously recognized for an asset may no longer exist or may have decreased. If such indication exists, the Company estimates the recoverable amount of the asset.

Kerugian penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya untuk aset selain goodwill dibalik hanya jika terdapat perubahan asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui. Dalam hal ini, jumlah tercatat aset dinaikkan ke jumlah terpulihkannya. Pembalikan tersebut dibatasi sehingga jumlah tercatat aset tidak melebihi jumlah terpulihkannya maupun jumlah tercatat, neto setelah penyusutan, seandainya tidak ada rugi penurunan nilai yang telah diakui untuk aset tersebut pada tahun sebelumnya. Pembalikan rugi penurunan nilai diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

An impairment loss previously recognized for an asset other than goodwill is reversed only if there has been a change in the assumptions used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment loss was recognized. In such case, the carrying amount of the asset is increased to its recoverable amount. The reversal is limited so that the carrying amount of the asset does not exceed its recoverable amount nor the carrying amount, net of depreciation, as if no impairment loss had been recognized for the asset in prior years. The reversal of impairment loss is recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

x Instrumen Keuangan

x Financial Instruments

Perusahaan mengklasifikasikan instrumen keuangan menjadi aset keuangan dan liabilitas keuangan. Instrumen keuangan adalah setiap kontrak yang menimbulkan aset keuangan pada satu entitas dan liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas pada entitas lain.

The Company classifies financial instruments into financial assets and financial liabilities. A financial instrument is any contract that gives rise to a financial asset of one entity and a financial liability or equity instrument of another entity.

Aset Keuangan

Financial Assets

Aset keuangan diklasifikasikan pada saat pengakuan awal dan selanjutnya diukur pada (i) biaya perolehan diamortisasi, (ii) nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ("FVOCI") atau (iii) nilai wajar melalui laba rugi ("FVTPL").

Financial assets are classified at initial recognition and subsequently measured at (i) amortized cost, (ii) fair value through other comprehensive income ("FVOCI") or (iii) fair value through profit or loss ("FVTPL").

Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi

Financial Assets at Amortized Cost

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika kedua kondisi berikut terpenuhi:

Financial assets are measured at amortized cost if both of the following conditions are met:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan

- *The financial asset is held within a business model whose objective is to hold financial assets in order to collect contractual cash flows; and*

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH
TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025
Serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**2 IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(Lanjutan)**

x Instrumen Keuangan (Lanjutan)

- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan yang pada tanggal tertentu meningkatkan arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi diukur pada jumlah yang diakui saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya, dan dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024, kategori ini meliputi bank, deposito dan piutang usaha yang dimiliki oleh Perusahaan.

Aset keuangan pada FVTPL

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi kecuali aset keuangan tersebut diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Saat pengakuan awal, Perusahaan dapat membuat penetapan yang tidak dapat dibatalkan untuk mengukur aset yang memenuhi persyaratan untuk diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain pada nilai wajar melalui laba rugi, apabila penetapan tersebut mengeliminasi atau secara signifikan mengurangi inkonsistensi pengukuran atau pengakuan (kadang disebut sebagai "accounting mismatch").

Aset keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi dicatat pada laporan posisi keuangan pada nilai wajarnya. Perubahan nilai wajar langsung diakui dalam laba rugi.

Bunga yang diperoleh dicatat sebagai pendapatan bunga, sedangkan pendapatan dividen dicatat sebagai bagian dari pendapatan lain-lain sesuai dengan persyaratan dalam kontrak, atau pada saat hak pembayaran telah ditetapkan.

Pada tanggal 31 Desember 2025 kategori ini meliputi investasi asosiasi yang dimiliki oleh Perusahaan.

Liabilitas Keuangan dan Instrumen Ekuitas

Liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas Perusahaan diklasifikasikan berdasarkan substansi perjanjian kontraktual serta definisi liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas.

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH
TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
And For The Year Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2 SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (Continued)**

x Financial Instruments (Continued)

- The contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.

Financial assets at amortized cost are measured at the amount recognized at initial recognition minus principal repayments, plus or minus cumulative amortization using the effective interest method calculated from the difference between the initial amount and the maturity amount, and less allowance for impairment losses.

As of December 31, 2025 and December 31, 2024, this category includes bank accounts, deposits and trade receivables held by the Company.

Financial Assets at FVTPL

Financial assets are measured at fair value through profit or loss unless the financial assets are measured at amortized cost or at fair value through other comprehensive income.

At initial recognition, the Company may make an irrevocable designation to measure assets that meet the requirements to be measured at amortized cost or at fair value through other comprehensive income at fair value through profit or loss, if such designation eliminates or significantly reduces a measurement or recognition inconsistency (sometimes referred to as an "accounting mismatch").

Financial assets at fair value through profit or loss are recorded in the statement of financial position at their fair value. Changes in fair value are recognized directly in profit or loss.

Interest earned is recorded as interest income, while dividend income is recorded as part of other income in accordance with the terms of the contract, or when the right to receive payment has been established.

As of December 31, 2025, this category includes investments held by the Company.

Financial Liabilities and Equity Instruments

Financial liabilities and equity instruments of the Company are classified in accordance with the substance of the contractual arrangements and the definitions of financial liabilities and equity instruments.

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH
TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025
Serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**2 IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(Lanjutan)**

x Instrumen Keuangan (Lanjutan)

Liabilitas keuangan

Perusahaan mengklasifikasikan liabilitas keuangannya, pada pengakuan awal sebagai (i) liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi, atau (ii) liabilitas keuangan diukur pada FVTPL.

Seluruh liabilitas keuangan diakui pada awalnya sebesar nilai wajar dan, dalam hal pinjaman dan utang, termasuk biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Amortisasi suku bunga efektif disajikan sebagai bagian dari beban keuangan dalam laba rugi.

Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi

Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi diukur pada jumlah yang diakui saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, kategori ini dari utang usaha, biaya yang masih harus dibayar, utang bank yang dimiliki oleh Perusahaan.

Instrumen Ekuitas

Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset suatu entitas setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya. Instrumen ekuitas dicatat sejumlah hasil yang diterima, setelah dikurangkan dengan biaya penerbitan langsung.

Metode Suku Bunga Efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari liabilitas keuangan dan metode untuk mengalokasikan biaya bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran kas masa depan (mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan dan diterima yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi dan premium atau diskonto lainnya) selama perkiraan umur liabilitas keuangan, atau (jika lebih tepat) digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih pada saat pengakuan awal.

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH
TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
And For The Year Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2 SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (Continued)**

x Financial Instruments (Continued)

Financial Liabilities

The Company classifies its financial liabilities, at initial recognition, as (i) financial liabilities measured at amortized cost, or (ii) financial liabilities measured at FVTPL.

All financial liabilities are initially recognized at fair value and, in the case of loans and borrowings, include directly attributable transaction costs and are subsequently measured at amortized cost using the effective interest method. Effective interest amortization is presented as part of finance costs in profit or loss.

Financial Liabilities at Amortized Cost

Financial liabilities at amortized cost are measured at the amount recognized at initial recognition minus principal repayments, plus or minus cumulative amortization using the effective interest method calculated from the difference between the initial amount and the maturity amount.

As of December 31, 2025 and 2024, this category consists of trade payables, accrued expenses, and bank loans held by the Company.

Equity Instruments

An equity instrument is any contract that evidences a residual interest in the assets of an entity after deducting all of its liabilities. Equity instruments are recorded at the proceeds received, net of direct issuance costs.

Effective Interest Method

The effective interest method is a method of calculating the amortized cost of a financial liability and of allocating interest expense over the relevant period. The effective interest rate is the rate that exactly discounts estimated future cash payments (including all fees and points paid or received that form an integral part of the effective interest rate, transaction costs and other premiums or discounts) through the expected life of the financial liability, or (where appropriate) a shorter period, to obtain the net carrying amount at initial recognition.

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH
TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025
Serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**2 IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(Lanjutan)**

x Instrumen Keuangan (Lanjutan)

Saling Hapus atas Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai bersihnya dilaporkan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui dari aset keuangan dan liabilitas keuangan tersebut dan terdapat intensi untuk menyelesaikan dengan menggunakan dasar bersih, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara bersamaan.

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap periode pelaporan, Perusahaan menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Perusahaan menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian ("ECL"). Dalam melakukan penilaian, Perusahaan membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat periode pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi, yang tersedia tanpa biaya atau usaha pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

Karena piutang usaha Perusahaan tidak memiliki komponen pembiayaan signifikan, Perusahaan menerapkan pendekatan yang disederhanakan dalam perhitungan ECL. Oleh karena itu, Perusahaan tidak menelusuri perubahan dalam risiko kredit, namun justru mengakui penyisihan kerugian berdasarkan ECL sepanjang umurnya pada setiap tanggal pelaporan. Perusahaan membentuk matriks provisi berdasarkan pengalaman kerugian kredit masa lampau, disesuaikan dengan perkiraan masa depan (*forward-looking*) atas faktor yang spesifik untuk debitur dan lingkungan ekonomi.

Perusahaan mempertimbangkan aset keuangan memenuhi definisi default ketika telah menunggak lebih dari dua tahun. Namun, dalam kasus-kasus tertentu, Perusahaan juga dapat menganggap aset keuangan dalam keadaan default ketika informasi internal atau eksternal menunjukkan bahwa Perusahaan tidak mungkin menerima arus kas kontraktual secara penuh tanpa melakukan perluasan persyaratan kredit. Piutang usaha dihapusbukukan ketika kecil kemungkinan untuk memulihkan arus kas kontraktual, setelah semua upaya penagihan telah dilakukan dan telah sepenuhnya dilakukan penyisihan.

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH
TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
And For The Year Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2 SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (Continued)**

x Financial Instruments (Continued)

Offsetting of Financial Instruments

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount is reported in the statement of financial position if, and only if, there is a legally enforceable right to offset, the recognized amounts of the financial assets and financial liabilities and there is an intention to settle on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously.

Impairment of Financial Assets

At each reporting period, the Company assesses whether the credit risk of a financial instrument has increased significantly since initial recognition. In performing the assessment, the Company uses the change in the risk of default occurring over the expected life of the financial instrument rather than the change in the amount of expected credit losses ("ECL"). In making that assessment, the Company compares the risk of default occurring on the financial instrument as at the reporting date with the risk of default occurring on the financial instrument at the date of initial recognition and considers reasonable and supportable information that is available without undue cost or effort at the reporting date about past events, current conditions and forecasts of future economic conditions, which indicate an increase in credit risk since initial recognition.

As the Company's trade receivables do not contain a significant financing component, the Company applies the simplified approach in calculating ECL. Therefore, the Company does not track changes in credit risk, but instead recognizes a loss allowance based on lifetime ECL at each reporting date. The Company establishes a provision matrix based on historical credit loss experience, adjusted for forward-looking factors specific to the debtors and the economic environment.

The Company considers a financial asset to meet the definition of default when it is more than two years past due. However, in certain cases, the Company may also consider a financial asset to be in default when internal or external information indicates that the Company is unlikely to receive the outstanding contractual cash flows in full without extending credit terms. Trade receivables are written off when there is no reasonable expectation of recovering the contractual cash flows, after all collection efforts have been made and full allowance has been provided.

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH
TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025
Serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**2 IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(Lanjutan)**

x Instrumen Keuangan (Lanjutan)

Secara khusus, informasi berikut diperhitungkan ketika menilai apakah risiko kredit telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal: (a) indikasi pihak peminjam atau kelompok pihak peminjam mengalami kesulitan keuangan signifikan, (b) wanprestasi atau tunggakan pembayaran bunga atau pokok, (c) kemungkinan bahwa mereka akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya dan (d) dimana data yang dapat diobservasi mengindikasikan bahwa ada terukur penurunan arus kas estimasi masa mendatang, seperti perubahan tunggakan atau kondisi ekonomi yang berkorelasi dengan wanprestasi.

Penghentian Pengakuan Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan
Aset Keuangan

Aset keuangan (atau bagian dari aset keuangan atau kelompok aset keuangan serupa) dihentikan pengakuannya jika:

- a. hak kontraktual untuk menerima arus kas dari aset keuangan tersebut telah berakhir;
- b. Perusahaan tetap mempertahankan hak untuk menerima arus kas dari aset keuangan tersebut, namun juga menanggung liabilitas kontraktual untuk membayar arus kas yang diterima tersebut kepada satu atau lebih pihak penerima melalui suatu kesepakatan; atau
- c. Perusahaan telah mengalihkan hak kontraktual untuk menerima arus kas dari aset keuangan dan (i) telah secara substansial mengalihkan seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, atau (ii) secara substansial tidak mengalihkan atau tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, namun telah mengalihkan pengendalian atas aset keuangan tersebut.

Ketika Perusahaan telah mentransfer hak untuk menerima arus kas dari aset atau telah menandatangani kesepakatan pelepasan (*pass-through arrangement*), dan secara substansial tidak mentransfer dan tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, maupun mentransfer pengendalian atas aset, aset tersebut diakui sejauh keterlibatan berkelanjutan Perusahaan terhadap aset keuangan tersebut.

Keterlibatan berkelanjutan yang berbentuk pemberian jaminan atas aset yang ditransfer diukur sebesar jumlah terendah dari jumlah tercatat aset dan jumlah maksimal dari pembayaran yang diterima yang mungkin harus dibayar kembali.

Dalam hal ini, Perusahaan juga mengakui liabilitas terkait. Aset yang ditransfer dan liabilitas terkait diukur dengan dasar yang mencerminkan hak dan liabilitas yang masih dimiliki Perusahaan.

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH
TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
And For The Year Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2 SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (Continued)**

x Financial Instruments (Continued)

In particular, the following information is taken into account when assessing whether credit risk has increased significantly since initial recognition: (a) indications that the borrower or a group of borrowers is experiencing significant financial difficulty, (b) default or delinquency in interest or principal payments, (c) the probability that they will enter bankruptcy or other financial reorganization and (d) where observable data indicate that there is a measurable decrease in the estimated future cash flows, such as changes in arrears or economic conditions that correlate with default.

Derecognition of Financial Assets and Financial Liabilities
Financial Assets

A financial asset (or part of a financial asset or group of similar financial assets) is derecognized if:

- a. the contractual rights to receive cash flows from the financial asset have expired;
- b. the Company retains the right to receive cash flows from the financial asset, but also assumes a contractual obligation to pay the received cash flows to one or more recipients through an arrangement; or
- c. the Company has transferred its contractual rights to receive cash flows from the financial asset and (i) has substantially transferred all the risks and rewards of the financial asset, or (ii) has neither substantially transferred nor retained all the risks and rewards of the financial asset, but has transferred control of the financial asset.

the Company has transferred its contractual rights to receive cash flows from the financial asset and (i) has substantially transferred all the risks and rewards of the financial asset, or (ii) has neither substantially transferred nor retained all the risks and rewards of the financial asset, but has transferred control of the financial asset.

Continuing involvement that takes the form of a guarantee over the transferred asset is measured at the lower of the carrying amount of the asset and the maximum amount of consideration received that may have to be repaid.

In such case, the Company also recognizes an associated liability. The transferred asset and the associated liability are measured on a basis that reflects the rights and obligations that the Company has retained.

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH
TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025
Serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH
TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
And For The Year Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2 IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(Lanjutan)**

x Instrumen Keuangan (Lanjutan)

Pada penghentian pengakuan aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, perbedaan antara nilai tercatat aset dan jumlah imbalan yang diterima dan piutang diakui dalam laba rugi.

Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak dihentikan atau dibatalkan atau kedaluwarsa. Selisih antara jumlah tercatat liabilitas keuangan yang dihentikan pengakuannya dan imbalan yang dibayarkan dan utang diakui dalam laba rugi dan laporan komprehensif lain.

Ketika liabilitas keuangan saat ini digantikan dengan yang lain dari pemberi pinjaman yang sama dengan persyaratan yang berbeda secara substansial, atau modifikasi secara substansial atas ketentuan liabilitas keuangan yang saat ini ada, maka pertukaran atau modifikasi tersebut dicatat sebagai penghapusan liabilitas keuangan awal dan pengakuan liabilitas keuangan baru, dan selisih antara nilai tercatat liabilitas keuangan tersebut diakui sebagai laba rugi dan laporan komprehensif lain.

y Investasi pada anak perusahaan dan perusahaan asosiasi

Anak perusahaan adalah entitas yang dikendalikan oleh entitas induk. Pengendalian adalah kemampuan untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasional dari suatu entitas sehingga mendapatkan manfaat dari aktivitas tersebut.

Perusahaan asosiasi adalah suatu entitas dimana Perusahaan mempunyai pengaruh signifikan dan bukan merupakan entitas anak ataupun bagian dalam joint venture.

Perusahaan mencatat investasi pada anak perusahaan dengan metode ekuitas (*equity method*) sedangkan investasi pada perusahaan asosiasi dicatat dengan metode biaya (*cost method*).

Anak perusahaan tidak dikonsolidasikan dalam laporan keuangan Perusahaan.

2 SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

x Financial Instruments (Continued)

Upon derecognition of a financial asset measured at amortized cost, the difference between the carrying amount of the asset and the sum of the consideration received and receivable is recognized in profit or loss.

Financial Liabilities

A financial liability is derecognized when the obligation specified in the contract is discharged, cancelled or expires. The difference between the carrying amount of the financial liability derecognized and the consideration paid and payable is recognized in profit or loss and other comprehensive report.

When an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing financial liability are substantially modified, such exchange or modification is accounted for as the derecognition of the original financial liability and the recognition of a new financial liability, and the difference between the carrying amounts of the financial liabilities is recognized in profit or loss and other comprehensive report.

y Investment in Subsidiaries and Associates

A subsidiary is an entity that is controlled by a parent entity. Control is the power to govern the financial and operating policies of an entity so as to obtain benefits from its activities.

An associate is an entity in which the Company has significant influence and which is neither a subsidiary nor an interest in a joint venture.

The Company accounts for investments in subsidiaries using the equity method, while investments in associates are accounted for using the cost method.

Subsidiaries are not consolidated in the Company's financial statements.

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH
TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025
Serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH
TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
And For The Year Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

3 PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI

Penyusunan laporan keuangan Perusahaan mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari pendapatan, beban, aset dan liabilitas, dan pengungkapan atas liabilitas kontinjensi, pada akhir periode pelaporan. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam tahun pelaporan berikutnya.

Pertimbangan

Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan, manajemen telah membuat keputusan berikut, yang memiliki pengaruh paling signifikan terhadap jumlah yang diakui dalam laporan keuangan.

Kelangsungan Usaha

Manajemen Perusahaan telah melakukan penilaian terhadap kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usaha dan menilai keyakinan bahwa Perusahaan memiliki sumber daya untuk melanjutkan bisnis di masa mendatang. Selain itu, manajemen menilai tidak adanya ketidakpastian material yang dapat menimbulkan keraguan signifikan terhadap kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Oleh karena itu, laporan keuangan dilanjutkan untuk disusun atas basis kelangsungan usaha.

Penentuan Mata Uang Fungsional

Mata uang fungsional Perusahaan adalah mata uang dari lingkungan ekonomi primer tempat Perusahaan beroperasi. Mata uang tersebut adalah mata uang yang mempengaruhi penjualan dan beban dari produk yang diberikan. Berdasarkan penilaian manajemen Perusahaan, mata uang fungsional Perusahaan adalah Rupiah.

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk periode berikutnya diungkapkan di bawah ini. Perusahaan mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Perusahaan. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya

3 Use of Judgments, Estimates, and Assumptions

The preparation of the Company's financial statements requires management to make judgments, estimates, and assumptions that affect the reported amounts of revenues, expenses, assets, and liabilities, as well as the disclosure of contingent liabilities, at the end of the reporting period. Uncertainty about these assumptions and estimates could result in material adjustments to the carrying amounts of assets and liabilities in the subsequent reporting year.

Judgments

In the process of applying the Company's accounting policies, management has made the following judgments, which have the most significant effect on the amounts recognized in the financial statements.

Going Concern

Management has assessed the Company's ability to continue as a going concern and is satisfied that the Company has adequate resources to continue its operations in the foreseeable future. Furthermore, management is not aware of any material uncertainties that may cast significant doubt upon the Company's ability to continue as a going concern. Accordingly, the financial statements have been prepared on a going concern basis.

Determination of Functional Currency

The Company's functional currency is the currency of the primary economic environment in which the Company operates. It is the currency that mainly influences the sales prices and costs of the goods and services provided. Based on management's assessment, the Company's functional currency is the Indonesian Rupiah.

Estimates and Assumptions

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date, which have a significant risk of resulting in a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next reporting period, are disclosed below. The Company bases its assumptions and estimates on parameters available when the financial statements are prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments, however, may change due to market changes or circumstances arising beyond the control of the Company. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH
TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025
Serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH
TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
And For The Year Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

3 PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI (Lanjutan)

Nilai Wajar Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Perusahaan mencatat aset keuangan dan liabilitas keuangan tertentu pada nilai wajarnya, dan penyajian ini mengharuskan penggunaan estimasi. Komponen pengukuran nilai wajar yang signifikan ditentukan berdasarkan bukti-bukti objektif yang dapat diverifikasi, sedangkan saat dan besaran perubahan nilai wajar dapat menjadi berbeda karena penggunaan metode penilaian yang berbeda.

Penurunan Nilai Aset Nonkeuangan

Penelaahan atas penurunan nilai dilakukan apabila terdapat indikasi penurunan nilai aset tertentu. Penentuan nilai wajar aset membutuhkan estimasi arus kas yang diharapkan akan dihasilkan dari pemakaian berkelanjutan dan pelepasan akhir atas aset tersebut. Perubahan signifikan dalam asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan nilai wajar dapat berdampak signifikan pada nilai terpulihkan dan jumlah kerugian penurunan nilai yang terjadi mungkin berdampak material pada hasil operasi Perusahaan.

Pajak Penghasilan

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan penyisihan atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti dalam kegiatan usaha normal. Perusahaan mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan.

4 KAS DAN BANK

Kas dan Bank terdiri dari:

	31 Desember 2025/ December 31, 2025
Kas Kecil	50.000.000
Kas Ditangan	-
Sub Jumlah	50.000.000
Bank:	
PT Bank Nasional Indonesia Tbk	44.411.441.315
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	11.353.941.918
PT Bank Syariah Indonesia, Tbk	7.619.793.380
Perumda Bank Kota Bogor	5.041.017.323
PT BPD Jawa Barat Banten Tbk	3.410.798.708
PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk	2.085.518.503
PT Bank Mega Syariah	1.671.060.679
PT Bank Centra Asia, Tbk	1.583.250.530
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	637.498.034
PT Bank CIMB Niaga, Tbk	509.478.304
PT Bank KB Bukopin, Tbk	38.658.455
PT Bank SMBC Indonesia, Tbk	37.664.877
PT Bank Panin Indonesia, Tbk	4.002.033
PT Bank Jabar Banten Syariah	158.819
PT Bank OCBC NISP, Tbk	-
Sub Jumlah	78.404.282.878
Jumlah	78.454.282.878

3 Use of Judgments, Estimates, and Assumptions (Continued)

Fair Value of Financial Assets and Financial Liabilities

The Company measures certain financial assets and financial liabilities at fair value, and such presentation requires the use of estimates. Significant components of fair value measurement are determined based on objective and verifiable evidence, while the timing and amount of changes in fair value may differ due to the use of different valuation techniques.

Impairment of Non-Financial Assets

An impairment review is performed when there are indications of impairment of certain assets. Determining the fair value of the assets requires estimates of the expected cash flows to be generated from their continuing use and ultimate disposal. Significant changes in the assumptions used to determine fair value may have a significant impact on the recoverable amount and the amount of impairment loss recognized, which could materially affect the Company's results of operations.

Income Tax

Significant judgment is involved in determining the provision for corporate income tax. There are certain transactions and calculations for which the ultimate tax determination is uncertain in the ordinary course of business. The Company recognizes liabilities for corporate income tax based on estimates of whether additional corporate income tax will be due.

4 CASH AND BANKS

Cash and Banks consist of

	31 Desember 2024/ December 31, 2024	
	50.000.000	Petty Cash
	900.000	Cash on hand
Sub Total	50.900.000	Sub Total
Banks:		Banks:
PT Bank Nasional Indonesia Tbk	9.548.780.680	PT Bank Nasional Indonesia Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	16.090.630.786	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Bank Syariah Indonesia, Tbk	8.634.870.468	PT Bank Syariah Indonesia, Tbk
Perumda Bank Kota Bogor	9.028.684.558	Perumda Bank Kota Bogor
PT BPD Jawa Barat Banten Tbk	7.404.303.381	PT BPD Jawa Barat Banten Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk	6.733.315.745	PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk
PT Bank Mega Syariah	1.661.442.937	PT Bank Mega Syariah
Pt Bank Centra Asia, Tbk	2.699.483.749	Pt Bank Centra Asia, Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	260.898.862	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank CIMB Niaga, Tbk	4.696.289.259	PT Bank CIMB Niaga, Tbk
PT Bank KB Bukopin, Tbk	1.188.330.967	PT Bank KB Bukopin, Tbk
PT Bank SMBC Indonesia, Tbk	38.183.093	PT Bank SMBC Indonesia, Tbk
PT Bank Panin Indonesia, Tbk	1.649.593.891	PT Bank Panin Indonesia, Tbk
PT Bank Jabar Banten Syariah	7.296.433.379	PT Bank Jabar Banten Syariah
PT Bank OCBC NISP, Tbk	2.156.760.558	PT Bank OCBC NISP, Tbk
Sub Total	79.088.002.313	Sub Total
Total	79.138.902.313	Total

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH
TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025
Serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH
TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
And For The Year Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

4 KAS DAN BANK (Lanjutan)

Pada tanggal 31 Oktober 2025 dan 31 Desember 2024 tidak terdapat kas di bank yang dibatasi penggunaannya, Manajemen perusahaan telah menempatkan kas di Perumda Bank Kota Bogor yang merupakan pihak berelasi bagi perusahaan (catatan 43).

Perusahaan telah menempatkan dana pada peroduk tabungan investasi berjangka (Tapenas Meriah Non Perorangan) di PT Bank Negara Indonesia sesuai dengan surat tanggal 27 November 2025 Nomor BGR/04/3410 sebesar Rp 35.000.000.000 dengan jangka waktu mulai dari 26 November 2025 sampai dengan 26 Februari 2026 dengan suku bunga sebesar 4,35% pa.

4 CASH AND BANKS (Continued)

As of October 31, 2025 and December 31, 2024, there were no cash in banks that was restricted in use. The management has placed cash in Perumda Bank Kota Bogor, a related party of the company (Note 43).

The company has also placed funds in a term savings investment product (Tapenas Meriah Non-Individual) at PT Bank Negara Indonesia, in accordance with letter dated November 27, 2025, No. BGR/04/3410, amounting to IDR 35,000,000,000, with a term from November 26, 2025 to February 26, 2026, and an annual interest rate of 4.35% p.a.

5 DEPOSITO

Deposito terdiri dari:

	31 Desember 2025/ December 31, 2025
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	38.500.000.000
PT BPD Jawabarat Banten, Tbk	38.500.000.000
Perumda Bank Kota bogor	7.000.000.000
Jumlah	84.000.000.000

PT Bank Syariah Indonesia Kota Bogor dengan Nomor Sertifikat 00465031, berjangka 3 (tiga) bulan (29 Desember 2025 s/d 29 Maret 2026) dengan nisbah bank 48,00 % / tahun, Nomor Sertifikat 00626070, berjangka 3 (tiga) bulan (02 November 2025 s/d 02 Februari 2026) dengan nisbah bank 34,39 % / tahun, Nomor Sertifikat 00626188, berjangka 3 (tiga) bulan (02 November 2025 s/d 02 Februari 2026) dengan nisbah bank 33,06 % / tahun. Nomor Sertifikat 00705597, berjangka 3 (tiga) bulan (29 Desember 2025 s/d 29 Januari 2026) dengan nisbah bank 74% / tahun, untuk Deposito yang telah jatuh tempo secara otomatis diperpanjang kembali untuk jangka waktu yang sama dengan tingkat bunga yang berlaku.

Perumda Bank Kota Bogor dengan Nomor Rekening/Bilyet 312-001-000003702 berjangka 12 (dua belas) bulan (19 September 2025 s/d 19 September 2026) dengan suku bunga 6,50%/tahun, Nomor 312-001-000003751 berjangka 12 (dua belas) bulan (23 Desember 2025 s/d 23 Desember 2026) dengan suku bunga 6,50%/tahun, Nomor 312-001-000003622 berjangka 12 (dua belas) bulan (6 Juni 2025 s/d 6 Juni 2026) dengan suku bunga 6,25%/tahun, Nomor 312-001-000003623, berjangka 12 (dua belas) bulan (7 Juni 2025 s/d 7 Juni 2026) dengan suku bunga 6,25%/tahun, Nomor 312-001-000003741 berjangka 12 (dua belas) bulan (9 Desember 2025 s/d 9 Desember 2026) dengan suku bunga 6,50%/tahun, untuk Deposito yang telah jatuh tempo secara otomatis diperpanjang kembali untuk jangka waktu yang sama dengan tingkat bunga yang berlaku.

PT BPD Jawabarat Banten, Tbk Cabang Kota Bogor dengan Nomor Sertifikat A 651959 berjangka 3 (tiga) bulan (23 Desember 2025 s/d 23 Maret 2026) dengan tingkat suku bunga 5,75% pa, Nomor A 651999 berjangka 3 (tiga) bulan (1 Desember 2025 s/d 1 Maret 2026) dengan tingkat suku

5 DEPOSITS

Deposits consist of

	31 Desember 2024/ December 31, 2024	
35.000.000.000		PT Bank Syariah Indonesia Tbk
31.000.000.000		PT BPD Jawabarat Banten, Tbk
7.000.000.000		Perumda Bank Kota bogor
73.000.000.000		Total

The company has placed funds in PT Bank Syariah Indonesia – Bogor Branch with the following certificates: Certificate No. 00465031 for a 3-month term (December 29, 2025 – March 29, 2026) with a bank profit-sharing rate of 48.00% per year; Certificate No. 00626070 for a 3-month term (November 2, 2025 – February 2, 2026) with a bank profit-sharing rate of 34.39% per year; Certificate No. 00626188 for a 3-month term (November 2, 2025 – February 2, 2026) with a bank profit-sharing rate of 33.06% per year; and Certificate No. 00705597 for a 3-month term (December 29, 2025 – January 29, 2026) with a bank profit-sharing rate of 74% per year. Certificates that mature are automatically renewed for the same term at the prevailing rate.

The company has also placed funds in Perumda Bank Kota Bogor with the following account/certificate numbers: 312-001-000003702 for a 12-month term (September 19, 2025 – September 19, 2026) at an interest rate of 6.50% per year; 312-001-000003751 for a 12-month term (December 23, 2025 – December 23, 2026) at 6.50% per year; 312-001-000003622 for a 12-month term (June 6, 2025 – June 6, 2026) at 6.25% per year; 312-001-000003623 for a 12-month term (June 7, 2025 – June 7, 2026) at 6.25% per year; and 312-001-000003741 for a 12-month term (December 9, 2025 – December 9, 2026) at 6.50% per year. Deposits that mature are automatically renewed for the same term at the prevailing interest rate.

Furthermore, the company has placed funds in PT BPD Jawa Barat & Banten, Tbk – Bogor Branch with the following certificates: A 651959 for a 3-month term (December 23, 2025 – March 23, 2026) at 5.75% per year; A 651999 for a 3-month term (December 1,

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH
TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025
Serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

5 DEPOSITO (Lanjutan)

bunga 4,25% pa, Nomor A 01027732 berjangka 3 (tiga) bulan (27 November 2025 s/d 27 Februari 2026) dengan tingkat suku bunga 4,25% pa, Nomor A 750820 berjangka 1 (satu) bulan (22 Desember 2025 - 22 Januari 2026) dengan tingkat suku bunga 6,25 % pa; untuk Deposito yang telah jatuh tempo secara otomatis diperpanjang kembali untuk jangka waktu yang sama dengan tingkat bunga yang berlaku.

6 PIUTANG USAHA

Terdiri dari:

	31 Desember 2025/ December 31, 2025
Air	48.283.941.925
Non Air	413.486.690
Ragu - Ragu	2.299.597.828
Penyisihan Piutang	(8.469.038.318)
Jumlah	42.527.988.125

Piutang ragu-ragu yaitu piutang air dan non air yang berumur lebih dari setahun, terdiri dari :

	31 Desember 2025/ December 31, 2025
Air	2.179.647.950
Non air	119.949.878
Jumlah	2.299.597.828

7 PIUTANG LAIN-LAIN

Terdiri dari:

	31 Desember 2025/ December 31, 2025
Rupa-rupa piutang lainnya	22.991.812
Uang Muka Operasional Bulan Desember 2025 Dewas	10.000.000
Pengembalian Uang Muka operasional Trandist Desember 2025	82.700
Uang Muka Rakernas Dewas	1.260.000
Pengembalian uang muka SPPD ke Bali	-
Uang Muka Operasional Bulan Agustus 2024 Dewas	-
Pengembalian uang muka kegiatan Lomba K3	-
Pengembalian Uang Muka survallience ISO 17025 QC	-
Uang Muka Workshop Dewas di Sumbang	-
Pengembalian uang muka sosialisasi PB bulan Oktober 2024	-
Pengembalian uang operasional Perlengkapan Oktober 2024	-
Jumlah Dipindahkan	34.334.512

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH
TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
And For The Year Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

5 DEPOSITS (Continued)

2025 – March 1, 2026) at 4.25% per year; A 01027732 for a 3-month term (November 27, 2025 – February 27, 2026) at 4.25% per year; and A 750820 for a 1-month term (December 22, 2025 – January 22, 2026) at 6.25% per year. All deposits that mature are automatically renewed for the same term at the prevailing interest rate.

6 ACCOUNT RECEIVABLE

Consist of:

	31 Desember 2024/ December 31, 2024	
44.432.015.998		Water
353.506.205		Non Water
1.437.360.500		allowance for doubtful accounts
(7.519.901.172)		Allowance for Doubtful Accounts
38.702.981.531		Total

Doubtful receivables are water and non-water receivables that are more than one year past due. They consist of:

	31 Desember 2024/ December 31, 2024	
1.284.720.700		Water
152.639.800		Non Water
1.437.360.500		Total

7 OTHER RECEIVABLE

Consist of:

	31 Desember 2024/ December 31, 2024	
7.850.115		Miscellaneous Other Receivables
-		Operational Advance for December 2025 – Board of Commissioners
-		Reimbursement of Operational Advance – Trandist December 2025
-		Advance for National Working Meeting – Board of Commissioners
-		Reimbursement of SPPD Advance to Bali
16.854.568		Operational Advance for August 2024 – Board of Commissioners
10.000.000		Reimbursement of Advance – K3 Competition Activities
33.012.500		Reimbursement of Advance – ISO 17025 QC Surveillance
28.207.105		Workshop Advance – Board of Commissioners in West Sumatra
37.770.000		Reimbursement of PB Socialization Advance – October 2024
6.574.500		Reimbursement of Operational Supplies Advance – October 2024
3.421.000		Transferred Total
143.689.788		

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH
TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025
Serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH
TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
And For The Year Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

7 PIUTANG LAIN-LAIN (Lanjutan)

	31 Desember 2025/ December 31, 2025
Jumlah pindahan	34.334.512
Pengembalian uang muka Operasional Sekper Oktober 2024	-
Pengembalian Uang Muka pelatihan Lemhanas	-
Uang Muka operasional kegiatan mancing	-
Pengembalian Uang Muka operasional Trandist November 2024	-
Pengembalian Uang Muka team building	-
Pengembalian Uang Muka Desember 2024 Laboratorium	-
Pengembalian Uang Muka Operasional RT Desember 2024	-
Pengembalian Uang Muka BBM Desember 2024	-
Pengembalian Uang Muka Operasional Perawatan Desember 2024	-
Pengembalian Uang Muka Operasional safety Breifing Desember 2024	-
Pengembalian Uang Muka Operasional Trandist Desember 2024	-
Pengembalian uang muka ekstra fooding Desember 2024	-
Uang Muka Munas V ASDEPAMSI	-
Pengembalian Uang Muka operasional QHSE Desember 2024	-
Pengembalian Uang Muka bantuan stunting	-
Pengembalian Uang Muka operasional Humas Desember 2024	-
Pengembalian Uang Muka Media gathering 2024	-
Souvenir	494.137.000
Total Piutang Lain-lain	528.471.512

Dari jumlah piutang dinas tersebut diatas baru dipertanggung jawabkan sebesar Rp.24.334.512,- yaitu pada bulan Januari 2026 dan sisanya sebesar Rp.10.000.000,- belum dapat dipertanggungjawabkan.

8 PENDAPATAN YANG AKAN DITERIMA

Pendapatan yang akan diterima merupakan pendapatan atas bunga deposito dari PT BPD Jawa barat dan Banten dan Perumda Bank Kota Bogor masing masing sebesar Rp63.137.619 tahun 2025 dan Rp55.291.043 tahun 2024.

7 OTHER RECEIVABLE (Continued)

	31 Desember 2024/ December 31, 2024	
	143.689.788	Transferred Total
		Reimbursement of Secretariat
		Operational Advance – October
	2.025.000	2024
	16.582.837	Reimbursement of Lemhanas
		Training Advance
	-	Fishing Activities
		Reimbursement of Operational
		Advance – Trandist November
	27.000	2024
	5.560.000	Reimbursement of Team Building
		Advance
	3.217.500	Reimbursement of December 2024
		Laboratory Advance
	19.290	Reimbursement of RT Operational
		Advance – December 2024
	22.357.650	Reimbursement of Fuel Advance –
		December 2024
		Reimbursement of Maintenance
		Operational Advance – December
	273.800	2024
		Reimbursement of Safety Briefing
		Operational Advance – December
	2.387.500	2024
		Reimbursement of Trandist
		Operational Advance – December
	58.296	2024
		Reimbursement of Extra Fooding
		Advance – December 2024
	8.953.550	Munas V Advance – ASDEPAMSI
	23.300.000	Reimbursement of QHSE
		Operational Advance – December
	2.300.000	2024
		Reimbursement of Stunting
		Assistance Advance
	1.380.400	Reimbursement of Public Relations
		Operational Advance – December
	14.926.100	2024
		Reimbursement of Media Gathering
	15.767.500	Advance – 2024
	-	Souvenirs
Total Piutang Lain-lain	262.826.211	Total Other Receivables

From the total departmental receivables listed above, Rp24,334,512 has been properly accounted for in January 2026, while the remaining Rp10,000,000 has not yet been settled or justified.

8 ACCRUED INCOME

The income to be received represents interest revenue from term deposits with PT BPD Jawa Barat & Banten, Tbk and Perumda Bank Kota Bogor, amounting to Rp63,137,619 for 2025 and Rp55,291,043 for 2024, respectively.

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH
TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025
Serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH
TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
And For The Year Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

9 PERSEDIAAN

	31 Desember 2025/ December 31, 2025
Bahan Operasi	
Bahan Kimia	1.434.087.186
Alat Tulis Kantor	706.341.112
Suku Cadang	343.112.050
Rupa-rupa Bahan Operasi	231.579.548
Bahan Pembantu	33.067.442
Bahan Teknik Pipa/Pipa Persil	8.034.120
Sub Jumlah	2.756.221.458
Bahan Instalasi	
Rupa-rupa Bahan Instalasi	10.270.022.726
Meter Air	1.803.113.622
Pipa	1.823.590.812
Sub Jumlah	13.896.727.160
Cadangan Penurunan Nilai Bahan Instalasi	(37.758.037)
Jumlah	16.615.190.581

10 BIAYA DIBAYAR DIMUKA

Terdiri dari:

	31 Desember 2025/ December 31, 2025
a. Jangka Pendek	
Pembelian persediaan	2.471.488
Sewa kendaraan	-
Asuransi bangunan	242.716.750
Asuransi kendaraan	97.447.916
Lainnya	66.242.000
Sub Jumlah	408.878.154

Biaya dibayar dimuka sebesar Rp340.164.666, merupakan pembayaran dimuka premi asuransi Kendaraan dan Bangunan Perusahaan pada PT Asuransi Sinarmas, serta uang muka lainnya dengan rincian sebagai berikut :

Uang muka lain-lain terdiri dari :	
- Kantor Kas Negara - Bea materai	66.242.000
- CV BELA PERSADA - 20% DPT di Palasari	-
Jumlah	66.242.000

b. Jangka Panjang

	31 Desember 2025/ December 31, 2025
Sewa Tanah	557.348.358
Sewa tanah milik PT. Kereta Api Indonesia di KM. 6+810 s/d 9+570 antara Batutulis-Maseng lintas Bogor; KM 52+265, KM 54+400 antara Cilebut Bogor, lintas Jakarta-Bogor, KM 2+8/9 antara Bogor-Batutulis, lintas Bogor-Yogyakarta sesuai dengan perjanjian No KL. 701/VI/103/DO.1/2021 tanggal 23 Juni 2021, No KL. 701/VI/103/DO.1/2021 tanggal 23 Juni 2021.	

9 INVENTORY

	31 Desember 2024/ December 31, 2024
Operating Materials	
Chemicals	1.075.135.258
Office Supplies	891.031.148
Spare Parts	344.369.005
Miscellaneous Operating Materials	269.955.912
Auxiliary Materials	47.004.238
Pipe / Pipeline Technical Materials	8.123.220
Subtotal	2.635.618.781
Installation Materials	
Miscellaneous Installation Materials	11.157.636.765
Water Meters	5.125.127.816
Pipes (Pipa)	2.181.790.947
Subtotal	18.464.555.528
Allowance for Decline in Value of Installation Materials	(37.758.037)
Total	21.062.416.272

10 PREPAID EXPENSES

Consists of:

	31 Desember 2024/ December 31, 2024
a. Short Term	
-	-
Inventory Purchases	73.304.400
Vehicle Rental	234.562.334
Building Insurance	91.887.416
Vehicle Insurance	589.132.000
Others	-
Subtotal	988.886.150

The prepaid fee of Rp340,164,666, is the prepayment of the Company's Vehicle and Building insurance premium at PT Asuransi Sinarmas, as well as other advance payments with the following details:

Other advances consist of:

- Kantor Kas Negara – Stamp Duty	97.132.000
- CV BELA PERSADA – 20% advance payment for DPT in Palasari	492.000.000
Total	589.132.000

b. Long Term

	31 Desember 2024/ December 31, 2024
Sewa Tanah	1.007.952.727
Land lease of land owned by PT Kereta Api Indonesia located at KM 6+810 to KM 9+570 between Batutulis–Maseng (Bogor line); KM 52+265 and KM 54+400 between Cilebut–Bogor (Jakarta–Bogor line); and KM 2+8/9 between Bogor–Batutulis (Bogor–Yogyakarta line), based on Agreement No. KL.701/VI/103/DO.1/2021 dated June 23, 2021.	

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH
TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025
Serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH
TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
And For The Year Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

10 BIAYA DIBAYAR DIMUKA (Lanjutan)

Sewa tanah milik PT. Kereta Api Indonesia di KM. 6+810 s/d 9+570 antara Batutulis-Maseng lintas Bogor; KM 52+265, KM 54+400 antara Cilebut Bogor, lintas Jakarta-Bogor, KM 2+8/9 antara Bogor-Batutulis, lintas Bogor-Yogyakarta sesuai dengan perjanjian No KL. 701/XI/46/DO.1-2022 tanggal 03 November 2022.

Pengawasan keamanan operasional dan jalur kereta api pada perpotongan tidak sebidang (crossing) dan/atau persinggungan (sejajar) dengan jalur kereta api untuk penanaman pipa air sesuai dengan perjanjian No KL. 701/VIII/146/DO.1-2023 tanggal 21 agustus 2023

Pemanfaatan lahan dan instalasi pengolahan air yang digunakan untuk pengolahan air minum di Jl Raya tajur nomor 1 Kecamatan Bogor Timur berupa tanah +/- 2.200 Meter persegi sesuai dengan perjanjian nomor : 690/SP.36 - PERUMDA.TPKB/2024

penempatan jaringan pipa air HDPE diameter 16 dan 8 mm di ruas jalan raya Pajajaran STA 3+700 s.d 4+600 sesuai dengan perjanjian No KL. 701/VIII/146/DO.1-2023 tanggal 21 agustus 2023

10 PREPAID EXPENSES (Continued)

Land lease of land owned by PT Kereta Api Indonesia located at KM 6+810 to KM 9+570 between Batutulis-Maseng (Bogor line); KM 52+265 and KM 54+400 between Cilebut-Bogor (Jakarta-Bogor line); and KM 2+8/9 between Bogor-Batutulis (Bogor-Yogyakarta line), based on Agreement No. KL.701/XI/46/DO.1-2022 dated November 3, 2022.

Operational security and railway track supervision at grade-separated crossings (crossing) and/or parallel alignments with railway tracks for water pipeline installation, in accordance with Agreement No. KL.701/VIII/146/DO.1-2023 dated August 21, 2023 with PT Kereta Api Indonesia

Utilization of land and a water treatment installation used for drinking water processing located at Jl. Raya Tajur No. 1, East Bogor District, comprising land of approximately ±2,200 square meters, in accordance with Agreement No. 690/SP.36-PERUMDA.TPKB/2024.

Installation of HDPE water pipelines with diameters of 16 mm and 8 mm along Jalan Raya Pajajaran at STA 3+700 to STA 4+600, in accordance with Agreement No. KL.701/VIII/146/DO.1-2023 dated August 21, 2023 with PT Kereta Api Indonesia.

11 ASET TETAP

Terdiri dari:

11 FIXED ASSETS

Consist of

	31 Desember 2025/ December 31, 2025				
	1 Januari 2025/ January 1, 2025	Penambahan/ Addition	Pengurang/ Deductions	31 Desember 2025 December 31, 2025	
Harga perolehan:					Acquisition cost:
Tanah dan hak atas tanah	72.647.813.911	-	-	72.647.813.911	Land and land rights
Instalasi sumber air	28.498.831.189	2.291.492.000	36.509.500	30.753.813.689	Water source installations
Instalasi perpompaan	45.044.985.275	4.272.579.910	42.903.653	49.274.661.532	Pumping installations
Instalasi pengolahan air	174.100.755.372	10.986.435.650	879.917.500	184.207.273.522	Water treatment installations
Instalasi transmisi dan distribusi	777.263.944.968	85.698.506.944	5.897.026.197	857.065.425.715	Transmission and distribution installations
Bangunan dan gedung	31.164.382.648	982.794.000	-	32.147.176.648	Buildings and structures
Peralatan dan perlengkapan	17.987.860.186	1.107.597.600	549.187.150	18.546.270.636	Equipment and supplies
Alat pengangkutan dan kendaraan	7.001.408.275	-	537.800.000	6.463.608.275	Transportation equipment and vehicles
Instalasi non pabrik lainnya	-	-	-	-	Other non-factory installations
Perabot inventaris kantor	44.556.780.891	2.062.921.400	1.831.573.025	44.788.129.266	Office furniture and fixtures
Jumlah	1.198.266.762.715	107.402.327.504	9.774.917.025	1.295.894.173.194	Total

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH
TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025
Serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH
TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
And For The Year Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

11 ASET TETAP (lanjutan)

11 FIXED ASSETS (Continued)

		31 Desember 2025/ December 31, 2025			
	1 Januari 2025/ Januari 1, 2025	Penambahan/ Addition	Pengurang/ Deductions	31 Desember 2025 December 31, 2025	
Akumulasi Penyusutan					Accumulated Depreciation:
Instalasi sumber air	12.841.079.128	1.962.536.660	36.509.500	14.767.106.288	Water source installations
Instalasi perpompaan	18.341.777.556	4.806.069.273	42.903.653	23.104.943.176	Pumping installations
Instalasi pengolahan air	105.478.543.043	9.135.241.409	879.917.500	113.733.866.952	Water treatment installations
Instalasi transmisi dan distribusi	419.843.570.278	59.243.900.411	5.747.724.648	473.839.746.041	Transmission and distribution installations
Bangunan dan gedung	11.978.609.415	1.419.459.450	-	13.398.068.865	Buildings and structures
Peralatan dan perlengkapan	13.849.762.970	1.418.586.545	549.187.150	14.719.162.365	Equipment and supplies
Alat pengangkutan dan kendaraan	5.268.307.132	606.701.620	537.800.000	5.337.208.752	Transportation equipment and vehicles
Perabot inventaris kantor	38.661.408.020	2.328.338.327	1.831.573.025	39.158.173.322	Office furniture and fixtures
Amortisasi hak atas tanah	171.147.920	9.020.500	-	180.168.420	Amortization of land rights
Jumlah	626.434.205.462	80.929.854.195	9.625.615.476	697.738.444.181	Total
Penurunan nilai	125.832.323			125.832.323	Impairment
Nilai Buku	571.706.724.930			598.029.896.690	Carrying amount

		31 Desember 2024/ December 31, 2024				
	1 Januari 2023/ Januari 1, 2023	Penambahan/ Addition	Pengurang/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassification	31 Desember 2024 December 31, 2024	
Harga perolehan:						Acquisition Cost:
Tanah dan hak atas tanah	56.178.026.911	16.469.787.000	-	-	72.647.813.911	Land and land rights
Instalasi sumber air	25.429.566.189	3.069.265.000	-	-	28.498.831.189	Water source installations
Instalasi perpompaan	33.105.914.375	11.939.070.900	-	-	45.044.985.275	Pumping installations
Instalasi pengolahan air	166.370.743.472	8.022.938.400	292.926.500	-	174.100.755.372	Water treatment installations
Instalasi transmisi dan distribusi	690.405.018.425	91.980.987.789	5.122.061.246	-	777.263.944.968	Transmission and distribution installations
Bangunan dan gedung	19.770.787.148	11.393.595.500	-	-	31.164.382.648	Buildings and structures
Peralatan dan perlengkapan	15.950.145.686	2.037.714.500	-	-	17.987.860.186	Equipment and supplies
Alat pengangkutan dan kendaraan	14.244.918.595	-	7.243.510.320	-	7.001.408.275	Transportation equipment and vehicles
Perabot inventaris kantor	43.099.091.241	1.457.689.650	-	-	44.556.780.891	Other non-factory installations
Aset tidak berwujud	-	852.925.525	-	(852.925.525)	-	Office furniture and fixtures
Jumlah	1.064.554.212.042	147.223.974.264	12.658.498.066	(852.925.525)	1.198.266.762.715	Total

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH
TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025
Serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH
TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
And For The Year Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

11 ASET TETAP (Lanjutan)

11 FIXED ASSETS (Continued)

31 Desember 2024/ December 31, 2024						Cumulated depreciation :
1 Januari 2023/ Januari 1, 2023	Penambahan/ Addition	Pengurang/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassification	31 Desember 2024 December 31, 2024		
Akumulasi Penyusutan						
Instalasi sumber air	11.185.101.961	1.655.977.167	-	12.841.079.128		Water source installations
Instalasi perpompaan	14.650.054.737	3.691.722.819	-	18.341.777.556		Pumping installations
Instalasi pengolahan air	97.000.935.143	8.508.121.077	30.513.177	105.478.543.043		Water treatment installations
Instalasi transmisi dan distribusi	368.830.017.827	55.677.300.091	4.663.747.640	419.843.570.278		Transmission and distribution installations
Bangunan dan gedung	10.822.930.995	1.155.678.420	-	11.978.609.415		Buildings and structures
Peralatan dan perlengkapan	12.442.153.022	1.407.609.948	-	13.849.762.970		Equipment and supplies
Alat pengangkutan dan kendaraan	11.152.155.753	908.427.557	6.792.276.178	5.268.307.132		Transportation equipment and vehicles
Perabot inventaris kantor	36.201.193.850	2.460.214.170	-	38.661.408.020		Office inventory furniture
Amortisasi hak atas tanah	162.127.420	9.020.500	-	171.147.920		Amortization of land rights
Aset tidak berwujud	-	53.307.845	-	-		Intangible assets
Jumlah	562.446.670.708	75.527.379.594	11.486.536.995	626.434.205.462		Total
Penurunan nilai	125.832.323			125.832.323		Impairment
Nilai Buku	501.981.709.011			571.706.724.930		Carrying amount

Manajemen perusahaan telah mengasuransikan bangunan dan kendaraan dari risiko kebakaran dan kecelakaan.
Pada tahun 2025 perusahaan telah menjual beberapa aset milik perusahaan, keuntungan atas pelepasan aset tetap tersebut dicatat sebagai pendapatan lain-lain (catatan No. 39) Pada tahun 2025 tidak ada aset tetap perusahaan yang dijadikan jaminan.

Management has insured the Company's buildings and vehicles against risks of fire and accident.
In 2025, the Company disposed of certain assets. The gain on disposal of property, plant and equipment was recognized as other income (Note No. 39). In 2025, none of the Company's property, plant and equipment were pledged as collateral.

12 ASET TAK BERWUJUD

Terdiri dari:

12 INTANGIBLE ASSETS

Consist of:

31 Desember 2025/ December 31, 2025				Acquisition cost:
1 Januari 2024/ Januari 1, 2024	Penambahan/ Addition		31 Desember 2025 December 31, 2025	
Harga perolehan:				
Perangkat lunak	1.511.810.525	868.824.000	2.380.634.525	Software
Jumlah	1.511.810.525	868.824.000	2.380.634.525	Total
Akumulasi amortisasi				
Perangkat lunak	712.192.845	231.331.882	943.524.727	Accumulated amortization Software
Jumlah	712.192.845	231.331.882	943.524.727	Total
Nilai Buku	799.617.680		1.437.109.798	Book Value

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH
TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025
Serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH
TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
And For The Year Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

12 ASET TAK BERWUJUD (Lanjutan)

12 INTANGIBLE ASSETS (Continued)

	1 Januari 2023/ Januari 1, 2023	31 Desember 2024/ Reklasifikasi/ December 31, 2024	31 Desember 2024/ December 31, 2024	
Harga perolehan: Perangkat lunak	658.885.000	852.925.525	1.511.810.525	Acquisition cost: Software
Jumlah	658.885.000	852.925.525	1.511.810.525	Total
Akumulasi amortisasi Perangkat lunak	658.885.000	53.307.845	712.192.845	Accumulated Amortization Software
Jumlah	658.885.000	53.307.845	712.192.845	Total
Nilai Buku	-	-	799.617.680	Book Value

13 ASET DALAM PENYELESAIAN

Terdiri dari:

13 CONSTRUCTION IN PROGRESS

Consist of:

	31 Desember 2025/ December 31, 2025	31 Desember 2024/ December 31, 2024	
Pemasangan saluran transdist untuk ganti meter pelanggan	410.120.891	438.162.589	Installation of transmission and distribution pipelines for customer meter replacement
PT Matrasarakan Sinergita - DED Jembatan Tipe F	239.814.000	239.814.000	PT Matrasarakan Sinergita DED for Type F Bridge
PT Uta E Consultant - DED SPAM Danau Bogor Raya	239.580.000	239.580.000	PT Uta E Consultant – DED for SPAM Danau Bogor Raya
PT Muara Consult - FS SPAM Danau Bogor Raya	237.689.000	237.689.000	PT Muara Consult – Feasibility Study (FS) for SPAM Danau Bogor Raya
Pemasangan saluran transdist untuk pelanggan	109.600.290	44.388.810	Installation of transmission and distribution pipelines for customers
CV Bela Persada - DPT Palasari	-	373.969.200	CV Bela Persada –DPT Palasari
CV Dua Belas Konstruksi - Interior gedung TC	-	177.808.020	CV Dua Belas Konstruksi – TC Building Interior Works
PT Rajawali - penataan lahan depan database	-	463.050.000	PT Rajawali – Landscaping Works in Front of Database Building
Jumlah	1.236.804.181	2.214.461.619	Total

14 UANG JAMINAN

Terdiri dari:

14 SECURITY DEPOSITS

Consist of:

	31 Desember 2025/ December 31, 2025	31 Desember 2024/ December 31, 2024	
Listrik	349.539.649	349.539.649	Electricity
Pekerjaan	60.000.000	60.000.000	Work/Project
Telepon	187.800	187.800	Telephone
Pos dan giro	150.000	150.000	Post and Giro
Jumlah	409.877.449	409.877.449	Total

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH
TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025
Serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH
TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
And For The Year Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

15 PROPERTI INVESTASI

Terdiri dari:

15 INVESTMENT PROPERTY

Consist of :

31 Desember 2025				
	Saldo Awal 31-Des-2024	Penambahan	Saldo Akhir 31-Des-2025	
Nilai Perolehan			Acquisiton Cost	
Bangunan	139.747.000	-	139.747.000	Buildings
Jumlah	139.747.000	-	139.747.000	Total
Akumulasi Penyusutan			Accumulated depreciation	
Bangunan	77.443.130	6.987.350	84.430.480	Buildings
Jumlah	77.443.130	6.987.350	84.430.480	Total
Nilai Buku	62.303.870		55.316.520	Book Value
31 Desember 2024				
	Saldo Awal 31-Des-2024	Penambahan	Saldo Akhir 31-Des-2024	
Nilai Perolehan			Acquisiton Cost	
Bangunan	139.747.000	-	139.747.000	Buildings
Jumlah	139.747.000	-	139.747.000	Total
Akumulasi Penyusutan			Accumulated depreciation	
Bangunan	70.455.780	6.987.350	77.443.130	Building
Jumlah	70.455.780	6.987.350	77.443.130	Total
Nilai Buku	69.291.220		62.303.870	Book Value

16 UTANG USAHA

Terdiri dari:

16 ACCOUNT PAYABLE

Consist of:

	31 Desember 2025/ December 31, 2025	31 Desember 2024/ December 31, 2024	
PT Lautan Sukses Nusantara	1.066.834.080	-	PT Lautan Sukses Nusantara
CV Gelora Jaya	934.196.865	-	CV Gelora Jaya
PT Khlirin Inti	604.414.980	256.683.068	PT Khlirin Inti
PT Inti Karunia Sentosa	361.989.700	485.969.000	PT Inti Karunia Sentosa
Inkop Pamsi	188.658.600	-	Inkop Pamsi
CV Banteng Gading Amerta	178.234.141	126.140.400	CV Banteng Gading Amerta
CV Putra Multikarya	140.122.117	-	CV Putra Multikarya
CV Bintang Jaya Sentosa	135.147.259	235.166.376	CV Bintang Jaya Sentosa
CV Dahlia	31.868.650	-	CV Dahlia
CV SIS Gemilang	-	586.657.060	CV SIS Gemilang
CV Rolet	-	587.209.121	CV Rolet
CV Maju Utama	-	172.600.560	CV Maju Utama
PT Jayaraya Kimia Inti	-	178.625.000	PT Jayaraya Kimia Inti
CV Rekakova	-	11.787.234	CV Rekakova
CV Jasa Rakatama	-	91.081.299	CV Jasa Rakatama
CV Bayu Kahuripan Abadi	-	372.210.130	CV Bayu Kahuripan Abadi
CV Prima Multicons	-	171.590.802	CV Prima Multicons
PT Tunas Tirta Persada	-	310.383.443	PT Tunas Tirta Persada
CV Daehan Co	-	327.529.444	CV Daehan Co
PT Mandala Adthya Utama	-	774.956.504	PT Mandala Adthya Utama
PT Banyu indo Andalan Persada	-	491.508.000	PT Banyu indo Andalan Persada
Jumlah	3.641.466.392	5.180.097.441	Total

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH
TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025
Serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH
TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
And For The Year Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

17 UTANG LAIN-LAIN

Terdiri dari:

	31 Desember 2025/ December 31, 2025
Bunga Bank (IBRD World Bank)	483.260.494
DHHD terbuka	-
Jumlah	483.260.494

17 OTHER PAYABLE

Consist of:

	31 Desember 2024/ December 31, 2024	
	543.668.056	Bank Interest (IBRD – World Bank)
	547.400	Outstanding DHHD
	544.215.456	Total

18 BIAYA YANG MASIH HARUS DI BAYAR

Terdiri dari:

	31 Desember 2025/ December 31, 2025
Biaya YMH Dibayar lainnya	37.881.071.750
Hutang Masa Pemeliharaan	6.993.949.373
Biaya YMH Dibayar/DHHD Terbuka	636.536.649
Premi Asuransi	34.554.545
Jumlah	45.546.112.317

18 ACCRUED EXPENSES

Consist of:

	31 Desember 2024/ December 31, 2024	
	22.764.329.888	Other Accrued Expense
	7.539.228.853	Retention Payable
	4.161.542.162	Outstanding Accrued Expense
	35.467.028	Insurance Premium
	34.500.567.931	Total

Biaya Yang Masih Harus Dibayar lainnya merupakan tagihan pihak ke tiga atas masa pemeliharaan dan rupa-rupa lainnya.

Other accrued expenses represent third-party billings related to the maintenance period and other miscellaneous expenses.

19 PERPAJAKAN

Terdiri dari:

a. Utang Pajak

	31 Desember 2025/ December 31, 2025
Pajak Penghasilan:	
Pasal 21	4.915.901.622
Pasal 29	3.213.942.587
Pasal 4 ayat (2)	202.103.830
Pasal 23	12.070.334
Pasal 25	-
Pajak Pertambahan Nilai	311.959.541
Jumlah	8.655.977.914

19 TAXATION

Consist of:

a. Taxes Payable

	31 Desember 2024/ December 31, 2024	
	5.033.590.608	Income Taxes:
	4.237.978.122	Article 21
	235.542.777	Article 29
	16.647.149	Article 4 paragraph (2)
	1.339.396.483	Article 23
	418.161.671	Article 25
	11.281.316.810	Value Added Tax
		Total

Saldo Hutang PPh Pasal 21, Pasal 25 dan PPh Pasal 23, PPN, PPh pasal 4 ayat 2 per 31 Desember 2025 telah disetor pada bulan Januari 2026 sedangkan Pph Badan masih terhutang (Estimasi).

The outstanding balances of Income Tax Article 21, Article 25, and Article 23, Value Added Tax (VAT), and Income Tax Article 4(2) as of December 31, 2025 were paid in January 2026, while Corporate Income Tax remains payable (estimated).

b. Beban Pajak

	31 Desember 2025/ December 31, 2025
Pajak kini	19.745.858.220
Manfaat (beban) pajak tanggungan	480.636.148
Jumlah	20.226.494.368

b. Tax Expense

	31 Desember 2024/ December 31, 2024	
	20.310.735.720	Current tax
	1.395.426.236	Deferred tax benefit (expense)
	21.706.161.956	Total

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH
TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025
Serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH
TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
And For The Year Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

19 PERPAJAKAN (Lanjutan)

Rekonsiliasi antara laba sebelum beban pajak penghasilan seperti yang disajikan dalam laporan laba rugi dengan laba kena pajak Perusahaan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

	31 Desember 2025/ December 31, 2025
Laba sebelum pajak	79.383.866.450
Beda Permanen:	
Kesejahteraan Karyawan	3.179.508.848
Penyusutan Mess	5.617.765
Sumbangan	993.046.768
Sanksi administrasi	315.354.151
Rupa-rupa biaya umum lainnya	101.000.295
Biaya Representasi Direksi	1.337.500.000
Biaya Telekomunikasi (pulsa)	330.919.599
PPH Pasal 4 (2)	105.187.060
Bantuan dharma wanita	150.000.000
Sosial & kesejahteraan	266.390.000
Rupa-rupa operasi	805.802.250
Bunga deposito	(4.832.463.527)
Beda temporer	
Penyisihan Piutang Usaha	2.399.877.496
Penyisihan uang katineung	2.134.498.164
Pembayaran uang katineung	-
Penurunan nilai persediaan	1.192.769.065
Beban imbalan kerja	3.335.767.730
Penghapusan Piutang Usaha	(1.450.740.350)
Penghasilan Kena Pajak	89.753.901.764
Pembulatan	89.753.901.000
Pajak kini	19.745.858.220
Kredit pajak:	
Pajak Penghasilan Pasal 29	(16.531.915.633)
Utang Pajak Penghasilan	3.213.942.587

Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan yang dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku dari laba sebelum beban pajak penghasilan seperti yang dilaporkan pada laporan laba rugi adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2025/ December 31, 2025
Laba sebelum pajak penghasilan	79.383.866.450
Pajak dihitung pada tarif pajak yang berlaku	17.464.450.619
Pengaruh pajak atas beda permanen	606.729.906
Pengaruh pajak atas beda temporer	1.674.677.863
Efek pembulatan	(168)
Beban Pajak Penghasilan	19.745.858.220

19 TAXATION (Continued)

The reconciliation between profit before income tax expense as presented in the statement of profit or loss and the Company's taxable income for the years ended December 31, 2025 and December 31, 2024 is as follows:

	31 Desember 2024/ December 31, 2024	
	79.428.936.989	<i>Income Before Tax</i>
Permanent Differences:		
Employee Welfare	4.093.008.399	
Mess Depreciation	5.617.765	
Donations	1.008.289.100	
Administrative Sanctions	3.142.906.797	
Other General and Administrative Expenses	9.894.050	
Directors' Representation Expenses	1.235.000.000	
Telecommunication Expenses (airtime credit)	179.257.854	
Income Tax Article 4(2)	107.286.372	
Dharma Wanita Contribution	150.000.000	
Social & Welfare Expenses	613.773.500	
Miscellaneous Operations	(3.997.547.922)	
Interest on Deposits		
Temporary Differences:		
Provision for Trade Receivables	1.715.074.124	
Provision for Katineung Allowance	9.291.165.268	
Payment of Katineung Allowance	(2.506.340.718)	
Inventory Write-down	-	
Employee benefits expense	-	
Write-off of Trade Receivables	(2.154.794.800)	
Taxable Income	92.321.526.778	
Rounding	92.321.526.778	
Current Tax	20.310.735.720	
Tax Credits:		
Income Tax Article	16.072.757.598	
Income Tax Payable – Article 29	4.237.978.122	

The reconciliation between income tax expense calculated by applying the applicable tax rate to profit before income tax expense as reported in the statement of profit or loss is as follows:

	31 Desember 2024/ December 31, 2024	
	79.428.936.989	<i>Income Before Tax</i>
Tax calculated at the applicable tax rate	17.474.366.138	
Tax effect of permanent differences	1.440.446.901	
Tax effect of temporary differences	1.395.922.852	
Rounding effect	(171)	
Income Tax Expense	20.310.735.720	

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH
TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025
Serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH
TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
And For The Year Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

19 PERPAJAKAN (Lanjutan)

c. Aset Pajak Tangguhan

Pajak tangguhan dihitung berdasarkan pengaruh dari perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Rincian aset dan liabilitas pajak tangguhan sebagai berikut :

31 Desember 2025/ December 31, 2025				
	31- Des - 2024	Dikreditkan pada laba (rugi)/ Credited to profit (loss)	Dikreditkan pada penghasilan komprehensif lain/ Credited to other comprehensive income	31 – Des - 25
Penyisihan piutang	1.654.378.258	208.810.172		1.863.188.430
Penurunan nilai		262.409.194		262.409.194
Imbalan Pasca Kerja	11.873.227.685	(951.855.514)	1.447.740.240	12.369.112.411
Jumlah	13.527.605.943	(480.636.148)	1.447.740.240	14.494.710.035
31 Desember 2024/ December 31, 2024				
	31 - Des - 2023	Dikreditkan pada laba (rugi)/ Credited to profit (loss)	Dikreditkan pada penghasilan komprehensif lain/ Credited to other comprehensive income	31 – Des - 2024
Penyisihan piutang	1.751.116.808	(96.738.549)		1.654.378.259
Imbalan Pasca Kerja	11.398.140.514	(1.298.687.687)	1.773.774.857	11.873.227.684
Jumlah	13.149.257.322	(1.395.426.238)	1.773.774.857	13.527.605.943

20 TITIPAN RETRIBUSI

Terdiri dari:

	31 Desember 2025/ December 31, 2025	31 Desember 2024/ December 31, 2024	Related party: Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor
Pihak berelasi			
Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor	1.196.585.500	412.727.100	
Jumlah	1.196.585.500	412.727.100	Total

19 TAXATION (Continued)

c. Deferred Tax Assets

Deferred tax is calculated based on the effects of temporary differences between the carrying amounts of assets and liabilities according to the financial statements and the tax bases of the assets and liabilities. The details of deferred tax assets and liabilities are as follows.

20 RETRIBUTION COLLECTIONS HELD IN TRUST

Consists of:

	31 Desember 2025/ December 31, 2025	31 Desember 2024/ December 31, 2024	Related party: Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor
Pihak berelasi			
Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor	1.196.585.500	412.727.100	
Jumlah	1.196.585.500	412.727.100	Total

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH
TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025
Serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH
TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
And For The Year Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

21 PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA

Terdiri dari

	31 Desember 2025/ December 31, 2025
Uang muka sewa tanah PT.Bali Telkom	175.000.000
Uang muka sewa ATM Bank Kota Bogor	93.041.657
Uang muka sewa lain-lain	87.707.619
Uang muka sewa ATM BSI	54.000.000
Uang muka sewa ATM Mandiri	39.398.808
Uang muka sewa ATM BNI	28.875.000
Uang muka sewa ATM BRI	16.200.000
Uang muka Hankam	8.310.095
Jumlah	502.533.179

Jumlah tersebut merupakan pendapatan diterima dimuka atas sewa ruang ATM & sewa tanah berdasarkan perjanjian kerjasama dengan Bank BNI No.: 695/SP.55-PERUMDA.TPKB/2024 jangka waktu perjanjian tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan 10 Juli 2026; Bank Mandiri No.690/SP.70-PERUMDA.TPKB/2024 jangka waktu perjanjian tanggal 06 September 2024 sampai dengan 5 september 2026; Bank BRI No.695/SP.02-PERUMDA.TPKB/2020, Tanggal 08 Januari 2020 PT. Bali Telekom No.:690/SP.44/PERUMDA/2023 tgl. 07 februari 2023, Bank BJB nomor 695/SP.107-PERUMDA.TPKB/2023 jangka waktu perjanjian tanggal 27 November 2023 sampai dengan 27 November 2026, Bank BSI No.:695/SP.-01-/PERUMDA,TPKB/2025 No.:04/1605-3/017 jangka waktu perjanjian tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 1 Januari 2027, Bank Kota Bogor No.:690/SP.-64-/PERUMDA.TPKB/2025 jangka waktu perjanjian tanggal 30 Mei 2025 sampai dengan 31 Mei 2028.

21 UNEARNED REVENUE

Consist of:

	31 Desember 2024/ December 31, 2024	
	295.000.000	Advance rent – land lease PT Bali Telkom
	49.583.322	Advance rent – ATM lease Bank Kota Bogor
	908.927.756	Other advances
	-	Advance rent – ATM lease BSI
	34.034.168	Advance rent – ATM lease Mandiri
	27.499.998	Advance rent – ATM lease BNI
	16.200.000	Advance rent – ATM lease BRI
	8.310.095	Advance from Hankam
	1.339.555.339	Total

The amount is income received in advance for ATM space rental & land rental based on cooperation agreement with Bank BNI No.: 695/SP.55-PERUMDA.TPKB/2024 agreement period date July 10, 2024 to July 10, 2026; Bank Mandiri No.690/SP.70-PERUMDA.TPKB/2024 agreement period date September 6, 2024 to September 5, 2026; Bank BRI No.695/SP.02- PERUMDA.TPKB/2020, January 8, 2020 PT.Bali Telekom No.:690/SP.44/PERUMDA/2023 date February 7, 2023, Bank BJB number 695/SP.107-PERUMDA.TPKB/2023 agreement period date November 27, 2023 to November 27, 2026, Bank BSI No.:695/SP.-01-/PERUMDA,TPKB/2025 No.:04/1605-3/017 agreement period January 1, 2025 to January 1, 2027,Bank Kota Bogor No.:690/SP.-64-/PERUMDA.TPKB/2025 agreement period May 30, 2025 to May 31, 2028.

22 UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA

Terdiri dari:

	31 Desember 2025/ December 31, 2025
Imbalan paska kerja jangka pendek	10.716.534.956
Sambungan baru yang masih harus dipasang	3.440.296.031
Hutang jangka pendek pasang baru	2.779.265.837
Titipan rekening air	211.326.289
Jumlah	17.147.423.113

22 OTHER CURRENT LIABILITIES

Consists of:

	31 Desember 2024/ December 31, 2024	
	11.633.420.646	Short-term employee benefits
	4.024.145.812	New connections to be installed
	2.405.570.631	Short-term liabilities for new installations
	205.901.039	Water bill deposits
	18.269.038.128	Total

23 UTANG BANK

Terdiri dari:

a. Bagian Utang Jangka Pendek

	31 Desember 2025/ December 31, 2025
World Bank	5.484.766.185
PT BPD Jawa Barat dan Banten	5.385.787.125
Jumlah	10.870.553.310

23 BANK LOAN

Consists of:

a. Current Portion of Bank Loans

	31 Desember 2024/ December 31, 2024	
	5.484.766.179	World Bank
	5.385.787.125	PT BPD Jawa Barat dan Banten
	10.870.553.304	Total

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH
TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025
Serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

23 UTANG BANK (Lanjutan)

b. Bagian Utang Bank Jangka Panjang

	31 Desember 2025/ December 31, 2025
World Bank	38.393.363.246
PT BPD Jawa Barat dan Banten	32.314.722.719
Jumlah	70.708.085.965

1. IBRD SLA 1226/DSMI/2009/2 November 2009

Hutang tersebut karena adanya perjanjian antara Pemerintah Kota Bogor dengan Perusahaan tentang Pelaksanaan Penerusan Pinjaman Pembiayaan UWSSP Kota Bogor dengan ketentuan :

Loan Agreement (NPPLN)	Ln 7730-ID/1 September 2009
Sub Loan (NPPP)	SLA 1226/DSMI/2009/2 November 2009
Pagu Pinjaman	Rp. 85.204.000.000

Bunga NPPLN LIBOR + Variable Spread+5,02 % per tahun dihitung sejak penarikan pinjaman.
Bunga Tunggal 0,5 % diatas tingkat suku bunga.

Jangka Waktu 24,5 tahun termasuk masa tenggang 9 tahun
Jumlah Hutang Pokok Pinjaman Penerusan, dibayar dalam 31 kali angsuran setiap 15 April dan 15 Oktober
Angsuran pertama mulai dibayarkan pada tanggal 15 Oktober 2018 dan terakhir pada tanggal 15 Oktober 2033.

2. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa barat dan Banten Tbk

Saldo Hutang Jangka Panjang Per 31 Desember 2023 merupakan penarikan dana berdasarkan perjanjian kredit nomor 97 tanggal 20 Desember tahun 2023 PT BPD Jabar & Banten Tbk dengan Perusahaan dengan ketentuan :

Pagu Pinjaman	Rp. 54.700.000.000
Suku bunga :	Suku bunga acuan menjadi beban Perusahaan ditambah subsidi bunga yang dibayarkan oleh Pemerintah
Suku bunga acuan	Mengacu pada PerMenkeu nomor 60/PMK.08/2020
Jangka Waktu kredit	120 bulan TMT 20 Desember 2022 s/d 20 Desember 2032
Pembayaran pokok	Setiap tanggal 23 tiap bulan sejak bulan Januari 2024

24 JAMINAN PELANGGAN

Terdiri dari:

	31 Desember 2025/ December 31, 2025
Uang jaminan pelanggan	2.878.832.025
Uang jaminan pihak ke-3	25.000.000
Jumlah	2.903.832.025

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH
TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
And For The Year Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

23 BANK LOAN (Continued)

b. Non-Current Portion of Bank Loans

	31 Desember 2024/ December 31, 2024	
	43.878.129.422	World Bank
	37.700.509.847	PT BPD Jawa Barat dan Banten
Total	81.578.639.269	

1. IBRD SLA 1226/DSMI/2009 dated November 2, 2009

The debt is due to an agreement between the Bogor City Government and the Company regarding the Implementation of the Continuation of the Bogor City UWSSP Financing Loan with the following provisions:

Loan Agreement (NPPLN)	Ln 7730-ID dated September 1, 2009
Sub Loan (NPPP)	SLA 1226/DSMI/2009 dated November 2, 2009
Loan Ceiling	Rp 85,204,000,000

Interest NPPLN : LIBOR + Variable Spread + 5.02% per annum, calculated from the date of loan withdrawal.
Penalty Interest : 0.5% above the applicable interest rate

Loan Term : 24.5 years including a 9-year grace period
The principal amount of the on-lending loan is payable in 31 installments every April 15 and October 15.
The first installment was paid on October 15, 2018 and the last installment will be due on October 15, 2033.

2. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk

Long-Term Debt Balance as of December 31, 2023 represents the withdrawal of funds based on credit agreement number 97 dated December 20, 2023, PT BPD Jabar & Banten Tbk with the Company with the following provisions:

Loan Ceiling	Rp. 54.700.000.000
Interest Rate	The benchmark interest rate is the Company's burden plus the interest subsidy paid by the Government.
Benchmark Interest Rate	Refers to Minister of Finance Regulation No. 60/PMK.08/2020.
Loan Term	120 months commencing December 20, 2022 up to December 20, 2032.
Principal Repayment	On the 23rd of each month starting from January 2024.

24 COSTUMER DEPOSIT

Consists of:

	31 Desember 2024/ December 31, 2024	
	2.899.950.175	Customer security deposits
	-	Third-party security deposits
Total	2.899.950.175	

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH
TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025
Serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH
TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
And For The Year Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

24 JAMINAN PELANGGAN (Lanjutan)

Jumlah tersebut merupakan Uang Jaminan Pelanggan Air (UJPA) yang telah disetor oleh para pelanggan sampai dengan 31 Desember 2000, mulai tahun 2003 para pelanggan tidak dikenakan UJPA sesuai dengan Kep.Men OTDA No.8 Tahun 2000. Pengurangan terjadi karena dikompensasikan dengan tunggakan para pelanggan serta deposit pengelolaan satuan pelayanan pemenuhan gizi dari Yayasan Bhakti Garuda Putra

24 COSTUMER DEPOSIT (Continued)

The above amount represents Water Customer Security Deposits (UJPA) that had been paid by customers up to December 31, 2000. Starting in 2003, customers were no longer required to pay UJPA in accordance with Minister of Regional Autonomy Decree No. 8 of 2000. The decrease occurred due to compensation against customers' outstanding receivables as well as the management service unit deposit for nutritional fulfillment services from Yayasan Bhakti Garuda Putra.

25 IMBALAN PASCA KERJA

Terdiri dari:

Perhitungan atas utang imbalan pasca kerja per 31 Desember 2025 dan 2024 dilakukan oleh Kantor Konsultan Aktuaria (KKA) Tubagus Syafrial & Amran Nangasan dengan perhitungan sebagai berikut:

25 POST-EMPLOYMENT BENEFITS

Consists of:

The calculation of post-employment benefit liabilities as of December 31, 2025 and 2024 was performed by the Actuarial Consulting Firm (KKA) Tubagus Syafrial & Amran Nangasan using the following calculations:

	31 Desember 2025/ December 31, 2025	31 Desember 2024/ December 31, 2024	
Tingkat Diskonto	5,45660%	6.47%	Discount rate
Tingkat Kenaikan Gaji	4,50%	4,50%	Salary increase rate
Tingkat Mortalita	TMI-IV 2019 Unisex	TMI-IV 2019 Unisex	Mortality rate
Tingkat Cacat	3%	3%	Disability rate
Tingkat Mengundurkan Diri	1.00%	1.00%	Resignation rate
Usia Pensiun Normal	56 Tahun	56 Tahun	Normal retirement age
1. Program Pensiun			1. Pension Program
	31 Desember 2025/ December 31, 2025	31 Desember 2024/ December 31, 2024	
Liabilitas (Aset) Imbalan Pasti Neto			Net Defined Benefit Liability (Asset)
Nilai kini kewajiban	(219.367.960.906)	(203.980.900.719)	Present value of obligation
Nilai wajar aset program	181.906.328.402	168.813.840.045	Fair value of plan assets
Liabilitas (Aset) Imbalan Pasti Neto	(37.461.632.504)	(35.167.060.674)	Net Defined Benefit Liability (Asset)
Beban Diakui Dalam Laporan Laba Rugi			Expenses Recognized in the Statement of Profit or Loss
Biaya jasa kini	1.912.379.841	1.983.348.120	Current service cost
Biaya jasa lalu	-	-	Past service cost
Bunga neto atas liabilitas (aset)	1.939.013.250	2.168.458.323	Net interest on the liability (asset)
Iuran program dari karyawan (keuntungan)/kerugian aktuaria	(515.625.361) -	(502.071.497) -	Program contributions from employees Actuarial (gains)/losses
Beban Diakui Dalam Laba Rugi	3.335.767.730	3.649.734.946	Expenses Recognized in Profit or Loss
Beban Diakui Dalam Pendapatan Komprehensif lain -OCI			Expenses Recognized in Other Comprehensive Income (OCI)
(keuntungan) dan kerugian aktuaria	8.170.085.809	3.620.063.781	Actuarial (gains) and losses
Imbalan hasil diluar bunga aset tetap	585.600.158	4.442.549.204	Return on assets excluding interest
Perubahan atas dampak batas aset	-	-	Changes in the effect of the asset ceiling
Pengukuran kembali liabilitas (aset) - periode berjalan	8.755.685.967	8.062.612.985	Remeasurement of liability (asset) - current period

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH
TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025
Serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH
TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
And For The Year Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

25 IMBALAN PASCA KERJA (Lanjutan)

1. Program Pensiun (lanjutan)

**Rekonsiliasi Perubahan
Kewajiban Pada Neraca**

Kewajiban pada awal periode	35.167.060.674
Beban diakui dalam laba rugi	3.335.767.730
Beban diakui dalam laporan penghasilan komprehensif lain	8.755.685.967
Pembayaran manfaat dari perusahaan	-
Iuran dari perusahaan	(9.796.881.867)
Kewajiban pada akhir periode	37.461.632.504

Pengukuran Kembali liabilitas (aset) pada OCI

Pengukuran Kembali liabilitas (aset) awal periode	8.062.612.985
Pengukuran Kembali liabilitas (aset) periode berjalan	8.755.685.967
Pengukuran Kembali liabilitas (aset) akhir periode	16.818.298.952

2. Program Pesangon

Liabilitas (Aset) Imbalan Pasti Neto

Nilai kini kewajiban	18.761.605.727
Nilai wajar aset program	-
Liabilitas (Aset) Imbalan Pasti Neto	18.761.605.727

Beban Diakui Dalam Laporan Laba Rugi

Biaya jasa kini	806.657.750
Biaya jasa lalu	-
Bunga neto atas liabilitas (aset) iuran program dari karyawan (keuntungan)/kerugian aktuarial	1.327.840.414
	-
	-

Beban Diakui Dalam Laba Rugi	2.134.498.164
-------------------------------------	----------------------

Beban Diakui Dalam Pendapatan Komprehensif lain (OCI)

(keuntungan) dan kerugian aktuarial	(2.175.048.511)
Imbalan hasil diluar bunga aset tetap	-
Perubahan atas dampak batas aset	-
Pengukuran kembali liabilitas (aset) - periode berjalan	(2.175.048.511)

25 POST-EMPLOYMENT BENEFITS (Continued)

1. Pension Program (Continued)

Reconciliation of Changes in Liability in the Statement of Financial Position

Liability at the beginning of the period	33.007.573.542
Expenses recognized in profit or loss	3.649.734.946
Expenses recognized in other comprehensive income	8.062.612.985
Benefit payments by the Company	-
Contributions by the Company	(9.552.860.799)
Liability at the end of the period	35.167.060.674

Remeasurement of liability (asset) in OCI

Remeasurement of liability (asset) at the beginning of the period	-
Remeasurement of liability (asset) for the current period	8.062.612.985
Remeasurement of liability (asset) at the end of the period	8.062.612.985

2. Severance Pay Program

Net Defined Benefit Liability (Asset)

Present value of defined benefit obligation	18.802.156.074
Fair value of plan assets	-
Net Defined Benefit Liability (Asset)	18.802.156.074

Expense Recognized in Profit or Loss

Current service cost	-
Past service cost	-
Net interest on the liability (asset)	-
Employee contributions	-
Actuarial (gains)/losses	-
Expense Recognized in Profit or Loss	-

Expense recognized in other comprehensive income (OCI)

Actuarial gains and losses	-
Return on plan assets excluding interest income	-
Changes in the effect of the asset ceiling	-
Remeasurement of liability (asset) - current period	-

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH
TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025
Serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH
TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
And For The Year Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

25 IMBALAN PASCA KERJA (Lanjutan)

2. Program Pesangon (Lanjutan)

Rekonsiliasi Perubahan Kewajiban Pada Neraca

	31 Desember 2025/ December 31, 2025	31 Desember 2024/ December 31, 2024
Kewajiban pada awal periode	18.802.156.074	18.802.156.074
Beban diakui dalam laba rugi	2.134.498.164	-
Beban diakui dalam laporan penghasilan komprehensif lain	(2.175.048.511)	-
Pembayaran manfaat dari perusahaan	-	-
luran dari perusahaan	-	-
Kewajiban pada akhir periode	18.761.605.727	18.802.156.074

Pengukuran Kembali liabilitas (aset) pada OCI

	31 Desember 2025/ December 31, 2025	31 Desember 2024/ December 31, 2024
Pengukuran Kembali liabilitas (aset) awal periode	-	-
Pengukuran Kembali liabilitas (aset) periode berjalan	(2.175.048.511)	-
Pengukuran Kembali liabilitas (aset) akhir periode	(2.175.048.511)	-

	31 Desember 2025/ December 31, 2025	31 Desember 2024/ December 31, 2024
--	--	--

a. Imbalan pasca kerja jangka pendek

Pensiun	9.664.887.876	4.532.650.476
Pesangon	1.051.647.080	7.100.770.170
Jumlah	10.716.534.956	11.633.420.646

b. Imbalan pasca kerja jangka panjang

Pensiun	27.796.744.628	30.634.410.198
Pesangon	17.709.958.647	11.701.385.904
Jumlah	45.506.703.275	42.335.796.102

Jumlah Imbalan Pasca Kerja	56.223.238.231	53.969.216.748
-----------------------------------	-----------------------	-----------------------

26 MODAL

Terdiri dari:

	31 Desember 2025/ December 31, 2025	31 Desember 2024/ December 31, 2024
Pemerintah kota bogor	342.951.510.000	327.951.510.000
Pemerintah pusat	29.120.142.000	29.120.142.000
Jumlah	372.071.652.000	357.071.652.000

25 POST-EMPLOYMENT BENEFITS (Continued)

2. Severance Pay Program (Continued)

Reconciliation of Changes in the Liability

	31 Desember 2025/ December 31, 2025	31 Desember 2024/ December 31, 2024
Opening obligation	18.802.156.074	18.802.156.074
Expense recognized in profit or loss	2.134.498.164	-
Expense recognized in other comprehensive income (OCI)	(2.175.048.511)	-
Benefits paid by the Company	-	-
Employer contributions	-	-
Closing obligation	18.761.605.727	18.802.156.074

Remeasurement of liability (asset) recognized in OCI

	31 Desember 2025/ December 31, 2025	31 Desember 2024/ December 31, 2024
Remeasurement of liability (asset) at the beginning of the period	-	-
Remeasurement of liability (asset) for the current period	(2.175.048.511)	-
Remeasurement of liability (asset) at the end of the period	(2.175.048.511)	-

	31 Desember 2025/ December 31, 2025	31 Desember 2024/ December 31, 2024
--	--	--

a. Short-term Post-Employment Benefits

Pension	9.664.887.876	4.532.650.476
Severance pay	1.051.647.080	7.100.770.170
Total	10.716.534.956	11.633.420.646

b. Long-term post-employment benefits

Pension	27.796.744.628	30.634.410.198
Severance pay	17.709.958.647	11.701.385.904
Total	45.506.703.275	42.335.796.102

Total Post-Employee Benefits

26 CAPITAL

Consists of:

	31 Desember 2025/ December 31, 2025	31 Desember 2024/ December 31, 2024
Bogor City Government	342.951.510.000	327.951.510.000
Central Government	29.120.142.000	29.120.142.000
Total	372.071.652.000	357.071.652.000

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH
TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025
Serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH
TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
And For The Year Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

26 MODAL (Lanjutan)

26 CAPITAL (Continued)

Modal Pemerintah pusat:

Central Government Capital:

**31 Desember 2025/
December 31, 2025**

**31 Desember 2024/
December 31, 2024**

Pemasangan Pipa HDPE distribusi dan retikulasi bantuan APBN 2009-2010 di lima kecamatan Kota Bogor, s/d Maret 2011 belum ada serah terima.

12.885.773.000

12.885.773.000

Installation of HDPE distribution and reticulation pipelines funded by the State Budget (APBN) 2009–2010 in five districts of Bogor City, as of March 2011 not yet officially handed over

Instalasi Pengolahan Air (IPA) Lengkap Palasari, sesuai Berita Acara Serah terima sementara Pengelolaan Sementara Nomor 099/BASTP/PSPAM-IKK/XII/2008 tanggal 30 Desember 2008.

-

Complete Water Treatment Plant (WTP) Palasari, in accordance with the Minutes of Temporary Handover of Interim Management No. 099/BASTP/PSPAM-IKK/XII/2008 dated December 30, 2008.

Bangunan prasedimentasi dan jaringan perpipaan transmisi dan distribusi dia 100 mm di Ciherang Pondok kab Bogor, yang dibangun oleh SVNT pelaksana pengelolaan SDA Ciliwung-Cisadane Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane Dirjen Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum sesuai dengan amandemen II Mutual Check akhir (MC-100) No.KU08.10/PPKPAB/SNVTPV SDACC/XII/1403 tanggal 27 Des 2010 yang oleh PDAM telah dioperasikan sejak 31 Desember 2010.

16.234.369.000

16.234.369.000

Pre-sedimentation building and transmission and distribution pipeline network diameter 100 mm in Ciherang Pondok, Bogor Regency, constructed by SNVT implementing Ciliwung-Cisadane Water Resources Management, Ciliwung-Cisadane River Basin Authority, Directorate General of Water Resources, Ministry of Public Works, in accordance with Amendment II Final Mutual Check (MC-100) No. KU08.10/PPKPAB/S NVTPVSDACC/XII/1403 December 27, 2010, which has been operated by PDAM since December 31, 2010.

Jumlah Pemerintah Pusat

29.120.142.000

29.120.142.000

Total Central Government Capital

Modal Pemerintah Kota Bogor:

Bogor City Government Capital:

**31 Desember 2025/
December 31, 2025**

**31 Desember 2024/
December 31, 2024**

Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2023 tanggal 18 April 2024:

Regional Regulation of Bogor City No. 3 of 2023 dated April 18, 2024:

Prasarana dan Sarana Sistem Penyediaan Air Bersih di Desa Tegal Gundil Kota Bogor, sesuai dengan Berita Acara Serah Terima pengelolaan sementara Nomor : 02/BA/ca.09/1998 tanggal 25 Mei 1998.

644.946.000

644.946.000

Infrastructure and Facilities of Clean Water Supply System in Tegal Gundil Village, Bogor City, in accordance with Minutes of Temporary Handover No. 02/BA/ca.09/1998 dated May 25, 1998. Derived from DIP value: land, buildings, machinery and equipment, main pipelines, water plant miscellaneous assets, inventories, etc. Year 1987.

Berasal dari nilai DIP : nilai tanah, bangunan, mesin dan perlengkapan, pipa induk, rupa-rupa pabrik air, persediaan, dll. Tahun 1987.

1.036.740.801

1.036.740.801

Receipt of facilities and infrastructure such as construction buildings, water plant, vehicles, etc. (Minutes No. 64/BA/Pemb./1991/1992 dated April 25, 1992).

Penerimaan sarana dan prasarana, seperti bangunan konstruksi, pabrik air, kendaraan dll. (Berita Acara Nomor 64/BA/Pemb./1991/1992 tgl 25 April 1992).

457.433.050

457.433.050

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH
TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025
Serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH
TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
And For The Year Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

26 MODAL (Lanjutan)	26 CAPITAL (Continued)
Modal Pemerintah Kota Bogor (Lanjutan)	Bogor City Government Capital (Continued):
Dana pendamping Pemda Provinsi Jabar pada Proyek P3KT, tahun 1995, 1996, dan 1997.	Matching funds from West Java Provincial Government for P3KT Project, years 1995, 1996, and 1997.
Bantuan Colombo Plan, tahun 1977, \$2.900.500 dengan kurs Rp520,00.	Colombo Plan assistance, year 1977, USD 2,900,500 at exchange rate Rp520.00.
Bantuan dari Negeri Belanda, tahun 1989, berupa komputer, alat laboratorium, peralatan bengkel, kendaraan dan logam detektor.	Assistance from the Netherlands Government, year 1989, in the form of computers, laboratory equipment, workshop equipment, vehicles and metal detectors.
Modal awal berupa kekayaan dikurangi hutang atau kekayaan bersih.	Initial capital in the form of assets net of liabilities or net assets.
Penyertaan Pemda Kota Bogor 1992 s/d 2009, setelah dikompensasi dengan hutang Rp471.186.802,67.	Capital participation of Bogor City Government 1992 to 2009, after compensation with debt of Rp471,186,802.67.
Setoran dari bagian laba Pemkot Bogor Tahun 2003 s/d tahun 2008.	Contribution from profit distribution of Bogor City Government 2003 to 2008.
Dana Pendamping tahun 2007 dan 2008.	Matching funds year 2007 and 2008.
Dana pendamping Pemda Kota Bogor pada Program Hibah Air Minum, tahun 2010.	Matching funds from Bogor City Government under the Water Grant Program, year 2010.
Dana pendamping Pemda Kota Bogor pada Urban Water Supply & Sanitation Project (UWSSP), tahun 2010.	Matching funds from Bogor City Government under the Urban Water Supply & Sanitation Project (UWSSP), year 2010.
Setoran dari bagian laba Pemkot Bogor Tahun 2009.	Contribution from profit distribution of Bogor City Government year 2009.
Tambahan Penyertaan Modal tahun 2010. (Dana Pendamping)	Additional capital participation year 2010 (Matching Funds).
Setoran dari bagian laba Pemkot Bogor Tahun 2010.	Contribution from profit distribution of Bogor City Government year 2010.
Dana pendamping Pemda Kota Bogor pada Program Hibah Air Minum, tahun 2011.	Matching funds from Bogor City Government under the Water Grant Program, year 2011.
Dana pendamping Pemda Kota Bogor pada Program Bank Dunia, tahun 2011.	Matching funds from Bogor City Government under the World Bank Program, year 2011.
Setoran dari bagian laba Pemkot Bogor Tahun 2011.	Contribution from profit distribution of Bogor City Government year 2011.
Dana pendamping Pemda Kota Bogor pada Program Hibah Air Minum, tahun 2012.	Matching funds from Bogor City Government under the Water Grant Program, year 2012.
Dana pendamping Pemda Kota Bogor pada Program Bank Dunia, tahun 2012.	Matching funds from Bogor City Government under the World Bank Program, year 2012.
Dana pendamping Pemda Kota Bogor pada Pembebasan lahan Intake, tahun 2012.	Matching funds from Bogor City Government for Intake land acquisition, year 2012.
Setoran dari bagian laba Pemkot Bogor Tahun 2012	Contribution from profit distribution of Bogor City Government year 2012.
Dana pendamping Pemda Kota Bogor pada Pembebasan lahan Intake, tahun 2012.	Matching funds from Bogor City Government for Intake land acquisition, year 2012.
Dana pendamping Pemda Kota Bogor pada Pembebasan Reservoir Zona 4.	Matching funds from Bogor City Government for Reservoir Zone 4 land acquisition.

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH
TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025
Serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH
TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
And For The Year Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

26 MODAL (Lanjutan)

Modal Pemerintah Kota Bogor (Lanjutan)

Dana pendamping Pemda Kota Bogor pada Perluasan Jaringan Distribusi.	1.200.000.000
Dana pendamping Pemda Kota Bogor pada Program Kehilangan Air	2.500.000.000
Setoran dari bagian laba Pemkot Bogor Tahun 2013.	17.651.447.957
Dana pendamping Pemda Kota Bogor pada Program water hibah, tahun 2013.	6.000.000.000
Dana pendamping Pemda Kota Bogor pada Perluasan Jaringan Distribusi.	5.300.000.000
Dana pendamping Pemda Kota Bogor pada Program Kehilangan Air	2.622.000.000
Pengembalian Kelebihan dana pendamping program kehilangan air	(500.000.000)
Penyertaan modal Pemkot Bogor Tahun 2015.	10.921.110.161
Penyertaan modal Pemkot Bogor Tahun 2016.	52.898.242.000
Penyertaan modal Pemkot Bogor Tahun 2017.	10.934.000.000
Penyertaan modal Pemkot Bogor Tahun 2019.	10.000.000.000
Penyertaan modal Pemkot Bogor Tahun 2020.	24.300.000.000
Penyertaan modal Pemkot Bogor Tahun 2024.	47.819.268.000
Penyertaan modal Pemkot Bogor Tahun 2025.	15.000.000.000
Jumlah Modal Pemerintah Pusat	342.951.510.000

Mutasi Modal:

	31 Desember 2025/ December 31, 2025
Saldo per 31 Desember 2008	35.808.026.323
Tambahan Penyertaan Modal 2009	1.470.000.000
Pembagian Laba Tahun 2008	9.030.803.266
Saldo per 31 Desember 2009	46.308.829.589
Tambahan Penyertaan modal 2010	8.437.733.568
Tambahan Penyertaan modal sementara Pemerintah Pusat	16.528.525.200
Pembagian Laba Tahun 2009	10.862.102.432
Saldo per 31 Desember 2010	82.137.190.789
Tambahan Penyertaan modal 2011	9.940.701.000
Tambahan Penyertaan (Dana Pendamping)	9.437.000.000
Tambahan Penyertaan modal sementara Pemerintah Pusat	16.234.369.000
Saldo per 31 Desember 2011	117.749.260.789

26 CAPITAL (Continued)

Bogor City Government Capital (Continued):

1.200.000.000	Matching funds from Bogor City Government for Distribution Network Expansion.
2.500.000.000	Matching funds from Bogor City Government for Non-Revenue Water Program.
17.651.447.957	Contribution from profit distribution of Bogor City Government year 2013.
6.000.000.000	Matching funds from Bogor City Government under the Water Grant Program, year 2013.
5.300.000.000	Matching funds from Bogor City Government for Distribution Network Expansion.
2.622.000.000	Matching funds from Bogor City Government for Non-Revenue Water Program.
(500.000.000)	Refund of excess matching funds for Non-Revenue Water Program.
10.921.110.161	Capital participation of Bogor City Government year 2015
52.898.242.000	Capital participation of Bogor City Government year 2016.
10.934.000.000	Capital participation of Bogor City Government year 2017
10.000.000.000	Capital participation of Bogor City Government year 2019
24.300.000.000	Capital participation of Bogor City Government year 2020
47.819.268.000	Capital participation of Bogor City Government year 2024
-	Capital participation of Bogor City Government year 2025
327.951.510.000	Total Bogor City Government Capital

Changes in Capital:

35.808.026.323	Balance as of December 31, 2008
1.470.000.000	Additional Capital Participation 2009
9.030.803.266	Profit Distribution Year 2008
46.308.829.589	Balance as of December 31, 2009
8.437.733.568	Additional Capital Participation 2010
16.528.525.200	Additional Temporary Capital Participation – Central Government
10.862.102.432	Profit Distribution Year 2009
82.137.190.789	Balance as of December 31, 2010
9.940.701.000	Additional Capital Participation 2011
9.437.000.000	Additional Participation (Matching Funds)
16.234.369.000	Additional Temporary Capital Participation – Central Government
117.749.260.789	Balance as of December 31, 2011

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH
TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025
Serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH
TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
And For The Year Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

26 MODAL (Lanjutan)	26 CAPITAL (Continued)
Mutasi Modal (Lanjutan) :	Changes in Capital (Continued):
Tambahan Penyertaan modal 2012	12.279.435.000 Additional Capital Participation 2012
Penyertaan Dana Pendamping Water Hibah	2.000.000.000 Participation – Water Grant Matching Funds
Penyertaan Dana Pendamping Bank Dunia	5.429.000.000 Participation – World Bank Matching Funds
Penyertaan Pembebasan lahan Intake	10.000.000.000 Participation – Intake Land Acquisition
Saldo per 31 Desember 2012	147.457.695.789 Balance as of December 31, 2012
Tambahan Penyertaan modal 2013	15.122.405.000 Additional Capital Participation 2013
Penyertaan Pembebasan Lahan Intake	4.088.235.294 Participation – Intake Land Acquisition
Penyertaan Dana Pendamping Reservoir Zona 4	2.400.000.000 Participation – Reservoir Zone 4 Matching Funds
Penyertaan Dana Pendamping Jaringan Distribusi	1.200.000.000 Participation – Distribution Network Matching Funds
Penyertaan Program Kehilangan Air	2.500.000.000 Participation – Non-Revenue Water Program
Saldo per 31 Desember 2013	172.768.336.083 Balance as of December 31, 2013
Tambahan Penyertaan modal 2014	17.651.447.956 Additional Capital Participation 2014
Tambahan Penyertaan Program water hibah	6.000.000.000 Additional Participation – Water Grant Program
Tambahan Penyertaan perluasan jaringan	5.300.000.000 Additional Participation – Network Expansion
Tambahan Penyertaan Program kehilangan air	2.622.000.000 Additional Participation – Non-Revenue Water Program
Pengembalian kelebihan dana pendamping program kehilangan air	(500.000.000) Refund of excess matching funds – Non-Revenue Water Program
Saldo per 31 Desember 2014	203.841.784.039 Balance as of December 31, 2014
Tambahan Penyertaan modal 2015	10.921.110.161 Additional Capital Participation 2015
Saldo per 31 Desember 2015	214.762.894.200 Balance as of December 31, 2015
Tambahan Penyertaan modal 2016	52.898.242.000 Additional Capital Participation 2016
Saldo per 31 Desember 2016	267.661.136.200 Balance as of December 31, 2016
Tambahan Penyertaan modal 2017	10.934.000.000 Additional Capital Participation 2017
Saldo per 31 Desember 2018	278.595.136.200 Balance as of December 31, 2018
Tambahan Penyertaan modal 2019	10.000.000.000 Additional Capital Participation 2019
Saldo per 31 Desember 2019	288.595.136.200 Balance as of December 31, 2019
Tambahan Penyertaan modal 2020	24.300.000.000 Additional Capital Participation 2020
Saldo per 31 Desember 2020	312.895.136.200 Balance as of December 31, 2020
Tambahan Penyertaan modal 2024	47.819.268.000 Additional Capital Participation 2024
Instalasi Pengolahan Air Palasari tahun 2010	(3.642.752.200) Palasari Water Treatment Plant year 2010
Tambahan Penyertaan modal 2025	15.000.000.000 Additional Capital Participation 2025
Saldo per 31 Desember 2025	372.071.652.000 Balance as of December 31, 2025

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH
TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025
Serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

27 CADANGAN UMUM

Terdiri dari:

	31 Desember 2025/ December 31, 2025
Saldo awal	53.542.051.643
Penambahan	15.370.732.330
Saldo Akhir	68.912.783.973

Saldo Cadangan umum tersebut merupakan dana yang tersedia berasal dari pembagian laba bersih untuk cadangan umum Perusahaan sesuai dengan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 21 Tahun 2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Pengelolaan PERUMDA Tirta Pakuan Kota Bogor Pasal 27 ayat (2) menetapkan penggunaan laba bersih setelah Pajak Penghasilan.

Pembagian laba tahun 2024 ditetapkan berdasarkan keputusan Walikota Bogor Nomor 900.1.13.2/Kep.1226-Bag.Ekon/2025 tentang penggunaan laba Perusahaan Umum Daerah Kota Bogor Tahun Buku 2024 tanggal 8 Juli 2024. Berdasarkan keputusan tersebut penggunaan laba tahun 2024 untuk pemenuhan dana cadangan ditetapkan sebesar 26%.

28 SALDO LABA

Terdiri dari:

	31 Desember 2025/ December 31, 2025
Saldo awal	133.175.889.593
Koreksi aset pajak tangguhan	-
Penambahan	10.132.089.712
Pengukuran kembali imbalan pasca kerja	-
Saldo Akhir	143.307.979.305

Laba ditahan merupakan pembentukan sisa laba bersih setelah pajak penghasilan dengan peraturan daerah Nomor : 21 tahun 2019 tentang pengelolaan PERUMDA Tirta Pakuan Kota Bogor.

29 LABA TAHUN BERJALAN

Jumlah tersebut merupakan perhitungan laba perusahaan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 dengan perincian sebagai berikut :

	31 Desember 2025/ December 31, 2025
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	79.383.866.450
Pajak Penghasilan - bersih	(20.226.494.368)
Laba Bersih	59.157.372.082

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH
TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
And For The Year Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

27 GENERAL RESERVE

Consist of:

	31 Desember 2024/ December 31, 2024	
	35.630.193.876	Beginning balance
	17.911.857.767	Addition
	53.542.051.643	Ending Balance

The general reserve balance is the available funds originating from the distribution of net profit for the Company's general reserves in accordance with Regional Regulation Number: 21 of 2019 dated December 31 2019 concerning the Management of PERUMDA Tirta Pakuan, Bogor City, Article 27 paragraph (2) stipulates the use of net profit after Income Tax.

The distribution of profit for 2024 was determined based on the Decree of the Mayor of Bogor Number 900.1.13.2/Kep.1226-Bag.Ekon/2025 concerning the utilization of profit of Perusahaan Umum Daerah Kota Bogor for Fiscal Year 2024 dated July 8, 2024. Based on such decree, the utilization of profit for 2024 for the fulfillment of reserve funds was determined at 26%.

28 RETAINED EARNINGS

Consist of:

	31 Desember 2024/ December 31, 2024	
	106.522.708.315	Beginning balance
	13.149.257.322	Deferred tax asset adjustment
	4.617.545.807	Additions
	8.886.378.149	Remeasurement of post employment benefits
	133.175.889.593	Total Ending balance

Retained earnings represent the appropriation of the remaining net profit after income tax in accordance with Regional Regulation Number 21 of 2019 concerning the management of PERUMDA Tirta Pakuan Kota Bogor.

29 PROFIT FOR THE YEAR

The amount represents the calculation of the Company's profit for the years ended October 31, 2025 and October 31, 2024, with details as follows:

	31 Desember 2024/ December 31, 2024	
	79.428.936.989	Profit Before Income Tax
	(21.706.161.956)	Income Tax - net
	57.722.775.033	Net Profit

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH
TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025
Serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH
TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
And For The Year Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

30 PENJUALAN AIR

Terdiri dari:

	31 Desember 2025/ December 31, 2025
Harga air	324.293.149.220
Abodemen	59.681.807.400
Penjualan air lainnya	31.039.000
Jumlah	384.005.995.620

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 900.1.13.2/Kep.285-Ekon/2023 Tahun 2023 tanggal 26 September 2023 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah Tirta Pakuan Kota Bogor, Perusahaan melakukan penyesuaian tarif air minum yang berlaku untuk rekening Oktober 2023 & ditagihkan bulan November 2023.

Penyesuaian tarif air minum tahun 2023 menjadi sebagai berikut :

30 WATER SALES

Consist of:

	31 Desember 2024/ December 31, 2024	
	319.233.632.195	Water charges
	56.633.583.800	Subscription fees
	30.382.000	Other water sales
Jumlah	375.897.597.995	Total

Based on Mayoral Regulation Number 900.1.13.2/Kep.285-Ekon/2023 of 2023 dated September 26, 2023 concerning Drinking Water Tariffs for the Perusahaan Umum Daerah Tirta Pakuan Kota Bogor, the Company made adjustments to the drinking water tariffs applicable to the October 2023 bill & billed in November 2023.

The adjustment of the drinking water tariff in 2023 is as follows:

Golongan Pelanggan	Pemakaian Air (Water Using)				Customer Classification
	0 s/d 10 m3	11 s/d 20 m3	21 s/d 30 m3	>30 m3	
Sosial Umum (S1)	800	1000	1100	1200	Public Social (S1)
Sosial Khusus (S2)	1800	2700	3000	3200	Special Social (S2)
Rumah Tangga (R1)	2000	3000	3300	3500	Household (R1)
Rumah Tangga (R2)	2500	3500	4500	4700	Household (R2)
Rumah Tangga (R3)	3500	4700	5500	5600	Household (R3)
Rumah Tangga (R4)	4000	5900	6200	6300	Household (R4)
Rumah Tangga (R5)	5200	6700	7200	7300	Household (R5)
Rumah Tangga (R6)	7500	10600	11000	11300	Household (R6)
Rumah Tangga (R7)	9000	12400	13200	13600	Household (R7)
Rumah Tangga (R8)	10300	14200	15000	15400	Household (R8)
Instansi Pemerintah (IP)	11000	12500	13500	14500	Government Institutions (IP)
Niaga (N1)	9900	13500	16000	16500	Commercial (N1)
Niaga (N2)	11000	12500	13500	14500	Commercial (N2)
Niaga (N3)	12100	19000	23000	23500	Commercial (N3)
Niaga (N4)	13200	20000	25000	26000	Commercial (N4)
Indsutri (I1)	16000	23000	26000	27000	Industry (I1)
Industri (I2)	17500	24000	29000	29000	Industry (I2)

31 PENJUALAN NON AIR

Terdiri dari:

	31 Desember 2025/ December 31, 2025
Denda	11.497.911.180
Sambungan baru	9.284.604.938
PB bukaan kembali	765.505.200
Administrasi retikulasi	623.549.104
Reparasi ganti meter	173.803.282
Balik nama	3.950.004
Non air lainnya	399.942.653
Pusat Pelatihan	377.286.547
Jumlah	23.126.552.908

31 NON-WATER SALES

Consist of:

	31 Desember 2024/ December 31, 2024	
	12.104.252.655	Penalties
	9.849.085.232	New connections
	728.306.795	Reconnection fees
	714.635.400	Reticulation administration
	156.730.120	Meter replacement repairs
	13.347.278	Transfer of ownership
	312.138.584	Other non-water
	-	Training Center
Jumlah	23.878.496.064	Total

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH
TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025
Serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH
TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
And For The Year Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

32 BEBAN SUMBER AIR

Terdiri dari:

	31 Desember 2025/ December 31, 2025
Biaya pegawai	4.400.243.877
Biaya penyusutan sumber air	1.971.174.160
Pajak pemanfaatan air	1.636.760.652
Biaya Listrik/PLN	779.700.354
Biaya bahan kimia	711.131.117
Biaya pemeliharaan bangunan dan instalasi sumber air	461.739.221
Biaya operasi lainnya	1.020.850.000
Jumlah	10.981.599.381

32 WATER SOURCE EXPENSES

Consist of:

	31 Desember 2024/ December 31, 2024	
	4.142.094.773	Employee expenses
		Depreciation expense – water sources
	1.664.614.666	Water utilization tax
	1.586.912.300	Electricity/PLN expense
	849.211.276	Chemical expenses
	961.054.266	Maintenance expense – water source buildings and installations
	1.311.580.819	Other operating expenses
	1.098.561.750	
Total	11.614.029.850	Total

33 BEBAN PENGOLAHAN AIR

Terdiri dari:

	31 Desember 2025/ December 31, 2025
Biaya pegawai	26.798.454.002
Pemakaian bahan kimia	10.767.975.642
Biaya penyusutan pengolahan air	9.135.241.409
Biaya pemeliharaan bangunan dan instalasi pengolahan air	8.458.355.210
Biaya listrik/PLN	4.934.285.717
Biaya operasional lainnya	373.850.195
Jumlah	60.468.162.175

33 WATER TREATMENT EXPENSES

Consist of:

	31 Desember 2024/ December 31, 2024	
	27.497.537.788	Employee expense
	11.881.930.310	Chemical consumption
		Depreciation expense – water treatment
	8.477.607.900	Maintenance expense – water treatment buildings and installations
	2.482.136.938	Electricity/PLN expense
	5.094.220.154	Other operating expense
	498.638.940	
Total	55.932.072.030	Total

34 BEBAN TRANSMISI DAN DISTRIBUSI

Terdiri dari:

	31 Desember 2025/ December 31, 2025
Biaya penyusutan bangunan dan instalasi transmisi & distribusi	59.244.283.411
Biaya pegawai	19.314.662.676
Biaya pemakaian bahan/perlengkapan	9.126.069.709
Biaya pemeliharaan bangunan dan instalasi trandist	5.837.266.714
Biaya listrik/PLN	2.303.336.882
Biaya operasi lainnya	1.354.626.835
Biaya bukaan tutupan	274.124.424
Jumlah	97.454.370.651

34 TRANSMISSION AND DISTRIBUTION EXPENSES

Consist of:

	31 Desember 2024/ December 31, 2024	
	55.649.894.972	Depreciation expense – transmission & distribution buildings and installations
	18.124.454.053	Employee expenses
	2.371.154.843	Materials and supplies expense
		Maintenance expense – transmission and distribution buildings and installations
	6.400.732.247	Electricity/PLN expense
	2.405.947.257	Other operating expenses
	1.822.896.563	Connection and disconnection expenses
	325.685.124	
Total	87.100.765.059	Total

35 BEBAN PERPOMPAAN

Terdiri dari:

	31 Desember 2025/ December 31, 2025
Beban penyusutan	4.806.069.273
Jumlah	4.806.069.273

35 PUMPING EXPENSES

Consist of:

	31 Desember 2024/ December 31, 2024	
	3.691.722.819	Depreciation expense
Total	3.691.722.819	Total

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH
TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025
Serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH
TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
And For The Year Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

36 BEBAN PERENCANAAN TEKNIK

Terdiri dari:

	31 Desember 2025/ December 31, 2025
Biaya pegawai	5.950.677.622
Rupa-rupa biaya perencanaan teknik	2.366.329.156
Jumlah	8.317.006.778

36 TECHNICAL PLANNING EXPENSES

Consist of:

	31 Desember 2024/ December 31, 2024	
	5.432.335.874	Employee expense
	2.485.366.354	Other technical planning expense
Total	7.917.702.228	

37 BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM

Terdiri dari:

	31 Desember 2025/ December 31, 2025
Beban rupa-rupa umum	38.402.255.608
Beban pegawai	28.804.491.201
Beban kantor, listrik dan air	21.355.218.156
Beban keuangan	7.301.378.498
Beban direksi dan dewan pengawas	8.345.533.660
Beban penyusutan dan amortisasi	6.011.405.174
Beban pemeliharaan dan bahan bakar	3.054.086.019
Beban training center	137.518.063
Beban penyisihan piutang	2.399.877.496
Jumlah	115.811.763.875

37 GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES

Consist of:

	31 Desember 2024/ December 31, 2024	
	49.945.421.752	Other general expenses
	27.783.069.877	Employee expenses
	22.256.822.711	Office, electricity and water expenses
	8.811.922.749	Financial expenses
	8.226.046.594	Board of Directors and Supervisory Board expenses
	5.992.225.290	Depreciation and amortization expenses
	3.705.696.893	Maintenance and fuel expenses
	-	Training Center expenses
	1.715.074.124	Allowance for doubtful accounts
Total	128.436.279.990	

Detail beban rupa-rupa umum:

Biaya Imbalan Paska Kerja	8.922.330.957
Biaya rupa-rupa Umum	4.893.386.359
Biaya Jasa Profesional	3.850.420.990
Biaya Pendidikan, Pelatihan & Diklat	3.206.028.559
Lain-lain	2.855.893.961
Biaya Perjalanan Dinas	1.766.073.957
Iuran dana asuransi pegawai	2.334.935.941
Biaya Honor Tim	1.892.675.000
Biaya iuran berlangganan	1.640.444.570
Biaya Zakat Perusahaan	1.477.955.000
Representasi Direksi/Pos Pimpinan	1.337.500.000
Olah Raga	323.614.887
Biaya sewa	1.323.375.169
Sumbangan-sumbangan	993.046.768
Biaya PBB	731.713.175
Biaya Sosial & Kesejahteraan	266.390.000
Biaya asuransi Bangunan	283.105.684
Biaya asuransi kendaraan	111.376.999
Biaya Katinueng Karyawan/ti	73.405.572
Beban Pajak	105.187.060
Biaya rapat & Koordinasi	13.395.000
Retribusi pemakaian tanah	-
Jumlah	38.402.255.608

Details of other general expenses:

Post-employment benefits expense	18.064.252.805
Other general expenses	5.739.842.039
Professional fees	3.665.088.025
Education, training & development expenses	3.534.300.226
Others	2.876.673.145
Business travel expenses	2.635.005.403
Employee insurance contributions	2.368.168.185
Team honorarium expenses	1.838.627.500
Subscription fees	1.419.544.300
Corporate zakat expense	1.279.418.400
Directors' representation / management post expenses	1.235.000.000
Sports	1.216.335.254
Rental expenses	1.016.589.937
Donations	1.008.289.100
Property tax (PBB) expense	641.182.406
Social & welfare expenses	613.773.500
Building insurance expense	279.688.691
Vehicle insurance expense	191.262.702
Employee Katineung expense	130.994.781
Tax expense	107.286.372
Meeting & coordination expenses	84.098.981
Land utilization retribution	-
Total	49.945.421.752

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH
TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025
Serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH
TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
And For The Year Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

38 BEBAN HUBUNGAN PELANGGAN

Terdiri dari

	31 Desember 2025/ December 31, 2025
Biaya pegawai	30.537.838.349
Rupa-rupa biaya hubungan pelanggan	7.341.264.923
Jumlah	37.879.103.272

38 CUSTOMER RELATIONS EXPENSE

Consist of:

	31 Desember 2024/ December 31, 2024
	31.798.512.694
	5.843.813.446
Total	37.642.326.140

Employee costs
Miscellaneous customer relations expenses
Total

39 PENDAPATAN LAIN-LAIN

Terdiri dari

	31 Desember 2025/ December 31, 2025
Pendapatan keuntungan penjualan aset tetap	2.646.447.148
Pendapatan bunga deposito	3.504.491.638
Pendapatan jasa giro	1.327.971.889
Pendapatan dari piutang yang telah dihapuskan	315.929.600
Pemungutan retribusi sampah	576.498.356
Selisih opname persediaan	-
Rupa-rupa pendapatan lainnya	800.481.061
Jumlah	9.171.819.692

39 OTHER INCOME

Consist of:

	31 Desember 2024/ December 31, 2024
	3.784.854.695
	3.054.300.534
	943.247.388
	158.041.300
	-
	-
	4.154.715.030
Total	12.095.158.947

Gain on sale of fixed assets
Interest income from deposits
Current account service income / Giro income
Income from written-off receivables
Garbage collection fees
Inventory count differences
Miscellaneous other income
Total

40 BEBAN LAIN-LAIN

Terdiri dari

	31 Desember 2025/ December 31, 2025
Biaya bank	9.657.300
Penurunan nilai	1.192.769.065
Kerugian lainnya	-
Jumlah	1.202.426.365

40 OTHER EXPENSES

Consist of:

	31 Desember 2024/ December 31, 2024
	9.433.900
	35.615.369
	62.368.632
Total	107.417.901

Bank charges
Impairment
Other losses
Total

41 ASET LAIN-LAIN

Terdiri dari

	31 Desember 2025/ December 31, 2025
Persediaan Deadstock:	
Meter air	164.954.536
Bahan instalasi pipa	316.224.800
Rupa-rupa bahan instalasi	1.014.960.122
Jumlah	1.496.139.458
Penurunan Nilai	1.192.074.858
Jumlah Aset Lain-lain	304.064.600

41 OTHER ASSETS

Consist of:

	31 Desember 2024/ December 31, 2024
	164.954.536
	316.224.800
	1.014.960.122
Total	1.496.139.458
	-
Total Other Assets	1.496.139.458

Deadstock Inventories
Water meters
Pipe installation materials
Miscellaneous installation materials
Total
Impairment
Total Other Assets

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH
TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025
Serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH
TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
And For The Year Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

42 INVESTASI ENTITAS ASOSIASI

Terdiri dari

	31 Desember 2025/ December 31, 2025
PT Lembaga sertifikasi Profesi Air Minum Indonesia	67.500.000
Jumlah	67.500.000

PT Lembaga Sertifikasi Profesi Air Minum Indonesia

PT LSP-AMI didirikan berdasarkan Notaris Ilmiawan Dekrit S.SH.,MH Nomor 20 tanggal 26 Juli 2024, Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan tanggal 30 Juli 2025 Nomor AHU-0057042.AH.01.01 Tahun 2024. Anggaran dasar PT LSP-AMI telah mengalami beberapa perubahan yang dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta Notaris Ilmiawan Dekrit S.SH.,MH Nomor 1 Tanggal 2 Juni 2025 dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan tanggal 20 Desember 2023 Nomor AHU-0035717.AH.01.02.TAHUN 2025.

Nilai tercatat investasi pada entitas asosiasi dengan metode biaya (cost) pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2025/ December 31, 2025
Saldo Awal	-
Saldo laba (rugi)	-
Penambahan	67.500.000
Saldo Akhir	67.500.000

42 INVESTMENT IN ASSOCIATES

Consist of:

	31 Desember 2024/ December 31, 2024
	-
	-

PT Lembaga Sertifikasi Profesi Air Minum Indonesia

Total

PT Lembaga Sertifikasi Profesi Air Minum Indonesia

PT LSP-AMI was established based on Notarial Deed No. 20 dated July 26, 2024, of Notary Ilmiawan Dekrit S., S.H., M.H. The deed was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decree No. AHU-0057042.AH.01.01 Year 2024 dated July 30, 2025. The Articles of Association of PT LSP-AMI have been amended several times, with the latest amendment based on Notarial Deed No. 1 dated June 2, 2025, of Notary Ilmiawan Dekrit S., S.H., M.H., which was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decree No. AHU-0035717.AH.01.02 Year 2025 dated December 20, 2023.

The carrying amount of investment in an associate using the cost method as of December 31, 2025 and 2024 is as follows:

	31 Desember 2024/ December 31, 2024
	-
	-
	-

Beginning balance
Retained earnings
Additions
Ending balance

43 SIFAT, SALDO, DAN TRANSAKSI HUBUNGAN BERELASI

Dalam kegiatan usaha normal, Perusahaan melakukan transaksi usaha dan keuangan dengan pihak - pihak berelasi, berdasarkan persyaratan yang disetujui kedua belah pihak.

Rincian sifat hubungan dan jenis transaksi yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

43 Nature, Balances, and Transactions with Related Parties

In the normal course of business, the Company enters into business and financial transactions with related parties, based on terms and conditions agreed upon by the respective parties.

The details of the nature of relationships and the significant types of transactions with related parties are as follows:

<u>Pihak-pihak berelasi/ Related Parties</u>	<u>Sifat dan hubungan/ Nature of Relationship</u>	<u>Sifat transaksi/ Nature of Transactions</u>
Pemerintah kota bogor/ <i>Bogor City Government</i>	Pemilik/ <i>Owner</i>	Setoran modal, titipan retribusi, dividen, dan penjualan/ <i>Capital contributions, retribution deposits, dividends, and sales.</i>
Perumda Pasar Pakuan Jaya/ <i>Perumda Pasar Pakuan Jaya</i>	Perusahaan sepengendali/ <i>Entities under Common Control</i>	Penjualan/ <i>Sales</i>
Perumda Bank Kota Bogor/ <i>Perumda Bank Kota Bogor</i>	Perusahaan sepengendali/ <i>Entities under Common Control</i>	Bank dan Deposito/ <i>Bank and Deposits</i>
Perumda Jasa Transportasi/ <i>Perumda Jasa Transportasi</i>	Perusahaan sepengendali/ <i>Entities under Common Control</i>	Penjualan/ <i>Sales</i>
RSUD Kota Bogor/ <i>RSUD Kota Bogor</i>	Perusahaan sepengendali/ <i>Entities under Common Control</i>	Penjualan/ <i>Sales</i>

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH
TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025
Serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH
TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
And For The Year Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

43 SIFAT, SALDO, DAN TRANSAKSI HUBUNGAN BERELASI (Lanjutan)

Saldo dan transaksi dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

a. Bank

	31 Desember 2025/ December 31, 2025
Perumda bank kota bogor	5.041.017.323
Persentase	0.60%

*) Persentase dari total aset

b. Deposito

	31 Desember 2025/ December 31, 2025
Perumda bank kota bogor	7.000.000.000
Persentase	0.83%

*) Persentase dari total aset

c. Titipan Retribusi

	31 Desember 2025/ December 31, 2025
Dinas lingkungan hidup	1.196.585.500
Persentase	0.58%

*) Persentase dari total utang

d. Dividen

	31 Desember 2025/ December 31, 2025
Pemerintah kota bogor	29.559.100.635

43 Nature, Balances, and Transactions with Related Parties (Continued)

Balances and transactions with related parties are as follows:

a. Bank

	31 Desember 2024/ December 31, 2024	
	9.028.684.558	Perumda bank kota bogor
	1.14%	Percentage

*) Percentage of total assets

b. Deposits

	31 Desember 2024/ December 31, 2024	
	7.000.000.000	Perumda bank kota bogor
	0.89%	Percentage

*) Percentage of total assets

c. Retribution Deposits

	31 Desember 2024/ December 31, 2024	
	412.727.100	Dinas lingkungan hidup
	0.20%	Percentage

*) Percentage of total liabilities

d. Dividends

	31 Desember 2024/ December 31, 2024	
	25.588.368.239	Government of Bogor City

44 PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN

Efektif berlaku 1 Januari 2025 Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik tidak berlaku dan diganti dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat.

Dampak atas penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat, Perusahaan telah menyajikan kembali saldo 1 Januari 2025, sebagai berikut:

44 RESTATEMENT OF FINANCIAL STATEMENTS

Effective January 1, 2025, the Financial Accounting Standards for Entities Without Public Accountability are no longer applicable and have been replaced by the Financial Accounting Standards for Private Entities.

As a result of the implementation of the Financial Accounting Standards for Private Entities, the Company has restated its balances as of January 1, 2025, as follows:

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH
TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025
Serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH
TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
And For The Year Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**44 PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

**44 RESTATEMENT OF FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

	31 Desember 2024		
	Setelah penyesuaian dan reklasifikasi/ <i>After adjustments and reclassifications</i>	Sebelum penyesuaian dan reklasifikasi/ <i>Before adjustments and reclassifications</i>	
Persediaan	21.062.416.272	22.558.555.730	Inventory
Aset pajak tangguhan	13.527.605.943	-	Deferred Tax Assets
Aset lain-lain	1.496.139.458	-	Other assets
Imbalan pasca kerja	42.335.796.102	43.159.561.266.00	Post-employment benefits
Beban sumber air	11.614.029.850	20.613.561.397	Water Source Expenses
Beban pengolahan air	55.932.072.030	46.932.540.483	Water Treatment Expenses
Komponen Ekuitas Lainnya	(6.288.838.128)	-	Other Components of Equity
Saldo Laba	133.175.889.593	111.140.254.122	Retained Earnings
Laba tahun berjalan	57.722.775.033	59.118.201.269	Current year profit
Penghasilan Komprehensif Lainnya	6.288.838.128	-	Comprehensive Income

45 DIVIDEN (PENDAPATAN ASLI DAERAH)

Pembagian laba tahun 2024 ditetapkan berdasarkan keputusan Walikota Bogor Nomor 900.1.13.2/Kep.226-Bag.Ekon/2025 tentang penggunaan laba Perusahaan Umum Daerah Kota Bogor Tahun Buku 2024 tanggal 8 Juli 2024.

Perusahaan telah menyetorkan dividen ke Pemerintah Kota Bogor sebesar 50% dari laba bersih tahun 2023 sebesar Rp29.559.100.635

45 DIVIDENDS (REGIONAL ORIGINAL REVENUE)

The distribution of profit for the year 2024 was determined based on the Decree of the Mayor of Bogor No. 900.1.13.2/Kep.226-Bag.Ekon/2025 concerning the appropriation of profit of Perusahaan Umum Daerah Kota Bogor for the fiscal year 2024 dated July 8, 2024.

The Company has distributed dividends to the Government of Bogor City amounting to 50% of the net income for the year 2023 totaling Rp29,559,100,635.

46 MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Tingkat probabilitas risiko yang sangat potensial terjadi dari instrumen keuangan Perusahaan adalah risiko pasar (yaitu risiko mata uang asing dan tingkat suku bunga), risiko kredit dan risiko likuiditas. Kebijakan akan pentingnya mengelola tingkat risiko ini telah meningkat secara signifikan dengan mempertimbangkan beberapa parameter perubahan dan volatilitas pasar keuangan baik di Indonesia maupun internasional. Direksi Perusahaan menelaah dan menyetujui kebijakan risiko yang mencakup toleransi risiko dalam strategi mengelola risiko-risiko yang dirangkum di bawah ini.

Risiko Pasar

Risiko Suku Bunga

Risiko suku bunga adalah risiko dalam hal nilai wajar atau arus kas kontraktual masa datang dari suatu instrumen keuangan akan terpengaruh akibat perubahan suku bunga pasar. Eksposur Perusahaan yang terpengaruh risiko suku bunga terutama terkait dengan bank dan deposito.

Perusahaan memonitor secara ketat fluktuasi suku bunga pasar dan ekspektasi pasar sehingga dapat mengambil langkah-langkah yang paling menguntungkan Perusahaan secara tepat waktu. Manajemen tidak menganggap perlunya melakukan swap suku bunga saat ini.

46 FINANCIAL RISK MANAGEMENT

The Company's financial instruments expose it to significant risks, including market risk (i.e., foreign currency risk and interest rate risk), credit risk, and liquidity risk. The importance of managing these risks has increased significantly in light of various changes and volatility in the financial markets, both domestically and internationally. The Company's Board of Directors reviews and approves risk management policies, including risk tolerance levels and strategies for managing the risks summarized below.

Market Risk

Interest Rate Risk

Interest rate risk is the risk that the fair value or future contractual cash flows of a financial instrument will be affected by changes in market interest rates. The Company's exposure to interest rate risk primarily relates to bank loans and time deposits.

The Company closely monitors fluctuations in market interest rates and market expectations in order to take the most beneficial actions for the Company in a timely manner. Management currently does not consider it necessary to enter into interest rate swap arrangements.

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH
TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025
Serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH
TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
And For The Year Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

46 MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

Tabel berikut adalah nilai tercatat, berdasarkan jatuh temponya, atas aset dan liabilitas keuangan Perusahaan yang terkait risiko suku bunga

46 FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

The following table presents the carrying amounts, by maturity, of the Company's financial assets and financial liabilities that are exposed to interest rate risk.

31 Desember 2025 / 31 December 2025

	Rata-rata suku bunga efektif/ Average effective interest rate	Jatuh tempo dalam satu (1) tahun/ Maturing within one (1) year	Jatuh tempo dalam dua (2) tahun/ Maturing within two (2) year	Jatuh tempo pada tahun ke-3/ Maturing in the 3rd year	Total	
Aset						Assets
Kas di bank	0.25%	78.404.282.878	-	-	78.404.282.878	Cash in Banks
Deposito	4-5%	84.000.000.000	-	-	84.000.000.000	Deposits

31 Desember 2024 / 31 December 2024

	Rata-rata suku bunga efektif/ Average effective interest rate	Jatuh tempo dalam satu (1) tahun/ Maturing within one (1) year	Jatuh tempo dalam dua (2) tahun/ Maturing within two (2) year	Jatuh tempo pada tahun ke-3/ Maturing in the 3rd year	Total	
Aset						Assets
Kas di bank	0.25%	79.088.002.313	-	-	79.088.002.313	Cash in Banks
Deposito	4-5%	73.000.000.000	-	-	73.000.000.000	Deposits

Risiko kredit

Risiko kredit adalah risiko dalam hal pihak ketiga tidak akan memenuhi liabilitasnya berdasarkan instrumen keuangan atau kontrak pelanggan, yang menyebabkan kerugian keuangan. Perusahaan dihadapkan pada risiko kredit dari kegiatan operasi dan dari aktivitas pendanaan, termasuk bank, dan instrumen keuangan lainnya. Risiko kredit terutama berasal dari bank deposito.

Risiko kredit juga timbul dari kas di bank. Untuk memitigasi risiko kredit, Perusahaan menempatkan kas di bank pada institusi keuangan yang terpercaya.

Tabel berikut ini memberikan informasi mengenai maksimum kredit yang dihadapi oleh Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024.

Credit Risk

Credit risk is the risk that a third party will fail to meet its obligations under financial instruments or customer contracts, resulting in a financial loss. The Company is exposed to credit risk arising from its operating activities and financing activities, including placements with banks and other financial instruments. Credit risk primarily arises from time deposits placed with banks.

Credit risk also arises from cash in banks. To mitigate credit risk, the Company places its cash in banks with reputable financial institutions.

The following table provides information regarding the maximum exposure to credit risk faced by the Company as of December 31, 2025 and December 31, 2024.

	31 Desember 2025/ December 31, 2025	31 Desember 2024/ December 31, 2024	
Kas di bank	78.404.282.878	79.088.002.313	Cash in Banks
Deposito	84.000.000.000	73.000.000.000	Deposits
Piutang Usaha	42.527.988.125	38.702.981.531	Account Receivables
Jumlah	204.932.271.003	190.790.983.844	Total

Tabel berikut memberikan kualitas kredit dan analisis umur aset keuangan Perusahaan sesuai dengan peringkat kredit debitur Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024.

The following table presents the credit quality and aging analysis of the Company's financial assets based on the credit ratings of the Company's debtors as of December 31, 2025 and December 31, 2024.

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH
TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025
Serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH
TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
And For The Year Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

46 MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

46 FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

31 Desember 2025						
	Telah jatuh tempo tetapi belum diturunkan nilainya / <i>Past due but not impaired</i>			Telah jatuh tempo dan mengalami penurunan nilai / <i>Past due and impaired</i>	Jumlah/ Total	
Belum jatuh tempo dan tidak ada penurunan nilainya / <i>Neither past due nor impaired</i>	1 Tahun/ 1 Year	2 Tahun/ 2 Year				
Kas di bank	78.404.282.878	-	-	-	78.404.282.878	Cash in Banks
Deposito	84.000.000.000	-	-	-	84.000.000.000	Deposits
Piutang Usaha	42.970.986.525	-	-	-	42.970.986.525	Account Receivables
Jumlah	205.375.269.403	-	-	-	205.375.269.403	Total
31 Desember 2024						
	Telah jatuh tempo tetapi belum diturunkan nilainya / <i>Past due but not impaired</i>			Telah jatuh tempo dan mengalami penurunan nilai / <i>Past due and impaired</i>	Jumlah/ Total	
Belum jatuh tempo dan tidak ada penurunan nilainya / <i>Neither past due nor impaired</i>	1 Tahun/ 1 Year	2 Tahun/ 2 Year				
Kas di bank	79.088.002.313	-	-	-	79.088.002.313	Cash in Banks
Deposito	73.000.000.000	-	-	-	73.000.000.000	Deposits
Piutang Usaha	38.702.981.531	33.067.442	-	-	38.736.048.973	Account Receivables
Jumlah	190.790.983.844	33.067.442	-	-	190.824.051.286	Total

Risiko likuiditas

Risiko likuiditas merupakan risiko dalam hal Perusahaan tidak bisa memenuhi liabilitas pada saat jatuh tempo. Manajemen melakukan evaluasi dan pengawasan yang ketat atas arus kas masuk (cash-in) dan kas keluar (cash-out) untuk memastikan tersedianya dana untuk memenuhi kebutuhan pembayaran liabilitas yang jatuh tempo

Tabel di bawah merupakan profil jatuh tempo liabilitas keuangan Perusahaan berdasarkan pembayaran kontraktual yang tidak terdiskonto pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024:

Liquidity Risk

Liquidity risk is the risk that the Company may encounter difficulty in meeting its obligations as they fall due. Management conducts regular evaluation and close monitoring of cash inflows and cash outflows to ensure the availability of funds to meet maturing liabilities.

The table below presents the maturity profile of the Company's financial liabilities based on undiscounted contractual payments as of December 31, 2025 and December 31, 2024:

31 Desember 2025						
	<=1 tahun	2-5 tahun	>5 tahun	Jumlah	Nilai wajar	
Liabilitas						Liabilities
Utang usaha	3.641.466.392	-	-	3.641.466.392	3.641.466.392	Trade Payables
Biaya yang masih harus dibayar	45.546.112.317	-	-	45.546.112.317	45.546.112.317	Accrued Expenses
Titipan retribusi	1.196.585.500	-	-	1.196.585.500	1.196.585.500	Retribution Deposits
Utang jangka pendek lainnya	17.147.423.113	-	-	17.147.423.113	17.147.423.113	Current Portion of Long-term Liabilities
Utang bank	10.870.553.310	43.482.213.216	27.225.872.749	81.578.639.275	81.578.639.275	Bank Loans
Jumlah	78.402.140.632	43.482.213.216	27.225.872.749	149.110.226.597	149.110.226.597	Total

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH
TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025
Serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH
TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
And For The Year Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

46 MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

46 FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

31 Desember 2024

	<=1 tahun	2-5 tahun	>5 tahun	Jumlah	Nilai wajar	
Liabilitas						Liabilities
Utang usaha	5.180.097.441	-	-	5.180.097.441	5.180.097.441	Trade Payables
Utang lain-lain	544.215.456	-	-	544.215.456	544.215.456	Other liabilities
Biaya yang masih harus dibayar	34.500.567.931	-	-	34.500.567.931	34.500.567.931	Accrued Expenses
Titipan retribusi	412.727.100	-	-	412.727.100	412.727.100	Retribution Deposits
Utang jangka pendek lainnya	18.269.038.128	-	-	18.269.038.128	18.269.038.128	Current Portion of Long-term Liabilities
Utang Bank	10.870.553.304	43.482.213.216	38.096.426.053	92.449.192.573	92.449.192.573	Bank Loans
Jumlah	69.777.199.360	43.482.213.216	38.096.426.053	151.355.838.629	151.355.838.629	Total

47 MANAJEMEN MODAL

47 CAPITAL MANAGEMENT

Tujuan utama dari pengelolaan modal Perusahaan adalah untuk memastikan bahwa pemeliharaan peringkat kredit yang tinggi dan rasio modal yang sehat dalam rangka mendukung bisnis dan memaksimalkan nilai pemegang saham. Perusahaan tidak diwajibkan untuk memenuhi syarat-syarat modal tertentu.

The primary objective of the Company's capital management is to ensure the maintenance of a high credit rating and healthy capital ratios in order to support its business and maximize shareholder value. The Company is not subject to any externally imposed capital requirements.

Manajemen Perusahaan mengelola struktur permodalan dan melakukan penyesuaian, berdasarkan perubahan kondisi ekonomi. Untuk memelihara dan menyesuaikan struktur permodalan, Perusahaan dapat memilih menyesuaikan pembayaran dividen kepada pemegang saham atau menerbitkan saham baru. Tidak ada perubahan yang dibuat dalam tujuan, kebijakan, atau proses selama periode yang disajikan.

The Company's management manages the capital structure and makes adjustments in response to changes in economic conditions. To maintain and adjust the capital structure, the Company may adjust dividend payments to shareholders or issue new shares. No changes were made to the objectives, policies, or processes during the periods presented.

Kebijakan Perusahaan adalah untuk menjaga rasio modal yang sehat dalam rangka untuk mengamankan pembiayaan pada biaya yang wajar.

The Company's policy is to maintain a sound capital ratio in order to secure financing at a reasonable cost.

Sebagaimana praktik yang berlaku umum, Perusahaan mengevaluasi struktur permodalan melalui rasio pinjaman terhadap modal (gearing ratio) yang dihitung melalui pembagian antara pinjaman bersih dengan modal. Pinjaman bersih adalah jumlah liabilitas sebagaimana disajikan di dalam laporan posisi keuangan dikurangi dengan jumlah kas dan setara kas, investasi lainnya dan deposito yang dibatasi penggunaannya. Sedangkan modal meliputi seluruh komponen ekuitas dalam laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024, perhitungan rasio adalah sebagai berikut:

As generally accepted practice, the Company evaluates its capital structure through the debt-to-equity ratio (gearing ratio), which is calculated by dividing net borrowings by total equity. Net borrowings represent total liabilities as presented in the statement of financial position, less cash and cash equivalents, other investments, and restricted time deposits. Total equity comprises all components of equity in the statement of financial position as of December 31, 2025 and December 31, 2024. The computation of the ratio is as follows:

	31 Desember 2025/ December 31, 2025	31 Desember 2024/ December 31, 2024	
Total liabilitas berbunga	81.578.639.275	92.449.192.573	Total Interest-Bearing Liabilities
Dikurangi bank dan deposito	162.454.282.878	152.138.902.313	Less: Cash in Banks and Time Deposits
Liabilitas neto	(80.875.643.603)	(59.689.709.740)	Net Liabilities
Jumlah ekuitas	632.028.044.077	595.223.530.141	Total Equity
Rasio liabilitas neto terhadap modal	(0.13)	(0.10)	Net Liabilities to Equity Ratio

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH
TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025
Serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH
TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
And For The Year Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

48 INSTRUMEN KEUANGAN

Tabel di bawah ini adalah perbandingan nilai tercatat dan nilai wajar instrumen keuangan Perusahaan yang dicatat di laporan keuangan :

	31 Desember 2025/ December 31, 2025	
	Nilai Tercatat/ Carrying Value	Nilai Wajar/ Fair Value
Aset Keuangan		
Kas di bank	78.404.282.878	78.404.282.878
Deposito	84.000.000.000	84.000.000.000
Piutang usaha	42.527.988.125	42.527.988.125
Jumlah Aset Keuangan	204.932.271.003	204.932.271.003
Liabilitas Keuangan		
Utang usaha	3.641.466.392	3.641.466.392
Biaya yang masih harus dibayar	45.546.112.317	45.546.112.317
Titipan retribusi	1.196.585.500	1.196.585.500
Utang jangka panjang yang jatuh tempo	10.870.553.310	10.870.553.310
Utang jangka pendek lainnya	17.147.423.113	17.147.423.113
Utang bank	70.708.085.965	70.708.085.965
Jumlah Liabilitas Keuangan	149.110.226.597	149.110.226.597

	31 Desember 2024/ December 31, 2024	
	Nilai Tercatat/ Carrying Value	Nilai Wajar/ Fair Value
Aset Keuangan		
Kas di bank	79.088.002.313	79.088.002.313
Deposito	73.000.000.000	73.000.000.000
Piutang usaha	38.736.048.973	38.736.048.973
Jumlah Aset Keuangan	190.824.051.286	190.824.051.286
Liabilitas Keuangan		
Utang usaha	5.180.097.441	5.180.097.441
Utang lain-lain	544.215.456	544.215.456
Biaya yang masih harus dibayar	34.500.567.931	34.500.567.931
Titipan retribusi	412.727.100	412.727.100
Utang jangka panjang yang jatuh tempo	10.870.553.304	10.870.553.304
Utang jangka pendek lainnya	18.269.038.128	18.269.038.128
Utang bank	81.578.639.269	81.578.639.269
Jumlah Liabilitas Keuangan	151.355.838.629	151.355.838.629

Berikut metode dan asumsi yang digunakan untuk mengestimasi nilai wajar:

- 1 Kas di bank dan deposito mendekati nilai tercatatnya karena bersifat jangka pendek yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan.
- 2 Nilai wajar utang pihak dicatat sebesar biaya historis karena nilai wajarnya tidak dapat diukur secara handal. Tidak praktis untuk mengestimasi nilai wajar aset dan liabilitas tersebut karena tidak ada jangka waktu penerimaan/pembayaran yang pasti walaupun tidak diharapkan untuk diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah tanggal laporan posisi keuangan.

48 FINANCIAL INSTRUMENTS

The table below presents the comparison between the carrying amounts and the fair values of the Company's financial instruments as recorded in the financial statements

Financial Assets
Cash in Banks
Time Deposits
Trade Receivables
Total Financial Assets
Financial Liabilities
Trade Payables
Accrued expenses
Retribution Deposits
Current Maturities of Long-term Liabilities
Other Short-term Liabilities
Bank Loans
Total Financial Liabilities

Financial Assets
Cash in Banks
Time Deposits
Trade Receivables
Total Financial Assets
Financial Liabilities
Trade Payables
Other Payables
Accrued Expenses
Retribution Deposits
Current Maturities of Long-term Liabilities
Other Short-term Liabilities
Bank Loans
Total Financial Liabilities

The following methods and assumptions were used in estimating the fair value:

- 1 Cash in banks and time deposits approximate their carrying amounts due to their short-term maturities of 12 months or less
- 2 The liabilities are carried at historical cost as their fair values cannot be measured reliably. It is not practicable to estimate the fair values of these assets and liabilities because there are no fixed repayment or settlement terms, although they are not expected to be settled within 12 months after the reporting date

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH
TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025
Serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH
TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
And For The Year Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

49 KEJADIAN SETELAH TANGGAL NERACA

Berdasarkan Keputusan walikota Bogor Nomor 100.3.3.3./Kep.116-Bag.Ekon/2026 tentang pengangkatan saudara Muzakkir, S.TP., M.Si sebagai direktur pelayanan dan bisnis perusahaan daerah air minum tirta pakuan kota bogor periode 2026-2031.

Berdasarkan Keputusan walikota Bogor Nomor 100.3.3.3./Kep.117-Bag.Ekon/2026 tentang pengangkatan saudara Dani Rakhmawan, ST sebagai direktur operasional perusahaan daerah air minum tirta pakuan kota bogor periode 2026-2031.

49 SUBSEQUENT EVENTS

Based on the Mayor of Bogor's Decree Number 100.3.3.3./Kep.116-Bag.Ekon/2026 regarding the appointment of Mr. Muzakkir, S.TP., M.Si as Director of Services and Business of the Regional Drinking Water Company Tirta Pakuan, Bogor City, for the 2026–2031 term.

Based on the Mayor of Bogor's Decree Number 100.3.3.3./Kep.117-Bag.Ekon/2026 regarding the appointment of Mr. Dani Rakhmawan, S.T. as Director of Operations of the Regional Drinking Water Company Tirta Pakuan, Bogor City, for the 2026–2031 term.

